LAPORAN
KEUANGAN
TA 2024

LLDIKTI Wilayah VI
periode berakhir 30 Juni 2024



UNAUDITED

Bagian Anggaran 023

Laporan Keuangan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang

(023.01.0300.723014.KD)

Unaudited

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

Jalan Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur
Semarang 50233

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

LLDIKTI Wilayah VI Semarang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan LLDIKTI Wilayah VI Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada LLDIKTI Wilayah VI Semarang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 17 Juli 2024
Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Pernyataan Telah Direviu	viii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Data DIPA dan Revisi DIPA	18
Tabel 2	Struktur DIPA dan Revisi DIPA	18
Tabel 3	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	20
Tabel 4	Perbandingan Realisasi Pendapatan	20
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja	21
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Belanja	21
Tabel 7	Perbandingan Belanja Pegawai	23
Tabel 8	Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023	23
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023	24
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023	24
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023	25
Tabel 12	Uraian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023	26
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya	26
Tabel 16	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	27
Tabel 17	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	27
Tabel 18	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	28
Tabel 19	Rincian Piutang Bukan Pajak	28
Tabel 20	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	28
Tabel 21	Rincian Bagian Lancar TPA	29
Tabel 22	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek	29
Tabel 23	Rincian Belanja Dibayar di Muka	30
Tabel 24	Rincian Persediaan	30
Tabel 25	Rincian Persediaan Mutasi Persediaan	30
Tabel 26	Rincian Tagihan TP/TGR	31
Tabel 27	Rincian Tagihan PA	31
Tabel 28	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang	32
Tabel 29	Mutasi Aset Tanah	32
Tabel 30	Rincian Tanah	32
Tabel 31	Mutasi Peralatan dan Mesin	33

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 32	Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin	33
Tabel 33	Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin	33
Tabel 34	Mutasi Gedung dan Bangunan	34
Tabel 35	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	34
Tabel 36	Mutasi Aset Tetap Lainnya	35
Tabel 37	Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya	35
Tabel 38	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	35
Tabel 39	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
Tabel 40	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
Tabel 41	Mutasi Aset Tak Berwujud	37
Tabel 42	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	37
Tabel 43	Mutasi Aset Lain - Lain	38
Tabel 44	Mutasi Tambah Aset Lain-lain	38
Tabel 45	Mutasi Kurang Aset Lain-lain	38
Tabel 46	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	39
Tabel 47	Mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	39
Tabel 48	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	40
Tabel 49	Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan	40
Tabel 50	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	41
Tabel 51	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	41
Tabel 52	Rincian Pendapatan Perpajakan TA 2024 dan 2023	42
Tabel 53	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023	42
Tabel 54	Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023	43
Tabel 55	Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023	43
Tabel 56	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	44
Tabel 57	Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023	45
Tabel 58	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023	45
Tabel 59	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023	46
Tabel 60	Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023	47
Tabel 61	Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2023	47
Tabel 62	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024 dan 2023	49
Tabel 63	Rincian Output Strategis Kode Output DK.4472	50
Tabel 64	Rincian Output Strategis Kode Output WA.6392	50

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 65	Data Rekening Virtual	51
Tabel 66	Data Rekening RPL	51
Tabel 67	Data Tutup Rekening Giro	51
Tabel 68	Dana Non DIPA LLDIKTI Wilayah VI	52
Tabel 69	Daftar Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Manual	53
Tabel 70	Pembayaran Tunjangan Serdos dan Guru Besar Tahun 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024 (Carry Over) (Dosen Non PNS)	62
Tabel 71	Pembayaran Tunjangan Serdos dan Guru Besar Tahun 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024 (Carry Over) (Dosen PNS)	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023
LAMPIRAN II	: TELAAH LAPORAN KEUANGAN
LAMPIRAN III	: MEMO PENYESUAIAN
LAMPIRAN IV	: DIPA SATKER LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
LAMPIRAN V	: LPJ DAN REKENING KORAN
LAMPIRAN VI	: SSPB
LAMPIRAN VII	: SSBP
LAMPIRAN VIII	: SURAT HASIL REKONSILIASI
LAMPIRAN IX	: PERUBAHAN REKENING
LAMPIRAN X	: CATATAN HASIL PEMANTAUAN TPD 2023
LAMPIRAN XI	: TEMUAN BPK 2023 DAN SURAT TANGGAPAN
LAMPIRAN XII	: TRANSAKSI RESIPROKAL
LAMPIRAN XIII	: PERSETUJUAN SEWA BMN
LAMPIRAN XIV	: LAPORAN BMN
LAMPIRAN XV	: LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: https://lldikti6.kemdikbud.go.id/

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan LLDIKTI Wilayah VI Semarang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 (*unaudited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 17 Juli 2024

Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: https://lldikti6.kemdikbud.go.id/

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
SEMESTER I TAHUN 2024 *UNAUDITED*

Kami telah mereviu Laporan Keuangan LLDIKTI Wilayah VI Semarang untuk Semester I Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2024, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen LLDIKTI Wilayah VI Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan, yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Semarang, 17 Juli 2024
Satuan Pengawas Intern,

Nur Diana
NIP 198103032008122003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I LLDIKTI Wilayah VI Semarang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 99.879.550,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 166.532.026.140,00 atau mencapai 49,71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 335.042.788.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset. kewajiban. dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 106.960.127.982,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 344.074.868,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 106.545.348.552,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 70.704.562,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 3.091.386.709,00 dan Rp. 103.868.741.273,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban. surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa. dan surplus/defisit-LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 2.466.000,00.

sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 169.497.084.180,00 sehingga terdapat nilai Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 169.494.618.180,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp. 94.947.550,00) dan sebesar Rp.0,00 sehingga entitas mengalami nilai defisit LO sebesar (Rp 169.399.670.630,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 106.836.265.313,00 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 169.399.670.630,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi dan penyesuaian nilai tahun berjalan senilai Rp. 0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 166.432.146.590,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 103.868.741.273,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	99.879.550	0.00	81.774.594
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	**99.879.550**	**0.00**	**81.774.594**
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	320.711.204.000	161.113.648.125	50.24	140.657.367.322
Belanja Barang	B.2.2	14.031.834.000	5.234.067.015	37.30	3.773.259.840
Bantuan Sosial	B.2.3	0	0	0.00	0
Jumlah Belanja Operasi		**334.743.038.000**	**166.347.715.140**	**49,69**	**144.430.627.162**
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.2.4	0	0	0.00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.5	299,750,000	184.311.000	61.49	37.881.400
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.6	0	0	0.00	0
Belanja Jalan. Irigasi. Jaringan	B.2.7	0	0	0.00	0
Belanja Modal Lainnya	B.2.8	0	0	0.00	0
Jumlah Belanja Modal		**299.750.000**	**184.311.000**	**61.49**	**37.881.400**
JUMLAH BELANJA		**335.042.788.000**	**166.532.026.140**	**49.71**	**144.468.508.562**

Semarang, 17 Juli 2024
Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

II. NERACA

LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
NERACA
PER 30 Juni 2024 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	300.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	8.952.538	0
Piutang PNBP	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	C.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	0
Persediaan	C.9	35.122.330	26.073.390
Jumlah Aset Lancar		**344.074.868**	**26.073.390**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.12	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**0**	**0**
ASET TETAP			
Tanah	C.13	91.868.492.000	91.868.492.000
Peralatan dan Mesin	C.14	7.766.165.164	7.581.854.164
Gedung dan Bangunan	C.15	21.616.397.751	21.616.397.751
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.16	532.291.317	532.291.317
Aset Tetap Lainnya	C.17	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(15.237.997.680)	(14.417.511.159)
Jumlah Aset Tetap		**106.545.348.552**	**107.181.524.073**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	332.601.500	332.601.500
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21		133.492.000
Aset Lain-lain	C.22	2.450.000	2.450.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(264.346.938)	(222.771.750)
Jumlah Aset Lainnya		**70.704.562**	**245.771.750**
JUMLAH ASET		**106.960.127.982**	**107.453.369.213**

Uraian	Cat.	30 Juni 2024	31 Desember 2023
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	300.000.000	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	2.732.732.850	616.692.900
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	46.824.321	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.27	2.877.000	411.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	8.952.538	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**3.091.386.709**	**617.103.900**
JUMLAH KEWAJIBAN		**3.091.386.709**	**617.103.900**
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	103.868.741.273	106.836.265.313
JUMLAH EKUITAS		**103.868.741.273**	**106.836.265.313**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**106.960.127.982**	**107.453.369.213**

Semarang, 17 Juli 2024
Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

III. LAPORAN OPERASIONAL

LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	2.466.000	2.055.000
JUMLAH PENDAPATAN		**2.466.000**	**2.055.000**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.3	163.095.876.085	143.172.794.478
Beban Persediaan	D.4	15.638.390	19.999.320
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.308.558.854	2.143.949.820
Beban Pemeliharaan	D.6	365.756.465	340.984.321
Beban Perjalanan Dinas	D.7	2.849.192.677	1.640.988.841
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.9	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	862.061.709	884.267.743
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	0	0
Beban Lain-lain	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN		**169.497.084.180**	**148.202.984.523**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(169.494.618.180)**	**(148.200.929.523)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	0	(65.739.833)
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14	0	0
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	94.947.550	56.842.595
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**94.947.550**	**(8.897.238)**
POS LUAR BIASA	D.16		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		**(169.399.670.630)**	**(148.209.826.761)**

Semarang, 17 Juli 2024
Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	E.1	106.836.265.313	108.740.075.968
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	**(169.399.670.630)**	**(148.209.826.761)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	0	0
Koreksi Lain-lain	E.7	0	0
Jumlah Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas		**0**	**0**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	**166.432.146.590**	**144.386.733.968**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(2.967.524.040)**	**(3.823.092.793)**
EKUITAS AKHIR	E.9	**103.868.741.273**	**104.916.983.175**

Semarang. 17 Juli 2024
Kepala.

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor LLDIKTI Wilayah VI

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa Kemendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Permendikbudristek 35 tahun 2021 tentang OTK LLDIKTI ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 830).

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Terdapat beberapa hal yang diatur dalam Permendikbudristek 35 tahun 2021 yaitu tentang LLDIKTI yaitu:

a. LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
b. Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
c. LLDIKTI terdiri atas 18 wilayah kerja;
d. LLDIKTI dipimpin oleh Kepala yang merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.;
e. LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
f. LLDIKTI terdiri atas Kepala, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LLDIKTI menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal terkait, dan pimpinan satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja dengan LLDIKTI.

LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
d. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
e. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
f. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
g. Pelaksanaan kerja sama;
h. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
j. Pelaksanaan administrasi.

Dalam melaksanaan fungsi tersebut, LLDIKTI Wilayah VI memiliki visi " *menjadi institusi yang prima dalam pelayanan pendidikan tinggi dalam rangka membentuk insan Indonesia yang cerdas komprehensif* ".

Dalam menjalankan visi tersebut, LLDIKTI Wilayah VI mempunyai 3 misi, yaitu:

1. Pelaksanaan regulasi dari pemerintah dalam pengawasan, pengendalian dan pemantauan PTS di Jawa Tengah
2. Fasilitator bagi semua stakeholder pendidikan tinggi khususnya PTS dalam penguat (empower), pemberdaya (enabler) dan penyedia (provider) layanan pendidikan tinggi
3. Penyelaras sistem pendidkan tinggi, baik terhadap strategi nasional, pembangunan daerah, pembangunan lintas sektor dan perkembangan global. Interaksi Perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Dalam mencapai visi dan misinya, terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai LLDIKTI Wilayah VI dalam tahun 2020-2024 yaitu:

a. Meningkatnya kualitas LLDIKTI;

b. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi;
c. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
d. Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor LLDIKTI Wilayah VI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor LLDIKTI Wilayah VI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor LLDIKTI Wilayah VI dalam penyusunan dan penyajian Laporan

Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor LLDIKTI Wilayah VI. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor LLDIKTI Wilayah VI adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan TA 2024 ini LLDIKTI Wilayah VI telah menerima DIPA dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sepanjang periode TA 2024 LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan revisi DIPA sebanyak 6 kali.

Detail proses revisi DIPA LLDIKTI Wilayah VI adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data DIPA dan Revisi DIPA LLDIKTI Wilayah VI
TA 2024

KETERANGAN	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Nilai DIPA
Revisi 0	SP DIPA- 023.01.2.723014/2024	24-11-2023	335.042.788.000
Revisi 1	SP DIPA- 023.01.2.723014/2024	17-02-2024	335.042.788.000
Revisi 2	SP DIPA- 023.01.2.723014/2024	04-03-2024	335.042.788.000
Revisi 3	SP DIPA- 023.01.2.723014/2024	24-03-2024	335.042.788.000
Revisi 4	SP DIPA- 023.01.2.723014/2024	22-04-2024	335.042.788.000
Revisi 5	SP DIPA- 023.01.2.723014/2024	01-06-2024	335.042.788.000

Tabel 2
Struktur DIPA dan Revisi DIPA LLDIKTI Wilayah VI
TA 2024

Uraian	2023 (dalam ribuan)					
	DIPA AWAL	DIPA REVISI-1	DIPA REVISI-2	DIPA REVISI-3	DIPA REVISI-4	DIPA REVISI-5
Pendapatan :						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja :						
Belanja Pegawai	320.711.204	320.711.204	320.711.204	320.711.204	320.711.204	320.711.204
Belanja Barang	14.331.584	14.331.584	14.031.834	14.031.834	14.031.834	14.031.834
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal	0	0	299.750	299.750	299.750	299.750
Jumlah	**335.042.788**	**335.042.788**	**335.042.788**	**335.042.788**	**335.042.788**	**335.042.788**

DIPA Revisi ke-1 :

Berdasarkan surat Kepala LLDIKTI Wilayah VI Nomor: 217/LL6/PR.01.05/2024 perihal Usulan Revisi Anggaran, dengan pertimbangan perlunya revisi anggaran guna mempercepat tercapainya program kerja Kementerian, perubahan/ralat rencana penarikan dana dan menyamakan data antara ADK Satker dengan ADK di OM SPAN Kemenkeu maka terdapat Ralat rencana penarikan hal III DIPA.

DIPA Revisi ke-2 :

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor: 5701/A.A1/PR.08.00/2024 perihal Usulan Revisi Anggaran pada Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 dengan tema revisi yaitu revisi dalam hal pagu anggaran tetap; dan tata cara revisi:

penghapusan/perubahan Halaman IV A DIPA dan pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional. Pertimbangan dalam revisi anggaran:

a. percepatan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024; dan
b. peningkatan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Pada DIPA Revisi kedua ini terdapat pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Semula	Pergeseran	Menjadi
01.WA.6392.EBA.994	Layanan Perkantoran	85.783.369	(299.750)	85.483.619
01.WA.6392.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	80.076.153	-	80.076.153
01.WA.6392.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.707.216	(299.750)	5.407.466
01.WA.6392.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	299.750	299.750
01.WA.6392.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan Bermotor	-	79.350	79.350
01.WA.6392.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	220.400	220.400

DIPA Revisi ke-3 :

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor: 7994/A.A1/PR.08.00/2024 perihal Usulan Revisi Anggaran pada Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 dengan tema revisi : revisi dalam hal pagu anggaran tetap; dan tata cara revisi: pergeseran anggaran antar-program antar-satker, pergeseran anggaran untuk satker baru, dan penghapusan/perubahan Halaman IVA DIPA. Pertimbangan perlunya revisi anggaran:

a. penyesuaian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
b. Percepatan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024; dan
c. Peningkatan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

DIPA Revisi ke-4 :

Berdasarkan surat Kepala LLDIKTI Wilayah VI No 315/LL6/PR.01.05/2024 perihal usulan revisi halaman III DIPA dengan tema revisi : revisi administrasi dan mekanisme revisinya yaitu ralat rencana penarikan halaman III DIPA. Pertimbangan perlunya revisi anggaran :

a. Mempercepat tercapainya program kerja Kementerian
b. Perubahan/ralat rencana penarikan dana

c. Menyamakan data antara ADK Satker dengan ADK di OM SPAN Kemenkeu

DIPA Revisi ke-5 :

Berdasarkan surat Kepala LLDIKTI Wilayah VI No 415/LL6/PR.01.05/2024 perihal usulan revisi halaman III DIPA dengan tema revisi : revisi administrasi dan mekanisme revisinya yaitu ralat rencana penarikan halaman III DIPA. Pertimbangan perlunya revisi anggaran :

a. Mempercepat tercapainya program kerja Kementerian
b. Perubahan/ralat rencana penarikan dana
c. Menyamakan data antara ADK Satker dengan ADK di OM SPAN Kemenkeu

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp.99.879.550,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.99.879.550,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00. Pendapatan yang diterima satker LLDIKTI Wilayah VI pada tahun 2024 ini berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4.932.000	0,00
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	94.947.550	0,00
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
6. Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**99,879,550**	**0,00**

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	19.999.999	(100,00)
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.932.000	4.932.000	0,00
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	94.947.550	56.842.595	67,04
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
6. Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	**99.879.550**	**81.774.594**	**22,14**

Jika dibandingkan dengan pendapatan 30 Juni 2023 sebesar Rp81.774.594,00 dan pendapatan 30 Juni 2024 sebesar Rp.99.879.550,00 maka realisasi pendapatan atas mengalami kenaikan sebesar Rp.18.104.956,00 yang berasal dari Penyetoran Atas Kelebihan Pembayaran TPD Dosen Non PNS.

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Rp.166.532.026.140,00

Realisasi Belanja Negara netto untuk 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.166.532.026.140,00 atau sebesar 49,71% dari pagu anggaran sebesar Rp.335.042.788.000,00 sedangkan realisasi belanja 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.144.468.508.562,00 atau 49,19% dari pagu anggaran sebesar Rp.293.689.520.000,00. Realisasi Belanja per Sumber Dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Pegawai	320.711.204.000	161.134.698.331	50,24
Belanja Barang	14.031.834.000	5.234.067.015	37,30
Belanja Modal	299.750.000	184.311.000	61,49
Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	**335.042.788.000**	**166.553.076.346**	**49,71**
Pengembalian Belanja	(0)	(21.050.206)	0,00
Belanja Netto	335.042.788.000	166.532.026.140	49,70

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	161.113.648.125	140.657.367.322	14,54
Belanja Barang	5.234.067.015	3.773.259.840	38,71
Belanja Modal	184.311.000	37.881.400	386,55
Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah total	**166.532.026.140**	**144.468.508.562**	**15,27**

Realisasi anggaran belanja pegawai pada TA 2024 adalah sebesar Rp.161.113.648.125,00. Porsi belanja pegawai terbesar adalah pada Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS yaitu sebesar Rp.122.224.995.075,00 atau sebesar 75,86 persen dari keseluruhan realisasi anggaran belanja pegawai pada TA 2024.

Untuk realisasi anggaran belanja barang pada TA 2024 adalah Rp.5.234.067.015,00. Porsi belanja barang terbesar adalah untuk Belanja Perjalanan Dalam Negeri yaitu

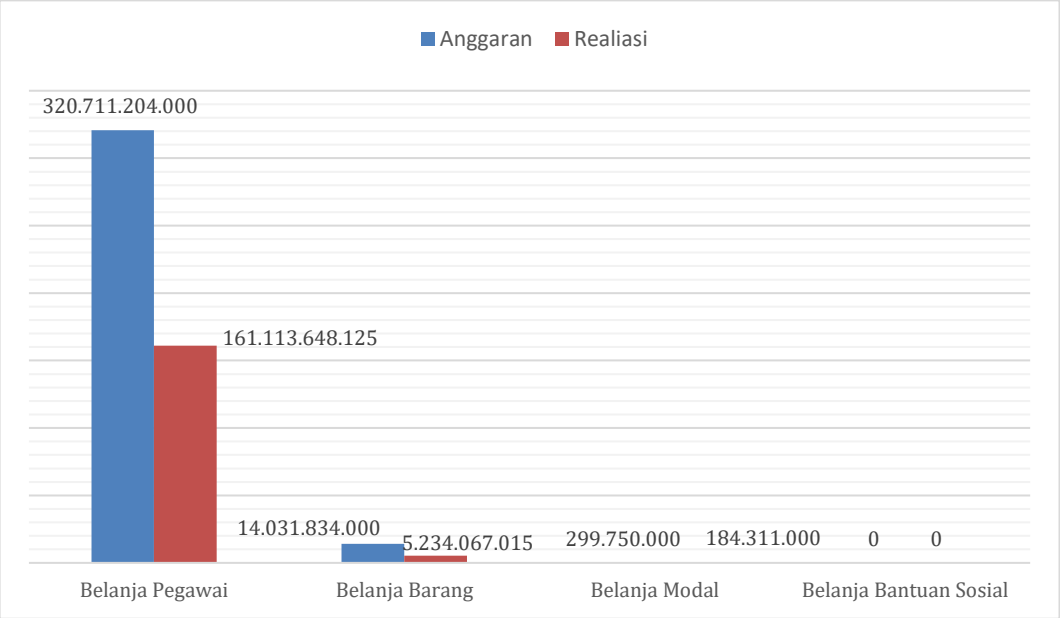
sebesar Rp.2.671.544.346,00 yaitu sebesar 51,04 persen dari keseluruhan realisasi anggaran belanja barang pada TA 2024.

Untuk realisasi anggaran belanja modal pada TA 2024 sebesar Rp. 184.311.000,00 atau sebesar 61.49 persen dari pagu anggaran belanja modal yaitu Rp.299.750.000,00.

Secara keseluruhan realisasi belanja LLDIKTI Wilayah VI mengalami kenaikan sebesar 15,27 persen.

Gambar 1

Grafik Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran TA 2024



Belanja Pegawai Rp. 161.113.648.125,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 161.113.648.125,00 dan Rp. 140.657.367.322,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Peggawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 7
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	38.894.982.231	36.622.104.402	6,21
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	122.238.862.100	104.043.002.300	17,49
Belanja Honorarium	0	0	0,00
Belanja Lembur	854.000	239.000	257,32
Belanja Vakasi	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**161.134.698.331**	**140.665.345.702**	**14,55**
Pengembalian Belanja Pegawai	(21.050.206)	(7.978.380)	163,84
Jumlah Belanja Bersih	**161.113.648.125**	**140.657.367.322**	**14,54**

Jika dibandingkan dengan belanja pegawai 30 Juni 2023 sebesar Rp.140.657.367.322,00 dan belanja pegawai 30 Juni 2024 sebesar Rp.161.113.648.125,00 maka realisasi belanja pegawai atas mengalami kenaikan sebesar 14,54 persen dimana kenaikan tersebut berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS dan Belanja Lembur.

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang Rp. 5.234.067.015,00

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.234.067.015,00 dan Rp. 3.773.259.840,00. Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Tabel 8
Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.056.971.979	939.931.725	12,45
Belanja Barang Non Operasional	568.448.170	271.538.530	109,34
Belanja Barang Persediaan	29.485.035	29.186.525	1,02
Belanja Jasa	572.412.355	620.831.690	(7,80)
Belanja Pemeliharaan	335.205.130	320.049.429	4,74
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.671.544.346	1.591.721.941	67,84
Jumlah Belanja Kotor	**5.234.067.015**	**3.773.259.840**	**38,71**
Pengembalian Belanja	0	0	**0**
Jumlah Belanja Bersih	**5.234.067.015**	**3.773.259.840**	**38,71**

Jika dibandingkan dengan belanja barang 30 Juni 2023 sebesar Rp.3.773.259.840,00 dan belanja barang 30 Juni 2024 sebesar Rp.5.234.067.015,00 maka realisasi belanja barang atas mengalami kenaikan sebesar 38,71 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada seluruh komponen Belanja Barang.

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,00

B.2.3 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal Tanah Rp.0,00

B.2.4 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 184.311.000,00,-

B.2.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 184.311.000,00 dan Rp.37.881.400,00. Belanja modal tersebut terdiri dari Pengadaan Peralatan dan Mesin, Pengadaan Alat Kebersihan, dan Pengadaan Mebelair.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Peralatan dan Mesin	184.311.000	37.881.400	386,55
Jumlah Belanja Kotor	**184.311.000**	**37.881.400**	**386,55**
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**184.311.000**	**37.881.400**	**386,55**

Jika dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin 30 Juni 2023 sebesar Rp.37.881.40000 dan belanja modal peralatan dan mesin 30 Juni 2024 sebesar Rp.184.311.000,00 maka realisasi belanja modal peralatan dan mesin atas mengalami kenaikan sebesar 386,55 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada komponen belanja modal peralatan dan mesin.

Tabel 12
Uraian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	KUANTITAS	NILAI
Sepeda Motor	3	61.826.000
A.C. Split	13	100.815.000
Televisi	3	21.670.000
Jumlah Peralatan dan Mesin	**38**	**184.311.000**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0,00

B.2.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0,00

B.2.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.2.8 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp.0,00

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	**0**	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	0,00
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Muka dari KPPN. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Keterangan	TA 2024	TA 2023
1	Saldo UP pada rekening Mandiri a/c 8100127230141000	62.893.769	0
2	Saldo UP pada brankas Bendahara Pengeluaran	0	0
3	Kuitansi UP yang belum di-SP2D	237.106.231	0
	Jumlah	**300.000.000**	**0**

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerima Rp.0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 17
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Keterangan	TA 2024	TA 2023
1	-	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 8.952.538,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 8.952.538,00 dan Rp. 0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TA 2024	TA 2023
Jasa Giro uang Belum Disetor ke Kas Negara	0	0
Pajak yang Belum Disetor	8.952.538	0
Honor Kegiatan yang Belum Dibagikan	0	0
Pengembalian Belanja Belum Disetor ke Kas Negara	0	0
Dana Titipan	0	0
Jumlah	**8.952.538**	**0**

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp.0,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut :

Tabel 19
Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TA 2024	TA 2023
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Bag Lancar Tagihan TP/TGR Rp.0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji adalah sebagai berikut :

Tabel 20
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	TA 2023	TA 2023
1	-	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bag Lancar TPA Rp.0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21
Rincian Bagian Lancar TPA

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	-	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Rp.0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp.0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Jenis	TA 2024	TA 2023
1	Pembayaran Internet	0	0
2	Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
3	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.9 Persediaan

Persediaan Rp.35.122.330,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.35.122.330,00 dan Rp.26.073.390,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	31.520.310	24.131.720
Barang untuk Pemeliharaan	3.602.020	1.941.670
Bahan Baku	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	**35.122.330**	**26.073.390**

Tabel 25
Rincian Mutasi Persediaan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**26.073.390**
Mutasi tambah :	
Pembelian	29.485.035
Mutasi kurang :	
Pemakaian	20.436.095
Saldo per 30 Juni 2024	**35.122.330**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Rp.0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 26
Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1	-		
Jumlah			

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

TPA Rp.0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Tagihan PA

No	Debitur	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-		
Jumlah			

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Tabel 28
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

C.13 Tanah

Tanah
Rp.91.868.492.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.91.868.492.000,00 dan Rp.91.868.492.000,00.

Tabel 29
Mutasi Aset Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**91.868.492.000**
Mutasi tambah :	
	0
Mutasi kurang :	
	0
Saldo per 30 Juni 2024	**91.868.492.000**

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 30
Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	27.651 m2	Jl. Pawiyatan Luhur, Semarang	91.868.492.000
		Jumlah	**91.868.492.000**

Dari luas tanah 27.651 m2 seperti tersebut diatas, dapat diperinci menurut penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Seluas kurang lebih 140 m2 berdiri sebuah bangunan tempat ibadah berupa masjid yang dibangun secara swadaya dan dimanfaatkan oleh LLDIKTI Wilayah VI.
2. Seluas kurang lebih 5.000 m2 dimanfaatkan oleh Politeknik Maritim Negeri

Indonesia (POLIMARIN).

3. Seluas kurang lebih 150 m2 dimanfaatkan oleh Aptisi LLDIKTI Wilayah VI.

Penjelasan mengenai aset tanah secara lebih terperinci dijelaskan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.14 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp. 7.766.165.164,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.7.766.165.164,00 dan Rp.7.581.854.164,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 31
Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**7.581.854.164**
Mutasi tambah :	
Pembelian peralatan dan mesin	184.311.000
Mutasi kurang :	
Penghapusan peralatan dan mesin	0
Saldo per 30 Juni 2024	**7.766.165.164**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	**(6.776.268.020)**
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**989.897.144**

Dari jumlah Peralatan dan Mesin diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,00.

Pada TA 2024 realisasi atas belanja modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp.7.766.165.164,00. Terdapat pembelian senilai Rp.184.311.000,00 penghapusan peralatan dan mesin pada TA 2024 sebesar Rp. 0,00.

Tabel 32
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nominal
1	Sepeda Motor	3	61.826.000
2	A.C. Split	13	100.815.000
3	Televisi	3	21.670.000
Jumlah			**184.311.000**

Tabel 33
Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nominal
1	-	0	0
Jumlah			

Rincian terkait Aset Peralatan dan Mesin akan dijelaskan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

C.15 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp. 21.616.397.751,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.21.616.397.751,00 dan Rp.21.616.397.751,00. Pada TA 2024 tidak terdapat penambahan atas aset Gedung dan Bangunan akan tetapi terdapat koreksi pencatatan yg dilakukan karena terdapat beberapa Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan hasil dari renovasi/pengembangan namun dicatatkan menjadi NUP baru. Mutasi nilai gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 34
Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**21.616.397.751**
Mutasi tambah :	
Mutasi kurang :	
Saldo per 30 Juni 2024	**21.616.397.751**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	**(7.976.547.722)**
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**13.639.850.029**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.532.291.317,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.532.291.317,00 dan Rp.532.291.317,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 35
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**532.291.317**
Mutasi tambah :	
	0
Mutasi kurang :	
Saldo per 30 Juni 2024	**532.291.317**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	**(485.181.938)**
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**47.109.379**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp.0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pada TA 2024 tidak terdapat penambahan atas Aset Tetap Lainnya. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 36
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**0**
Mutasi tambah :	
	0
Mutasi kurang :	
Pencatatan Barang Dihapuskan (barang rusak berat yang dihentikan penggunaannya)	0
Saldo per 30 Juni 2024	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**0**

Tabel 37
Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nominal
1	-	0	0
2			
Jumlah			

Rincian aset tetap lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstriksi Dalam Pengerjaan Rp.0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. Rp.0,00.

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 38
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**0**
Mutasi tambah :	
Koreksi Pencatatan	0
Mutasi kurang :	
Kapitalisasi BMN	0
Saldo per 30 Juni 2024	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**0**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) disajikan dalam lampiran.

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 15.237.997,680,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.15.237.997.680,00 dan Rp.14.417.511.159,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 39
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	91.868.492.000	0	91.868.492.000
2	Peralatan dan Mesin	7.766.165.164	6.776.268.020	989.897.144
3	Gedung dan Bangunan	21.616.397.751	7.976.547.722	13.639.850.029
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	532.291.317	485.181.938	47.109.379
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
		121.783.346.232	**15.237.997.680**	**106.545.348.552**

Tabel 40
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	91.868.492.000		0	91.868.492.000
2	Peralatan dan Mesin	7.766.165.164	-6.492.718.829	-283.549.191	989.897.144
3	Gedung dan Bangunan	21.616.397.751	-7.440.534.105	-536.013.617	13.639.850.029
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	532.291.317	-484.258.225	-923.713	47.109.379
5	Aset Tetap Lainnya	0		0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0		0	0
		121.783.346.232	**-14.417.511.159**	**-820.486.521**	**106.545.348.552**

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp.332.601.500,00.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.332.601.500,00 dan Rp.332.601.500,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset

yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak Berwujud yang dimiliki LLDIKTI Wilayah VI Semarang per 30 Juni 2024 adalah berupa Software Aplikasi Keuangan dengan nama ***SiCantik***, Pengembangan Aplikasi Beban Kerja Dosen, Pengadaan Aplikasi Dashboard Terintegrasi, dan Pengembangan Aplikasi Sijago Reborn Tahun 2023 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 41
Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**332.601.500**
Mutasi tambah :	
	0
Mutasi kurang :	
	0
Saldo per 30 Juni 2024	332.601.500
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	**(261.896.938)**
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**70.704.562**

Rincian lebih lanjut terkait Aset Tak Berwujud akan disajikan dalam lampiran.

C.21 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp.0,00

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00 dan Rp.133.492.000,00. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kantor LLDIKTI Wilayah VI per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 42
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1			
2			
3			
4			
5			
Total			

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp.2.450.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.2.450.000,00 dan Rp.2.450.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Pada TA 2024 tidak terdapat penambahan atas Aset Lain-lain. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Tabel 43
Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**2.450.000**
Mutasi tambah :	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
Mutasi kurang :	
Pencatatan Barang Yang Dihapuskan	0
Saldo per 30 Juni 2024	**2.450.000**
Akumulasi Penyusutan	(2.450.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**0**

Tabel 44
Mutasi Tambah Aset Lain-lain

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nominal
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Tabel 45
Mutasi Kurang Aset Lain-lain

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nominal
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.264.346.938,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.264.346.938,00 dan Rp.222.771.750,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 46
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	332.601.500	261.896.938	70.704.562
Aset Lain-lain	2.450.000	2.450.000	0
Jumlah	**335.051.500**	**264.346.938**	**70.704.562**

Tabel 47
Mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	Beban Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	332.601.500	-220.321.750	-41.575.188	70.704.562
2	Aset Lain-lain	2.450.000	0	-2.450.000	0
		335.051.500	**-220.321.750**	**-44.025.188**	**70.704.562**

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp. 300.000.000,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.300.000.000,00 dan Rp.0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp.2.732.732.850,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.2.732.732.850,00 dan Rp.616.692.900,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor LLDIKTI Wilayah VI per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 48
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Beban pegawai yang masih harus dibayar	2.465.428.860	Gaji Induk bulan Juli 2024
2	Beban barang yang masih harus dibayar	35.683.659	Belanja Barang Honor PPNPN Bulan Juni 2024
3	Beban barang yang masih harus dibayar	191.733.310	Belanja Barang yang Belum GU Tunai
4	Beban barang yang masih harus dibayar	39.887.021	Belanja Barang yang Belum GU Tunai
5	Beban barang yang masih harus dibayar	41.338.421	Belanja Barang yang Belum GU KKP
6	Beban barang yang masih harus dibayar	5.485.900	Belanja Barang yang Belum GU Tunai
Total		**2.732.732.850**	

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp.46.824.321 ,00

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp.46.824.321,00 dan Rp.0,00. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan Lainnya pada Kantor LLDIKTI Wilayah VI per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 49
Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

NO	SUMBER DANA	KODE AKUN				TOTAL	KET
		KEG	OUTPUT	AKUN	Keterangan Belanja		
1	UP KKP	4472	BDB	524111	Belanja Perjalanan Dinas	13.279.000	Transaksi KKP yang belum GU Per 30 Juni 2024
2	UP KKP	4472	BDB	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	5.250.000	Transaksi KKP yang belum GU Per 30 Juni 2024
3	UP KKP	6392	EBA	521111	Belanja Keperluan Sehari-hari	1.099.000	Transaksi KKP yang belum GU Per 30 Juni 2024
4	UP KKP	6392	EBA	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.400	Transaksi KKP yang belum GU Per 30 Juni 2024
5	UP KKP	6392	EBA	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Inventaris	5.542.207	Transaksi KKP yang belum GU Per 30 Juni 2024
6	UP KKP	6392	EBA	524111	Belanja Perjalanan Dinas	13.167.814	Transaksi KKP yang belum GU Per 30 Juni 2024
7	UP TUNAI	6392	EBA	522151	Belanja Jasa Profesi	5.000.000	Transaksi UP yang belum GU Per 30 Juni 2024
8	UP TUNAI	6392	EBA	521111	Belanja Keperluan Sehari-hari	485.900	Transaksi UP yang belum GU Per 30 Juni 2024
					Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	**46.824.321**	

Pendapatan Diterima Dimuka
Rp.2.877.000,00

C.27 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp.2.877.000,00 dan Rp.411.000,00. Adapun rincian Pendapatan diterima dimuka per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 50
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Pendapatan atas sewa kantin	2.877.000	Bulan Juli 2024 s.d Januari 2025
Total		**411.000**	

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp.8.952.538,00

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp.8.952.538,00 dan Rp.0,00. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Kantor LLDIKTI Wilayah VI per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 51
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang atas Pendapatan Pajak yang belum disetor	8.952.538	Sudah disetor 1 Juli 2024
Total		**8.952.538**	

Ekuitas
Rp.103.868.741.273,00
,-

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.103.868.741.273,00 dan Rp.106.836.265.313,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Rp.0,00

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 52
Rincian Pendapatan Perpajakan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan PPh pasal 22	0	0	0,00
Pendapatan PPh pasal 23	0	0	0,00
Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp.2.466.000,00

Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.2.466.000,00 dan Rp.2.055.000,00.

Rincian pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 53
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.466.000	2.055.000	20,00
Jumlah	**2.466.000**	**2.055.000**	**20,00**

Dibandingkan dengan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2023 sebesar Rp.2.055.000,00 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp.2.466.000,00 maka Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas mengalami kenaikan sebesar 20,00 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp.163.095.876.085,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.163.095.876.085,00 dan Rp.143.172.794.478,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 54
Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	41.353.227.910	39.129.890.523	5,68
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	121.741.794.175	104.042.664.955	17,01
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	
Beban Lembur	854.000	239.000	257,32
Jumlah	**163.095.876.085**	**143.172.794.478**	**13,92**

Berdasarkan rincian di atas terdapat kenaikan Beban Pegawai per 30 Juni 2024 senilai Rp.163.095.876.085,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp.143.172.794.478,00 yaitu sebesar 13,92 persen dimana kenaikan tersebut terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan PNS, Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS dan Beban Lembur.

D.4 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp.15.638.390,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.15.638.390,00 dan Rp.19.999.320,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	15.638.390	19.999.320	(21,81)
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	**15.638.390**	**19.999.320**	**(21,81)**

Berdasarkan rincian di atas terdapat penurunan Beban Persediaan antara Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Anggaran 2023 sejumlah 21,81 persen yang keseluruhannya terdapat pada Beban Persediaan Konsumsi.

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp.2.308.558.854,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.308.558.854,00 dan Rp.2.143.949.820,00 terdapat kenaikan sebesar 7,68 persen. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa

konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 56
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.039.152.429	978.170.800	6,23
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	895.900	3.383.800	(73,52)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55.400.000	111.310.000	(50,23)
Beban Bahan	305.223.202	225.624.530	35,28
Beban Honor Output Kegiatan	88.200.000	47.700.000	84,91
Beban Barang Non Operasional Lainnya	181.074.968	35.995.000	0,00
Beban Langganan Listrik	133.474.127	136.688.133	(2,35)
Beban Langganan Telepon	3.092.160	2.651.569	16,62
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	64.149.965	257.960.988	(75,13)
Beban Sewa	10.296.103	125.765.000	0,00
Beban Jasa Profesi	427.600.000	218.700.000	95,52
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah	**2.308.558.854**	**2.143.949.820**	**7,68**

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.365.756.465.00

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.365.756.465,00 dan Rp.340.984.321,00 terdapat kenaikan sejumlah 7.26 persen. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 57
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222.305.879	203.436.113	9,28
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.652.881	129.241.003	7,28
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	4.797.705	8.307.205	(42,25)
Jumlah	**365.756.465**	**340.984.321**	**7,26**

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp.2.849.192.677,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.849.192.677,00 dan Rp.1.640.988.841,00 dimana terdapat kenaikan sejumlah 73.63 persen. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 58
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	596.867.265	692.599.523	(13,82)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	697.972.698	146.025.000	377,98
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.554.352.714	802.364.318	93,72
Jumlah	**2.849.192.677**	**1.640.988.841**	**73,63**

D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi.

D.9. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp.0,00

Beban Bantuan Sosial pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.862.061.709,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.862.061.709,00 dan Rp.884.267.743,00 dimana terdapat penurunan sejumlah 2.51 persen. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 59
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	283.549.191	305.755.225	(7,26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	536.013.617	536.013.617	0,00
Beban Penyusutan Jalan. Irigasi. Jaringan	923.713	923.713	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Penyusutan	**820.486.521**	**842.692.555**	**(2,64)**
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	41.575.188	41.575.188	0,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi	**41.575.188**	**41.575.188**	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**862.061.709**	**884.267.743**	**(2,51)**

D.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

D.12. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Rp.0,00

Jumlah Beban Lain-lain pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena

penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.13. Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.94.947.550,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.94.947.550,00 dan (Rp.8.897.238,00) dimana terdapat kenaikan sejumlah 1.167,16 persen. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 60
Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	19.999.999	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	(85.739.832)	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	94.947.550	56.842.595	67,04
Beban dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**94.947.550**	**(8.897.238)**	**(1.167,16)**

D.14 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp.0.,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 61
Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Luar Biasa	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.106.836.265.313,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.106.836.265.313,00 dan Rp.108.740.075.968,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp.169.399.670.630,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp.169.399.670.630,00) dan (Rp.148.209.826.761,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

Penyesuaian Nilai Aset adalah penyesuaian atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan . Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap Non Revaluasi

Selisih Revaluasi Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp.0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2032 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.6. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp. 0,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2022 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.7. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp.0,00

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.8. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp.166.432.146.590,00

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.166.432.146.590,00 dan Rp.144.386.733.968,00. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 62
Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	166.532.026.140	144.468.508.562	15,27
Diterima dari Entitas Lain	(99.879.550)	(81.774.594)	22,14
Transfer Keluar	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	100
Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0
Jumlah	**166.432.146.590**	**144.386.733.968**	**15,27**

Ekuitas Akhir Rp.103.868.741.273,00

E.9. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.103.868.741.273,00 dan Rp.104.916.983.175,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Beberapa kejadian penting lainnya yang terjadi pada TA 2024 adalah sebagai berikut :

1) PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Selama periode Tahun Anggaran 2024 , output strategis yang telah dicapai oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Tinggi memiliki beberapa output strategis berupa:
   a. Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu
   b. Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi

Secara rinci output atas Program Pendidikan Tinggi, dapat kami sampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 63
Rincian Output Strategis Kode Output DK.4472

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	DK.4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	7.775.734.000	2.903.364.736	37,34%	210 lembaga	210 lembaga	57,24%
2	DK.4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	001 - Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	240.635.051.000	122.238.862.100	50,80%	5.561 orang	5.561 orang	55,78%

2. Program Dukungan Manajemen memiliki output strategis berupa Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Tabel 64
Rincian Output Strategis Kode Output WA.6392

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	WA.6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	548.884.000	250.453.550	45,63%	1 layanan	1 layanan	65,53%
2	WA.6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	85.783.369.000	40.942.295.760	47,73%	1 layanan	1 layanan	67,71%
3	WA.6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	299.750.000	184.311.000	61,49%	4 unit	2 unit	81,48%

2) PERUBAHAN REKENING BENDAHARAN PENGELUARAN

Adapun Rekening Virtual Bendahara Pengeluaran yang saat ini Aktif dan digunakan Adalah sebagai berikut :

Tabel 65
Data Rekening Virtual

Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Status
8100127230141000	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	Mandiri	Aktif

Tabel 66
Data Rekening RPL

Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Status
1053003521	RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK KERJASAMA	PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sampangan Semarang	Aktif
00571.01.30.000 0280	RPL 026 KS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK KERJASAMA	PT Bank Tabungan Negara	Aktif

Rekening Giro yang sebelumnya digunakan telah ditutup dengan data sebagai berikut :

Tabel 67
Data Tutup Rekening Giro

Nama Rekening	: RPL 026 PS LLDIKTI WIL VI SMG UNTUK P2B
Nomor Rekening	: 1360087000771
Nama Bank	: Mandiri
Status Rekening	: Tidak Aktif
No Surat Penutupan Bank	: 22/LL6/KU.00.03/2023
Tanggal Penutupan	: 11 Januari 2023
Saldo Per 11 Januari 2023	: Rp 0,00

Surat-surat perihal proses Perubahan Rekening menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

3) DANA NON DIPA PADA TA 2024

Selama periode Triwulan III LLDIKTI Wilayah VI mendapat alokasi Dana Non DIPA yang telah disalurkan pada TA 2023. Dana tersebut adalah :

Tabel 68
Dana Non DIPA LLDIKTI Wilayah VI

No	Jenis Dana Non DIPA	Nilai	Diterima Tanggal	Keterangan
1	Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap I No Kontrak 103/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/III/2024 Tanggal Kontrak 19 Maret 2024	1.111.800.900	02-Apr-24	Penyaluran tanggal 06-May-24
2	Kontrak Dana PKM DIKTI Tahap I No Kontrak 078/E2/PPK/SPPK/PKM/2024 Tanggal Kontrak 30-Apr-24	1.660.239.000	20-May-24	Penyaluran tanggal 10-Jun-24
3	Kontrak Dana Program Kreativitas Mahasiswa PT Vokasi Tahap I No Kontrak 54/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/V/2024 Tanggal Kontrak 10-Mei-24	22.400.000	06-Jun-24	Penyaluran tanggal 25-Jun-24

Keseluruhan Dana Non DIPA disalurkan melalui Rekening Virtual Bendahara Pengeluaran kepada setiap Perguruan Tinggi Swasta Penerima yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah VI Semarang dan Daftar Lampiran Penerima sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

4) PENJELASAN JURNAL PENYESUAIAN DAN JURNAL MANUAL TA 2024

Daftar Jurnal Penyesuaian pada Periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 69
Daftar Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Manual

No	Akun	Uraian	Debet	Kredit
1.	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	30.202.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		30.202.000
	Ket :	Jurnal balik Pengadaan Bandwith Kantor LLDIKTI Wilayah VI Th 2023 sesuai BAST/BAPP Nomor 376/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023		
2	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	45.210.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		45.210.000
	Ket :	Jurnal balik Pengadaan Tenaga Satpam LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2023 sesuai BAST/BAPP Nomor 323/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023		
3	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	37.800.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		37.800.000
	Ket :	Jurnal balik Pengadaan Tenaga Kebersihan Gedung dan Halaman LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2023 sesuai BAST/BAPP Nomor 341/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023		
4	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	6.882.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		6.882.000
	Ket :	Jurnal balik Collocation LLDIKTI Wilayah VI Th 2023 sesuai BAST/BAPP Nomor 395/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023		

5	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	13.398.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		13.398.000
	Ket :	Jurnal balik Pengadaan Tenaga Sopir LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2023 sesuai BAST/BAPP Nomor 359/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023		
6	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	483.200.900	
	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS		483.200.900
	Ket :	Jurnal balik hutang pembayaran Serdos untuk 157 Dosen yang dibayar TA 2024		
7	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	411.000	
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		411.000
	Ket :	Sewa kantin bulan Januari 2024		
8	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.877.000	
	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		2.877.000
	Ket :	Sewa kantin bulan Juli 2024 s.d Januari 2025		

5) PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Surat Perjanjian nomor 94/LL6/LK.05.05/2024 tertanggal 7 Februari 2024 harga sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun merujuk pada surat persetujuan sewa dari KPKNL dengan nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 14.796.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan harga sewa periode kedua sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

6) CATATAN HASIL PEMANTAUAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN NON PNS TAHUN 2023

Hal-hal yang menjadi perhatian:

1) Linimasa penilaian BKD yang berlaku pada LLDIKTI Wilayah VI yaitu September s.d. Februari (semester gasal) sedangkan dalam aturan pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dosen yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang menyatakan "Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI selama ini untuk penerima TPD Non-PNS yang baru sertifikasi dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dengan tetap menunggu Laporan Kinerja Dosen (LKD) semester gasal yang merupakan syarat pencairan Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS.
2) Hasil unduhan rekapitulasi LKD dari SISTER tidak sesuai dengan data tampilan di aplikasi SISTER pada akun LLDikti VI di mana terdapat perbedaan jumlah digit SKS. Hal ini disebabkan terdapat pergeseran tanda koma yang mengubah digit angka. Akibatnya jumlah SKS pada hasil data unduhan tampil lebih besar dari jumlah SKS riil yang ada di aplikasi SISTER akun LLDIKTI dan PTS.
3) Penerima TPD Non-PNS yang melaksanakan tugas belajar dan pensiun tidak mendapatkan tunjangan terhitung mulai tanggal (TMT) permulaan tugas belajar dan/atau pensiun sedangkan dosen telah melaksanakan Beban Kerja Dosen dan Tridharma pada semester itu.

Tindak Lanjut yang diperlukan:

Kepala LLDIKTI Wilayah VI agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap status keaktifan dosen Non-PNS dan menyusun kebijakan yang mengatur mekanisme pelaporan status dosen Non-PNS yang bertugas sebagai pejabat struktural/pejabat negara kepada LLDIKTI Wilayah VI.

7) TRANSAKSI RESIPROKAL

Pada Semester I tahun anggaran 2024 terdapat transaksi resiprokal atas Kursus/Diklat/Pelatihan bagi Pegawai - Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan IV tgl 4 Maret s.d. 13 Mei 2024 yang diikuti 1 peserta dari LLDIKTI Wilayah VI sejumlah Rp 6,790,000.

8) TEMUAN PEMERIKSAAN BPK

1. TP.4. Aset Setjen: Penatausahaan Aset Tetap pada Sekretariat Jenderal Belum Optimal

   Tanggapan :

   Kondisi Aset tetap di LLDIKTI Wilayah VI saat ini tidak ada yang dicatatkan dalam kondisi rusak berat, akan tetapi kami mencatatkan 127 aset tetap dalam Kondisi Rusak Ringan.

   Pada LLDIKTI Wilayah VI terdapat tiga kendaraan dinas yang nomor polisinya belum dicatatkan pada aplikasi SIMAN terdiri dari 1 (satu) sepeda motor dan 2 (dua) mobil yaitu :

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan
1	3020104001	3	Sepeda Motor	Honda	16/02/2007	11.975.000
2	3020101001	2	Sedan	Toyota Altis V A/T	21/03/2011	344.400.000
3	3020102003	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova G 2.0 M/T	08/05/2019	305.853.500

   serta terdapat 4 (empat) kendaraan dinas yang nomor rangka dan nomor mesinnya belum dicatatkan pada aplikasi SIMAN terdiri dari 2 (dua) sepeda motor dan 2 (dua) mobil yaitu:

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan
1	3020104001	3	Sepeda Motor	Honda	16/02/2007	11.975.000
2	3020104001	7	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	19/04/2011	14.875.000
3	3020101001	2	Sedan	Toyota Altis V A/T	21/03/2011	344.400.000
4	3020102003	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova G 2.0 M/T	08/05/2019	305.853.500

   Pelaksana penatausahaan BMN di LLDIKTI Wilayah VI akan menindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa BPK dengan melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dan optimalisasi penatausahaan BMN di LLDIKTI Wilayah VI.

2. TP.7. Kurang Volume Belanja Pemeliharaan: Kekurangan volume pekerjaan belanja barang dan jasa sebesar Rp, 316.531.096 pada empat satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal

   Tanggapan :

   LLDIKTI Wilayah VI Semarang akan menindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa BPK dengan memerintahkan pengembalian kelebihan

pembayaran kepada Penyedia dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pada Penatausahaan Belanja Barang dan Jasa di LLDIKTI Wilayah VI Semarang.

3. TP.35. Serdos dan Kehormatan Guru Besar:
   a. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tidak Akurat.
   b. Kurang saji atas akun Belanja Pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp11.554.911.396,00 atas carry over TPD 2023 yang belum tercatat di semua LLDIKTI. Untuk LLDIKTI Wilayah VI senilai Rp. 483.200.900,00 untuk 157 Dosen yang pembayaran TPDnya dilakukan pada TA 2024.

Tanggapan 3.a :

Tabel 4. Rincian Pembayaran TPD kepada Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD di Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD	
		Jumlah (orang)	Nilai (Rp)
1	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	14	166.791.800
2	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	26	213.881.000
3	[723013] LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta	1	3.204.700
4	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	127	2.951.695.516
5	[723015] LLDIKTI Wilayah VII Surabaya	8	50.032.900
6	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	86	1.547.766.400
7	[723018] LLDIKTI Wilayah X Padang	33	582.091.000
8	[723019] LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin	1	18.453.000
9	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	13	93.308.783
10	[723022] LLDIKTI Wilayah XIV Biak	3	51.506.000
11	[723023] LLDIKTI Wilayah XV Kupang	4	13.098.000
12	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	8	186.816.500
TOTAL		**324**	**5.878.645.599**

Tabel 5. Rincian Pembayaran TPD Januari dan Februari 2023 kepada Dosen Lulus Sertifikasi Tahun 2022 Namun Tidak Memenuhi Status BKD Semester Genap 2021-2022

No	Satuan Kerja	Dosen (Orang)	Nilai (Rp)
1	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	110	567.350.200
2	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	5	28.922.000
3	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	78	204.843.750
4	[723016] LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar	1	5.546.400
5	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	47	157.153.400
6	[723018] LLDIKTI Wilayah X Padang	1	5.781.000
7	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	15	78.165.417
8	[723022] LLDIKTI Wilayah XIV Biak	1	5.781.000
9	[723023] LLDIKTI Wilayah XV Kupang	6	36.140.800
10	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	1	5.377.000
TOTAL		**265**	**1.095.060.967**

Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa:

1. Terdapat status BKD dari 127 dosen pada perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Semarang dengan nilai sebesar Rp. 2.951.695.516, yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen /TPD tahun 2023.
2. Terdapat status BKD dari 78 dosen lulus sertifikasi tahun 2022 untuk pembayaran Januari s.d Februari 2023 yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran pada semester Genap 2021/2022 sebesar Rp. 204.843.750.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Status BKD 127 dosen dan 78 dosen seperti tersebut di atas sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sesuai dengan data pada aplikasi sister.kemdikbud.go.id. Terjadinya temuan dikarenakan adanya:

   a. Perbedaan cara verifikasi data pendukung yang digunakan sebagai dasar pembayaran oleh LLDIKTI Wilayah VI Semarang dan data pendukung yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK yaitu:

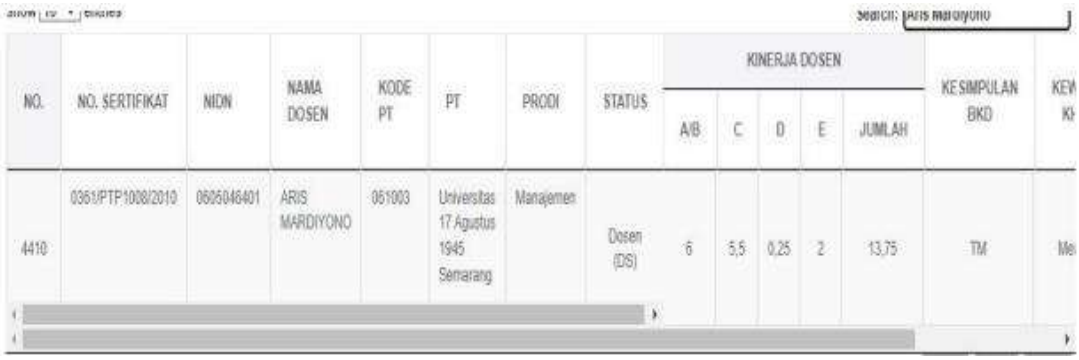
   • Verifikasi data pendukung yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI Semarang dilakukan dengan cara sebagai berikut: membandingkan secara langsung data pembayaran TPD dan data dosen terkait pada dashboard pada aplikasi sister.kemdikbud.go.id (melakukan akses langsung menggunakan akun login pengelola Sister LLDIKTI Wilayah VI Semarang) tanpa melakukan pengunduhan data pendukung.

   • Verifikasi data pendukung yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK dilakukan dengan cara sebagai berikut: melakukan pengunduhan data pendukung dari aplikasi sister.kemdikbud.go.id untuk kemudian membandingkan data pembayaran TPD dengan data hasil unduhan dimaksud.

   b. Terjadi gangguan pada sistem aplikasi sister.kemdikbud.go.id pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim BPK yang mengakibatkan perbedaan versi data pada akun Admin Ditjen Diktiristek, LLDIKTI, Pengelola PT, dan Dosen. Beberapa status dosen yang berbeda tersaji di bawah ini :

Contoh pada data dosen a.n. Aris Mardiyono (Univ 17 Agustus 1945 Semarang) :

Di laman sister.kemdikbud.go.id pada akun LLDIKTI VI, diperiksa ulang tanggal 17 April 2024 untuk pelaporan Ganjil 2022/2023 :



NO.	NO. SERTIFIKAT	NIDN	NAMA DOSEN	KODE PT	PT	PRODI	STATUS	KINERJA DOSEN					KESIMPULAN BKD	KEW KI
								A/B	C	D	E	JUMLAH		
4410	0361/PTP.1008/2010	0605046401	ARIS MARDIYONO	051003	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Manajemen	Dosen (DS)	6	5,5	0,25	2	13,75	TM	Me

Kesimpulan BKD : **Tidak memenuhi**

Di akun Pengelola Perguruan Tinggi dan Dosen ybs :



NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Show 10 entries Search: mardi

NO*	STATUS	NO. SERTIFIKAT	NIDN	KINERJA DOSEN								KEWAJIBAN DOSEN	KESIMPULAN
				≥(B) LVB	C	Lebih C	D	Lebih D	E	Lebih E	Dikerjakan	Dikecam Lebih	BKD SEMESTER		
1464	Dosen (DS)	0361/PTP.1008/2010	0605046401	6	4	0	0,5	0	2	0	14,5	6	M	M	M

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 232 total entries) Copy Excel CSV PDF Previous 1 Next



LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)
LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN
SEMESTER GANJIL TAHUN 2022/2023

A. Identitas

Nama	:	ARIS MARDIYONO, S.E., M.M
NIDN	:	0605046401
Nomor Sertifikat	:	0361/PTP-1008/2010
Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
Status	:	DOSEN (DS)
Alamat PT	:	JALAN PAWIYATAN LUHUR BENDAN DHUWUR, KOTA SEMARANG, PROV. JAWA TENGAH - 50133
Fakultas/Departemen	:	EKONOMI
Jurusan/Program Studi	:	MANAJEMEN (S1)
Jab. Fungsional/Golongan	:	LEKTOR/III.D
Tempat/Tanggal Lahir	:	PURWODADI, 05 APRIL 1964
Asal S1	:	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
Asal S2	:	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

C. Kesimpulan Kinerja Dosen Tahun Akademik 2022/2023 Semester GANJIL

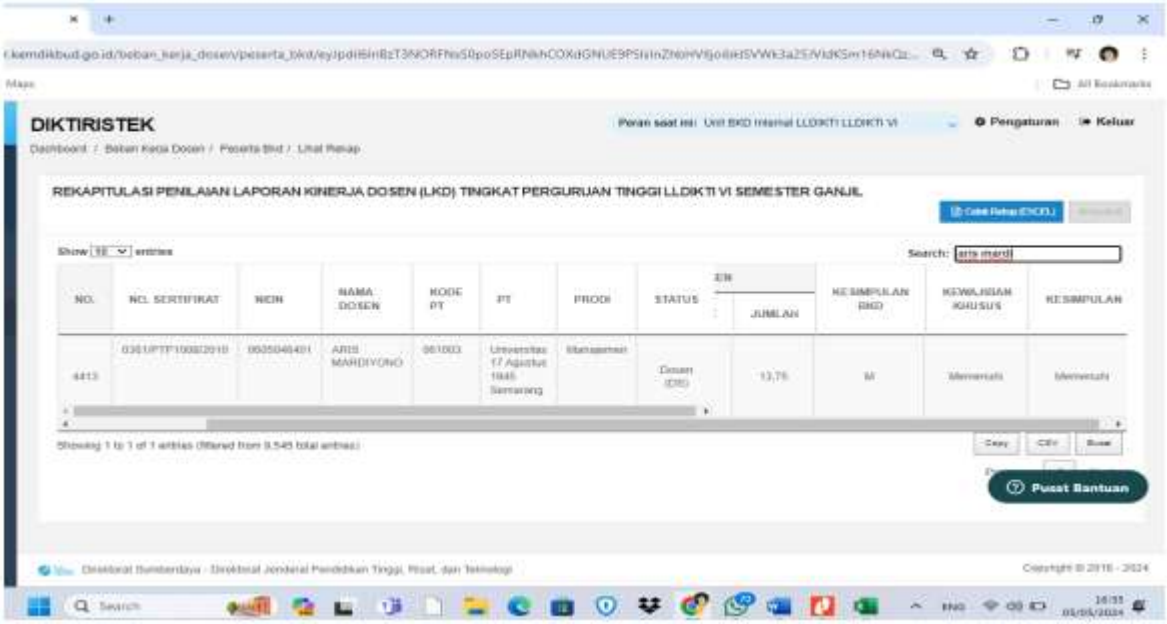
No	Jenis Kinerja	Syarat	SKS BKD	SKS Lebih	Status
1	Pelaksanaan Pendidikan	Tidak boleh kosong	6	6	M
2	Pelaksanaan Penelitian	Tidak boleh kosong	5.5	0	M
3	Pelaksanaan Pengabdian	Tidak boleh kosong	0.25	0	M
4	Pelaksanaan Penunjang	Tidak boleh kosong	2	0	M
	Kriteria Pelaksanaan Pendidikan dan Pelaksanaan Penelitian	***Minimal 9 sks***	***11.5***	***6***	***M***
	Kriteria Pelaksanaan Pengabdian dan Pelaksanaan Penunjang	***Tidak boleh kosong***	***2.25***	***0***	***M***
Total Kinerja		Minimal 12 sks dan Maksimal 16 sks	13.75	**6**	M

Keterangan:
- **TM**: Tidak Memenuhi
- **M**: Memenuhi

Memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen.

Kesimpulan BKD: **Memenuhi**

Setelah LLDIKTI Wilayah VI berkonsultasi ke Tim SISTER Pusat terkait perbedaan ini, diberikan solusi agar Pengelola PT memproses pengesahan ulang, sehingga data yang tersaji pada seluruh akun dapat valid dan menyajikan informasi yang sama. Setelah dilakukan pengesahan ulang, LLDIKTI Wilayah VI memeriksa kembali pada tanggal 5 Mei 2024 melalui akun LLDIKTI Wilayah VI di sister.kemdikbud.go.id pada laporan BKD Ganjil 2022/2023 a.n. Dosen ybs, pada halaman rekapitulasi penilaian didapatkan hasil seperti di bawah ini:



Kesimpulan BKD : **Memenuhi**

Contoh lain untuk dosen a.n. : **Yustiana Dwirainaningsih (0626077201-Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan)** untuk Laporan Semester Genap 2021/2022 :

Di akun LLDIKTI VI pada tanggal 5 Mei 2024 :



Kesimpulan BKD : **Memenuhi**

2. Beberapa dosen masih dalam penanganan Tim SISTER Pusat, untuk dosen yang pernah berstatus pindah homebase Perguruan Tinggi pada kurun waktu 2021 s.d. 2023, karena data dosen tersebut saat ini telah tidak muncul secara online di laman sister.kemdikbud.go.id pada akun Perguruan Tinggi sebelumnya.
3. Secara teknis, pada kondisi normal seharusnya data yang tersaji pada dashboard aplikasi sister.kemdikbud.go.id pada waktu kapanpun dan data hasil unduhan adalah sama. Akan tetapi, pada saat dilakukan pengunduhan data pendukung sesuai permintaan dari Tim Pemeriksa BPK, data yang tersaji di dashboard aplikasi sister.kemdikbud.go.id dengan hasil pengunduhan mengalami perbedaan sehingga mengakibatkan perbedaan hasil verifikasi antara yang dilakukan oleh Petugas di LLDIKTI Wilayah VI dan Tim Pemeriksa BPK.
4. Kendala pada sistem yang mengakibatkan ketidaksesuaian ini telah dilaporkan dan dikonsultasikan oleh LLDIKTI Wilayah VI Semarang ke Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan telah ditindaklanjuti dengan menugaskan Pengelola Perguruan tinggi untuk melakukan Pengesahan Kembali dan data telah tersaji : Memenuhi. Tetapi untuk dosen yang pindah homebase pergruruan tinggi, sampai dengan saat ini masih tahap

perbaikan di sister.kemdikbud.go.id oleh Tim SISTER Kemdikbudristek (Direktorat Sumber Daya).

Tanggapan 3.b :

Temuan ini akan kami tindak lanjuti dengan melakukan jurnal penyesuaian (beban akrual), dan sebagai pedoman LLDIKTI Wilayah VI Semarang dalam penjurnalan di tahun selanjutnya.

Tabel 70

Pembayaran Tunjangan Serdos dan Guru Besar Tahun 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024 (Carry Over) (Dosen Non PNS)

NO	NAMA PENERIMA	NIDN	NO SERDIK	GOLONGAN	BULAN USULAN	JML KOTOR	NAMA PERGURUAN TINGGI
1	Faiza Munabari	0619056501	20106413601918	III/b	SEPT, OKT,NOV, DES 2023	11.442.000	Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945
2	Dyah Rohma Wati	0209078703	19106414902132	III/b	Sep-23	2.688.500	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
3	Sumarno	0608016501	12106101307278	III/c	SEPT, OKT,NOV, DES 2023	14.364.800	Universitas Pancasakti Tegal
4	Hasman Budiadi	0619126802	18106304002505	III/b	Oct-23	2.688.500	STMIK Sinar Nusantara
5	Kasno	0601036101	19106103407418	III/c	Dec-23	3.821.000	Universitas Aki
6	Ana Wahyuni	0601067503	14106103401657	III/c	Dec-23	3.272.200	Universitas Aki
7	Yani Prihati	0602017001	091250202102	IV/a	Dec-23	3.782.400	Universitas Aki
8	Erawati Kartika	0604107501	21106103402378	III/b	Dec-23	2.773.200	Universitas Aki
9	Suwarno	0606037001	11106103411667	III/c	Dec-23	3.075.500	Universitas Aki
10	Suhaji	0608096806	15106300707987	III/d	Dec-23	3.628.900	Universitas Aki
11	Tri Purwani	0609027101	08250205448	IV/a	Dec-23	3.901.500	Universitas Aki
12	Alice Zellawati	0610067401	17106103402256	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Aki
13	Ika Listyawati	0611108801	21106103402813	III/b	Dec-23	2.773.200	Universitas Aki
14	Daniel Tunggono Saputro	0612047901	16106103405592	III/c	Dec-23	3.481.600	Universitas Aki
15	Sri Murjani Listijo	0613026301	13106103404175	III/b	Dec-23	2.773.200	Universitas Aki
16	Yusup	0613037101	091250208319	III/d	Dec-23	3.410.600	Universitas Aki

17	Yohana Tri Widayati	0613046804	08250205447	IV/a	Dec-23	3.901.500	Universitas Aki
18	Alexander Dharmawan	0615107201	091250201615	IV/a	Dec-23	3.554.900	Universitas Aki
19	Harries Arizonia Ismail	0618127802	20106103408956	III/c	Dec-23	2.802.300	Universitas Aki
20	Ahmad Muhid	0619016301	17106103405684	III/a	Dec-23	3.204.700	Universitas Aki
21	Suprapto	0621066901	13106103403421	III/a	Dec-23	3.305.700	Universitas Aki
22	Eko Heriyanto	0628118704	21106103405092	III/c	Dec-23	2.890.500	Universitas Aki
23	Handoko Soerjanto	0629126201	17106103401070	III/b	Dec-23	2.950.600	Universitas Aki
24	Sinta Tridian Galih	0630107301	11106103417712	III/c	Dec-23	3.272.200	Universitas Aki
25	B. Dedi, S.KM., M.KEP.	0403086701	11104320501897	III/c	Dec-23	3.272.200	Universitas Karya Husada Semarang
26	Witri Hastuti	0525098201	15106307410191	III/c	Dec-23	3.272.200	Universitas Karya Husada Semarang
27	Maftuchah	0601048901	22106106401622	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Karya Husada Semarang
28	Nurma Ika Zuliyanti	0610118603	15106414109156	III/d	Dec-23	3.306.500	Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia
29	Tri Puspa Kusumaningsih	0619078801	17106414102775	III/c	Dec-23	3.075.500	Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia
30	Fetty Chandra Wulandari	0620128801	18106414102076	III/b	Dec-23	2.688.500	Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia
31	Dyah Ayu Wulandari	0602097901	15106307409408	III/b	Dec-23	3.238.300	Universitas Karya Husada Semarang
32	Dwi Kustriyanti	0604088404	20106307402317	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Karya Husada Semarang
33	Sulastri	0628027001	20106310608749	III/a	Dec-23	3.012.000	Universitas Muhammadiyah Kendal Batang
34	Boediarsih	0606126702	17106307407149	III/a	Dec-23	2.830.900	Universitas Karya Husada Semarang
35	Durrotun Munafiah	0608018501	22106106401169	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Karya Husada Semarang
36	Eni Kusyati	0608087202	12106307410375	III/b	Dec-23	3.238.300	Universitas Karya Husada Semarang
37	Lestari Puji Astuti	0610038101	15106307409996	III/b	Dec-23	3.238.300	Universitas Karya Husada Semarang
38	Fery Agusman Motuho Mendrofa	0610087301	12106307410506	III/d	Dec-23	3.518.100	Universitas Karya Husada Semarang

39	Rose Nurhudhariani	0610097502	15106307410568	III/b	Dec-23	3.238.300	Universitas Karya Husada Semarang
40	Siti Nur Umariyah Febriyanti	0614028001	16106307404634	III/b	Dec-23	3.238.300	Universitas Karya Husada Semarang
41	Sri Puji Lestari	0618107101	16106307401778	III/a	Dec-23	2.744.500	Universitas Karya Husada Semarang
42	Dewi Mayangsari	0623038001	15106307400990	III/b	Dec-23	3.139.400	Universitas Karya Husada Semarang
43	Isy Royhanaty	0625028101	15106307409292	III/b	Dec-23	3.238.300	Universitas Karya Husada Semarang
44	Hermeksi Rahayu	0626096703	19106307406918	III/a	Dec-23	2.920.100	Universitas Karya Husada Semarang
45	Tri Ismu Pujiyanto	0630056901	12106307401589	III/c	Dec-23	3.375.300	Universitas Karya Husada Semarang
46	ITA RAHMAWATI	0610058501	13106410402553	III/d	Dec-23	3.306.500	Universitas Al Hikmah Jepara
47	Eko Sutarto	0609096101	18106305201760	III/c	Dec-23	3.821.000	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
48	IR. AGUS DWI KORAWAN, MT	0629086501	12106305201944	IV/a	Dec-23	4.024.400	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
49	Hendri Suryanto	0617077201	19106305208023	III/b	Dec-23	2.688.500	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
50	Drajat Indah Mawarni	0618077402	18106305201608	III/c	Dec-23	2.981.500	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
51	Hariyanto	0619077803	20106305201378	III/c	Dec-23	2.981.500	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
52	Joko Handoyo	0628107801	17106305209070	III/d	Dec-23	3.628.900	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
53	Eva Hertnacahyani Herraprastanti	0627027803	19106305208264	III/c	Dec-23	2.981.500	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
54	Indra Gunawan	1015088303	17110305502660	III/b	Dec-23	2.688.500	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
55	Adhika Pramita Widyassari	0608078701	22106305202132	III/b	Dec-23	2.773.200	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
56	Richardus Indra Gunawan	0603068202	19106102002547	III/c	Dec-23	2.890.500	Universitas Kristen Teknologi Solo
57	Rusnandari Retno Cahyani	0601058202	16106103307087	III/c	Dec-23	3.075.500	Universitas Sahid Surakarta
58	Widiyono	0602048902	21106103305153	III/c	Dec-23	2.890.500	Universitas Sahid Surakarta
59	Faqih Purnomosidi	0602058801	22106103306398	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta
60	Khotimatul Khusna	0605078703	20106103307107	III/c	Dec-23	2.890.500	Universitas Sahid Surakarta
61	Hari Wiryawan	0605106303	20106103301958	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta

62	Arif Yulianto	0606077302	19106103307720	III/b	Dec-23	2.860.500	Universitas Sahid Surakarta
63	Anik Suwarni	0607077901	12106103313570	III/d	Dec-23	3.518.100	Universitas Sahid Surakarta
64	Marwahyudi	0607107103	15106103302673	III/c	Dec-23	3.075.500	Universitas Sahid Surakarta
65	Ahmad Khoirul Anwar	0610068302	15106103307630	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta
66	Erwin Kartinawati	0612028002	19106103308005	III/c	Dec-23	2.981.500	Universitas Sahid Surakarta
67	Fadilah Qonitah	0612129002	20106103307958	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta
68	Vitri Dyah Herawati	0613118603	22106103301253	III/b	Dec-23	2.773.200	Universitas Sahid Surakarta
69	Dahlan Susilo	0614016701	11106103302249	III/c	Dec-23	3.272.200	Universitas Sahid Surakarta
70	Risma Sakti Pambudi	0614059101	20106103307111	III/c	Dec-23	2.890.500	Universitas Sahid Surakarta
71	Firdhaus Hari Saputro Al Haris	0614068201	19106103307629	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta
72	Anggit Dyah Kusumastuti	0615079101	22106103301864	III/b	Dec-23	2.773.200	Universitas Sahid Surakarta
73	Erna Indriastiningsih	0616057702	20106103303874	III/c	Dec-23	2.890.500	Universitas Sahid Surakarta
74	Reni Ariastuti	0618018901	20106103302892	III/c	Dec-23	2.981.500	Universitas Sahid Surakarta
75	Anita Oktaviana Trisna Devi	0619108802	22106103301863	III/b	Dec-23	2.773.200	Universitas Sahid Surakarta
76	Anniez Rachmawati Musslifah	0623068501	18106103300657	III/c	Dec-23	3.075.500	Universitas Sahid Surakarta
77	Destina Paningrum	0624077901	14106103304243	III/c	Dec-23	3.172.300	Universitas Sahid Surakarta
78	Ahwan	0626088401	20106103307106	III/c	Dec-23	2.981.500	Universitas Sahid Surakarta
79	Yunita Primasanti	0627058101	21106103304999	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta
80	Annisa Indah Mutiasari	0628078505	21106103303018	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta
81	Rahmat Wisudawanto	0628108301	19106103307794	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta
82	Evelyne Henny Lukitasari	0630017802	19106103307673	III/c	Dec-23	2.981.500	Universitas Sahid Surakarta
83	Wahyu Ari Indriastuti	0614016902	18106404006540	III/c	Dec-23	3.375.300	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
84	Aldi Budi Riyanta	0602038701	18106501200384	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
85	Taufiq Abidin	0603088305	19106501202940	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama

86	Ulfatul Latifah	0605018003	18106501206434	III/d	Dec-23	3.410.600	Politeknik Harapan Bersama
87	Wilda Amananti	0605128902	19106501204801	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
88	Eko Budihartono	0605037304	22106501204566	III/b	Dec-23	2.688.500	Politeknik Harapan Bersama
89	Hetika	0606048901	18106501202656	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
90	Adevia Maulidya Chikmah	0606118802	21106501202424	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
91	Dega Surono Wibowo	0607108202	18106501201299	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
92	Mukhamad Khumaidi Usman	0608058601	19106501203171	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
93	Muchamad Sobri Sungkar	0608068801	19106501206042	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
94	Ririh Sri Harjanti	0609067704	18106501205290	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
95	Inur Tivani	0610078502	19106501204644	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
96	Meliyana Perwita Sari	0610079003	22106501202040	III/b	Dec-23	2.773.200	Politeknik Harapan Bersama
97	Arifia Yasmin	0611019201	21106501204770	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
98	Heru Nurcahyo	0611058001	16106501205534	III/c	Dec-23	3.272.200	Politeknik Harapan Bersama
99	Meyliya Qudriani	0611058702	20106501202409	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
100	Rosaria Ika Pratiwi	0611108102	20106501205954	III/b	Dec-23	2.688.500	Politeknik Harapan Bersama
101	Dairoh	0612108701	18106501201195	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
102	Ginanjar Wiro Sasmito	0613028601	15106501201614	III/d	Dec-23	3.306.500	Politeknik Harapan Bersama
103	Nora Rahmanindar	0613118506	21106501201943	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
104	Dyah Apriliani	0614049002	19106501204608	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
105	Rais	0614108501	18106501209999	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
106	Evi Zulfiana	0615048901	20106501204979	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
107	Syaefani Arif Romadhon	0615068401	18106501210023	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
108	Kusnadi	0616038701	17106501206586	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
109	Asrofi Langgeng Noerman Syah	0616038801	18106501209677	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama

110	Yusri Anis Faidah	0618049002	22106501205825	III/b	Dec-23	2.688.500	Politeknik Harapan Bersama
111	M. Nishom	0619048701	21106501204737	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
112	Miftakhul Huda	0620127801	17106501208255	III/b	Dec-23	3.238.300	Politeknik Harapan Bersama
113	M. Taufik Qurohman	0621028701	17106501208401	III/d	Dec-23	3.107.700	Politeknik Harapan Bersama
114	Muhamad Bakhar	0622028602	19106501206027	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
115	Amin Nur Akhmadi	0622048302	20106501204903	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
116	Sari Prabandari	0623018502	19106501204332	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
117	Arfan Haqiqi Sulasmoro	0623037704	19106501201440	III/b	Dec-23	2.688.500	Politeknik Harapan Bersama
118	Muhammad Fikri Hidayattullah	0623108801	19106501201919	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
119	Arif Rakhman	0623118301	19106501205577	III/d	Dec-23	3.107.700	Politeknik Harapan Bersama
120	Iroma Maulida	0624037501	15106501202165	III/d	Dec-23	3.410.600	Politeknik Harapan Bersama
121	Ida Afriliana	0624047703	19106501201922	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
122	Erni Unggul Sedya Utami	0625077102	16106501205642	III/c	Dec-23	3.375.300	Politeknik Harapan Bersama
123	Very Kurnia Bakti	0625118301	17106501207172	III/d	Dec-23	3.518.100	Politeknik Harapan Bersama
124	Ida Farida	0626017902	17106501201186	III/d	Dec-23	3.306.500	Politeknik Harapan Bersama
125	Juhrotun Nisa	0626088801	20106501207768	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
126	Yeni Priatna Sari	0627037702	15106501206346	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
127	Syarifudin	0627068803	22106501203340	III/b	Dec-23	2.773.200	Politeknik Harapan Bersama
128	Qirom	0627128503	22106501205667	III/b	Dec-23	2.688.500	Politeknik Harapan Bersama
129	Hesti Widianti	0628048201	16106501205107	III/d	Dec-23	3.518.100	Politeknik Harapan Bersama
130	Umriaty	0628088601	20106501202408	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
131	Anita Karunia	0628108902	21106501201839	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama
132	Andri Widianto	0629129101	20106501204467	III/c	Dec-23	2.981.500	Politeknik Harapan Bersama
133	Seventina Nurul Hidayah	1117088601	19106501201515	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Harapan Bersama

134	Nilatul Izah	0606048703	20106501207382	III/c	Dec-23	2.890.500	Politeknik Muhammadiyah Tegal
135	Teguh Rimbawan	0624057601	22106502204124	III/b	Dec-23	2.688.500	Politeknik Muhammadiyah Tegal
136	Rustina Dewi Werdiasih	0613056901	18106306405507	III/c	Dec-23	3.941.400	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap
137	Poppy Fitrijanti Soeparan	0318117102	18106500604815	III/b	Dec-23	3.043.600	Politeknik Pratama
138	Nugrah Leksono Putri Handayani	0613018401	18106500604541	III/a	Dec-23	2.920.100	Politeknik Pratama
139	Widodo Wibisono	0620116701	17106500602258	III/c	Dec-23	3.172.300	Politeknik Pratama
140	MUSLIKH	2117026501	122211509862	III/d	Dec-23	3.205.500	STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal
141	Jutono Gondohanindijo	0613016603	13106103404743	III/b	Dec-23	2.860.500	Universitas Aki
142	Sonhaji	0630078401	20106307402474	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Karya Husada Semarang
143	Hardika Khusnuliawati	0631089201	21106103304323	III/b	Dec-23	2.688.500	Universitas Sahid Surakarta
144	Dian Muhammad Rifai	0631129201	21106103304472	III/c	Dec-23	2.890.500	Universitas Sahid Surakarta
145	Retno Wahyusari	0620038202	22106305203988	III/b	Dec-23	2.688.500	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
146	Puput Eka Suryani	0616059101	21106305205865	III/b	Dec-23	2.950.600	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
	Total					**462.564.500**	

Tabel 71

Pembayaran Tunjangan Serdos dan Guru Besar Tahun 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024 (Carry Over)

(Dosen PNS)

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH BERSIH	NIDN	NO SERDIK	BULAN USULAN	JML KOTOR	JML PPH	NAMA PERGURUAN TINGGI
1	Tri Nurindahyanti Y	3.519.085	0023057501	17106306403453	Des-23	3.704.300	185.215	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap
2	Sri Huning Anwariningsih	3.420.740	0017067901	11106103310816	Des-23	4.024.400	603.660	Universitas Sahid Surakarta
3	Diyah Ruswanti	3.239.310	0027018101	22106103303064	Des-23	3.409.800	170.490	Universitas Sahid Surakarta
4	Sarjono	4.120.205	0026126102	101255303847	Des-23	4.847.300	727.095	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
5	Bambang Supranoto	4.418.070	0018046001	11106305201753	Des-23	4.650.600	232.530	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
	Total	**18.717.410**				**20.636.400**	**1.918.990**	



LLDIKTI WILAYAH VI

Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023**
ESELON I : **SEKRETARIAT JENDERAL 01**
SATUAN KERJA : **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG 723014**

Tgl Data : 15/07/24 12:25 PM
Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**99,879,550**	**99,879,550**	**0**	**0**	**81,774,594**	**(81,774,594)**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	99,879,550	99,879,550	0	0	81,774,594	(81,774,594)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**99,879,550**	**99,879,550**	**0**	**0**	**81,774,594**	**(81,774,594)**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	335,042,788,000	166,532,026,140	(168,510,761,860)	50	293,689,520,000	144,468,508,562	149,221,011,438	49
1. Belanja Pegawai	320,711,204,000	161,113,648,125	(159,597,555,875)	50	284,184,020,000	140,657,367,322	143,526,652,678	49
2. Belanja Barang	14,031,834,000	5,234,067,015	(8,797,766,985)	37	9,155,500,000	3,773,259,840	5,382,240,160	41
3. Belanja Modal	299,750,000	184,311,000	(115,439,000)	61	350,000,000	37,881,400	312,118,600	11
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023**

ESELON I : **SEKRETARIAT JENDERAL 01**

SATUAN KERJA : **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG 723014**

Tgl Data : 15/07/24 12:25 PM
Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Transfer Umum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c. Dana Keistimewaan DIY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d. Dana Otonomi Khusus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Hibah Kepada Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**335,042,788,000**	**166,532,026,140**	**(168,510,761,860)**	**50**	**293,689,520,000**	**144,468,508,562**	**149,221,011,438**	**49**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Semarang, 15 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

BHIMO WIDYO ANDOKO
196808051994031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 023**	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/07/24 7:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 15/7/24 7:29 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,522,001,000	21,522,001,000	15,863,597,500	0	15,863,597,500	73.71	5,658,403,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	616,000	616,000	207,906	12,831	195,075	33.75	420,925
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,913,378,000	3,913,378,000	1,177,289,780	0	1,177,289,780	30.08	2,736,088,220
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	639,179,000	639,179,000	205,300,158	0	205,300,158	32.12	433,878,842
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	130,488,000	130,488,000	26,280,000	0	26,280,000	20.14	104,208,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,118,572,000	10,118,572,000	2,461,215,000	0	2,461,215,000	24.32	7,657,357,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	516,217,000	516,217,000	474,788,804	0	474,788,804	91.97	41,428,196
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,661,000,000	1,661,000,000	603,548,280	0	603,548,280	36.34	1,057,451,720
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,586,804,000	7,586,804,000	1,339,650,000	0	1,339,650,000	17.66	6,247,154,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	225,499,000	225,499,000	58,350,000	925,050	57,424,950	25.88	168,074,050
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	27,879,354,000	27,879,354,000	13,318,523,031	6,245,300	13,312,277,731	47.77	14,567,076,269
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	5,552,469,000	5,552,469,000	3,366,231,772	0	3,366,231,772	60.63	2,186,237,228
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	79,745,577,000	79,745,577,000	38,894,982,231	7,183,181	38,887,799,050	48.77	40,857,777,950
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	240,635,051,000	240,635,051,000	122,238,862,100	13,867,025	122,224,995,075	50.8	118,410,055,925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	240,635,051,000	240,635,051,000	122,238,862,100	13,867,025	122,224,995,075	50.8	118,410,055,925
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	330,576,000	330,576,000	854,000	0	854,000	0.26	329,722,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	330,576,000	330,576,000	854,000	0	854,000	0.26	329,722,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	320,711,204,000	320,711,204,000	161,134,698,331	21,050,206	161,113,648,125	50.24	159,597,555,875
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,536,701,000	2,692,676,000	1,000,676,079	0	1,000,676,079	37.16	1,691,999,921
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	12,000,000	895,900	0	895,900	7.47	11,104,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	142,752,000	142,752,000	55,400,000	0	55,400,000	38.81	87,352,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,691,453,000	2,847,428,000	1,056,971,979	0	1,056,971,979	37.12	1,790,456,021
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	518,644,000	754,319,000	305,223,202	0	305,223,202	40.46	449,095,798
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	195,825,000	196,200,000	82,150,000	0	82,150,000	41.87	114,050,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	240,000,000	220,981,000	181,074,968	0	181,074,968	81.94	39,906,032
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	954,469,000	1,171,500,000	568,448,170	0	568,448,170	48.52	603,051,830
5218	Belanja Barang Persediaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 023**	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/07/24 7:31 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 15/7/24 7:29 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	60,000,000	29,485,035	0	29,485,035	49.14	30,514,965
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	60,000,000	29,485,035	0	29,485,035	49.14	30,514,965
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	420,000,000	300,000,000	133,474,127	0	133,474,127	44.49	166,525,873
522112	Belanja Langganan Telepon	30,000,000	30,000,000	3,092,160	0	3,092,160	10.31	26,907,840
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	419,071,000	183,096,000	64,149,965	0	64,149,965	35.04	118,946,035
522141	Belanja Sewa	0	235,857,000	10,296,103	0	10,296,103	4.37	225,560,897
522151	Belanja Jasa Profesi	1,901,500,000	1,749,950,000	361,400,000	0	361,400,000	20.65	1,388,550,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,770,571,000	2,498,903,000	572,412,355	0	572,412,355	22.91	1,926,490,645
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391,106,000	331,106,000	202,461,416	0	202,461,416	61.15	128,644,584
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326,872,000	326,873,000	132,743,714	0	132,743,714	40.61	194,129,286
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	717,978,000	657,979,000	335,205,130	0	335,205,130	50.94	322,773,870
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,172,841,000	1,794,323,000	521,199,534	0	521,199,534	29.05	1,273,123,466
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,655,708,000	1,293,820,000	638,162,698	0	638,162,698	49.32	655,657,302
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,368,564,000	3,707,881,000	1,512,182,114	0	1,512,182,114	40.78	2,195,698,886
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	7,197,113,000	6,796,024,000	2,671,544,346	0	2,671,544,346	39.31	4,124,479,654
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	14,331,584,000	14,031,834,000	5,234,067,015	0	5,234,067,015	37.3	8,797,766,985
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	299,750,000	184,311,000	0	184,311,000	61.49	115,439,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	299,750,000	184,311,000	0	184,311,000	61.49	115,439,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	299,750,000	184,311,000	0	184,311,000	61.49	115,439,000
	JUMLAH BELANJA	335,042,788,000	335,042,788,000	166,553,076,346	21,050,206	166,532,026,140	49.71	168,510,761,860

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 023**	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 15/07/24 7:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,932,000	0	4,932,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	4,932,000	0	4,932,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	94,947,550	0	94,947,550	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	94,947,550	0	94,947,550	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	99,879,550	0	99,879,550	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	99,879,550	0	99,879,550	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 023**	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/24 7:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi							
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	518,644,000	579,319,000	202,715,039	0	202,715,039	34.99	376,603,961
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	195,825,000	196,200,000	82,150,000	0	82,150,000	41.87	114,050,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	240,000,000	220,981,000	181,074,968	0	181,074,968	81.94	39,906,032
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	954,469,000	996,500,000	465,940,007	0	465,940,007	46.76	530,559,993
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	0	32,624,000	10,296,103	0	10,296,103	31.56	22,327,897
522151	Belanja Jasa Profesi	1,757,500,000	1,734,950,000	361,400,000	0	361,400,000	20.83	1,373,550,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,757,500,000	1,767,574,000	371,696,103	0	371,696,103	21.03	1,395,877,897
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	744,127,000	285,843,000	63,329,201	0	63,329,201	22.16	222,513,799
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	951,074,000	1,017,936,000	490,217,311	0	490,217,311	48.16	527,718,689
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,368,564,000	3,707,881,000	1,512,182,114	0	1,512,182,114	40.78	2,195,698,886
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	5,063,765,000	5,011,660,000	2,065,728,626	0	2,065,728,626	41.22	2,945,931,374
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,775,734,000	7,775,734,000	2,903,364,736	0	2,903,364,736	37.34	4,872,369,264
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4472.BDB	7,775,734,000	7,775,734,000	2,903,364,736	0	2,903,364,736	37.339	4,872,369,264
BEJ	null							
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	240,635,051,000	240,635,051,000	122,238,862,100	13,867,025	122,224,995,075	50.79	118,410,055,925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	240,635,051,000	240,635,051,000	122,238,862,100	13,867,025	122,224,995,075	50.8	118,410,055,925
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	240,635,051,000	240,635,051,000	122,238,862,100	13,867,025	122,224,995,075	50.8	118,410,055,925
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4472.BEJ	240,635,051,000	240,635,051,000	122,238,862,100	13,867,025	122,224,995,075	50.798	118,410,055,925
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4472	248,410,785,000	248,410,785,000	125,142,226,836	13,867,025	125,128,359,811	50.38	123,282,425,189
6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi							
EBA	null							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,522,001,000	21,522,001,000	15,863,597,500	0	15,863,597,500	73.71	5,658,403,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 023**	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/24 7:44 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	616,000	616,000	207,906	12,831	195,075	31.67	420,925
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,913,378,000	3,913,378,000	1,177,289,780	0	1,177,289,780	30.08	2,736,088,220
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	639,179,000	639,179,000	205,300,158	0	205,300,158	32.12	433,878,842
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	130,488,000	130,488,000	26,280,000	0	26,280,000	20.14	104,208,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,118,572,000	10,118,572,000	2,461,215,000	0	2,461,215,000	24.32	7,657,357,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	516,217,000	516,217,000	474,788,804	0	474,788,804	91.97	41,428,196
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,661,000,000	1,661,000,000	603,548,280	0	603,548,280	36.34	1,057,451,720
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,586,804,000	7,586,804,000	1,339,650,000	0	1,339,650,000	17.66	6,247,154,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	225,499,000	225,499,000	58,350,000	925,050	57,424,950	25.47	168,074,050
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	27,879,354,000	27,879,354,000	13,318,523,031	6,245,300	13,312,277,731	47.75	14,567,076,269
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	5,552,469,000	5,552,469,000	3,366,231,772	0	3,366,231,772	60.63	2,186,237,228
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	79,745,577,000	79,745,577,000	38,894,982,231	7,183,181	38,887,799,050	48.77	40,857,777,950
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	330,576,000	330,576,000	854,000	0	854,000	0.26	329,722,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	330,576,000	330,576,000	854,000	0	854,000	0.26	329,722,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	80,076,153,000	80,076,153,000	38,895,836,231	7,183,181	38,888,653,050	48.57	41,187,499,950
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,536,701,000	2,692,676,000	1,000,676,079	0	1,000,676,079	37.16	1,691,999,921
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	12,000,000	895,900	0	895,900	7.47	11,104,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	142,752,000	142,752,000	55,400,000	0	55,400,000	38.81	87,352,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,691,453,000	2,847,428,000	1,056,971,979	0	1,056,971,979	37.12	1,790,456,021
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	0	175,000,000	102,508,163	0	102,508,163	58.58	72,491,837
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	175,000,000	102,508,163	0	102,508,163	58.58	72,491,837
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	60,000,000	29,485,035	0	29,485,035	49.14	30,514,965
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	60,000,000	29,485,035	0	29,485,035	49.14	30,514,965
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	420,000,000	300,000,000	133,474,127	0	133,474,127	44.49	166,525,873
522112	Belanja Langganan Telepon	30,000,000	30,000,000	3,092,160	0	3,092,160	10.31	26,907,840
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	419,071,000	183,096,000	64,149,965	0	64,149,965	35.04	118,946,035
522141	Belanja Sewa	0	203,233,000	0	0	0	0	203,233,000
522151	Belanja Jasa Profesi	144,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 023**	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/24 7:44 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,013,071,000	731,329,000	200,716,252	0	200,716,252	27.45	530,612,748
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391,106,000	331,106,000	202,461,416	0	202,461,416	61.15	128,644,584
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326,872,000	326,873,000	132,743,714	0	132,743,714	40.61	194,129,286
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	717,978,000	657,979,000	335,205,130	0	335,205,130	50.94	322,773,870
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,428,714,000	1,508,480,000	457,870,333	0	457,870,333	30.35	1,050,609,667
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	704,634,000	275,884,000	147,945,387	0	147,945,387	53.63	127,938,613
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,133,348,000	1,784,364,000	605,815,720	0	605,815,720	33.95	1,178,548,280
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,555,850,000	6,256,100,000	2,330,702,279	0	2,330,702,279	37.25	3,925,397,721
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6392.EBA	86,632,003,000	86,332,253,000	41,226,538,510	7,183,181	41,219,355,329	47.753	45,112,897,671
EBB	null							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	299,750,000	184,311,000	0	184,311,000	61.49	115,439,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	299,750,000	184,311,000	0	184,311,000	61.49	115,439,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	299,750,000	184,311,000	0	184,311,000	61.49	115,439,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6392.EBB	0	299,750,000	184,311,000	0	184,311,000	61.488	115,439,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN6392	86,632,003,000	86,632,003,000	41,410,849,510	7,183,181	41,403,666,329	47.8	45,228,336,671
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	335,042,788,000	335,042,788,000	166,553,076,346	21,050,206	166,532,026,140	49.71	168,510,761,860
	JUMLAH BELANJA	335,042,788,000	335,042,788,000	166,553,076,346	21,050,206	166,532,026,140	49.71	168,510,761,860

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 16/07/24 7:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SATUAN KERJA : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
DK	Program Pendidikan Tinggi							
4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	248,410,785,000	248,410,785,000	125,142,226,836	13,867,025	125,128,359,811	50.38	123,282,425,189
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DK	**248,410,785,000**	**248,410,785,000**	**125,142,226,836**	**13,867,025**	**125,128,359,811**	**50.38**	**123,282,425,189**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	86,632,003,000	86,632,003,000	41,410,849,510	7,183,181	41,403,666,329	47.8	45,228,336,671
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**86,632,003,000**	**86,632,003,000**	**41,410,849,510**	**7,183,181**	**41,403,666,329**	**47.8**	**45,228,336,671**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**335,042,788,000**	**335,042,788,000**	**166,553,076,346**	**21,050,206**	**166,532,026,140**	**49.71**	**168,510,761,860**
	JUMLAH	**335,042,788,000**	**335,042,788,000**	**166,553,076,346**	**21,050,206**	**166,532,026,140**	**49.71**	**168,510,761,860**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2024

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/24 7:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SATUAN KERJA : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,522,001,000	21,522,001,000	15,863,597,500	0	15,863,597,500	73.71	5,658,403,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	616,000	616,000	207,906	12,831	195,075	31.67	420,925
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,913,378,000	3,913,378,000	1,177,289,780	0	1,177,289,780	30.08	2,736,088,220
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	639,179,000	639,179,000	205,300,158	0	205,300,158	32.12	433,878,842
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	130,488,000	130,488,000	26,280,000	0	26,280,000	20.14	104,208,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,118,572,000	10,118,572,000	2,461,215,000	0	2,461,215,000	24.32	7,657,357,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	516,217,000	516,217,000	474,788,804	0	474,788,804	91.97	41,428,196
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,661,000,000	1,661,000,000	603,548,280	0	603,548,280	36.34	1,057,451,720
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,586,804,000	7,586,804,000	1,339,650,000	0	1,339,650,000	17.66	6,247,154,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	225,499,000	225,499,000	58,350,000	925,050	57,424,950	25.47	168,074,050
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	27,879,354,000	27,879,354,000	13,318,523,031	6,245,300	13,312,277,731	47.75	14,567,076,269
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	5,552,469,000	5,552,469,000	3,366,231,772	0	3,366,231,772	60.63	2,186,237,228
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	240,635,051,000	240,635,051,000	122,238,862,100	13,867,025	122,224,995,075	50.79	118,410,055,925
512211	Belanja Uang Lembur	330,576,000	330,576,000	854,000	0	854,000	0.26	329,722,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**320,711,204,000**	**320,711,204,000**	**161,134,698,331**	**21,050,206**	**161,113,648,125**	**50.24**	**159,597,555,875**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,536,701,000	2,692,676,000	1,000,676,079	0	1,000,676,079	37.16	1,691,999,921
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	12,000,000	895,900	0	895,900	7.47	11,104,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	142,752,000	142,752,000	55,400,000	0	55,400,000	38.81	87,352,000
521211	Belanja Bahan	518,644,000	754,319,000	305,223,202	0	305,223,202	40.46	449,095,798
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	195,825,000	196,200,000	82,150,000	0	82,150,000	41.87	114,050,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	240,000,000	220,981,000	181,074,968	0	181,074,968	81.94	39,906,032
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	60,000,000	29,485,035	0	29,485,035	49.14	30,514,965
522111	Belanja Langganan Listrik	420,000,000	300,000,000	133,474,127	0	133,474,127	44.49	166,525,873
522112	Belanja Langganan Telepon	30,000,000	30,000,000	3,092,160	0	3,092,160	10.31	26,907,840
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	419,071,000	183,096,000	64,149,965	0	64,149,965	35.04	118,946,035
522141	Belanja Sewa	0	235,857,000	10,296,103	0	10,296,103	4.37	225,560,897
522151	Belanja Jasa Profesi	1,901,500,000	1,749,950,000	361,400,000	0	361,400,000	20.65	1,388,550,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391,106,000	331,106,000	202,461,416	0	202,461,416	61.15	128,644,584
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326,872,000	326,873,000	132,743,714	0	132,743,714	40.61	194,129,286
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,172,841,000	1,794,323,000	521,199,534	0	521,199,534	29.05	1,273,123,466
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,655,708,000	1,293,820,000	638,162,698	0	638,162,698	49.32	655,657,302
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,368,564,000	3,707,881,000	1,512,182,114	0	1,512,182,114	40.78	2,195,698,886
	JUMLAH BELANJA BARANG	**14,331,584,000**	**14,031,834,000**	**5,234,067,015**	**0**	**5,234,067,015**	**37.3**	**8,797,766,985**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	299,750,000	184,311,000	0	184,311,000	61.49	115,439,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**299,750,000**	**184,311,000**	**0**	**184,311,000**	**61.49**	**115,439,000**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SATUAN KERJA : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**335,042,788,000**	**335,042,788,000**	**166,553,076,346**	**21,050,206**	**166,532,026,140**	**49.71**	**168,510,761,860**
	TOTAL	**335,042,788,000**	**335,042,788,000**	**166,553,076,346**	**21,050,206**	**166,532,026,140**	**49.71**	**168,510,761,860**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 6:21 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	8,952,538	0	8,952,538	0.00
Persediaan	35,122,330	26,073,390	9,048,940	34.71
JUMLAH ASET LANCAR	**344,074,868**	**26,073,390**	**318,001,478**	**1,219.64**
ASET TETAP				
Tanah	91,868,492,000	91,868,492,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,766,165,164	7,581,854,164	184,311,000	2.43
Gedung dan Bangunan	21,616,397,751	21,616,397,751	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	532,291,317	532,291,317	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(15,237,997,680)	(14,417,511,159)	(820,486,521)	5.69
JUMLAH ASET TETAP	**106,545,348,552**	**107,181,524,073**	**(636,175,521)**	**(0.59)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	332,601,500	332,601,500	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	133,492,000	(133,492,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	2,450,000	2,450,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(264,346,938)	(222,771,750)	(41,575,188)	18.66
JUMLAH ASET LAINNYA	**70,704,562**	**245,771,750**	**(175,067,188)**	**(71.23)**
JUMLAH ASET	**106,960,127,982**	**107,453,369,213**	**(493,241,231)**	**(0.46)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,732,732,850	616,692,900	2,116,039,950	343.13
Utang Yang Belum Ditagihkan	46,824,321	0	46,824,321	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	2,877,000	411,000	2,466,000	600.00
Uang Muka dari KPPN	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	8,952,538	0	8,952,538	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**3,091,386,709**	**617,103,900**	**2,474,282,809**	**400.95**
JUMLAH KEWAJIBAN	**3,091,386,709**	**617,103,900**	**2,474,282,809**	**400.95**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	103,868,741,273	106,836,265,313	(2,967,524,040)	(2.78)
JUMLAH EKUITAS	**103,868,741,273**	**106,836,265,313**	**(2,967,524,040)**	**(2.78)**
JUMLAH EKUITAS	**103,868,741,273**	**106,836,265,313**	**(2,967,524,040)**	**(2.78)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**106,960,127,982**	**107,453,369,213**	**(493,241,231)**	**(0.46)**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 6:21 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Semarang, 15 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BHIMO WIDYO ANDOKO

196808051994031001

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

UNIT ORGANISASI : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**

WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**

SATUAN KERJA : 723014 **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**

Tgl. Cetak 15/07/2024 7:31 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	24,131,720	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,941,670	0
0.0	131111	Tanah	91,868,492,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,581,854,164	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	21,616,397,751	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	457,291,317	0
0.0	134113	Jaringan	75,000,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,492,718,829
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,440,534,105
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	457,291,317
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	26,966,908
0.0	162151	Software	332,601,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	133,492,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,450,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,450,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	220,321,750
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	483,200,900
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	133,492,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	411,000
0.0	391111	Ekuitas	0	106,836,265,313
JUMLAH			**122,093,652,122**	**122,093,652,122**

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 12:25 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	8,952,538	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	31,520,310	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,602,020	0
0.0	131111	Tanah	91,868,492,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,766,165,164	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	21,616,397,751	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	457,291,317	0
0.0	134113	Jaringan	75,000,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,776,268,020
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,976,547,722
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	457,291,317
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	27,890,621
0.0	162151	Software	332,601,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,450,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,450,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	261,896,938
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	2,465,428,860
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	267,303,990
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	46,824,321
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,877,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	300,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	8,952,538
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	166,532,026,140
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	99,879,550	0
0.0	391111	Ekuitas	0	106,836,265,313
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,466,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	94,947,550
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	17,771,656,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	216,068	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,318,583,190	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	230,477,656	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	29,565,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,754,199,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	489,902,683	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	676,257,960	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,339,650,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	64,209,950	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 12:25 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	13,312,277,731	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	3,366,231,772	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	121,741,794,175	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	854,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,039,152,429	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	895,900	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55,400,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	305,223,202	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	88,200,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	181,074,968	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	133,474,127	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,092,160	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	64,149,965	0
3.0	522141	Beban Sewa	10,296,103	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	427,600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222,305,879	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138,652,881	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	596,867,265	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	697,972,698	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,554,352,714	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	283,549,191	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	536,013,617	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	923,713	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	41,575,188	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	15,638,390	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,797,705	0
JUMLAH			**292,059,436,330**	**292,059,436,330**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 15 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BHIMO WIDYO ANDOKO

196808051994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 6:21 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	166,532,026,140
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	99,879,550	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,932,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	94,947,550
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	15,863,597,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	207,906	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,177,289,780	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	205,300,158	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	26,280,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,461,215,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	474,788,804	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,548,280	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,339,650,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	58,350,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	13,318,523,031	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	3,366,231,772	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	122,238,862,100	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	854,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,000,676,079	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	895,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	55,400,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	305,223,202	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	82,150,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	181,074,968	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,485,035	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	133,474,127	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,092,160	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	64,149,965	0
3.0	522141	Belanja Sewa	10,296,103	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	361,400,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	202,461,416	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132,743,714	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	521,199,534	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	638,162,698	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,512,182,114	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184,311,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	12,831
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	925,050

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 6:21 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511153	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	6,245,300
3.1	511521	Pengembalian Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	13,867,025
JUMLAH			**166,652,955,896**	**166,652,955,896**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 15 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BHIMO WIDYO ANDOKO

196808051994031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 12:25 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,466,000	2,055,000	411,000	20
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,466,000	2,055,000	411,000	20
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,466,000	2,055,000	411,000	20
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	163,095,876,085	143,172,794,478	19,923,081,607	13.915
Beban Persediaan	15,638,390	19,999,320	(4,360,930)	(21.805)
Beban Barang dan Jasa	2,308,558,854	2,143,949,820	164,609,034	7.678
Beban Pemeliharaan	365,756,465	340,984,321	24,772,144	7.265
Beban Perjalanan Dinas	2,849,192,677	1,640,988,841	1,208,203,836	73.627
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 12:25 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	862,061,709	884,267,743	(22,206,034)	(2.511)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	169,497,084,180	148,202,984,523	21,294,099,657	14.368
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(169,494,618,180)	(148,200,929,523)	(21,293,688,657)	14.368
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(65,739,833)	65,739,833	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	19,999,999	(19,999,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	85,739,832	(85,739,832)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	94,947,550	56,842,595	38,104,955	67.036
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	94,947,550	56,842,595	38,104,955	67.036
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	94,947,550	(8,897,238)	103,844,788	(1,167.158)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(169,399,670,630)	(148,209,826,761)	(21,189,843,869)	14.297
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(169,399,670,630)	(148,209,826,761)	(21,189,843,869)	14.297

Keterangan :

FINAL

Semarang, 15 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

BHIMO WIDYO ANDOKO
196808051994031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 15/07/24 6:21 PM

Tgl Cetak : 15/07/24 7:30 PM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	106,836,265,313	108,740,075,968	(1,903,810,655)	(1.75)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(169,399,670,630)	(148,209,826,761)	(21,189,843,869)	14.3
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	166,432,146,590	144,386,733,968	22,045,412,622	15.27
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,967,524,040)	(3,823,092,793)	855,568,753	(22.38)
EKUITAS AKHIR	103,868,741,273	104,916,983,175	(1,048,241,902)	(1)

Keterangan :

FINAL

Semarang, 15 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BHIMO WIDYO ANDOKO

196808051994031001

LLDIKTI WILAYAH VI

TELAAH

LAPORAN KEUANGAN

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TA 202A UNAUDITED

Kode dan Nama UAKPA : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kode dan Nama UAPPAW : (0300) JAWA TENGAH
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Kode dan Nama K/L : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun			Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak

11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBP		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak

4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			

1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak

3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak

5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(Yolanda Sarah Dilla)
NIP 199008132019032020

Semarang, 17 Juli 2024
Penelaah,

(Nur Diana)
NIP 198103032008122003



LLDIKTI WILAYAH VI

MEMO PENYESUAIAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Eselon 1/UAPPA-E1	: 01	Sekretariat Jenderal
Wilayah	: 0300	Jawa Tengah
Satuan Kerja/UAKPA	: 723014	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
No Dokumen	: 001/01/JPK/2024	
Tanggal	: 02 Januari 2024	
Tahun Anggaran	: 2024	

Kategori Penyesuaian :

1	Pendapatan Diterima Di Muka	11	Koreksi Antar Beban	21	Kas Lainnya di BLU
2	Pendapatan yang masih harus diterima	12	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	22	Uang Muka Belanja
3	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	23	Perolehan Aset
4	Belanja yang masih harus dibayar	14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	24	Koreksi Piutang/Utang
5	Penyisihan Piutang	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	25	Hibah Langsung
6	Penghapusan Piutang	16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	26	Jurnal Manual
7	Penyusutan Aset	17	Transfer Masuk		
8	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	18	Transfer Keluar		
9	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	19	Koreksi Beban Aset		
10	Persediaan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN - BLU		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
01.	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	411.000	
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		411.000

Uraian

Jurnal penyesuaian Sewa kantin bulan Januari 2024

Direkam oleh :	Disetujui oleh :	Divalidasi oleh :
Tanggal : 2 Januari 2024	Tanggal : 2 Januari 2024	Tanggal : 2 Januari 2024
Yolanda Sarah Dilla	Herawaty Tetty Sudarminto	Adhrial Refaddin
NIP. 199008132019032020	NIP. 197512122008122003	NIP. 197504212008121003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Eselon 1/UAPPA-E1	: 01	Sekretariat Jenderal
Wilayah	: 0300	Jawa Tengah
Satuan Kerja/UAKPA	: 723014	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
No Dokumen	: 001/06/JPK/2024	
Tanggal	: 28 Juni 2024	
Tahun Anggaran	: 2024	

Kategori Penyesuaian :

1	Pendapatan Diterima Di Muka	11	Koreksi Antar Beban	21	Kas Lainnya di BLU
2	Pendapatan yang masih harus diterima	12	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	22	Uang Muka Belanja
3	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	23	Perolehan Aset
4	Belanja yang masih harus dibayar	14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	24	Koreksi Piutang/Utang
5	Penyisihan Piutang	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	25	Hibah Langsung
6	Penghapusan Piutang	16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	26	Jurnal Manual
7	Penyusutan Aset	17	Transfer Masuk		
8	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	18	Transfer Keluar		
9	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	19	Koreksi Beban Aset		
10	Persediaan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN - BLU		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
01.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.877.000	
	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		2.877.000

Uraian

Jurnal penyesuaian sewa kantin bulan Juli 2024 s.d Januari 2025

Direkam oleh :	Disetujui oleh :	Divalidasi oleh :
Tanggal : 28 Juni 2024	Tanggal : 28 Juni 2024	Tanggal : 28 Juni 2024
Yolanda Sarah Dilla	Herawaty Tetty Sudarminto	Adhrial Refaddin
NIP. 199008132019032020	NIP. 197512122008122003	NIP. 197504212008121003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Eselon 1/UAPPA-E1	: 01	Sekretariat Jenderal
Wilayah	: 0300	Jawa Tengah
Satuan Kerja/UAKPA	: 723014	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
No Dokumen	: 001/01/JM/2024	
Tanggal	: 04 Januari 2024	
Tahun Anggaran	: 2024	

Kategori Penyesuaian :

1	Pendapatan Diterima Di Muka	11	Koreksi Antar Beban	21	Kas Lainnya di BLU
2	Pendapatan yang masih harus diterima	12	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	22	Uang Muka Belanja
3	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	23	Perolehan Aset
4	Belanja yang masih harus dibayar	14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	24	Koreksi Piutang/Utang
5	Penyisihan Piutang	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	25	Hibah Langsung
6	Penghapusan Piutang	16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	26	Jurnal Manual
7	Penyusutan Aset	17	Transfer Masuk		
8	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	18	Transfer Keluar		
9	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	19	Koreksi Beban Aset		
10	Persediaan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN - BLU		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
01.	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	30.202.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		30.202.000

Uraian

Jurnal balik Pengadaan Bandwith Kantor LLDIKTI Wilayah VI Th 2023 sesuai BAST/BAPP
Nomor 376/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023

Direkam oleh :	Disetujui oleh :	Divalidasi oleh :
Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024
Yolanda Sarah Dilla	Herawaty Tetty Sudarminto	Adhrial Refaddin
NIP. 199008132019032020	NIP. 197512122008122003	NIP. 197504212008121003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Eselon 1/UAPPA-E1	: 01	Sekretariat Jenderal
Wilayah	: 0300	Jawa Tengah
Satuan Kerja/UAKPA	: 723014	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
No Dokumen	: 002/01/JM/2024	
Tanggal	: 04 Januari 2024	
Tahun Anggaran	: 2024	

Kategori Penyesuaian :

1	Pendapatan Diterima Di Muka	11	Koreksi Antar Beban	21	Kas Lainnya di BLU
2	Pendapatan yang masih harus diterima	12	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	22	Uang Muka Belanja
3	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	23	Perolehan Aset
4	Belanja yang masih harus dibayar	14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	24	Koreksi Piutang/Utang
5	Penyisihan Piutang	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	25	Hibah Langsung
6	Penghapusan Piutang	16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	26	Jurnal Manual
7	Penyusutan Aset	17	Transfer Masuk		
8	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	18	Transfer Keluar		
9	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	19	Koreksi Beban Aset		
10	Persediaan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN - BLU		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
01.	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	45.210.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		45.210.000

Uraian

Jurnal balik Pengadaan Tenaga Satpam LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2023 sesuai BAST/BAPP
Nomor 323/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023

Direkam oleh :	Disetujui oleh :	Divalidasi oleh :
Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024
Yolanda Sarah Dilla	Herawaty Tetty Sudarminto	Adhrial Refaddin
NIP. 199008132019032020	NIP. 197512122008122003	NIP. 197504212008121003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Eselon 1/UAPPA-E1	: 01	Sekretariat Jenderal
Wilayah	: 0300	Jawa Tengah
Satuan Kerja/UAKPA	: 723014	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
No Dokumen	: 003/01/JM/2024	
Tanggal	: 04 Januari 2024	
Tahun Anggaran	: 2024	

Kategori Penyesuaian :

1	Pendapatan Diterima Di Muka	11	Koreksi Antar Beban	21	Kas Lainnya di BLU
2	Pendapatan yang masih harus diterima	12	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	22	Uang Muka Belanja
3	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	23	Perolehan Aset
4	Belanja yang masih harus dibayar	14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	24	Koreksi Piutang/Utang
5	Penyisihan Piutang	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	25	Hibah Langsung
6	Penghapusan Piutang	16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	26	Jurnal Manual
7	Penyusutan Aset	17	Transfer Masuk		
8	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	18	Transfer Keluar		
9	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	19	Koreksi Beban Aset		
10	Persediaan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN - BLU		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
01.	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	37.800.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		37.800.000

Uraian

Jurnal balik Pengadaan Tenaga Kebersihan Gedung dan Halaman LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2023
sesuai BAST/BAPP Nomor 341/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023

Direkam oleh :	Disetujui oleh :	Divalidasi oleh :
Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024
Yolanda Sarah Dilla	Herawaty Tetty Sudarminto	Adhrial Refaddin
NIP. 199008132019032020	NIP. 197512122008122003	NIP. 197504212008121003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Eselon 1/UAPPA-E1	: 01	Sekretariat Jenderal
Wilayah	: 0300	Jawa Tengah
Satuan Kerja/UAKPA	: 723014	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
No Dokumen	: 004/01/JM/2024	
Tanggal	: 04 Januari 2024	
Tahun Anggaran	: 2024	

Kategori Penyesuaian :

1	Pendapatan Diterima Di Muka	11	Koreksi Antar Beban	21	Kas Lainnya di BLU
2	Pendapatan yang masih harus diterima	12	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	22	Uang Muka Belanja
3	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	23	Perolehan Aset
4	Belanja yang masih harus dibayar	14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	24	Koreksi Piutang/Utang
5	Penyisihan Piutang	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	25	Hibah Langsung
6	Penghapusan Piutang	16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	26	Jurnal Manual
7	Penyusutan Aset	17	Transfer Masuk		
8	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	18	Transfer Keluar		
9	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	19	Koreksi Beban Aset		
10	Persediaan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN - BLU		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
01.	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	6.882.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		6.882.000

Uraian

Jurnal balik Collocation LLDIKTI Wilayah VI Th 2023 sesuai BAST/BAPP Nomor 395/LL6/TU/PBJ/2023

Tanggal 31-12-2023

Direkam oleh :	Disetujui oleh :	Divalidasi oleh :
Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024
Yolanda Sarah Dilla	Herawaty Tetty Sudarminto	Adhrial Refaddin
NIP. 199008132019032020	NIP. 197512122008122003	NIP. 197504212008121003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Eselon 1/UAPPA-E1	: 01	Sekretariat Jenderal
Wilayah	: 0300	Jawa Tengah
Satuan Kerja/UAKPA	: 723014	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
No Dokumen	: 005/01/JM/2024	
Tanggal	: 04 Januari 2024	
Tahun Anggaran	: 2024	

Kategori Penyesuaian :

1	Pendapatan Diterima Di Muka	11	Koreksi Antar Beban	21	Kas Lainnya di BLU
2	Pendapatan yang masih harus diterima	12	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	22	Uang Muka Belanja
3	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	23	Perolehan Aset
4	Belanja yang masih harus dibayar	14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	24	Koreksi Piutang/Utang
5	Penyisihan Piutang	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	25	Hibah Langsung
6	Penghapusan Piutang	16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	26	Jurnal Manual
7	Penyusutan Aset	17	Transfer Masuk		
8	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	18	Transfer Keluar		
9	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	19	Koreksi Beban Aset		
10	Persediaan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN - BLU		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
01.	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	13.398.000	
	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		13.398.000

Uraian

Jurnal balik Pengadaan Tenaga Sopir LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2023 sesuai BAST/BAPP
Nomor 359/LL6/TU/PBJ/2023 Tanggal 31-12-2023

Direkam oleh :	Disetujui oleh :	Divalidasi oleh :
Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024
Yolanda Sarah Dilla	Herawaty Tetty Sudarminto	Adhrial Refaddin
NIP. 199008132019032020	NIP. 197512122008122003	NIP. 197504212008121003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Eselon 1/UAPPA-E1	: 01	Sekretariat Jenderal
Wilayah	: 0300	Jawa Tengah
Satuan Kerja/UAKPA	: 723014	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
No Dokumen	: 006/01/JM/2024	
Tanggal	: 04 Januari 2024	
Tahun Anggaran	: 2024	

Kategori Penyesuaian :

1	Pendapatan Diterima Di Muka	11	Koreksi Antar Beban	21	Kas Lainnya di BLU
2	Pendapatan yang masih harus diterima	12	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	22	Uang Muka Belanja
3	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	23	Perolehan Aset
4	Belanja yang masih harus dibayar	14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	24	Koreksi Piutang/Utang
5	Penyisihan Piutang	15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	25	Hibah Langsung
6	Penghapusan Piutang	16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	26	Jurnal Manual
7	Penyusutan Aset	17	Transfer Masuk		
8	Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	18	Transfer Keluar		
9	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	19	Koreksi Beban Aset		
10	Persediaan	20	Pendapatan dari Alokasi APBN - BLU		

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
01.	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	483.200.900	
	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS		483.200.900

Uraian

Jurnal balik Hutang pembayaran Serdos untuk 157 Dosen yang dibayar TA 2024

Direkam oleh :	Disetujui oleh :	Divalidasi oleh :
Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024	Tanggal : 04 Januari 2024
Yolanda Sarah Dilla	Herawaty Tetty Sudarminto	Adhrial Refaddin
NIP. 199008132019032020	NIP. 197512122008122003	NIP. 197504212008121003



LLDIKTI WILAYAH VI

DIPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0964-1130-1502-7054

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 023.01.2.723014/2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi	:	(01)	Sekretariat Jenderal
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(723014)	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Sebesar	:	Rp. 335.042.788.000	(TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I	(026)	Rp.	335.042.788.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:0964-1130-1502-7054

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

10	PENDIDIKAN	Rp.	335.042.788.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	248.410.785.000
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	Rp.	86.632.003.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:0964-1130-1502-7054

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

DK	Program Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	86.632.003.000
WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp.	86.632.003.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0964-1130-1502-7054

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Program	: 023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Kegiatan	: 4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Layanan Fasilitasi Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		210,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.775.734.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu		210.00	Lembaga	7.775.734.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi		5.561,00	Orang	240.635.051.000
Rincian Output	: 01 BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi		5561.00	Orang	240.635.051.000
Program	: 023.01.WA	Program Dukungan Manajemen				86.632.003.000
Kegiatan	: 6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi				86.632.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Predikat Sakip LL Dikti				
	2. 02	Nilai KInerja Anggaran				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	86.632.003.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	848.634.000
	02 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	85.783.369.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.

Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:0964-1130-1502-7054

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2024	Rp. 335.042.788.000		
1. Rupiah Murni	Rp. 335.042.788.000		
2. PNBP	Rp. 0		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
5. Hibah Langsung	Rp. 0		
6. SBSN PBS	Rp. 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register **1. Pinjaman Luar Negeri** **2. Hibah Luar Negeri** **3. Pinjaman Dalam Negeri** **4. Hibah Dalam Negeri**		PAGU TAHUN INI **1) Mata Uang NPP/H** **2) Ekuivalen USD** **3) Ekuivalen Rupiah**		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN **1) PP** **2) PL** **3) RK** **4) LC** **5) -**		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:0964-1130-1502-7054

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**	**320.711.204**	**14.331.584**	**-**	**-**	**-**	**335.042.788**		
023.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472	**Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	03 . 51	
01	RM	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	026@	
4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	03 . 51	
01	RM	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	026	
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**80.076.153**	**6.555.850**	**-**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**	**80.076.153**	**6.555.850**	**-**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	80.076.153	6.555.850	-	-	-	86.632.003	03 . 51	
01	RM	80.076.153	6.555.850	-	-	-	86.632.003	026@	
	JUMLAH	**320.711.204**	**14.331.584**	**-**	**-**	**-**	**335.042.788**		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0964-1130-1502-7054

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	24.000.000	24.682.000	26.982.000	33.850.000	26.714.000	33.947.000	27.587.484	28.035.000	28.260.000	28.383.366	27.946.400	24.655.538	335.042.788
		BELANJA PEGAWAI	24.000.000	24.000.000	26.000.000	33.000.000	26.000.000	33.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	27.000.000	23.711.204	320.711.204
		BELANJA BARANG	0	682.000	982.000	850.000	714.000	947.000	1.587.484	2.035.000	2.260.000	2.383.366	946.400	944.334	14.331.584
	023.01.DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	18.750.000	19.075.000	21.175.000	21.125.000	21.107.000	21.165.000	21.125.000	22.328.000	22.135.000	22.207.000	21.339.400	16.879.385	248.410.785
		51 BELANJA PEGAWAI	18.750.000	18.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	16.385.051	240.635.051
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	325.000	425.000	375.000	357.000	415.000	375.000	1.578.000	1.385.000	1.457.000	589.400	494.334	7.775.734
	023.01.WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	5.250.000	5.607.000	5.807.000	12.725.000	5.607.000	12.782.000	6.462.484	5.707.000	6.125.000	6.176.366	6.607.000	7.776.153	86.632.003
		51 BELANJA PEGAWAI	5.250.000	5.250.000	5.250.000	12.250.000	5.250.000	12.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	6.250.000	7.326.153	80.076.153
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	357.000	557.000	475.000	357.000	532.000	1.212.484	457.000	875.000	926.366	357.000	450.000	6.555.850

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV A. B L O K I R

DS:0964-1130-1502-7054

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	1.234.854		
	52 Belanja Barang	Rp.	1.234.854		
023.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**				
4472	**Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi**				
4472.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**				
	521211 Belanja Bahan(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	114.854		
	Dasar referensi harga dan standardisasi pelaksanaan				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	65.000		
	Relevansi RO				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	855.000		
	Dasar referensi harga dan standardisasi pelaksanaan				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**				
6392.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	200.000		
	Konfirmasi pusdatin atas catatan APIP				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV B. C A T A T A N

DS:0964-1130-1502-7054

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0964-1130-1502-7054

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 023.01.2.723014/2024

Revisi ke 01
Tanggal : 17 Februari 2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi	:	(01)	Sekretariat Jenderal
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(723014)	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Sebesar	:	Rp. 335.042.788.000	(TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 335.042.788.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:0964-1130-1502-7054

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

10	PENDIDIKAN	Rp.	335.042.788.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	248.410.785.000
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	Rp.	86.632.003.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:0964-1130-1502-7054

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

DK	Program Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	86.632.003.000
WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp.	86.632.003.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0964-1130-1502-7054

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Program	: 023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Kegiatan	: 4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Layanan Fasilitasi Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		210,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.775.734.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu		210.00	Lembaga	7.775.734.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi		5.561,00	Orang	240.635.051.000
Rincian Output	: 01 BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi		5561.00	Orang	240.635.051.000
Program	: 023.01.WA	Program Dukungan Manajemen				86.632.003.000
Kegiatan	: 6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi				86.632.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Predikat Sakip LL Dikti				
	2. 02	Nilai KInerja Anggaran				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	86.632.003.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	848.634.000
	02 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	85.783.369.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.

Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:0964-1130-1502-7054

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2024	Rp. 335.042.788.000		
1. Rupiah Murni	Rp. 335.042.788.000		
2. PNBP	Rp. 0		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
5. Hibah Langsung	Rp. 0		
6. SBSN PBS	Rp. 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register **1. Pinjaman Luar Negeri** **2. Hibah Luar Negeri** **3. Pinjaman Dalam Negeri** **4. Hibah Dalam Negeri**		PAGU TAHUN INI **1) Mata Uang NPP/H** **2) Ekuivalen USD** **3) Ekuivalen Rupiah**		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN **1) PP** **2) PL** **3) RK** **4) LC** **5) -**		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:0964-1130-1502-7054

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**	**320.711.204**	**14.331.584**	**-**	**-**	**-**	**335.042.788**		
023.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472	**Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	03 . 51	
01	RM	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	026@	
4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	03 . 51	
01	RM	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	026	
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**80.076.153**	**6.555.850**	**-**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**	**80.076.153**	**6.555.850**	**-**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	80.076.153	6.555.850	-	-	-	86.632.003	03 . 51	
01	RM	80.076.153	6.555.850	-	-	-	86.632.003	026@	
	JUMLAH	**320.711.204**	**14.331.584**	**-**	**-**	**-**	**335.042.788**		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0964-1130-1502-7054

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	22.648.000	24.675.000	30.850.000	29.450.000	26.340.000	26.425.000	29.975.000	26.575.000	26.575.000	26.425.000	26.450.000	38.654.788	335.042.788
		BELANJA PEGAWAI	22.181.000	23.600.000	29.900.000	28.500.000	25.100.000	25.100.000	28.750.000	25.350.000	25.350.000	25.350.000	25.350.000	36.180.204	320.711.204
		BELANJA BARANG	467.000	1.075.000	950.000	950.000	1.240.000	1.325.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.075.000	1.100.000	2.474.584	14.331.584
	023.01.DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	18.238.000	19.600.000	25.500.000	21.150.000	21.265.000	21.250.000	21.500.000	21.500.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	14.057.785	248.410.785
		51 BELANJA PEGAWAI	17.771.000	19.000.000	25.000.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	13.614.051	240.635.051
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	467.000	600.000	500.000	650.000	765.000	750.000	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000	443.734	7.775.734
	023.01.WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	4.410.000	5.075.000	5.350.000	8.300.000	5.075.000	5.175.000	8.475.000	5.075.000	5.125.000	4.975.000	5.000.000	24.597.003	86.632.003
		51 BELANJA PEGAWAI	4.410.000	4.600.000	4.900.000	8.000.000	4.600.000	4.600.000	8.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	22.566.153	80.076.153
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	475.000	450.000	300.000	475.000	575.000	475.000	475.000	525.000	375.000	400.000	2.030.850	6.555.850

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV A. B L O K I R

DS:0964-1130-1502-7054

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	1.234.854		
	52 Belanja Barang	Rp.	1.234.854		
023.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**				
4472	**Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi**				
4472.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**				
	521211 Belanja Bahan(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	114.854		
	Dasar referensi harga dan standardisasi pelaksanaan				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	65.000		
	Relevansi RO				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	855.000		
	Dasar referensi harga dan standardisasi pelaksanaan				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**				
6392.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	200.000		
	Konfirmasi pusdatin atas catatan APIP				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV B. C A T A T A N

DS:0964-1130-1502-7054

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

Nomor	:	217/LL6/PR.01.05/2024	15 Februari 2024
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Usulan Revisi Anggaran	

Yth Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Keuangan
Jl. Pemuda no 2
Semarang

1. Dasar :
   a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
   b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran
   c. DIPA Petikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang no SP DIPA-023.01.2.723014/2024 tanggal 24 November 2024 kode Digital Stamp DS : 0964-1130-1502-7054

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tema Revisi :
      - Revisi Administrasi
   b. Mekanisme Revisi :
      - Ralat rencana penarikan hal III DIPA

3. Alasan/Pertimbangan perlunya revisi anggaran :
   - Mempercepat tercapainya program kerja kementerian
   - Perubahan/ralat rencana penarikan dana
   - Menyamakan data antara ADK Satker dengan ADK di OM SPAN Kemenkeu

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
   - ADK RKAK-L DIPA Revisi
   - Matrik Perubahan (semula-menjadi)
   - Form A dan B
   - DIPA Petikan terakhir

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Ehimo Widyo Andoko
NIP.196808051994031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Gedung Keuangan Negara, Jl. Pemuda No. 2, Semarang 50138; TELEPON (024) 3555852, 3515989; FAKSIMILE (024) 3544255, 3545877; SUREL kanwil.jateng@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng

Nomor : S-709/WPB.14/2024 17 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Revisi DIPA ke-01 Tahun 2024 Satker 023-01-723014

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I
2. KPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang (01-723014)

Sehubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran Nomor 217/LL6/PR.01.05/2024 tanggal 15 Februari 2024, dengan ini kami sampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi DIPA ke-01 ini, kode pengaman *(digital stamp)* DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi **tetap, yaitu: 0964-1130-1502-7054**.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran Satker dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Ditandatangani secara elektronik
M U H D I

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2069-7076-9705-2343

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 023.01.2.723014/2024

Revisi ke 02
Tanggal : 04 Maret 2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi	:	(01)	Sekretariat Jenderal
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(723014)	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Sebesar	:	Rp. 335.042.788.000	(TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 335.042.788.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:2069-7076-9705-2343

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

10	PENDIDIKAN	Rp.	335.042.788.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	248.410.785.000
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	Rp.	86.632.003.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:2069-7076-9705-2343

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

DK	Program Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	86.632.003.000
WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp.	86.632.003.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2069-7076-9705-2343

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Program	:	023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Kegiatan	:	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Layanan Fasilitasi Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	210,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim		7.775.734.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	210.00	Lembaga		7.775.734.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	5.561,00	Orang		240.635.051.000
Rincian Output	:	01 BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	5561.00	Orang		240.635.051.000
Program	:	023.01.WA	Program Dukungan Manajemen				86.632.003.000
Kegiatan	:	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi				86.632.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Predikat Sakip LL Dikti				
		2. 02	Nilai KInerja Anggaran				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		86.332.253.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		548.884.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		85.783.369.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket		299.750.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	4.00	Unit		299.750.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.

Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:2069-7076-9705-2343

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

		Pagu
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	335.042.788.000
1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000
2. PNBP	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		

Ket :

			Pagu	Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RPLN	US$	0	Rp. 0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RHLN	US$	0	Rp. 0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0	
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0	
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0	
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:2069-7076-9705-2343

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**	**320.711.204**	**14.031.834**	**299.750**	**-**	**-**	**335.042.788**		
023.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472	**Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	026	
4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	026	
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**80.076.153**	**6.256.100**	**299.750**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**	**80.076.153**	**6.256.100**	**299.750**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	80.076.153	6.256.100	-	-	-	86.332.253	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	80.076.153	6.256.100	-	-	-	86.332.253	026	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:2069-7076-9705-2343

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	299.750	-	-	299.750	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	-	299.750	-	-	299.750	026@	
	JUMLAH	**320.711.204**	**14.031.834**	**299.750**	**-**	**-**	**335.042.788**		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2069-7076-9705-2343

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	22.648.000	24.675.000	31.149.750	29.450.000	26.340.000	26.425.000	29.975.000	26.575.000	26.575.000	26.425.000	26.450.000	38.355.038	335.042.788
		BELANJA PEGAWAI	22.181.000	23.600.000	29.900.000	28.500.000	25.100.000	25.100.000	28.750.000	25.350.000	25.350.000	25.350.000	25.350.000	36.180.204	320.711.204
		BELANJA BARANG	467.000	1.075.000	950.000	950.000	1.240.000	1.325.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.075.000	1.100.000	2.174.834	14.031.834
		BELANJA MODAL	0	0	299.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.750
	023.01.DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	18.238.000	19.600.000	25.500.000	21.150.000	21.265.000	21.250.000	21.500.000	21.500.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	14.057.785	248.410.785
		51 BELANJA PEGAWAI	17.771.000	19.000.000	25.000.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	13.614.051	240.635.051
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	467.000	600.000	500.000	650.000	765.000	750.000	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000	443.734	7.775.734
	023.01.WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	4.410.000	5.075.000	5.649.750	8.300.000	5.075.000	5.175.000	8.475.000	5.075.000	5.125.000	4.975.000	5.000.000	24.297.253	86.632.003
		51 BELANJA PEGAWAI	4.410.000	4.600.000	4.900.000	8.000.000	4.600.000	4.600.000	8.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	22.566.153	80.076.153
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	475.000	450.000	300.000	475.000	575.000	475.000	475.000	525.000	375.000	400.000	1.731.100	6.256.100
		53 BELANJA MODAL	0	0	299.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.750

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV A. B L O K I R

DS:2069-7076-9705-2343

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	299.750		
	53 Belanja Modal	Rp.	299.750		
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**				
6392.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**				
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	299.750		
	optimalisasi belanja ops				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV B. C A T A T A N

DS:2069-7076-9705-2343

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 14, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2345 JKP 10024
TELEPON (021) 34358586; FAKSIMILE (021) 3868101; SITUS www.anggaran.depkeu.go.id

BERITA ACARA PENELAAHAN USUL REVISI ANGGARAN TA 2024
SEKRETARIAT JENDERAL
Nomor: 04/023.01/AG.41.1/2024

Pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan penelaahan usulan revisi anggaran melalui media daring sebagaimana surat undangan Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor UND-19/AG.4/AG.41/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari:

1. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek; dan
2. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran.

A. Data Usul Revisi :

1. Berdasarkan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 Nomor STAP-023.01-03/AG/2023, pagu unit Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek adalah sebesar **Rp43.225.845.905.000,-** yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp43.224.770.749.000,-** dan PNBP/ BLU sebesar **Rp1.075.156.000,-**. Adapun Total anggaran yang diblokir adalah sebesar **Rp3.590.065.614.000,-.**
2. Usulan revisi diajukan melalui surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 5701/A.A1/PR.08.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek TA 2024.

B. Hasil Penelaahan:

1. Sekjen Kemendikbudristek melalui surat sebagaimana disebut di atas, menyampaikan usulan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap anggaran berupa penghapusan/perubahan Halaman IV A DIPA dan pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional.
   a. Usulan revisi penghapusan/perubahan Halaman IV A DIPA dengan rincian sebagai berikut:

(*ribuan rupiah*)

No	Satker	Pagu 2024	Blokir		
			Semula	Usulan Buka Blokir	Menjadi
1	LLDikti Wilayah I Medan	291.425.835	1.572.743	1.572.743	-
2	LLDikti Wilayah II Palembang	212.823.217	1.957.800	1.957.800	-
3	LLDikti Wilayah III Jakarta	472.536.956	1.935.700	1.935.700	-
4	LLDikti Wilayah IV Bandung	521.339.348	4.635.436	4.635.436	-
5	LLDikti Wilayah V Yogyakarta	253.398.134	548.641	548.641	-
6	LLDikti Wilayah VI Semarang	335.042.788	1.234.854	1.234.854	-
7	LLDikti Wilayah VII Surabaya	452.108.958	1.819.530	1.819.530	-
8	LLDikti Wilayah VIII Denpasar	227.087.121	567.173	567.173	-
9	LLDikti Wilayah IX Makassar	307.326.161	1.187.668	1.187.668	-
10	LLDikti Wilayah XI Banjarmasin	127.652.068	728.048	728.048	-
11	LLDikti Wilayah XII Ambon	70.656.026	3.761.820	3.761.820	-

12	LLDikti Wilayah XIII Aceh	67.650.004	1.342.191	1.342.191	-
13	LLDikti Wilayah XIV Biak	58.261.777	1.020.144	1.020.144	-
14	LLDikti Wilayah XV Kupang	63.106.309	8.258.160	8.258.160	-
15	LLDikti Wilayah XVI Gorontalo	76.372.416	1.251.530	1.251.530	-
TOTAL		**3.536.787.118**	**31.821.438**	**31.821.438**	**-**

b. Sementara untuk usulan revisi pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional pada satker LLDIKTI Wilayah VI Semarang dengan rincian sebagai berikut:

(*ribuan rupiah*)

Kode	Uraian	Semula	Pergeseran	Menjadi
01.WA.6392.EBA.994	Layanan Perkantoran	85.783.369	(299.750)	85.483.619
01.WA.6392.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	80.076.153	-	80.076.153
01.WA.6392.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.707.216	(299.750)	5.407.466
01.WA.6392.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	299.750	299.750
01.WA.6392.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan Bermotor	-	79.350	79.350
01.WA.6392.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	220.400	220.400

2. Berdasarkan hasil penelaahan, disampaikan sebagai berikut:

Usul Revisi	Satker	Usulan Buka Blokir Reguler (ribuan rupiah)	Penjelasan Singkat	Catatan Penelahaan
Penghapusan/Perubahan Buka Blokir Reguler	LLDikti Wilayah I Medan	1.572.743	Buka blokir untuk alokasi penilaian angka kredit dosen, visitasi Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada PTS, MBKM, dan alokasi belanja modal.	- Penjelasan dan justifikasi terhadap kegiatan tim Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen oleh Biro Perencanaan agar ada keseragamaan untuk seluruh LLDikti; - Untuk pengadaan CCTV, agar dilakukan perbaikan data RKA/KL menyesuaikan dengan referensi harga (data RKA/KL sebesar Rp.27,2 Juta dengan rincian pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Rp.12,7 juta dan pengadaan alat pengolah data komunikasi Rp,14,4 Juta); dan - Penjelasan dari Biro Perencanaan terkait kegiatan MBKM.
	LLDikti Wilayah II Palembang	1.957.800	Buka blokir untuk kebutuhan publikasi kegiatan LLDIKTI, penilaian angka kredit dosen, pengadaan meubelair, dan kebutuhan perbaikan plafon dan ruang kantor.	- Penjelasan dan justifikasi terhadap kegiatan tim Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen oleh Biro Perencanaan agar ada keseragamaan untuk seluruh LLDikti; dan - Data histori jumlah dosen yang dinilai dan alokasi dananya untuk tahun 2023 dan 2024 untuk **seluruh satker LLDikti.**
	LLDikti Wilayah III Jakarta	1.935.700	Buka blokir untuk alokasi penilaian angka kredit dosen, pelaksanaan peningkatan kerjasama perguruan tinggi, fasilitasi layanan LLDtikti, dan kebutuhan belanja modal.	- Perbaikan data analis kebutuhan dan RAB pada belanja peralatan perkantoran.
	LLDikti Wilayah IV Bandung	4.635.436	Buka blokir untuk alokasi penilaian angka kredit dosen, peningkatan kualitas mutu dosen dan pengembangan kompetensi tendik, layanan peningkatan mutu, rapat koordinasi perguruan tinggi, dan alokasi untuk pengadaan mebeulair dan pengadaan laptop, printer, dan perangkat multimedia.	- Penjelasan dan justifikasi terhadap kegiatan tim Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen oleh Biro Perencanaan agar ada keseragamaan untuk seluruh LLDikti; - Alokasi untuk pengadaan mebeulair dan pengadaan laptop, printer, dan perangkat multimedia telah dilengkapi data dukung.

	LLDikti Wilayah V Yogyakarta	548.641	Buka blokir untuk anggaran pemeliharaan gedung/bangunan kantor, dan, pengadaan peralatan kantor dan pengadaan meubelair.	- Dokumen pendukung pemeliharaan Gedung/ bangunan kantor; - Penyesuaian harga pelaralatan kantor antara RAB dan referensi harga.
	LLDikti Wilayah VI Semarang	1.234.854	Buka blokir untuk alokasi penilaian angka kredit dosen, coaching clinic penjaminan mutu perguruan tinggi, dan anggaran Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Penjelasan dan justifikasi terhadap kegiatan tim Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen oleh Biro Perencanaan agar ada keseragamaan untuk seluruh LLDikti.
	LLDikti Wilayah VII Surabaya	1.819.530	Buka blokir untuk kegiatan asistensi, penguatan tata kelola perguruan tinggi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kerjasama PTS, alokasi untuk langganan *bandwith,* dan alokasi belanja modal.	- Penjelasan dan justifikasi dari LLDikti VII Surabaya yang berisi informasi urgensi untuk pengadaan genset; - Penjelasan dan rincian terkait biaya *overhead* untuk pengadaan genset; - Layanan Bandwith tetap diblokir karena sudah dicover dari Pusdatin.
	LLDikti Wilayah VIII Denpasar	567.173	Buka blokir untuk alokasi sosialisasi IKU tentang implementasi tiga dosa dan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Tinggi	Penjelasan dari Biro Perencanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan LLDikti, yang memberikan informasi: 1. informasi yang menyatakan bahwa kegiatan dimaksud tidak duplikasi dengan kegiatan yang dilaksanakan Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA); dan 2. pihak-pihak selain LLDikti VIII Denpasar yang diberikan pelimpahan tugas PPKS.
	LLDikti Wilayah IX Makassar	1.187.668	Buka blokir untuk penilaian angka kredit dosen, bimtek dan workshop, forum komunikasi pengelola PT, peningkatan kapasitas satgas penanggulan 5 dosa, dan pengadaan sepeda motor.	- Pengadaan sepeda motor telah dilengkapi RKBMN 2024; - Penjelasan dari Biro Perencanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
	LLDikti Wilayah XI Banjarmasin	728.048	Buka blokir untuk penilaian angka kredit dosen dan pembelian inventaris kantor.	- Penjelasan dan justifikasi terhadap kegiatan tim Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen oleh Biro Perencanaan agar ada keseragamaan untuk seluruh LLDikti;

				- Pembelian inventaris kantor.telah dilengkapi dokumen pendukung berupa analisa kebutuhan dan refrensi harga.
	LLDikti Wilayah XII Ambon	3.761.820	Buka blokir untuk penilaian angka kredit dosen, penggantian inventaris lama/pembelian inventaris baru, dan alokasi untuk renovasi pagar samping.	- Penjelasan dan justifikasi terhadap kegiatan tim Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen oleh Biro Perencanaan agar ada keseragamaan untuk seluruh LLDikti; - Rehab Pagar Samping Kantor LLDIKTI Wilayah XII sebesar Rp 2.296.150.000,00 telah dilengkapi surat persetujuan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dan Rekomendasi dari Dinas PU; - Rincian dan dokumen pendukung untuk Sub Komponen Penggantian Inventaris Lama/Pembelian Inventaris Baru (6392.EBB.951. 997.A) sebesar Rp.390 juta.
	LLDikti Wilayah XIII Aceh	1.342.191	Buka blokir untuk penguatan dan peningkatan kompetensi dosen, pengadaan kendaraan, dan pengadaan inventaris kantor.	- Penjelasan dan justifikasi terhadap kegiatan tim Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen oleh Biro Perencanaan agar ada keseragamaan untuk seluruh LLDikti; - Agar dilakukan penyesuain redaksi untuk pengadaan mesin Fotokopi sebesar Rp109,8 juta menjadi peralatan perkantoran; - Pengadaan kendaraan belum dilengkapi RKBMN 2024.
	LLDikti Wilayah XIV Biak	1.020.144	Buka blokir untuk alokasi workshop/ sosialisasi/bimbingan teknis peningkatan mutu perguruan tinggi, fasilitasi layanan LLDikti dan anggaran pada layanan umum.	Rincian serta data pendukung untuk akun belanja barang non operasional Lainnya sebesar Rp.86.711.000.
	LLDikti Wilayah XV Kupang	8.258.160	Buka blokir untukPeningkatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka/MBKM, Penilaian Angka Kredit Usulan Jabatan Fungsional Dosen, Pembangunan ruang aula	- Penjelasan dari Biro Perencanaan terkait kegiatan MBKM; - Pembangunan ruang aula LLDIKTI Wilayah XV sebesar Rp.7 miliar telah dilengkapi surat persetujuan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dan Rekomendasi dari Dinas PU.

	LLDikti Wilayah XVI Gorontalo	1.251.530	Buka blokir untuk perjalanan dinas luar negeri, sewa perpetual lisensi, dan annual lisensi dan alokasi untuk perlengkapan perkantoran	Kegiatan perjalanan dinas luar negeri LLDikti XVI Gorontalo tetap diblokir karena kurang sesuai dengan tusi LLDikti.
Pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional	LLDIKTI Wilayah VI Semarang	299.750	Pengadaan Kendaraan Bermotor dan fasilitas kantor	Untuk di awal tahun, kebutuhan belanja Kendaraan bermotor dan fasilitas kantor agar dipenuhi dari belanja non operasional yang lain.

Catatan Penelaahan :

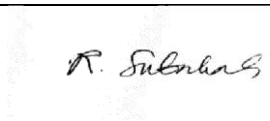
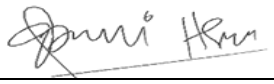
1. Dalam penelaahan RKA-K/L disepakati bahwa alokasi dalam RKA-K/L merupakan perencanaan anggaran sebagai dasar penyusunan dan pengesahan DIPA Satker terkait TA 2024.
2. Kemendikbudristek bertanggung jawab atas keutuhan, keabsahan, keaslian, serta kebenaran formil dan material terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajujan usulan anggaran termasuk kelengkapan dokumennya yang disampaikan kepada Ditjen Anggaran.
3. Dalam hal kebenaran/kesesuaian antara dokumen pendukung dengan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Satker terkait, dan dalam proses pencairannya harus mengikuti ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penelaahan ini dibuat dan dipahami oleh pihak-pihak terkait untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemendikbud

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Imran Fauzi	Koordinator PPA Setjen Kemdikbud	
2	Rina	Pokja PPA Setjen Kemdikbud	

Kemenkeu

1	M.Nafi	Kasubdit ABPK	
2	Heru Novandi	Kasi ABPK I	
3	Rachmat Subarkah	Analis ABPK I Senior	
4.	Arbi Wardana Paripurna	Analis ABPK I Senior	
5.	Elpani H.S.	Analis ABPK I Senior	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-111/AG/AG.4/2024 4 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran pada Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 (Revisi IVAnggaran)

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Sistem Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor: 5701/A.A1/PR.08.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek TA 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui, yaitu penghapusan/perubahan catatan pada Halaman IV DIPA (buka blokir reguler) pada satker di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek sebesar Rp.30.754.079.000,00.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, KPA dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Plh.Direktur Anggaran Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik
Dwi Pudjiastuti Handayani

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Direktur Jenderal Anggaran
5. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

Lampiran Surat Dirjen Anggaran
Nomor : S-111/AG/AG.4/2024
Tanggal : 4 Maret 2024

REVISI ANGGARAN IV
023.01 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK TA 2024

NO	KODE DAN NOMENKLATUR SATKER	DIGITAL STAMP	
		SEMULA	MENJADI
1	LLDikti Wilayah I Medan	7704-3601-7684-2083	9882-1303-5936-7239
2	LLDikti Wilayah II Palembang	4330-7166-1338-1055	7364-0770-0394-2070
3	LLDikti Wilayah III Jakarta	9691-2122-8563-3049	4028-0433-6820-6020
4	LLDikti Wilayah IV Bandung	5433-5602-4400-2213	0290-0085-0098-5739
5	LLDikti Wilayah V Yogyakarta	1023-0360-5460-2381	0350-0305-1789-7528
6	LLDikti Wilayah VI Semarang	0964-1130-1502-7054	2069-7076-9705-2343
7	LLDikti Wilayah VII Surabaya	3098-2322-6330-2330	5729-9653-9464-3320
8	LLDikti Wilayah VIII Denpasar	9700-5030-0543-0481	1106-4001-0094-6600
9	LLDikti Wilayah IX Makassar	3404-0443-1024-2655	4561-5796-1687-7212
10	LLDikti Wilayah XI Banjarmasin	6476-4706-3214-0907	4784-0640-5529-6644
11	LLDikti Wilayah XII Ambon	3011-7055-3403-0808	4003-1373-4647-0129
12	LLDikti Wilayah XIII Aceh	6059-2891-5770-4040	5061-0251-4222-0717
13	LLDikti Wilayah XIV Biak	0402-7408-6512-3327	3656-7576-3040-0994
14	LLDikti Wilayah XV Kupang	8353-2724-1481-9889	1135-3505-9079-7929
15	LLDikti Wilayah XVI Gorontalo	0027-0419-6196-0704	8284-4552-0401-4675

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 8, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435
TELEPON (021) 3451028, FAKSIMILE (021) 3450430; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : UND-19/AG.4/AG.41/2024 23 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Penelaahan Usulan Revisi Anggaran pada Unit Sekretariat Jenderal TA 2024 (Revisi IV Anggaran)

Yth. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Berkenaan dengan surat Sekjen Kemendikbudristek No. 5701/A.A1/PR.08.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek TA 2024, dengan ini dimohon kehadiran Saudara/i atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk, untuk menghadiri rapat penelahaan usulan revisi anggaran secara online/daring pada:

hari, tanggal : Senin, 26 Februari 2024,
pukul : 13.30 WIB s.d selesai.,
tempat/media : MS Teams: **478 624 279 578**; Passcode: 3JX2UN; URL: https://s.id/22tsW,
agenda : Penelaahan Usulan Revisi Anggaran pada Unit Sekretariat Jenderal TA 2024 (Revisi IV Anggaran).

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya dan menyiapkan data dukung terkait.

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen untuk memberikan layanan secara berintegritas, profesional, dan bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan

Ditandatangani secara elektronik
M. Nafi

Tembusan:
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 5701/A.A1/PR.08.00/2024 21 Februari 2024
Lampiran : satu berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran pada Satker
di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
b. DIPA Induk Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA- 023 . 01 - 0 / 2024 tanggal 24 November 2023 Kode *Digital Stamp*:1435-2018-0187-4358; dan
c. DIPA Petikan Satker terkait.

2. Bersama ini kami sampaikan usulan revisi anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

a. tema revisi: revisi dalam hal pagu anggaran tetap; dan
b. tata cara revisi: penghapusan/perubahan Halaman IV A DIPA dan pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional.

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
a. percepatan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024; dan
b. peningkatan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebur, kami sampaikan secara terlampir data dukung berupa:

a. KAK/TOR dan RAB;
b. ADK RKA-K/L SAKTI DIPA Revisi;
c. matriks perubahan (semula-menjadi);
d. rencana kerja dan anggaran satker (Form A dan B); dan
e. dokumen pendukung lainnya yang relevan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:
1. Direktur Anggaran Bidang PMK, Kementerian Keuangan
2. Kepala satuan kerja terkait

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
Nomor : 5701/A.A1/PR.08.00/2024
Tanggal : 21 Februari 2024

DIPA Petikan Satker Pengaju Revisi Anggaran

Satker	DIPA Petikan
LLDikti Wilayah I Medan	SP DIPA- 023.01.2.723009/2024 DS:7704-3601-7684-2083
LLDikti Wilayah II Palembang	SP DIPA- 023.01.2.723010/2024 DS:4330-7166-1338-1055
LLDikti Wilayah III Jakarta	SP DIPA- 023.01.2.723011/2024 DS:9691-2122-8563-3049
LLDikti Wilayah IV Bandung	SP DIPA- 023.01.2.723012/2024 DS:5433-5602-4400-2213
LLDikti Wilayah V Yogyakarta	SP DIPA- 023.01.2.723013/2024 DS:1023-0360-5460-2381
LLDikti Wilayah VI Semarang	SP DIPA- 023.01.2.723014/2024 DS:0964-1130-1502-7054
LLDikti Wilayah VII Surabaya	SP DIPA- 023.01.2.723015/2024 DS:3098-2322-6330-2330
LLDikti Wilayah VIII Denpasar	SP DIPA- 023.01.2.723016/2024 DS:9700-5030-0543-0481
LLDikti Wilayah IX Makassar	SP DIPA- 023.01.2.723017/2024 DS:3404-0443-1024-2655
LLDikti Wilayah XI Banjarmasin	SP DIPA- 023.01.2.723019/2024 DS:6476-4706-3214-0907
LLDikti Wilayah XII Ambon	SP DIPA- 023.01.2.723020/2024 DS:3011-7055-3403-0808
LLDikti Wilayah XIII Aceh	SP DIPA- 023.01.2.723021/2024 DS:6059-2891-5770-4040
LLDikti Wilayah XIV Biak	SP DIPA- 023.01.2.723022/2024 DS:0402-7408-6512-3327
LLDikti Wilayah XV Kupang	SP DIPA- 023.01.2.723023/2024 DS:8353-2724-1481-9889
LLDikti Wilayah XVI Gorontalo	SP DIPA- 023.01.2.723024/2024 DS:0027-0419-6196-0704

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5912-4961-3920-5329

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 023.01.2.723014/2024

Revisi ke 03
Tanggal : 24 Maret 2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi	:	(01)	Sekretariat Jenderal
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(723014)	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Sebesar	:	Rp. 335.042.788.000	(TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 335.042.788.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

10	PENDIDIKAN	Rp.	335.042.788.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	248.410.785.000
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	Rp.	86.632.003.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

DK	Program Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	86.632.003.000
WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp.	86.632.003.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Program	023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Kegiatan	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Jumlah Layanan Fasilitasi Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		210,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.775.734.000
Rincian Output	01 BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu		210.00	Lembaga	7.775.734.000
Klasifikasi Rincian Output 2	4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi		5.561,00	Orang	240.635.051.000
Rincian Output	01 BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi		5561.00	Orang	240.635.051.000
Program	023.01.WA	Program Dukungan Manajemen				86.632.003.000
Kegiatan	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi				86.632.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Predikat Sakip LL Dikti				
	2. 02	Nilai KInerja Anggaran				
Klasifikasi Rincian Output 1	6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	86.332.253.000
Rincian Output	01 EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	548.884.000
	02 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	85.783.369.000
Klasifikasi Rincian Output 2	6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		4,00	Unit, m2, Paket	299.750.000
Rincian Output	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal		4.00	Unit	299.750.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.

Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

		Pagu
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	335.042.788.000
1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000
2. PNBP	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		

Ket :

			Pagu	Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RPLN	US$	0	Rp. 0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RHLN	US$	0	Rp. 0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0	
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0	
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0	
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**	**320.711.204**	**14.031.834**	**299.750**	**-**	**-**	**335.042.788**		
023.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472	**Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	026	
4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	026	
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**80.076.153**	**6.256.100**	**299.750**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**	**80.076.153**	**6.256.100**	**299.750**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	80.076.153	6.256.100	-	-	-	86.332.253	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	80.076.153	6.256.100	-	-	-	86.332.253	026	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	299.750	-	-	299.750	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	-	299.750	-	-	299.750	026	
	JUMLAH	**320.711.204**	**14.031.834**	**299.750**	**-**	**-**	**335.042.788**		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	22.648.000	24.751.000	33.510.000	26.349.750	26.340.000	26.275.000	29.975.000	26.575.000	26.425.000	26.425.000	26.450.000	39.319.038	335.042.788
		BELANJA PEGAWAI	22.181.000	23.953.000	32.700.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000	28.750.000	25.350.000	25.350.000	25.350.000	25.350.000	36.427.204	320.711.204
		BELANJA BARANG	467.000	798.000	810.000	950.000	1.240.000	1.175.000	1.225.000	1.225.000	1.075.000	1.075.000	1.100.000	2.891.834	14.031.834
		BELANJA MODAL	0	0	0	299.750	0	0	0	0	0	0	0	0	299.750
	023.01.DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	18.238.000	19.676.000	23.960.000	21.150.000	21.265.000	21.250.000	21.500.000	21.500.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	15.521.785	248.410.785
		51 BELANJA PEGAWAI	17.771.000	19.353.000	23.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	20.750.000	14.761.051	240.635.051
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	467.000	323.000	460.000	650.000	765.000	750.000	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000	760.734	7.775.734
	023.01.WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	4.410.000	5.075.000	9.550.000	5.199.750	5.075.000	5.025.000	8.475.000	5.075.000	4.975.000	4.975.000	5.000.000	23.797.253	86.632.003
		51 BELANJA PEGAWAI	4.410.000	4.600.000	9.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	8.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	21.666.153	80.076.153
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	475.000	350.000	300.000	475.000	425.000	475.000	475.000	375.000	375.000	400.000	2.131.100	6.256.100
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	299.750	0	0	0	0	0	0	0	0	299.750

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV A. B L O K I R

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV B. C A T A T A N

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**				
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**				
6392.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	299.750		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	* Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2 sebanyak 3 Unit	Rp.	79.350		
	* Pengadaan Peralatan (AC,, TV LED) dan Mebelair Perkantoran	Rp.	220.400		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 14, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2345 JKP 10024
TELEPON (021) 34358586; FAKSIMILE (021) 3868101; SITUS www.anggaran.depkeu.go.id

BERITA ACARA PENELAAHAN USUL REVISI ANGGARAN TA 2024 SEKRETARIAT JENDERAL Nomor: 05/023.01/AG.41.1/2024

Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan penelaahan usulan revisi anggaran melalui media daring sebagaimana surat undangan Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor UND-26/AG.4/AG.41/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari:

1. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek; dan
2. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran.

A. Data Usul Revisi :

1. Berdasarkan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 Nomor STAP-023.01-04/AG/2023, pagu unit Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek adalah sebesar **Rp43.225.845.905.000,-** yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp43.224.770.749.000,-** dan PNBP/ BLU sebesar **Rp1.075.156.000,-**. Adapun Total anggaran yang diblokir adalah sebesar **Rp3.559.311.535.000,-.**
2. Usulan revisi diajukan melalui surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No.7994/A.A1/ PR.08.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek TA 2024.

B. Hasil Penelaahan:

1. Sekjen Kemendikbudristek melalui surat sebagaimana disebut di atas, menyampaikan usulan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap anggaran berupa penghapusan/perubahan Halaman IV A DIPA, pergeseran anggaran antar-program antar-satker, dan pergeseran anggaran untuk satker baru.
   a. Usulan revisi penghapusan/perubahan Halaman IV A DIPA dengan rincian sebagai berikut:

(*ribuan rupiah*)

Satker	Alokasi TA 2024	Blokir		
		Semula	Menjadi	Usulan Buka Blokir
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	157.519.052	2.568.834	500.000	2.068.834
Biro Perencanaan	68.147.927	3.915.600	500.000	3.415.600
LLDIKTI Wilayah VI Semarang	335.042.788	299.750	-	299.750
LLDIKTI Wilayah X Padang	283.241.679	2.866.602	-	2.866.602
LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	76.372.416	126.609	-	126.609
Total	**920.323.862**	**9.777.395**	**1.000.000**	**8.777.395**

   b. Sementara untuk usulan revisi pergeseran anggaran antar-program antar-satker dalam 1 unit Eselon I dan pergeseran anggaran untuk satker baru di atas dengan rincian sebagai berikut:

(*ribuan rupiah*)

Uraian	Semula		Menjadi		Selisih	
	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
723018 - LLDikti WIL X PADANG		**283.241.679**		**225.689.059**		**-57.552.620**
DK - Program Pendidikan Tinggi		196.720.150		153.397.599		-43.322.551
4472 - Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi		196.720.150		153.397.599		-43.322.551
BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	268	6.619.475	144	5.347.275	-121	-1.272.200
BEJ - Bantuan Pendidikan Tinggi	4.827	190.100.675	2.550	148.050.324	-2.277	-42.050.351
WA - Program Dukungan Manajemen		86.521.529		72.291.460		-14.230.069
6392 - Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi		86.521.529		72.291.460		-14.230.069
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	86.160.529	2	71.930.460	-	-14.230.069
690906 - LLDikti WIL XVII RIAU		**-**		**57.552.620**		**57.552.620**
DK - Program Pendidikan Tinggi		-		43.250.351		43.250.351
4472 - Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi		-		43.250.351		43.250.351
BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	-	121	1.200.000		1.200.000
BEJ - Bantuan Pendidikan Tinggi	-	-	2.237	42.050.351	2.237	42.050.351
WA - Program Dukungan Manajemen	-	-		14.302.269		14.302.269
6392 - Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	-	-		14.302.269		14.302.269
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	2	13.242.980	2	13.242.980
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	61	1.059.289	61	1.059.289

2. Berdasarkan hasil penelaahan, disampaikan sebagai berikut:

Usul Revisi	Satker	Penjelasan Singkat	Catatan Penelahaan
Penghapusan/Perubahan Buka Blokir Reguler	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Buka blokir untuk pengadaan meubelair di ULT dan peralatan pendukung pelaksanaan tugas BKHM.	- Penjelasan terkait urgensi pengadaan kamera; - Penjelasan untuk pengadaan medical check up; - Price list untuk pengadaan mebeulair dan podcast.
	Biro Perencanaan	Buka blokir pada layanan umum, pengadaan alat pengolah data dan fasilitasi perkantoran, perencanaan dan penganggaran, dan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.	- Dokumen penawaran harga untuk kegiatan peningkatan budaya dan etos kerja; - Analisa kebutuhan untuk pengadaan kursi kantor.
	LLDIKTI Wilayah VI Semarang	Buka blokir untuk pengadaan meubelair dan kendaraan bermotor.	
	LLDIKTI Wilayah X Padang	Buka blokir untuk penilaian angka kredit dosen, alokasi untuk LLDIKTI Wilayah XVII Riau, layanan umum, dan pengadaan alat pengolah data dan fasilitasi perkantoran.	- Kegiatan penilaian angka kredit dosen untuk selanjutnya agar dilakukan standarisasi untuk seluruh LLDIKTI; - Evaluasi kembali untuk price list agar tidak menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%. Perencanaan pengadaan pelaralatan kantor agar dilakukan berdasarkan kebutuhan baik jumlah maupun sepesifikasi alat.
	LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	Buka blokir untuk Kegiatan FGD terkait Kerjasama Perguruan Tinggi dan Industri.	Penjelasan terkait urgensi penyelenggaraan kegiatan FGD yang dilaksanakan antara LLDikti XVI Gorontalo dengan PTS.
Pergeseran anggaran antar-program antar-	LLDIKTI Wilayah X Padang	Usulan Pergeseran Anggaran untuk Satker Baru LLDIKTI Wilayah XVII Riau sebesar Rp57.552.620.000,00.	Penjelasan terhadap perbedaan volume pada KRO BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.

satker dalam 1 unit Eselon I dan pergeseran anggaran untuk satker baru	LLDikti Wilayah XVII Riau	Usulan Pergeseran Anggaran dari Satker LLDIKTI Wilayah X Padang sebesar Rp57.552.620.000,00.	- Perbedaan volume pada KRO BEJ - Bantuan Pendidikan Tinggi antara LLDikti Wilayan X Padang dan LLDikti Wilayah XVII Riau karena ada 40 orang dosen telah pensiun. - Agar melengkapi dokumen: a. Pinjam pakai/serah terima gedung dari Pemda Riau ke LLDikti Wilayah XVII Riau; b. Penetapan KPA, PPK, Penguji tagihan dan penandatangan SPM, dll. c. Surat pernyataan KPA yang memuat informasi waktu dimulainya LLDIKTI Riau menggunakan gedung kantor dan melaksanakan tugas dan fungsinya. - Agar dirinci pada RKAKL untuk kegiatan layanan sarana internal dan penyesuaian/penyeragaman terhadap alokasi sesuai dengan lama waktu pelaksanaan DIPA (beberapa ada dialokasikan 12 bulan dan ada yang 8 bulan).

Catatan Penelaahan :

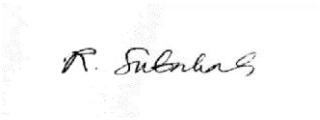
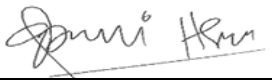
1. Dalam penelaahan RKA-K/L disepakati bahwa alokasi dalam RKA-K/L merupakan perencanaan anggaran sebagai dasar penyusunan dan pengesahan DIPA Satker terkait TA 2024.
2. Kemendikbudristek bertanggung jawab atas keutuhan, keabsahan, keaslian, serta kebenaran formil dan material terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajujan usulan anggaran termasuk kelengkapan dokumennya yang disampaikan kepada Ditjen Anggaran.
3. Dalam hal kebenaran/kesesuaian antara dokumen pendukung dengan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Satker terkait, dan dalam proses pencairannya harus mengikuti ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penelaahan ini dibuat dan dipahami oleh pihak-pihak terkait untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemendikbud

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Imran Fauzi	Koordinator PPA Setjen Kemdikbud	
2	Rina Andriani	Pokja PPA Setjen Kemdikbud	

Kemenkeu

1	M.Nafi	Kasubdit ABPK	
2	Rachmat Subarkah	Analis ABPK I Senior/ Plh. Kasi ABPK I	
3	Arbi Wardana Paripurna	Analis ABPK I Senior	
4.	Elpani H.S.	Analis ABPK I Senior	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-130/AG/AG.4/2024 24 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran pada Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024 (Revisi V Anggaran)

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Sistem Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor:7994/A.A1/PR.08.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek TA 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui, yaitu:
   a. pencantuman/perubahan catatan pada Halaman IV DIPA di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek sebesar Rp8.777.395.000,00, dan
   b. pergeseran anggaran antar-program antar-satker dalam 1 unit Eselon I untuk satker baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek sebesar Rp57.552.620.000,00.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, KPA dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik
Putut Hari Satyaka

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Direktur Jenderal Anggaran
5. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

Lampiran Surat Dirjen Anggaran
Nomor : S-130/AG/AG.4/2024
Tanggal : 24 Maret 2024

REVISI ANGGARAN V
023.01 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK TA 2024

NO	KODE DAN NOMENKLATUR SATKER	DIGITAL STAMP	
		SEMULA	MENJADI
1	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	2026-8132-6002-8096	0426-5631-0255-1049
2	Biro Perencanaan	8260-0705-8804-0139	1540-6154-0243-0087
3	LLDIKTI Wilayah VI Semarang	2069-7076-9705-2343	5912-4961-3920-5329
4	LLDIKTI Wilayah X Padang	8824-9141-5040-6005	0343-0921-4381-2307
5	LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	8284-4552-0401-4675	8420-9699-7796-5851
6	LLDIKTI Wilayah XVII Riau	0000-0000-0000-0000	4180-2297-1260-0900

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 7994/A.A1/PR.08.00/2024 13 Maret 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran pada Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI
Jakarta

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
b. DIPA Induk Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA-023.01-0/2024 tanggal 24 November 2023 Kode *Digital Stamp*: 1435-2018-0187-4358; dan
c. DIPA Petikan Satker terkait.

2. Bersama ini kami sampaikan usulan revisi anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

a. tema revisi: revisi dalam hal pagu anggaran tetap; dan
b. tata cara revisi: pergeseran anggaran antar-program antar-satker, pergeseran anggaran untuk satker baru, dan penghapusan/perubahan Halaman IVA DIPA.

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

a. penyesuaian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
b. percepatan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024; dan
c. peningkatan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut, kami sampaikan secara terlampir data dukung berupa:

a. KAK/TOR dan RAB;
b. ADK RKA-K/L SAKTI DIPA Revisi;
c. matriks perubahan (semula-menjadi);
d. rencana kerja dan anggaran satker (Form A dan B); dan
e. dokumen pendukung lainnya yang relevan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:
1. Direktur Anggaran Bidang PMK, Kementerian Keuangan
2. Kepala Satuan Kerja terkait

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
Nomor : 7994/A.A1/PR.08.00/2024
Tanggal : 13 Maret 2024

DIPA Petikan Satker Pengaju Revisi Anggaran

Satker	DIPA Petikan Satker
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	SP DIPA-023.01.1.626173/2024 DS: 2026-8132-6002-8096
Biro Perencanaan	SP DIPA-023.01.1.690271/2024 DS: 8260-0705-8804-0139
LLDIKTI Wilayah VI Semarang	SP DIPA-023.01.2.723014/2024 DS: 2069-7076-9705-2343
LLDIKTI Wilayah X Padang	SP DIPA-023.01.2.723017/2024 DS: 3404-0443-1024-2655
LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	SP DIPA-023.01.2.723024/2024 DS: 8284-4552-0401-4675
LLDIKTI Wilayah XVII Riau	

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 8, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435
TELEPON (021) 3451028, FAKSIMILE (021) 3450430; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : UND-26/AG.4/AG.41/2024 18 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Penelaahan Usulan Revisi Anggaran pada Unit Sekretariat Jenderal TA 2024 (Revisi V Anggaran)

Yth. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Berkenaan dengan surat Sekjen Kemendikbudristek No. 7994/A.A1/PR.08.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek TA 2024, dengan ini dimohon kehadiran Saudara/i atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk, untuk menghadiri rapat penelahaan usulan revisi anggaran secara online/daring pada:

hari, tanggal : Selasa, 19 Maret 2024,
pukul : 13.30 WIB s.d selesai,
tempat/media : MS Teams: **472 929 379 622**; Passcode: N99Gt9; URL: https://s.id/249gG,
agenda : Penelaahan Usulan Revisi Anggaran pada Unit Sekretariat Jenderal TA 2024 (Revisi V Anggaran).

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya dan menyiapkan data dukung terkait.

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen untuk memberikan layanan secara berintegritas, profesional, dan bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan

Ditandatangani secara elektronik
M. Nafi

Tembusan:
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 8458 /A.A1/PR.08.00/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama	: Suharti
NIP	: 196911211992032002
jabatan	: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dengan ini menyatakan atas hal-hal sebagai berikut.

1. Menyetujui substansi usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada satker di Unit Sekretariat Jenderal, dalam hal:
    a. Penghapusan/perubahan catatan pada Halaman IV DIPA pada satker di lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024;
    b. Pergeseran anggaran antar-program antar-satker dalam satu Unit Eselon I;
    c. Pergeseran anggaran untuk Satker LLDikti Wilayah XVII Riau; dan
    d. Revisi POK pada satker di lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024.
2. Usulan revisi anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga telah menyetujui usulan revisi anggaran dalam hal sebagaimana tercantum pada poin satu.
4. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab mutlak atas kerugian tersebut dan menyetorkan ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 Maret 2024
Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 196911211992032002

Usulan Buka Blokir Satker Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2024

Satker	Alokasi TA 2024	Blokir		
		Semula	Menjadi	Usulan Buka Blokir
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	157.519.052.000	2.568.834.000	500.000.000	2.068.834.000
Biro Perencanaan	68.147.927.000	3.915.600.000	500.000.000	3.415.600.000
LLDIKTI Wilayah VI Semarang	335.042.788.000	299.750.000	-	299.750.000
LLDIKTI Wilayah X Padang	283.241.679.000	2.866.602.000	-	2.866.602.000
LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	76.372.416.000	126.609.000	-	126.609.000
Total	**920.323.862.000**	**9.777.395.000**	**1.000.000.000**	**8.777.395.000**

Usulan Pergeseran Anggaran untuk Satker Baru LLDIKTI Wilayah XVII Riau

Kode	Uraian	Semula		Menjadi		Selisih	
		Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
723018	**723018 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X PADANG**		**283.241.679.000**		**225.689.059.000**		**- 57.552.620.000**
01.DK	DK - Program Pendidikan Tinggi		196.720.150.000		153.397.599.000		- 43.322.551.000
01.DK.4472	4472 - Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi		196.720.150.000		153.397.599.000		- 43.322.551.000
01.DK.4472.BDB	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	268	6.619.475.000	144	5.347.275.000	- 121	- 1.272.200.000
01.DK.4472.BEJ	BEJ - Bantuan Pendidikan Tinggi	4.827	190.100.675.000	2.550	148.050.324.000	- 2.277	- 42.050.351.000
01.WA	WA - Program Dukungan Manajemen		86.521.529.000		72.291.460.000		- 14.230.069.000
01.WA.6392	6392 - Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi		86.521.529.000		72.291.460.000		- 14.230.069.000
01.WA.6392.EBA	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	86.160.529.000	2	71.930.460.000	-	- 14.230.069.000
01.WA.6392.EBB	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	22	361.000.000	22	361.000.000	-	-
690906	**690906 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVII RIAU**		**-**		**57.552.620.000**		**57.552.620.000**
01.DK	DK - Program Pendidikan Tinggi		-		43.250.351.000		43.250.351.000
01.DK.4472	4472 - Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi		-		43.250.351.000		43.250.351.000
01.DK.4472.BDB	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	-	121	1.200.000.000		1.200.000.000
01.DK.4472.BEJ	BEJ - Bantuan Pendidikan Tinggi	-	-	2.237	42.050.351.000	2.237	42.050.351.000
01.WA	WA - Program Dukungan Manajemen	-	-		14.302.269.000		14.302.269.000
01.WA.6392	6392 - Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	-	-		14.302.269.000		14.302.269.000
01.WA.6392.EBA	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	2	13.242.980.000	2	13.242.980.000
01.WA.6392.EBB	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	61	1.059.289.000	61	1.059.289.000

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5912-4961-3920-5329

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 023.01.2.723014/2024

Revisi ke 04
Tanggal : 22 April 2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi	:	(01)	Sekretariat Jenderal
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(723014)	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Sebesar	:	Rp. 335.042.788.000	(TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 335.042.788.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

10	PENDIDIKAN	Rp.	335.042.788.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	248.410.785.000
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	Rp.	86.632.003.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

DK	Program Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	86.632.003.000
WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp.	86.632.003.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Program	023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Kegiatan	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Jumlah Layanan Fasilitasi Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		210,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.775.734.000
Rincian Output	01 BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu		210.00	Lembaga	7.775.734.000
Klasifikasi Rincian Output 2	4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi		5.561,00	Orang	240.635.051.000
Rincian Output	01 BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi		5561.00	Orang	240.635.051.000
Program	023.01.WA	Program Dukungan Manajemen				86.632.003.000
Kegiatan	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi				86.632.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Predikat Sakip LL Dikti				
	2. 02	Nilai KInerja Anggaran				
Klasifikasi Rincian Output 1	6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	86.332.253.000
Rincian Output	01 EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	548.884.000
	02 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	85.783.369.000
Klasifikasi Rincian Output 2	6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		4,00	Unit, m2, Paket	299.750.000
Rincian Output	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal		4.00	Unit	299.750.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.

Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

		Pagu
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	335.042.788.000
1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000
2. PNBP	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		

Ket :

			Pagu	Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RPLN	US$	0	Rp. 0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RHLN	US$	0	Rp. 0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0	
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0	
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0	
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**	**320.711.204**	**14.031.834**	**299.750**	**-**	**-**	**335.042.788**		
023.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472	**Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	026	
4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	026	
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**80.076.153**	**6.256.100**	**299.750**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**	**80.076.153**	**6.256.100**	**299.750**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	80.076.153	6.256.100	-	-	-	86.332.253	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	80.076.153	6.256.100	-	-	-	86.332.253	026	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	299.750	-	-	299.750	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	-	299.750	-	-	299.750	026	
	JUMLAH	**320.711.204**	**14.031.834**	**299.750**	**-**	**-**	**335.042.788**		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	22.646.980	24.750.313	34.927.239	26.661.000	27.059.311	29.624.442	26.875.000	26.990.439	26.875.000	26.875.000	26.875.000	34.883.064	335.042.788
		BELANJA PEGAWAI	22.180.153	23.952.482	33.897.643	25.800.000	25.800.000	28.400.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	25.800.000	31.680.926	320.711.204
		BELANJA BARANG	466.827	797.831	1.029.596	861.000	1.075.000	1.224.442	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	3.202.138	14.031.834
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	184.311	0	0	115.439	0	0	0	0	299.750
	023.01.DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	18.071.000	19.753.000	25.497.643	21.761.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	10.728.142	248.410.785
		51 BELANJA PEGAWAI	17.771.000	19.353.000	24.697.643	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000	10.013.408	240.635.051
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	300.000	400.000	800.000	661.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	714.734	7.775.734
	023.01.WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	4.575.980	4.997.313	9.429.596	4.900.000	5.259.311	7.824.442	5.075.000	5.190.439	5.075.000	5.075.000	5.075.000	24.154.922	86.632.003
		51 BELANJA PEGAWAI	4.409.153	4.599.482	9.200.000	4.700.000	4.700.000	7.300.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	21.667.518	80.076.153
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	166.827	397.831	229.596	200.000	375.000	524.442	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	2.487.404	6.256.100
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	184.311	0	0	115.439	0	0	0	0	299.750

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV A. B L O K I R

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV B. C A T A T A N

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**				
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**				
6392.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	299.750		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	* Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2 sebanyak 3 Unit	Rp.	79.350		
	* Pengadaan Peralatan (AC,, TV LED) dan Mebelair Perkantoran	Rp.	220.400		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

Nomor	:	315/LL6/PR.01.05/2024	19 April 2024
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Usulan Revisi Halaman III DIPA	

Yth Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Keuangan
Jl. Pemuda no 2
Semarang

1. Dasar :
   a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
   b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran
   c. DIPA Petikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang no SP DIPA-023.01.2.723014/2024 tanggal 24 November 2024 kode Digital Stamp DS : 0964-1130-1502-7054

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tema Revisi :
      - Revisi Administrasi
   b. Mekanisme Revisi :
      - Ralat rencana penarikan hal III DIPA

3. Alasan/Pertimbangan perlunya revisi anggaran :
   - Mempercepat tercapainya program kerja kementerian
   - Perubahan/ralat rencana penarikan dana
   - Menyamakan data antara ADK Satker dengan ADK di OM SPAN Kemenkeu

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
   - ADK RKAK-L DIPA Revisi
   - Matrik Perubahan (semula-menjadi)
   - Form A dan B
   - DIPA Petikan terakhir

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ehimo Widyo Andoko
NIP.196808051994031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Gedung Keuangan Negara, Jl. Pemuda No. 2, Semarang 50138; TELEPON (024) 3555852, 3515989; FAKSIMILE (024) 3544255, 3545877; SUREL kanwil.jateng@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng

Nomor : S-2034/WPB.14/2024 22 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Revisi DIPA ke-04 Tahun 2024 Satker 023-01-723014

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I
2. KPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang (01-723014)

Sehubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran Nomor 315/LL6/PR.01.05/2024 tanggal 19 April 2024, dengan ini kami sampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi DIPA ke-04 ini, kode pengaman *(digital stamp)* DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi **tetap, yaitu: 5912-4961-3920-5329**.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran Satker dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Ditandatangani secara elektronik
M U H D I

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

Nomor	:	315/LL6/PR.01.05/2024	19 April 2024
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Usulan Revisi Halaman III DIPA	

Yth Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Keuangan
Jl. Pemuda no 2
Semarang

1. Dasar :
   a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
   b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran
   c. DIPA Petikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang no SP DIPA-023.01.2.723014/2024 tanggal 24 November 2024 kode Digital Stamp DS : 0964-1130-1502-7054

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tema Revisi :
      - Revisi Administrasi
   b. Mekanisme Revisi :
      - Ralat rencana penarikan hal III DIPA

3. Alasan/Pertimbangan perlunya revisi anggaran :
   - Mempercepat tercapainya program kerja kementerian
   - Perubahan/ralat rencana penarikan dana
   - Menyamakan data antara ADK Satker dengan ADK di OM SPAN Kemenkeu

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
   - ADK RKAK-L DIPA Revisi
   - Matrik Perubahan (semula-menjadi)
   - Form A dan B
   - DIPA Petikan terakhir

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ehimo Widyo Andoko
NIP.196808051994031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5912-4961-3920-5329

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 023.01.2.723014/2024

Revisi ke 05
Tanggal : 01 Juni 2024

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(023)	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi	:	(01)	Sekretariat Jenderal
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(723014)	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Sebesar	:	Rp. 335.042.788.000	(TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 335.042.788.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

10	PENDIDIKAN	Rp.	335.042.788.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	248.410.785.000
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	Rp.	86.632.003.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

DK	Program Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp.	248.410.785.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	86.632.003.000
WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp.	86.632.003.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Program	023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Kegiatan	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi				248.410.785.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Jumlah Layanan Fasilitasi Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		210,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.775.734.000
Rincian Output	01 BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu		210.00	Lembaga	7.775.734.000
Klasifikasi Rincian Output 2	4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi		5.561,00	Orang	240.635.051.000
Rincian Output	01 BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi		5561.00	Orang	240.635.051.000
Program	023.01.WA	Program Dukungan Manajemen				86.632.003.000
Kegiatan	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi				86.632.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Predikat Sakip LL Dikti				
	2. 02	Nilai KInerja Anggaran				
Klasifikasi Rincian Output 1	6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	86.332.253.000
Rincian Output	01 EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	548.884.000
	02 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	85.783.369.000
Klasifikasi Rincian Output 2	6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		4,00	Unit, m2, Paket	299.750.000
Rincian Output	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal		4.00	Unit	299.750.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.

Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

		Pagu
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	335.042.788.000
1. Rupiah Murni	Rp.	335.042.788.000
2. PNBP	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		

Ket :

			Pagu	Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RPLN	US$	0	Rp. 0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RHLN	US$	0	Rp. 0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0	
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0	
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0	
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024

DS:5912-4961-3920-5329

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**	**320.711.204**	**14.031.834**	**299.750**	**-**	**-**	**335.042.788**		
023.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472	**Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi**	**240.635.051**	**7.775.734**	**-**	**-**	**-**	**248.410.785**		
4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	7.775.734	-	-	-	7.775.734	026	
4472.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	240.635.051	-	-	-	-	240.635.051	026	
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**80.076.153**	**6.256.100**	**299.750**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**	**80.076.153**	**6.256.100**	**299.750**	**-**	**-**	**86.632.003**		
6392.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	80.076.153	6.256.100	-	-	-	86.332.253	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	80.076.153	6.256.100	-	-	-	86.332.253	026	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6392.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	299.750	-	-	299.750	03 . 51	
	(03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)								
01	RM	-	-	299.750	-	-	299.750	026	
	JUMLAH	**320.711.204**	**14.031.834**	**299.750**	**-**	**-**	**335.042.788**		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**723014**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	22.646.980	24.750.322	34.947.352	26.848.107	26.336.540	31.411.326	26.244.341	26.359.776	26.244.341	26.244.341	26.244.341	36.765.022	335.042.788
		BELANJA PEGAWAI	22.180.153	23.952.491	33.917.755	25.988.209	25.217.232	30.262.211	25.217.232	25.217.232	25.217.232	25.217.232	25.217.232	33.106.995	320.711.204
		BELANJA BARANG	466.827	797.831	1.029.596	859.898	934.998	1.149.114	1.027.109	1.027.109	1.027.109	1.027.109	1.027.109	3.658.023	14.031.834
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	184.311	0	0	115.435	0	0	0	4	299.750
	023.01.DK.4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	18.237.590	19.186.739	24.604.339	21.546.027	20.783.990	20.785.102	20.876.102	20.876.102	20.876.102	20.876.102	20.876.102	18.886.487	248.410.785
		51 BELANJA PEGAWAI	17.770.763	18.793.760	24.030.646	21.044.737	20.375.102	20.375.102	20.375.102	20.375.102	20.375.102	20.375.102	20.375.102	16.369.430	240.635.051
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	466.827	392.979	573.693	501.290	408.888	410.000	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000	2.517.057	7.775.734
	023.01.WA.6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	4.409.391	5.563.583	10.343.012	5.302.080	5.552.550	10.626.224	5.368.239	5.483.674	5.368.239	5.368.239	5.368.239	17.878.535	86.632.003
		51 BELANJA PEGAWAI	4.409.391	5.158.731	9.887.109	4.943.472	4.842.129	9.887.109	4.842.129	4.842.129	4.842.129	4.842.129	4.842.129	16.737.565	80.076.153
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	404.852	455.903	358.608	526.109	739.114	526.109	526.109	526.109	526.109	526.109	1.140.966	6.256.100
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	184.311	0	0	115.435	0	0	0	4	299.750

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV A. B L O K I R

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 023.01.2.723014/2024
IV B. C A T A T A N

DS:5912-4961-3920-5329

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [723014] LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
723014	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**				
023.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
6392	**Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi**				
6392.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	299.750		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	* Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2 sebanyak 3 Unit	Rp.	61.830		
	* Pengadaan Peralatan (AC,, TV LED) dan Mebelair Perkantoran	Rp.	237.920		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.
NIP 196911211992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

Nomor	:	415/LL6/PR.01.05/2024	29 Mei 2024
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Usulan Revisi Halaman III DIPA	

Yth Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Keuangan
Jl. Pemuda no 2
Semarang

1. Dasar :
   a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
   b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran
   c. DIPA Petikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang no SP DIPA-023.01.2.723014/2024 tanggal 24 November 2024 kode Digital Stamp DS : 0964-1130-1502-7054

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tema Revisi :
      - Revisi Administrasi
   b. Mekanisme Revisi :
      - Ralat rencana penarikan hal III DIPA

3. Alasan/Pertimbangan perlunya revisi anggaran :
   - Mempercepat tercapainya program kerja kementerian
   - Perubahan/ralat rencana penarikan dana
   - Menyamakan data antara ADK Satker dengan ADK di OM SPAN Kemenkeu

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
   - ADK RKAK-L DIPA Revisi
   - Matrik Perubahan (semula-menjadi)
   - Form A dan B
   - DIPA Petikan terakhir

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ehimo Widyo Andoko
NIP.196808051994031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Gedung Keuangan Negara, Jl. Pemuda No. 2, Semarang 50138; TELEPON (024) 3555852, 3515989; FAKSIMILE (024) 3544255, 3545877; SUREL kanwil.jateng@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng

Nomor : S-3080/WPB.14/2024 1 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Revisi DIPA ke-2 Tahun 2024 Satker 023.01.723014

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I
2. Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang

Sehubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran nomor 415/LL6/PR.01.05/2024 tanggal 29 Mei 2024, dengan ini kami sampaikan :

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini , Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi **tetap yaitu** : **5912-4961-3920-5329.**
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Ditandatangani secara elektronik
M U H D I

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua BPK RI di Jakarta

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

LLDIKTI WILAYAH VI

LPJ DAN REKENING KORAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Januari 2024

Kementerian/Lembaga	: (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Tgl, No. SP	: 28 November 2023 , DIPA-023.01.2.723014/2024
Unit Organisasi	: (01) SEKRETARIAT JENDERAL	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG	KPPN	: (026) Semarang I
Satuan Kerja	: (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 39.306.782,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00300/KW/723014/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	0,00	307.576.117,00	268.269.335,00	39.306.782,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	307.576.117,00	268.269.335,00	39.306.782,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	0,00	303.868.117,00	264.561.335,00	39.306.782,00
	1. BP UP*)	0,00	300.000.000,00	264.561.335,00	35.438.665,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.868.117,00	0,00	3.868.117,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 264.561.335,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	3.708.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	35.598.782,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	39.306.782,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	39.306.782,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	39.306.782,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1.	Saldo UP	Rp.	35.438.665,00
2.	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	264.561.335,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4.	Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5.	Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1.	Saldo TUP	Rp.	0,00
2.	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4.	Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5.	Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1.	Saldo Lainnya	Rp.	3.868.117,00
2.	Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	3.868.117,00
3.	Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

KOTA SEMARANG, Januari 2024
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Dicetak pada tanggal,05 Februari 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100127230141000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 39.306.782 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00300/KW/723014/2024

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara			
A.	Saldo Kas Bendahara			
1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	39.306.782
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	39.306.782
B.	Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :			
1	Saldo BP UP	Rp.	35.438.665
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	3.868.117
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	39.306.782
C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)			
A.	Kas yang dikuasai bendahara			
1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	3.708.000
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	35.598.782
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	39.306.782
B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal			
A.	Pembukuan menurut Bendahara			
1	a. Saldo UP	Rp.	35.438.665
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	264.561.335
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	300.000.000
2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3	Saldo Lainnya	Rp.	3.868.117
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	303.868.117
B.	Pembukuan menurut UAKPA			
1	Kas UP di Bendahara	Rp.	300.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	3.868.117
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	303.868.117
C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
IV.	Penjelasan atas selisih			
A.	Selisih Kas (II.B)			
B.	Selisih Pembukuan UP (III.C)			

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 723014

BULAN : JANUARI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100127230141000	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	MANDIRI	20	S-3895/WPB.12/KP.03/2021	23-12-2021	2024-01-31	35,598,782.00
2	0057101300000280	RPL 026 KS LLDIKTI W	Semarang	30	S-614/KPN.1401/2023	02-08-2023	-	0.00
3	1053003521	RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B	Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang	30	S-7/KPN.1401/2023	05-01-2023	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Notalina Yodianti

NIP 196311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JANUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 8100127230141000

Nama Rekening : BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG

Nama Bank : MANDIRI

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		- 2024			0,00
12-01-2024	FPK-PENG-9NvYDGgI1wmnRoC	SPM UP	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
15-01-2024	00007/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Januari 2024 ID Pel : 523011392634	0,00	18.610.676,00	281.389.324,00
15-01-2024	00121/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, 1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KIP Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KIP Kuliah Akademi Kebidanan Siti Fatimah Tanggal 08/01/2024 s.d 09/	0,00	1.208.000,00	280.181.324,00
15-01-2024	00015/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Januari 2024 No JasTel : 143422111050	0,00	1.071.150,00	279.110.174,00
15-01-2024	00014/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Januari 2024 No JasTel : 143422110530	0,00	982.350,00	278.127.824,00
15-01-2024	00005/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Januari 2024 ID Pel : 523013280785	0,00	951.737,00	277.176.087,00
15-01-2024	00122/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Kepala LLDIKTI VI dalam rangka, 1. Penyerahan SK Izin Pembukaan	0,00	750.000,00	276.426.087,00

1	2	3	4	5	6
		Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 2. Penyerahan SK Izin Pembukaan Prod			
15-01-2024	00016/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	450.000,00	275.976.087,00
15-01-2024	00120/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 H 6674 XG berupa Ganti Rem dan Ganti Oli dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	442.708,00	275.533.379,00
15-01-2024	00103/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	275.098.379,00
15-01-2024	00070/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	274.663.379,00
15-01-2024	00071/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	274.228.379,00
15-01-2024	00086/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	273.793.379,00
15-01-2024	00094/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	273.358.379,00
15-01-2024	00107/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	272.923.379,00
15-01-2024	00077/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	272.488.379,00
15-01-2024	00082/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	272.053.379,00
15-01-2024	00085/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	271.618.379,00

1	2	3	4	5	6
15-01-2024	00089/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	271.183.379,00
15-01-2024	00091/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	270.748.379,00
15-01-2024	00096/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	270.313.379,00
15-01-2024	00076/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	269.878.379,00
15-01-2024	00088/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	269.443.379,00
15-01-2024	00097/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	269.008.379,00
15-01-2024	00105/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	268.573.379,00
15-01-2024	00068/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	268.138.379,00
15-01-2024	00078/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	267.703.379,00
15-01-2024	00083/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	267.268.379,00
15-01-2024	00084/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	266.833.379,00
15-01-2024	00087/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	266.398.379,00
15-01-2024	00106/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	265.963.379,00

1	2	3	4	5	6
15-01-2024	00109/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	265.528.379,00
15-01-2024	00111/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	265.093.379,00
15-01-2024	00064/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	264.658.379,00
15-01-2024	00065/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	264.223.379,00
15-01-2024	00067/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	263.788.379,00
15-01-2024	00075/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	263.353.379,00
15-01-2024	00093/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	262.918.379,00
15-01-2024	00098/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	262.483.379,00
15-01-2024	00100/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	262.048.379,00
15-01-2024	00066/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	261.613.379,00
15-01-2024	00092/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	261.178.379,00
15-01-2024	00099/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	260.743.379,00
15-01-2024	00101/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	260.308.379,00

1	2	3	4	5	6
15-01-2024	00108/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	259.873.379,00
15-01-2024	00110/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	259.438.379,00
15-01-2024	00072/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	259.003.379,00
15-01-2024	00073/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	258.568.379,00
15-01-2024	00074/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	258.133.379,00
15-01-2024	00095/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	257.698.379,00
15-01-2024	00123/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Driver LLDIKTI VI dalam rangka, mengantar Kepala 1. Penyerahan SK Izin Pembukaan Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 2. Penyerahan SK Iz	0,00	420.000,00	257.278.379,00
15-01-2024	00017/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	400.000,00	256.878.379,00
15-01-2024	00004/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Januari 2024 ID Pel : 523013044430	0,00	396.000,00	256.482.379,00
15-01-2024	00012/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Januari 2024 No Telp 0248317281	0,00	387.686,00	256.094.693,00
15-01-2024	00049/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	255.794.693,00
15-01-2024	00021/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI	0,00	300.000,00	255.494.693,00

1	2	3	4	5	6
		Wilayah VI Tahun 2024			
15-01-2024	00039/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	255.194.693,00
15-01-2024	00041/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	254.894.693,00
15-01-2024	00044/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	254.594.693,00
15-01-2024	00055/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	254.294.693,00
15-01-2024	00059/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	253.994.693,00
15-01-2024	00018/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	253.694.693,00
15-01-2024	00019/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	253.394.693,00
15-01-2024	00033/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	253.094.693,00
15-01-2024	00050/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	252.794.693,00
15-01-2024	00023/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	252.494.693,00

1	2	3	4	5	6
15-01-2024	00026/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	252.194.693,00
15-01-2024	00028/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	251.894.693,00
15-01-2024	00029/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	251.594.693,00
15-01-2024	00035/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	251.294.693,00
15-01-2024	00051/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	250.994.693,00
15-01-2024	00056/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	250.694.693,00
15-01-2024	00057/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	250.394.693,00
15-01-2024	00022/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	250.094.693,00
15-01-2024	00025/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	249.794.693,00
15-01-2024	00043/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	249.494.693,00
15-01-2024	00052/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi	0,00	300.000,00	249.194.693,00

1	2	3	4	5	6
		Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024			
15-01-2024	00054/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	248.894.693,00
15-01-2024	00058/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	248.594.693,00
15-01-2024	00060/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	248.294.693,00
15-01-2024	00061/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	247.994.693,00
15-01-2024	00037/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	247.694.693,00
15-01-2024	00046/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	247.394.693,00
15-01-2024	00062/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	247.094.693,00
15-01-2024	00032/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	246.794.693,00
15-01-2024	00040/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	246.494.693,00
15-01-2024	00045/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan	0,00	300.000,00	246.194.693,00

1	2	3	4	5	6
		Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024			
15-01-2024	00048/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	245.894.693,00
15-01-2024	00053/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	245.594.693,00
15-01-2024	00034/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	245.294.693,00
15-01-2024	00036/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	244.994.693,00
15-01-2024	00038/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	244.694.693,00
15-01-2024	00063/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	244.394.693,00
15-01-2024	00020/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	244.094.693,00
15-01-2024	00024/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	243.794.693,00
15-01-2024	00027/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	243.494.693,00
15-01-2024	00030/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI	0,00	300.000,00	243.194.693,00

1	2	3	4	5	6
		Wilayah VI Tahun 2024			
15-01-2024	00031/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	242.894.693,00
15-01-2024	00090/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	265.000,00	242.629.693,00
15-01-2024	00116/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor Pembelian BBM Perjadin H 9507 CG kegiatan Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	200.000,00	242.429.693,00
15-01-2024	00115/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Perjadin H 1034 XG kegiatan Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka Perjadin ST 3/LL6/LP.01.01/2024	0,00	200.000,00	242.229.693,00
15-01-2024	00118/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Service berkala kendaraan dinas roda 2 H 6174 XG dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	170.313,00	242.059.380,00
15-01-2024	00104/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	170.000,00	241.889.380,00
15-01-2024	00003/KW/723014/2024	Biaya Pengiriman Surat Dinas	0,00	132.000,00	241.757.380,00
15-01-2024	00011/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Januari 2024 No Telp 0248311521	0,00	129.669,00	241.627.711,00
15-01-2024	00081/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	95.000,00	241.532.711,00
15-01-2024	00102/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	95.000,00	241.437.711,00
15-01-2024	00079/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	95.000,00	241.342.711,00
15-01-2024	00080/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan	0,00	95.000,00	241.247.711,00

1	2	3	4	5	6
		LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024			
15-01-2024	00001/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembuatan ID Card	0,00	83.333,00	241.164.378,00
15-01-2024	00010/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Januari 2024 No Telp 0248311273	0,00	59.221,00	241.105.157,00
15-01-2024	00009/KW/723014/2024	Tagihan Kartu Halo bulan Januari 2024 No Telp 08112690267	0,00	58.000,00	241.047.157,00
15-01-2024	00002/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian aqua botol kecil	0,00	41.000,00	241.006.157,00
15-01-2024	00013/KW/723014/2024	Telepon bulan Januari 2024 No Telp 0248449458	0,00	39.907,00	240.966.250,00
15-01-2024	00117/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 H 6174 XG dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan	0,00	35.000,00	240.931.250,00
15-01-2024	00008/KW/723014/2024	Tagihan Telepon Bulan Januari 2024 No 08112558011	0,00	30.250,00	240.901.000,00
15-01-2024	00119/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 H 1033 XG berupa Pengisian Nitrogen dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	25.000,00	240.876.000,00
18-01-2024	00113/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian aqua galon, isi ulang, dan aqua 330 ml	0,00	634.000,00	240.242.000,00
18-01-2024	00112/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian silicon	0,00	208.000,00	240.034.000,00
18-01-2024	00114/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian 3 kran onda	0,00	114.000,00	239.920.000,00
21-01-2024	00042/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	239.620.000,00
22-01-2024	00141/KW/723014/2024	1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KIP Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes	0,00	1.472.500,00	238.147.500,00

1	2	3	4	5	6
		2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KIP Kuliah Akademi Kebidanan Siti Fatimah			
22-01-2024	00131/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	1.396.000,00	236.751.500,00
22-01-2024	00139/KW/723014/2024	Penyerahan SK Izin Pembukaan Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 2. Penyerahan SK Izin Pembukaan Prodi Teknik Elektro Program Sarjana pada Sekol	0,00	1.105.000,00	235.646.500,00
22-01-2024	00143/KW/723014/2024	Penyerahan SK Izin Pembukaan Prodi Hukum Bisnis Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Karanganyar	0,00	673.500,00	234.973.000,00
22-01-2024	00125/KW/723014/2024	Penyerahan SK Guru Besar M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D. Penyerahan SK Prodi Baru Sistem Informasi Program Sarjana Penyerahan SK Perubahan Nama Prodi Magister Psikologi Profesi menjadi Prodi Pendidikan Profesi Psikologi Program P	0,00	630.000,00	234.343.000,00
22-01-2024	00130/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	233.751.000,00
22-01-2024	00129/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	233.159.000,00
22-01-2024	00134/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	232.567.000,00
22-01-2024	00132/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	231.975.000,00
22-01-2024	00127/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	231.383.000,00
22-01-2024	00140/KW/723014/2024	1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KIP Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KIP Kuliah Akademi Kebidanan Siti Fatimah	0,00	592.000,00	230.791.000,00
22-01-2024	00137/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	230.199.000,00
22-01-2024	00133/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	229.607.000,00
22-01-2024	00128/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	229.015.000,00

1	2	3	4	5	6
22-01-2024	00135/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	228.423.000,00
22-01-2024	00136/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	227.831.000,00
22-01-2024	00126/KW/723014/2024	Tindak lanjut aduan masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah Merdeka	0,00	592.000,00	227.239.000,00
22-01-2024	00138/KW/723014/2024	1. Penyerahan SK Izin Pembukaan Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 2. Penyerahan SK Izin Pembukaan Prodi Teknik Elektro Program Sarjana pada Sekolah Tin	0,00	592.000,00	226.647.000,00
22-01-2024	00142/KW/723014/2024	Penyerahan SK Izin Pembukaan Prodi Hukum Bisnis Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Karanganyar	0,00	296.000,00	226.351.000,00
22-01-2024	00124/KW/723014/2024	Penyerahan SK Guru Besar M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D. Penyerahan SK Prodi Baru Sistem Informasi Program Sarjana Penyerahan SK Perubahan Nama Prodi Magister Psikologi Profesi menjadi Prodi Pendidikan Profesi Psikologi Program P	0,00	296.000,00	226.055.000,00
22-01-2024	00144/KW/723014/2024	Mengantar LPJ Keuangan Bulan Desember 2023	0,00	170.000,00	225.885.000,00
22-01-2024	00145/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian insektisida anti rayap	0,00	40.000,00	225.845.000,00
25-01-2024	00146/KW/723014/2024	Pemeriksaan administrasi awal seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024	0,00	640.000,00	225.205.000,00
25-01-2024	00148/KW/723014/2024	Pemeriksaan administrasi awal seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024	0,00	640.000,00	224.565.000,00
25-01-2024	00147/KW/723014/2024	Pemeriksaan administrasi awal seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024	0,00	640.000,00	223.925.000,00
25-01-2024	00150/KW/723014/2024	Rapat persamaan persepsi dalam rangka seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024	0,00	170.000,00	223.755.000,00
25-01-2024	00149/KW/723014/2024	Rapat persamaan persepsi dalam rangka seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi	0,00	170.000,00	223.585.000,00

1	2	3	4	5	6
		Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024			
25-01-2024	00151/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Sealer dan Amplas	0,00	30.000,00	223.555.000,00
29-01-2024	00163/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Tanggal 09/01/2024 s.d 10/01/2024 PO Hotel Semarang Jl. Pemuda No.118, Sekayu, Kec.	0,00	7.700.000,00	215.855.000,00
29-01-2024	00164/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, 1. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024 2. Penyerahan SK Guru Besar an Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. dan Ihwan Susila, S.E., M.Si., Ph.D. Universitas Muhammadiya	0,00	1.500.000,00	214.355.000,00
29-01-2024	00157/KW/723014/2024	Review Instrumen Pembukaan Prodi D3 Farmasi Fakultas Pertanian UNTIDAR	0,00	647.000,00	213.708.000,00
29-01-2024	00156/KW/723014/2024	Review Instrumen Pembukaan Prodi D3 Farmasi Fakultas Pertanian UNTIDAR	0,00	592.000,00	213.116.000,00
29-01-2024	00155/KW/723014/2024	Review Instrumen Pembukaan Prodi D3 Farmasi Fakultas Pertanian UNTIDAR	0,00	592.000,00	212.524.000,00
29-01-2024	00154/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi - UMS	0,00	487.500,00	212.036.500,00
29-01-2024	00159/KW/723014/2024	Pembukaan Siklus SPMI Universitas Kristen Satya Wacana	0,00	446.000,00	211.590.500,00
29-01-2024	00158/KW/723014/2024	Pembukaan Siklus SPMI Universitas Kristen Satya Wacana	0,00	296.000,00	211.294.500,00
29-01-2024	00153/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi - UMS	0,00	296.000,00	210.998.500,00
29-01-2024	00152/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi - UMS	0,00	296.000,00	210.702.500,00
29-01-2024	00161/KW/723014/2024	Menghadiri Sosialisasi Sertifikasi Dosen Universitas Semarang	0,00	170.000,00	210.532.500,00
29-01-2024	00160/KW/723014/2024	Menghadiri Sosialisasi Sertifikasi Dosen	0,00	170.000,00	210.362.500,00

1	2	3	4	5	6
		Universitas Semarang			
29-01-2024	00162/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian compound dan kain perca	0,00	18.000,00	210.344.500,00
31-01-2024	00049/BP/723014/2024	pungut pajak	988.000,00	0,00	211.332.500,00
31-01-2024	00048/BP/723014/2024	pungut pajak	420.000,00	0,00	211.752.500,00
31-01-2024	00040/BP/723014/2024	pungut pajak	225.000,00	0,00	211.977.500,00
31-01-2024	00039/BP/723014/2024	pungut pajak	225.000,00	0,00	212.202.500,00
31-01-2024	00050/BP/723014/2024	Pungut pajak	210.000,00	0,00	212.412.500,00
31-01-2024	00052/BP/723014/2024	pungut pajak	180.000,00	0,00	212.592.500,00
31-01-2024	00051/BP/723014/2024	pungut pajak	180.000,00	0,00	212.772.500,00
31-01-2024	00053/BP/723014/2024	Pungut Pajak	128.623,00	0,00	212.901.123,00
31-01-2024	00045/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	212.991.123,00
31-01-2024	00046/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	213.081.123,00
31-01-2024	00047/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	213.171.123,00
31-01-2024	00002/BP/723014/2024	Pungut Pajak	67.500,00	0,00	213.238.623,00
31-01-2024	00041/BP/723014/2024	pungut pajak	67.500,00	0,00	213.306.123,00
31-01-2024	00037/BP/723014/2024	pungut pajak	67.500,00	0,00	213.373.623,00
31-01-2024	00055/BP/723014/2024	pungut pajak	64.240,00	0,00	213.437.863,00
31-01-2024	00042/BP/723014/2024	pungut pajak	60.000,00	0,00	213.497.863,00
31-01-2024	00003/BP/723014/2024	Pungut Pajak	60.000,00	0,00	213.557.863,00
31-01-2024	00024/BP/723014/2024	Pungut Pajak	45.000,00	0,00	213.602.863,00
31-01-2024	00022/BP/723014/2024	Pungut Pajak	45.000,00	0,00	213.647.863,00
31-01-2024	00021/BP/723014/2024	Pungut Pajak	45.000,00	0,00	213.692.863,00
31-01-2024	00054/BP/723014/2024	pungut pajak	21.900,00	0,00	213.714.763,00
31-01-2024	00038/BP/723014/2024	pungut pajak	20.000,00	0,00	213.734.763,00
31-01-2024	00034/BP/723014/2024	pungut pajak	17.708,00	0,00	213.752.471,00

1	2	3	4	5	6
31-01-2024	00009/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.767.471,00
31-01-2024	00010/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.782.471,00
31-01-2024	00023/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.797.471,00
31-01-2024	00025/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.812.471,00
31-01-2024	00036/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	213.827.471,00
31-01-2024	00006/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.842.471,00
31-01-2024	00044/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.857.471,00
31-01-2024	00035/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	213.872.471,00
31-01-2024	00017/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.887.471,00
31-01-2024	00026/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.902.471,00
31-01-2024	00005/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.917.471,00
31-01-2024	00007/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.932.471,00
31-01-2024	00013/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.947.471,00
31-01-2024	00016/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.962.471,00
31-01-2024	00020/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	213.977.471,00
31-01-2024	00031/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	213.992.471,00
31-01-2024	00015/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.007.471,00
31-01-2024	00019/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.022.471,00
31-01-2024	00004/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.037.471,00
31-01-2024	00012/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.052.471,00
31-01-2024	00018/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.067.471,00
31-01-2024	00028/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.082.471,00
31-01-2024	00043/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	214.097.471,00
31-01-2024	00014/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.112.471,00
31-01-2024	00027/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.127.471,00
31-01-2024	00032/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	214.142.471,00

1	2	3	4	5	6
31-01-2024	00008/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.157.471,00
31-01-2024	00011/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.172.471,00
31-01-2024	00029/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	214.187.471,00
31-01-2024	00030/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	214.202.471,00
31-01-2024	00033/BP/723014/2024	pungut pajak	6.813,00	0,00	214.209.284,00
31-01-2024	00001/BP/723014/2024	Pungut Pajak	3.333,00	0,00	214.212.617,00
31-01-2024	00278/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullboard dalam rangka kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	49.400.000,00	164.812.617,00
31-01-2024	00277/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullboard bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	21.000.000,00	143.812.617,00
31-01-2024	00292/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	10.500.000,00	133.312.617,00
31-01-2024	00006/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Januari 2024 ID Pel : 523012307734	0,00	4.769.100,00	128.543.517,00
31-01-2024	00183/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	4.500.000,00	124.043.517,00
31-01-2024	00182/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	4.500.000,00	119.543.517,00
31-01-2024	FPK-PENG-UncWuRln8tZfega	[DARI TUNAI] Penarikan Tunai	0,00	3.708.000,00	115.835.517,00
31-01-2024	00293/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI	0,00	3.600.000,00	112.235.517,00
31-01-2024	00294/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	3.600.000,00	108.635.517,00
31-01-2024	00295/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi makan dan snack dalam rangka Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP tahun 2023 Bagi Pengelola Kepegawaian PT Area Karanganya	0,00	3.215.583,00	105.419.934,00
31-01-2024	00297/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Makan dalam rangka Pendampingan Penyelesaian SKP	0,00	3.212.000,00	102.207.934,00
31-01-2024	00299/KW/723014/2024	Biaya Pesawat Pulang Pergi Jakarta - Semarang Narassumber	0,00	1.972.850,00	100.235.084,00

1	2	3	4	5	6
31-01-2024	00189/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	98.435.084,00
31-01-2024	00188/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	96.635.084,00
31-01-2024	00190/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	94.835.084,00
31-01-2024	00173/KW/723014/2024	1. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024 2. Penyerahan SK Guru Besar an Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. dan Ihwan Susila, S.E.,	0,00	1.099.500,00	93.735.584,00
31-01-2024	00296/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Snack dalam rangka Pendampingan Penyelesaian SKP	0,00	1.095.000,00	92.640.584,00
31-01-2024	00168/KW/723014/2024	Visitasi Lapangan Penggabungan Akademi Keperawatan Yappi Sragen dan Akademi Kebidanan Yappi Sragen menjadi Universitas Sragen	0,00	874.000,00	91.766.584,00
31-01-2024	00177/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Usul Perubahan Bentuk Institut Sugeng Hartono menjadi Universitas Sugeng Hartono	0,00	821.000,00	90.945.584,00
31-01-2024	00232/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	809.000,00	90.136.584,00
31-01-2024	00249/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	806.800,00	89.329.784,00
31-01-2024	00197/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	782.000,00	88.547.784,00

1	2	3	4	5	6
31-01-2024	00238/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	737.256,00	87.810.528,00
31-01-2024	00242/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	733.300,00	87.077.228,00
31-01-2024	00205/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	723.191,00	86.354.037,00
31-01-2024	00256/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	717.300,00	85.636.737,00
31-01-2024	00252/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	688.500,00	84.948.237,00
31-01-2024	00275/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas Transportasi dalam rangka kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	675.000,00	84.273.237,00
31-01-2024	00250/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	659.620,00	83.613.617,00
31-01-2024	00200/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	650.412,00	82.963.205,00
31-01-2024	00243/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	634.800,00	82.328.405,00
31-01-2024	00212/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	624.691,00	81.703.714,00
31-01-2024	00257/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	621.500,00	81.082.214,00
31-01-2024	00195/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan	0,00	615.250,00	80.466.964,00

1	2	3	4	5	6
		Tinggi Wilayah VI Tahun 2024			
31-01-2024	00198/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	599.614,00	79.867.350,00
31-01-2024	00235/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	598.000,00	79.269.350,00
31-01-2024	00258/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	594.500,00	78.674.850,00
31-01-2024	00248/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	593.000,00	78.081.850,00
31-01-2024	00169/KW/723014/2024	Visitasi Lapangan Penggabungan Akademi Keperawatan Yappi Sragen dan Akademi Kebidanan Yappi Sragen menjadi Universitas Sragen	0,00	592.000,00	77.489.850,00
31-01-2024	00174/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Usul Perubahan Bentuk Institut Sugeng Hartono menjadi Universitas Sugeng Hartono	0,00	592.000,00	76.897.850,00
31-01-2024	00167/KW/723014/2024	Visitasi Lapangan Penggabungan Akademi Keperawatan Yappi Sragen dan Akademi Kebidanan Yappi Sragen menjadi Universitas Sragen	0,00	592.000,00	76.305.850,00
31-01-2024	00172/KW/723014/2024	1. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024 2. Penyerahan SK Guru Besar an Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. dan Ihwan Susila, S.E., M.Si., Ph.D. Universitas Muhammadiyah Surakarta	0,00	592.000,00	75.713.850,00
31-01-2024	00175/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Usul Perubahan Bentuk Institut Sugeng Hartono menjadi Universitas Sugeng Hartono	0,00	592.000,00	75.121.850,00
31-01-2024	00176/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Usul Perubahan Bentuk Institut Sugeng Hartono menjadi Universitas Sugeng Hartono	0,00	592.000,00	74.529.850,00
31-01-2024	00226/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan	0,00	592.000,00	73.937.850,00

1	2	3	4	5	6
		Tinggi Wilayah VI Tahun 2024			
31-01-2024	00234/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	590.000,00	73.347.850,00
31-01-2024	00244/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	585.000,00	72.762.850,00
31-01-2024	00222/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	575.000,00	72.187.850,00
31-01-2024	00229/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	575.000,00	71.612.850,00
31-01-2024	00231/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	575.000,00	71.037.850,00
31-01-2024	00218/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	575.000,00	70.462.850,00
31-01-2024	00221/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	575.000,00	69.887.850,00
31-01-2024	00223/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	575.000,00	69.312.850,00
31-01-2024	00233/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	575.000,00	68.737.850,00

1	2	3	4	5	6
31-01-2024	00227/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	575.000,00	68.162.850,00
31-01-2024	00228/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	575.000,00	67.587.850,00
31-01-2024	00230/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	575.000,00	67.012.850,00
31-01-2024	00255/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	571.000,00	66.441.850,00
31-01-2024	00215/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	568.458,00	65.873.392,00
31-01-2024	00220/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	568.300,00	65.305.092,00
31-01-2024	00239/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	560.000,00	64.745.092,00
31-01-2024	00246/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	560.000,00	64.185.092,00
31-01-2024	00254/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	560.000,00	63.625.092,00
31-01-2024	00247/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	560.000,00	63.065.092,00
31-01-2024	00245/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	560.000,00	62.505.092,00

1	2	3	4	5	6
31-01-2024	00237/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	560.000,00	61.945.092,00
31-01-2024	00213/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	553.000,00	61.392.092,00
31-01-2024	00191/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	548.996,00	60.843.096,00
31-01-2024	00276/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas Transfportasi dalam rangka kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	536.000,00	60.307.096,00
31-01-2024	00206/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	510.000,00	59.797.096,00
31-01-2024	00236/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	489.000,00	59.308.096,00
31-01-2024	00219/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	460.000,00	58.848.096,00
31-01-2024	00194/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	455.000,00	58.393.096,00
31-01-2024	00193/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	455.000,00	57.938.096,00
31-01-2024	00184/KW/723014/2024	Honor Panitia (Penanggungjawab) dalam rangka Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	450.000,00	57.488.096,00

1	2	3	4	5	6
31-01-2024	00180/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	450.000,00	57.038.096,00
31-01-2024	00298/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	435.000,00	56.603.096,00
31-01-2024	00290/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	56.173.096,00
31-01-2024	00287/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	55.743.096,00
31-01-2024	00284/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	55.313.096,00
31-01-2024	00291/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	54.883.096,00
31-01-2024	00282/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	54.453.096,00
31-01-2024	00281/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	54.023.096,00
31-01-2024	00283/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	53.593.096,00
31-01-2024	00286/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	53.163.096,00
31-01-2024	00279/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	52.733.096,00
31-01-2024	00280/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	430.000,00	52.303.096,00
31-01-2024	00185/KW/723014/2024	Honor Panitia (Ketua) dalam rangka Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	400.000,00	51.903.096,00
31-01-2024	00181/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	400.000,00	51.503.096,00
31-01-2024	00165/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian aqua galon dan isi ulang	0,00	392.000,00	51.111.096,00
31-01-2024	00268/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	50.721.096,00
31-01-2024	00241/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem	0,00	390.000,00	50.331.096,00

1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024			
31-01-2024	00251/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	390.000,00	49.941.096,00
31-01-2024	00260/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	49.551.096,00
31-01-2024	00262/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	49.161.096,00
31-01-2024	00259/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	48.771.096,00
31-01-2024	00269/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	48.381.096,00
31-01-2024	00273/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	47.991.096,00
31-01-2024	00253/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	390.000,00	47.601.096,00
31-01-2024	00263/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	47.211.096,00
31-01-2024	00240/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	390.000,00	46.821.096,00
31-01-2024	00271/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	46.431.096,00
31-01-2024	00274/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	46.041.096,00
31-01-2024	00264/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	45.651.096,00
31-01-2024	00265/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	45.261.096,00
31-01-2024	00266/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	44.871.096,00
31-01-2024	00272/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	44.481.096,00
31-01-2024	00270/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	44.091.096,00
31-01-2024	00267/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem	0,00	390.000,00	43.701.096,00

1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024			
31-01-2024	00261/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	390.000,00	43.311.096,00
31-01-2024	00202/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	374.500,00	42.936.596,00
31-01-2024	00209/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	369.000,00	42.567.596,00
31-01-2024	00166/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Aqua Galon dan Isi Ulang	0,00	343.000,00	42.224.596,00
31-01-2024	00225/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	339.614,00	41.884.982,00
31-01-2024	00224/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	318.800,00	41.566.182,00
31-01-2024	00186/KW/723014/2024	Honor Panitia (Sekretaris) dalam rangka Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	41.266.182,00
31-01-2024	00047/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	40.966.182,00
31-01-2024	00187/KW/723014/2024	Honor Panitia (Anggota) dalam rangka Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	40.666.182,00
31-01-2024	00178/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	300.000,00	40.366.182,00
31-01-2024	00179/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru	0,00	300.000,00	40.066.182,00

1	2	3	4	5	6
		dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1			
31-01-2024	00207/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	39.806.182,00
31-01-2024	00214/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	39.546.182,00
31-01-2024	00217/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	260.000,00	39.286.182,00
31-01-2024	00204/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	39.026.182,00
31-01-2024	00199/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	38.766.182,00
31-01-2024	00208/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	38.506.182,00
31-01-2024	00216/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024 - Internal LLDIKTI	0,00	260.000,00	38.246.182,00
31-01-2024	00201/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	37.986.182,00
31-01-2024	00192/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	37.726.182,00
31-01-2024	00196/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di	0,00	260.000,00	37.466.182,00

1	2	3	4	5	6
		Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024			
31-01-2024	00203/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	37.206.182,00
31-01-2024	00210/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	36.946.182,00
31-01-2024	00211/KW/723014/2024	Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	36.686.182,00
31-01-2024	00288/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	260.000,00	36.426.182,00
31-01-2024	00289/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	205.000,00	36.221.182,00
31-01-2024	00171/KW/723014/2024	Undangan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan I 2024	0,00	170.000,00	36.051.182,00
31-01-2024	00170/KW/723014/2024	Undangan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan I 2024	0,00	170.000,00	35.881.182,00
31-01-2024	00300/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari - Biaya Administrasi Bank Bulan Januari 2024	0,00	152.400,00	35.728.782,00
31-01-2024	00285/KW/723014/2024	Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,	0,00	130.000,00	35.598.782,00
		Jumlah	**303.868.117,00**	**268.269.335,00**	**35.598.782,00**

BENDAHARA PENGELUARAN



Noralina Yodianti

NIP.198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JANUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 0057101300000280

Nama Rekening : RPL 026 KS LLDIKTI W

Nama Bank : Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		- 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JANUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 1053003521

Nama Rekening : RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		- 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 05-02-2024

Periode : 2024-01

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 05-02-2024 04:59:20 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 05-02-2024

Periode : 2024-01

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 05-02-2024 04:59:20 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 05-02-2024

Periode : 2024-01

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 05-02-2024 04:59:20 WIB.

Report Satker

Tanggal :2024-01-01 - 2024-01-31

Kementerian :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023)

Eselon :SEKRETARIAT JENDERAL (01)

Satker :LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Rekening Induk :RKK SETJEN KEMENDIKBUD OPS (1220010692575)

Rekening Satker :BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG (8100127230141000)

Total Mutasi

Debit : 283,098,413.00

Kredit : 318,697,195.00

Saldo Akhir : 35,598,782.00

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
12-01-2024	10:56:42	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000046000001 | Penyediaan Uang Persediaan LEMBAGA LAYAN	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	SPAN	
12-01-2024	14:58:19	MCM InhouseTrf VA | 202401121415998936 | KE 9910000133349	300,000,000.00	4,635,000.00	0.00	295,365,000.00	MCM	
12-01-2024	14:58:21	MCM InhouseTrf VA | Perjadin NIK NPWP 202401121453549263 | KE 1360030349515	295,365,000.00	260,000.00	0.00	295,105,000.00	MCM	
12-01-2024	14:58:25	MCM InhouseTrf VA | Meeting NPWP NIK 202401121449544935 | KE 1350031338989	295,105,000.00	10,290,000.00	0.00	284,815,000.00	MCM	
15-01-2024	08:23:51	MCM InhouseTrf VA | 202401150754974881 | KE 9910000133349	284,815,000.00	3,082,733.00	0.00	281,732,267.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422110530 | KE	281,732,267.00	982,350.00	0.00	280,749,917.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | 202401150727968314 /9910000002106 | KE	280,749,917.00	2,500.00	0.00	280,747,417.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 013044430 | KE	280,747,417.00	396,000.00	0.00	280,351,417.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | 202401150717967558 /9910000006891 | KE	280,351,417.00	3,500.00	0.00	280,347,917.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422111050 | KE	280,347,917.00	1,071,150.00	0.00	279,276,767.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | 202401150727969079 /9910000002106 | KE	279,276,767.00	2,500.00	0.00	279,274,267.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 013280785 | KE	279,274,267.00	951,737.00	0.00	278,322,530.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 011392634 | KE	278,322,530.00	18,610,676.00	0.00	259,711,854.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | 202401150720967807 /9910000006891 | KE	259,711,854.00	3,500.00	0.00	259,708,354.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | 202401150723968102 /9910000006891 | KE	259,708,354.00	3,500.00	0.00	259,704,854.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 012307734 | KE	259,704,854.00	4,769,100.00	0.00	254,935,754.00	MCM	
15-01-2024	08:23:52	MCM UBP Payment VA | 202401150722967917 /9910000006891 | KE	254,935,754.00	3,500.00	0.00	254,932,254.00	MCM	
15-01-2024	11:25:59	MCM InhouseTrf VA | 202401151104707881 | KE 9910000133349	254,932,254.00	1,301,500.00	0.00	253,630,754.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
15-01-2024	11:26:01	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202401151104707881 | KE 9910000133349	253,630,754.00	5,800.00	0.00	253,624,954.00	MCM	
15-01-2024	17:20:52	Withdrawal | H | KE	253,624,954.00	2,500,000.00	0.00	251,124,954.00	OTHERS	
15-01-2024	17:21:52	Withdrawal | J | KE	251,124,954.00	2,500,000.00	0.00	248,624,954.00	OTHERS	
15-01-2024	17:22:59	Withdrawal | J | KE	248,624,954.00	2,500,000.00	0.00	246,124,954.00	OTHERS	
15-01-2024	17:23:58	Withdrawal | H | KE	246,124,954.00	2,500,000.00	0.00	243,624,954.00	OTHERS	
15-01-2024	17:24:55	Withdrawal | H | KE	243,624,954.00	2,500,000.00	0.00	241,124,954.00	OTHERS	
15-01-2024	17:26:21	Withdrawal | H | KE	241,124,954.00	2,500,000.00	0.00	238,624,954.00	OTHERS	
17-01-2024	12:24:05	Withdrawal | J | KE	238,624,954.00	2,500,000.00	0.00	236,124,954.00	OTHERS	
17-01-2024	12:25:03	Withdrawal | H | KE	236,124,954.00	2,500,000.00	0.00	233,624,954.00	OTHERS	
17-01-2024	12:25:59	Withdrawal | H | KE	233,624,954.00	2,500,000.00	0.00	231,124,954.00	OTHERS	
17-01-2024	12:27:02	Withdrawal | J | KE	231,124,954.00	2,500,000.00	0.00	228,624,954.00	OTHERS	
17-01-2024	12:27:59	Withdrawal | H | KE	228,624,954.00	2,500,000.00	0.00	226,124,954.00	OTHERS	
17-01-2024	12:28:58	Withdrawal | H | KE	226,124,954.00	2,500,000.00	0.00	223,624,954.00	OTHERS	
18-01-2024	07:20:32	Withdrawal | H | KE	223,624,954.00	2,500,000.00	0.00	221,124,954.00	OTHERS	
18-01-2024	07:21:26	Withdrawal | H | KE	221,124,954.00	2,500,000.00	0.00	218,624,954.00	OTHERS	
18-01-2024	09:19:36	MCM InhouseTrf VA | 202401180902914471 | KE 9910000133349	218,624,954.00	956,000.00	0.00	217,668,954.00	MCM	
20-01-2024	07:21:42	Withdrawal | H | KE	217,668,954.00	2,500,000.00	0.00	215,168,954.00	OTHERS	
20-01-2024	07:22:38	Withdrawal | H | KE	215,168,954.00	2,500,000.00	0.00	212,668,954.00	OTHERS	
20-01-2024	07:23:37	Withdrawal | H | KE	212,668,954.00	2,500,000.00	0.00	210,168,954.00	OTHERS	
22-01-2024	08:44:00	MCM InhouseTrf VA | 202401220824524308 | KE 9910000133349	210,168,954.00	13,605,000.00	0.00	196,563,954.00	MCM	
23-01-2024	13:37:07	New Mandiri Online Trf VA | Setor Tunai | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	196,563,954.00	0.00	2,407,500.00	198,971,454.00	OTHERS	
24-01-2024	12:11:17	MCM InhouseTrf VA | 202401241027560587 | KE 9910000133349	198,971,454.00	4,000,000.00	0.00	194,971,454.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
24-01-2024	12:11:20	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202401241027560587 | KE 9910000133349	194,971,454.00	2,900.00	0.00	194,968,554.00	MCM	
25-01-2024	14:12:06	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000214000001 | Pembayaran Belanja Pegawai-Tunjangan Pro	194,968,554.00	0.00	12,874,595.00	207,843,149.00	SPAN	
25-01-2024	15:11:00	MCM InhouseTrf VA | 202401250709898184 | KE 9910000133349	207,843,149.00	2,290,000.00	0.00	205,553,149.00	MCM	
26-01-2024	10:36:49	MCM InhouseTrf VA | 202401260937658127 | KE 9910000133349	205,553,149.00	12,874,595.00	0.00	192,678,554.00	MCM	
26-01-2024	10:36:50	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202401260937658127 | KE 9910000133349	192,678,554.00	2,900.00	0.00	192,675,654.00	MCM	
26-01-2024	14:28:34	MCM InhouseTrf VA | Tiket Narsum 202401261406559706 | KE 1370012778896	192,675,654.00	1,972,850.00	0.00	190,702,804.00	MCM	
29-01-2024	07:18:07	MCM InhouseTrf VA | 202401290440903237 | KE 9910000133349	190,702,804.00	3,550,000.00	0.00	187,152,804.00	MCM	
29-01-2024	07:45:59	MCM InhouseTrf VA | 202401290738916482 | KE 9910000133349	187,152,804.00	4,010,500.00	0.00	183,142,304.00	MCM	
29-01-2024	14:06:19	MCM InhouseTrf VA | Penginapan Panitia R 202401291356861675 | KE 1360000111887	183,142,304.00	7,700,000.00	0.00	175,442,304.00	MCM	
29-01-2024	14:06:19	MCM Outw SKN (VA) | Snack 202401291400867540 | KE 703516971524000	175,442,304.00	1,073,100.00	0.00	174,369,204.00	MCM	
29-01-2024	14:06:19	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202401291400867540 | KE 703516971524000	174,369,204.00	2,900.00	0.00	174,366,304.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
29-01-2024	14:06:23	MCM Outw SKN (VA) | Konsumsi Makan 202401291402869531 | KE 2020236224	174,366,304.00	3,147,760.00	0.00	171,218,544.00	MCM	
29-01-2024	14:06:23	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202401291402869531 | KE 2020236224	171,218,544.00	2,900.00	0.00	171,215,644.00	MCM	
29-01-2024	15:41:40	| RTR-002-99-202401291400867540-Fakih Den | 0599102117075101 0599102117075101_202401	171,215,644.00	0.00	1,073,100.00	172,288,744.00	OTHERS	
30-01-2024	08:18:34	MCM InhouseTrf VA | Konsumsi 202401300814773165 | KE 1380012945171	172,288,744.00	3,086,960.00	0.00	169,201,784.00	MCM	
31-01-2024	10:18:34	MCM Outw SKN (VA) | Konsumsi Snack 202401301113531325 | KE 025101008023532	169,201,784.00	1,073,100.00	0.00	168,128,684.00	MCM	
31-01-2024	10:18:34	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202401301113531325 | KE 025101008023532	168,128,684.00	2,900.00	0.00	168,125,784.00	MCM	
31-01-2024	10:18:34	MCM InhouseTrf VA | 202401311009959783 | KE 9910000133349	168,125,784.00	132,706,288.00	0.00	35,419,496.00	MCM	
31-01-2024	10:18:36	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202401311009959783 | KE 9910000133349	35,419,496.00	107,300.00	0.00	35,312,196.00	MCM	
31-01-2024	10:18:38	MCM Outw SKN (VA) | Narsum 202401311012964885 | KE 0028779652	35,312,196.00	1,710,000.00	0.00	33,602,196.00	MCM	
31-01-2024	10:18:38	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202401311012964885 | KE 0028779652	33,602,196.00	2,900.00	0.00	33,599,296.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
31-01-2024	10:18:42	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Dewan Pakar202401311013968212 | KE 0028779652	33,599,296.00	339,614.00	0.00	33,259,682.00	MCM	
31-01-2024	10:18:42	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202401311013968212 | KE 0028779652	33,259,682.00	2,900.00	0.00	33,256,782.00	MCM	
31-01-2024	13:41:22	| RTR-009-01-202401311009959783-Hario Nga | 0599102128642701 0599102128642701 RET LL	33,256,782.00	0.00	260,000.00	33,516,782.00	OTHERS	
31-01-2024	13:41:24	| RTR-113-02-202401311009959783-Wuryanto | 0599102128642401 0599102128642401	33,516,782.00	0.00	260,000.00	33,776,782.00	OTHERS	
31-01-2024	13:41:26	| RTR-451-02-202401311009959783-Aman Suya | 0599102128642301 REKENING TIDAK TERDAFTA	33,776,782.00	0.00	260,000.00	34,036,782.00	OTHERS	
31-01-2024	13:41:27	| RTR-009-02-202401311009959783-Saiful Ba | 0599102128643501 0599102128643501 RET LL	34,036,782.00	0.00	390,000.00	34,426,782.00	OTHERS	
31-01-2024	13:41:31	| RTR-451-02-202401311009959783-Ariy kaer | 0599102128644001 REKENING TIDAK TERDAFTA	34,426,782.00	0.00	390,000.00	34,816,782.00	OTHERS	
31-01-2024	13:41:33	| RTR-451-02-202401311009959783-Gilang Pr | 0599102128641601 REKENING TIDAK TERDAFTA	34,816,782.00	0.00	782,000.00	35,598,782.00	OTHERS	

05/02/2024 05:00:53

Account Balance

Customer **LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG**

Organization Unit Name **00571 - KCP SAMPANGAN**

Current

Account No/Account Name	*Account Status*	Currency	*Ledger balance*	*Available Balance*
0057101300000280 / RPL 026 KS	Active	IDR	0.00	0.00
		Total	***0.00***	***0.00***

Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang
Jawa Tengah
Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Monday 05 February
Reference 1707084491344

Laporan Saldo Rekening

Kota Semarang
RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG

Total Saldo : Rp. 0

No	CIF	Rekening	Nama Rekening	Cabang	Saldo
1	03734254	1053003521	RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG	CAPEM SAMPANGAN	0

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Februari 2024

Kementerian/Lembaga	: (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Tgl, No. SP	: 28 November 2023 , DIPA-023.01.2.723014/2024
Unit Organisasi	: (01) SEKRETARIAT JENDERAL	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG	KPPN	: (026) Semarang I
Satuan Kerja	: (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 152.105.746,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00135/BP/723014/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	39.306.782,00	589.193.626,00	476.394.662,00	152.105.746,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	39.306.782,00	589.193.626,00	476.394.662,00	152.105.746,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	39.306.782,00	573.300.626,00	460.501.662,00	152.105.746,00
	1. BP UP*)	35.438.665,00	511.393.423,00	449.186.232,00	97.645.856,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	2.132.450,00	2.132.450,00	0,00
	4. BP Pajak	3.868.117,00	10.978.200,00	9.182.980,00	5.663.337,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	48.796.553,00	0,00	48.796.553,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 202.354.144,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	12.185.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	139.920.746,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	152.105.746,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	152.105.746,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	152.105.746,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1.	Saldo UP	Rp.	97.645.856,00
2.	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	202.354.144,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4.	Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5.	Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1.	Saldo TUP	Rp.	0,00
2.	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4.	Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5.	Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1.	Saldo Lainnya	Rp.	54.459.890,00
2.	Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	54.459.890,00
3.	Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

KOTA SEMARANG, Februari 2024
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Dicetak pada tanggal,02 Maret 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100127230141000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 152.105.746 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00135/BP/723014/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	152.105.746
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	152.105.746

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	97.645.856
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	5.663.337
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	48.796.553
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	152.105.746

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	12.185.000
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	139.920.746
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	152.105.746

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a.	Saldo UP	Rp.	97.645.856
	b.	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	202.354.144
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	300.000.000
2	a.	Saldo TUP	Rp.	0
	b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3		Saldo Lainnya	Rp.	54.459.890
4		Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	354.459.890

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	300.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	54.459.890
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	354.459.890

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

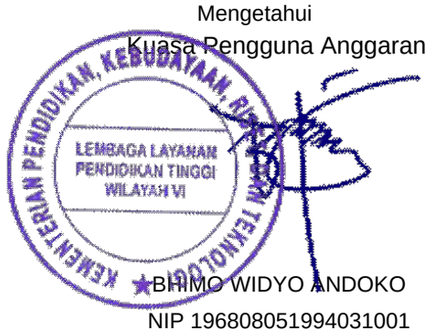
A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 723014

BULAN : FEBRUARI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100127230141000	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	MANDIRI	20	S-3895/WPB.12/KP.03/2021	23-12-2021	2024-02-29	139,920,746.00
2	0057101300000280	RPL 026 KS LLDIKTI W	Semarang	30	S-614/KPN.1401/2023	02-08-2023	-	0.00
3	1053003521	RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B	Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang	30	S-7/KPN.1401/2023	05-01-2023	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : FEBRUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 8100127230141000

Nama Rekening : BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG

Nama Bank : MANDIRI

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Januari 2024			35.598.782,00
01-02-2024	FPK-PENG-HH9uFGesxvicv2W	[DARI TUNAI] Setor Tunai Bank	3.708.000,00	0,00	39.306.782,00
01-02-2024	00609/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Februari 2024 No JasTel : 143422110530	0,00	2.053.500,00	37.253.282,00
02-02-2024	FPK-PENG-FhA2CqUyYNMwXFT	SPM GUP	201.289.985,00	0,00	238.543.267,00
02-02-2024	FPK-PENG-JZtMwmYwF1h7tp9	SPM GUP	61.146.100,00	0,00	299.689.367,00
02-02-2024	00057/BP/723014/2024	Pungut Pajak	564.000,00	0,00	300.253.367,00
02-02-2024	00056/BP/723014/2024	Pungut Pajak	327.401,00	0,00	300.580.768,00
02-02-2024	00058/BP/723014/2024	Pungut Pajak	317.400,00	0,00	300.898.168,00
02-02-2024	00059/BP/723014/2024	Pungut Pajak	307.800,00	0,00	301.205.968,00
02-02-2024	00060/BP/723014/2024	Pungut Pajak	56.600,00	0,00	301.262.568,00
02-02-2024	00061/BP/723014/2024	Pungut Pajak	49.400,00	0,00	301.311.968,00
02-02-2024	00063/BP/723014/2024	Pungut Pajak	36.800,00	0,00	301.348.768,00

1	2	3	4	5	6
02-02-2024	00062/BP/723014/2024	Pungut Pajak	36.800,00	0,00	301.385.568,00
02-02-2024	00064/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	301.419.568,00
02-02-2024	00065/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	301.453.568,00
02-02-2024	00066/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	301.487.568,00
02-02-2024	00068/BP/723014/2024	Pungut Pajak	13.600,00	0,00	301.501.168,00
02-02-2024	00067/BP/723014/2024	Pungut Pajak	13.600,00	0,00	301.514.768,00
02-02-2024	00311/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullboard dalam rangka Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) LLDIKTI Wilayah VI	0,00	28.200.000,00	273.314.768,00
02-02-2024	00306/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pemeliharaan Personal Computer bulan Januari 2024	0,00	2.795.500,00	270.519.268,00
02-02-2024	00317/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Januari 2024	0,00	2.116.000,00	268.403.268,00
02-02-2024	00318/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Januari 2024	0,00	2.052.000,00	266.351.268,00
02-02-2024	00305/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pemeliharaan Personal Computer bulan Januari 2024	0,00	1.735.000,00	264.616.268,00
02-02-2024	00319/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Januari 2024	0,00	1.132.000,00	263.484.268,00
02-02-2024	00310/KW/723014/2024	FGD Pendirian Prodi Teknik atau Teknologi Rekayasa Perairan Politeknik Harapan Bersama	0,00	994.000,00	262.490.268,00
02-02-2024	00320/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Januari 2024	0,00	988.000,00	261.502.268,00
02-02-2024	00302/KW/723014/2024	Melakukan konsultasi permasalahan kepegawaian : 1. Angka Kredit (AK) integrasi bagi dosen dpk 2. Penyampaian usulan perpindahan jabatan pelaksana 3. Proses pengusulan uji kompetensi jabatan fungsional 4. Perkembangan proses u	0,00	848.000,00	260.654.268,00
02-02-2024	00301/KW/723014/2024	Melakukan konsultasi permasalahan kepegawaian : 1. Angka Kredit (AK) integrasi bagi dosen dpk 2. Penyampaian usulan perpindahan jabatan pelaksana 3. Proses	0,00	848.000,00	259.806.268,00

1	2	3	4	5	6
02-02-2024	00304/KW/723014/2024	Melakukan konsultasi permasalahan kepegawaian : 1. Angka Kredit (AK) integrasi bagi dosen dpk 2. Penyampaian usulan perpindahan jabatan pelaksana 3. Proses pengusulan uji kompetensi jabatan fungsional 4. Perkembangan proses u	0,00	848.000,00	258.958.268,00
02-02-2024	00303/KW/723014/2024	Melakukan konsultasi permasalahan kepegawaian : 1. Angka Kredit (AK) integrasi bagi dosen dpk 2. Penyampaian usulan perpindahan jabatan pelaksana 3. Proses pengusulan uji kompetensi jabatan fungsional 4. Perkembangan proses u	0,00	848.000,00	258.110.268,00
02-02-2024	00322/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Januari 2024	0,00	736.000,00	257.374.268,00
02-02-2024	00321/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Januari 2024	0,00	736.000,00	256.638.268,00
02-02-2024	00323/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Januari 2024	0,00	736.000,00	255.902.268,00
02-02-2024	00326/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari 2024	0,00	680.000,00	255.222.268,00
02-02-2024	00324/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari 2024	0,00	680.000,00	254.542.268,00
02-02-2024	00325/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari 2024	0,00	680.000,00	253.862.268,00
02-02-2024	00309/KW/723014/2024	FGD Pendirian Prodi Teknik atau Teknologi Rekayasa Perairan Politeknik Harapan Bersama	0,00	592.000,00	253.270.268,00
02-02-2024	00313/KW/723014/2024	Wisuda Akademi Pelayaran Nasional Surakarta Ke XVII	0,00	503.500,00	252.766.768,00
02-02-2024	00315/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Perjadin H 9507 CG acara FGD Pendirian Prodi Teknik atau Teknologi Rekayasa Perairan Politeknik Harapan Bersama dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan M	0,00	300.000,00	252.466.768,00
02-02-2024	00312/KW/723014/2024	Wisuda Akademi Pelayaran Nasional Surakarta Ke XVII	0,00	296.000,00	252.170.768,00
02-02-2024	00328/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari 2024	0,00	272.000,00	251.898.768,00
02-02-2024	00327/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan	0,00	272.000,00	251.626.768,00

1	2	3	4	5	6
		Januari 2024			
02-02-2024	00308/KW/723014/2024	Sosialisasi Implmentasi NPWP 16 Digit	0,00	170.000,00	251.456.768,00
02-02-2024	00307/KW/723014/2024	Sosialisasi Implmentasi NPWP 16 Digit	0,00	170.000,00	251.286.768,00
02-02-2024	00314/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Pelet Ikan, Udang beku, dan lain-lain	0,00	70.000,00	251.216.768,00
06-02-2024	00069/BP/723014/2024	Pungut Pajak	357.175,00	0,00	251.573.943,00
06-02-2024	00070/BP/723014/2024	Pungut Pajak	5.000,00	0,00	251.578.943,00
06-02-2024	00344/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Februari 2024 ID Pel : 523011392634	0,00	18.705.000,00	232.873.943,00
06-02-2024	00343/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Februari 2024 ID Pel : 523012307734	0,00	5.304.700,00	227.569.243,00
06-02-2024	00340/KW/723014/2024	Langganan Zoom Bulan Januari 2024	0,00	3.796.398,00	223.772.845,00
06-02-2024	00352/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Perbaikan CCTV dan Instalasi Telepon	0,00	3.049.725,00	220.723.120,00
06-02-2024	00332/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Pemeliharaan Server LLDIKTI VI Tanggal 29/01/2024 s.d 30/01/2024 PT. Cybertechtonic Pratama Jl. Kuningan Bar. 1 No.26 Suite 104, RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta	0,00	2.565.000,00	218.158.120,00
06-02-2024	00351/KW/723014/2024	BPJS Ketenagakerjaan PPNPN Tagihan Januari	0,00	2.225.880,00	215.932.240,00
06-02-2024	00329/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Penyusunan Rancangan Awal Renja K/T TA 2025 Tanggal 01/02/2024 s.d 03/02/2024 Sari Pacific Jakarta, Autograph Collection Jl. M.H. Thamrin No.6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jak	0,00	2.170.000,00	213.762.240,00
06-02-2024	00333/KW/723014/2024	Pemeliharaan Server LLDIKTI VI	0,00	1.387.000,00	212.375.240,00
06-02-2024	00334/KW/723014/2024	Pemeliharaan Server LLDIKTI VI	0,00	1.230.000,00	211.145.240,00
06-02-2024	00335/KW/723014/2024	Pemeliharaan Server LLDIKTI VI	0,00	1.060.000,00	210.085.240,00

1	2	3	4	5	6
06-02-2024	00342/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Februari 2024 ID Pel : 523013280785	0,00	1.026.516,00	209.058.724,00
06-02-2024	00049/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	988.000,00	208.070.724,00
06-02-2024	00330/KW/723014/2024	Penyusunan Rancangan Awal Renja K/T TA 2025	0,00	790.000,00	207.280.724,00
06-02-2024	00331/KW/723014/2024	Penyusunan Rancangan Awal Renja K/T TA 2025	0,00	710.000,00	206.570.724,00
06-02-2024	00338/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Perjadin H 9507 CG acara Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Program Studi Obstretik dan Ginekologi, Neurologi, dan Bedah Program Spesialis Universitas Jenderal S	0,00	494.172,00	206.076.552,00
06-02-2024	00048/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	420.000,00	205.656.552,00
06-02-2024	00336/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas H 9507 CG dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	400.000,00	205.256.552,00
06-02-2024	00341/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Februari 2024 ID Pel : 523013044430	0,00	396.000,00	204.860.552,00
06-02-2024	00039/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	225.000,00	204.635.552,00
06-02-2024	00040/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	225.000,00	204.410.552,00
06-02-2024	00349/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Februari 2024 No Telp 0248317281	0,00	217.732,00	204.192.820,00
06-02-2024	00050/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	210.000,00	203.982.820,00
06-02-2024	00051/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	203.802.820,00
06-02-2024	00052/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	203.622.820,00
06-02-2024	00055/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	128.623,00	203.494.197,00

1	2	3	4	5	6
06-02-2024	00353/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembuatan Ex Banner	0,00	125.000,00	203.369.197,00
06-02-2024	00339/KW/723014/2024	Biaya Pengiriman Surat Dinas bulan Januari 2024	0,00	102.000,00	203.267.197,00
06-02-2024	00337/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Operasional TU H 1578 XG dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	100.000,00	203.167.197,00
06-02-2024	00046/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	90.000,00	203.077.197,00
06-02-2024	00047/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	90.000,00	202.987.197,00
06-02-2024	00045/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	90.000,00	202.897.197,00
06-02-2024	00348/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Februari 2024 No Telp 0248311521	0,00	72.000,00	202.825.197,00
06-02-2024	00037/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	67.500,00	202.757.697,00
06-02-2024	00002/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	67.500,00	202.690.197,00
06-02-2024	00041/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	67.500,00	202.622.697,00
06-02-2024	00054/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	64.240,00	202.558.457,00
06-02-2024	00003/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	60.000,00	202.498.457,00
06-02-2024	00042/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	60.000,00	202.438.457,00
06-02-2024	00347/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Februari 2024 No Telp 0248311273	0,00	59.221,00	202.379.236,00
06-02-2024	00346/KW/723014/2024	Tagihan Kartu Halo bulan Februari 2024 No Telp 08112690267	0,00	58.000,00	202.321.236,00
06-02-2024	00021/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	45.000,00	202.276.236,00
06-02-2024	00025/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	45.000,00	202.231.236,00

1	2	3	4	5	6
06-02-2024	00022/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	45.000,00	202.186.236,00
06-02-2024	00350/KW/723014/2024	Telepon bulan Februari 2024 No Telp 0248449458	0,00	39.907,00	202.146.329,00
06-02-2024	00345/KW/723014/2024	Tagihan Telepon Bulan Februari 2024 No 08112558011	0,00	30.250,00	202.116.079,00
06-02-2024	00053/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	21.900,00	202.094.179,00
06-02-2024	00038/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	20.000,00	202.074.179,00
06-02-2024	00034/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	17.708,00	202.056.471,00
06-02-2024	00027/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	202.041.471,00
06-02-2024	00030/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	202.026.471,00
06-02-2024	00031/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	202.011.471,00
06-02-2024	00010/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	201.996.471,00
06-02-2024	00020/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.981.471,00
06-02-2024	00026/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.966.471,00
06-02-2024	00044/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.951.471,00
06-02-2024	00015/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	201.936.471,00
06-02-2024	00029/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.921.471,00
06-02-2024	00036/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.906.471,00
06-02-2024	00009/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	201.891.471,00
06-02-2024	00004/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.876.471,00
06-02-2024	00043/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.861.471,00

1	2	3	4	5	6
06-02-2024	00019/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.846.471,00
06-02-2024	00005/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.831.471,00
06-02-2024	00006/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.816.471,00
06-02-2024	00007/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.801.471,00
06-02-2024	00011/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.786.471,00
06-02-2024	00035/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.771.471,00
06-02-2024	00012/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	201.756.471,00
06-02-2024	00008/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.741.471,00
06-02-2024	00028/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.726.471,00
06-02-2024	00013/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	201.711.471,00
06-02-2024	00014/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	201.696.471,00
06-02-2024	00016/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.681.471,00
06-02-2024	00018/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.666.471,00
06-02-2024	00023/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.651.471,00
06-02-2024	00032/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.636.471,00
06-02-2024	00017/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.621.471,00
06-02-2024	00024/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	201.606.471,00
06-02-2024	00033/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	6.813,00	201.599.658,00
06-02-2024	00001/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	3.333,00	201.596.325,00

1	2	3	4	5	6
07-02-2024	FPK-PENG-1uJYQGAPpCNsITK	SPM GUP KKP No 00080T/723014/2024	41.956.729,00	0,00	243.553.054,00
07-02-2024	FPK-PENG-muuujJTYboNDeEJ	SPM GUP KKP No 00079T/723014/2024	3.962.295,00	0,00	247.515.349,00
07-02-2024	00086/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	247.650.349,00
07-02-2024	00089/BP/723014/2024	Pungut Pajak	74.490,00	74.490,00	247.650.349,00
07-02-2024	00085/BP/723014/2024	Pungut Pajak	67.500,00	0,00	247.717.849,00
07-02-2024	00071/BP/723014/2024	pungut pajak	60.000,00	0,00	247.777.849,00
07-02-2024	00090/BP/723014/2024	Pungut Pajak	50.000,00	50.000,00	247.777.849,00
07-02-2024	00073/BP/723014/2024	Pungut Pajak	45.000,00	0,00	247.822.849,00
07-02-2024	00093/BP/723014/2024	Pungut Pajak	37.758,00	37.758,00	247.822.849,00
07-02-2024	00080/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.837.849,00
07-02-2024	00076/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.852.849,00
07-02-2024	00079/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.867.849,00
07-02-2024	00078/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.882.849,00
07-02-2024	00072/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.897.849,00
07-02-2024	00084/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.912.849,00
07-02-2024	00083/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.927.849,00
07-02-2024	00082/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.942.849,00
07-02-2024	00075/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.957.849,00
07-02-2024	00081/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.972.849,00
07-02-2024	00074/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	247.987.849,00
07-02-2024	00077/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	248.002.849,00
07-02-2024	00087/BP/723014/2024	Pungut Pajak	12.735,00	12.735,00	248.002.849,00
07-02-2024	00091/BP/723014/2024	Pungut Pajak	4.592,00	4.592,00	248.002.849,00
07-02-2024	00088/BP/723014/2024	Pungut Pajak	4.245,00	4.245,00	248.002.849,00
07-02-2024	00092/BP/723014/2024	Pungut Pajak	2.908,00	2.908,00	248.002.849,00

1	2	3	4	5	6
07-02-2024	00373/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	450.000,00	247.552.849,00
07-02-2024	00354/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Ketua dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	400.000,00	247.152.849,00
07-02-2024	00368/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	246.852.849,00
07-02-2024	00366/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	246.552.849,00
07-02-2024	00356/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	246.252.849,00
07-02-2024	00355/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	245.952.849,00
07-02-2024	00365/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	245.652.849,00
07-02-2024	00364/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	245.352.849,00
07-02-2024	00361/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	245.052.849,00
07-02-2024	00363/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	244.752.849,00
07-02-2024	00372/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	244.452.849,00
07-02-2024	00370/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	244.152.849,00
07-02-2024	00357/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	243.852.849,00

1	2	3	4	5	6
07-02-2024	00369/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	243.552.849,00
07-02-2024	00360/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	243.252.849,00
07-02-2024	00371/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	242.952.849,00
07-02-2024	00367/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	242.652.849,00
07-02-2024	00362/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	242.352.849,00
07-02-2024	00359/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	242.052.849,00
07-02-2024	00358/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	300.000,00	241.752.849,00
07-02-2024	00394/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	241.487.849,00
07-02-2024	00391/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	241.222.849,00
07-02-2024	00376/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	240.957.849,00
07-02-2024	00382/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	240.692.849,00
07-02-2024	00390/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	240.427.849,00
07-02-2024	00377/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	240.162.849,00
07-02-2024	00380/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	239.897.849,00
07-02-2024	00387/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	239.632.849,00
07-02-2024	00383/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	239.367.849,00

1	2	3	4	5	6
07-02-2024	00385/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	239.102.849,00
07-02-2024	00384/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	238.837.849,00
07-02-2024	00375/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	238.572.849,00
07-02-2024	00386/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	238.307.849,00
07-02-2024	00388/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	238.042.849,00
07-02-2024	00389/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	237.777.849,00
07-02-2024	00381/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	265.000,00	237.512.849,00
07-02-2024	00393/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	170.000,00	237.342.849,00
07-02-2024	00392/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	95.000,00	237.247.849,00
07-02-2024	00379/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	95.000,00	237.152.849,00
07-02-2024	00378/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi Melalui PDDIKTI	0,00	95.000,00	237.057.849,00
12-02-2024	FPK-PENG-RQUaPuanViStiw1	Tagihan KKP No : 4895940300048201 SUTO SUGIRAHARJO	0,00	22.221.880,00	214.835.969,00
12-02-2024	FPK-PENG-uRAFpTGQsa2vwxo	Tagihan KKP No : 4340750300084580 SITI NURUL JANNAH	0,00	5.824.000,00	209.011.969,00
12-02-2024	FPK-PENG-FHotQA5dPEDS3VT	Tagihan KKP No : 4340750300084606 AGUNG PRASETYO	0,00	3.962.295,00	205.049.674,00
12-02-2024	FPK-PENG-IkoXe981TW2SrZS	Tagihan KKP No : 4340750300084655 SRI HARTONO	0,00	3.834.000,00	201.215.674,00
12-02-2024	FPK-PENG-7zT578LO03dOAQJ	Tagihan KKP No : 4340750300084549 NATANAEL PRIHASTOMO	0,00	3.802.684,00	197.412.990,00
12-02-2024	FPK-PENG-f8N5IHbi66b4UK7	Tagihan KKP No : 4340750300084598 LIS SETYOWATI	0,00	3.547.254,00	193.865.736,00
12-02-2024	FPK-PENG-b07iYsmMFxuabYy	Tagihan KKP No : 4340750300084556 BHIMO WIDYO ANDOKO	0,00	1.530.183,00	192.335.553,00
12-02-2024	FPK-PENG-NnOXMuN3nw2nUD4	Tagihan KKP No : 4340750300085108 ADHRIAL REFADDIN	0,00	1.000.000,00	191.335.553,00

1	2	3	4	5	6
12-02-2024	00058/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	74.490,00	191.261.063,00
12-02-2024	00059/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	50.000,00	191.211.063,00
12-02-2024	00062/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	37.758,00	191.173.305,00
12-02-2024	00056/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	12.735,00	191.160.570,00
12-02-2024	FPK-PENG-oHtUJFXapMq5Znd	Tagihan KKP No : 4340750300084614 NOVIA FITRIANA	0,00	10.000,00	191.150.570,00
12-02-2024	00060/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	4.592,00	191.145.978,00
12-02-2024	00057/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	4.245,00	191.141.733,00
12-02-2024	00061/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	2.908,00	191.138.825,00
13-02-2024	00097/BP/723014/2024	pungut pajak	456.000,00	0,00	191.594.825,00
13-02-2024	00115/BP/723014/2024	Pungut Pajak	390.000,00	0,00	191.984.825,00
13-02-2024	00096/BP/723014/2024	Pungut Pajak	356.036,00	0,00	192.340.861,00
13-02-2024	00106/BP/723014/2024	pungut pajak	270.000,00	0,00	192.610.861,00
13-02-2024	00113/BP/723014/2024	pungut pajak	225.000,00	0,00	192.835.861,00
13-02-2024	00114/BP/723014/2024	pungut pajak	225.000,00	0,00	193.060.861,00
13-02-2024	00108/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	193.195.861,00
13-02-2024	00107/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	193.330.861,00
13-02-2024	00109/BP/723014/2024	pungut pajak	67.500,00	0,00	193.398.361,00
13-02-2024	00110/BP/723014/2024	pungut pajak	20.000,00	0,00	193.418.361,00
13-02-2024	00099/BP/723014/2024	Pungut pajak	17.540,00	0,00	193.435.901,00
13-02-2024	00102/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	193.450.901,00
13-02-2024	00112/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	193.465.901,00
13-02-2024	00101/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	193.480.901,00
13-02-2024	00111/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	193.495.901,00

1	2	3	4	5	6
13-02-2024	00094/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	193.510.901,00
13-02-2024	00105/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	193.525.901,00
13-02-2024	00100/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	193.540.901,00
13-02-2024	00104/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	193.555.901,00
13-02-2024	00103/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	193.570.901,00
13-02-2024	00095/BP/723014/2024	pungut pajak	14.583,00	0,00	193.585.484,00
13-02-2024	00098/BP/723014/2024	pungut pajak	6.400,00	0,00	193.591.884,00
13-02-2024	00476/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullboard bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	19.500.000,00	174.091.884,00
13-02-2024	00409/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Makan) dalam rangka SOSIALISASI PENINGKATAN KETERWAKILAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN tgl 19 Jan 2024	0,00	11.400.000,00	162.691.884,00
13-02-2024	00454/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	5.400.000,00	157.291.884,00
13-02-2024	00475/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	4.500.000,00	152.791.884,00
13-02-2024	00474/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	4.500.000,00	148.291.884,00
13-02-2024	00408/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Snack) dalam rangka SOSIALISASI PENINGKATAN KETERWAKILAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN tgl 19 Jan 2024	0,00	3.040.000,00	145.251.884,00
13-02-2024	00455/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	142.551.884,00
13-02-2024	00477/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti	0,00	2.700.000,00	139.851.884,00
13-02-2024	00456/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	137.151.884,00

1	2	3	4	5	6
13-02-2024	00457/KW/723014/2024	Biaya Transportasi dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	1.620.000,00	135.531.884,00
13-02-2024	00411/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	134.001.884,00
13-02-2024	00412/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	132.471.884,00
13-02-2024	00407/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L TA 2025 Tanggal 01/02/2024 s.d 03/02/2024 Sari Pacific Jakarta Hotel Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat PERJADIN 49/LL6/PR.07.04/2024	0,00	1.284.364,00	131.187.520,00
13-02-2024	00399/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP tahun 2023 Bagi Pengelola Kepegawaian PT Area Karanganyar	0,00	966.016,00	130.221.504,00
13-02-2024	00467/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	782.000,00	129.439.504,00
13-02-2024	00460/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	776.000,00	128.663.504,00
13-02-2024	00462/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	127.933.504,00
13-02-2024	00461/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	127.203.504,00
13-02-2024	00464/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	126.473.504,00
13-02-2024	00465/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	125.743.504,00
13-02-2024	00463/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	125.013.504,00

1	2	3	4	5	6
13-02-2024	00459/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	124.283.504,00
13-02-2024	00458/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	123.553.504,00
13-02-2024	00466/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	723.200,00	122.830.304,00
13-02-2024	00480/KW/723014/2024	Uang Lembur bulan Januari 2024	0,00	687.000,00	122.143.304,00
13-02-2024	00410/KW/723014/2024	Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L TA 2025	0,00	586.600,00	121.556.704,00
13-02-2024	00469/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	543.100,00	121.013.604,00
13-02-2024	00415/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Aqua Galon, Isi Ulang, Aqua Botol 330 ml, dan Aqua Cup	0,00	507.000,00	120.506.604,00
13-02-2024	00413/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Kendaraan Dinas H 1034 XG melayani Biro Ortala Kemdikbudristek dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	500.000,00	120.006.604,00
13-02-2024	00470/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	450.000,00	119.556.604,00
13-02-2024	00405/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP Tahun 2023 bagi Pengelola Kepegawaian PTS LLDIKTI Wilayah VI Area Purworejo	0,00	446.000,00	119.110.604,00
13-02-2024	00417/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Kabel RCA Biru dan Kabel Jack	0,00	438.500,00	118.672.104,00
13-02-2024	00427/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	118.242.104,00
13-02-2024	00435/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	117.812.104,00
13-02-2024	00437/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	117.382.104,00
13-02-2024	00439/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	116.952.104,00
13-02-2024	00420/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	116.522.104,00

1	2	3	4	5	6
13-02-2024	00429/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	116.092.104,00
13-02-2024	00433/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	115.662.104,00
13-02-2024	00421/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	115.232.104,00
13-02-2024	00426/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	114.802.104,00
13-02-2024	00434/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	114.372.104,00
13-02-2024	00436/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	113.942.104,00
13-02-2024	00422/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	113.512.104,00
13-02-2024	00431/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	113.082.104,00
13-02-2024	00425/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	112.652.104,00
13-02-2024	00432/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	112.222.104,00
13-02-2024	00430/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	111.792.104,00
13-02-2024	00440/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	111.362.104,00
13-02-2024	00423/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	110.932.104,00
13-02-2024	00428/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	110.502.104,00
13-02-2024	00418/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	110.072.104,00
13-02-2024	00419/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	430.000,00	109.642.104,00
13-02-2024	00438/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	410.000,00	109.232.104,00
13-02-2024	00471/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	400.000,00	108.832.104,00
13-02-2024	00404/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP Tahun 2023 bagi Pengelola Kepegawaian PTS LLDIKTI Wilayah VI Area Purworejo	0,00	391.000,00	108.441.104,00
13-02-2024	00403/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP Tahun 2023 bagi Pengelola Kepegawaian PTS LLDIKTI Wilayah VI Area Purworejo	0,00	391.000,00	108.050.104,00
13-02-2024	00395/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP tahun 2023 Bagi Pengelola Kepegawaian PT Area Karanganyar	0,00	391.000,00	107.659.104,00
13-02-2024	00401/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP Tahun 2023 bagi Pengelola Kepegawaian PTS LLDIKTI Wilayah VI Area Purworejo	0,00	391.000,00	107.268.104,00

1	2	3	4	5	6
13-02-2024	00402/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP Tahun 2023 bagi Pengelola Kepegawaian PTS LLDIKTI Wilayah VI Area Purworejo	0,00	391.000,00	106.877.104,00
13-02-2024	00396/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP tahun 2023 Bagi Pengelola Kepegawaian PT Area Karanganyar	0,00	391.000,00	106.486.104,00
13-02-2024	00400/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP Tahun 2023 bagi Pengelola Kepegawaian PTS LLDIKTI Wilayah VI Area Purworejo	0,00	391.000,00	106.095.104,00
13-02-2024	00406/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor - Perbaikan Brankas	0,00	364.583,00	105.730.521,00
13-02-2024	00448/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	105.430.521,00
13-02-2024	00445/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	105.130.521,00
13-02-2024	00446/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	104.830.521,00
13-02-2024	00473/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	300.000,00	104.530.521,00
13-02-2024	00453/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	104.230.521,00
13-02-2024	00450/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	103.930.521,00
13-02-2024	00414/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Operasional TU H 1034 XG dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	300.000,00	103.630.521,00
13-02-2024	00472/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	300.000,00	103.330.521,00

1	2	3	4	5	6
13-02-2024	00452/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	103.030.521,00
13-02-2024	00451/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	102.730.521,00
13-02-2024	00449/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	102.430.521,00
13-02-2024	00447/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	102.130.521,00
13-02-2024	00444/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Linkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	101.830.521,00
13-02-2024	00424/KW/723014/2024	FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	260.000,00	101.570.521,00
13-02-2024	00442/KW/723014/2024	Senam pagi di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	170.000,00	101.400.521,00
13-02-2024	00443/KW/723014/2024	Senam pagi di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	170.000,00	101.230.521,00
13-02-2024	00468/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	163.200,00	101.067.321,00
13-02-2024	00479/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Perbaikan Jaringan Automatis Pomp Air dan Perbaikan Water Hiater Guest House	0,00	160.000,00	100.907.321,00
13-02-2024	00478/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Saklar dan lain-lain	0,00	89.000,00	100.818.321,00
15-02-2024	00398/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP tahun 2023 Bagi Pengelola Kepegawaian PT Area Karanganyar	0,00	391.000,00	100.427.321,00
15-02-2024	00397/KW/723014/2024	Pendampingan Penyelesaian Pelaporan SKP tahun 2023 Bagi Pengelola Kepegawaian PT	0,00	391.000,00	100.036.321,00

1	2	3	4	5	6
		Area Karanganyar			
16-02-2024	FPK-PENG-HVAAebDzUcitF9t	SPM GUP	111.916.366,00	0,00	211.952.687,00
16-02-2024	FPK-PENG-KJb5cZJwRxmYf5o	SPM GUP	91.121.948,00	0,00	303.074.635,00
19-02-2024	00116/BP/723014/2024	Pungut Pajak	640.000,00	0,00	303.714.635,00
19-02-2024	00493/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullday dalam rangka kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	32.000.000,00	271.714.635,00
19-02-2024	00489/KW/723014/2024	1. Wisuda Universitas Safin Pati 2. Penyerahan SK Guru Besar an Dr. M.I. Retno Susilorini, S.T., M.T. Universitas Pancasakti Tegal	0,00	1.778.000,00	269.936.635,00
19-02-2024	00487/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, 1. Wisuda Universitas Safin Pati 2. Penyerahan SK Guru Besar an Dr. M.I. Retno Susilorini, S.T., M.T. Universitas Pancasakti Tegal Tanggal 04/02/2024 s.d 06/02/2024 1. Hotel Safin Pati 2. Univer	0,00	1.208.000,00	268.728.635,00
19-02-2024	00483/KW/723014/2024	Sosialisasi mengenai Usul Perubahan atau Penetapan Badan Penyelenggara PTS dan Panduan APPP PTS Tahun 2024	0,00	1.205.500,00	267.523.135,00
19-02-2024	00492/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Penyelenggaraan Program Studi Obstetrik dan Ginekologi, Neurologi dan Bedah Program Spesialis - UNSOED	0,00	1.029.000,00	266.494.135,00
19-02-2024	00486/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, 1. Wisuda Universitas Safin Pati 2. Penyerahan SK Guru Besar an Dr. M.I. Retno Susilorini, S.T., M.T. Universitas Pancasakti Tegal Tanggal 04/02/2024 s.d 06/02/2024 1. Hotel Safin Pati 2. Univer	0,00	1.010.000,00	265.484.135,00
19-02-2024	00485/KW/723014/2024	Persiapan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara UAPB Eselon I Sekretaria Jenderal Tahun Anggaran 2023	0,00	889.500,00	264.594.635,00
19-02-2024	00491/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Penyelenggaraan Program Studi Obstetrik dan Ginekologi, Neurologi dan Bedah Program Spesialis - UNSOED	0,00	888.000,00	263.706.635,00

1	2	3	4	5	6
19-02-2024	00488/KW/723014/2024	1. Wisuda Universitas Safin Pati 2. Penyerahan SK Guru Besar an Dr. M.I. Retno Susilorini, S.T., M.T. Universitas Pancasakti Tegal	0,00	888.000,00	262.818.635,00
19-02-2024	00490/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Penyelenggaraan Program Studi Obstetrik dan Ginekologi, Neurologi dan Bedah Program Spesialis - UNSOED	0,00	888.000,00	261.930.635,00
19-02-2024	00482/KW/723014/2024	Sosialisasi mengenai Usul Perubahan atau Penetapan Badan Penyelenggara PTS dan Panduan APPP PTS Tahun 2024	0,00	848.000,00	261.082.635,00
19-02-2024	00065/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	564.000,00	260.518.635,00
19-02-2024	00100/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	456.000,00	260.062.635,00
19-02-2024	00494/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	259.632.635,00
19-02-2024	00497/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	259.202.635,00
19-02-2024	00495/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	258.772.635,00
19-02-2024	00496/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	258.342.635,00
19-02-2024	00498/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	257.912.635,00
19-02-2024	00118/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	390.000,00	257.522.635,00
19-02-2024	00500/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	380.691,00	257.141.944,00
19-02-2024	00484/KW/723014/2024	Sosialisasi mengenai Usul Perubahan atau Penetapan Badan Penyelenggara PTS dan Panduan APPP PTS Tahun 2024	0,00	360.000,00	256.781.944,00
19-02-2024	00066/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	317.400,00	256.464.544,00
19-02-2024	00067/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	307.800,00	256.156.744,00
19-02-2024	00077/SSP/723014/2024	PPN	0,00	302.225,00	255.854.519,00
19-02-2024	00098/SSP/723014/202	PPN	0,00	301.261,00	255.553.258,00

1	2	3	4	5	6
	4				
19-02-2024	00063/SSP/723014/2024	PPN	0,00	277.032,00	255.276.226,00
19-02-2024	00109/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	270.000,00	255.006.226,00
19-02-2024	00117/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	225.000,00	254.781.226,00
19-02-2024	00116/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	225.000,00	254.556.226,00
19-02-2024	00499/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	190.000,00	254.366.226,00
19-02-2024	00096/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	254.231.226,00
19-02-2024	00111/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	254.096.226,00
19-02-2024	00110/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	253.961.226,00
19-02-2024	00112/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	253.893.726,00
19-02-2024	00095/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	253.826.226,00
19-02-2024	00481/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Cuci Mobil Kendaraan Dinas Kepala H 73 dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	60.000,00	253.766.226,00
19-02-2024	00080/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	60.000,00	253.706.226,00
19-02-2024	00068/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	56.600,00	253.649.626,00
19-02-2024	00078/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	54.950,00	253.594.676,00
19-02-2024	00099/SSP/723014/2024	PPH 22	0,00	54.775,00	253.539.901,00
19-02-2024	00064/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	50.369,00	253.489.532,00
19-02-2024	00069/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	49.400,00	253.440.132,00

1	2	3	4	5	6
19-02-2024	00082/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	45.000,00	253.395.132,00
19-02-2024	00071/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	36.800,00	253.358.332,00
19-02-2024	00070/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	36.800,00	253.321.532,00
19-02-2024	00072/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	253.287.532,00
19-02-2024	00073/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	253.253.532,00
19-02-2024	00074/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	253.219.532,00
19-02-2024	00113/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	253.199.532,00
19-02-2024	00102/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	17.540,00	253.181.992,00
19-02-2024	00105/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.166.992,00
19-02-2024	00107/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.151.992,00
19-02-2024	00086/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.136.992,00
19-02-2024	00087/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.121.992,00
19-02-2024	00089/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.106.992,00
19-02-2024	00092/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.091.992,00
19-02-2024	00090/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.076.992,00
19-02-2024	00085/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.061.992,00
19-02-2024	00083/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.046.992,00
19-02-2024	00114/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.031.992,00
19-02-2024	00106/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.016.992,00

1	2	3	4	5	6
19-02-2024	00103/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	253.001.992,00
19-02-2024	00088/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	252.986.992,00
19-02-2024	00094/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	252.971.992,00
19-02-2024	00108/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	252.956.992,00
19-02-2024	00093/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	252.941.992,00
19-02-2024	00091/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	252.926.992,00
19-02-2024	00104/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	252.911.992,00
19-02-2024	00081/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	252.896.992,00
19-02-2024	00084/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	252.881.992,00
19-02-2024	00097/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	14.583,00	252.867.409,00
19-02-2024	00076/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	13.600,00	252.853.809,00
19-02-2024	00075/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	13.600,00	252.840.209,00
19-02-2024	00101/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	6.400,00	252.833.809,00
19-02-2024	00079/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	5.000,00	252.828.809,00
20-02-2024	FPK-PENG-5RhyxedZueDupLb	LS BP UM JANUARI 2024	2.132.450,00	0,00	254.961.259,00
21-02-2024	00118/BP/723014/2024	Pungut Pajak	2.567.188,00	0,00	257.528.447,00
21-02-2024	00117/BP/723014/2024	Pungut Pajak	1.667,00	0,00	257.530.114,00
21-02-2024	00523/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman berupa Pekerjaan Pemasangan Kabel Tray Dan Instalasi Kabel Sound Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	21.919.836,00	235.610.278,00
21-02-2024	00002/KWTI/723014/20	uang makan bulan Januari 24	0,00	1.540.000,00	234.070.278,00

1	2	3	4	5	6
	24				
21-02-2024	00001/KWTI/723014/2024	uang makan bulan Januari 24	0,00	592.450,00	233.477.828,00
21-02-2024	00524/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari - Biaya Jilid Laporan BMN	0,00	575.500,00	232.902.328,00
21-02-2024	00525/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Aqua Galon, Isi Ulang, Aqua 330ml, dan Aqua Cup	0,00	519.000,00	232.383.328,00
21-02-2024	00502/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI WIlayah VI berupa pembelian materai	0,00	500.000,00	231.883.328,00
21-02-2024	00508/KW/723014/2024	Tinjau Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	480.000,00	231.403.328,00
21-02-2024	00503/KW/723014/2024	Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur - NON PNS LLDIKTI Wilayah VI Periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024	0,00	316.000,00	231.087.328,00
21-02-2024	00509/KW/723014/2024	Tinjau Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	296.000,00	230.791.328,00
21-02-2024	00510/KW/723014/2024	Tinjau Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	296.000,00	230.495.328,00
21-02-2024	00511/KW/723014/2024	Tinjau Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	296.000,00	230.199.328,00
21-02-2024	00507/KW/723014/2024	Tinjau Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	296.000,00	229.903.328,00
21-02-2024	00505/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Senar Mesin Potong Rumput	0,00	255.000,00	229.648.328,00
21-02-2024	00504/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Grendel dan Silinder Pintu	0,00	145.000,00	229.503.328,00
21-02-2024	00501/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembuatan 5 ID Card	0,00	41.667,00	229.461.661,00
21-02-2024	00506/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Operasional Kendaraan DInas H 6174 XG dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	30.000,00	229.431.661,00
21-02-2024	00115/SSP/723014/202	PPH 21	0,00	15.000,00	229.416.661,00

1	2	3	4	5	6
	4				
22-02-2024	00119/BP/723014/2024	Pungut Pajak	731.982,00	0,00	230.148.643,00
22-02-2024	00533/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Perbaikan Lantai Rumah Dinas dan Gedung E & Perbaikan Rel Gorden Gedung F	0,00	6.250.000,00	223.898.643,00
22-02-2024	00531/KW/723014/2024	Cetak dan jilid Laporan Keuangan TA 2023 Unaudited	0,00	583.750,00	223.314.893,00
22-02-2024	00528/KW/723014/2024	Menghadiri undangan Pendampingan Percepatan jabatan Fungsional Dosen UNIKA Soegijapranata	0,00	320.000,00	222.994.893,00
22-02-2024	00530/KW/723014/2024	Menghadiri undangan Pendampingan Percepatan jabatan Fungsional Dosen UNIKA Soegijapranata	0,00	320.000,00	222.674.893,00
22-02-2024	00529/KW/723014/2024	Menghadiri undangan Pendampingan Percepatan jabatan Fungsional Dosen UNIKA Soegijapranata	0,00	320.000,00	222.354.893,00
22-02-2024	00527/KW/723014/2024	Menghadiri Pengukuhan Profesor Prof. Dr. Helmy Purwanto, Universitas Wahid Hasyim	0,00	170.000,00	222.184.893,00
22-02-2024	00532/KW/723014/2024	Jilid laporan kegiatan Keuangan	0,00	52.500,00	222.132.393,00
26-02-2024	00134/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	780.000,00	0,00	222.912.393,00
26-02-2024	00124/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	270.000,00	0,00	223.182.393,00
26-02-2024	00125/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	270.000,00	0,00	223.452.393,00
26-02-2024	00133/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	180.000,00	0,00	223.632.393,00
26-02-2024	00120/BP/723014/2024	Pungut Pajak	67.500,00	0,00	223.699.893,00
26-02-2024	00135/BP/723014/2024	Pungut pajak	20.000,00	0,00	223.719.893,00
26-02-2024	00122/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	223.734.893,00
26-02-2024	00126/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	223.749.893,00
26-02-2024	00129/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	223.764.893,00
26-02-2024	00123/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	223.779.893,00
26-02-2024	00132/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	223.794.893,00
26-02-2024	00131/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	223.809.893,00

1	2	3	4	5	6
26-02-2024	00130/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	223.824.893,00
26-02-2024	00128/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	223.839.893,00
26-02-2024	00127/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	223.854.893,00
26-02-2024	00549/KW/723014/2024	Paket meeting fullboard Bimbingan Teknis IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	39.000.000,00	184.854.893,00
26-02-2024	00534/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Dinas dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di	0,00	9.300.000,00	175.554.893,00
26-02-2024	00608/KW/723014/2024	Uang Lembur Non PNS Bulan Februari 2024	0,00	2.388.000,00	173.166.893,00
26-02-2024	00535/KW/723014/2024	Biaya Transportasi dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di	0,00	1.700.000,00	171.466.893,00
26-02-2024	00555/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 dengan tema Berpacu dalam Mutu, Bersinergi Membangun Negeriâ€	0,00	1.272.000,00	170.194.893,00
26-02-2024	00556/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 dengan tema Berpacu dalam Mutu, Bersinergi Membangun Negeriâ€	0,00	1.065.000,00	169.129.893,00
26-02-2024	00606/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	843.000,00	168.286.893,00
26-02-2024	00550/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	840.000,00	167.446.893,00
26-02-2024	00542/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	166.716.893,00
26-02-2024	00546/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	165.986.893,00
26-02-2024	00536/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	165.256.893,00

1	2	3	4	5	6
26-02-2024	00541/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	164.526.893,00
26-02-2024	00547/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	163.796.893,00
26-02-2024	00538/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	163.066.893,00
26-02-2024	00543/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	162.336.893,00
26-02-2024	00544/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	161.606.893,00
26-02-2024	00545/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	160.876.893,00
26-02-2024	00537/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	730.000,00	160.146.893,00
26-02-2024	00598/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	159.474.893,00
26-02-2024	00601/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	158.802.893,00
26-02-2024	00599/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	158.130.893,00
26-02-2024	00604/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	157.458.893,00
26-02-2024	00551/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	156.786.893,00
26-02-2024	00600/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	156.114.893,00
26-02-2024	00603/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	155.442.893,00
26-02-2024	00552/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	154.770.893,00

1	2	3	4	5	6
26-02-2024	00605/KW/723014/2024	Studi Tiru Terkait Pengelolaan Arsip	0,00	672.000,00	154.098.893,00
26-02-2024	00540/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	660.700,00	153.438.193,00
26-02-2024	00539/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	649.200,00	152.788.993,00
26-02-2024	00548/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	459.200,00	152.329.793,00
26-02-2024	00554/KW/723014/2024	Mengantar Kelengkapan Kekurangan Dokumen SPJ	0,00	397.000,00	151.932.793,00
26-02-2024	00607/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	300.000,00	151.632.793,00
26-02-2024	00553/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian MCB dan Obeng	0,00	71.000,00	151.561.793,00
27-02-2024	00559/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 dengan tema â€œBerpacu dalam Mutu, Bersinergi Membangun Negeriâ€ Tanggal 18/02/2024 s.d 20/02/2024 The Grand	0,00	6.132.000,00	145.429.793,00
27-02-2024	00577/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	4.500.000,00	140.929.793,00
27-02-2024	00576/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	4.500.000,00	136.429.793,00
27-02-2024	00597/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di	0,00	3.600.000,00	132.829.793,00
27-02-2024	00557/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 dengan tema Berpacu dalam Mutu,	0,00	2.119.000,00	130.710.793,00

1	2	3	4	5	6
		Bersinergi Membangun Negeriâ€			
27-02-2024	00560/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 dengan tema â€œBerpacu dalam Mutu, Bersinergi Membangun Negeriâ€ Tanggal 18/02/2024 s.d 20/02/2024 The Grand	0,00	1.440.000,00	129.270.793,00
27-02-2024	00565/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Kegiatan Temu Konsolidasi Kerja Sama Pendidikan Vokasi Tahun 2024 Tanggal 05/02/2024 s.d 07/02/2024 Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta PERJADIN 53/LL6/KS.00.01/2024	0,00	1.090.000,00	128.180.793,00
27-02-2024	00558/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 dengan tema Berpacu dalam Mutu, Bersinergi Membangun Negeriâ€	0,00	1.015.500,00	127.165.293,00
27-02-2024	00564/KW/723014/2024	Kegiatan Temu Konsolidasi Kerja Sama Pendidikan Vokasi Tahun 2024	0,00	958.500,00	126.206.793,00
27-02-2024	00563/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Tanggal 19/02/2024 s.d 20/02/2024 Atria Hotel M	0,00	675.000,00	125.531.793,00
27-02-2024	00561/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	592.000,00	124.939.793,00
27-02-2024	00571/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	450.000,00	124.489.793,00
27-02-2024	00562/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	446.000,00	124.043.793,00
27-02-2024	00579/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	123.613.793,00
27-02-2024	00580/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	123.183.793,00
27-02-2024	00582/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru &	0,00	430.000,00	122.753.793,00

1	2	3	4	5	6
		Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1			
27-02-2024	00583/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	122.323.793,00
27-02-2024	00581/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	121.893.793,00
27-02-2024	00572/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	400.000,00	121.493.793,00
27-02-2024	00568/KW/723014/2024	Pemeriksaan Administrasi Seleksi Tingkat Pusat penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024	0,00	320.000,00	121.173.793,00
27-02-2024	00567/KW/723014/2024	Pemeriksaan Administrasi Seleksi Tingkat Pusat penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024	0,00	320.000,00	120.853.793,00
27-02-2024	00566/KW/723014/2024	Pemeriksaan Administrasi Seleksi Tingkat Pusat penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024	0,00	320.000,00	120.533.793,00
27-02-2024	00569/KW/723014/2024	Pemeriksaan Administrasi Seleksi Tingkat Pusat penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2024	0,00	320.000,00	120.213.793,00
27-02-2024	00573/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	300.000,00	119.913.793,00
27-02-2024	00574/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	300.000,00	119.613.793,00
27-02-2024	00585/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	119.313.793,00
27-02-2024	00587/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	119.013.793,00
27-02-2024	00586/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI	0,00	300.000,00	118.713.793,00

1	2	3	4	5	6
		Wilayah VI Tahun 2024			
27-02-2024	00594/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	118.413.793,00
27-02-2024	00591/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	118.113.793,00
27-02-2024	00589/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	117.813.793,00
27-02-2024	00593/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	117.513.793,00
27-02-2024	00592/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	117.213.793,00
27-02-2024	00590/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	116.913.793,00
27-02-2024	00595/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	116.613.793,00
27-02-2024	00596/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	116.313.793,00
27-02-2024	00588/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan	0,00	300.000,00	116.013.793,00
27-02-2024	00584/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	170.000,00	115.843.793,00
27-02-2024	00578/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru &	0,00	170.000,00	115.673.793,00

1	2	3	4	5	6
		Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1			
27-02-2024	00570/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Tol dan Parkir Operasional Kendaraan Dinas H 9507 CG dalam rangka melayani BPK	0,00	24.500,00	115.649.293,00
29-02-2024	FPK-PENG-1L9l27CLCaJ7wkW	SPM GUP KKP 00118T/723014/2024	34.861.553,00	0,00	150.510.846,00
29-02-2024	FPK-PENG-mlCxyvGfGCyIk4i	SPM GUP KKP 00117T/723014/2024	13.935.000,00	0,00	164.445.846,00
29-02-2024	FPK-PENG-30CLMexpS8oCCXM	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	12.185.000,00	152.260.846,00
29-02-2024	00611/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	12.150.000,00	140.110.846,00
29-02-2024	00610/KW/723014/2024	Biaya Transfer	0,00	190.100,00	139.920.746,00
		Jumlah	**577.008.626,00**	**472.686.662,00**	**139.920.746,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : FEBRUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 0057101300000280

Nama Rekening : RPL 026 KS LLDIKTI W

Nama Bank : Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Januari 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : FEBRUARI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 1053003521

Nama Rekening : RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Januari 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198811132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 02-03-2024

Periode : 2024-02

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7A1912M2E89VKHL8 079737594992	411121	IDR	15,000	ADA
2	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	0500E0T7EJ5D8NAU 109879595067	411121	IDR	67,500	ADA
3	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4A41C2M2E89U46OD 115912594926	411121	IDR	15,000	ADA
4	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A035F1PKUDNRDPC 7 171900595078	411121	IDR	90,000	ADA
5	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	388F52M2E89VOCOK 182462594989	411121	IDR	45,000	ADA
6	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6BAF05BATO13TRFS 196055594952	411121	IDR	15,000	ADA
7	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CC4CC1PKUDNHF4U 6 214921594936	411121	IDR	15,000	ADA
8	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	53FBC1PKUDNHCC6 2 230907594914	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F3E11745TD62AP2R 255368595053	411121	IDR	20,000	ADA
10	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	603E467ODIJH27GI 269661595008	411121	IDR	45,000	ADA
11	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BE9591PKUDO7132F 271145595089	411124	IDR	420,000	ADA
12	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F452800PUOIQQREP 284722594982	411121	IDR	15,000	ADA
13	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E5E8800PUOIOVORI 287754594946	411121	IDR	15,000	ADA
14	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4369000PUOJH8Q4A 294224595119	411121	IDR	180,000	ADA
15	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	251E367ODIJG3E57 330521594965	411121	IDR	15,000	ADA
16	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CEE855BATO1CTIGB 357733595096	411121	IDR	90,000	ADA
17	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	141C42M2E8A7BF2N 358277595100	411121	IDR	15,000	ADA
18	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7BF575BATO13JJE1 360705594972	411121	IDR	15,000	ADA
19	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	147FB67ODIJLJOO0 362672595057	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3A5143IFU2SFVB3M 368182595023	411121	IDR	15,000	ADA
21	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AD3E64ETDTFEN4GD 376157595118	411124	IDR	64,240	ADA
22	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	014371PKUDNGQOLF 398943594910	411121	IDR	67,500	ADA
23	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9FD12745TD5UBTIH 419393595018	411121	IDR	15,000	ADA
24	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2600C5BATO1B5KHA 470909595046	411121	IDR	225,000	ADA
25	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	39C173IFU2SKC6U3 499246595082	411121	IDR	90,000	ADA
26	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	076E72M2E89TCB2T 523058594912	411121	IDR	15,000	ADA
27	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2E7942M2E89UVDS3 529052594967	411121	IDR	15,000	ADA
28	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	38FD900PUOJ1UQC0 538450595074	411121	IDR	15,000	ADA
29	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	59AF64ETDTFEU52H 541187595103	411124	IDR	128,623	ADA
30	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3785C745TD5TC7SV 564834595004	411121	IDR	45,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	138930T7EJ54ST1O 575737594919	411121	IDR	15,000	ADA
32	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A131B0T7EJ5751JS 600543595012	411121	IDR	15,000	ADA
33	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6392B0T7EJ5BJPVB 626548595027	411121	IDR	225,000	ADA
34	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E554E4ETDTESVGA1 653689595049	411121	IDR	67,500	ADA
35	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D84785BATO14C3GF 682982594961	411121	IDR	15,000	ADA
36	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D8BBF745TD5TIB6V 706223594996	411121	IDR	15,000	ADA
37	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F11C500PUOIPBGP4 711855594958	411121	IDR	15,000	ADA
38	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EA4FA745TD5SAQEB 721588594942	411121	IDR	15,000	ADA
39	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	177A91PKUDO6QI3O 750877595025	411124	IDR	17,708	ADA
40	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E48501PKUDNNE49O 772539595035	411121	IDR	15,000	ADA
41	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	666B7745TD6486RI 77418595069	411121	IDR	60,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
42	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B59163IFU2SAF3C9 779025594933	411121	IDR	15,000	ADA
43	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2F3FB4ETDTF9HJI2 783561595041	411124	IDR	6,813	ADA
44	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	0C6E100PUOIRC264 834658595020	411121	IDR	15,000	ADA
45	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D06F467ODIK69154 837290595064	411124	IDR	210,000	ADA
46	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D02A74ETDTEOMEL G 864014595002	411121	IDR	15,000	ADA
47	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A53E900PUOJB20PA 886841594928	411124	IDR	3,333	ADA
48	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4AAC467ODIJGRTBS 895220594975	411121	IDR	15,000	ADA
49	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B9B9E4ETDTENLHT0 921961594978	411121	IDR	15,000	ADA
50	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FF9CE0T7EJ5TQR7P 923398595110	411121	IDR	180,000	ADA
51	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	893D767ODIJI2LKB 939520594993	411121	IDR	15,000	ADA
52	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3359E0T7EJ554PVN 963937594939	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
53	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	62A4F5BATO12H3R4 965970594917	411121	IDR	60,000	ADA
54	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	62AF467ODIK76V9Q 986408595113	411124	IDR	21,900	ADA
55	026	560965	05-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D72BD745TD6HLL3R 998544595095	411124	IDR	988,000	ADA
56	026	560965	12-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B5B1667ODJI5BKRF 124040364586	411124	IDR	12,735	ADA
57	026	560965	12-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BF9BE5BATOVQU44E 157625364589	411124	IDR	37,758	ADA
58	026	560965	12-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EFA6367ODJI6KGEU 302217364590	411124	IDR	50,000	ADA
59	026	560965	12-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9075600PUPHF8GEO 477848364591	411124	IDR	74,490	ADA
60	026	560965	12-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CC92C3IFU3R15EM2 608566364587	411124	IDR	4,245	ADA
61	026	560965	12-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1C1C15BATOVQM36G 619280364585	411124	IDR	2,908	ADA
62	026	560965	12-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9741300PUPHG19EP 905295364588	411124	IDR	4,592	ADA
63	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	5A79167ODK0JCD71 017571050085	411124	IDR	6,400	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
64	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CA7FF4ETDURLJOTT 020308050100	411121	IDR	15,000	ADA
65	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	523902M2E9MINS6J 040394050058	411211	IDR	302,225	ADA
66	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FAA350T7EKI92E45 062993050079	411124	IDR	17,540	ADA
67	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E9E844ETDURQRD9 N 077706052111	411124	IDR	390,000	ADA
68	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FE8B0745TEIPULFG 083350050063	411121	IDR	15,000	ADA
69	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	5738000PUPVMTQ04 105326050086	411121	IDR	67,500	ADA
70	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D7E864ETDURCVVN 3 124724050046	411121	IDR	13,600	ADA
71	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6BC69745TEIHLD71 147056050044	411121	IDR	36,800	ADA
72	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BC0DB3IFU48VSJ1N 152900050041	411121	IDR	49,400	ADA
73	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6CFE61PKUF4FSEIV 166210050077	411121	IDR	135,000	ADA
74	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	632711PKUF4G652D 177921050084	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
75	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	0DAC24ETDURNI06F 180128052109	411121	IDR	225,000	ADA
76	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	16CB600PUPVRIKOJ 184106052112	411124	IDR	50,369	ADA
77	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1C74B1PKUF47MHJF 195445050052	411121	IDR	13,600	ADA
78	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4810B0T7EKHRI250 210551050053	411121	IDR	15,000	ADA
79	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	5B21B4ETDURKR1T M 231239050065	411121	IDR	15,000	ADA
80	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	33C695BATPE1KDFV 250027050087	411121	IDR	15,000	ADA
81	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	07E32745TEISRT11 293022052113	411121	IDR	225,000	ADA
82	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	71B4C745TEIQNS5P 301536050080	411121	IDR	15,000	ADA
83	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	559822M2E9MKMA8P 325804050054	411121	IDR	15,000	ADA
84	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2B7B51PKUF4F13GB 382801050071	411121	IDR	15,000	ADA
85	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F6E830T7EKHRESJF 385463050047	411121	IDR	60,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
86	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	035C4745TEIR2HVG 390450052102	411121	IDR	15,000	ADA
87	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	12F5A745TEIRB9BV 395591050097	411121	IDR	135,000	ADA
88	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	83A47745TEISKT91 427944050096	411121	IDR	15,000	ADA
89	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C6ED12M2E9MJ76E0 511024050038	411121	IDR	317,400	ADA
90	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1CC63745TEII1B63 528667050057	411121	IDR	34,000	ADA
91	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2621A1PKUF4FCERN 538511050061	411121	IDR	15,000	ADA
92	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6DD6E0T7EKI4O0AI 565003052104	411121	IDR	67,500	ADA
93	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	0D5203IFU499B1O3 566214050092	411121	IDR	15,000	ADA
94	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	194522M2E9MJCU2S 566797050033	411121	IDR	56,600	ADA
95	026	560965	19-Feb-24	MANDIRI JAYA 747765105517000	399421PKUF55HG61 583607052107	411122	IDR	54,775	ADA
96	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	09B072M2E9N1CQV8 583800050083	411124	IDR	14,583	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
97	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E46D15BATPDQ016G 584747050062	411121	IDR	15,000	ADA
98	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7EE4C745TEIHAPC6 608227050045	411121	IDR	307,800	ADA
99	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	865B82M2E9N18FBF 616314050060	411124	IDR	5,000	ADA
100	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	0B3D31PKUF485L29 650564050055	411121	IDR	15,000	ADA
101	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	24C7F1PKUF48FU4V 709840050074	411121	IDR	15,000	ADA
102	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1F61E4ETDURKAIIK 711113050076	411121	IDR	15,000	ADA
103	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8DA663IFU48UQOSD 720049050032	411211	IDR	277,032	ADA
104	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	DB5D20T7EKHR42QS 774118050039	411121	IDR	34,000	ADA
105	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6DC585BATPE6Q38D 775385050088	411124	IDR	456,000	ADA
106	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	735BD0T7EKHQ5Q58 818977050081	411211	IDR	301,261	ADA
107	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7DD9E67ODK0FE9TR 823633050095	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
108	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	50DB567ODK06J5E8 830600050069	411121	IDR	15,000	ADA
109	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FEA9D5BATPE6BBG1 850016052108	411124	IDR	54,950	ADA
110	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	0D79D67ODK0F9UBQ 876641050094	411121	IDR	20,000	ADA
111	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B6BBB4ETDURD93R1 883926050049	411121	IDR	45,000	ADA
112	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3DDCB745TEIPL5RE 898356050072	411121	IDR	15,000	ADA
113	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BFF3C2M2E9MKQVIK 912849050070	411121	IDR	15,000	ADA
114	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B6C454ETDURM7TF H 914026052103	411121	IDR	135,000	ADA
115	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	02954745TEIHSPI1 917344050035	411121	IDR	34,000	ADA
116	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EF706745TEIR7ABF 942559050099	411121	IDR	270,000	ADA
117	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	5E5301PKUF4KJP6O 955425050031	411124	IDR	564,000	ADA
118	026	560965	19-Feb-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2A69200PUPVEH3DH 972146050042	411121	IDR	36,800	ADA

TOTAL	9,182,980	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 02-03-2024 16:11:13 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 02-03-2024

Periode : 2024-02

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 02-03-2024 16:11:13 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 02-03-2024

Periode : 2024-02

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 02-03-2024 16:11:13 WIB.

Report Satker

Tanggal :2024-02-01 - 2024-02-29

Kementerian :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023)

Eselon :SEKRETARIAT JENDERAL (01)

Satker :LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Rekening Induk :RKK SETJEN KEMENDIKBUD OPS (1220010692575)

Rekening Satker :BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG (8100127230141000)

Total Mutasi

Debit : 464,252,462.00

Kredit : 568,574,426.00

Saldo Akhir : 139,920,746.00

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
01-02-2024	08:27:08	MCM InhouseTrf VA | 202402010818896891 | KE 9910000133349	35,598,782.00	10,146,000.00	0.00	25,452,782.00	MCM	
01-02-2024	08:27:10	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402010818896891 | KE 9910000133349	25,452,782.00	5,800.00	0.00	25,446,982.00	MCM	
02-02-2024	11:46:30	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000315000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	25,446,982.00	0.00	201,289,985.00	226,736,967.00	SPAN	
02-02-2024	11:46:57	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000314000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	226,736,967.00	0.00	61,146,100.00	287,883,067.00	SPAN	
02-02-2024	14:08:41	MCM InhouseTrf VA | 202402021352673412 | KE 9910000133349	287,883,067.00	35,915,599.00	0.00	251,967,468.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
02-02-2024	14:08:42	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Sistem MBKM202402020852828548 | KE 011137178	251,967,468.00	390,000.00	0.00	251,577,468.00	MCM	
02-02-2024	14:08:42	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402020852828548 | KE 011137178	251,577,468.00	2,900.00	0.00	251,574,568.00	MCM	
02-02-2024	14:08:42	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402021352673412 | KE 9910000133349	251,574,568.00	2,900.00	0.00	251,571,668.00	MCM	
02-02-2024	14:08:46	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Dewan Pakar202402020847821900 | KE 5043047325	251,571,668.00	782,000.00	0.00	250,789,668.00	MCM	
02-02-2024	14:08:46	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402020847821900 | KE 5043047325	250,789,668.00	2,900.00	0.00	250,786,768.00	MCM	
02-02-2024	14:08:50	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Dewan Pakar202402020850827086 | KE 0417788850	250,786,768.00	260,000.00	0.00	250,526,768.00	MCM	
02-02-2024	14:08:50	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402020850827086 | KE 0417788850	250,526,768.00	2,900.00	0.00	250,523,868.00	MCM	
02-02-2024	14:08:53	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Dewan Pakar202402020848824100 | KE 6013108147	250,523,868.00	260,000.00	0.00	250,263,868.00	MCM	
02-02-2024	14:08:53	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402020848824100 | KE 6013108147	250,263,868.00	2,900.00	0.00	250,260,968.00	MCM	
02-02-2024	14:08:57	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Sistem MBKM202402020855830559 | KE 762385234700	250,260,968.00	390,000.00	0.00	249,870,968.00	MCM	
02-02-2024	14:08:57	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402020855830559 | KE 762385234700	249,870,968.00	2,900.00	0.00	249,868,068.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
02-02-2024	14:09:00	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Dewan Pakar202402020845821626 | KE 5043000217	249,868,068.00	260,000.00	0.00	249,608,068.00	MCM	
02-02-2024	14:09:00	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402020845821626 | KE 5043000217	249,608,068.00	2,900.00	0.00	249,605,168.00	MCM	
02-02-2024	19:10:50	| RTR-113-02-202402020848824100 -Wuryanto | 0599102147546801 0599102147546801	249,605,168.00	0.00	260,000.00	249,865,168.00	OTHERS	
02-02-2024	19:10:52	| RTR-009-02-202402020852828548 -Saiful Ba | 0599102147546501 0599102147546501 RET LL	249,865,168.00	0.00	390,000.00	250,255,168.00	OTHERS	
05-02-2024	10:41:04	| RTR-009-01-202402020850827086 -Hario Nga | 0599102147546701 0599102147546701 RET LL	250,255,168.00	0.00	260,000.00	250,515,168.00	OTHERS	
05-02-2024	11:55:36	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202402051034711880 | KE 9910000133315	250,515,168.00	3,868,117.00	0.00	246,647,051.00	MCM	
06-02-2024	09:17:27	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523013280785 | KE	246,647,051.00	1,026,516.00	0.00	245,620,535.00	MCM	
06-02-2024	09:17:27	MCM UBP Payment VA | 202402060802510427 /9910000006891 | KE	245,620,535.00	3,500.00	0.00	245,617,035.00	MCM	
06-02-2024	09:17:27	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523011392634 | KE	245,617,035.00	18,705,000.00	0.00	226,912,035.00	MCM	
06-02-2024	09:17:27	MCM UBP Payment VA | 202402060804510810 /9910000006891 | KE	226,912,035.00	3,500.00	0.00	226,908,535.00	MCM	
06-02-2024	09:17:27	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523013044430 | KE	226,908,535.00	396,000.00	0.00	226,512,535.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
06-02-2024	09:17:27	MCM UBP Payment VA | 202402060801510501 /9910000006891 | KE	226,512,535.00	3,500.00	0.00	226,509,035.00	MCM	
06-02-2024	09:17:27	MCM UBP Payment VA | UBP60212399902FFFFFF422 163295000 | KE	226,509,035.00	2,225,880.00	0.00	224,283,155.00	MCM	
06-02-2024	09:17:27	MCM InhouseTrf VA | 202402060838531943 | KE 9910000133349	224,283,155.00	17,974,230.00	0.00	206,308,925.00	MCM	
06-02-2024	09:17:28	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 012307734 | KE	206,308,925.00	5,304,700.00	0.00	201,004,225.00	MCM	
06-02-2024	09:17:28	MCM UBP Payment VA | 202402060803511003 /9910000006891 | KE	201,004,225.00	3,500.00	0.00	201,000,725.00	MCM	
06-02-2024	09:17:28	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422111050 | KE	201,000,725.00	1,071,150.00	0.00	199,929,575.00	MCM	
06-02-2024	09:17:28	MCM UBP Payment VA | 202402060813515256 /9910000002106 | KE	199,929,575.00	2,500.00	0.00	199,927,075.00	MCM	
06-02-2024	09:17:29	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402060838531943 | KE 9910000133349	199,927,075.00	8,700.00	0.00	199,918,375.00	MCM	
06-02-2024	09:17:29	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422110530 | KE	199,918,375.00	982,350.00	0.00	198,936,025.00	MCM	
06-02-2024	09:17:29	MCM UBP Payment VA | 202402060812515083 /9910000002106 | KE	198,936,025.00	2,500.00	0.00	198,933,525.00	MCM	
06-02-2024	11:39:24	MCM InhouseTrf VA | Ex Banner 202402061118776662 | KE 1360030451600	198,933,525.00	120,000.00	0.00	198,813,525.00	MCM	
06-02-2024	11:39:24	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Sistem MBKM202402061121778993 | KE 0111137178	198,813,525.00	390,000.00	0.00	198,423,525.00	MCM	
06-02-2024	11:39:24	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402061121778993 | KE 0111137178	198,423,525.00	2,900.00	0.00	198,420,625.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
06-02-2024	11:39:28	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Dewan Pakar202402061123784138 | KE 90013119732	198,420,625.00	260,000.00	0.00	198,160,625.00	MCM	
06-02-2024	11:39:28	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402061123784138 | KE 90013119732	198,160,625.00	2,900.00	0.00	198,157,725.00	MCM	
06-02-2024	11:39:31	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin Dewan Pakar202402061124786789 | KE 0152330608	198,157,725.00	260,000.00	0.00	197,897,725.00	MCM	
06-02-2024	11:39:31	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402061124786789 | KE 0152330608	197,897,725.00	2,900.00	0.00	197,894,825.00	MCM	
07-02-2024	10:41:29	MCM InhouseTrf VA | 202402071038677267 | KE 9910000133349	197,894,825.00	13,142,500.00	0.00	184,752,325.00	MCM	
07-02-2024	10:41:31	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402071038677267 | KE 9910000133349	184,752,325.00	2,900.00	0.00	184,749,425.00	MCM	
07-02-2024	13:41:30	| RTR-113-02-202402071038677267-Agus Sety | 0599102169626301 0599102169626301BUKAN N	184,749,425.00	0.00	2,565,000.00	187,314,425.00	OTHERS	
07-02-2024	14:56:29	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000455000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	187,314,425.00	0.00	3,962,295.00	191,276,720.00	SPAN	
07-02-2024	14:58:11	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000456000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	191,276,720.00	0.00	41,956,729.00	233,233,449.00	SPAN	
12-02-2024	07:38:59	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300085108 | KE	233,233,449.00	1,000,000.00	0.00	232,233,449.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
12-02-2024	07:38:59	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084598 | KE	232,233,449.00	3,547,254.00	0.00	228,686,195.00	MCM	
12-02-2024	07:38:59	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084580 | KE	228,686,195.00	5,824,000.00	0.00	222,862,195.00	MCM	
12-02-2024	07:38:59	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084556 | KE	222,862,195.00	1,530,183.00	0.00	221,332,012.00	MCM	
12-02-2024	07:38:59	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084655 | KE	221,332,012.00	3,834,000.00	0.00	217,498,012.00	MCM	
12-02-2024	07:38:59	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084549 | KE	217,498,012.00	3,802,684.00	0.00	213,695,328.00	MCM	
12-02-2024	07:38:59	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084606 | KE	213,695,328.00	3,962,295.00	0.00	209,733,033.00	MCM	
12-02-2024	07:38:59	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF489 5940300048201 | KE	209,733,033.00	22,221,880.00	0.00	187,511,153.00	MCM	
12-02-2024	07:39:01	MCM InhouseTrf VA | 202402120655761819 | KE 1360018231529	187,511,153.00	10,000.00	0.00	187,501,153.00	MCM	
12-02-2024	10:26:14	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202402121015931302 | KE 9910000133315	187,501,153.00	186,728.00	0.00	187,314,425.00	MCM	
12-02-2024	10:26:16	MCM Outw SKN (VA) | Retur Honor Narsum 202402121017933848 | KE 044221000083	187,314,425.00	2,565,000.00	0.00	184,749,425.00	MCM	
12-02-2024	10:26:16	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402121017933848 | KE 044221000083	184,749,425.00	2,900.00	0.00	184,746,525.00	MCM	
12-02-2024	13:41:45	| RTR-112-02-202402121017933848-AGUS SETY | 0599102181649301 0599102181649301 BUKAN	184,746,525.00	0.00	2,565,000.00	187,311,525.00	OTHERS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
12-02-2024	16:18:46	MCM InhouseTrf VA | 202402121617956296 | KE 9910000133349	187,311,525.00	32,408,504.00	0.00	154,903,021.00	MCM	
12-02-2024	16:18:49	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402121617956296 | KE 9910000133349	154,903,021.00	23,200.00	0.00	154,879,821.00	MCM	
13-02-2024	08:39:16	MCM InhouseTrf VA | 202402130835691586 | KE 9910000133349	154,879,821.00	340,000.00	0.00	154,539,821.00	MCM	
13-02-2024	08:39:18	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402130835691586 | KE 9910000133349	154,539,821.00	5,800.00	0.00	154,534,021.00	MCM	
13-02-2024	11:40:27	MCM InhouseTrf VA | 202402131134897728 | KE 9910000133349	154,534,021.00	51,880,000.00	0.00	102,654,021.00	MCM	
13-02-2024	11:40:29	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402131134897728 | KE 9910000133349	102,654,021.00	23,200.00	0.00	102,630,821.00	MCM	
13-02-2024	11:40:29	MCM InhouseTrf VA | Perjadin FGD SiJago 202402131137900256 | KE 1360030503582	102,630,821.00	150,000.00	0.00	102,480,821.00	MCM	
13-02-2024	21:57:00	MCM Outw SKN (VA) | Retur Honor Narsum 202402132049891626 | KE 044221000083	102,480,821.00	2,565,000.00	0.00	99,915,821.00	MCM	
13-02-2024	21:57:00	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402132049891626 | KE 044221000083	99,915,821.00	2,900.00	0.00	99,912,921.00	MCM	
16-02-2024	09:02:22	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000670000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	99,912,921.00	0.00	111,916,366.00	211,829,287.00	SPAN	
16-02-2024	09:28:25	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000671000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	211,829,287.00	0.00	91,121,948.00	302,951,235.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
16-02-2024	14:48:28	MCM Outw SKN (VA) | ST 61 202402161444927392 | KE 8830850881	302,951,235.00	9,300,000.00	0.00	293,651,235.00	MCM	
16-02-2024	14:48:28	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402161444927392 | KE 8830850881	293,651,235.00	2,900.00	0.00	293,648,335.00	MCM	
16-02-2024	16:32:43	MCM Outw SKN (VA) | ST 63 Hotel 202402161614576191 | KE 1680289022	293,648,335.00	6,132,000.00	0.00	287,516,335.00	MCM	
16-02-2024	16:32:43	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402161614576191 | KE 1680289022	287,516,335.00	2,900.00	0.00	287,513,435.00	MCM	
19-02-2024	07:28:08	MCM InhouseTrf VA | 202402190507545681 | KE 9910000133349	287,513,435.00	45,132,691.00	0.00	242,380,744.00	MCM	
19-02-2024	07:28:10	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402190507545681 | KE 9910000133349	242,380,744.00	5,800.00	0.00	242,374,944.00	MCM	
19-02-2024	08:14:01	MCM Outw SKN (VA) | ST 66 Hotel 202402190810562835 | KE 8830850881	242,374,944.00	675,000.00	0.00	241,699,944.00	MCM	
19-02-2024	08:14:01	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402190810562835 | KE 8830850881	241,699,944.00	2,900.00	0.00	241,697,044.00	MCM	
19-02-2024	08:37:13	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202402190830571055 | KE 9910000133315	241,697,044.00	5,128,135.00	0.00	236,568,909.00	MCM	
20-02-2024	07:40:55	MCM InhouseTrf VA | 202402200447721158 | KE 9910000133349	236,568,909.00	15,347,000.00	0.00	221,221,909.00	MCM	
20-02-2024	10:49:10	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302000754000001 | Pembayaran belanja pegawai-uang makan bu	221,221,909.00	0.00	2,132,450.00	223,354,359.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
21-02-2024	07:59:03	MCM InhouseTrf VA | 202402210756982468 | KE 9910000133349	223,354,359.00	2,132,450.00	0.00	221,221,909.00	MCM	
21-02-2024	07:59:03	MCM InhouseTrf VA | 202402210511960754 | KE 9910000133349	221,221,909.00	27,083,648.00	0.00	194,138,261.00	MCM	
21-02-2024	07:59:04	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402210511960754 | KE 9910000133349	194,138,261.00	2,900.00	0.00	194,135,361.00	MCM	
21-02-2024	16:53:59	MCM InhouseTrf VA | 202402211638525293 | KE 9910000133349	194,135,361.00	3,482,500.00	0.00	190,652,861.00	MCM	
21-02-2024	16:54:00	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402211638525293 | KE 9910000133349	190,652,861.00	31,900.00	0.00	190,620,961.00	MCM	
22-02-2024	16:29:03	MCM InhouseTrf VA | 202402221600850639 | KE 9910000133349	190,620,961.00	7,284,268.00	0.00	183,336,693.00	MCM	
22-02-2024	16:29:04	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402221600850639 | KE 9910000133349	183,336,693.00	2,900.00	0.00	183,333,793.00	MCM	
23-02-2024	10:57:14	| RTR-202402211638525293-305-NMA BEDA | VACORRECTION	183,333,793.00	0.00	212,000.00	183,545,793.00	OTHERS	
26-02-2024	15:47:28	MCM InhouseTrf VA | 202402261533831399 | KE 9910000133349	183,545,793.00	80,257,100.00	0.00	103,288,693.00	MCM	
26-02-2024	15:47:29	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202402261533831399 | KE 9910000133349	103,288,693.00	11,600.00	0.00	103,277,093.00	MCM	
27-02-2024	15:32:26	MCM Outw SKN (VA) | ST 80 Hotel 202402271053859468 | KE 8830850881	103,277,093.00	12,150,000.00	0.00	91,127,093.00	MCM	
27-02-2024	15:32:26	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202402271053859468 | KE 8830850881	91,127,093.00	2,900.00	0.00	91,124,193.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
29-02-2024	08:56:56	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001114000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	91,124,193.00	0.00	34,861,553.00	125,985,746.00	SPAN	
29-02-2024	08:56:56	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001113000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	125,985,746.00	0.00	13,935,000.00	139,920,746.00	SPAN	

01/03/2024 14:52:11

Account Balance

Customer **LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG**

Organization Unit Name **00571 - KCP SAMPANGAN**

Current

Account No/Account Name	*Account Status*	Currency	*Ledger balance*	*Available Balance*
0057101300000280 / RPL 026 KS	Active	IDR	0.00	0.00
		Total	***0.00***	***0.00***

Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang
Jawa Tengah
Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Friday 01 March
Reference 1709279777581

Laporan Saldo Rekening

Kota Semarang
RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG

Total Saldo : Rp. 0

No	CIF	Rekening	Nama Rekening	Cabang	Saldo
1	03734254	1053003521	RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG	CAPEM SAMPANGAN	0

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Maret 2024

Kementerian/Lembaga	: (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Tgl, No. SP	: 28 November 2023 , DIPA-023.01.2.723014/2024
Unit Organisasi	: (01) SEKRETARIAT JENDERAL	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG	KPPN	: (026) Semarang I
Satuan Kerja	: (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 134.338.633,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01104/KW/723014/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	152.105.746,00	732.618.922,00	750.386.035,00	134.338.633,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	152.105.746,00	732.618.922,00	750.386.035,00	134.338.633,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	152.105.746,00	698.615.922,00	716.383.035,00	134.338.633,00
	1. BP UP*)	97.645.856,00	683.943.563,00	647.250.786,00	134.338.633,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	5.663.337,00	14.672.359,00	20.335.696,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	48.796.553,00	0,00	48.796.553,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 165.661.367,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	21.818.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	112.520.633,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	134.338.633,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	134.338.633,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	134.338.633,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1.	Saldo UP	Rp.	134.338.633,00
2.	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	165.661.367,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4.	Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5.	Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1.	Saldo TUP	Rp.	0,00
2.	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4.	Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5.	Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1.	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2.	Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3.	Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

KOTA SEMARANG, Maret 2024
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Dicetak pada tanggal,04 April 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100127230141000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 134.338.633 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 01104/KW/723014/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	134.338.633
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	134.338.633

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	134.338.633
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	134.338.633

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	21.818.000
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	112.520.633
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	134.338.633

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a.	Saldo UP	Rp.	134.338.633
	b.	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	165.661.367
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	300.000.000
2	a.	Saldo TUP	Rp.	0
	b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3		Saldo Lainnya	Rp.	0
4		Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	300.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	300.000.000

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 723014

BULAN : MARET 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100127230141000	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	MANDIRI	20	S-3895/WPB.12/KP.03/2021	23-12-2021	2024-03-31	112,520,633.00
2	0057101300000280	RPL 026 KS LLDIKTI W	Semarang	30	S-614/KPN.1401/2023	02-08-2023	-	0.00
3	1053003521	RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B	Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang	30	S-7/KPN.1401/2023	05-01-2023	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Nofarina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : MARET 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 8100127230141000

Nama Rekening : BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG

Nama Bank : MANDIRI

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Februari 2024			139.920.746,00
01-03-2024	FPK-PENG-yI2hNLTu0RyUBXM	SPM GUP	121.960.791,00	0,00	261.881.537,00
01-03-2024	FPK-PENG-eNoAaIKOWnUiXNe	SPM GUP	65.999.753,00	0,00	327.881.290,00
01-03-2024	FPK-PENG-y2UdgSvq3MJl7mA	SPM GUP KKP	34.861.553,00	0,00	362.742.843,00
01-03-2024	FPK-PENG-FJgCmyq11X1E7cQ	SPM GUP KKP	13.935.000,00	0,00	376.677.843,00
01-03-2024	FPK-PENG-WX9f0Li96xsXF1w	[DARI TUNAI] Setor Tunai Bank	12.185.000,00	0,00	388.862.843,00
01-03-2024	00137/BP/723014/2024	Pungut Pajak	81.701,00	81.701,00	388.862.843,00
01-03-2024	00136/BP/723014/2024	Pungut Pajak	38.710,00	38.710,00	388.862.843,00
01-03-2024	FPK-PENG-1V02nQk3fPET1Ed	SPM GUP KKP	0,00	48.796.553,00	340.066.290,00
01-03-2024	FPK-PENG-1gcPIJficrUqke5	Tagihan KKP No : 4895940300048201 SUTO SUGIRAHARJO	0,00	27.948.508,00	312.117.782,00
01-03-2024	FPK-PENG-6MlYSTAYz7oAxq4	Tagihan KKP No : 4340750300084655 SRI HARTONO	0,00	8.040.000,00	304.077.782,00

1	2	3	4	5	6
01-03-2024	FPK-PENG-7Jql1w7Vz4SO7Wn	Tagihan KKP No : 4340750300084580 SITI NURUL JANNAH	0,00	5.310.350,00	298.767.432,00
01-03-2024	FPK-PENG-k6vn6MSwAMbP8LV	Tagihan KKP No : 4340750300084549 NATANAEL PRIHASTOMO	0,00	3.282.738,00	295.484.694,00
01-03-2024	FPK-PENG-CEI0Q3J2vUMpbvb	Tagihan KKP No : 4340750300084556 BHIMO WIDYO ANDOKO	0,00	2.194.546,00	293.290.148,00
01-03-2024	00121/SSP/723014/2024	PPN	0,00	2.172.236,00	291.117.912,00
01-03-2024	00632/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Februari 2024	0,00	2.116.000,00	289.001.912,00
01-03-2024	00633/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Februari 2024	0,00	2.052.000,00	286.949.912,00
01-03-2024	FPK-PENG-tZf2OwhZQcsyeMT	Tagihan KKP No : 4340750300085108 ADHRIAL REFADDIN	0,00	1.900.000,00	285.049.912,00
01-03-2024	00634/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Februari 2024	0,00	1.132.000,00	283.917.912,00
01-03-2024	00635/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Februari 2024	0,00	988.000,00	282.929.912,00
01-03-2024	00613/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian aqua galon, gula pasir, dan teh	0,00	958.000,00	281.971.912,00
01-03-2024	00615/KW/723014/2024	Visitasi Penyatuan Program Studi PAI (S1) dan PAUD (S1) pada STAI Muhammadiyah Klaten ke dalam Universitas Muhammadiyah Klaten	0,00	856.000,00	281.115.912,00
01-03-2024	00139/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	780.000,00	280.335.912,00
01-03-2024	00636/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Februari 2024	0,00	736.000,00	279.599.912,00
01-03-2024	00637/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Februari 2024	0,00	736.000,00	278.863.912,00
01-03-2024	00638/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Februari 2024	0,00	736.000,00	278.127.912,00
01-03-2024	00616/KW/723014/2024	1. Bimtek dan Klarifikasi Usul Program Studi dalam rangka usul penggabungan dan/atau penyatuan PTS 2. Tinjau Lapangan Usul Pendirian PT Baru (Yayasan Al-Asyâ€™ariyyah Wonosobo)	0,00	714.000,00	277.413.912,00
01-03-2024	00618/KW/723014/2024	1. Bimtek dan Klarifikasi Usul Program Studi	0,00	692.000,00	276.721.912,00

1	2	3	4	5	6
		dalam rangka usul penggabungan dan/atau penyatuan PTS 2. Tinjau Lapangan Usul Pendirian PT Baru (Yayasan Al-Asyâ€™ariyyah Wonosobo)			
01-03-2024	00617/KW/723014/2024	1. Bimtek dan Klarifikasi Usul Program Studi dalam rangka usul penggabungan dan/atau penyatuan PTS 2. Tinjau Lapangan Usul Pendirian PT Baru (Yayasan Al-Asyâ€™ariyyah Wonosobo)	0,00	692.000,00	276.029.912,00
01-03-2024	00639/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Februari 2024	0,00	680.000,00	275.349.912,00
01-03-2024	00640/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Februari 2024	0,00	680.000,00	274.669.912,00
01-03-2024	00641/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Februari 2024	0,00	680.000,00	273.989.912,00
01-03-2024	00614/KW/723014/2024	Visitasi Penyatuan Program Studi PAI (S1) dan PAUD (S1) pada STAI Muhammadiyah Klaten ke dalam Universitas Muhammadiyah Klaten	0,00	672.000,00	273.317.912,00
01-03-2024	00621/KW/723014/2024	Penyerahan SK Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Giri Satria Husada ke Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	0,00	643.000,00	272.674.912,00
01-03-2024	00119/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	640.000,00	272.034.912,00
01-03-2024	00623/KW/723014/2024	Visitasi Penyatuan Program Studi PAI (S1) dan PAUD (S1) pada STAI Muhammadiyah Klaten ke dalam Universitas Muhammadiyah Klaten	0,00	630.000,00	271.404.912,00
01-03-2024	00123/SSP/723014/2024	PPN	0,00	619.369,00	270.785.543,00
01-03-2024	00122/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	394.952,00	270.390.591,00
01-03-2024	00628/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD dan TKGB	0,00	378.000,00	270.012.591,00
01-03-2024	00631/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD dan TKGB	0,00	351.000,00	269.661.591,00
01-03-2024	00624/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD-TKGB di UKSW	0,00	351.000,00	269.310.591,00
01-03-2024	00630/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD dan TKGB	0,00	296.000,00	269.014.591,00
01-03-2024	00627/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan	0,00	296.000,00	268.718.591,00

1	2	3	4	5	6
		TPD dan TKGB			
01-03-2024	00629/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD dan TKGB	0,00	296.000,00	268.422.591,00
01-03-2024	00626/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD-TKGB di UKSW	0,00	296.000,00	268.126.591,00
01-03-2024	00620/KW/723014/2024	Penyerahan SK Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Giri Satria Husada ke Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	0,00	296.000,00	267.830.591,00
01-03-2024	00625/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD-TKGB di UKSW	0,00	296.000,00	267.534.591,00
01-03-2024	00622/KW/723014/2024	Visitasi Penyatuan Program Studi PAI (S1) dan PAUD (S1) pada STAI Muhammadiyah Klaten ke dalam Universitas Muhammadiyah Klaten	0,00	296.000,00	267.238.591,00
01-03-2024	00643/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Februari 2024	0,00	272.000,00	266.966.591,00
01-03-2024	00642/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Februari 2024	0,00	272.000,00	266.694.591,00
01-03-2024	00130/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	270.000,00	266.424.591,00
01-03-2024	00129/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	270.000,00	266.154.591,00
01-03-2024	00138/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	265.974.591,00
01-03-2024	00619/KW/723014/2024	Pembukaan Rapat Koordinasi Program Revitalisasi Bahasa Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	0,00	170.000,00	265.804.591,00
01-03-2024	00124/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	112.613,00	265.691.978,00
01-03-2024	00141/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	81.701,00	265.610.277,00
01-03-2024	00125/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	265.542.777,00
01-03-2024	00612/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian pelet ikan	0,00	57.000,00	265.485.777,00
01-03-2024	00140/SSP/723014/202	pph 23	0,00	38.710,00	265.447.067,00

1	2	3	4	5	6
	4				
01-03-2024	00126/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	265.427.067,00
01-03-2024	00137/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.412.067,00
01-03-2024	00127/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.397.067,00
01-03-2024	00133/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.382.067,00
01-03-2024	00128/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.367.067,00
01-03-2024	00136/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.352.067,00
01-03-2024	00134/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.337.067,00
01-03-2024	00131/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.322.067,00
01-03-2024	00132/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.307.067,00
01-03-2024	00135/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	265.292.067,00
01-03-2024	00120/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	1.667,00	265.290.400,00
04-03-2024	00660/KW/723014/2024	Belanja Persediaan Cetakan LLDIKTI 6	0,00	6.500.000,00	258.790.400,00
04-03-2024	00651/KW/723014/2024	Biaya penginapan dalam rangka, Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Angkatan I dan II Tahun 2024 Tanggal 28/02/2024 s.d 29/02/2024 Atria Hotel Magelang Jl. Jend. Sudirman No.42, Tidar Sel., Kec. Mage	0,00	600.000,00	258.190.400,00
04-03-2024	00649/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Angkatan I dan II Tahun 2024	0,00	592.000,00	257.598.400,00
04-03-2024	00644/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Materai	0,00	500.000,00	257.098.400,00
04-03-2024	00656/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD-TKGB di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Politeknik Indonusa Surakarta	0,00	493.000,00	256.605.400,00

1	2	3	4	5	6
04-03-2024	00657/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD-TKGB di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Politeknik Indonusa Surakarta	0,00	296.000,00	256.309.400,00
04-03-2024	00658/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD-TKGB di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Politeknik Indonusa Surakarta	0,00	296.000,00	256.013.400,00
04-03-2024	00659/KW/723014/2024	Mendampingi Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD-TKGB di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Politeknik Indonusa Surakarta	0,00	296.000,00	255.717.400,00
04-03-2024	00650/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Angkatan I dan II Tahun 2024	0,00	245.000,00	255.472.400,00
04-03-2024	00648/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Jasa Perbaikan Panel Pompa Air dan Pemasangan Radar Tandon	0,00	210.000,00	255.262.400,00
04-03-2024	00652/KW/723014/2024	Mendampingi BPK Dalam Pemeriksaan TPD TKGB	0,00	170.000,00	255.092.400,00
04-03-2024	00654/KW/723014/2024	Mendampingi BPK Dalam Pemeriksaan TPD TKGB	0,00	170.000,00	254.922.400,00
04-03-2024	00653/KW/723014/2024	Mendampingi BPK Dalam Pemeriksaan TPD TKGB	0,00	170.000,00	254.752.400,00
04-03-2024	00646/KW/723014/2024	Biaya Pengiriman Surat Dinas bulan Februari 2024	0,00	76.500,00	254.675.900,00
04-03-2024	00647/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian radar	0,00	75.000,00	254.600.900,00
04-03-2024	00645/KW/723014/2024	Biaya Pengiriman Surat Dinas bulan Februari 2024	0,00	38.000,00	254.562.900,00
05-03-2024	00663/KW/723014/2024	BPJS Ketenagakerjaan PPNPN Tagihan Februari 2024	0,00	2.226.661,00	252.336.239,00
05-03-2024	00670/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 serta Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 pada	0,00	2.009.326,00	250.326.913,00
05-03-2024	00661/KW/723014/2024	Uang Lembur Non PNS tanggal 20,, 21 dan 24 Februari 2024	0,00	1.873.000,00	248.453.913,00
05-03-2024	00674/KW/723014/2024	Penandatanganan PKS Program MSIB Angkatan 6	0,00	1.571.700,00	246.882.213,00

1	2	3	4	5	6
05-03-2024	00671/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Pengukuhan Guru Besar an Prof. Dr. Rr. M.I. Reto Susilorini, S.T., M.T. Tanggal 03/03/2024 s.d 04/03/2024 Kampus II Lt.2 Universitas Pancasakti Tegal PERJADIN 108/LL6/HM.00.08/2024	0,00	1.210.500,00	245.671.713,00
05-03-2024	00672/KW/723014/2024	Mengantar Tim BPK Dalam Pemeriksaan TPD-TKGB beberapa PTS di Salatiga, dan Surakarta	0,00	828.000,00	244.843.713,00
05-03-2024	00667/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Pimpinan Bidang Kemahasiswaan PTN-PTS Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	704.000,00	244.139.713,00
05-03-2024	00675/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Kereta dalam rangka, Penandatanganan PKS Program MSIB Angkatan 6 Tanggal 19/02/2024 s.d 21/02/2024 Auditorium Gedung D Lantai 2 Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Jender	0,00	525.000,00	243.614.713,00
05-03-2024	00666/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Pimpinan Bidang Kemahasiswaan PTN-PTS Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	296.000,00	243.318.713,00
05-03-2024	00662/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari - Biaya Fotocopy Dokumen Peranggungjawaban Keuangan	0,00	217.900,00	243.100.813,00
05-03-2024	00664/KW/723014/2024	Konsultasi Terkait PPH 21 Dosen Non PNS Atas Perubahan NPWP ke NIK	0,00	170.000,00	242.930.813,00
05-03-2024	00669/KW/723014/2024	Menghadiri rapat koordinasi dalam rangka tahapan seleksi tingkat pusat penerimaan SIPSS T.A. 2024	0,00	170.000,00	242.760.813,00
05-03-2024	00668/KW/723014/2024	Mengantar LPJ Keuangan Bulan Januari 2024 dan Mengantar Surat Retur SP2D	0,00	170.000,00	242.590.813,00
05-03-2024	00665/KW/723014/2024	Konsultasi Terkait PPH 21 Dosen Non PNS Atas Perubahan NPWP ke NIK	0,00	170.000,00	242.420.813,00
05-03-2024	00673/KW/723014/2024	Biaya Parkir Operasional Kendaraan Dinas H 9507 CG dalam rangka melayani BPK	0,00	36.000,00	242.384.813,00
07-03-2024	00150/BP/723014/2024	pungut pajak	2.426.432,00	0,00	244.811.245,00
07-03-2024	00149/BP/723014/2024	pungut pajak	731.982,00	0,00	245.543.227,00
07-03-2024	00174/BP/723014/2024	pungut pajak	350.000,00	0,00	245.893.227,00
07-03-2024	00152/BP/723014/2024	pungut pajak	325.000,00	0,00	246.218.227,00

1	2	3	4	5	6
07-03-2024	00138/BP/723014/2024	Pungut Pajak	317.400,00	0,00	246.535.627,00
07-03-2024	00139/BP/723014/2024	Pungut Pajak	307.800,00	0,00	246.843.427,00
07-03-2024	00162/BP/723014/2024	pungut pajak	270.000,00	0,00	247.113.427,00
07-03-2024	00161/BP/723014/2024	pungut pajak	270.000,00	0,00	247.383.427,00
07-03-2024	00173/BP/723014/2024	pungut pajak	180.000,00	0,00	247.563.427,00
07-03-2024	00172/BP/723014/2024	pungut pajak	180.000,00	0,00	247.743.427,00
07-03-2024	00151/BP/723014/2024	pungut pajak	125.000,00	0,00	247.868.427,00
07-03-2024	00175/BP/723014/2024	pungut pajak	72.917,00	0,00	247.941.344,00
07-03-2024	00167/BP/723014/2024	pungut pajak	67.500,00	0,00	248.008.844,00
07-03-2024	00178/BP/723014/2024	pungut pajak	56.600,00	0,00	248.065.444,00
07-03-2024	00140/BP/723014/2024	Pungut Pajak	49.400,00	0,00	248.114.844,00
07-03-2024	00177/BP/723014/2024	pungut pajak	40.800,00	0,00	248.155.644,00
07-03-2024	00141/BP/723014/2024	Pungut Pajak	36.800,00	0,00	248.192.444,00
07-03-2024	00142/BP/723014/2024	Pungut pajak	36.800,00	0,00	248.229.244,00
07-03-2024	00143/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	248.263.244,00
07-03-2024	00144/BP/723014/2024	Pungut PAJAK	34.000,00	0,00	248.297.244,00
07-03-2024	00145/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	248.331.244,00
07-03-2024	00163/BP/723014/2024	pungut pajak	20.000,00	0,00	248.351.244,00
07-03-2024	00168/BP/723014/2024	pungut pajak	20.000,00	0,00	248.371.244,00
07-03-2024	00156/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.386.244,00
07-03-2024	00154/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.401.244,00
07-03-2024	00165/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.416.244,00
07-03-2024	00166/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.431.244,00
07-03-2024	00170/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.446.244,00
07-03-2024	00157/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.461.244,00
07-03-2024	00158/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.476.244,00

1	2	3	4	5	6
07-03-2024	00171/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.491.244,00
07-03-2024	00164/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.506.244,00
07-03-2024	00169/BP/723014/2024	pungit pajak	15.000,00	0,00	248.521.244,00
07-03-2024	00159/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.536.244,00
07-03-2024	00160/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.551.244,00
07-03-2024	00155/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.566.244,00
07-03-2024	00153/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	248.581.244,00
07-03-2024	00146/BP/723014/2024	pungut pajak	13.600,00	0,00	248.594.844,00
07-03-2024	00148/BP/723014/2024	pungut pajak	8.400,00	0,00	248.603.244,00
07-03-2024	00682/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman berupa Pemeliharaan Gedung G LLDIKTI Wilayah VI	0,00	20.718.000,00	227.885.244,00
07-03-2024	00795/KW/723014/2024	Biaya Paket meeting fullday Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	17.500.000,00	210.385.244,00
07-03-2024	00725/KW/723014/2024	Paket Meeting Fullboard FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian	0,00	16.250.000,00	194.135.244,00
07-03-2024	00748/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	5.400.000,00	188.735.244,00
07-03-2024	00749/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	5.400.000,00	183.335.244,00
07-03-2024	00787/KW/723014/2024	Honor Narasumber Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	3.600.000,00	179.735.244,00
07-03-2024	00788/KW/723014/2024	Honor Narasumber Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	3.600.000,00	176.135.244,00
07-03-2024	00679/KW/723014/2024	Langganan Zoom bulan Februari 2024	0,00	3.378.248,00	172.756.996,00
07-03-2024	00696/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Hi Ace dalam rangka, Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024 Tanggal	0,00	3.125.000,00	169.631.996,00

1	2	3	4	5	6
		07/03/2024 s.d 08/03/2024 Kantor LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta Jl. Tentara Pelajar No. 13 Jetis Yogyakart			
07-03-2024	00766/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Semarang - Magelang (PP) dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	2.570.000,00	167.061.996,00
07-03-2024	00796/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembuatan Plakat Gunungan LLDIKTI Wilayah VI	0,00	1.822.917,00	165.239.079,00
07-03-2024	00692/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	163.709.079,00
07-03-2024	00693/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	162.179.079,00
07-03-2024	00689/KW/723014/2024	Pengukuhan Guru Besar an Prof. Dr. Rr. M.I. Reto Susilorini, S.T., M.T.	0,00	1.294.000,00	160.885.079,00
07-03-2024	00691/KW/723014/2024	Raker Forkom LPPM Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	1.049.500,00	159.835.579,00
07-03-2024	00686/KW/723014/2024	Pemantauan Pelaksaan Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode I Gelombang 1 tahun 2024	0,00	751.428,00	159.084.151,00
07-03-2024	00757/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	158.354.151,00
07-03-2024	00765/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	157.624.151,00
07-03-2024	00764/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	156.894.151,00
07-03-2024	00756/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	156.164.151,00
07-03-2024	00755/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	155.434.151,00
07-03-2024	00754/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	154.704.151,00
07-03-2024	00812/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	153.974.151,00
07-03-2024	00758/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi	0,00	730.000,00	153.244.151,00

1	2	3	4	5	6
		BKP dalam Implementasi MBKM			
07-03-2024	00762/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	152.514.151,00
07-03-2024	00763/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	151.784.151,00
07-03-2024	00760/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	151.054.151,00
07-03-2024	00752/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	150.324.151,00
07-03-2024	00761/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	149.594.151,00
07-03-2024	00759/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	730.000,00	148.864.151,00
07-03-2024	00685/KW/723014/2024	Pemantauan Pelaksaan Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode I Gelombang 1 tahun 2024	0,00	690.400,00	148.173.751,00
07-03-2024	00687/KW/723014/2024	Pemantauan Pelaksaan Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode I Gelombang 1 tahun 2024	0,00	690.400,00	147.483.351,00
07-03-2024	00677/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian karpet	0,00	595.000,00	146.888.351,00
07-03-2024	00690/KW/723014/2024	Raker Forkom LPPM Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	592.000,00	146.296.351,00
07-03-2024	00688/KW/723014/2024	Pengukuhan Guru Besar an Prof. Dr. Rr. M.I. Reto Susilorini, S.T., M.T.	0,00	592.000,00	145.704.351,00
07-03-2024	00751/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	560.180,00	145.144.171,00
07-03-2024	00699/KW/723014/2024	Pembukaan acara Capacity Building Influencer dan Content Creator UMS	0,00	505.800,00	144.638.371,00
07-03-2024	00698/KW/723014/2024	Pembukaan acara Capacity Building Influencer dan Content Creator UMS	0,00	482.000,00	144.156.371,00
07-03-2024	00781/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	450.000,00	143.706.371,00
07-03-2024	00750/KW/723014/2024	Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM	0,00	446.000,00	143.260.371,00
07-03-2024	00676/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian aqua, isi	0,00	435.000,00	142.825.371,00

1	2	3	4	5	6
		ulang, dan aqua botol 330ml			
07-03-2024	00702/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	142.395.371,00
07-03-2024	00710/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	141.965.371,00
07-03-2024	00715/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	141.535.371,00
07-03-2024	00775/KW/723014/2024	Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	430.000,00	141.105.371,00
07-03-2024	00705/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	140.675.371,00
07-03-2024	00719/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	140.245.371,00
07-03-2024	00721/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	139.815.371,00
07-03-2024	00774/KW/723014/2024	Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	430.000,00	139.385.371,00
07-03-2024	00776/KW/723014/2024	Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	430.000,00	138.955.371,00
07-03-2024	00729/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	138.525.371,00
07-03-2024	00810/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	138.095.371,00
07-03-2024	00707/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	137.665.371,00
07-03-2024	00722/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	137.235.371,00
07-03-2024	00727/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	136.805.371,00
07-03-2024	00713/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	136.375.371,00

1	2	3	4	5	6
07-03-2024	00773/KW/723014/2024	Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	430.000,00	135.945.371,00
07-03-2024	00777/KW/723014/2024	Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	430.000,00	135.515.371,00
07-03-2024	00778/KW/723014/2024	Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	430.000,00	135.085.371,00
07-03-2024	00730/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	134.655.371,00
07-03-2024	00731/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	430.000,00	134.225.371,00
07-03-2024	00704/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	133.795.371,00
07-03-2024	00709/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	133.365.371,00
07-03-2024	00712/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	132.935.371,00
07-03-2024	00717/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	132.505.371,00
07-03-2024	00720/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	132.075.371,00
07-03-2024	00780/KW/723014/2024	Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	430.000,00	131.645.371,00
07-03-2024	00724/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	131.215.371,00
07-03-2024	00701/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	130.785.371,00
07-03-2024	00718/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	130.355.371,00
07-03-2024	00700/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	129.925.371,00
07-03-2024	00703/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	129.495.371,00

1	2	3	4	5	6
		Tahun 2024			
07-03-2024	00706/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	129.065.371,00
07-03-2024	00716/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	128.635.371,00
07-03-2024	00723/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	128.205.371,00
07-03-2024	00711/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	127.775.371,00
07-03-2024	00779/KW/723014/2024	Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	430.000,00	127.345.371,00
07-03-2024	00767/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	400.000,00	126.945.371,00
07-03-2024	00782/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	400.000,00	126.545.371,00
07-03-2024	00797/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Maret 2024 ID Pel : 523013044430	0,00	396.000,00	126.149.371,00
07-03-2024	00694/KW/723014/2024	menghadiri wisuda ke Politeknik Balekambang Jepara	0,00	320.500,00	125.828.871,00
07-03-2024	00735/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	125.528.871,00
07-03-2024	00739/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun	0,00	300.000,00	125.228.871,00
07-03-2024	00786/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	300.000,00	124.928.871,00
07-03-2024	00746/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	124.628.871,00

1	2	3	4	5	6
07-03-2024	00737/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun	0,00	300.000,00	124.328.871,00
07-03-2024	00745/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	124.028.871,00
07-03-2024	00734/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	123.728.871,00
07-03-2024	00708/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	123.428.871,00
07-03-2024	00742/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun	0,00	300.000,00	123.128.871,00
07-03-2024	00744/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	122.828.871,00
07-03-2024	00743/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	122.528.871,00
07-03-2024	00768/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	300.000,00	122.228.871,00
07-03-2024	00740/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun	0,00	300.000,00	121.928.871,00
07-03-2024	00783/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	300.000,00	121.628.871,00
07-03-2024	00772/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	300.000,00	121.328.871,00
07-03-2024	00747/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan	0,00	300.000,00	121.028.871,00

1	2	3	4	5	6
		Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024			
07-03-2024	00741/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun	0,00	300.000,00	120.728.871,00
07-03-2024	00785/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	300.000,00	120.428.871,00
07-03-2024	00770/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	300.000,00	120.128.871,00
07-03-2024	00738/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun	0,00	300.000,00	119.828.871,00
07-03-2024	00736/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun	0,00	300.000,00	119.528.871,00
07-03-2024	00784/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	300.000,00	119.228.871,00
07-03-2024	00811/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	300.000,00	118.928.871,00
07-03-2024	00769/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	300.000,00	118.628.871,00
07-03-2024	00771/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	300.000,00	118.328.871,00
07-03-2024	00695/KW/723014/2024	menghadiri wisuda ke Politeknik Balekambang Jepara	0,00	296.000,00	118.032.871,00
07-03-2024	00697/KW/723014/2024	Pembukaan acara Capacity Building Influencer dan Content Creator UMS	0,00	296.000,00	117.736.871,00
07-03-2024	00790/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	265.000,00	117.471.871,00
07-03-2024	00791/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	265.000,00	117.206.871,00
07-03-2024	00792/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	265.000,00	116.941.871,00
07-03-2024	00789/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	265.000,00	116.676.871,00

1	2	3	4	5	6
07-03-2024	00793/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	265.000,00	116.411.871,00
07-03-2024	00794/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1	0,00	265.000,00	116.146.871,00
07-03-2024	00714/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	260.000,00	115.886.871,00
07-03-2024	00684/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Mesin Potong Rumput dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	200.000,00	115.686.871,00
07-03-2024	00680/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian lem fox dan amplas	0,00	185.000,00	115.501.871,00
07-03-2024	00733/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	170.000,00	115.331.871,00
07-03-2024	00732/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	170.000,00	115.161.871,00
07-03-2024	00809/KW/723014/2024	Mendampingi BPK Dalam Pemeriksaan TPD TKGB	0,00	170.000,00	114.991.871,00
07-03-2024	00681/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman pembelian plitur, paku, silicon dan amplas	0,00	147.500,00	114.844.371,00
07-03-2024	00683/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 H 6174 XG dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	28.749,00	114.815.622,00
07-03-2024	00678/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari Laundry sprey besar dan sprey kecil	0,00	26.000,00	114.789.622,00
08-03-2024	00800/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Maret 2024 ID Pel : 523011392634	0,00	15.894.657,00	98.894.965,00
08-03-2024	00799/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Maret 2024 ID Pel : 523012307734	0,00	4.411.080,00	94.483.885,00
08-03-2024	00808/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Maret 2024 No JasTel : 143422111050	0,00	1.071.150,00	93.412.735,00
08-03-2024	00807/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Maret 2024 No JasTel : 143422110530	0,00	982.350,00	92.430.385,00
08-03-2024	00798/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Maret 2024 ID Pel : 523013280785	0,00	939.840,00	91.490.545,00

1	2	3	4	5	6
08-03-2024	00805/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Maret 2024 No Telp 0248317281	0,00	282.426,00	91.208.119,00
08-03-2024	00804/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Maret 2024 No Telp 0248311521	0,00	66.847,00	91.141.272,00
08-03-2024	00803/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Maret 2024 No Telp 0248311273	0,00	59.221,00	91.082.051,00
08-03-2024	00802/KW/723014/2024	Tagihan Kartu Halo bulan Maret 2024 No Telp 08112690267	0,00	58.000,00	91.024.051,00
08-03-2024	00806/KW/723014/2024	Telepon bulan Maret 2024 No Telp 0248449458	0,00	39.907,00	90.984.144,00
08-03-2024	00801/KW/723014/2024	Tagihan Telepon Bulan Maret 2024 No 08112558011	0,00	30.250,00	90.953.894,00
13-03-2024	FPK-PENG-qcx6YYPo6Nutas6	SPM GUP	111.384.357,00	0,00	202.338.251,00
13-03-2024	FPK-PENG-CrzVOFmuC5OVQf6	SPM GUP	104.116.180,00	0,00	306.454.431,00
13-03-2024	FPK-PENG-HVcrFgtYBU86p6M	SPM GUP KKP	9.982.648,00	0,00	316.437.079,00
13-03-2024	FPK-PENG-fozBnTeuGS1ymx4	SPM GUP KKP	1.945.800,00	0,00	318.382.879,00
13-03-2024	00817/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	4.500.000,00	313.882.879,00
13-03-2024	00818/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	4.500.000,00	309.382.879,00
13-03-2024	00816/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	300.000,00	309.082.879,00
13-03-2024	00815/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	300.000,00	308.782.879,00
13-03-2024	00814/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	300.000,00	308.482.879,00
13-03-2024	00813/KW/723014/2024	1. Bimtek dan Klarifikasi Usul Program Studi dalam rangka usul penggabungan dan/atau penyatuan PTS 2. Tinjau Lapangan Usul Pendirian PT Baru (Yayasan Al-Asyâ€™ariyyah Wonosobo)	0,00	236.000,00	308.246.879,00
14-03-2024	FPK-PENG-b3uI2yOYEreGgp8	SPM GUP KKP	9.117.730,00	0,00	317.364.609,00
14-03-2024	00185/BP/723014/2024	Pungut Pajak	840.000,00	0,00	318.204.609,00

1	2	3	4	5	6
14-03-2024	00179/BP/723014/2024	Pungut Pajak	253.000,00	0,00	318.457.609,00
14-03-2024	00184/BP/723014/2024	Pungut Pajak	225.000,00	0,00	318.682.609,00
14-03-2024	00183/BP/723014/2024	Pungut Pajak	225.000,00	0,00	318.907.609,00
14-03-2024	00200/BP/723014/2024	pungut pajak	180.000,00	0,00	319.087.609,00
14-03-2024	00199/BP/723014/2024	pungut pajak	180.000,00	0,00	319.267.609,00
14-03-2024	00194/BP/723014/2024	Pungut pajak	90.000,00	0,00	319.357.609,00
14-03-2024	00193/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	319.447.609,00
14-03-2024	00192/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	319.537.609,00
14-03-2024	00195/BP/723014/2024	pungut pajak	67.500,00	0,00	319.605.109,00
14-03-2024	00180/BP/723014/2024	Pungut pajak	67.500,00	0,00	319.672.609,00
14-03-2024	00191/BP/723014/2024	pungut pajak	45.000,00	0,00	319.717.609,00
14-03-2024	00181/BP/723014/2024	Pungut Pajak	20.000,00	0,00	319.737.609,00
14-03-2024	00196/BP/723014/2024	Pungut pajak	20.000,00	0,00	319.757.609,00
14-03-2024	00182/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	319.772.609,00
14-03-2024	00186/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	319.787.609,00
14-03-2024	00198/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	319.802.609,00
14-03-2024	00190/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	319.817.609,00
14-03-2024	00205/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	319.832.609,00
14-03-2024	00188/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	319.847.609,00
14-03-2024	00189/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	319.862.609,00
14-03-2024	00187/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	319.877.609,00
14-03-2024	00197/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	319.892.609,00
14-03-2024	00819/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullboard Bimtek IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	42.000.000,00	277.892.609,00
14-03-2024	00891/KW/723014/2024	Paket Meeting Fullboard FGD Evaluasi SiJAGO Tahun 2024	0,00	12.650.000,00	265.242.609,00
14-03-2024	00885/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor	0,00	6.122.500,00	259.120.109,00

1	2	3	4	5	6
		berupa Biaya Pajak Kendaraan LLDIKTI Wilayah VI			
14-03-2024	00834/KW/723014/2024	Biaya Tranportasi Pesawat dalam rangka, Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 serta Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024	0,00	5.818.644,00	253.301.465,00
14-03-2024	00835/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Pesawat dalam rangka, Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 serta Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 pada Satuan Kerja Kemendikbudristek Tanggal 07/03/2024 s.d 09/03/2024 Hil	0,00	5.045.827,00	248.255.638,00
14-03-2024	FPK-PENG-FS83AjFmpNaXr5B	Tagihan KKP No : 4895940300048201 SUTO SUGIRAHARJO	0,00	4.082.638,00	244.173.000,00
14-03-2024	00875/KW/723014/2024	Honor Narasumber Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	3.600.000,00	240.573.000,00
14-03-2024	00874/KW/723014/2024	Honor Narasumber Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	3.600.000,00	236.973.000,00
14-03-2024	FPK-PENG-BJLOnITqTvLxb5l	Tagihan KKP No : 4340750300084580 SITI NURUL JANNAH	0,00	3.041.004,00	233.931.996,00
14-03-2024	FPK-PENG-AcYzXmYHCCyIcuT	Tagihan KKP No : 4340750300084556 BHIMO WIDYO ANDOKO	0,00	2.377.209,00	231.554.787,00
14-03-2024	FPK-PENG-7DlAnx4YsGnEqpN	Tagihan KKP No : 4340750300084564 NURKHOLIS	0,00	1.945.800,00	229.608.987,00
14-03-2024	00833/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	227.808.987,00
14-03-2024	00849/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	226.008.987,00
14-03-2024	00832/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	224.208.987,00
14-03-2024	00889/KW/723014/2024	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Fungsional	0,00	1.489.000,00	222.719.987,00

1	2	3	4	5	6
14-03-2024	00890/KW/723014/2024	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Fungsional	0,00	1.230.000,00	221.489.987,00
14-03-2024	00888/KW/723014/2024	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Fungsional	0,00	1.230.000,00	220.259.987,00
14-03-2024	00886/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 serta Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 pada Satuan Kerja Kemendikbudristek	0,00	795.000,00	219.464.987,00
14-03-2024	00883/KW/723014/2024	Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur - NON PNS LLDIKTI Wilayah VI Periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024	0,00	714.000,00	218.750.987,00
14-03-2024	00844/KW/723014/2024	Pembahasan Data Calon Peserta Program Pendanaan Revitalisasi LPTK tahun 2024	0,00	666.420,00	218.084.567,00
14-03-2024	00887/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 serta Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 pada Satuan Kerja Kemendikbudristek	0,00	650.000,00	217.434.567,00
14-03-2024	00867/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	545.700,00	216.888.867,00
14-03-2024	00845/KW/723014/2024	Pembahasan Data Calon Peserta Program Pendanaan Revitalisasi LPTK tahun 2024	0,00	530.000,00	216.358.867,00
14-03-2024	00837/KW/723014/2024	Wisuda ke-XVI Periode Maret Tahun 2024 Universitas Ngudi Waluyo	0,00	516.000,00	215.842.867,00
14-03-2024	00843/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional	0,00	489.500,00	215.353.367,00
14-03-2024	FPK-PENG-STiiKqmyHRDdMeM	Tagihan KKP No : 6032987100007480 NADILA RIZKI	0,00	461.797,00	214.891.570,00
14-03-2024	00861/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	214.436.570,00
14-03-2024	00857/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	213.981.570,00
14-03-2024	00855/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	213.526.570,00
14-03-2024	00851/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	213.071.570,00

1	2	3	4	5	6
14-03-2024	00863/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	212.616.570,00
14-03-2024	00856/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	212.161.570,00
14-03-2024	00862/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	211.706.570,00
14-03-2024	00859/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	211.251.570,00
14-03-2024	00854/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	210.796.570,00
14-03-2024	00853/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	210.341.570,00
14-03-2024	00860/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	209.886.570,00
14-03-2024	00858/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	209.431.570,00
14-03-2024	00852/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	455.000,00	208.976.570,00
14-03-2024	00868/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	450.000,00	208.526.570,00
14-03-2024	00846/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	450.000,00	208.076.570,00
14-03-2024	00847/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 Bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2	0,00	400.000,00	207.676.570,00
14-03-2024	00869/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	400.000,00	207.276.570,00
14-03-2024	00850/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Darat (Kereta Api) dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan	0,00	390.000,00	206.886.570,00

1	2	3	4	5	6
		Penangangan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024			
14-03-2024	00826/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	206.586.570,00
14-03-2024	00829/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	206.286.570,00
14-03-2024	00827/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	205.986.570,00
14-03-2024	00830/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	205.686.570,00
14-03-2024	00848/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	205.386.570,00
14-03-2024	00823/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	205.086.570,00
14-03-2024	00831/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	204.786.570,00
14-03-2024	00872/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	300.000,00	204.486.570,00
14-03-2024	00821/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	204.186.570,00
14-03-2024	00822/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	203.886.570,00

1	2	3	4	5	6
14-03-2024	00873/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	300.000,00	203.586.570,00
14-03-2024	00870/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	300.000,00	203.286.570,00
14-03-2024	00825/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	202.986.570,00
14-03-2024	00871/KW/723014/2024	Honor Panitia Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	300.000,00	202.686.570,00
14-03-2024	00820/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	202.386.570,00
14-03-2024	00828/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	202.086.570,00
14-03-2024	00824/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	201.786.570,00
14-03-2024	00840/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional	0,00	296.000,00	201.490.570,00
14-03-2024	00842/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional	0,00	296.000,00	201.194.570,00
14-03-2024	00836/KW/723014/2024	Wisuda ke-XVI Periode Maret Tahun 2024 Universitas Ngudi Waluyo	0,00	296.000,00	200.898.570,00
14-03-2024	00841/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional	0,00	296.000,00	200.602.570,00
14-03-2024	00876/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	265.000,00	200.337.570,00
14-03-2024	00879/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	265.000,00	200.072.570,00
14-03-2024	00878/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	265.000,00	199.807.570,00
14-03-2024	00877/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	265.000,00	199.542.570,00

1	2	3	4	5	6
14-03-2024	00880/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	265.000,00	199.277.570,00
14-03-2024	00864/KW/723014/2024	Biaya Transportasi darat (kereta api) dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	235.000,00	199.042.570,00
14-03-2024	00884/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa klem kabel, steker, dan lain-lain	0,00	178.000,00	198.864.570,00
14-03-2024	00881/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	170.000,00	198.694.570,00
14-03-2024	00882/KW/723014/2024	Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	170.000,00	198.524.570,00
14-03-2024	00865/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	170.000,00	198.354.570,00
14-03-2024	00839/KW/723014/2024	Menghadiri undangan Bimtek Penilaian Angka Kredit STIKES Telogorejo Semarang	0,00	170.000,00	198.184.570,00
14-03-2024	00838/KW/723014/2024	Menghadiri undangan Bimtek Penilaian Angka Kredit STIKES Telogorejo Semarang	0,00	170.000,00	198.014.570,00
14-03-2024	00866/KW/723014/2024	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	131.500,00	197.883.070,00
14-03-2024	FPK-PENG-GTQxhWYYZYg7b5V	Tagihan KKP No : 4340750300084655 SRI HARTONO	0,00	10.000,00	197.873.070,00
14-03-2024	FPK-PENG-hBFJ8F9cusJksxW	Tagihan KKP No : 4340750300084549 NATANAEL PRIHASTOMO	0,00	10.000,00	197.863.070,00
15-03-2024	FPK-PENG-Y6T763jmu2pwZaF	Tagihan KKP No : 4895940300048201 SUTO SUGIRAHARJO	0,00	8.617.730,00	189.245.340,00
15-03-2024	00892/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Dalam Rangka, Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024 Tanggal 07/03/2024 s.d 08/03/2024 Kantor LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta Jl. Tentara Pelajar No. 13 Jetis Yogyakarta Daerah	0,00	3.380.000,00	185.865.340,00
15-03-2024	00156/SSP/723014/2024	PPN	0,00	2.053.135,00	183.812.205,00
15-03-2024	00893/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat	0,00	1.800.000,00	182.012.205,00

1	2	3	4	5	6
		Fungsional Tanggal 07/03/2024 s.d 08/03/2024 Plasa Insan Berprestasi Gedung Ki Hadjar Dewantara Jakarta PERJADIN 142/LL6/KU.01.00/2024			
15-03-2024	00154/SSP/723014/2024	PPN	0,00	644.144,00	181.368.061,00
15-03-2024	FPK-PENG-6gBtsZamhqrMXLI	Tagihan KKP No : 4340750300085108 ADHRIAL REFADDIN	0,00	500.000,00	180.868.061,00
15-03-2024	00157/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	373.297,00	180.494.764,00
15-03-2024	00183/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	350.000,00	180.144.764,00
15-03-2024	00160/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	325.000,00	179.819.764,00
15-03-2024	00142/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	317.400,00	179.502.364,00
15-03-2024	00143/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	307.800,00	179.194.564,00
15-03-2024	00170/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	270.000,00	178.924.564,00
15-03-2024	00171/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	270.000,00	178.654.564,00
15-03-2024	00182/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	178.474.564,00
15-03-2024	00181/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	178.294.564,00
15-03-2024	00159/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	125.000,00	178.169.564,00
15-03-2024	00155/SSP/723014/2024	PPH 22	0,00	87.838,00	178.081.726,00
15-03-2024	00158/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	72.917,00	178.008.809,00
15-03-2024	00176/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	177.941.309,00
15-03-2024	00144/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	56.600,00	177.884.709,00
15-03-2024	00145/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	49.400,00	177.835.309,00

1	2	3	4	5	6
15-03-2024	00152/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	40.800,00	177.794.509,00
15-03-2024	00147/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	36.800,00	177.757.709,00
15-03-2024	00146/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	36.800,00	177.720.909,00
15-03-2024	00150/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	177.686.909,00
15-03-2024	00148/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	177.652.909,00
15-03-2024	00149/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	177.618.909,00
15-03-2024	00177/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	177.598.909,00
15-03-2024	00172/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	177.578.909,00
15-03-2024	00173/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.563.909,00
15-03-2024	00174/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.548.909,00
15-03-2024	00179/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.533.909,00
15-03-2024	00175/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.518.909,00
15-03-2024	00161/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.503.909,00
15-03-2024	00162/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.488.909,00
15-03-2024	00164/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.473.909,00
15-03-2024	00178/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.458.909,00
15-03-2024	00167/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.443.909,00
15-03-2024	00180/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.428.909,00
15-03-2024	00169/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.413.909,00

1	2	3	4	5	6
15-03-2024	00168/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.398.909,00
15-03-2024	00163/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.383.909,00
15-03-2024	00166/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	177.368.909,00
15-03-2024	00151/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	13.600,00	177.355.309,00
15-03-2024	00153/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	8.400,00	177.346.909,00
18-03-2024	00203/BP/723014/2024	Pungut Pajak	775.200,00	0,00	178.122.109,00
18-03-2024	00204/BP/723014/2024	pungut pajak	350.000,00	0,00	178.472.109,00
18-03-2024	00201/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	178.607.109,00
18-03-2024	00202/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	178.742.109,00
18-03-2024	00919/KW/723014/2024	Paket Meeting Fullboard Workshop Peningkatan Karir Dosen	0,00	38.760.000,00	139.982.109,00
18-03-2024	00926/KW/723014/2024	Biaya paket meeting fullday Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2	0,00	17.500.000,00	122.482.109,00
18-03-2024	00910/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Pesawat dan KAI dalam rangka, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Fungsional Tanggal 07/03/2024 s.d 08/03/2024 Plasa Insan Berprestasi Gedung Ki Hadjar Dewantara Jakarta PERJADIN 142/LL6/KU.01.0	0,00	5.357.160,00	117.124.949,00
18-03-2024	00918/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	2.700.000,00	114.424.949,00
18-03-2024	00917/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	2.700.000,00	111.724.949,00
18-03-2024	00916/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN LAPORANKERMA	0,00	1.498.000,00	110.226.949,00
18-03-2024	00896/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan Universitas Al-Irsyad Cilacap	0,00	1.050.500,00	109.176.449,00
18-03-2024	00895/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan Universitas Al-Irsyad Cilacap	0,00	888.000,00	108.288.449,00

1	2	3	4	5	6
18-03-2024	00903/KW/723014/2024	Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024	0,00	869.000,00	107.419.449,00
18-03-2024	00899/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, valuasi Lapangan Usul Pembukaan Prodi Keperawatan Program Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi Ners STIKES Panti Kosala dan STIKES Tujuh Belas. Tanggal 06/03/2024 s.d 07/03/2024 1. STIKES Panti	0,00	847.000,00	106.572.449,00
18-03-2024	00898/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Prodi Keperawatan Program Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi Ners STIKES Panti Kosala dan STIKES Tujuh Belas.	0,00	819.500,00	105.752.949,00
18-03-2024	00912/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN LAPORANKERMA	0,00	688.000,00	105.064.949,00
18-03-2024	00911/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN LAPORANKERMA	0,00	688.000,00	104.376.949,00
18-03-2024	00913/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN LAPORANKERMA	0,00	688.000,00	103.688.949,00
18-03-2024	00915/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN LAPORANKERMA	0,00	688.000,00	103.000.949,00
18-03-2024	00914/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN LAPORANKERMA	0,00	688.000,00	102.312.949,00
18-03-2024	00901/KW/723014/2024	Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024	0,00	672.000,00	101.640.949,00
18-03-2024	00906/KW/723014/2024	Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024	0,00	672.000,00	100.968.949,00
18-03-2024	00904/KW/723014/2024	Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024	0,00	672.000,00	100.296.949,00
18-03-2024	00905/KW/723014/2024	Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024	0,00	672.000,00	99.624.949,00
18-03-2024	00902/KW/723014/2024	Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024	0,00	672.000,00	98.952.949,00
18-03-2024	00900/KW/723014/2024	Pendampingan dan Visitasi Pembangunan Zona Integritas LLDIKTI Tahun 2024	0,00	672.000,00	98.280.949,00
18-03-2024	00908/KW/723014/2024	FGD Fasilitasi Pengembangan Program Internasional PTS LLDIKTI Wilayah VI	0,00	669.500,00	97.611.449,00
18-03-2024	00897/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Prodi Keperawatan Program Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi Ners STIKES Panti Kosala	0,00	592.000,00	97.019.449,00

1	2	3	4	5	6
		dan STIKES Tujuh Belas.			
18-03-2024	00920/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - ITBM Grobogan	0,00	540.000,00	96.479.449,00
18-03-2024	00921/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - ITBM Grobogan	0,00	540.000,00	95.939.449,00
18-03-2024	00922/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - ITBM Grobogan	0,00	540.000,00	95.399.449,00
18-03-2024	00923/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - ITBM Grobogan	0,00	540.000,00	94.859.449,00
18-03-2024	00925/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - ITBM Grobogan	0,00	540.000,00	94.319.449,00
18-03-2024	00924/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - ITBM Grobogan	0,00	370.000,00	93.949.449,00
18-03-2024	00907/KW/723014/2024	FGD Fasilitasi Pengembangan Program Internasional PTS LLDIKTI Wilayah VI	0,00	296.000,00	93.653.449,00
18-03-2024	00894/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Perlengkapan Perbaikan Saklar Gedung A	0,00	200.000,00	93.453.449,00
18-03-2024	00909/KW/723014/2024	Wisuda Program Diploma, Sarjana & Pascasarjana Periode I Tahun 2024 Universitas Katolik Soegijapranata	0,00	170.000,00	93.283.449,00
19-03-2024	FPK-PENG-lzkIiDLayfVO9zD	SPM GUP	162.670.200,00	0,00	255.953.649,00
19-03-2024	FPK-PENG-aKfeoDKXvnNG0PW	SPM GUP	47.969.551,00	0,00	303.923.200,00
19-03-2024	00210/BP/723014/2024	pungut pajak	300.000,00	0,00	304.223.200,00
19-03-2024	00208/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	304.313.200,00
19-03-2024	00209/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	304.403.200,00
19-03-2024	00207/BP/723014/2024	pungut pajak	60.000,00	0,00	304.463.200,00
19-03-2024	00211/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	54.560,00	0,00	304.517.760,00
19-03-2024	00212/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	304.532.760,00
19-03-2024	00213/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	15.000,00	0,00	304.547.760,00
19-03-2024	00952/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dan paket meeting	0,00	15.000.000,00	289.547.760,00
19-03-2024	00950/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	287.747.760,00

1	2	3	4	5	6
19-03-2024	00951/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	285.947.760,00
19-03-2024	00932/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Perbaikan Lampu LED	0,00	1.364.000,00	284.583.760,00
19-03-2024	00933/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tanggal 07/03/2024 s.d	0,00	1.213.082,00	283.370.678,00
19-03-2024	00931/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tanggal 07/03/2024 s.d 08/03/2024 Plaza Insan Pendidikan Berprestasi Gedung A Lantai 1 Kementerian Pendi	0,00	1.100.000,00	282.270.678,00
19-03-2024	00189/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	840.000,00	281.430.678,00
19-03-2024	00209/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	775.200,00	280.655.478,00
19-03-2024	00927/KW/723014/2024	Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	0,00	680.000,00	279.975.478,00
19-03-2024	00956/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - Politeknik Akbara	0,00	670.191,00	279.305.287,00
19-03-2024	00930/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tanggal 07/03/2024 s.d 08/03/2024 Plaza Insan Pendidikan Berprestasi Gedung A Lantai 1 Kementerian	0,00	629.771,00	278.675.516,00
19-03-2024	00940/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	620.000,00	278.055.516,00
19-03-2024	00943/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	620.000,00	277.435.516,00
19-03-2024	00955/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - Politeknik Akbara	0,00	608.300,00	276.827.216,00
19-03-2024	00954/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - Politeknik Akbara	0,00	505.800,00	276.321.416,00
19-03-2024	00944/KW/723014/2024	Honor Panitia	0,00	400.000,00	275.921.416,00

1	2	3	4	5	6
19-03-2024	00935/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	391.000,00	275.530.416,00
19-03-2024	00936/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	391.000,00	275.139.416,00
19-03-2024	00939/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	391.000,00	274.748.416,00
19-03-2024	00941/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	391.000,00	274.357.416,00
19-03-2024	00934/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	391.000,00	273.966.416,00
19-03-2024	00937/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	391.000,00	273.575.416,00
19-03-2024	00942/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	391.000,00	273.184.416,00
19-03-2024	00938/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	391.000,00	272.793.416,00
19-03-2024	00210/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	350.000,00	272.443.416,00
19-03-2024	00949/KW/723014/2024	Honor Panitia	0,00	300.000,00	272.143.416,00
19-03-2024	00946/KW/723014/2024	Honor Panitia	0,00	300.000,00	271.843.416,00
19-03-2024	00948/KW/723014/2024	Honor Panitia	0,00	300.000,00	271.543.416,00
19-03-2024	00947/KW/723014/2024	Honor Panitia	0,00	300.000,00	271.243.416,00
19-03-2024	00945/KW/723014/2024	Honor Panitia	0,00	300.000,00	270.943.416,00
19-03-2024	00953/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDIKTI - Politeknik Akbara	0,00	296.000,00	270.647.416,00
19-03-2024	00206/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	253.000,00	270.394.416,00
19-03-2024	00188/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	225.000,00	270.169.416,00

1	2	3	4	5	6
19-03-2024	00187/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	225.000,00	269.944.416,00
19-03-2024	00205/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	269.764.416,00
19-03-2024	00204/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	269.584.416,00
19-03-2024	00207/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	269.449.416,00
19-03-2024	00208/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	269.314.416,00
19-03-2024	00928/KW/723014/2024	Uang Lembur Non PNS Bulan 27 dan 29 Februari 2024	0,00	112.000,00	269.202.416,00
19-03-2024	00929/KW/723014/2024	Uang Lembur Non PNS tanggal 04 dan 06 Maret 2024	0,00	112.000,00	269.090.416,00
19-03-2024	00198/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	269.000.416,00
19-03-2024	00197/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	268.910.416,00
19-03-2024	00199/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	268.820.416,00
19-03-2024	00184/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	268.752.916,00
19-03-2024	00200/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	268.685.416,00
19-03-2024	00195/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	45.000,00	268.640.416,00
19-03-2024	00201/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	268.620.416,00
19-03-2024	00185/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	268.600.416,00
19-03-2024	00190/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	268.585.416,00
19-03-2024	00193/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	268.570.416,00
19-03-2024	00194/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	268.555.416,00
19-03-2024	00202/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	268.540.416,00

1	2	3	4	5	6
19-03-2024	00196/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	268.525.416,00
19-03-2024	00191/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	268.510.416,00
19-03-2024	00192/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	268.495.416,00
19-03-2024	00186/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	268.480.416,00
19-03-2024	00203/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	268.465.416,00
21-03-2024	00977/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	266.665.416,00
21-03-2024	00976/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	264.865.416,00
21-03-2024	00996/KW/723014/2024	Undangan Rakor PPID 2024	0,00	1.530.500,00	263.334.916,00
21-03-2024	00962/KW/723014/2024	Biaya Penginapan 1 Malam pada 30 Januari 2024 untuk 2 orang Narasumber pada kegiatan Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDIKTI	0,00	1.500.000,00	261.834.916,00
21-03-2024	00957/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN BMN DI LLDIKTI WILAYAH IV	0,00	1.498.000,00	260.336.916,00
21-03-2024	00979/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Travel dalam rangka, Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024 Tanggal 13/03/2024 s.d 15/03/2024 Universitas Duta Bangsa Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Sahid Surakarta PERJAD	0,00	1.460.000,00	258.876.916,00
21-03-2024	00985/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.335.000,00	257.541.916,00
21-03-2024	00980/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.317.000,00	256.224.916,00
21-03-2024	00981/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.280.000,00	254.944.916,00
21-03-2024	00982/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.280.000,00	253.664.916,00
21-03-2024	00983/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.280.000,00	252.384.916,00
21-03-2024	00984/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.280.000,00	251.104.916,00

1	2	3	4	5	6
21-03-2024	00986/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.280.000,00	249.824.916,00
21-03-2024	00989/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.280.000,00	248.544.916,00
21-03-2024	00987/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.280.000,00	247.264.916,00
21-03-2024	00988/KW/723014/2024	Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024	0,00	1.280.000,00	245.984.916,00
21-03-2024	00966/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - Politeknik Pancasakti Tegal	0,00	1.208.000,00	244.776.916,00
21-03-2024	00965/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - Politeknik Pancasakti Tegal	0,00	1.208.000,00	243.568.916,00
21-03-2024	00968/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Surakarta selama 1 malam	0,00	1.175.000,00	242.393.916,00
21-03-2024	01002/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggil Wilayah VI	0,00	1.100.000,00	241.293.916,00
21-03-2024	00967/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - Politeknik Pancasakti Tegal	0,00	1.007.000,00	240.286.916,00
21-03-2024	00964/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - Politeknik Pancasakti Tegal	0,00	992.000,00	239.294.916,00
21-03-2024	00992/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	955.000,00	238.339.916,00
21-03-2024	00961/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN BMN DI LLDIKTI WILAYAH IV	0,00	688.000,00	237.651.916,00
21-03-2024	00959/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN BMN DI LLDIKTI WILAYAH IV	0,00	688.000,00	236.963.916,00
21-03-2024	00960/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN BMN DI LLDIKTI WILAYAH IV	0,00	688.000,00	236.275.916,00
21-03-2024	00958/KW/723014/2024	STUDI TIRU PENGELOLAAN BMN DI LLDIKTI WILAYAH IV	0,00	688.000,00	235.587.916,00
21-03-2024	00963/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - Politeknik Pancasakti Tegal	0,00	592.000,00	234.995.916,00
21-03-2024	00991/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	592.000,00	234.403.916,00
21-03-2024	00990/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	450.000,00	233.953.916,00
21-03-2024	00997/KW/723014/2024	Rakor Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan	0,00	390.000,00	233.563.916,00

1	2	3	4	5	6
21-03-2024	00970/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	339.400,00	233.224.516,00
21-03-2024	00974/KW/723014/2024	Coaching Clinic - Peran Humas Di Era Digital & Society 5.0 Angkatan I	0,00	265.000,00	232.959.516,00
21-03-2024	00975/KW/723014/2024	Coaching Clinic - Peran Humas Di Era Digital & Society 5.0 Angkatan I	0,00	265.000,00	232.694.516,00
21-03-2024	00971/KW/723014/2024	Coaching Clinic - Peran Humas Di Era Digital & Society 5.0 Angkatan I	0,00	265.000,00	232.429.516,00
21-03-2024	00973/KW/723014/2024	Coaching Clinic - Peran Humas Di Era Digital & Society 5.0 Angkatan I	0,00	245.000,00	232.184.516,00
21-03-2024	00993/KW/723014/2024	Biaya Tol Operasional Kendaraan Dinas H 1034 XG	0,00	239.500,00	231.945.016,00
21-03-2024	00994/KW/723014/2024	Biaya Tol Operasioanl Kendaraan Dinas H 9507 CG	0,00	239.500,00	231.705.516,00
21-03-2024	00995/KW/723014/2024	Biaya Tol Operasional Kendaraan Dinas H 9507 CG	0,00	171.000,00	231.534.516,00
21-03-2024	00998/KW/723014/2024	Peliputan Penyerahan Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi Magister (S2) Manajemen oleh Kepala LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	170.000,00	231.364.516,00
21-03-2024	00978/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Travel dalam rangka, Verifikasi Dan Validasi Laporan BKD 2023/2024 Tanggal 13/03/2024 s.d 15/03/2024 Universitas Duta Bangsa Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Sahid Surakarta PERJAD	0,00	160.419,00	231.204.097,00
21-03-2024	00969/KW/723014/2024	FGD FASILITASI PENGEMBANGAN PROGRAM INTERNASIONAL PTS LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	148.000,00	231.056.097,00
21-03-2024	00972/KW/723014/2024	Coaching Clinic - Peran Humas Di Era Digital & Society 5.0 Angkatan I	0,00	95.000,00	230.961.097,00
21-03-2024	01004/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian stop kran dan lain-lain	0,00	93.500,00	230.867.597,00
21-03-2024	01003/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Cuci dan Doorsmer Kendaraan Dinas Kepala H 73 dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	60.000,00	230.807.597,00

1	2	3	4	5	6
22-03-2024	01007/KW/723014/2024	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi melalui PDDikti (Narasumber)	0,00	1.611.074,00	229.196.523,00
22-03-2024	01010/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Kepala LLDIKTI VI dalam rangka, Undangan Penandatangan Kontrak PPM Vokasi Tahun 2024 Tanggal 18/03/2024 s.d 19/03/2024 Hotel	0,00	730.000,00	228.466.523,00
25-03-2024	00224/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	228.601.523,00
25-03-2024	00225/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	228.736.523,00
25-03-2024	00215/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	228.826.523,00
25-03-2024	00214/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	228.916.523,00
25-03-2024	00216/BP/723014/2024	pungut pajak	67.500,00	0,00	228.984.023,00
25-03-2024	00226/BP/723014/2024	Pungut Pajak	41.880,00	0,00	229.025.903,00
25-03-2024	00217/BP/723014/2024	pungut pajak	20.000,00	0,00	229.045.903,00
25-03-2024	00221/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	229.060.903,00
25-03-2024	00227/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	229.075.903,00
25-03-2024	00218/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	229.090.903,00
25-03-2024	00219/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	229.105.903,00
25-03-2024	00220/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	229.120.903,00
25-03-2024	00223/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	229.135.903,00
25-03-2024	00222/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	229.150.903,00
25-03-2024	01028/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pakarti Series Angkatan 1	0,00	2.700.000,00	226.450.903,00
25-03-2024	01029/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pakarti Series Angkatan 1	0,00	2.700.000,00	223.750.903,00
25-03-2024	01009/KW/723014/2024	Undangan Penandatangan Kontrak PPM Vokasi Tahun 2024	0,00	2.237.000,00	221.513.903,00
25-03-2024	01011/KW/723014/2024	Menghadiri Penjelasan Teknis dan Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Vokasi	0,00	1.282.000,00	220.231.903,00
25-03-2024	01006/KW/723014/2024	1. Sosialisasi dan Bimtek Verifikasi serta Validasi Registrasi dan Perubahan Data Dosen; 2. Sosialisasi dan Bimtek Anugerah Academic Leader Tahun 2024	0,00	1.228.500,00	219.003.403,00

1	2	3	4	5	6
25-03-2024	01008/KW/723014/2024	Undangan Penandatangan Kontrak PPM Vokasi Tahun 2024	0,00	848.000,00	218.155.403,00
25-03-2024	01005/KW/723014/2024	1. Sosialisasi dan Bimtek Verifikasi serta Validasi Registrasi dan Perubahan Data Dosen; 2. Sosialisasi dan Bimtek Anugerah Academic Leader Tahun 2024	0,00	830.000,00	217.325.403,00
25-03-2024	01013/KW/723014/2024	Biaya Transportasi dalam rangka, Menghadiri Penjelasan Teknis dan Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Vokasi Tanggal 18/03/2024 s.d 19/03/2024 Hotel Millenium Sirih Jl. H. Fah	0,00	815.000,00	216.510.403,00
25-03-2024	01015/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari pembelian aqua galon,isi ualang aqua dan aqua botol 330ml	0,00	498.000,00	216.012.403,00
25-03-2024	01018/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	450.000,00	215.562.403,00
25-03-2024	01012/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Menghadiri Penjelasan Teknis dan Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan	0,00	422.602,00	215.139.801,00
25-03-2024	01019/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	400.000,00	214.739.801,00
25-03-2024	01022/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	300.000,00	214.439.801,00
25-03-2024	01025/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	300.000,00	214.139.801,00
25-03-2024	01023/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	300.000,00	213.839.801,00
25-03-2024	01026/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	300.000,00	213.539.801,00
25-03-2024	01020/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	300.000,00	213.239.801,00
25-03-2024	01027/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	300.000,00	212.939.801,00
25-03-2024	01021/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	300.000,00	212.639.801,00
25-03-2024	01024/KW/723014/2024	Honor Panitia Pakarti Series Angkatan 1	0,00	300.000,00	212.339.801,00
25-03-2024	01050/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	212.074.801,00
25-03-2024	01032/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	211.809.801,00
25-03-2024	01033/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	211.544.801,00

1	2	3	4	5	6
25-03-2024	01036/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	211.279.801,00
25-03-2024	01047/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	211.014.801,00
25-03-2024	01045/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	210.749.801,00
25-03-2024	01030/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	210.484.801,00
25-03-2024	01044/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	210.219.801,00
25-03-2024	01041/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	209.954.801,00
25-03-2024	01048/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	209.689.801,00
25-03-2024	01039/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	209.424.801,00
25-03-2024	01037/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	209.159.801,00
25-03-2024	01040/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	208.894.801,00
25-03-2024	01046/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	208.629.801,00
25-03-2024	01042/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	208.364.801,00
25-03-2024	01034/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	208.099.801,00
25-03-2024	01038/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	207.834.801,00
25-03-2024	01031/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	207.569.801,00
25-03-2024	01049/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	207.304.801,00
25-03-2024	01043/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	207.039.801,00
25-03-2024	01035/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	265.000,00	206.774.801,00
25-03-2024	01052/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	170.000,00	206.604.801,00

1	2	3	4	5	6
25-03-2024	01051/KW/723014/2024	PAKARTI Series On The Spot : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1	0,00	170.000,00	206.434.801,00
25-03-2024	01017/KW/723014/2024	Biaya Transportasi dalam rangka, Menghadiri Acara User Meeting, Kolokium Visi Misi dan Kolokium Kurikulum STIKES Nasional Tanggal 09/03/2024 s.d 09/03/2024 Hotel Brother Soolloo Baru Jl. Ir. Soekarno Blok AC 25 Solo Baru, Kab	0,00	130.000,00	206.304.801,00
25-03-2024	01014/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari Pembelian ikan hias, pakan ikan lem aquarium dan sticker gambar 60x1m	0,00	68.000,00	206.236.801,00
26-03-2024	01053/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman berupa Pekerjaan Perbaikan Rangka Atap dan Plafond Lobby Gedung D Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	16.391.370,00	189.845.431,00
26-03-2024	01086/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	2.700.000,00	187.145.431,00
26-03-2024	01085/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	2.700.000,00	184.445.431,00
26-03-2024	01096/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka FGD Pengelolaan Konten Digital, Podcast & Majalah Instansi	0,00	1.800.000,00	182.645.431,00
26-03-2024	01058/KW/723014/2024	Visitasi penggabungan PTS menjadi Universitas Muhammadiyah Tegal	0,00	994.000,00	181.651.431,00
26-03-2024	01065/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	755.000,00	180.896.431,00
26-03-2024	01092/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	702.800,00	180.193.631,00
26-03-2024	01091/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	650.191,00	179.543.440,00
26-03-2024	01060/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	619.500,00	178.923.940,00
26-03-2024	01055/KW/723014/2024	Penyerahan SK Guru Besar Bapak Didit Nugroho, S.Si., M.Si., D.Sc.	0,00	618.500,00	178.305.440,00
26-03-2024	01067/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA	0,00	592.000,00	177.713.440,00

1	2	3	4	5	6
		2023			
26-03-2024	01061/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	592.000,00	177.121.440,00
26-03-2024	01057/KW/723014/2024	Visitasi penggabungan PTS menjadi Universitas Muhammadiyah Tegal	0,00	592.000,00	176.529.440,00
26-03-2024	01063/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	592.000,00	175.937.440,00
26-03-2024	01068/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	592.000,00	175.345.440,00
26-03-2024	01069/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	592.000,00	174.753.440,00
26-03-2024	01066/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	592.000,00	174.161.440,00
26-03-2024	01064/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	592.000,00	173.569.440,00
26-03-2024	01056/KW/723014/2024	Visitasi penggabungan PTS menjadi Universitas Muhammadiyah Tegal	0,00	592.000,00	172.977.440,00
26-03-2024	01062/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	592.000,00	172.385.440,00
26-03-2024	01090/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	578.500,00	171.806.940,00
26-03-2024	01074/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	525.000,00	171.281.940,00
26-03-2024	01093/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	487.500,00	170.794.440,00
26-03-2024	01079/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Ketua dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	400.000,00	170.394.440,00
26-03-2024	01084/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	300.000,00	170.094.440,00

1	2	3	4	5	6
26-03-2024	01080/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	300.000,00	169.794.440,00
26-03-2024	01081/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	300.000,00	169.494.440,00
26-03-2024	01082/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	300.000,00	169.194.440,00
26-03-2024	01083/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Anggota dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	300.000,00	168.894.440,00
26-03-2024	01075/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	296.000,00	168.598.440,00
26-03-2024	01095/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	296.000,00	168.302.440,00
26-03-2024	01089/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	296.000,00	168.006.440,00
26-03-2024	01054/KW/723014/2024	Penyerahan SK Guru Besar Bapak Didit Nugroho, S.Si., M.Si., D.Sc.	0,00	296.000,00	167.710.440,00
26-03-2024	01094/KW/723014/2024	FGD Optimalisasi Konten Digital dan Website Instansi	0,00	296.000,00	167.414.440,00
26-03-2024	01077/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	296.000,00	167.118.440,00
26-03-2024	01078/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	296.000,00	166.822.440,00
26-03-2024	01076/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	296.000,00	166.526.440,00
26-03-2024	01088/KW/723014/2024	Biaya Tiket Pulang a.n. Ramadhina Febry Darmanto dan Budi Cholisetiawan Semarang Tegal dalam rangka kegiatan Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester	0,00	220.000,00	166.306.440,00
26-03-2024	01073/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	170.000,00	166.136.440,00

1	2	3	4	5	6
26-03-2024	01070/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	170.000,00	165.966.440,00
26-03-2024	01072/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	170.000,00	165.796.440,00
26-03-2024	01071/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang Hasil Hibah PKKM TA 2023	0,00	170.000,00	165.626.440,00
26-03-2024	01059/KW/723014/2024	Undangan Rekonsiliasi Kepesertaan dan Iuran JKN	0,00	170.000,00	165.456.440,00
26-03-2024	01087/KW/723014/2024	Biaya Tiket Berangkat a.n. Budi Cholisetiawan Semarang tegal dalam rangka kegiatan Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	49.000,00	165.407.440,00
27-03-2024	00228/BP/723014/2024	Pungut pajak	1.919.710,00	0,00	167.327.150,00
27-03-2024	00239/BP/723014/2024	pungut pajak	450.000,00	0,00	167.777.150,00
27-03-2024	00234/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	167.912.150,00
27-03-2024	00233/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	168.047.150,00
27-03-2024	00235/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	168.137.150,00
27-03-2024	00237/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	168.227.150,00
27-03-2024	00236/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	168.317.150,00
27-03-2024	00238/BP/723014/2024	pungut pajak	86.667,00	0,00	168.403.817,00
27-03-2024	00229/BP/723014/2024	Pungut Pajak	60.000,00	0,00	168.463.817,00
27-03-2024	00230/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	168.478.817,00
27-03-2024	00232/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	168.493.817,00
27-03-2024	00231/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	168.508.817,00
27-03-2024	01100/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting dalam rangka kegiatan Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	22.500.000,00	146.008.817,00
27-03-2024	01099/KW/723014/2024	Konsumsi Nasi kotak dan Snack	0,00	2.166.667,00	143.842.150,00
27-03-2024	01097/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka FGD Pengelolaan Konten Digital, Podcast & Majalah	0,00	1.800.000,00	142.042.150,00

1	2	3	4	5	6
		Instansi			
27-03-2024	01098/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka FGD Pengelolaan Konten Digital, Podcast & Majalah Instansi	0,00	1.800.000,00	140.242.150,00
28-03-2024	00232/SSP/723014/2024	PPN	0,00	1.624.370,00	138.617.780,00
28-03-2024	01103/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman berupa perbaikan penguat rangka plafon, skrup gipsum 5cm, dan jasa perbaikan plafon gantung	0,00	1.047.000,00	137.570.780,00
28-03-2024	00244/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	450.000,00	137.120.780,00
28-03-2024	00217/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	300.000,00	136.820.780,00
28-03-2024	00233/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	295.340,00	136.525.440,00
28-03-2024	00238/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	136.390.440,00
28-03-2024	00230/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	136.255.440,00
28-03-2024	00231/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	136.120.440,00
28-03-2024	00239/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	135.985.440,00
28-03-2024	01101/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa batu kupang putih	0,00	115.000,00	135.870.440,00
28-03-2024	01102/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian batu kupang	0,00	115.000,00	135.755.440,00
28-03-2024	00240/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	135.665.440,00
28-03-2024	00218/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	135.575.440,00
28-03-2024	00241/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	135.485.440,00
28-03-2024	00215/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	135.395.440,00

1	2	3	4	5	6
28-03-2024	00216/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	135.305.440,00
28-03-2024	00242/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	135.215.440,00
28-03-2024	00219/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	135.125.440,00
28-03-2024	00243/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	86.667,00	135.038.773,00
28-03-2024	00221/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	134.971.273,00
28-03-2024	00212/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	60.000,00	134.911.273,00
28-03-2024	00234/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	60.000,00	134.851.273,00
28-03-2024	00211/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	54.560,00	134.796.713,00
28-03-2024	00220/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	41.880,00	134.754.833,00
28-03-2024	00222/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	134.734.833,00
28-03-2024	00213/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.719.833,00
28-03-2024	00224/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.704.833,00
28-03-2024	00223/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.689.833,00
28-03-2024	00236/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.674.833,00
28-03-2024	00214/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.659.833,00
28-03-2024	00225/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.644.833,00
28-03-2024	00235/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.629.833,00
28-03-2024	00229/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.614.833,00
28-03-2024	00228/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.599.833,00

1	2	3	4	5	6
28-03-2024	00227/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.584.833,00
28-03-2024	00237/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.569.833,00
28-03-2024	00226/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	134.554.833,00
31-03-2024	FPK-PENG-JU8PIYbenP0zQuh	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	21.818.000,00	112.736.833,00
31-03-2024	01104/KW/723014/2024	Biaya Transfer bulan Maret 2024	0,00	216.200,00	112.520.633,00
		Jumlah	**710.800.922,00**	**738.201.035,00**	**112.520.633,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Norafina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : MARET 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 0057101300000280

Nama Rekening : RPL 026 KS LLDIKTI W

Nama Bank : Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Februari 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : MARET 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 1053003521

Nama Rekening : RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Februari 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofarina Yodianti

NIP. 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Report Satker

Tanggal :2024-03-01 - 2024-03-31

Kementerian :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023)

Eselon :SEKRETARIAT JENDERAL (01)

Satker :LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Rekening Induk :RKK SETJEN KEMENDIKBUD OPS (1220010692575)

Rekening Satker :BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG (8100127230141000)

Total Mutasi

Debit : 715,936,990.00

Kredit : 688,536,877.00

Saldo Akhir : 112,520,633.00

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
01-03-2024	07:06:30	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403010443996956 | KE 9910000133349	139,920,746.00	5,800.00	0.00	139,914,946.00	MCM	
01-03-2024	07:06:30	MCM InhouseTrf VA | 202403010443996956 | KE 9910000133349	139,914,946.00	19,354,800.00	0.00	120,560,146.00	MCM	
01-03-2024	07:06:32	MCM Outw SKN (VA) | Retur Lembur Feb 202403010445997583 | KE 003401091894502	120,560,146.00	212,000.00	0.00	120,348,146.00	MCM	
01-03-2024	07:06:32	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202403010445997583 | KE 003401091894502	120,348,146.00	2,900.00	0.00	120,345,246.00	MCM	
01-03-2024	11:49:06	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084556 | KE	120,345,246.00	2,194,546.00	0.00	118,150,700.00	MCM	
01-03-2024	11:49:06	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084580 | KE	118,150,700.00	5,310,350.00	0.00	112,840,350.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
01-03-2024	11:49:06	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084655 | KE	112,840,350.00	8,040,000.00	0.00	104,800,350.00	MCM	
01-03-2024	11:49:06	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300085108 | KE	104,800,350.00	1,900,000.00	0.00	102,900,350.00	MCM	
01-03-2024	11:49:06	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084549 | KE	102,900,350.00	3,282,738.00	0.00	99,617,612.00	MCM	
01-03-2024	11:49:06	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF489 5940300048201 | KE	99,617,612.00	21,897,878.00	0.00	77,719,734.00	MCM	
01-03-2024	11:49:08	MCM InhouseTrf VA | Pembayaran KKP 202403011037767578 | KE 1360018231529	77,719,734.00	6,050,630.00	0.00	71,669,104.00	MCM	
01-03-2024	11:49:09	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202403011133874713 | KE 9910000133315	71,669,104.00	5,783,748.00	0.00	65,885,356.00	MCM	
01-03-2024	14:57:09	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001167000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	65,885,356.00	0.00	65,999,753.00	131,885,109.00	SPAN	
01-03-2024	15:13:25	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001166000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	131,885,109.00	0.00	121,960,791.00	253,845,900.00	SPAN	
04-03-2024	08:21:10	MCM InhouseTrf VA | 202403040818928732 | KE 9910000133349	253,845,900.00	10,157,118.00	0.00	243,688,782.00	MCM	
04-03-2024	08:21:12	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403040818928732 | KE 9910000133349	243,688,782.00	8,700.00	0.00	243,680,082.00	MCM	
05-03-2024	07:30:51	MCM UBP Payment VA | UBP60212399902FFFFFF422 163295000 | KE	243,680,082.00	2,226,661.00	0.00	241,453,421.00	MCM	
05-03-2024	07:30:51	MCM InhouseTrf VA | 202403050418735252 | KE 9910000133349	241,453,421.00	19,643,337.00	0.00	221,810,084.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
05-03-2024	07:30:52	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403050418735252 | KE 9910000133349	221,810,084.00	29,000.00	0.00	221,781,084.00	MCM	
06-03-2024	09:47:22	MCM InhouseTrf VA | ST 114 Sewa HiAce 202403060938855754 | KE 1360017315810	221,781,084.00	3,000,000.00	0.00	218,781,084.00	MCM	
07-03-2024	08:43:33	MCM Outw SKN (VA) | ST 110 IAPS 4.0 202403070837568376 | KE 0247406578	218,781,084.00	170,000.00	0.00	218,611,084.00	MCM	
07-03-2024	08:43:33	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202403070837568376 | KE 0247406578	218,611,084.00	2,900.00	0.00	218,608,184.00	MCM	
07-03-2024	08:43:34	MCM InhouseTrf VA | 202403070836567403 | KE 9910000133349	218,608,184.00	124,561,773.00	0.00	94,046,411.00	MCM	
07-03-2024	08:43:35	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403070836567403 | KE 9910000133349	94,046,411.00	40,600.00	0.00	94,005,811.00	MCM	
07-03-2024	09:09:24	New Mandiri Online Trf VA | Pengembalian tiket KA perjadin | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	94,005,811.00	0.00	751,000.00	94,756,811.00	OTHERS	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422110530 | KE	94,756,811.00	982,350.00	0.00	93,774,461.00	MCM	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | 202403080532968322 /9910000002106 | KE	93,774,461.00	2,500.00	0.00	93,771,961.00	MCM	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 011392634 | KE	93,771,961.00	15,894,657.00	0.00	77,877,304.00	MCM	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | 202403080526969143 /9910000006891 | KE	77,877,304.00	3,500.00	0.00	77,873,804.00	MCM	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 013280785 | KE	77,873,804.00	939,840.00	0.00	76,933,964.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | 202403080524968729 /9910000006891 | KE	76,933,964.00	3,500.00	0.00	76,930,464.00	MCM	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 013044430 | KE	76,930,464.00	396,000.00	0.00	76,534,464.00	MCM	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 012307734 | KE	76,534,464.00	4,411,080.00	0.00	72,123,384.00	MCM	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | 202403080523968717 /9910000006891 | KE	72,123,384.00	3,500.00	0.00	72,119,884.00	MCM	
08-03-2024	09:37:52	MCM UBP Payment VA | 202403080525968737 /9910000006891 | KE	72,119,884.00	3,500.00	0.00	72,116,384.00	MCM	
08-03-2024	09:37:53	MCM InhouseTrf VA | ST 141 Hotel 202403080444964552 | KE 1360018231529	72,116,384.00	1,100,000.00	0.00	71,016,384.00	MCM	
08-03-2024	09:37:58	MCM InhouseTrf VA | ST 42 Hotel 202403080440960846 | KE 1360018231529	71,016,384.00	1,800,000.00	0.00	69,216,384.00	MCM	
08-03-2024	09:38:03	MCM InhouseTrf VA | ST 141 Tiket 202403080444964550 | KE 1360018231529	69,216,384.00	629,771.00	0.00	68,586,613.00	MCM	
08-03-2024	09:38:07	MCM InhouseTrf VA | ST 114 Hotel 202403080447964563 | KE 1360018231529	68,586,613.00	3,380,000.00	0.00	65,206,613.00	MCM	
08-03-2024	09:38:12	MCM InhouseTrf VA | Plakat Gunungan 202403080443960857 | KE 1360018231529	65,206,613.00	1,750,000.00	0.00	63,456,613.00	MCM	
13-03-2024	08:42:28	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422111050 | KE	63,456,613.00	1,071,150.00	0.00	62,385,463.00	MCM	
13-03-2024	08:42:28	MCM UBP Payment VA | 202403080533968326 /9910000002106 | KE	62,385,463.00	2,500.00	0.00	62,382,963.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
13-03-2024	08:42:28	MCM InhouseTrf VA | 202403080543972922 | KE 9910000133349	62,382,963.00	536,651.00	0.00	61,846,312.00	MCM	
13-03-2024	08:42:29	MCM InhouseTrf VA | 202403130724512019 | KE 9910000133349	61,846,312.00	19,205,247.00	0.00	42,641,065.00	MCM	
13-03-2024	08:42:30	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403130724512019 | KE 9910000133349	42,641,065.00	5,800.00	0.00	42,635,265.00	MCM	
13-03-2024	09:06:50	New Mandiri Online Trf VA | | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	42,635,265.00	0.00	3,873,267.00	46,508,532.00	OTHERS	
13-03-2024	13:13:41	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001516000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	46,508,532.00	0.00	111,384,357.00	157,892,889.00	SPAN	
13-03-2024	13:14:37	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001517000001 | Pembayaran belanja pegawai-gaji terusan	157,892,889.00	0.00	8,017,700.00	165,910,589.00	SPAN	
13-03-2024	13:14:45	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001518000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	165,910,589.00	0.00	1,945,800.00	167,856,389.00	SPAN	
13-03-2024	13:14:52	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001514000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	167,856,389.00	0.00	9,982,648.00	177,839,037.00	SPAN	
13-03-2024	13:15:07	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001515000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	177,839,037.00	0.00	104,116,180.00	281,955,217.00	SPAN	
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | | KE	281,955,217.00	0.00	10,000.00	281,965,217.00	MCM	
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | | KE	281,965,217.00	0.00	1,945,800.00	283,911,017.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084549 | KE	283,911,017.00	10,000.00	0.00	283,901,017.00	MCM	
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084580 | KE	283,901,017.00	3,041,004.00	0.00	280,860,013.00	MCM	
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084556 | KE	280,860,013.00	2,377,209.00	0.00	278,482,804.00	MCM	
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF603 2987100007480 | KE	278,482,804.00	461,797.00	0.00	278,021,007.00	MCM	
14-03-2024	07:00:17	MCM InhouseTrf VA | 202403140439794538 | KE 9910000133349	278,021,007.00	66,985,700.00	0.00	211,035,307.00	MCM	
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF489 5940300048201 | KE	211,035,307.00	4,082,638.00	0.00	206,952,669.00	MCM	
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084564 | KE	206,952,669.00	1,945,800.00	0.00	205,006,869.00	MCM	
14-03-2024	07:00:17	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084655 | KE	205,006,869.00	10,000.00	0.00	204,996,869.00	MCM	
14-03-2024	07:00:18	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403140439794538 | KE 9910000133349	204,996,869.00	14,500.00	0.00	204,982,369.00	MCM	
14-03-2024	08:20:00	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084655 | KE	204,982,369.00	10,000.00	0.00	204,972,369.00	MCM	
14-03-2024	08:20:00	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084564 | KE	204,972,369.00	1,945,800.00	0.00	203,026,569.00	MCM	
14-03-2024	08:20:00	MCM InhouseTrf VA | 202403140800816422 | KE 9910000133349	203,026,569.00	7,180,000.00	0.00	195,846,569.00	MCM	
14-03-2024	08:20:01	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403140800816422 | KE 9910000133349	195,846,569.00	11,600.00	0.00	195,834,969.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
14-03-2024	08:20:02	MCM InhouseTrf VA | 202403140815824007 | KE 1360030439852	195,834,969.00	6,122,500.00	0.00	189,712,469.00	MCM	
14-03-2024	08:35:35	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF820240313877587 | KE	189,712,469.00	6,790,000.00	0.00	182,922,469.00	MCM	
14-03-2024	08:35:37	MCM InhouseTrf VA | Diklat Arsiparis 202403140833838386 | KE 1360030439852	182,922,469.00	13,580,000.00	0.00	169,342,469.00	MCM	
14-03-2024	08:42:13	MCM InhouseTrf VA | gaji terusan ke 2 202403140837843735 | KE 1360030348640	169,342,469.00	8,017,700.00	0.00	161,324,769.00	MCM	
14-03-2024	14:43:57	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001572000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	161,324,769.00	0.00	9,117,730.00	170,442,499.00	SPAN	
15-03-2024	10:04:35	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF4340750300085108 | KE	170,442,499.00	500,000.00	0.00	169,942,499.00	MCM	
15-03-2024	10:04:35	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF4895940300048201 | KE	169,942,499.00	8,617,730.00	0.00	161,324,769.00	MCM	
15-03-2024	10:04:41	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202403150958729069 | KE 9910000133315	161,324,769.00	6,218,431.00	0.00	155,106,338.00	MCM	
15-03-2024	10:05:24	MCM InhouseTrf VA | Refund 202403150958729069 | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	155,106,338.00	0.00	180,000.00	155,286,338.00	MCM	
15-03-2024	15:20:58	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028650213919057 | KE	155,286,338.00	180,000.00	0.00	155,106,338.00	MCM	
18-03-2024	08:02:31	MCM InhouseTrf VA | 202403180659544839 | KE 9910000133349	155,106,338.00	84,063,460.00	0.00	71,042,878.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
18-03-2024	08:02:32	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403180659544839 | KE 9910000133349	71,042,878.00	8,700.00	0.00	71,034,178.00	MCM	
18-03-2024	15:15:01	MCM InhouseTrf VA | 202403181125808016 | KE 9910000133349	71,034,178.00	904,000.00	0.00	70,130,178.00	MCM	
18-03-2024	15:15:02	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403181125808016 | KE 9910000133349	70,130,178.00	5,800.00	0.00	70,124,378.00	MCM	
18-03-2024	15:15:03	MCM Outw SKN (VA) | Konsumsi Makan 202403181513589551 | KE 0091672803	70,124,378.00	2,080,000.00	0.00	68,044,378.00	MCM	
18-03-2024	15:15:03	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202403181513589551 | KE 0091672803	68,044,378.00	2,900.00	0.00	68,041,478.00	MCM	
19-03-2024	07:54:08	MCM InhouseTrf VA | 202403182142773876 | KE 9910000133349	68,041,478.00	28,900,813.00	0.00	39,140,665.00	MCM	
19-03-2024	07:54:09	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403182142773876 | KE 9910000133349	39,140,665.00	11,600.00	0.00	39,129,065.00	MCM	
19-03-2024	08:57:32	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001762000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	39,129,065.00	0.00	47,969,551.00	87,098,616.00	SPAN	
19-03-2024	09:01:38	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001763000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	87,098,616.00	0.00	162,670,200.00	249,768,816.00	SPAN	
19-03-2024	11:25:18	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202403191117696258 | KE 9910000133315	249,768,816.00	3,923,200.00	0.00	245,845,616.00	MCM	
19-03-2024	14:45:03	| RTR-202403180659544839-870-REK TDK ADA | VACORRECTION	245,845,616.00	0.00	37,984,800.00	283,830,416.00	OTHERS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
20-03-2024	08:47:26	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302001814000001 | Pembayaran belanja pegawai-uang makan bu	283,830,416.00	0.00	627,300.00	284,457,716.00	SPAN	
21-03-2024	08:03:18	MCM InhouseTrf VA | 202403201523902851 | KE 9910000133349	284,457,716.00	11,932,000.00	0.00	272,525,716.00	MCM	
21-03-2024	08:03:19	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403201523902851 | KE 9910000133349	272,525,716.00	2,900.00	0.00	272,522,816.00	MCM	
21-03-2024	14:13:48	MCM InhouseTrf VA | 202403211344662854 | KE 9910000133349	272,522,816.00	26,134,319.00	0.00	246,388,497.00	MCM	
21-03-2024	14:13:48	MCM InhouseTrf VA | Hotel Bhimo 202403211410713263 | KE 1360030439852	246,388,497.00	1,100,000.00	0.00	245,288,497.00	MCM	
21-03-2024	14:13:52	MCM InhouseTrf VA | Uang Makan Bulan Feb 202403211109939963 | KE 1380007448371	245,288,497.00	627,300.00	0.00	244,661,197.00	MCM	
21-03-2024	14:13:52	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403211344662854 | KE 9910000133349	244,661,197.00	11,600.00	0.00	244,649,597.00	MCM	
22-03-2024	15:18:41	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403221515906315 | KE 9910000133349	244,649,597.00	2,900.00	0.00	244,646,697.00	MCM	
22-03-2024	15:18:41	MCM InhouseTrf VA | 202403221515906315 | KE 9910000133349	244,646,697.00	5,426,074.00	0.00	239,220,623.00	MCM	
25-03-2024	11:56:26	MCM InhouseTrf VA | 202403251145923888 | KE 9910000133349	239,220,623.00	3,085,602.00	0.00	236,135,021.00	MCM	
25-03-2024	11:56:29	MCM InhouseTrf VA | Meeting Fullboard Ka 202403251147927526 | KE 1350080009168	236,135,021.00	37,984,800.00	0.00	198,150,221.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
26-03-2024	07:32:39	MCM InhouseTrf VA | 202403251518916543 | KE 9910000133349	198,150,221.00	15,227,620.00	0.00	182,922,601.00	MCM	
26-03-2024	07:32:40	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403251518916543 | KE 9910000133349	182,922,601.00	14,500.00	0.00	182,908,101.00	MCM	
26-03-2024	07:32:41	MCM InhouseTrf VA | ST 132 202403251521923188 | KE 1360030349580	182,908,101.00	300,000.00	0.00	182,608,101.00	MCM	
26-03-2024	07:32:45	MCM InhouseTrf VA | ST 132 202403251522928515 | KE 1360030917238	182,608,101.00	300,000.00	0.00	182,308,101.00	MCM	
26-03-2024	13:48:04	MCM Outw SKN (VA) | ST 187 Hotel 202403261340991982 | KE 6800788887	182,308,101.00	1,448,000.00	0.00	180,860,101.00	MCM	
26-03-2024	13:48:04	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202403261340991982 | KE 6800788887	180,860,101.00	2,900.00	0.00	180,857,201.00	MCM	
27-03-2024	08:27:38	MCM InhouseTrf VA | 202403261522756534 | KE 9910000133349	180,857,201.00	36,734,651.00	0.00	144,122,550.00	MCM	
27-03-2024	08:27:39	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403261522756534 | KE 9910000133349	144,122,550.00	2,900.00	0.00	144,119,650.00	MCM	
27-03-2024	13:50:23	MCM InhouseTrf VA | 202403271348823409 | KE 9910000133349	144,119,650.00	27,180,000.00	0.00	116,939,650.00	MCM	
27-03-2024	13:50:24	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202403271348823409 | KE 9910000133349	116,939,650.00	8,700.00	0.00	116,930,950.00	MCM	
28-03-2024	18:25:43	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202403281816571355 | KE 9910000133315	116,930,950.00	4,410,317.00	0.00	112,520,633.00	MCM	

01/03/2024 14:52:11

Account Balance

Customer **LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG**

Organization Unit Name **00571 - KCP SAMPANGAN**

Current

Account No/Account Name	*Account Status*	Currency	*Ledger balance*	*Available Balance*
0057101300000280 / RPL 026 KS	Active	IDR	0.00	0.00
		Total	***0.00***	***0.00***

Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang
Jawa Tengah
Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Thursday 04 April
Reference 1712198623702

Laporan Saldo Rekening

Kota Semarang
RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG

Total Saldo : Rp. 0

No	CIF	Rekening	Nama Rekening	Cabang	Saldo
1	03734254	1053003521	RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG	CAPEM SAMPANGAN	0

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: April 2024

Kementerian/Lembaga	: (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Tgl, No. SP	: 28 November 2023 , DIPA-023.01.2.723014/2024
Unit Organisasi	: (01) SEKRETARIAT JENDERAL	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG	KPPN	: (026) Semarang I
Satuan Kerja	: (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 1.337.726.082,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00336/SSP/723014/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	134.338.633,00	1.790.037.083,00	586.649.634,00	1.337.726.082,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	134.338.633,00	1.790.037.083,00	586.649.634,00	1.337.726.082,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	134.338.633,00	1.768.219.083,00	564.831.634,00	1.337.726.082,00
	1. BP UP*)	134.338.633,00	625.632.233,00	534.045.684,00	225.925.182,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	16.782.700,00	16.782.700,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	14.003.250,00	14.003.250,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	1.111.800.900,00	0,00	1.111.800.900,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 74.074.818,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	1.337.726.082,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	1.337.726.082,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	1.337.726.082,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	1.337.726.082,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1.	Saldo UP	Rp.	225.925.182,00
2.	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	74.074.818,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4.	Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5.	Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1.	Saldo TUP	Rp.	0,00
2.	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4.	Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5.	Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1.	Saldo Lainnya	Rp.	1.111.800.900,00
2.	Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	1.111.800.900,00
3.	Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196608051994031001

KOTA SEMARANG, April 2024
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Dicetak pada tanggal,03 Mei 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 bulan April tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100127230141000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 1.337.726.082 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00336/SSP/723014/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	1.337.726.082
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.337.726.082

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	225.925.182
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	1.111.800.900
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	1.337.726.082

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	1.337.726.082
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	1.337.726.082

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a.	Saldo UP	Rp.	225.925.182
	b.	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	74.074.818
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	300.000.000
2	a.	Saldo TUP	Rp.	0
	b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3		Saldo Lainnya	Rp.	1.111.800.900
4		Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.411.800.900

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	300.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	1.111.800.900
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	1.411.800.900

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 723014

BULAN : APRIL 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100127230141000	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	MANDIRI	20	S-3895/WPB.12/KP.03/2021	23-12-2021	2024-04-30	225,925,182.00
2	0057101300000280	RPL 026 KS LLDIKTI W	Semarang	30	S-614/KPN.1401/2023	02-08-2023	02-04-2024	1,111,800,900.00
3	1053003521	RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B	Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang	30	S-7/KPN.1401/2023	05-01-2023	-	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Nofaina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : APRIL 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 8100127230141000

Nama Rekening : BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG

Nama Bank : MANDIRI

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Maret 2024			112.520.633,00
01-04-2024	FPK-PENG-A6wrCQLgM70bufl	SPM GUP	126.220.342,00	0,00	238.740.975,00
01-04-2024	FPK-PENG-p6fPMh9VGXV83F4	SPM GUP	39.441.025,00	0,00	278.182.000,00
01-04-2024	FPK-PENG-CaOvV8dcpqEqOGj	[DARI TUNAI] Setor Tunai Bank	20.370.000,00	0,00	298.552.000,00
01-04-2024	FPK-PENG-WFNpjFGrEiuKwya	[DARI TUNAI] Setor Tunai Bank	1.448.000,00	0,00	300.000.000,00
01-04-2024	01120/KW/723014/2024	Biaya paket meeting fullday Pakarti Series Angkatan 1	0,00	39.875.000,00	260.125.000,00
01-04-2024	01121/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Maret 2024	0,00	2.116.000,00	258.009.000,00
01-04-2024	01122/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Maret 2024	0,00	2.052.000,00	255.957.000,00
01-04-2024	01123/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Maret 2024	0,00	1.132.000,00	254.825.000,00
01-04-2024	01105/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Penggantian Pipa Instalasi AC 2 PK Ruang Kabag Umum	0,00	1.042.000,00	253.783.000,00

1	2	3	4	5	6
		Gedung C			
01-04-2024	01109/KW/723014/2024	1.Melakukan konsultasi permasalahan studi lanjut dosen PNS dpk 1 Kurnia Wijayanti 2 Alwani Hamad 3 Yunita Widiyantari 4 Indah Riwayati 2. Konsultasi permasalahan kepegawaian 3. Menyerahkan dokumen Ujikom Perencana ke Bappenas	0,00	994.500,00	252.788.500,00
01-04-2024	01106/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Isi Freon AC, ganti kapasitor, dan lain-lain ruangan Akmawa Gedung D	0,00	990.000,00	251.798.500,00
01-04-2024	01124/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Maret 2024	0,00	988.000,00	250.810.500,00
01-04-2024	01116/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	980.112,00	249.830.388,00
01-04-2024	01114/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	805.659,00	249.024.729,00
01-04-2024	01117/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	805.659,00	248.219.070,00
01-04-2024	01126/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Maret 2024	0,00	736.000,00	247.483.070,00
01-04-2024	01125/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Maret 2024	0,00	736.000,00	246.747.070,00
01-04-2024	01127/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Maret 2024	0,00	736.000,00	246.011.070,00
01-04-2024	01115/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	710.659,00	245.300.411,00
01-04-2024	01110/KW/723014/2024	1.Melakukan konsultasi permasalahan studi lanjut dosen PNS dpk 1 Kurnia Wijayanti 2 Alwani Hamad 3 Yunita Widiyantari 4 Indah Riwayati 2. Konsultasi permasalahan kepegawaian 3. Menyerahkan dokumen Ujikom Perencana ke Bappenas	0,00	700.000,00	244.600.411,00
01-04-2024	01234/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Maret 2024	0,00	680.000,00	243.920.411,00
01-04-2024	01129/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Maret 2024	0,00	680.000,00	243.240.411,00
01-04-2024	01130/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Maret 2024	0,00	680.000,00	242.560.411,00

1	2	3	4	5	6
01-04-2024	01112/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	635.000,00	241.925.411,00
01-04-2024	01118/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	592.000,00	241.333.411,00
01-04-2024	01119/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	514.189,00	240.819.222,00
01-04-2024	01111/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	391.000,00	240.428.222,00
01-04-2024	01108/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	351.000,00	240.077.222,00
01-04-2024	01107/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	296.000,00	239.781.222,00
01-04-2024	01131/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Maret 2024	0,00	272.000,00	239.509.222,00
01-04-2024	01132/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Maret 2024	0,00	272.000,00	239.237.222,00
01-04-2024	01113/KW/723014/2024	Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan I	0,00	265.000,00	238.972.222,00
02-04-2024	FPK-PENG-j78oRu50jl5kmzL	LS BP	8.137.700,00	0,00	247.109.922,00
02-04-2024	FPK-PENG-jHO9ijbjAXjQCgW	LS BP	8.017.700,00	0,00	255.127.622,00
03-04-2024	00253/BP/723014/2024	Pungut Pajak	1.819.415,00	0,00	256.947.037,00
03-04-2024	00242/BP/723014/2024	pungut pajak	797.500,00	0,00	257.744.537,00
03-04-2024	00255/BP/723014/2024	Pungut Pajak	520.000,00	0,00	258.264.537,00
03-04-2024	00256/BP/723014/2024	Pungut Pajak	494.000,00	0,00	258.758.537,00
03-04-2024	00243/BP/723014/2024	pungut pajak	317.400,00	0,00	259.075.937,00
03-04-2024	00244/BP/723014/2024	pungut pajak	307.800,00	0,00	259.383.737,00
03-04-2024	00254/BP/723014/2024	Pungut Pajak	286.000,00	0,00	259.669.737,00
03-04-2024	00263/BP/723014/2024	Pungut Pajak	220.000,00	0,00	259.889.737,00
03-04-2024	00274/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	260.024.737,00
03-04-2024	00258/BP/723014/2024	Pungut pajak	135.000,00	0,00	260.159.737,00
03-04-2024	00262/BP/723014/2024	Pungut pajak	135.000,00	0,00	260.294.737,00

1	2	3	4	5	6
03-04-2024	00259/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	260.429.737,00
03-04-2024	00277/BP/723014/2024	PUNGUT PAJAK	135.000,00	0,00	260.564.737,00
03-04-2024	00261/BP/723014/2024	Pungut pajak	135.000,00	0,00	260.699.737,00
03-04-2024	00267/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	260.789.737,00
03-04-2024	00264/BP/723014/2024	Pungut pajak	90.000,00	0,00	260.879.737,00
03-04-2024	00266/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	260.969.737,00
03-04-2024	00265/BP/723014/2024	Pungut pajak	90.000,00	0,00	261.059.737,00
03-04-2024	00268/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	261.149.737,00
03-04-2024	00257/BP/723014/2024	Pungut Pajak	60.000,00	0,00	261.209.737,00
03-04-2024	00245/BP/723014/2024	pungut pajak	56.600,00	0,00	261.266.337,00
03-04-2024	00278/BP/723014/2024	pungut pajak	49.400,00	0,00	261.315.737,00
03-04-2024	00260/BP/723014/2024	Pungut Pajak	45.000,00	0,00	261.360.737,00
03-04-2024	00240/BP/723014/2024	Pungut pajak	41.680,00	0,00	261.402.417,00
03-04-2024	00251/BP/723014/2024	Pungut pajak	40.800,00	0,00	261.443.217,00
03-04-2024	00241/BP/723014/2024	pungut pajak	39.600,00	0,00	261.482.817,00
03-04-2024	00247/BP/723014/2024	pungut pajak	36.800,00	0,00	261.519.617,00
03-04-2024	00246/BP/723014/2024	pungut pajak	36.800,00	0,00	261.556.417,00
03-04-2024	00249/BP/723014/2024	pungut pajak	34.000,00	0,00	261.590.417,00
03-04-2024	00279/BP/723014/2024	pungut pajak	34.000,00	0,00	261.624.417,00
03-04-2024	00248/BP/723014/2024	pungut pajak	34.000,00	0,00	261.658.417,00
03-04-2024	00252/BP/723014/2024	Pungut Pajak	17.625,00	0,00	261.676.042,00
03-04-2024	00273/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	261.691.042,00
03-04-2024	00271/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	261.706.042,00
03-04-2024	00272/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	261.721.042,00
03-04-2024	00269/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	261.736.042,00
03-04-2024	00270/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	261.751.042,00

1	2	3	4	5	6
03-04-2024	00250/BP/723014/2024	pungut pajak	13.600,00	0,00	261.764.642,00
03-04-2024	01225/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting dalam rangka kegiatan Workshop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	25.250.000,00	236.514.642,00
03-04-2024	01151/KW/723014/2024	Paket Meeting Fullboard Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Impelemntasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	24.700.000,00	211.814.642,00
03-04-2024	01136/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman berupa Pemeliharaan Saluran Air/Talud Taman dalam rangka Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	0,00	15.535.000,00	196.279.642,00
03-04-2024	01210/KW/723014/2024	Paket meeting fullday 44 pax	0,00	11.000.000,00	185.279.642,00
03-04-2024	01139/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Penggantian AVR Genset Perkins 110 KVA	0,00	4.440.000,00	180.839.642,00
03-04-2024	01149/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Impelemntasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	3.600.000,00	177.239.642,00
03-04-2024	01150/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Impelemntasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	3.600.000,00	173.639.642,00
03-04-2024	01224/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	2.700.000,00	170.939.642,00
03-04-2024	01223/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	2.700.000,00	168.239.642,00
03-04-2024	01203/KW/723014/2024	Honor Narasumber MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	2.700.000,00	165.539.642,00
03-04-2024	01200/KW/723014/2024	Honor Narasumber MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	2.700.000,00	162.839.642,00
03-04-2024	01204/KW/723014/2024	Honor Narasumber MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	2.700.000,00	160.139.642,00
03-04-2024	01201/KW/723014/2024	Honor Narasumber MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	2.700.000,00	157.439.642,00

1	2	3	4	5	6
03-04-2024	01138/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Servis Panel Pompa dan Penggantian Spare Part Panel	0,00	2.442.000,00	154.997.642,00
03-04-2024	01141/KW/723014/2024	Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Lanjut Angkatan 1 s.d. 6	0,00	1.833.000,00	153.164.642,00
03-04-2024	01212/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	151.364.642,00
03-04-2024	01213/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	149.564.642,00
03-04-2024	01215/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	147.764.642,00
03-04-2024	01214/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	145.964.642,00
03-04-2024	01211/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	144.164.642,00
03-04-2024	01146/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	142.634.642,00
03-04-2024	01147/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	141.104.642,00
03-04-2024	01133/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Konsultasi dengan Biro SDM Kemendikbudristek Tanggal 28/03/2024 s.d 28/03/2024 Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jl. Jenderal Sudirman Lantai 2, Senayan, Kecamatan	0,00	1.448.000,00	139.656.642,00
03-04-2024	01148/KW/723014/2024	Konsultasi dengan Biro SDM Kemendikbudristek	0,00	1.290.500,00	138.366.142,00
03-04-2024	01143/KW/723014/2024	Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis PDLN pada satuan pendidikan dan satuan kerja Kemendikbudristek	0,00	1.272.000,00	137.094.142,00
03-04-2024	01142/KW/723014/2024	Mengantar Bapak Kepala ke Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek untuk mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Lanjut Angkatan 1 s.d. 6	0,00	904.500,00	136.189.642,00
03-04-2024	01202/KW/723014/2024	Honor Narasumber MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	900.000,00	135.289.642,00
03-04-2024	01227/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	635.000,00	134.654.642,00

1	2	3	4	5	6
03-04-2024	01233/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	635.000,00	134.019.642,00
03-04-2024	01228/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	635.000,00	133.384.642,00
03-04-2024	01229/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	635.000,00	132.749.642,00
03-04-2024	01230/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	629.844,00	132.119.798,00
03-04-2024	01206/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	615.400,00	131.504.398,00
03-04-2024	01231/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	613.844,00	130.890.554,00
03-04-2024	01232/KW/723014/2024	Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	605.450,00	130.285.104,00
03-04-2024	01208/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	495.000,00	129.790.104,00
03-04-2024	01209/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	495.000,00	129.295.104,00
03-04-2024	01134/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembuatan MMT Terus Bergerak dan WBBM	0,00	440.625,00	128.854.479,00
03-04-2024	01167/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	128.424.479,00
03-04-2024	01168/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	127.994.479,00
03-04-2024	01175/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	127.564.479,00
03-04-2024	01153/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	127.134.479,00
03-04-2024	01166/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	126.704.479,00
03-04-2024	01173/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	126.274.479,00
03-04-2024	01176/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan	0,00	430.000,00	125.844.479,00

1	2	3	4	5	6
		Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI			
03-04-2024	01177/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	125.414.479,00
03-04-2024	01180/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	124.984.479,00
03-04-2024	01185/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	124.554.479,00
03-04-2024	01158/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	124.124.479,00
03-04-2024	01164/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	123.694.479,00
03-04-2024	01188/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	123.264.479,00
03-04-2024	01189/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	122.834.479,00
03-04-2024	01191/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	122.404.479,00
03-04-2024	01157/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	121.974.479,00
03-04-2024	01162/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	121.544.479,00
03-04-2024	01154/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	121.114.479,00
03-04-2024	01160/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	120.684.479,00
03-04-2024	01165/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	120.254.479,00

1	2	3	4	5	6
03-04-2024	01169/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	119.824.479,00
03-04-2024	01179/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	119.394.479,00
03-04-2024	01183/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	118.964.479,00
03-04-2024	01186/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	118.534.479,00
03-04-2024	01187/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	118.104.479,00
03-04-2024	01193/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	117.674.479,00
03-04-2024	01155/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	117.244.479,00
03-04-2024	01156/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	116.814.479,00
03-04-2024	01163/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	116.384.479,00
03-04-2024	01181/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	115.954.479,00
03-04-2024	01182/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	115.524.479,00
03-04-2024	01190/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	115.094.479,00
03-04-2024	01159/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	114.664.479,00
03-04-2024	01161/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun	0,00	430.000,00	114.234.479,00

1	2	3	4	5	6
		2021 LLDIKTI Wilayah VI			
03-04-2024	01171/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	113.804.479,00
03-04-2024	01172/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	113.374.479,00
03-04-2024	01178/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	112.944.479,00
03-04-2024	01184/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	112.514.479,00
03-04-2024	01192/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	430.000,00	112.084.479,00
03-04-2024	01170/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	111.654.479,00
03-04-2024	01174/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	430.000,00	111.224.479,00
03-04-2024	01196/KW/723014/2024	Honor Panitia MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	400.000,00	110.824.479,00
03-04-2024	01140/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Perjadin Kepala H 1033 XG Audiensi Permasalahan Program Magang Internasional Ferein Job Jerman dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIK	0,00	392.770,00	110.431.709,00
03-04-2024	01226/KW/723014/2024	Biaya Tiket Pulang a.n. Ramadhina Febry Darmanto, Henny Dyah Wulandari, Budi Cholisetiawan, M. Zaenudin Magelang Semarang dalam rangka Worskhop Pelaporan PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	380.000,00	110.051.709,00
03-04-2024	01219/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Sekretaris dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	300.000,00	109.751.709,00
03-04-2024	01199/KW/723014/2024	Honor Panitia MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	300.000,00	109.451.709,00

1	2	3	4	5	6
03-04-2024	01217/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Sekretaris dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	300.000,00	109.151.709,00
03-04-2024	01216/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Sekretaris dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	300.000,00	108.851.709,00
03-04-2024	01218/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Sekretaris dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	300.000,00	108.551.709,00
03-04-2024	01197/KW/723014/2024	Honor Panitia MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	300.000,00	108.251.709,00
03-04-2024	01198/KW/723014/2024	Honor Panitia MBKM TU-FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	0,00	300.000,00	107.951.709,00
03-04-2024	01221/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Sekretaris dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	300.000,00	107.651.709,00
03-04-2024	01222/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Sekretaris dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	300.000,00	107.351.709,00
03-04-2024	01220/KW/723014/2024	Honor Panitia sebagai Sekretaris dalam kegiatan Workshop PDDIKTI Semester 2023/2024 Gasal Angkatan II	0,00	300.000,00	107.051.709,00
03-04-2024	01152/KW/723014/2024	Bimtek Tata Kelola Arsip Elektronik dan Implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	260.000,00	106.791.709,00
03-04-2024	01205/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	260.000,00	106.531.709,00
03-04-2024	00245/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	220.000,00	106.311.709,00
03-04-2024	01195/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	200.000,00	106.111.709,00
03-04-2024	01144/KW/723014/2024	Mengantar LPJ Keuangan Bulan Februari 2024 dan Mengantar Surat	0,00	170.000,00	105.941.709,00
03-04-2024	01145/KW/723014/2024	Mengambil LPJ Keuangan Bulan Februari 2024	0,00	170.000,00	105.771.709,00
03-04-2024	01194/KW/723014/2024	Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1	0,00	170.000,00	105.601.709,00
03-04-2024	01207/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	170.000,00	105.431.709,00
03-04-2024	01135/KW/723014/2024	Biaya Pengiriman Surat Dinas bulan Maret	0,00	61.000,00	105.370.709,00

1	2	3	4	5	6
		2024			
03-04-2024	01137/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian kawat	0,00	18.000,00	105.352.709,00
04-04-2024	FPK-PENG-mEDBQpmJJpsYFHc	SPM GUP	168.288.816,00	0,00	273.641.525,00
04-04-2024	FPK-PENG-isAqLREhPSiT0eI	SPM GUP	48.930.895,00	0,00	322.572.420,00
05-04-2024	00306/BP/723014/2024	pungut pajak	374.000,00	0,00	322.946.420,00
05-04-2024	00305/BP/723014/2024	Pungut pajak	180.000,00	0,00	323.126.420,00
05-04-2024	00304/BP/723014/2024	pungut pajak	180.000,00	0,00	323.306.420,00
05-04-2024	00298/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	323.396.420,00
05-04-2024	00290/BP/723014/2024	Pungut pajak	90.000,00	0,00	323.486.420,00
05-04-2024	00295/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	323.576.420,00
05-04-2024	00292/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	323.666.420,00
05-04-2024	00297/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	323.756.420,00
05-04-2024	00299/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	323.846.420,00
05-04-2024	00294/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	323.936.420,00
05-04-2024	00313/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	324.026.420,00
05-04-2024	00291/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	324.116.420,00
05-04-2024	00289/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	324.206.420,00
05-04-2024	00296/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	324.296.420,00
05-04-2024	00300/BP/723014/2024	pungut pajak	67.500,00	0,00	324.363.920,00
05-04-2024	00301/BP/723014/2024	pungut pajak	20.000,00	0,00	324.383.920,00
05-04-2024	00280/BP/723014/2024	pungut pajak	20.000,00	0,00	324.403.920,00
05-04-2024	00303/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	324.418.920,00
05-04-2024	00302/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	324.433.920,00
05-04-2024	00281/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	324.448.920,00

1	2	3	4	5	6
05-04-2024	01308/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullda Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS	0,00	18.700.000,00	305.748.920,00
05-04-2024	01324/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan April 2024 ID Pel : 523011392634	0,00	13.082.275,00	292.666.645,00
05-04-2024	00003/KWTI/723014/2024	THR 2024	0,00	8.137.700,00	284.528.945,00
05-04-2024	00004/KWTI/723014/2024	Gaji terusan ke 3 April 2024	0,00	8.017.700,00	276.511.245,00
05-04-2024	01323/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan April 2024 ID Pel : 523012307734	0,00	3.994.020,00	272.517.225,00
05-04-2024	01306/KW/723014/2024	Honor Narasumber Sinkronisasi IKU, Renstra dan Renop PTS	0,00	3.600.000,00	268.917.225,00
05-04-2024	01307/KW/723014/2024	Honor Narasumber Sinkronisasi IKU, Renstra dan Renop PTS	0,00	3.600.000,00	265.317.225,00
05-04-2024	01333/KW/723014/2024	Langganan Zoom Bulan Maret 2024	0,00	3.373.690,00	261.943.535,00
05-04-2024	01241/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Audiensi Permasalahan Program Magang Internasional Ferein Job Jerman Tanggal 31/03/2024 s.d 01/04/2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Jl. Pintu Satu Senayan No.1 1, R	0,00	2.350.000,00	259.593.535,00
05-04-2024	01293/KW/723014/2024	BPJS Ketenagakerjaan PPNPN - Tagihan bulan Maret 2024	0,00	2.226.661,00	257.366.874,00
05-04-2024	01240/KW/723014/2024	Audiensi Permasalahan Program Magang Internasional Ferein Job Jerman	0,00	2.214.500,00	255.152.374,00
05-04-2024	01269/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	253.352.374,00
05-04-2024	01264/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	251.552.374,00
05-04-2024	01267/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	249.752.374,00
05-04-2024	01268/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	247.952.374,00

1	2	3	4	5	6
05-04-2024	01270/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	246.152.374,00
05-04-2024	01273/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	244.352.374,00
05-04-2024	01260/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	242.552.374,00
05-04-2024	01266/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	240.752.374,00
05-04-2024	01261/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	238.952.374,00
05-04-2024	01263/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	237.152.374,00
05-04-2024	01274/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	235.352.374,00
05-04-2024	01361/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	233.552.374,00
05-04-2024	01262/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	231.752.374,00
05-04-2024	01275/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	229.952.374,00
05-04-2024	01276/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	228.152.374,00
05-04-2024	01265/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	226.352.374,00
05-04-2024	01271/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	224.552.374,00

1	2	3	4	5	6
05-04-2024	01272/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan I	0,00	1.800.000,00	222.752.374,00
05-04-2024	01298/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, . Penyerahan SK Guru Besar Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H. Universitas Slamet Riyadi 2. Pendampingan Pengelolaan Data PDDIKTI Stikes Mitra Husada Karanganyar Tanggal 04/04/2024 s.d 05/04/2024 1.	0,00	1.500.000,00	221.252.374,00
05-04-2024	01252/KW/723014/2024	Biaya Tansportasi Kereta PP Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Angkatan I	0,00	1.323.000,00	219.929.374,00
05-04-2024	01242/KW/723014/2024	Audiensi Permasalahan Program Magang Internasional Ferein Job Jerman	0,00	1.230.000,00	218.699.374,00
05-04-2024	01319/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - STKIP NU Tegal	0,00	1.209.213,00	217.490.161,00
05-04-2024	01318/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - STKIP NU Tegal	0,00	1.208.000,00	216.282.161,00
05-04-2024	01243/KW/723014/2024	Audiensi Permasalahan Program Magang Internasional Ferein Job Jerman	0,00	1.201.000,00	215.081.161,00
05-04-2024	01246/KW/723014/2024	Mengantar Bapak Kepala untuk Konsultasi dengan Biro SDM di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	0,00	1.161.000,00	213.920.161,00
05-04-2024	01332/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan April 2024 No JasTel : 143422111050	0,00	1.071.150,00	212.849.011,00
05-04-2024	01317/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - STKIP NU Tegal	0,00	1.008.213,00	211.840.798,00
05-04-2024	01331/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan April 2024 No JasTel : 143422110530	0,00	982.350,00	210.858.448,00
05-04-2024	01288/KW/723014/2024	FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	910.000,00	209.948.448,00
05-04-2024	01286/KW/723014/2024	FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	910.000,00	209.038.448,00
05-04-2024	01291/KW/723014/2024	FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	910.000,00	208.128.448,00
05-04-2024	01289/KW/723014/2024	FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	910.000,00	207.218.448,00
05-04-2024	01287/KW/723014/2024	FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	910.000,00	206.308.448,00

1	2	3	4	5	6
05-04-2024	01290/KW/723014/2024	FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	910.000,00	205.398.448,00
05-04-2024	01299/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, . mengantar Kepala Lembaga Penyerahan SK Guru Besar Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H. Universitas Slamet Riyadi 2. Pendampingan	0,00	900.000,00	204.498.448,00
05-04-2024	01239/KW/723014/2024	Audiensi Permasalahan Program Magang Internasional Ferein Job Jerman	0,00	848.000,00	203.650.448,00
05-04-2024	01292/KW/723014/2024	FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	740.000,00	202.910.448,00
05-04-2024	01322/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan April 2024 ID Pel : 523013280785	0,00	720.601,00	202.189.847,00
05-04-2024	01238/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan DInas - Pembayaran tiket sebagian (refund) atas pembatalan Perjalanan Dinas No : 114/LL6/KU.01.00/2024 tanggal 01 Maret 2024	0,00	712.660,00	201.477.187,00
05-04-2024	01237/KW/723014/2024	Pembinaan Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahap II Kemendikbud Ristek	0,00	710.000,00	200.767.187,00
05-04-2024	01236/KW/723014/2024	Pembinaan Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahap II Kemendikbud Ristek	0,00	710.000,00	200.057.187,00
05-04-2024	01294/KW/723014/2024	Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur - NON PNS LLDIKTI Wilayah VI Periode 01/03/2024 s.d 31/03/2024	0,00	640.000,00	199.417.187,00
05-04-2024	01284/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	635.000,00	198.782.187,00
05-04-2024	01279/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	635.000,00	198.147.187,00
05-04-2024	01281/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	635.000,00	197.512.187,00
05-04-2024	01280/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	635.000,00	196.877.187,00
05-04-2024	01282/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	635.000,00	196.242.187,00
05-04-2024	01278/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	635.000,00	195.607.187,00
05-04-2024	01285/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	635.000,00	194.972.187,00
05-04-2024	01316/KW/723014/2024	Pendampingan Pelaporan PDDikti - STKIP NU Tegal	0,00	592.000,00	194.380.187,00
05-04-2024	01259/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Dosen Angkatan I	0,00	540.000,00	193.840.187,00
05-04-2024	01258/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Dosen Angkatan I	0,00	540.000,00	193.300.187,00

1	2	3	4	5	6
05-04-2024	01253/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Dosen Angkatan I	0,00	540.000,00	192.760.187,00
05-04-2024	01256/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Dosen Angkatan I	0,00	540.000,00	192.220.187,00
05-04-2024	01257/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Dosen Angkatan I	0,00	540.000,00	191.680.187,00
05-04-2024	01255/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Dosen Angkatan I	0,00	540.000,00	191.140.187,00
05-04-2024	01254/KW/723014/2024	Pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Dosen Angkatan I	0,00	540.000,00	190.600.187,00
05-04-2024	01245/KW/723014/2024	Evaluasi lapangan usulan pembukaan Pembukaan Prodi Manajemen Program Doktor dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta	0,00	493.000,00	190.107.187,00
05-04-2024	01283/KW/723014/2024	FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM	0,00	465.000,00	189.642.187,00
05-04-2024	01300/KW/723014/2024	Honor Panitia Sinkronisasi IKU, Renstra dan Renop PTS	0,00	450.000,00	189.192.187,00
05-04-2024	01301/KW/723014/2024	Honor Panitia Sinkronisasi IKU, Renstra dan Renop PTS	0,00	400.000,00	188.792.187,00
05-04-2024	01247/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Angkatan I	0,00	400.000,00	188.392.187,00
05-04-2024	01321/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan April 2024 ID Pel : 523013044430	0,00	396.000,00	187.996.187,00
05-04-2024	01235/KW/723014/2024	Uang Lembur Non PNS tanggal 27 Maret 2024	0,00	342.000,00	187.654.187,00
05-04-2024	01297/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian senar mesin potong rumput dan lain-lain	0,00	330.000,00	187.324.187,00
05-04-2024	01250/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Angkatan I	0,00	300.000,00	187.024.187,00
05-04-2024	01302/KW/723014/2024	Honor Panitia Sinkronisasi IKU, Renstra dan Renop PTS	0,00	300.000,00	186.724.187,00
05-04-2024	01248/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Angkatan I	0,00	300.000,00	186.424.187,00
05-04-2024	01305/KW/723014/2024	Honor Panitia Sinkronisasi IKU, Renstra dan Renop PTS	0,00	300.000,00	186.124.187,00
05-04-2024	01304/KW/723014/2024	Honor Panitia Sinkronisasi IKU, Renstra dan	0,00	300.000,00	185.824.187,00

1	2	3	4	5	6
		Renop PTS			
05-04-2024	01249/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Angkatan I	0,00	300.000,00	185.524.187,00
05-04-2024	01251/KW/723014/2024	Honor Ketua Panitia pendampingan Usulan Jabatan Fungsional Angkatan I	0,00	300.000,00	185.224.187,00
05-04-2024	01303/KW/723014/2024	Honor Panitia Sinkronisasi IKU, Renstra dan Renop PTS	0,00	300.000,00	184.924.187,00
05-04-2024	01244/KW/723014/2024	Evaluasi lapangan usulan pembukaan Pembukaan Prodi Manajemen Program Doktor dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta	0,00	296.000,00	184.628.187,00
05-04-2024	01312/KW/723014/2024	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS	0,00	265.000,00	184.363.187,00
05-04-2024	01320/KW/723014/2024	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS	0,00	265.000,00	184.098.187,00
05-04-2024	01309/KW/723014/2024	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS	0,00	265.000,00	183.833.187,00
05-04-2024	01311/KW/723014/2024	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS	0,00	265.000,00	183.568.187,00
05-04-2024	01310/KW/723014/2024	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS	0,00	265.000,00	183.303.187,00
05-04-2024	01313/KW/723014/2024	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS	0,00	265.000,00	183.038.187,00
05-04-2024	01334/KW/723014/2024	Biaya Pengiriman Surat Dinas - Biaya Pengiriman Buku Tabungan Pegawai	0,00	185.400,00	182.852.787,00
05-04-2024	01329/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan April 2024 No Telp 0248317281	0,00	170.783,00	182.682.004,00
05-04-2024	01315/KW/723014/2024	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS	0,00	170.000,00	182.512.004,00
05-04-2024	01314/KW/723014/2024	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis	0,00	170.000,00	182.342.004,00

1	2	3	4	5	6
		PTS			
05-04-2024	01295/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian body kunci pintu (mortise lock paloma standard)	0,00	135.000,00	182.207.004,00
05-04-2024	01328/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan April 2024 No Telp 0248311521	0,00	88.542,00	182.118.462,00
05-04-2024	01327/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan April 2024 No Telp 0248311273	0,00	59.221,00	182.059.241,00
05-04-2024	01326/KW/723014/2024	Tagihan Kartu Halo bulan April 2024 No Telp 08112690267	0,00	58.000,00	182.001.241,00
05-04-2024	01330/KW/723014/2024	Telepon bulan April 2024 No Telp 0248449458	0,00	39.907,00	181.961.334,00
05-04-2024	01325/KW/723014/2024	Tagihan Telepon Bulan April 2024 No 08112558011	0,00	30.250,00	181.931.084,00
05-04-2024	01296/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 H 6174 XG dalam rangka Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	30.000,00	181.901.084,00
15-04-2024	00325/BP/723014/2024	Pungut Pajak	505.000,00	0,00	182.406.084,00
16-04-2024	FPK-PENG-9a9IA7fZdCandvA	GUP KKP	45.409.051,00	0,00	227.815.135,00
16-04-2024	FPK-PENG-jQhfVeyfNOmKr8K	GUP KKP	44.838.716,00	0,00	272.653.851,00
16-04-2024	00312/BP/723014/2024	pungut pajak	270.000,00	0,00	272.923.851,00
16-04-2024	00293/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	273.013.851,00
16-04-2024	00288/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	273.103.851,00
16-04-2024	00311/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	273.193.851,00
16-04-2024	00286/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	273.283.851,00
16-04-2024	00283/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	273.373.851,00
16-04-2024	00285/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	273.463.851,00
16-04-2024	00287/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	273.553.851,00
16-04-2024	00284/BP/723014/2024	pungut pajak	90.000,00	0,00	273.643.851,00
16-04-2024	00308/BP/723014/2024	Pungut Pajak	20.000,00	0,00	273.663.851,00

1	2	3	4	5	6
16-04-2024	00310/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	273.678.851,00
16-04-2024	00309/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	273.693.851,00
16-04-2024	00307/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	273.708.851,00
16-04-2024	00282/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	273.723.851,00
16-04-2024	01359/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	271.923.851,00
16-04-2024	01360/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	270.123.851,00
16-04-2024	01358/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	268.323.851,00
16-04-2024	00261/SSP/723014/2024	PPN	0,00	1.539.505,00	266.784.346,00
16-04-2024	01340/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Lapangan Usul Perubahan Bentuk AMIK PGRI Kebumen menjadi Sekolah Tinggi	0,00	915.500,00	265.868.846,00
16-04-2024	01338/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Lapangan Usul Perubahan Bentuk AMIK PGRI Kebumen menjadi Sekolah Tinggi	0,00	888.000,00	264.980.846,00
16-04-2024	01337/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Lapangan Usul Perubahan Bentuk AMIK PGRI Kebumen menjadi Sekolah Tinggi	0,00	888.000,00	264.092.846,00
16-04-2024	01339/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Lapangan Usul Perubahan Bentuk AMIK PGRI Kebumen menjadi Sekolah Tinggi	0,00	888.000,00	263.204.846,00
16-04-2024	00248/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	797.500,00	262.407.346,00
16-04-2024	00267/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	494.000,00	261.913.346,00
16-04-2024	00265/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	440.000,00	261.473.346,00
16-04-2024	01355/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	261.043.346,00

1	2	3	4	5	6
16-04-2024	01349/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	260.613.346,00
16-04-2024	01357/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	260.183.346,00
16-04-2024	01356/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	259.753.346,00
16-04-2024	01352/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	259.323.346,00
16-04-2024	01350/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	258.893.346,00
16-04-2024	01354/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	258.463.346,00
16-04-2024	01353/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	258.033.346,00
16-04-2024	01351/KW/723014/2024	Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	257.603.346,00
16-04-2024	01346/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	400.000,00	257.203.346,00
16-04-2024	00249/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	317.400,00	256.885.946,00
16-04-2024	00250/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	307.800,00	256.578.146,00

1	2	3	4	5	6
16-04-2024	01347/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	256.278.146,00
16-04-2024	01345/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	255.978.146,00
16-04-2024	01344/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	255.678.146,00
16-04-2024	01341/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	255.378.146,00
16-04-2024	01342/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	255.078.146,00
16-04-2024	01348/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	254.778.146,00
16-04-2024	01343/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka Bimtek Sistem Informasi Layanan Kepegawaian bagi Pengelola Kepegawaian Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	254.478.146,00
16-04-2024	00262/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	279.910,00	254.198.236,00
16-04-2024	00263/SSP/723014/2024	PPN	0,00	242.000,00	253.956.236,00
16-04-2024	00269/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	253.821.236,00

1	2	3	4	5	6
16-04-2024	00272/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	253.686.236,00
16-04-2024	00273/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	253.551.236,00
16-04-2024	00270/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	253.416.236,00
16-04-2024	00285/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	253.281.236,00
16-04-2024	00284/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	253.146.236,00
16-04-2024	00278/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	253.056.236,00
16-04-2024	00275/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	252.966.236,00
16-04-2024	00276/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	252.876.236,00
16-04-2024	00277/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	252.786.236,00
16-04-2024	00274/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	252.696.236,00
16-04-2024	00266/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	80.000,00	252.616.236,00
16-04-2024	01335/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian pelet ikan	0,00	70.000,00	252.546.236,00
16-04-2024	00268/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	60.000,00	252.486.236,00
16-04-2024	00251/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	56.600,00	252.429.636,00
16-04-2024	01336/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian silinder pintu	0,00	52.000,00	252.377.636,00
16-04-2024	00252/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	49.400,00	252.328.236,00
16-04-2024	00271/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	45.000,00	252.283.236,00
16-04-2024	00264/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	44.000,00	252.239.236,00

1	2	3	4	5	6
16-04-2024	00246/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	41.680,00	252.197.556,00
16-04-2024	00259/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	40.800,00	252.156.756,00
16-04-2024	00247/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	39.600,00	252.117.156,00
16-04-2024	00254/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	36.800,00	252.080.356,00
16-04-2024	00253/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	36.800,00	252.043.556,00
16-04-2024	00257/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	252.009.556,00
16-04-2024	00256/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	251.975.556,00
16-04-2024	00255/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	251.941.556,00
16-04-2024	00260/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	17.625,00	251.923.931,00
16-04-2024	00282/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	251.908.931,00
16-04-2024	00280/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	251.893.931,00
16-04-2024	00283/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	251.878.931,00
16-04-2024	00279/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	251.863.931,00
16-04-2024	00281/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	251.848.931,00
16-04-2024	00258/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	13.600,00	251.835.331,00
17-04-2024	00321/BP/723014/2024	Pajak GUP KKP	8.735,00	8.735,00	251.835.331,00
17-04-2024	FPK-PENG-fuHDW5pUhCtRdZ0	Tagihan KKP No : 4895940300048201 SUTO SUGIRAHARJO	0,00	42.689.494,00	209.145.837,00
17-04-2024	FPK-PENG-l5UihrSM2xX21vi	Tagihan KKP No : 4340750300084598 LIS SETYOWATI	0,00	13.115.280,00	196.030.557,00
17-04-2024	FPK-PENG-1qWr9Y6MlVy9Jrd	Tagihan KKP No : 4340750300084564 NURKHOLIS	0,00	9.501.000,00	186.529.557,00

1	2	3	4	5	6
17-04-2024	FPK-PENG-UtTypQekBWLGFs6	Tagihan KKP No : 4340750300084606 AGUNG PRASETYO	0,00	4.753.586,00	181.775.971,00
17-04-2024	FPK-PENG-BptslgsD9ivVvNq	Tagihan KKP No : 6032987100007480 NADILA RIZKI	0,00	4.282.315,00	177.493.656,00
17-04-2024	FPK-PENG-b4vPlZPAYCzJKOj	Tagihan KKP No : 4340750300084549 NATANAEL PRIHASTOMO	0,00	3.808.887,00	173.684.769,00
17-04-2024	FPK-PENG-JNwszTtQX4GRldR	Tagihan KKP No : 4340750300085108 ADHRIAL REFADDIN	0,00	3.372.040,00	170.312.729,00
17-04-2024	FPK-PENG-geKrQU1UEdiKikP	Tagihan KKP No : 4340750300084556 BHIMO WIDYO ANDOKO	0,00	3.360.899,00	166.951.830,00
17-04-2024	FPK-PENG-wP4fo5qmy1vNO0U	Tagihan KKP No : 4340750300084655 SRI HARTONO	0,00	3.010.051,00	163.941.779,00
17-04-2024	FPK-PENG-hZeYu8XpfjV9jye	Tagihan KKP No : 4340750300084580 SITI NURUL JANNAH	0,00	2.345.480,00	161.596.299,00
17-04-2024	00336/SSP/723014/2024	PPH PS 23	0,00	505.000,00	161.091.299,00
19-04-2024	00314/BP/723014/2024	Pungut Pajak	5.208,00	0,00	161.096.507,00
19-04-2024	01372/KW/723014/2024	1. Penyerahan SK Guru Besar Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H. Universitas Slamet Riyadi 2. Pendampingan Pengelolaan Data PDDIKTI Stikes Mitra Husada Karanganyar 3. Penyerahan SK Izin Penggabungan Akper Yappi Sragen dan Akbid Ya	0,00	1.190.000,00	159.906.507,00
19-04-2024	01380/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	791.191,00	159.115.316,00
19-04-2024	01366/KW/723014/2024	Pendampingan Pengelolaan Data PDDIKTI - Stikes Mitra Husada Karanganyar	0,00	742.016,00	158.373.300,00
19-04-2024	01365/KW/723014/2024	Pendampingan Pengelolaan Data PDDIKTI - Stikes Mitra Husada Karanganyar	0,00	711.516,00	157.661.784,00
19-04-2024	01377/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	666.191,00	156.995.593,00
19-04-2024	01373/KW/723014/2024	Menghadiri Acara User Meeting, Kolokium Visi Misi dan Kolokium Kurikulum STIKES Nasional	0,00	654.900,00	156.340.693,00
19-04-2024	01368/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian aqua galon, aqua botol 330 ml, dan aqua cup	0,00	636.000,00	155.704.693,00
19-04-2024	01376/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	619.500,00	155.085.193,00

1	2	3	4	5	6
19-04-2024	01367/KW/723014/2024	Pendampingan Pengelolaan Data PDDIKTI - Stikes Mitra Husada Karanganyar	0,00	599.420,00	154.485.773,00
19-04-2024	01371/KW/723014/2024	1. Penyerahan SK Guru Besar Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H. Universitas Slamet Riyadi 2. Pendampingan Pengelolaan Data PDDIKTI Stikes Mitra Husada Karanganyar	0,00	592.000,00	153.893.773,00
19-04-2024	01378/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	566.010,00	153.327.763,00
19-04-2024	01381/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	519.500,00	152.808.263,00
19-04-2024	01383/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	296.000,00	152.512.263,00
19-04-2024	01374/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	296.000,00	152.216.263,00
19-04-2024	01382/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	296.000,00	151.920.263,00
19-04-2024	01375/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	296.000,00	151.624.263,00
19-04-2024	01364/KW/723014/2024	Pendampingan Pengelolaan Data PDDIKTI - Stikes Mitra Husada Karanganyar	0,00	296.000,00	151.328.263,00
19-04-2024	01379/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Modul Website Angkatan I	0,00	296.000,00	151.032.263,00
19-04-2024	01369/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian kran dan lain-lain	0,00	192.500,00	150.839.763,00
19-04-2024	01370/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Pelaporan PDDikti	0,00	170.000,00	150.669.763,00
19-04-2024	01363/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 H 6174 XG berupa ganti oli dan busi dalam rangka biaya pemeliharaan	0,00	130.208,00	150.539.555,00
19-04-2024	01362/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian gelas cup dan gelas kertas	0,00	82.500,00	150.457.055,00
21-04-2024	00316/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	150.437.055,00
23-04-2024	FPK-PENG-3EqBX1GqdJkkeym	SPM GUP	102.871.770,00	0,00	253.308.825,00
23-04-2024	FPK-PENG-	SPM GUP	49.631.618,00	0,00	302.940.443,00

1	2	3	4	5	6
	7p6sWH8iEUmllJA				
23-04-2024	00316/BP/723014/2024	Pungut Pajak	2.055.300,00	0,00	304.995.743,00
23-04-2024	00315/BP/723014/2024	Pungut pajak	910.000,00	0,00	305.905.743,00
23-04-2024	FPK-PENG-JpKsQ0uNYbnZ4do	SPM LS BP	627.300,00	0,00	306.533.043,00
23-04-2024	00317/BP/723014/2024	Pungut Pajak	22.703,00	0,00	306.555.746,00
23-04-2024	01387/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman	0,00	17.549.100,00	289.006.646,00
23-04-2024	01386/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman berupa Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Baliho pada Gerbang Kantor LLDIKTI WIlayah VI	0,00	7.770.000,00	281.236.646,00
23-04-2024	01388/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Pemeliharaan Komputer bulan Maret 2024	0,00	1.260.000,00	279.976.646,00
23-04-2024	01394/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	805.000,00	279.171.646,00
23-04-2024	01390/KW/723014/2024	Undangan Presentasi dan Evaluasi Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	643.000,00	278.528.646,00
23-04-2024	01393/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	592.000,00	277.936.646,00
23-04-2024	01391/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	592.000,00	277.344.646,00
23-04-2024	01392/KW/723014/2024	Presentasi dan Evaluasi Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	592.000,00	276.752.646,00
23-04-2024	01389/KW/723014/2024	Undangan Presentasi dan Evaluasi Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	296.000,00	276.456.646,00
23-04-2024	01395/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Isi Ulang Gas dan Rafia	0,00	67.000,00	276.389.646,00
23-04-2024	01385/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian	0,00	14.000,00	276.375.646,00

1	2	3	4	5	6
		Sikat Kawat			
24-04-2024	00314/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	374.000,00	276.001.646,00
24-04-2024	00320/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	270.000,00	275.731.646,00
24-04-2024	00312/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	275.551.646,00
24-04-2024	00313/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	275.371.646,00
24-04-2024	00303/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	275.281.646,00
24-04-2024	00292/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	275.191.646,00
24-04-2024	00298/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	275.101.646,00
24-04-2024	00301/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	275.011.646,00
24-04-2024	00297/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	90.000,00	274.921.646,00
24-04-2024	00305/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.831.646,00
24-04-2024	00302/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.741.646,00
24-04-2024	00295/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.651.646,00
24-04-2024	00304/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.561.646,00
24-04-2024	00293/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.471.646,00
24-04-2024	00319/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.381.646,00
24-04-2024	00306/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.291.646,00
24-04-2024	00296/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	90.000,00	274.201.646,00
24-04-2024	00291/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.111.646,00

1	2	3	4	5	6
24-04-2024	00307/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	274.021.646,00
24-04-2024	00294/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	273.931.646,00
24-04-2024	00290/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	273.841.646,00
24-04-2024	00299/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	273.751.646,00
24-04-2024	00300/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	273.661.646,00
24-04-2024	00308/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	273.594.146,00
24-04-2024	00287/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	273.574.146,00
24-04-2024	00309/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	273.554.146,00
24-04-2024	00310/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	273.539.146,00
24-04-2024	00315/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	273.524.146,00
24-04-2024	00289/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	273.509.146,00
24-04-2024	00317/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	273.494.146,00
24-04-2024	00318/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	273.479.146,00
24-04-2024	00311/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	273.464.146,00
24-04-2024	00288/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	273.449.146,00
24-04-2024	00322/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	8.735,00	273.440.411,00
24-04-2024	00321/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	5.208,00	273.435.203,00
25-04-2024	00320/BP/723014/2024	Pungut Pajak	326.300,00	0,00	273.761.503,00
25-04-2024	00319/BP/723014/2024	Pungut Pajak	16.577,00	0,00	273.778.080,00

1	2	3	4	5	6
25-04-2024	00318/BP/723014/2024	Pungut Pajak	5.525,00	0,00	273.783.605,00
25-04-2024	01403/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pemeliharaan cctv dan telepon	0,00	2.786.100,00	270.997.505,00
25-04-2024	01397/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa cetak infraboard dan visual infraboard (60 x 80 cm)	0,00	414.419,00	270.583.086,00
25-04-2024	01400/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Persiapan Semarak Bulan Merdeka Belajar	0,00	351.000,00	270.232.086,00
25-04-2024	01402/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Persiapan Semarak Bulan Merdeka Belajar	0,00	296.000,00	269.936.086,00
25-04-2024	01401/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Persiapan Semarak Bulan Merdeka Belajar	0,00	296.000,00	269.640.086,00
25-04-2024	01399/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa Biaya BBM Semarang-Magelang dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Semarak Bulan Merdeka Belajar - H 1034 XG	0,00	250.000,00	269.390.086,00
25-04-2024	01398/KW/723014/2024	Mengantar LPJ Bulan Maret 2024 dan Mengantar Surat Retur SP2D	0,00	170.000,00	269.220.086,00
25-04-2024	01396/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa cetak infraboad dan visual infraboard	0,00	138.125,00	269.081.961,00
29-04-2024	01407/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa pemeliharaan personal computer dan printer bulan januari - april 2024 LLDIKTI Wilayah VI	0,00	3.470.000,00	265.611.961,00
29-04-2024	01404/KW/723014/2024	Uang Lembur Pegawai Alih Daya Bulan April 2024	0,00	2.580.000,00	263.031.961,00
29-04-2024	01406/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Lampu LED dan Emergency	0,00	785.000,00	262.246.961,00
29-04-2024	01414/KW/723014/2024	Penyerahan SK Izin Pembukaan Program Studi Bisnis dan Manajemen Ritel Program Sarjana Terapan pada Politeknik Indonusa Surakarta	0,00	643.000,00	261.603.961,00
29-04-2024	00005/KWTI/723014/2024	Uang makan bulan Februari 24	0,00	627.300,00	260.976.661,00
29-04-2024	01405/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian aqua galon, isi ulang, dan gula pasir	0,00	612.000,00	260.364.661,00

1	2	3	4	5	6
29-04-2024	01411/KW/723014/2024	Undangan Presentasi dan Evaluasi Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	525.000,00	259.839.661,00
29-04-2024	01413/KW/723014/2024	Penyerahan SK Izin Pembukaan Program Studi Bisnis dan Manajemen Ritel Program Sarjana Terapan pada Politeknik Indonusa Surakarta	0,00	296.000,00	259.543.661,00
29-04-2024	01412/KW/723014/2024	Undangan Presentasi dan Evaluasi Lapangan Alih Kelola dan Pindah Lokasi Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	0,00	296.000,00	259.247.661,00
29-04-2024	01410/KW/723014/2024	Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah dalam rangka Seleksi Penerimaan Terpadu Anggota Polri T.A 2024	0,00	170.000,00	259.077.661,00
29-04-2024	01409/KW/723014/2024	Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah dalam rangka Seleksi Penerimaan Terpadu Anggota Polri T.A 2024	0,00	170.000,00	258.907.661,00
29-04-2024	01408/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian kabel RJ45	0,00	120.000,00	258.787.661,00
30-04-2024	00322/BP/723014/2024	Pungut Pajak	406.396,00	0,00	259.194.057,00
30-04-2024	00324/BP/723014/2024	Pungut Pajak	152.461,00	0,00	259.346.518,00
30-04-2024	00323/BP/723014/2024	Pungut Pajak	5.525,00	0,00	259.352.043,00
30-04-2024	01416/KW/723014/2024	Kursus/Diklat/Pelatihan bagi Pegawai - Pembayaran PNBP Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan Ii tgl 20 Februari s.d. 26 Februari 2024 a.n Hendro Widhiarto dan Andhi P	0,00	13.580.000,00	245.772.043,00
30-04-2024	01421/KW/723014/2024	Biaya Sewa kendaraan dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pegawai Dalam Rangka Evaluasi Layanan Publik	0,00	7.623.049,00	238.148.994,00
30-04-2024	01415/KW/723014/2024	Kursus/Diklat/Pelatihan bagi Pegawai - Pembayaran PNBP Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan IV tgl 4 Maret s.d. 13 Mei 2024 a.n Suto Sugiraharjo	0,00	6.790.000,00	231.358.994,00
30-04-2024	00325/SSP/723014/2024	PPN	0,00	1.739.100,00	229.619.894,00
30-04-2024	00323/SSP/723014/2024	PPN	0,00	770.000,00	228.849.894,00

1	2	3	4	5	6
30-04-2024	01417/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Kepala dalam rangka 1. Wisuda Angkatan X dan Angkat Sumpah Provesi Universitas Kusuma Husada Surakarta 2. Halal Bihalal APTISI Wilayah VI Jawa Tengah Komisariat II Surakarta ST No 220/LL6/HM.00.08/2024	0,00	750.000,00	228.099.894,00
30-04-2024	01418/KW/723014/2024	Biaya Penginapan Kepala dalam rangka 1. Wisuda Angkatan X dan Angkat Sumpah Provesi Universitas Kusuma Husada Surakarta 2. Halal Bihalal APTISI Wilayah VI Jawa Tengah Komisariat II Surakarta ST No 220/LL6/HM.00.08/2024	0,00	420.000,00	227.679.894,00
30-04-2024	00332/SSP/723014/2024	PPN	0,00	343.874,00	227.336.020,00
30-04-2024	00326/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	316.200,00	227.019.820,00
30-04-2024	00330/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	276.100,00	226.743.720,00
30-04-2024	01420/KW/723014/2024	Biaya Transfer bulan April	0,00	224.900,00	226.518.820,00
30-04-2024	00335/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	152.461,00	226.366.359,00
30-04-2024	00324/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	140.000,00	226.226.359,00
30-04-2024	01419/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembuatan infraboard	0,00	138.125,00	226.088.234,00
30-04-2024	00333/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	62.522,00	226.025.712,00
30-04-2024	00331/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	50.200,00	225.975.512,00
30-04-2024	00327/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	22.703,00	225.952.809,00
30-04-2024	00329/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	16.577,00	225.936.232,00
30-04-2024	00334/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	5.525,00	225.930.707,00
30-04-2024	00328/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	5.525,00	225.925.182,00

1	2	3	4	5	6
		Jumlah	**678.236.183,00**	**564.831.634,00**	**225.925.182,00**

BENDAHARA PENGELUARAN



Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : APRIL 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 0057101300000280

Nama Rekening : RPL 026 KS LLDIKTI W

Nama Bank : Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Maret 2024			0,00
02-04-2024	FPK-PENG-HGgiiUVfzGH1TxK	Dana Penelitian	1.111.800.900,00	0,00	1.111.800.900,00
		Jumlah	**1.111.800.900,00**	**0,00**	**1.111.800.900,00**

BENDAHARA PENGELUARAN



Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : APRIL 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 1053003521

Nama Rekening : RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Maret 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Noralina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 03-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	03-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C84310T7KLPS0T78 001658159303	411124	IDR	220,000	ADA
2	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AE5977463G8VQQFM 024974417399	411121	IDR	90,000	ADA
3	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	60F414ETK0HG3EQ8 055460417381	411121	IDR	36,800	ADA
4	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A4F3B0T7KM86FF70 084251417390	411121	IDR	40,800	ADA
5	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D65A13IG45VM9UG4 101275417630	411124	IDR	80,000	ADA
6	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	508CD7463G96EHUR 106349417384	411124	IDR	39,600	ADA
7	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F779867OJLMKHTOS 112730417615	411121	IDR	15,000	ADA
8	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	25E4C00Q4RLHIL0T 161386417376	411121	IDR	56,600	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E17792M2KBCMTRLU 203016417382	411121	IDR	49,400	ADA
10	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	56EE22M2KBCNOI84 209075417389	411121	IDR	34,000	ADA
11	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4AC5E00Q4RLQAPO C 210718417394	411121	IDR	60,000	ADA
12	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7F6702M2KBDA5C08 229310417392	411124	IDR	494,000	ADA
13	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9B0690T7KM8GPDQR 229606417619	411124	IDR	44,000	ADA
14	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	952D35BB3R48M0L2 263328417628	411121	IDR	15,000	ADA
15	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	533B600Q4RLR46D1 298527417601	411121	IDR	135,000	ADA
16	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7A58C5BB3R3R7L5P 298713417391	411211	IDR	440,000	ADA
17	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	003513IG45VC644J 301922417606	411121	IDR	135,000	ADA
18	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3ACD05BB3R47RKVT 348842417611	411121	IDR	15,000	ADA
19	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8749B67OJLMJOBF1 362291417607	411121	IDR	90,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4687F4ETK0HKQ081 370701417395	411121	IDR	34,000	ADA
21	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	609FB3IG45V1U43A 397949417385	411211	IDR	1,539,505	ADA
22	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AE14C0T7KM8G8QH E 402508417396	411124	IDR	17,625	ADA
23	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	35CFF00Q4RLUTAAK 449077417623	411121	IDR	135,000	ADA
24	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F42C23IG45V297JB 515064417393	411211	IDR	242,000	ADA
25	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	86EE200Q4RM44OLK 528263417613	411124	IDR	279,910	ADA
26	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	22BCC1PL4GQLH72R 554351417605	411121	IDR	90,000	ADA
27	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3AD1B7463G8LETEE 567188417375	411121	IDR	36,800	ADA
28	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2A5EB0T7KM8FBB90 572093417373	411124	IDR	41,680	ADA
29	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9F73A1PL4GQLT7UT 657631417609	411121	IDR	90,000	ADA
30	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	015161PL4GQJNFFO 698063417608	411121	IDR	45,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	945262M2KBCMFATJ 728437417380	411121	IDR	317,400	ADA
32	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	49C9100Q4RM3FJSJ 730835417377	411124	IDR	797,500	ADA
33	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D67851PL4GQK45N6 775551417603	411121	IDR	135,000	ADA
34	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8C89F4ETK0HFDPFO 777007417371	411121	IDR	307,800	ADA
35	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3D4C04ETK0HQD5LB 816406417398	411121	IDR	90,000	ADA
36	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	12D322M2KBD37O66 846546417616	411121	IDR	15,000	ADA
37	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	524E467OJLMFA6LR 864792417388	411121	IDR	13,600	ADA
38	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	64BD92M2KBD3LUA0 922694417612	411121	IDR	15,000	ADA
39	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F4DCB00Q4RLIBJOR 974746417379	411121	IDR	34,000	ADA
40	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	293BB1PL4GQNGHIP 985061417621	411121	IDR	135,000	ADA
41	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1396E67OJLMHISR0 998040417400	411121	IDR	135,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
42	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	751B82M2KCL1GQ4B 019041186302	411121	IDR	90,000	ADA
43	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	18BAA67OJMUKOV5 P 048954186305	411121	IDR	90,000	ADA
44	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4B1322M2KCL4BMDJ 062180186313	411121	IDR	15,000	ADA
45	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AA4150T7KNGCKBLJ 079329186314	411121	IDR	20,000	ADA
46	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	673417463HH2U147 102625186307	411121	IDR	180,000	ADA
47	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	282C21PL4I2MAHB2 120678186198	411121	IDR	90,000	ADA
48	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	DEB041PL4I2KNNDS 177904186185	411121	IDR	90,000	ADA
49	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	35C481PL4I2J6UQL 188304186182	411121	IDR	90,000	ADA
50	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	505E23IG477HK581 272866186316	411121	IDR	15,000	ADA
51	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CED195BB3SC43IT4 303369186183	411121	IDR	15,000	ADA
52	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	98D200T7KNGEI1D7 325094186318	411124	IDR	374,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
53	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7B2F14ETK1PQNCIA 362035186197	411121	IDR	90,000	ADA
54	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3AA9F5BB3SC4EJB1 383444186193	411121	IDR	90,000	ADA
55	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	929797463HGVB75I 389540186301	411121	IDR	90,000	ADA
56	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AB2B34ETK1PNG8M D 393586186192	411121	IDR	20,000	ADA
57	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	69D652M2KCL0MKB5 403422186190	411121	IDR	90,000	ADA
58	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E796D2M2KCL2UI1S 407578186195	411121	IDR	90,000	ADA
59	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	62E855BB3SC7OOO Q 427114186200	411121	IDR	90,000	ADA
60	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4830000Q4SU0OS8O 509683186337	411121	IDR	90,000	ADA
61	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	586F40T7KNG9G3NB 597523186199	411121	IDR	90,000	ADA
62	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F42C02M2KCL65C3B 634077186325	411121	IDR	270,000	ADA
63	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	396822M2KCL3OD7H 707481186319	411121	IDR	67,500	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
64	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	32FF03IG477I2O1H 735539186330	411121	IDR	15,000	ADA
65	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6BD7400Q4SU2BU15 769624186323	411124	IDR	5,208	ADA
66	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1C4D40T7KNG68BD2 806006186187	411121	IDR	15,000	ADA
67	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A3D193IG477K96SB 849346186328	411124	IDR	8,735	ADA
68	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	11F473IG477GHONR 864907186322	411121	IDR	15,000	ADA
69	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	530247463HGUI6BS 869014186181	411121	IDR	90,000	ADA
70	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6D95600Q4STRN3G3 904744186188	411121	IDR	90,000	ADA
71	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	DDDCD5BB3SC94J8H 922210186311	411121	IDR	20,000	ADA
72	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7DA4B4ETK1PQTNKA 952731186196	411121	IDR	90,000	ADA
73	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E1FE77463HH3S01A 965759186327	411121	IDR	15,000	ADA
74	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	489512M2KCL1MGQ G 968652186306	411121	IDR	90,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
75	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	721217463HGTEVHM 982117186189	411121	IDR	90,000	ADA
76	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	39EDE67OJMUM9TG 0 993894186309	411121	IDR	180,000	ADA
77	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FD9657463HHO5M17 997795186312	411121	IDR	90,000	ADA
78	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BBEDD0T7KOIN4740 010250882409	411124	IDR	62,522	ADA
79	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FA45500Q4U0B845F 018522882408	411124	IDR	152,461	ADA
80	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C6A037463IJ8A19L 261073882193	411211	IDR	276,100	ADA
81	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3C63F4ETK2S695SN 281852882194	411211	IDR	343,874	ADA
82	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	240D867OJO10RMF1 445735882197	411124	IDR	16,577	ADA
83	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	378750T7KOIH6HRD 524525882199	411211	IDR	1,739,100	ADA
84	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B94454ETK2S12THO 555074882192	411211	IDR	770,000	ADA
85	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	510D12M2KDNFM1C8 589028882189	411124	IDR	50,200	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
86	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2D7233IG489QOTPB 611129882403	411124	IDR	316,200	ADA
87	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	47ABA2M2KDNEKL20 887286882404	411124	IDR	22,703	ADA
88	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8FB4567OJO0VLQHJ 932041882190	411124	IDR	140,000	ADA
89	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CE6974ETK2S7NSVG 971899882401	411124	IDR	5,525	ADA
90	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AFD771PL4J53Q4AS 981120882407	411124	IDR	5,525	ADA
91					296234ETK0I3HG28 801586417620	411121		505,000	N/A
TOTAL								14,003,250	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 03-05-2024 13:58:04 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 03-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 03-05-2024 13:58:04 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 03-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 03-05-2024 13:58:04 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 03-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	03-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C84310T7KLPS0T78 001658159303	411124	IDR	220,000	ADA
2	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AE5977463G8VQQFM 024974417399	411121	IDR	90,000	ADA
3	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	60F414ETK0HG3EQ8 055460417381	411121	IDR	36,800	ADA
4	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A4F3B0T7KM86FF70 084251417390	411121	IDR	40,800	ADA
5	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D65A13IG45VM9UG4 101275417630	411124	IDR	80,000	ADA
6	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	508CD7463G96EHUR 106349417384	411124	IDR	39,600	ADA
7	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F779867OJLMKHTOS 112730417615	411121	IDR	15,000	ADA
8	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	25E4C00Q4RLHIL0T 161386417376	411121	IDR	56,600	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E17792M2KBCMTRLU 203016417382	411121	IDR	49,400	ADA
10	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	56EE22M2KBCNOI84 209075417389	411121	IDR	34,000	ADA
11	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4AC5E00Q4RLQAPO C 210718417394	411121	IDR	60,000	ADA
12	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7F6702M2KBDA5C08 229310417392	411124	IDR	494,000	ADA
13	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9B0690T7KM8GPDQR 229606417619	411124	IDR	44,000	ADA
14	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	952D35BB3R48M0L2 263328417628	411121	IDR	15,000	ADA
15	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	533B600Q4RLR46D1 298527417601	411121	IDR	135,000	ADA
16	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7A58C5BB3R3R7L5P 298713417391	411211	IDR	440,000	ADA
17	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	003513IG45VC644J 301922417606	411121	IDR	135,000	ADA
18	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3ACD05BB3R47RKVT 348842417611	411121	IDR	15,000	ADA
19	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8749B67OJLMJOBF1 362291417607	411121	IDR	90,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4687F4ETK0HKQ081 370701417395	411121	IDR	34,000	ADA
21	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	609FB3IG45V1U43A 397949417385	411211	IDR	1,539,505	ADA
22	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AE14C0T7KM8G8QH E 402508417396	411124	IDR	17,625	ADA
23	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	35CFF00Q4RLUTAAK 449077417623	411121	IDR	135,000	ADA
24	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F42C23IG45V297JB 515064417393	411211	IDR	242,000	ADA
25	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	86EE200Q4RM44OLK 528263417613	411124	IDR	279,910	ADA
26	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	22BCC1PL4GQLH72R 554351417605	411121	IDR	90,000	ADA
27	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3AD1B7463G8LETEE 567188417375	411121	IDR	36,800	ADA
28	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2A5EB0T7KM8FBB90 572093417373	411124	IDR	41,680	ADA
29	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9F73A1PL4GQLT7UT 657631417609	411121	IDR	90,000	ADA
30	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	015161PL4GQJNFFO 698063417608	411121	IDR	45,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	945262M2KBCMFATJ 728437417380	411121	IDR	317,400	ADA
32	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	49C9100Q4RM3FJSJ 730835417377	411124	IDR	797,500	ADA
33	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D67851PL4GQK45N6 775551417603	411121	IDR	135,000	ADA
34	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8C89F4ETK0HFDPFO 777007417371	411121	IDR	307,800	ADA
35	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	296234ETK0I3HG28 801586417620	411124	IDR	505,000	ADA
36	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3D4C04ETK0HQD5LB 816406417398	411121	IDR	90,000	ADA
37	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	12D322M2KBD37O66 846546417616	411121	IDR	15,000	ADA
38	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	524E467OJLMFA6LR 864792417388	411121	IDR	13,600	ADA
39	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	64BD92M2KBD3LUA0 922694417612	411121	IDR	15,000	ADA
40	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F4DCB00Q4RLIBJOR 974746417379	411121	IDR	34,000	ADA
41	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	293BB1PL4GQNGHIP 985061417621	411121	IDR	135,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
42	026	560965	16-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1396E67OJLMHISR0 998040417400	411121	IDR	135,000	ADA
43	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	751B82M2KCL1GQ4B 019041186302	411121	IDR	90,000	ADA
44	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	18BAA67OJMUKOV5 P 048954186305	411121	IDR	90,000	ADA
45	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4B1322M2KCL4BMDJ 062180186313	411121	IDR	15,000	ADA
46	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AA4150T7KNGCKBLJ 079329186314	411121	IDR	20,000	ADA
47	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	673417463HH2U147 102625186307	411121	IDR	180,000	ADA
48	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	282C21PL4I2MAHB2 120678186198	411121	IDR	90,000	ADA
49	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	DEB041PL4I2KNNDS 177904186185	411121	IDR	90,000	ADA
50	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	35C481PL4I2J6UQL 188304186182	411121	IDR	90,000	ADA
51	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	505E23IG477HK581 272866186316	411121	IDR	15,000	ADA
52	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CED195BB3SC43IT4 303369186183	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
53	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	98D200T7KNGEI1D7 325094186318	411124	IDR	374,000	ADA
54	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7B2F14ETK1PQNCIA 362035186197	411121	IDR	90,000	ADA
55	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3AA9F5BB3SC4EJB1 383444186193	411121	IDR	90,000	ADA
56	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	929797463HGVB75I 389540186301	411121	IDR	90,000	ADA
57	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AB2B34ETK1PNG8M D 393586186192	411121	IDR	20,000	ADA
58	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	69D652M2KCL0MKB5 403422186190	411121	IDR	90,000	ADA
59	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E796D2M2KCL2UI1S 407578186195	411121	IDR	90,000	ADA
60	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	62E855BB3SC7OOO Q 427114186200	411121	IDR	90,000	ADA
61	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4830000Q4SU0OS8O 509683186337	411121	IDR	90,000	ADA
62	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	586F40T7KNG9G3NB 597523186199	411121	IDR	90,000	ADA
63	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F42C02M2KCL65C3B 634077186325	411121	IDR	270,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
64	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	396822M2KCL3OD7H 707481186319	411121	IDR	67,500	ADA
65	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	32FF03IG477I2O1H 735539186330	411121	IDR	15,000	ADA
66	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6BD7400Q4SU2BU15 769624186323	411124	IDR	5,208	ADA
67	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1C4D40T7KNG68BD2 806006186187	411121	IDR	15,000	ADA
68	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A3D193IG477K96SB 849346186328	411124	IDR	8,735	ADA
69	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	11F473IG477GHONR 864907186322	411121	IDR	15,000	ADA
70	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	530247463HGUI6BS 869014186181	411121	IDR	90,000	ADA
71	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6D95600Q4STRN3G3 904744186188	411121	IDR	90,000	ADA
72	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	DDDCD5BB3SC94J8H 922210186311	411121	IDR	20,000	ADA
73	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7DA4B4ETK1PQTNKA 952731186196	411121	IDR	90,000	ADA
74	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E1FE77463HH3S01A 965759186327	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
75	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	489512M2KCL1MGQG 968652186306	411121	IDR	90,000	ADA
76	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	721217463HGTEVHM 982117186189	411121	IDR	90,000	ADA
77	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	39EDE67OJMUM9TG0 993894186309	411121	IDR	180,000	ADA
78	026	560965	23-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FD9657463HHO5M17 997795186312	411121	IDR	90,000	ADA
79	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BBEDD0T7KOIN4740 010250882409	411124	IDR	62,522	ADA
80	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FA45500Q4U0B845F 018522882408	411124	IDR	152,461	ADA
81	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C6A037463IJ8A19L 261073882193	411211	IDR	276,100	ADA
82	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3C63F4ETK2S695SN 281852882194	411211	IDR	343,874	ADA
83	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	240D867OJO10RMF1 445735882197	411124	IDR	16,577	ADA
84	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	378750T7KOIH6HRD 524525882199	411211	IDR	1,739,100	ADA
85	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B94454ETK2S12THO 555074882192	411211	IDR	770,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
86	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	510D12M2KDNFM1C8 589028882189	411124	IDR	50,200	ADA
87	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2D7233IG489QOTPB 611129882403	411124	IDR	316,200	ADA
88	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	47ABA2M2KDNEKL20 887286882404	411124	IDR	22,703	ADA
89	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8FB4567OJO0VLQHJ 932041882190	411124	IDR	140,000	ADA
90	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CE6974ETK2S7NSVG 971899882401	411124	IDR	5,525	ADA
91	026	560965	30-Apr-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AFD771PL4J53Q4AS 981120882407	411124	IDR	5,525	ADA
TOTAL								14,003,250	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 03-05-2024 14:27:08 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 03-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 03-05-2024 14:27:08 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 03-05-2024

Periode : 2024-04

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 03-05-2024 14:27:08 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SEMARANG I

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 19-04-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	609FB3IG45V1U43A	411211	IDR	1,539,505	ADA
2	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	7A58C5BB3R3R7L5P	411211	IDR	440,000	ADA
3	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	25E4C00Q4RLHIL0T	411121	IDR	56,600	ADA
4	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	E17792M2KBCMTRLU	411121	IDR	49,400	ADA
5	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	F4DCB00Q4RLIBJOR	411121	IDR	34,000	ADA
6	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	4687F4ETK0HKQ081	411121	IDR	34,000	ADA
7	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	524E467OJLMFA6LR	411121	IDR	13,600	ADA
8	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	A4F3B0T7KM86FF70	411121	IDR	40,800	ADA
9	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	4AC5E00Q4RLQAPOC	411121	IDR	60,000	ADA
10	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	015161PL4GQJNFFO	411121	IDR	45,000	ADA
11	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3D4C04ETK0HQD5LB	411121	IDR	90,000	ADA
12	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	9F73A1PL4GQLT7UT	411121	IDR	90,000	ADA
13	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	F779867OJLMKHTOS	411121	IDR	15,000	ADA
14	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	12D322M2KBD37O66	411121	IDR	15,000	ADA
15	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	293BB1PL4GQNGHIP	411121	IDR	135,000	ADA
16	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	49C9100Q4RM3FJSJ	411124	IDR	797,500	ADA
17	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	D65A13IG45VM9UG4	411124	IDR	80,000	ADA
18	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	F42C23IG45V297JB	411211	IDR	242,000	ADA
19	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	945262M2KBCMFATJ	411121	IDR	317,400	ADA
20	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	8C89F4ETK0HFDPFO	411121	IDR	307,800	ADA
21	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	60F414ETK0HG3EQ8	411121	IDR	36,800	ADA
22	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3AD1B7463G8LETEE	411121	IDR	36,800	ADA

tanggal cetak : 19-04-24 09:19:27 oleh : 026

23	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	56EE22M2KBCNOI84	411121	IDR	34,000	ADA
24	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	003513IG45VC644J	411121	IDR	135,000	ADA
25	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	1396E67OJLMHISR0	411121	IDR	135,000	ADA
26	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	533B600Q4RLR46D1	411121	IDR	135,000	ADA
27	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	D67851PL4GQK45N6	411121	IDR	135,000	ADA
28	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	AE5977463G8VQQFM	411121	IDR	90,000	ADA
29	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	22BCC1PL4GQLH72R	411121	IDR	90,000	ADA
30	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	8749B67OJLMJOBF1	411121	IDR	90,000	ADA
31	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3ACD05BB3R47RKVT	411121	IDR	15,000	ADA
32	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	952D35BB3R48M0L2	411121	IDR	15,000	ADA
33	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	64BD92M2KBD3LUA0	411121	IDR	15,000	ADA
34	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	35CFF00Q4RLUTAAK	411121	IDR	135,000	ADA
35	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	2A5EB0T7KM8FBB90	411124	IDR	41,680	ADA
36	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	508CD7463G96EHUR	411124	IDR	39,600	ADA
37	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	AE14C0T7KM8G8QHE	411124	IDR	17,625	ADA
38	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	86EE200Q4RM44OLK	411124	IDR	279,910	ADA
39	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	9B0690T7KM8GPDQR	411124	IDR	44,000	ADA
40	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	7F6702M2KBDA5C08	411124	IDR	494,000	ADA
41	026	560965	16-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	296234ETK0I3HG28	411124	IDR	505,000	ADA
42	026	560965	03-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	C84310T7KLPS0T78	411124	IDR	220,000	ADA
TOTAL								**7,142,020**	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Joko Tri Hartono, S.E
NIP 198212102004121001

tanggal cetak : 19-04-24 09:19:27 oleh : 026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SEMARANG I

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-05-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	AB2B34ETK1PNG8MD	411121	IDR	20,000	ADA
2	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3AA9F5BB3SC4EJB1	411121	IDR	90,000	ADA
3	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	721217463HGTEVHM	411121	IDR	90,000	ADA
4	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	530247463HGUI6BS	411121	IDR	90,000	ADA
5	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	6D95600Q4STRN3G3	411121	IDR	90,000	ADA
6	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	489512M2KCL1MGQG	411121	IDR	90,000	ADA
7	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	586F40T7KNG9G3NB	411121	IDR	90,000	ADA
8	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	E796D2M2KCL2UI1S	411121	IDR	90,000	ADA
9	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	396822M2KCL3OD7H	411121	IDR	67,500	ADA
10	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	DDDCD5BB3SC94J8H	411121	IDR	20,000	ADA
11	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	11F473IG477GHONR	411121	IDR	15,000	ADA
12	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	4B1322M2KCL4BMDJ	411121	IDR	15,000	ADA
13	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	32FF03IG477I2O1H	411121	IDR	15,000	ADA
14	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	4830000Q4SU0OS8O	411121	IDR	90,000	ADA
15	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	F42C02M2KCL65C3B	411121	IDR	270,000	ADA
16	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	6BD7400Q4SU2BU15	411124	IDR	5,208	ADA
17	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	FD9657463HHO5M17	411121	IDR	90,000	ADA
18	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	CED195BB3SC43IT4	411121	IDR	15,000	ADA
19	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	1C4D40T7KNG68BD2	411121	IDR	15,000	ADA
20	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	35C481PL4I2J6UQL	411121	IDR	90,000	ADA
21	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	69D652M2KCL0MKB5	411121	IDR	90,000	ADA
22	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	DEB041PL4I2KNNDS	411121	IDR	90,000	ADA

tanggal cetak : 03-05-24 10:46:56 oleh : 026

23	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	929797463HGVB75I	411121	IDR	90,000	ADA
24	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	751B82M2KCL1GQ4B	411121	IDR	90,000	ADA
25	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	7B2F14ETK1PQNCIA	411121	IDR	90,000	ADA
26	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	7DA4B4ETK1PQTNKA	411121	IDR	90,000	ADA
27	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	62E855BB3SC7OOOQ	411121	IDR	90,000	ADA
28	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	282C21PL4I2MAHB2	411121	IDR	90,000	ADA
29	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	18BAA67OJMUKOV5P	411121	IDR	90,000	ADA
30	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	39EDE67OJMUM9TG0	411121	IDR	180,000	ADA
31	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	673417463HH2U147	411121	IDR	180,000	ADA
32	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	505E23IG477HK581	411121	IDR	15,000	ADA
33	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	AA4150T7KNGCKBLJ	411121	IDR	20,000	ADA
34	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	E1FE77463HH3S01A	411121	IDR	15,000	ADA
35	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	98D200T7KNGEI1D7	411124	IDR	374,000	ADA
36	026	560965	23-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	A3D193IG477K96SB	411124	IDR	8,735	ADA
TOTAL								**2,960,443**	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Joko Tri Hartono, S.E
NIP 198302072006021001

tanggal cetak : 03-05-24 10:46:56 oleh : 026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SEMARANG I

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 02-05-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	B94454ETK2S12THO	411211	IDR	770,000	ADA
2	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	378750T7KOIH6HRD	411211	IDR	1,739,100	ADA
3	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3C63F4ETK2S695SN	411211	IDR	343,874	ADA
4	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	2D7233IG489QOTPB	411124	IDR	316,200	ADA
5	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	BBEDD0T7KOIN4740	411124	IDR	62,522	ADA
6	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	C6A037463IJ8A19L	411211	IDR	276,100	ADA
7	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	8FB4567OJO0VLQHJ	411124	IDR	140,000	ADA
8	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	47ABA2M2KDNEKL20	411124	IDR	22,703	ADA
9	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	CE6974ETK2S7NSVG	411124	IDR	5,525	ADA
10	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	240D867OJO10RMF1	411124	IDR	16,577	ADA
11	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	510D12M2KDNFM1C8	411124	IDR	50,200	ADA
12	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	AFD771PL4J53Q4AS	411124	IDR	5,525	ADA
13	026	560965	30-APR-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	FA45500Q4U0B845F	411124	IDR	152,461	ADA
TOTAL								**3,900,787**	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Joko Tri Hartono
NIP 198302072006021001

tanggal cetak : 02-05-24 15:10:33 oleh : 026

Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang
Jawa Tengah
Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Tuesday 30 April
Reference 1714460505656

Laporan Saldo Rekening

Kota Semarang
RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG

Total Saldo : Rp. 0

No	CIF	Rekening	Nama Rekening	Cabang	Saldo
1	03734254	1053003521	RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG	CAPEM SAMPANGAN	0

Transaction History

Company	:	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
Account	:	0057101300000280 - RPL 026 KS LLDIKTI W
Account Organization Unit	:	KCP SAMPANGAN
Period	:	01-Apr-2024 - 30-Apr-2024
Starting Balance	:	IDR 0.00
Ending Balance	:	IDR 1,111,800,900.00
Total Transaction Debit	:	0
Total Transaction Credit	:	1
Page	:	1 of 1

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
1	02/04	13:41:09	02/04	13:41:09	240881304000490000001	0.00	1,111,800,900.00	1,111,800,900.00	24040296619996442104
				Total		**0.00**	**1,111,800,900.00**		

Report Satker

Tanggal	:2024-04-01 - 2024-04-30	Total Mutasi	
Kementerian	:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023)	Debit	: 536,920,384.00
Eselon	:SEKRETARIAT JENDERAL (01)	Kredit	: 648,674,933.00
Satker	:LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)	Saldo Akhir	: 225,925,182.00
Rekening Induk	:RKK SETJEN KEMENDIKBUD OPS (1220010692575)		
Rekening Satker	:BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG (8100127230141000)		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
01-04-2024	08:14:44	MCM InhouseTrf VA | 202404010520753161 | KE 9910000133349	114,170,633.00	59,187,798.00	0.00	54,982,835.00	MCM	
01-04-2024	08:14:55	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202404010520753161 | KE 9910000133349	54,982,835.00	11,600.00	0.00	54,971,235.00	MCM	
01-04-2024	13:35:46	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002264000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	54,971,235.00	0.00	39,441,025.00	94,412,260.00	SPAN	
01-04-2024	13:40:58	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002265000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	94,412,260.00	0.00	126,220,342.00	220,632,602.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
02-04-2024	11:21:49	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261506000148000001 | Pembayaran Belanja Pegawai-Pembayaran TH	220,632,602.00	0.00	8,137,700.00	228,770,302.00	SPAN	
02-04-2024	11:22:56	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002317000001 | Pembayaran belanja pegawai-gaji terusan	228,770,302.00	0.00	8,017,700.00	236,788,002.00	SPAN	
03-04-2024	10:56:06	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202404031052563463 | KE 9910000133349	236,788,002.00	63,800.00	0.00	236,724,202.00	MCM	
03-04-2024	10:56:06	MCM InhouseTrf VA | 202404031052563463 | KE 9910000133349	236,724,202.00	152,724,553.00	0.00	83,999,649.00	MCM	
04-04-2024	13:55:49	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002590000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	83,999,649.00	0.00	48,930,895.00	132,930,544.00	SPAN	
04-04-2024	13:59:31	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002589000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	132,930,544.00	0.00	168,288,816.00	301,219,360.00	SPAN	
05-04-2024	07:12:26	MCM UBP Payment VA | UBP60212399902FFFFFF422 163295000 | KE	301,219,360.00	2,226,661.00	0.00	298,992,699.00	MCM	
05-04-2024	07:12:26	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202404050510580617 | KE 9910000133349	298,992,699.00	11,600.00	0.00	298,981,099.00	MCM	
05-04-2024	07:12:26	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 013280785 | KE	298,981,099.00	720,601.00	0.00	298,260,498.00	MCM	
05-04-2024	07:12:26	MCM UBP Payment VA | 202404050504580116 /9910000006891 | KE	298,260,498.00	3,500.00	0.00	298,256,998.00	MCM	
05-04-2024	07:12:26	MCM InhouseTrf VA | 202404041505611428 | KE 9910000133349	298,256,998.00	57,748,500.00	0.00	240,508,498.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
05-04-2024	07:12:26	MCM InhouseTrf VA | 202404050510580617 | KE 9910000133349	240,508,498.00	34,180,926.00	0.00	206,327,572.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422111050 | KE	206,327,572.00	1,071,150.00	0.00	205,256,422.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | 202404050508580266 /9910000002106 | KE	205,256,422.00	2,500.00	0.00	205,253,922.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202404041505611428 | KE 9910000133349	205,253,922.00	52,200.00	0.00	205,201,722.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422110530 | KE	205,201,722.00	982,350.00	0.00	204,219,372.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | 202404050507579911 /9910000002106 | KE	204,219,372.00	2,500.00	0.00	204,216,872.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 012307734 | KE	204,216,872.00	3,994,020.00	0.00	200,222,852.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | 202404050505579722 /9910000006891 | KE	200,222,852.00	3,500.00	0.00	200,219,352.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 013044430 | KE	200,219,352.00	396,000.00	0.00	199,823,352.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 011392634 | KE	199,823,352.00	13,082,275.00	0.00	186,741,077.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | 202404050503580073 /9910000006891 | KE	186,741,077.00	3,500.00	0.00	186,737,577.00	MCM	
05-04-2024	07:12:27	MCM UBP Payment VA | 202404050506579893 /9910000006891 | KE	186,737,577.00	3,500.00	0.00	186,734,077.00	MCM	
05-04-2024	07:12:28	MCM InhouseTrf VA | ST 201 Hotel 202404041509619393 | KE 1360018231529	186,734,077.00	2,400,000.00	0.00	184,334,077.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
05-04-2024	11:02:22	MCM InhouseTrf VA | 202404050521581730 | KE 9910000133349	184,334,077.00	16,602,103.00	0.00	167,731,974.00	MCM	
05-04-2024	11:02:26	MCM Outw SKN (VA) | Zoom Maret 2024 202404051100610452 | KE 705704097200	167,731,974.00	3,373,690.00	0.00	164,358,284.00	MCM	
05-04-2024	11:02:26	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202404051100610452 | KE 705704097200	164,358,284.00	2,900.00	0.00	164,355,384.00	MCM	
05-04-2024	11:02:28	MCM InhouseTrf VA | Pengiriman Buku Tabu 202404051056595867 | KE 1360030349556	164,355,384.00	185,400.00	0.00	164,169,984.00	MCM	
16-04-2024	10:29:34	MCM InhouseTrf VA | 202404161025544191 | KE 9910000133349	164,169,984.00	15,046,500.00	0.00	149,123,484.00	MCM	
16-04-2024	10:29:35	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202404161025544191 | KE 9910000133349	149,123,484.00	5,800.00	0.00	149,117,684.00	MCM	
16-04-2024	10:29:39	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202404161024542811 | KE 9910000133315	149,117,684.00	6,922,020.00	0.00	142,195,664.00	MCM	
16-04-2024	13:41:26	| RTR-014-02-202404161025544191-Chr. Argo | 0599102530858501 0599102530858501 04/16/	142,195,664.00	0.00	1,710,000.00	143,905,664.00	OTHERS	
16-04-2024	14:10:55	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002738000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	143,905,664.00	0.00	45,409,051.00	189,314,715.00	SPAN	
16-04-2024	14:11:00	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002739000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	189,314,715.00	0.00	44,838,716.00	234,153,431.00	SPAN	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084655 | KE	234,153,431.00	3,010,051.00	0.00	231,143,380.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084564 | KE	231,143,380.00	9,501,000.00	0.00	221,642,380.00	MCM	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084556 | KE	221,642,380.00	3,360,899.00	0.00	218,281,481.00	MCM	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084580 | KE	218,281,481.00	2,345,480.00	0.00	215,936,001.00	MCM	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084606 | KE	215,936,001.00	4,753,586.00	0.00	211,182,415.00	MCM	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300085108 | KE	211,182,415.00	3,372,040.00	0.00	207,810,375.00	MCM	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084598 | KE	207,810,375.00	13,115,280.00	0.00	194,695,095.00	MCM	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF603 2987100007480 | KE	194,695,095.00	4,282,315.00	0.00	190,412,780.00	MCM	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084549 | KE	190,412,780.00	3,808,887.00	0.00	186,603,893.00	MCM	
17-04-2024	16:25:09	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF489 5940300048201 | KE	186,603,893.00	42,689,494.00	0.00	143,914,399.00	MCM	
19-04-2024	07:46:16	MCM InhouseTrf VA | 202404190707923592 | KE 9910000133349	143,914,399.00	2,556,452.00	0.00	141,357,947.00	MCM	
19-04-2024	16:22:35	MCM InhouseTrf VA | 202404191619547983 | KE 9910000133349	141,357,947.00	8,077,792.00	0.00	133,280,155.00	MCM	
19-04-2024	16:22:37	MCM Outw SKN (VA) | Narsum 202404191050635523 | KE 2460476669	133,280,155.00	1,710,000.00	0.00	131,570,155.00	MCM	
19-04-2024	16:22:37	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202404191050635523 | KE 2460476669	131,570,155.00	2,900.00	0.00	131,567,255.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
23-04-2024	08:37:14	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002900000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	131,567,255.00	0.00	102,871,770.00	234,439,025.00	SPAN	
23-04-2024	08:40:51	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002909000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	234,439,025.00	0.00	49,631,618.00	284,070,643.00	SPAN	
23-04-2024	08:41:12	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302002901000001 | Pembayaran belanja pegawai-uang makan bu	284,070,643.00	0.00	627,300.00	284,697,943.00	SPAN	
23-04-2024	09:06:20	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202404230740709981 | KE 9910000133349	284,697,943.00	8,700.00	0.00	284,689,243.00	MCM	
23-04-2024	09:06:20	MCM InhouseTrf VA | 202404230740709981 | KE 9910000133349	284,689,243.00	27,192,097.00	0.00	257,497,146.00	MCM	
23-04-2024	12:17:36	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202404231214517988 | KE 9910000133315	257,497,146.00	2,960,443.00	0.00	254,536,703.00	MCM	
24-04-2024	12:24:18	MCM Outw SKN (VA) | Sewa Kendaraan 202404241158799973 | KE 137201000069563	254,536,703.00	7,470,588.00	0.00	247,066,115.00	MCM	
24-04-2024	12:24:18	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202404241158799973 | KE 137201000069563	247,066,115.00	2,900.00	0.00	247,063,215.00	MCM	
25-04-2024	08:54:43	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202404250753525486 | KE 9910000133349	247,063,215.00	2,900.00	0.00	247,060,315.00	MCM	
25-04-2024	08:54:43	MCM InhouseTrf VA | 202404250753525486 | KE 9910000133349	247,060,315.00	4,353,242.00	0.00	242,707,073.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
29-04-2024	10:04:50	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202404290953855981 | KE 9910000133349	242,707,073.00	34,800.00	0.00	242,672,273.00	MCM	
29-04-2024	10:04:50	MCM InhouseTrf VA | 202404290953855981 | KE 9910000133349	242,672,273.00	9,260,604.00	0.00	233,411,669.00	MCM	
29-04-2024	12:00:34	MCM InhouseTrf VA | uang makan bulan Feb 202404291148633130 | KE 1360030345026	233,411,669.00	627,300.00	0.00	232,784,369.00	MCM	
29-04-2024	15:52:22	MCM Outw SKN (VA) | ST 220 Hotel 202404291546563259 | KE 3273073333	232,784,369.00	750,000.00	0.00	232,034,369.00	MCM	
29-04-2024	15:52:22	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202404291546563259 | KE 3273073333	232,034,369.00	2,900.00	0.00	232,031,469.00	MCM	
29-04-2024	15:52:25	MCM Outw SKN (VA) | ST 220 HOTEL 202404291547564691 | KE 0154002002	232,031,469.00	420,000.00	0.00	231,611,469.00	MCM	
29-04-2024	15:52:25	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202404291547564691 | KE 0154002002	231,611,469.00	2,900.00	0.00	231,608,569.00	MCM	
30-04-2024	08:55:56	MCM InhouseTrf VA | 202404300854989634 | KE 9910000133349	231,608,569.00	6,332,600.00	0.00	225,275,969.00	MCM	
30-04-2024	10:47:33	New Mandiri Online Trf VA | | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	225,275,969.00	0.00	910,000.00	226,185,969.00	OTHERS	
30-04-2024	10:49:33	New Mandiri Online Trf VA | PENGEMBALIAN DANA FGD FORKAMA | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	226,185,969.00	0.00	910,000.00	227,095,969.00	OTHERS	
30-04-2024	10:50:36	New Mandiri Online Trf VA | | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	227,095,969.00	0.00	910,000.00	228,005,969.00	OTHERS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
30-04-2024	11:32:13	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202404301106790465 | KE 9910000133315	228,005,969.00	3,900,787.00	0.00	224,105,182.00	MCM	
30-04-2024	11:53:44	New Mandiri Online Trf VA | dobel bayar | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	224,105,182.00	0.00	910,000.00	225,015,182.00	OTHERS	
30-04-2024	12:19:56	New Mandiri Online Trf VA | | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	225,015,182.00	0.00	910,000.00	225,925,182.00	OTHERS	

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Mei 2024

Kementerian/Lembaga	: (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Tgl, No. SP	: 28 November 2023 , DIPA-023.01.2.723014/2024
Unit Organisasi	: (01) SEKRETARIAT JENDERAL	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG	KPPN	: (026) Semarang I
Satuan Kerja	: (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 1.848.788.913,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01817/KW/723014/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	1.337.726.082,00	2.281.657.517,00	1.770.594.686,00	1.848.788.913,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	1.337.726.082,00	2.281.657.517,00	1.770.594.686,00	1.848.788.913,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	1.337.726.082,00	2.281.657.517,00	1.770.594.686,00	1.848.788.913,00
	1. BP UP*)	225.925.182,00	590.954.427,00	631.117.638,00	185.761.971,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	8.017.700,00	8.017.700,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	22.446.390,00	19.658.448,00	2.787.942,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	1.111.800.900,00	1.660.239.000,00	1.111.800.900,00	1.660.239.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 114.238.029,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	1.848.788.913,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	1.848.788.913,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	1.848.788.913,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	1.848.788.913,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1.	Saldo UP	Rp.	185.761.971,00
2.	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	114.238.029,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4.	Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5.	Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1.	Saldo TUP	Rp.	0,00
2.	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4.	Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5.	Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1.	Saldo Lainnya	Rp.	1.663.026.942,00
2.	Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	1.663.026.942,00
3.	Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO

NIP 196809051994031001

KOTA SEMARANG, Mei 2024

Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

Dicetak pada tanggal,04 Juni 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100127230141000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 1.848.788.913 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 01817/KW/723014/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	1.848.788.913
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.848.788.913

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	185.761.971
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	2.787.942
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	1.660.239.000
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	1.848.788.913

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	1.848.788.913
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	1.848.788.913

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a.	Saldo UP	Rp.	185.761.971
	b.	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	114.238.029
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	300.000.000
2	a.	Saldo TUP	Rp.	0
	b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3		Saldo Lainnya	Rp.	1.663.026.942
4		Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.963.026.942

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	300.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	1.663.026.942
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	1.963.026.942

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 723014

BULAN : MEI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100127230141000	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	MANDIRI	20	S-3895/WPB.12/KP.03/2021	23-12-2021	2024-05-31	188,549,913.00
2	0057101300000280	RPL 026 KS LLDIKTI W	Semarang	30	S-614/KPN.1401/2023	02-08-2023	06-05-2024	0.00
3	1053003521	RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B	Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang	30	S-7/KPN.1401/2023	05-01-2023	16-05-2024	1,660,239,000.00

BENDAHARA PENGELUARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : MEI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 8100127230141000

Nama Rekening : BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG

Nama Bank : MANDIRI

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan April 2024			225.925.182,00
01-05-2024	01422/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan April 2024	0,00	2.116.000,00	223.809.182,00
01-05-2024	01423/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan April 2024	0,00	2.052.000,00	221.757.182,00
01-05-2024	01424/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan April 2024	0,00	1.132.000,00	220.625.182,00
01-05-2024	01425/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan April 2024	0,00	988.000,00	219.637.182,00
01-05-2024	01426/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan April 2024	0,00	736.000,00	218.901.182,00
01-05-2024	01427/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan April 2024	0,00	736.000,00	218.165.182,00
01-05-2024	01428/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan April 2024	0,00	736.000,00	217.429.182,00
01-05-2024	01431/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan April 2024	0,00	680.000,00	216.749.182,00
01-05-2024	01429/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan April 2024	0,00	680.000,00	216.069.182,00

1	2	3	4	5	6
01-05-2024	01430/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan April 2024	0,00	680.000,00	215.389.182,00
01-05-2024	01433/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan April 2024	0,00	272.000,00	215.117.182,00
01-05-2024	01432/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan April 2024	0,00	272.000,00	214.845.182,00
03-05-2024	01484/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa pemeliharaan kendaraan dinas H 1323 XG berupa perbaikan bohlam dan lain-lain	0,00	408.854,00	214.436.328,00
03-05-2024	01483/KW/723014/2024	Biaya Pengiriman Surat Dinas bulan April 2024	0,00	151.500,00	214.284.828,00
06-05-2024	01446/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Mei 2024 ID Pel : 523011392634	0,00	14.397.201,00	199.887.627,00
06-05-2024	01445/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Mei 2024 ID Pel : 523012307734	0,00	4.704.300,00	195.183.327,00
06-05-2024	01437/KW/723014/2024	Langganan Zoom bulan April 2024	0,00	3.417.518,00	191.765.809,00
06-05-2024	01434/KW/723014/2024	BPJS Ketenagakerjaan PPNPN - Tagihan bulan April 2024	0,00	2.226.661,00	189.539.148,00
06-05-2024	01436/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Menghadiri Undangan Perayaan Hari Pendidikan Nasional 2024 Tanggal 02/05/2024 s.d 03/05/2024 Indonesia Arena, Kawasan	0,00	1.900.000,00	187.639.148,00
06-05-2024	01454/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Mei 2024 No JasTel : 143422111050	0,00	1.071.150,00	186.567.998,00
06-05-2024	01453/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Mei 2024 No JasTel : 143422110530	0,00	982.350,00	185.585.648,00
06-05-2024	01442/KW/723014/2024	Pendampingan pemanfaatan layanan online jabatan fungsional Dosen untuk para dosen di PTS Lingkup LLDIKTI XV	0,00	960.000,00	184.625.648,00
06-05-2024	01444/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Mei 2024 ID Pel : 523013280785	0,00	858.263,00	183.767.385,00
06-05-2024	01439/KW/723014/2024	1. Wisuda Angkatan X dan Angkat Sumpah Provesi Universitas Kusuma Husada Surakarta 2. Halal Bihalal APTISI Wilayah VI Jawa Tengah Komisariat II Surakarta	0,00	653.500,00	183.113.885,00
06-05-2024	01441/KW/723014/2024	Sidang Terbuka Senat Universitas Pekalongan Wisuda Magister ke-1, Profesi ke-10, Sarjana ke-60 dan Diploma ke-24	0,00	541.000,00	182.572.885,00
06-05-2024	01443/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan	0,00	396.000,00	182.176.885,00

1	2	3	4	5	6
		Listrik bulan Mei 2024 ID Pel : 523013044430			
06-05-2024	01438/KW/723014/2024	1. Wisuda Angkatan X dan Angkat Sumpah Provesi Universitas Kusuma Husada Surakarta 2. Halal Bihalal APTISI Wilayah VI Jawa Tengah Komisariat II Surakarta	0,00	296.000,00	181.880.885,00
06-05-2024	01440/KW/723014/2024	Sidang Terbuka Senat Universitas Pekalongan Wisuda Magister ke-1, Profesi ke-10, Sarjana ke-60 dan Diploma ke-24	0,00	296.000,00	181.584.885,00
06-05-2024	01435/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa print outdoor dan infraboard	0,00	217.188,00	181.367.697,00
06-05-2024	01451/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Mei 2024 No Telp 0248317281	0,00	143.749,00	181.223.948,00
06-05-2024	01450/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Mei 2024 No Telp 0248311521	0,00	62.884,00	181.161.064,00
06-05-2024	01449/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Mei 2024 No Telp 0248311273	0,00	59.221,00	181.101.843,00
06-05-2024	01448/KW/723014/2024	Tagihan Kartu Halo bulan Mei 2024 No Telp 08112690267	0,00	58.000,00	181.043.843,00
06-05-2024	01452/KW/723014/2024	Telepon bulan Mei 2024 No Telp 0248449458	0,00	39.907,00	181.003.936,00
06-05-2024	01447/KW/723014/2024	Tagihan Telepon Bulan Mei 2024 No 08112558011	0,00	30.250,00	180.973.686,00
07-05-2024	FPK-PENG-ntUAr4O7mmIscOM	SPM LS BP	8.017.700,00	0,00	188.991.386,00
07-05-2024	00338/BP/723014/2024	Pungut Pajak	615.000,00	0,00	189.606.386,00
07-05-2024	00326/BP/723014/2024	Pungut Pajak	317.400,00	0,00	189.923.786,00
07-05-2024	00327/BP/723014/2024	Pungut Pajak	307.800,00	0,00	190.231.586,00
07-05-2024	00328/BP/723014/2024	Pungut Pajak	56.600,00	0,00	190.288.186,00
07-05-2024	00329/BP/723014/2024	Pungut Pajak	49.400,00	0,00	190.337.586,00
07-05-2024	00336/BP/723014/2024	Pungut Pajak	40.800,00	0,00	190.378.386,00
07-05-2024	00331/BP/723014/2024	Pungut Pajak	36.800,00	0,00	190.415.186,00
07-05-2024	00330/BP/723014/2024	Pungut Pajak	36.800,00	0,00	190.451.986,00
07-05-2024	00332/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	190.485.986,00

1	2	3	4	5	6
07-05-2024	00333/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	190.519.986,00
07-05-2024	00334/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	190.553.986,00
07-05-2024	00335/BP/723014/2024	Pungut Pajak	13.600,00	0,00	190.567.586,00
07-05-2024	00337/BP/723014/2024	Pungut Pajak	8.688,00	0,00	190.576.274,00
07-05-2024	01482/KW/723014/2024	Paket meeting fullday 1 hari dan penginapan selama 2 malam kegiatan Pengembangan Kapasitas Pegawai Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Layanan Publik LLDIKTI Wilayah VI surat tugas no 208/LL6/HM.00.06/2024	0,00	30.750.000,00	159.826.274,00
07-05-2024	01474/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	1.356.000,00	158.470.274,00
07-05-2024	01475/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	157.698.274,00
07-05-2024	01457/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	156.926.274,00
07-05-2024	01459/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	156.154.274,00
07-05-2024	01465/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	155.382.274,00
07-05-2024	01468/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	154.610.274,00
07-05-2024	01471/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	153.838.274,00
07-05-2024	01463/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	153.066.274,00
07-05-2024	01473/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	152.294.274,00
07-05-2024	01478/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI	0,00	772.000,00	151.522.274,00

1	2	3	4	5	6
		DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI			
07-05-2024	01480/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	150.750.274,00
07-05-2024	01462/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	149.978.274,00
07-05-2024	01476/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	149.206.274,00
07-05-2024	01481/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	148.434.274,00
07-05-2024	01466/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	147.662.274,00
07-05-2024	01458/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	146.890.274,00
07-05-2024	01472/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	146.118.274,00
07-05-2024	01461/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	145.346.274,00
07-05-2024	01464/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	144.574.274,00
07-05-2024	01469/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	143.802.274,00
07-05-2024	01479/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	143.030.274,00
07-05-2024	01460/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	142.258.274,00
07-05-2024	01467/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI	0,00	772.000,00	141.486.274,00

1	2	3	4	5	6
		DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI			
07-05-2024	01477/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	140.714.274,00
07-05-2024	01470/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	772.000,00	139.942.274,00
07-05-2024	01456/KW/723014/2024	Senam pagi di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	170.000,00	139.772.274,00
07-05-2024	01455/KW/723014/2024	Senam pagi di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	170.000,00	139.602.274,00
08-05-2024	FPK-PENG-nogafpJkDld8gIC	SPM GUP	90.812.911,00	0,00	230.415.185,00
08-05-2024	FPK-PENG-KxCg4ceAa5ByhRM	SPM GUP	71.004.000,00	0,00	301.419.185,00
08-05-2024	FPK-PENG-xrsRixwmg03gdxr	SPM GUP KKP	42.617.364,00	0,00	344.036.549,00
08-05-2024	00341/BP/723014/2024	Pungut Pajak	180.000,00	0,00	344.216.549,00
08-05-2024	00340/BP/723014/2024	Pungut Pajak	90.000,00	0,00	344.306.549,00
08-05-2024	00339/BP/723014/2024	Pungut Pajak	16.354,00	0,00	344.322.903,00
08-05-2024	00342/BP/723014/2024	Pungut Pajak	14.592,00	14.592,00	344.322.903,00
08-05-2024	00006/KWTI/723014/2024	Gaji Terusan Ke-4	0,00	8.017.700,00	336.305.203,00
08-05-2024	01492/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	3.600.000,00	332.705.203,00
08-05-2024	01491/KW/723014/2024	Honor Narasumber	0,00	1.800.000,00	330.905.203,00
08-05-2024	01488/KW/723014/2024	Konsultasi permasalahan kepegawaian ke Biro SDM Kemendikbudristek	0,00	1.713.000,00	329.192.203,00
08-05-2024	01486/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	327.662.203,00
08-05-2024	01485/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	326.132.203,00
08-05-2024	01487/KW/723014/2024	Menghadiri Undangan Perayaan Hari Pendidikan Nasional 2024	0,00	1.314.000,00	324.818.203,00

1	2	3	4	5	6
08-05-2024	01489/KW/723014/2024	Konsultasi permasalahan kepegawaian ke Biro SDM Kemendikbudristek	0,00	1.230.000,00	323.588.203,00
08-05-2024	00337/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	317.400,00	323.270.803,00
08-05-2024	00338/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	307.800,00	322.963.003,00
08-05-2024	01490/KW/723014/2024	Pembentukan Panitia Bulan Dana PMI Kota Semarang	0,00	170.000,00	322.793.003,00
08-05-2024	00350/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	14.592,00	322.778.411,00
13-05-2024	00348/BP/723014/2024	Pungut Pajak	440.000,00	0,00	323.218.411,00
13-05-2024	00347/BP/723014/2024	Pungut Pajak	360.360,00	0,00	323.578.771,00
13-05-2024	00346/BP/723014/2024	Pungut Pajak	360.360,00	0,00	323.939.131,00
13-05-2024	00350/BP/723014/2024	Pungut Pajak	330.000,00	0,00	324.269.131,00
13-05-2024	00349/BP/723014/2024	Pungut Pajak	270.270,00	0,00	324.539.401,00
13-05-2024	00345/BP/723014/2024	Pungut Pajak	66.000,00	0,00	324.605.401,00
13-05-2024	00344/BP/723014/2024	Pungut Pajak	22.000,00	0,00	324.627.401,00
13-05-2024	00343/BP/723014/2024	Pungut Pajak	12.041,00	12.041,00	324.627.401,00
13-05-2024	FPK-PENG-tuR64gsHAshCxwg	Tagihan KKP No : 4895940300048201 SUTO SUGIRAHARJO	0,00	18.357.411,00	306.269.990,00
13-05-2024	01502/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Makan) Sosialisasi Program Revitalisasi LPTK 2024 dan Pengadaan BMN (PT di LLDIKTI III,IV,V,VI,VII,VIII,XI,XV) tgl 25 April 2024	0,00	11.000.000,00	295.269.990,00
13-05-2024	01504/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Makan) Buka Bersama Brayat Agung LLDIKTI 6 tgl 3 April 2024	0,00	8.250.000,00	287.019.990,00
13-05-2024	FPK-PENG-Mr6qfsZ9gKHyL1T	Tagihan KKP No : 4340750300084564 NURKHOLIS	0,00	5.723.600,00	281.296.390,00
13-05-2024	FPK-PENG-SFmxXwANfTtvlMS	Tagihan KKP No : 4340750300084606 AGUNG PRASETYO	0,00	4.435.200,00	276.861.190,00
13-05-2024	FPK-PENG-iXOb0VgCtc9Wwdq	Tagihan KKP No : 4340750300084580 SITI NURUL JANNAH	0,00	3.980.000,00	272.881.190,00
13-05-2024	01500/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Snack pagi) Sosialisasi Program Revitalisasi LPTK 2024	0,00	3.200.000,00	269.681.190,00

1	2	3	4	5	6
		dan Pengadaan BMN (PT di LLDIKTI III,IV,V,VI,VII,VIII,XI,XV) tgl 25 April 2024			
13-05-2024	01501/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Snack siang) Sosialisasi Program Revitalisasi LPTK 2024 dan Pengadaan BMN (PT di LLDIKTI III,IV,V,VI,VII,VIII,XI,XV) tgl 25 April 2024	0,00	3.200.000,00	266.481.190,00
13-05-2024	FPK-PENG-k22M3l2N9EaNzYk	Tagihan KKP No : 4340750300084549 NATANAEL PRIHASTOMO	0,00	3.083.647,00	263.397.543,00
13-05-2024	FPK-PENG-DQ5N6thMUUH2GPy	Tagihan KKP No : 6032987100007480 NADILA RIZKI	0,00	2.823.000,00	260.574.543,00
13-05-2024	FPK-PENG-DngtZpOhkB6o3DK	Tagihan KKP No : 4340750300085108 ADHRIAL REFADDIN	0,00	2.790.676,00	257.783.867,00
13-05-2024	01503/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Snack) Buka Bersama Brayat Agung LLDIKTI 6 tgl 3 April 2024	0,00	2.400.000,00	255.383.867,00
13-05-2024	01506/KW/723014/2024	Menghadiri Undangan Perayaan Hari Pendidikan Nasional 2024	0,00	2.294.500,00	253.089.367,00
13-05-2024	01511/KW/723014/2024	Workshop Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 bagi LLDIKTI	0,00	1.816.060,00	251.273.307,00
13-05-2024	01499/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Makan) dalam rangka Pemeriksaan Fact Finding adanya Permasalahan dalam Pelaksanaan Program Ferienjob pada Perguruan Tinggi dan LLDIKTI 24 April 2024	0,00	1.650.000,00	249.623.307,00
13-05-2024	FPK-PENG-Bat864DFyi31fVk	Tagihan KKP No : 4340750300084556 BHIMO WIDYO ANDOKO	0,00	1.387.197,00	248.236.110,00
13-05-2024	01512/KW/723014/2024	Workshop Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 bagi LLDIKTI	0,00	1.360.000,00	246.876.110,00
13-05-2024	01523/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	1.160.910,00	245.715.200,00
13-05-2024	01522/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	1.123.500,00	244.591.700,00
13-05-2024	01516/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	994.000,00	243.597.700,00
13-05-2024	01498/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Snack) dalam rangka Pemeriksaan Fact Finding adanya Permasalahan dalam Pelaksanaan Program Ferienjob pada Perguruan Tinggi dan LLDIKTI 24 April 2024	0,00	960.000,00	242.637.700,00

1	2	3	4	5	6
13-05-2024	01521/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	912.000,00	241.725.700,00
13-05-2024	01515/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	910.000,00	240.815.700,00
13-05-2024	01517/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	910.000,00	239.905.700,00
13-05-2024	01518/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	910.000,00	238.995.700,00
13-05-2024	01519/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	910.000,00	238.085.700,00
13-05-2024	01505/KW/723014/2024	Menghadiri Undangan Perayaan Hari Pendidikan Nasional 2024	0,00	848.000,00	237.237.700,00
13-05-2024	01493/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari pembelian Aqua galon, isi ulang air dan gula pasir	0,00	791.000,00	236.446.700,00
13-05-2024	01514/KW/723014/2024	Uang Lembur Non PNS - Pembayaran Lembur Pegawai Alih Daya bulan April 2024	0,00	747.000,00	235.699.700,00
13-05-2024	00349/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	615.000,00	235.084.700,00
13-05-2024	01520/KW/723014/2024	FGD Penyusunan Antarmuka Website LLDIKTI 6	0,00	592.000,00	234.492.700,00
13-05-2024	01508/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	584.000,00	233.908.700,00
13-05-2024	01497/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Makan) dalam rangka Pemeriksaan Fact Finding adanya Permasalahan dalam Pelaksanaan Program Ferienjob pada Perguruan Tinggi dan LLDIKTI 22 April 2024	0,00	550.000,00	233.358.700,00
13-05-2024	01494/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari pembelian materai sejumlah "40 "	0,00	400.000,00	232.958.700,00
13-05-2024	01496/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Snack) dalam rangka Pemeriksaan Fact Finding adanya Permasalahan dalam Pelaksanaan Program Ferienjob pada Perguruan Tinggi dan LLDIKTI 22 April 2024	0,00	320.000,00	232.638.700,00
13-05-2024	01507/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	296.000,00	232.342.700,00
13-05-2024	01510/KW/723014/2024	Undangan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TW 2 Tahun 2024	0,00	170.000,00	232.172.700,00

1	2	3	4	5	6
13-05-2024	01509/KW/723014/2024	Undangan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TW 2 Tahun 2024	0,00	170.000,00	232.002.700,00
13-05-2024	00339/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	56.600,00	231.946.100,00
13-05-2024	01531/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor pembelian kabel power ori	0,00	50.000,00	231.896.100,00
13-05-2024	00340/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	49.400,00	231.846.700,00
13-05-2024	01495/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari - Biaya Jilid Laporan Tanggapan Temuan BPK	0,00	48.800,00	231.797.900,00
13-05-2024	00347/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	40.800,00	231.757.100,00
13-05-2024	00342/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	36.800,00	231.720.300,00
13-05-2024	00341/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	36.800,00	231.683.500,00
13-05-2024	00344/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	231.649.500,00
13-05-2024	00343/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	231.615.500,00
13-05-2024	00345/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	231.581.500,00
13-05-2024	00346/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	13.600,00	231.567.900,00
13-05-2024	00351/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	12.041,00	231.555.859,00
13-05-2024	FPK-PENG-nib8lw8sWDmx4QW	Tagihan KKP No : 4340750300084598 LIS SETYOWATI	0,00	10.000,00	231.545.859,00
13-05-2024	00348/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	8.688,00	231.537.171,00
15-05-2024	01526/KW/723014/2024	1. Pendampingan Pengelolaan Data Pddikti - Stikes Tujuh Belas 2. Wisuda Sarjana Angkatan 76 Universitas Slamet Riyadi 3. Wisuda Pascasarjana ke-23, Sarjana ke-53, Diploma ke-7 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	0,00	1.114.000,00	230.423.171,00
15-05-2024	01524/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, 1. Pendampingan Pengelolaan Data Pddikti - Stikes Tujuh Belas 2. Wisuda Sarjana	0,00	1.100.000,00	229.323.171,00

1	2	3	4	5	6
		Angkatan 76 Universitas Slamet Riyadi 3. Wisuda Pascasarjana ke-23, Sarjana ke-53, Diploma ke-7 Universitas Vetera			
15-05-2024	01527/KW/723014/2024	Pengelolaan Arsip Digital di Lingkungan LLDikti	0,00	788.500,00	228.534.671,00
15-05-2024	01528/KW/723014/2024	Pengelolaan Arsip Digital di Lingkungan LLDikti	0,00	710.000,00	227.824.671,00
15-05-2024	01525/KW/723014/2024	1. Pendampingan Pengelolaan Data Pddikti - Stikes Tujuh Belas 2. Wisuda Sarjana Angkatan 76 Universitas Slamet Riyadi 3. Wisuda Pascasarjana ke-23, Sarjana ke-53, Diploma ke-7 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	0,00	592.000,00	227.232.671,00
15-05-2024	01529/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	170.000,00	227.062.671,00
15-05-2024	01530/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	126.000,00	226.936.671,00
16-05-2024	00353/BP/723014/2024	Pungut Pajak	945.000,00	0,00	227.881.671,00
16-05-2024	00352/BP/723014/2024	Pungut Pajak	945.000,00	0,00	228.826.671,00
16-05-2024	01553/KW/723014/2024	Biaya Tansportasi Kereta PP Semarang - Tegal	0,00	2.160.000,00	226.666.671,00
16-05-2024	01534/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Makan) dalam rangka Evaluasi Kinerja PTS di LLDIKTI Wil VI tgl 30 April 2024	0,00	1.000.000,00	225.666.671,00
16-05-2024	01549/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	224.756.671,00
16-05-2024	01546/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	223.846.671,00
16-05-2024	01544/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	222.936.671,00
16-05-2024	01551/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	222.026.671,00
16-05-2024	01545/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	221.116.671,00

1	2	3	4	5	6
16-05-2024	01547/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	220.206.671,00
16-05-2024	01552/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	219.296.671,00
16-05-2024	01550/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	218.386.671,00
16-05-2024	01548/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD PDD Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan PDD SISTER	0,00	910.000,00	217.476.671,00
16-05-2024	01556/KW/723014/2024	Pelatihan Keprotokolan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	0,00	801.600,00	216.675.071,00
16-05-2024	01555/KW/723014/2024	Pelatihan Keprotokolan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	0,00	772.500,00	215.902.571,00
16-05-2024	01554/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Perguruan Tinggi Lintas LLDikti Tanggal 07/05/2024 s.d 08/05/2024 Hotel Aston Priority Simatupang PERJADIN 230/LL6/KS.05.00/2024	0,00	730.000,00	215.172.571,00
16-05-2024	01539/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	646.000,00	214.526.571,00
16-05-2024	01557/KW/723014/2024	Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Perguruan Tinggi Lintas LLDikti	0,00	615.500,00	213.911.071,00
16-05-2024	01541/KW/723014/2024	Wisuda Sarjana Angkatan ke-54 Magister Angkatan ke-33 Universitas Islam Batik Surakarta	0,00	493.000,00	213.418.071,00
16-05-2024	01558/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Berangkat dalam rangka, Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Perguruan Tinggi Lintas LLDikti Tanggal 07/05/2024 s.d 08/05/2024 Hotel Aston Priority Simatupang PERJADIN 230/LL6/KS.05.00/2024	0,00	430.000,00	212.988.071,00
16-05-2024	01533/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu (Snack) Evaluasi Kinerja PTS di LLDIKTI Wil VI tgl 30 april 2024	0,00	320.000,00	212.668.071,00
16-05-2024	01538/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi	0,00	296.000,00	212.372.071,00

1	2	3	4	5	6
		MBKM Tahun 2024			
16-05-2024	01540/KW/723014/2024	Wisuda Sarjana Angkatan ke-54 Magister Angkatan ke-33 Universitas Islam Batik Surakarta	0,00	296.000,00	212.076.071,00
16-05-2024	01543/KW/723014/2024	FGD Gerakan Zero Retur SP2D Tahun Anggaran 2024	0,00	170.000,00	211.906.071,00
16-05-2024	01542/KW/723014/2024	FGD Gerakan Zero Retur SP2D Tahun Anggaran 2024	0,00	170.000,00	211.736.071,00
16-05-2024	01535/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian roofing, mur baut ring, dan lain-lain	0,00	157.000,00	211.579.071,00
16-05-2024	01536/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian sok pipa 1 1/2 inch dan lain-lain	0,00	120.000,00	211.459.071,00
16-05-2024	01537/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian kikir dan lain-lain	0,00	57.500,00	211.401.571,00
16-05-2024	01532/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian pelet ikan	0,00	56.000,00	211.345.571,00
20-05-2024	01607/KW/723014/2024	Pendampingan Pengelolaan Data Pddikti - Stikes Tujuh Belas	0,00	726.016,00	210.619.555,00
20-05-2024	01608/KW/723014/2024	Pendampingan Pengelolaan Data Pddikti - Stikes Tujuh Belas	0,00	726.016,00	209.893.539,00
22-05-2024	00356/BP/723014/2024	Pungut Pajak	416.000,00	0,00	210.309.539,00
22-05-2024	00357/BP/723014/2024	Pungut Pajak	300.000,00	0,00	210.609.539,00
22-05-2024	00354/BP/723014/2024	Pungut pajak	225.000,00	0,00	210.834.539,00
22-05-2024	00355/BP/723014/2024	Pungut Pajak	225.000,00	0,00	211.059.539,00
22-05-2024	00351/BP/723014/2024	Pungut Pajak	40.000,00	0,00	211.099.539,00
22-05-2024	01589/KW/723014/2024	Paket Meeting Fullboard dalam rangka kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	20.800.000,00	190.299.539,00
22-05-2024	01570/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	6.300.000,00	183.999.539,00

1	2	3	4	5	6
22-05-2024	01569/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	6.300.000,00	177.699.539,00
22-05-2024	01605/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	5.000.000,00	172.699.539,00
22-05-2024	01572/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	4.500.000,00	168.199.539,00
22-05-2024	01571/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	4.500.000,00	163.699.539,00
22-05-2024	01588/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Semarang - Magelang (PP) dalam rangka Kegiatan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	1.870.000,00	161.829.539,00
22-05-2024	01563/KW/723014/2024	Biaya penginapan dalam rangka, Akselerasi Akreditasi Perguruan Tinggi Tanggal 13/05/2024 s.d 15/05/2024 Hotel Novotel Tangerang PERJADIN 242/LL6/KL.00.01/2024	0,00	1.702.500,00	160.127.039,00
22-05-2024	01566/KW/723014/2024	1. Penyerahan SK Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2. Wisuda Periode I Tahun 2024 Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Setia Budi 3.	0,00	1.431.000,00	158.696.039,00
22-05-2024	01559/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, 1. Penyerahan SK Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2. Wisuda Periode I Tahun 2024 Program Pascasarjana, Sarjana dan Dip	0,00	1.215.000,00	157.481.039,00
22-05-2024	01560/KW/723014/2024	Cetak dan jilid Laporan Keuangan TA 2023 Audited	0,00	1.117.600,00	156.363.439,00
22-05-2024	01562/KW/723014/2024	Akselerasi Akreditasi Perguruan Tinggi	0,00	940.500,00	155.422.939,00
22-05-2024	01561/KW/723014/2024	Akselerasi Akreditasi Perguruan Tinggi	0,00	710.000,00	154.712.939,00

1	2	3	4	5	6
22-05-2024	01565/KW/723014/2024	1. Penyerahan SK Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2. Wisuda Periode I Tahun 2024 Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Setia Budi 3.	0,00	592.000,00	154.120.939,00
22-05-2024	01584/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	586.000,00	153.534.939,00
22-05-2024	01582/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	581.500,00	152.953.439,00
22-05-2024	01578/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	579.500,00	152.373.939,00
22-05-2024	01576/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	560.000,00	151.813.939,00
22-05-2024	01580/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	560.000,00	151.253.939,00
22-05-2024	01587/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	560.000,00	150.693.939,00
22-05-2024	01577/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	560.000,00	150.133.939,00
22-05-2024	01585/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	560.000,00	149.573.939,00
22-05-2024	01581/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	560.000,00	149.013.939,00
22-05-2024	01579/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	560.000,00	148.453.939,00
22-05-2024	01586/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	553.000,00	147.900.939,00
22-05-2024	01601/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	490.000,00	147.410.939,00
22-05-2024	01609/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	479.329,00	146.931.610,00
22-05-2024	01597/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri	0,00	423.930,00	146.507.680,00

1	2	3	4	5	6
		kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI			
22-05-2024	01583/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	390.000,00	146.117.680,00
22-05-2024	01602/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	145.727.680,00
22-05-2024	01596/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	145.337.680,00
22-05-2024	01599/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	144.947.680,00
22-05-2024	01594/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	144.557.680,00
22-05-2024	01595/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	144.167.680,00
22-05-2024	01592/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	143.777.680,00
22-05-2024	01593/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	143.387.680,00

1	2	3	4	5	6
22-05-2024	01590/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	142.997.680,00
22-05-2024	01591/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	142.607.680,00
22-05-2024	01598/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	142.217.680,00
22-05-2024	01603/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	390.000,00	141.827.680,00
22-05-2024	01604/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	300.000,00	141.527.680,00
22-05-2024	01606/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa : Media Komunikasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Latanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	296.000,00	141.231.680,00
22-05-2024	01574/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	100.000,00	141.131.680,00
22-05-2024	01575/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	100.000,00	141.031.680,00
22-05-2024	01564/KW/723014/2024	Biaya tol dalam rangka, PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI Tanggal 24/04/2024 s.d	0,00	98.500,00	140.933.180,00
22-05-2024	01573/KW/723014/2024	FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah VI Jawa Tengah Tahun 2024	0,00	95.000,00	140.838.180,00
27-05-2024	01621/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan	0,00	3.600.000,00	137.238.180,00

1	2	3	4	5	6
		Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024			
27-05-2024	01622/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	3.600.000,00	133.638.180,00
27-05-2024	01623/KW/723014/2024	Biaya Transportasi dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.120.000,00	132.518.180,00
27-05-2024	00366/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	945.000,00	131.573.180,00
27-05-2024	00365/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	945.000,00	130.628.180,00
27-05-2024	01633/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	504.800,00	130.123.380,00
27-05-2024	01634/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	481.000,00	129.642.380,00
27-05-2024	01635/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	468.300,00	129.174.080,00
27-05-2024	01626/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	463.500,00	128.710.580,00
27-05-2024	00360/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	440.000,00	128.270.580,00
27-05-2024	01627/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	127.840.580,00
27-05-2024	01629/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	127.410.580,00
27-05-2024	01630/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	126.980.580,00
27-05-2024	01625/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP:	0,00	430.000,00	126.550.580,00

1	2	3	4	5	6
		Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024			
27-05-2024	01628/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	126.120.580,00
27-05-2024	01632/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	125.690.580,00
27-05-2024	00369/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	416.000,00	125.274.580,00
27-05-2024	01613/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	400.000,00	124.874.580,00
27-05-2024	00363/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	330.000,00	124.544.580,00
27-05-2024	00356/SSP/723014/2024	PPN	0,00	317.117,00	124.227.463,00
27-05-2024	00358/SSP/723014/2024	PPN	0,00	317.117,00	123.910.346,00
27-05-2024	01617/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	123.610.346,00
27-05-2024	01620/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	123.310.346,00
27-05-2024	01618/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	123.010.346,00
27-05-2024	00370/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	300.000,00	122.710.346,00
27-05-2024	01615/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	122.410.346,00
27-05-2024	01619/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran	0,00	300.000,00	122.110.346,00

1	2	3	4	5	6
		Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024			
27-05-2024	01616/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	121.810.346,00
27-05-2024	01614/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	121.510.346,00
27-05-2024	01611/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembuatan infraboard dan print PP syntethic	0,00	276.330,00	121.234.016,00
27-05-2024	01631/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	260.000,00	120.974.016,00
27-05-2024	00361/SSP/723014/2024	PPN	0,00	237.838,00	120.736.178,00
27-05-2024	00368/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	225.000,00	120.511.178,00
27-05-2024	00367/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	225.000,00	120.286.178,00
27-05-2024	00371/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	180.000,00	120.106.178,00
27-05-2024	01624/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	145.000,00	119.961.178,00
27-05-2024	00353/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	90.000,00	119.871.178,00
27-05-2024	01612/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembuatan MMT Harkitnas	0,00	77.083,00	119.794.095,00
27-05-2024	00355/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	66.000,00	119.728.095,00
27-05-2024	00357/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	43.243,00	119.684.852,00
27-05-2024	00359/SSP/723014/2024	PPH 22	0,00	43.243,00	119.641.609,00

1	2	3	4	5	6
27-05-2024	00364/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	40.000,00	119.601.609,00
27-05-2024	00362/SSP/723014/2024	PPN	0,00	32.432,00	119.569.177,00
27-05-2024	00354/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	22.000,00	119.547.177,00
27-05-2024	00352/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	16.354,00	119.530.823,00
28-05-2024	FPK-PENG-F4UNVWJfl48Iy8z	SPM GUP	88.078.701,00	0,00	207.609.524,00
28-05-2024	FPK-PENG-E8qtnTXeu9bYvAe	SPM GUP	68.691.414,00	0,00	276.300.938,00
28-05-2024	01679/KW/723014/2024	Biaya paket meeting fullboard Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	36.000.000,00	240.300.938,00
28-05-2024	01706/KW/723014/2024	Outdoor activity dalam rangka Seruni Ngudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD)/Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) LLDIKTI Wilayah VI	0,00	35.378.475,00	204.922.463,00
28-05-2024	01642/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Perbaikan Saluran Air/Talud	0,00	18.328.000,00	186.594.463,00
28-05-2024	01705/KW/723014/2024	Paket Meeting Fullboard Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	16.250.000,00	170.344.463,00
28-05-2024	01657/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullday dalam rangka kegiatan Akegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah VI Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun	0,00	7.500.000,00	162.844.463,00
28-05-2024	01678/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	4.500.000,00	158.344.463,00
28-05-2024	01677/KW/723014/2024	Honor Narasumber Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	4.500.000,00	153.844.463,00
28-05-2024	01653/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	151.144.463,00

1	2	3	4	5	6
28-05-2024	01652/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	148.444.463,00
28-05-2024	01696/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	145.744.463,00
28-05-2024	01685/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	143.044.463,00
28-05-2024	01694/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	140.344.463,00
28-05-2024	01697/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	137.644.463,00
28-05-2024	01692/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	134.944.463,00
28-05-2024	01688/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	132.244.463,00
28-05-2024	01691/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	129.544.463,00
28-05-2024	01695/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	126.844.463,00
28-05-2024	01689/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	124.144.463,00
28-05-2024	01682/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	121.444.463,00
28-05-2024	01654/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	118.744.463,00
28-05-2024	01686/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun	0,00	2.700.000,00	116.044.463,00

1	2	3	4	5	6
		2024 Angkatan II			
28-05-2024	01683/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	113.344.463,00
28-05-2024	01680/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	110.644.463,00
28-05-2024	01687/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	107.944.463,00
28-05-2024	01684/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	105.244.463,00
28-05-2024	01681/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	102.544.463,00
28-05-2024	01693/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	99.844.463,00
28-05-2024	01690/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	2.700.000,00	97.144.463,00
28-05-2024	01647/KW/723014/2024	Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara	0,00	1.864.500,00	95.279.963,00
28-05-2024	01646/KW/723014/2024	Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara	0,00	1.760.000,00	93.519.963,00
28-05-2024	01664/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Rapat Koordinasi dan Finalisasi Skema Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2024 Tanggal 16/05/2024 s.d 18/05/2024 Mercure Jakarta Sabang Jalan H. Agus Salim N	0,00	1.600.000,00	91.919.963,00
28-05-2024	01656/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Semarang - Magelang (PP) dalam rangka Kegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah VI Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	1.245.000,00	90.674.963,00
28-05-2024	01658/KW/723014/2024	Biaya penginapan dalam rangka, Assesmen Lapangan Akreditasi Perguruan Tinggi	0,00	1.150.000,00	89.524.963,00

1	2	3	4	5	6
		Universitas Muhammadiyah Magelang Tanggal 17/05/2024 s.d 18/05/2024			
28-05-2024	01660/KW/723014/2024	Assesmen Lapangan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang	0,00	1.024.500,00	88.500.463,00
28-05-2024	01666/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD BKD â€œNgudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan BKD SISTER	0,00	910.000,00	87.590.463,00
28-05-2024	01671/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD BKD â€œNgudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan BKD SISTER	0,00	910.000,00	86.680.463,00
28-05-2024	01670/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD BKD â€œNgudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan BKD SISTER	0,00	910.000,00	85.770.463,00
28-05-2024	01668/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD BKD â€œNgudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan BKD SISTER	0,00	910.000,00	84.860.463,00
28-05-2024	01667/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD BKD â€œNgudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan BKD SISTER	0,00	910.000,00	83.950.463,00
28-05-2024	01669/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD BKD â€œNgudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan BKD SISTER	0,00	910.000,00	83.040.463,00
28-05-2024	01665/KW/723014/2024	Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD BKD â€œNgudarasa : Media Konsultasi dan Evaluasi Layanan BKD SISTER	0,00	910.000,00	82.130.463,00
28-05-2024	01655/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Kegiatan Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	900.000,00	81.230.463,00
28-05-2024	01640/KW/723014/2024	Uang Lembur Non PNS bulan Mei 2024	0,00	791.000,00	80.439.463,00
28-05-2024	01662/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi dan Finalisasi Skema Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2024	0,00	781.500,00	79.657.963,00
28-05-2024	01663/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi dan Finalisasi Skema Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2024	0,00	710.000,00	78.947.963,00
28-05-2024	01638/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian air minum	0,00	615.000,00	78.332.963,00

1	2	3	4	5	6
28-05-2024	01659/KW/723014/2024	Assesmen Lapangan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang	0,00	592.000,00	77.740.963,00
28-05-2024	01672/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	450.000,00	77.290.963,00
28-05-2024	01701/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	430.000,00	76.860.963,00
28-05-2024	01703/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	430.000,00	76.430.963,00
28-05-2024	01702/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	430.000,00	76.000.963,00
28-05-2024	01698/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	430.000,00	75.570.963,00
28-05-2024	01699/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	430.000,00	75.140.963,00
28-05-2024	01704/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	430.000,00	74.710.963,00
28-05-2024	01700/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan II	0,00	430.000,00	74.280.963,00
28-05-2024	01673/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	400.000,00	73.880.963,00
28-05-2024	01648/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah VI Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	400.000,00	73.480.963,00
28-05-2024	01639/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian air minum	0,00	350.000,00	73.130.963,00
28-05-2024	01643/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian SDL pipa, stopkran dan lain-lain	0,00	324.000,00	72.806.963,00
28-05-2024	01651/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah VI Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	300.000,00	72.506.963,00
28-05-2024	01676/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	300.000,00	72.206.963,00
28-05-2024	01650/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah VI Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional	0,00	300.000,00	71.906.963,00

1	2	3	4	5	6
		Tahun 2024			
28-05-2024	01649/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah VI Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	300.000,00	71.606.963,00
28-05-2024	01674/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	300.000,00	71.306.963,00
28-05-2024	01675/KW/723014/2024	Honor Panitia Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	300.000,00	71.006.963,00
28-05-2024	01644/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian lem, stopkran dan lain-lain	0,00	240.500,00	70.766.463,00
28-05-2024	01637/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembiatan MMT bergerak bersama	0,00	225.000,00	70.541.463,00
28-05-2024	01645/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian dop, knee dan lain-lain	0,00	186.000,00	70.355.463,00
28-05-2024	01641/KW/723014/2024	Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur - NON PNS LLDIKTI Wilayah VI Periode 01/04/2024 s.d 30/04/2024	0,00	82.000,00	70.273.463,00
28-05-2024	01661/KW/723014/2024	Biaya parkir operasional TU Plat H 1034 XG dalam rangka, melayani Itjen	0,00	23.500,00	70.249.963,00
29-05-2024	01759/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Pesawat Berangkat dalam rangka, menghadiri Kampus Merdeka Fair Padang 2024 Tanggal 29/05/2024 s.d 31/05/2024 Universitas PGRI Sumatera Barat Convention Center (UPCC) PERJADIN 283/LL6/DT.00.00/2024	0,00	14.846.538,00	55.403.425,00
29-05-2024	01760/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Pesawat Pulang dalam rangka, menghadiri Kampus Merdeka Fair Padang 2024 Tanggal 29/05/2024 s.d 31/05/2024 Universitas PGRI Sumatera Barat Convention Center (UPCC) PERJADIN 283/LL6/DT.00.00/2024	0,00	12.765.456,00	42.637.969,00
29-05-2024	01757/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka , Kampus Merdeka Fair Padang 2024 Tanggal 29/05/2024 s.d 31/05/2024 Universitas PGRI Sumatera Barat Convention Center (UPCC) PERJADIN 283/LL6/DT.00.00/2024	0,00	4.800.000,00	37.837.969,00

1	2	3	4	5	6
29-05-2024	01756/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Bimbingan Teknis SKP Angkatan VI Tanggal 29/05/2024 s.d 31/05/2024 The Malioboro Hotel and Conference Center Jl. Gandekan Lor No.21, Pringgokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Mengantar Bapa	0,00	3.200.000,00	34.637.969,00
29-05-2024	01755/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	34.372.969,00
29-05-2024	01744/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	34.107.969,00
29-05-2024	01752/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	33.842.969,00
29-05-2024	01725/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	265.000,00	33.577.969,00
29-05-2024	01736/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	33.312.969,00
29-05-2024	01748/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	33.047.969,00
29-05-2024	01747/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	32.782.969,00
29-05-2024	01746/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	32.517.969,00
29-05-2024	01741/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	32.252.969,00
29-05-2024	01738/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	31.987.969,00
29-05-2024	01730/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	31.722.969,00
29-05-2024	01726/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	265.000,00	31.457.969,00
29-05-2024	01754/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	31.192.969,00
29-05-2024	01750/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	30.927.969,00
29-05-2024	01737/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	30.662.969,00
29-05-2024	01733/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	30.397.969,00

1	2	3	4	5	6
29-05-2024	01732/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	30.132.969,00
29-05-2024	01731/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	29.867.969,00
29-05-2024	01728/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	29.602.969,00
29-05-2024	01727/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	265.000,00	29.337.969,00
29-05-2024	01729/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	29.072.969,00
29-05-2024	01753/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	28.807.969,00
29-05-2024	01742/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	28.542.969,00
29-05-2024	01751/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	28.277.969,00
29-05-2024	01734/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	28.012.969,00
29-05-2024	01735/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	27.747.969,00
29-05-2024	01740/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	27.482.969,00
29-05-2024	01743/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	27.217.969,00
29-05-2024	01739/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	26.952.969,00
29-05-2024	01745/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	26.687.969,00
29-05-2024	01749/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Kepegawaian tgl 28 Mei 2024	0,00	265.000,00	26.422.969,00
29-05-2024	01720/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	170.000,00	26.252.969,00
29-05-2024	01715/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	26.082.969,00
29-05-2024	01724/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei	0,00	170.000,00	25.912.969,00

1	2	3	4	5	6
		2024			
29-05-2024	01713/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	25.742.969,00
29-05-2024	01714/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	25.572.969,00
29-05-2024	01719/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	170.000,00	25.402.969,00
29-05-2024	01722/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	170.000,00	25.232.969,00
29-05-2024	01721/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	170.000,00	25.062.969,00
29-05-2024	01711/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	24.892.969,00
29-05-2024	01718/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	170.000,00	24.722.969,00
29-05-2024	01716/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	170.000,00	24.552.969,00
29-05-2024	01712/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	24.382.969,00
29-05-2024	01709/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	24.212.969,00
29-05-2024	01708/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	24.042.969,00
29-05-2024	01707/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	23.872.969,00
29-05-2024	01723/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei	0,00	170.000,00	23.702.969,00

1	2	3	4	5	6
		2024			
29-05-2024	01717/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 27 Mei 2024	0,00	170.000,00	23.532.969,00
29-05-2024	01758/KW/723014/2024	Biaya Tol dalam rangka menghadiri kegiatan SERUNI Ngudarasa Tanggal 20 - 22 Mei 2024 di UMBUL SIDOMUKTI	0,00	64.000,00	23.468.969,00
30-05-2024	FPK-PENG-5XcUWuJ8Htaej9E	SPM GUP	198.749.124,00	0,00	222.218.093,00
30-05-2024	FPK-PENG-TCOjqLFQBbBiaH8	SPM GUP	31.000.913,00	0,00	253.219.006,00
30-05-2024	01762/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	3.030.130,00	250.188.876,00
30-05-2024	01761/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	983.500,00	249.205.376,00
30-05-2024	01766/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	530.000,00	248.675.376,00
30-05-2024	01767/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	530.000,00	248.145.376,00
30-05-2024	01765/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	340.000,00	247.805.376,00
30-05-2024	01770/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	190.000,00	247.615.376,00
30-05-2024	01769/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	190.000,00	247.425.376,00
30-05-2024	01763/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	190.000,00	247.235.376,00
30-05-2024	01764/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	190.000,00	247.045.376,00
30-05-2024	01768/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	190.000,00	246.855.376,00
31-05-2024	00402/BP/723014/2024	Pungut pajak	4.143.425,00	0,00	250.998.801,00
31-05-2024	00403/BP/723014/2024	Pungut Pajak	2.607.942,00	0,00	253.606.743,00
31-05-2024	00369/BP/723014/2024	Pungut Pajak	2.146.522,00	0,00	255.753.265,00
31-05-2024	00382/BP/723014/2024	Pungut pajak	720.000,00	0,00	256.473.265,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	00400/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	256.878.265,00
31-05-2024	00396/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	257.283.265,00
31-05-2024	00373/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	257.688.265,00
31-05-2024	00374/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	258.093.265,00
31-05-2024	00399/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	258.498.265,00
31-05-2024	00401/BP/723014/2024	Pungut pajak	325.000,00	0,00	258.823.265,00
31-05-2024	00381/BP/723014/2024	Pungut Pajak	225.000,00	0,00	259.048.265,00
31-05-2024	00380/BP/723014/2024	Pungut Pajak	225.000,00	0,00	259.273.265,00
31-05-2024	00365/BP/723014/2024	Pungut Pajak	180.000,00	0,00	259.453.265,00
31-05-2024	00367/BP/723014/2024	Pungut Pajak	180.000,00	0,00	259.633.265,00
31-05-2024	00366/BP/723014/2024	Pungut pajak	180.000,00	0,00	259.813.265,00
31-05-2024	00376/BP/723014/2024	Pungut Pajak	150.000,00	0,00	259.963.265,00
31-05-2024	00394/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	260.098.265,00
31-05-2024	00398/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	260.233.265,00
31-05-2024	00387/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	260.368.265,00
31-05-2024	00391/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	260.503.265,00
31-05-2024	00393/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	260.638.265,00
31-05-2024	00383/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	260.773.265,00
31-05-2024	00392/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	260.908.265,00
31-05-2024	00386/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	261.043.265,00
31-05-2024	00390/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	261.178.265,00
31-05-2024	00389/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	261.313.265,00
31-05-2024	00385/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	261.448.265,00
31-05-2024	00388/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	261.583.265,00
31-05-2024	00397/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	261.718.265,00
31-05-2024	00395/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	261.853.265,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	00375/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	261.988.265,00
31-05-2024	00384/BP/723014/2024	Pungut pajak	135.000,00	0,00	262.123.265,00
31-05-2024	00377/BP/723014/2024	Pungut Pajak	67.500,00	0,00	262.190.765,00
31-05-2024	00370/BP/723014/2024	Pungut Pajak	60.000,00	0,00	262.250.765,00
31-05-2024	00360/BP/723014/2024	Pungut Pajak	60.000,00	0,00	262.310.765,00
31-05-2024	00378/BP/723014/2024	Pungut Pajak	20.000,00	0,00	262.330.765,00
31-05-2024	00379/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	262.345.765,00
31-05-2024	00363/BP/723014/2024	Paungut Pajak	15.000,00	0,00	262.360.765,00
31-05-2024	00361/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	262.375.765,00
31-05-2024	00364/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	262.390.765,00
31-05-2024	00372/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	262.405.765,00
31-05-2024	00371/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	262.420.765,00
31-05-2024	00362/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	262.435.765,00
31-05-2024	00358/BP/723014/2024	Pungut Pajak	11.053,00	0,00	262.446.818,00
31-05-2024	00368/BP/723014/2024	Pungut pajak	9.000,00	0,00	262.455.818,00
31-05-2024	00359/BP/723014/2024	Pungut Pajak	3.083,00	0,00	262.458.901,00
31-05-2024	01771/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman berupa Pekerjaan Pemasangan Jalur Disabilitas Kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	22.267.809,00	240.191.092,00
31-05-2024	01783/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka FGD Pengembangan Website Angkatan I	0,00	3.600.000,00	236.591.092,00
31-05-2024	00416/SSP/723014/2024	PPN	0,00	3.505.975,00	233.085.117,00
31-05-2024	01809/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	3.360.000,00	229.725.117,00
31-05-2024	01772/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa perpanjangan STNK dan ganti plat nomor kendaraan dinas H 6674 XG, H 1823 XG, dan H	0,00	3.159.000,00	226.566.117,00
31-05-2024	01816/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Pesawat dalam rangka , Pendampingan verifikasi dan validasi Penilaian	0,00	2.236.950,00	224.329.167,00

1	2	3	4	5	6
		Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024 Tanggal 20/05/2024 s.d 21/05/2024 LLDIKTI WILAYAH VI Semarang			
31-05-2024	00382/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	1.816.288,00	222.512.879,00
31-05-2024	01810/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	1.800.000,00	220.712.879,00
31-05-2024	01782/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Pendampingan Akselarasi Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta - ITS PKU Muhammadiyah Surakarta Tanggal 16/05/2024 s.d 17/05/2024 ITS PKU Muhammadiyah Surakarta PERJADIN 262/LL6/KL.	0,00	1.299.990,00	219.412.889,00
31-05-2024	01815/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka , Pendampingan verifikasi dan validasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	1.200.000,00	218.212.889,00
31-05-2024	01814/KW/723014/2024	Biaya Tiket dalam rangka , Pendampingan verifikasi dan validasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024 Tanggal 20/05/2024 s.d 21/05/2024 LLDIKTI WILAYAH VI Semarang PERJADIN 292/LL	0,00	1.112.309,00	217.100.580,00
31-05-2024	01776/KW/723014/2024	Evaluasi lapangan usulan pembukaan Pembukaan Program Studi Pendidikan Program Doktor pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto	0,00	1.045.500,00	216.055.080,00
31-05-2024	01808/KW/723014/2024	Biaya Tiket dalam rangka kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	1.019.625,00	215.035.455,00
31-05-2024	01811/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka , Pendampingan verifikasi dan validasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024 Tanggal 20/05/2024 s.d 21/05/2024 LLDIKTI WILAYAH VI Semarang PERJ	0,00	990.000,00	214.045.455,00
31-05-2024	01779/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Penyatuan dan Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta Vokasi Tahun 2024 Tanggal 21/05/2024 s.d 22/05/2024 Artotel Suites	0,00	970.000,00	213.075.455,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	01780/KW/723014/2024	Asesmen Lapangan Akreditasi Perguruan Tinggi - Universitas Muhammadiyah Magelang	0,00	948.090,00	212.127.365,00
31-05-2024	01775/KW/723014/2024	Evaluasi lapangan usulan pembukaan Pembukaan Program Studi Pendidikan Program Doktor pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto	0,00	888.000,00	211.239.365,00
31-05-2024	01777/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Evaluasi lapangan usulan pembukaan Pembukaan Program Studi Pendidikan Program Doktor pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tanggal 20/05/2024 s.d 22/05/2024 Universitas Muhammadiyah Purwokert	0,00	776.100,00	210.463.265,00
31-05-2024	01781/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Asesmen Lapangan Akreditasi Perguruan Tinggi - Universitas Muhammadiyah Magelang Tanggal 17/05/2024 s.d 18/05/2024 Universitas Muhammadiyah Magelang PERJADIN 263/LL6/KL.00.01/2024	0,00	725.000,00	209.738.265,00
31-05-2024	00396/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	720.000,00	209.018.265,00
31-05-2024	01787/KW/723014/2024	Pendampingan Akselarasi Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta - ITS PKU Muhammadiyah Surakarta	0,00	690.500,00	208.327.765,00
31-05-2024	01778/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Penyatuan dan Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta Vokasi Tahun 2024	0,00	655.500,00	207.672.265,00
31-05-2024	00417/SSP/723014/2024	PPH 22	0,00	637.450,00	207.034.815,00
31-05-2024	01799/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	635.000,00	206.399.815,00
31-05-2024	01802/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	635.000,00	205.764.815,00
31-05-2024	01795/KW/723014/2024	Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	635.000,00	205.129.815,00
31-05-2024	01804/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	635.000,00	204.494.815,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	01798/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	635.000,00	203.859.815,00
31-05-2024	01800/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	635.000,00	203.224.815,00
31-05-2024	01784/KW/723014/2024	Pendampingan Akselarasi Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta - ITS PKU Muhammadiyah Surakarta	0,00	592.000,00	202.632.815,00
31-05-2024	01786/KW/723014/2024	Pendampingan Akselarasi Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta - ITS PKU Muhammadiyah Surakarta	0,00	592.000,00	202.040.815,00
31-05-2024	01803/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	565.500,00	201.475.315,00
31-05-2024	01812/KW/723014/2024	Biaya Refund Tiket dalam rangka , Pendampingan verifikasi dan validasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024 Tanggal 20/05/2024 s.d 21/05/2024 LLDIKTI WILAYAH VI Semarang PERJADIN	0,00	563.785,00	200.911.530,00
31-05-2024	01797/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	540.000,00	200.371.530,00
31-05-2024	01801/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	446.000,00	199.925.530,00
31-05-2024	01788/KW/723014/2024	Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	430.000,00	199.495.530,00
31-05-2024	01792/KW/723014/2024	Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	430.000,00	199.065.530,00
31-05-2024	01791/KW/723014/2024	Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	430.000,00	198.635.530,00
31-05-2024	01790/KW/723014/2024	Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	430.000,00	198.205.530,00
31-05-2024	01789/KW/723014/2024	Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	430.000,00	197.775.530,00
31-05-2024	00388/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	197.370.530,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	00410/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	196.965.530,00
31-05-2024	00414/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	196.560.530,00
31-05-2024	00387/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	196.155.530,00
31-05-2024	00413/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	195.750.530,00
31-05-2024	01807/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	396.000,00	195.354.530,00
31-05-2024	01806/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	391.000,00	194.963.530,00
31-05-2024	01796/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	391.000,00	194.572.530,00
31-05-2024	01805/KW/723014/2024	Pendampingan Peserta PILMAPRES Wilayah VI Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2024	0,00	370.000,00	194.202.530,00
31-05-2024	00383/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	330.234,00	193.872.296,00
31-05-2024	00415/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	325.000,00	193.547.296,00
31-05-2024	01793/KW/723014/2024	Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	309.500,00	193.237.796,00
31-05-2024	01785/KW/723014/2024	Pendampingan Akselarasi Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta - ITS PKU Muhammadiyah Surakarta	0,00	296.000,00	192.941.796,00
31-05-2024	01813/KW/723014/2024	Biaya Refund Tiket dalam rangka , Pendampingan verifikasi dan validasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024 Tanggal 20/05/2024 s.d 21/05/2024 LLDIKTI WILAYAH VI Semarang PERJADIN	0,00	288.847,00	192.652.949,00
31-05-2024	01817/KW/723014/2024	Biaya Administrasi Bank	0,00	261.400,00	192.391.549,00
31-05-2024	00395/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	225.000,00	192.166.549,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	00394/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	225.000,00	191.941.549,00
31-05-2024	00379/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	191.761.549,00
31-05-2024	00380/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	191.581.549,00
31-05-2024	01710/KW/723014/2024	Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Persiapan Pembinaan Kepegawaian tgl 17 Mei 2024	0,00	170.000,00	191.411.549,00
31-05-2024	01794/KW/723014/2024	Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3	0,00	170.000,00	191.241.549,00
31-05-2024	00390/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	150.000,00	191.091.549,00
31-05-2024	00397/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	190.956.549,00
31-05-2024	00400/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	190.821.549,00
31-05-2024	00412/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	190.686.549,00
31-05-2024	00411/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	190.551.549,00
31-05-2024	00407/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	190.416.549,00
31-05-2024	00401/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	190.281.549,00
31-05-2024	00406/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	190.146.549,00
31-05-2024	00399/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	190.011.549,00
31-05-2024	00404/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	189.876.549,00
31-05-2024	00403/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	189.741.549,00
31-05-2024	00389/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	189.606.549,00
31-05-2024	00402/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	189.471.549,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	00398/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	189.336.549,00
31-05-2024	00405/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	189.201.549,00
31-05-2024	00408/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	189.066.549,00
31-05-2024	00409/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	188.931.549,00
31-05-2024	00391/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	67.500,00	188.864.049,00
31-05-2024	00374/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	60.000,00	188.804.049,00
31-05-2024	00384/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	60.000,00	188.744.049,00
31-05-2024	01773/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa pembelian bbm kendaraan dinas roda 2 H 6174 XG dalam rangka biaya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	30.000,00	188.714.049,00
31-05-2024	00392/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	20.000,00	188.694.049,00
31-05-2024	01774/KW/723014/2024	Biaya Tol Operasional kendaraa dinas H 9507 CG dalam rangka melayani Itjen	0,00	16.000,00	188.678.049,00
31-05-2024	00376/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	188.663.049,00
31-05-2024	00378/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	188.648.049,00
31-05-2024	00377/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	188.633.049,00
31-05-2024	00386/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	188.618.049,00
31-05-2024	00375/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	188.603.049,00
31-05-2024	00385/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	188.588.049,00
31-05-2024	00393/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	188.573.049,00
31-05-2024	00372/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	11.053,00	188.561.996,00

1	2	3	4	5	6
31-05-2024	00381/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	9.000,00	188.552.996,00
31-05-2024	00373/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	3.083,00	188.549.913,00
		Jumlah	**621.418.517,00**	**658.793.786,00**	**188.549.913,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : MEI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 0057101300000280

Nama Rekening : RPL 026 KS LLDIKTI W

Nama Bank : Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan April 2024			1.111.800.900,00
06-05-2024	FPK-PENG-c1ZlV1GejU2stSR	Pencairan Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap I (70%)	0,00	1.111.800.900,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**1.111.800.900,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN



Nofalina Yodianti

NIP 199311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : MEI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 1053003521

Nama Rekening : RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan April 2024			0,00
16-05-2024	FPK-PENG-q980tuKfXEas63J	Dana PKM DIKTI Tahun 2024	1.660.239.000,00	0,00	1.660.239.000,00
		Jumlah	**1.660.239.000,00**	**0,00**	**1.660.239.000,00**

BENDAHARA PENGELUARAN



Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 04-06-2024

Periode : 2024-05

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6D96C1PL7HPD5M52 026063972401	411124	IDR	615,000	ADA
2	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D3A7F4ETN1GI4T2R 075824971999	411124	IDR	8,688	ADA
3	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B31F31PL7HPCGDFN 089837972403	411121	IDR	40,800	ADA
4	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C2BA85BB6S2V8GL3 194206972402	411124	IDR	12,041	ADA
5	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3084D5BB6S2RQ8CR 376240971986	411121	IDR	317,400	ADA
6	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	68A4767OMML8EPKC 402018971980	411121	IDR	307,800	ADA
7	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E3E4B5BB6S2THSMT 495584971984	411121	IDR	34,000	ADA
8	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4975F2M2NCBN12NG 504813971976	411121	IDR	56,600	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C6F8B2M2NCBN7450 582350971991	411121	IDR	49,400	ADA
10	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EC3997466H7LMF6H 631270971973	411121	IDR	36,800	ADA
11	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	84C3F7466H7M56S9 661874971987	411121	IDR	34,000	ADA
12	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	92BCF3IG76U3QJ3C 715290971993	411121	IDR	36,800	ADA
13	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3E2F21PL7HPBGE1O 748275971989	411121	IDR	34,000	ADA
14	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BC97967OMMLA6266 763274971992	411121	IDR	13,600	ADA
15	026	560965	08-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	25D1B67OMMLBDAU 7 897097971996	411124	IDR	14,592	ADA
16	026	560965	27-Mei-24	MANDIRI JAYA 747765105517000	001DF5BB6U1TQ42Q 113764588827	411122	IDR	32,432	ADA
17	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AEB1E67OMOK62291 237308588825	411121	IDR	300,000	ADA
18	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	266354ETN3FKPIRJ 253444588813	411124	IDR	440,000	ADA
19	026	560965	27-Mei-24	MANDIRI JAYA 747765105517000	F96C33IG78T4HDEO 284050588822	411122	IDR	43,243	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1DB664ETN3FCOF9H 291942588839	411121	IDR	225,000	ADA
21	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	167431PL7JOFQ909 362655588809	411124	IDR	330,000	ADA
22	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C89042M2NEAK5ISP 398362588826	411121	IDR	225,000	ADA
23	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6E73367OMOK5A3OI 425608588831	411121	IDR	945,000	ADA
24	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A9FE91PL7JOECB7E 552461588816	411124	IDR	16,354	ADA
25	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3EB8400Q7UJLP7SB 603926588821	411124	IDR	22,000	ADA
26	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	DD5B800Q7UJB1ISE 616650588810	411121	IDR	90,000	ADA
27	026	560965	27-Mei-24	MANDIRI JAYA 747765105517000	927B35BB6U1TJG73 640916588835	411122	IDR	43,243	ADA
28	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	508937466J6HF9LB 651790588830	411121	IDR	945,000	ADA
29	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BCE091PL7JNQC5Q1 652099588804	411211	IDR	237,838	ADA
30	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BBB9C1PL7JNQ5B59 705676588806	411211	IDR	317,117	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3AE192M2NEAR76IG 835209588814	411124	IDR	66,000	ADA
32	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C95B80T7NP63KDC0 873526588838	411124	IDR	40,000	ADA
33	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FA24D1PL7JOGAKAC 910889588823	411124	IDR	416,000	ADA
34	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7FBB567OMOK24RI3 970806588818	411121	IDR	180,000	ADA
35	026	560965	27-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A488A00Q7UJ12PKC 985572588803	411211	IDR	317,117	ADA
36	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	08E305BB6UKD60IP 038179571713	411211	IDR	3,505,975	ADA
37	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	296000T7NPOKMJ86 046136377654	411121	IDR	135,000	ADA
38	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1E5362M2NETFH6GM 089168342506	411121	IDR	135,000	ADA
39	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9AB471PL7KBC09DN 115902137443	411124	IDR	150,000	ADA
40	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1711C1PL7KATNI56 126030462326	411121	IDR	15,000	ADA
41	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9DF837466JP8UD44 142717457239	411121	IDR	60,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
42	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CEF2067OMP6R9GMP 161329372423	411121	IDR	15,000	ADA
43	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	ACF414ETN42D9RMM 220800307030	411124	IDR	3,083	ADA
44	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2751F2M2NETB2L2G 231493377333	411121	IDR	15,000	ADA
45	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	68AEC1PL7KAVRD15 232167506638	411121	IDR	20,000	ADA
46	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EEBCD7466JPELGF1 233826632311	411121	IDR	405,000	ADA
47	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	927EE4ETN42HNE1S 235627571208	411124	IDR	325,000	ADA
48	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A489A0T7NPORG25F 245577437632	411124	IDR	11,053	ADA
49	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E62073IG79FSP3TR 286385472410	411121	IDR	405,000	ADA
50	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	199DD3IG79FR9V1Q 291420502557	411121	IDR	135,000	ADA
51	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D2E8067OMP6T9EKC 318315336742	411121	IDR	405,000	ADA
52	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E952C0T7NPON48H5 319369361400	411121	IDR	135,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
53	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FC8135BB6UKF5QIQ 350584436222	411121	IDR	15,000	ADA
54	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	55D3D4ETN426LTHO 351705352445	411121	IDR	135,000	ADA
55	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	34BEE5BB6UKJF09R 365438222303	411121	IDR	135,000	ADA
56	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	209A567OMP6R3H8O 382328292428	411121	IDR	60,000	ADA
57	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7A6812M2NETCSRA8 387713382850	411121	IDR	225,000	ADA
58	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8FA717466JPMNBFF 389888341852	411124	IDR	720,000	ADA
59	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	99FCB00Q7V6FMSSL 409903632507	411124	IDR	330,234	ADA
60	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	29B953IG79FP3P1A 420493252753	411121	IDR	225,000	ADA
61	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E2A315BB6UKIGEK0 422267401346	411121	IDR	135,000	ADA
62	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EEB1D5BB6UKKVD42 540001317304	411121	IDR	405,000	ADA
63	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	5502667OMP6VMBIU 603583422056	411121	IDR	135,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
64	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4AA3A3IG79FPG9E5 610056266448	411121	IDR	135,000	ADA
65	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BD4E600Q7V6976DG 620318311858	411121	IDR	135,000	ADA
66	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	5E70000Q7V6FFPCG 684406276727	411124	IDR	9,000	ADA
67	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	7119300Q7V66LRRO 696345550937	411121	IDR	135,000	ADA
68	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	726400T7NPOHHRJC 741239312430	411121	IDR	180,000	ADA
69	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4F0787466JP7R28N 744029512025	411121	IDR	15,000	ADA
70	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	FEA5300Q7V6AU58V 772202342200	411121	IDR	135,000	ADA
71	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CCAEB0T7NPQ4PK9 P 777312342424	411121	IDR	180,000	ADA
72	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F68A85BB6UKIU0AR 839365321651	411121	IDR	135,000	ADA
73	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1A2C267OMP70U9TU 847987297802	411121	IDR	135,000	ADA
74	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	4A9F600Q7V667940 865627437336	411121	IDR	405,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
75	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	217B62M2NETEM3CE 869086427705	411121	IDR	135,000	ADA
76	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BA7800T7NPOJLKEE 897620382349	411121	IDR	15,000	ADA
77	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	353E667OMP6TMHIF 905389392034	411121	IDR	67,500	ADA
78	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	709DD5BB6UKCRII5 909290527341	411211	IDR	1,816,288	ADA
79	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EB5B02M2NETF3F49 951612426801	411121	IDR	135,000	ADA
80	026	560965	31-Mei-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6ABF43IG79FNLEHE 972511147044	411121	IDR	15,000	ADA
81					CCF0200Q7V6JSFBR 064785592212	411122		637,450	N/A
TOTAL								19,658,448	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 04-06-2024 03:26:56 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 04-06-2024

Periode : 2024-05

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 04-06-2024 03:26:56 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 04-06-2024

Periode : 2024-05

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 04-06-2024 03:26:56 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SEMARANG I

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 14-05-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	C6F8B2M2NCBN7450	411121	IDR	49,400	ADA
2	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	EC3997466H7LMF6H	411121	IDR	36,800	ADA
3	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	E3E4B5BB6S2THSMT	411121	IDR	34,000	ADA
4	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	BC97967OMMLA6266	411121	IDR	13,600	ADA
5	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	B31F31PL7HPCGDFN	411121	IDR	40,800	ADA
6	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	6D96C1PL7HPD5M52	411124	IDR	615,000	ADA
7	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	C2BA85BB6S2V8GL3	411124	IDR	12,041	ADA
8	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3084D5BB6S2RQ8CR	411121	IDR	317,400	ADA
9	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	68A4767OMML8EPKC	411121	IDR	307,800	ADA
10	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	4975F2M2NCBN12NG	411121	IDR	56,600	ADA
11	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	92BCF3IG76U3QJ3C	411121	IDR	36,800	ADA
12	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3E2F21PL7HPBGE1O	411121	IDR	34,000	ADA
13	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	84C3F7466H7M56S9	411121	IDR	34,000	ADA
14	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	D3A7F4ETN1GI4T2R	411124	IDR	8,688	ADA
15	026	560965	08-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	25D1B67OMMLBDAU7	411124	IDR	14,592	ADA
TOTAL								**1,611,521**	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Joko Tri Hartono, S.E
NIP 198302072006021001

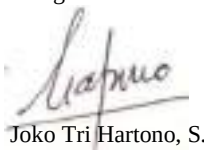
tanggal cetak : 14-05-24 15:30:11 oleh : 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 30-05-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	27-MAY-24	MANDIRI JAYA	927B35BB6U1TJG73	411122	IDR	43,243	ADA
2	026	560965	27-MAY-24	MANDIRI JAYA	001DF5BB6U1TQ42Q	411122	IDR	32,432	ADA
3	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	A488A00Q7UJ12PKC	411211	IDR	317,117	ADA
4	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	BBB9C1PL7JNQ5B59	411211	IDR	317,117	ADA
5	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	DD5B800Q7UJB1ISE	411121	IDR	90,000	ADA
6	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	6E73367OMOK5A3OI	411121	IDR	945,000	ADA
7	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	1DB664ETN3FCOF9H	411121	IDR	225,000	ADA
8	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	A9FE91PL7JOECB7E	411124	IDR	16,354	ADA
9	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3EB8400Q7UJLP7SB	411124	IDR	22,000	ADA
10	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	3AE192M2NEAR76IG	411124	IDR	66,000	ADA
11	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	167431PL7JOFQ909	411124	IDR	330,000	ADA
12	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	BCE091PL7JNQC5Q1	411211	IDR	237,838	ADA
13	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	7FBB567OMOK24RI3	411121	IDR	180,000	ADA
14	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	508937466J6HF9LB	411121	IDR	945,000	ADA
15	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	C89042M2NEAK5ISP	411121	IDR	225,000	ADA
16	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	AEB1E67OMOK62291	411121	IDR	300,000	ADA
17	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	266354ETN3FKPIRJ	411124	IDR	440,000	ADA
18	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	C95B80T7NP63KDC0	411124	IDR	40,000	ADA
19	026	560965	27-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	FA24D1PL7JOGAKAC	411124	IDR	416,000	ADA
20	026	560965	27-MAY-24	MANDIRI JAYA	F96C33IG78T4HDEO	411122	IDR	43,243	ADA
TOTAL								**5,231,344**	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN



Joko Tri Hartono, S.E
NIP 198302072006021001

tanggal cetak : 30-05-24 11:08:48 oleh : 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-06-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	08E305BB6UKD60IP	411211	IDR	3,505,975	ADA
2	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	CEF2067OMP6R9GMP	411121	IDR	15,000	ADA
3	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	FC8135BB6UKF5QIQ	411121	IDR	15,000	ADA
4	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	1711C1PL7KATNI56	411121	IDR	15,000	ADA
5	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	2751F2M2NETB2L2G	411121	IDR	15,000	ADA
6	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	6ABF43IG79FNLEHE	411121	IDR	15,000	ADA
7	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	7119300Q7V66LRRO	411121	IDR	135,000	ADA
8	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	353E667OMP6TMHIF	411121	IDR	67,500	ADA
9	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	BA7800T7NPOJLKEE	411121	IDR	15,000	ADA
10	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	7A6812M2NETCSRA8	411121	IDR	225,000	ADA
11	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	E2A315BB6UKIGEK0	411121	IDR	135,000	ADA
12	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	199DD3IG79FR9V1Q	411121	IDR	135,000	ADA
13	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	EB5B02M2NETF3F49	411121	IDR	135,000	ADA
14	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	EEB1D5BB6UKKVD42	411121	IDR	405,000	ADA
15	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	209A567OMP6R3H8O	411121	IDR	60,000	ADA
16	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	4F0787466JP7R28N	411121	IDR	15,000	ADA
17	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	726400T7NPOHHRJC	411121	IDR	180,000	ADA
18	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	9DF837466JP8UD44	411121	IDR	60,000	ADA
19	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	4A9F600Q7V667940	411121	IDR	405,000	ADA
20	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	D2E8067OMP6T9EKC	411121	IDR	405,000	ADA
21	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	68AEC1PL7KAVRD15	411121	IDR	20,000	ADA
22	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	29B953IG79FP3P1A	411121	IDR	225,000	ADA

tanggal cetak : 03-06-24 10:06:04 oleh : 026

23	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	4AA3A3IG79FPG9E5	411121	IDR	135,000	ADA
24	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	296000T7NPOKMJ86	411121	IDR	135,000	ADA
25	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	F68A85BB6UKIU0AR	411121	IDR	135,000	ADA
26	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	55D3D4ETN426LTHO	411121	IDR	135,000	ADA
27	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	5502667OMP6VMBIU	411121	IDR	135,000	ADA
28	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	709DD5BB6UKCRII5	411211	IDR	1,816,288	ADA
29	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	BD4E600Q7V6976DG	411121	IDR	135,000	ADA
30	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	217B62M2NETEM3CE	411121	IDR	135,000	ADA
31	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	1A2C267OMP70U9TU	411121	IDR	135,000	ADA
32	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	1E5362M2NETFH6GM	411121	IDR	135,000	ADA
33	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	E952C0T7NPON48H5	411121	IDR	135,000	ADA
34	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	EEBCD7466JPELGF1	411121	IDR	405,000	ADA
35	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	A489A0T7NPORG25F	411124	IDR	11,053	ADA
36	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	ACF414ETN42D9RMM	411124	IDR	3,083	ADA
37	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	5E70000Q7V6FFPCG	411124	IDR	9,000	ADA
38	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	9AB471PL7KBC09DN	411124	IDR	150,000	ADA
39	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	927EE4ETN42HNE1S	411124	IDR	325,000	ADA
40	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	34BEE5BB6UKJF09R	411121	IDR	135,000	ADA
41	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	FEA5300Q7V6AU58V	411121	IDR	135,000	ADA
42	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	E62073IG79FSP3TR	411121	IDR	405,000	ADA
43	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	99FCB00Q7V6FMSSL	411124	IDR	330,234	ADA
44	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	8FA717466JPMNBFF	411124	IDR	720,000	ADA
45	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	CCF0200Q7V6JSFBR	411124	IDR	637,450	ADA
46	026	560965	31-MAY-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN	CCAEB0T7NPQ4PK9P	411121	IDR	180,000	ADA
TOTAL								**12,815,583**	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN



Joko Tri Hartono, S.E
NIP 198212102004121001

Report Satker

Tanggal :2024-05-01 - 2024-05-31

Kementerian :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023)

Eselon :SEKRETARIAT JENDERAL (01)

Satker :LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Rekening Induk :RKK SETJEN KEMENDIKBUD OPS (1220010692575)

Rekening Satker :BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG (8100127230141000)

Total Mutasi

Debit : 642,470,853.00

Kredit : 605,095,584.00

Saldo Akhir : 188,549,913.00

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
01-05-2024	15:27:38	MCM InhouseTrf VA | 202405011426937453 | KE 9910000133349	225,925,182.00	10,118,800.00	0.00	215,806,382.00	MCM	
01-05-2024	15:27:39	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405011426937453 | KE 9910000133349	215,806,382.00	5,800.00	0.00	215,800,582.00	MCM	
02-05-2024	09:08:35	MCM Outw SKN (VA) | ST 225 Hotel ST 225 Hotel | KE 7340777748	215,800,582.00	950,000.00	0.00	214,850,582.00	MCM	
02-05-2024	09:08:35	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee ST 225 Hotel | KE 7340777748	214,850,582.00	2,900.00	0.00	214,847,682.00	MCM	
02-05-2024	09:08:38	MCM Outw SKN (VA) | ST 226 HOTEL 202405020856607732 | KE 7340777748	214,847,682.00	950,000.00	0.00	213,897,682.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
02-05-2024	09:08:38	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202405020856607732 | KE 7340777748	213,897,682.00	2,900.00	0.00	213,894,782.00	MCM	
03-05-2024	08:24:20	MCM InhouseTrf VA | 202405030816998295 | KE 9910000133349	213,894,782.00	544,000.00	0.00	213,350,782.00	MCM	
03-05-2024	08:24:21	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405030816998295 | KE 9910000133349	213,350,782.00	2,900.00	0.00	213,347,882.00	MCM	
03-05-2024	08:24:21	MCM UBP Payment VA | UBP60212399902FFFFFF422 163295000 | KE	213,347,882.00	2,226,661.00	0.00	211,121,221.00	MCM	
06-05-2024	07:22:10	MCM InhouseTrf VA | 202405060514895252 | KE 9910000133349	211,121,221.00	6,372,518.00	0.00	204,748,703.00	MCM	
06-05-2024	07:22:11	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405060514895252 | KE 9910000133349	204,748,703.00	2,900.00	0.00	204,745,803.00	MCM	
06-05-2024	09:28:31	MCM InhouseTrf VA | 202405060905502355 | KE 9910000133349	204,745,803.00	394,011.00	0.00	204,351,792.00	MCM	
06-05-2024	09:28:33	MCM Outw SKN (VA) | ST 230 Hotel 202405060908506715 | KE 2860311855	204,351,792.00	730,000.00	0.00	203,621,792.00	MCM	
06-05-2024	09:28:33	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202405060908506715 | KE 2860311855	203,621,792.00	2,900.00	0.00	203,618,892.00	MCM	
06-05-2024	09:28:33	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 012307734 | KE	203,618,892.00	4,704,300.00	0.00	198,914,592.00	MCM	
06-05-2024	09:28:33	MCM UBP Payment VA | 202405060851984338 /9910000006891 | KE	198,914,592.00	3,500.00	0.00	198,911,092.00	MCM	
06-05-2024	09:28:33	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422111050 | KE	198,911,092.00	1,071,150.00	0.00	197,839,942.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
06-05-2024	09:28:33	MCM UBP Payment VA | 202405060901998743 /9910000002106 | KE	197,839,942.00	2,500.00	0.00	197,837,442.00	MCM	
06-05-2024	09:28:34	MCM UBP Payment VA | UBP60214003502FFFFFF143 422110530 | KE	197,837,442.00	982,350.00	0.00	196,855,092.00	MCM	
06-05-2024	09:28:34	MCM UBP Payment VA | 202405060901994589 /9910000002106 | KE	196,855,092.00	2,500.00	0.00	196,852,592.00	MCM	
06-05-2024	09:28:34	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 013280785 | KE	196,852,592.00	858,263.00	0.00	195,994,329.00	MCM	
06-05-2024	09:28:34	MCM UBP Payment VA | 202405060850983682 /9910000006891 | KE	195,994,329.00	3,500.00	0.00	195,990,829.00	MCM	
06-05-2024	09:28:34	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 013044430 | KE	195,990,829.00	396,000.00	0.00	195,594,829.00	MCM	
06-05-2024	09:28:34	MCM UBP Payment VA | UBP60213030502FFFFFF523 011392634 | KE	195,594,829.00	14,397,201.00	0.00	181,197,628.00	MCM	
06-05-2024	09:28:34	MCM UBP Payment VA | 202405060849982663 /9910000006891 | KE	181,197,628.00	3,500.00	0.00	181,194,128.00	MCM	
06-05-2024	09:28:34	MCM UBP Payment VA | 202405060852985069 /9910000006891 | KE	181,194,128.00	3,500.00	0.00	181,190,628.00	MCM	
07-05-2024	07:32:28	MCM InhouseTrf VA | 202405061548652426 | KE 9910000133349	181,190,628.00	50,359,000.00	0.00	130,831,628.00	MCM	
07-05-2024	07:32:29	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405061548652426 | KE 9910000133349	130,831,628.00	8,700.00	0.00	130,822,928.00	MCM	
07-05-2024	08:54:29	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302003394000001 | Pembayaran belanja pegawai-gaji terusan	130,822,928.00	0.00	8,017,700.00	138,840,628.00	SPAN	
07-05-2024	14:52:33	MCM Outw SKN (VA) | ST 239 Hotel 202405071449985037 | KE 3920338088	138,840,628.00	1,100,000.00	0.00	137,740,628.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
07-05-2024	14:52:33	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202405071449985037 | KE 3920338088	137,740,628.00	2,900.00	0.00	137,737,728.00	MCM	
08-05-2024	08:06:33	MCM InhouseTrf VA | 202405080744863342 | KE 9910000133349	137,737,728.00	12,617,000.00	0.00	125,120,728.00	MCM	
08-05-2024	08:06:34	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405080744863342 | KE 9910000133349	125,120,728.00	11,600.00	0.00	125,109,128.00	MCM	
08-05-2024	13:09:43	MCM InhouseTrf VA | Gaji terusan ke 4 Me 202405081308868494 | KE 1360030348640	125,109,128.00	8,017,700.00	0.00	117,091,428.00	MCM	
08-05-2024	14:15:56	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202405081414975959 | KE 9910000133315	117,091,428.00	1,611,521.00	0.00	115,479,907.00	MCM	
08-05-2024	16:42:42	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302003521000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	115,479,907.00	0.00	90,812,911.00	206,292,818.00	SPAN	
08-05-2024	16:42:50	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302003522000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	206,292,818.00	0.00	71,004,000.00	277,296,818.00	SPAN	
08-05-2024	16:44:55	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302003520000001 | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	277,296,818.00	0.00	42,617,364.00	319,914,182.00	SPAN	
13-05-2024	07:23:11	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084580 | KE	319,914,182.00	3,980,000.00	0.00	315,934,182.00	MCM	
13-05-2024	07:23:11	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084549 | KE	315,934,182.00	3,083,647.00	0.00	312,850,535.00	MCM	
13-05-2024	07:23:11	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084556 | KE	312,850,535.00	1,387,197.00	0.00	311,463,338.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
13-05-2024	07:23:11	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084564 | KE	311,463,338.00	5,723,600.00	0.00	305,739,738.00	MCM	
13-05-2024	07:23:11	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300085108 | KE	305,739,738.00	2,790,676.00	0.00	302,949,062.00	MCM	
13-05-2024	07:23:11	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084606 | KE	302,949,062.00	4,435,200.00	0.00	298,513,862.00	MCM	
13-05-2024	07:23:11	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF603 2987100007480 | KE	298,513,862.00	2,823,000.00	0.00	295,690,862.00	MCM	
13-05-2024	07:23:11	MCM InhouseTrf VA | 202405130517948761 | KE 9910000133349	295,690,862.00	39,256,370.00	0.00	256,434,492.00	MCM	
13-05-2024	07:23:12	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF489 5940300048201 | KE	256,434,492.00	18,357,411.00	0.00	238,077,081.00	MCM	
13-05-2024	07:23:12	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405130517948761 | KE 9910000133349	238,077,081.00	14,500.00	0.00	238,062,581.00	MCM	
13-05-2024	07:23:12	MCM UBP Payment VA 2L | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084598 | KE	238,062,581.00	10,000.00	0.00	238,052,581.00	MCM	
13-05-2024	11:10:02	MCM InhouseTrf VA | 202405131106702344 | KE 9910000133349	238,052,581.00	8,422,410.00	0.00	229,630,171.00	MCM	
15-05-2024	08:37:23	MCM InhouseTrf VA | 202405150834537087 | KE 9910000133349	229,630,171.00	4,715,500.00	0.00	224,914,671.00	MCM	
15-05-2024	08:37:24	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405150834537087 | KE 9910000133349	224,914,671.00	5,800.00	0.00	224,908,871.00	MCM	
16-05-2024	07:16:54	MCM InhouseTrf VA | 202405160715805704 | KE 9910000133349	224,908,871.00	14,091,500.00	0.00	210,817,371.00	MCM	
16-05-2024	15:03:09	MCM InhouseTrf VA | 202405161101511151 | KE 9910000133349	210,817,371.00	2,619,600.00	0.00	208,197,771.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
16-05-2024	15:03:11	MCM Outw SKN (VA) | ST 259 Hotel 202405161457771702 | KE 1223802501	208,197,771.00	1,150,000.00	0.00	207,047,771.00	MCM	
16-05-2024	15:03:11	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202405161457771702 | KE 1223802501	207,047,771.00	2,900.00	0.00	207,044,871.00	MCM	
16-05-2024	15:03:12	MCM InhouseTrf VA | Tiket Pesawat 202405161453766895 | KE 1360018231529	207,044,871.00	4,480,400.00	0.00	202,564,471.00	MCM	
16-05-2024	15:03:15	MCM Outw SKN (VA) | Hotel Itjen 202405161455769153 | KE 7961559999	202,564,471.00	2,400,000.00	0.00	200,164,471.00	MCM	
16-05-2024	15:03:15	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202405161455769153 | KE 7961559999	200,164,471.00	2,900.00	0.00	200,161,571.00	MCM	
18-05-2024	21:55:22	MCM InhouseTrf VA | Tiket Pesawat 202405181059838897 | KE 1360030349556	200,161,571.00	2,362,738.00	0.00	197,798,833.00	MCM	
19-05-2024	17:39:03	MCM InhouseTrf VA | 202405191508534334 | KE 1360030349556	197,798,833.00	1,176,401.00	0.00	196,622,432.00	MCM	
19-05-2024	17:39:06	MCM InhouseTrf VA | 202405191510533916 | KE 1360030349556	196,622,432.00	1,112,309.00	0.00	195,510,123.00	MCM	
20-05-2024	07:21:39	MCM InhouseTrf VA | 202405200635582924 | KE 9910000133349	195,510,123.00	8,044,132.00	0.00	187,465,991.00	MCM	
20-05-2024	13:36:23	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405201243500220 | KE 9910000133349	187,465,991.00	20,300.00	0.00	187,445,691.00	MCM	
20-05-2024	13:36:23	MCM InhouseTrf VA | 202405201243500220 | KE 9910000133349	187,445,691.00	48,419,000.00	0.00	139,026,691.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
22-05-2024	08:23:23	MCM Outw SKN (VA) | Perjadin 202405220821572814 | KE 0196195776	139,026,691.00	990,000.00	0.00	138,036,691.00	MCM	
22-05-2024	08:23:23	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202405220821572814 | KE 0196195776	138,036,691.00	2,900.00	0.00	138,033,791.00	MCM	
22-05-2024	09:34:00	MCM InhouseTrf VA | 202405220932683302 | KE 9910000133349	138,033,791.00	11,043,259.00	0.00	126,990,532.00	MCM	
22-05-2024	09:34:01	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405220932683302 | KE 9910000133349	126,990,532.00	14,500.00	0.00	126,976,032.00	MCM	
27-05-2024	08:42:44	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405270441752289 | KE 9910000133349	126,976,032.00	11,600.00	0.00	126,964,432.00	MCM	
27-05-2024	08:42:44	MCM InhouseTrf VA | 202405270441752289 | KE 9910000133349	126,964,432.00	19,001,877.00	0.00	107,962,555.00	MCM	
27-05-2024	13:30:02	MCM InhouseTrf VA | UBP Summary 202405271318765060 | KE 9910000133315	107,962,555.00	5,231,344.00	0.00	102,731,211.00	MCM	
28-05-2024	08:52:47	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405280849873405 | KE 9910000133349	102,731,211.00	29,000.00	0.00	102,702,211.00	MCM	
28-05-2024	08:52:47	MCM InhouseTrf VA | 202405280849873405 | KE 9910000133349	102,702,211.00	40,470,478.00	0.00	62,231,733.00	MCM	
28-05-2024	09:05:03	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302004223000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	62,231,733.00	0.00	88,078,701.00	150,310,434.00	SPAN	
28-05-2024	09:05:58	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302004222000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	150,310,434.00	0.00	68,691,414.00	219,001,848.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
28-05-2024	14:27:55	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405281423872716 | KE 9910000133349	219,001,848.00	55,100.00	0.00	218,946,748.00	MCM	
28-05-2024	14:27:55	MCM InhouseTrf VA | 202405281423872716 | KE 9910000133349	218,946,748.00	152,109,050.00	0.00	66,837,698.00	MCM	
29-05-2024	07:18:00	MCM InhouseTrf VA | ST 283 Tiket 202405290712769266 | KE 1360030349796	66,837,698.00	14,846,538.00	0.00	51,991,160.00	MCM	
29-05-2024	07:18:03	MCM InhouseTrf VA | ST 283 Hotel 202405290713768361 | KE 1110020594434	51,991,160.00	4,800,000.00	0.00	47,191,160.00	MCM	
29-05-2024	08:49:21	MCM Outw SKN (VA) | ST 288 Hotel - Utomo202405290843818201 | KE 1260635677	47,191,160.00	1,600,000.00	0.00	45,591,160.00	MCM	
29-05-2024	08:49:21	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202405290843818201 | KE 1260635677	45,591,160.00	2,900.00	0.00	45,588,260.00	MCM	
29-05-2024	08:49:25	MCM Outw SKN (VA) | ST 286 Hotel - Adhri202405290844817976 | KE 1260635677	45,588,260.00	1,600,000.00	0.00	43,988,260.00	MCM	
29-05-2024	08:49:25	MCM Outw SKN (VA) | Clearing Fee 202405290844817976 | KE 1260635677	43,988,260.00	2,900.00	0.00	43,985,360.00	MCM	
29-05-2024	09:17:59	MCM InhouseTrf VA | 202405290916860329 | KE 9910000133349	43,985,360.00	10,935,000.00	0.00	33,050,360.00	MCM	
29-05-2024	10:40:02	MCM InhouseTrf VA | Pembinaan Kepeg 202405291038990130 | KE 1360030349564	33,050,360.00	340,000.00	0.00	32,710,360.00	MCM	
30-05-2024	09:04:37	MCM InhouseTrf VA | ST 283 Tiket 202405300901726654 | KE 1360030349796	32,710,360.00	12,766,456.00	0.00	19,943,904.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
30-05-2024	13:28:08	MCM InhouseTrf VA | 202405301326675770 | KE 9910000133349	19,943,904.00	6,113,630.00	0.00	13,830,274.00	MCM	
30-05-2024	13:28:09	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405301326675770 | KE 9910000133349	13,830,274.00	8,700.00	0.00	13,821,574.00	MCM	
30-05-2024	13:53:52	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302004325000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	13,821,574.00	0.00	31,000,913.00	44,822,487.00	SPAN	
30-05-2024	13:56:44	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302004326000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl	44,822,487.00	0.00	198,749,124.00	243,571,611.00	SPAN	
31-05-2024	07:22:01	MCM InhouseTrf VA | Transaction Fee 202405310425789896 | KE 9910000133349	243,571,611.00	17,400.00	0.00	243,554,211.00	MCM	
31-05-2024	07:22:01	MCM InhouseTrf VA | 202405310425789896 | KE 9910000133349	243,554,211.00	42,132,547.00	0.00	201,421,664.00	MCM	
31-05-2024	10:45:17	MCM InhouseTrf VA | 202405311014603462 | KE 9910000133349	201,421,664.00	6,179,625.00	0.00	195,242,039.00	MCM	
31-05-2024	10:45:22	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861312789082 | KE	195,242,039.00	15,000.00	0.00	195,227,039.00	MCM	
31-05-2024	10:45:23	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861312484057 | KE	195,227,039.00	15,000.00	0.00	195,212,039.00	MCM	
31-05-2024	10:45:24	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861366948153 | KE	195,212,039.00	180,000.00	0.00	195,032,039.00	MCM	
31-05-2024	10:45:25	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861312633111 | KE	195,032,039.00	15,000.00	0.00	195,017,039.00	MCM	
31-05-2024	10:45:27	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861312977062 | KE	195,017,039.00	15,000.00	0.00	195,002,039.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
31-05-2024	10:45:28	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861324060048 | KE	195,002,039.00	9,000.00	0.00	194,993,039.00	MCM	
31-05-2024	10:45:29	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861312288024 | KE	194,993,039.00	60,000.00	0.00	194,933,039.00	MCM	
31-05-2024	10:45:30	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861313216108 | KE	194,933,039.00	180,000.00	0.00	194,753,039.00	MCM	
31-05-2024	10:45:31	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861323833046 | KE	194,753,039.00	3,083.00	0.00	194,749,956.00	MCM	
31-05-2024	10:45:32	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861323643055 | KE	194,749,956.00	11,053.00	0.00	194,738,903.00	MCM	
31-05-2024	10:45:33	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861313963088 | KE	194,738,903.00	15,000.00	0.00	194,723,903.00	MCM	
31-05-2024	10:45:34	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861315008079 | KE	194,723,903.00	67,500.00	0.00	194,656,403.00	MCM	
31-05-2024	10:45:36	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861314344064 | KE	194,656,403.00	405,000.00	0.00	194,251,403.00	MCM	
31-05-2024	10:45:37	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861314822008 | KE	194,251,403.00	135,000.00	0.00	194,116,403.00	MCM	
31-05-2024	10:45:38	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861315200037 | KE	194,116,403.00	20,000.00	0.00	194,096,403.00	MCM	
31-05-2024	10:45:39	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861313791108 | KE	194,096,403.00	60,000.00	0.00	194,036,403.00	MCM	
31-05-2024	10:45:41	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861310356037 | KE	194,036,403.00	1,816,288.00	0.00	192,220,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:42	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861314579084 | KE	192,220,115.00	405,000.00	0.00	191,815,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:43	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861327943095 | KE	191,815,115.00	150,000.00	0.00	191,665,115.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
31-05-2024	10:45:44	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861314153006 | KE	191,665,115.00	15,000.00	0.00	191,650,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:46	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861316888120 | KE	191,650,115.00	135,000.00	0.00	191,515,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:47	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861316283008 | KE	191,515,115.00	135,000.00	0.00	191,380,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:48	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861316081093 | KE	191,380,115.00	135,000.00	0.00	191,245,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:49	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861315437006 | KE	191,245,115.00	15,000.00	0.00	191,230,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:50	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861315870024 | KE	191,230,115.00	225,000.00	0.00	191,005,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:51	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861316727131 | KE	191,005,115.00	135,000.00	0.00	190,870,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:52	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861328240111 | KE	190,870,115.00	720,000.00	0.00	190,150,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:54	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861315671082 | KE	190,150,115.00	225,000.00	0.00	189,925,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:55	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861316517126 | KE	189,925,115.00	135,000.00	0.00	189,790,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:56	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861317099102 | KE	189,790,115.00	135,000.00	0.00	189,655,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:57	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861317971002 | KE	189,655,115.00	135,000.00	0.00	189,520,115.00	MCM	
31-05-2024	10:45:59	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861317487024 | KE	189,520,115.00	135,000.00	0.00	189,385,115.00	MCM	
31-05-2024	10:46:00	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861319288095 | KE	189,385,115.00	135,000.00	0.00	189,250,115.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
31-05-2024	10:46:01	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861319062053 | KE	189,250,115.00	135,000.00	0.00	189,115,115.00	MCM	
31-05-2024	10:46:02	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861318184073 | KE	189,115,115.00	135,000.00	0.00	188,980,115.00	MCM	
31-05-2024	10:46:03	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861318408126 | KE	188,980,115.00	135,000.00	0.00	188,845,115.00	MCM	
31-05-2024	10:46:04	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861317284155 | KE	188,845,115.00	135,000.00	0.00	188,710,115.00	MCM	
31-05-2024	10:46:05	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861318870146 | KE	188,710,115.00	405,000.00	0.00	188,305,115.00	MCM	
31-05-2024	10:46:06	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861317746062 | KE	188,305,115.00	135,000.00	0.00	188,170,115.00	MCM	
31-05-2024	10:46:07	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861318634006 | KE	188,170,115.00	135,000.00	0.00	188,035,115.00	MCM	
31-05-2024	10:46:08	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861324293013 | KE	188,035,115.00	330,234.00	0.00	187,704,881.00	MCM	
31-05-2024	10:46:09	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861328472124 | KE	187,704,881.00	325,000.00	0.00	187,379,881.00	MCM	
31-05-2024	10:46:10	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861319516091 | KE	187,379,881.00	405,000.00	0.00	186,974,881.00	MCM	
31-05-2024	10:46:11	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861319791073 | KE	186,974,881.00	405,000.00	0.00	186,569,881.00	MCM	
31-05-2024	10:46:13	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861310698073 | KE	186,569,881.00	3,505,975.00	0.00	183,063,906.00	MCM	
31-05-2024	10:46:13	MCM UBP Payment VA | UBP60215001202FFFFFF028861328670075 | KE	183,063,906.00	637,450.00	0.00	182,426,456.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
31-05-2024	15:27:41	New Mandiri Online Trf VA | refund tiket tamu HKTL | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	182,426,456.00	0.00	1,798,953.00	184,225,409.00	OTHERS	
31-05-2024	15:29:08	New Mandiri Online Trf VA | refund tiket tamu HKTL | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	184,225,409.00	0.00	887,554.00	185,112,963.00	OTHERS	
31-05-2024	15:37:03	New Mandiri Online Trf VA | Refund Hotel Quest Prime | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	185,112,963.00	0.00	1,200,000.00	186,312,963.00	OTHERS	
31-05-2024	17:27:17	New Mandiri Online Trf VA | | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	186,312,963.00	0.00	2,236,950.00	188,549,913.00	OTHERS	

Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang
Jawa Tengah
Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Tuesday 30 April
Reference 1714460505656

Laporan Saldo Rekening

Kota Semarang
RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG

Total Saldo : Rp. 0

No	CIF	Rekening	Nama Rekening	Cabang	Saldo
1	03734254	1053003521	RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG	CAPEM SAMPANGAN	0

Transaction History

Company : LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG

Account : 0057101300000280 - RPL 026 KS LLDIKTI W

Account Organization Unit : KCP SAMPANGAN

Period : 01-May-2024 - 31-May-2024

Starting Balance : IDR 1,111,800,900.00

Ending Balance : IDR 1,660,239,000.00

Total Transaction Debit : 33

Total Transaction Credit : 1

Page : 1 of 1

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
1	06/05	13:41:58	06/05	13:41:58	DANA PPKM TAHAP 1 2024 240506730048	67,637,500.00	0.00	1,044,163,400.00	24050696029990015907
2	06/05	13:42:06	06/05	13:42:06	PPKM THP 1LPPM STIFAR 20240506185822133 2	70,607,600.00	0.00	973,555,800.00	24050696079990015915
3	06/05	13:42:06	06/05	13:42:06	PPKM THP 1Akademi Teknik Elektro Medik 20240506417236756	38,648,400.00	0.00	934,907,400.00	24050696039990015906
4	06/05	13:42:06	06/05	13:42:06	PPKM THP 1Akademi Farmasi Kusuma Husada 20240506185822133 4	14,000,000.00	0.00	920,907,400.00	24050696069990015919
5	06/05	13:42:06	06/05	13:42:06	PPKM THP 1LPPM UNIVERSITAS STEKOM SMG 20240506324532070	13,724,200.00	0.00	907,183,200.00	24050696029990015908
6	06/05	13:42:06	06/05	13:42:06	PPKM THP 1Politeknik Purbaya 20240506185822133 0	12,113,500.00	0.00	895,069,700.00	24050696059990015921
7	06/05	13:42:06	06/05	13:42:06	PPKM THP 1STIKOM YOS SUDARSO PURWOKERTO 20240506253992538	10,747,800.00	0.00	884,321,900.00	24050696049990015907
8	06/05	13:42:07	06/05	13:42:07	PPKM THP 1Universitas Aisyiyah Surakarta 20240506417236778	95,943,400.00	0.00	788,378,500.00	24050696059990015922
9	06/05	13:42:07	06/05	13:42:07	PPKM THP 1Universitas Muhammadiyah Magel 20240506417236758	49,620,200.00	0.00	738,758,300.00	24050696019990015913
10	06/05	13:42:07	06/05	13:42:07	PPKM THP 1LPPM UNIVERSITAS DUTA BANGSA 202405061694977116	36,103,200.00	0.00	702,655,100.00	24050696069990015920
11	06/05	13:42:07	06/05	13:42:07	PPKM THP 1Politeknik Pratama Mulia 202405061694977120	25,260,900.00	0.00	677,394,200.00	24050696029990015909
12	06/05	13:42:07	06/05	13:42:07	PPKM THP 1LPPM STMIK BINA PATRIA 20240506487776245	24,857,000.00	0.00	652,537,200.00	24050696039990015907
13	06/05	13:42:07	06/05	13:42:07	PPKM THP 1LPPM AAK 17 AGUSTUS 1945 SEMAR 20240506417236760	13,972,000.00	0.00	638,565,200.00	24050696049990015908
14	06/05	13:42:07	06/05	13:42:07	PPKM THP 1LPPM UMPP 202405061694977118	12,754,000.00	0.00	625,811,200.00	24050696019990015914
15	06/05	13:42:07	06/05	13:42:07	PPKM THP 1UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN 202405061694977114	9,695,700.00	0.00	616,115,500.00	24050696079990015916
16	06/05	13:42:08	06/05	13:42:08	PPKM THP 1PPPM STT Warga 20240506487776243	26,201,700.00	0.00	589,913,800.00	24050696039990015908
17	06/05	13:42:08	06/05	13:42:08	PPKM THP 1STIKES Mitra Husada Karanganya 20240506487776263	13,881,700.00	0.00	576,032,100.00	24050696029990015910
18	06/05	13:42:08	06/05	13:42:08	PPKM THP 1Yayasan Tunas Muria Mijen 20240506487776241	10,780,000.00	0.00	565,252,100.00	24050696059990015923
19	06/05	13:42:09	06/05	13:42:09	PPKM THP 1Politeknik Harapan Bersama 202405061624437635	209,331,500.00	0.00	355,920,600.00	24050696039990015909
20	06/05	13:42:09	06/05	13:42:09	PPKM THP 1UPPM POLITEKNIK INDONUSA 202405061624437631	51,440,200.00	0.00	304,480,400.00	24050696059990015924
21	06/05	13:42:09	06/05	13:42:09	PPKM THP 1Setia Budi Universitas 20240506487776261	25,508,000.00	0.00	278,972,400.00	24050696049990015909
22	06/05	13:42:09	06/05	13:42:09	PPKM THP 1LPPM Universitas Pekalongan 202405061624437676	13,745,200.00	0.00	265,227,200.00	24050696049990015910
23	06/05	13:42:09	06/05	13:42:09	PPKM THP 1LPPM ITS PKU MUHAMMADIYAH SURA 202405061624437633	12,838,000.00	0.00	252,389,200.00	24050696069990015921
24	06/05	13:42:10	06/05	13:42:10	PPKM THP 1LP3M UNSIQ 202405061787681105	53,957,400.00	0.00	198,431,800.00	24050696069990015922
25	06/05	13:42:10	06/05	13:42:10	PPKM THP 1LPPM STIKES NASIONAL 20240506829109061	49,207,200.00	0.00	149,224,600.00	24050696079990015917
26	06/05	13:42:10	06/05	13:42:10	PPKM THP 1LPPM UNIVERSITAS BHAMADA 20240506417236801	12,880,000.00	0.00	136,344,600.00	24050696029990015911
27	06/05	13:42:10	06/05	13:42:10	PPKM THP 1ITS NU Pekalongan 202405061787681107	12,125,400.00	0.00	124,219,200.00	24050696059990015925
28	06/05	13:42:10	06/05	13:42:10	PPKM THP 1Universitas Widya Husada Semar 202405061787681101	9,740,500.00	0.00	114,478,700.00	24050696079990015918
29	06/05	13:42:11	06/05	13:42:11	PPKM THP 1Universitas Pignatelli Triputr 20240506324532023	39,775,400.00	0.00	74,703,300.00	24050696029990015912
30	06/05	13:42:11	06/05	13:42:11	PPKM THP 1Politeknik Manufaktur Ceper 202405061787681103	26,943,000.00	0.00	47,760,300.00	24050696019990015915
31	06/05	13:42:11	06/05	13:42:11	PPKM THP 1Politeknik Bhakti Semesta 20240506324532027	22,500,100.00	0.00	25,260,200.00	24050696059990015926
32	06/05	13:42:11	06/05	13:42:11	PPKM THP 1STIKES PANTI KOSALA 20240506324532025	13,538,000.00	0.00	11,722,200.00	24050696049990015911
33	06/05	13:42:11	06/05	13:42:11	PPKM THP 1STIE AMA - LP2M 20240506324532068	11,722,200.00	0.00	0.00	24050696039990015910
34	20/05	12:24:42	20/05	12:24:42	000604/RT/BELMAWA	0.00	1,660,239,000.00	1,660,239,000.00	24052000169520000138
				Total		**1,111,800,900.00**	**1,660,239,000.00**		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga	: (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Tgl, No. SP	: 28 November 2023 , DIPA-023.01.2.723014/2024
Unit Organisasi	: (01) SEKRETARIAT JENDERAL	Tahun	: 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG	KPPN	: (026) Semarang I
Satuan Kerja	: (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 71.846.307,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00508/BP/723014/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	1.848.788.913,00	664.676.356,00	2.441.618.962,00	71.846.307,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	1.848.788.913,00	664.676.356,00	2.441.618.962,00	71.846.307,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	1.848.788.913,00	664.676.356,00	2.441.618.962,00	71.846.307,00
	1. BP UP*)	185.761.971,00	632.043.684,00	754.911.886,00	62.893.769,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	8.137.700,00	8.137.700,00	0,00
	4. BP Pajak	2.787.942,00	24.494.972,00	18.330.376,00	8.952.538,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	1.660.239.000,00	0,00	1.660.239.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 237.106.231,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	71.846.307,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	71.846.307,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	71.846.307,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	71.846.307,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1.	Saldo UP	Rp.	62.893.769,00
2.	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	237.106.231,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4.	Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5.	Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1.	Saldo TUP	Rp.	0,00
2.	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3.	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4.	Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5.	Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1.	Saldo Lainnya	Rp.	8.952.538,00
2.	Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	8.952.538,00
3.	Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

KOTA SEMARANG, Juni 2024
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yudianti
NIP 198311132010122002

Dicetak pada tanggal,01 Juli 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100127230141000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 71.846.307 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00508/BP/723014/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	71.846.307
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	71.846.307

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	62.893.769
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	8.952.538
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	71.846.307

C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	71.846.307
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	71.846.307

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a.	Saldo UP	Rp.	62.893.769
	b.	Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	237.106.231
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	300.000.000
2	a.	Saldo TUP	Rp.	0
	b.	Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c.	Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3		Saldo Lainnya	Rp.	8.952.538
4		Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	308.952.538

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	300.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	8.952.538
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	308.952.538

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Nofalina Yodianti
NIP 198311132010122002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BHIMO WIDYO ANDOKO
NIP 196808051994031001

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 723014

BULAN : JUNI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8100127230141000	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG	MANDIRI	20	S-3895/WPB.12/KP.03/2021	23-12-2021	2024-06-30	71,846,307.00
2	0057101300000280	RPL 026 KS LLDIKTI W	Semarang	30	S-614/KPN.1401/2023	02-08-2023	-	0.00
3	1053003521	RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B	Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang	30	S-7/KPN.1401/2023	05-01-2023	10-06-2024	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 8100127230141000

Nama Rekening : BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG

Nama Bank : MANDIRI

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			188.549.913,00
01-06-2024	00432/BP/723014/2024	Pungut Pajak	56.600,00	0,00	188.606.513,00
01-06-2024	01818/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Mei 2024	0,00	2.116.000,00	186.490.513,00
01-06-2024	01819/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Mei 2024	0,00	2.052.000,00	184.438.513,00
01-06-2024	01820/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Mei 2024	0,00	1.132.000,00	183.306.513,00
01-06-2024	01821/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Mei 2024	0,00	988.000,00	182.318.513,00
01-06-2024	01823/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Mei 2024	0,00	736.000,00	181.582.513,00
01-06-2024	01824/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Mei 2024	0,00	736.000,00	180.846.513,00
01-06-2024	01822/KW/723014/2024	Honor Pejabat Perbendaharaan Bulan Mei 2024	0,00	736.000,00	180.110.513,00
01-06-2024	01825/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Mei 2024	0,00	680.000,00	179.430.513,00
01-06-2024	01826/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan	0,00	680.000,00	178.750.513,00

1	2	3	4	5	6
		Mei 2024			
01-06-2024	01827/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Mei 2024	0,00	680.000,00	178.070.513,00
01-06-2024	01829/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Mei 2024	0,00	272.000,00	177.798.513,00
01-06-2024	01828/KW/723014/2024	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Mei 2024	0,00	272.000,00	177.526.513,00
03-06-2024	FPK-PENG-yeLID5DrKCw0xep	LS BENDAHARA	8.137.700,00	0,00	185.664.213,00
03-06-2024	00430/BP/723014/2024	Pungut pajak	945.000,00	0,00	186.609.213,00
03-06-2024	00450/BP/723014/2024	Pungut Pajak	420.000,00	0,00	187.029.213,00
03-06-2024	00423/BP/723014/2024	Pungut pajak	374.000,00	0,00	187.403.213,00
03-06-2024	00407/BP/723014/2024	Pungut Pajak	317.400,00	0,00	187.720.613,00
03-06-2024	00431/BP/723014/2024	Pungut pajak	315.000,00	0,00	188.035.613,00
03-06-2024	00408/BP/723014/2024	Pungut Pajak	307.800,00	0,00	188.343.413,00
03-06-2024	00422/BP/723014/2024	Pungut Pajak	180.000,00	0,00	188.523.413,00
03-06-2024	00421/BP/723014/2024	Pungut Pajak	180.000,00	0,00	188.703.413,00
03-06-2024	00424/BP/723014/2024	Pungut pajak	132.000,00	0,00	188.835.413,00
03-06-2024	00427/BP/723014/2024	Pungut pajak	60.000,00	0,00	188.895.413,00
03-06-2024	00409/BP/723014/2024	Pungut Pajak	49.400,00	0,00	188.944.813,00
03-06-2024	00416/BP/723014/2024	Pungut Pajak	40.800,00	0,00	188.985.613,00
03-06-2024	00411/BP/723014/2024	Pungut Pajak	36.800,00	0,00	189.022.413,00
03-06-2024	00410/BP/723014/2024	Pungut Pajak	36.800,00	0,00	189.059.213,00
03-06-2024	00413/BP/723014/2024	Pungut pajak	34.000,00	0,00	189.093.213,00
03-06-2024	00412/BP/723014/2024	Pungut pajak	34.000,00	0,00	189.127.213,00
03-06-2024	00414/BP/723014/2024	Pungut Pajak	34.000,00	0,00	189.161.213,00
03-06-2024	00417/BP/723014/2024	Pungut Pajak	22.500,00	0,00	189.183.713,00
03-06-2024	00418/BP/723014/2024	Pungut pajak	20.000,00	0,00	189.203.713,00
03-06-2024	00420/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	189.218.713,00

1	2	3	4	5	6
03-06-2024	00419/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	189.233.713,00
03-06-2024	00428/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	189.248.713,00
03-06-2024	00429/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	189.263.713,00
03-06-2024	00415/BP/723014/2024	Pungut Pajak	13.600,00	0,00	189.277.313,00
03-06-2024	00425/BP/723014/2024	Pungut Pajak	4.250,00	0,00	189.281.563,00
03-06-2024	01868/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullday dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	21.000.000,00	168.281.563,00
03-06-2024	01849/KW/723014/2024	Biaya paket meeting fullday Lokakarya Statuta PTS	0,00	18.700.000,00	149.581.563,00
03-06-2024	01885/KW/723014/2024	Honor Narasumber Workshop Dosen Sebagai Academic Leader LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	6.300.000,00	143.281.563,00
03-06-2024	01886/KW/723014/2024	Honor Narasumber Workshop Dosen Sebagai Academic Leader LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	6.300.000,00	136.981.563,00
03-06-2024	01848/KW/723014/2024	Honor Narasumber Lokakarya statuta PTS	0,00	3.600.000,00	133.381.563,00
03-06-2024	01847/KW/723014/2024	Honor Narasumber Lokakarya statuta PTS	0,00	3.600.000,00	129.781.563,00
03-06-2024	00421/SSP/723014/2024	PPN	0,00	2.206.720,00	127.574.843,00
03-06-2024	01864/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	1.706.000,00	125.868.843,00
03-06-2024	01869/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Semarang - Magelang (PP) dalam rangka Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.620.000,00	124.248.843,00
03-06-2024	00446/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	945.000,00	123.303.843,00
03-06-2024	01867/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	943.000,00	122.360.843,00
03-06-2024	01865/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	940.500,00	121.420.343,00
03-06-2024	01863/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	915.500,00	120.504.843,00

1	2	3	4	5	6
03-06-2024	01862/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	119.616.843,00
03-06-2024	01856/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	118.728.843,00
03-06-2024	01861/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	117.840.843,00
03-06-2024	01854/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	116.952.843,00
03-06-2024	01860/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	116.064.843,00
03-06-2024	01855/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	115.176.843,00
03-06-2024	01866/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	114.288.843,00
03-06-2024	01857/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	113.400.843,00
03-06-2024	01858/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	112.512.843,00
03-06-2024	01859/KW/723014/2024	Pameran dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024	0,00	888.000,00	111.624.843,00
03-06-2024	01872/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	110.989.843,00
03-06-2024	01873/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	110.354.843,00
03-06-2024	01878/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	109.719.843,00
03-06-2024	01875/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	109.084.843,00
03-06-2024	01870/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	108.449.843,00
03-06-2024	01874/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	107.814.843,00

1	2	3	4	5	6
03-06-2024	01871/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	107.179.843,00
03-06-2024	01880/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	106.544.843,00
03-06-2024	01877/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	635.000,00	105.909.843,00
03-06-2024	01876/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	602.344,00	105.307.499,00
03-06-2024	01890/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	104.747.499,00
03-06-2024	01896/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	104.187.499,00
03-06-2024	01891/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	103.627.499,00
03-06-2024	01888/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	103.067.499,00
03-06-2024	01895/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	102.507.499,00
03-06-2024	01892/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	101.947.499,00
03-06-2024	01889/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	101.387.499,00
03-06-2024	01887/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	100.827.499,00
03-06-2024	01894/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	560.000,00	100.267.499,00
03-06-2024	01831/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	525.000,00	99.742.499,00
03-06-2024	01841/KW/723014/2024	Honor Panitia Lokakarya statuta PTS	0,00	450.000,00	99.292.499,00
03-06-2024	00442/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	420.000,00	98.872.499,00
03-06-2024	00422/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	401.222,00	98.471.277,00

1	2	3	4	5	6
03-06-2024	01881/KW/723014/2024	Honor Panitia Workshop Dosen Sebagai Academic Leader LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	400.000,00	98.071.277,00
03-06-2024	01842/KW/723014/2024	Honor Panitia Lokakarya statuta PTS	0,00	400.000,00	97.671.277,00
03-06-2024	01832/KW/723014/2024	Launching Program Zheng He Academy	0,00	391.714,00	97.279.563,00
03-06-2024	01893/KW/723014/2024	Workshop Dosen Sebagai Academic Leader Lldikti Wilayah Vi Tahun 2024	0,00	390.000,00	96.889.563,00
03-06-2024	00440/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	374.000,00	96.515.563,00
03-06-2024	01839/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Dalam Rangka Menyemarakkan Bulan Merdeka Belajar	0,00	351.000,00	96.164.563,00
03-06-2024	01835/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Dalam Rangka Menyemarakkan Bulan Merdeka Belajar	0,00	345.500,00	95.819.063,00
03-06-2024	00423/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	317.400,00	95.501.663,00
03-06-2024	00447/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	315.000,00	95.186.663,00
03-06-2024	00424/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	307.800,00	94.878.863,00
03-06-2024	01884/KW/723014/2024	Honor Panitia Workshop Dosen Sebagai Academic Leader LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	94.578.863,00
03-06-2024	01844/KW/723014/2024	Honor Panitia Lokakarya statuta PTS	0,00	300.000,00	94.278.863,00
03-06-2024	01883/KW/723014/2024	Honor Panitia Workshop Dosen Sebagai Academic Leader LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	93.978.863,00
03-06-2024	01882/KW/723014/2024	Honor Panitia Workshop Dosen Sebagai Academic Leader LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	93.678.863,00
03-06-2024	01846/KW/723014/2024	Honor Panitia Lokakarya statuta PTS	0,00	300.000,00	93.378.863,00
03-06-2024	01845/KW/723014/2024	Honor Panitia Lokakarya statuta PTS	0,00	300.000,00	93.078.863,00
03-06-2024	01843/KW/723014/2024	Honor Panitia Lokakarya statuta PTS	0,00	300.000,00	92.778.863,00
03-06-2024	01838/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Dalam Rangka Menyemarakkan Bulan Merdeka	0,00	296.000,00	92.482.863,00

1	2	3	4	5	6
		Belajar			
03-06-2024	01833/KW/723014/2024	Launching Program Zheng He Academy	0,00	296.000,00	92.186.863,00
03-06-2024	01837/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Dalam Rangka Menyemarakkan Bulan Merdeka Belajar	0,00	296.000,00	91.890.863,00
03-06-2024	01830/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	296.000,00	91.594.863,00
03-06-2024	01836/KW/723014/2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Dalam Rangka Menyemarakkan Bulan Merdeka Belajar	0,00	296.000,00	91.298.863,00
03-06-2024	01852/KW/723014/2024	Biaya Pengiriman Surat Dinas bulan Mei 2024	0,00	187.500,00	91.111.363,00
03-06-2024	00420/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	90.931.363,00
03-06-2024	00439/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	90.751.363,00
03-06-2024	00438/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	180.000,00	90.571.363,00
03-06-2024	01834/KW/723014/2024	Pendampingan Proses Pembuatan Ijazah dan Transkrip Elektronik	0,00	170.000,00	90.401.363,00
03-06-2024	01851/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pembuatan MMT Harlah Pancasila 2024	0,00	106.250,00	90.295.113,00
03-06-2024	01853/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian MCB dan lain-lain	0,00	94.000,00	90.201.113,00
03-06-2024	00443/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	60.000,00	90.141.113,00
03-06-2024	00425/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	56.600,00	90.084.513,00
03-06-2024	00426/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	49.400,00	90.035.113,00
03-06-2024	00433/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	40.800,00	89.994.313,00
03-06-2024	00428/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	36.800,00	89.957.513,00
03-06-2024	00427/SSP/723014/202	PPH 21	0,00	36.800,00	89.920.713,00

1	2	3	4	5	6
	4				
03-06-2024	00429/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	34.000,00	89.886.713,00
03-06-2024	00430/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	89.852.713,00
03-06-2024	00431/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	34.000,00	89.818.713,00
03-06-2024	00434/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	22.500,00	89.796.213,00
03-06-2024	00435/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	20.000,00	89.776.213,00
03-06-2024	00437/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	89.761.213,00
03-06-2024	00444/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	89.746.213,00
03-06-2024	00445/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	89.731.213,00
03-06-2024	00436/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	89.716.213,00
03-06-2024	00432/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	13.600,00	89.702.613,00
03-06-2024	00441/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	4.250,00	89.698.363,00
05-06-2024	FPK-PENG-hDIXhiBsJMAJQpC	SPM GUP	115.139.540,00	0,00	204.837.903,00
05-06-2024	FPK-PENG-InRhbNtDpWV3Gi8	SPM GUP	103.431.797,00	0,00	308.269.700,00
05-06-2024	01901/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pekerjaan Pemeliharaan Interior Ruang Bermain Anak	0,00	24.950.000,00	283.319.700,00
05-06-2024	00007/KWTI/723014/2024	SPM LS BP	0,00	8.137.700,00	275.182.000,00
05-06-2024	01898/KW/723014/2024	Paket Fullday Kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai	0,00	6.600.000,00	268.582.000,00
05-06-2024	01919/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	265.882.000,00

1	2	3	4	5	6
05-06-2024	01913/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	263.182.000,00
05-06-2024	01917/KW/723014/2024	Honor Narasumber Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Dosen PNS Dpk LLDIKTI Wilayah VI	0,00	2.700.000,00	260.482.000,00
05-06-2024	01918/KW/723014/2024	Honor Narasumber Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Dosen PNS Dpk LLDIKTI Wilayah VI	0,00	2.700.000,00	257.782.000,00
05-06-2024	01916/KW/723014/2024	BPJS Ketenagakerjaan PPNPN bulan Mei 2024	0,00	2.226.661,00	255.555.339,00
05-06-2024	01905/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	254.025.339,00
05-06-2024	01904/KW/723014/2024	Pendamping Tenaga Keamanan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	0,00	1.530.000,00	252.495.339,00
05-06-2024	01897/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Travel dalam rangka Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD BKD	0,00	1.145.000,00	251.350.339,00
05-06-2024	01900/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI WIlayah VI berupa pembelian air minum, gula pasir, dan lain-lain	0,00	1.108.000,00	250.242.339,00
05-06-2024	01899/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	465.000,00	249.777.339,00
05-06-2024	01915/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	323.535,00	249.453.804,00
05-06-2024	01910/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	249.153.804,00
05-06-2024	01911/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	248.853.804,00
05-06-2024	01906/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	248.553.804,00

1	2	3	4	5	6
05-06-2024	01909/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	248.253.804,00
05-06-2024	01912/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	247.953.804,00
05-06-2024	01908/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	247.653.804,00
05-06-2024	01907/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	247.353.804,00
05-06-2024	01914/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	251.535,00	247.102.269,00
05-06-2024	01903/KW/723014/2024	Mengantar LPJ Bulan April 2024	0,00	170.000,00	246.932.269,00
05-06-2024	01902/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian cat avian, kuas, dan lain-lain	0,00	145.000,00	246.787.269,00
06-06-2024	00433/BP/723014/2024	Pungut Pajak	2.922.073,00	0,00	249.709.342,00
06-06-2024	00448/BP/723014/2024	Pungut pajak	405.000,00	0,00	250.114.342,00
06-06-2024	00439/BP/723014/2024	Pungut pajak	405.000,00	0,00	250.519.342,00
06-06-2024	00449/BP/723014/2024	pungut pajak	405.000,00	0,00	250.924.342,00
06-06-2024	00438/BP/723014/2024	Pungut pajak	405.000,00	0,00	251.329.342,00
06-06-2024	00440/BP/723014/2024	pungut pajak	405.000,00	0,00	251.734.342,00
06-06-2024	00447/BP/723014/2024	Pungut pajak	270.000,00	0,00	252.004.342,00
06-06-2024	00441/BP/723014/2024	pungut pajak	135.000,00	0,00	252.139.342,00
06-06-2024	00445/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	252.154.342,00
06-06-2024	00446/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	252.169.342,00
06-06-2024	00444/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	252.184.342,00

1	2	3	4	5	6
06-06-2024	00436/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	252.199.342,00
06-06-2024	00437/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	252.214.342,00
06-06-2024	00434/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	252.229.342,00
06-06-2024	00443/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	252.244.342,00
06-06-2024	00435/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	252.259.342,00
06-06-2024	00442/BP/723014/2024	pungut pajak	11.250,00	0,00	252.270.592,00
06-06-2024	01922/KW/723014/2024	Uang Lembur Non PNS bulan Mei 2024	0,00	1.998.000,00	250.272.592,00
06-06-2024	02050/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Liputan Wisuda Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tanggal 06/06/2024 s.d 06/06/2024 Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta PER	0,00	1.690.000,00	248.582.592,00
06-06-2024	01947/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	993.101,00	247.589.491,00
06-06-2024	01942/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	956.003,00	246.633.488,00
06-06-2024	01924/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	902.510,00	245.730.978,00
06-06-2024	01941/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	854.603,00	244.876.375,00
06-06-2024	01955/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Penyelesaian SPJ kegiatan SERUNI NGUDARASA: Media Konsultasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pembayaran TPD/TKGB	0,00	800.000,00	244.076.375,00
06-06-2024	01926/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	641.500,00	243.434.875,00
06-06-2024	01950/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	604.250,00	242.830.625,00
06-06-2024	01951/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi	0,00	582.568,00	242.248.057,00

1	2	3	4	5	6
		MBKM Tahun 2024			
06-06-2024	01934/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	541.500,00	241.706.557,00
06-06-2024	01948/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	456.953,00	241.249.604,00
06-06-2024	01928/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	453.644,00	240.795.960,00
06-06-2024	01937/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	441.500,00	240.354.460,00
06-06-2024	01932/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	395.000,00	239.959.460,00
06-06-2024	01940/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	392.000,00	239.567.460,00
06-06-2024	01933/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	345.000,00	239.222.460,00
06-06-2024	01943/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	341.259,00	238.881.201,00
06-06-2024	01954/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	337.813,00	238.543.388,00
06-06-2024	01952/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	295.000,00	238.248.388,00
06-06-2024	01945/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	294.689,00	237.953.699,00
06-06-2024	01930/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	283.059,00	237.670.640,00
06-06-2024	01923/KW/723014/2024	Biaya Dekorasi Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Dosen PNS Dpk LLDIKTI	0,00	281.250,00	237.389.390,00

1	2	3	4	5	6
		Wilayah VI (MMT uk. 5 x 245)			
06-06-2024	01935/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	252.504,00	237.136.886,00
06-06-2024	01949/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	232.200,00	236.904.686,00
06-06-2024	01927/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	173.995,00	236.730.691,00
06-06-2024	01944/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	236.635.691,00
06-06-2024	01946/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	236.540.691,00
06-06-2024	01939/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	236.445.691,00
06-06-2024	01929/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	236.350.691,00
06-06-2024	01936/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	236.255.691,00
06-06-2024	01931/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	236.160.691,00
06-06-2024	01925/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	236.065.691,00
06-06-2024	01938/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	235.970.691,00
06-06-2024	01953/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	95.000,00	235.875.691,00
06-06-2024	01920/KW/723014/2024	Biaya Komunikasi Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A	0,00	50.000,00	235.825.691,00

1	2	3	4	5	6
		bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024			
06-06-2024	01921/KW/723014/2024	Biaya Komunikasi Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A bagi Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	50.000,00	235.775.691,00
07-06-2024	01961/KW/723014/2024	Kampus Merdeka Fair Padang 2024	0,00	1.310.000,00	234.465.691,00
07-06-2024	01962/KW/723014/2024	Dwi Anugrah Purnama Yanmea	0,00	1.310.000,00	233.155.691,00
07-06-2024	01960/KW/723014/2024	Kampus Merdeka Fair Padang 2024	0,00	1.310.000,00	231.845.691,00
07-06-2024	01968/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis SKP Angkatan VI	0,00	1.245.000,00	230.600.691,00
07-06-2024	01969/KW/723014/2024	Mengantar Bapak Kepala untuk menghadiri Rapat Koordinasi Rektor Anggota Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Seni Indonesia (BKS-PTSI)	0,00	1.008.000,00	229.592.691,00
07-06-2024	01957/KW/723014/2024	Kampus Merdeka Fair Padang 2024	0,00	930.000,00	228.662.691,00
07-06-2024	01958/KW/723014/2024	Kampus Merdeka Fair Padang 2024	0,00	930.000,00	227.732.691,00
07-06-2024	01959/KW/723014/2024	Kampus Merdeka Fair Padang 2024	0,00	930.000,00	226.802.691,00
07-06-2024	01966/KW/723014/2024	1. Penyerahan SK Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2. Wisuda Periode I Tahun 2024 Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Setia Budi 3.	0,00	446.000,00	226.356.691,00
07-06-2024	01963/KW/723014/2024	Wisuda Ke-22 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	0,00	345.000,00	226.011.691,00
07-06-2024	01964/KW/723014/2024	Wisuda Ke-22 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	0,00	296.000,00	225.715.691,00
07-06-2024	01965/KW/723014/2024	1. Penyerahan SK Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2. Wisuda Periode I Tahun 2024 Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Setia Budi 3.	0,00	296.000,00	225.419.691,00
07-06-2024	01976/KW/723014/2024	Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta	0,00	265.000,00	225.154.691,00
07-06-2024	01974/KW/723014/2024	Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta	0,00	265.000,00	224.889.691,00
07-06-2024	01973/KW/723014/2024	Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta	0,00	265.000,00	224.624.691,00
07-06-2024	01971/KW/723014/2024	Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta	0,00	265.000,00	224.359.691,00

1	2	3	4	5	6
07-06-2024	01975/KW/723014/2024	Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta	0,00	265.000,00	224.094.691,00
07-06-2024	01972/KW/723014/2024	Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta	0,00	265.000,00	223.829.691,00
07-06-2024	01956/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa pembelian slot pintu dan lain-lain	0,00	239.000,00	223.590.691,00
07-06-2024	01978/KW/723014/2024	Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta	0,00	214.500,00	223.376.191,00
07-06-2024	01967/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Tol dalam rangka, Mengantar Bapak Kepala untuk menghadiri Rapat Koordinasi Rektor Anggota Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Seni Indonesia (BKS-PTSI) Tanggal 29/05/2024 s.d 31/05/2024 Hotel Grand Zuri Malio	0,00	184.000,00	223.192.191,00
07-06-2024	01977/KW/723014/2024	Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta	0,00	170.000,00	223.022.191,00
07-06-2024	01970/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Travel dalam rangka Monitoring Evaluasi SISTER CLOUD â€“ BKD Pulang an. Hendro	0,00	95.000,00	222.927.191,00
10-06-2024	FPK-PENG-90nq60IxjTQUH3b	SPM GUP KKP	48.664.318,00	0,00	271.591.509,00
10-06-2024	FPK-PENG-KnMVckWBehDhaAC	SPM GUP KKP	15.762.000,00	0,00	287.353.509,00
10-06-2024	00452/BP/723014/2024	Pungut Pajak	1.851.622,00	0,00	289.205.131,00
10-06-2024	00451/BP/723014/2024	Pungut Pajak	313.060,00	0,00	289.518.191,00
10-06-2024	FPK-PENG-bcv1FxSg1lYDl4D	Tagihan KKP No : 4895940300048201 SUTO SUGIRAHARJO	0,00	28.292.969,00	261.225.222,00
10-06-2024	01983/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juni 2024 ID Pel : 523011392634	0,00	16.436.127,00	244.789.095,00
10-06-2024	FPK-PENG-kPGKYfUXt6rs2NZ	Tagihan KKP No : 4340750300084655 SRI HARTONO	0,00	10.500.000,00	234.289.095,00
10-06-2024	FPK-PENG-dY6E7O789Jh4ZDq	Tagihan KKP No : 4340750300084598 LIS SETYOWATI	0,00	7.221.000,00	227.068.095,00
10-06-2024	01982/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juni 2024 ID Pel : 523012307734	0,00	5.228.128,00	221.839.967,00
10-06-2024	FPK-PENG-dpr7wddRWl3bj3V	Tagihan KKP No : 4340750300084580 SITI NURUL JANNAH	0,00	4.333.249,00	217.506.718,00
10-06-2024	FPK-PENG-3duZMuDJVoqINvj	Tagihan KKP No : 4340750300084549 NATANAEL PRIHASTOMO	0,00	4.118.003,00	213.388.715,00

1	2	3	4	5	6
10-06-2024	01979/KW/723014/2024	Langganan Zoom bulan Mei 2024	0,00	3.453.111,00	209.935.604,00
10-06-2024	FPK-PENG-3xpPmexs31uM0K5	Tagihan KKP No : 4340750300084564 NURKHOLIS	0,00	2.815.000,00	207.120.604,00
10-06-2024	02000/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	204.420.604,00
10-06-2024	02001/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	201.720.604,00
10-06-2024	02051/KW/723014/2024	Konsumsi Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Dosen PNS dpk LLDIKTI Wilayah 6	0,00	2.673.054,00	199.047.550,00
10-06-2024	FPK-PENG-hGP25dPzORZKIfo	Tagihan KKP No : 4340750300085108 ADHRIAL REFADDIN	0,00	2.433.371,00	196.614.179,00
10-06-2024	01999/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.800.000,00	194.814.179,00
10-06-2024	FPK-PENG-aGZIYuDF5UolV1i	Tagihan KKP No : 6032987100007480 NADILA RIZKI	0,00	1.800.000,00	193.014.179,00
10-06-2024	FPK-PENG-zvqXlAe1leSBwGo	Tagihan KKP No : 4340750300084556 BHIMO WIDYO ANDOKO	0,00	1.455.068,00	191.559.111,00
10-06-2024	FPK-PENG-9akULy6CkUqMfAm	Tagihan KKP No : 4340750300084606 AGUNG PRASETYO	0,00	1.350.000,00	190.209.111,00
10-06-2024	01991/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Juni 2024 No JasTel : 143422111050	0,00	1.071.150,00	189.137.961,00
10-06-2024	01981/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juni 2024 ID Pel : 523013280785	0,00	1.063.906,00	188.074.055,00
10-06-2024	01990/KW/723014/2024	Langganan Bandwith (back up) - Bulan Juni 2024 No JasTel : 143422110530	0,00	982.350,00	187.091.705,00
10-06-2024	02013/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	448.000,00	186.643.705,00
10-06-2024	02002/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	447.000,00	186.196.705,00
10-06-2024	02004/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam	0,00	446.000,00	185.750.705,00

1	2	3	4	5	6
		Implementasi MBKM Tahun 2024			
10-06-2024	02007/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	185.320.705,00
10-06-2024	02003/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	184.890.705,00
10-06-2024	02012/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	430.000,00	184.460.705,00
10-06-2024	02006/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	184.030.705,00
10-06-2024	02011/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	430.000,00	183.600.705,00
10-06-2024	02005/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	183.170.705,00
10-06-2024	02008/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	182.740.705,00
10-06-2024	02010/KW/723014/2024	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI	0,00	430.000,00	182.310.705,00
10-06-2024	02009/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	181.880.705,00
10-06-2024	01980/KW/723014/2024	Langganan Listrik - Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juni 2024 ID Pel : 523013044430	0,00	396.000,00	181.484.705,00
10-06-2024	01993/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	181.184.705,00
10-06-2024	01994/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	180.884.705,00
10-06-2024	01995/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi	0,00	300.000,00	180.584.705,00

1	2	3	4	5	6
		Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024			
10-06-2024	01997/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	180.284.705,00
10-06-2024	01998/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	179.984.705,00
10-06-2024	01996/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	179.684.705,00
10-06-2024	01992/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.000,00	179.384.705,00
10-06-2024	01988/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Juni 2024 No Telp 0248317281	0,00	279.755,00	179.104.950,00
10-06-2024	01987/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Juni 2024 No Telp 0248311521	0,00	65.819,00	179.039.131,00
10-06-2024	01986/KW/723014/2024	Tagihan telepon bulan Juni 2024 No Telp 0248311273	0,00	59.221,00	178.979.910,00
10-06-2024	01985/KW/723014/2024	Tagihan Kartu Halo bulan Juni 2024 No Telp 08112690267	0,00	58.000,00	178.921.910,00
10-06-2024	01989/KW/723014/2024	Telepon bulan Juni 2024 No Telp 0248449458	0,00	39.907,00	178.882.003,00
10-06-2024	01984/KW/723014/2024	Tagihan Telepon Bulan Juni 2024 No 08112558011	0,00	30.250,00	178.851.753,00
11-06-2024	02047/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting dalam rangka kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	39.000.000,00	139.851.753,00
11-06-2024	02053/KW/723014/2024	Biaya Konsumsi (Snack dan Makan) dalam rangka kegiatan Pembinaan Kepegawaian Dosen PNS DPK LLDIKTI WILAYAH VI TA 2024 tgl 28 Mei 2024 sebanyak 402 pax pax total Rp 25.270.524 (sesuai invoice terlampir)	0,00	22.766.064,00	117.085.689,00

1	2	3	4	5	6
11-06-2024	02048/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI WIlayah VI berupa Pembayaran Pekerjaan Paket Pengadaan Seminar Kit Dalam Rangka Festival Merdeka Belajar	0,00	20.091.000,00	96.994.689,00
11-06-2024	02017/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pekerjaan Pemeliharaan Meubelair Ruang Tamu	0,00	15.810.000,00	81.184.689,00
11-06-2024	02066/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	7.266.000,00	73.918.689,00
11-06-2024	02030/KW/723014/2024	Biaya Trasnsportasi Semarang - Surakarta (PP) dalam rangka kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.835.000,00	72.083.689,00
11-06-2024	02024/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Pertemuan Koordinasi Perguruan Tinggi dengan Kementerian Kesehatan Tanggal 16/05/2024 s.d 18/05/2024 Grand Mercure Kemayoran PERJADIN 267/LL6/PK.02/2024	0,00	1.205.000,00	70.878.689,00
11-06-2024	02065/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Mengantar Bapak Kepala menghadiri Wisuda Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024 Universitas	0,00	1.200.000,00	69.678.689,00
11-06-2024	02020/KW/723014/2024	Liputan Wisuda Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	0,00	1.094.000,00	68.584.689,00
11-06-2024	02021/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis SKP Angkatan VI	0,00	999.000,00	67.585.689,00
11-06-2024	02019/KW/723014/2024	Liputan Wisuda Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	0,00	855.050,00	66.730.639,00
11-06-2024	02023/KW/723014/2024	Pertemuan Koordinasi Perguruan Tinggi dengan Kementerian Kesehatan	0,00	849.000,00	65.881.639,00
11-06-2024	02055/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	821.000,00	65.060.639,00
11-06-2024	02036/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	805.516,00	64.255.123,00

1	2	3	4	5	6
11-06-2024	02059/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	805.516,00	63.449.607,00
11-06-2024	02031/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	805.516,00	62.644.091,00
11-06-2024	02058/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	707.016,00	61.937.075,00
11-06-2024	02064/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	654.310,00	61.282.765,00
11-06-2024	02052/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka , valuasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 Tanggal 03/06/2024 s.d 04/06/2024	0,00	650.000,00	60.632.765,00
11-06-2024	02016/KW/723014/2024	Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur - NON PNS LLDIKTI Wilayah VI Periode 01/05/2024 s.d 31/05/2024	0,00	610.000,00	60.022.765,00
11-06-2024	02034/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	594.000,00	59.428.765,00
11-06-2024	02054/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	592.000,00	58.836.765,00
11-06-2024	02018/KW/723014/2024	Liputan Wisuda Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	0,00	590.000,00	58.246.765,00
11-06-2024	02060/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	588.500,00	57.658.265,00
11-06-2024	02063/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	578.500,00	57.079.765,00
11-06-2024	02037/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	574.000,00	56.505.765,00
11-06-2024	02056/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	560.000,00	55.945.765,00

1	2	3	4	5	6
11-06-2024	02061/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	560.000,00	55.385.765,00
11-06-2024	02062/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	560.000,00	54.825.765,00
11-06-2024	02049/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	560.000,00	54.265.765,00
11-06-2024	02015/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari pembelian materai sejumlah "50"	0,00	500.000,00	53.765.765,00
11-06-2024	02032/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	475.000,00	53.290.765,00
11-06-2024	02033/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	475.000,00	52.815.765,00
11-06-2024	02035/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	475.000,00	52.340.765,00
11-06-2024	02038/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	51.950.765,00
11-06-2024	02039/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	51.560.765,00
11-06-2024	02044/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	51.170.765,00
11-06-2024	02042/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	50.780.765,00
11-06-2024	02043/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	50.390.765,00
11-06-2024	02045/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	50.000.765,00
11-06-2024	02057/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem	0,00	390.000,00	49.610.765,00

1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024			
11-06-2024	02040/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	49.220.765,00
11-06-2024	02041/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	48.830.765,00
11-06-2024	02046/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta PTS	0,00	390.000,00	48.440.765,00
11-06-2024	02025/KW/723014/2024	Penyelesaian SPJ kegiatan SERUNI NGUDARASA: Media Konsultasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI Wilayah VI	0,00	370.000,00	48.070.765,00
11-06-2024	02026/KW/723014/2024	Penyelesaian SPJ kegiatan SERUNI NGUDARASA: Media Konsultasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI Wilayah VI	0,00	370.000,00	47.700.765,00
11-06-2024	02029/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	355.250,00	47.345.515,00
11-06-2024	02028/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	170.000,00	47.175.515,00
11-06-2024	02027/KW/723014/2024	Liputan Prosesi Wisuda Sarjana Periode XXI STIE Totalwin Semarang	0,00	170.000,00	47.005.515,00
11-06-2024	02022/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Travel Berangkat dalam rangka, Bimbingan Teknis SKP Angkatan VI Tanggal 29/05/2024 s.d 31/05/2024 The Malioboro Hotel and Conference Center Jl. Gandekan Lor No.21, Pringgokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta	0,00	135.000,00	46.870.515,00
12-06-2024	FPK-PENG-sjku3GSyO6iTaMh	SPM GUP	97.957.435,00	0,00	144.827.950,00
12-06-2024	FPK-PENG-dY50YXRDPSv3juy	SPM GUP	52.632.721,00	0,00	197.460.671,00
14-06-2024	00455/BP/723014/2024	Pungut Pajak	2.262.500,00	0,00	199.723.171,00
14-06-2024	00454/BP/723014/2024	Pungut Pajak	780.000,00	0,00	200.503.171,00

1	2	3	4	5	6
14-06-2024	00453/BP/723014/2024	Pungut Pajak	455.321,00	0,00	200.958.492,00
14-06-2024	00508/BP/723014/2024	Pungut Pajak	300.000,00	0,00	201.258.492,00
14-06-2024	00461/BP/723014/2024	Pungut Pajak	270.000,00	0,00	201.528.492,00
14-06-2024	00462/BP/723014/2024	Pungut Pajak	270.000,00	0,00	201.798.492,00
14-06-2024	00464/BP/723014/2024	Pungut Pajak	82.089,00	82.089,00	201.798.492,00
14-06-2024	00465/BP/723014/2024	Pungut Pajak	19.018,00	19.018,00	201.798.492,00
14-06-2024	00460/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	201.813.492,00
14-06-2024	00456/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	201.828.492,00
14-06-2024	00458/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	201.843.492,00
14-06-2024	00459/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	201.858.492,00
14-06-2024	00457/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	201.873.492,00
14-06-2024	00463/BP/723014/2024	Pungut Pajak	6.551,00	6.551,00	201.873.492,00
14-06-2024	02208/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	5.400.000,00	196.473.492,00
14-06-2024	02207/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	5.400.000,00	191.073.492,00
14-06-2024	02378/KW/723014/2024	Honor Narasumber dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	5.000.000,00	186.073.492,00
14-06-2024	02209/KW/723014/2024	Biaya Transportasi Semarang - Tegal PP dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	2.700.000,00	183.373.492,00
14-06-2024	02173/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.774.500,00	181.598.992,00
14-06-2024	00470/SSP/723014/2024	PPN	0,00	1.566.757,00	180.032.235,00
14-06-2024	02186/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.345.000,00	178.687.235,00

1	2	3	4	5	6
14-06-2024	02185/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.344.000,00	177.343.235,00
14-06-2024	02196/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas Transfportasi (PP) dalam rangka kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024	0,00	1.220.000,00	176.123.235,00
14-06-2024	02172/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.220.000,00	174.903.235,00
14-06-2024	02170/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.135.317,00	173.767.918,00
14-06-2024	02162/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.130.000,00	172.637.918,00
14-06-2024	02181/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.080.000,00	171.557.918,00
14-06-2024	02221/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	1.040.580,00	170.517.338,00
14-06-2024	02159/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.035.000,00	169.482.338,00
14-06-2024	02180/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	1.011.500,00	168.470.838,00
14-06-2024	02144/KW/723014/2024	Mengantar Bapak Kepala menghadiri Wisuda Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	0,00	1.008.000,00	167.462.838,00
14-06-2024	02157/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	980.000,00	166.482.838,00
14-06-2024	02150/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	980.000,00	165.502.838,00
14-06-2024	02175/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	888.500,00	164.614.338,00

1	2	3	4	5	6
14-06-2024	02151/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	826.000,00	163.788.338,00
14-06-2024	02165/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	816.693,00	162.971.645,00
14-06-2024	02193/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta mitra	0,00	800.016,00	162.171.629,00
14-06-2024	02161/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	780.000,00	161.391.629,00
14-06-2024	02166/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	767.000,00	160.624.629,00
14-06-2024	02215/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	159.894.629,00
14-06-2024	02219/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	159.164.629,00
14-06-2024	02213/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	158.434.629,00
14-06-2024	02217/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	157.704.629,00
14-06-2024	02216/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	156.974.629,00
14-06-2024	02212/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	156.244.629,00
14-06-2024	02218/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	155.514.629,00
14-06-2024	02214/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	154.784.629,00
14-06-2024	02182/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	690.000,00	154.094.629,00
14-06-2024	02160/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	689.500,00	153.405.129,00
14-06-2024	02187/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam	0,00	666.589,00	152.738.540,00

1	2	3	4	5	6
		Implementasi MBKM Tahun 2024			
14-06-2024	02176/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	650.000,00	152.088.540,00
14-06-2024	02189/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	620.000,00	151.468.540,00
14-06-2024	02177/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	580.000,00	150.888.540,00
14-06-2024	02164/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	577.120,00	150.311.420,00
14-06-2024	02074/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun	0,00	560.000,00	149.751.420,00
14-06-2024	02106/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	560.000,00	149.191.420,00
14-06-2024	02153/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	553.706,00	148.637.714,00
14-06-2024	02190/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	547.000,00	148.090.714,00
14-06-2024	02135/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	539.960,00	147.550.754,00
14-06-2024	02158/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	530.000,00	147.020.754,00
14-06-2024	02179/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	510.000,00	146.510.754,00
14-06-2024	02134/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan	0,00	510.000,00	146.000.754,00

1	2	3	4	5	6
		Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025			
14-06-2024	02156/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	489.400,00	145.511.354,00
14-06-2024	02194/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta mitra	0,00	488.400,00	145.022.954,00
14-06-2024	02094/KW/723014/2024	iaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	470.000,00	144.552.954,00
14-06-2024	02136/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	450.995,00	144.101.959,00
14-06-2024	00469/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	449.550,00	143.652.409,00
14-06-2024	02109/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	440.000,00	143.212.409,00
14-06-2024	02138/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	435.970,00	142.776.439,00
14-06-2024	02169/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	142.346.439,00
14-06-2024	02191/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	141.916.439,00
14-06-2024	02188/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	430.000,00	141.486.439,00
14-06-2024	02107/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	428.462,00	141.057.977,00
14-06-2024	02154/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam	0,00	427.233,00	140.630.744,00

1	2	3	4	5	6
		Implementasi MBKM Tahun 2024			
14-06-2024	02155/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	426.900,00	140.203.844,00
14-06-2024	02152/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	423.000,00	139.780.844,00
14-06-2024	02104/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	420.000,00	139.360.844,00
14-06-2024	00463/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	138.955.844,00
14-06-2024	00455/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	138.550.844,00
14-06-2024	00454/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	138.145.844,00
14-06-2024	00453/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	137.740.844,00
14-06-2024	00464/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	405.000,00	137.335.844,00
14-06-2024	02129/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	136.945.844,00
14-06-2024	02092/KW/723014/2024	iaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	136.555.844,00
14-06-2024	02067/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	136.165.844,00
14-06-2024	02075/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	135.775.844,00
14-06-2024	02082/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai	0,00	390.000,00	135.385.844,00

1	2	3	4	5	6
		Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025			
14-06-2024	02097/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	134.995.844,00
14-06-2024	02100/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	134.605.844,00
14-06-2024	02112/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	134.215.844,00
14-06-2024	02115/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	133.825.844,00
14-06-2024	02128/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	133.435.844,00
14-06-2024	02142/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	133.045.844,00
14-06-2024	02073/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun	0,00	390.000,00	132.655.844,00
14-06-2024	02099/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	132.265.844,00
14-06-2024	02101/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	131.875.844,00
14-06-2024	02116/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan	0,00	390.000,00	131.485.844,00

1	2	3	4	5	6
		Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025			
14-06-2024	02117/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	131.095.844,00
14-06-2024	02125/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	130.705.844,00
14-06-2024	02068/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	130.315.844,00
14-06-2024	02093/KW/723014/2024	iaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	129.925.844,00
14-06-2024	02102/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	129.535.844,00
14-06-2024	02105/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	129.145.844,00
14-06-2024	02111/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	128.755.844,00
14-06-2024	02124/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	128.365.844,00
14-06-2024	02133/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	127.975.844,00
14-06-2024	02141/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan	0,00	390.000,00	127.585.844,00

1	2	3	4	5	6
		Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025			
14-06-2024	02143/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	127.195.844,00
14-06-2024	02071/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	126.805.844,00
14-06-2024	02077/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	126.415.844,00
14-06-2024	02078/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	126.025.844,00
14-06-2024	02095/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	125.635.844,00
14-06-2024	02110/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	125.245.844,00
14-06-2024	02113/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	124.855.844,00
14-06-2024	02119/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	124.465.844,00
14-06-2024	02120/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	124.075.844,00
14-06-2024	02121/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	123.685.844,00

1	2	3	4	5	6
14-06-2024	02122/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	123.295.844,00
14-06-2024	02126/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	122.905.844,00
14-06-2024	02127/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	122.515.844,00
14-06-2024	02081/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	122.125.844,00
14-06-2024	02085/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	121.735.844,00
14-06-2024	02096/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	121.345.844,00
14-06-2024	02139/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	120.955.844,00
14-06-2024	02195/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta mitra	0,00	390.000,00	120.565.844,00
14-06-2024	02070/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	120.175.844,00
14-06-2024	02076/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	119.785.844,00
14-06-2024	02079/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai	0,00	390.000,00	119.395.844,00

1	2	3	4	5	6
		Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025			
14-06-2024	02080/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	119.005.844,00
14-06-2024	02086/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	118.615.844,00
14-06-2024	02088/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	118.225.844,00
14-06-2024	02089/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	117.835.844,00
14-06-2024	02098/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	117.445.844,00
14-06-2024	02108/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	117.055.844,00
14-06-2024	02114/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	116.665.844,00
14-06-2024	02130/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	116.275.844,00
14-06-2024	02131/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	115.885.844,00
14-06-2024	02084/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan	0,00	390.000,00	115.495.844,00

1	2	3	4	5	6
		Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025			
14-06-2024	02090/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	115.105.844,00
14-06-2024	02103/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	114.715.844,00
14-06-2024	02118/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	114.325.844,00
14-06-2024	02140/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	113.935.844,00
14-06-2024	02069/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	113.545.844,00
14-06-2024	02072/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	113.155.844,00
14-06-2024	02083/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	112.765.844,00
14-06-2024	02087/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	112.375.844,00
14-06-2024	02123/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	111.985.844,00
14-06-2024	02132/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	111.595.844,00

1	2	3	4	5	6
14-06-2024	02137/KW/723014/2024	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	111.205.844,00
14-06-2024	02192/KW/723014/2024	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM Angkatan II Tahun 2024 untuk peserta mitra	0,00	390.000,00	110.815.844,00
14-06-2024	02091/KW/723014/2024	iaya Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025	0,00	390.000,00	110.425.844,00
14-06-2024	02183/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	386.963,00	110.038.881,00
14-06-2024	02178/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	347.400,00	109.691.481,00
14-06-2024	02167/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	333.000,00	109.358.481,00
14-06-2024	02184/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	312.577,00	109.045.904,00
14-06-2024	02163/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	300.600,00	108.745.304,00
14-06-2024	02206/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	108.445.304,00
14-06-2024	02204/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	108.145.304,00
14-06-2024	02203/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	107.845.304,00
14-06-2024	02202/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	107.545.304,00
14-06-2024	02200/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan	0,00	300.000,00	107.245.304,00

1	2	3	4	5	6
		Tinggi Tahun 2024			
14-06-2024	02199/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	106.945.304,00
14-06-2024	02205/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	106.645.304,00
14-06-2024	02201/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	106.345.304,00
14-06-2024	02198/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	106.045.304,00
14-06-2024	02197/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	300.000,00	105.745.304,00
14-06-2024	02220/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	296.000,00	105.449.304,00
14-06-2024	00471/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	284.865,00	105.164.439,00
14-06-2024	00462/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	270.000,00	104.894.439,00
14-06-2024	02174/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	260.000,00	104.634.439,00
14-06-2024	02171/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	260.000,00	104.374.439,00
14-06-2024	00448/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	132.000,00	104.242.439,00
14-06-2024	02145/KW/723014/2024	Biaya Tol dalam rangka, Mengantar Bapak Kepala menghadiri Wisuda Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tanggal 05/06/2024 s.d 07/06/2024 Sportorium Universitas Muhammad	0,00	126.000,00	104.116.439,00
14-06-2024	00466/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	82.089,00	104.034.350,00
14-06-2024	00450/SSP/723014/202	PPH 21	0,00	15.000,00	104.019.350,00

1	2	3	4	5	6
	4				
14-06-2024	00452/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	104.004.350,00
14-06-2024	00459/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	103.989.350,00
14-06-2024	00449/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	103.974.350,00
14-06-2024	00460/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	103.959.350,00
14-06-2024	00461/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	103.944.350,00
14-06-2024	00451/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	103.929.350,00
14-06-2024	00458/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	11.250,00	103.918.100,00
14-06-2024	00465/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	6.551,00	103.911.549,00
21-06-2024	FPK-PENG-590RhGpF5JNtYPm	SPM GUP	141.332.486,00	0,00	245.244.035,00
21-06-2024	FPK-PENG-uu3HNlTwEzaWsPv	SPM GUP	57.123.387,00	0,00	302.367.422,00
21-06-2024	00490/BP/723014/2024	Pungut Pajak	540.000,00	0,00	302.907.422,00
21-06-2024	00491/BP/723014/2024	Pungut Pajak	540.000,00	0,00	303.447.422,00
21-06-2024	00482/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	303.852.422,00
21-06-2024	00481/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	304.257.422,00
21-06-2024	00483/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	304.662.422,00
21-06-2024	00485/BP/723014/2024	Pungut Pajak	405.000,00	0,00	305.067.422,00
21-06-2024	00478/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	305.202.422,00
21-06-2024	00474/BP/723014/2024	Pungut pajak	135.000,00	0,00	305.337.422,00
21-06-2024	00466/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	305.472.422,00
21-06-2024	00476/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	305.607.422,00
21-06-2024	00479/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	305.742.422,00

1	2	3	4	5	6
21-06-2024	00472/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	305.877.422,00
21-06-2024	00473/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	306.012.422,00
21-06-2024	00467/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	306.147.422,00
21-06-2024	00475/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	306.282.422,00
21-06-2024	00477/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	306.417.422,00
21-06-2024	00469/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	306.552.422,00
21-06-2024	00480/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	306.687.422,00
21-06-2024	00471/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	306.822.422,00
21-06-2024	00484/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	306.957.422,00
21-06-2024	00468/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	307.092.422,00
21-06-2024	00470/BP/723014/2024	Pungut Pajak	135.000,00	0,00	307.227.422,00
21-06-2024	00486/BP/723014/2024	Pungut Pajak	67.500,00	0,00	307.294.922,00
21-06-2024	00487/BP/723014/2024	Pungut pajak	20.000,00	0,00	307.314.922,00
21-06-2024	00489/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	307.329.922,00
21-06-2024	00488/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	307.344.922,00
21-06-2024	02274/KW/723014/2024	Honor Narasumber Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Pemenuhan Sarana Prasarana)	0,00	3.600.000,00	303.744.922,00
21-06-2024	02275/KW/723014/2024	Honor Narasumber Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Pemenuhan Sarana Prasarana)	0,00	3.600.000,00	300.144.922,00
21-06-2024	02253/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	297.444.922,00
21-06-2024	02249/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	294.744.922,00
21-06-2024	02243/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	292.044.922,00

1	2	3	4	5	6
21-06-2024	02261/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	289.344.922,00
21-06-2024	02258/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	286.644.922,00
21-06-2024	02252/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	283.944.922,00
21-06-2024	02247/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	281.244.922,00
21-06-2024	02254/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	278.544.922,00
21-06-2024	02255/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	275.844.922,00
21-06-2024	02250/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	273.144.922,00
21-06-2024	02242/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	270.444.922,00
21-06-2024	02244/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	267.744.922,00
21-06-2024	02246/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	265.044.922,00
21-06-2024	02256/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	262.344.922,00
21-06-2024	02248/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	259.644.922,00
21-06-2024	02257/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	256.944.922,00

1	2	3	4	5	6
21-06-2024	02260/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	254.244.922,00
21-06-2024	02259/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	251.544.922,00
21-06-2024	02245/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	248.844.922,00
21-06-2024	02251/KW/723014/2024	Honor Narasumber Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	2.700.000,00	246.144.922,00
21-06-2024	00468/SSP/723014/2024	PPN	0,00	2.472.523,00	243.672.399,00
21-06-2024	02236/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Evaluasi Lapangan Usulan Perubahan Bentuk STT Ronggolawe menjadi Universitas dan Wisuda Universitas YPPI Rembang Tanggal 05/06/2024 s.d 07/06/2024 STT Ronggolawe dan Universitas YPPI Rembang PER	0,00	2.393.000,00	241.279.399,00
21-06-2024	00476/SSP/723014/2024	ppn	0,00	1.991.000,00	239.288.399,00
21-06-2024	02285/KW/723014/2024	Diseminasi Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karir Dosen	0,00	1.607.280,00	237.681.119,00
21-06-2024	02284/KW/723014/2024	Diseminasi Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karir Dosen	0,00	1.477.000,00	236.204.119,00
21-06-2024	02223/KW/723014/2024	Diseminasi Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karir Dosen	0,00	1.360.000,00	234.844.119,00
21-06-2024	02222/KW/723014/2024	Diseminasi Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karir Dosen	0,00	1.360.000,00	233.484.119,00
21-06-2024	02238/KW/723014/2024	Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Rancangan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi	0,00	1.287.500,00	232.196.619,00
21-06-2024	02235/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usulan Perubahan Bentuk STT Ronggolawe menjadi Universitas dan Wisuda Universitas YPPI Rembang	0,00	1.110.500,00	231.086.119,00
21-06-2024	02232/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usulan Perubahan Bentuk STT Ronggolawe menjadi Universitas dan	0,00	888.000,00	230.198.119,00

1	2	3	4	5	6
		Wisuda Universitas YPPI Rembang			
21-06-2024	02233/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usulan Perubahan Bentuk STT Ronggolawe menjadi Universitas dan Wisuda Universitas YPPI Rembang	0,00	888.000,00	229.310.119,00
21-06-2024	02234/KW/723014/2024	Evaluasi Lapangan Usulan Perubahan Bentuk STT Ronggolawe menjadi Universitas dan Wisuda Universitas YPPI Rembang	0,00	888.000,00	228.422.119,00
21-06-2024	02241/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APPP-PTS Tahun 2024 Gelombang 1	0,00	811.500,00	227.610.619,00
21-06-2024	00475/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	780.000,00	226.830.619,00
21-06-2024	02224/KW/723014/2024	Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024	0,00	764.600,00	226.066.019,00
21-06-2024	02226/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	225.336.019,00
21-06-2024	02225/KW/723014/2024	Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	730.000,00	224.606.019,00
21-06-2024	02240/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APPP-PTS Tahun 2024 Gelombang 1	0,00	680.000,00	223.926.019,00
21-06-2024	02239/KW/723014/2024	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APPP-PTS Tahun 2024 Gelombang 1	0,00	680.000,00	223.246.019,00
21-06-2024	02227/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI WIlayah VI berupa pembelian air minum	0,00	500.000,00	222.746.019,00
21-06-2024	00474/SSP/723014/2024	pph 23	0,00	455.321,00	222.290.698,00
21-06-2024	02270/KW/723014/2024	Honor Panitia Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Pemenuhan Sarana Prasarana)	0,00	450.000,00	221.840.698,00
21-06-2024	02263/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Angkatan III	0,00	430.000,00	221.410.698,00
21-06-2024	02265/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Angkatan III	0,00	430.000,00	220.980.698,00
21-06-2024	02269/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Angkatan III	0,00	430.000,00	220.550.698,00
21-06-2024	02267/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya	0,00	430.000,00	220.120.698,00

1	2	3	4	5	6
		LLDIKTI Wilayah VI Angkatan III			
21-06-2024	02268/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Angkatan III	0,00	430.000,00	219.690.698,00
21-06-2024	02264/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Angkatan III	0,00	430.000,00	219.260.698,00
21-06-2024	02266/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Angkatan III	0,00	430.000,00	218.830.698,00
21-06-2024	02262/KW/723014/2024	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Angkatan III	0,00	430.000,00	218.400.698,00
21-06-2024	02271/KW/723014/2024	Honor Panitia Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Pemenuhan Sarana Prasarana)	0,00	400.000,00	218.000.698,00
21-06-2024	02237/KW/723014/2024	Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Rancangan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi	0,00	370.000,00	217.630.698,00
21-06-2024	02273/KW/723014/2024	Honor Panitia Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Pemenuhan Sarana Prasarana)	0,00	300.000,00	217.330.698,00
21-06-2024	02272/KW/723014/2024	Honor Panitia Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Pemenuhan Sarana Prasarana)	0,00	300.000,00	217.030.698,00
21-06-2024	00484/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	271.500,00	216.759.198,00
21-06-2024	00483/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	270.000,00	216.489.198,00
21-06-2024	00482/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	270.000,00	216.219.198,00
21-06-2024	02280/KW/723014/2024	Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana)	0,00	265.000,00	215.954.198,00
21-06-2024	02276/KW/723014/2024	Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana)	0,00	265.000,00	215.689.198,00
21-06-2024	02282/KW/723014/2024	Sharing Session Badan Penyelenggara	0,00	265.000,00	215.424.198,00

1	2	3	4	5	6
		Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana)			
21-06-2024	02279/KW/723014/2024	Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana)	0,00	265.000,00	215.159.198,00
21-06-2024	02281/KW/723014/2024	Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana)	0,00	265.000,00	214.894.198,00
21-06-2024	02277/KW/723014/2024	Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana)	0,00	265.000,00	214.629.198,00
21-06-2024	02278/KW/723014/2024	Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana)	0,00	265.000,00	214.364.198,00
21-06-2024	00472/SSP/723014/2024	ppn	0,00	264.897,00	214.099.301,00
21-06-2024	02231/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa pembelian bbm mesin potong rumput	0,00	200.000,00	213.899.301,00
21-06-2024	02283/KW/723014/2024	Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana)	0,00	170.000,00	213.729.301,00
21-06-2024	00456/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	135.000,00	213.594.301,00
21-06-2024	02229/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian LED Panel dan lain-lain	0,00	85.000,00	213.509.301,00
21-06-2024	00473/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	48.163,00	213.461.138,00
21-06-2024	02230/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor berupa pembelian bbm operasional kendaraan dinas H 6312 XZ dalam rangka biaya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	41.960,00	213.419.178,00
21-06-2024	02228/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian Kabel dan Bluetooth Receiver	0,00	38.000,00	213.381.178,00
21-06-2024	00467/SSP/723014/2024	PPH 23	0,00	19.018,00	213.362.160,00
21-06-2024	00481/SSP/723014/202	PPH 21	0,00	15.000,00	213.347.160,00

1	2	3	4	5	6
	4				
21-06-2024	00479/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	213.332.160,00
21-06-2024	00457/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	213.317.160,00
21-06-2024	00477/SSP/723014/2024	PPH 21	0,00	15.000,00	213.302.160,00
21-06-2024	00480/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	213.287.160,00
21-06-2024	00478/SSP/723014/2024	pph 21	0,00	15.000,00	213.272.160,00
25-06-2024	00493/BP/723014/2024	Pungut Pajak	20.833,00	0,00	213.292.993,00
25-06-2024	00492/BP/723014/2024	Pungut Pajak	2.500,00	0,00	213.295.493,00
25-06-2024	02315/KW/723014/2024	Pembayaran penginapan panitia 1 malam, ST No. 312/LL6/HM.00.06/2024 kegiatan Studi Tiru Pengelolaan Kehumasan	0,00	2.254.500,00	211.040.993,00
25-06-2024	02317/KW/723014/2024	Biaya Penginapan dalam rangka, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APPP-PTS Tahun 2024 Gelombang 1 Tanggal 10/06/2024 s.d 11/06/2024 Kantor LLDIKTI Wilayah VII PERJADIN 316/LL6/DT.03.03/2024	0,00	1.440.000,00	209.600.993,00
25-06-2024	02288/KW/723014/2024	Wisuda Sarjana Ke-1 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal	0,00	1.388.213,00	208.212.780,00
25-06-2024	02294/KW/723014/2024	Studi Tiru Pengelolaan Kehumasan	0,00	1.118.000,00	207.094.780,00
25-06-2024	02295/KW/723014/2024	Studi Tiru Pengelolaan Kehumasan	0,00	1.117.500,00	205.977.280,00
25-06-2024	02292/KW/723014/2024	Studi Tiru Pengelolaan Kehumasan	0,00	1.060.000,00	204.917.280,00
25-06-2024	02293/KW/723014/2024	Studi Tiru Pengelolaan Kehumasan	0,00	1.060.000,00	203.857.280,00
25-06-2024	02291/KW/723014/2024	Studi Tiru Pengelolaan Kehumasan	0,00	1.060.000,00	202.797.280,00
25-06-2024	02289/KW/723014/2024	Studi Tiru Pengelolaan Kehumasan	0,00	1.060.000,00	201.737.280,00
25-06-2024	02311/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas Sragen	0,00	1.053.671,00	200.683.609,00
25-06-2024	02312/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas Sragen	0,00	1.034.171,00	199.649.438,00
25-06-2024	02303/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas	0,00	995.084,00	198.654.354,00

1	2	3	4	5	6
		Sugeng Hartono			
25-06-2024	02302/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas Sugeng Hartono	0,00	986.084,00	197.668.270,00
25-06-2024	02313/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas Sragen	0,00	892.000,00	196.776.270,00
25-06-2024	02305/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas Sugeng Hartono	0,00	892.000,00	195.884.270,00
25-06-2024	02307/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	0,00	699.084,00	195.185.186,00
25-06-2024	02306/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	0,00	683.084,00	194.502.102,00
25-06-2024	02298/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data Perubahan Program Studi dan Pendampingan IKU	0,00	666.191,00	193.835.911,00
25-06-2024	02299/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data Perubahan Program Studi dan Pendampingan IKU	0,00	650.191,00	193.185.720,00
25-06-2024	02308/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	0,00	595.150,00	192.590.570,00
25-06-2024	02310/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas Sragen	0,00	592.000,00	191.998.570,00
25-06-2024	02301/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas Sugeng Hartono	0,00	592.000,00	191.406.570,00
25-06-2024	02314/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Universitas Sragen	0,00	592.000,00	190.814.570,00
25-06-2024	02297/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data Perubahan Program Studi dan Pendampingan IKU	0,00	566.000,00	190.248.570,00
25-06-2024	02318/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa pemesanan kaos souvenir untuk acara Kampus Merdeka Fair Tahun 2024 di Universitas PGRI	0,00	520.833,00	189.727.737,00
25-06-2024	02334/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	189.297.737,00
25-06-2024	02340/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	188.867.737,00
25-06-2024	02332/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	188.437.737,00

1	2	3	4	5	6
25-06-2024	02328/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	188.007.737,00
25-06-2024	02327/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	187.577.737,00
25-06-2024	02341/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	187.147.737,00
25-06-2024	02335/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	186.717.737,00
25-06-2024	02326/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	186.287.737,00
25-06-2024	02338/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	185.857.737,00
25-06-2024	02333/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	185.427.737,00
25-06-2024	02337/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	184.997.737,00
25-06-2024	02331/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	184.567.737,00
25-06-2024	02329/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	184.137.737,00
25-06-2024	02320/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	183.707.737,00
25-06-2024	02319/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	183.277.737,00
25-06-2024	02325/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	182.847.737,00

1	2	3	4	5	6
25-06-2024	02342/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	182.417.737,00
25-06-2024	02339/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	181.987.737,00
25-06-2024	02323/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	181.557.737,00
25-06-2024	02324/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	181.127.737,00
25-06-2024	02330/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	180.697.737,00
25-06-2024	02287/KW/723014/2024	Wisuda Sarjana dan Magister ke-71 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman	0,00	359.714,00	180.338.023,00
25-06-2024	02304/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	0,00	296.000,00	180.042.023,00
25-06-2024	02300/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data Perubahan Program Studi dan Pendampingan IKU	0,00	296.000,00	179.746.023,00
25-06-2024	02296/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data Perubahan Program Studi dan Pendampingan IKU	0,00	296.000,00	179.450.023,00
25-06-2024	02309/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi PDDIKTI - Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	0,00	296.000,00	179.154.023,00
25-06-2024	02316/KW/723014/2024	Sosialisasi dan Bimtek Pendampingan Implementasi Digitalisasi Pembayaran Melalui CMS, KKP, dan Digipay	0,00	170.000,00	178.984.023,00
25-06-2024	02336/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	130.000,00	178.854.023,00
25-06-2024	02286/KW/723014/2024	Pemeliharaan Peralatan dan inventaris Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa jasa perbaikan PABX	0,00	125.000,00	178.729.023,00
26-06-2024	02290/KW/723014/2024	Studi Tiru Pengelolaan Kehumasan	0,00	1.060.000,00	177.669.023,00
26-06-2024	02322/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	177.239.023,00

1	2	3	4	5	6
26-06-2024	02321/KW/723014/2024	FGD Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	430.000,00	176.809.023,00
27-06-2024	00495/BP/723014/2024	Pungut Pajak	1.945.205,00	0,00	178.754.228,00
27-06-2024	00496/BP/723014/2024	Pungut Pajak	60.000,00	0,00	178.814.228,00
27-06-2024	00499/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	178.829.228,00
27-06-2024	00504/BP/723014/2024	pungut pajak	15.000,00	0,00	178.844.228,00
27-06-2024	00500/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	178.859.228,00
27-06-2024	00498/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	178.874.228,00
27-06-2024	00497/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	178.889.228,00
27-06-2024	00502/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	178.904.228,00
27-06-2024	00501/BP/723014/2024	Pungut Pajak	15.000,00	0,00	178.919.228,00
27-06-2024	00503/BP/723014/2024	Pungut pajak	15.000,00	0,00	178.934.228,00
27-06-2024	02346/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman berupa pekerjaan pengecatan gedung F kantor LLDIKTI Wilayah VI	0,00	16.609.063,00	162.325.165,00
27-06-2024	02373/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	2.230.000,00	160.095.165,00
27-06-2024	02356/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data PDDikti	0,00	910.000,00	159.185.165,00
27-06-2024	02355/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data PDDikti	0,00	910.000,00	158.275.165,00
27-06-2024	02353/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data PDDikti	0,00	910.000,00	157.365.165,00
27-06-2024	02354/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data PDDikti	0,00	910.000,00	156.455.165,00
27-06-2024	02352/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data PDDikti	0,00	910.000,00	155.545.165,00
27-06-2024	02357/KW/723014/2024	Pendampingan Migrasi Data PDDikti	0,00	740.000,00	154.805.165,00
27-06-2024	02358/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruasn Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	400.000,00	154.405.165,00
27-06-2024	02364/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan	0,00	300.000,00	154.105.165,00

1	2	3	4	5	6
		Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024			
27-06-2024	02366/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	153.805.165,00
27-06-2024	02361/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruasn Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	153.505.165,00
27-06-2024	02365/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	153.205.165,00
27-06-2024	02362/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruasn Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	152.905.165,00
27-06-2024	02360/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruasn Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024	0,00	300.000,00	152.605.165,00
27-06-2024	02372/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	152.305.165,00
27-06-2024	02370/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	152.005.165,00
27-06-2024	02363/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	151.705.165,00
27-06-2024	02359/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruasn Tinggi	0,00	300.000,00	151.405.165,00

1	2	3	4	5	6
		Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024			
27-06-2024	02368/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	151.105.165,00
27-06-2024	02369/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	150.805.165,00
27-06-2024	02371/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	150.505.165,00
27-06-2024	02367/KW/723014/2024	Honor Panitia dalam rangka kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024	0,00	300.000,00	150.205.165,00
27-06-2024	02350/KW/723014/2024	Biaya Tiket Berangkat a.n. Nia Indah Susilowati dalam rangka Workshop Operator Baru PDDIKTI	0,00	135.000,00	150.070.165,00
27-06-2024	02348/KW/723014/2024	Biaya Tiket Berangkat a.n. Ramadhina Febry Darmanto dan M Zaenuddin dalam rangka Workshop Operator Baru PDDIKTI	0,00	120.000,00	149.950.165,00
27-06-2024	02349/KW/723014/2024	Biaya Tiket Pulang a.n. Ramadhina Febry Darmanto dan M Zaenuddin dalam rangka Workshop Operator Baru PDDIKTI	0,00	116.000,00	149.834.165,00
27-06-2024	02345/KW/723014/2024	Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Halaman Kantor LLDIKTI Wilayah VI berupa Pembelian LED panel 9 watt, 12 watt, dan lain-lain	0,00	112.000,00	149.722.165,00
27-06-2024	02343/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI WIlayah VI berupa pembuatan stempel LLDIKTI	0,00	98.958,00	149.623.207,00
27-06-2024	02351/KW/723014/2024	Biaya Tiket Pulang a.n. Nia Indah Susilowati dalam rangka Workshop Operator Baru PDDIKTI	0,00	95.000,00	149.528.207,00
27-06-2024	02344/KW/723014/2024	Biaya keperluan sehari hari perkantoran LLDIKTI Wilayah VI berupa aqua botol mini dan gelas plastik	0,00	88.000,00	149.440.207,00
27-06-2024	02347/KW/723014/2024	Biaya Tol dalam rangka, Evaluasi Kinerja dan	0,00	74.500,00	149.365.707,00

1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Kapasitas Pegawai Semester I Tahun 2024 serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025 Dalam Rangka Fasilitasi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Ta			
28-06-2024	00505/BP/723014/2024	Pungut pajak	640.000,00	0,00	150.005.707,00
28-06-2024	00506/BP/723014/2024	Pungut Pajak	522.500,00	0,00	150.528.207,00
28-06-2024	00507/BP/723014/2024	Pungut Pajak	364.000,00	0,00	150.892.207,00
28-06-2024	02375/KW/723014/2024	Biaya Paket Meeting Fullday dalam rangka Bimbingan Teknis Verifikator SINTA Perguruan Tinggi Tahun 2024	0,00	32.000.000,00	118.892.207,00
28-06-2024	02376/KW/723014/2024	Biaya paket meeting fullday Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Pemenuhan Sarana Prasarana)	0,00	26.125.000,00	92.767.207,00
28-06-2024	02377/KW/723014/2024	Paket Meeting Fullboard Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumberdaya LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 Angkatan III	0,00	18.200.000,00	74.567.207,00
28-06-2024	02374/KW/723014/2024	Biaya Transportasi KAI dalam rangka, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APPP-PTS Tahun 2024 Gelombang 1 Tanggal 10/06/2024 s.d 11/06/2024 Kantor	0,00	2.235.000,00	72.332.207,00
30-06-2024	02379/KW/723014/2024	Biaya Transfer Antar Bank Bulan Juni 2024	0,00	485.900,00	71.846.307,00
		Jumlah	**664.676.356,00**	**781.379.962,00**	**71.846.307,00**

BENDAHARA PENGELUARAN



Norafina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 0057101300000280

Nama Rekening : RPL 026 KS LLDIKTI W

Nama Bank : Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			0,00
			0,00	0,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN

Nofalina Yodianti

NIP 198311132010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2024

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Propinsi / Kabupaten / Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG

Satuan Kerja : (723014) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG72301400-

No Rekening : 1053003521

Nama Rekening : RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Sampangan Semarang

Jenis Rekening : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			1.660.239.000,00
10-06-2024	FPK-PENG-fCoLzejh8Pd95wH	Dana PKM DIKTI TAHAP I	0,00	1.660.239.000,00	0,00
		Jumlah	**0,00**	**1.660.239.000,00**	**0,00**

BENDAHARA PENGELUARAN



Nofalina Yodianti

NIP 198311232010122002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	121F44ETQ28KEQSR 074017137058	411121	IDR	180,000	ADA
2	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	153610T7QNV0GIPU 074382137051	411121	IDR	34,000	ADA
3	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	150F17469HVQK9GV 112921137063	411121	IDR	60,000	ADA
4	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	217D04ETQ28LNMH3 139731137064	411121	IDR	15,000	ADA
5	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F4D7D00QATCQ2EA O 144398137054	411124	IDR	374,000	ADA
6	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B44371PLAIHCG19I 163720137047	411121	IDR	34,000	ADA
7	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1AC5767OPNDCN5B G 212396137052	411121	IDR	15,000	ADA
8	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9BBCB4ETQ28NQB8 N 217787137059	411124	IDR	401,222	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	24B0900QATCKC67J 247762137050	411121	IDR	13,600	ADA
10	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9FC1E0T7QNV4BDFN 301021137062	411121	IDR	15,000	ADA
11	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	92E5A0T7QNV21SVL 313570137057	411121	IDR	15,000	ADA
12	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F01D35BB9SR2N1DC 322244137060	411121	IDR	945,000	ADA
13	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	82E912M2QD3RDKD C 340831137049	411121	IDR	180,000	ADA
14	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	9B2201PLAIHHBJPG 478920137061	411121	IDR	315,000	ADA
15	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EAB223IGA7M44KT8 526380137043	411121	IDR	56,600	ADA
16	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A56EF0T7QNUVGEIF 547902137038	411121	IDR	36,800	ADA
17	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3CE3F7469HVL9V7Q 555993137044	411121	IDR	317,400	ADA
18	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F8C2567OPNDANI9K 586157137037	411121	IDR	34,000	ADA
19	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BB5395BB9SQTRFPK 612094137046	411121	IDR	36,800	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	2A3C400QATCKLD3P 639409137056	411121	IDR	40,800	ADA
21	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	0922B5BB9SQSN6KS 659218137029	411121	IDR	307,800	ADA
22	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3F2DC3IGA7M6ITQR 661238137055	411121	IDR	22,500	ADA
23	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CFDA61PLAIHJ750O 668458137065	411124	IDR	4,250	ADA
24	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	09EEC67OPND89H6Q 719627137039	411121	IDR	180,000	ADA
25	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	881B57469HVJU8PO 773806137032	411211	IDR	2,206,720	ADA
26	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	6791C3IGA7M6PFRH 820324137053	411121	IDR	20,000	ADA
27	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C783667OPND9JA4F 886587137034	411121	IDR	49,400	ADA
28	026	560965	06-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	669CA3IGA7MCALP1 956827137066	411124	IDR	420,000	ADA
29	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	702125BB9U4E876L 091943966341	411121	IDR	405,000	ADA
30	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	78E853IGA8VK7FTL 130326966317	411121	IDR	135,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A177C67OPOMONT99 131307966318	411121	IDR	15,000	ADA
32	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3815E67OPOMPS1E9 147816966345	411121	IDR	15,000	ADA
33	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BE3354ETQ3I21RV9 185108966313	411124	IDR	132,000	ADA
34	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	CBD080T7QP8FURFG 191380966333	411121	IDR	270,000	ADA
35	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A3BFA67OPOMP8R82 197224966315	411121	IDR	405,000	ADA
36	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B06F83IGA8VL9HMP 278191966335	411121	IDR	405,000	ADA
37	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A04CE67OPPCR4UFM 327218966352	411124	IDR	82,089	ADA
38	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	20BEC1PLAKGT7VCH 363027966350	411124	IDR	19,018	ADA
39	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	EA8893IGA9LLPD3A 448385966348	411124	IDR	6,551	ADA
40	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3B53C4ETQ3HV4OHK 451190966323	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
41	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	390787469J95DLFQ 457031966325	411121	IDR	405,000	ADA
42	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	AFAE02M2QED9G0QG 563962966326	411124	IDR	11,250	ADA
43	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B96B62M2QED78SBI 630866966316	411121	IDR	15,000	ADA
44	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B9C953IGA8VJU6VT 668688966324	411121	IDR	405,000	ADA
45	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	13E512M2QED6UK95 678840966320	411121	IDR	15,000	ADA
46	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	11D7E3IGA8VLPIF3 703092966328	411124	IDR	449,550	ADA
47	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	95F9F1PLAJQP7SD5 753492966330	411211	IDR	1,566,757	ADA
48	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	650805BB9U4DAUKA 755322966332	411121	IDR	15,000	ADA
49	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	E1CB667OPOMR83K2 808447966354	411124	IDR	284,865	ADA
50	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	00E377469J95VVCT 913637966329	411121	IDR	15,000	ADA
51	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	069BE4ETQ3I1DHKG 953611966337	411121	IDR	15,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
52	026	560965	20-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	991AE3IGA8VHRTU7 967267966322	411211	IDR	2,472,523	ADA
53	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	085B74ETQ4JELKNK 015180369672	411121	IDR	15,000	ADA
54	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	C5E013IGAA0VV16T 028964975567095	411211	IDR	1,991,000	ADA
55	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F7C994ETQ4JFJBOR 053261369678	411124	IDR	48,163	ADA
56	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	8EDC71PLAKS96TJ1 054714369676	411121	IDR	15,000	ADA
57	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	D66F63IGAA11T3FL 075590369674	411121	IDR	15,000	ADA
58	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	3A59E1PLAKSAKOCS 147447369662	411124	IDR	780,000	ADA
59	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	F4E973IGAA1256C8 162768369655	411121	IDR	15,000	ADA
60	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B79DC7469KAK7Q4E 497467369685	411121	IDR	270,000	ADA
61	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	B6B584ETQ4JFN4VC 541460369660	411124	IDR	455,321	ADA
62	019	662791	21-Jun-24	ANEKA SAKTI BAKTI (ASABA) 013069422073000	F4A3B2M2QFEMFO7 N 646126369680	411122	IDR	271,500	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
63	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	BBAAD0T7QQ9T5LID 657537369670	411121	IDR	15,000	ADA
64	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	1DAE05BB9V5OCLMJ 698585369656	411211	IDR	264,897	ADA
65	026	560965	21-Jun-24	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TIN 952286425517000	A32663IGAA12G4US 739311369663	411121	IDR	270,000	ADA
TOTAL								18,330,376	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 01-07-2024 09:28:00 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 01-07-2024 09:28:00 WIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Semarang I - 026

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198311132010122002 pada 01-07-2024 09:28:00 WIB.

Report Satker

Tanggal	:2024-06-01 - 2024-06-30	Total Mutasi	
Kementerian	:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023)	Debit	: 786,318,179.00
Eselon	:SEKRETARIAT JENDERAL (01)	Kredit	: 669,614,573.00
Satker	:LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG (723014)	Saldo Akhir	: 71,846,307.00
Rekening Induk	:RKK SETJEN KEMENDIKBUD OPS (1220010692575)		
Rekening Satker	:BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG (8100127230141000)		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
01-06-2024	09:26:26	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406010757678152	188,549,913.00	10,118,800.00	0.00	178,431,113.00		
01-06-2024	09:26:27	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406010757678152	178,431,113.00	5,800.00	0.00	178,425,313.00		
03-06-2024	13:17:45	Transfer Credit SPAN | Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2024 Untuk 1 | SPAN 240261506000234000001	178,425,313.00	0.00	8,137,700.00	186,563,013.00		
03-06-2024	15:33:52	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406031532637663	186,563,013.00	38,019,714.00	0.00	148,543,299.00		
03-06-2024	15:33:53	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406031532637663	148,543,299.00	2,900.00	0.00	148,540,399.00		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
03-06-2024	16:08:20	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406031606684393	148,540,399.00	60,730,844.00	0.00	87,809,555.00		
03-06-2024	16:08:21	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406031606684393	87,809,555.00	11,600.00	0.00	87,797,955.00		
05-06-2024	11:35:14	MCM UBP Payment VA | KE | UBP60212399902FFFFFF422 163295000	87,797,955.00	2,226,661.00	0.00	85,571,294.00		
05-06-2024	11:35:14	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406051132688913	85,571,294.00	46,713,697.00	0.00	38,857,597.00		
05-06-2024	11:35:15	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406051132688913	38,857,597.00	17,400.00	0.00	38,840,197.00		
05-06-2024	14:59:18	Transfer Credit SPAN | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl | SPAN 240261302004669000001	38,840,197.00	0.00	115,139,540.00	153,979,737.00		
05-06-2024	15:03:13	Transfer Credit SPAN | Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl | SPAN 240261302004668000001	153,979,737.00	0.00	103,431,797.00	257,411,534.00		
06-06-2024	07:11:38	New Mandiri Online Trf VA | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG | Pengemb Honor Narsum Acad Leader	257,411,534.00	0.00	5,985,000.00	263,396,534.00		
06-06-2024	08:55:08	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406060847951699	263,396,534.00	26,371,762.00	0.00	237,024,772.00		
06-06-2024	08:55:09	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406060847951699	237,024,772.00	116,000.00	0.00	236,908,772.00		
06-06-2024	08:55:11	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133315 | UBP Summary 202406060848952460	236,908,772.00	6,329,892.00	0.00	230,578,880.00		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
06-06-2024	10:41:37	| 0599102818622601 0599102818622601_202406 | RTR-002-01-202406060847951699-Susiloha	230,578,880.00	0.00	294,689.00	230,873,569.00		
06-06-2024	15:24:31	MCM InhouseTrf VA | KE 1350050403029 | ST 303 Hotel 202406061520533943	230,873,569.00	800,000.00	0.00	230,073,569.00		
06-06-2024	15:24:34	MCM InhouseTrf VA | KE 1370016520195 | ST 307 Hotel 202406061521534369	230,073,569.00	600,000.00	0.00	229,473,569.00		
07-06-2024	07:21:41	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406070716787000	229,473,569.00	5,800.00	0.00	229,467,769.00		
07-06-2024	07:21:41	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406070716787000	229,467,769.00	10,874,000.00	0.00	218,593,769.00		
07-06-2024	10:28:31	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406071025511558	218,593,769.00	1,974,500.00	0.00	216,619,269.00		
07-06-2024	10:28:33	MCM Outw SKN (VA) | KE 5045091969 | ST 312 Hotel 202406070914884618	216,619,269.00	2,254,500.00	0.00	214,364,769.00		
07-06-2024	10:28:33	MCM Outw SKN (VA) | KE 5045091969 | Clearing Fee 202406070914884618	214,364,769.00	2,900.00	0.00	214,361,869.00		
07-06-2024	10:28:37	MCM Outw SKN (VA) | KE 1021008334 | Sewa Round Table 202406070929906266	214,361,869.00	2,359,994.00	0.00	212,001,875.00		
07-06-2024	10:28:37	MCM Outw SKN (VA) | KE 1021008334 | Clearing Fee 202406070929906266	212,001,875.00	2,900.00	0.00	211,998,975.00		
07-06-2024	10:40:59	| 0599102825021701 0599102825021701 06/07/ | RTR-014-01-202406070716787000-Dwi Anugr	211,998,975.00	0.00	1,310,000.00	213,308,975.00		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
10-06-2024	08:16:55	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 20240610075074567 3	213,308,975.00	13,371,000.00	0.00	199,937,975.00		
10-06-2024	08:16:55	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 20240610052670873 2	199,937,975.00	532,952.00	0.00	199,405,023.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | UBP60214003502FFFFFF143 422111050	199,405,023.00	1,071,150.00	0.00	198,333,873.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | 20240610052370871 0 /9910000002106	198,333,873.00	2,500.00	0.00	198,331,373.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | UBP60213030502FFFFFF523 013280785	198,331,373.00	1,063,906.00	0.00	197,267,467.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | 20240610051670780 7 /9910000006891	197,267,467.00	3,500.00	0.00	197,263,967.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | UBP60213030502FFFFFF523 013044430	197,263,967.00	396,000.00	0.00	196,867,967.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | UBP60213030502FFFFFF523 012307734	196,867,967.00	5,228,128.00	0.00	191,639,839.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | 20240610051670780 3 /9910000006891	191,639,839.00	3,500.00	0.00	191,636,339.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | 20240610051870444 4 /9910000006891	191,636,339.00	3,500.00	0.00	191,632,839.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | UBP60213030502FFFFFF523 011392634	191,632,839.00	16,436,127.00	0.00	175,196,712.00		
10-06-2024	08:16:56	MCM UBP Payment VA | KE | 20240610051970785 4 /9910000006891	175,196,712.00	3,500.00	0.00	175,193,212.00		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
10-06-2024	08:16:56	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406100750745673	175,193,212.00	2,900.00	0.00	175,190,312.00		
10-06-2024	12:56:30	MCM UBP Payment VA | KE | UBP60214003502FFFFFF143 422110530	175,190,312.00	982,350.00	0.00	174,207,962.00		
10-06-2024	12:56:30	MCM UBP Payment VA | KE | 202406101103585104 /9910000002106	174,207,962.00	2,500.00	0.00	174,205,462.00		
10-06-2024	12:56:31	MCM Outw SKN (VA) | KE 0473081544 | ST 309 Hotel 202406101059575333	174,205,462.00	7,266,000.00	0.00	166,939,462.00		
10-06-2024	12:56:31	MCM Outw SKN (VA) | KE 0473081544 | Clearing Fee 202406101059575333	166,939,462.00	2,900.00	0.00	166,936,562.00		
10-06-2024	12:56:35	MCM Outw SKN (VA) | KE 8030566832 | ST 283 202406101119620575	166,936,562.00	1,310,000.00	0.00	165,626,562.00		
10-06-2024	12:56:35	MCM Outw SKN (VA) | KE 8030566832 | Clearing Fee 202406101119620575	165,626,562.00	2,900.00	0.00	165,623,662.00		
10-06-2024	13:17:43	Transfer Credit SPAN | Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke | SPAN 240261302004855000001	165,623,662.00	0.00	48,664,318.00	214,287,980.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084564	214,287,980.00	2,815,000.00	0.00	211,472,980.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084549	211,472,980.00	4,118,003.00	0.00	207,354,977.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF434 0750300084606	207,354,977.00	1,350,000.00	0.00	206,004,977.00		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF4340750300084556	206,004,977.00	1,455,068.00	0.00	204,549,909.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF4340750300085108	204,549,909.00	2,433,371.00	0.00	202,116,538.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF4895940300048201	202,116,538.00	28,292,969.00	0.00	173,823,569.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF4340750300084598	173,823,569.00	7,221,000.00	0.00	166,602,569.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF4340750300084655	166,602,569.00	10,500,000.00	0.00	156,102,569.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF6032987100007480	156,102,569.00	1,800,000.00	0.00	154,302,569.00		
10-06-2024	14:23:22	MCM UBP Payment VA 2L | KE | UBP60212000602FFFFFF4340750300084580	154,302,569.00	4,333,249.00	0.00	149,969,320.00		
10-06-2024	14:29:52	Transfer Credit SPAN | Penggantian Uang Persediaan KKP Untuk Ke | SPAN 240261302004856000001	149,969,320.00	0.00	15,762,000.00	165,731,320.00		
11-06-2024	08:02:54	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406110641917044	165,731,320.00	2,900.00	0.00	165,728,420.00		
11-06-2024	08:02:54	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406110641917044	165,728,420.00	24,065,678.00	0.00	141,662,742.00		
11-06-2024	11:52:52	MCM Outw SKN (VA) | KE 1021008334 | Konsumsi 202406111150674733	141,662,742.00	22,310,743.00	0.00	119,351,999.00		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
11-06-2024	11:52:52	MCM Outw SKN (VA) | KE 1021008334 | Clearing Fee 202406111150674733	119,351,999.00	2,900.00	0.00	119,349,099.00		
11-06-2024	11:52:55	MCM Outw SKN (VA) | KE 2460112489 | Seminar Kit 202406111041588210	119,349,099.00	17,828,500.00	0.00	101,520,599.00		
11-06-2024	11:52:55	MCM Outw SKN (VA) | KE 2460112489 | Clearing Fee 202406111041588210	101,520,599.00	2,900.00	0.00	101,517,699.00		
11-06-2024	12:57:37	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406111238712506	101,517,699.00	53,310,874.00	0.00	48,206,825.00		
11-06-2024	12:57:38	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406111238712506	48,206,825.00	26,100.00	0.00	48,180,725.00		
11-06-2024	13:41:11	| 0599102843209501 0599102843209501 06/11/ | RTR-014-01-202406111041588210-ANEKA SAR	48,180,725.00	0.00	17,828,500.00	66,009,225.00		
12-06-2024	10:41:20	MCM Outw SKN (VA) | KE 2460112489 | 202406121037824471	66,009,225.00	17,828,500.00	0.00	48,180,725.00		
12-06-2024	10:41:20	MCM Outw SKN (VA) | KE 2460112489 | Clearing Fee 202406121037824471	48,180,725.00	2,900.00	0.00	48,177,825.00		
12-06-2024	11:22:07	Transfer Credit SPAN | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl | SPAN 240261302004970000001	48,177,825.00	0.00	52,632,721.00	100,810,546.00		
12-06-2024	11:23:20	Transfer Credit SPAN | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl | SPAN 240261302004969000001	100,810,546.00	0.00	97,957,435.00	198,767,981.00		
14-06-2024	07:19:28	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406140709572988	198,767,981.00	29,000.00	0.00	198,738,981.00		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
14-06-2024	07:19:28	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406140709572988	198,738,981.00	30,945,387.00	0.00	167,793,594.00		
14-06-2024	07:19:29	MCM Outw SKN (VA) | KE 674201021201536 | Retur Perjadin 202406140711573256	167,793,594.00	294,689.00	0.00	167,498,905.00		
14-06-2024	07:19:29	MCM Outw SKN (VA) | KE 674201021201536 | Clearing Fee 202406140711573256	167,498,905.00	2,900.00	0.00	167,496,005.00		
14-06-2024	07:24:05	MCM InhouseTrf VA | KE BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG | Refund 202406140709572988	167,496,005.00	0.00	390,000.00	167,886,005.00		
14-06-2024	07:27:48	MCM Outw SKN (VA) | KE 017301060803500 | Honor Eval Sem 1 202406140725579816	167,886,005.00	4,700,000.00	0.00	163,186,005.00		
14-06-2024	07:27:48	MCM Outw SKN (VA) | KE 017301060803500 | Clearing Fee 202406140725579816	163,186,005.00	2,900.00	0.00	163,183,105.00		
14-06-2024	12:24:45	MCM Outw SKN (VA) | KE 003401084438501 | Perjadin 202406141221991206	163,183,105.00	390,000.00	0.00	162,793,105.00		
14-06-2024	12:24:45	MCM Outw SKN (VA) | KE 003401084438501 | Clearing Fee 202406141221991206	162,793,105.00	2,900.00	0.00	162,790,205.00		
14-06-2024	12:24:47	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406141217987954	162,790,205.00	130,500.00	0.00	162,659,705.00		
14-06-2024	12:24:47	MCM InhouseTrf VA | KE 9910000133349 | 202406141217987954	162,659,705.00	64,497,374.00	0.00	98,162,331.00		
14-06-2024	15:40:46	| 0599102864938201 0599102864938201_202406 | RTR-002-01-202406141217987954-Mohamad A	98,162,331.00	0.00	260,000.00	98,422,331.00		

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
14-06-2024	15:40:48	| 0599102864934601 0599102864934601 | RTR-113-02-20240614121798795 4-Amin Purw	98,422,331.00	0.00	1,130,000.00	99,552,331.00		
20-06-2024	09:59:58	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133315 | UBP Summary 20240620095692081 7	99,552,331.00	7,574,603.00	0.00	91,977,728.00	MCM	
21-06-2024	08:52:56	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302005308000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	91,977,728.00	0.00	141,332,486.00	233,310,214.00	MCM	
21-06-2024	08:55:49	Transfer Credit SPAN | SPAN 240261302005307000001 | Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperl	233,310,214.00	0.00	57,123,387.00	290,433,601.00	MCM	
21-06-2024	15:27:00	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406211517801473	290,433,601.00	60,900.00	0.00	290,372,701.00	MCM	
21-06-2024	15:27:00	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | 202406211517801473	290,372,701.00	73,998,960.00	0.00	216,373,741.00	MCM	
21-06-2024	15:27:01	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133315 | UBP Summary 202406211518803460	216,373,741.00	4,425,881.00	0.00	211,947,860.00	MCM	
24-06-2024	09:55:38	MCM Outw SKN (VA) | TRF|KE 2003213512 | Retur Asist Mengajar202406240953614840	211,947,860.00	260,000.00	0.00	211,687,860.00	MCM	
24-06-2024	09:55:38	MCM Outw SKN (VA) | CHG|Clearing Fee | Clearing Fee 202406240953614840	211,687,860.00	2,900.00	0.00	211,684,960.00	MCM	
24-06-2024	09:55:41	MCM Outw SKN (VA) | TRF|KE 3120016325 | Retur Perjadin Asist202406240950612847	211,684,960.00	1,130,000.00	0.00	210,554,960.00	MCM	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
24-06-2024	09:55:41	MCM Outw SKN (VA) | CHG|Clearing Fee | Clearing Fee 202406240950612847	210,554,960.00	2,900.00	0.00	210,552,060.00	MCM	
25-06-2024	07:59:29	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406250439564575	210,552,060.00	2,900.00	0.00	210,549,160.00	MCM	
25-06-2024	07:59:29	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | 202406250439564575	210,549,160.00	22,078,637.00	0.00	188,470,523.00	MCM	
25-06-2024	08:56:34	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406250855719581	188,470,523.00	11,600.00	0.00	188,458,923.00	MCM	
25-06-2024	08:56:34	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | 202406250855719581	188,458,923.00	16,600,000.00	0.00	171,858,923.00	MCM	
26-06-2024	08:46:14	New Mandiri Online Trf VA | TRF|DARI 1220007068821 | Refund kelebihan tiket KA	171,858,923.00	0.00	2,235,000.00	174,093,923.00	OTHERS	
27-06-2024	10:24:20	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | 202406270935800345	174,093,923.00	27,443,316.00	0.00	146,650,607.00	MCM	
27-06-2024	10:24:21	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406270935800345	146,650,607.00	2,900.00	0.00	146,647,707.00	MCM	
28-06-2024	14:53:55	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | 202406281335670577	146,647,707.00	74,798,500.00	0.00	71,849,207.00	MCM	
28-06-2024	14:53:56	MCM InhouseTrf VA | TRF|KE 9910000133349 | Transaction Fee 202406281335670577	71,849,207.00	2,900.00	0.00	71,846,307.00	MCM	

Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang
Jawa Tengah
Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Tuesday 30 April
Reference 1714460505656

Laporan Saldo Rekening

Kota Semarang
RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG

Total Saldo : Rp. 0

No	CIF	Rekening	Nama Rekening	Cabang	Saldo
1	03734254	1053003521	RPL 026 LLDIKTI WIL VI SMG	CAPEM SAMPANGAN	0

Account Statement

Company	:	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
Account	:	0057101300000280 - RPL 026 KS LLDIKTI W
Account Organization Unit	:	KCP SAMPANGAN
Period	:	06-2024
Starting Balance	:	IDR 1,660,239,000.00
Ending Balance	:	IDR 0.00
Total Transaction Debit	:	61
Total Transaction Credit	:	1
Page	:	1 of 2

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
1	06/06	14:30:51	06/06	14:30:51	240881304000861000001	0.00	22,400,000.00	1,682,639,000.00	24060696639996118962
2	10/06	12:15:40	10/06	12:15:40	PKM DIKTI THP 1Universitas Duta Bangsa S 2024061099666017	15,840,000.00	0.00	1,666,799,000.00	24061096039990015704
3	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1Universitas Muhammadiyah 202406101416551321	194,400,000.00	0.00	1,472,399,000.00	24061096039990015705
4	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1Universitas Dian Nuswanto 2024061099665997	150,255,000.00	0.00	1,322,144,000.00	24061096029990015701
5	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1Institut Teknologi Telkom 202406101416552508	127,503,000.00	0.00	1,194,641,000.00	24061096049990015722
6	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1Universitas Muhammadiyah 20240610695662571	69,669,000.00	0.00	1,124,972,000.00	24061096029990015702
7	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1Universitas Semarang 2024061099665995	16,515,000.00	0.00	1,108,457,000.00	24061096059990015703
8	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1STIKES Ibnu Sina Ajibaran 20240610695662573	7,290,000.00	0.00	1,101,167,000.00	24061096019990015706
9	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1Universitas Nasional Kara 20240610695662614	6,525,000.00	0.00	1,094,642,000.00	24061096079990015711
10	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1Sekolah Tinggi Ilmu Keseh 20240610695662616	5,625,000.00	0.00	1,089,017,000.00	24061096069990015709
11	10/06	12:15:41	10/06	12:15:41	PKM DIKTI THP 1Universitas Wahid Hasyim 20240610695662618	5,400,000.00	0.00	1,083,617,000.00	24061096049990015721
12	10/06	12:15:42	10/06	12:15:42	PKM DIKTI THP 1Universitas Muhammadiyah 202406101416552510	7,614,000.00	0.00	1,076,003,000.00	24061096059990015704
13	10/06	12:15:43	10/06	12:15:43	PKM DIKTI THP 1Universitas Islam Sultan 202406101416552514	92,025,000.00	0.00	983,978,000.00	24061096079990015712
14	10/06	12:15:43	10/06	12:15:43	PKM DIKTI THP 1Universitas Pekalongan 202406101416552512	5,760,000.00	0.00	978,218,000.00	24061096069990015710
15	10/06	12:15:44	10/06	12:15:44	PKM DIKTI THP 1Universitas Widya Dharma 20240610788365353	7,065,000.00	0.00	971,153,000.00	24061096059990015706
16	10/06	12:15:45	10/06	12:15:45	PKM DIKTI THP 1Universitas Ngudi Waluyo 20240610788365351	13,815,000.00	0.00	957,338,000.00	24061096039990015706
17	10/06	12:15:45	10/06	12:15:45	PKM DIKTI THP 1Universitas Amikom Purwok 20240610788365371	12,465,000.00	0.00	944,873,000.00	24061096039990015707
18	10/06	12:15:45	10/06	12:15:45	PKM DIKTI THP 1Universitas Kristen Satya 20240610788365349	12,420,000.00	0.00	932,453,000.00	24061096029990015704
19	10/06	12:15:45	10/06	12:15:45	PKM DIKTI THP 1Universitas Nahdlatul Ula 20240610788365394	8,010,000.00	0.00	924,443,000.00	24061096059990015705
20	10/06	12:15:45	10/06	12:15:45	PKM DIKTI THP 1Universitas Peradaban 202406101323848521	6,525,000.00	0.00	917,918,000.00	24061096049990015723
21	10/06	12:15:46	10/06	12:15:46	PKM DIKTI THP 1Universitas Muhammadiyah 202406101323848525	93,168,000.00	0.00	824,750,000.00	24061096019990015707
22	10/06	12:15:46	10/06	12:15:46	PKM DIKTI THP 1STIKES Telogorejo Semaran 202406101323848570	10,800,000.00	0.00	813,950,000.00	24061096059990015707
23	10/06	12:15:46	10/06	12:15:46	PKM DIKTI THP 1Universitas Tunas Pembang 202406101323848527	7,425,000.00	0.00	806,525,000.00	24061096029990015705
24	10/06	12:15:46	10/06	12:15:46	PKM DIKTI THP 1Universitas Stikubank 202406101323848523	5,400,000.00	0.00	801,125,000.00	24061096069990015711
25	10/06	12:15:47	10/06	12:15:47	PKM DIKTI THP 1Institut Teknologi Keseha 20240610858904854	12,690,000.00	0.00	788,435,000.00	24061096059990015708
26	10/06	12:15:47	10/06	12:15:47	PKM DIKTI THP 1Sekolah Tinggi Ilmu Farma 20240610858904834	6,750,000.00	0.00	781,685,000.00	24061096069990015712
27	10/06	12:15:47	10/06	12:15:47	PKM DIKTI THP 1Universitas Ivet 202406101323848568	6,750,000.00	0.00	774,935,000.00	24061096079990015713
28	10/06	12:15:47	10/06	12:15:47	PKM DIKTI THP 1Universitas Slamet Riyadi 20240610858904856	6,075,000.00	0.00	768,860,000.00	24061096019990015708
29	10/06	12:15:48	10/06	12:15:48	PKM DIKTI THP 1Universitas Muhammadiyah 20240610858904852	7,200,000.00	0.00	761,660,000.00	24061096079990015714
30	10/06	12:15:49	10/06	12:15:49	PKM DIKTI THP 1Universitas 'Aisyiyah Sur 202406101253309042	6,552,000.00	0.00	755,108,000.00	24061096059990015709
31	10/06	12:15:49	10/06	12:15:49	PKM DIKTI THP 1Universitas Putra Bangsa 20240610858904850	5,985,000.00	0.00	749,123,000.00	24061096029990015706
32	10/06	12:15:49	10/06	12:15:49	PKM DIKTI THP 1Universitas Nahdlatul Ula 202406101253309083	5,850,000.00	0.00	743,273,000.00	24061096069990015713
33	10/06	12:15:50	10/06	12:15:50	PKM DIKTI THP 1Universitas Setia Budi 202406101253309085	25,155,000.00	0.00	718,118,000.00	24061096079990015715
34	10/06	12:15:51	10/06	12:15:51	PKM DIKTI THP 1Universitas Pancasakti Te 202406101253309087	6,075,000.00	0.00	712,043,000.00	24061096069990015714
35	10/06	12:15:51	10/06	12:15:51	PKM DIKTI THP 1Universitas Pignatelli Tr 20240610929444337	5,670,000.00	0.00	706,373,000.00	24061096049990015724
36	10/06	12:15:51	10/06	12:15:51	PKM DIKTI THP 1Sekolah Tinggi Ilmu Ekono 20240610929444335	5,625,000.00	0.00	700,748,000.00	24061096069990015715
37	10/06	12:15:51	10/06	12:15:51	PKM DIKTI THP 1Universitas Muhammadiyah 202406101253309065	5,400,000.00	0.00	695,348,000.00	24061096019990015709
38	10/06	12:15:52	10/06	12:15:52	PKM DIKTI THP 1Universitas Muhammadiyah 20240610929444339	127,188,000.00	0.00	568,160,000.00	24061096029990015707
39	10/06	12:15:52	10/06	12:15:52	PKM DIKTI THP 1Universitas PGRI Semarang 20240610929444333	94,140,000.00	0.00	474,020,000.00	24061096019990015710
40	10/06	12:15:52	10/06	12:15:52	PKM DIKTI THP 1Universitas Islam Nahdlat 20240610929444292	61,101,000.00	0.00	412,919,000.00	24061096039990015708
41	10/06	12:15:52	10/06	12:15:52	PKM DIKTI THP 1Universitas Sahid Surakar 202406101182769602	13,995,000.00	0.00	398,924,000.00	24061096059990015710

Account Statement

Company	:	LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
Account	:	0057101300000280 - RPL 026 KS LLDIKTI W
Account Organization Unit	:	KCP SAMPANGAN
Period	:	06-2024
Starting Balance	:	IDR 1,660,239,000.00
Ending Balance	:	IDR 0.00
Total Transaction Debit	:	61
Total Transaction Credit	:	1
Page	:	2 of 2

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
42	10/06	12:15:53	10/06	12:15:53	PKM DIKTI THP 1Universitas Muria Kudus 20240610118276960O	156,186,000.00	0.00	242,738,000.00	24061096049990015725
43	10/06	12:15:53	10/06	12:15:53	PKM DIKTI THP 1Universitas Muhammadiyah 20240610118276958O	6,534,000.00	0.00	236,204,000.00	24061096069990015716
44	10/06	12:15:53	10/06	12:15:53	PKM DIKTI THP 1Sekolah Tinggi Ilmu Keseh 20240610118276958 4	6,300,000.00	0.00	229,904,000.00	24061096049990015726
45	10/06	12:15:54	10/06	12:15:54	PKM DIKTI THP 1Universitas Al-Irsyad Cil 20240610999983818	29,025,000.00	0.00	200,879,000.00	24061096019990015711
46	10/06	12:15:54	10/06	12:15:54	PKM DIKTI THP 1Institut Teknologi Sains 20240610999983820	6,660,000.00	0.00	194,219,000.00	24061096059990015711
47	10/06	12:15:55	10/06	12:15:55	PKM DIKTI THP 1Sekolah Tinggi Ilmu Keseh 20240610999983777	5,400,000.00	0.00	188,819,000.00	24061096059990015712
48	10/06	12:15:55	10/06	12:15:55	PKM DIKTI THP 1STIKES Mitra Husada Karan 20240610118276958 2	5,400,000.00	0.00	183,419,000.00	24061096069990015717
49	10/06	12:16:02	10/06	12:16:02	PKM DIKTI IUniversitas Veteran Bangun Nu 20240610166566439 2	20,259,000.00	0.00	163,160,000.00	24061096049990015729
50	10/06	12:16:02	10/06	12:16:02	PKM DIKTI IInstitut Teknologi Dan Sains 20240610166566439 6	5,400,000.00	0.00	157,760,000.00	24061096039990015711
51	10/06	12:16:03	10/06	12:16:03	PKM DIKTI IInstitut Teknologi Sains dan 20240610166566434 9	31,068,000.00	0.00	126,692,000.00	24061096069990015721
52	10/06	12:16:03	10/06	12:16:03	PKM DIKTI IUniversitas Kusuma Husada Sur 20240610517089772	6,885,000.00	0.00	119,807,000.00	24061096059990015715
53	10/06	12:16:04	10/06	12:16:04	PKM DIKTI IUniversitas Sains Alqur an 20240610166566435 1	30,978,000.00	0.00	88,829,000.00	24061096069990015722
54	10/06	12:16:04	10/06	12:16:04	PKM DIKTI IUniversitas 17 Agustus 1945 S 20240610166566439 4	7,200,000.00	0.00	81,629,000.00	24061096029990015711
55	10/06	12:16:04	10/06	12:16:04	PKM DIKTI IUniversitas Katolik Soegijapr 20240610446549523	6,300,000.00	0.00	75,329,000.00	24061096019990015715
56	10/06	12:16:04	10/06	12:16:04	PKM DIKTI IUniversitas Muhammadiyah Peka 20240610517089008	5,814,000.00	0.00	69,515,000.00	24061096039990015712
57	10/06	12:16:04	10/06	12:16:04	PKM DIKTI ISTMIK Widya Utama 20240610446549521	5,400,000.00	0.00	64,115,000.00	24061096049990015730
58	10/06	12:16:04	10/06	12:16:04	PKM DIKTI IUniversitas Harapan Bangsa 20240610517089006	5,400,000.00	0.00	58,715,000.00	24061096059990015716
59	14/06	07:21:52	14/06	07:21:52	DANA PKM DIKTI I 20240614726870497	5,400,000.00	0.00	53,315,000.00	24061496029990015181
60	20/06	09:21:44	20/06	09:21:44	DANA PKM DIKTI 1 20240620727975518	30,915,000.00	0.00	22,400,000.00	24062096049990015075
61	25/06	09:53:32	25/06	09:53:32	DANA PKM VOKASI THP 1 20240625332443761	9,600,000.00	0.00	12,800,000.00	24062596029990015945
62	25/06	09:53:35	25/06	09:53:35	DANA PKM VOKASI THP 1 20240625201649998 8	12,800,000.00	0.00	0.00	24062596069990015955
				Total		**1,682,639,000.00**	**22,400,000.00**		



LLDIKTI WILAYAH VI

SSPB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
16-07-2024 19:53:18

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702403050580444

Pembuat Billing
NOFALINA YODIANTI, SE

NTPN
4A72B5UFPJ8FHAES

Tanggal Billing
05-03-2024 15:00:33

Kementerian / Lembaga
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NTB
061332776204

Tanggal Kadaluwarsa
12-03-2024 15:00:33

Unit Eselon I
01 - SEKRETARIAT JENDERAL

Tanggal Bayar
08-03-2024 07:48:47

Status
Sudah dibayar

Satuan Kerja
723014 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Bank/ Pos Bayar
BANK CIMB NIAGA

Keterangan
Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Februari 2024 a.n Ramos Somya (PTS : UKSW Salatiga)

Kanal Bayar
7014 - Internet Banking

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG NPWP 952286425517000	**Kab/ Kota KOTA SEMARANG** Periode FEBRUARI 2024	**511521** 02301DK.4472BEJ	**3.356.200,00**

Total Disetor **IDR 3.356.200,00**

(Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
16-07-2024 19:54:06

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702403050580385

Pembuat Billing
NOFALINA YODIANTI, SE

NTPN
699C345KPU3MNAD1

Tanggal Billing
05-03-2024 14:56:00

Kementerian/ Lembaga
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NTB
061332776924

Tanggal Kadaluwarsa
12-03-2024 14:56:00

Unit Eselon I
01 - SEKRETARIAT JENDERAL

Tanggal Bayar
08-03-2024 07:48:49

Status
Sudah dibayar

Satuan Kerja
723014 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Bank/ Pos Bayar
BANK CIMB NIAGA

Keterangan
Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Februari 2024 a.n Jacob Daan Engel (PTS : UKSW Salatiga)

Kanal Bayar
7014 - Internet Banking

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG NPWP 952286425517000	**Kab/ Kota KOTA SEMARANG** Periode FEBRUARI 2024	**511521** 02301DK.4472BEJ	**3.839.200,00**

Total Disetor **IDR 3.839.200,00**

(Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
16-07-2024 19:54:24

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702403180619586

Pembuat Billing
NOFALINA YODIANTI, SE

NTPN
0ADDF1GCAEGDGPQ2

Tanggal Billing
18-03-2024 10:29:20

Kementerian / Lembaga
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NTB
000000705552

Tanggal Kadaluwarsa
25-03-2024 10:29:20

Unit Eselon I
01 - SEKRETARIAT JENDERAL

Tanggal Bayar
19-03-2024 14:48:42

Status
Sudah dibayar

Satuan Kerja
723014 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Bank/ Pos Bayar
BANK NEGARA INDONESIA

Keterangan
Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Januari 2024 a.n Fitria Fatichatul Hidayah PTS : Universitas Muhammadiyah Semarang (NIDN : 0601068701)

Kanal Bayar
7015 - Mobile Banking

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG NPWP 952286425517000	**Kab/ Kota KOTA SEMARANG** Periode JANUARI 2024	**511521** 02301DK.4472BEJ	**2.832.425,00**

Total Disetor **IDR 2.832.425,00**

(Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
16-07-2024 19:54:42

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702403180619674

Pembuat Billing
NOFALINA YODIANTI, SE

NTPN
F66192CPQ92PTPSQ

Tanggal Billing
18-03-2024 10:33:32

Kementerian / Lembaga
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NTB
FT240802RKGL

Tanggal Kadaluwarsa
25-03-2024 10:33:32

Unit Eselon I
01 - SEKRETARIAT JENDERAL

Tanggal Bayar
20-03-2024 12:43:53

Status
Sudah dibayar

Satuan Kerja
723014 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Bank/ Pos Bayar
BANK SYARIAH INDONESIA

Keterangan
Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Februari 2024 a.n Ayu Novianti Hanum PTS : Universitas Muhammadiyah Semarang (NIDN : 0623118001)

Kanal Bayar
7012 - Teller

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG NPWP 952286425517000	**Kab/ Kota KOTA SEMARANG** Periode FEBRUARI 2024	**511153** 02301WA.6392EBA	**3.122.650,00**

Total Disetor **IDR 3.122.650,00**

(Tiga Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
16-07-2024 19:55:07

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702403050580367

Pembuat Billing
NOFALINA YODIANTI, SE

NTPN
2AFE35UFPJ8FHACF

Tanggal Billing
05-03-2024 14:54:31

Kementerian / Lembaga
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NTB
061332776187

Tanggal Kadaluwarsa
12-03-2024 14:54:31

Unit Eselon I
01 - SEKRETARIAT JENDERAL

Tanggal Bayar
08-03-2024 07:48:47

Status
Sudah dibayar

Satuan Kerja
723014 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Bank/ Pos Bayar
BANK CIMB NIAGA

Keterangan
Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Januari 2024 a.n Jacob Daan Engel (PTS : UKSW Salatiga)

Kanal Bayar
7014 - Internet Banking

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG NPWP 952286425517000	**Kab/ Kota KOTA SEMARANG** Periode JANUARI 2024	**511521** 02301DK.4472BEJ	**3.839.200,00**

Total Disetor **IDR 3.839.200,00**

(Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
16-07-2024 19:55:10

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702403180619655

Pembuat Billing
NOFALINA YODIANTI, SE

NTPN
4DDCA7NAP8H4BPS7

Tanggal Billing
18-03-2024 10:32:19

Kementerian / Lembaga
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NTB
FT240800CWS4

Tanggal Kadaluwarsa
25-03-2024 10:32:19

Unit Eselon I
01 - SEKRETARIAT JENDERAL

Tanggal Bayar
20-03-2024 12:43:31

Status
Sudah dibayar

Satuan Kerja
723014 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Bank/ Pos Bayar
BANK SYARIAH INDONESIA

Keterangan
Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Januari 2024 a.n Ayu Novianti Hanum PTS : Universitas Muhammadiyah Semarang (NIDN : 0623118001)

Kanal Bayar
7012 - Teller

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG NPWP 952286425517000	**Kab/ Kota KOTA SEMARANG** Periode JANUARI 2024	**511153** 02301WA.6392EBA	**3.122.650,00**

Total Disetor **IDR 3.122.650,00**

(Tiga Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240131252301
Tanggal Billing	:	31-01-2024 14:48:25
Tanggal Kedaluwarsa	:	07-02-2024 14:48:25
Tanggal Bayar	:	**31-01-2024 14:59:56**
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	**BANK MANDIRI**
Channel Bayar	:	***Mobile Banking***
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	4.932.000 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**332926214795**
NTPN	:	**C532E1JNFUN6RO2D**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	:	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	:	4.932.000 (IDR)
Keterangan	:	Sewa Kantin LLDIKTI Wilayah VI untuk Periode 7 Februari 2024 s.d 6 Februari 2025



LLDIKTI WILAYAH VI

SSBP

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240228409067
Tanggal Billing	:	28-02-2024 11:45:24
Tanggal Kedaluwarsa	:	06-03-2024 11:45:24
Tanggal Bayar	:	**28-02-2024 22:06:36**
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	**BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar	:	***Mobile Banking***
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	16.994.550 (IDR)
Terbilang	:	*Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000360679**
NTPN	:	**423F97QLUOQQBNNB**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	16.994.550 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Non PNS September 2021 sd Februari 2022 a.n Muchamad Arif Agung N (UNWAHAS)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240305176546
Tanggal Billing	:	05-03-2024 15:07:12
Tanggal Kedaluwarsa	:	12-03-2024 15:07:12
Tanggal Bayar	:	**08-03-2024 07:48:49**
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	**BANK CIMB NIAGA**
Channel Bayar	:	***Internet Banking***
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	19.221.825 (IDR)
Terbilang	:	*Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**061332776953**
NTPN	:	**C62AF2G4VPEP4FV2**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	19.221.825 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Periode September 2022 s.d Februari 2023 dan September 2023 a.n Tri Nova Hasti Yunianta (PTS : UKSW Salatiga)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240318362114
Tanggal Billing	:	18-03-2024 09:25:07
Tanggal Kedaluwarsa	:	25-03-2024 09:25:07
Tanggal Bayar	:	**22-03-2024 10:28:51**
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	**BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar	:	***Mobile Banking***
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	14.608.625 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000653288**
NTPN	:	**B2E170NA04ACSSG2**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	14.608.625 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Agustus s.d Desember 2023 a.n Indah Manfaati Nur PTS : Universitas Muhammadiyah Semarang (NIDN : 0617088502)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240318362610
Tanggal Billing	:	18-03-2024 09:28:24
Tanggal Kedaluwarsa	:	25-03-2024 09:28:24
Tanggal Bayar	:	**19-03-2024 14:54:09**
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	**BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar	:	***Mobile Banking***
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	14.162.125 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000026692**
NTPN	:	**DB55C1JNFUSP9SVI**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	14.162.125 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Agustus s.d Desember 2023 a.n Fitria Fatichatul Hidayah Nur PTS : Universitas Muhammadiyah Semarang (NIDN : 0601068701)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240318380327
Tanggal Billing	:	18-03-2024 10:19:40
Tanggal Kedaluwarsa	:	25-03-2024 10:19:40
Tanggal Bayar	:	**20-03-2024 12:42:50**
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	**BANK SYARIAH INDONESIA**
Channel Bayar	:	***Teller***
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	15.613.250 (IDR)
Terbilang	:	*Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**FT24080ZLFZ4**
NTPN	:	**DB4B861QV3ONBE97**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	15.613.250 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan Agustus s.d Desember 2023 a.n Ayu Novianti Hanum PTS : Universitas Muhammadiyah Semarang (NIDN : 0623118001)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240318380836
Tanggal Billing	:	18-03-2024 10:23:23
Tanggal Kedaluwarsa	:	25-03-2024 10:23:23
Tanggal Bayar	:	**21-03-2024 14:36:38**
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	**BANK SYARIAH INDONESIA**
Channel Bayar	:	***Mobile Banking***
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	14.162.125 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**FT24081CJQHC**
NTPN	:	**B593C7QLUOTG5EP4**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	14.162.125 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Tunjangan Profesi Dosen Bulan September 2022 s.d Januari 2023 a.n Eko Yuliyanto PTS : Universitas Muhammadiyah Semarang (NIDN : 0604058801)

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240704430041
Tanggal Billing	:	04-07-2024 09:24:55
Tanggal Kedaluwarsa	:	11-07-2024 09:24:55
Tanggal Bayar	:	**05-07-2024 10:52:04**
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	**BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar	:	***Teller***
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	7.740.152 (IDR)
Terbilang	:	*Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Dua (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**240705833392**
NTPN	:	**0F2B63CIFKD29NUP**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	7.740.152 (IDR)
Keterangan	:	Penyetoran atas LHP BPK RI Th 2023 (B.7.a) - Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Selasar LLDIKTI VI



LLDIKTI WILAYAH VI

SURAT HASIL REKONSILIASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH
KPPN SEMARANG I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 723014
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-03

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	335,042,788,000	335,042,788,000	0
2	Belanja	82,344,653,715	82,344,653,715	0
3	Pengembalian Belanja	-20,121,680	-20,121,680	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	99,879,550	99,879,550	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-APR-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH
KPPN SEMARANG I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 723014
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-04

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	335,042,788,000	335,042,788,000	0
2	Belanja	109,192,760,877	109,192,760,877	0
3	Pengembalian Belanja	-20,121,813	-20,121,813	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	99,879,550	99,879,550	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 31-MAY-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH
KPPN SEMARANG I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 723014
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-05

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	335,042,788,000	335,042,788,000	0
2	Belanja	135,529,301,077	135,529,301,077	0
3	Pengembalian Belanja	-20,122,486	-20,122,486	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	99,879,550	99,879,550	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JUN-24

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH
KPPN SEMARANG I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 723014
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	335,042,788,000	335,042,788,000	0
2	Belanja	166,553,076,346	166,553,076,346	0
3	Pengembalian Belanja	-21,050,206	-21,050,206	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	99,879,550	99,879,550	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JUL-24



LLDIKTI WILAYAH VI

PERUBAHAN REKENING

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.ristekdikti.go.id

Nomor : 656/L.L6/KU.00.03/2023 14 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Yth. Kepala KPPN Semarang I
Di
Semarang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Lembaga/Negara dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I Nomor : S-614/KPN.1401/2023 tanggal 2 Agustus 2023 hal Persetujuan dan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Pengeluaran dengan data sebagai berikut:

Nomor Rekening : 00571.01.30.0000280
Nama Rekening : RPL 026 KS LLDIKTI WIL VI SMG UNTUK KERJASAMA
Nama Bank : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang

Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa Rekening tersebut agar masuk dalam program Treasury Notional Pooling (TNP) .

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I
Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34, Semarang 50241; TELEPON (024) 8411089, 8411086; FAKSIMILE (024) 8312987; SUREL semarang1.kppn@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1

Nomor : S-614/KPN.1401/2023 2 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Dua lembar
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Yth. KPA Satker LLDIKTI Wilayah VI Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur
Semarang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara / Lembaga dan surat Saudara tanggal 31 Juli 2023 Nomor 504/LL6/PR.07.00/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya dalam bentuk Giro Pemerintah pada **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang** untuk keperluan menampung uang dana kerjasama penelitian, pengabdian dan beasiswa.
   Rekening tersebut akan diberi nama **RPL 026 KS LLDIKTI WIL VI SMG UNTUK KERJASAMA .**
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
   a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat tanggal **30 Agustus 2023**.
   b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja.
   d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila:
   a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat tanggal **31 Agustus 2023.**
   b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.

c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN.
e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening

Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal **23 Agustus 2023** dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, KPPN Tipe A1 Semarang I berkomitmen menjaga integritas, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan memberikan pelayanan secara CERMAT: Cepat, Efektif, Ramah, Melayani, Akuntabel, Transparan serta tanpa biaya (Rp. 0,-).

Demikian disampaikan untuk dapat dpergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Semarang I

Ditandatangani secara elektronik
Farhan Fatnanto

Tembusan:
1. Pimpinan BTN Cabang Semarang
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Riset dan Teknologi.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521

Nomor : 22/LL6/KU.00.03/2023 12 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) rangkap
Hal : Laporan Penutupan Rekening

Yth. Kepala KPPN Semarang I
Di
Semarang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga dan Surat Saudara Nomor : S-182/WPB.14/KP.01/2020 tanggal 06 Februari 2020 dengan ini kami laporkan bahwa Rekening :

Nomor : 1360087000771
Nama Rekening : RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK P2B
Bank : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Semarang Pahlawan

Telah ditutup pada tanggal 11 Januari 2023, dengan sisa saldo Rp.0,- (Nol Rupiah)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bhime Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Nomor : JRB.R07/Br.SPW/ 031 /2023
Tanggal : 11 Januari 2023

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Cabang Semarang Pahlawan
Jl. Pahlawan No. 3
Semarang 50243 Indonesia
Telp. (62-024) 8415362
Facs. (62-024) 8311366
www.bankmandiri.co.id

SURAT KETERANGAN BANK

Menunjuk permohonan penutupan rekening Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah dengan Nomor 19/LL6/KU.00.03/2023 dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : **RPL 026 PS LLDIKTI WIL VI SMG UNTUK P2B**
No Rekening : **136-00-8700077-1**

Adalah nasabah kelolaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pahlawan yang saat ini rekening tersebut berstatus **CLOSED** sejak tanggal 11 Januari 2023.

Demikian kami sampaikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pahlawan

Anggrawati Pambudiningsih
Branch Manager

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I
Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34, Semarang 50241; TELEPON (024) 8411089, 8411086; FAKSIMILE (024) 8312987; SUREL semarang1.kppn@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1

Nomor : S-7/KPN.1401/2023 5 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Yth. KPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur
Semarang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara / Lembaga dan surat Saudara tanggal 4 Januari 2023 Nomor 49/LL6/KU.00.03/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya dalam bentuk Giro Pemerintah pada **PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sampangan Semarang** untuk keperluan menampung uang dana kerjasama penelitian, Pengabdian dan Beasiswa.
   Rekening tersebut akan diberi nama **RPL 026 PS LLDIKTI WIL. VI SMG UNTUK KERJASAMA**
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
   a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat tanggal **1 Februari 2023**.
   b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja.
   d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila:
   a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat tanggal **2 Februari 2023.**
   b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.
   c. Rekening tidak digunRakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN.

e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening

Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal **25 Januari 2023** dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

An. Menteri Keuangan,
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Farhan Fatnanto

Tembusan:
1. Pimpinan Bank BPD Cabang Sampangan Semarang
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF



LLDIKTI WILAYAH VI

CATATAN HASIL PEMANTAUAN TPD

2023

CATATAN HASIL PEMANTAUAN
TUNJANGAN PROFESI DOSEN NON-PNS TAHUN 2023

BAGIAN I (Informasi Umum)

Provinsi	:	Jawa Tengah
LLDIKTI	:	Wilayah VI
Alamat	:	Jl. Pawiyatan Luhur I/No 1 Bendan Dhuwur, Semarang, Jawa Tengah
Nama Kepala Lembaga	:	Bhimo Widyo Andoko
Nomor Telepon/HP	:	024-8317281
Jumlah Dosen Non PNS	:	14.588
Jumlah Dosen Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi	:	5.178
Nilai Alokasi Anggaran Tunjangan Profesi Dosen	:	Rp204.916.366.000,00
Nilai Realisasi Anggaran Tunjangan Profesi Dosen	:	Rp139.380.393.500,00

BAGIAN II (Catatan Fakta Hasil Pemantauan)

Uraian Pemantauan	Hasil Pemantauan
A. Meyakini LLDIKTI melakukan verifikasi persyaratan dosen penerima tunjangan profesi pada setiap periode pengajuan pembayaran.	LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan verifikasi persyaratan dosen penerima Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non-PNS melalui aplikasi SERUNI dengan bukti dokumen LKD dan SPTJM.
B. Meyakini LLDIKTI melakukan evaluasi kepada penerima tunjangan profesi dosen setiap 3 (tiga) tahun.	LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan evaluasi kepada penerima TPD Non-PNS sampai dengan Semester Gasal 2022/2023 yang dilaksanakan pada Februari-Maret 2023.
C. Meyakini tidak terdapat data ganda NIDN (entri data ganda dan/atau dosen Non-PNS memiliki lebih dari 1 NIDN) pada masing-masing PTS	Tidak terdapat data ganda NIDN pada dosen Non-PNS yang memiliki sertifikasi dosen dan menerima TPD Non-PNS periode pembayaran Januari s.d. Agustus 2023 di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI.
D.1. Meyakini tidak terjadi pembayaran ganda tunjangan profesi dosen Non-PNS.	Tidak terjadi pembayaran TPD Non-PNS ganda periode Januari s.d. Agustus 2023 di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI.
D.2. Meyakini tidak terdapat dosen yang tidak sesuai dengan kriteria masih dibayarkan tunjangan profesinya.	Tidak terdapat dosen yang tidak sesuai dengan kriteria masih dibayarkan tunjangan profesinya.
D.3. Meyakini tidak terdapat pembayaran tunjangan dosen	Tidak terdapat pembayaran tunjangan dosen untuk dosen pengaktifan kembali pada tahun berjalan.

untuk dosen pengaktifan kembali pada tahun berjalan.	
D.4. Meyakini tidak terdapat dosen sedang menjalankan tugas belajar/pejabat struktural/ pejabat negara yang tidak menjalankan Tridharma masih dibayarkan tunjangan profesinya.	LLDIKTI Wilayah VI belum dapat mengidentifikasi dosen Non-PNS yang sedang menjalankan tugas sebagai pejabat struktural/pejabat negara yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari APBN/D.
E. Meyakini tidak terdapat penerima tunjangan dosen yang tidak terdata pada PDDikti	Tidak terdapat dosen penerima TPD Non-PNS periode pembayaran Januari s.d. Agustus 2023 di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI yang tidak terdata pada PDDikti.

Hal-hal yang menjadi perhatian:

1) Linimasa penilaian BKD yang berlaku pada LLDIKTI Wilayah VI yaitu **September s.d. Februari (semester gasal)** sedangkan dalam aturan pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dosen yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang menyatakan "Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor **diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya** setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI selama ini untuk penerima TPD Non-PNS yang baru sertifikasi dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dengan tetap menunggu Laporan Kinerja Dosen (LKD) semester gasal yang merupakan syarat pencairan Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS.

2) Hasil unduhan rekapitulasi LKD dari SISTER tidak sesuai dengan data tampilan di aplikasi SISTER pada akun LLDikti VI di mana terdapat perbedaan jumlah digit SKS. Hal ini disebabkan terdapat pergeseran tanda koma yang mengubah digit angka. Akibatnya jumlah SKS pada hasil data unduhan tampil lebih besar dari jumlah SKS riil yang ada di aplikasi SISTER akun LLDIKTI dan PTS.

3) Penerima TPD Non-PNS yang melaksanakan tugas belajar dan pensiun tidak mendapatkan tunjangan terhitung mulai tanggal (TMT) permulaan tugas belajar dan/atau pensiun sedangkan dosen telah melaksanakan Beban Kerja Dosen dan Tridharma pada semester itu.

Tindak Lanjut yang diperlukan :

Kepala LLDIKTI Wilayah VI agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap status keaktifan dosen Non-PNS dan menyusun kebijakan yang mengatur mekanisme pelaporan status dosen Non-PNS yang bertugas sebagai pejabat struktural/pejabat negara kepada LLDIKTI Wilayah VI.

Semarang, 8 September 2023

a.n. Kepala LLDIKTI Wilayah VI,
Kepala Bagian Umum,

Adhrial Refaddin
NIP197504212008121003

Tim Pemantauan TPD Non-PNS
Ketua Tim,

Budi Agung Prasetya
NIP197510182002121002

Anggota Tim,

Siti Rohimah
NIP196907041988122001

Redha Novellea
NIP199111282018012001

Athfin Rafiqi Abrar
NIP199409062018011005



LLDIKTI WILAYAH VI

TEMUAN BPK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

Nomor : 0535/LL6/KU.02.00/2024 6 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tanggapan konsep temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Yth. Ketua Tim Pemeriksaan 2
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Di Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kemendikbudristek nomor 13504/A2/RHS/WS.03.04/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 pada Eselon I Setjen, dengan hormat kami sampaikan tanggapan terhadap Konsep Temuan Pemeriksaan Tim Pemeriksaan 2 BPK sebagai berikut :

1. **TP.4. Aset Setjen: Penatausahaan Aset Tetap pada Sekretariat Jenderal Belum Optimal**

Tanggapan :
Kondisi Aset tetap di LLDIKTI Wilayah VI saat ini tidak ada yang dicatatkan dalam kondisi rusak berat, akan tetapi kami mencatatkan 127 aset tetap dalam Kondisi Rusak Ringan.
Pada LLDIKTI Wilayah VI terdapat tiga kendaraan dinas yang nomor polisinya belum dicatatkan pada aplikasi SIMAN terdiri dari 1 (satu) sepeda motor dan 2 (dua) mobil yaitu :

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan
1	3020104001	3	Sepeda Motor	Honda	16/02/2007	11.975.000
2	3020101001	2	Sedan	Toyota Altis V A/T	21/03/2011	344.400.000
3	3020102003	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova G 2.0 M/T	08/05/2019	305.853.500

serta terdapat 4 (empat) kendaraan dinas yang nomor rangka dan nomor mesinnya belum dicatatkan pada aplikasi SIMAN terdiri dari 2 (dua) sepeda motor dan 2 (dua) mobil yaitu:

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan
1	3020104001	3	Sepeda Motor	Honda	16/02/2007	11.975.000
2	3020104001	7	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	19/04/2011	14.875.000
3	3020101001	2	Sedan	Toyota Altis V A/T	21/03/2011	344.400.000
4	3020102003	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova G 2.0 M/T	08/05/2019	305.853.500

Pelaksana penatausahaan BMN di LLDIKTI Wilayah VI akan menindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa BPK dengan melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dan optimalisasi penatausahaan BMN di LLDIKTI Wilayah VI.

2. **TP.7. Kurang Volume Belanja Pemeliharaan: Kekurangan volume pekerjaan belanja barang dan jasa sebesar Rp, 316.531.096 pada empat satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal**

Tanggapan :
LLDIKTI Wilayah VI Semarang akan menindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa BPK dengan memerintahkan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Penyedia dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pada Penatausahaan Belanja Barang dan Jasa di LLDIKTI Wilayah VI Semarang.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

3. TP.35. Serdos dan Kehormatan Guru Besar:

a. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tidak Akurat.

b. Kurang saji atas akun Belanja Pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp11.554.911.396,00 atas *carry over* TPD 2023 yang belum tercatat.

Tanggapan 3.a :

Tabel 4. Rincian Pembayaran TPD kepada Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD di Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD	
		Jumlah (orang)	Nilai (Rp)
1	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	14	166.791.800
2	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	26	213.881.000
3	[723013] LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta	1	3.204.700
4	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	127	2.951.695.516
5	[723015] LLDIKTI Wilayah VII Surabaya	8	50.032.900
6	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	86	1.547.766.400
7	[723018] LLDIKTI Wilayah X Padang	33	582.091.000
8	[723019] LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin	1	18.453.000
9	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	13	93.308.783
10	[723022] LLDIKTI Wilayah XIV Biak	3	51.506.000
11	[723023] LLDIKTI Wilayah XV Kupang	4	13.098.000
12	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	8	186.816.500
TOTAL		**324**	**5.878.645.599**

Tabel 5. Rincian Pembayaran TPD Januari dan Februari 2023 kepada Dosen Lulus Sertifikasi Tahun 2022 Namun Tidak Memenuhi Status BKD Semester Genap 2021-2022

No	Satuan Kerja	Dosen (Orang)	Nilai (Rp)
1	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	110	567.350.200
2	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	5	28.922.000
3	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	78	204.843.750
4	[723016] LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar	1	5.546.400
5	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	47	157.153.400
6	[723018] LLDIKTI Wilayah X Padang	1	5.781.000
7	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	15	78.165.417
8	[723022] LLDIKTI Wilayah XIV Biak	1	5.781.000
9	[723023] LLDIKTI Wilayah XV Kupang	6	36.140.800
10	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	1	5.377.000
TOTAL		**265**	**1.095.060.967**

Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa:

1. Terdapat status BKD dari 127 dosen pada perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Semarang dengan nilai sebesar Rp. 2.951.695.516, yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen /TPD tahun 2023.
2. Terdapat status BKD dari 78 dosen lulus sertifikasi tahun 2022 untuk pembayaran Januari s.d Februari 2023 yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran pada semester Genap 2021/2022 sebesar Rp. 204.843.750.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Status BKD 127 dosen dan 78 dosen seperti tersebut di atas sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sesuai dengan data pada aplikasi sister.kemdikbud.go.id. Terjadinya temuan dikarenakan adanya:

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

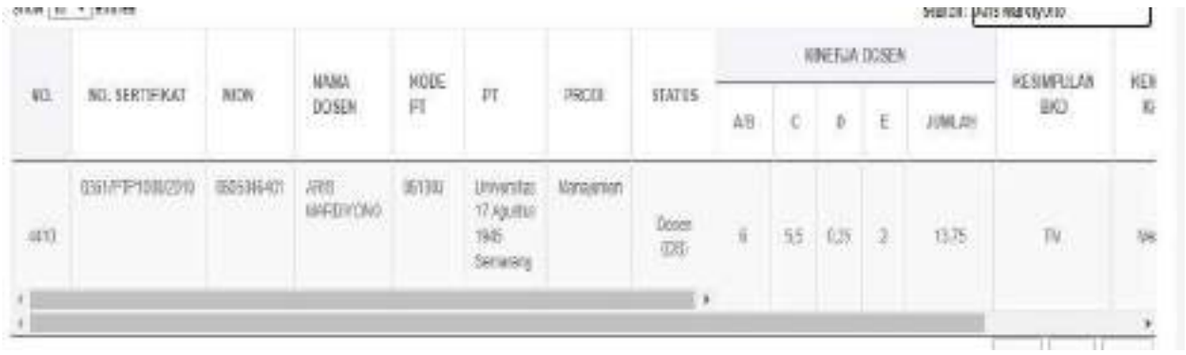
a. Perbedaan cara verifikasi data pendukung yang digunakan sebagai dasar pembayaran oleh LLDIKTI Wilayah VI Semarang dan data pendukung yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK yaitu:

- **Verifikasi data pendukung yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI Semarang dilakukan dengan cara sebagai berikut:** membandingkan secara langsung data pembayaran TPD dan data dosen terkait pada *dashboard* pada aplikasi sister.kemdikbud.go.id (melakukan akses langsung menggunakan akun *login* pengelola Sister LLDIKTI Wilayah VI Semarang) tanpa melakukan pengunduhan data pendukung.
- **Verifikasi data pendukung yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK dilakukan dengan cara sebagai berikut:** melakukan pengunduhan data pendukung dari aplikasi sister.kemdikbud.go.id untuk kemudian membandingkan data pembayaran TPD dengan data hasil unduhan dimaksud.

b. Terjadi gangguan pada sistem aplikasi sister.kemdikbud.go.id pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim BPK yang mengakibatkan perbedaan versi data pada akun Admin **Ditjen Diktiristek, LLDIKTI, Pengelola PT, dan Dosen**. Beberapa status dosen yang berbeda tersaji di bawah ini :

Contoh pada data dosen a.n. **Aris Mardiyono** (Univ 17 Agustus 1945 Semarang) :

Di laman sister.kemdikbud.go.id pada akun LLDIKTI VI, diperiksa ulang tanggal **17 April 2024** untuk pelaporan Ganjil 2022/2023 :



NO.	NO. SERTIFIKAT	NIDN	NAMA DOSEN	KODE PT	PT	PRODI	STATUS	KINERJA DOSEN					KESIMPULAN BKD	KE
								A/B	C	D	E	JUMLAH		
413	0361/FTP1008/2010	0605046401	ARIS MARDIYONO	061030	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Manajemen	Dosen (DS)	6	5.5	0.25	2	13.75	TV	

Kesimpulan BKD : **Tidak memenuhi**

Di akun Pengelola Perguruan Tinggi dan Dosen ybs :



NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Show 10 entries Search: mard

NO	STATUS	NO. SERTIFIKAT	NIDN	KINERJA DOSEN									KEWAJIBAN DOSEN	KESIMPULAN
				Lebih VB	C	Lebih C	D	Lebih D	E	Lebih E	ΣKinerja	ΣBeban Lebih	BKD SEMESTER		
188	Dosen (DS)	0361/PTP1008/2010	0605046401	6	4	0	2.5	0	2	0	14.5	6	M	M	M

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 232 total entries) Copy Excel CSV PDF Previous 1 Next



LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)
LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN
SEMESTER GANJIL TAHUN 2022/2023

A. Identitas

Nama	:	ARIS MARDIYONO, S.E., M.M
NIDN	:	0605046401
Nomor Sertifikat	:	0361/PTP-1100/2010
Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
Status	:	DOSEN (DS)
Alamat PT	:	JALAN PAWIYATTAN LUHUR SEMDAN DRUWUE, KOTA SEMARANG, PROV. JAWA TENGAH - 50133
Fakultas/Departemen	:	EKONOMI
Jurusan/Program Studi	:	MANAJEMEN (S1)
Jab. Fungsional/Golongan	:	LEKTOR/III/D
Tempat/Tanggal Lahir	:	PURWOGADI, 06 APRIL 1964
Asal S1	:	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
Asal S2	:	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

C. Kesimpulan Kinerja Dosen Tahun Akademik 2022/2023 Semester GANJIL

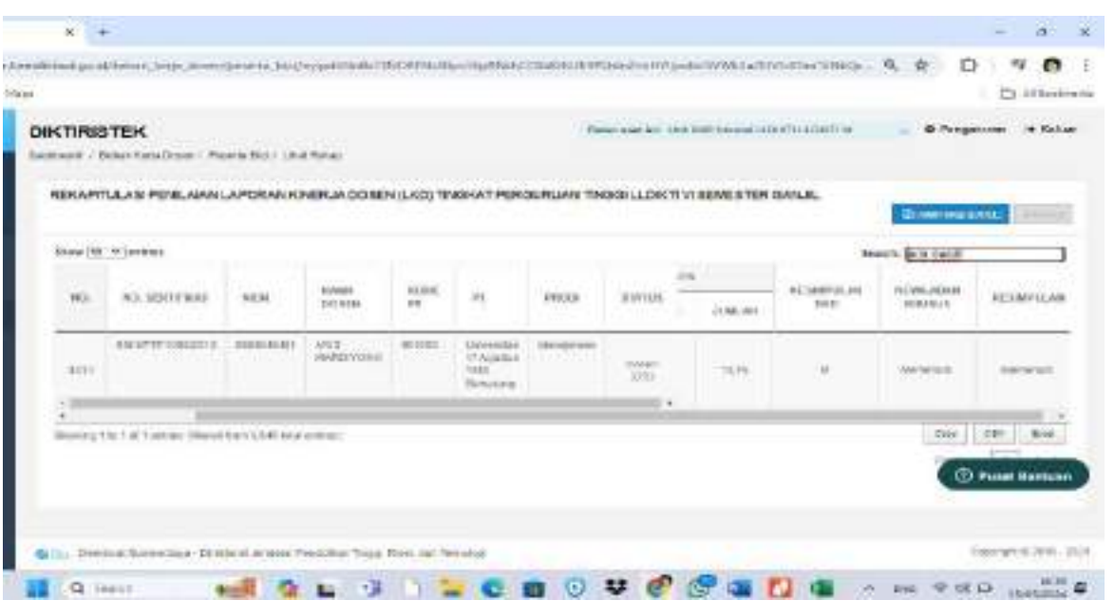
No	Jenis Kinerja	Syarat	SKS BKD	SKS Lebih	Status
1	Pelaksanaan Pendidikan	Tidak boleh kosong	6	6	M
2	Pelaksanaan Penelitian	Tidak boleh kosong	5.5	0	M
3	Pelaksanaan Pengabdian	Tidak boleh kosong	0.25	0	M
4	Pelaksanaan Penunjang	Tidak boleh kosong	2	0	M
	Kriteria Pelaksanaan Pendidikan dan Pelaksanaan Penelitian	***Minimal 9 sks***	***11.5***	***6***	***M***
	Kriteria Pelaksanaan Pengabdian dan Pelaksanaan Penunjang	***Tidak boleh kosong***	***2.25***	***0***	***M***
Total Kinerja		Minimal 12 sks dan Maksimal 16 sks	13.75	**6**	M

Keterangan:
- TM: Tidak Memenuhi
- M: Memenuhi

Memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen.

Kesimpulan BKD: **Memenuhi**

Setelah LLDIKTI Wilayah VI berkonsultasi ke Tim SISTER Pusat terkait perbedaan ini, diberikan solusi agar Pengelola PT memproses pengesahan ulang, sehingga data yang tersaji pada seluruh akun dapat valid dan menyajikan informasi yang sama. Setelah dilakukan pengesahan ulang, LLDIKTI Wilayah VI memeriksa kembali pada tanggal **5 Mei 2024** melalui akun LLDIKTI Wilayah VI di sister.kemdikbud.go.id pada laporan BKD Ganjil 2022/2023 a.n. Dosen ybs, pada halaman rekapitulasi penilaian didapatkan hasil seperti di bawah ini:



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kesimpulan BKD : **Memenuhi**

Contoh lain untuk dosen a.n. **: Yustiana Dwirainaningsih (0626077201-Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan)** untuk Laporan Semester Genap 2021/2022 :

Di akun LLDIKTI VI pada tanggal 5 Mei 2024 :



Kesimpulan BKD : **Memenuhi**

2. Beberapa dosen masih dalam penanganan Tim SISTER Pusat, untuk dosen yang pernah berstatus pindah homebase Perguruan Tinggi pada kurun waktu 2021 s.d. 2023, karena data dosen tersebut saat ini telah tidak muncul secara online di laman sister.kemdikbud.go.id pada akun Perguruan Tinggi sebelumnya.

3. Secara teknis, pada kondisi normal seharusnya data yang tersaji pada *dashboard* aplikasi sister.kemdikbud.go.id pada **waktu kapanpun** dan **data hasil unduhan adalah sama**. Akan tetapi, pada saat dilakukan pengunduhan data pendukung sesuai permintaan dari Tim Pemeriksa BPK, data yang tersaji di *dashboard* aplikasi sister.kemdikbud.go.id dengan hasil pengunduhan mengalami perbedaan sehingga mengakibatkan perbedaan hasil verifikasi antara yang dilakukan oleh Petugas di LLDIKTI Wilayah VI dan Tim Pemeriksa BPK.

4. Kendala pada sistem yang mengakibatkan ketidaksesuaian ini telah dilaporkan dan dikonsultasikan oleh LLDIKTI Wilayah VI Semarang ke Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan telah ditindaklanjuti dengan menugaskan Pengelola Perguruan tinggi untuk melakukan Pengesahan Kembali dan data telah tersaji : **Memenuhi.** Tetapi untuk dosen yang pindah homebase pergruruan tinggi, sampai dengan saat ini masih tahap perbaikan di sister.kemdikbud.go.id oleh Tim SISTER Kemdikbudristek (Direktorat Sumber Daya).

Tanggapan 3.b :

Temuan ini akan kami tindak lanjuti dengan melakukan jurnal penyesuaian (beban akrual), dan sebagai pedoman LLDIKTI Wilayah VI Semarang dalam penjurnalan di tahun selanjutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001

Tembusan :

- Kepala Biro Keuangan & BMN, Kemendikbudristek

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor	: 13504/A2/RHS/WS.03.00/2024	3 Mei 2024
Lampiran	: Dua Lembar	
Hal	: Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 pada Eselon I Setjen	

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti surat Saudari Ketua Tim 2 Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek nomor: 7/S-Tim.2/LK-DIKBUDRISTEK/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan, dengan hormat kami sampaikan Konsep Temuan Pemeriksaan (KTP) satuan kerja Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, selain yang telah disampaikan secara langsung oleh pemeriksa sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat menyusun Tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan tersebut secara tertulis (*hardcopy* dan *softcopy*) dan disampaikan paling lambat hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 kepada Tim 2 serta dengan tembusan kepada Biro Keuangan dan BMN melalui link (https://ringkas.kemdikbud.go.id/TanggapanSetjen) dengan sandi: seTJen

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara,

Faisal Syahrul
NIP 196712311994031012

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Nomor : 13504/A2/RHS/WS.03.00/2024
Tanggal : 3 Mei 2024

Daftar Penerima:
1. Kepala Biro Umum dan PBJ
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN
4. Kepala Biro Hukum
5. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
7. Kepala Pusat Prestasi nasional
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
9. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
10. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
11. Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia
12. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan
13. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang
14. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta
15. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Bandung
16. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta
17. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang
18. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya
19. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Denpasar
20. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Makassar
21. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang
22. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
23. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Ambon
24. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Banda Aceh
25. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Biak
26. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kupang
27. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
28. Kepala Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan
29. Kepala Atdikbud KBRI Washington
30. Kepala Atdikbud KBRI Canberra
31. Kepala Atdikbud KBRI Bangkok
32. Kepala Atdikbud KBRI Den Haag
33. Kepala Atdikbud KBRI Kuala Lumpur
34. Kepala Atdikbud KBRI Berlin
35. Kepala Atdikbud KBRI Cairo
36. Kepala Atdikbud KBRI Paris
37. Kepala Atdikbud KBRI London
38. Kepala Atdikbud KBRI Port Moresby
39. Kepala Atdikbud KBRI Manila
40. Kepala Atdikbud KBRI Riyadh
41. Kepala Atdikbud KBRI Beijing
42. Kepala Atdikbud KBRI New Delhi
43. Kepala Atdikbud KBRI Singapura

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Peralatan dan Mesin (Barang Intrakomptabel) yang Nilainya Dibawah Rp1.000.000,00

No	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	**Biro Umum dan PBJ**			
1	Diagnostik Set	1	850.000,00	850.000,00
2	Nebulizer	1	800.000,00	800.000,00
3	Stabilizer	2	700.000,00	1.400.000,00
4	Glucosa Analyzer	1	750.000,00	750.000,00
	Jumlah	**5**	**3.100.000,00**	**4.550.000,00**
B	**Pusdiklat**			
1	Exhause Fan	4	935.000,00	3.740.000,00
2	Monografi	246	358.020,00	88.072.927,00
3	Buku Lainnya	511	270.583,67	138.268.255,00
	Jumlah	**761**	**1.563.603,67**	**230.081.182,00**
C	**Puspresnas**			
1	Kursi Kayu	9	357.666,67	3.219.000,00
	Jumlah	**9**	**357.666,67**	**3.219.000,00**
2	Puspeka			
1	Alat Pemotong Kertas	1	700.000,00	700.000,00
2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	749.000,00	2.247.000,00
3	Tripod Camera	1	950.000,00	950.000,00
4	Tas Kamera	3	400.000,00	1.200.000,00
5	Monopod	4	605.000,00	2.420.000,00
6	Alat Pelindung Lainnya	5	950.000,00	4.750.000,00
	Jumlah	**17**	**4.354.000,00**	**12.267.000,00**
D	**Biro Keuangan dan BMN**			
1	Mesin Gergaji Logam	1	25.000,00	25.000,00
2	Cermin Besar	77	185.623,00	14.293.000,00
3	Tabung Pemadam Api	5	393.800,00	1.969.000,00
4	Flip Chart	18	707.033,00	12.726.600,00
5	Publik Astari (Pembatas Antrian)	4	859.750,00	3.439.000,00
6	Exhause Fan	1	660.000,00	660.000,00
7	Teko Listrik	8	917.500,00	7.340.000,00
8	Alat Pemanggang Roti/Sate	4	450.000,00	1.800.000,00
9	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	247	966.345,00	238.687.180,00
10	Lambang Garuda Pancasila	9	125.000,00	1.125.000,00
11	Vertikal Blind	17	385.000,00	6.545.000,00
12	DVD Player	5	819.980,00	4.099.900,00
13	Microphone/Boom Stand	1	797.500,00	797.500,00
14	Head Set	190	626.149,00	118.968.269,00
15	Monopod	2	508.500,00	1.017.000,00
16	Mesin Barcode	2	825.000,00	1.650.000,00
17	Pesawat Telephone	2	26.000,00	52.000,00
18	Unit Tranceiver UHF Portable	2	939.600,00	1.879.200,00
19	Portable Reporter Link	1	687.500,00	687.500,00
20	Tools	8	44.375,00	355.000,00
21	Spray Gun	1	957.000,00	957.000,00
22	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Peleburan)	2	1.000.000,00	2.000.000,00
23	Eye Goggles	1	25.000,00	25.000,00
24	DVD Writer	1	450.000,00	450.000,00
25	External CD/ DVD Drive (ROM)	1	850.000,00	850.000,00
26	Hub	4	333.850,00	1.335.400,00
	Jumlah	**614**	**14.565.505,00**	**423.733.549,00**
E	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan**			
1	Handy Talky (HT)	6	650.000,00	3.900.000,00
2	Hard Disk	3	805.000,00	2.415.000,00
	Jumlah	**9**	**1.455.000,00**	**6.315.000,00**
F	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC**			
1	Savetuy Valve	1	992.970,00	992.970,00
2	Filing Cabinet Besi	2	331.886,00	663.772,00
3	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	200.157,00	200.157,00
4	Alat Penghancur Kertas	1	455.000,00	455.000,00
5	Alat Pemotong Kertas	1	94.049,00	94.049,00
6	Rak Sepatu (Almunium)	2	333.066,00	666.132,00
7	Gantungan Jas	2	782.643,00	1.565.286,00
8	Jam Elektronik	2	46.117,00	92.234,00
9	Kitchen Set	1	474.121,00	474.121,00
10	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	2	189.497,00	378.994,00
11	Unit Power Supply	2	491.945,00	98.389,00
12	Dispenser	1	450.000,00	450.000,00
13	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	6	423.298,00	2.539.788,00
14	Camera Electronic	4	750.381,00	3.001.524,00
15	Film Projector	13	135.007,00	1.755.091,00
16	Facsimile	2	801.949,00	1.603.898,00
17	Lukisan Cat Minyak	9	928.888,89	8.360.000,00
18	Wayang Golek	2	605.000,00	1.210.000,00

19	Pahatan Batu	4	271.250,00	1.085.000,00
	Jumlah	**58**	**8.757.224,89**	**25.686.405,00**
G	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra**			
1	Cermin Besar	1	41.849,00	41.849,00
2	Rak-Rak Penyimpan	6	300.000,00	1.800.000,00
3	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	56.885,00	56.885,00
4	Mesin Ketik Listrik	2	51.797,00	103.594,00
5	Mesin Fotocopy Electronic	1	398.912,00	398.912,00
6	Lemari Besi/Metal	10	641.863,00	6.418.626,00
7	Lemari Kayu	27	443.054,00	11.962.451,00
8	Rak Besi	11	266.702,00	2.933.725,00
9	Rak Kayu	16	510.445,00	8.167.124,00
10	Filing Cabinet Besi	10	240.045,00	2.400.450,00
11	Papan Visual/Papan Nama	2	365.222,00	730.443,00
12	White Board	8	773.206,00	6.185.651,00
13	Peta	5	120.005,00	600.027,00
14	Display	5	435.195,00	2.175.976,00
15	Mesin Laminating	1	138.046,00	138.046,00
16	Meja Kerja Kayu	13	461.628,00	6.001.167,00
17	Kursi Besi/Metal	17	673.792,00	11.454.463,00
18	Bangku Panjang Kayu	2	44.545,00	89.090,00
19	Meja Rapat	1	66.817,00	66.817,00
20	Meja Komputer	3	208.261,00	624.782,00
21	Meja Ketik	2	194.306,00	388.611,00
22	Meja Makan Besi	1	500.000,00	500.000,00
23	Kursi Fiber Glas/Plastik	5	259.946,00	1.299.728,00
24	Gantungan Jas	2	111.362,00	222.724,00
25	Jam Elektronik	3	54.231,00	162.692,00
26	Lemari Es	4	139.619,00	558.476,00
27	Teko Listrik	4	513.313,00	2.053.253,00
28	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	38.288,00	38.288,00
29	Oven Listrik	2	78.981,00	157.961,00
30	Blender	1	663.869,00	663.869,00
31	Amplifier	2	103.097,00	206.194,00
32	Alat Hiasan	12	44.545,00	534.540,00
33	Water Filter	1	353.399,00	353.399,00
34	Tangga Aluminium	1	413.871,00	413.871,00
35	Kaca Hias	1	44.775,00	44.775,00
36	Dispenser	1	565.767,00	565.767,00
37	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	8	107.101,00	856.806,00
38	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	638.908,00	638.908,00
39	Digital Audio Taperecorder	1	252.644,00	252.644,00
40	Video Tape Recorder Portable	2	21.576,00	43.151,00
41	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	850.000,00	850.000,00
42	Layar Film/Projector	1	259.773,00	259.773,00
43	Mesin Folding	3	642.502,00	1.927.506,00
44	Pesawat Telephone	3	42.391,00	127.172,00
45	Antene VHF/FM Portable	1	24.121,00	24.121,00
46	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	1	549.500,00	549.500,00
47	Mangkok/Kom Betadin (Stainless,Keramik/China)	1	18.443,00	18.443,00
48	Boneka	13	35.339,00	459.412,00
49	Heater (Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam)	7	305.443,00	2.138.104,00
50	Mangkok Porselin	1	65.809,00	65.809,00
51	Container (Alat Laboratorium Kwalitas Udara)	2	206.784,00	413.568,00
52	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	36.182,00	36.182,00
53	Keris	9	140.000,00	1.260.000,00
54	Hard Disk	4	740.484,00	2.961.936,00
55	Keyboard (Peralatan Mainframe)	5	23.796,00	118.981,00
56	Monitor	9	663.457,00	5.971.113,00
57	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	465.584,00	465.584,00
58	Router	2	870.898,00	1.741.795,00
59	Mobile Modem GSM/ CDMA	1	500.006,00	500.006,00
60	Miniatur	1	70.932,00	70.932,00
	Jumlah	**264**	**17.849.311,00**	**92.265.672,00**
H	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok**			
1	Perkakas Dapur Tempa	20	941,00	18.820,00
2	Meja Kerja Besi/Metal	3	240.950,00	722.850,00
3	Meja Kerja Kayu	79	527.046,00	41.636.634,00
4	Kursi Besi/Metal	28	274.378,00	7.682.585,00
5	Meja Rapat	1	724.654,00	724.654,00
6	Meja Komputer	4	590.889,00	2.363.556,00
7	Meja Ketik	1	144.674,00	144.674,00
8	Gantungan Jas	1	120.227,00	120.227,00
9	Jam Elektronik	2	6.460,00	12.919,00
	Jumlah	**139**	**2.630.219,00**	**53.426.919,00**
I	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag**			
1	Meja Kerja Kayu	1	771.691,00	771.691,00
2	Gantungan Jas	1	800.000,00	800.000,00
	Jumlah	**2**	**1.571.691,00**	**1.571.691,00**

J	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur**			
1	Meja Kerja Kayu	233	672.750,18	156.750.791,00
2	Kursi Kayu	222	495.755,00	110.057.610,00
	Jumlah	**455**	**1.168.505,18**	**266.808.401,00**
K	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin**			
1	Gerobak Dorong	1	674.865,00	674.865,00
2	Mesin Bor Tangan	1	884.940,00	884.940,00
3	Mesin Gergaji Besi	1	884.940,00	884.940,00
4	Tool Kit Set	4	884.940,00	3.539.760,00
5	Tool Kit Box	1	884.940,00	884.940,00
6	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	272.500,00	272.500,00
7	Alat Pengering (Dryer)	1	337.500,00	337.500,00
8	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2	123.350,00	246.700,00
9	Alat Pemotong Kertas	1	600.000,00	600.000,00
10	Kursi Kayu	28	621.817,00	17.410.867,00
11	Meja Ketik	5	268.848,00	1.344.240,00
12	Meja Telepon	3	617.222,00	1.851.665,00
13	Kasur/Spring Bed	8	806.631,00	6.453.045,00
14	Meja Makan Kayu	2	185.277,00	370.554,00
15	Gantungan Jas	4	247.841,00	991.363,00
16	Kipas Angin	1	526.987,00	526.987,00
17	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	557.583,00	557.583,00
18	Oven Listrik	2	386.506,00	773.012,00
19	Radio	2	612.775,00	1.225.550,00
20	Megaphone	1	304.380,00	304.380,00
21	Lambang Garuda Pancasila	1	464.250,00	464.250,00
22	Tangga Aluminium	2	578.602,00	1.157.204,00
23	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	46.763,00	46.763,00
24	Kabel Roll	1	215.865,00	215.865,00
25	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	1	598.000,00	598.000,00
26	Audio Maximizer	1	403.650,00	403.650,00
27	Mesin Pembuat Huruf	1	579.823,00	579.823,00
28	Telephone Mobile	1	981.444,00	981.444,00
29	Bantal Angin/Wind Ring	2	252.488,00	504.975,00
30	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	556.856,00	1.113.711,00
31	CD Writter	3	450.100,00	1.350.300,00
32	Hub	2	944.865,00	1.889.730,00
33	Peralatan Fitnes	6	258.496,00	1.550.974,00
	Jumlah	**94**	**17.015.044,00**	**50.992.080,00**
L	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Cairo**			
1	Brandkas	1	93.336,00	93.336,00
	Jumlah	**1**	**93.336,00**	**93.336,00**
M	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Paris**			
1	Kipas Angin	2	316.007,00	632.014,00
	Jumlah	**2**	**316.007,00**	**632.014,00**
N	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London**			
1	Kursi Besi/Metal	30	924.024,20	27.720.726,00
2	Tas Kamera	1	890.749,00	890.749,00
	Jumlah	**31**	**1.814.773,20**	**28.611.475,00**
O	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Port Moresby**			
1	Pahat	2	682.654,00	1.365.308,00
2	Rak Kayu	1	839.469,00	839.469,00
3	Papan Visual/Papan Nama	1	933.260,00	933.260,00
4	White Board	1	224.630,00	224.630,00
5	Peta	1	650.000,00	650.000,00
6	Meja Kerja Kayu	1	894.400,00	894.400,00
7	Meja Ketik	1	622.400,00	622.400,00
8	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	734.644,00	734.644,00
9	Hardware Conf Off-Line Computer	2	589.761,00	1.179.522,00
10	Modem	1	803.176,00	803.176,00
	Jumlah	**12**	**6.974.394,00**	**8.246.809,00**
P	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Port Moresby**			
1	Mesin Ketik Listrik	1	106.000,00	106.000,00
2	Lemari Kayu	14	75.214,29	1.053.000,00
3	Rak Kayu	1	201.000,00	201.000,00
4	Tabung Pemadam Api	2	59.000,00	118.000,00
5	White Board	2	935.385,50	1.870.771,00
6	Perkakas Kantor Lainnya	1	542.382,00	542.382,00
7	Meja Kerja Kayu	17	418.949,47	7.122.141,00
8	Kursi Kayu	19	278.635,26	5.294.070,00
9	Sice	2	49.000,00	98.000,00
10	Meja Komputer	2	18.000,00	36.000,00
11	Meja Ketik	2	34.500,00	69.000,00
12	Meja Telepon	1	39.000,00	39.000,00
13	Meja Makan Kayu	1	932.175,00	932.175,00
14	Jam Elektronik	3	7.000,00	21.000,00
15	A.C. Split	4	847.500,00	3.390.000,00
16	Kipas Angin	17	969.069,41	16.474.180,00
17	Exhause Fan	3	6.000,00	18.000,00

18	Video Cassette	1	187.000,00	187.000,00
19	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	265.000,00	265.000,00
20	Kaca Hias	1	12.000,00	12.000,00
21	Rak Peralatan	1	8.000,00	8.000,00
22	Layar Film/Projector	1	74.000,00	74.000,00
23	Head Set	3	780.787,33	2.342.362,00
24	Facsimile	1	175.000,00	175.000,00
25	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2	997.188,50	1.994.377,00
	Jumlah	**103**	**8.017.786,76**	**42.442.458,00**
1	Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh			
2	Globe	1	200.000,00	200.000,00
3	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	3	796.444,00	2.389.332,00
	Jumlah	**4**	**996.444,00**	**2.589.332,00**
Q	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing**			
1	Pesawat Telephone	2	394.661,00	789.322,00
2	Pakaian Pelindung	33	964.856,00	31.840.248,00
3	Hard Disk	1	830.149,00	830.149,00
4	Modem	1	748.495,00	748.495,00
	Jumlah	**37**	**2.938.161,00**	**34.208.214,00**
R	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI New Dehli**			
1	Alat Penghancur Kertas	1	973.740,00	973.740,00
2	Alat Pencetak Label	1	661.761,00	661.761,00
3	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	559.538,00	559.538,00
4	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	599.524,00	599.524,00
5	Alat Pemanas Ruangan	5	740.565,00	3.702.825,00
6	DVD Player	2	812.237,00	1.624.474,00
7	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	672.430,00	672.430,00
8	Stabilizer	3	400.000,00	1.200.000,00
9	Stabilizer/UPS	4	970.861,50	3.883.446,00
10	Long Range Receiver TV-201	1	894.956,00	894.956,00
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	986.364,00	986.364,00
12	External CD/ DVD Drive (ROM)	1	403.982,00	403.982,00
	Jumlah	**22**	**8.675.958,50**	**16.163.040,00**
S	**Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura**			
1	Kursi Fiber Glas/Plastik	15	798.750,00	11.981.250,00
2	Teko Listrik	1	726.721,00	726.721,00
3	Blender	1	551.940,00	551.940,00
4	Seterika	2	818.711,00	1.637.422,00
	Jumlah	**19**	**2.896.122,00**	**14.897.333,00**
	Jumlah Total	**2658**	**105.298.086,20**	**1.309.266.910,00**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari belanja Barang/Jasa atau Belanja Pemeliharaan
Belum Dicatat atau Dikapitalisasi

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
A	**Biro Umum dan PBJ**	
1	Penataan Plafon Jembatan Gedung A ke Gedung C	75.976.160
2	Penataan Plafon Penghubung Gedung A ke Gedung E	69.971.260
3	Pekerjaan Penataan Toilet Wanita ULT dan Toilet Disabilitas Lantai 1 Gedung C	93.384.350
4	Penataan Sarana Olahraga dan Sarana Perpustakaan Gedung A	141.864.000
5	Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Pusat	80.791.200
6	Penataan Toilet Kamar Basement I Wisma Argamulya	118.046.880
7	Pekerjaan Penataan Ruang Bilas Wanita dan Sarana Lingkungan Wisma Argamulya	78.251.900
8	Pekerjaan Penataan Ruang Sebaguna dan Toiet Pimpinan Wisma Argamulya	87.814.000
9	Penataan Sarana Fasilitas Lingkungan Wisma Argamulya	138.778.000
10	Perbaikan dan Penggantian Instalasi Supply Air Bersih Wisma Argamulya	99.788.000
11	Penataan Sarana Fasilitas Wisma Griya Dewantara	101.869.000
12	Perbaikan Plafon, Dinding, Lantai, dan Pintu Mess Rempoa (Rumah Negara Rempoa 18)	128.100.750
13	Perbaikan Plafon, Dinding, Lantai, dan Pintu Mess Rempoa (Rumah Negara Rempoa 19)	106.181.400
14	Penataan Atap, Toilet, dan Pagar Mess Cokro	193.055.085
15	Pekerjaan Atap Pagar dan Dan Toilet RD Cirendeu	175.868.289
16	Penataan Sarana Lingkungan Gudang Ciketing	29.747.200
17	Pasang Besi Hollo dan Pasang Wiremesh Gudang E Ciketing	87.992.100
18	Pasang Besi Hollo dan Pekerjaan Partisi Besi I,J,K,L Gudang E Ciketing	135.429.050
19	Penataan Sarana Fasilitas Gudang Arsip Ciketing	87.092.600
20	Penataan Gabungan Atap Gudang Ciketing	113.210.625
21	Pengembangan Sistem Aplikasi (Farmasi) Poliklinik	86.580.000
22	PENGEMBANGAN REKAM MEDIS POLIKLINIK	89.910.000
23	Pekerjaan Perbaikan Lift	159.276.120
	Jumlah	**2.478.977.969**
B	**Badan Pengembangan Talenta Indonesia**	
1	Paket Pekerjaan Perbaikan Lantai Kamar Tidur dan Selasar Asrama Mawar	173.645.625
2	Perbaikan Lantai Keramik Kamar Tidur & Selasar Asrama Bougenvile	33.527.273
3	Pekerjaan Renovasi Asrama Anggrek, Perbaikan Keramik Kamar Tidur (6 Unit) dan Selasar Lantai	140.624.846
6	Pemeliharaan Gedung Kantor BPTI	61.678.982
9	Pemeliharaan Gedung Kantor BPTI Tahap 2	147.602.916
	Jumlah	**557.079.641**
C	**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbudristek**	
1	Perbaikan Kanopi Mobil Lobi Bawah Gedung Pancasila dan Garuda	168.831.000
	Jumlah	**168.831.000**
	Jumlah Total	**3.204.888.610**

4. Penatausahaan Aset Tetap pada Sekretariat Jenderal Belum Optimal

Kondisi

Neraca (*Unaudited*) Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2023 menyajikan Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Aset Tetap dan Aset Lainnya Sekretariat Jenderal Per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Aset	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Aset Tetap			
Tanah	3.299.755.367.292,00	3.333.874.714.497,00	(34.119.347.205,00)
Peralatan dan Mesin	1.071.345.361.947,00	1.127.376.647.035,00	(56.031.285.088,00)
Gedung dan Bangunan	1.910.041.547.798,00	1.861.040.801.871,00	49.000.745.927,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.094.107.181,00	62.381.935.071,00	(2.287.827.890,00)
Aset Tetap Lainnya	53.287.825.613,00	50.576.810.639,00	2.711.014.974,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	17.969.490.743,00	120.276.721.266,00	(102.307.230.523,00)
Akumulasi Penyusutan	(1.315.780.757.992,00)	(1.274.478.454.914,00)	(41.302.303.078,00)
Jumlah Aset Tetap	**5.096.712.942.582,00**	**5.281.049.175.465,00**	**(184.336.232.883,00)**
Aset Lainnya			
Aset tak berwujud	779.468.549.116,00	381.236.757.796,00	398.231.791.320,00
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	551.283.752.551,00	667.974.367.106,00	(116.690.614.555,00)
Aset Lain-Lain	26.174.913.555,00	41.255.200.224,00	(15.080.286.669,00)
Akumulasi penyusutan/amortisasi	(80.910.620.842,00)	(91.572.122.447,00)	10.661.501.605,00
Jumlah Aset Lainnya	**1.276.016.594.380,00**	**998.894.202.679,00**	**277.122.391.701,00**

Saldo Aset Tetap Setjen per 31 Desember 2023 senilai Rp5.096.712.942.582,00 menurun senilai Rp184.336.232.883,00 dan aset lainnya Per 31 Desember 2023 senilai Rp1.276.016.594.380,00 naik senilai Rp277.122.391.701,00 dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Hasil Pemeriksaan terhadap penatausahaan aset tetap dan aset lainnya pada Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2023, menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. 1.877 Aset dalam Kondisi Rusak Berat pada 11 Satker Masih Tercatat dalam Neraca Sebagai Aset Tetap Sebesar Rp24.764.342.385,00

Berdasarkan database SAKTI diketahui terdapat aset tetap yang berstatus aktif namun dalam kondisi rusak berat dimana seharusnya aset tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasional. Aset tetap yang rusak berat terdiri dari 5 unit aset tetap gedung bangunan di LLDikti Wilayah XIV, 16 unit aset tak berwujud pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan 1.856 aset tetap peralatan dan mesin yang tercatat pada 11 Satker sebesar Rp24.764.342.385,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Aset tetap rusak berat pada Biro Organisasi dan Tata Kelola terdiri dari 17 unit barang yang merupakan alat penghancur kertas, lemari besi, dan laptop. BPK telah melakukan pemeriksaan fisik atas 17 unit barang tersebut yang sudah disimpan di gudang karena sudah rusak berat dan sudah tidak digunakan.
2. Aset tetap rusak berat pada Biro SDM terdiri dari 191 unit barang yang telah rusak berat dan telah dilakukan persetujuan lelang oleh Sekjen berdasarkan surat nomor 43886/MPK.A/UK.01.03/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Persetujuan Penjualan BMN dengan total nilai limit penjualan sebesar Rp25.726.428,00.

3. Aset tetap rusak berat pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) terdiri dari 226 unit barang rusak dalam proses penghapusan dan disimpan di gudang berdasarkan surat nomor 35303/MPK.A/LK.01.03/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Persetujuan Penjualan BMN dari Sekretaris Jenderal.
4. Aset tetap rusak berat pada Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri dari 16 unit barang rusak berat dan tidak digunakan.
5. Pengelola BMN pada Tujuh LLDikti menjelaskan bahwa 1.427 unit barang yang saat ini tercatat pada aset tetap sudah rusak berat.

Rincian 1.877 aset dalam kondisi rusak berat pada 11 Satker yang masih tercatat sebagai aset tetap dalam neraca dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

b. Sebanyak 42 Kendaraan pada 9 Satker Tercatat Tanpa Nomor Polisi Sebesar Rp7.866.822.925,00

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan aset kendaraan pada aplikasi SIMAN diketahui sebanyak 42 kendaraan tidak tercatat nomor polisinya pada sembilan Satker sebesar Rp7.866.822.925,00. Kendaraan dinas yang dicatat tanpa nomor polisi akan mempersulit untuk mengidentifikasi kendaraan dinas dimaksud dan mempersulit proses inventarisasi. Rincian kendaraan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

c. Sebanyak 67 Kendaraan pada 14 Satker Tercatat Tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sebesar Rp11.924.804.088,00

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan aset kendaraan pada aplikasi SIMAN diketahui sebanyak 67 kendaraan tidak tercatat nomor rangka dan nomor mesinnya pada 14 Satker sebesar Rp11.924.804.088,00. Kendaraan dinas yang dicatat tanpa nomor rangka dan nomor mesin akan mempersulit mengidentifikasi kendaraan dinas dimaksud dan mempersulit proses inventarisasi. Rincian kendaraan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

d. Sebanyak 10 Aset pada 3 Satker Tidak Diketahui Keberadaannya Sebesar Rp7.909.500,00

Hasil pemeriksaan fisik diketahui sebanyak 10 aset pada 3 satker tidak ditemukan/tidak diketahui keberadaannya. Rincian jenis aset tetap yang tidak dapat ditemukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Aset Tidak Diketahui Keberadaannya

No.	Satker	Jenis Aset	Merek/Tipe	NUP Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Pusdatin	Mini Bus	Daihatsu	1	1977	1.000.000,00
2	Pusdatin	Mini Bus	Daihatsu	2	1977	1.000.000,00
3	Pusdatin	Sepeda Motor	Honda	1	1976	50.000,00
4	Pusdatin	Sepeda Motor	Yamaha L2S	2	1978	150.000,00
5	Pusdatin	Sepeda Motor	Honda CG 110	4	1979	450.000,00
6	Pusdatin	Sepeda Motor	Honda CG 110	6	1980	517.000,00
7	Pusdatin	Sepeda Motor	Suzuki GP 100	7	1980	532.000,00
8	Pusdatin	Sepeda Motor	Honda GL 100	23	1991	1.906.000,00
9	Biro Perencanaan	Portable Router	Asus Dual-band Wirelles	1	2015	550.000,00

KONSEP

No.	Satker	Jenis Aset	Merek/Tipe	NUP Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
10	Puslapdik	Alat Pemadam Kebakaran	FIREX	1	2011	1.754.500,00
TOTAL						**7.909.500,00**

PPK dan pengelola BMN Pusdatin menjelaskan bahwa 2 unit mobil dan 6 unit motor yang tidak dapat ditelusuri karena melihat jangka waktu sudah melebihi 30 tahun (rentang tahun 1976 s.d 1991) sehingga terkendala untuk mencari informasi atas Asset tersebut. Berdasarkan penjelasan Operator BMN, akibat kebijakan otonomi daerah pada tahun 2002 berdampak pada pengembangan sanggar teknologi komunikasi sebagai UPT Pustekkom Depdiknas menjadi Balai Tekkomdik, kemudian aset berupa kendaraan tersebut digunakan oleh karyawan dari sanggar Balaitekkom yang lama. Meskipun demikian, tim BMN tidak mendapatkan dokumen sumber peralihan aset maupun dokumen sumber lain yang dapat mendukung historis barang maupun lokasi fisik barang di arsip Pustekkom. Tim BMN sudah melakukan koordinasi dengan operator BMN terdahulu, tetapi tetap tidak ditemukan dokumen *history* dan dokumen terkait BMN tersebut. Dari tim BMN ingin mengajukan penghapusan kendaraan bermotor tersebut tetapi terkendala karena secara fisik tidak ditemukan sehingga tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan maupun penghapusan.

e. Sebanyak 23 Unit Laptop Rusak Berat Biro Perencanaan Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp390.896.396,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 21 Maret 2024, operator aset Biro Perencanaan tidak mampu menunjukkan 23 unit laptop yang dinyatakan rusak berat dalam surat keterangan perubahan kondisi BMN No.27385 tanggal 7 Agustus 2023. Laptop-laptop yang dinyatakan rusak berat merupakan laptop pembelian rentang tahun 2018 s.d 2022, dengan uraian sebagai berikut.

1) Ketidakjelasan operator aset dalam menunjukkan lokasi keberadaan laptop

   Hasil wawancara dengan operator aset, bahwa laptop tersebut tersimpan di gudang namun setelah BPK melakukan pemeriksaan fisik di gudang sebagaimana disebutkan oleh operator aset pada saat wawancara ternyata tidak ditemukan ke-23 laptop dimaksud.~~,~~ Operator aset kemudian mengubah keterangannya bahwa laptop tersebut masih dipegang oleh peminjam laptop. BPK meminta seluruh dokumen Berita Acara Pinjam Pakai pada saat pemeriksaan fisik namun operator aset tidak dapat menunjukkannya. pemeriksaan fisik, operator aset melakukan pendataan untuk mengetahui keberadaan 23 laptop rusak berat tersebut melalui berita acara pinjam pakai.

2) Ketidakakuratan informasi yang termuat dalam Berita Acara Pinjam Pakai

   a) Tidak memuat NUP Aset

      Hasil pemeriksaan lebih lanjut menemukan bahwa berita acara pinjam pakai tidak dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan 23 unit laptop karena tidak memuat NUP aset sebagai dasar untuk menselaraskan dengan data SIMAN/SAKTI. Sebagai contoh: laptop rusak berat yang tercatat pada SIMAN/SAKTI yaitu Asus Expertbook P1440FB NUP 107 tidak dapat dicari pada BA Pinjam Pakai untuk mengetahui siapa peminjamnya karena BA Pinjam Pakai tidak memuat informasi NUP. Selain itu

KONSEP

terdapat 6 laptop lainnya dengan merek serupa yaitu NUP 105, 106, 108, 109 dan 110 dengan kondisi baik dan NUP 104 dengan kondisi rusak berat.

b) Tidak dilengkapi dengan Label BMN dan Tidak Dapat Diselaraskan dengan Aplikasi SIMAN

Berdasarkan dokumen pendataan 23 laptop rusak berat yang dilakukan setelah pemeriksaan fisik, diketahui sebanyak 9 unit laptop tidak dilengkapi dengan label BMN dan di klaim sebagai laptop NUP 107, 188, 211, 225, 226, 240, 242, 243 dan 253. Sembilan unit laptop yang di klaim tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena berita acara pinjam pakai tidak memuat NUP laptop, sementara itu serial number yang tertera pada laptop dan berita acara pinjam pakai tidak dapat diselaraskan dengan data SIMAN/SAKTI karena operator aset tidak menginput serial number di aplikasi tersebut. Sedangkan foto 14 unit laptop yang memiliki label BMN juga tidak dapat diyakini kebenarannya, karena NUP pada saat pemeriksaan fisik tidak satupun laptop yang dapat ditunjukkan oleh operator aset dengan alasan masih dibawa oleh peminjam laptop, sehingga BPK tidak dapat meyakini bahwa foto laptop yang dilampirkan bukan merupakan laptop yang baru ditempel stiker/label BMN.

3) Penetapan Status Rusak Berat atas Lima Laptop Tidak Didasarkan pada Data Pengujian Fisik

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sebanyak Lima Laptop pembelian tahun 2022 yang masih dalam masa garansi, tercatat dalam pengajuan Aset Rusak Berat yang seharusnya dapat diajukan lebih dahulu klaim garansinya sebelum diusulkan menjadi rusak berat untuk penghapusan. Operator aset menjelaskan bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh *service center* tidak diketemukan/mendapat vonis permasalahan yang pasti, kondisi permasalahan timbul pada saat digunakan untuk mengolah data dan pemproses data yang berat. Penjelasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan laptop tersebut sudah rusak berat karena tidak didukung oleh bukti, di sisi lain operator aset menjelaskan bahwa hanya menguji secara sampel atas satu unit laptop pembelian tahun 2022 kemudian menyimpulkan bahwa laptop sejenis lainnya juga rusak berat. Selain itu, juga tidak ada dokumen justifikasi dalam menetapkan status laptop menjadi rusak berat seperti catatan kerusakan pada masing-masing laptop.

Rincian 23 unit laptop rusak berat yang tidak diketahui keberadaannya dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

4) Sebanyak Empat Unit Laptop Rusak Berat Berpotensi Hilang Sebesar Rp88.290.000,00

Berdasarkan penjelasan paragraf diatas, karena tidak dapat diyakini kesesuaian dan kebenaran 23 unit laptop rusak berat, BPK melakukan prosedur alternatif dengan cara uji populasi seluruh laptop yang dimiliki oleh Biro Perencanaan dengan membandingkan serial number pada masing-masing unit laptop. Prosedur alternatif ini mengesampingkan kemungkinan bahwa satker dapat membawa laptop pribadi dengan merek sejenis atau meminjam laptop sejenis dari satker lain dan ditempel stiker BMN.

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan data SIMAN/SAKTI, Biro Perencanaan mempunyai laptop merek Asus Expertbook P1440FB sebanyak Tujuh unit yang terdiri dari Dua unit kondisi rusak berat dan Lima unit kondisi baik yang tercatat di SIMAN/SAKTI. Biro perencanaan hanya mampu menunjukkan Tiga unit laptop merek Asus Expertbook P1440FB

KONSEP

yaitu laptop NUP 104, 105 dan 106. Sedangkan sebanyak Empat unit laptop merek Asus Expertbook P1440FB berpotensi hilang dengan NUP 107, 108, 109 dan 110 tahun perolehan 2020. Diantara Empat unit laptop yang berpotensi hilang, Satu unit laptop yaitu Asus Expertbook P1440FB NUP 107 diubah kondisinya menjadi rusak berat oleh operator BMN untuk selanjutnya akan dihapuskan.

Tabel 1.3 4 Unit Laptop Berpotensi Hilang

No.	Jenis Aset	Merek/Tipe	Kondisi	NUP Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Laptop	Asus expertbook P1440FB	Rusak Berat	107	2020	17.820.000,00
2	Laptop	Asus expertbook P1440FB	Baik	108	2020	17.820.000,00
3	Laptop	Asus expertbook P1440FB	Baik	109	2020	17.820.000,00
4	Laptop	Asus expertbook P1440FB	Baik	110	2020	15.820.000,00
TOTAL						**88.290.000,00**

f. Sebanyak 64 Aset pada Dua Satker Tidak Dilengkapi Label BMN Sebesar Rp2.123.384.405,00

Hasil pemeriksaan fisik aset pada 2 satker diketahui sebanyak 64 aset tidak dilengkapi label BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp2.123.384.405,00**.** Aset tetap yang tidak dilengkapi oleh label BMN dapat mempersulit proses inventarisasi dan penelusuran saat cek fisik serta diragukan kesesuaian aset dimaksud dengan catatan BMN. Rekapitulasi hasil pengujian fisik pada 2 satker dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama Satker	Jumlah Aset	Rentang Tahun Perolehan	Total Harga Perolehan (Rp)
1	Biro Hukum	13	2023	407.475.000,00
2	Biro Perencanaan	51	2007 s.d 2023	1.715.909.405,00
TOTAL				**2.123.384.405,00**

Aset tetap yang belum dilengkapi oleh label BMN pada biro hukum berasal dari pengadaan belanja modal tahun anggaran 2023 sedangkan biro perencanaan aset tetap yang berasal dari pengadaan modal tahun anggaran 2023 dan aset tetap tahun sebelumnya. Rincian aset tetap pada 2 satker yang tidak dilengkapi label BMN dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

g. Ruang Server pada Biro Perencanaan tidak dilengkapi Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Seluruh Aset Didalamnya Tidak Dilengkapi Stiker/Label BMN

Hasil pemeriksaan ruang server di Biro Perencanaan diketahui bahwa tidak terdapat daftar barang ruangan (DBR) yang tertempel pada ruangan tersebut serta unit barang yang tersimpan didalamnya tidak terdapat label BMN. Daftar Barang Ruangan (DBR) adalah daftar yang digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian untuk mencatat barang di dalam ruangan. Penyusunan daftar barang ruangan (DBR) dan pelabelan barang milik negara merupakan salah satu tahapan pada siklus pengelolaan BMN tepatnya pada siklus inventarisasi BMN dan pengamanan BMN. Kedua tahap ini dilakukan dalam upaya menciptakan tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN.

Pelabelan BMN tidak hanya dilakukan pada barang yang dibeli/ diperoleh atas beban APBN, tetapi juga barang yang diperoleh atas perolehan lainnya yang sah, seperti hibah/ sumbangan

yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak, ketentuan perundang-undangan dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Pengelola Aset BMN memberikan keterangan bahwa tidak dapat mengakses data DBR yang ada di SIMAN, setelah ditelusuri DBR tersebut harus diinput terlebih dahulu oleh Biro Umum dan PBJ karena gedung yang ditempati biro perencanaan tercatat sebagai aset Biro Umum dan PBJ. Sedangkan tidak adanya label BMN dikarenakan ruang server merupakan pindahan dari lantai 2 gedung C pada saat pemeliharaan ruangan pada tahun 2020.

h. Sebanyak 38 Unit Laptop/Notebook pada Biro Perencanaan tidak dilengkapi Berita Acara Pinjam Pakai

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator aset BMN dan dokumen berita acara pinjam pakai laptop diperoleh informasi bahwa terdapat total 104 berita acara pinjam pakai laptop yang dimiliki oleh Biro Perencanaan. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan bahwa Biro Perencanaan total mempunyai 142 laptop yang saat ini aktif digunakan oleh pegawai Biro Perencanaan yang merupakan informasi yang berasal dari database SAKTI sehingga sebanyak 38 (142 – 104) unit laptop tidak mempunyai BA Pinjam pakai.
Selain itu, berita acara pinjam pakai yang dibuat oleh Biro Perencanaan juga minim informasi karena hanya memuat nama peminjam, merek dan serial number laptop. Berita acara pinjam pakai tidak memuat spesifikasi laptop dan NUP aset sehingga tidak dapat dicocokkan dengan catatan SIMAN/SAKTI. Informasi yang diinput oleh operator aset BMN di SIMAN/SAKTI hanya NUP saja, tidak memuat serial number atau spesifikasi laptop sehingga sulit untuk melakukan penelusuran dan inventarisasi laptop karena tidak dapat disandingkan antara database SIMAN/SAKTI dengan berita acara pinjam pakai laptop. Operator aset BMN saat ini sedang mengupayakan untuk menginventarisasi 38 Laptop yang belum mempunyai berita acara pinjam pakai.

Kriteria

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
   1) Pasal 6 Ayat (2.f) menyatakan bahwa Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
   2) Pasal 6 Ayat (2.j) menyatakan bahwa Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
   3) Pasal 6 Ayat (2.l) menyatakan bahwa Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
   4) Pasal 30 Ayat (3) menyatakan bahwa pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu, tanggungjawab peminjam serta hak dan kewajiban para pihak.
b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:
   1) Pasal 1 Ayat (14) menyatakan bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN;

KONSEP

2) Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan BMN ke dalam buku barang pada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya menyampaikannya kepada pengelola barang;
3) Pasal 18 Ayat (5) menyatakan bahwa Pengguna barang melakukan pendaftaran, pencatatan, dan/atau pemutakhiran daftar barang berdasarkan hasil inventarisasi;
4) Pasal 38 Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelola barang wajib melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;

Akibat
Hal tersebut mengakibatkan:

a. Tujuan tertib administrasi atas pengelolaan BMN belum sepenuhnya tercapai;
b. Potensi penyalahgunaan BMN;
c. Saldo aset tetap dan aset lainnya per 31 Desember 2023 belum menggambarkan kondisi senyatanya;
d. Potensi kerugian negara atas Lima unit laptop yang berpotensi hilang sebesar Rp88.290.000,00

Sebab
Hal tersebut disebabkan:
a. Pelaksana penatausahaan BMN tidak melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
b. Pengguna barang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya terkait penatausahaan BMN yang menjadi tanggungjawabnya.

Komentar Instansi
(*terlampir*)

KONSEP

Lampiran 1

1.900 Aset Rusak Berat yang Masih Tercatat Sebagai Aset Tetap Dalam Neraca

No.	Nama Satker	Nama Barang	Kondisi	Merek	No. Aset	Status Aset	Tgl Perolehan	Jenis Aset	Harga Perolehan
1	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Alat Penghancur Kerta	Rusak Berat	Kozure KS-8900C	5	Aset Aktif	9/14/2020	Peralatan dan Mesin	4.730.000,00
2	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari Besi Pintu Kaca Elit	73	Aset Aktif	12/23/2015	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
3	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	elte	58	Aset Aktif	5/11/2012	Peralatan dan Mesin	2.918.388,00
4	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lap Top	Rusak Berat	Notebook ASUS	4	Aset Aktif	12/7/2019	Peralatan dan Mesin	11.110.000,00
5	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lap Top	Rusak Berat	Notebook ASUS	3	Aset Aktif	12/7/2019	Peralatan dan Mesin	11.110.000,00
6	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari Besi	14	Aset Aktif	3/1/2017	Peralatan dan Mesin	3.900.000,00
7	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Elite	67	Aset Aktif	11/19/2015	Peralatan dan Mesin	3.080.000,00
8	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari Besi Pintu Kaca Elit	30	Aset Aktif	12/23/2015	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
9	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari Besi Pintu Kaca Elit	74	Aset Aktif	12/23/2015	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
10	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Elite	9	Aset Aktif	7/25/2007	Peralatan dan Mesin	2.926.000,00
11	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Elite	6	Aset Aktif	7/25/2007	Peralatan dan Mesin	2.926.000,00
12	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Elite	43	Aset Aktif	7/25/2007	Peralatan dan Mesin	2.926.000,00
13	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU KACA	53	Aset Aktif	6/3/2008	Peralatan dan Mesin	3.575.000,00
14	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari Besi Pintu Besi Elite	33	Aset Aktif	12/23/2015	Peralatan dan Mesin	3.080.000,00
15	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari Besi Pintu Kaca Elit	75	Aset Aktif	12/10/2015	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
16	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Elite	19	Aset Aktif	11/19/2015	Peralatan dan Mesin	3.080.000,00
17	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Elite EL-438	38	Aset Aktif	7/5/2015	Peralatan dan Mesin	3.851.950,00
18	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Uk 200x100x50cm	52	Aset Aktif	9/2/2010	Peralatan dan Mesin	4.235.000,00
19	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	72	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
20	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	93	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
21	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	77	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
22	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	86	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
23	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Uk 200x100x50cm	53	Aset Aktif	9/2/2010	Peralatan dan Mesin	4.235.000,00
24	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	69	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
25	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Alat Penghancur Kerta	Rusak Berat	AsmixSC7520CD	11	Aset Aktif	11/30/2012	Peralatan dan Mesin	5.500.000,00
26	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Dispenser	Rusak Berat	Sharp SWD-72EHL-BK	13	Aset Aktif	5/5/2016	Peralatan dan Mesin	3.350.000,00
27	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	A.C. Split	Rusak Berat	AC Daikin Split Wall 1 PK	15	Aset Aktif	3/19/2018	Peralatan dan Mesin	9.300.000,00
28	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU BESI	146	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
29	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 436-SP	249	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.149.850,00
30	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STEEL CUPBOARD 438	138	Aset Aktif	11/8/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
31	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	92	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
32	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU KACA SLIDING	151	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
33	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	SWING	106	Aset Aktif	11/9/2009	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
34	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 438-SP	218	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.399.980,00
35	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Mesin Ketik Manual St	Rusak Berat	Olympia SM.18	21	Aset Aktif	3/14/2016	Peralatan dan Mesin	3.250.000,00
36	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Mesin Hitung Elektroni	Rusak Berat	Katkulator Casio (DH-160)	1	Aset Aktif	3/6/2017	Peralatan dan Mesin	340.000,00
37	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	TELE CUPBOARD	61	Aset Aktif	11/17/2008	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
38	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU BESI SWING STEE	97	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
39	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	TELE CUPBOARD	62	Aset Aktif	11/17/2008	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
40	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	90	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
41	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU BESI SWING STEE	96	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
42	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU BESI	144	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
43	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU BESI	147	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
44	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 436-SP	245	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.149.850,00
45	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Jam Mekanis	Rusak Berat	SEIKO	5	Aset Aktif	5/25/2009	Peralatan dan Mesin	396.000,00
46	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Jam Mekanis	Rusak Berat	SEIKO	8	Aset Aktif	5/25/2009	Peralatan dan Mesin	396.000,00
47	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Portable Air Conditione	Rusak Berat	Air Cooler Sanyo REF-B100	1	Aset Aktif	5/5/2016	Peralatan dan Mesin	2.500.000,00
48	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Dispenser	Rusak Berat	Sharp SWD-72EHL-BK	15	Aset Aktif	5/5/2016	Peralatan dan Mesin	3.350.000,00
49	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	75	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
50	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	94	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
51	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	71	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
52	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	74	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
53	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STEEL CUPBOARD 438	135	Aset Aktif	11/8/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
54	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	SWING	105	Aset Aktif	11/9/2009	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
55	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STEEL CUPBOARD 438	129	Aset Aktif	11/8/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
56	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STELLCUPBOARD	63	Aset Aktif	12/11/2008	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
57	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	SLINDING	100	Aset Aktif	11/9/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
58	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari besi arsip uk.183x92	112	Aset Aktif	5/24/2010	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
59	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 436-SP	247	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.149.850,00
60	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari besi arsip uk.183x92	111	Aset Aktif	5/24/2010	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
61	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Stel cupboard 438	127	Aset Aktif	8/11/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
62	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STEEL CUPBOARD 438	130	Aset Aktif	11/8/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
63	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	rutin	140	Aset Aktif	6/24/1991	Peralatan dan Mesin	494.000,00
64	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Stel cupboard 438	126	Aset Aktif	8/11/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
65	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	91	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
66	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari besi arsip uk.183x92	110	Aset Aktif	5/24/2010	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
67	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	TELE CUPBOARD	60	Aset Aktif	11/17/2008	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
68	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU KACA SLIDING	150	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
69	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	SWING	103	Aset Aktif	11/9/2009	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
70	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	95	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
71	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 436-SP	251	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.149.850,00
72	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	LCD Projector Epson EB-94	10	Aset Aktif	12/8/2015	Peralatan dan Mesin	10.707.771,00
73	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	EPSON EB-1776W	16	Aset Aktif	8/27/2014	Peralatan dan Mesin	14.691.000,00
74	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Portable Air Conditione	Rusak Berat	Merk Klaz Type DK A330	2	Aset Aktif	12/5/2017	Peralatan dan Mesin	1.760.000,00
75	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Oven Listrik	Rusak Berat	Sharp Microwave R728(W)-	1	Aset Aktif	5/5/2016	Peralatan dan Mesin	3.250.000,00
76	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Brandkas	Rusak Berat	Daichiban	2	Aset Aktif	12/14/2007	Peralatan dan Mesin	3.635.500,00
77	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Scanner (Peralatan Mi	Rusak Berat	HP Pro 2500 Flatbed	29	Aset Aktif	11/28/2018	Peralatan dan Mesin	7.590.000,00
78	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Scanner (Peralatan Mi	Rusak Berat	Fujit F1-5530C2	16	Aset Aktif	11/4/2013	Peralatan dan Mesin	42.472.100,00
79	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	104	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
80	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	EPSON PRINTER L565	163	Aset Aktif	9/26/2018	Peralatan dan Mesin	4.054.500,00
81	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Officejet 7612 Wide-For	139	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	3.480.000,00
82	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 436-SP	244	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.149.850,00
83	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STEEL CUPBOARD 438	136	Aset Aktif	11/8/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
84	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	87	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
85	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	94	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
86	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	PC HP PAVILLION 23G020	196	Aset Aktif	5/7/2015	Peralatan dan Mesin	12.461.600,00
87	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Router	Rusak Berat	ROUTER TP LINK (TL-WDI	19	Aset Aktif	11/6/2014	Peralatan dan Mesin	1.133.000,00
88	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Router	Rusak Berat	ROUTER TP LINK (TL-WDI	21	Aset Aktif	11/6/2014	Peralatan dan Mesin	1.133.000,00
89	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	Lenovo Thing center	262	Aset Aktif	11/4/2013	Peralatan dan Mesin	13.714.360,00
90	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lap Top	Rusak Berat	HP Pavillion 14-N233TX	28	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	13.216.300,00
91	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Ultra Mobile P.C.	Rusak Berat	Samsung Galaxi Tab38.0	3	Aset Aktif	12/23/2013	Peralatan dan Mesin	5.099.600,00
92	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Ultra Mobile P.C.	Rusak Berat	Samsung Galaxi Tab37.0	16	Aset Aktif	12/23/2013	Peralatan dan Mesin	4.158.000,00
93	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	105	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
94	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	SWING	107	Aset Aktif	11/9/2009	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
95	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Stel cupboard 438	123	Aset Aktif	8/11/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
96	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	98	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
97	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	145X265X50	139	Aset Aktif	11/16/2010	Peralatan dan Mesin	11.935.000,00
98	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	101	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
99	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 436-SP	248	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.149.850,00
100	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STELLCUPBOARD	73	Aset Aktif	12/11/2008	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
101	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Elite Type 436	187	Aset Aktif	10/17/2014	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
102	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lap Top	Rusak Berat	HP Pavillion 14-N233TX	32	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	13.216.300,00
103	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lap Top	Rusak Berat	HP Pavillion 14-N233TX	29	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	13.216.300,00
104	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Ultra Mobile P.C.	Rusak Berat	Samsung Galaxi Tab37.0	17	Aset Aktif	12/23/2013	Peralatan dan Mesin	4.158.000,00
105	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	DOT MATRIX EPSON LQ 2	121	Aset Aktif	7/4/2013	Peralatan dan Mesin	12.265.000,00
106	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	102	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
107	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	103	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
108	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	Toshiba Canvio Ready 3.0	1	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	790.000,00
109	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	Toshiba Canvio Ready 3.0	3	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	790.000,00
110	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	Toshiba Canvio Ready 3.0	7	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	790.000,00
111	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	76	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
112	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Uk 200x100x50cm	55	Aset Aktif	9/2/2010	Peralatan dan Mesin	4.235.000,00
113	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Scanner (Peralatan Mi	Rusak Berat	CANNON LIDE 100 CALOR	6	Aset Aktif	9/7/2009	Peralatan dan Mesin	733.700,00
114	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laser Jet	60	Aset Aktif	6/21/2010	Peralatan dan Mesin	6.981.700,00

115	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	93	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
116	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Printer HP Laserjet Pro M40	115	Aset Aktif	12/8/2015	Peralatan dan Mesin	4.420.701,00
117	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	99	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
118	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Stel cupboard 438	128	Aset Aktif	8/11/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
119	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	WD My Passport SSD 256 G	11	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	1.640.000,00
120	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	88	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
121	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STEEL CUPBOARD 438	134	Aset Aktif	11/8/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
122	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	89	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
123	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 436-SP	246	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.149.850,00
124	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Stel cupboard 438	121	Aset Aktif	8/11/2010	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
125	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	pINTU KACA STEELCUPOA	86	Aset Aktif	6/1/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
126	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	SLINDING	99	Aset Aktif	11/9/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
127	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Switch	Rusak Berat	HUB Switch HP 1810-24(J9	3	Aset Aktif	12/5/2016	Peralatan dan Mesin	3.267.000,00
128	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	ELITE 436-SP	250	Aset Aktif	7/15/2013	Peralatan dan Mesin	2.149.850,00
129	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU KACA SLIDING	149	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
130	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	Lenovo All-in One IdeaCent	298	Aset Aktif	6/19/2019	Peralatan dan Mesin	16.800.000,00
131	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	HP All In One Business Pro	289	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	16.340.000,00
132	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	Lenovo All-in One IdeaCent	300	Aset Aktif	6/19/2019	Peralatan dan Mesin	16.800.000,00
133	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lap Top	Rusak Berat	HP Pavillion 14-N233TX	31	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	13.216.300,00
134	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lap Top	Rusak Berat	HP Pavillion 14-N233TX	27	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	13.216.300,00
135	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lap Top	Rusak Berat	Laptop Mcbook Air (MJVG2	40	Aset Aktif	11/23/2015	Peralatan dan Mesin	26.697.827,00
136	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU BESI	145	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
137	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	SLINDING	102	Aset Aktif	11/9/2009	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
138	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	SWING	104	Aset Aktif	11/9/2009	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
139	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	100	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
140	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP laser Jet	47	Aset Aktif	6/21/2010	Peralatan dan Mesin	4.230.600,00
141	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	Toshiba Canvio Ready 3.0	2	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	790.000,00
142	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	LCD Projector Epson EB-94	13	Aset Aktif	12/8/2015	Peralatan dan Mesin	10.707.771,00
143	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP laser Jet	43	Aset Aktif	6/21/2010	Peralatan dan Mesin	4.230.600,00
144	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	Toshiba Canvio Ready 3.0	6	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	790.000,00
145	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laser Jet Pro MFP M13	133	Aset Aktif	8/30/2017	Peralatan dan Mesin	2.650.000,00
146	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	Toshiba Canvio Ready 3.0	4	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	790.000,00
147	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	WD My Passport SSD 256 G	9	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	1.640.000,00
148	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	WD My Passport SSD 256 G	8	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	1.640.000,00
149	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Router	Rusak Berat	ROUTER TP LINK (TL-WDF	20	Aset Aktif	11/6/2014	Peralatan dan Mesin	1.133.000,00
150	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Router	Rusak Berat	ROUTER TP LINK (TL-WDF	18	Aset Aktif	11/6/2014	Peralatan dan Mesin	1.133.000,00
151	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	Lenovo Thing center	266	Aset Aktif	11/4/2013	Peralatan dan Mesin	13.714.360,00
152	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	EPSON EB-1776W	15	Aset Aktif	8/27/2014	Peralatan dan Mesin	14.691.000,00
153	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lap Top	Rusak Berat	HP Pavillion 14-N233TX	33	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	13.216.300,00
154	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Ultra Mobile P.C.	Rusak Berat	Samsung Galaxi Tab38.0	8	Aset Aktif	12/23/2013	Peralatan dan Mesin	5.099.600,00
155	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Router	Rusak Berat	Modem D-linkDWR 530	17	Aset Aktif	11/26/2012	Peralatan dan Mesin	2.420.000,00
156	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Ultra Mobile P.C.	Rusak Berat	Samsung Galaxi Tab38.0	7	Aset Aktif	12/23/2013	Peralatan dan Mesin	5.099.600,00
157	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Scanner (Peralatan Mi	Rusak Berat	Fujitsu Scansnap (iX500)	28	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	9.090.000,00
158	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Scanner (Peralatan Mi	Rusak Berat	Fujit F1-5530C2	15	Aset Aktif	11/4/2013	Peralatan dan Mesin	42.472.100,00
159	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet M130NW	150	Aset Aktif	12/6/2018	Peralatan dan Mesin	2.695.000,00
160	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laserjet Pro P1606DN	97	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	4.776.100,00
161	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	LCD Projector Epson EB-94	11	Aset Aktif	12/8/2015	Peralatan dan Mesin	10.707.771,00
162	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lap Top	Rusak Berat	HP Pavillion 14-N233TX	30	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	13.216.300,00
163	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Ultra Mobile P.C.	Rusak Berat	Samsung Galaxi Tab38.0	9	Aset Aktif	12/23/2013	Peralatan dan Mesin	5.099.600,00
164	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	70	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
165	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Uk 200x100x50cm	54	Aset Aktif	9/2/2010	Peralatan dan Mesin	4.235.000,00
166	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Scanner (Peralatan Mi	Rusak Berat	Scanner Kodak i2800	9	Aset Aktif	11/6/2014	Peralatan dan Mesin	34.100.000,00
167	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Scanner (Peralatan Mi	Rusak Berat	Scanner Kodak A3	11	Aset Aktif	11/6/2014	Peralatan dan Mesin	25.300.000,00
168	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Officejet 7612 Wide-For	141	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	3.480.000,00
169	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Rak Besi	Rusak Berat	Maxitrillon type MT-SA	73	Aset Aktif	8/2/2013	Peralatan dan Mesin	2.255.000,00
170	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Mesin Barcode	Rusak Berat	Motorolla	4	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	2.023.900,00
171	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP laser Jet	46	Aset Aktif	6/21/2010	Peralatan dan Mesin	4.230.600,00
172	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Officejet 7612 Wide-For	140	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	3.480.000,00
173	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Facsimile	Rusak Berat	Panasonic KX-FM-387	26	Aset Aktif	3/14/2016	Peralatan dan Mesin	2.500.000,00
174	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Mesin Barcode	Rusak Berat	Motorolla	6	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	2.032.500,00
175	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Telephone	10	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	170.000,00
176	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Telephone	11	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	170.000,00
177	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Telephone	4	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	170.000,00
178	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Mesin Barcode	Rusak Berat	Motorolla	3	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	2.023.900,00
179	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Facsimile	Rusak Berat	PANASONIC KX FPG 378	15	Aset Aktif	7/31/2008	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
180	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Facsimile	Rusak Berat	PANASONIC KX FPG 378	16	Aset Aktif	7/31/2008	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
181	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	PC All in One (HO Pro One	237	Aset Aktif	12/8/2015	Peralatan dan Mesin	19.759.186,00
182	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	PC HP PAVILLION 23G020	200	Aset Aktif	5/7/2015	Peralatan dan Mesin	12.461.600,00
183	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	PC HP PAVILLION 23G020	210	Aset Aktif	5/7/2015	Peralatan dan Mesin	12.461.600,00
184	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Voice Recorder	Rusak Berat	Sony Voice Recorder ICD-P	1	Aset Aktif	5/5/2016	Peralatan dan Mesin	1.250.000,00
185	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	P.C Unit	Rusak Berat	PC HP PAVILLION 23G020	178	Aset Aktif	5/7/2015	Peralatan dan Mesin	12.461.600,00
186	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	External/ Portable Hard	Rusak Berat	Toshiba Canvio Ready 3.0	5	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	790.000,00
187	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Voice Recorder	Rusak Berat	Sony Voice Recorder ICD-P	2	Aset Aktif	5/5/2016	Peralatan dan Mesin	1.250.000,00
188	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Crimping Tolls	Rusak Berat	Krisbow Crimping Mudular I	2	Aset Aktif	3/6/2017	Peralatan dan Mesin	450.000,00
189	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Crimping Tolls	Rusak Berat	Krisbow Crimping Mudular I	1	Aset Aktif	3/6/2017	Peralatan dan Mesin	450.000,00
190	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Vertikal Blind	Rusak Berat	Rollerlblind uk. 9 m2	2	Aset Aktif	2/26/2016	Peralatan dan Mesin	6.698.000,00
191	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Vertikal Blind	Rusak Berat	Rollerblind uk. 23,75 m2	1	Aset Aktif	2/26/2016	Peralatan dan Mesin	15.135.000,00
192	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Mesin Barcode	Rusak Berat	Motorolla	1	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	2.023.900,00
193	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Switch	Rusak Berat	HUB Switch HP 1810-24(J9	2	Aset Aktif	12/5/2016	Peralatan dan Mesin	3.267.000,00
194	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU KACA SLIDING	148	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
195	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Switch	Rusak Berat	HUB Switch HP 1810-24(J9	4	Aset Aktif	12/5/2016	Peralatan dan Mesin	3.267.000,00
196	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Telephone	3	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	170.000,00
197	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Telephone	9	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	170.000,00
198	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	PINTU BESI	143	Aset Aktif	12/9/2011	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
199	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Elite Type 436	189	Aset Aktif	10/17/2014	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
200	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	STELLCUPBOARD	75	Aset Aktif	12/11/2008	Peralatan dan Mesin	4.510.000,00
201	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Mesin Barcode	Rusak Berat	Motorolla	2	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	2.023.900,00
202	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari besi arsip uk.183x92	114	Aset Aktif	5/24/2010	Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
203	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Telephone	5	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	170.000,00
204	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Telephone	6	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	170.000,00
205	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Mesin Barcode	Rusak Berat	Motorolla	5	Aset Aktif	8/4/2014	Peralatan dan Mesin	2.023.900,00
206	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Telephone	2	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	170.000,00
207	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Telephone (PABX)	Rusak Berat	Pesawat Telepone SH 2236	1	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	165.000,00
208	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	Facsimile	Rusak Berat	PANASONIC	21	Aset Aktif	12/3/2009	Peralatan dan Mesin	2.640.000,00
209	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Multi Tester	Rusak Berat		34	Aset Aktif	1/1/1996	Peralatan dan Mesin	100.000,00
210	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tempat Prepara	Rusak Berat	Resistor Box	8	Aset Aktif	12/31/2001	Peralatan dan Mesin	22.000,00
211	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Pipa U	Rusak Berat		3	Aset Aktif	1/1/2001	Peralatan dan Mesin	135.000,00
212	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Digital Multi Tester	Rusak Berat		3	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	350.000,00
213	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Amperemeter	Rusak Berat		26	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	650.000,00
214	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Amperemeter	Rusak Berat		25	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	650.000,00
215	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mixer (Alat Laboratoriu	Rusak Berat	LM 800	1	Aset Aktif	9/28/2007	Peralatan dan Mesin	2.400.000,00
216	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Digital Multi Tester	Rusak Berat		4	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	350.000,00
217	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Digital Multi Tester	Rusak Berat		1	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	350.000,00
218	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Vacuum System	Rusak Berat	Aksesori Vakum	2	Aset Aktif	12/31/1999	Peralatan dan Mesin	5.000,00
219	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	230/240 VOLT, 10 A.50/60	1	Aset Aktif	12/27/2007	Peralatan dan Mesin	3.000.000,00
220	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	230/240 VOLT, 10 A.50/60	3	Aset Aktif	12/27/2007	Peralatan dan Mesin	3.000.000,00
221	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Interface	Rusak Berat	Laboratory Interface Systen	1	Aset Aktif	12/31/2001	Peralatan dan Mesin	32.000,00
222	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound Monitor/ Sirine	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/31/2003	Peralatan dan Mesin	75.000,00
223	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Amperemeter	Rusak Berat		24	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	650.000,00
224	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Thermometer (Alat Lab	Rusak Berat		4	Aset Aktif	1/1/1993	Peralatan dan Mesin	150.000,00
225	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Multi Tester	Rusak Berat		35	Aset Aktif	1/1/1996	Peralatan dan Mesin	100.000,00
226	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Multi Tester	Rusak Berat		33	Aset Aktif	1/1/1996	Peralatan dan Mesin	100.000,00
227	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stabilizer	Rusak Berat	FUMITSU	3	Aset Aktif	1/2/2002	Peralatan dan Mesin	779.000,00
228	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Autoclave (Alat Labora	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	250.000,00
229	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Alat Gerinda	Rusak Berat		3	Aset Aktif	12/23/2003	Peralatan dan Mesin	175.000,00
230	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stabilizer	Rusak Berat	SUMATSU	2	Aset Aktif	10/6/2005	Peralatan dan Mesin	900.000,00
231	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stabilizer	Rusak Berat	FUMITSU	4	Aset Aktif	1/2/2004	Peralatan dan Mesin	614.000,00
232	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lambang Garuda Pan	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/31/2002	Peralatan dan Mesin	75.000,00

233	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rak Besi	Rusak Berat		10	Aset Aktif	12/31/2002	Peralatan dan Mesin	250.000,00
234	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Alat Pengaman / Sinya	Rusak Berat		1	Aset Aktif	5/11/2007	Peralatan dan Mesin	280.000,00
235	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Pipa U	Rusak Berat		2	Aset Aktif	1/1/2001	Peralatan dan Mesin	135.000,00
236	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Digital Multi Tester	Rusak Berat		2	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	350.000,00
237	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound Monitor/ Sirine	Rusak Berat		2	Aset Aktif	12/31/2003	Peralatan dan Mesin	75.000,00
238	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Calorimeter	Rusak Berat		2	Aset Aktif	1/1/1993	Peralatan dan Mesin	145.000,00
239	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mesin Ketik Manual Pc	Rusak Berat		3	Aset Aktif	1/1/1983	Peralatan dan Mesin	125.000,00
240	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Penctrometer	Rusak Berat	Dutch Gone Penetrometer	2	Aset Aktif	12/31/2001	Peralatan dan Mesin	43.000,00
241	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CARRIER	3	Aset Aktif	1/1/2001	Peralatan dan Mesin	1.880.000,00
242	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Watt Meter	Rusak Berat		7	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	150.000,00
243	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	230/240 VOLT, 10 A.50/60	2	Aset Aktif	12/27/2007	Peralatan dan Mesin	3.000.000,00
244	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Micrometer	Rusak Berat		1	Aset Aktif	1/1/2001	Peralatan dan Mesin	150.000,00
245	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Overhead Projector	Rusak Berat		5	Aset Aktif	1/1/2001	Peralatan dan Mesin	3.000.000,00
246	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat		29	Aset Aktif	12/31/2007	Peralatan dan Mesin	1.250.000,00
247	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Scanner (Universal Tes	Rusak Berat		4	Aset Aktif	1/1/1993	Peralatan dan Mesin	150.000,00
248	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Termometer Standar	Rusak Berat		1	Aset Aktif	1/1/1999	Peralatan dan Mesin	750.000,00
249	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Termometer Standar	Rusak Berat		3	Aset Aktif	1/1/2001	Peralatan dan Mesin	140.000,00
250	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mimbar/Podium	Rusak Berat	-	1	Aset Aktif	1/1/2003	Peralatan dan Mesin	722.000,00
251	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stabilizer	Rusak Berat	ICA	1	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	1.517.000,00
252	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Overhead Projector	Rusak Berat	In Focus	3	Aset Aktif	12/31/2002	Peralatan dan Mesin	347.000,00
253	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Vernier Caliper Height	Rusak Berat		2	Aset Aktif	12/23/2003	Peralatan dan Mesin	250.000,00
254	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Vibrating Test Equipme	Rusak Berat	Vibrator dan Katrol	1	Aset Aktif	12/31/2001	Peralatan dan Mesin	106.000,00
255	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Conductivity Meter (Ala	Rusak Berat	Konductivity	1	Aset Aktif	12/31/1993	Peralatan dan Mesin	21.000,00
256	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Anak Timbangan Dari	Rusak Berat		8	Aset Aktif	1/1/1993	Peralatan dan Mesin	150.000,00
257	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Multi Meter	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/31/2003	Peralatan dan Mesin	150.000,00
258	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Termometer Standar	Rusak Berat		4	Aset Aktif	1/1/2001	Peralatan dan Mesin	140.000,00
259	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stopwatch	Rusak Berat		2	Aset Aktif	1/1/1999	Peralatan dan Mesin	145.000,00
260	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	TOSHIBA	17	Aset Aktif	1/1/2004	Peralatan dan Mesin	129.283.000,00
261	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stopwatch	Rusak Berat		1	Aset Aktif	1/1/1999	Peralatan dan Mesin	145.000,00
262	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA 600 VA	3	Aset Aktif	4/28/2006	Peralatan dan Mesin	1.285.000,00
263	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA 600 VA	5	Aset Aktif	4/28/2006	Peralatan dan Mesin	1.285.000,00
264	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Pesawat Telephone	Rusak Berat	LG	23	Aset Aktif	5/11/2007	Peralatan dan Mesin	240.000,00
265	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Besi/Metal	Rusak Berat		5	Aset Aktif	12/31/2004	Peralatan dan Mesin	200.000,00
266	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stopwatch	Rusak Berat		3	Aset Aktif	1/1/1999	Peralatan dan Mesin	145.000,00
267	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stopwatch	Rusak Berat		4	Aset Aktif	1/1/1999	Peralatan dan Mesin	145.000,00
268	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat		10	Aset Aktif	1/1/1980	Peralatan dan Mesin	450.000,00
269	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Stopwatch	Rusak Berat		5	Aset Aktif	1/1/1999	Peralatan dan Mesin	145.000,00
270	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tool Set	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/31/2003	Peralatan dan Mesin	80.000,00
271	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA 600 VA	1	Aset Aktif	4/28/2006	Peralatan dan Mesin	1.285.000,00
272	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA	6	Aset Aktif	9/28/2007	Peralatan dan Mesin	6.200.000,00
273	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Power Supply (Peralat	Rusak Berat		2	Aset Aktif	9/7/2004	Peralatan dan Mesin	150.000,00
274	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA 1200 VA	9	Aset Aktif	12/27/2007	Peralatan dan Mesin	2.990.000,00
275	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Pipa U	Rusak Berat		4	Aset Aktif	12/31/2003	Peralatan dan Mesin	125.000,00
276	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Termometer Standar	Rusak Berat		2	Aset Aktif	1/1/1999	Peralatan dan Mesin	750.000,00
277	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Amperemeter	Rusak Berat		23	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	650.000,00
278	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA	8	Aset Aktif	12/27/2007	Peralatan dan Mesin	3.000.000,00
279	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		9	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
280	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tabung 02	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/23/2003	Peralatan dan Mesin	250.000,00
281	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Welding Machine	Rusak Berat	Electrical Welding Machine	1	Aset Aktif	12/31/2001	Peralatan dan Mesin	44.000,00
282	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		6	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
283	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rotary Saw	Rusak Berat	Jig Saw Blade	1	Aset Aktif	12/31/2001	Peralatan dan Mesin	25.000,00
284	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		10	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
285	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
286	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Vernier Caliper Height	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/23/2003	Peralatan dan Mesin	250.000,00
287	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		13	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
288	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA 600 VA	4	Aset Aktif	4/28/2006	Peralatan dan Mesin	1.285.000,00
289	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA	7	Aset Aktif	9/28/2007	Peralatan dan Mesin	6.200.000,00
290	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		2	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
291	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		5	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
292	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		7	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
293	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		14	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
294	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rak Kayu	Rusak Berat		31	Aset Aktif	12/31/2002	Peralatan dan Mesin	250.000,00
295	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		3	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
296	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		4	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
297	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		12	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
298	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		8	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
299	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		11	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
300	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		16	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
301	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Concrete Mould	Rusak Berat		15	Aset Aktif	12/23/2004	Peralatan dan Mesin	100.000,00
302	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA 600 VA	2	Aset Aktif	4/28/2006	Peralatan dan Mesin	1.285.000,00
303	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Brandkas	Rusak Berat	Delica	2	Aset Aktif	6/22/1984	Peralatan dan Mesin	75.000,00
304	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Brandkas	Rusak Berat	Delika	1	Aset Aktif	6/22/1984	Peralatan dan Mesin	195.000,00
305	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mini Bus (Penumpang	Rusak Berat		1	Aset Aktif	10/10/1987	Peralatan dan Mesin	7.930.000,00
306	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	124	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
307	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	105	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
308	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	56	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
309	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	116	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
310	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	134	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
311	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	Biro Type 2	145	Aset Aktif	11/6/2009	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
312	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	Biro Type 2	150	Aset Aktif	11/6/2009	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
313	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	54	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
314	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	92	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
315	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	100	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
316	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	120	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
317	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	81	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
318	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	84	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
319	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	128	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
320	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	125	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
321	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	55	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
322	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	108	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
323	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	70	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
324	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	77	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
325	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	113	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
326	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	60	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
327	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	91	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
328	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	123	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
329	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	132	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
330	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	128	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
331	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	125	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
332	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	Biro Type 2	146	Aset Aktif	11/6/2009	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
333	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	88	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
334	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	89	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
335	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	112	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
336	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	115	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
337	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	129	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
338	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	Biro Type 2	151	Aset Aktif	11/6/2009	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
339	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	95	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
340	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	101	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
341	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	111	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
342	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	127	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
343	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	61	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
344	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	71	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
345	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	68	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
346	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	67	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
347	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	109	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
348	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	127	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
349	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	130	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
350	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	115	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00

351	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	124	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
352	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	Biro Type 2	148	Aset Aktif	11/6/2009	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
353	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	136	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
354	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	93	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
355	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	94	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
356	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	57	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
357	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	78	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
358	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	63	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
359	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	58	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
360	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	62	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
361	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	65	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
362	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	87	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
363	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	73	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
364	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	110	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
365	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	126	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
366	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	66	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
367	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	83	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
368	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	121	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
369	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	59	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
370	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	97	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
371	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	106	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
372	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	118	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
373	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	122	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
374	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	135	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
375	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	99	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
376	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	113	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
377	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	126	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
378	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	102	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
379	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	76	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
380	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	80	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
381	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	117	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
382	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	64	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
383	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	69	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
384	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	86	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
385	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	114	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
386	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	Biro Type 2	149	Aset Aktif	11/6/2009	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
387	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	133	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
388	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	Teakwood	30	Aset Aktif	1/10/2003	Peralatan dan Mesin	1.106.000,00
389	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	114	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
390	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	103	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
391	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	104	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
392	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	-	131	Aset Aktif	5/8/2006	Peralatan dan Mesin	890.000,00
393	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	Biro Type 2	147	Aset Aktif	11/6/2009	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
394	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	116	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
395	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	75	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
396	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	90	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
397	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	98	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
398	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	123	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
399	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	119	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
400	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	82	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
401	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	122	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
402	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	96	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
403	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	53	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
404	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	72	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
405	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	107	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
406	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	85	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
407	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura (Kursi Sidang)	74	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	410.000,00
408	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal komputer (rakitan)	13	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
409	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	P IV 1,3 GHZ	11	Aset Aktif	12/12/2001	Peralatan dan Mesin	17.851.500,00
410	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	P IV 1,3 GHZ	12	Aset Aktif	12/12/2001	Peralatan dan Mesin	17.851.500,00
411	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal komputer (rakitan)	14	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
412	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal komputer (rakitan)	15	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
413	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal komputer (rakitan)	16	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
414	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer (rakitan)	17	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
415	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer (rakitan)	18	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
416	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer (rakitan)	22	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
417	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer (rakitan)	19	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
418	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer (rakitan)	20	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
419	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer (rakitan)	21	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
420	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer (rakitan)	23	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
421	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer (rakitan)	24	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
422	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal Komputer (rakitan	25	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
423	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal Komputer (Rakitar	26	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
424	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal Komputer (Rakitar	27	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
425	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal Komputer (Rakitar	28	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
426	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal Komputer (Rakitar	29	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	5.313.000,00
427	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal komputer network	30	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	7.700.000,00
428	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal komputer network	31	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	7.700.000,00
429	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	MUSTANG	18	Aset Aktif	12/31/1992	Peralatan dan Mesin	190.000,00
430	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	MUSTANG	19	Aset Aktif	12/31/1992	Peralatan dan Mesin	190.000,00
431	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal Komputer Network	32	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	7.700.000,00
432	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	personal komputer network	33	Aset Aktif	12/22/2006	Peralatan dan Mesin	7.700.000,00
433	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	MUSTANG	20	Aset Aktif	12/31/1991	Peralatan dan Mesin	151.000,00
434	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	-	34	Aset Aktif	12/10/2004	Peralatan dan Mesin	69.300.000,00
435	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	MUSTANG	21	Aset Aktif	12/31/1992	Peralatan dan Mesin	190.000,00
436	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Penyimpan	Rusak Berat	lemari katalog	21	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	310.000,00
437	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	LG	35	Aset Aktif	12/10/2004	Peralatan dan Mesin	6.930.000,00
438	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	MUSTANG	22	Aset Aktif	12/31/1993	Peralatan dan Mesin	208.000,00
439	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Penyimpan	Rusak Berat	lemari katalog	22	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	310.000,00
440	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Accer	36	Aset Aktif	11/27/2000	Peralatan dan Mesin	7.550.000,00
441	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal Komputer	37	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	5.610.000,00
442	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Personal Komputer	38	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	5.610.000,00
443	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilon	39	Aset Aktif	7/4/2008	Peralatan dan Mesin	9.460.000,00
444	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	40	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
445	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	41	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
446	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	42	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
447	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	43	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
448	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	44	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
449	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	45	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
450	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	46	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
451	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	47	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
452	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	48	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
453	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	49	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
454	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	50	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
455	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	52	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
456	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Extron Zirex setara HP	51	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
457	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	pc hp dx 2390	53	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	6.545.000,00
458	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	pc. compaq dx231omt	54	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	8.525.000,00
459	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	pc. compaq dx231omt	55	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	8.525.000,00
460	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	pc. compaq dx231omt	56	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	8.525.000,00
461	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	hp pavillion	57	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	12.584.000,00
462	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	hp pavillion	58	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	12.584.000,00
463	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	hp pavillion	59	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	12.584.000,00
464	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Compaq dx 2390mt	60	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	9.768.000,00
465	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Compaq dx 2390mt	61	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	9.768.000,00
466	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Compaq dx 2390mt	62	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	9.768.000,00
467	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	compaq dx 2390mt	63	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	9.768.000,00
468	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	64	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00

469	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	65	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
470	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	66	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
471	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	67	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
472	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	68	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
473	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	69	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
474	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	70	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
475	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	71	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
476	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	72	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
477	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	75	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
478	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	73	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
479	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	74	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
480	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	76	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
481	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	77	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
482	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	78	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
483	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	79	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
484	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	81	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
485	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	80	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
486	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	82	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
487	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	83	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
488	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	84	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
489	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	86	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
490	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	85	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
491	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	mustang	33	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	348.000,00
492	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	87	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
493	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	mustang	34	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	348.000,00
494	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	88	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
495	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	mustang	35	Aset Aktif	5/30/1994	Peralatan dan Mesin	232.000,00
496	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	89	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
497	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	mustang	36	Aset Aktif	12/2/1996	Peralatan dan Mesin	357.000,00
498	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	90	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
499	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Besi/Metal	Rusak Berat	Lemari Arsip Mustang	37	Aset Aktif	9/27/2007	Peralatan dan Mesin	1.837.000,00
500	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	91	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
501	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	92	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
502	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	93	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
503	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	94	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
504	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	96	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
505	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	95	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
506	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	M3910 acer	97	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.380.000,00
507	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Acer M 3920	98	Aset Aktif	6/3/2011	Peralatan dan Mesin	7.623.000,00
508	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Acer M 3920	99	Aset Aktif	6/3/2011	Peralatan dan Mesin	7.623.000,00
509	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Acer M 3920	100	Aset Aktif	6/3/2011	Peralatan dan Mesin	7.623.000,00
510	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Acer M 3920	101	Aset Aktif	6/3/2011	Peralatan dan Mesin	7.623.000,00
511	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Acer M 3920	102	Aset Aktif	6/3/2011	Peralatan dan Mesin	8.553.600,00
512	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	P.C Unit Acer Aspire M3970	103	Aset Aktif	12/23/2011	Peralatan dan Mesin	10.219.770,00
513	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	P.C Unit Acer Aspire M3970	104	Aset Aktif	12/23/2011	Peralatan dan Mesin	10.219.770,00
514	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	P.C Unit Acer Aspire M3970	105	Aset Aktif	12/23/2011	Peralatan dan Mesin	10.219.770,00
515	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER PC HP-P2 115	106	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.440.500,00
516	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER PC HP-P2 115	107	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.440.500,00
517	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER PC HP-P2 115	108	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.440.500,00
518	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER PC HP-P2 115	109	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.440.500,00
519	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER PC HP-P2 115	110	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.440.500,00
520	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER PC HP-P2 115	111	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.440.500,00
521	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER PC HP-P2 115	112	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.440.500,00
522	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER PC HP-P2 115	113	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.440.500,00
523	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Travel Mate 3012 WTMi	10	Aset Aktif	8/16/2006	Peralatan dan Mesin	18.975.000,00
524	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	ACER	12	Aset Aktif	12/15/2006	Peralatan dan Mesin	25.410.000,00
525	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Travel Mate 2428	11	Aset Aktif	8/16/2006	Peralatan dan Mesin	9.075.000,00
526	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	ACER	13	Aset Aktif	12/15/2006	Peralatan dan Mesin	25.410.000,00
527	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	ACER	14	Aset Aktif	12/15/2006	Peralatan dan Mesin	25.410.000,00
528	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	ACER	15	Aset Aktif	12/15/2006	Peralatan dan Mesin	18.515.200,00
529	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	ACER	16	Aset Aktif	2/3/2000	Peralatan dan Mesin	31.150.000,00
530	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	ACER	17	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	19.500.000,00
531	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	1	Aset Aktif	12/31/1991	Peralatan dan Mesin	87.000,00
532	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	ACER	18	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	19.500,00
533	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	2	Aset Aktif	12/31/1991	Peralatan dan Mesin	87.000,00
534	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Acer Aspire 5052 ANWXMi	20	Aset Aktif	9/27/2007	Peralatan dan Mesin	8.354.500,00
535	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Toshiba Satelite	19	Aset Aktif	7/12/2007	Peralatan dan Mesin	12.375.000,00
536	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	3	Aset Aktif	12/31/1999	Peralatan dan Mesin	2.463.000,00
537	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Acer Aspire 5052 ANWXMi	21	Aset Aktif	9/27/2007	Peralatan dan Mesin	8.354.500,00
538	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	4	Aset Aktif	12/31/1999	Peralatan dan Mesin	3.019.000,00
539	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Toshiba M 500	22	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	19.250.000,00
540	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Toshiba M 500	23	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	19.250.000,00
541	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	5	Aset Aktif	12/31/1999	Peralatan dan Mesin	769.000,00
542	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Sony Vaio VGN CR 23	24	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	18.865.000,00
543	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	6	Aset Aktif	12/31/1999	Peralatan dan Mesin	769.000,00
544	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	7	Aset Aktif	12/31/1998	Peralatan dan Mesin	475.000,00
545	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Sony Vaio VGN CR 23	25	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	18.865.000,00
546	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	8	Aset Aktif	12/31/1997	Peralatan dan Mesin	670.000,00
547	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Sony Vaio VGN-TXN 25N	26	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	22.715.000,00
548	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Sony VAIO ULV 753	27	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	16.500.000,00
549	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	9	Aset Aktif	12/31/1997	Peralatan dan Mesin	670.000,00
550	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	10	Aset Aktif	12/31/1997	Peralatan dan Mesin	670.000,00
551	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Fuijitsu	28	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	25.696.000,00
552	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Toshiba	29	Aset Aktif	4/24/2008	Peralatan dan Mesin	18.601.000,00
553	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	lokal	11	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	174.000,00
554	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Toshiba	30	Aset Aktif	4/24/2008	Peralatan dan Mesin	18.601.000,00
555	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Lemari Uno 80x40x75	12	Aset Aktif	9/27/2007	Peralatan dan Mesin	1.039.500,00
556	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Toshiba	31	Aset Aktif	4/24/2008	Peralatan dan Mesin	18.601.000,00
557	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	credenza	13	Aset Aktif	9/15/2009	Peralatan dan Mesin	8.107.000,00
558	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Toshiba	32	Aset Aktif	4/24/2008	Peralatan dan Mesin	18.601.000,00
559	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Toshiba	33	Aset Aktif	4/24/2008	Peralatan dan Mesin	18.601.000,00
560	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	accer aspire	34	Aset Aktif	11/13/2008	Peralatan dan Mesin	9.460.000,00
561	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	toshiba portege m800-e365	35	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	17.545.000,00
562	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Sony vpc cw 1 pfx	36	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	17.974.000,00
563	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Sony Vaio VPC-EA36FG	37	Aset Aktif	7/22/2011	Peralatan dan Mesin	14.905.000,00
564	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Sony Vaio VPC-EA36FG	38	Aset Aktif	7/22/2011	Peralatan dan Mesin	14.905.000,00
565	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Acer Aspire 5951G	39	Aset Aktif	7/22/2011	Peralatan dan Mesin	17.490.000,00
566	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Acer Aspire 5951G	40	Aset Aktif	7/22/2011	Peralatan dan Mesin	17.490.000,00
567	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	NB HP Mini 110	41	Aset Aktif	7/22/2011	Peralatan dan Mesin	4.345.000,00
568	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Lemari kayu	22	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	4.567.408,00
569	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Lap Top Sony VaioVPC SB	42	Aset Aktif	12/23/2011	Peralatan dan Mesin	14.835.150,00
570	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Lap Top Sony VaioVPC SB	43	Aset Aktif	12/23/2011	Peralatan dan Mesin	14.835.150,00
571	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Lemari kayu	23	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	4.567.408,00
572	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Lap Top Sony VaioVPC SB	44	Aset Aktif	12/23/2011	Peralatan dan Mesin	14.835.150,00
573	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lap Top	Rusak Berat	Sony Vaio SVE -14122 CV	45	Aset Aktif	11/27/2012	Peralatan dan Mesin	6.490.000,00
574	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	ACCER	1	Aset Aktif	12/10/2004	Peralatan dan Mesin	19.910.000,00
575	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	AS4741-5452G50M acer	2	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	9.350.000,00
576	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	AS4741-5452G50M acer	3	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	9.350.000,00
577	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Monitor	Rusak Berat	ACCER 1516	1	Aset Aktif	12/20/2006	Peralatan dan Mesin	2.134.000,00
578	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Monitor	Rusak Berat	ACCER 1516	2	Aset Aktif	12/20/2006	Peralatan dan Mesin	2.134.000,00
579	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	Infocos DW 122	1	Aset Aktif	11/5/2015	Peralatan dan Mesin	6.930.000,00
580	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	Infocos DW 122	2	Aset Aktif	11/5/2015	Peralatan dan Mesin	6.930.000,00
581	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	Infocos DW 122	3	Aset Aktif	11/5/2015	Peralatan dan Mesin	6.930.000,00
582	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	TOSHIBA	4	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	27.500.000,00
583	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	TOSHIBA	5	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	27.500.000,00
584	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	KURSI SIDANG	1	Aset Aktif	12/12/2002	Peralatan dan Mesin	1.263.000,00
585	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	KURSI SIDANG	2	Aset Aktif	12/12/2002	Peralatan dan Mesin	1.263.000,00
586	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	KURSI SIDANG	3	Aset Aktif	12/12/2002	Peralatan dan Mesin	1.263.000,00

587	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi putar kecil Mustang	4	Aset Aktif	5/30/1994	Peralatan dan Mesin	464.000,00
588	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	futura	5	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
589	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	futura	6	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
590	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	futura	7	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
591	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	futura	8	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
592	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	futura	9	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
593	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi putar pantoni	10	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	230.000,00
594	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi penghadap	11	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	190.000,00
595	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi putar pimpinan	12	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	344.000,00
596	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi putar	13	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	230.000,00
597	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi putar	14	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	230.000,00
598	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi putar	15	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	230.000,00
599	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	lokal	16	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
600	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	lokal	17	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
601	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	lokal	18	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
602	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi putar toyogoan	19	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	382.000,00
603	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	20	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
604	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	21	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
605	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	22	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
606	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	23	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
607	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	24	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
608	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	25	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
609	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	26	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
610	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	27	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
611	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	28	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
612	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	29	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
613	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	30	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
614	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	31	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
615	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	32	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
616	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	33	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
617	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	34	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
618	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	35	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
619	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	36	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
620	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	37	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
621	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	38	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
622	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	39	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
623	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	40	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
624	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	41	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
625	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	42	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
626	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	43	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
627	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica rn 1600 c	17	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	9.658.000,00
628	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	BR1500i	35	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
629	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA	10	Aset Aktif	12/1/2005	Peralatan dan Mesin	2.378.000,00
630	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	UPS Rackmount 2U 3000VA	37	Aset Aktif	12/23/2011	Peralatan dan Mesin	17.216.100,00
631	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica rn 1600 c	16	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	9.658.000,00
632	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica pn 602 b	14	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	2.772.000,00
633	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	20	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	7.942.000,00
634	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	21	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	7.942.000,00
635	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	BR1500i	32	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
636	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA	13	Aset Aktif	12/10/2004	Peralatan dan Mesin	1.473.000,00
637	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA-	18	Aset Aktif	9/15/2009	Peralatan dan Mesin	11.544.500,00
638	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	ICA	7	Aset Aktif	5/22/2008	Peralatan dan Mesin	6.094.000,00
639	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	23	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	1.694.000,00
640	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	28	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	1.694.000,00
641	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	44	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
642	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	45	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
643	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	46	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
644	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	47	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
645	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	48	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
646	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	49	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
647	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	50	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
648	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	51	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
649	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	52	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
650	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	53	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
651	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	54	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
652	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	55	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
653	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	56	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
654	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	57	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
655	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	58	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
656	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	59	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
657	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	60	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
658	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	61	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
659	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	62	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
660	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	63	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
661	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	64	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
662	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	65	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
663	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	66	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
664	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	67	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	68.000,00
665	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chitose	68	Aset Aktif	8/26/1992	Peralatan dan Mesin	31.000,00
666	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Arindah	69	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	67.000,00
667	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	70	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
668	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	futura	75	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
669	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	futura	76	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
670	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	futura	77	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	39.000,00
671	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	85	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
672	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	86	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
673	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	87	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
674	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	88	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
675	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	89	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
676	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	90	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
677	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	91	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
678	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	92	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
679	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	93	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
680	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	94	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
681	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Sidang	95	Aset Aktif	5/24/2003	Peralatan dan Mesin	732.000,00
682	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi putar	96	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	382.000,00
683	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi sidang	97	Aset Aktif	12/27/2002	Peralatan dan Mesin	383.000,00
684	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi sidang	98	Aset Aktif	12/27/2002	Peralatan dan Mesin	383.000,00
685	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi sidang	99	Aset Aktif	12/27/2002	Peralatan dan Mesin	383.000,00
686	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi sidang	100	Aset Aktif	12/27/2002	Peralatan dan Mesin	383.000,00
687	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi sidang	101	Aset Aktif	12/27/2002	Peralatan dan Mesin	383.000,00
688	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	kursi sidang	102	Aset Aktif	12/27/2002	Peralatan dan Mesin	383.000,00
689	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica pn 602 b	15	Aset Aktif	6/12/2009	Peralatan dan Mesin	2.772.000,00
690	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA	12	Aset Aktif	7/19/1997	Peralatan dan Mesin	24.000,00
691	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	22	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	14.179.000,00
692	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Self Supporting Tower	Rusak Berat	Mini Self Sup Aantene	1	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	90.750.000,00
693	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	110	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
694	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	111	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
695	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	112	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
696	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	113	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
697	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	114	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
698	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	115	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
699	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	116	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
700	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	117	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
701	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	118	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
702	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	119	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
703	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	120	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
704	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	121	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00

705	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	122	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
706	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	123	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
707	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	124	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
708	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chairman	125	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	660.000,00
709	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	ICA	4	Aset Aktif	5/22/2008	Peralatan dan Mesin	9.592.000,00
710	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	ICA	8	Aset Aktif	5/22/2008	Peralatan dan Mesin	6.094.000,00
711	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri N3	159	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	2.805.000,00
712	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri N3	160	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.935.450,00
713	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri N3	161	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.935.450,00
714	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	casanova 425	165	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
715	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	casanova 425	166	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
716	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	casanova 425	167	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
717	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	171	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.112.650,00
718	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	174	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.112.650,00
719	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	175	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.112.650,00
720	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	176	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.112.650,00
721	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	177	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.234.200,00
722	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	178	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.234.200,00
723	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	179	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.234.200,00
724	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	180	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.234.200,00
725	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	181	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.234.200,00
726	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	182	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.234.200,00
727	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri E3	183	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	1.234.200,00
728	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Casanova 425	185	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
729	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Casanova 425	186	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
730	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	208	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
731	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	209	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
732	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	210	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
733	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	211	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
734	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	212	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
735	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	UPS APC	3	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	3.410.000,00
736	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	ICA	5	Aset Aktif	5/22/2008	Peralatan dan Mesin	6.094.000,00
737	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	213	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
738	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	214	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
739	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	215	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
740	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	216	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
741	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	217	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
742	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	218	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
743	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	219	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
744	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	220	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
745	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	221	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
746	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	222	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
747	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	223	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
748	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	224	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
749	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	225	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
750	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	226	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
751	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	227	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
752	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	228	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
753	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	229	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
754	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	230	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
755	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	231	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
756	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	232	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
757	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	233	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
758	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	234	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
759	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	235	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
760	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	236	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
761	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	237	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
762	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	238	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
763	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	239	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
764	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	240	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
765	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	241	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
766	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	242	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
767	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	243	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
768	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	244	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
769	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	245	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
770	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	246	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
771	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	247	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
772	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	248	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
773	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	249	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
774	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	250	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
775	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	ICA 602	1	Aset Aktif	12/12/2004	Peralatan dan Mesin	1.374.000,00
776	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	ICA	6	Aset Aktif	5/22/2008	Peralatan dan Mesin	6.094.000,00
777	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	251	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
778	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	252	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
779	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	253	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
780	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	254	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
781	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	255	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
782	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	256	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
783	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	casanova 425	257	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
784	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	casanova 425	258	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
785	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	259	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
786	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Capri X1	260	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	818.125,00
787	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Casanova 425	263	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
788	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Casanova 425	264	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
789	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Casanova 425	265	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
790	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Casanova 425	266	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	757.350,00
791	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	lemari kaca sorong	1	Aset Aktif	12/18/1994	Peralatan dan Mesin	4.104.000,00
792	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	mandaw	2	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
793	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	3	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
794	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	4	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
795	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	5	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
796	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	6	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
797	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	7	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
798	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	8	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
799	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	9	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
800	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	10	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
801	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	11	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
802	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	12	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
803	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	13	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
804	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	14	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
805	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	15	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
806	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	16	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
807	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	17	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
808	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	18	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
809	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	19	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
810	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	20	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
811	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	21	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
812	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	22	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
813	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	23	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
814	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	24	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
815	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	25	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
816	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	26	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
817	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	27	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
818	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	28	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
819	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	29	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
820	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	30	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
821	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	31	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
822	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	32	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00

823	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	33	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
824	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	34	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
825	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	35	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
826	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	36	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
827	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	37	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
828	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	38	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
829	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	39	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
830	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	40	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
831	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	41	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
832	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	42	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
833	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	43	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
834	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	44	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
835	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	45	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
836	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	46	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
837	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	47	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
838	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	48	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
839	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	49	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
840	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	50	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
841	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	51	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
842	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	52	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
843	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	53	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
844	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	54	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
845	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	55	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
846	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	56	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
847	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	57	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
848	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	58	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
849	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	59	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
850	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	60	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
851	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	61	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
852	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	62	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
853	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	63	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
854	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	64	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
855	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	65	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
856	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	66	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
857	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	67	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
858	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	68	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
859	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	69	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
860	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	70	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
861	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	71	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
862	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	72	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
863	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	73	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
864	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	74	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
865	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	75	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
866	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	76	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
867	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	77	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
868	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	78	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
869	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	79	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
870	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	80	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
871	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	81	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
872	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	82	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
873	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	83	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
874	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	84	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
875	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	85	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
876	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	86	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
877	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	87	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
878	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	88	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
879	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	89	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
880	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	90	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
881	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	91	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
882	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	92	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
883	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	93	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
884	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	94	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
885	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	95	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
886	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	96	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
887	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	97	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
888	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	98	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
889	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	99	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
890	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	100	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
891	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	101	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
892	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	102	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
893	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	103	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
894	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	104	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
895	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	105	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
896	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	106	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
897	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	107	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
898	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	108	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
899	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	109	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
900	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	110	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
901	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	111	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
902	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	112	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
903	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	113	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
904	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	114	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
905	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	115	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
906	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	116	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
907	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	117	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
908	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	118	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
909	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	119	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
910	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	120	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
911	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	121	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
912	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	122	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
913	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	123	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
914	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	124	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
915	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	125	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
916	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	126	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
917	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	127	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
918	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	128	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
919	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	129	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
920	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	130	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
921	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	131	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
922	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	132	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
923	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	133	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
924	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	134	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
925	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	135	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
926	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	136	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
927	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	137	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
928	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	138	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
929	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	139	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
930	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	140	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
931	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	141	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
932	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	142	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
933	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	143	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
934	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	144	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
935	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	145	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
936	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	146	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
937	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	147	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
938	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	148	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
939	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	150	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
940	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	149	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00

941	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	151	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
942	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	152	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
943	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	153	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
944	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	154	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
945	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	155	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
946	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	156	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
947	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	157	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
948	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	158	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
949	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	159	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
950	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	160	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
951	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	161	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
952	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	kursi baca	162	Aset Aktif	3/5/1998	Peralatan dan Mesin	38.000,00
953	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Es	Rusak Berat	NATIONAL 2 PINTU	1	Aset Aktif	10/15/2003	Peralatan dan Mesin	1.779.000,00
954	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Es	Rusak Berat	NATIONAL	2	Aset Aktif	12/12/2003	Peralatan dan Mesin	1.906.000,00
955	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Es	Rusak Berat	National	3	Aset Aktif	11/3/2003	Peralatan dan Mesin	1.885.000,00
956	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Es	Rusak Berat	Modul NR Sharp	4	Aset Aktif	7/2/2003	Peralatan dan Mesin	1.889.000,00
957	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	NASIONAL	11	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	4.119.000,00
958	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	NASIONAL	12	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	4.119.000,00
959	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	NASIONAL	13	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	4.119.000,00
960	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	AUX KFR 120 LU	14	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	127.407.000,00
961	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	AUX KFR 120 LU	15	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	127.407.000,00
962	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	AUX KFR 120 LU	16	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	127.407.000,00
963	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	NATIONAL	17	Aset Aktif	5/13/2003	Peralatan dan Mesin	6.887.000,00
964	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	national	18	Aset Aktif	5/2/1994	Peralatan dan Mesin	1.683.000,00
965	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	National	19	Aset Aktif	10/15/2005	Peralatan dan Mesin	3.080.000,00
966	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	national	20	Aset Aktif	11/27/2000	Peralatan dan Mesin	5.239.000,00
967	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	national	21	Aset Aktif	5/12/1994	Peralatan dan Mesin	455.000,00
968	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	national	22	Aset Aktif	5/12/1994	Peralatan dan Mesin	455.000,00
969	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	General	23	Aset Aktif	12/10/1994	Peralatan dan Mesin	1.752.000,00
970	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	Daikin	24	Aset Aktif	3/3/1999	Peralatan dan Mesin	3.239.000,00
971	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	Daikin	25	Aset Aktif	3/3/1999	Peralatan dan Mesin	3.239.000,00
972	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	Daikin	26	Aset Aktif	3/3/1999	Peralatan dan Mesin	3.239.000,00
973	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	Panasonic	27	Aset Aktif	7/12/2007	Peralatan dan Mesin	4.334.000,00
974	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	Panasonic cs-c9 DKJ	28	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	3.520.000,00
975	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	PAnasonik	29	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
976	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	PAnasonik	30	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
977	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	PANASONIC	31	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.470.000,00
978	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	PANASONIC	32	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.470.000,00
979	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	PANASONIC	33	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.470.000,00
980	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	PANASONIC	34	Aset Aktif	12/19/2008	Peralatan dan Mesin	8.470.000,00
981	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	35	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
982	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	36	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
983	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	37	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
984	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	38	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
985	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	39	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
986	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	40	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
987	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	41	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
988	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	42	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
989	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	43	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
990	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	44	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
991	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	45	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
992	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	46	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
993	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	47	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
994	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	48	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
995	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	49	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
996	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	50	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
997	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	51	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
998	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	52	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
999	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	53	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1000	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	54	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1001	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	55	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1002	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	56	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1003	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	57	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1004	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS C18/Panasonic	58	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1005	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS-C9 KKP Panasonic	59	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	4.400.000,00
1006	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS-C9 KKP Panasonic	60	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	4.400.000,00
1007	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS-C9 KKP Panasonic	61	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	4.400.000,00
1008	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Window	Rusak Berat	CS-C9 KKP Panasonic	62	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	4.400.000,00
1009	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	NATIONAL	1	Aset Aktif	12/12/2002	Peralatan dan Mesin	8.184.000,00
1010	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	NATIONAL 2 PK	2	Aset Aktif	5/13/2003	Peralatan dan Mesin	6.887.000,00
1011	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	AUX 5 PK	3	Aset Aktif	12/12/2005	Peralatan dan Mesin	14.490.000,00
1012	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	AUX 5 PK	4	Aset Aktif	12/12/2005	Peralatan dan Mesin	14.490.000,00
1013	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	AUX 1 PK	5	Aset Aktif	12/12/2005	Peralatan dan Mesin	2.085.000,00
1014	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	NATIONAL 2 PK	6	Aset Aktif	5/13/2003	Peralatan dan Mesin	6.887.000,00
1015	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	NATIONAL	7	Aset Aktif	12/12/2002	Peralatan dan Mesin	8.184.000,00
1016	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	NATIONAL	8	Aset Aktif	12/12/2002	Peralatan dan Mesin	8.184.000,00
1017	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	NATIONAL 2 PK	9	Aset Aktif	5/13/2003	Peralatan dan Mesin	6.887.000,00
1018	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	national	10	Aset Aktif	5/13/2003	Peralatan dan Mesin	6.887.000,00
1019	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	national	11	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	12.741.000,00
1020	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	national	12	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	12.741.000,00
1021	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	national	13	Aset Aktif	12/3/2004	Peralatan dan Mesin	12.741.000,00
1022	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	mitshubishi	14	Aset Aktif	10/25/2005	Peralatan dan Mesin	14.490.000,00
1023	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	CS C45/Panasonic	15	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	26.125.000,00
1024	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	CS C45/Panasonic	16	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	26.125.000,00
1025	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	CS C45/Panasonic	17	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	26.125.000,00
1026	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	CS C45/Panasonic	18	Aset Aktif	12/27/2010	Peralatan dan Mesin	26.125.000,00
1027	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Wireless	Rusak Berat	TOA 2 W - 770	1	Aset Aktif	5/19/2003	Peralatan dan Mesin	5.820.000,00
1028	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Wireless	Rusak Berat	3 com	2	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	940.500,00
1029	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Wireless	Rusak Berat	3 com	3	Aset Aktif	4/21/2010	Peralatan dan Mesin	940.500,00
1030	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	25	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	1.694.000,00
1031	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	BR1500i	34	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1032	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	26	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	1.694.000,00
1033	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	27	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	1.694.000,00
1034	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	BR1500i	30	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1035	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Video Monitor	Rusak Berat	Polycom	1	Aset Aktif	12/17/2007	Peralatan dan Mesin	101.970.000,00
1036	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterupted Power Su	Rusak Berat	ICA 602	2	Aset Aktif	12/12/2004	Peralatan dan Mesin	1.374.000,00
1037	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Audio Monitor Active	Rusak Berat	Speaker Monitor Aktif 15"	2	Aset Aktif	10/2/2012	Peralatan dan Mesin	4.400.000,00
1038	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	19	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	7.942.000,00
1039	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	BR1500i	31	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1040	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	UPS Rackmount 2U 3000VA	36	Aset Aktif	12/23/2011	Peralatan dan Mesin	17.216.100,00
1041	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	BR1500i	33	Aset Aktif	12/15/2010	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1042	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	24	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	1.694.000,00
1043	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA 525	9	Aset Aktif	2/3/2000	Peralatan dan Mesin	879.000,00
1044	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	Matsuga	11	Aset Aktif	5/13/2003	Peralatan dan Mesin	1.445.000,00
1045	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ica	29	Aset Aktif	5/5/2010	Peralatan dan Mesin	1.694.000,00
1046	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Canon MG 2570 S	117	Aset Aktif	10/8/2018	Peralatan dan Mesin	1.021.000,00
1047	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Rapat	Rusak Berat	P.180 L.70 T 75 cm	28	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	1.060.000,00
1048	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat		27	Aset Aktif	9/7/2016	Peralatan dan Mesin	2.343.000,00
1049	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	197	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1050	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	683	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1051	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	685	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1052	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	694	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1053	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	105	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1054	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	137	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1055	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	206	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1056	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	647	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1057	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	670	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1058	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	677	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00

1059	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	689	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1060	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	Uchida	2	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	542.000,00
1061	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	Uchida	6	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	1.375.000,00
1062	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Rapat	Rusak Berat	P.180 L.70 T 75 cm	27	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	1.060.000,00
1063	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kasur/Spring Bed	Rusak Berat	Super Springbed	2	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	1.425.000,00
1064	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kasur/Spring Bed	Rusak Berat	Super Springbed	4	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	1.425.000,00
1065	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Jam Mekanis	Rusak Berat	PAGOL PGW 33IT	7	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	250.000,00
1066	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Hitachi Ros 5144c	7	Aset Aktif	1/1/1997	Peralatan dan Mesin	1.494.000,00
1067	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Mitsubhishi	14	Aset Aktif	4/1/1996	Peralatan dan Mesin	1.249.000,00
1068	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Toshiba 1,5 HP	30	Aset Aktif	5/14/2001	Peralatan dan Mesin	5.120.000,00
1069	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	AC 1 PK	67	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	3.396.800,00
1070	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Mitsubishi	4	Aset Aktif	4/1/1996	Peralatan dan Mesin	970.000,00
1071	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Calling Fan Uchida W 240	12	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	525.000,00
1072	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Televisi	Rusak Berat	Picture in Pictre (PIP)	8	Aset Aktif	11/12/2007	Peralatan dan Mesin	14.500.000,00
1073	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Televisi	Rusak Berat	LG 21 " Layar Datar	7	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	1.750.000,00
1074	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	17	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1075	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tabung Pemadam Api	Rusak Berat	Chubb	6	Aset Aktif	11/18/1995	Peralatan dan Mesin	272.000,00
1076	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Copy Board/Elektric W	Rusak Berat	KX-B520	1	Aset Aktif	11/19/1996	Peralatan dan Mesin	2.307.000,00
1077	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	P.170 L.85 T.75 cm	37	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	632.000,00
1078	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	P.170 L.85 T.75 cm	38	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	632.000,00
1079	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat		41	Aset Aktif	3/20/1996	Peralatan dan Mesin	90.000,00
1080	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	78	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1081	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	179	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1082	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	699	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1083	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	705	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1084	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	725	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1085	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	81	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1086	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	110	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1087	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	116	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1088	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	158	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1089	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	125	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1090	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Model 480 HL	277	Aset Aktif	5/8/2001	Peralatan dan Mesin	550.000,00
1091	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	663	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1092	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	703	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1093	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	704	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1094	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Pagoda	15	Aset Aktif	11/8/1993	Peralatan dan Mesin	327.000,00
1095	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	166	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1096	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	216	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1097	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	676	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1098	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	722	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1099	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	727	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1100	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	Ligna	7	Aset Aktif	11/8/1993	Peralatan dan Mesin	51.000,00
1101	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mesin Ketik Manual St	Rusak Berat	Olivetti	1	Aset Aktif	10/26/1991	Peralatan dan Mesin	424.000,00
1102	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mesin Ketik Manual La	Rusak Berat	Olivetti 18"	1	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	2.250.000,00
1103	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	19	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1104	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Alba / Geser	2	Aset Aktif	1/1/1995	Peralatan dan Mesin	390.000,00
1105	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	Toshiba Spi 2200 Ansi Lum	2	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	8.350.000,00
1106	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat		44	Aset Aktif	3/20/1996	Peralatan dan Mesin	90.000,00
1107	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	P.170 L.85 T.75 cm	40	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	632.000,00
1108	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	66	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1109	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	155	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1110	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	161	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1111	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	686	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1112	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	ISSABELL/KD 6033 TLP	1151	Aset Aktif	12/6/2016	Peralatan dan Mesin	715.000,00
1113	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Pagoda	14	Aset Aktif	11/8/1993	Peralatan dan Mesin	327.000,00
1114	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	99	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1115	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	123	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1116	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	713	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1117	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	104	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1118	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	128	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1119	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	169	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1120	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	191	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1121	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	199	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1122	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	73	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1123	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	117	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1124	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	165	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1125	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Rapat	Rusak Berat	P.180 L.70 T 75 cm	25	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	1.060.000,00
1126	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Resepsionis	Rusak Berat		2	Aset Aktif	3/18/1996	Peralatan dan Mesin	382.000,00
1127	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Jam Mekanis	Rusak Berat	Seiko	4	Aset Aktif	4/29/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1128	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Fujitsu 1 PK	27	Aset Aktif	11/19/1996	Peralatan dan Mesin	1.175.000,00
1129	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Panasonic Model Indoor Un	46	Aset Aktif	11/1/2004	Peralatan dan Mesin	26.187.000,00
1130	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	AC 1 PK	68	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	3.396.800,00
1131	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Uchida	32	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	5.089.000,00
1132	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Mitsubishi	4	Aset Aktif	12/8/1997	Peralatan dan Mesin	261.000,00
1133	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Mitsubishi	5	Aset Aktif	12/8/1997	Peralatan dan Mesin	261.000,00
1134	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Calling Fan Uchida W 240	13	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	525.000,00
1135	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Alat Rumah Tangga La	Rusak Berat	Spray Pengharum Otomatis	2	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	295.000,00
1136	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	706	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1137	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	710	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1138	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	90	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1139	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	102	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1140	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	121	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1141	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	174	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1142	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	194	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1143	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Model 480 HL	274	Aset Aktif	5/8/2001	Peralatan dan Mesin	550.000,00
1144	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	657	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1145	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	690	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1146	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Indachi	1125	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	2.730.000,00
1147	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	18	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1148	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	15	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1149	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	EPSON - 825	3	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	28.522.500,00
1150	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat		42	Aset Aktif	3/20/1996	Peralatan dan Mesin	90.000,00
1151	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	96	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1152	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	215	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1153	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	122	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1154	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	154	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1155	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	711	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1156	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	681	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1157	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	61	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1158	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	103	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1159	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	124	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1160	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		8	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1161	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	24	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1162	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone	Rusak Berat	Toa Jepit	8	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	585.225,00
1163	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone Table Star	Rusak Berat	Tiang Mic	2	Aset Aktif	11/1/2000	Peralatan dan Mesin	774.000,00
1164	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone Table Star	Rusak Berat	Type Condenser	7	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	588.500,00
1165	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tiang Bendera	Rusak Berat		4	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	189.000,00
1166	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	Uchida	1	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	542.000,00
1167	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	87	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1168	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	135	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1169	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	143	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1170	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	172	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1171	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	80	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1172	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	211	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1173	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	724	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1174	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	214	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1175	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	658	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1176	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	701	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00

1177	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	723	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1178	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	716	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1179	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	75	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1180	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	714	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1181	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	173	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1182	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	181	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1183	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	195	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1184	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	88	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1185	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	152	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1186	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	185	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1187	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	Ligna	4	Aset Aktif	11/3/1993	Peralatan dan Mesin	54.000,00
1188	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Komputer	Rusak Berat		1	Aset Aktif	11/8/1999	Peralatan dan Mesin	604.000,00
1189	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Es	Rusak Berat		1	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	1.690.000,00
1190	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mesin Ketik Manual St	Rusak Berat	Olivetti	2	Aset Aktif	1/30/1993	Peralatan dan Mesin	431.000,00
1191	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	14	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1192	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Brandkas	Rusak Berat	Modari A2	1	Aset Aktif	10/26/1991	Peralatan dan Mesin	309.000,00
1193	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	CCTV - Camera Contr	Rusak Berat	Camera Dome IR	2	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	23.408.000,00
1194	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat		13	Aset Aktif	1/1/1995	Peralatan dan Mesin	260.000,00
1195	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat		43	Aset Aktif	3/20/1996	Peralatan dan Mesin	90.000,00
1196	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	84	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1197	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	91	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1198	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	693	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1199	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	63	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1200	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	675	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1201	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	719	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1202	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Model MBD	919	Aset Aktif	5/8/2001	Peralatan dan Mesin	203.000,00
1203	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	86	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1204	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	115	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1205	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	186	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1206	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	189	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1207	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	198	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1208	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	687	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1209	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Hadap	931	Aset Aktif	8/13/2007	Peralatan dan Mesin	1.090.000,00
1210	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	71	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1211	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Model 480 HL	276	Aset Aktif	5/8/2001	Peralatan dan Mesin	550.000,00
1212	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	665	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1213	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	679	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1214	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	695	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1215	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Panasonic	44	Aset Aktif	11/1/2004	Peralatan dan Mesin	5.986.000,00
1216	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Panasonic	35	Aset Aktif	11/1/2004	Peralatan dan Mesin	3.367.000,00
1217	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Panasonic	36	Aset Aktif	11/1/2004	Peralatan dan Mesin	3.367.000,00
1218	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Toshiba	3	Aset Aktif	11/6/1993	Peralatan dan Mesin	281.000,00
1219	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Maspion	7	Aset Aktif	3/18/1996	Peralatan dan Mesin	53.000,00
1220	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Televisi	Rusak Berat	Toshiba 20	1	Aset Aktif	11/19/1996	Peralatan dan Mesin	534.000,00
1221	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		4	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1222	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		9	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1223	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	26	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1224	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		12	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	1.628.000,00
1225	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		14	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	1.628.000,00
1226	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	18	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1227	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone	Rusak Berat	TOA	7	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	398.250,00
1228	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone Table Stan	Rusak Berat	Type Condenser	8	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	588.500,00
1229	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Gambar Presiden/Wak	Rusak Berat		1	Aset Aktif	10/11/1993	Peralatan dan Mesin	140.000,00
1230	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	82	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1231	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	129	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1232	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	77	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1233	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	95	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1234	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	150	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1235	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	671	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1236	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	692	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1237	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	93	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1238	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	138	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1239	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kasur/Spring Bed	Rusak Berat	Super Springbed	6	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	1.425.000,00
1240	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kasur/Spring Bed	Rusak Berat	Super Springbed	3	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	1.425.000,00
1241	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Hitachi Ros 5144c	21	Aset Aktif	1/1/1997	Peralatan dan Mesin	1.494.000,00
1242	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Wall Fan Panasonic 309	9	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	495.000,00
1243	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Equalizer	Rusak Berat	Equalizer Audio	3	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	2.728.000,00
1244	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Loudspeaker	Rusak Berat	Spekaer Satelite + Stand Sp	7	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	4.450.000,00
1245	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Loudspeaker	Rusak Berat	Spekaer Satelite + Stand Sp	8	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	4.450.000,00
1246	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		1	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1247	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		10	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1248	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	25	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1249	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	201	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1250	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	656	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1251	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	176	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1252	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	717	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1253	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	726	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1254	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	Ligna	5	Aset Aktif	11/3/1993	Peralatan dan Mesin	54.000,00
1255	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat		8	Aset Aktif	3/18/1996	Peralatan dan Mesin	72.000,00
1256	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	130	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1257	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	203	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1258	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	667	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1259	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	KURSI KERJA	1128	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	790.300,00
1260	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	109	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1261	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	153	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1262	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	175	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1263	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Chitose	1	Aset Aktif	1/1/1996	Peralatan dan Mesin	237.000,00
1264	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	721	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1265	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	Ligna	6	Aset Aktif	11/8/1993	Peralatan dan Mesin	51.000,00
1266	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Kayu	Rusak Berat	Ligna	3	Aset Aktif	11/3/1993	Peralatan dan Mesin	50.000,00
1267	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Rapat	Rusak Berat	Uk.180x65 t:75	16	Aset Aktif	11/8/1999	Peralatan dan Mesin	967.000,00
1268	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Rapat	Rusak Berat	P.180 L.70 T 75 cm	26	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	1.060.000,00
1269	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kasur/Spring Bed	Rusak Berat	Super Springbed	5	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	1.425.000,00
1270	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Fujitsu 1 PK	26	Aset Aktif	11/19/1996	Peralatan dan Mesin	1.175.000,00
1271	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	AC 1/2 PK	63	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	4.387.500,00
1272	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Panasonic	37	Aset Aktif	11/1/2004	Peralatan dan Mesin	5.986.000,00
1273	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Panasonic	34	Aset Aktif	11/1/2004	Peralatan dan Mesin	3.367.000,00
1274	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Alat Rumah Tangga La	Rusak Berat	Bak Sampah 3 in 1, Size 85	6	Aset Aktif	12/30/2016	Peralatan dan Mesin	2.400.000,00
1275	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Alba	1	Aset Aktif	1/1/1995	Peralatan dan Mesin	390.000,00
1276	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tabung Pemadam Api	Rusak Berat	Chubb	1	Aset Aktif	11/18/1995	Peralatan dan Mesin	272.000,00
1277	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Movitex Board	Rusak Berat	2,10x2,10m	1	Aset Aktif	11/19/1996	Peralatan dan Mesin	765.000,00
1278	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	67	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1279	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	92	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1280	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	217	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1281	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	674	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1282	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	688	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1283	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	718	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1284	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Hitachi Ros 5144c	23	Aset Aktif	1/1/1997	Peralatan dan Mesin	1.494.000,00
1285	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Mitsubhishi	13	Aset Aktif	4/1/1996	Peralatan dan Mesin	1.249.000,00
1286	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Hitachi Ros 5144c	12	Aset Aktif	1/1/1997	Peralatan dan Mesin	1.494.000,00
1287	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Nasional	10	Aset Aktif	11/6/1993	Peralatan dan Mesin	281.000,00
1288	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Maspion	2	Aset Aktif	3/18/1996	Peralatan dan Mesin	53.000,00
1289	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Alat Rumah Tangga La	Rusak Berat	Spray Pengharum Otomatis	1	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	295.000,00
1290	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Televisi	Rusak Berat	TV LCD LG 22" + Braket	16	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	1.958.000,00
1291	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	23	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1292	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		7	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1293	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	17	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1294	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		16	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	1.628.000,00

1295	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone	Rusak Berat	TOA	6	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	398.250,00
1296	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tiang Bendera	Rusak Berat		5	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	189.000,00
1297	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	Uchida	4	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	447.000,00
1298	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	120	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1299	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	159	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1300	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	672	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1301	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	707	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1302	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	720	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1303	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	74	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1304	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	209	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1305	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	654	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1306	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	669	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1307	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	83	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1308	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	136	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1309	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	700	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1310	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	715	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1311	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Televisi	Rusak Berat		28	Aset Aktif	12/19/2019	Peralatan dan Mesin	28.448.000,00
1312	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		11	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1313	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	21	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1314	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		2	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1315	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		3	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1316	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone	Rusak Berat	Type BMB BM 30	3	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	750.000,00
1317	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone	Rusak Berat	Type BMB BM 30	4	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	750.000,00
1318	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone	Rusak Berat	TOA	5	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	398.250,00
1319	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	70	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1320	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	108	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1321	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	145	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1322	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	164	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1323	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	213	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1324	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	698	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1325	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	65	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1326	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	85	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1327	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	691	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1328	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	139	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1329	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	142	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1330	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Model 480 HL	273	Aset Aktif	5/8/2001	Peralatan dan Mesin	550.000,00
1331	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	655	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1332	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	668	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1333	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	16	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1334	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Filing Cabinet Besi	Rusak Berat	Lion	16	Aset Aktif	2/1/2000	Peralatan dan Mesin	1.177.000,00
1335	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mesin Absensi	Rusak Berat	Casing Hitam RS-232/485	1	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	3.278.000,00
1336	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat		30	Aset Aktif	3/18/1996	Peralatan dan Mesin	130.000,00
1337	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat		10	Aset Aktif	1/1/1991	Peralatan dan Mesin	203.000,00
1338	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	P.170 L.85 T.75 cm	36	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	632.000,00
1339	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	119	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1340	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	126	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1341	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	132	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1342	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	163	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1343	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	170	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1344	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	188	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1345	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	192	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1346	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	212	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1347	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tabung Pemadam Api	Rusak Berat	Chubb	5	Aset Aktif	11/18/1995	Peralatan dan Mesin	272.000,00
1348	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tabung Pemadam Api	Rusak Berat	Chubb	3	Aset Aktif	11/18/1995	Peralatan dan Mesin	272.000,00
1349	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	White Board	Rusak Berat		1	Aset Aktif	12/8/1997	Peralatan dan Mesin	254.000,00
1350	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	P.170 L.85 T.75 cm	39	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	632.000,00
1351	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	171	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1352	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	182	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1353	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	207	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1354	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	697	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1355	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	160	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1356	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	193	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1357	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	101	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1358	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	177	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1359	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	ISSABELL/KD 6033 TLP	1138	Aset Aktif	12/6/2016	Peralatan dan Mesin	715.000,00
1360	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	98	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1361	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	118	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1362	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	149	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1363	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	141	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1364	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	205	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1365	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	664	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1366	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		13	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	1.628.000,00
1367	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	22	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1368	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		6	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1369	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	20	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1370	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone Table Star	Rusak Berat	Type Condenser	6	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	588.500,00
1371	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tiang Bendera	Rusak Berat		3	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	189.000,00
1372	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	Uchida	7	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	1.375.000,00
1373	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	Uchida	3	Aset Aktif	1/1/1998	Peralatan dan Mesin	530.000,00
1374	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat		5	Aset Aktif	1/1/2000	Peralatan dan Mesin	447.000,00
1375	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mimbar/Podium	Rusak Berat	P.55 L.50 T.125 cm	1	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	700.000,00
1376	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	KURSI KERJA	1131	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	790.300,00
1377	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	127	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1378	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	208	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1379	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	661	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1380	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	79	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1381	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	134	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1382	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	100	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1383	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	157	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1384	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	144	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1385	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	187	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1386	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Model 480 HL	275	Aset Aktif	5/8/2001	Peralatan dan Mesin	550.000,00
1387	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	89	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1388	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	112	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1389	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	133	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1390	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	146	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1391	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	180	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1392	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	624	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1393	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	660	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1394	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	178	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1395	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	MP 287	34	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	814.000,00
1396	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	canon ip 100	25	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	5.473.000,00
1397	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	696	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1398	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	702	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1399	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	712	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1400	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	EPSON L210 WARNA	36	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	2.290.000,00
1401	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Canon PIXMA G3000	58	Aset Aktif	12/8/2017	Peralatan dan Mesin	3.210.000,00
1402	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mesin Ketik Manual La	Rusak Berat	Olvetti 24"	2	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	4.250.000,00
1403	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	10	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1404	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	64	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1405	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	106	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1406	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	151	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1407	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	202	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1408	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	94	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1409	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	107	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1410	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	190	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1411	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	210	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1412	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	673	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00

1413	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	678	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1414	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kasur/Spring Bed	Rusak Berat	Super Springbed	1	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	1.425.000,00
1415	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat		2	Aset Aktif	1/1/2003	Peralatan dan Mesin	2.910.000,00
1416	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat		1	Aset Aktif	1/1/1993	Peralatan dan Mesin	240.000,00
1417	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Wall Fan Panasonic 309	8	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	495.000,00
1418	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Calling Fan Uchida W 240	10	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	525.000,00
1419	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kipas Angin	Rusak Berat	Calling Fan Uchida W 240	11	Aset Aktif	5/5/2006	Peralatan dan Mesin	525.000,00
1420	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Televisi	Rusak Berat	LG	11	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	16.250.000,00
1421	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tape Recorder (Alat R	Rusak Berat	4track,2Chanel streo systen	2	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	3.500.000,00
1422	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Equalizer	Rusak Berat	Subwoofer	2	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	7.500.000,00
1423	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rak Kayu	Rusak Berat		7	Aset Aktif	3/18/1996	Peralatan dan Mesin	1.224.000,00
1424	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	TOEHIBA U840-3317	18	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	7.374.000,00
1425	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	LAPTOP ASUS S451L	25	Aset Aktif	12/11/2014	Peralatan dan Mesin	10.319.000,00
1426	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP LASERJET	57	Aset Aktif	9/7/2016	Peralatan dan Mesin	1.815.000,00
1427	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Laser Jet 1020	20	Aset Aktif	10/29/2005	Peralatan dan Mesin	2.090.000,00
1428	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tabung Pemadam Api	Rusak Berat	Chubb	4	Aset Aktif	11/18/1995	Peralatan dan Mesin	272.000,00
1429	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Canon PIXMA G3000	59	Aset Aktif	12/8/2017	Peralatan dan Mesin	3.210.000,00
1430	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Laser Jet 1020	23	Aset Aktif	10/29/2005	Peralatan dan Mesin	2.090.000,00
1431	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Tabung Pemadam Api	Rusak Berat	Chubb	2	Aset Aktif	11/18/1995	Peralatan dan Mesin	272.000,00
1432	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	CCTV - Camera Contr	Rusak Berat	SHARP	1	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	19.575.000,00
1433	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Server	Rusak Berat	IMB System X3400	3	Aset Aktif	11/12/2007	Peralatan dan Mesin	29.650.000,00
1434	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Modem	Rusak Berat	ADSL, Wireles Prolink 9000	1	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	2.000.000,00
1435	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Proc Intel Core2Dou 2.33	13	Aset Aktif	8/20/2007	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
1436	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel 3,0 Ghz dual core	33	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	4.048.000,00
1437	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Toshiba	4	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	12.100.000,00
1438	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Asus A42F-VX085D	14	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	7.055.000,00
1439	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	72	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1440	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Acer 4740-33G12Mn	12	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	5.196.150,00
1441	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Epson LQ 2180	19	Aset Aktif	2/1/2000	Peralatan dan Mesin	2.498.000,00
1442	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	183	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1443	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Scanner (Peralatan Pe	Rusak Berat	FUJITSU SCAN SNAPS130	2	Aset Aktif	4/25/2016	Peralatan dan Mesin	4.741.412,00
1444	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	PC Desktop II (Client)	11	Aset Aktif	11/12/2007	Peralatan dan Mesin	8.725.000,00
1445	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Samsung Intel Core 2 Duo	17	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	7.410.000,00
1446	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	168	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1447	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	184	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1448	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	PC CLIENT (RAKITAN)	30	Aset Aktif	8/25/2011	Peralatan dan Mesin	16.005.000,00
1449	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel Pentium D Processor	9	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	8.150.000,00
1450	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	ACER 4736	8	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	8.775.000,00
1451	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	662	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1452	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Hard Disk	Rusak Berat	External Hard disk	2	Aset Aktif	10/29/2005	Peralatan dan Mesin	1.465.000,00
1453	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	147	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1454	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAV 20-A210D	51	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	9.400.000,00
1455	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	709	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1456	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAV 20-A210D	52	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	9.400.000,00
1457	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	62	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1458	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	113	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1459	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rak Kayu	Rusak Berat		6	Aset Aktif	3/18/1996	Peralatan dan Mesin	1.224.000,00
1460	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Printer Laser Jet HP. P1006	2	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	1.515.000,00
1461	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	659	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1462	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laser Jet 1160	24	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	3.500.000,00
1463	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	684	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1464	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	708	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1465	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Kursi Hadap	935	Aset Aktif	8/13/2007	Peralatan dan Mesin	1.090.000,00
1466	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Server	Rusak Berat	Mugen Server SHV-G	1	Aset Aktif	9/1/2001	Peralatan dan Mesin	13.128.000,00
1467	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel Pentium D Processor	6	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	8.150.000,00
1468	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	GIGABYTE	21	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	7.280.000,00
1469	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	97	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1470	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	131	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1471	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	196	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1472	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	KOMPUTER DELL	22	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	8.320.000,00
1473	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	HP ALL IN ONE20 B110D	39	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	8.455.000,00
1474	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel Pentium D Processor	8	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	8.150.000,00
1475	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel Pentium D Processor	10	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	8.150.000,00
1476	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Epson LQ 2180	18	Aset Aktif	9/1/2000	Peralatan dan Mesin	3.222.000,00
1477	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Acer M 3910	24	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	8.235.000,00
1478	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel 2.0 Dou Core, Monitor	15	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	7.300.000,00
1479	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	76	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1480	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	140	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1481	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	204	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1482	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	680	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1483	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	682	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1484	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	LENOVO IdeaPad IP300 D5	26	Aset Aktif	4/25/2016	Peralatan dan Mesin	9.214.997,00
1485	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Laptop 11.6" touch screen	39	Aset Aktif	12/14/2017	Peralatan dan Mesin	21.515.000,00
1486	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Hard Disk	Rusak Berat	Eksternal Hard disk	5	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	1.540.000,00
1487	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Laser Jet 1160	22	Aset Aktif	10/29/2005	Peralatan dan Mesin	4.920.000,00
1488	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laser 1102	9	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	2.504.250,00
1489	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone Table Stan	Rusak Berat	Type Condenser	5	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	588.500,00
1490	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Unit Power Supply	Rusak Berat		15	Aset Aktif	9/6/2018	Peralatan dan Mesin	654.100,00
1491	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Gordyin/Kray	Rusak Berat	Verticale Blind Gorden	2	Aset Aktif	4/7/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1492	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	12	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1493	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	13	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1494	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	HP Mini 110	9	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	3.645.000,00
1495	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	11	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1496	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	21	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1497	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	29	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1498	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	17	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1499	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	ACER 4736	7	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	8.775.000,00
1500	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	TOSHIBA SATELLITE C840	17	Aset Aktif	12/26/2012	Peralatan dan Mesin	7.228.000,00
1501	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	35	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1502	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Camera Digital	Rusak Berat	SONY	2	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	5.525.000,00
1503	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Hard Disk	Rusak Berat	External Hard disk	1	Aset Aktif	10/29/2005	Peralatan dan Mesin	1.465.000,00
1504	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	CANON PIXMA IP4970 WA	39	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	1.900.000,00
1505	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone/Wireless M	Rusak Berat	Professional Wireless Micro	2	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	1.500.000,00
1506	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Husindo 805	26	Aset Aktif	1/1/1997	Peralatan dan Mesin	293.000,00
1507	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	EPSON L210 WARNA	38	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	2.290.000,00
1508	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	111	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1509	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Canon Color IX 6560	33	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	4.158.000,00
1510	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	148	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1511	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	PRINTER CANON MG3120	45	Aset Aktif	12/11/2014	Peralatan dan Mesin	965.000,00
1512	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	162	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1513	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	200	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1514	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	33	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1515	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel Core I3	43	Aset Aktif	3/17/2014	Peralatan dan Mesin	4.550.000,00
1516	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Acer Aspire M3920 I3 Win7	27	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	6.034.500,00
1517	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Pesawat Telephone	Rusak Berat	Panasonic	1	Aset Aktif	10/5/1995	Peralatan dan Mesin	145.000,00
1518	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura FTR 405	666	Aset Aktif	10/1/2000	Peralatan dan Mesin	210.000,00
1519	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	Setara ICA 800VA	6	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	945.000,00
1520	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	GIGABYTE	20	Aset Aktif	6/11/2010	Peralatan dan Mesin	6.760.000,00
1521	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Dell Inpirion 2320	35	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	14.278.000,00
1522	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	27	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1523	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA AT 1082B. 2000VA	3	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	2.300.000,00
1524	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	HP ALL IN ONE 20 B110D	37	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	8.455.000,00
1525	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	156	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1526	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Axioo Pico Pad	11	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	6.682.500,00
1527	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Laptop 12" core M5	38	Aset Aktif	12/14/2017	Peralatan dan Mesin	27.690.000,00
1528	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Asus A42F-VX085D	15	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	7.055.000,00
1529	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone/Wireless M	Rusak Berat	SHURE MIC WIRELESS LX	4	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	1.555.000,00
1530	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	28	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00

1531	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	30	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1532	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone/Wireless M	Rusak Berat	SHURE MIC WIRELESS LX	3	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	1.555.000,00
1533	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Printer Laser Jet HP LJ2104	4	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	3.775.000,00
1534	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Xerox CP105 b	14	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	3.442.500,00
1535	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Peralatan Studio Audio	Rusak Berat	-	1	Aset Aktif	11/15/2016	Peralatan dan Mesin	1.250.000,00
1536	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Ketik	Rusak Berat	Meja LCD	3	Aset Aktif	8/13/2007	Peralatan dan Mesin	643.000,00
1537	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Ketik	Rusak Berat		2	Aset Aktif	12/8/1997	Peralatan dan Mesin	291.000,00
1538	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mesin Pemotong Rumi	Rusak Berat	Steel deck Body	2	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	3.500.000,00
1539	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Handy Talky (HT)	Rusak Berat	Baofeng UV82-Dual Band	2	Aset Aktif	11/14/2016	Peralatan dan Mesin	748.000,00
1540	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Handy Talky (HT)	Rusak Berat	Baofeng UV82-Dual Band	1	Aset Aktif	11/14/2016	Peralatan dan Mesin	748.000,00
1541	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone/Wireless M	Rusak Berat	Professional Wireless Micro	1	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	1.500.000,00
1542	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	A.C. Split	Rusak Berat	Uchida	31	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	5.089.000,00
1543	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ICA AT 1082B. 2000VA	2	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	2.300.000,00
1544	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	34	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1545	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	HP ALL IN ONE20 B110D	41	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	8.455.000,00
1546	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Televisi	Rusak Berat	TV LCD LG 22" + Braket	15	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	1.958.000,00
1547	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel 2.0 Dou Core, Monitor	16	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	7.300.000,00
1548	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel 3,0 Ghz dual core	34	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	4.048.000,00
1549	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	ASUS K31CD-ID011D	78	Aset Aktif	12/8/2017	Peralatan dan Mesin	5.800.000,00
1550	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		15	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	1.628.000,00
1551	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone	Rusak Berat	Type BMB BM 30	1	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	750.000,00
1552	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Microphone	Rusak Berat	Type BMB BM 30	2	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	750.000,00
1553	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Fujitsu Model S6410x	6	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	33.609.000,00
1554	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	ASIOO NS 658/MS 058	2	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	12.200.000,00
1555	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Acer 4740-33G12Mn	13	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	5.196.150,00
1556	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	Type NC4010	1	Aset Aktif	10/29/2005	Peralatan dan Mesin	29.100.000,00
1557	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	LAPTOP TOSHIBA C40D	24	Aset Aktif	12/11/2014	Peralatan dan Mesin	6.084.000,00
1558	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Lemari Kayu	Rusak Berat	Model Jatileng setara Olimp	20	Aset Aktif	7/27/2005	Peralatan dan Mesin	675.000,00
1559	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	114	Aset Aktif	12/1/1993	Peralatan dan Mesin	48.000,00
1560	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	167	Aset Aktif	5/20/1996	Peralatan dan Mesin	70.000,00
1561	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Keyboard (Peralatan M	Rusak Berat	Roland	1	Aset Aktif	11/19/1996	Peralatan dan Mesin	947.000,00
1562	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kamera Digital	Rusak Berat	CANON	1	Aset Aktif	9/7/2016	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
1563	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Pesawat Radio Meter	Rusak Berat	Router board 532A	2	Aset Aktif	11/12/2007	Peralatan dan Mesin	17.500.000,00
1564	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kamera Digital	Rusak Berat	CANON	2	Aset Aktif	9/7/2016	Peralatan dan Mesin	3.465.000,00
1565	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Camera Digital	Rusak Berat	Sony	1	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	6.325.000,00
1566	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Klem Jaringan	Rusak Berat	Jaringan Nirkabl + Lokal	1	Aset Aktif	8/20/2007	Peralatan dan Mesin	37.300.000,00
1567	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Pesawat Radio Meter	Rusak Berat	Router board 532A	1	Aset Aktif	11/12/2007	Peralatan dan Mesin	17.500.000,00
1568	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Thermocouple Switch I	Rusak Berat	Dlink Des 1008	2	Aset Aktif	11/12/2007	Peralatan dan Mesin	350.000,00
1569	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Handy Talky (HT)	Rusak Berat	Baofeng UV82-Dual Band	3	Aset Aktif	11/14/2016	Peralatan dan Mesin	748.000,00
1570	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Facsimile	Rusak Berat	Mesin Faximile Panasonic	2	Aset Aktif	8/16/2012	Peralatan dan Mesin	3.828.000,00
1571	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Proc Intel Core2Dou 2.33	12	Aset Aktif	8/20/2007	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
1572	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Audio Mixing Console	Rusak Berat	Prince PM 122x250 watt	1	Aset Aktif	11/1/2000	Peralatan dan Mesin	7.559.000,00
1573	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Intel Pentium D Processor	7	Aset Aktif	12/28/2006	Peralatan dan Mesin	8.150.000,00
1574	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat		5	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	375.000,00
1575	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	36	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1576	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Scanner (Universal Tes	Rusak Berat	Cannon	4	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	1.220.000,00
1577	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	ERSYS 600 Va	37	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	400.000,00
1578	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Transportable Water P	Rusak Berat	Makita Type MPA 250	1	Aset Aktif	8/7/1995	Peralatan dan Mesin	1.135.000,00
1579	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Scanner (Universal Tes	Rusak Berat	Canon lide 110	7	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	891.000,00
1580	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja (Alat Labor	Rusak Berat	1 biro, Setara Prodesign	10	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	1.375.000,00
1581	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Proc Intel Core2Dou 2.33	14	Aset Aktif	8/20/2007	Peralatan dan Mesin	8.250.000,00
1582	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAV 20-A210D	53	Aset Aktif	9/15/2014	Peralatan dan Mesin	9.400.000,00
1583	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja (Alat Labor	Rusak Berat		5	Aset Aktif	1/1/1995	Peralatan dan Mesin	127.000,00
1584	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Scanner (Universal Tes	Rusak Berat	Cannon	5	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	1.220.000,00
1585	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Scanner (Universal Tes	Rusak Berat	Cannon	3	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	1.220.000,00
1586	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sedan	Rusak Berat	Toyota Vios	2	Aset Aktif	12/1/2004	Peralatan dan Mesin	110.300.000,00
1587	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Voice Recorder	Rusak Berat	SONY	4	Aset Aktif	9/7/2016	Peralatan dan Mesin	814.000,00
1588	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	HP ALL IN ONE20 B110D	40	Aset Aktif	7/3/2013	Peralatan dan Mesin	8.455.000,00
1589	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Sound System	Rusak Berat	Model TS-702	19	Aset Aktif	7/1/2002	Peralatan dan Mesin	4.668.000,00
1590	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Mixer (Perkakas Bengk	Rusak Berat	11Chanel,3 mono+4Stereo	1	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	6.500.000,00
1591	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja (Alat Labor	Rusak Berat	Setara Prodesign Ekspresso	9	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	2.465.000,00
1592	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Scanner (Universal Tes	Rusak Berat	Cannon	6	Aset Aktif	3/27/2009	Peralatan dan Mesin	1.220.000,00
1593	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Thermocouple Switch I	Rusak Berat	Manged Layer 2/Lingys	1	Aset Aktif	11/12/2007	Peralatan dan Mesin	3.750.000,00
1594	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Handy Talky (HT)	Rusak Berat	Baofeng UV82-Dual Band	4	Aset Aktif	11/14/2016	Peralatan dan Mesin	748.000,00
1595	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	P.C Unit	Rusak Berat	Acer Aspire M3920 I3 Win7	28	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	6.034.500,00
1596	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Meja Kerja (Alat Labor	Rusak Berat		1	Aset Aktif	1/1/1997	Peralatan dan Mesin	163.000,00
1597	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Facsimile	Rusak Berat	Panasonic KX-MB772CX	1	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	3.375.000,00
1598	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	I Pad 16 GB Apple	10	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	10.125.000,00
1599	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Note Book	Rusak Berat	ASUS	36	Aset Aktif	9/7/2016	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
1600	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Uninterruptible Power S	Rusak Berat	Setara ICA 800VA	7	Aset Aktif	6/7/2011	Peralatan dan Mesin	945.000,00
1601	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Handy Cam	Rusak Berat	Sony	1	Aset Aktif	4/9/2008	Peralatan dan Mesin	8.850.000,00
1602	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		9	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1603	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		6	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1604	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		3	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1605	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Printer	Rusak Berat	Printer Canon 287	10	Aset Aktif	12/22/2015	Peralatan dan Mesin	1.370.000,00
1606	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Printer	Rusak Berat	Printer Epson L 355	4	Aset Aktif	12/22/2015	Peralatan dan Mesin	3.680.000,00
1607	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		4	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1608	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Printer	Rusak Berat	Printer Canon 287	14	Aset Aktif	12/22/2015	Peralatan dan Mesin	1.370.000,00
1609	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		7	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1610	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		10	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1611	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		5	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1612	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		8	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1613	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	50	Aset Aktif	5/4/2016	Peralatan dan Mesin	605.000,00
1614	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	Uchida	9	Aset Aktif	4/19/2016	Peralatan dan Mesin	742.500,00
1615	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	Uchida	10	Aset Aktif	4/19/2016	Peralatan dan Mesin	742.500,00
1616	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Televisi	Rusak Berat		1	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.800.000,00
1617	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Wireless	Rusak Berat	Mic PA System Apollo 679	1	Aset Aktif	4/15/2014	Peralatan dan Mesin	7.700.000,00
1618	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat	arisa dan miyako	5	Aset Aktif	7/29/2020	Peralatan dan Mesin	2.750.000,00
1619	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat		11	Aset Aktif	11/4/2017	Peralatan dan Mesin	795.500,00
1620	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Dispenser	Rusak Berat		3	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.920.000,00
1621	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Air Conditioning (AC)	Rusak Berat	Polytron	4	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	3.700.000,00
1622	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Printer	Rusak Berat	Printer Canon i 2770	1	Aset Aktif	12/22/2015	Peralatan dan Mesin	950.000,00
1623	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Futura	51	Aset Aktif	5/4/2016	Peralatan dan Mesin	605.000,00
1624	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		2	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	3.700.000,00
1625	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		1	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	3.700.000,00
1626	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Scanner/Printer	Rusak Berat		11	Aset Aktif	6/25/2014	Peralatan dan Mesin	1.130.000,00
1627	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Printer	Rusak Berat	Printer Canon 287	11	Aset Aktif	12/22/2015	Peralatan dan Mesin	1.370.000,00
1628	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Printer	Rusak Berat	Printer Canon 287	12	Aset Aktif	12/22/2015	Peralatan dan Mesin	1.370.000,00
1629	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Printer	Rusak Berat	Printer Canon 287	13	Aset Aktif	12/22/2015	Peralatan dan Mesin	1.370.000,00
1630	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Serial Printer	Rusak Berat	Printer Canon i 2770	2	Aset Aktif	12/22/2015	Peralatan dan Mesin	950.000,00
1631	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rumah Negara Golong	Rusak Berat		1	Aset Aktif	3/31/1993	Gedung dan Bangunan	104.056.000,00
1632	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rumah Negara Golong	Rusak Berat		2	Aset Aktif	3/31/1993	Gedung dan Bangunan	104.056.000,00
1633	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rumah Negara Golong	Rusak Berat		1	Aset Aktif	3/31/1994	Gedung dan Bangunan	104.056.000,00
1634	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rumah Negara Golong	Rusak Berat		3	Aset Aktif	3/31/1993	Gedung dan Bangunan	104.056.000,00
1635	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH	Rumah Negara Golong	Rusak Berat		5	Aset Aktif	3/31/1994	Gedung dan Bangunan	104.056.000,00
1636	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	SISTEM PEMATAU APLIKA	106	Aset Aktif	12/16/2013	Aset Tetap tak Berwujud	652.385.563,00
1637	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	PEMUTAKHIRAN JARDIKN	110	Aset Aktif	12/9/2013	Aset Tetap tak Berwujud	49.555.000,00
1638	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	Pengembangan Aplikasi PP	182	Aset Aktif	8/25/2020	Aset Tetap tak Berwujud	98.120.000,00
1639	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	Pengembangan perangkat M	132		12/26/2018	Aset Tetap tak Berwujud	47.025.000,00
1640	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	PEMBUATAN APLIKASI AD	134	Aset Aktif	12/19/2018	Aset Tetap tak Berwujud	48.081.000,00
1641	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	PENGEMBANGAN STREAM	111	Aset Aktif	11/19/2013	Aset Tetap tak Berwujud	154.275.000,00
1642	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	Software Systems Manager	196	Aset Aktif	12/6/2021	Aset Tetap tak Berwujud	190.300.000,00
1643	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	PEMBUATAN APLIKASI PP	133	Aset Aktif	12/26/2018	Aset Tetap tak Berwujud	91.465.000,00
1644	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Lisensi	Rusak Berat	Arcserve UDP v5 Premium	104	Aset Aktif	11/20/2015	Aset Tetap tak Berwujud	838.200.000,00
1645	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	ACUNETIX	114	Aset Aktif	5/26/2014	Aset Tetap tak Berwujud	135.850.000,00
1646	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	PENGEMBANGAN SUMBE	107	Aset Aktif	12/10/2013	Aset Tetap tak Berwujud	191.620.000,00
1647	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	aplikasi tv edukasi	131	Aset Aktif	11/2/2018	Aset Tetap tak Berwujud	99.000.000,00
1648	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Software Komputer	Rusak Berat	Pengembangan Webportal	186	Aset Aktif	11/13/2020	Aset Tetap tak Berwujud	74.140.000,00

1649	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Lisensi	Rusak Berat	HP	1	Aset Aktif	11/28/2009	Aset Tetap tak Berwujud	2.703.206.800,00
1650	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Lisensi	Rusak Berat	METRODATA	2	Aset Aktif	12/11/2012	Aset Tetap tak Berwujud	11.581.569.512,00
1651	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Lisensi	Rusak Berat	44103103-PKM-000667421	168	Aset Aktif	10/10/2019	Aset Tetap tak Berwujud	11.000.000,00
1652	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Facsimile	Rusak Berat	Canon L-170	2	Aset Aktif	2/6/2015	Peralatan dan Mesin	4.554.100,00
1653	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Buffet	Rusak Berat	-	2	Aset Aktif	7/26/2011	Peralatan dan Mesin	15.812.500,00
1654	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	10	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1655	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	67	Aset Aktif	7/6/2018	Peralatan dan Mesin	11.220.000,00
1656	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	40	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1657	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Camera Digital	Rusak Berat		10	Aset Aktif	12/9/2016	Peralatan dan Mesin	5.720.000,00
1658	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Video Conference	Rusak Berat	LOGITECH	1	Aset Aktif	12/20/2017	Peralatan dan Mesin	23.650.000,00
1659	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Facsimile	Rusak Berat	Panasonic	3	Aset Aktif	7/12/2019	Peralatan dan Mesin	5.000.000,00
1660	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		20	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1661	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		15	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1662	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		23	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1663	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		19	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1664	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	CPU (Peralatan Mini K	Rusak Berat	INTEL NUC5CPYH	2	Aset Aktif	8/27/2015	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1665	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		22	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1666	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		16	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1667	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Epson LX-310	25	Aset Aktif	2/6/2015	Peralatan dan Mesin	2.673.000,00
1668	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		21	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1669	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Lampu Blitz Kamera	Rusak Berat		4	Aset Aktif	12/9/2016	Peralatan dan Mesin	4.400.000,00
1670	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Epson LX-310	23	Aset Aktif	2/6/2015	Peralatan dan Mesin	2.673.000,00
1671	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		14	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1672	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Camera Digital	Rusak Berat		11	Aset Aktif	12/9/2016	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1673	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	CPU (Peralatan Mini K	Rusak Berat	INTEL NUC5CPYH	1	Aset Aktif	8/27/2015	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1674	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	CPU (Peralatan Mini K	Rusak Berat	INTEL NUC5CPYH	5	Aset Aktif	8/27/2015	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1675	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laser Jet Pro 400 M401	15	Aset Aktif	2/6/2015	Peralatan dan Mesin	4.653.100,00
1676	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		17	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1677	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Facsimile	Rusak Berat		4	Aset Aktif	5/3/2016	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1678	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		24	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1679	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	37	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1680	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat		12	Aset Aktif	12/2/2019	Peralatan dan Mesin	19.250.000,00
1681	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		18	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1682	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	LCD Monitor	Rusak Berat		2	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	34.100.000,00
1683	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Keyboard (Peralatan P	Rusak Berat	Logitech MK 270r	2	Aset Aktif	3/5/2018	Peralatan dan Mesin	495.000,00
1684	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Facsimile	Rusak Berat		5	Aset Aktif	5/3/2016	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1685	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	64	Aset Aktif	7/6/2018	Peralatan dan Mesin	11.220.000,00
1686	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	47	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1687	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		26	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	715.000,00
1688	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	20	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	13.200.000,00
1689	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	68	Aset Aktif	8/6/2019	Peralatan dan Mesin	12.019.000,00
1690	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone Cable	Rusak Berat		25	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	385.000,00
1691	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	57	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1692	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	41	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1693	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	5	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1694	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	71	Aset Aktif	8/6/2019	Peralatan dan Mesin	12.019.000,00
1695	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	Lenovo	24	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	9.612.710,00
1696	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	1	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1697	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Kabel UTP	Rusak Berat		4	Aset Aktif	7/24/2017	Peralatan dan Mesin	900.000,00
1698	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	1	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1699	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Kabel UTP	Rusak Berat		2	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	4.950.000,00
1700	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	15	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1701	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	4	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1702	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	10	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1703	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	16	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1704	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	49	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1705	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Gordyin/Kray	Rusak Berat		7	Aset Aktif	4/6/2016	Peralatan dan Mesin	11.862.500,00
1706	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	39	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1707	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	52	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1708	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	60	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1709	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	56	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1710	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	54	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1711	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	51	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1712	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	32	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1713	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	50	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1714	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	38	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1715	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	17	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1716	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	19	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1717	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	20	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1718	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	11	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1719	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	HP Pavilion x360	17	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	6.058.000,00
1720	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	HP	30	Aset Aktif	7/6/2018	Peralatan dan Mesin	15.120.600,00
1721	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	HP Pavilion x360	20	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	6.058.000,00
1722	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	35	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1723	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	25	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1724	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laser Jet Pro 400 M401	16	Aset Aktif	2/6/2015	Peralatan dan Mesin	4.653.100,00
1725	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laser Jet Pro	6	Aset Aktif	10/9/2013	Peralatan dan Mesin	4.262.500,00
1726	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Wireless	Rusak Berat		2	Aset Aktif	5/3/2016	Peralatan dan Mesin	10.000.000,00
1727	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	42	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1728	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	46	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1729	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Tangga Aluminium	Rusak Berat	Dutro	1	Aset Aktif	5/3/2013	Peralatan dan Mesin	2.100.000,00
1730	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	7	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1731	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	12	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1732	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Alat Pembersih Lainny	Rusak Berat		4	Aset Aktif	5/31/2017	Peralatan dan Mesin	700.000,00
1733	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	Lenovo	23	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	9.612.710,00
1734	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat		141	Aset Aktif	7/9/2017	Peralatan dan Mesin	11.550.000,00
1735	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Portable Air Conditione	Rusak Berat	Sharp KIA 60Y-W	1	Aset Aktif	10/21/2014	Peralatan dan Mesin	8.030.000,00
1736	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Televisi	Rusak Berat		6	Aset Aktif	9/29/2011	Peralatan dan Mesin	4.961.000,00
1737	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	14	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1738	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	15	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1739	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	8	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1740	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	3	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1741	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	5	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1742	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	14	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1743	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	62	Aset Aktif	7/6/2018	Peralatan dan Mesin	11.220.000,00
1744	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	58	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1745	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	15	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1746	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	48	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1747	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	SONY VAIO	9	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	9.900.000,00
1748	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat		150	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	600.000,00
1749	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	38	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1750	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	HP Pavilion x360	16	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	6.058.000,00
1751	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	34	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1752	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Proyector Spider Brack	Rusak Berat	Motorized XLT ECU-350	1	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	23.100.000,00
1753	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	CPU (Peralatan Mini K	Rusak Berat	INTEL NUC5CPYH	7	Aset Aktif	8/27/2015	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1754	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	CPU (Peralatan Mini K	Rusak Berat	INTEL NUC5CPYH	3	Aset Aktif	8/27/2015	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1755	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	Epson LX-310	24	Aset Aktif	2/6/2015	Peralatan dan Mesin	2.673.000,00
1756	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	43	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1757	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	37	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1758	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	59	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1759	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	65	Aset Aktif	7/6/2018	Peralatan dan Mesin	11.220.000,00
1760	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	44	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1761	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	SONY VAIO	7	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	9.900.000,00
1762	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	HP Pavilion x360	19	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	6.058.000,00
1763	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	SONY VAIO	12	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	9.900.000,00
1764	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	HP Pavilion x360	18	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	6.058.000,00
1765	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat	Avtificial leather	41	Aset Aktif	4/6/2016	Peralatan dan Mesin	3.754.000,00
1766	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sice	Rusak Berat		12	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	9.200.000,00

1767	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	124	Aset Aktif	10/10/2013	Peralatan dan Mesin	20.020.000,00
1768	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	61	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1769	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	34	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1770	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	53	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1771	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	123	Aset Aktif	6/26/2012	Peralatan dan Mesin	7.188.000,00
1772	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	19	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1773	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	21	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	13.200.000,00
1774	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	16	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1775	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	9	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1776	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	66	Aset Aktif	7/6/2018	Peralatan dan Mesin	11.220.000,00
1777	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	70	Aset Aktif	8/6/2019	Peralatan dan Mesin	12.019.000,00
1778	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	24	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	13.200.000,00
1779	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	13	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1780	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	SONY VAIO	10	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	9.900.000,00
1781	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mesin Penghisap Debu	Rusak Berat	Karcher Multi-purpose Vacu	1	Aset Aktif	4/2/2018	Peralatan dan Mesin	9.625.000,00
1782	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	Apple	35	Aset Aktif	8/6/2019	Peralatan dan Mesin	15.746.000,00
1783	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Alat Pembersih Lainny	Rusak Berat		3	Aset Aktif	5/31/2017	Peralatan dan Mesin	700.000,00
1784	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Alat Pembersih Lainny	Rusak Berat		7	Aset Aktif	5/31/2017	Peralatan dan Mesin	700.000,00
1785	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	Lenovo	25	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	9.612.710,00
1786	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat		142	Aset Aktif	7/9/2017	Peralatan dan Mesin	11.550.000,00
1787	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	CPU (Peralatan Mini K	Rusak Berat	INTEL NUC5CPYH	4	Aset Aktif	8/27/2015	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1788	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	7	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1789	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	2	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1790	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	11	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1791	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	6	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1792	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sice	Rusak Berat		11	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	5.700.000,00
1793	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Keyboard (Peralatan P	Rusak Berat	Logitech MK 270r	1	Aset Aktif	3/5/2018	Peralatan dan Mesin	495.000,00
1794	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	30	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1795	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	23	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	13.200.000,00
1796	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	45	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1797	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	33	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1798	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	36	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1799	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	33	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1800	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	hp 510-P049D (W2S78AA)	55	Aset Aktif	6/9/2017	Peralatan dan Mesin	12.980.000,00
1801	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Pavilion 20-2211d	35	Aset Aktif	1/30/2015	Peralatan dan Mesin	9.154.000,00
1802	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	18	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	8.800.000,00
1803	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	SONY VAIO	11	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	9.900.000,00
1804	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	SONY VAIO	8	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	9.900.000,00
1805	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP Envy 23-d240d	28	Aset Aktif	8/25/2014	Peralatan dan Mesin	19.732.570,00
1806	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat	MacBook Air 11,6 inc	21	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	18.589.950,00
1807	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Lemari Kayu	Rusak Berat	-	122	Aset Aktif	6/26/2012	Peralatan dan Mesin	5.428.000,00
1808	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat		144	Aset Aktif	7/9/2017	Peralatan dan Mesin	19.030.000,00
1809	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Note Book	Rusak Berat		143	Aset Aktif	7/9/2017	Peralatan dan Mesin	19.030.000,00
1810	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Keyboard (Peralatan M	Rusak Berat	Apple	1	Aset Aktif	10/25/2019	Peralatan dan Mesin	3.199.000,00
1811	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP LJ 1606 dn	13	Aset Aktif	8/25/2014	Peralatan dan Mesin	4.840.000,00
1812	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	LCD Projector/Infocus	Rusak Berat	Panasonic VW540	11	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	37.015.000,00
1813	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP Laser Jet Pro 400 M401	14	Aset Aktif	2/6/2015	Peralatan dan Mesin	4.653.100,00
1814	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Printer (Peralatan Pers	Rusak Berat	HP LJ 1606 dn	12	Aset Aktif	8/25/2014	Peralatan dan Mesin	4.840.000,00
1815	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Ultra Mobile P.C.	Rusak Berat		2	Aset Aktif	11/24/2017	Peralatan dan Mesin	6.335.000,00
1816	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	CPU (Peralatan Mini K	Rusak Berat	INTEL NUC5CPYH	6	Aset Aktif	8/27/2015	Peralatan dan Mesin	5.250.000,00
1817	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Scanner (Peralatan Pe	Rusak Berat	HP Scanjet	11	Aset Aktif	7/6/2018	Peralatan dan Mesin	18.452.500,00
1818	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Kursi Besi/Metal	Rusak Berat		149	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	600.000,00
1819	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Keyboard (Peralatan P	Rusak Berat	Logitech MK 270r	3	Aset Aktif	3/5/2018	Peralatan dan Mesin	495.000,00
1820	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	32	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1821	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Alat Pembersih Lainny	Rusak Berat	SHARP	2	Aset Aktif	6/1/2017	Peralatan dan Mesin	4.000.000,00
1822	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Alat Pembersih Lainny	Rusak Berat		6	Aset Aktif	5/31/2017	Peralatan dan Mesin	700.000,00
1823	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Televisi	Rusak Berat	LG	9	Aset Aktif	11/24/2017	Peralatan dan Mesin	12.725.000,00
1824	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Televisi	Rusak Berat		4	Aset Aktif	9/29/2011	Peralatan dan Mesin	4.961.000,00
1825	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Televisi	Rusak Berat		5	Aset Aktif	9/29/2011	Peralatan dan Mesin	4.961.000,00
1826	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Loudspeaker	Rusak Berat		6	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	797.500,00
1827	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	11	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1828	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	10	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1829	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	17	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1830	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	18	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1831	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	14	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1832	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mesin Ketik Elektronik/	Rusak Berat	Brother GX 8250	1	Aset Aktif	2/6/2015	Peralatan dan Mesin	2.574.000,00
1833	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Buffet	Rusak Berat	-	3	Aset Aktif	7/15/2011	Peralatan dan Mesin	3.500.000,00
1834	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sice	Rusak Berat		10	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	5.700.000,00
1835	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Resepsionis	Rusak Berat	-	2	Aset Aktif	12/19/2017	Peralatan dan Mesin	13.300.000,00
1836	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Alat Pembersih Lainny	Rusak Berat		8	Aset Aktif	5/31/2017	Peralatan dan Mesin	700.000,00
1837	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Kitchen Set	Rusak Berat	-	3	Aset Aktif	12/4/2017	Peralatan dan Mesin	11.764.170,00
1838	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Televisi	Rusak Berat	Samsung	8	Aset Aktif	10/9/2017	Peralatan dan Mesin	13.683.850,00
1839	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	13	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1840	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	2	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1841	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	12	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1842	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	13	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1843	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	27	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1844	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Loudspeaker	Rusak Berat		7	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	797.500,00
1845	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Loudspeaker	Rusak Berat		8	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	797.500,00
1846	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	4	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1847	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	3	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1848	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Gordyin/Kray	Rusak Berat		6	Aset Aktif	4/6/2016	Peralatan dan Mesin	5.475.000,00
1849	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sice	Rusak Berat		9	Aset Aktif	5/13/2016	Peralatan dan Mesin	7.550.000,00
1850	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	31	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1851	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	36	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1852	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	39	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1853	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	40	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1854	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Meja Rapat	Rusak Berat	Meja Rapat	29	Aset Aktif	12/10/2021	Peralatan dan Mesin	4.127.860,00
1855	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Alat Pembersih Lainny	Rusak Berat		5	Aset Aktif	5/31/2017	Peralatan dan Mesin	700.000,00
1856	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	A.C. Split	Rusak Berat	SHARP AH-A18SCY	14	Aset Aktif	12/4/2015	Peralatan dan Mesin	7.826.500,00
1857	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	A.C. Split	Rusak Berat	SHARP AH-A18SCY	15	Aset Aktif	12/4/2015	Peralatan dan Mesin	7.826.500,00
1858	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Portable Air Conditione	Rusak Berat	Sharp KC-A60Y-W	5	Aset Aktif	10/21/2014	Peralatan dan Mesin	5.995.000,00
1859	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Buffet	Rusak Berat	-	1	Aset Aktif	7/26/2011	Peralatan dan Mesin	22.666.800,00
1860	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Televisi	Rusak Berat	Sharp 24SA4100	15	Aset Aktif	3/5/2018	Peralatan dan Mesin	2.640.000,00
1861	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Loudspeaker	Rusak Berat		5	Aset Aktif	9/26/2016	Peralatan dan Mesin	797.500,00
1862	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Wireless	Rusak Berat	-	3	Aset Aktif	6/1/2017	Peralatan dan Mesin	12.500.000,00
1863	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	12	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1864	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	9	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1865	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Microphone	Rusak Berat	PANARAY	6	Aset Aktif	11/15/2011	Peralatan dan Mesin	1.870.000,00
1866	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	9	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1867	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Vertikal Blind	Rusak Berat	Sharp Point	8	Aset Aktif	7/11/2019	Peralatan dan Mesin	770.000,00
1868	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	69	Aset Aktif	8/6/2019	Peralatan dan Mesin	12.019.000,00
1869	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Lampu Blitz Kamera	Rusak Berat		3	Aset Aktif	12/9/2016	Peralatan dan Mesin	4.400.000,00
1870	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP	63	Aset Aktif	7/6/2018	Peralatan dan Mesin	11.220.000,00
1871	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	P.C Unit	Rusak Berat	HP PAVILION	22	Aset Aktif	7/14/2012	Peralatan dan Mesin	13.200.000,00
1872	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	TV Monitor	Rusak Berat	Samsung TV VA22H5000	2	Aset Aktif	8/25/2014	Peralatan dan Mesin	2.618.000,00
1873	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	TV Monitor	Rusak Berat	LG 32"	6	Aset Aktif	8/27/2015	Peralatan dan Mesin	6.100.000,00
1874	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	TV Monitor	Rusak Berat	Samsung TV VA22H5000	3	Aset Aktif	8/25/2014	Peralatan dan Mesin	2.618.000,00
1875	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	TV Monitor	Rusak Berat	Samsung TV VA22H5000	5	Aset Aktif	8/25/2014	Peralatan dan Mesin	2.618.000,00
1876	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	TV Monitor	Rusak Berat	Samsung TV VA22H5000	1	Aset Aktif	8/25/2014	Peralatan dan Mesin	2.618.000,00
1877	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	TV Monitor	Rusak Berat	Samsung TV VA22H5000	4	Aset Aktif	8/25/2014	Peralatan dan Mesin	2.618.000,00
			TOTAL						**24.764.342.385,00**

16
5
1856

1. LLDikti Medan konfirm
2. LLDikti Palembang konfirm

3. LLdikti JKT	konfirm
4. LLDikti Makassar	konfirm
5. LLDikti Denpasar	konfirm
6. LLDikti Padang	konfirm
7. LLDikti Banjarmasin	konfirm
8. LLDikti Banda Aceh	konfirm
9. LLDikti Biak	

Lampiran 2

42 Kendaraan Tercatat Tanpa Nomor Polisi

No.	Nama Satker	Nama Barang	Merek	Tgl Perolehan	No. Polisi	Nilai Perolehan
1	PUSDATIN	Sepeda Motor	Honda	1/1/1976	-	50.000
2	LLDIKTI WILAYAH VI	Sepeda Motor	Honda	2/16/2007	-	11.975.000
3	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza E	10/8/2008	-	120.450.000
4	LLDIKTI WILAYAH VI	Sedan	Toyota Altis V A/T	3/21/2011	-	344.400.000
5	PUSDATIN	Sepeda Motor	Honda	1/1/1979	-	450.000
6	PUSDATIN	Sepeda Motor	Suzuki	1/1/1980	-	532.000
7	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA INNOVA	7/12/2012	-	293.440.000
8	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papu	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Fortuner 2,7G LUX A/T	9/12/2014	-	491.700.000
9	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	19.066.500
10	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	19.066.500
11	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	19.066.500
12	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	19.066.500
13	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	19.066.500
14	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	19.066.500
15	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papu	Sepeda Motor	YAMAHA XEON	6/15/2015	-	20.000.000
16	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII	Sepeda Motor	Honda New Vario	4/14/2016	-	19.219.000
17	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII	Sepeda Motor	Honda New Vario	4/14/2016	-	19.219.000
18	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	10/4/2017	-	381.050.000
19	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Pembelian Mobil Kijang Inov	10/16/2017	-	347.640.000
20	PUSDATIN	Sepeda Motor	Honda Vario Hitam	12/19/2017	-	20.231.000
21	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota All New Kijang Innov	5/18/2018	-	384.150.000
22	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota	7/23/2018	-	302.400.000
23	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	29.800.000
24	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	29.800.000
25	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	29.800.000
26	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	29.800.000
27	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	29.800.000
28	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	25.875.000
29	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	25.875.000
30	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Pajero	4/18/2019	-	481.453.425
31	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mobil	4/29/2019	-	336.000.000
32	LLDIKTI WILAYAH VI	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova G 2.0 M/T	5/8/2019	-	305.853.500
33	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	10/16/2019	-	26.600.000
34	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	10/16/2019	-	26.600.000
35	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kijang Innova 2.0 G A/T	9/11/2020	-	317.000.000
36	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Fortuner 4x2	10/19/2020	-	521.000.000
37	PUSDATIN	Sepeda Motor	HONDA VARIO 150 2017 W	12/19/2017	-	20.231.000
38	LLDIKTI WILAYAH IV	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Mitsubishi/New Pajero Sport	3/29/2023	-	625.200.000
39	LLDIKTI WILAYAH IV	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Toyota/Hiace	9/7/2023	-	554.530.000
40	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II	Jeep	TOYOTA FORTUNER 2.8 V	11/20/2023	-	610.100.000
41	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	TOYOTA AGYA 1.2 G CVT	11/20/2023	-	194.400.000
42	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sedan	Toyota/Camry V-Tahun 202	12/5/2023	-	775.800.000
						7.866.822.925

Lampiran 3

67 Kendaraan Tercatat Tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin

No.	Nama Satker	Nama Barang	Merek	Tgl Perolehan	No. Mesin	No. Rangka	Nilai Perolehan
1	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang LGX 1,8	10/28/2003	-	-	102.000.000,00
2	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daehatsu	1/1/1977	-	-	1.000.000,00
3	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daehatsu	1/1/1977	-	-	1.000.000,00
4	PUSDATIN	Sepeda Motor	Yamaha	1/1/1978	-	-	150.000,00
5	LLDIKTI WILAYAH VI	Sepeda Motor	Honda	2/16/2007	-	-	11.975.000,00
6	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza E	10/8/2008	-	-	120.450.000,00
7	LLDIKTI WILAYAH VI	Sedan	Toyota Altis V A/T	3/21/2011	-	-	344.400.000,00
8	LLDIKTI WILAYAH VI	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	4/19/2011	-	-	14.875.000,00
9	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	NISSAN GRAN LIVINA 1.5 L	5/18/2011	-	-	187.075.000,00
10	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	NISSAN GRANT LIVINA 1.5 L	5/18/2011	-	-	187.070.600,00
11	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	NISSAN GRAN LIVINA 1.5 L	5/18/2011	-	-	187.075.000,00
12	PUSDATIN	Sepeda Motor	Suzuki	1/1/1980	-	-	532.000,00
13	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	NISSAN GRAN LIVINA 1.5 L	5/18/2011	-	-	187.075.000,00
14	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	NISSAN GRAND LIV 1.8 XV AT	9/19/2011	-	-	234.634.600,00
15	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA INNOVA	7/12/2012	-	-	293.440.000,00
16	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Avansa	12/6/2013	-	-	208.500.000,00
17	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota	12/6/2013	-	-	208.500.000,00
18	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Vega Zr	12/6/2013	-	-	14.850.000,00
19	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDIKBUDRISTEK	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	12/23/2013	-	-	294.850.000,00
20	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Rush	5/6/2014	-	-	260.600.000,00
21	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki Ertiga	6/10/2014	-	-	178.350.000,00
22	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki Ertiga	6/10/2014	-	-	178.350.000,00
23	BIRO PERENCANAAN	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Honda freed	6/19/2014	-	-	223.020.000,00
24	PUSDATIN	Sepeda Motor	HONDA BEBEKSUPRAX125CWF	8/13/2014	-	-	16.285.000,00
25	PUSDATIN	Sepeda Motor	HONDA BEBEKSUPRAX125CWF	8/13/2014	-	-	16.285.000,00
26	PUSDATIN	Sepeda Motor	HONDA BEBEK REVO FIT F1-201	8/13/2014	-	-	12.260.000,00
27	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Fortuner 2,7G LUX A/T	9/12/2014	-	-	491.700.000,00
28	PUSDATIN	Sepeda Motor	HONDA	11/3/2014	-	-	16.429.900,00
29	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sepeda Motor	Yamaha New Yupiter MX	5/13/2015	-	-	16.800.000,00
30	BIRO HUKUM	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki Ertiga	5/18/2015	-	-	188.054.400,00
31	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	-	19.066.500,00
32	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	-	19.066.500,00
33	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	-	19.066.500,00
34	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	-	19.066.500,00
35	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	-	19.066.500,00
36	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	5/26/2015	-	-	19.066.500,00
37	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza G MT Luxury	10/8/2015	-	-	217.106.250,00
38	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA INNOVA V AT LUXURY	10/8/2015	-	-	359.631.250,00
39	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Sepeda Motor	HONDA VARIO	2/22/2016	-	-	24.428.637,00
40	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Sepeda Motor	Honda Vario	2/22/2016	-	-	24.428.636,00
41	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XIV Papua, Papua Bara	Sepeda Motor	Honda Vario	2/22/2016	-	-	24.428.636,00
42	LLDIKTI Wilayah V	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	HONDA CRV 2.0 AT (2016)	6/7/2016	-	-	402.000.000,00
43	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	10/4/2017	-	-	381.050.000,00
44	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Pembelian Mobil Kijang Inova	10/16/2017	-	-	347.640.000,00
45	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota	7/23/2018	-	-	302.400.000,00
46	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	-	29.800.000,00
47	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	-	29.800.000,00
48	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	-	29.800.000,00
49	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	-	29.800.000,00
50	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	-	29.800.000,00
51	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	-	25.875.000,00
52	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Sepeda Motor	Yamaha	11/5/2018	-	-	25.875.000,00
53	PUSDATIN	Sepeda Motor	VIVA	12/7/2018	-	-	29.516.000,00
54	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Pajero	4/18/2019	-	-	481.453.425,00
55	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mobil	4/29/2019	-	-	336.000.000,00
56	LLDIKTI WILAYAH VI	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova G 2.0 M/T	5/8/2019	-	-	305.853.500,00
57	PUSDATIN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA NEW FORTUNER 4x2 2	7/4/2019	-	-	503.860.000,00
58	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	10/16/2019	-	-	26.600.000,00
59	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sepeda Motor	-	10/16/2019	-	-	26.600.000,00
60	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kijang Innova 2.0 G A/T	9/11/2020	-	-	317.000.000,00
61	PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Fortuner 4x2	10/19/2020	-	-	521.000.000,00
62	LLDIKTI Wilayah V	Sepeda Motor	HONDA VARIO 125 CBS ISS	12/2/2021	-	-	21.042.254,00
63	LLDIKTI WILAYAH IV	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Mitsubishi/New Pajero Sport 2.4L D	3/29/2023	-	-	625.200.000,00
64	LLDIKTI WILAYAH IV	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Toyota/Hiace	9/7/2023	-	-	554.530.000,00
65	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II	Jeep	TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ GR	11/20/2023	-	-	610.100.000,00
66	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	TOYOTA AGYA 1.2 G CVT	11/20/2023	-	-	194.400.000,00
67	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Sedan	Toyota/Camry V-Tahun 2023	12/5/2023	-	-	775.800.000,00
TOTAL							**11.924.804.088,00**

Pekerjaan Rehap Ruang Teknisi

No	Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Terpasang	Selisih	Jumlah (Rp)
	Pekerjaan Bongkaran dan Galian	A	2	3	4	5	6 = 1 - 5	7 = 3 X 6
1	Bongkar Keramik Dinding Kamar Mandi uk 25 x 25	18,5	m2	30.000,00	555.000,00	14,44	4,06	121.800,00
2	Bongkar Plafon Internit Ruang Dalam	23,4	m2	25.000,00	585.000,00	18,59	4,81	120.250,00
3	Bongkar Plafon Kamar Mandi	1,8	m	25.000,00	45.000,00	3,36	-1,56	- 39.000,00
4	Bongkar Lis Kayu Palpon	43	m'	7.000,00	301.000,00	32,24	10,76	75.320,00
5	Bongkar Plapon Emperan Teras	19,7	m2	20.000,00	394.000,00	21,4	-1,7	- 34.000,00
6	Bongkar Genteng Asbes	63	m2	38.000,00	2.394.000,00	55,89	7,11	270.180,00
7	Bongkar Lisplang Papan 30 cm	24	m'	13.000,00	312.000,00	30	-6	- 78.000,00
	Pekerjaan Sipil dan Arsitektur - A							
8	Pekerjaan Pasangan Pondasi Rollag bata merah	22,3	m'	37.288,20	831.526,86	21,1	1,2	44.745,84
9	Pekerjaan Beton Kolom 10 x 15 cm	0,36	m3	4.361.983,00	1.570.313,88	0,32	0,04	174.479,32
	Pekerjaan Sipil dan Arsitektur - C							
10	Pekerjaan Pasang Rangka Atap Baja Ringan	48,6	m2	240.976,00	11.711.433,60	38,64	9,96	2.400.120,96
11	Pekerjaan Pasang Genteng Metal Berpasir	48,6	m2	96.073,00	4.669.147,80	38,64	9,96	956.887,08
12	Pekerjaan Kusen Pintu Jendela							
13	Pasang Pintu PBV/toilet alumunium putih 3" ukuran 240 x 240 cm	1	unit	3.760.050,00	3.760.050,00	0	1	3.760.050,00
	Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk							
14	Pengecoran badan jalan tebal 10 cm	4,15	m3	1.250.103,00	5.187.927,45	3,41	0,74	925.076,22
	Jumlah							**8.697.909,42**

7. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp316.531.096,00 pada Empat Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Kondisi

Realisasi Belanja Barang dan Jasa atas Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Jenderal TA 2023 (*unaudited*) sebesar Rp79.697.239.000,00 atau sebesar 97,52% dari anggaran sebesar Rp81.719.822.000,00. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh BPK bersama penyedia serta PPK dan telah ditandatangani dalam Berita Acara, serta analisis dokumen kelengkapan bukti pertanggungjawaban pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada empat satker yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
   1) Kekurangan Volume pekerjaan sebesar Rp258.177.684,00. Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik atas 17 kegiatan pemeliharaan pada Biro Umum dan Jasa terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Kelebihan Pembayaran atas 17 Pekerjaan pada Biro Umum dan PBJ

No	Uraian Pekerjaan	MAK	No & tgl Kontrak	Penyedia Jasa	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Penataan restroom Wisma Argamulya	523111	12178/A7/RT.02.00/2023 Tgl 12-04-2023	PT. Asri Multi Sejahtera	13.712.099,00
2	Penataan Toilet Wisma Argamulya	523111	20570/A7/RT.02.00/2023 Tgl 23-06-2023	PT. Dimar Ataya Semesta	13.712.099,00
3	Penataan toilet kamar basement I Wisma Argamulya	523111	8918/A7/RT.02.00/2023 Tgl 14-03-2023	PT. Zabrina Karya Utama	13.712.099,00
4	Perbaikan dinding penahan tanah Wisma Argamulya	523111	22131/A7/RT.02.00/2023 Tgl 07-07-2023	PT. Bisma Inti Persada	3.686.031,00
5	Penataan Ruang ganti pakaian pria Argamulya	523111	29483/A7/RT.02.00/2023 Tgl 04-09-2023	PT. Bisma Inti Persada	1.600.863,00
6	Penataan sarana fasilitas lingkungan Wisma Argamulya	523111	22597/A7/RT.02.00/2023 Tgl 12-07-2023	CV. Khayla	19.980.968,00
7	Perbaikan Turap Wisma Argamulya	523111	20027/A7/RT.02.00/2023 Tgl 20-06-2023	CV. Graha Cipta Perkasa	17.122.500
8	Penataan Ruang Bilas Wanita dan Penataan Lingkungan	523111	:25140/A7/RT.02.00/2023 Tgl 01-08-2023	CV. Graha Cipta Perkasa	2.921.463,00
9	Paket Pekerjaan Perbaikan Sarana Restroom Wisma Arga Mulya	523111	28390/A7/RT.02.00/2023 Tgl 28-08-2023	CV. Sitiotio Mandiri	8.666.388,00
10	Penataan Kantin Nusantara Gedung F Sekjen Kemendikbudristek	523111	19477/A7/RT.02.00/2023 Tgl 16-06-2023	PT Juida Karya Utama	15.059.045,00
11	Penataan Cieling Ruang Basement Gedung A Kemendikbudristek	523111	10027/A7/RT.02.00/2023 Tgl 27-03-2023	PT Juida Karya Utama	31.630.388,00

KONSEP

No	Uraian Pekerjaan	MAK	No & tgl Kontrak	Penyedia Jasa	Kelebihan Pembayaran (Rp)
12	Pekerjaan Penataan Pagar Pembatas Lingkungan Kantor Pusat	523111	12495/A7/RT.02.00/2023 Tgl 14-04-2023	PT. Mata Intan Cahaya	37.068.357,00
13	Pekerjaan Penataan Taman Vertikal	523111	8354/A7/RT.02.01/2023 Tgl 09-03-202	CV. Lamtama Gemilang	12.564.287,00
14	Pekerjaan Penataan Atap Dak Gedung C	523111	20137/A7/RT.02.00/2023 Tgl 21-06-2023	PT. Milyati Putri Gemilang	49.137.442,00
15	Pekerjaan Penataan Kantor Lt 12 s/d 17 Gedung C	523111	14002/A7/RT.02.00/2023 Tgl 04-05-2023	PT. Putra Gomgomi Makmur	Rp7.918.533
16	Penataan Sarana Gd.C,F	523111	19516/A7/RT.02.00/2023 Tgl 16-06-2023	PT. Tampung Indo Rizki	Rp4.386.720
17	Penataan sarana arsip lt 16 gd C	523111	6041/A7/RT.02.00/2023 Tgl 22-02-2023	PT. Putra Ayahanda Perkasa	Rp5.298.402
	Jumlah				**258.177.684,00**

Menurut keterangan Pejabat Pengadaan diketahui bahwa pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan dari Penyedia Barang kepada Panitia Penerima Barang hanya melakukan pengamatan fisik secara terbatas maupun berdasarkan dokumentasi foto dan atau laporan dari penyedia barang, tidak sampai dilakukan pengukuran secara fisik atau pengecekan fisik barang secara rinci. Rincian kekurangan volume pekerjaan terdapat pada Lampiran 1.

b. Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI)

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas tiga paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan TA 2023 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp16.643.420,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Kelebihan Pembayaran atas Tiga Pekerjaan pada BPTI

No	Uraian Pekerjaan	MAK	No & tgl Kontrak	Penyedia Jasa	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Pemeliharaan Gedung Kantor BPTI Tahap 2	523111	24403/BPTI.PPK.01./PL/XII/SPK/2023 tgl 7 Dec 2023	PT.Dian Rizki Santosa	9.842.100,00
2	Pemeliharaan Asrama Mawar	523111	300/J2/PBJ.1/SPK/2023 tgl 10 Apr 2023	PT.Dian Rizki Santosa	2.423.050,00
3	Pemeliharaan Asrama Anggrek	523111	20601/BPTI.PPK.01./PL/XI/SPK/2023 tgl 3 Nov 2023	PT.Dian Rizki Santosa	4.378.270,00
					16.643.420,00

Rincian kekurangan volume pekerjaan terdapat pada Lampiran 2. BPK telah menginformasikan kepada PPK dan kontraktor pelaksana, dan kontraktor pelaksana bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran.

KONSEP

c. Pusdiklat

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas lima paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan TA 2023 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp33.969.840,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. Kelebihan Pembayaran atas Lima Pekerjaan pada Pusdiklat

No	Uraian Pekerjaan	MAK	No & tgl Kontrak	Penyedia Jasa	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Pengaspalan Jalan Lingkungan Masjid Al-Huda	523111	526/J2/PBJ. 1/SPK/2023 tgl 26 Juni 2023	PT. Alya Sinar Pratama	3.659.795,00
2	Pemeliharaan Jalan/Pengaspalan Area Poliklinik	523111	300/J2/PBJ. 1/SPK/2023 tgl 10 Apr 2023	CV. Ely Mahkota Mandiri	17.927.485,00
3	Rehab Kamar Peserta Asrama Bharata	523111	287/J2/PBJ. 1/SPK/2023 tgl 5 Apr 2023	CV. Wildan Bersinar	1.989.560,00
4	Perbaikan Taman dan Tanggul Area Danau	523111	632/J2/PBJ. 1/SPK/2023	PT. Maulana Sejahtera Barokah	7.443.000,00
5	Pemeliharaan Gedung Merah Putih	523111	294/J2/PBJ. 1/SPK/2023	PT. Nairra Ekatama	2.950.000,00
	Jumlah				**33.969.840,00**

Rincian kekurangan volume pekerjaan terdapat pada Lampiran 3. BPK telah menginformasikan kepada PPK dan kontraktor pelaksana, dan kontraktor pelaksana bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran.

d. LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah.

BPK melaksanakan pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 atas satu paket Pekerjaan Renovasi Selasar LLDikti VI. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Mahanata melalui SPK Nomor 11/LL6/PBJ/RS/2023 tanggal 5 Desember 2023. Hasil pemeriksaan fisik oleh BPK bersama penyedia dan PPK serta didukung dengan analisis dokumen laporan, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp7.740.152,00. Rincian kekurangan volume pekerjaan terdapat pada Lampiran 4.

KONSEP

Kriteria

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres No.16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021 pada:
    1. Pasal 11 ayat (1) huruf i menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: mengendalikan kontrak;
    2. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas:
        a) pelaksanaan kontrak;
        b) kualitas barang/jasa;
        c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
        d) ketepatan waktu penyerahan; dan
        e) ketepatan tempat penyerahan.
    3. Surat Perintah Kerja masing-masing pekerjaan.

Akibat

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp316.531.096,00 terdiri dari Satker :

a. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp258.177.684,00
b. Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) sebesar Rp16.643.420,00
c. Pusdiklat sebesar Rp33.969.840,00
d. LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah sebesar Rp7.740.152,00

Sebab

Hal tersebut disebabkan karena :

a. PPK satker terkait tidak optimal dalam mengendalikan kontrak;
b. Panitia Penerima Barang tidak optimal dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya;
c. KPA belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas satker yang menjadi tanggungjawabnya.

Komentar Instansi

(Terlampir)

KONSEP

Lampiran 1

Kekurangan volume pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

1 Paket Pekerjaan Penataan restroom Wisma Arga Mulya (PT. Asri Multi Sejahtera)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Bongkar keramik	m2	Rp26.000	133,4	122,8134	10,5866	Rp275.252
2	Bongkar plafond gypsum	m2	Rp50.000	24	23	1	Rp50.000
3	Pasang plafond	m2	Rp305.000	24	23	1	Rp305.000
4	Water profing dinding dan lan	m2	Rp195.000	33,6	32,6	1	Rp195.000
5	Keramik lantai	m2	Rp515.000	24	23,0094	0,9906	Rp510.159
6	Keramik Dinding	m2	Rp515.000	109,4	99,804	9,596	Rp4.941.940
7	Floordrain	bh	Rp685.000	12	6	6	Rp4.110.000
8	Instalasi lampu	bh	Rp300.000	12	0	12	Rp3.600.000
							Rp13.987.351

2 Paket Pekerjaan Penataan Toilet Kamar Lantai Dasar Wisma Arga Mulya (PT. Dimar Ataya Semesta)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Bongkar keramik	m2	Rp26.000	133,4	122,8134	10,5866	Rp275.252
2	Bongkar plafond gypsum	m2	Rp50.000	24	23	1	Rp50.000
3	Pasang plafond	m2	Rp305.000	24	23	1	Rp305.000
4	Water profing dinding dan lan	m2	Rp195.000	33,6	32,6	1	Rp195.000
5	Keramik lantai	m2	Rp515.000	24	23,0094	0,9906	Rp510.159
6	Keramik Dinding	m2	Rp515.000	109,4	99,804	9,596	Rp4.941.940
7	Floordrain	bh	Rp685.000	12	6	6	Rp4.110.000
8	Instalasi lampu	bh	Rp300.000	12	0	12	Rp3.600.000
							Rp13.987.351

3 Paket Pekerjaan Penataan Toilet Basement I Wisma Arga Mulya (PT. Zabrina Karya Utama)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Bongkar keramik	m2	Rp26.000	133,4	#REF!	#REF!	#REF!
2	Bongkar plafond gypsum	m2	Rp50.000	24	#REF!	#REF!	#REF!
3	Pasang plafond	m2	Rp305.000	24	#REF!	#REF!	#REF!
4	Water profing dinding dan lan	m2	Rp195.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Keramik lantai	m2	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Keramik Dinding	m2	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Floordrain	bh	Rp685.000	12	6	6	Rp4.110.000
8	Instalasi lampu	bh	Rp300.000	12	0	12	Rp3.600.000

							#REF!

4 Perbaikan Dinding Penahan Tanah Wisma Argamulya (CV Bisma Inti Persada)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Pembersihan lahan kerja	m2	Rp35.000	75	#REF!	#REF!	#REF!
2	Pekerjaan geotekstil	m2	Rp45.000	40	22	18	Rp810.000
3	Pekerjaan turap batu kali	m3	Rp1.525.000	20	#REF!	#REF!	#REF!
4	Pekerjaan turap bronjong	m3	Rp1.775.000	75	73,7	1,3	Rp2.307.500
							#REF!

5 Paket Pekerjaan Penataan Ruang Ganti Pakaian Pria Wisma Arga Mulya (PT. Bisma Inti Persada)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
2	Granit Lantai	m2	Rp515.000	16,6	#REF!	#REF!	#REF!
3	Granit Dinding	m2	Rp515.000	63,2	62,554	0,646	Rp332.690
4	Floor drain	bh	Rp685.000	7	6	1	Rp685.000
5	Tempat sabun	bh	Rp200.000	6	5	1	Rp200.000
6	Pasang instalasi listrik	bh	Rp300.000	8	7	1	Rp300.000
							#REF!

6 Penataan sarana fasilitas lingkungan Wisma Argamulya (CV Khayla)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Galian	m3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	Balok lantai	m3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	Beton dinding	m3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Plester aci	m2	Rp155.000	62,8	30,8	32	Rp4.960.000
	plester	m2	Rp110.200	0	32	-32	-Rp3.526.400
5	Topping batu alam	m	Rp475.000	25	0	25	Rp11.875.000
	Topping batu alam	m	Rp385.215	0	25	-25	-Rp9.630.375
							#REF!

7 Paket Pekerjaan Turap Wisma Argamulya (CV Graha Cipta Persada)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Pembersihan lahan kerja	m2	Rp34.500	75	#REF!	#REF!	#REF!
2	Pekerjaan geotekstil	m2	Rp46.000	40	22	18	Rp828.000
3	Pekerjaan turap bronjong	m3	Rp1.776.000	75	66	9	Rp15.984.000
							#REF!

8 Paket Pekerjaan Penataan Ruang Bilas Wanita dan Penataan Lingkungan (CV. Graha Cipta Perkasa)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Bongkar keramik lama	m2	Rp26.000	72	66,7	5,3	Rp137.800
2	Granit Lantai	m2	Rp515.000	16,6	#REF!	#REF!	#REF!
3	Granit hebel	m2	Rp185.000	4	2	2	Rp370.000
4	Granit Dinding	m2	Rp515.000	58,4	#REF!	#REF!	#REF!
5	Pasang instalasi listrik	bh	Rp300.000	8	6	2	Rp600.000
	Sarana Lingkungan						
1	Pekerjaan rabat beton	m2	Rp90.000	59,4	41,58	17,82	Rp1.603.800
							#REF!

9 Paket Pekerjaan Perbaikan Sarana Restroom Wisma Arga Mulya (CV. SITIOTIO MANDIRI)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
	I. Kamar LB1-15 dan LB1-16						
1	Bongkar keramik	m2	Rp26.000	44,5	40,94	3,56	Rp92.617
2	Bongkar plafond gypsum	m2	Rp50.000	11	7,67	3,33	Rp166.667
3	Pasang plafond	m2	Rp305.000	11	7,67	3,33	Rp1.016.667
4	Water profing dinding dan lan	m2	Rp195.000	11,2	7,67	3,53	Rp689.000
5	Keramik lantai	m2	Rp515.000	8	7,67	0,33	Rp170.053
6	Keramik Dinding	m2	Rp515.000	36,84	33,27	3,57	Rp1.839.580
7	Instalasi lampu	bh	Rp300.000	4	0,00	4,00	Rp1.200.000

							Rp5.174.584
	II. Toilet Pria dan Wanita R. Serbaguna						
1	Bongkar keramik	m2	Rp26.000	58,6	#REF!	#REF!	Rp0
2	Bongkar plafond gypsum	m2	Rp50.000	11	#REF!	#REF!	#REF!
3	Pasang plafond	m2	Rp305.000	11	#REF!	#REF!	#REF!
4	Water profing dinding dan lan	m2	Rp195.000	12,2	11,00	1,20	Rp234.000
5	Keramik lantai	m2	Rp515.000	8,4	#REF!	#REF!	#REF!
6	Keramik Dinding	m2	Rp515.000	50,2	#REF!	#REF!	#REF!
7	Keramik meja wastafel	m2	Rp515.000	1,4	#REF!	#REF!	#REF!
8	Cermin wastafel	m2	Rp825.000	2,4	#REF!	#REF!	#REF!
9	Instalasi lampu	m2	Rp300.000	6	4,00	2,00	Rp600.000
							#REF!
	Total I + II						**#REF!**

10 Paket Pekerjaan Penataan Kantin Gedung F (PT Juida Karya Utama)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Pengecatan dinding dan plafo	m2	Rp47.400	960	930,17	29,83	Rp1.413.942
2	Meja kios	m2	Rp473.000	38	#REF!	#REF!	#REF!
3	Pasang GRC 2 muka	m2	Rp528.000	36	#REF!	#REF!	#REF!
4	Plester aci	m2	Rp155.500	64	64	0	Rp0
4	Cat grill besi	m2	Rp47.500	36	#REF!	#REF!	#REF!
							#REF!

11 Paket Pekerjaan Penataan Ceiling Ruang Basement Gedung A (PT Juida Karya Utama)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Pasang Karpet anti bocor	m2	Rp324.500	256	#REF!	#REF!	#REF!
3	Pengerokan cat ceiling	m2	Rp8.950	775	600	175	**Rp1.566.250**
4	Lapisan Kedap air Ceiling	m2	Rp69.500	657	455,84	201,16	Rp13.980.620
							#REF!

12 Paket Pekerjaan Penataan Pagar Pembatas Lingkungan Kantor Pusat (PT. MATA INTAN CAHAYA)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Pengecatan tembok keliling k	m2	Rp52.000	1575	#REF!	#REF!	#REF!
2	Pengecatan besi ulir dan kelil	m2	Rp47.500	1250	#REF!	#REF!	#REF!
3	Pengecatan turap parkir moto	m2	Rp52.000	170	#REF!	#REF!	#REF!
4	Pengecatan pagar besi seber	m2	Rp47.500	105	#REF!	#REF!	#REF!
							#REF!

13 Paket Pekerjaan Konstruksi Penataan Taman Vertikal Sayap Kanan Lantai 2 Gedung A (CV. LAMTAMA GEMILANG)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Kantong tanaman	m2	Rp534.500	114	#REF!	#REF!	#REF!
2	Philodendrom	bh	Rp15.000	575	528	47	Rp705.000
3	Sirih centong	bh	Rp15.000	575	528	47	Rp705.000
4	Cocok gaok	bh	Rp15.000	575	528	47	Rp705.000
5	lili paris	bh	Rp20.000	575	528	47	Rp940.000
6	sengonium	bh	Rp15.000	575	528	47	Rp705.000
7	dracena hijau	bh	Rp15.000	575	528	47	Rp705.000
8	pakis kelabang	bh	Rp20.000	575	528	47	Rp940.000
9	Pupuk Media Tanam	karung	Rp64.300	585	#REF!	#REF!	#REF!
							#REF!

14 Paket Pekerjaan Penataan Atap Dak Gedung C Sayap Kiri (PT. MILYATI PUTRI GEMILANG)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volum	Lebih Bayar
1	**Pengelupasan / Pengerokan**	**m2**	**34900**	**678,7**	**464,5935**	**214,1065**	**Rp7.472.317**
2	**Waterproofing dak**	**m2**	**194600**	**678,7**	**464,5935**	**214,1065**	**Rp41.665.125**
							Rp49.137.442

15 Paket Pekerjaan Penataan Sarana Kantor Lantai 12, 15, 16 dan Lantai 17 Gedung C (PT. PUTRA GOMGOMI MAKMUR)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Pengamplasan dinding	m2	Rp22.500	129,5	103,1463	26,3537	Rp592.958
2	Pasang HPL baru	m2	Rp685.000	69,9	61,505	8,395	Rp5.750.575
3	Top table granit	m	2500000	3,1	2,47	0,63	1575000
							Rp7.918.533

16 Paket Pekerjaan Penataan Sarana Kantor Lantai 1, 3, 5 dan 19 Gedung C (PT. TAMPUNG INDO RIZKI)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
	Jembatan Penghubung						
1	Pengecatan dinding dan plafo	m2	Rp47.500	69,88	#REF!	#REF!	#REF!
	Lantai 19						
1	Bongkar Dinding Parafet	m2	Rp50.000	20,06	#REF!	#REF!	#REF!
2	Multipleks Dinding Parafet	m2	Rp185.000	20,06	#REF!	#REF!	#REF!
3	HPL Dinding Parafet	m2	Rp685.000	20,06	#REF!	#REF!	#REF!
4	Plint HPL	m2	Rp235.000	20,06	#REF!	#REF!	#REF!
5	Pasang wallpaper	m2	Rp190.000	163,58	#REF!	#REF!	#REF!
6	Pengecatan dinding	m2	Rp47.500	128,96	#REF!	#REF!	#REF!
							#REF!

17 Paket Pekerjaan Penataan Sarana Arsip Lantai 16 Gedung C (PT. PUTRA AYAHANDA PERKASA)

No	Item pekerjaan	Satuan	Harga	Vol SPK	Vol Cek Fisik	Selisih Volume	Lebih Bayar
1	Pengecatan lemari kabinet	m2	Rp139.000	64,75	#REF!	#REF!	#REF!
							#REF!

Lampiran 2

Kekurangan volume pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Satker BPTI

1	**Pemeliharaan Gedung Kantor BPTI Tahap 2 (PT.DIAN RIZKI SANTOSA)**						
	No	**Item pekerjaan**	**Satuan**	**Harga**	**Vol SPK**	**Vol Cek Fisik**	**Selisih Volume**	**Lebih Bayar**
	1	Partisi GRC dengan rangka metal stad	m2	Rp300.000	49,2	13,43	35,77	Rp10.731.000
	2	Cat outdoor	m2	Rp50.000	49,2	33,31	15,89	Rp794.500
								Rp11.525.500
2	**Pemeliharaan Asrama Mawar (PT.DIAN RIZKI SANTOSA)**						
	No	**Item pekerjaan**	**Satuan**	**Harga**	**Vol SPK**	**Vol Cek Fisik**	**Selisih Volume**	**Lebih Bayar**
		Selasar						
	1	Bongkar plint lama	m	Rp7.500	150	130,22	19,78	Rp148.350
	2	Pasang plint baru	m	Rp115.000	150	130,22	19,78	Rp2.274.700
								Rp2.423.050
3	**Pemeliharaan Asrama Anggrek (PT.DIAN RIZKI SANTOSA)**						
	No	**Item pekerjaan**	**Satuan**	**Harga**	**Vol SPK**	**Vol Cek Fisik**	**Selisih Volume**	**Lebih Bayar**
		Kamar Tidur						
	1	Bongkar keramik lama	m2	Rp40.000	148,86	144,69	4,17	Rp166.800
	2	Pasang granit baru		Rp425.000	148,86	144,69	4,17	Rp1.772.250
		Teras/Koridor						
	1	Bongkar list keramik lama	m2	Rp18.000	125,77	95,18	30,59	Rp550.620
	2	Pasang plint PVC		Rp115.000	125,77	95,18	30,59	Rp3.517.850
								Rp6.007.520

Lampiran 3

Kekurangan volume pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Satker Pusdiklat

1. Pengaspalan lingkungan Masjid Alhuda (PT. ALYA SINAR PRATAMA)							
No	**Item pekerjaan**	**Satuan**	**Harga**	**Vol SPK**	**Vol Cek Fisik**	**Selisih Volume**	**Lebih Bayar**
1	Pembersihan badan jalan	m2	Rp1.500	1600	0	1600	Rp2.400.000
2	Primecoat aspal emulsi	m2	Rp28.000	1600	#REF!	#REF!	#REF!
3	Aspal hotmix 3cm gelar	m2	Rp61.000	1600	#REF!	#REF!	#REF!
	Spesifikasi						
	Hotmix 3 cm namun terpasang 1,8 cm (terpadatkan)		*Rp61.000*	*0,6*	*#REF!*		
							#REF!

2. Pengaspalan Area poliklinik s/d Gedung Nusantara (CV. ELY MAHKOTA MANDIRI)							
No	**Item pekerjaan**	**Satuan**	**Harga**	**Vol SPK**	**Vol Cek Fisik**	**Selisih Volume**	**Lebih Bayar**
1	Pembersihan badan jalan	m2	Rp1.500	1695	0	1695	Rp2.542.500
2	Primecoat aspal emulsi	m2	Rp28.000	1695	#REF!	#REF!	#REF!
3	Aspal hotmix 3cm gelar	m2	Rp61.000	1695	#REF!	#REF!	#REF!
	Spesifikasi						
	Hotmix 3 cm namun terpasang 1,8 cm (terpadatkan)		*Rp61.000*	*0,6*	*#REF!*		
							#REF!

3. Rehab Kamar Peserta Asrama Bharata (CV. WILDAN BERSINAR)							
No	**Item pekerjaan**	**Satuan**	**Harga**	**Vol SPK**	**Vol Cek Fisik**	**Selisih Volume**	**Lebih Bayar**
1	Bongkar lantai keramik	m2	Rp35.000	54	48,856	5,144	Rp180.040
2	Lantai Granit Tile	m2	Rp265.000	45	40,232	4,768	Rp1.263.520
3	Instalasi antena	bh	Rp198.000	2	0	2	Rp396.000
4	Soket antena TV	bh	Rp75.000	2	0	2	Rp150.000
							Rp1.989.560
4. Perbaikan taman dan tanggul area danau (PT. Maulana Sejahtera Barokah)							
No	**Item pekerjaan**	**Satuan**	**Harga**	**Vol SPK**	**Vol Cek Fisik**	**Selisih Volume**	**Lebih Bayar**
1	Bongkar Kansteen	m	Rp60.000	135	91	44	Rp2.640.000
2	Pasang kansteen kembali	m	Rp74.000	135	91	44	Rp3.256.000
3	Plester aci kanstin	m2	Rp182.000	52	#REF!	#REF!	#REF!
							#REF!
5. Pemeliharaan Gedung Merah Putih (PT. Nairra Ekatama)							
No	**Item pekerjaan**	**Satuan**	**Harga**	**Vol SPK**	**Vol Cek Fisik**	**Selisih Volume**	**Lebih Bayar**
	Alat bantu kerja						
1	Bambu perancah	batang	Rp35.000	50	0	50	Rp1.750.000
2	Skyfolding	set	Rp60.000	20	0	20	Rp1.200.000
							Rp2.950.000

Lampiran 4

Kekurangan volume pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Satker LLDIKTI Wilayah VI

Atap baja ringan	Lapangan	Luas kontrak	selisih	harga satuan	Lebih bayar
Segmen 1	3,8				
	4				
	2				
	4				
Segmen 2	18,45				
Segmen 3	9,5				
Segmen 4	14,4				
Segmen 5	13,6				
Overlap antar segmen	3,6				
Total panjang	73,35				
Lebar kuda2	3,48				
Total luasan atap baja ringan	255,258	277	-21,742	310.500	Rp6.750.891
Pemasangan genteng kembali	227,358	249,1	-21,742	45.500	Rp989.261
Kelebihan Pembayaran					**Rp7.740.152**

35. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tidak Akurat

Kondisi

Laporan Realisasi Anggaran (*unaudited*) pada Sekretariat Jenderal menyajikan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 senilai Rp10.853.374.782,00 atau 98,82% dari anggaran senilai Rp10.983.377.503,00. Belanja Pegawai dimaksud antara lain direalisasikan untuk membayarkan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) sebesar Rp2.119.794.043.566,00 dari anggaran sebesar Rp2.139.547.274.000,00 atau 99,02%. Anggaran TPD Non PNS dikelola oleh satker Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang terbagi dalam 16 wilayah di seluruh Indonesia. Pembayaran TPD yang dikelola LLDIKTI meliputi pembayaran TPD atas dosen-dosen yang bertugas di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) Swasta.

Tunjangan profesi dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Rincian anggaran dan realisasi atas pembayaran TPD Non PNS dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Tunjangan Profesi Dosen Non PNS Tahun Anggaran 2023

No	Satuan Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	[723009] LLDIKTI Wilayah I Medan	148.959.190.000	148.957.746.800	100,00%
2	[723010] LLDIKTI Wilayah II Palembang	98.920.401.000	97.455.997.600	98,52%
3	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	369.132.831.000	369.132.053.649	100,00%
4	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	326.704.000.000	320.760.592.000	98,18%
5	[723013] LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta	144.552.058.000	143.512.824.600	99,28%
6	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	209.906.002.000	208.422.171.300	99,29%
7	[723015] LLDIKTI Wilayah VII Surabaya	253.683.509.000	252.624.831.300	99,58%
8	[723016] LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar	101.245.461.000	100.707.615.500	99,47%
9	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	140.726.000.000	140.281.171.800	99,68%
10	[723018] LLDIKTI Wilayah X Padang	163.461.058.000	162.210.485.167	99,23%
11	[723019] LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin	56.653.328.000	54.724.011.100	96,59%
12	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	19.841.056.000	19.459.612.950	98,08%
13	[723021] LLDIKTI Wilayah XIII Banda Aceh	23.852.976.000	21.001.887.200	88,05%
14	[723022] LLDIKTI Wilayah XIV Biak	17.384.342.000	17.089.804.500	98,31%
15	[723023] LLDIKTI Wilayah XV Kupang	27.683.705.000	26.614.184.600	96,14%
16	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	36.841.357.000	36.839.053.500	99,99%
TOTAL		**2.139.547.274.000**	**2.119.794.043.566**	99,08%

Pembayaran tunjangan profesi dosen Non PNS dilaksanakan oleh LLDIKTI dengan berpedoman pada beberapa ketentuan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Ketentuan dimaksud menjelaskan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan, yakni senilai satu kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang melaksanakan

tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 SKS pada setiap semester.

Pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) diinput oleh masing-masing dosen melalui aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (Sister) Kemendikbudristek pada laman https://sister.kemdikbud.go.id Verifikasi atas data capaian beban kerja dosen dilakukan oleh asesor dan Tim di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), yang menghasilkan dua status penilaian yakni "memenuhi BKD" (M) dan "tidak memenuhi BKD" (TM). Hasil dari Sister tersebut kemudian diverifikasi dan diproses oleh LPPMP dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk menyiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang penerima tunjangan fungsional dosen. SPTJM dikirimkan ke LLDIKTI untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi (verval) dan proses pembayaran TPD kepada masing-masing dosen.

Pemeriksaan atas pengelolaan realisasi belanja pegawai TPD Non PNS pada LLDIKTI dengan meminta keterangan kepada seluruh LLDIKTI, wawancara dengan pihak PTS secara uji petik, dan pengujian data Pembayaran TPD dengan data Sister yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek). Data pembayaran TPD kepada LLDIKTI telah dimintakan melalui surat nomor 11/S-Tim.2/LK-DKBUDRISTEK/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 dan permintaan kedua melalui surat nomor 26/S-Tim.2/LK-DKBUDRISTEK/03/2024 tanggal 26 Maret 2024. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, LLDIKTI Wilayah I Medan tidak dapat memenuhi data yang valid sehingga pengujian atas pembayaran TPD tidak dilakukan secara populasi. Sedangkan data Sister yang diperoleh dari Ditjen Dikti memiliki keterbatasan berupa tidak dapat menampilkan data dosen yang telah pensiun dan meninggal per tanggal data tersebut diperoleh, yaitu bulan Maret 2024.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan realisasi belanja pegawai TPD Non PNS pada LLDIKTI diketahui terdapat kondisi sebagai berikut:

a. Terdapat Keterlambatan dan Ketidakakuratan Pembayaran TPD Diawal Tahun 2023

Pada periode awal Tahun Anggaran 2023, LLDIKTI menggunakan aplikasi SERUNI *Advance* dalam mengelola pembayaran TPD sesuai dengan Surat Sekjen nomor 73583/A.A1/PR.07.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS dan Non PNS di Lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melalui Aplikasi SERUNI *Advance*.

Aplikasi SERUNI awalnya merupakan Aplikasi yang digunakan LLDIKTI Wilayah VI Semarang dalam mengelola pembayaran TPD di wilayahnya. Aplikasi SERUNI dinilai berhasil dalam membantu pengelolaan pembayaran TPD sehingga dikembangkan untuk dapat diterapkan ke semua LLDIKTI, yaitu SERUNI *Advance*. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada LLDIKTI diketahui bahwa penerapan SERUNI *Advance* tidak berjalan mulus dikarenakan terjadi anomali atas hasil pemrosesan data pembayaran seperti:

1) Database dosen tidak lengkap. Terdapat kondisi dimana dosen aktif yang datanya tidak muncul pada proses pembayaran;
2) Pangkat dan Golongan dosen tidak akurat sehingga memengaruhi besaran pembayaran TPD; dan
3) Status BKD tidak akurat. Terdapat kondisi dosen yang telah memenuhi BKD namun terbaca TM sehingga tidak dapat diproses pembayaran.

Atas permasalahan tersebut, terjadi keterlambatan pembayaran TPD bulan Januari dan Februari diseluruh LLDIKTI kepada 42.669 dosen senilai Rp266.546.065.535 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Keterlambatan Pembayaran TPD Bulan Januari dan Februari 2023 Akibat Kegagalan Implementasi Aplikasi SERUNI *Advance*

No	Satuan Kerja	Dosen (Orang)	Nilai (Rp)
1	[723009] LLDIKTI Wilayah I Medan	2.409	16.472.903.600
2	[723010] LLDIKTI Wilayah II Palembang	2.836	18.613.684.700
3	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	889	7.530.709.800
4	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	9.124	59.963.035.700
5	[723013] LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta	3.902	27.371.782.100
6	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	5.555	21.103.295.550
7	[723015] LLDIKTI Wilayah VII Surabaya	243	1.335.834.800
8	[723016] LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar	3.174	20.214.688.900
9	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	4.349	30.682.164.700
10	[723018] LLDIKTI Wilayah X Padang	4.724	30.062.850.085
11	[723019] LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin	1.853	10.653.734.300
12	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	657	4.198.572.100
13	[723021] LLDIKTI Wilayah XIII Banda Aceh	687	4.466.412.200
14	[723022] LLDIKTI Wilayah XIV Biak	469	2.761.344.600
15	[723023] LLDIKTI Wilayah XV Kupang	710	4.354.751.000
16	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	1.088	6.760.301.400
TOTAL		**42.669**	**266.546.065.535**

Berkaitan dengan ketidakakuratan pangkat dan golongan serta status BKD, berimbas kepada pengajuan pembayaran secara susulan pada periode-periode selanjutnya.

b. Belum Ada Kebijakan yang Seragam dalam Pengelolaan Pembayaran TPD

Berdasarkan keterangan yang didapat dari 16 LLDIKTI, diketahui terdapat perbedaan kebijakan dalam pengelolaan pembayaran TPD yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbedaan Kebijakan dalam PengelolaanPembayaran TPD oleh LLDIKTI

No	LLDIKTI Wilayah	Pengunaan Aplikasi	Periode Pembayaran	SPTJM dari Perguruan Tinggi	Pengaruh Cuti	Carry Over TPD
1	I Medan	Ada	Per Bulan	Per Semester	Tidak Berpengaruh	Ada
2	II Palembang	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Tidak Ada
3	III DKI Jakarta	Ada	Per Bulan	Per Semester	Status Cuti di PD DIKTI	Ada
4	IV Bandung	Ada	Per Bulan	Per Bulan	Hanya Cuti Besar	Ada
5	V Yogyakarta	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Hanya Cuti Besar	Ada
6	VI Semarang	Ada	Per Bulan	Per Bulan	Semua Jenis Cuti	Ada
7	VII Surabaya	Ada	Per Bulan	Per Bulan	Semua Jenis Cuti	Ada
8	VIII Denpasar	Manual	Per Bulan	Per Semester	Semua Jenis Cuti	Tidak Ada
9	IX Makassar	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Ada
10	X Padang	Ada	Per Bulan	Per Semester	Tidak Berpengaruh	Tidak Ada
11	XI Banjarmasin	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Hanya Cuti Besar	Tidak Ada
12	XII Ambon	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Ada
13	XIII Banda Aceh	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Tidak Ada
14	XIV Biak	Manual	Per 3-bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Tidak Ada

KONSEP

No	LLDIKTI Wilayah	Pengunaan Aplikasi	Periode Pembayaran	SPTJM dari Perguruan Tinggi	Pengaruh Cuti	Carry Over TPD
15	XV Kupang	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Hanya Cuti Besar	Tidak Ada
16	XVI Gorontalo	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Ada

Penjelasan lebih lanjut atas perbedaan kebijakan Pembayaran TPD oleh LLDIKTI adalah sebagai berikut:

1) Penggunaan Aplikasi

   Penggunaan aplikasi bantuan bertujuan untuk membantu proses verval yang dilakukan setiap periode pembayaran. Terdapat dua poin penting verval dalam proses pembayaran TPD, yaitu verval terpenuhinya BKD dan verval status keaktifan dosen.

   Verval terpenuhinya BKD berkaitan dengan output yang dihasilkan Aplikasi Sister, yaitu Laporan BKD yang menunjukkan bahwa dosen tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban BKD. Verval status keaktifan dosen, pangkat, golongan dan masa kerja dosen dilakukan oleh Bagian Sumber Daya LLDIKTI.

2) Perbedaan periode pembayaran

   Terdapat 15 LLDIKTI yang membayarkan TPD per bulan dan 1 LLDIKTI membayarkan TPD per triwulan yaitu LLDIKTI Wilayah XIV Biak.

3) Mekanisme penerbitan dan pengumpulan SPTJM dari PTS

   Terdapat 12 LLDIKTI menerapkan SPTJM yang dibuat setiap pengajuan pembayaran/per bulan, dan 4 LLDIKTI menerapkan SPTJM yang dibuat per semester/6 bulanan;

4) Perbedaan pengaruh cuti atas status keaktifan dosen

   Beberapa LLDIKTI menerapkan kebijakan yang berbeda-beda atas cuti yang dapat memengaruhi status keaktifan dosen, yaitu:

   a) Tidak berpengaruh terhadap keaktifan dosen;
   b) Berpengaruh terhadap keaktifan dosen jika cuti terdata di PD DIKTI;
   c) Berpengaruh terhadap keaktifan dosen hanya untuk cuti besar (melahirkan, haji, umroh), cuti sakit diatas 1 bulan, cuti diluar tanggungan negara (CLTN);
   d) Berpengaruh terhadap keaktifan dosen atas semua jenis cuti, sampai dengan cuti tahunan.

5) *Carry Over* Pembayaran TPD

   Terdapat 7 LLDIKTI yang tidak memiliki *carry over* pembayaran TPD, yaitu pembayaran TPD periode tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024.

c. Pembayaran TPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp6.973.706.566,00

Salah satu syarat agar seorang dosen bersertifikasi dapat dibayarkan TPD adalah dosen tersebut harus memenuhi BKD yang terdata dalam Aplikasi Sister setiap semester dan telah dinilai oleh dua orang Assessor yang terdaftar di Ditjen Dikti. Proses pemenuhan BKD dan penilaian dua Assessor dilakukan da terdokumentasi scara daring dalam aplikasi Sister.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (POBKD) diatur syarat pembayaran TPD Tahun

KONSEP

2023 dengan status pemenuhan BKD disetiap semesternya sehingga syarat pembayaran TPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Pembayaran TPD bulan Januari dan Februari, harus memenuhi status BKD semester genap 2021-2022;
2) Pembayaran TPD bulan Maret s.d. Agustus, harus memenuhi status BKD semester ganjil 2022-2023; dan
3) Pembayaran TPD bulan September s.d. Desember, harus memenuhi status BKD semester genap 2022-2023.

Hasil pengujian terhadap data pembayaran TPD oleh LLDIKTI ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1) Terdapat Pembayaran TPD kepada Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD

   Dengan melakukan perbandingan antara rincian pembayaran TPD LLDIKTI dengan status BKD setiap semester pada data aplikasi Sister, diketahui terdapat pembayaran TPD pada 12 LLDIKTI senilai Rp5.878.645.599,00 kepada 324 dosen yang tidak memenuhi status Beban Kerja Dosen (BKD) berdasarkan data aplikasi Sister yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Rincian Pembayaran TPD kepada Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD di Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD	
		Jumlah (orang)	Nilai (Rp)
1	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	14	166.791.800
2	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	26	213.881.000
3	[723013] LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta	1	3.204.700
4	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	127	2.951.695.516
5	[723015] LLDIKTI Wilayah VII Surabaya	8	50.032.900
6	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	86	1.547.766.400
7	[723018] LLDIKTI Wilayah X Padang	33	582.091.000
8	[723019] LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin	1	18.453.000
9	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	13	93.308.783
10	[723022] LLDIKTI Wilayah XIV Biak	3	51.506.000
11	[723023] LLDIKTI Wilayah XV Kupang	4	13.098.000
12	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	8	186.816.500
TOTAL		**324**	**5.878.645.599**

Hasil konfirmasi atas dosen yang tidak memenuhi status BKD namun tetap dilakukan pembayaran TPD adalah sebagai berikut:

a) Terdapat perbedaaan antara database Aplikasi Sister (file CSV) dengan informasi yang ditampilkan pada laman https://sister.kemdikbud.go.id atau unduhan Laporan BKD; dan

b) Terdapat dua status yaitu M dan TM atas dosen dengan NIDN yang sama dan didalam periode penilaian yang sama.

2) Terdapat Pembayaran atas Dosen yang Baru Mendapatkan Sertifikat Pendidik Tetapi Tidak Memenuhi Status BKD

   Bagi dosen yang baru mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2022, maka TPD baru dibayarkan di tahun 2023. Dengan membandingkan data pembayaran TPD LLDIKTI

dengan data status BKD dari aplikasi Sister untuk semester genap 2021-2022 yang menjadi syarat pembayaran TPD Bulan Januari dan Februari 2023, diketahui terdapat pembayaran TPD Bulan Januari dan Februari 2023 atas dosen yang baru lulus sertifikasi tahun 2022 namun tidak memenuhi status BKD senilai Rp1.095.066.967,00 kepada 265 dosen yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Rincian Pembayaran TPD Januari dan Februari 2023 kepada Dosen Lulus Sertifikasi Tahun 2022 Namun Tidak Memenuhi Status BKD Semester Genap 2021-2022

No	Satuan Kerja	Dosen (Orang)	Nilai (Rp)
1	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	110	567.350.200
2	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	5	28.922.000
3	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	78	204.843.750
4	[723016] LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar	1	5.546.400
5	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	47	157.153.400
6	[723018] LLDIKTI Wilayah X Padang	1	5.781.000
7	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	15	78.165.417
8	[723022] LLDIKTI Wilayah XIV Biak	1	5.781.000
9	[723023] LLDIKTI Wilayah XV Kupang	6	36.140.800
10	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	1	5.377.000
TOTAL		**265**	**1.095.060.967**

Hasil konfirmasi kepada LLDIKTI diketahui bahwa pembayaran tersebut mengacu kepada PMK Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa Tunjangan Profesi Dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional. Namun pembayaran TPD bulan Januari dan Februari 2023 kepada Dosen Lulus Sertifikasi Tahun 2022 tersebut belum memenuhi persayaratan dibayarkannya TPD yaitu harus memenuhi BKD sesuai POBKD setiap semesternya.

d. Tidak ada Nilai Utang yang Disajikan pada Laporan Keuangan LLDIKTI

Atas pembayaran TPD periode 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 (*carry over*), LLDIKTI belum mencatat dan menyajikan nilai utang pada laporan keuangan. Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa tidak dicatatnya nilai utang tersebut dikarenakan tagihan atas TPD berasal dari perguruan tinggi setiap bulannya sehingga LLDIKTI baru mengetahui terdapat tagihan *carry over* TPD diawal tahun 2024. Nilai carry over TPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. *Carry Over* TPD Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Dosen (Orang)	Nilai (Rp)
1	[723009] LLDIKTI Wilayah I Medan	440	1.446.393.900
2	[723011] LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	642	2.376.516.700
3	[723012] LLDIKTI Wilayah IV Bandung	14	80.567.796
4	[723013] LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta	9	131.209.200
5	[723014] LLDIKTI Wilayah VI Semarang	151	483.200.900
6	[723015] LLDIKTI Wilayah VII Surabaya	1	21.727.600
7	[723017] LLDIKTI Wilayah IX Makassar	1	31.596.600
8	[723020] LLDIKTI Wilayah XII Ambon	1	9.513.900
9	[723024] LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo	1	184.126.900
TOTAL		**1.260**	**4.764.853.496**

Kriteria

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan antara lain melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan diantaranya beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

b. PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor pada:

   1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; dan

   2) Pasal 9 yang menyatakan bahwa pemberian tunjangan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PMK Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor pada:

   1) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa Tunjangan Profesi Dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional;

   2) Pasal 13 yang menyatakan bahwa Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dihentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang;

   3) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK menguji kebenaran daftar perhitungan pembayaran dan SK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   4) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPSPM melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran material dan formal SPP-LS dan dokumen pendukungnya; dan

   5) Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa penelitian dan pengujian meliputi a) kesesuaian daftar perhitungan pembayaran tunjangan dengan SK, b) ketersediaan pagu anggaran berkenaan dalam DIPA, c) meneliti kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21.

d. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada:

   1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila memenuhi persyaratan:

KONSEP

a) melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:

(1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

(2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

b) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.

2) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural, diangkat sebagai pejabat negara, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus bagi lektor kepala;

3) Pasal 17 yang menyatakan bahwa Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen pada Bab V Penghargaan dan Sanksi Dosen yang hasil penilaian BKD-nya dengan status TM dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut poin 3 ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen atau ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor;

Akibat

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Inkonsistensi kebijakan terkait pembayaran TPD Non PNS pada masing-masing LLDIKTI;

b. Potensi kelebihan pembayaran TPD atas 589 dosen sebesar Rp6.973.706.566,00 yang terdiri dari:

1) 324 dosen dengan status TM berdasarkan data aplikasi Sister sebesar Rp5.878.645.599,00; dan

2) 265 dosen lulus sertifikasi tahun 2022 namun tidak memenuhi status BKD Semester Genap 2021-2022 sebesar Rp1.095.060.967,00

c. Kurang saji atas akun Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar senilai Rp11.554.911.396,00 atas *carry over* TPD 2023 yang belum tercatat.

KONSEP

Sebab

Hal tersebut disebabkan:

a. Sekretaris Jenderal sebagai Unit Kerja Utama yang membawahi LLDIKTI belum menyusun panduan untuk mengatur kebijakan atas pembayaran TPD Dosen Non PNS yang berlaku secara seragam pada LLDIKTI di seluruh Indonesia; dan

b. Para Kepala LLDIKTI tidak optimal dalam mengelola pembayaran TPD Dosen Non PNS.

Komentar Instansi

[terlampir]

KONSEP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

Nomor : 0549/LL6/KU.02.01/2024 7 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Konsep Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2023

Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (terlampir)
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kemendikbudristek nomor 13504/A2/RHS/WS.03.04/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 pada Eselon I Sekretariat Jenderal, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat potensi temuan atas pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD)/Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) untuk periode pembayaran tahun 2023 dengan rincian:
   - Dosen dengan Status BKD ***Tidak Memenuhi*** sejumlah 127 Orang (*data dosen terlampir*).
   - Dosen Lolos Sertifikasi Pendidik tahun 2022 dengan Status BKD Tidak Memenuhi sejumlah 39 Orang (*data dosen terlampir*).
2. Potensi temuan tersebut disebabkan oleh permasalahan saat penarikan data pada aplikasi sister.kemdikbud.go.id yang mengakibatkan perbedaan data hasil unduhan dan data yang sebenarnya tersimpan di aplikasi sister.kemdikbud.go.id yang digunakan oleh Tim Pemeriksa.
3. Untuk menindaklanjuti konsep temuan pemeriksaaan BPK dimaksud, kami akan menyampaikan dokumen pendukung berupa Laporan BKD dosen-dosen terkait dan tangkapan layar Laporan BKD dari aplikasi sister.kemdikbud.go.id sebagai bukti bahwa pembayaran TPD/TKGB seperti yang disebutkan pada poin 1 sudah memenuhi syarat.
4. Untuk mempercepat proses pengumpulan dokumen pendukung dimaksud mengingat keterbatasan tenggat waktu yang diberikan oleh Tim Pemeriksa BPK, dengan hormat kami mohon agar Saudara berkenan membantu melakukan pengunggahan Laporan BKD yang dipersyaratkan tim pemeriksa BPK (Harap mengunggah File sesuai Folder nomor urut masing-masing dosen) ke tautan berikut:

No	Uraian	LBKD yang diupload	Link
1	Dosen yang tidak memenuhi status BKD	Genap 21/22 (Mar 22 s.d Agust 22)	https://drive.google.com/drive/0/folders/150X6w4fBjk2hURIRjFH-uki18atbmAX
		Gasal 22/23 (Sep 22 s.d Feb 23)	
		Genap 22/23 (Mar 23 s.d Agust 23)	
2	Dosen berserdik tahun 2022 yang tidak memenuhi status BKD	Genap 21/22 (Mar 22 s.d Agust 22)	https://drive.google.com/drive/0/folders/1OKV1qoG08BskADrdndpF6i6eUNVIqO

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

5. Mohon berkenan memberikan nama file sesuai *template* sebagai berikut dan.
   - NIDN-Nama Dosen-LBKDGenap21_22
   - NIDN-Nama Dosen-SisterGenap21_22
   - NIDN-Nama Dosen-LBKDGasal22_23
   - NIDN-Nama Dosen-SisterGasal22_23
   - dstnya
6. Batas waktu pengunggahan adalah hari Selasa, tgl 7 Mei 2024, pukul 15.00 WIB

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

Lampiran 1

DAFTAR DOSEN YANG TIDAK MEMENUHI STATUS BKD TAHUN 2023

No	NIDN	Nama	Perguruan Tinggi
1	0608038303	Risnawati	Akademi Kebidanan Mardi Rahayu
2	0627018701	Esteria Priyanti	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
3	0622027801	Hesti Ristanto	Institut Teknologi dan Bisnis Semarang
4	0626077201	Yustiana Dwirainaningsih	Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
5	0613038701	Sri Hindriyastuti	Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus
6	0606018203	Dwi Ari Cahyani	Politeknik Banjarnegara
7	0613028501	Lia Aria Ratmawati	Politeknik Banjarnegara
8	0616117302	Siswanto	Politeknik Insan Husada Surakarta
9	0601116702	Antonius Prihanto	Politeknik Katolik Mangunwijaya
10	0620058401	Maria Mita Susanti	Politeknik Katolik Mangunwijaya
11	0610039001	Sabtun Ismi Khasanah	Politeknik Manufaktur Ceper
12	0627078802	Pratika Ayuningtyas	Politeknik Sawunggalih Aji
13	0619096902	Sabtarini Kusumaningsih	Politeknik Stibisnis
14	0631056501	Aletta Dewi Maria Th.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
15	0621027002	Aurilia Triani Aryaningtyas	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
16	0610065901	C Susmono Widagdo	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
17	0021017901	Dyah Palupiningtyas	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
18	0603036601	Haniek Listyorini	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
19	0611056901	Hendrajaya	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
20	0612077202	Henry Yuliamir	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
21	0630036501	Mengku Marhendi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
22	0630126901	Suwarti	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
23	0630126601	EKO SASONO, SE., MM	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang
24	0616016701	Andri Nurtantiono	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
25	0629038301	Ginanjar Rahmawan	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
26	0615037501	Heny Kurnianingsih	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
27	0010107501	Ida Ayu Kade Rachmawati	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
28	0631077403	Achmad Wildan	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi
29	0725046703	Agus Suprijono	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi
30	0012037701	Dwi Hadi Setya Palupi	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi
31	0619056201	Maria Caecilia Nanny Setiawati	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi
32	0628058301	Lailatul Mustaghfiroh	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati
33	0714078502	LULUK YULIATI	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati
34	0629018002	Artathi Eka Suryandari	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto
35	0609018202	Dyah Fajarsari	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto
36	0609098401	Andin Sefrina	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas
37	0613028701	Ellyzabeth Sukmawati	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas
38	0618077402	Drajat Indah Mawarni	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
39	0609096101	Eko Sutarto	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

40	1015088303	Indra Gunawan	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
41	0618067503	Sri Iswahyuni	STIKES Mamba ul Ulum Surakarta
42	0603078801	Anindhita Yudha Cahyaningtyas	STIKES Mitra Husada Karanganyar
43	0626118901	Astri Sri Wariyanti	STIKES Mitra Husada Karanganyar
44	0626108702	Estiningtyas	STIKES Mitra Husada Karanganyar
45	0601018301	Hastutik	STIKES Mitra Husada Karanganyar
46	0606048201	N. Kadek Sri Eka Putri	STIKES Mitra Husada Karanganyar
47	0625028803	Reni Puspita Sari	STIKES Mitra Husada Karanganyar
48	0603098701	Siskana Dewi Rosita	STIKES Mitra Husada Karanganyar
49	0610128802	Yeni Anggraini	STIKES Mitra Husada Karanganyar
50	0614037103	Kartika Imam Santoso	STMIK Bina Patria
51	0617057309	Muhammad Lutfi Mahasinul A	STMIK Bina Patria
52	0605046401	Aris Mardiyono	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
53	0601086401	Indra Kertati	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
54	0620076001	Jaluanto Sunu Punjul Tyoso	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
55	1109127301	Murdiansyah Herman	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
56	0621106301	Parju	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
57	0614096501	Rr Suprantiningrum	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
58	0610056301	Sri Suyati	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
59	0808057402	Donna Setiawati	Universitas Boyolali
60	0604038601	Fera Tri Wulandari	Universitas Boyolali
61	0626116701	LISTYOWATI PUJI RAHAYU	Universitas Boyolali
62	0606096201	Edy Dwi Kurniati	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
63	0607017401	Anita Wijayanti	Universitas Islam Batik
64	0618059002	Dika Yudanto	Universitas Islam Batik
65	0020086902	Pramono Hadi	Universitas Islam Batik
66	0610036502	Siti Nurlaela	Universitas Islam Batik
67	0015027201	Suhendro	Universitas Islam Batik
68	0610026401	Suparwi	Universitas Islam Batik
69	0613108502	Umi Nur Solikah	Universitas Islam Batik
70	0605077801	Yuli Chomsatu Samrotun	Universitas Islam Batik
71	0618087603	Agus Subhan Akbar	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
72	0630038301	DS. Drajad Wibowo	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
73	0620017801	Dwi Agung Nugroho Arianto	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
74	0029106001	Luky Mudiarti	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
75	0619077401	Samsul Arifin	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
76	0627046601	Rakhmat Bowo Suharto	Universitas Islam Sultan Agung
77	0615076202	Sri Kusriyah	Universitas Islam Sultan Agung
78	0601068101	Anne Indrayanti Timotius	Universitas Kristen Satya Wacana
79	0612047401	ARIEF WIDODO	Universitas Kristen Satya Wacana
80	0629128104	Augie David Manuputty	Universitas Kristen Satya Wacana
81	0620077101	Listyani	Universitas Kristen Satya Wacana
82	0630068302	Nur Aji Wibowo	Universitas Kristen Satya Wacana
83	0603098002	Yusepaldo Pasharibu	Universitas Kristen Satya Wacana
84	0604058901	Amalia Rahmawati	Universitas Muhammadiyah Kudus
85	0616108001	Diana Tri Lestari	Universitas Muhammadiyah Kudus
86	0601038002	Nor Asiyah	Universitas Muhammadiyah Kudus

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

87	0602087401	Sri Karyati	Universitas Muhammadiyah Kudus
88	0604058601	Umi Faridah	Universitas Muhammadiyah Kudus
89	0622078302	Robiul Fitri Masithoh	Universitas Muhammadiyah Magelang
90	0629127903	Dendy Murdiyanto	Universitas Muhammadiyah Surakarta
91	0001066401	Joko Sutarso	Universitas Muhammadiyah Surakarta
92	0625066301	Sofyan Anif	Universitas Muhammadiyah Surakarta
93	0621088501	Agus Darmuki	Universitas Muria Kudus
94	0620068303	Ahmad Hariyadi	Universitas Muria Kudus
95	0616069001	Edris Zamroni	Universitas Muria Kudus
96	0606058201	Fajar Nugraha	Universitas Muria Kudus
97	0616098701	Fina Fakhriyah	Universitas Muria Kudus
98	0918039101	Luthfa Nugraheni	Universitas Muria Kudus
99	0628098705	Nur Alfin Hidayati	Universitas Muria Kudus
100	0624058701	Savitri Wanabuliandari	Universitas Muria Kudus
101	0616088502	Tri Listyorini	Universitas Muria Kudus
102	0625019102	Asfi Aniuranti	Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
103	0625089002	Dwi Sukowati	Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
104	0618018501	Adhista Setyarini	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
105	0605049001	Anni Nurul Hidayati	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
106	0625097401	Lintang Pamugar Mukti Aji	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
107	0617077704	Rony Arpinto Ady	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
108	0603068904	Hery Muhamad Ansory	Universitas Setia Budi
109	0617036301	Nur Hidayati	Universitas Setia Budi
110	0623117704	Titiek Puji Astuti	Universitas Setia Budi
111	0611018302	Yari Mukti Wibowo	Universitas Setia Budi
112	0626029001	Widhian Hardiyanti	Universitas Stikubank
113	0605117103	Yunus Anis	Universitas Stikubank
114	0613108501	Ika Oktaria Cahyaningrum	Universitas Surakarta
115	0630016801	Juni Trisnowati	Universitas Surakarta
116	0624067602	Sarsiti	Universitas Surakarta
117	0611086801	Sukoco	Universitas Surakarta
118	0629106601	Suryati	Universitas Surakarta
119	0612038601	Widyashanti Kunthara Anindita	Universitas Surakarta
120	0624087501	Andi Purwono	Universitas Wahid Hasyim
121	0617047201	Darmanto	Universitas Wahid Hasyim
122	0622116801	Nugroho Widiasmadi	Universitas Wahid Hasyim
123	0627108404	Heny Prasetyorini	Universitas Widya Husada Semarang
124	0629108101	Novita Alfiani	Universitas Widya Husada Semarang
125	0601047704	Rahayu Winarti	Universitas Widya Husada Semarang
126	0601108102	Tri Sakti Widyaningsih	Universitas Widya Husada Semarang
127	1114067601	Yane Puspito Sari	Universitas Widya Husada Semarang

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

Lampiran 2

DAFTAR DOSEN BERSERDIK 2022 TIDAK MEMENUHI STATUS BKD

No	NIDN	Nama	Nama Perguruan Tinggi
1	605037304	Eko Budihartono	Politeknik Harapan Bersama
2	627128503	Qirom	Politeknik Harapan Bersama
3	627068803	Syarifudin	Politeknik Harapan Bersama
4	618049002	Yusri Anis Faidah	Politeknik Harapan Bersama
5	618087902	Sri Suparti	Politeknik Indonusa Surakarta
6	623087201	Wachidah Fauzijanti	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang
7	714078502	LULUK YULIATI	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati
8	609098401	Andin Sefrina	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas
9	620038202	Retno Wahyusari	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
10	626108702	Estiningtyas	STIKES Mitra Husada Karanganyar
11	621108608	Ika Swasti Putri	Universitas Dharma AUB Surakarta
12	601088402	AGUS IRFAN	Universitas Islam Sultan Agung
13	609099001	Selvia Agustina	Universitas Islam Sultan Agung
14	615068003	Widhi Handayani	Universitas Kristen Satya Wacana
15	609098602	Ira Hapsari	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
16	631039003	Kurnia Ritma Dhanti	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
17	611018303	Kurniawan	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
18	602118201	Oke Kadarullah	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
19	609069201	M Iqbal Taufiqurrahman Sunariya	Universitas Muhammadiyah Surakarta
20	605078901	Muhad Fatoni	Universitas Muhammadiyah Surakarta
21	605098401	Muhamad Toyib	Universitas Muhammadiyah Surakarta
22	604118402	Nida Sri Utami	Universitas Muhammadiyah Surakarta
23	609048702	Rini Setyaningsih	Universitas Muhammadiyah Surakarta
24	618028702	AHMAD ROIS	Universitas Sains Alqur an
25	602118902	AKMAL BASHORI	Universitas Sains Alqur an
26	610026501	ALI IMRON	Universitas Sains Alqur an
27	612119002	ENI CANDRA NURHAYATI	Universitas Sains Alqur an
28	622117801	LILIK ROCHMAD NURCHOLISHO	Universitas Sains Alqur an
29	621118001	MUHAMMAD SAEFULLAH	Universitas Sains Alqur an
30	624048101	ROBINGUN SUYUD EL SYAM	Universitas Sains Alqur an
31	627048202	SAWAUN	Universitas Sains Alqur an
32	605119002	SITI LAILIYAH	Universitas Sains Alqur an
33	612058501	SOFAN RIZQI	Universitas Sains Alqur an
34	605049101	Ahmad Jawandi	Universitas Slamet Riyadi
35	602087902	Alfonsa Maria Sofia Hapsari	Universitas Slamet Riyadi
36	620056902	Arif Sutikno	Universitas Slamet Riyadi
37	609098404	Asih Handayani	Universitas Slamet Riyadi
38	618128603	Imroatul Ma	Universitas Slamet Riyadi
39	609098801	Sofyan Ardyanto	Universitas Wahid Hasyim

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Klarifikasi Temuan TPD

Ketentuan:

1. Klarifikasi dibuat per NIDN/Dosen (1 folder);
2. Melampirkan 2 bukti dokumen, berupa:
   a. Laporan BKD sesuai periode di temuan (Genap 21-22, Ganjil 22-23, dan Genap 22-23) yang telah disahkan



PERNYATAAN DOSEN

24 April 2024

Dosen Yang Membuat

DR., DRS. M.I SUHIFATULLAH, M.PD

PERNYATAAN ASESOR

Asesor I

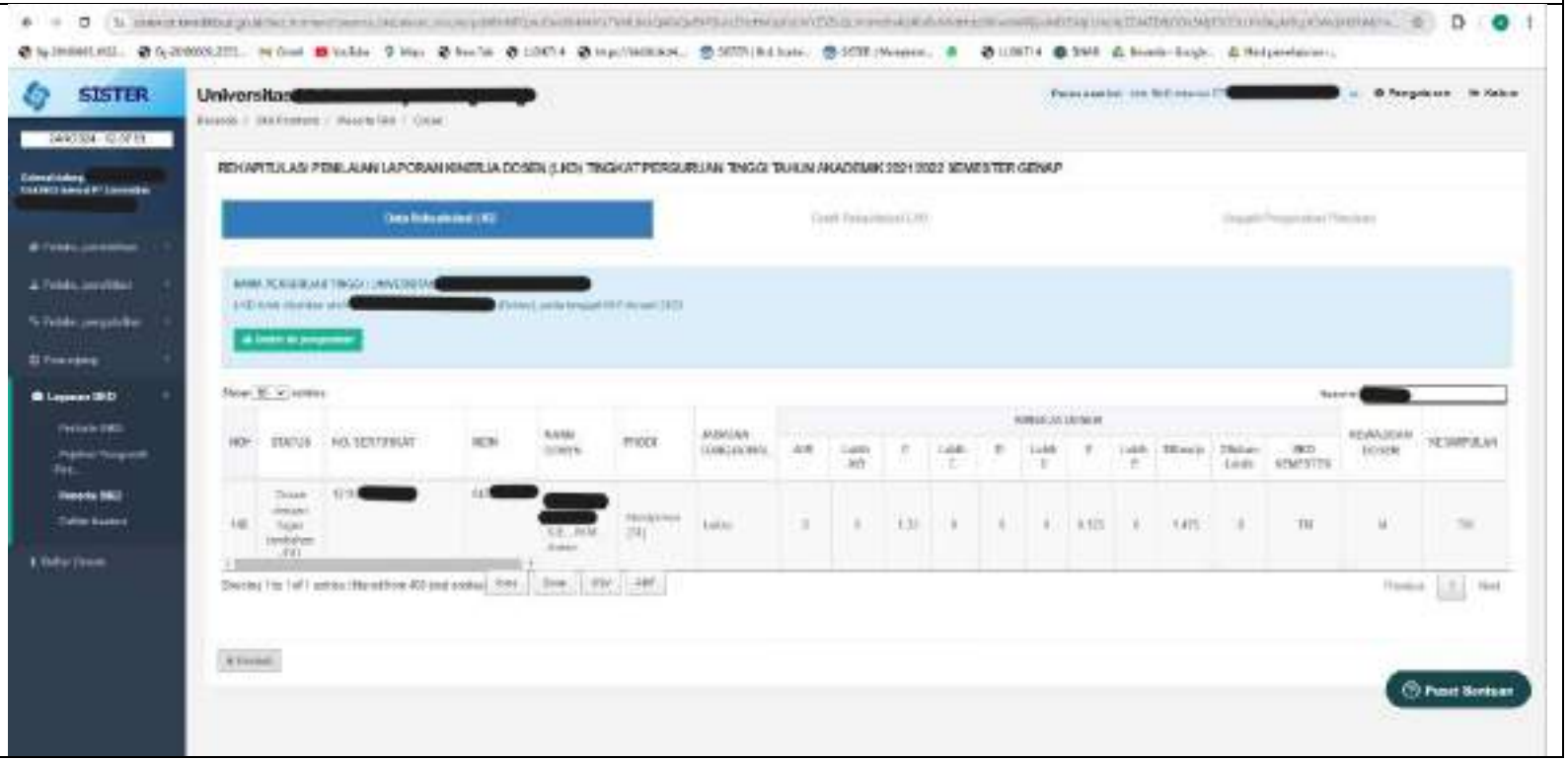
MUSTOFA KAMIL

Asesor II

JIM HOT YAM

Mengetahui Rektor

   b. Screenshot dari tampilan Sister yang diakses dengan akun Admin PT, sbb:

Diakses melalui: Layanan BKD >> Peserta BKD >> **REKAP BKD**	
Tampilan ScreenShot	

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
JAKARTA



Nomor : 7/LHP/XIX/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

Nomor : 7.b/LHP/XIX/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 25549000 Pesawat 3694

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4

A. Pendapatan 4

1. Pengelolaan Pendapatan pada Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan 4
2. Pemungutan dan Pengembalian Uang Kuliah Tunggal Belum Sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan 26
3. Pengelolaan Pendapatan BLU Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan 36

B. Belanja 66

1. Kemendikbudristek Belum Menetapkan Kebijakan Penggunaan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Sesuai Dengan Amanat PP Nomor 18 Tahun 2022 Sehingga Pelakasanaan *Automatic Adjustment* Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Tidak Memiliki Kriteria Yang Jelas 66
2. Pengelolaan Belanja Pegawai pada Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan 71
3. Penganggaran dan Proses Pengadaan Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan 96
4. Pengelolaan BPPTNBH Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan sehingga Hak dan Kewajiban Pemerintah Kepada PTNBH belum dapat Disajikan Secara Tepat 128
5. Penatausahaan dan Pertangungjawaban atas Realisasi Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan 138
6. Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan 147
7. Kelebihan Bayar atas Pertanggungjawaban Belanja Barang Senilai Rp6.835.419.102,15 dan Terdapat Kekurangan Pemotongan/Pemungutan Pajak atas Belanja Barang Senilai Rp1.559.030.234,20 162
8. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Banpem untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan 189
9. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Dikdasmen Belum Memadai 221
10. Pengelolaan Belanja Bansos Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tidak Sesuai Ketentuan 230

11. Pelaksanaan Belanja Modal pada Beberapa Satker Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan dan Kondisi Sebenarnya 241
12. Penganggaran dan Penggunaan Mata Anggaran Penerimaan dan MAK Tidak Tepat dan Tidak Konsisten pada Kemendikbudristek 258
C. Aset 266
1. Pengelolaan Kas pada Setjen dan Ditjen Diktiristek Tidak Sesuai Ketentuan Penatausahaan Kas 266
2. Pengelolaan Kas pada PTN BLU Universitas Manado, Unmul, dan PPNS Tidak Tertib 286
3. Pengoptimalan Kas Melalui Investasi Jangka Pendek pada Delapan Satker BLU di Ditjen Diksi Tidak Didukung Kebijakan Investasi Jangka Pendek yang Memadai .. 295
4. Monev Pertanggungjawaban atas Kegiatan pada Akun BDDM dari Belanja Banpem Belum Memadai 299
5. Pengelolaan Piutang pada Unit Kerja di Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan 313
6. Pengelolaan Persediaan Kemendikbudristek Belum Memadai 336
7. Penatausahaan dan Pencatatan Aset Lainnya pada Kemdikbudristek Kurang Memadai 356
8. Pengelolaan Aset Tetap pada Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Memadai 363
D. Kewajiban 402
Penyajian dan Pengungkapan Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Diksi Belum Memadai dan Kelebihan Pembayaran UKT pada PENS Belum Dikembalikan 402
BAB II IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2023 406
DAFTAR SINGKATAN
RENCANA AKSI
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kemendikbudristek Tahun 2023 4
Tabel 2. Rincian Perjanjian Sewa BRI dan BNI 5
Tabel 3. PKS Sewa Kantin pada PENS 6
Tabel 4. PKS Kantin Itjen Tahun 2023 10
Tabel 5. Pemotongan Pajak atas Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Unimal 12
Tabel 6. Pengenaan Pajak atas Pendapatan Jasa Giro pada Empat Satker di Ditjen Diksi ... 13
Tabel 7. Keterlambatan Penyetoran PNBP ke Kas Negara 14
Tabel 8. Rincian Keterlambatan Pembayaran Sewa pada PENS 15
Tabel 9. Rincian Keterlambatan Pembayaran Sewa pada Polimedia 16
Tabel 10. Penggunaan Langsung PNBP pada Satker PNBP 18
Tabel 11. Rincian Kegiatan Kerjasama dengan Pemberian Dana ke UMRAH TA 2023 19
Tabel 12. Rincian Pengembalian UKT Tahun 2023 atas Penerimaan UKT Tahun Sebelumnya 27
Tabel 13. Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ Enam SKS 28
Tabel 14. Kelebihan Pungutan UKT atas Mahasiswa yang Menjalani Cuti 29
Tabel 15. Rincian Satker yang Menyajikan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 31
Tabel 16. Rekening yang Menampung Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 31 Des 2023 ... 32
Tabel 17. Daftar Rekening Pengelolaan Kas Kegiatan Konferensi Ilmiah UHO 38
Tabel 18. Pendapatan Hasil Kerja Sama Penggunaan Laboratorium/Bengkel 39
Tabel 19. Pembagian Pendapatan dari Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel Teknik Kimia .. 39
Tabel 20. Pembagian Pendapatan dari Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel Teknik Elektro 40
Tabel 21. Pembagian Pendapatan dari Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel Teknik Mesin .. 41
Tabel 22. Pembagian Pendapatan dari Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel Teknik Sipil 42
Tabel 23. Rincian Sewa Ruangan PPNS 46
Tabel 24. Keterlambatan Pembayaran Sewa BMN pada Satker BLU 46
Tabel 25. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa BPPP 47
Tabel 26. Rincian Pendapatan Pembuatan Soal 48
Tabel 27. Rincian Jumlah Kantin dan Pendapatan Sewa 49
Tabel 28. Pendapatan dari Penerimaan Biaya Listrik Pemakaian ATM 50
Tabel 29. Tarif Biaya Sewa Asrama Mahasiswa 50
Tabel 30. Penerimaan Sewa Asrama 51

Tabel 31. Pendapatan dari Kebun Wonosalam 51
Tabel 32. Data Aset yang Belum Ditetapkan Nilai Sewa oleh Tim PPU 52
Tabel 33. PKS BMN 53
Tabel 34. Tarif *Driving Golf* Untan 55
Tabel 35. Daftar Biaya Registrasi dan Publikasi Artikel pada Kegiatan Konferensi Ilmiah UHO 56
Tabel 36. Jasa Giro Dikenakan Pajak Penghasilan pada Unmul 61
Tabel 37. Bagi Hasil yang Belum Disetor oleh Pemkab Mojokerto 61
Tabel 38. Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2023 67
Tabel 39. Perhitungan AA Tahun 2023 pada Kemendikbudristek 68
Tabel 40. Selisih Perhitungan Pembayaran Tukin 71
Tabel 41. Pemberian Tukin pada Pegawai Tugas Belajar 72
Tabel 42. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum 73
Tabel 43. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional 74
Tabel 44. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Tugas Belajar yang Menggunakan MAK Fungsional 75
Tabel 45. Pembayaran Tunjangan Fungsional kepada Dosen Yang Melaksanakan Tugas Belajar 76
Tabel 46. Rincian Kekurangan Pembayaran TPG Non PNS Tahun 2023 80
Tabel 47. Rincian Kelebihan Pembayaran TPG Non PNS TA 2023 81
Tabel 48. Rincian Potensi Kelebihan Pembayaran TPG Non PNS atas Guru yang Diangkat menjadi PPPK di Tahun 2023 82
Tabel 49. Keterlambatan Pembayaran TPD Bulan Januari dan Februari 2023 83
Tabel 50. Perbedaan Kebijakan dalam PengelolaanPembayaran TPD oleh LLDikti 84
Tabel 51. Rincian Pembayaran TPD Non PNS kepada Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD di Tahun 2023 85
Tabel 52. Pembayaran TPD kepada Dosen Lulus Sertifikasi Namun Tidak Memenuhi Status BKD 86
Tabel 53. Kelebihan Pembayaran TPD PNS pada Ditjen Diktiristek 87
Tabel 54. Pemotongan PPh Final atas Tunjangan Kinerja 87
Tabel 55. Daftar Belanja Barang Satker yang Tidak Terbayarkan Menggunakan DIPA TA 2023 96
Tabel 56. Rincian Biaya Dukungan Lainnya Tagihan Januari s.d. September 2023 100
Tabel 57. Daftar Belanja Jasa Konsultan Biro Perencanaan Tahun 2023 101
Tabel 58. Rincian Tanggal Transaksi Dokumen Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran 104

Tabel 59. Realisasi SK Kegiatan pada Bagian PLP dan TLK 105
Tabel 60. Kesesuaian antara Tugas Tim dalam SK dengan SOTK 105
Tabel 61. Realisasi SK Kegiatan TLK di Tahun Ke-4 106
Tabel 62. Rincian Anggran SangiRun Night Trail Direktorat PPK..... 106
Tabel 63. Rincian MAK Kegiatan PKN 108
Tabel 64. Revisi DIPA Kegiatan PKN 109
Tabel 65. Rincian Kertas Kerja Satker Belanja Jasa Lainnya PKN..... 110
Tabel 66. Alokasi Anggaran Kegiatan Monev Kegiatan Ditjen Kebudayaan 110
Tabel 67. Daftar Kontrak Kegiatan Monev Kegiatan Ditjen Kebudayaan..... 111
Tabel 68. Perbedaan Waktu Survei Dampak pada HPS/Penawaran dan Durasi SPK..... 112
Tabel 69 Perbedaan Waktu Survei Impact pada HPS/Penawaran dan Durasi SPK 112
Tabel 70. Perbedaan Waktu Survei Kepuasan pada HPS/Penawaran dan Durasi SPK..... 112
Tabel 71. Perbedaan Waktu Survei Layanan pada HPS/Penawaran dan Durasi SPK..... 113
Tabel 72. Rincian Penyedia Belanja Bahan pada BBGP Jatim 114
Tabel 73. Rincian Pengadaan Kelengkapan Peserta Lokakarya dan ATK Pendukung Kegiatan Berindikasi Pemecahan Kontrak..... 114
Tabel 74. Rincian Kontrak Swakelola Tipe III oleh Yayasan ATT..... 116
Tabel 75. Rincian DIPA Pembayaran Swakelola Tipe III oleh Yayasan Artikel Tiga Tiga pada Ditjen GTK..... 116
Tabel 76. Rincian Sembilan Paket Belanja Pemeliharaan..... 120
Tabel 77. Rincian Empat Paket Belanja Pemeliharaan Perawatan Toilet..... 121
Tabel 78. Rincian Item Pekerjaan yang Sama pada Perawatan Toilet Pria dan Wanita..... 122
Tabel 79. Anggaran dan Realisasi Penanganan Pandemi COVID-19 138
Tabel 80. Rincian Pengeluaran Penanganan Pandemik COVID-19 Semester II Tahun 2023 138
Tabel 81. Rincian Anggran SangiRun Night Trail Direktorat PPK..... 140
Tabel 82. Daftar Pengadaan Melebihi Rp50.000.000,00..... 141
Tabel 83. Selisih Pembukuan Bendahara 143
Tabel 84. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Ditjen PDM..... 148
Tabel 85. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Petugas Survei di Jambi dan Jawa Tengah 149
Tabel 86. Sewa Kendaraan Kegiatan Lokakarya Aplikasi e-Monev..... 149
Tabel 87. Kelebihan Pembayaran Biaya Narasumber 151
Tabel 88. Rekapitulasi Biaya Transportasi Menggunakan DPR..... 153
Tabel 89. Hasil Konfirmasi Hotel atas Lima Kegiatan Pusdatin..... 153

Tabel 90. Biaya Transpor Taksi Menggunakan DPR 154
Tabel 91. Pembayaran Transpor Tidak Sesuai Ketentuan 155
Tabel 92. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri 155
Tabel 93. Besaran Biaya Perjadin LN Biro Perencanaan 156
Tabel 94. Kurang Volume Belanja Pemeliharaan 162
Tabel 95. Biaya Operasional Sewa Alat 165
Tabel 96. Pelaksanaan Perjalanan Dinas SKM Oktober s/d Desember 2023 165
Tabel 97. Kelebihan Pembayaran Biaya Personil Pekerjaan Paket Profile Tim GSI 166
Tabel 98. Rincian Kelebihan Pembayaran Sewa Cloud Per Bulan 167
Tabel 99. Daftar Pengembangan Aplikasi dan Kajian E-Planning Tahun 2023 168
Tabel 100. Kelebihan Pembayaran Honorarium 170
Tabel 101. Rincian Uji Petik Pertanggungjawaban atas Kuitansi pada BPK Wilayah XI 172
Tabel 102. Rincian Belanja Barang yang Tidak Dilampiri Bukti Pertanggungjawban Memadai 173
Tabel 103. Kelebihan Pembayaran atas Jasa Event Organizer kegiatan OPSI SMP dan SMA Tingkat Nasional TA 2023 174
Tabel 104. Kelebihan Pembayaran *Sangirun Night Trail* Tahun 2023 179
Tabel 105. Rincian Pembayaran kepada Penyedia Lebih Kecil dari Dokumen Pertanggungjawaban 180
Tabel 106. Kekurangan Pemotongan Pajak 180
Tabel 107. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Kemendikbudristek TA 2023 189
Tabel 108. Pembelian Aset dari Dana Bantuan 190
Tabel 109. Alokasi Perjalanan dan Konsumsi PTS Melebihi Ketentuan 191
Tabel 110. Rincian Kontrak P3TV PTS 193
Tabel 111. Rincian Keterlambatan Pengiriman Barang 194
Tabel 112. Rincian realisasi Dana Banpem pada SMK Purnama 1 Jakarta 194
Tabel 113. Rincian Penggunaan Dana Banpem SMK Negeri 15 Jakarta 195
Tabel 114. Penerima Banpem Tidak Merealisasikan Bantuan yang Diterimanya 195
Tabel 115. Daftar Penerima Bantuan UJK dan PKK atau PKW 196
Tabel 116. Rincian Pembayaran Honor Belum Dipotong Pajak 197
Tabel 117. Rincian Pembayaran Honor Narasumber 198
Tabel 118. Rincian Realisasi Dana Banpem 199
Tabel 119. Penerima Bantuan Tahun 2023 yang Belum Menyampaikan LPJ per 31 Maret 2024 199

Tabel 120. Sekolah Belum Mengupload LPJ 201
Tabel 121. Sekolah Belum Lengkap Melaporkan LPJ 202
Tabel 122. LPJ atas Banpem yang Belum Disampaikan Tahun 2023 pada Direktorat SMK 204
Tabel 123. LPJ atas Banpem yang Belum Disampaikan Tahun 2023 pada Direktorat Suslat 204
Tabel 124. Penerima Dana PKM yang Belum Mengisi *Logbook* Keuangan..... 205
Tabel 125. Penerima Dana P2MD yang Belum Mengisi *Logbook* Keuangan..... 206
Tabel 126. Rincian Pembayaran Transport Narasumber 207
Tabel 127. Rekapitulasi Kelompok Mahasiswa yang Belum Mengunggah Laporan Akhir... 208
Tabel 128. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang Tidak Sesuai Ketentuan 208
Tabel 129. Rekapitulasi Sisa Dana PKM yang Belum Disetorkan..... 209
Tabel 130. Rekapitulasi Sisa Dana Banpem P2MD yang Belum Disetorkan 210
Tabel 131. Penelitian Tahun 2023 dan 2022 yang Belum Memenuhi Kriteria Luaran 212
Tabel 132. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bansos PIP Dikdasmen Tahun 2023 ... 221
Tabel 133. Besaran PIP per Jenjang Pendidikan 222
Tabel 134. Rincian Penyaluran PIP Dikdasmen Per Jenjang Pendidikan Tahun 2023 per 29 Februari 2024..... 222
Tabel 135. Rincian Pengembalian Sisa Dana PIP Dikdasmen 2023 223
Tabel 136. Tenaga Jasa Konsultan Database Administrator PIP..... 223
Tabel 137. Jangka Waktu dan Termin Pekerjaan Tenaga Jasa Konsultan *Database* Administrator PIP Dikdasmen..... 223
Tabel 138. Rekapitulasi Penerima PIP Dikdasmen dengan status “Tidak Diusulkan Menerima PIP” Jenjang SD 224
Tabel 139. Rekapitulasi Penerima PIP Dikdasmen dengan status “Tidak Diusulkan Menerima PIP” Jenjang SMP 225
Tabel 140. Rekapitulasi Penerima PIP Dikdasmen dengan status “Tidak Diusulkan Menerima PIP” Jenjang SMA..... 225
Tabel 141. Rekapitulasi Penerima PIP Dikdasmen dengan status “Tidak Diusulkan Menerima PIP” Jenjang SMK..... 225
Tabel 142. Rekapitulasi Siswa Layak PIP Dikdasmen Belum Menjadi Penerima PIP 225
Tabel 143. Rincian Program Belanja Bansos untuk Bidikmisi/KIPK Tahun 2023..... 230
Tabel 144. Rincian Jumlah Penerima Bansos Bidikmisi/KIPK TA 2023 231
Tabel 145. Nilai Maksimal Bantuan Biaya Pendidikan KIPK Angkatan 2021-2023 Berdasarkan Akreditasi Prodi..... 232
Tabel 146. Rekapitulasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi/KIPK yang Statusnya Tidak Aktif Semester Genap 2022/2023..... 232

Tabel 147. Rekapitulasi Nilai Bantuan Penerima Bidikmisi/KIPK yang Statusnya Tidak Aktif Semester Gasal 2023/2024 232
Tabel 148. Penyampaian Data UKT dari 57 Perguruan Tinggi 233
Tabel 149. Rekapitulasi Nilai Bantuan Penerima dari Prodi Tidak Terakreditasi 234
Tabel 150. Rekapitulasi Kelebihan Nilai UKT Tidak Sesuai Akreditasi 234
Tabel 151. Rekapitulasi Penerima KIPK *on Going* Angkatan 2021 dengan Nilai Anomali .. 235
Tabel 152. Rekapitulasi Data Penerima KIPK *on Going* yang Tidak Terdaftar di Semester Sebelumnya 235
Tabel 153. Rekapitulasi Nilai Bantuan Ganda KIPK dan ADik 236
Tabel 154. Rekapitulasi Potensi Bantuan Ganda Bidikmisi/KIPK dan Beasiswa Pemda 237
Tabel 155. Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan pada 18 Satker 241
Tabel 156. Rincian Denda Keterlambatan pada 11 Satker 243
Tabel 157. Rekapitulasi Kontrak Pekerjaan yang Tidak Mengatur Cara Pengukuran dan Cara Pembayaran Hasil Pekerjaan 248
Tabel 158. Usulan Anggaran BA BUN BPK Wilayah XI 251
Tabel 159. Rincian Rencana dan Realisasi Pengadaan Lahan BPK W XI Jatim 251
Tabel 160. Waktu Pengalihan Hak dan Tanggal Laporan KJPP 252
Tabel 161. LRA Kemendikbudristek Tahun 2023 258
Tabel 162. Rincian Kesalahan Penganggaran dan Penggunaan MAK Belanja Barang Seharusnya Belanja Modal 259
Tabel 163. Rincian Kesalahan Penganggaran dan Penggunaan MAK Belanja Modal Seharusnya Belanja Barang 260
Tabel 164. Rincian Kesalahan Penganggaran dan Penggunaan MAK pada Level Akun Empat Digit 261
Tabel 165. Rincian Penggunaan MAK tidak Konsisten 262
Tabel 166. Rincian Kas pada Kemendikbudristek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 266
Tabel 167. Rincian Penggunaan TUP dan GUP 267
Tabel 168. Nilai Penggunaan TUP dan GUP Menurut Sdr. DA 268
Tabel 169. Pencatatan BKU Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Atdikbud 268
Tabel 170. Daftar Penarikan Uang Bendahara Pengeluaran 270
Tabel 171. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kantor Pusat Atdikbud 271
Tabel 172. Pembayaran Belanja Kantor Pusat yang Dialihkan ke DIPA BKHM 272
Tabel 173. Penihilan Selisih Kas Kantor Pusat Atdikbud Tahun 2023 273
Tabel 174. Belanja Perjadin yang Tidak Dilaksanakan 275

Tabel 175. Perjalanan Dinas yang Tidak Dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran 276
Tabel 176. Mutasi Masuk Dana pada Rekening Unpatti yang Belum Teridentifikasi 279
Tabel 177. Mutasi Masuk Dana Kelolaan pada Rekening Unimed per 31 Desember 2023... 280
Tabel 178. Sisa Dana PPG yang Belum Disalurkan pada Unimed Tahun 2023 282
Tabel 179. Perhitungan Sisa Kas BLU Unima 286
Tabel 180. Saldo Rekening BLU per 31 Desember 2023..... 286
Tabel 181. Rekap Penggunaan Uang Panjar Unima..... 287
Tabel 182. Rincian Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022..... 287
Tabel 183. Rincian Kas pada BLU Unmul per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 .. 288
Tabel 184. Rincian Saldo Dana Kelolaan PPNS yang Belum Diketahui Sumbernya 290
Tabel 185. Perhitungan Saldo Kas pada BLU PPNS pada Neraca per 31 Desember 2023.... 290
Tabel 186. Saldo Kas dan Bank BLU PPNS per 31 Desember 2023 291
Tabel 187. Hasil Penelusuran Selisih Kas BLU PPNS per 31 Des 2023 tanggal 25 Apr 2024 291
Tabel 188. Saldo Investasi Jangka Pendek pada Ditjen Diksi per 31 Desember 2023..... 295
Tabel 189. Rincian Investasi Jangka Pendek yang Tidak Tercatat dalam Neraca..... 296
Tabel 190. BDDM dari Belanja Banpem per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022 299
Tabel 191. Penerima Bantuan yang Belum Menyampaikan LPJ..... 301
Tabel 192. Rincian Banpem yang Belum Diterima LPJnya pada Direktorat SD 302
Tabel 193. Penerima Bantuan yang Belum Menyampaikan LPJ pada Direktorat PAUD..... 302
Tabel 194. Mutasi Kurang Saldo BDDM Direktorat SMK per 31 Desember 2023..... 303
Tabel 195. Rincian Hasil Verifikasi Itjen 304
Tabel 196. Rincian BDDM Periode 2020-2022 305
Tabel 197. Penyetoran Sisa Dana Bantuan Beasiswa PPA ke Kas Negara 307
Tabel 198. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang Bukan Pajak, dan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Neraca per 31 Desember 2023 314
Tabel 199. Rekapitulasi Tunggakan UKT Belum Lunas per 31 Desember 2023..... 315
Tabel 200. Rekapitulasi Tunggakan IPI Belum Lunas per 31 Desember 2023..... 317
Tabel 201. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Unmul per 31 Desember 2023 321
Tabel 202. Piutang Bukan Pajak Polimedia..... 322
Tabel 203. Rincian Pengembalian Dana a.n Dr. AZ..... 324
Tabel 204. Rincian Piutang TGR dan SKTJM yang diterbitkan 325
Tabel 205. Sisa Royalti Belum Dibayarkan atas Penerbitan KBBI Edisi V Cetakan Ketiga . 327
Tabel 206. Rincian Kerjasama Penerbitan KBBI Edisi V Cetakan Ketiga 328

Tabel 207. Rincian Saldo Persediaan per Eselon I per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 336
Tabel 208. Daftar Tiga Sekolah yang Belum Menyampaikan BAST Peralatan TIK 336
Tabel 209. Persediaan yang Tidak dalam Penguasaan Satker pada Direktorat PK 338
Tabel 210. Rincian Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang Belum dapat Diserahkan ke Satker karena Belum Selesai 339
Tabel 211. Rincian Barang TIK yang Diterima dari Program KLIC 342
Tabel 212. Rincian Penerima Hibah 343
Tabel 213. Penyerahan Persediaan kepada Sekolah 343
Tabel 214. Saldo Persediaan Berupa Hibah Sarana dan Prasarana kepada PTNBH 346
Tabel 215. Persediaan Usang dan Rusak pada Setditjen Diksi 347
Tabel 216. Rincian Sisa Belanja Bahan *Kit* Pendukung Seminar pada BBGP 349
Tabel 217. Aplikasi yang Belum Belum Diketahui Nilai Perolehan pada Setditjen Diksi 356
Tabel 218. ATB UMRAH yang Tidak Dilengkapi dengan Penjelasan yang Memadai 358
Tabel 219. Tahapan Usulan Penghapusan BMN yang telah Dihibahkan Tahun 2007 - 2009 359
Tabel 220. Barang yang Belum termasuk ke Dalam Rencana Usulan Penghapusan 360
Tabel 221. Daftar Barang yang Diserahakan ke KKG/MGMP di Tahun 2009 360
Tabel 222. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 363
Tabel 223. Tanah Belum Bersertifikat a.n Kemendikbudristek pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI 364
Tabel 224. Aset Tetap Tanah Polimedia yang Belum Bersertifikat a.n Pemerintah RI c.q Kemendikbudristek 366
Tabel 225. Tanah yang Digunakan PTNBH yang Tidak Didukung Bukti Kepemilikan Berupa Sertifikat 367
Tabel 226. Tanah milik Direktorat SMK yang sedang dalam Permasalahan Hukum 371
Tabel 227. Perkara Hukum Sengketa Tanah Direktorat SMK 371
Tabel 228. Klasifikasi Tanah dalam Penguasaan Pihak Lain pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI 374
Tabel 229. Laptop Tidak Diketahui Keberdaannya pada Biro Perencanaan 376
Tabel 230. Rincian BMN Tidak Dilengkapi label BMN 376
Tabel 231. Perbedaan Luas Tanah antara KIB dengan Bukti Kepemilikan 377
Tabel 232. Rincian Donasi Barang dari PT Esco Bintan Indonesia 378
Tabel 233. Rincian Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Pencatatannya 379
Tabel 234. KIB Kendaraan Tidak Mecantumkan Nomor BPKB atau Nomor Polisi 380
Tabel 235. Pencatatan Kondisi Aset Tetap Tidak Sesuai Kondisi Sesungguhnya 380

Tabel 236. Aset Tetap di Bawah Nilai Minimum Kapitalisasi 381
Tabel 237. Peralatan dan Mesin dengan Nilai Perolehan Rp1,00..... 382
Tabel 238. BAST Aset Tetap GTK ke BPTI 382
Tabel 239. Aset Tetap Salah Kode Barang..... 383
Tabel 240. Selisih Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 384
Tabel 241. Kondisi BMN Rusak Masih Tercatat dalam Aset Tetap 384
Tabel 242. KDP Gedung dan Bangunan yang Tidak Dapat Dilanjutkan Pembangunannya .. 386
Tabel 243. KDP yang Tidak Dapat Dikembangkan ke Aset Definitif..... 386
Tabel 244. Rincian Pekerjaan Sumber Dana SBSN TA 2023 pada USK..... 387
Tabel 245. BMN untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang Dicatat sebagai Aset Tetap ... 389
Tabel 246. Rincian Aset Tetap dan ATB yang Belum/Telah Memiliki SK PSP..... 389
Tabel 247. BMN yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya 389
Tabel 248. Upaya Polines untuk Mendapatkan Pengakuan Aset Tanah..... 391
Tabel 249. Daftar Kendaraan Bermotor Roda Empat yang diterima dari Balai Arkeologi 392
Tabel 250. Daftar Pemanfaatan Aset Untan yang belum memiliki PKS 395
Tabel 251. Daftar Pemanfaatan Aset Untan yang belum memiliki PKS 395
Tabel 252. Daftar Pemanfaatan Aset UPR yang belum memiliki PKS 396
Tabel 253. Dana Pihak Ketiga Belum Dapat Diidentifikasi pada Empat Satker..... 402
Tabel 254. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi per 31 Desember 2023..... 406

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Penyaluaran TPG Non PNS 80
Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Biaya Kuliah 129
Gambar 3. Tampilan Menu *Home* Aplikasi Banpem 200

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1.1	PPh atas Jasa Giro dan Biaya Administrasi
Lampiran A.1.2	Pendapatan Terlambat Setor
Lampiran A.1.3	Rincian Rentang Waktu Penyetoran Pendapatan Sewa ke Kas Negara pada Dit PMPK
Lampiran A.1.4	Rincian Rentang Waktu Penyetoran Pendapatan Sewa ke Kas Negara pada BPMP Provinsi Papua
Lampiran A.1.5	Penerimaan atas Sewa Gedung dan Bangunan di BGP Provinsi Sulawesi Selatan, Jambi, dan NTT
Lampiran A.1.6	Rekap PNBP UKBI 2023
Lampiran A.1.7	Laporan PNBP Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
Lampiran A.2.1	Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ 6 SKS pada Universitas Pendidikan Ganesha
Lampiran A.2.2	Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ 6 SKS pada Universitas Halu Oleo
Lampiran A.2.3	Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ 6 SKS pada Universitas Negeri Makassar
Lampiran A.2.4	Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ 6 SKS Semester Genap Pada Universitas Tanjungpura
Lampiran A.2.5	Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ 6 SKS Semester Ganjil Pada Universitas Tanjungpura
Lampiran A.2.6	Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ 6 SKS Semester Ganjil Pada UPN Veteran Jawa Timur Semester Genap TA. 2022/2023
Lampiran A.2.7	Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ 6 SKS Semester Ganjil Pada UPN Veteran Jawa Timur Semester Gasal TA. 2023/2024
Lampiran A.2.8	Pungutan atas UKT Mahasiswa Cuti pada Universitas Lampung
Lampiran A.2.9	Pungutan atas UKT Mahasiswa Cuti pada Universitas Halu Oleo
Lampiran A.2.10	Pembayaran Biaya Cuti Sebesar 20% UKT pada Politeknik Negeri Batam
Lampiran A.2.11	Pembayaran Biaya Cuti Sebesar 25% pada Politeknik Negeri Media Kreatif
Lampiran A.3.1	Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Konferensi Ilmiah yang Bersumber dari Pungutan Peserta
Lampiran B.1	Pemblokiran Rincian Outout (RO) pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi

Lampiran B.2.1	Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Timur
Lampiran B.2.2	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum
Lampiran B.2.3	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional
Lampiran B.2.4	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Tugas Belajar
Lampiran B.2.5	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional
Lampiran B.2.6.a	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Bagi Fungsional Dosen yang Melaksanakan Tugas Belajar pada UPN Veteran Jawa Timur TA 2023
Lampiran B.2.6.b	Kelebihan Pembayaran Sertifikasi Dosen Bagi Fungsional Dosen yang Melaksanakan Tugas Belajar pada UPN Veteran Jawa Timur TA 2023
Lampiran B.2.7	Rekapitulasi Nilai Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Bagi Dosen yang Melaksanakan Tugas Belajar pada Institut Teknologi Kalimantan TA 2023
Lampiran B.2.8	Potensi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional pada Pegawai Belajar Universitas Maritim Ali Haji TA 2023
Lampiran B.2.9	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional pada Pegawai Belajar Universitas Negeri Medan TA 2023
Lampiran B.2.10	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional pada Pegawai Tugas Belajar Untirta TA 2023
Lampiran B.2.11	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Bagi Fungsional Dosen yang Melaksanakan Tugas Belajar pada Institut Teknologi Sumatera TA 2023
Lampiran B.2.12	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Bagi Fungsional Dosen yang Melaksanakan Tugas Belajar pada UPN Veteran Jakarta TA 2023
Lampiran B.2.13	Rincian Perhitungan Tunjangan Kinerja TA 2023 yang Tidak Sesuai PermenPANRB pada Direktorat Belmawa
Lampiran B.2.14	Rincian Perhitungan Tunjangan Kinerja TA 2023 yang Tidak Sesuai PermenPANRB pada DRTPM
Lampiran B.2.15	Rincian Kelebihan Pembayaran Gaji
Lampiran B.2.16	Rekapitulasi Kekurangan Pembayaran KGB pada UPN Veteran Jawa Timur TA 2023
Lampiran B.2.17	Rincian Kurang dan Lebih Bayar TPG Non-PNS Tahun 2023(Perbandingan Data SKTP dengan Data Pembayaran)
Lampiran B.2.18	Lampiran Potensi Kelebihan Pembayaran TPG Guru Swasta yang Diangkat menjadi PPPK di Tahun 2023 (Realisasi Pembayaran Pusat dan Daerah yang melebihi 12 bulan dalam 1 tahun)
Lampiran B.2.19	Rincian Pembayaran TPD kepada Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD di Tahun 2023

Lampiran B.2.20	Rincian Pembayaran TPD Januari dan Februari 2023 kepada Dosen Lulus Sertifikasi Tahun 2022 Namun Tidak Memenuhi Status BKD Semester Genap 2021-2022
Lampiran B.2.21	Dosen dengan status “tidak memenuhi” namun masih dibayarkan TPD PNS
Lampiran B.2.22	Dosen dengan status “tidak memenuhi” namun masih dibayarkan TPD PNS
Lampiran B.2.23	Data Status Pegawai Itjen (kawin dan jumlah anak yang tanggung negara
Lampiran B.2.24	Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 21 pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Lampiran B.2.25	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Badan Bahasa Aceh
Lampiran B.2.26	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Badan Bahasa Babel
Lampiran B.2.27	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Badan Bahasa Banten
Lampiran B.2.28	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Badan Bahasa DIY
Lampiran B.2.29	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Pusbanglin
Lampiran B.2.30	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Pusbin
Lampiran B.2.31	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Sekretariat Badan
Lampiran B.2.32	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Balai Bahasa Provinsi Riau
Lampiran B.2.33	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran B.2.34	Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran B.3.1	Rincian Belanja Barang BGP Sumbar yang Belum Dapat Terbayarkan menggunakan DIPA 2023
Lampiran B.3.2	Rincian Kekurangan Pembayaran Transpor (MAK 524119) Kegiatan *Capacity Building* BGP Banten
Lampiran B.3.3	Rincian Belanja Barang BGP Maluku Utara yang Belum Dapat Terbayarkan Menggunakan DIPA 2023
Lampiran B.3.4	Daftar Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BGP Maluku Bulan Desember 2023 yang Baru Terbit di Januari 2024
Lampiran B.5.1	Rincian selisih dokumen pertanggungjawaban TUP pada BPTI
Lampiran B.6.1	Rincian Kelebihan Pembayaran Uang Penginapan pada Ditjen PDM
Lampiran B.6.2	Rincian Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Ditjen PDM
Lampiran B.6.3	Rincian Kelebihan Pembayaran Uang Transportasi Perjalanan Dinas pada Ditjen PDM
Lampiran B.6.4	Daftar Pegawai yang tidak ada dokumen SPJ
Lampiran B.6.5	Rincian Perjalanan Dinas Dalam Kantor BPTI

Lampiran B.6.6	Rincian Pertanggungjawaban kegiatan Penyusunan Laporan Bidang Seni Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Bidang Olah Raga Tahun 2023
Lampiran B.6.7	Daftar Pengeluaran Riil (DPR) yang bersifat lumpsum tanpa disertai bukti pertanggungjawaban atas kegiatan BOS Kinerja
Lampiran B.6.8	Kegiatan Paket Meeting Tanpa Melibatkan Peserta Kementerian Negara/Lembaga Lainnya
Lampiran B.6.9	Biaya Transpor Taksi yang Masih Menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (DPR)
Lampiran B.6.10	Transpor Daerah Diperhitungkan Tarif Sewa Kendaraan
Lampiran B.6.11	Kelebihan Pembayaran Transpor Narasumber, Pengajar, dan Moderator pada Politeknik Negeri Jakarta
Lampiran B.6.12	Rincian Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Ditjen PDM
Lampiran B.6.13	Rekapitulasi Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan
Lampiran B.7.1	Kekurangan Volume pada Belanja Pemeliharaan di Setjen
Lampiran B.7.2	Kekurangan Volume Belanja Pemeliharaan pada Ditjen PDM
Lampiran B.7.3	Kurang Volume Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Ditjen Kebudayaan
Lampiran B.7.4	Selisih nilai yang dibayarkan dengan bukti pertanggungjawaban belanja BBM Bulan Agustus s.d. November 2023
Lampiran B.7.5	Selisih nilai yang dibayarkan Bendahara dengan nilai yang dibayarkan pengelola BBM Bulan Januari s.d. November 2023
Lampiran B.7.6.a	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Januari 2023
Lampiran B.7.6.b	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Februari 2023
Lampiran B.7.6.c	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Maret 2023
Lampiran B.7.6.d	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan April 2023
Lampiran B.7.6.e	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Mei 2023
Lampiran B.7.6.f	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Juni 2023
Lampiran B.7.6.g	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Juli 2023
Lampiran B.7.6.h	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Agustus 2023
Lampiran B.7.6.i	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan September 2023
Lampiran B.7.6.j	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Oktober 2023
Lampiran B.7.6.k	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan November 2023
Lampiran B.7.6.l	Hasil Perhitungan Bersama Public Cloud Bulan Desember 2023
Lampiran B.7.7	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Biro Perencanaan

Lampiran B.7.8	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Pusdatin
Lampiran B.7.9	Rekapitulasi Pembayaran Honor Panitia Pengadaan TA 2023 di BPTI
Lampiran B.7.10	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Itjen
Lampiran B.7.11	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Ditjen Dikti Ristek
Lampiran B.7.12	Kelebihan Pembayaran Kegiatan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Jenjang SMA/MA dan SMP/MTS Tahun 2023
Lampiran B.7.13	Rincian Kelebihan Pembayaran Jasa Profesi Kegiatan Pelaksanaan OPSI SMP dan SMA TA 2023
Lampiran B.7.14	Harga Negosiasi Sewa Kendaraan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Jenjang SMA/MA & SMP/MTs
Lampiran B.7.15	Kekurangan Pemotongan Pajak pada Setjen
Lampiran B.7.16	Paket Kegiatan Meeting yang belum dipotong PPh 23 Pada Inspektorat Jenderal Tahun 2023
Lampiran B.7.17	Kekurangan Pemotongan Pajak pada Ditjen PDM
Lampiran B.7.18	Kekurangan Pemotongan Pajak pada Badan Bahasa
Lampiran B.7.19	Kekurangan Pemotongan Pajak pada Ditjen GTK
Lampiran B.7.20	Kekurangan Pemotongan Pajak pada Ditjen Diktiristek
Lampiran B.7.21	Rincian Kurang Potong PPh 23 atas Pekerjaan Paket Meeting Fullboard/Fullday/Halfday Tahun 2023 Ditjen Vokasi
Lampiran B.8.1	Rincian Pengadaan Belanja MF Dengan MAK 521211 Pada PNJ
Lampiran B.8.2	Sisa Denda Keterlambatan Pengadaan Barang P3TV PTS
Lampiran B.8.3	Kekurangan Volume Pekerjaan pada SMK Purnama 1 Jakarta
Lampiran B.8.4	Kekurangan Volume Pekerjaan pada SMK Negeri 15 Jakarta
Lampiran B.8.5	Daftar Narasumber Penerima Honorarium
Lampiran B.8.6	Penerima Banpem BPP Bahasa Belum Menyampaikan LPJ
Lampiran B.8.7	Bukti Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan pada BPP Bahasa belum sesuai ketentuan
Lampiran B.8.8	Rincian Saldo BDDM per 31 Maret 2024 pada Direktorat SMK
Lampiran B.8.9	Rincian Saldo BDDM per 31 Maret 2024 pada Direktorat Suslat
Lampiran B.8.10	Penerima Bantuan PKM Vokasi Tahun 2023 yang Belum Mengisi Logbook Keuangan
Lampiran B.8.11	Penerima Bantuan Pemerintah P2MD yang Belum Mengisi Logbook per 31 Desember 2023
Lampiran B.8.12	Biaya Pengabdian yang Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban pada Universitas Yarsi

Lampiran B.8.13	Biaya Pengabdian yang Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Lampiran B.8.14	Biaya Pengabdian yang Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Lampiran B.8.15	Sisa Dana PKM yang Belum Disetorkan Tahun 2023
Lampiran B.8.16	Sisa Dana Bantuan Pemerintah P2MD yang Belum Disetorkan ke Kas Negara
Lampiran B.8.17	Rekapitulasi Sisa Dana Progmra UMKM pada Setditjen Diktiristek
Lampiran B.8.18	Rekapitulasi PTS peserta program UMKM yang lengkp bukti pendukung output kegiatan
Lampiran B.8.19	Rincian Belanja Penelitian TA 2023 Yang Belum Memenuhi Kriteria Luaran
Lampiran B.8.20	Rincian Belanja Penelitian TA 2022 Yang Belum Memenuhi Kriteria Luaran
Lampiran B.8.21	Rincian Belanja Pengabdian Kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022 Yang Belum Memenuhi Kriteria Luaran
Lampiran B.8.22	Rincian Belanja Kosabangsa TA 2023 dan 2022 Yang Belum Memenuhi Kriteria Luaran
Lampiran B.8.23	Rincian Belanja Prototipe TA 2023 dan 2022 Yang Belum Memenuhi Kriteria Luaran
Lampiran B.8.24	Daftar LPJ yang tidak sesuai ketentuan Juknis
Lampiran B.9.1	Penerima PIP Tidak Layak Jenjang SD
Lampiran B.9.2	Penerima PIP Tidak Layak Jenjang SMP
Lampiran B.9.3	Penerima PIP Tidak Layak Jenjang SMA
Lampiran B.9.4	Penerima PIP Tidak Layak Jenjang SMK
Lampiran B.9.5	Daftar Penerima PIP Terlambat Salur Dana Jenjang SD dan Daftar Penerima PIP Terlambat Salur Dana Jenjang SMP
Lampiran B.10.1	Rincian Pengembalian Belanja KIPK atas Realisasi Tahun Anggaran 2023
Lampiran B.10.2	Rincian Penerima Bidikmisi on going Semester Genap 2022/2023 dengan Status Akademik Tidak Aktif
Lampiran B.10.3	Rincian Penerima KIPK PTN on going Semester Genap 2022/2023 dengan Status Akademik Tidak Aktif
Lampiran B.10.4	Rincian Penerima KIPK PTS on going Semester Genap 2022/2023 dengan Status Akademik Tidak Aktif
Lampiran B.10.5	Rincian Penerima Bidikmisi on going Semester Gasal 2023/2024 dengan Status Akademik Tidak Aktif
Lampiran B.10.6	Rincian Penerima KIPK on going PTN Semester Gasal 2023/2024 dengan Status Akademik Tidak Aktif

Lampiran B.10.7	Rincian Penerima KIPK on going PTS Semester Gasal 2023/2024 dengan Status Akademik Tidak Aktif
Lampiran B.10.8	Rincian Penerima KIPK Baru Semester Gasal 2023/2024 dengan Status Akademik Tidak Aktif
Lampiran B.10.9	Rincian Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Semester Gasal 2023/2024 dengan Status Akademik Tidak Aktif
Lampiran B.10.10	Perguruan Tinggi Yang Tidak Menetapkan Biaya UKT di Sistem KIPK
Lampiran B.10.11	Perguruan Tinggi Yang Lebih Menetapkan Biaya UKT dari KIPK
Lampiran B.10.12	Perguruan Tinggi Yang Salah Input Biaya UKT di Sistem KIPK
Lampiran B.10.13	Rincian Penerima Bantuan KIPK Baru Prodi Tidak Terakreditasi
Lampiran B.10.14	Rekap Penerima Bantuan KIPK Baru Prodi Tidak Terakreditasi
Lampiran B.10.15	Rincian Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Prodi Tidak Terakreditasi
Lampiran B.10.16	Rekap Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Prodi Tidak Terakreditasi
Lampiran B.10.17	Kelebihan Nilai UKT Tidak Sesuai Akreditasi untuk PT dengan Akreditasi B
Lampiran B.10.18	Kelebihan Nilai UKT Tidak Sesuai Akreditasi untuk PT dengan Akreditasi C
Lampiran B.10.19	Rincian Penerima KIPK on Going Angkatan 2021 dengan nilai anomali
Lampiran B.10.20	Rincian Penerima KIPK on Going yang Baru (PTN)
Lampiran B.10.21	Rincian Penerima KIPK on Going yang Baru (PTS)
Lampiran B.10.22	Rincian Bantuan Ganda KIPK dan Adik pada Penerima KIPK On Going
Lampiran B.10.23	Rincian Bantuan Ganda KIPK dan Adik pada Penerima KIPK New
Lampiran B.10.24	Rincian Penerima Bidikmisi on going Semester Genap 2022/2023 yang Juga Menerima Beasiswa Lain
Lampiran B.10.25	Rincian Penerima Bidikmisi on going Semester Gasal 2023/2024 yang Juga Menerima Beasiswa Lain
Lampiran B.10.26	Rincian Penerima KIPK on going PTN Semester Genap 2022/2023 yang Juga Menerima Beasiswa Lain
Lampiran B.10.27	Rincian Penerima KIPK on going PTN Semester Gasal 2023/2024 yang Juga Menerima Beasiswa Lain
Lampiran B.10.28	Rincian Penerima KIPK on going PTS Semester Genap 2022/2023 yang Juga Menerima Beasiswa Lain
Lampiran B.10.29	Rincian Penerima KIPK on going PTS Semester Gasal 2023/2024 yang Juga Menerima Beasiswa Lain
Lampiran B.10.30	Rincian Penerima KIPK Baru Semester Gasal 2023/2024 yang Juga Menerima Beasiswa Lain

Lampiran B.10.31	Rincian Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Semester Gasal 2023/2024 yang Juga Menerima Beasiswa Lain
Lampiran B.11.1	Perhitungan Kurang Volume Pekerjaan Perbaikan/Renovasi Auditorium Lantai 2 Ditjen Diktiristek
Lampiran B.11.2	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung STP UI
Lampiran B.11.3	Perhitungan Kurang Volume Renovasi Ruang Kerja Pegawai pada Direktorat Belmawa
Lampiran B.11.4	Kekurangan Vol Interior Ruang Rapat, Ruang Keuangan dan Plafon Ruang Kerja
Lampiran B.11.5	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Teknik Mesin Fakultas Teknik
Lampiran B.11.6	Kekurangan Volume Pembangunan Gedung Research Center UPN Veteran Jawa Timur
Lampiran B.11.7	Kekurangan Volume Pekerjaan Perbaikan Saluran FT - BAKPK
Lampiran B.11.8	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir UPN Veteran Jakarta
Lampiran B.11.9	Analisis atas Perhitungan Kurang Volume Jalan Penghubung Gedung Satu Gurindam
Lampiran B.11.10	Kurang Vol Pek Pusat Pengembangan Karakter Mahasiswa Umrah
Lampiran B.11.11	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah PPG UHO
Lampiran B.11.12	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gudang Barang Milik Negara UHO
Lampiran B.11.13	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pagar Depan UHO Lanjutan Tahun 2023
Lampiran B.11.14	Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Gedung D5 Fakultas Pertanian
Lampiran B.11.15	Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Gedung Kuliah Lingkup FEB
Lampiran B.11.16	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Teknik Mesin Kampus 2 PNUP
Lampiran B.11.17	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Fasad Gedung Direktorat dalam Rangka Prasarana Pendukung Pembelajaran PNJ TA 2023
Lampiran B.11.18	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Tugu Ikonik Monumen dalam Rangka Pembangunan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) TA 2023
Lampiran B.11.19	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Gedung Akuntansi dalam Rangka Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran PNJ TA 2023

Lampiran B.11.20	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pek Gd Smart Automation Workshop
Lampiran B.11.21	Kekuerangan Volume pada Pekerjaan Rehap Ruang Teknisi
Lampiran B.11.22	Kekurangan Volume Pekerjaan Rehap Pintu Masuk Gedung Asrama Nusantara
Lampiran B.11.23	Kekurangan Volume Pekerjaan Rehap Lantai Kantin Paramitha
Lampiran B.11.24	Kekurangan Volume Penataan Ruang Kerja Lantai 14 Sayap Kiri Gedung C
Lampiran B.11.25	Penataan Ruang Kerja Lantai 14 Sayap Kanan Gedung C dan Kekurangan Volume Renovasi Gedung dan Bangunan Fasad LL Dikti Wilayah Bandung
Lampiran B.11.26	Kelebihan Pembayaran atas Renovasi Gedung Bernoulli BBGP DIY
Lampiran B.11.27	Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Karyawan BBGP Jateng dan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Karyawan BBGP Banten
Lampiran B.11.28	Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor BBMP Prov Kaltim
Lampiran B.11.29	Perhitungan Selisih Volume Penyelesaian Pembangunan Gedung C dan *Entrance Museum* Nasional 2023
Lampiran B.11.30	Denda Keterlambatan Belum Dipungut
Lampiran B.11.31	Pekerjaan Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis
Lampiran B.11.32	Kekurangan volume Paket The Development and Upgrading of State university of Jakarta (Phase-2) Civil Works
Lampiran B.11.33	Rincian Permasalahan Kontrak Tidak Mengatur Cara Pengukuran dan Cara Pembayaran Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Teknik Mesin Kampus 2 PNUP
Lampiran B.11.34	Rincian Permasalahan Kontrak Tidak Mengatur Cara Pengukuran dan Cara Pembayaran Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasad Gedung Direktorat dalam Rangka Prasarana Pendukung Pembelajaran PNJ TA 2023
Lampiran B.11.35	Rincian Permasalahan Kontrak Tidak Mengatur Cara Pengukuran dan Cara Pembayaran Hasil Pekerjaan Pembangunan Tugu Ikonik Monumen dalam Rangka Pembangunan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran PNJ TA 2023
Lampiran B.12.1	Konten Non - Liputan pada Balai Media Kebudayaan Tahun 2023
Lampiran B.12.2	Rincian Ketidaksesuaian Akun VS Kode Barang Aset Tetap
Lampiran B.12.3	Rincian Penganggaran atas belanja menggunakan MAK 53 yang seharusnya menggunakan MAK 521252 Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptable
Lampiran B.12.4	Rincian Ketidaksesuaian Akun Versus Kode Barang Persediaan

Lampiran C.1.1	Rekapitulasi Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Atdikbud Tahun 2023
Lampiran C.1.2	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
Lampiran C.3.1	Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek dalam Neraca per 31 Desember 2023
Lampiran C.3.2	Rincian Deposito yang Tidak Tercatat dalam saldo Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2023
Lampiran C.4.1	Rincian LPJ Banpem belum selesai pada Direktorat PAUD Tahun 2016-2022
Lampiran C.4.2	Laporan Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Direktorat Sumber Daya - Ditjen Dikti TA.2021 4470 BEJ-Bantuan Pendidikan Tinggi Tahun 2021 dan TA.2021 4470 PEF-Sosialisasi Dan Diseminasi Tahun 2021
Lampiran C.4.3	Rincian LPJ yang Belum Dapat Diyakini Berdasarkan Hasil Verifikasi Itjen Kemendikbudristek
Lampiran C.5.1	Rekapitulasi Tunggakan UKT Belum Lunas per 31 Desember 2023 pada Universitas Negeri Jakarta
Lampiran C.5.2	Rekapitulasi Tunggakan UKT Belum Lunas per 31 Desember 2023 pada Universitas Singaperbangsa Karawang
Lampiran C.5.3	Rekapitulasi Tunggakan UKT Belum Lunas per 31 Desember 2023 pada Universitas Halu Oleo
Lampiran C.5.4	Daftar Penerima Keringanan Pembayaran UKT Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 (Pembayaran Cicilan) pada Universitas Maritim Raja Ali Haji
Lampiran C.5.5	Rekapitulasi Tunggakan IPI Belum Lunas per 31 Desember 2023 pada Unsika
Lampiran C.5.6	Rekapitulasi Tunggakan IPI Belum Lunas per 31 Desember 2023 pada UNJ
Lampiran C.5.7	Rekapitulasi Tunggakan IPI Belum Lunas per 31 Desember 2023 pada UPNV Jakarta
Lampiran C.5.8	Rincian Piutang Tagihan TP/ TGR yang Tidak Ada SKTJM pada BPMP Provinsi Papua
Lampiran C.5.9	Rincian TP/TGR yang belum diakui memiliki SKTJM
Lampiran C.5.10	Rincian Pelunasan TP/TGR yang Belum Dibuatkan SKTL
Lampiran C.6.1	Rekap Persediaan pada Direktorat Sumber Daya untuk Dihibahkan ke PTNBH
Lampiran C.6.2	Rincian Persediaan Peralatan dan Mesin yang Telah Diserahterimakan kepada PTS dan Pihak Perguruan Tinggi di Lingkungan Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi namun Masih Tercatat Pada Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (Dit.APTV) Ditjen Pendidikan Vokasi

Lampiran C.6.3.a	Rincian Persediaan Peralatan dan Mesin yang Telah Diserahterimakan kepada Pihak Perguruan Tinggi di Lingkungan Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi serta PTS Tahun 2022 namun Masih Tercatat pada Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (Dit.KLSD PTV) Ditjen Pendidikan Tinggi Vokasi
Lampiran C.6.3.b	Rincian Persediaan Peralatan dan Mesin yang Telah Diserahterimakan kepada Pihak Perguruan Tinggi di Lingkungan Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi serta PTS Tahun 2023 namun Masih Tercatat pada Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (Dit.KLSD PTV) Ditjen Pendidikan Tinggi Vokasi
Lampiran C.6.4	Persediaan Obat pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya per 31 Desember 2023
Lampiran C.6.5	Rincian Barang Hibah berdasarkan Implementing Arrangement (IA) beserta Amandemennya
Lampiran C.6.6	Rincian Barang Hibah TIK BKHM Yang Dibagikan Ke Satuan Pendidikan
Lampiran C.6.7	Selisih Persediaan Berdasarkan Catatan dengan Jumlah Fisik
Lampiran C.6.8	Persediaan yang memiliki nama yang sama
Lampiran C.6.9	Laporan Rincian Barang Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31-12-2023 Tahun Anggaran : 2023
Lampiran C.6.10	Hasil Pemeriksaan Fisik Persediaan (Selisih Lebih/Kurang)
Lampiran C.6.11	Rekap Sisa Barang atas Pelaksanaan Kegiatan Program PGP Tahun 2023
Lampiran C.7.1	Rincian Pengembangan Sistem Informasi Akademik dari Tahun 2017 yang Belum Dicatat Sebagai Aset Tak Berwujud
Lampiran C.7.2	Rincian Kekayaan Intelektual yang Belum Dicatat Sebagai Aset Tak Berwujud pada PENS
Lampiran C.7.3	Rincian Kekayaan Intelektual yang Belum Dicatat Sebagai Aset Tak Berwujud pada PPNS
Lampiran C.7.4	Rincian Kekayaan Intelektual yang Belum Dicatat Sebagai Aset Tak Berwujud pada Politeknik Negeri Media Kreatif
Lampiran C.7.5	ATB Tidak Diketahui Merk dan Nama Pengguna pada UPN Veteran Jawa Timur TA 2023
Lampiran C.7.6	Daftar Aset Lain-Lain Dalam Kondisi Rusak Berat Pada UPN Veteran Jawa Timur TA 2023
Lampiran C.8.1	Rincian Tanah Belum Disertifikat atas nama Kemendikbudristek Pada Satker BPK wilayah XI
Lampiran C.8.2	Rincian Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kemendikbudristek pada Politeknik Negeri Ujung Pandang
Lampiran C.8.3	Rincian Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kemendikbudristek pada Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran C.8.4	Penanganan Perkara Aset Tanah dan Gedung Bangunan Flat/Mess Sriwijaya Direktorat SMK
Lampiran C.8.5.a	Rincian Tanah Belum Disertifikat Atas Nama Kemendikbudristek Pada Satker BPK Wilayah XI
Lampiran C.8.5.b	Daftar Tanah UNPAD yang dikuasai oleh masyarakat
Lampiran C.8.6.a	23 Unit Laptop Biro Perencanaan yang Tidak Ditemukan
Lampiran C.8.6.b	Daftar Aset Tetap Setjen yang Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran C.8.6.c	Daftar Aset Tetap Dirjen PDM yang Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran C.8.7.a	Daftar BMN yang belum diberi Label
Lampiran C.8.7.b	Daftar Aset Tetap Ditjen PDM Tanpa Nomor Inventaris
Lampiran C.8.7.c	Rincian Peralatan dan Mesin yang Belum Dilengkapi Label Inventarisasi BMN pada Politeknik Negeri Ujung Pandang
Lampiran C.8.7.d	Rincian Peralatan dan Mesin yang Belum Dilengkapi Label Inventarisasi BMN pada Politeknik Negeri Jakarta
Lampiran C.8.7.e	Rincian Peralatan dan Mesin yang Belum Dilengkapi Label Inventarisasi BMN pada Setditjen Diksi
Lampiran C.8.8.a	Daftar Kendaraan pada Satker Sekretariat Jenderal Tercatat Tanpa Nomor Polisi
Lampiran C.8.8.b	Daftar Kendaraan pada Satker Sekretariat Jenderal Tercatat Tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin
Lampiran C.8.9.a	Daftar Kondisi Aset Tetap Ditjen PDM Tidak Senyatanya
Lampiran C.8.9.b	Daftar Peralatan dan Mesin Rusak Berat Belum Dimutakhirkan Kondisinya TA 2023
Lampiran C.8.9.c	Daftar Aset tetap BBGMP Jawa Tengah dengan Kondisi Fisik Rusak Berat
Lampiran C.8.10.a	Daftar Peralatan dan Mesin Ditjen PDM Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi
Lampiran C.8.10.b	Daftar Gedung dan Bangunan Ditjen PDM Dibawah Batas Nilai Kapitalisasi
Lampiran C.8.10.c	Peralatan dan Mesin (Barang Intrakomptabel) yang Nilainya Dibawah Rp1.000.000,00
Lampiran C.8.10.d	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan Nilai Di Bawah Nilai Minimum Kapitalisasi
Lampiran C.8.10.e	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan Nilai Di Bawah Nilai Minimum Kapitalisasi
Lampiran C.8.11	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bernilai Rp1,00
Lampiran C.8.12	Kesalahan Penggunaan Kode Barang Persediaan untuk Barang yang Memiliki Karakteristik Aset Tetap

Lampiran C.8.13	Kesalahan Penggunaan MAK Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan dan Salah Penggunaan Kode Barang yang Memiliki Karakteristik Persediaan
Lampiran C.8.14.a	Daftar Aset Rusak Berat yang Masih Tercatat Sebagai Aset Tetap Dalam Neraca pada Sekretariat Jenderal
Lampiran C.8.14.b	Daftar Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat Pada Ditjen PDM
Lampiran C.8.14.c	Tabel Aset Kondisi Rusak Berat masih tercatat di Neraca pada Ditjen GTK
Lampiran C.8.14.d	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan Kondisi Rusak Berat
Lampiran C.8.14.e	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan Kondisi Rusak Berat
Lampiran C.8.15	KDP Potensi Mangkrak/Tidak ada Keberlanjutan Tahun Berikutnya
Lampiran C.8.16.a	Aset Tetap Tanah yang belum memiliki SK PSP per 31 Desember 2023
Lampiran C.8.16.b	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum memiliki SK PSP per 31 Desember 2023
Lampiran C.8.16.c	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum memiliki SK PSP per 31 Desember 2023
Lampiran C.8.16.d	Aset Tetap Jaringan Irigasi dan Jalan yang belum memiliki SK PSP per 31 Desember 2023
Lampiran C.8.16.e	Rincian Aset Tetap KIB E yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya pada Badan Bahasa
Lampiran C.8.16.f	Rincian Aset Tetap KIB F yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya pada Badan Bahasa
Lampiran C.8.17.a	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin BMN yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lampiran C.8.17.b	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lampiran C.8.17.c	Rincian Aset Tetap Lainnya yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lampiran C.8.18.a	Rincian Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Yang Belum Dilakukan Penetapan Status Pengguna Pada PPNS
Lampiran C.8.18.b	Rincian Aset Tak Berwujud yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Lampiran C.8.19.a	Rincian Aset Tetap Tanah yang Belum Dilakukan Penetapan Status Pengguna pada Politeknik Negeri Media Kreatif
Lampiran C.8.19.b	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Negeri Media Kreatif
Lampiran C.8.19.c	Rincian Aset Tetap Lainnya yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Negeri Media Kreatif

Lampiran C.8.20.a	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Negeri Pontianak
Lampiran C.8.20.b	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Belum Dilakukan Penetapan Status Pengguna pada Politeknik Negeri Pontianak
Lampiran C.8.21	Rincian BMN yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Negeri Jakarta
Lampiran C.8.22	Rincian BMN yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Negeri Ujung Pandang
Lampiran C.8.23	Rincian BMN yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada Politeknik Negeri Banyuwangi
Lampiran C.8.24	Rincian BMN yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan pada BPPMPV KPTK
Lampiran C.8.25	Rincian BMN yang Belum Dilakukan Penetapan Status Penggunaan Pada BBPPMPV BMTI
Lampiran C.8.26	Data Jumlah Asrama Mahasiswa Kabupaten/Kota di Lahan Kampus Universitas Palangka Raya Per 31 Desember 2023
Lampiran C.8.27	Daftar Pemakaian Kaveling Tanah Areal Kampus Upryang Berdomisili Di Jalan B. Koetin
Lampiran C.8.28	Rekapitulasi Nama Pihak Ketiga Pengguna Tanah/Lahan Berupa Kantin Di Lingkungan Universitas Palangka Raya Per 31 Desember 2023
Lampiran C.8.29	Rekapitulasi Nama Pihak Ketiga Pengguna Tanah/Lahan Berupa Taman Di Lingkungan Universitas Palangka Raya Per 31 Desember 2023
Lampiran C.8.30	Penggunaan Kamar di Polimedia Hotel Tahun 2023
Lampiran D	Pembayaran UKT Mandiri yang Belum Dikembalikan Kepada Mahasiswa

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 7.a/LHP/XIX/05/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

a. Kemendikbudristek belum menetapkan kebijakan penggunaan anggaran *Mandatory Spending* bidang pendidikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 sehingga pelaksanaan *Automatic Adjustment* anggaran pendidikan Tahun 2023 tidak memiliki kriteria yang jelas;

b. Pengelolaan Kas pada Setjen dan Ditjen Diktiristek tidak sesuai ketentuan penatausahaan kas;

c. Pengelolaan Persediaan Kemendikbudristek belum memadai;

d. Pengelolaan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga hak dan kewajiban Pemerintah kepada PTNBH belum dapat disajikan secara tepat; dan

e. Monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban atas kegiatan pada Akun Belanja Dibayar di Muka (BDDM) dari Belanja Bantuan Pemerintah (Banpem) belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) antara lain agar:

a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun dan menetapkan aturan turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2022 terkait mekanisme usulan dan kriteria penggunaan anggaran pendidikan melalui Peraturan Mendikbudristek;

b. Menginstruksikan:

   1) Sekretaris Jenderal (Sekjen) supaya memerintahkan Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) meminta pertanggungjawaban dari Bendahara yang bersangkutan dan memproses Tuntutan Perbendaharaan dan melaporkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK;

   2) Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor PTN untuk Menetapkan mekanisme yang terintegrasi antara petugas pengelola dana kelolaan dengan unit kerja yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas hak dan kewajiban dana yang dikelola;

   3) Inspektur Jenderal (Irjen) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.917.828.672,00 pada Kantor Pusat Atdikbud;

c. Menginstruksikan:

   a. Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan supaya memerintahkan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Kebudayaan untuk melakukan reviu keberlanjutan pekerjaan yang bersifat perencanaan seperti *masterplan* dan *Detail Engineering Design* (DED) pada tiga objek cagar budaya yang akan diserahkan kepada pemda setempat senilai Rp2.085.010.650,00;

   b. Dirjen Diktiristek memerintahkan KPA masing-masing Eselon II supaya:

      1) melakukan inventarisasi atas persediaan yang diserahkan kepada PTNBH dan tidak lagi dalam penguasaan Kemdikbudristek serta melaporkan hasilnya ke BPK;

      2) segera mengajukan proses Berita Acara Serah Terima (BAST) dan persetujuan hibah kepada PTNBH secara berjenjang ke Presiden melalui Kemendikbudristek selaku Pengguna Barang dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;

      3) Menyusun laporan monitoring atas:

         (1) Rincian nilai dan kondisi persediaan berupa Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai oleh PTNBH;

         (2) Proses pengajuan persetujuan hibah yang belum selesai dilaksanakan oleh PTNBH penerima;

d. Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan serta melibatkan PTNBH untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi pengelolaan BPPTNBH dengan peraturan terkait, dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, serta memerintahkan Dirjen Dikti untuk melakukan rekonsiliasi data penyaluran dana APBN ke PTNBH dengan unit utama terkait lainnya sebagai dasar pengajuan usulan BPPTNBH; dan

e. Menyusun kebijakan yang mengatur pencatatan BDDM dari Belanja Banpem terutama Banpem penelitian serta menginstruksikan Irjen melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas Banpem Tahun 2016 s.d 2022 yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp41.324.266.746,00.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan terperinci dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

Laode Nusriadi
Register Negara Akuntan Nomor 8888

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 mengungkapkan permasalahan terkait dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 24 temuan pemeriksaan, dengan perincian sebagai berikut.

A. Pendapatan

1. Pengelolaan Pendapatan pada Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Kemendikbudristek merealisasikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 (*audited*) senilai Rp11.868.375.576.289,00 atau 126,30% dari estimasi senilai Rp9.397.245.197.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kemendikbudristek Tahun 2023

Kode	Eselon I	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
02301	Sekretariat Jenderal (Setjen)	8.169.396.000	288.957.555.967	3.537,07
02302	Inspektorat Jenderal (Itjen)	156.000.000	251.742.767	161,37
02303	Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD, Dikdas dan Dikmen (PDM)	4.596.257.000	11.615.553.918	252,72
02311	Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP)	127.385.200.000	174.191.799.568	136,74
02313	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa)	185.750.000	4.085.276.071	2.199,34
02315	Ditjen Kebudayaan	94.913.063.000	18.065.083.332	19,03
02316	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	3.122.967.000	22.731.777.621	727,89
02317	Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek)	7.724.858.883.000	9.803.406.062.642	126,91
02318	Ditjen Pendidikan Vokasi (Diksi)	1.433.857.681.000	1.545.070.724.403	107,76
Jumlah		**9.397.245.197.000**	**11.868.375.576.289**	**126,30**

Hasil pemeriksaan atas PNBP menunjukkan permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

a. PNBP dipungut tidak sesuai ketentuan

1) Perjanjian/tarif pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) tidak didukung penetapan/persetujuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

a) Setditjen Diksi

PNBP Setditjen Diksi Tahun 2023 diantaranya merupakan penerimaan dari aset berupa gedung dan lapangan olahraga di komplek Gedung Handayani.

Pada bulan November 2023, Gedung Handayani disewakan untuk umum dan menerima pendapatan sewa senilai Rp7.520.000,00. Penyewaan Gedung Handayani di atas menggunakan tarif sesuai usulan nilai sewa pada surat usulan tarif sewa BMN ke KPKNL. KPKNL telah menyetujui pemanfaatan sewa Gedung Handayani sesuai surat Nomor S-331/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang salinannya baru diperoleh Setditjen Diksi pada tanggal 8 Maret 2024.

b) Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia)

(1) Ruang kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Polimedia menyewakan ruang kantor kas kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan ruang ATM kepada BRI dan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan rincian perjanjian sewa sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Perjanjian Sewa BRI dan BNI

No	Jenis Sewa	Penyewa	Perjanjian Sewa	Periode sewa	Nilai Sewa (Rp)	No dan Tgl Setor Kas Negara
1	Sewa Ruang Kantor Kas	BRI	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor antara PT BRI, Kantor Cabang TB Simatupang dengan Polimedia Nomor B.2364-KC-XIV/LYI/12/2021 dan diperpanjang melalui Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 6 Februari 2023	01-01-2023 s.d. 30-06-2023	50.000.000	04/05/2023 E17A18N3EABCU 8LN senilai Rp50.000.000,00
			Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor antara PT BRI, Kantor Cabang TB Simatupang dengan Polimedia Nomor B.2364-KC-XIV/LYI/12/2021 diperpanjang melalui Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor62 tanggal 13 Juni 2023	01-07-2023 s.d. 31-12-2023	50.000.000	03/10/2023 BCCF155DF0GM 8PHF senilai Rp50.000.000,00
2	Sewa ATM	BRI	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM di Polimedia antara PT BRI dengan Polimedia Nomor B.1111-XIV-KC/LOG/06/2023 tanggal 13 Juni 2023	01-06-2023 s.d. 31-05-2024	20.000.000	06/11/2023 7A1EB48VV61AC UQO Rp20.000.000,00
3	Sewa ATM	BNI	Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM antara Polimedia dan PT BNI (Persero) Tbk. Tanggal 17 Juni 2022	15-06-2022 s.d. 14-06-2025	54.000.000	12 Oktober 2022

Hasil wawancara dengan pengelola BMN Polimedia diketahui bahwa, nilai sewa tersebut tidak berdasarkan persetujuan penetapan tarif dari KPKNL namun berdasarkan negosiasi antara Polimedia dengan pihak Bank. Polimedia belum pernah mengusulkan tarif pemanfaatan BMN ke KPKNL karena saat itu sertifikat tanah Polimedia masih menjadi satu dengan Universitas Indonesia (UI). Sertifikat tanah tersebut telah dipisah pada tanggal 8 Desember 2023, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir Polimedia belum mengusulkan kembali penetapan tarif BMN kepada KPKNL.

Polimedia menginginkan agar biaya sewa yang diterima bisa digunakan langsung untuk operasional. Namun KPKNL menjelaskan bahwa, penggunaan langsung tersebut bisa dilakukan ketika Polimedia menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Hal tersebut mengakibatkan Polimedia tidak segera

mengusulkan tarif pemanfaatan BMN ke KPKNL karena sedang mengupayakan proses peningkatan menjadi BLU.

(2) Kantin

Selain menyewakan ruangan kepada BRI dan BNI, Polimedia juga menyediakan fasilitas kantin sebanyak 18 kios kantin pada dua lokasi di lingkungan kampus, yaitu di belakang hotel Polimedia sebanyak 13 kios dan di belakang gedung A sebanyak lima kios. Nilai sewa kios kantin diketahui senilai Rp6.000.000,00/tahun/kios sesuai tarif pada Surat Keputusan (SK) Direktur Polimedia Nomor 1152/PL27/KU/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Tarif Sewa Kantin Polimedia.

Hasil pemeriksaan dan wawancara diketahui bahwa penetapan tarif pada SK Direktur tersebut tidak berdasarkan penetapan tarif dan persetujuan sewa dari KPKNL. Petugas BMN menyatakan bahwa Polimedia belum pernah mengusulkan tarif sewa kantin kepada KPKNL dengan alasan yang sama seperti pada pemanfaatan BMN untuk kantor kas dan ATM.

Selain itu diketahui bahwa, sewa kantin di atas tidak dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembayaran sewa kantin dibayarkan kepada petugas BMN secara tunai dan penyewa kantin menerima kuitansi bermaterai yang ditandatangani petugas BMN.

Selama Tahun 2023 penerimaan dari penyewaan 16 kios kantin adalah senilai Rp96.000.000,00. Selain itu terdapat dua kios yang baru membayar pada tahun 2024 untuk masa sewa 2023-2024 senilai Rp12.000.000,00. Sehingga jumlah penerimaan sampai dengan saat pemeriksaan adalah senilai Rp108.000.000,00 (Rp96.000.000,00 + Rp12.000.000,00). Penerimaan sewa kantin tersebut dipegang pengelola BMN Polimedia dan tidak langsung disetor ke Kas Negara.

c) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pemanfaatan BMN berupa kantin pada PENS diketahui bahwa terdapat tiga PKS sewa kantin antara PENS dengan penyewa yang bertindak untuk dan atas nama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut.

Tabel 3. PKS Sewa Kantin pada PENS

No	Jenis Sewa	Penyewa	PKS	Periode Sewa	Nilai Sewa	Rincian Sewa
1	Kantin Tenan Barat 1 dan Tenan Taman Wifi	Sdr. RAs bertindak untuk dan atas nama UMKM selaku penyewa	0910/PL14/LK.01.02/2023 tanggal 13-Sep-23	01 Januari s.d. 31 Desember 2023	24.000.000	10 kios @1.800.000/tahun 4 kios @1.500.000/tahun
2	Sewa Toko/Kios Taman Wifi	Sdri. AF bertindak untuk dan atas nama UMKM selaku penyewa	0903/PL14/LK.01.02/2023 tanggal 13-Sep-23	01 Januari s.d. 31 Desember 2023	7.200.000	4 kios @1.800.000/tahun
3	Kantin Tenan Barat 2	Sdr. RAk bertindak untuk dan atas nama UMKM selaku penyewa	0909/PL14/LK.01.02/2023 tanggal 13-Sep-23	01 Januari s.d. 31 Desember 2023	16.500.000	11 kios @Rp1.500.000/tahun

Hasil pemeriksaan fisik pada area kantin diketahui dari tiga area tersebut terdapat kios kantin yang beroperasi dan tidak beroperasi. Hasil konfirmasi kepada pedagang kios diketahui bahwa, setiap kios membayar sewa kepada Sdr. RAs senilai Rp1.500.000/bulan s.d. Rp3.000.000,00/bulan dan tidak ada perjanjian sewa atas penggunaan kios tersebut.

Hasil konfirmasi lebih lanjut kepada penyewa yang tertera pada PKS, yaitu RAs dan RAk diketahui bahwa mereka merupakan pengurus dari Koperasi KDH yang beralamat di PENS. Sdri AF merupakan ketua Koperasi KDH, Sdr. RAk sebagai Sekretaris, dan Sdr. RAs sebagai Bendahara. Ketiga orang tersebut menandatangani PKS sebagai perwakilan UMKM.

Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh dokumen penunjukan perwakilan dari UMKM kepada Koperasi KDH dimaksud. Sdr. RAs dan Sdr. RAk menyatakan bahwa area kantin yang menjadi tanggung jawabnya adalah area kantin sesuai PKS. Pedagang kios kantin dianggap sebagai mitra dan diminta bagi hasil antara Rp1.500.000,00/bulan s.d. Rp2.000.000,00/bulan tergantung area dan fasilitas kantin. BPK telah meminta PKS antara Koperasi KDH dengan pedagang/mitra namun sampai dengan pemeriksaan berakhir (5 April 2024) dokumen tersebut belum diperoleh.

Berdasarkan analisis atas dokumen PKS diketahui bahwa, nilai bagi hasil pedagang/mitra kepada Koperasi KDH lebih besar dari pada nilai sewa yang tertera pada PKS antara ketiga orang pengurus koperasi tersebut dengan PENS. Penerusan sewa yang dilakukan oleh Sdri. AF, Sdr. RAk, dan Sdr. RAs kepada pedagang kios belum memiliki izin penerusan sewa kepada Pengguna Barang dhi. Direktur PENS.

Untuk tahun 2024, sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, PENS belum memproses perpanjangan ijin pemanfaatan BMN ke KPKNL. PENS juga belum memungut pendapatan sewa kios tahun 2024.

d) Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setjen

PT DT menyewa lahan seluas 40,2 m^2 di *Basement* Gedung E dan 108,8 m2 di *Rooftop* Gedung F Kemendikbudristek berdasarkan PKS Nomor 40143/A7/LK.01.02/2023 – Tel.1569/HK 810/J DMT-106000/2023 tanggal 14 November 2023. Perjanjian sewa berlaku mundur untuk 3 tahun terhitung mulai 29 Januari 2023 s.d. 28 Januari 2026. Tarif sewa yang tertuang dalam PKS senilai Rp1.239.479.000,00 (Gedung E Rp489.479.000,00 dan Gedung F Rp750.000.000,00). Sewa lahan *rooftop* Gedung F merupakan perpanjangan dari perjanjian sebelumnya. Sedangkan untuk sewa lahan pada *basement* Gedung E merupakan perjanjian baru di tahun 2023.

Ketetapan tarif berdasarkan SK Nomor S-19/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk Gedung E adalah senilai Rp694.681.000,00. Kemudian, PT DT pada tanggal 26 Mei 2023 memohon keringanan tarif sewa untuk Gedung E melalui surat Nomor DMT.15/DV0/ROW-e1000000/V/2023. Biro Umum dan PBJ menyetujui penurunan tarif menjadi Rp489.479.000,00. Tarif Gedung E kemudian direvisi berdasarkan SK Nomor S-184/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 31 Agustus 2023 menjadi Rp489.479.000,00. PT DT melakukan pembayaran biaya sewa ke Kas

Negara pada 13 November 2023 senilai Rp1.239.479.000,00 (Rp750.000.000,00 + Rp489.479.000,00).

Setelah tarif KPKNL direvisi dan PT DT melakukan pembayaran, selanjutnya dilakukan penandatanganan PKS pada 14 November 2023. Karena PT DT telah memanfaatkan lahan tersebut sejak Januari 2023. Maka, terdapat pemanfaatan lahan selama sepuluh bulan tanpa memiliki dasar hukum.

e) Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Prov. Jawa Barat

Koperasi Pegawai menggunakan ruangan pada gedung BBPMP Prov. Jawa Barat untuk kegiatan usaha berupa minimarket dan kantin yang dikelola oleh Koperasi BBPMP Prov. Jawa Barat. Koperasi sudah berdiri sejak tahun 2001.

BBPMP Prov. Jawa Barat telah memiliki SK Tarif BMN yang ditetapkan oleh Kepala BBPMP Prov. Jawa Barat pada tahun 2020, namun dalam SK tersebut belum mencantumkan tarif sewa koperasi dan kantin. Tarif sewa koperasi dan kantin baru ditetapkan pada tahun 2023 dalam SK Kepala BBPMP Prov. Jawa Barat Nomor 4391/C7.2/KU.04.00/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Tarif Sewa BMN Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Tahun 2023. Di mana dalam keputusan tersebut, tarif sewa kantin dan koperasi masing-masing senilai Rp4.250.000,00 per tahun.

Namun, hingga saat pemeriksaan dilaksanakan, belum ada PKS antara koperasi dan BBPMP Prov. Jawa Barat terkait sewa ruangan dan belum dilakukan pembayaran terkait sewa ruangan.

f) Balai Guru Penggerak (BGP) Prov. NTT

BGP Prov. NTT memiliki BMN yang difungsikan sebagai aula, asrama, mess/*guest house*, ruang makan, gedung Kober Pelangi, dan gedung TK Mentari dengan pemanfaatan diantaranya berupa sewa kepada pihak ketiga. Pengenaan tarif sewa atas BMN tersebut masih berpedoman pada SK Kepala Balai Nomor 0072/B7.161/LK.01.02/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan tarif sewa BMN pada BGP Prov. NTT karena belum ada SK penetapan tarif dari Kemenkeu.

Pengelola BMN pada BGP Prov. NTT menjelaskan bahwa, telah diajukan permohonan penetapan tarif sewa ke KPKNL melalui Surat Kepala Balai Nomor 0072/B7.161/LK.01.02/2023 tanggal 31 Januari 2023 tetapi belum disetujui karena masih ada dokumen yang harus dilengkapi. Upaya BGP selanjutnya adalah dengan membuat Penetapan Status Pengguna BMN yang akan diajukan ke Setjen.

g) Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Prov. Jawa Barat

Pada BBGP Prov. Jabar terdapat pemanfaatan aset berupa sewa ruang lokasi ATM. Pemanfaatan aset tersebut diatur berdasarkan perjanjian sewa ruang lokasi ATM antara BBGP Prov. Jabar dengan PT BRI (Persero) Tbk. Nomor B.2672 KC-VI/LOG/08/2023 dan Nomor 3568/B7.2/KU.84.83/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Masa berlaku sewa adalah selama satu tahun terhitung mulai 21 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2024.

Adapun harga sewa atas ATM tersebut adalah senilai Rp15.000.000,00 per tahun, merupakan hasil kesepakatan kedua pihak namun tidak berdasarkan penetapan oleh KPKNL. Perjanjian sewa dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa Pihak Kedua

bersedia membayar harga sewa senilai Rp15.000.000,00 per tahun hingga terbit penetapan tarif sewa ruang oleh KPKNL Kementerian Keuangan untuk kemudian akan dilakukan penyesuaian tarif.

BBGP Prov. Jabar menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat pengajuan penetapan tarif PNBP dengan Surat Kepala Balai BBGP Prov. Jabar Nomor 0064/B7.2/KU.01.02/2023 tanggal 7 Februari 2023 kepada KPKNL untuk harga sewa ruang lokasi ATM tersebut. KPKNL dengan Surat Nomor S-3/KNL.0801/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Permintaan Kekurangan Dokumen Sewa BMN pada Kemendikbudristek c.q. BBGP Prov. Jawa Barat yakni dokumen sertifikat tanah. Dokumen tersebut telah dilengkapi pada 23 Januari 2024, namun hingga pemeriksaan berlangsung belum ada respon lebih lanjut dari KPKNL.

h) Balai Bahasa (BB) Prov. Jatim

Realisasi PNBP BB Prov. Jatim dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan selama Tahun 2023 senilai Rp157.989.800,00. Pendapatan tersebut diantaranya berasal dari sewa TK/PAUD/YAC dan sewa ruangan (aula, balairung, wisma, asrama, ruang makan, dapur). Hasil pemeriksaan atas dokumen dan keterangan dari Bendahara Penerimaan BB Prov. Jatim serta pengurus BMN menunjukkan bahwa pelaksanaan PNBP untuk sewa TK/TPA telah berakhir pada tahun ajaran 2020/2021 dan belum diperpanjang.

Gedung dan bangunan pada BB Prov. Jatim sebelumnya dikelola oleh satuan kerja (satker) PP Paud dan Dikmas yang saat ini sudah dilikuidasi sehingga aset gedung dan bangunan dialihkan ke BB Prov. Jatim berdasarkan BAST Nomor 14354/C1/LK.03.03/2022 tanggal 21 September 2022. Salah satu dari gedung tersebut yaitu gedung dengan nama Matahari disewakan sebagai TK/TPA berdasarkan surat perjanjian antara BP Paud dan Dikmas Jatim dengan Lembaga CT Nomor 0342/C9/KU/2020 dan 03/CT/KP/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan berlaku selama satu tahun senilai Rp36.000.000,00.

Lembaga CT pada tanggal 3 Agustus 2020 mengajukan permohonan keringanan pembayaran PNBP berdasarkan surat Nomor 16/CT/KP/VIII/2020 karena pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan disetujui oleh Kepala BP Paud dan Dikmas Jatim berdasarkan Nomor 2770/C.7.4/TU/2020 tanggal 2 September 2020 dengan keringanan PNBP senilai Rp20.000.000,00 pertahun dari tarif sebelumnya yaitu senilai Rp36.000.000,00 pertahun. Lembaga CT telah menyetorkan biaya sewa senilai Rp20.000.000,00 pada tanggal 2 Desember 2020.

Hasil pemeriksaan Itjen Tahun 2023 menunjukkan bahwa Lembaga CT sampai dengan akhir Tahun 2023 masih menempati bangunan tersebut dan melakukan aktivitas pembelajaran sehingga berkewajiban menyetorkan biaya sewa PNBP ke Kas Negara selama tiga tahun dari Tahun 2021 s.d. 2023 senilai Rp108.000.000,00, (Rp36.000.000,00 x 3 tahun) dan telah ditindak lanjuti dengan menyetorkan sewa gedung biasa sewa senilai Rp108.000.000,00 pada tanggal 29 September 2023 ke Kas Negara.

Tarif pemanfaatan BMN tersebut belum didukung oleh penetapan/persetujuan KPKNL. Tahun 2021, KPKNL menerbitkan Persetujuan Sewa BMN Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan BP Paud dan Dikmas Jatim dengan Nomor S-

39/MK.6/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 4 Maret 2021 namun dalam surat tersebut tidak mencantumkan-BMN dhi. Gedung Matahari yang disewakan sebagai TK oleh Lembaga CT. BP Paud dan Dikmas Jatim kemudian mengajukan permohonan penilaian dan Penetapan Tarif sewa BMN dengan Nomor 1285/C7.4/LK.01.01/2021 tanggal 23 April 2021 Khusus Gedung dengan Nama Bangunan Matahari namun belum mendapatkan jawaban sampai dengan aset tersebut dialihkan ke BB Jatim. Saat ini BB Jatim masih dalam tahapan konsultasi dan mempersiapkan berkas persyaratan adminstrasinya.

i) Itjen

Itjen pada Tahun 2023 menyewakan gedung/bangunan yang dimanfaatkan sebagai kantin dan telah dituangkan dalam PKS yang berlaku selama Tahun 2023. Pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan atas sewa kantin adalah senilai Rp600.000,00/bulan dan khusus untuk warung kopi Iro tarif sewa senilai Rp1.500.000,00. Penetapan tarif sewa kantin tersebut tidak didukung dengan persetujuan dari KPKNL, namun hanya melalui kebijakan tidak tertulis dari KPA Itjen. Berikut rincian PKS sewa kantin pada Itjen pada Tahun 2023.

Tabel 4. PKS Kantin Itjen Tahun 2023

No	Lokasi/ Stand	PKS		Jenis Usaha	Tarif/Bulan (Rp)	Jangka Waktu (Tahun 2023)
		Nomor	Tanggal			
1	1	001/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Warnas Padang	600.000	3 Jan - 31 Des
2	2	002/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Mie ayam	600.000	3 Jan - 31 Des
3		002/G1/RT.01.00/2023	02/02/2023	Mie ayam	600.000	2 Feb - 31 Des
4		015/G1/RT.01.00/2023	04/09/2023	Mie ayam	600.000	4 Sept - 31 Des
5		002/G1/RT.01.00/2023	21/11/2023	Warung Ceria	600.000	21 Nov - 31 Des
6	3	003/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Alam Sunda	600.000	3 Jan - 31 Des
7	4	004/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Warkop	600.000	3 Jan - 31 Des
8	5	005/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Warpad	600.000	3 Jan - 31 Des
9	6	006/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Warung gado2	600.000	3 Jan - 31 Des
10	7	007/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Warung Ayam Kremes	600.000	3 Jan - 31 Des
11	8	008/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Warung Sate	600.000	3 Jan - 31 Des
12	9	009/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Ayam Penyet	600.000	3 Jan - 31 Des
13	10	010/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Soto Lamongan	600.000	3 Jan - 31 Des
14	11	011/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Soto Banjar	600.000	3 Jan - 31 Des
15	12	012/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Ayam Bakar Titi Djanda	600.000	3 Jan - 31 Des
16	12	012/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Chicken Steak	600.000	3 Jan - 31 Des
17	13	013/G1/RT.01.00/2023	03/01/2023	Warung Kopi Iro	1.500.000	3 Jan - 31 Des

Pengajuan ijin/persetujuan sudah dilakukan Itjen ke KPKNL melalui Surat Nomor 9851/G1/LK.01.02/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN yaitu surat permohonan sewa dari pelaku UMKM, data BMN yang disewakan (Kartu Identitas Barang/KIB, foto dan denah BMN), surat pernyataan bahwa objek BMN objek sewa tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat pernyataan kesediaan calon penyewa untuk

menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku dan salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Objek Sewa.

KPKNL telah menanggapi melalui Surat Nomor S-3036/KNL.0701/2023 tanggal 17 November 2023 yang menjelaskan antara lain belum terdapat informasi mengenai luas BMN yang akan disewakan, belum melampirkan KIB, penyewa belum melampirkan surat usulan dan pernyataan kesediaan calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) salah satu penyewa tidak sesuai dengan calon penyewa dan fotocopi surat izin usaha/tanda izin usaha sudah tidak berlaku. Namun Itjen belum melakukan tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2023 atas kekurangan dokumen sesuai dengan surat KPKNL tersebut.

2) Penatausahaan PNBP Wisma Arga Mulya pada Biro Umum dan PBJ tidak tertib

Wisma Arga Mulya dikelola oleh Pengelola Wisma pada Biro Umum dan PBJ. Wisma Arga Mulya menyewakan sebanyak 64 kamar, tiga aula, dan satu dapur. Realisasi pendapatan Wisma Arga Mulya Tahun 2023 senilai Rp917.938.000,00 yang terdiri dari penerimaan sewa kamar dan aula senilai Rp907.258.000,00 dan sewa dapur senilai Rp10.680.000,00. Pengelola Wisma ditunjuk sebagai petugas yang menerima penerimaan sewa dan menyetorkannya ke Kas Negara dengan sepengetahuan Bendahara Penerimaan. Dalam proses penyewaan, calon penyewa melakukan *booking* kepada Pengelola Wisma melalui telepon atau *whatsapp*, pembayaran tidak selalu dilakukan pada awal masa sewa, pembayaran dilakukan secara tunai oleh penyewa kepada Pengelola Wisma, kemudian Pengelola Wisma meminta kode billing kepada Bendahara Penerimaan dan menyetorkan ke Kas Negara.

Hasil pengujian dokumen penerimaan diketahui bahwa pengelolaan Wisma tidak tertib yaitu:

a) pengelola wisma tidak membuat pencatatan kedatangan tamu pada buku tamu atau sejenisnya;

b) tidak ada pencatatan kamar yang digunakan pada saat penyewaan;

c) tidak ada pemisahan fungsi pengelola wisma;

d) petugas yang bertanggung jawab untuk menerima pesanan sewa dan menerima pembayaran adalah orang yang sama;

e) kuitansi sebagai bukti pelunasan pembayaran yang diberikan oleh Pengelola Wisma kepada penyewa tidak bernomor seri;

f) pengelola Wisma tidak membuat laporan tamu yang menginap kepada satuan pengamanan setempat.

Dengan kondisi di atas, tidak dapat ditelusuri berapa nilai PNBP yang seharusnya diterima.

Dari pendapatan Wisma Arga Mulya yang tercatat senilai Rp907.258.000,00 senilai Rp265.633.000,00 merupakan pemasukan dari kegiatan Biro Umum dan PBJ sendiri. Nilai sewa yang dibayarkan oleh Biro Umum dan PBJ di satu sisi diakui sebagai realisasi Belanja Barang dan Jasa, dan di sisi lain juga diakui sebagai Pendapatan pada Biro Umum dan PBJ. Hal ini menyebabkan adanya transaksi uang masuk dan keluar

pada satker yang sama. Transaksi tersebut berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja realisasi Belanja dan Pendapatan satker, walaupun transaksi tersebut terjadi secara semu.

3) Penerimaan jasa giro dikenakan Pajak Penghasilan (Pph)

a) Universitas Malikussaleh (Unimal)

Hasil pemeriksaan atas mutasi pada dua rekening koran milik Unimal sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa, pihak Bank melakukan pemotongan pajak atas bunga/jasa giro pada bulan Oktober s.d Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. Pemotongan Pajak atas Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Unimal

No	Nama rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Potongan Pph (Rp)
1.	RPL 089 UNIMAL UTK OPS PEN BTN	BTN	16775750008	1.720.277,13
2.	RPL 089 UNIMAL UTK OPS PEN BSI	BSI	67757550896	11.466.666,68
	TOTAL			**13.186.943,81**

Penempatan dana Unimal di atas diikat melalui PKS antara Unimal dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) tentang Bank Operasional dan Pelayanan Perbankan Nomor 68/UN45/hk.02.03/2023 dan Nomor 03/2802-3/RO pada tanggal 18 Juli 2023 dan PKS antara Unimal dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) tentang Bank Operasional dan Pelayanan Perbankan Nomor 67/UN45/HK.02.03/2023 dan Nomor 09/PKS/SHAD/VIII/2023. Dari analisa dokumen PKS, pada Pasal 14 dinyatakan bahwa, Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak yang dikenakan atas bunga/jasa giro adalah PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh final sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.

Atas permasalahan tersebut Bendahara penerimaan dan Kepala Biro Umum dan Keuangan (BUK) telah melakukan koordinasi dengan mitra Bank Unimal. Dari kedua mitra, Bank BTN telah melakukan penyetoran kembali atas pajak ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) 089 Unimal UTK OPS PEN BTN Nomor rekening 16775750008 pada tanggal 26 Maret 2024 senilai Rp1.720.277,13. Unimal telah mengirimkan surat nomor 0065/UN45.1.2/KU.04.01/2024 tanggal 28 Maret kepada Pimpinan BSI untuk melakukan pengembalian atas pemotongan pajak tersebut.

b) Ditjen Diksi

Ditjen Diksi membuka rekening pada bank yang terdiri atas rekening operasional penerimaan, rekening operasional pengeluaran, rekening dana kelolaan, dan rekening pengelolaan kas yang dipergunakan untuk mengelola *idle cash*. Dalam hal satker tersebut berbentuk BLU, maka satker dapat membuka rekening pengeluaran untuk belanja yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (Rupiah Murni/RM). Satker juga dapat membuka rekening pada unit (biro, fakultas, Unit Pelaksana Teknis, dan subsatker) untuk pengelolaan belanja pada unit masing-masing.

Hasil pemeriksaan atas mutasi rekening koran pada empat Politeknik di lingkungan Ditjen Diksi selama tahun 2023 menunjukkan bahwa pihak bank mengenakan Pph

atas pendapatan jasa giro senilai Rp133.653.736,14 pada empat satker sebagai berikut.

Tabel 6. Pengenaan Pajak atas Pendapatan Jasa Giro pada Empat Satker di Ditjen Diksi

No	PTN	Pajak (Rp)
1	Politeknik Negeri Lampung (Polinela)	1.543.251,00
2	Politeknik Manufaktur Negeri (Polman) Bandung	22.850.935,00
3	Politeknik Negeri Bandung (Polban)	106.809.929,92
4	Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)	2.449.620,22
	Jumlah	**133.653.736,14**

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.1.1**

Hasil wawancara dengan pengelola keuangan Polinela, Polman Bandung, dan Polban diketahui bahwa perjanjian antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan bank mitra yang ditandatangani oleh Direktur dan pihak bank mitra tidak mengatur terkait klausul pengenaan pajak rekening dan biaya administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan pengelola keuangan Polnep diketahui bahwa, pengelola keuangan tidak mengetahui bahwa rekening milik pemerintah seharusnya tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi.

4) Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) Ditjen Kebudayaan belum menetapkan jenis dan tarif PNBP sensor dalam PP

Realisasi PNBP pada LSF Tahun 2023 senilai Rp2.916.616.688,00 terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp168.169.799,00 dan PNBP atas tarif sensor pelayanan penyensoran dan iklan film di LSF senilai Rp2.748.446.889,00. Pendapatan atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film pada LSF pada Tahun 2023 didasarkan atas Keputusan Ketua LSF Nomor 007 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada LSF. Sedangkan untuk mekanisme penyensoran film didasarkan pada Peraturan Ketua LSF Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pendoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

Hasil wawancara kepada tim Sekretariat LSF diketahui bahwa LSF dapat melakukan pungutan atas penyensoran berdasarkan pada PP Nomor 18 tahun 2014 tentang LSF, pada Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa, dalam melaksanakan penyensoran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSF dapat mengenakan tarif penyensoran.

Berdasarkan keterangan dari Setdijen Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan telah melakukan proses penyesuaian besaran tarif di lingkungan Ditjen Kebudayaan, namun baru sebatas tarif yang berasal dari pendapatan museum dan telah ditetapkan melalui PP Nomor 22 Tahun 2023. Namun dalam proses pengusulan penyesuaian atas jenis dan tarif PNBP tersebut tidak termasuk atas jenis dan tarif sensor film yang ada pada LSF.

b. PNBP terlambat disetor ke Kas Negara

Hasil pemeriksaan berkaitan dengan kepatuhan satker dalam penyetoran PNBP menunjukkan kelemahan sebagai berikut.

1) Bendahara Penerimaan terlambat menyetorkan PNBP ke Kas Negara

Terdapat PNBP yang diterima secara tunai oleh Bendahara Penerimaan. Sesuai ketentuan, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan PNBP yang diterima pada hari yang sama atau pada hari kerja berikutnya dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar yang diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau dalam hal diterima pada hari libur /hari yang diliburkan. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan Bendahara Penerimaan tidak menyetorkan PNBP yang diterima sesuai dengan ketentuan seperti uraian dalam tabel berikut.

Tabel 7. Keterlambatan Penyetoran PNBP ke Kas Negara

No.	Satker	Nilai PNBP	Keterlambatan (Hari Kerja)	Lampiran
1	**Ditjen Diksi**			
	Politeknik Negeri Subang	4.764.148.000,00	15 s.d. 30	Lampiran A.1.2
	Politeknik Negeri Lampung	33.835.450.000,00	15 s.d. 30	
	Politeknik Negeri Lhokseumawe	119.689.380,00	11	
	PENS	25.450.283.310,00	14	
	Politeknik Negeri Cilacap	1.961.278.000,00	5	
	Politeknik Negeri Banjarmasin	8.895.766.500,00	13	
	Politeknik Negeri Samarinda	6.358.929.533,00	14	
	Polimedia	47.464.456.000,00	21	
	Politeknik Perikanan Negeri Tual	61.468,00	24	
	Akademi Komunitas Negeri (AKN) Rejang Lebong	2.000.000,00	5	
	AKN Seni dan Budaya Yogyakarta	600.000,00	29	
	AKN Aceh Barat	24.000.000,00	12	
	Jumlah	**128.876.662.191,00**		
2	**Ditjen PDM**			
	Direktorat PMPK	302.150.000,00	2 s.d 13	Lampiran A.1.3
	BBPMP Prov. Papua	504.430.000,00	2 s.d 33	Lampiran A.1.4
	Jumlah	**806.580.000,00**		
3	**Ditjen GTK**			
	BBGP Prov. Jawa Tengah	2.534.000,00		
	BBGP Prov. Sulawesi Selatan	12.790.000,00	2 s.d 123	Lampiran A.1.5
	BGP Prov. Jambi	37.553.000,00	2 s.d 80	
	BGP Prov. NTT	9.750.000,00	2 s.d 6	
	Jumlah	**62.627.000,00**		
4	**BPP Bahasa**			
	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	2.823.960.000,00	7 s.d 60	Lampiran A.1.6
	Balai Bahasa Prov. Jawa Tengah	130.142.100,00	2 s.d 28	Lampiran A.1.7
	Jumlah	**2.954.102.100,00**		
	Total	**132.699.971.291,00**		

Atas permasalahan tersebut, Bendahara Penerimaan menjelaskan keterlambatan penyetoran diantaranya sebagai berikut:

a) keterlambatan terjadi karena kelalaian Bendahara Penerimaan, proses verifikasi penyetoran ke Kas Negara yang berjenjang pada aplikasi manajemen kas Bank, dan penyetoran yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan cek;

b) Bendahara Penerimaan sedang melaksanakan tugas dinas luar di hari tersebut atau hari berikutnya.

c) PNBP diterima setelah Bank tutup sehingga disetor keesokan harinya

d) hasil klarifikasi dengan Bendahara Penerimaan BB Prov. Jateng menunjukkan bahwa BB Prov. Jateng sebelumnya tidak mengelola PNBP karena gedung dan bangunan tersebut sebelumnya dikelola oleh PP Paud dan Dikmas yang saat ini sudah dilikuidasi. Oleh karena itu, Pihak BB Prov. Jateng memerlukan waktu untuk berkonsultasi dengan bagian pelaporan dan bagian BMN Sekretariat BPP Bahasa, Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait pengelolaan ataupun pelaporan sehingga penerimaan PNBP tersebut terlambat disetor ke Kas Negara.

Selain itu terdapat permasalahan pada Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yakni Bendahara Penerimaan yang belum tertib melakukan penyetoran ke Kas Negara atas PNBP di rekening tersebut sesuai ketentuan. Bendahara Penerimaan menjelaskan bahwa penyetoran Pendapatan PNBP ke Kas Negara tidak dilakukan pada hari kerja yang sama atau pada hari kerja berikutnya, namun dilakukan secara periodik/berkala yaitu sekali atau dua kali dalam sebulan.

Atas penyetoran secara berkala tersebut, UMRAH belum mendapatkan dispensasi dari KPPN terkait. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa seluruh PNBP Tahun 2023 sudah seluruhnya disetor ke Kas Negara.

2) Pembayaran PNBP oleh pihak ketiga tidak tepat waktu sesuai dengan kontrak kerjasama senilai Rp444.646.100,00

a) PENS

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran pemanfaatan BMN diketahui bahwa penyewa terlambat membayar sewa sesuai dengan ketentuan senilai Rp118.706.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Rincian Keterlambatan Pembayaran Sewa pada PENS

No	PKS	Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Pembayaran	Keterlambatan
1	Sewa Lahan ATM Nomor4959.01/PL14/LK/2023 dan R08.Ar.SBN/PKS. ATM.025/2023 Tanggal 21 Juni 2023	Bank Mandiri	20 Mar 2023 s.d 19 Mar 2025	47.782.000	14 Agust 2023	54 hari
2	Kantin Tenan Barat 1 dan Tenan Taman Wifi Nomor 0910/PL14/LK.01.02/2023 Tanggal 13-Sep-23	UMKM (PKS ditandatangani perwakilan Koperasi KDH)	01 Jan s.d. 31 Des 2023	24.000.000	29 Des 2023	109 hari
3	Kantin Utama Nomor 0902/PL14/LK.01.02/2023 Tanggal 13-Sep-23	Koperasi KDH	01 Jan s.d. 31 Des 2023	23.224.000	29 Des 2023	109 hari
4	Sewa Toko/Kios Taman Wifi Nomor0903/PL14/LK.01.02/2023	UMKM	01 Jan s.d. 31 Des 2023	7.200.000	29 Des 2023	109 hari

No	PKS	Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Pembayaran	Keterlambatan
	Tanggal 13-Sep-23	(PKS ditandatangani perwakilan Koperasi KDH)				
5	Kantin Tenan Barat 2 Nomor0909/PL14/LK.01.02/2023 Tanggal 13-Sep-23	UMKM (PKS ditandatangani perwakilan Koperasi Dinamika Harmoni)	01 Jan s.d. 31 Des 2023	16.500.000	29 Desember 2023	109 hari
Jumlah				**118.706.000**		

Dari tabel di atas diketahui bahwa, PKS baru ditandatangani dalam periode sewa berjalan. Hal ini disebabkan karena usulan persetujuan sewa ke KPKNL baru diajukan pada tanggal 28 Februari 2023 untuk ATM dan 28 Maret 2023 untuk kantin. Persetujuan sewa KPKNL terbit tanggal 4 April 2023 dengan Nomor S-130/MK.6/KNL.1001/2003 untuk ATM dan tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor S-202/MK.6/KNL.1001/2023 untuk kantin. Sesuai surat persetujuan KPKNL, perjanjian sewa ditandatangani setelah pembayaran uang sewa disetorkan ke Kas Negara dan bukti setoran dilampirkan dalam PKS. Lebih lanjut, perjanjian sewa ditandatangani dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak surat persetujuan KPKNL terbit.

Hasil konfirmasi kepada Koperasi KDH diketahui bahwa, pembayaran sewa terlambat dilakukan karena menunggu penagihan dari pengelola BMN PENS. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa surat perjanjian pemanfaatan BMN di PENS belum memasukkan klausul cara pembayaran dan denda pada surat perjanjian pemanfaatan BMN untuk kantin dan ATM tersebut sehingga denda keterlambatan tidak dipungut.

b) Polimedia

Hasil pemeriksaan atas PKS dan dokumen pembayaran PNBP atas sewa kantor kas dan ATM pada Polimedia diketahui bahwa terdapat keterlambatan pembayaran pemanfaatan BMN sebagai berikut.

Tabel 9. Rincian Keterlambatan Pembayaran Sewa pada Polimedia

No	Jenis Sewa	Penyewa	PKS	Periode sewa	Nilai sewa (Rp)	Setor Kas Negara	Keterangan
1	Sewa Ruang Kantor Kas	BRI	Nomor B.2364-KC-XIV/LYI/12/2021 diperpanjang melalui Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 6 Februari 2023.	01-01-2023 s.d. 30-06-2023	50.000.000	04/05/2023	• PKS terlambat dibuat • Tidak ada ketentuan pembayaran sewa sebelum masa sewa • Pembayaran terlambat 124 hari dari periode sewa sesuai PKS
			Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 62 tanggal 13 Juni 2023.	01-07-2023 s.d. 31-12-2023	50.000.000	03/10/2023	• Tidak ada ketentuan pembayaran sewa sebelum masa sewa • Pembayaran terlambat 112 hari dari tanggal akta perpanjangan sewa

No	Jenis Sewa	Penyewa	PKS	Periode sewa	Nilai sewa (Rp)	Setor Kas Negara	Keterangan
2	Sewa ATM	BRI	Nomor B.1111-XIV-KC/LOG/06/2023 tanggal 13 Juni 2023	01-06-2023 s.d. 31-05-2024	20.000.000	06/11/2023	• PKS terlambat dibuat • Pembayaran terlambat 124 hari dari periode sewa sesuai PKS
3	Sewa ATM	BNI	Nomor UID/2.1/1810/2019 dan 4499/PL27/DN/2019 tgl 10 Juni 2019, Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM antara Polimedia dan PT BNI Tbk. Tanggal 17 Juni 2022	15-06-2022 s.d. 14-06-2025	54.000.000	Tahun 2022	• PKS terlambat dibuat
Jumlah					**174.000.000**		

Selain keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara diketahui bahwa PKS sewa aset di atas ditandatangani oleh pimpinan cabang Bank dan perwakilan Polimedia dalam hal ini PPK. Hasil wawancara kepada PPK diketahui bahwa tidak ada surat penunjukkan/pendelegasian wewenang dari Direktur kepada PPK untuk menandatangani perjanjian.

Pemeriksaan lebih lanjut atas PKS sewa kantor kas dengan BRI diketahui bahwa terdapat klausul, "Setiap awal bulan, Pihak Pertama (Polimedia) akan mengirimkan kuitansi biaya pemakaian listrik kepada Pihak Kedua (BRI). Pembayaran dapat langsung ditransfer oleh Pihak Kedua ke Nomor rekening yang tertera pada kuitansi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kuitansi diterima lengkap oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama". Namun berdasarkan keterangan Pengelola BMN diketahui bahwa, Polimedia tidak pernah meminta pembayaran sewa listrik kepada BRI sehingga tidak ada penerimaan berupa pembayaran pemakaian listrik di rekening Bendahara Penerimaan.

Hasil pemeriksaan atas surat perjanjian pemanfaatan BMN di Polimedia menunjukkan bahwa Polimedia belum memasukkan klausul cara pembayaran dan denda pada surat perjanjian pemanfaatan BMN untuk kantin dan ATM tersebut sehingga denda keterlambatan belum dipungut.

c) Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi)

Hasil peneriksaan pada Poliwangi menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

(1) PKS pemanfaatan BMN berupa kantin Nomor 9221/PL36/LK.01.02/2023 tanggal 13 November 2023 dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 13 November 2023 s.d 12 November 2025 senilai Rp5.417.000,00. Pembayaran sewa dilakukan pada tanggal 8 Desember 2023 dengan NTPN 8DB196U8ELRJRAER senilai Rp5.417.000,00. Pembayaran uang sewa tersebut seharusnya dilakukan sekaligus secara tunai sebelum PKS ditandatangani, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran uang sewa selama 25 hari (13 November sampai dengan 8 Desember 2023).

(2) PKS pemanfaatan BMN berupa ruang ATM antara Poliwangi dengan PT Bank Mandiri Nomor R08/Ar.Jbr/457/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2025 senilai Rp25.133.000,00. Pembayaran dilakukan tanggal 27 September 2023 dengan NTPN C1F1F6U8ELJ83KUT senilai Rp25.133.000,00. Pembayaran uang sewa seharusnya dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran uang sewa selama 35 hari (23 Agustus sampai dengan 27 September 2023).

(3) PKS pemanfaatan BMN berupa sewa Tanah dan Gedung Koperasi Karyawan Poliwangi Nomor 4510/PL36/LK.01.02/2023 dan 045/KKP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung tanggal 1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025 senilai Rp14.164.500,00. Pembayaran sewa dilakukan tanggal 4 Juli 2023 dengan NTPN OFBBC61QUQQ75RQG senilai Rp14.164.500,00. Pembayaran uang sewa seharusnya dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran uang sewa selama 14 hari (20 Juni sampai dengan 4 Juli 2023)

d) Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK)

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat keterlambatan pembayaran PNBP atas pemanfaatan BMN dari sewa gedung di mana pembayaran sewa dibayarkan setelah kegiatan selesai. Pembayaran uang sewa seharusnya dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian sehingga terjadi keterlambatan pembayaran sewa senilai Rp107.225.600,00.

c. Penggunaan langsung atas PNBP yang diterima satker

Hasil pemeriksaan menunjukkan PNBP yang diterima oleh PNBP digunakan langsung untuk operasional satker dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 10. Penggunaan Langsung PNBP pada Satker PNBP

No.	Satker	PNBP	PNBP Digunakan Langsung (Rp)
1	Setditjen Diksi	Pemanfaatan Gedung Handayani	2.225.000,00
2	Polimedia	Sewa Kantin	23.000.000
3	BPMP Prov. Papua	Sewa kamar asrama, lapangan bulu tangkis, ruang kelas, dan ruang aula	34.185.000,00
4	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Hasil pendaftaran kegiatan *SangiRun Night Trail*	15.975.000,00
5	UMRAH	Pendapatan Kerjasama, Pemanfaatan Peralatan Mesin	670.294.251,00
Jumlah			**745.679.251,00**

Uraian penjelasan penggunaan langsung PNBP pada UMRAH senilai Rp670.294.251,00 diuraikan sebagai berikut.

1) Pelaksanaan kerjasama di UMRAH meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga termasuk bidang-bidang lainnya, antara lain

penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/ lokakarya, magang/kuliah praktik/*assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan UMRAH.

2) UMRAH tidak menyajikan realisasi Pendapatan Kerjasama di Tahun 2023 pada LRA. Hasil pemeriksaan atas RPL dan permintaan keterangan menunjukkan bahwa, pada Tahun 2023 UMRAH memiliki lima kegiatan kerjasama dengan mitra yang memberikan dana ke UMRAH dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 11. Rincian Kegiatan Kerjasama dengan Pemberian Dana ke UMRAH TA 2023

No	Nama Kegiatan Kerjasama	Unit Pelaksana Kerjasama	Mitra Pemberi Dana	Nilai Dana (Rp)	Rekening Penampung Dana Kerjasama
1.	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sekretariat DPRD Kota Batam	47.373.100,00	Bank BRI Nomor 17401002182304, RPL KS UMRAH UTK PENELITIAN DPRD BATAM
2.	Swakelola pada Pengadaan Paket Pengering Teripang	Lintas Fakultas	Dinas Perikanan Kabupaten Lingga	29.415.000,00	BRI Nomor 17401003112302, RPL 009 KS UMRAH UTK DRTPM
3.	Proyek *Enhancing the Role of Civil Society Organisations in Southeast Asia in Marine Resource Management, Maritime Security and Policy Implementation*	Lintas Fakultas	James Cook University (JCU)	190.790.400,00	BRI Nomor 17401003163303, RPL 009 KS UMRAH PENELITIAN JCU
4.	Survei Pemantauan Harga	Fakultas Ekonomi	Bank Indonesia	323.112.500,00	BRI Nomor 17401002131303, RPL 009 KS UMRAH UTK BANK INDONESIA
5.	*Maritime Continent Fulcrum International Conference* (MACIFIC)	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Peserta Konferensi	37.700.000,00	BRI Nomor 17401002468302, RPL 009 PS UMRAH UTK MACIFIC
Jumlah				**628.391.000,00**	

Seluruh penerimaan dana kerjasama senilai Rp628.391.000,00 tersebut tidak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP UMRAH. Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran yang mengelola rekening RPL diketahui bahwa dana kerjasama yang diterima tersebut selanjutnya disalurkan kepada masing-masing pelaksana kegiatan dan penggunaannya untuk kegiatan kerjasama tidak melalui mekanisme APBN. Kegiatan kerjasama tersebut seluruhnya telah dilaksanakan dan sudah didukung dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hasil konfirmasi kepada empat mitra kerjasama yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, *James Cook University* (JCU); dan Bank Indonesia menunjukkan tidak terdapat pengembalian atas penyaluran dan kerjasama ke UMRAH tersebut.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa dana kerjasama dengan JCU senilai Rp101.999.900,00 diterima melewati Tahun 2023, yaitu pada tanggal 12 Januari 2024. Atas penerimaan dana di Tahun 2024 tersebut, tersebut UMRAH tidak mencatat sebagai Piutang maupun sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Neraca UMRAH per 31 Desember 2023.

Lebih lanjut, UMRAH memperoleh Pendapatan dari Pengelolaan BMN dengan realisasi senilai Rp308.879.787,00 yang antara lain berupa Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin senilai Rp50.200.000,00. Salah satu Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin adalah berasal dari Pendapatan Laboratorium di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP). Pada Tahun 2023 pendapatan yang disetorkan ke Kas Negara dari pemanfaatan laboratorium-laboratorium di FIKP senilai Rp15.000.000,00. Dengan demikian PNBP yang digunakan langsung senilai Rp35.200.000,00 (Rp50.200.000,00 – Rp15.000.000,00)

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa, realisasi pendapatan sewa penggunaan pada Laboratorium *Marine Chemistry* merupakan nilai neto, yakni nilai pendapatan yang telah dikurangi penggunaan langsung untuk operasional laboratorium. Jumlah pendapatan selama tahun 2023 pada laboratorium tersebut adalah Rp14.496.105,00, dari jumlah tersebut digunakan langsung oleh Laboratorium senilai Rp6.703.251,00 yang digunakan untuk keperluan laboratorium.

Wakil Dekan II menjelaskan bahwa alasan belanja langsung kebutuhan tersebut, karena demi keberlangsungan pelayanan laboratorium yang prima khusus Laboratorium *Marine Chemistry*. Penggunaan langsung dimaksud tidak dilakukan dengan mekanisme penganggaran melalui mekanisme APBN.

d. PNBP belum diterima/PNBP tidak disetorkan ke Kas Negara

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat PNBP yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Negara senilai Rp68.745.000,00 dengan uraian sebagai berikut.

1) BPMP Prov. DKI Jakarta senilai Rp31.848.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat bukti pembayaran dari Yayasan DS atas sewa asrama, ruang kelas, dan aula senilai Rp31.848.000,00 pada BPMP Prov. DKI Jakarta pada tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2023. Berdasarkan konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan BPMP Prov. DKI Jakarta, penerimaan dari Yayasan DS tersebut belum disetorkan ke Kas Negara hingga saat ini. Hal ini dikarenakan Bendahara Penerimaan menganggap kegiatan tersebut masih terkait sebagai kegiatan penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam hal ini Kemendikbudristek dan BPMP Prov. DKI Jakarta merupakan unit kerja pendukung kegiatan dan fungsi kementerian sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.06/2016 pasal 1 ayat (7) yang menyatakan pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Saat ini, dana tersebut tidak digunakan dan masih disimpan oleh Bendahara Penerimaan secara tunai dan tidak dibukukan dalam laporan keuangan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

2) BPMP Prov. Kalimantan Selatan senilai Rp20.955.000,00

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat bukti pembayaran dari Yayasan DS atas sewa asrama, ruang kelas, dan kebersihan kelas senilai Rp20.955.000,00 pada BPMP Prov. Kalimantan Selatan pada tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2023 yang diterima oleh Bagian Kerumahtanggaan BPMP Prov. Kalimantan Selatan.

Berdasarkan konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan BPMP Prov. Kalimantan Selatan diketahui bahwa setoran kegiatan tersebut belum dilaporkan oleh pihak kerumahtanggaan karena banyak kegiatan di bulan Oktober 2023 yang pelaksanaannya bersamaan dan Bendahara Penerimaan sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar. Hingga saat ini pendapatan tersebut belum disetorkan ke Kas Negara dan masih disimpan oleh Bagian Kerumahtanggaan.

3) BPMP Prov. NTB senilai Rp2.820.000,00

Realisasi Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung, Bangunan BPMP Prov. NTB Tahun 2023 adalah senilai Rp59.212.000,00. Berdasarkan bukti penerimaan negara diketahui terdapat penyetoran ke Kas Negara senilai Rp4.320.000,00 atas sewa asrama oleh Yayasan DS untuk penyewaan gedung dan bangunan pada BPMP Prov. NTB pada tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2023. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa bukti penerimaan sewa kamar dan ruang kelas dari Yayasan Damayu Sejahtera senilai Rp7.140.000,00 sehingga terdapat selisih Rp2.820.000,00.

Hasil konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan BPMP Prov. NTB, diketahui terjadi kekeliruan pembayaran konsumsi ke pihak katering, karena Bendahara Penerimaan tidak mengecek kembali nominal sewa yang tertera pada bukti pembayaran sewa pada saat akan melakukan penyetoran ke Kas Negara, dimana bukti pembayaran sewa ditandatangani oleh Kasubag Umum BPMP Prov. NTB. Adapun jumlah yang dibayarkan ke pihak catering senilai Rp15.900.000,00 sudah termasuk kekurangan penerimaan sewa kamar dan ruang kelas yang seharusnya disetor ke Kas Negara. Bendahara Penerima hanya menyetorkan sisa dana yang diterima dari Yayasan DS setelah dikurangi pembayaran ke katering.

Pada saat ini, Bendahara Penerimaan telah memintakan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut ke pihak katering untuk kemudian menyetorkannya ke Kas Negara.

4) BPMP Prov. Riau senilai Rp9.022.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat bukti pembayaran dari Yayasan DS atas sewa asrama dan ruang belajar yang diterima Bagian Sarana dan Prasarana BPMP Prov. Riau pada Tahun 2023 senilai Rp9.022.000,00 untuk penyewaan gedung dan bangunan pada BPMP Prov. Riau pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2023. Atas penerimaan sewa tersebut, Bagian Sarana dan Prasarana tidak segera menyerahkan ke Bendahara Penerimaan, sehingga tidak tercatat dalam LRA BPMP Prov. Riau.

5) BGP Prov. NTT senilai Rp3.500.000,00

Pemeriksaan atas pemanfaatan aset BMN pada BGP Prov. NTT terdapat dua gedung yang disewakan yakni Gedung Kober Pelangi dan Gedung TK Mentari. PKS Nomor 0073/B7.16/LK.01.02/2023 tanggal 31 Januari 2023 antara BGP Prov. NTT dengan Yayasan ACPB menunjukkan bahwa nilai sewa adalah senilai

Rp1.750.000,00/gedung/tahun sehingga total pendapatan sewa untuk dua gedung tersebut senilai Rp3.500.000,00. Pemeriksaan atas pembayaran sewa pemanfaatan BMN menunjukkan bahwa, Masa sewa berdasarkan PKS telah berakhir pada 31 Desember 2023, namun penerimaan atas sewa BMN tersebut sampai dengan akhir tahun 2023 belum dibayarkan. Hasil analisis atas PKS menunjukkan bahwa pihak penyewa harus membayar pada 31 Desember 2023 ke Kas Negara.

Pengelola BMN menjelaskan bahwa telah dilakukan penagihan ke pihak penyewa melalui surat tagihan dengan Nomor 631/B7.16/LK.01.02/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan secara lisan telah dikomunikasikan namun belum ada hasil. Lebih lanjut, pihak penyewa menyatakan belum cukup biaya untuk membayar sewa tersebut.

6) Itjen senilai Rp600.000,00

Salah satu penyewa kantin yaitu warung nasi padang dengan PKS Nomor 001/G1/RT.01.00/2023 tanggal 3 Januari 2023, belum membayar sewa kantin bulan Desember 2023 senilai Rp600.000,00 berdasarkan perjanjian sewa. Koordinator PNBP telah berupaya menagih melalui media telepon dan surat, namun tidak mendapat tanggapan.

e. Hibah UNICEF senilai Rp154.675.000,00 pada Ditjen PDM belum disahkan

Pada tahun 2023, Direktorat Sekolah Dasar (SD) Ditjen PDM menerima hibah dari UNICEF senilai Rp154.675.000,00. Hibah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan Webinar Edukasi Gizi ke sekolah, Rapat Koordinasi Kementerian Lembaga Modelling Program Gizi, Rapat Koordinasi Kementerian Lembaga tentang Kantin Sehat, dan *Joint Monitoring Visit* (JMV) Modelling Program Gizi di Kabupaten Tegal.

Hasil pemeriksaan terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Direktorat SD diketahui bahwa atas pendapatan dan belanja hibah tersebut belum dilakukan pengesahan hibah langsung sehingga belum tercatat sebagai belanja. Dari keterangan Tim Akuntansi dan Pelaporan Direktorat SD diketahui bahwa Direktur SD telah mengajukan revisi DIPA Tahun 2023 ke KPPN Kanwil Jakarta via aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada tanggal 6 Februari 2024 agar dapat dilakukan pengesahan hibah langsung.

Namun, hasil konfirmasi dari Tim Akuntansi dan Pelaporan Ditjen PDM, revisi DIPA Tahun 2023 Direktorat SD tidak dapat dilakukan, karena tidak termasuk dalam satker yang dapat melakukan revisi DIPA sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6/PB/PB.6/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Penyelesaian Rekonsiliasi dan Kualitas Data dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (K/L). Selain itu, diketahui Direktur SD belum mengajukan permohonan dispensasi revisi DIPA kepada Biro Keuangan dan BMN sehingga Direktorat SD tidak masuk dalam surat Biro Keuangan dan BMN Nomor 4249/A2/KU.03.02/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Permohonan Dispensasi.

Dana hibah UNICEF tersebut telah diterima pada Bulan Oktober 2023 dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dari Bulan Oktober s.d. Desember 2023. Dari kegiatan tersebut terdapat sisa dana senilai Rp28.825.000,00 dan telah dikembalikan ke rekening UNICEF pada tanggal 25 Januari 2024 (sesuai bukti transfer ke Standard Chartered Bank dengan nomor rekening 30608827891). Sehingga jumlah pengeluaran atas hibah tersebut senilai Rp125.850.000,00 (Rp154.675.000,00 – Rp28.825.000,00). Dari hasil pengujian atas bukti

pertanggungjawaban, diketahui bahwa seluruh bukti pertanggungjawaban telah disusun sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
   1) Pasal 3
      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Seluruh Aktivitas, hal, dan/atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP;
      b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kriteria: a. pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah; b. penggunaan dana yang bersumber dari APBN; c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau d. penetapan peraturan perundang-undangan;
   2) Pasal 29 yang menyatakan bahwa Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara;
b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Lampiran I pada PSAP nomor 02, Paragraf 24 yang menyatakan bahwa Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
c. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang BMN/D sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020
   1) Pasal 1 ayat (11) yang menyatakan bahwa Sewa adalah Pemanfaatan BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
   2) Pasal 29 ayat (7) yang menyatakan bahwa Sewa BMN/D dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat: (a) para pihak yang terkait dalam perjanjian, (b) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu, (c) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, dan (d) hak dan kewajiban para pihak;
d. PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN
   1) Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pihak yang dapat menyewakan BMN adalah (a) Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan (b) Pengguna Barang dengan persetujuan dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
   2) Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan: (a) Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; (b) Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang
e. PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 58/PMK.02/2023 pada pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara paling lambat

1) pada akhir hari kerja yang sama dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; atau

2) pada hari kerja berikutnya dalam hal pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau dalam hal diterima pada hari libur /hari yang diliburkan.

f. PMK Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah BAB VI tentang Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga Penerima Hibah huruf H. Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Rupiah paragraf 2 yang menyatakan bahwa Secara umum ringkasan tahapan pengesahan transaksi belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam rupiah (hibah langsung bentuk uang rupiah), Proses register hibah:

1) Penerbitan nomor register atas penerimaan hibah langsung bentuk uang yang diterima dari pemberi hibah luar negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko berdasarkan permohonan dari satker; dan

2) Penerbitan nomor register atas penerimaan hibah langsung bentuk uang yang diterima dari pemberi hibah dalam negeri dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan permohonan dari Satker.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Risiko lebih atau kurang pungut tarif PNBP atas pendapatan yang belum memiliki penetapan dari KPKNL serta PKS yang belum diperpanjang;

b. Membuka peluang terjadinya risiko penyalahgunaan PNBP pada Wisma Arga Mulya Biro Umum dan PBJ Setjen;

c. Berkurangnya pendapatan senilai Rp146.840.679,95 (Rp13.186.943,81 + Rp133.653.736,14) atas jasa giro yang dipotong pajak;

d. Negara tidak dapat segera memanfaatkan dana dari PNBP yang terlambat disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan senilai Rp132.699.971.291,00 dan penyewa yang terlambat membayar sewa BMN senilai Rp444.646.100,00;

e. Kekurangan penerimaan negara senilai Rp68.745.000,00 (Ditjen PDM senilai Rp64.645.000,00, Ditjen GTK senilai Rp3.500.000,00, dan Itjen senilai Rp600.000,00);

f. Kurang saji Penerimaan atas penggunaan langsung PNBP, penerimaan tidak disetor dan hibah belum disahkan senilai Rp969.099.251,00 (Rp745.679.251,00 + Rp68.745.000,00+ Rp154.675.000,00); dan

g. Kurang saji Belanja Barang atas penggunaan langsung PNBP dan hibah belum disahkan senilai Rp871.529.251,00 (Rp745.679.251,00+ Rp125.850.000,00).

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA terkait kurang berkoordinasi dengan bank mitra terkait pengenaan pajak atas jasa giro;

b. KPA terkait tidak mematuhi pengelolaan PNBP melalui mekanisme APBN;

c. KPA Ditjen PDM tidak segera mengajukan pengesahan hibah dan dispensasi revisi DIPA kepada DJA;

d. Pimpinan satker terkait belum mengusulkan tarif PNBP atas pemanfaatan BMN kepada KPKNL dan memproses perpanjangan PKS;

e. Pengelola PNBP pada masing-masing satker kurang optimal dalam melakukan pemungutan, serta penatausahaan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan; dan

f. Bendahara Penerimaan tidak cermat dalam penyetoran atas pendapatan yang dikelolanya ke Kas Negara sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan penatausahaan PNBP secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Terkait hal tersebut:

a. Itjen telah melakukan penyetoran senilai Rp600.000,00 tanggal 1 April 2024 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 73FC255DF98PRAQQ;

b. Ditjen PDM telah melakukan penyetoran senilai Rp64.645.000,00 dengan rincian:

   1) Rp1.576.000,00 tanggal 4 April 2024, NTPN E5F3A1JNFUV89BH3;

   2) Rp2.856.000,00 tanggal 4 April 2024, NTPN 013B455DF98PT91H;

   3) Rp4.590.000,00 tanggal 4 April 2024, NTPN 8577D3CIFK413A90;

   4) Rp31.848.000,00 tanggal 26 April 2024, NTPN 7CC0E55DF99I2JAD;

   5) Rp 20.955.000,00 tanggal 30 April 2024, NTPN 413457QLUP0QN1BG; dan

   6) Rp2.820.000,00 tanggal 30 April 2024, NTPN EEC521JNFV03RSRC.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Seluruh Pimpinan Unit Utama terhadap masing-masing satkernya supaya:

   1) segera menyetorkan PNBP yang diterima ke Kas Negara dalam waktu sesuai ketentuan;

   2) menyetorkan setiap PNBP ke Kas Negara seluruhnya (bruto) tanpa dipergunakan terlebih dahulu;

   3) mengusulkan penetapan tarif atas pemanfaatan BMN yang dikelolanya;

   4) membuat perjanjian pemanfaatan sewa yang sudah habis masa berlaku kontraknya;

b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi memerintahkan Rektor/Direktur pada Unimal, Polinela, Polman Bandung, Polban, Polnep supaya berkoordinasi dengan bank mitra untuk tidak mengenakan pajak atas jasa giro pada rekening pemerintah;

c. Sekjen, Dirjen Diksi, Irjen, Kepala BPP Bahasa, Pimpinan satker terkait belum mengusulkan tarif PNBP atas pemanfaatan BMN kepada KPKNL dan memproses perpanjangan PKS;

d. Sekjen Kemendikbudristek supaya memerintahkan Kepala Biro Umum dan PBJ:

1) menetapkan prosedur penatausahaan keuangan Wisma Arga Mulya;

2) segera menyetorkan PNBP yang diterima ke Kas Negara dalam waktu sesuai ketentuan;

e. Dirjen Kebudayaan supaya melakukan kajian naskah akademik terkait peraturan pengelolaan penerimaan dari kegiatan penyensoran iklan dan film;

f. Dirjen PDM supaya memerintahkan:

1) Kepala BPMP Prov. Papua melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan keuangan tuntutan ganti kerugian negara;

2) Direktur SD mengajukan pengesahan hibah UNICEF kepada KPPN;

g. Dirjen GTK memerintahkan Kepala BGP Prov NTT untuk menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan penerimaan negara senilai Rp3.500.000,00.

2. Pemungutan dan Pengembalian Uang Kuliah Tunggal Belum Sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

Ditjen Diktiristek merealisasikan PNBP Tahun 2023 (*audited*) senilai Rp9.803.406.062.642,00 atau 126,91% dari estimasi senilai Rp7.724.858.883.000,00. Sedangkan Ditjen Diksi merealisasikan PNBP Tahun 2023 senilai Rp1.545.070.724.403,00 (*audited*) atau 107,76% dari estimasi senilai Rp1.433.857.681.000,00. Realisasi PNBP tersebut diantaranya merupakan pendapatan jasa layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing satker pada Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah mengungkapkan permasalahan pemungutan dan pengembalian Uang Kuliah Tunggal (UKT). Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Mendikbudristek untuk menginstruksikan Dirjen Diktiristek dan dan Dirjen Diksi agar memerintahkan:

a. Rektor PTN dan Direktur Politeknik terkait untuk (1) menetapkan ketentuan terkait integrasi data Satuan Kredit Semester (SKS) yang diambil oleh mahasiswa masing-masing fakultas dengan sistem tagihan pembayaran UKT dan (2) menyesuaikan tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalanai cuti dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan enam SKS; dan

b. Kepala Biro Keuangan pada PTN dan Politeknik terkait untuk mengembalikan UKT sesuai dengan pedoman keuangan BLU.

c. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Universitas Mataram (UNRAM) untuk mengembalikan UKT sesuai pedoman pengelolaan keuangan BLU

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut telah ditindak lanjuti namun belum sesuai rekomendasi, karena belum ada hasil kajian ulang terkait ketentuan peralihan penyesuaian tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti, belum ada penyesuaian tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti, serta belum ada surat Rektor tentang instruksi pengembalian UKT.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan jasa layanan pendidikan pada satker di lingkungan Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi Tahun 2023 menunjukkan permasalahan yang sama atas pengembalian dan pemungutan UKT Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pengembalian UKT Tahun 2023 di enam satker pada Ditjen Diktiristek tidak sesuai pedoman BLU

Transaksi kas keluar yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada beberapa PTN dapat berupa pengisian kas rekening Bendahara Pengeluaran dan pengembalian UKT. Pengembalian UKT dapat diberikan kepada:

1) mahasiswa yang sudah terlanjur melunasi UKT s.d. semester berikutnya, namun dinyatakan lulus pada semester berjalan;

2) mahasiwa aktif yang mendapatkan bantuan UKT namun sudah terlebih dahulu melakukan pembayaran secara mandiri;

3) mahasiswa yang mendapatkan pemotongan UKT yang ditetapkan oleh Rektor, namun sudah secara penuh membayarkan UKT tersebut pada semester sebelumnya.

Mekanisme pengembalian UKT diawali dengan pendataan pengembalian UKT oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Pendataan ini meliputi rincian seluruh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa/keringanan/potongan/pembebasan UKT namun sudah melakukan pembayaran penuh UKT. Bagi mahasiswa aktif, pengembalian UKT berupa kompensasi UKT semester berikutnya. Namun, apabila mahasiswa tersebut sudah lulus maka akan dilakukan pengembalian UKT ke rekening yang bersangkutan. Seluruh pengembalian UKT akan ditetapkan dengan SK Rektor. Biro Akademik kemudian menyampaikan SK tersebut kepada Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi dasar penarikan dana dari rekening penerimaan operasional. Selanjutnya Biro Keuangan mendistribusikan dana tersebut kepada penerima yang sudah ditetapkan sesuai SK. Pengembalian UKT kemudian disahkan sebagai pengurang penerimaan UKT pada bulan bersangkutan. Sehingga, jumlah penerimaan UKT yang diinput ke SAKTI adalah penerimaan UKT yang sudah dikurangi dengan pengembalian UKT.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pengembalian atas penerimaan UKT tahun 2020, 2021 dan 2022 senilai Rp7.149.259.500,00 yang dihitung sebagai pengurang pendapatan tahun 2023. Seharusnya pengembalian untuk UKT Tahun 2020, 2021, dan 2022 tersebut sebagai pengeluaran atau belanja yang akan berdampak pada ekuitas pada Laporan Keuangan (LK) PTN. Hal ini karena penerimaan UKT tersebut sudah disahkan menjadi pendapatan pada tahun berkenaan. Dengan demikian terdapat penerimaan tahun 2023 yang tidak disahkan dan digunakan langsung untuk pengembalian UKT tahun sebelumnya senilai Rp7.149.259.500,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 12. Rincian Pengembalian UKT Tahun 2023 atas Penerimaan UKT Tahun Sebelumnya

No.	PTN	UKT 2020 (Rp)	UKT 2021 (Rp)	UKT 2022 (Rp)	Total (Rp)
1	Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)	-	4.800.000,00	216.500.000,00	221.300.000,00
2	Universitas Lampung (UNILA)	-	-	212.450.000,00	212.450.000,00
3	UPNVJ	-	-	234.028.000,00	234.028.000,00

No.	PTN	UKT 2020 (Rp)	UKT 2021 (Rp)	UKT 2022 (Rp)	Total (Rp)
4	Universitas Pendidikan Ganesha	-	-	53.100.000,00	53.100.000,00
5	Universitas Halu Oleo (UHO)	57.750.000,00	112.027.000,00	6.271.354.500,00	6.383.381.500,00
6	UPN Veteran Jawa Timur	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00
Total		**57.750.000,00**	**116.827.000,00**	**7.032.432.500,00**	**7.149.259.500,00**

b. Pemotongan UKT kepada mahasiswa pada satker di Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi tidak sesuai ketentuan

Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kemendikbud menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan enam SKS maka mahasiswa membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT. Selain itu, mahasiswa yang sedang cuti kuliah dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.

Hasil pemeriksaan atas data pembayaran UKT dan data akademik yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) dan Bendahara Penerimaan menunjukkan bahwa terdapat mahasiswa yang seharusnya mendapatkan keringanan UKT sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, namun tetap membayarkan UKT secara penuh sebagai berikut.

1) Mahasiswa semester akhir yang mengambil ≤ enam SKS di lima satker pada Ditjen Diktiristek

Beberapa PTN sudah memberlakukan keringanan UKT sesuai dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020. Namun, pemberlakukan ini diterapkan pada mahasiswa yang mengajukan keringanan saja, di mana PTN tidak secara otomatis melakukan penyesuaian tagihan UKT atas mahasiswa semester akhir yang mengambil kurang dari atau sama dengan enam SKS.

Hasil pemeriksaan atas data pembayaran UKT menunjukkan bahwa terdapat 9.833 mahasiswa yang mengambil kurang dari atau sama dengan enam SKS namun membayarkan UKT secara penuh sehingga menyebabkan kelebihan penerimaan UKT senilai Rp13.888.027.667,00 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Kelebihan Pungutan atas UKT Mahasiswa Semester Akhir yang Mengambil Mata Kuliah ≤ Enam SKS

No.	PTN	Periode Akademik	Jumlah Mahasiswa	Total Kelebihan Pungutan (Rp)	Lampiran
1	Universitas Pendidikan Ganesha	Genap 2022/2023	2	562.500,00	Lampiran A.2.1
		Ganjil 2023/2024	174	35.375.000,00	
2	UHO	Genap 2022/2023	802	855.887.500,00	Lampiran A.2.2
		Ganjil 2023/2024	1.244	1.407.525.000,00	
3	Universitas Negeri Makassar (UNM)	Genap 2022/2023	1.736	2.656.600.000,00	Lampiran A.2.3
		Ganjil 2023/2024	762	1.151.625.000,00	
4	Universitas Tanjungpura (Untan)	Genap 2022/2023	1.887	2.907.089.500,00	Lampiran A.2.4
		Ganjil 2023/2024	2.390	3.511.613.167,00	Lampiran A.2.5
5		Genap 2022/2023	296	489.750.000,00	Lampiran A.2.6

No.	PTN	Periode Akademik	Jumlah Mahasiswa	Total Kelebihan Pungutan (Rp)	Lampiran
	UPN Veteran Jawa Timur	Ganjil 2023/2024	540	872.000.000,00	Lampiran A.2.7
Jumlah			**9.833**	**13.888.027.667,00**	

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran A.2.1** s.d. **Lampiran A.2.7**.

Berdasarkan penjelasan Bendahara Penerimaan dan Koordinator Bidang Akademik diketahui bahwa mekanisme pengembalian untuk mahasiswa tingkat akhir yang mengambil mata kuliah ≤ enam SKS, dilakukan berdasarkan pengajuan dari mahasiswa kepada masing-masing fakultas. Pengajuan dimaksud akan diverifikasi untuk menentukan mahasiswa yang akan ditetapkan dalam SK Rektor terkait keringanan UKT. Dengan mekanisme tersebut, proses pengembalian atas kelebihan pembayaran UKT tidak akan dilakukan kepada mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan UKT.

2) Mahasiswa yang menjalani cuti akademik di empat satker pada Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi

a) Dua satker pada Ditjen Diktiristek senilai Rp27.575.000,00

Proses cuti pada masing-masing PTN memiliki prosedur yang beragam. Pada beberapa PTN, proses cuti akademik diawali dengan permohonan cuti dari mahasiswa kepada Dekan melalui Kepala Prodi (Kaprodi). Jika cuti tersebut disetujui, maka Dekan akan menerbitkan surat keterangan cuti. Staf Biro Akademik akan melakukan *update* (*flagging*) pada Sistem Informasi Akademik atas nama mahasiswa bersangkutan dan melakukan penginputan nomor surat keterangan cuti tersebut setelah menerima surat keterangan cuti akademik tersebut dari fakultas. Selain proses cuti tersebut, pada beberapa PTN terdapat pula proses cuti yang sepenuhnya langsung diproses oleh Biro Akademik sehingga mahasiswa melakukan pengajuan bukan dari Fakultas, melainkan langsung ke Biro Akademik. Hasil pemeriksaan atas data cuti menunjukkan bahwa masih dilakukan pemungutan UKT pada mahasiswa yang menjalani cuti sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Kelebihan Pungutan UKT atas Mahasiswa yang Menjalani Cuti

No.	PTN	Periode Akademik	Jumlah Mahasiswa	Total Kelebihan Pungutan (Rp)	Lampiran
1	UNILA	Genap 2022/2023	2	8.950.000,00	Lampiran A.2.8
		Ganjil 2023/2024	1	1.000.000,00	
2	UHO	Genap 2022/2023	1	3.500.000,00	Lampiran A.2.9
		Ganjil 2023/2024	4	14.125.000,00	
Jumlah			**8**	**27.575.000,00**	

Rincian perhitungan kelebihan dapat dilihat pada **Lampiran A.2.8** dan **Lampiran A.2.9**.

b) Dua satker pada Ditjen Diksi senilai Rp146.100.000,00

Hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran UKT mahasiswa cuti pada satker di lingkungan Ditjen Diksi menunjukkan bahwa terdapat mahasiswa yang menjalani cuti akademik namun masih dikenakan UKT pada dua satker, yaitu Politeknik Negeri Batam (Polibatam) dan Polimedia total senilai Rp146.100.000,00 **(**Rp23.150.000,00 + Rp122.950.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Polibatam

Peraturan Direktur Polibatam Nomor 011 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembelajaran Mahasiswa Polibatam Tahun 2023 pada Pasal 24 mengatur bahwa mahasiswa yang menjalankan cuti akademik membayar biaya cuti. Besaran biaya cuti dicantumkan dalam pengumuman terkait daftar ulang setiap semester yaitu senilai 20% dari UKT semester yang terakhir dibayarkan oleh mahasiswa. Ketentuan terkait biaya cuti tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang membebaskan mahasiswa yang menjalani cuti akademik dari pembayaran UKT.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Polibatam memungut biaya cuti senilai 20% dari UKT kepada 24 mahasiswa program D3 dan D4 yang menjalani cuti akademik pada Semester Genap Tahun 2022/2023 dan Semester Gasal Tahun 2023/2024 dengan total senilai Rp23.150.000,00 dengan rincian pada **Lampiran A.2.10.**

Hasil wawancara dengan Bagian Akademik Polibatam menunjukkan bahwa pungutan biaya cuti tersebut dikenakan pada mahasiswa karena mengacu pada Peraturan Direktur Polibatam Nomor 011 Tahun 2023.

(2) Polimedia

Keputusan Senat Polimedia Nomor 2800/PL27.22/HK.00.15/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pengelolaan Pendidikan Polimedia pada Bab VIII - Cuti Akademik mengatur bahwa cuti akademik terdiri atas cuti akademik direncanakan, tidak direncanakan, akibat mengulang dan akibat ketidakhadiran. Ketentuan pengajuan dan pembayaran UKT atas mahasiswa cuti sebagai berikut.

(a) Cuti akademik direncanakan diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pertama registrasi. Bila di luar masa pengajuan dikenakan 100% SPP.

(b) Cuti akademik tidak direncanakan diberikan atas kehendak mahasiswa, diajukan dalam masa 30 hari setelah hari pertama registrasi, dikenakan 25% SPP.

(c) Cuti akademik akibat mengulang disebabkan mahasiswa mendapat status tidak lulus memperoleh nilai D/E, dikenakan 25% SPP.

(d) Cuti akademik akibat ketidakhadiran diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah ketidakhadiran minimal 114 jam dalam satu semester, dikenakan 25% SPP.

Berdasarkan data dari Bagian Akademik Polimedia memberikan ijin cuti kepada 151 mahasiswa pada Semester Genap Tahun 2022/2023 dan 213 mahasiswa pada Semester Gasal Tahun 2023/2024. Mahasiswa tersebut dikenakan pembayaran 25% UKT sesuai Keputusan Senat Polimedia di atas. Tagihan pembayaran UKT atas mahasiswa dengan status cuti tersebut senilai Rp487.050.000,00 dan telah dibayar serta disetor ke Kas Negara senilai Rp122.950.000,00 dengan rincian pada **Lampiran A.2.11**.

Hasil wawancara dengan Bagian Akademik Polimedia diketahui bahwa penetapan nilai UKT atas mahasiswa cuti telah berjalan sejak tahun 2018 sesuai Keputusan Direktur Nomor 1176/PL27/HK.08/2018 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan Polimedia. Keputusan Direktur tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan UKT pada PTN di lingkungan Kemenristekdikti yang telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017. Namun kedua peraturan tersebut tidak menyebutkan ketentuan mengenai pembayaran UKT atas mahasiswa cuti.

c. Mahasiswa Polimedia dipungut biaya kontribusi wisuda senilai Rp1.290.000,00

Saldo RPL pada BRI Nomor 165701000014304 milik Polimedia per 31 Desember 2023 antara lain terdiri dari biaya kontribusi wisuda senilai Rp1.290.000,00. Hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan Polimedia diketahui bahwa dana dari biaya kontribusi wisuda tersebut dibayar atas nama Sdr. T senilai Rp590.000,00 dan Sdr. N senilai Rp700.000,00 yang merupakan persyaratan pengambilan ijazah yang tertunda pada tahun ajaran saat mahasiswa tersebut lulus.

Pembayaran kontribusi wisuda tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa biaya wisuda sudah termasuk dalam perhitungan SSBOPT sebagai biaya langsung yang menjadi dasar dalam menetapkan BKT dan UKT. Selain itu dalam Keputusan Senat Polimedia Nomor 2800/PL27.22/HK.00.15/2022 sudah tidak menerapkan biaya kontribusi wisuda tersebut.

d. Pendapatan jasa layanan pendidikan pada POLINELA tidak disetorkan langsung ke rekening Bendahara Penerimaan senilai Rp4.331.075.000,00

LRA Ditjen Diksi Tahun 2023 menyajikan saldo Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp4.357.736.468,00 (*audited*) atau meningkat senilai Rp4.355.736.468,00 (217.786,82%) dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 senilai Rp2.000.000,00 (*audited*). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNBP. Saldo Kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2023. Satker pada Ditjen Diksi yang menyajikan saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 15. Rincian Satker yang Menyajikan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

No	Satker	Jumlah (Rp)	Keterangan	Penyetoran ke Kas Negara
1	Politeknik Perikanan Negeri Tual	61.468,00	Rekening Bank	24 Januari 2024
2	AKN Rejang Lebong	2.000.000,00	Tunai	5 Januari 2024
3	AKN Seni dan Budaya	600.000,00	Tunai	29 Januari 2024
4	AKN Aceh Barat	24.000.000,00	Rekening Bank	12 Januari 2024
5	POLINELA	4.331.075.000,00	Rekening Bank	8 Januari 2024
Jumlah		**4.357.736.468,00**		

Hasil pemeriksaan atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada POLINELA senilai Rp4.331.075.000,00 diketahui bahwa pada 31 Desember 2023 saldo Kas tersebut tidak berada di rekening Bendahara Penerimaan karena saldo rekening Bendahara Penerimaan

POLINELA pada Bank Mandiri nomor 0098-01-003856-30-8 atas nama BPN 017 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG menunjukkan bahwa saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan tersebut per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,00/tidak ada saldo. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 POLINELA dan Ditjen Diksi menjelaskan bahwa saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut berada pada tiga RPL selain rekening Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 16. Rekening yang Menampung Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 31 Des 2023

No	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
A	Pendapatan Pendidikan (425412)			
1	BNI	0071059905	Politeknik Negeri Lampung	3.222.525.000,00
2	BRI	009801003856308	RPL 017 PS POLINELA	6.000.000,00
3	PT Bank Lampung	3800003052303	Politeknik Negeri Lampung	1.100.000.000,00
Jumlah (A)				**4.328.525.000,00**
B	Pendapatan Pendidikan Lainnya (425419)			
1	BNI	0071059905	Politeknik Negeri Lampung	2.550.000,00
Jumlah (B)				2.550.000,00
Jumlah (A) + (B)				**4.331.075.000,00**

Hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa pendapatan jasa layanan pendidikan senilai Rp4.331.075.000,00 tersebut dibayarkan oleh mahasiswa tidak melalui rekening Bendahara Penerimaan melainkan disetorkan ke rekening penampungan lain sebagaimana tabel di atas. Menurut Bendahara Penerimaan, hal tersebut untuk memudahkan pembukuan di Bendahara Penerimaan. Saat mahasiswa melakukan pembayaran ke rekening penampungan, Bendahara Penerimaan akan melakukan rekapitulasi jumlah mahasiswa yang melakukan pembayaran kemudian menyetorkan penerimaan tersebut ke rekening Bendahara Penerimaan. Selanjutnya penerimaan yang telah diterima di rekening Bendahara Penerimaan tidak langsung disetorkan ke Kas Negara karena proses validasi pembayaran. Penerimaan pendapatan jasa layanan pendidikan yang tidak disetorkan langsung ke rekening Bendahara Penerimaan menyebabkan keterlambatan penyetoran ke Kas Negara dan risiko penyalahgunaan penerimaan tersebut karena masuk ke RPL.

Pada saat penyusunan LK Tahun 2023, Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Setditjen Diksi meminta penyusun Laporan Keuangan Polinela untuk melakukan koreksi pencatatan pada *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) dan telah dilakukan koreksi dari akun Kas Lainnya ke Kas di Bendahara Penerimaan atas saldo Kas Lainnya yang merupakan penerimaan pendapatan layanan pendidikan. Saldo pada RPL yang merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan disetorkan langsung ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2024 tanpa melalui pemindahbukuan dari RPL ke rekening Bendahara Penerimaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Lampiran 1

   1) PSAP Nomor 02, Paragraf 7 (Definisi) yang menyatakan bahwa Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan

pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

2) PSAP Nomor 02, Paragraf 24 yang menyatakan bahwa Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3) PSAP Nomor 12, Paragraf 26 yang menyatakan bahwa Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Pasal 14:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU.

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.

3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU.

4) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA Definitif.

c. PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU

1) Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk pertanggungjawaban pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan/atau belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang dapat digunakan langsung, BLU mengajukan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU kepada KPPN paling kurang satu kali dalam satu triwulan.

2) Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan BLU terdiri atas: (1) pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, (b) hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, (c) hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, (d) penerimaan lainnya yang sah, dan/atau (e) penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN (rupiah murni).

3) Pasal 69 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaporkan sebagai PNBP K/L.

4) Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan pertanggungjawaban pendapatan BLU berupa pengesahan pendapatan kepada KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64;

5) Pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyaluran belanja terkait dengan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b dilakukan dengan transfer dana secara langsung dari Rekening Operasional Pengeluaran BLU/Rekening Operasional BLU atau Rekening Dana Kelolaan BLU pada rekening pihak ketiga.

d. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang SSBOPT pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kemendikbud

   1) Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menetapkan BKT.

   2) Pasal 4:

      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa SSBOPT dihitung berdasarkan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

      b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi.

   3) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa BKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan dasar penetapan besaran UKT oleh PTN pada setiap Program Studi.

   4) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:

      a) Semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau

      b) Semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga.

      Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

   5) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

   6) Lampiran Penghitungan SSBOPT Huruf C. Model Pembiayaan Angka 2. Komponen Biaya Langsung yang menyatakan bahwa Biaya langsung terdiri dari empat jenis antara lain kegiatan tugas akhir/skripsi: tugas akhir, skripsi, seminar, uji komprehensif, pendadaran, dan wisuda.

e. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016

   1) Pasal 15 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara harus menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.

   2) Pasal 16:

      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan menatausahakan semua uang yang dikelolanya baik yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi penerimaan negara.

      b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penyetorannya secara khusus, Bendahara Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam rekening yang telah mendapat persetujuan BUN/Kuasa BUN.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Pengembalian UKT yang belum sesuai mekanisme BLU mengakibatkan nilai pendapatan dan belanja di enam satker terkait pada Ditjen Diktiristek tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
b. Potensi kelebihan pemungutan UKT atas:
    1) Mahasiswa semester akhir yang mengambil kurang dari atau sama dengan enam SKS di lima satker pada Ditjen Diktiristek senilai Rp13.888.027.667,00; dan
    2) Mahasiswa cuti di empat satker pada Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi senilai Rp173.675.000,00 (Rp27.575.000,00 + Rp146.100.000,00);
c. Kelebihan pemungutan biaya kontribusi wisuda pada Polimedia senilai Rp1.290.000,00; dan
d. Risiko penyalahgunaan pendapatan pada POLINELA yang diterima di RPL Bendahara Pengeluaran senilai Rp4.331.075.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Biro Keuangan pada enam PTN belum melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan pengembalian UKT;
b. Kepala Biro Akademik dan Biro Keuangan pada PTN dan Politeknik terkait tidak menyesuaikan tagihan UKT atas mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan enam SKS dan mahasiswa cuti;
c. Direktur Polimedia kurang cermat dalam menetapkan pungutan biaya kontribusi wisuda yang tidak sesuai ketentuan; dan
d. Direktur POLINELA dalam membuat kebijakan terkait penyetoran pendapatan atas jasa layanan pendidikan tidak langsung ke rekening Bendahara Penerimaan.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan pemungutan dan pengembalian UKT secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Terkait hal tersebut, Polimedia telah melakukan penyetoran ke Kas Negara tanggal 4 Maret 2024 dengan NTPN 01E7B3CIFK129BVA senilai Rp1.290.000,00.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya:

a. Memerintahkan Rektor PTN dan Direktur Politeknik terkait untuk:
    1) Menetapkan kebijakan terkait integrasi data SKS yang diambil oleh mahasiswa masing-masing fakultas dengan sistem tagihan pembayaran UKT;
    2) Memerintahkan Kepala Biro Akademik dan Kepala Biro Keuangan pada PTN dan Politeknik terkait untuk ke depannya menyesuaikan tagihan UKT atas mahasiswa yang

menjalani cuti dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan enam SKS; dan

b. Memerintahkan Direktur POLINELA untuk mengkaji ulang kebijakan mekanisme pembayaran UKT khususnya terkait perubahan rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan.

3. Pengelolaan Pendapatan BLU Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

LRA Kemendikbudristek Tahun 2023 (*audited*) menyajikan realisasi Pendapatan BLU senilai Rp9.798.800.900.626,00 atau senilai 128,60% dari estimasi senilai Rp7.619.801.072.000,00.

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 mengungkapkan permasalahan, antara lain: a) pendapatan PTN BLU tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU dan digunakan tanpa melalui pengesahan serta pertanggungjawaban belanja tidak didokumentasikan dengan baik; b) tarif pendapatan belum ditetapkan pejabat yang berwewenang; c) pembayaran sewa BMN oleh pihak ketiga tidak tepat waktu; d) penerimaan jasa giro dan bunga pada rekening PTN dikenakan pajak penghasilan; dan e) pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan BMN pada PTN tidak sesuai peraturan pengelolaan BMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan Rektor PTN dan Direktur Politeknik terkait antara lain agar: a) memerintahkan SPI untuk melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan pendapatan, penggunaan rekening, dan pemanfaatan BMN melalui reviu periodik; b) memperbaiki perjanjian antara PTN dan bank mitra yang ditandatangani oleh Rektor dan pihak bank mitra terkait klausul pengenaan pajak rekening sesuai peraturan yang berlaku; dan c) membuat PKS sebagai dasar pelaksanaan kerja sama pemanfaatan BMN. Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi karena belum ada hasil reviu periodik SPI terkait pengelolaan pendapatan, penggunaan rekening dan pemanfaatan BMN serta belum ada PKS sebagai dasar pelaksanaan kerja sama pemanfaatan BMN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan BLU masih ditemukan permasalahan sebagai berikut.

a. Pendapatan BLU tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp5.669.893.081,00 dan digunakan tanpa melalui pengesahan senilai Rp5.320.937.272,00

1) Ditjen Diktiristek

a) Pendapatan BLU pada Untan tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp18.600.000,00 dan digunakan tanpa melalui pengesahan senilai Rp17.566.435,00

Wisma Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Untan digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa dengan tarif senilai Rp100.000,00 per mahasiswa per bulan. Namun, pada kenyataannya belum terdapat peraturan internal seperti SK yang mengatur tarif terkait penggunaan wisma PGSD.

Pembayaran dari mahasiswa dilakukan secara tunai ke pengelola wisma yang digunakan secara langsung untuk operasional wisma. Berdasarkan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran selama Tahun 2023, diketahui bahwa terdapat pendapatan senilai Rp18.600.000,00. Penerimaan tersebut telah digunakan langsung tanpa pengesahan senilai Rp17.566.435,00, sehingga tersisa uang tunai senilai Rp1.033.565,00.

Pengelola wisma PGSD menjelaskan bahwa seluruh pendapatan dan belanja selama Tahun 2023 tidak dilaporkan kepada bagian keuangan, sehingga seluruhnya tidak terkonsolidasi dalam laporan keuangan Untan.

b) Pendapatan BLU pada Universitas Nusa Cendana (Undana) tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp205.313.500,00 dan digunakan tanpa melalui pengesahan senilai Rp190.756.000,00

Penerimaan pendapatan yang digunakan tanpa melalui pengesahan pada Undana diantaranya:

(1) Penerimaan pendapatan dari lima unit usaha senilai Rp187.506.000,00 Pengeluaran atas pendapatan tersebut berdasarkan permintaan manajer dari masing masing unit usaha sesuai kebutuhan, tanpa melalui otorisasi Kepala Badan Pengelola Usaha (BPU). Bukti transaksi atas pengeluaran tersebut didokumentasikan oleh petugas pembukuan BPU. Penggunaan langsung diantaranya dibelanjakan untuk biaya wifi, *automatic air*, *laundry*, BBM, bahan bangunan, media *converter*, gula dan kopi, taplak meja, sarung meja dan kursi, oli, dan uang makan untuk petugas lembur dan ATK.

Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti transaksi pengeluaran terhadap petugas pembukuan diketahui bahwa, terdapat bukti pengeluran uang kas tanpa dilengkapi dengan bukti transaksi pada Graha Undana. Penerimaan Graha Undana yang digunakan langsung senilai Rp60.868.500,00.

(2) Hasil pemeriksaan menunjukkan per 31 Desember 2023 masih terdapat kas tunai senilai Rp17.807.500,00 yang disimpan secara tunai oleh petugas pembukuan BPU. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai saat pemeriksaan, uang tersebut telah dibelanjakan senilai Rp3.250.000,00, disetor ke rekening operasional penerimaan BPU senilai Rp7.121.000,00. Sisanya senilai Rp7.436.000,00 masih disimpan oleh petugas pembukuan dalam bentuk kas tunai. Petugas pembukuan tidak menyetorkan semua penerimaan pendapatan sesuai dengan instruksi tidak tertulis dari Kepala BPU. Uang tunai tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional BPU yang tidak dianggarkan dalam RBA.

c) Pendapatan BLU pada UHO tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp298.833.000,00 dan digunakan tanpa melalui pengesahan senilai Rp135.560.375,00

Penerimaan penyelenggaraan konferensi ilmiah pada UHO diperoleh dari pembayaran peserta atas biaya registrasi, biaya publikasi dan dana sponsorship pihak ketiga. Pembayaran atas biaya registrasi dan/atau biaya publikasi pada Non Pasca Sarjana dilakukan melalui rekening pribadi panitia. Sedangkan, pembayaran pada kegiatan konferensi ilmiah yang dilaksanakan oleh Program Pasca Sarjana,

dilakukan melalui rekening unit yang diperuntukkan untuk pengelolaan kas jurnal. Sampai dengan saat ini, rekening tersebut belum memiliki ijin pembukaan dari Kementerian Keuangan. Daftar rekening pengelolaan kas masing-masing kegiatan konferensi ilmiah adalah sebagai berikut.

Tabel 17. Daftar Rekening Pengelolaan Kas Kegiatan Konferensi Ilmiah UHO

No	Nama Konferensi Ilmiah	Fakultas Penyelenggara	Rekening
1	*The 1st* Halu Oleo *International Conference on Pharmacy, Health, and Applied Sciences* (HICPHAS 2023)	Fakultas Farmasi	BNI 0306959039 a.n. Sdri. SRNJ
2	*The 2nd International Conference on Maritime Infrastructure and Development* (ICMID 2023)	Fakultas Teknik	BNI 0290039217 a.n. Sdr. DM
3	*The 2nd International Conference on Mathematics and Science Education* (ICMSE 2023)	Fakultas Keguruan dan Ilmu endidikan (FKIP)	Bank Muamalat 8210070048 a.n. Sdr. MAW
4	*The 3rd Halu Oleo International Conference on Agriculture and Food Security* (HICAFS 2023)	Fakultas Pertanian	BCA 7245231598 a.n. Sdri. RHF
5	*The 1st Halu Oleo International Conference on Public Health* (HOICPH 2023)	Fakultas Kesehatan Masyarakat	BNI 1175527359 a.n. Suriani
6	*The 1st International Conference Medical and Health Science* Halu Oleo (IMHO 2023)	Fakultas Kedokteran	BRI 064601018299538 a.n. IMHO Fakultas Kedokteran UHO
7	*International Conference on Improving Tropical Animal Production for Food Security* (ITAPS 2023)	Fakultas Peternakan	BCA 7911155285 a.n. Sdri. PDI
8	*The 1st International International Interdisciplinary Conference* (ICC 2023)	Program Pasca Sarjana	BNI 0902210436 a.n. Pengelola Jurnal Pascasarjana UHO

Penerimaan yang bersumber dari kontribusi peserta dan sponsor pada delapan kegiatan konferensi ilmiah senilai Rp298.833.000,00. Namun dari penerimaan tersebut, senilai Rp135.560.375,00 telah digunakan langsung untuk honor juri, moderator, narasumber internal, dan pengeluaran operasional lainnya. Dengan demikian, masih terdapat sisa penerimaan yang belum digunakan senilai Rp163.272.625,00 (Rp298.833.000,00 – Rp135.560.375,00) yang seluruhnya masih terdapat pada rekening panitia (rincian dalam **Lampiran A.3.1**).

Ketua Panitia menjelaskan bahwa pertimbangan utama penerimaan tersebut tidak disetorkan ke rekening UHO adalah kepraktisan dan kemudahan dalam pencairan dan penggunaannya. Lebih lanjut, sisa dana tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran ke pihak penerbit jurnal/prosiding dalam rangka publikasi artikel yang dipresentasikan pada saat kegiatan konferensi ilmiah.

2) Ditjen Diksi

a) Kerja sama penggunaan laboratorium pada Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp1.085.650.350,00 dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan belanja senilai Rp955.987.758,00

Hasil kerja sama penggunaan laboratorium/bengkel pada empat jurusan yaitu Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil senilai Rp1.148.172.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Pendapatan Hasil Kerja Sama Penggunaan Laboratorium/Bengkel

No	Jurusan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Tidak Disetor ke Rekening BLU (Rp)	Penggunaan Langsung Tanpa Pengesahan (Rp)
1	Teknik Kimia	12.090.000,00	10.880.000,00	10.745.500,00
2	Teknik Elektro	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3	Teknik Mesin	139.235.000,00	126.703.850,00	124.151.633,00
4	Teknik Sipil*)	991.847.500,00	943.566.500,00	816.590.625,00
Jumlah		**1.148.172.500,00**	**1.085.650.350,00**	**955.987.758,00**

*) Penerimaan dari kerja sama Januari s.d. November 2023

Tabel di atas menunjukkan adanya penggunaan langsung atas pendapatan yang diterima tanpa melalui pengesahan. Atas pendapatan kerja sama penggunaan laboratorium/bengkel tersebut sebagian telah disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan BLU pada tahun 2024 sebagai bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) PNUP senilai Rp62.523.000,00. Sedangkan yang tidak disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp1.085.650.350,00 dan digunakan langsung untuk pembayaran honorarium dan biaya operasional jurusan/laboratorium tanpa melalui pengesahan senilai Rp955.987.758,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Pendapatan pada Teknik Kimia tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp10.880.000,00 dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp10.745.500,00

Jurusan Teknik Kimia selama Tahun 2023 menerima pendapatan dari 10 kerja sama senilai Rp12.090.000,00. Besaran tarif kerja sama menggunakan tarif yang selama ini digunakan yang menyesuaikan dengan harga pasar dan jenis pengujian yang dilakukan. Kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam PKS. Pihak ketiga biasanya datang langsung ke laboratorium untuk melakukan pengujian.

Pendapatan atas kerja sama penggunaan laboratorium dibayarkan setelah pengujian selesai dilaksanakan dengan bukti berupa kuitansi sebagai tanda terima. Pembayaran dilakukan secara tunai dan diterima oleh petugas di laboratorium. Pembagian atas pendapatan laboratoriun sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 19. Pembagian Pendapatan dari Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel Teknik Kimia

No	Uraian	%	Jumlah Penerimaan (Rp)	Digunakan Langsung Tanpa Pengesahan (Rp)
1	Biaya pelaksanaan/ operasional	50	6.045.000,00	6.045.000,00
2	Dana Pengembangan Jurusan			
a	Pengembangan Jurusan	30%	4.835.000,00	4.700.000,00
b	PNUP	20%	1.210.000,00	
	Jumlah		**12.090.000,00**	**10.745.000,00**

Penjelasan dari tabel di atas diuraikan sebagai berikut.

(a)) Biaya jasa pengujian laboratorium senilai 50% dari pendapatan yang diterima atau senilai Rp6.045.000,00 diserahkan kepada Bendahara Jurusan secara tunai/ transfer ke rekening pribadi Bendahara Jurusan untuk honor pekerja Laboratorium;

(b)) Senilai Rp4.835.000,00 disimpan di dalam rekening pribadi Bendahara Jurusan dan telah digunakan untuk membiayai kegiatan jurusan antara lain untuk konsumsi, pembelian bahan dan peralatan laboratorium senilai Rp4.700.500,00 dengan persetujuan Ketua Jurusan. Sisa dana senilai Rp134.500,00 (Rp4.835.000,00 – Rp4.700.500,00); dan

(c)) Senilai Rp1.210.000,00 disetor ke rekening Bendahara Penerimaan tanggal 29 Februari 2024.

Dengan demikian pendapatan laboratorium Teknik Kimia yang tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp10.880.000,00 (Rp12.090.000,00 – Rp1.210.000,00) dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp10.745.500,00.

(2) Pendapatan pada Teknik Elektro tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp4.500.000,00

Laboratorium/bengkel pada jurusan Teknik Elektro selama Tahun 2023 menerima pendapatan dari kerja sama praktikum mahasiswa untuk penggunaan laboratorium mesin listrik dari Universitas Fajar selama tiga hari senilai Rp5.000.000,00. Belum ada Keputusan Direktur PNUP terkait besaran tarif atas kerja sama tersebut. Besaran tarif kerja sama menggunakan tarif yang selama ini digunakan yang menyesuaikan dengan harga pasar dan jumlah mahasiswa yang melaksanakan praktikum. Kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam PKS.

Pendapatan kerja sama laboratorium dibayarkan sebelum kegiatan praktikum dimulai secara tunai kepada Kepala Prodi D4 Listrik untuk selanjutnya diberikan kepada Ketua Jurusan. Selanjutnya pendapatan didistribusikan kepada petugas terkait setelah berkonsultasi dengan Kepala Laboratorium dan Kepala Prodi D4 Listrik dengan persentase sesuai dengan Peraturan Direktur PNUP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama PNUP sebagai berikut.

Tabel 20. Pembagian Pendapatan dari Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel Teknik Elektro

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Keterangan Pendistribusian
1	Jasa Pembawa Order	5%	250.000,00	Kepala Prodi D4 listrik
2	Biaya Pelaksanaan/Operasional	70%		
	Pemateri sebanyak 6 orang 3 hari		3.000.000,00	Staf pada Laboratorium
	Pendamping sebanyak 2 orang		500.000,00	
3	SHU	25%		
a	HI (Persediaan Operasional)	5%	62.500,00	Disetor ke rekening Bendahara
b	Pengembangan PNUP (PNBP)	25%	312.500,00	

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Keterangan Pendistribusian
c	Utilitas PNUP (PNBP)	5%	62.500,00	Penerimaan PNUP senilai Rp500.000,00 pada tanggal 14 Maret 2024
d	Pengelola PNUP	5%	62.500,00	
e	*Maintanence* Jurusan	15%	187.500,00	Uang senilai Rp750.000,00 dipegang dan dicatat pengeluarannya oleh Sekretaris Jurusan
f	Pengembangan Jurusan	15%	187.500,00	
g	Pengelola Jurusan	20%	250.000,00	
h	Ketua Jurusam	10%	125.000,00	
Jumlah			**5.000.000,00**	

Dari tabel di atas menunjukkan pendapatan penggunaan laboratorium Teknik Elektro senilai Rp5.000.000,00 tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU, dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp4.500.000,00 (Rp5.000.000,00 – Rp500.000,00).

(3) Pendapatan pada Teknik Mesin tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp126.703.850,00 dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp124.151.633,00

Laboratorium/bengkel pada jurusan Teknik Mesin selama Tahun 2023 menerima pendapatan dari 55 kerja sama pangujian sampel senilai Rp139.235.000,00. Belum ada Keputusan Direktur PNUP terkait besaran tarif atas kerja sama tersebut. Besaran tarif kerja sama yang selama ini digunakan ditentukan oleh Kepala Laboratorium dengan menyesuaikan harga pasar dan ukuran/kompleksitas sampel. Kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam PKS.

Pembayaran penggunaan laboratorium dilakukan secara tunai pada saat pengujian selesai dilaksanakan dan diterima oleh Kepala Laboratorium dengan bukti berupa kuitansi. Pembagian pendapatan kerjasama laboratorium berdasarkan Peraturan Direktur PNUP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama PNUP dengan uraian dalam tabel berikut.

Tabel 21. Pembagian Pendapatan dari Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel Teknik Mesin

No	Uraian	%	Jumlah Penerimaan (Rp)	Digunakan Langsung Tanpa Pengesahan (Rp)
1	Biaya Pelaksanaan/Operasional	75%	104.426.250,00	104.426.250,00
2	Dana Pengembangan Jurusan	25%		
a	Simpanan Staf Tim Kerjasama Industri (TKI)	10%	3.480.875,00	22.277.600,00
b	SHU	90%		
	- Pengembangan Jurusan	60%	18.796.725,00	
	- PNUP	40%	12.531.150,00	
Jumlah			**139.235.000,00**	**126.703.850,00**

Penjelasan dari tabel di atas diuraikan sebagai berikut.

(a)) Senilai 75% atau senilai Rp104.426.250,00 diberikan kepada petugas laboratorium yang melaksanakan pengujian.

(b)) Senilai Rp22.277.600,00 (Rp3.480.875,00 + Rp18.796.725,00) diserahkan kepada Sekretaris Jurusan untuk pengeluaran berupa honor Ketua dan Sekretaris Jurusan serta pengeluaran operasional seperti pembelian air minum, konsumsi, sumbangan/bantuan kegiatan jurusan, pembelian karangan bunga, pembelian alat praktikum, dan lain-lain. Berdasarkan catatan pengeluaran Sekretaris Jurusan Teknik Mesin dana tersisa senilai Rp2.552.217,00;

(c)) Senilai Rp12.531.150,00 telah disetor ke rekening Bendahara Penerimaan PNUP pada tanggal 1 Maret 2024.

Dengan demikian pendapatan yang tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp126.703.850,00 (Rp139.235.000,00 – Rp12.531.150,00) dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp124.151.633,00 (Rp126.703.850,00 –Rp2.552.217,00).

(4) Pendapatan pada Teknik Sipil tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp943.566.500,00 dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp816.590.625,00

Laboratorium/bengkel pada jurusan Teknik Sipil selama Tahun 2023 menerima pendapatan dari kerja sama pangujian sampel senilai Rp991.847.500,00. Belum ada Keputusan Direktur PNUP terkait besaran tarif atas kerja sama tersebut. Besaran tarif kerja sama yang selama ini digunakan ditentukan oleh Kepala Laboratorium dengan menyesuaikan harga pasar dan ukuran/kompleksitas sampel. Kerja sama tersebut ada yang dituangkan dalam PKS dan ada yang tidak.

Pembayaran penggunaan laboratorium dilakukan pada saat pengujian selesai dilaksanakan secara tunai kepada Bendahara Tim Kerjasama Industri (TKI) Jurusan Teknik Sipil yang ditetapkan melalui Surat Tugas Nomor 1222/PL.10/KS.08.02/2023 tanggal 9 Maret 2023 maupun melalui transfer ke rekening pribadi Bendahara TKI yang disiapkan khusus untuk menampung penerimaan dari kerja sama pemanfaatan laboratorium dengan bukti berupa kuitansi. Dari pendapatan kerja sama senilai Rp991.847.500,00 tersebut kemudian didistribusikan kepada petugas terkait melalui persetujuan Ketua Jurusan dengan dengan prosentase sesuai dengan Peraturan Direktur PNUP Nomor 34 Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 22. Pembagian Pendapatan dari Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel Teknik Sipil

No	Uraian	%	Jumlah Penerimaan (Rp)	Digunakan Langsung Tanpa Pengesahan (Rp)
1	Biaya Pelaksanaan/Operasional	75%	743.885.625,00	743.885.625,00
2	TKI	25%		
a	Simpanan Staf TKI		199.680.875,00	72.705.000,00
b	PNUP *) Atas penerimaan Januari s.d. Nov 2023		48.281.000,00	
	Jumlah		**991.847.500,00**	**816.590.625,00**

Penjelasan dari tabel di atas diuraikan sebagai berikut.

(a)) Senilai 75% atau senilai Rp743.885.625 diberikan kepada petugas laboratorium sebagai honor atas pengujian yang dilakukan.

(b)) Senilai Rp199.680.875,00 disimpan rekening pribadi Bendahara TKI. Berdasarkan catatan Admin, diketahui terdapat penggunaan senilai Rp72.705.000,00, sehingga terdapat sisa dana per 31 Desember 2023 senilai Rp126.975.875,00 (Rp199.680.875,00 - Rp72.705.000,00)

(c)) Senilai Rp48.281.000,00 disetor ke Bendahara Penerimaan tanggal 5 Januari 2024.

Dengan demikian pendapatan penggunaan laboratorium Teknik Sipil senilai Rp991.847.500,00 yang tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp943.566.500,00 (Rp991.847.500,00 – Rp48.281.000,00) dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp816.590.625,00.

b) Pendapatan dari PKS Pusat Unggulan Ilmu Teknik Sipil tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp3.991.770.631,00

Pusat Unggulan Ilmu Teknik Sipil (Pulitser) pada Tahun 2022 dan 2023 melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga atas nama PNUP yang dituangkan dalam PKS. Atas kerja sama tersebut Pulitser pendapatan Tahun 2023 senilai Rp4.111.526.631,00. Pihak ketiga membayar uang dari hasil kerja sama secara transfer ke rekening dana kelolaan PNUP pada BTN Nomor 401300017864 dengan nama RPL 054 BLU PNUP untuk Dana Kelolaan. Hasil wawancara dengan Sekretaris Pulitser diketahui bahwa tidak ada Peraturan dari Direktur PNUP terkait tarif kerja sama, sehingga selama ini tarif menggunakan harga pasar.

Pengeluaran dana dari RPL tersebut berdasarkan permintaan Tim Pulitser dengan persetujuan Direktur PNUP. Setelah Direktur PNUP menyetujui, Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan cek senilai jumlah dana yang masuk ke rekening dana kelolaan sesuai permintaan Tim Pulitser dan menyerahkan cek tersebut kepada perwakilan Tim Pulitser. Dana digunakan untuk operasional pelaksanaan pekerjaan dari pihak ketiga. Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pulitser diketahui bahwa tidak ada sisa dana dari pendapatan yang diperoleh dari kerja sama Tim Pulitser karena seluruhnya telah digunakan dan tidak ada pencatatan atas pengeluaran dana tersebut.

Dari dana kerja sama yang diterima pada Tahun 2023, Tim Pulitser memberikan SHU kepada PNUP senilai 5% dari nilai *netto* PKS senilai Rp119.756.000,00 yang disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan BLU.

Dengan demikian dari pendapatan yang diterima senilai Rp4.111.526.631,00, yang tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU, dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp3.991.770.631,00 (Rp4.111.526.631,00 – Rp119.756.000,00).

c) Pendapatan dari pemanfaatan rusunawa pada Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp42.500.000,00 dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp25.721.873,00

Polsri memiliki rusunawa yang terletak di Komplek Dosen Politeknik di Jalan Politeknik Palembang. Rusunawa tersebut dibangun pada tahun 2019 oleh Kementerian PUPR dan diserahterimakan kepada Polsri pada bulan Agustus s.d. Oktober 2023. Rusunawa tersebut belum secara resmi dimanfaatkan oleh mahasiswa Polsri karena tarif pemanfaatan Rusunawa baru diusulkan dalam dokumen Proposal Tarif Layanan BLU tertanggal 27 November 2023 kepada Kementerian Keuangan.

Pada masa pembelajaran semester ganjil Tahun 2023/2024, rusunawa tersebut digunakan oleh 39 mahasiswa peserta kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM). Program PMM dilaksanakan sesuai PKS antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Ditjen Diktiristek dengan Polsri Nomor 2800/E2/KM.00.02/2023 dan Nomor 07198/PL6.6.1/PKS/POLSRI/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Program PMM Tahun 2023.

Penempatan mahasiswa pelaksana PMM di Rusunawa berdasarkan rapat persiapan penyambutan mahasiswa PMM tanggal 23 Agustus 2023. Rapat tersebut juga menetapkan satu orang pengurus rumah tangga dan satu orang penjaga keamanan Rusunawa dengan honor masing-masing Rp2.000.000,00/bulan serta petugas kebersihan senilai Rp150.000,00/bulan. Pembayaran honor penjaga keamanan, petugas kebersihan, dan pengurus rumah tangga menggunakan iuran sewa yang dipungut dari mahasiswa peserta PMM karena tidak bisa dibiayai oleh dana PMM dari Kemendikbudristek. Sedangkan pembayaran listrik dan air dibebankan pada keuangan Polsri.

Tarif iuran sewa yang ditetapkan per mahasiswa adalah senilai Rp500.000,00/kamar sesuai notulen rapat persiapan. Total kamar yang digunakan oleh mahasiswa PMM sebanyak 17 kamar, masing-masing kamar ditempati sebanyak 2 s.d 3 orang mahasiswa/kamar. Pembayaran iuran sewa Rusunawa maksimal tanggal 5 setiap bulan, diberikan kepada Koordinator PMM Polsri yaitu Ibu DF baik secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi.

Mahasiswa pelaksana PMM mulai menempati rusunawa pada tanggal 31 Agustus 2023 s.d 26 Januari 2024 sesuai kalender akademik. Mahasiswa meninggalkan Rusunawa pada tanggal 28 Januari 2024. Selama 5 bulan pelaksanaan PMM (1 September 2023 – 28 Januari 2024) diketahui pendapatan iuran Rusunawa adalah senilai Rp42.500.000,00 (17 kamar x 5 bulan x Rp500.000,00). Pendapatan senilai Rp42.500.000,00 tersebut tidak disetorkan seluruhnya ke rekening penerimaan Polsri dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp25.721.873,00 yang digunakan untuk honor petugas keamanan, pengurus rumah tangga, petugas kebersihan, internet, pembelian peralatan fasilitas rusunawa dan fasilitas kesehatan.

Sisa pendapatan iuran rusunawa senilai Rp16.778.127,00 (Rp42.500.000,00 - Rp25.721.873,00) tersebut dipegang oleh koordinator PPM Polsri senilai Rp1.265.000,00 dan Bendahara Penerimaan senilai Rp15.513.127,00 dalam bentuk tunai.

Dengan demikian pendapatan penggunaan rusunawa senilai Rp42.500.000,00 yang tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU, dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp25.721.873,00.

d) Pendapatan dari denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan pada Politeknik Negeri Semarang (Polines) tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp5.495.600,00 dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp3.574.200,00

Polines memiliki Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan yang bertugas untuk mengelola Perpustakaan milik Polines. SK Direktur Polines Nomor 0352A/PL4.7.2/SK/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Daftar Tarif Layanan Penunjang Pendidikan di lingkungan Polines telah mengatur tentang tarif layanan diantaranya tarif denda keterlambatan pengembalian buku senilai Rp500,00 s.d. Rp1.000,00/buku/hari. Pada Tahun 2023 UPA Perpustakaan memperoleh pendapatan denda pengembalian buku senilai Rp5.495.600,00. Namun tarif denda keterlambatan yang dikenakan masih mengacu pada SK Direktur Polines Nomor 8412/PL4.1.6/PT/2014 tentang Peraturan Tata Tertib UPT Perpustakaan Polines tanggal 11 September 2014. Kepala UPA Perpustakaan belum mengetahui adanya SK Direktur Polines Nomor 0352A/PL4.7.2/SK/2023 tanggal 5 Juli 2023 sehingga masih menggunakan tarif yang lama. Perhitungan denda keterlambatan pengembalian buku dilakukan secara otomatis oleh aplikasi Perpustakaan setelah petugas menuliskan tanggal pengembalian buku oleh peminjam buku. Selanjutnya denda keterlambatan dibayarkan secara tunai kepada Petugas UPA Perpustakaan dan uang tersebut disimpan dalam laci terkunci di Perpustakaan.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa penerimaan dari denda keterlambatan pengembalian buku senilai Rp5.495.600,00 tidak segera diserahkan kepada Bendahara Penerimaan atau disetor ke rekening kas BLU dan digunakan langsung senilai Rp3.574.200,00 untuk biaya perpanjangan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) dan Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN), *reward* pemustaka, partisipasi dies, Besuk direktur, makan siang PKL UIN, makan siang PKL UNDIP dan karangan duka cita direktur.

Sisa pendapatan denda keterlambatan pengembalian buku senilai Rp1.921.400,00 (Rp5.495.600,00 - Rp3.574.200,00) dipegang oleh petugas UPA Perpustakaan. Hasil wawancara dengan Kepala UPA Perpustakaan diketahui bahwa UPA Perpustakaan menggunakan dana denda keterlambatan pengembalian buku karena Polines belum menganggarkan pengeluaran belanja UPA Perpustakaan.

Dengan demikian pendapatan dari denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan senilai Rp5.495.600,00 yang tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU, dan digunakan langsung tanpa melalui pengesahan senilai Rp3.574.200,00.

e) Pendapatan dari pengujian beton pada Jurusan Teknik Sipil pada Polines tidak disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLU senilai Rp21.730.000,00

Pada Tahun 2023 laboratorium uji beton pada Jurusan Teknik Sipil memperoleh pendapatan dari hasil tujuh pengujian beton senilai Rp21.730.000,00. Atas pendapatan tersebut belum diserahkan ke Bendahara Penerimaan/disetorkan ke kas BLU, namun belum ada penggunaan atas pendapatan tersebut. Saat ini uang dari pendapatan tersebut dititipkan di rekening koperasi di jurusan Teknik Sipil.

Hasil wawancara dengan Ketua Jurusan Teknik Sipil diketahui bahwa pendapatan tersebut belum disetorkan pada Tahun 2023 karena masih dalam proses transisi pendirian unit bisnis sehingga belum siap menampung pendapatan tersebut dan sesuai dengan saran Direktur sebelumnya maka pendapatan yang diterima disimpan di juruan terlebih dahulu. Pendapatan tersebut akan disetorkan ke Bendahara Penerimaan Tahun 2024.

f) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) belum memiliki pedoman pemberian diskon/potongan harga atas pemanfaatan BMN

Tarif sewa ruangan pada PPNS mengacu pada SK Direktur PPNS Nomor 1789/PL19/KU.01.02/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU PPNS. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa PPNS memberikan diskon/potongan harga sewa Gedung Dewaruci kepada penyewa. Berdasarkan dokumen tagihan pembayaran diketahui bahwa untuk penyewa perusahaan dikenakan tarif sesuai SK Direktur PPNS yaitu senilai Rp11.000.000,00 per hari, sedangkan untuk penyewa selain perusahaan dikenakan biaya sewa di bawah tarif SK Direktur PPNS. Rincian nilai sewa ruangan yang diberikan dan tarif yang ditetapkan sesuai tabel berikut.

Tabel 23. Rincian Sewa Ruangan PPNS

No	Penyewa	Waktu Pemakaian	Nilai Sewa (Rp)	SK Tarif (Rp)	Tanggal Bayar
1	SMP ITAU	10/06/2023	7.000.000,00	11.000.000,00	21/06/2023
2	Sdri. SZ	06/072023	6.000.000,00	11.000.000,00	06/07/2023
3	SD LAH	23/06/2024 pukul 7 s.d. 12 WIB	9.000.000,00	11.000.000,00	04/12/2023
4	SDIT AU	08/062024 pukul 7 s.d. 12 WIB	9.000.000,00	11.000.000,00	21/11/2023
5	SMP ITAU	02/06/2024	9.000.000,00	11.000.000,00	28/11/2023
Jumlah			**40.000.000,00**	**55.000.000,00**	

Dari tabel di atas menunjukkan terdapat selisih nilai sewa yang dikenakan dengan tarif sesuai SK senilai Rp15.000.000,00 (Rp55.000.000,00 – Rp40.000.000,00).

Hasil wawancara dengan pengelola BMN diketahui bahwa pemberian diskon sewa ruangan kepada penyewa dilakukan dalam rangka promosi perkenalan layanan sewa ruangan PPNS namun PPNS belum memiliki pedoman yang mengatur mengenai hal tersebut.

b. Keterlambatan penerimaan pendapatan dari pemanfaatan BMN senilai Rp233.551.000,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas kepatuhan penyewa BMN dalam membayar sewa BMN menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Keterlambatan Pembayaran Sewa BMN pada Satker BLU

No.	Satker	Jenis Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Tanggal Perjanjian	Tanggal Setor
1.	Untan	Sewa Kantin FKIP	11.000.000,00	21 Agust 2023	10 Jan 2024
		Sewa Kios FKIP	10.000.000,00	21 Agust 2023	20 Feb 2024
2.	Polsri	ATM BNI	41.713.000,00	1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2025	8 Juni 2023
		ATM Bank	26.738.000,00	1 Juli 2023 s.d. 30 Juni 2025	13 Des 2023

No.	Satker	Jenis Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Tanggal Perjanjian	Tanggal Setor
		Mandiri			
3.	Polban	ATM BPD	60.600.000,00	1 Jan 2022 s.d 31 Des 2024	17 Jan 2024
4.	PNUP	ATM BSI	81.000.000,00	5 Nop 2022 s.d 4 Nop 2025	8 Jan 2024
		Kantin	2.500.000,00	Sep s.d. Nov 2023	Jan 2024
Jumlah			**233.551.000,00**		

c. Pendapatan BLU dipungut tanpa dasar hukum pada satker di BSKAP dan Ditjen Diktiristek

1) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) belum memiliki dasar hukum yang memadai atas tarif pendapatan BLU

BPPP merupakan salah satu satker pada BSKAP yang pada Tahun 2023 mencatat realisasi pendapatan BLU senilai Rp173.703.400.580,00, diantaranya Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya senilai Rp172.170.163.364,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa BPPP

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)	127.385.200.000,00
2	Ujian Program Profesi Guru (PPG)	44.138.829.000,00
3	Seleksi POLRI	264.400.000,00
4	Seleksi TNI	24.100.000,00
5	Ujian masuk mahasiswa 6 Politeknik Periwisata	357.634.364,00
Jumlah		**172.170.163.364,00**

Pada Tahun 2023, organ BLU yang berfungsi melakukan pengawasan pada BPPP belum menjalankan fungsinya, sehingga pada tahun 2023 belum dapat dilakukan penunjukan KAP untuk melakukan pemeriksaan LK BLU BPPP Tahun 2023.

Tarif pendapatan BLU tahun 2023 mengacu pada:

a) PMK Nomor 4/PMK.02/2023 tentang Jenis dan Tarif Layanan Atas Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang Berlaku pada Kemendikbudristek. PMK tersebut menjadi dasar atas pengenaan tarif pendapatan yang berasal dari SNPMB dan seleksi bersama penerimaan mahasiswa baru (termasuk seleksi TNI, POLRI dan Politeknik Pariwisata);

b) Peraturan Dirjen GTK Nomor 3826/HK.04.01/2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Profesi Guru (PPG) untuk pendapatan ujian PPG.

c) Untuk seleksi bersama penerimaan mahasiswa baru, nilai pendapatan juga mengacu pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam PKS yang telah disepakati oleh BPPP dan pemberi kerja, sedangkan perhitungan komponen biaya dalam RAB mengacu pada aturan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM).

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan, yaitu:

a) Ketentuan terkait pengelolaan PNBP kebutuhan mendesak atas layanan SNPMB dalam PMK Nomor 4/PMK.02/2023 tidak sesuai dengan pola pengelolaan BLU

PMK Nomor 4/PMK.02/2023 Pasal 4 mengatur bahwa seluruh PNBP kebutuhan mendesak atas layanan SNPMB PTN yang berlaku pada Kemendibudristek wajib disetor ke Kas Negara. Aturan ini tidak selaras dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang mengatur pendapatan yang diterima tidak perlu disetor ke kas negara namun cukup disahkan sebagai pendapatan BLU dan dapat langsung digunakan untuk membiaya kegiatan pada BLU tersebut.

b) Belum terdapat aturan mengenai tarif layanan BLU

BPPP telah mengajukan usulan penetapan tarif layanan BLU kepada Kementerian Keuangan melalui surat Mendikbudristek Nomor 3097/PMK.A/KU.01/2023 pada tanggal 13 September 2023. Usulan tarif tersebut telah melalui tahapan penilaian usulan tarif kolektif bersama Direktur PPK BLU. Namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, belum ada penetapan tarif tersebut oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPK, dalam usulan tarif BLU BPPP, tarif yang diusulkan terkait dengan fungsi utama BPPP sebagai penyelenggara layanan pengujian pendidikan, terdiri dari tarif SNPMB, tes akademik objektif, tes akademik non objektif dan tes non akademik objektif. Sedangkan berdasarkan dokumen mengenai penerimaan pendapatan BLU, terdapat penerimaan yang berasal dari pembuatan soal, yaitu soal untuk seleksi TNI dan POLRI. Dengan demikian, usulan tarif BLU BPPP belum memasukkan usulan dari sumber pendapatan pembuatan soal.

Selain itu, berdasarkan PKS pembuatan soal seleksi tes masuk POLRI, terdapat pembuatan soal tes akademik non objektif dengan jumlah soal yang sama namun biaya pembuatan soal berbeda. Rincian pendapatan yang berasal dari pembuatan soal adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Rincian Pendapatan Pembuatan Soal

No.	No Kontrak Kerja	Tanggal	Nilai (Rp)	Pekerjaan
1	03/IV/PKS/2023 (312.C/IV/PKS/2023)	13-Apr-23	80.250.000,00	Pembuatan soal CAT penerimaan Tamtama
2	02/IV/PKS/2023 (312.B/IV/PKS/2023)	12-Apr-23	95.500.000,00	Pembuatan soal CAT penerimaan Bintara Kepolisian
3	01/IV/PKS/2023 (312.A/IV/PKS/2023	13-Apr-23	88.650.000,00	Penyiapan soal CAT untuk taruna/I Akpol
4	Surat permintaan : B/5234/XII/2023 tgl 6 Des 2023 dari Asper ub Waas TNI BAST : dari Kepala BPPP kepada BAN II Bindik SPERS TNI tgl 8 Dec 2023 BA Pembayaran : 559/XII/BAP/2023 tgl 8 Dec 2023		24.100.000,00	Penyiapan soal CAT penerimaan PA PK Reguler dan seleksi Sesko TNI

Berdasarkan penjelasan Kepala BPPP, perbedaan tarif tersebut berdasarkan tingkat kesulitan soal.

2) Tarif PNBP belum ditetapkan oleh Rektor dan tarif PNBP yang dikenakan tidak sesuai SK Rektor pada Ditjen Diktiristek

a) UPN Veteran Jawa Timur

Tarif Pendapatan dari layanan BLU pada UPN Veteran Jawa Timur berpedoman pada PMK Nomor 28/PMK.05/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Tarif Layanan BLU UPN Veteran Jawa Timur pada Kemendikbud. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

(1) Tarif sewa kantin

UPN Veteran Jawa Timur mempunyai tiga komplek kantin, yaitu Kantin Pusat 1, Kantin Pusat 2 dan Kantin Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN). Rincian jumlah kantin dan pendapatan sewa yang diterima pada tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 27. Rincian Jumlah Kantin dan Pendapatan Sewa

No	Nama Kantin	Kuantitas	Biaya Sewa/ Tahun (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kantin Pusat 1			
	Periode 1 Des 2023 sd 30 Nov 2024	21	15.500.000,00	325.500.000,00
2	Kantin Pusat 2 (Kantin Rusunawa)			
	Periode 1 Mar 2023 sd 29 Feb 2024	28	17.500.000,00	490.000.000,00
	Periode 2 Mei 2023 sd 1 Mei 2024	1	17.500.000,00	17.500.000,00
3	Kantin AMN periode 2 Okt 2023 sd 30 Sep 2024	1	34.000.000,00	34.000.000,00
Jumlah				**867.000.000,00**

Tarif sewa kantin yang dikenakan berpedoman pada harga sewa tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Direktur BPU dengan Penyewa. Sesuai perjanjian, biaya sewa atas kantin dibayar dimuka melalui penyetoran oleh penyewa ke rekening UPN Veteran Jawa Timur. Pengelola kantin menjelaskan bahwa tarif sewa kantin belum ditetapkan dalam Peraturan Rektor UPN Veteran Jawa Timur karena belum pernah diusulkan kepada Rektor.

(2) Tarif layanan Perpustakaan

Pada tahun 2023, terdapat realisasi penerimaan dari denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan senilai Rp12.685.400,00 yang tarifnya belum ditetapkan dalam PMK Nomor 28/PMK.05/2021 maupun dalam Peraturan Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Tarif denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan berpedoman pada hasil survei tarif perpustakaan di PTN lain yang dilakukan Petugas Perpustakaan. Direktur BPU juga menjelaskan bahwa tarif layanan perpustakaan belum ditetapkan dalam Peraturan Rektor UPN Veteran Jawa Timur karena belum pernah diusulkan kepada Rektor.

(3) Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah

Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah senilai Rp66.850.000,00, yang terdiri dari penerimaan sewa ATM BTN senilai Rp26.000.000,00, *vending machine* senilai Rp2.000.000,00 dan sewa *booth/stand* yang bersifat insidentil senilai Rp38.850.000,00.

Mekanisme penetapan tarif *vending machine* dan sewa lahan untuk *booth* mengacu pada perhitungan formula tarif sewa atas pelaksanaan sewa BMN yang ditetapkan dalam PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. BPU belum pernah melakukan *benchmarking* atas biaya sewa sejenis.

Hasil perhitungan formula tarif sewa yang dilakukan oleh BPU dituangkan dalam kertas kerja internal BPU. Tarif hasil perhitungan tidak serta merta menjadi tarif sewa melainkan tarifnya disesuaikan dengan persetujuan dari pihak penyewa. Namun demikian, persetujuan tarif dimaksud tidak ditetapkan dalam Peraturan Rektor UPN Veteran Jawa Timur karena sampai dengan saat ini belum pernah diusulkan kepada Rektor.

(4) Tarif listrik penggunaan ATM

Biaya listrik yang dikenakan kepada pihak Bank BTN dan Bank BNI sama dengan tarif yang berlaku tahun sebelumnya. Tarif dimaksud merupakan kebijakan dari Direktur BPU yang disepakati oleh penyewa karena UPN Veteran Jawa Timur belum menetapkan tarif atas penerimaan biaya listrik pemakaian ATM. Selain itu, terdapat perbedaan pengenaan tarif penerimaan biaya listrik atas pemakaian ATM dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 28. Pendapatan dari Penerimaan Biaya Listrik Pemakaian ATM

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Sewa / bulan (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
1	ATM BTN	1	870.000 / 1 unit	10.440.000,00
2	ATM BNI	2	550.000 / 2 unit	12.497.000,00
Jumlah				**22.937.000,00**

Pengelola menjelaskan bahwa tarif listrik penggunaan ATM belum ditetapkan dalam Peraturan Rektor UPN Veteran Jawa Timur karena belum pernah diusulkan kepada Rektor.

(5) Pemungutan sewa asrama melebihi tarif yang sudah ditetapkan

UPN Veteran Jawa Timur mengelola Asrama Nusantara yang berada di lingkungan UPN Veteran Jatim. Tarif biaya sewa asrama mahasiswa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 255/UN63/U/2021 seperti pada tabel berikut.

Tabel 29. Tarif Biaya Sewa Asrama Mahasiswa

No	Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Rusun Mahasiswa Lt 1	per semester / mhs	2.600.000,00
2	Rusun Mahasiswa Lt 2	per semester / mhs	2.400.000,00
3	Rusun Mahasiswa Lt 3	per semester / mhs	2.360.000,00
4	Rusun Mahasiswa Lt 4	per semester / mhs	2.350.000,00

Mekanisme pemungutan biaya sewa asrama dilakukan berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Direktur BPU dengan Penyewa. Biaya sewa asrama tersebut dibayar dimuka untuk jangka waktu satu tahun. Seluruh penerimaan sewa senilai Rp691.660.000,00 telah disetor ke rekening UPN Veteran Jawa Timur dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 30. Penerimaan Sewa Asrama

Lantai	Jumlah Kamar	Jumlah penghuni	Tarif/tahun/orang (Rp)	Penerimaan (Rp)
Lantai 1	19	45	5.450.000,00	245.250.000,00
Lantai 2	24	51	5.050.000,00	257.550.000,00
Lantai 3	24	38	4.970.000,00	188.860.000,00
Jumlah	**67**	**134**		**691.660.000,00**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan wawancara diketahui bahwa penyewa Asrama Nusantara dikenakan tarif yang lebih tinggi senilai Rp250.000,00/orang jika dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor. Direktur BPU menjelaskan bahwa kelebihan pengenaan tarif disebabkan adanya biaya pendaftaran senilai Rp100.000,00 dan biaya pembinaan senilai Rp150.000,00 yang tidak termasuk dalam komponen biaya sewa yang dibayarkan oleh mahasiswa. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua komponen biaya tersebut tidak diatur dalam PMK Nomor 28/PMK.05/2021 dan Peraturan Rektor Nomor 255/UN63/U/2021.

Dengan demikian, UPN Veteran Jawa Timur mengenakan pungutan yang lebih tinggi dari ketentuan senilai Rp33.500.000,00 (134 orang x Rp250.000,00) yang terdiri atas uang pendaftaran senilai Rp13.400.000,00 dan uang pembinaan senilai Rp20.100.000,00.

(6) Penatausahaan pendapatan hasil pengelolaan area perkebunan tidak tertib

Pada TA 2023, UPN Veteran Jawa Timur merealisasikan pendapatan senilai Rp49.900.000,00 dari hasil pengelolaan area perkebunan di Wonosalam dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 31. Pendapatan dari Kebun Wonosalam

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	24 Februari 2023	Penjualan Kayu Wonosalam	2.500.000,00
2	14 Maret 2023	Cengkeh Wonosalam	20.000.000,00
3	15 Maret 2023	Cengkeh Wonosalam	20.000.000,00
4	19 Maret 2023	Hasil Kebun Wonosalam	1.900.000,00
5	21 November 2023	Hasil kebun Wonosalam	5.500.000,00
		Jumlah	**49.900.000,00**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BPU menunjukkan bahwa hasil perkebunan dijual oleh tenaga harian lepas UPN Veteran Jawa Timur yang ditempatkan di Perkebunan Wonosalam. Harga penjualan sesuai kesepakatan antara Direktur BPU dengan pembeli, dengan mengacu pada harga pasar pada saat dilakukan penjualan.

Direktur BPU tidak mempunyai data yang valid mengenai kuantitas penjualan hasil kebun di Wonosalam. Realisasi penerimaan atas pendapatan dari hasil kebun Wonosalam dicatat hanya berdasarkan bukti setor ke rekening penerimaan UPN Veteran Jatim. BPU belum mempunyai suatu mekanisme atau prosedur tertentu untuk mengelola hasil kebun.

b) Untan

Mekanisme kerja sama pemanfaatan BMN pada Untan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Prosedur Kerja Sama Operasional (KSO). Tarif KSO aset BLU ditetapkan menggunakan dasar hasil taksiran dari tim Pengelola dan Pengembangan Usaha (PPU) Untan, yaitu tim yang betugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan mengkoordinasikan unit usaha di Untan serta optimalisasi perolehan sumber-sumber pendanaan. Selain itu, peraturan tersebut menetapkan bahwa prosedur pembayaran KSO menggunakan *Virtual Account* yang diterbitkan oleh BUK.

Pengelolaan kerja sama pemanfaatan BMN pada Untan masih dilakukan oleh Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas dengan operasional oleh Tim PPU karena Untan belum memiliki satker BPU yang berfungsi sebagai sentral pengelola usaha.

Lebih lanjut, hasil pengujian dokumen penatausahaan Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa BMN serta permintaan keterangan dengan pihak-pihak terkait menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

(1) Tim PPU Untan belum menetapkan nilai sewa

Terdapat 20 aset Untan yang telah dimanfaatkan melalui skema sewa tanah/lahan dan sewa gedung. Tim PPU menjelaskan bahwa, proses penilaian sewa dimulai dengan mengumpulkan data aset dari Subbagian BMN untuk mendapat data luas lahan yang dimanfaatkan oleh mitra. Kemudian data tersebut disampaikan ke Tim PPU untuk dilakukan penilaian aset mengacu pada PMK Nomor 33 Tahun 2012 tentang Prosedur Penilaian Aset BMN. Tim PPU memberikan rekomendasi nilai sewa aset kepada bagian Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas (BPKHM) untuk disampaikan ke Pimpinan dhi. Rektor/Wakil Rektor IV. Persetujuan atas hasil negosisasi sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan (Rektor/Wakil Rektor IV) Untan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat dua aset yang belum ditetapkan nilai sewanya sebagai berikut:

Tabel 32. Data Aset yang Belum Ditetapkan Nilai Sewa oleh Tim PPU

No	Mitra	Jenis Objek	Durasi	Nilai Sewa Tahun Lalu (Rp)	Keterangan
1.	PT.DCBS	Penempatan Billboard 1 titik	3 Tahun	225.600.000,00	PKS sudah berakhir tanggal 11 Januari 2024. PKS perpanjangan menunggu nilai sewa Tim PPU
2.	BNI	Sewa lahan untuk Ruang ATM BNI Depan Polnep	-	-	Belum ada PKS

Koordinator BPKHM menjelaskan bahwa proses penilaian sewa ATM sudah selesai sampai dengan persetujuan sesuai surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Nomor 2558/UN22/TU.01.01/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan nilai sewa pertahun senilai Rp27.596.400,00. Namun, untuk PT DCBS masih dalam proses administrasi pembuatan surat negosiasi nilai sewa.

Berdasarkan PKS antara PT DCBS dengan Untan Nomor 077/DBS/X/2021 Nomor 15440/UN22/KS/2021 tentang perpanjangan sewa menyewa tanah/lahan dan papan reklame di lingkungan Untan tanggal 18 Oktober 2021 diketahui bahwa jangka waktu sewa selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2021 s.d 11 Januari 2024 dengan biaya sewa senilai Rp225.600.000,00. Sampai saat ini PKS belum diperpanjang.

(2) Pemungutan tarif pemanfaatan Stadion Lapangan Sepak Bola tidak sesuai SK Tarif

Pemanfaatan BMN Stadion Lapangan Sepak Bola ditetapkan dengan SK Rektor Nomor 3042/UN22/RT.02.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang antara lain mengatur tarif sewa pemakaian BMN Stadion Lapangan Sepak Bola Untan senilai maksimal Rp2.000.000,00 per pertandingan. Selama Tahun 2023 terdapat pendapatan atas sewa stadion senilai Rp88.400.000,00. Tarif yang dikenakan atas sewa adalah beragam, mulai dari Rp500.000,00 s.d Rp1.500.000,00. Hasil wawancara dengan pengelola lapangan diketahui bahwa tarif senilai Rp500.000,00 berlaku untuk tim yang menggunakan lapangan bersama civitas akademika Untan. Sampai dengan saat ini Untan belum menetapkan peraturan yang menjadi dasar penyesuaian tarif.

(3) PKS sudah berakhir belum diperpanjang

Kerjasama Untan berkaitan dengan sewa BMN dengan pihak ketiga diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 33. PKS BMN

No.	Nama Mitra	Objek	Jangka Waktu	Nilai Kerjasama (Rp)	Permasalahan
1.	PT. DA dari PT. XLA, Tbk	-Radio Base Station 1x4 m -Antenna Pole 2x3 m 60 Antenna	5 tahun	364.000.000	Belum dibuat PKS perpanjangan. Sedang proses penandatanganan surat hasil penilaian PPU ke mitra
2.	PT. SSKP (PT. TBG)	Penempatan dan pengoperasian menara telekomuni-kasi	5 tahun	480.000.000	PKS sudah berakhir tanggal 19 Mei 2022. Surat Pemberitahuan nilai sewa sudah disampaikan ke mitra tanggal 23 November 2023
3.	PT. DT, Tbk Mi (TI)	Pemasangan dan penempatan Base Transceveir Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM	5 tahun	254.613.780	PKS sudah berakhir tanggal 20 Mei 2023 Mitra menginginkan sewa selama 10 tahun dengan nilai kontrak senilai Rp541.092.530
4.	Hotel Mercure	Penggunaan lahan untuk parkir kendaraan	5 tahun	6.000.000,00 per tahun	PKS sudah berakhir dan pihak Mercure meminta pertimbangan harga secara lisan
5.	CV. CAG	*Golf Driving Range*		100.000.000/th, addendum 25.000.000/th (2019)	Aset belum diserahkan ke Untan namun masih dikelola mitra sejak PKS berakhir. Pihak mitra masih berkeinginan kuat mengelola karena sudah mengeluarkan investasi yang besar. Mitra siap melakukan pembayaran jika diperpanjang.

No.	Nama Mitra	Objek	Jangka Waktu	Nilai Kerjasama (Rp)	Permasalahan
6.	Kantin Digulis	16 kios kantin		7.000.000 s.d 16.000.000/ tahun	Belum dibuat PKS
7.	Kantin Sepakat	18 kios kantin		10.000.000,00/ tahun	Belum dibuat PKS

Penjelasan atas permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

(a) Kerjasama dengan PT DA (PT XLA, Tbk)

Perpanjangan kerjasama masih menunggu proses penandatanganan nilai sewa. Biaya sewa yang ditetapkan Untan senilai Rp188.606.160,00/tahun namun pihak mitra meminta negosiasi harga senilai Rp64.000.000,00 atau Rp320.000.000,00/lima tahun. PT DA (PT XLA) telah melakukan pembayaran sesuai PKS senilai Rp364.000.000,00 pada tanggal 26 Juli 2017. Namun selama tahun 2023 tidak terdapat pembayaran.

(b) Kerjasama dengan PT SSKP

PKS telah berakhir pada 19 Mei 2022 namun mitra masih beroperasi, serta tidak ada pembayaran di Tahun 2023. Perpanjangan kerjasama masih menunggu proses negosiasi biaya sewa.

(c) Kerjasama dengan PT DT (PT TS)

PKS telah berakhir tanggal 20 Mei 2023 namun mitra masih beroperasi. Perpanjangan kerja sama masih menunggu proses negosiasi nilai sewa.

(d) Kerjasama dengan Hotel Mer

Perjanjian sewa menyewa antara Untan dengan Hotel Mer atas sebidang tanah seluas 96,475 m2 dengan jangka waktu 29 Agustus 2014 s.d 28 Agustus 2019. Letak sebidang tanah tersebut berbatasan dengan Polnep.

PKS belum dilakukan perpanjangan. Untan telah bersurat ke pihak Hotel Mer Nomor 7769/UN22/TU.01.01/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Sewa Menyewa. Pihak Hotel Mer menanggapi secara lisan bahwa pihaknya telah melakukan perjanjian sewa lahan parkir dengan Polnep dengan masa sewa dua tahun dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustustus 2024 dengan tarif sewa senilai Rp4.500.000,00 per bulan.

Berdasarkan reviu dokumen pembayaran dan wawancara dengan Wakil *General Manager* Hotel Mer diketahui bahwa pihak hotel membuat perjanjian dengan pihak Polnep atas sewa menyewa lahan parkir tersebut. Selama tahun 2023 Hotel Mer telah melakukan pembayaran kepada Polnep senilai Rp13.500.000,00 untuk sewa bulan Januari 2023 sampai Maret 2023. Pihak Hotel Mer berpendapat bahwa lahan parkir tersebut adalah milik Polnep.

(e) Kerjasama dengan CV CAG

Jangka waktu perjanjian sewa menyewa tanah/lahan tanggal 1 Oktober 2015 sampai tanggal 30 September 2020 dengan biaya sewa senilai Rp100.000.000,00 per tahun dan memberikan kontribusi berupa

pemberian Beasiswa Mandiri Untan senilai Rp72.000.000,00. Perjanjian di-*addendum* pada tanggal 11 Februari 2019 dengan perubahan klausul jangka waktu sewa menjadi empat tahun sampai dengan tanggal 30 September 2019 dan biaya sewa menjadi Rp25.000.000,00.

Selama tahun 2023 *golf driving range* tersebut masih beroperasi dan dikelola oleh CV CAG. Berdasarkan rekomendasi Tim PPU, nilai sewa senilai Rp1.051.947.000,00/tahun.

Hasil konfirmasi dengan CV CAG diketahui bahwa tarif biaya di *driving golf* sebagai berikut.

Tabel 34. Tarif *Driving Golf* Untan

Non Member	**Tarif**
50 *balls*	Rp60.000,00
100 *balls*	Rp100.000,00
Member	
50 *balls*	Rp50.000,00
100 *balls*	Rp70.000,00
Driving Range Membership	
1 *Year*	Rp750.000,00
2 *Year*	Rp1.000.000,00
Golf Lesson Package Rate	
15 *times*	Rp2.000.000,00
One Hour	Rp200.000,00

Direktur CV CAG menjelaskan bahwa telah melakukan pembayaran atas sewa tanah tahun 2015-2019 senilai Rp541.000.000,00. Sedangkan untuk tahun 2020 s.d 2023 belum melakukan pembayaran sewa dikarenakan belum terdapat perpanjangan perjanjian. Direktur CV CAG bersedia membayar biaya sewa jika perjanjian sudah diperpanjang.

(f) Kerjasama Kantin Digulis

Perjanjian atas sewa menyewa Kantin Digulis masih dalam proses revisi penilaian sewa tanah. Selama tahun 2023 terdapat penyetoran atas pembayaran sewa kantin Digulis dari 16 penyewa senilai Rp173.000.000,00.

(g) Kerjasama Kantin Sepakat

Selama tahun 2023 terdapat penyetoran atas pendapatan sewa kantin sepakat senilai Rp160.000.000,00 dari 16 penyewa dengan nilai masing-masing penyewa senilai Rp10.000.000,00.

c) UHO

Pengelolaan penetapan tarif pada UHO berpedoman pada PMK Nomor 35/PMK.05/2015 tentang Tarif BLU UHO. PMK tersebut belum mengatur mengenai tarif penyelenggaraan kegiatan konferensi ilmiah maupun kegiatan sejenisnya. Sampai saat ini belum terdapat keputusan rektor UHO yang mengatur terkait tarif kegiatan konferensi.

Pada pelaksanannya tarif penyelenggaraan kegiatan konferensi ilmiah ditetapkan oleh Ketua Panitia. Tarif tersebut terdiri dari biaya registrasi dan biaya publikasi. Rincian tarif konferensi ilmiah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Daftar Biaya Registrasi dan Publikasi Artikel pada Kegiatan Konferensi Ilmiah UHO

No	Nama Konferensi Ilmiah	Fakultas Penyelenggara	Biaya	
			Registrasi	Publikasi
1	*The 1st Halu Oleo International Conference on Pharmacy, Health, and Applied Sciences* (HICPHAS 2023)	Fakultas Farmasi	Rp100.000,00 - Rp400.000,00	Belum Ditentukan
2	*The 2nd International Conference on Maritime Infrastructure and Development* (ICMID 2023)	Fakultas Teknik	US$ 30; Rp100.000,00- Rp400.000,00	Rp750.000,00 - Rp3.000.000,00
3	*The 2nd International Conference on Mathematics and Science Education* (ICMSE 2023)	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Rp50.000,00 - Rp400.000,00	Rp2.750.000,00
4	*The 1st International International Interdisciplinary Conference* (ICC 2023)	Program Pasca Sarjana	Rp150.000,00 - Rp250.000,00	Belum Ditentukan
5	*The 3rd Halu Oleo International Conference on Agriculture and Food Security* (HICAFS 2023)	Fakultas Pertanian	Rp100.000,00 - Rp2.500.000,00; US$ 10 - US$ 250	
6	*The 1st Halu Oleo International Conference on Public Health* (HOICPH 2023)	Fakultas Kesehatan Masyarakat	US$ 30; Rp100.000,00 - Rp400.000,00	Belum Ditentukan
7	*The 1st International Conference Medical and Health Science Halu Oleo* (IMHO 2023)	Fakultas Kedokteran	US$100 - US$350; Rp1.000.000,00 - Rp2.500.000,00.	Belum Ditentukan
8	*International Conference on Improving Tropical Animal Production for Food Security* (ITAPS 2023)	Fakultas Peternakan	Rp100.000,00 - Rp500.000,00	Rp2.000.000,00
9	*The 3rd Halu Oleo International Conference on Economics and Business* (HOICEB 2023)	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	US$ 10 - US$23; Rp150.000,00 - Rp350.000,00	Belum Ditentukan

Catatan: Biaya publikasi yang belum ditentukan karena panitia belum berkomunikasi dengan pihak penerbit.

Atas permasalahan tersebut, ketua panitia masing-masing konferensi ilmiah menjelaskan bahwa penetapan besaran biaya registasi ditentukan dalam rapat panitia sehingga hal tersebut merupakan keputusan panitia. Sedangkan besaran biaya publikasi ditentukan berdasarkan harga yang ditetapkan penerbit jurnal atau *prosiding*. Sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pengusulan ke rektor atas penetapan tarif biaya registrasi/publikasi.

d) Universitas Palangka Raya (UPR)

UPR baru menetapkan satu jenis tarif yaitu jenis dan tarif BLU untuk Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis melalui SK Rektor Nomor 7277/UN24/KU/2023 tanggal 6 September 2023. Sedangkan untuk tarif dan layanan yang lain masih ditetapkan pada saat UPR masih menjadi Satker PNBP yaitu melalui SK Rektor UPR Nomor 16/UN24/KU/2019 sebagaimana terakhir diubah dengan SK Rektor Nomor 7683/UN24/KU/2022 tentang Penetapan Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan UPR.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPR menjelaskan bahwa saat ini UPR memang belum memiliki tarif resmi atas pelayanan-pelayanan yang diberikan khususnya terkait pemanfaatan aset sejak ditetapkan sebagai BLU karena saat ini UPR masih menunggu penetapan tarif kolektif oleh Kementerian Keuangan.

d. Pengelolaan atas pendapatan pada Museum dan Cagar Budaya (MCB) di Ditjen Kebudayaan belum sepenuhnya memadai

MCB adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengelolaan museum dan cagar budaya sebagai satker Ditjen Kebudayaan. MCB berdiri sejak tahun 2022 berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja MCB. Permendikbudristek tersebut mengatur adanya peleburan/penggabungan sebanyak sepuluh satker ke dalam MCB, yaitu Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran, Museum Nasional, Galeri Nasional, Balai Konservasi Borobudur, Museum Benteng *Vredeburg*, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Basuki Abdullah, dan Museum Kepresidenan Balai Kirti. MCB menjadi BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 318 tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan MCB pada Kemendikbudristek sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU). MCB baru mulai beroperasi pada bulan Mei 2023 dan DIPA awal MCB baru disahkan pada 23 Mei 2023. Selama periode Juni 2022 sampai dengan Mei 2023, operasional masih menggunakan/meneruskan nomenklatur, tugas dan fungsi, serta DIPA satker lama.

Sehubungan dengan perubahan organisasi UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan yang salah satunya adalah pembentukan MCB dan bergabungnya sepuluh satker menjadi di bawah MCB, Dirjen Kebudayaan menetapkan Keputusan Dirjen Kebudayaan Nomor 4391/F1/LK.03/00/2023 tentang Kelompok Kerja Likuidasi UPT di Lingkungan Ditjen Kebudayaan Tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 24 Februari 2023.

Berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi antara UPT MCB dan Balai Pelestarian Kebudayaan, maka urusan pemanfaatan Cagar Budaya yang semula ditangani Balai Pelestarian Kebudayaan, beralih ke UPT MCB, termasuk di dalamnya pengelolaan pemanfaatan Cagar Budaya yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/Prov. setempat dan termaktub dalam PKS/Nota Kesepakatan, yang mana sebelumnya dari PKS/Nota Kesepakatan ini menghasilkan kontribusi bagi hasil yang menjadi PNBP pada Ditjen Kebudayaan.

Realisasi pendapatan MCB yang disajikan dalam LRA Tahun 2023 senilai Rp4.912.908.508,00 terdiri atas pendapatan MCB sebelum menjadi satker BLU dan

pendapatan MCB ketika sudah menjadi satker BLU. Berdasarkan permintaan keterangan kepada Bendahara Penerimaan MCB, diperoleh informasi terkait pengelolaan penerimaan/pendapatan tersebut sebagai berikut.

1) Selama bulan Juni s.d. Agustus 2023, pendapatan yang dikelola oleh MCB yang berasal dari penerimaan dari tiket masuk pada museum dan penerimaan bagi hasil dari pengelolaan situs atau kawasan cagar budaya disetorkan ke kas negara melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan terlaporkan pada satker MCB dengan kode satker 690659.

2) Pada tanggal 1 September 2023, MCB beralih menjadi satker PPK-BLU berdasarkan KMK Nomor 318 tahun 2023.

Pada 6 September 2023, MCB mengajukan permohonan pembuatan rekening giro pada BRI untuk peruntukan Penampungan Sementara Penerimaan. Pembuatan rekening penampungan sementara dikarenakan terdapat permintaan dari unit-unit di bawah MCB yang akan melakukan penyetoran atas penerimaan yang diterima. Rekening penampungan sementara penerimaan tersebut secara efektif dibuka oleh BRI pada tanggal 8 September 2023. MCB telah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Jakarta III pada bulan November dan disetujui pada tanggal 6 Desember 2023. Adapun rekening penampungan tersebut disetujui pada tanggal 6 Desember 2023 melalui Surat Kepala KPPN Jakarta III nomor S-3068/KPN.1203/2023 dengan peruntukan sebagai berikut.

a) Rekening atas nama RPL 088 BLU Museum Cagar Budaya UTK OPS diperuntukan untuk Layanan Pendapatan Utama/Tiket; dan

b) Rekening atas nama RPL 088 BLU Museum Cagar Budaya UTK DK diperuntukan untuk Layanan Pemanfaatan Aset/Kerja Sama Pihak Ketiga.

Atas pembukaan RPL tersebut, Bendahara Penerimaan menginformasikan kepada 10 museum yang tergabung dalam agar atas setoran penerimaan PNBP per tanggal 1 September disetorkan ke rekening penerimaan sementara MCB dan untuk penerimaan sebelum tanggal 1 September masih di setor ke kas negara melalui billing SIMPONI.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Museum Nasional (Musnas) (satker BLU di bawah Ditjen Kebudayaan sebelum terbentuknya BLU MCB) pada saat adanya BLU MCB, status BLU Musnas tidak dapat dinonaktifkan atau dicabut, karena adanya komitmen antara pihak ketiga yang sudah didaftarkan melalui KPPN sehubungan dengan adanya SPK atas pekerjaaan Manajemen Konstruki (pengawas) renovasi lanjutan Gedung A Musnas dan adanya PKS atas pekerjaaan jasa *cleaning service* Musnas. Selain itu juga rekening penerimaan pada Musnas belum ditutup dan tetap aktif dengan saldo Rp10.233.121.636,00. Saldo kas ini tidak terkonsolidasi di LK MCB, namun telah dikonsolidasikan di LK tingkat Kementerian. Penerimaan yang ada di Musnas seluruhnya disimpan pada rekening a.n. RPL 088 BLU Museum Nasional UTK OPS di bank BRI. Selama tahun 2023, Rekening tersebut masih digunakan untuk menampung penerimaan dan baru ditutup pada 17 April 2024.

Bendahara Penerimaan menjelaskan untuk penerimaan yang berasal dari situs cagar budaya yang dalam pengelolaan berdasarkan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda), selama bulan Juni s.d. Agustus 2023 menggunakan SIMPONI dengan satker MCB dan mulai dari September 2023 menggunakan rekening penampungan

penerimaan sementara dan selanjutnya ketika rekening RPL BLU MCB sudah diterbitkan menggunakan rekening tersebut.

Bendahara Penerimaan melakukan pembukuan, berdasarkan informasi yang diterima dari bagian kerja sama ataupun petugas/pengelola penerimaan dan berdasarkan monitoring atau perekapan rekening koran yang digunakan untuk menampung setiap penerimaan. Sejak MCB terbentuk sampai dengan pemeriksaan dilakukan, MCB belum menetapkan Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan tidak terdapat SOP atau dokumen terkait lainnya yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan yang ada di MCB.

Hasil pengujian atas pembukuan dan dokumen terkait atas pengelolaan penerimaan/pendapatan MCB diketahui permasalahan sebagai berikut.

1) Pembukaan rekening penampungan penerimaan sementara pada 6 September 2023 tidak berdasarkan peraturan pembukaan rekening yang berlaku

   Pembuatan rekening hanya didasarkan atas surat permohonan dari Kepala Bagian Tata Usaha MCB dan tidak ada persetujuan dari KPPN. Selanjutnya, diperoleh informasi bahwa penutupan atas rekening penampungan penerimaan sementara tersebut baru diinisasi atau direncanakan pada 15 Januari 2024 dan baru ditutup pada akhir Maret 2024 karena rekening tersebut masih digunakan untuk rekening penampungan atas tiket pameran dan pertunjukan musik *Band Godbless* yang dilaksanakan pada 17 Februari s.d. 1 Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya aktif yang dilakukan dalam rangka menertibakan administrasi penggunaan rekening RPL BLU yang sudah terbit pada 21 Desember 2023.

2) Pencatatan penerimaan pendapatan oleh bendahara penerimaan tidak informatif dan lengkap.

   Pada dokumen pembukuan yang semula diterima dari Bendahara Penerimaan atas pembukuan yang dilakukan dalam rangka pengeolaan PNBP hanya merupakan rekapan atas nilai penerimaan yang diperoleh setiap bulannya dan telah disetor serta beberapa dokumen tersebut berasal dari pencatatan yang dilakukan oleh pengelola/petugas penerimaan yang berbeda satu sama lain. Informasi yang disajikan diantaranya hanya nama unit, nilai yang sudah disetor dan tanggal penyetoran. Catatan penerimaan tidak sepenuhnya menjelaskan secara lengkap penerimaan yang disetorkan tersebut atas penerimaan pada tanggal atau atas periode kapan saja.

3) *Cut off* pengakuan pendapatan BLU MCB

   Penerimaan yang dilaporkan pada Laporan Keuangan MCB atas pendapatan Museum senilai Rp224.834.500,00 terdiri dari:

   a) Pendapatan yang disetorkan ke kas negara melalui SIMPONI untuk pendapatan yang disetorkan selama 6 Juli s.d. 1 September 2023 untuk pendapatan yang diterima tanggal 5 Juli s.d. 1 September 2023.

   b) Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya senilai Rp507.703.075,00 merupakan Pendapatan yang disetorkan ke kas negara melalui SIMPONI atas pendapatan yang disetorkan pada tanggal 11 Juli s.d. 29 September 2023 untuk pendapatan yang diterima periode bulan Juni s.d. Agustus 2023 pada beberapa Candi yang merupakan penerimaan bagi hasil atas pengelolaan tiket.

Berdasarkan data SIMPONI, penyetoran pendapatan bulan Juni 2023 diakui oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Sesuai dengan perubahan struktur organisasi, pendapatan sejak bulan Juni 2023 seharunya diakui sebagai pendapatan BLU MCB.

4) Terdapat penerimaan yang seharusnya diakui sebagai penerimaan PNBP MCB namun tidak disetorkan dan dilaporkan sebagai pendapatan atas nama MCB senilai Rp160.037.800,00 yaitu atas Pendapatan dari Pemanfaatan Sewa, Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp83.278.500,00 dan Pendapatan Sejarah Kebudayaan Lainnya senilai Rp76.759.300,00. Berdasarkan data SIMPONI, pendapatan senilai Rp160.037.800,00 tersebut dilaporkan dan diakui sebagai bagian dari PNBP pada satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX. Pendapatan senilai Rp83.278.500,00 merupakan Pendapatan atas pemanfaatan sewa atas Rotterdam selama bulan Juni s.d. Desember 2023 dan pendapatan senilai Rp76.759.300,00 merupakan pendapatan atas sejarah dan kebudayaan lainnya selama bulan Juni s.d. Desember 2023 setelah dikurangi atas penyetoran penerimaan atas bagi hasil selama bulan Mei 2023.

5) Berdasarkan data RPL Penerimaan MCB, diketahui terdapat penyetoran bagi hasil retribusi objek wisata Candi Gedongsongo dari Pemkab Semarang senilai Rp797.666.350,00 yang merupakan penerimaan bagi hasil bulan April s.d. November 2023 (Triwulan II s.d. IV). Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Ditjen. Kebudayaan dan Perum Kehutanan Negara Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara tentang Pemanfaatan Kawasan dan Bagi Hasil Retribusi Masuk Objek Wisata Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang nomor 9438/F/KU/2020 pelaksanaan pembayaran bagi hasil dibayarkan empat kali dalam satu tahun atau setiap triwulan sekali. Pembayaran triwulan I direalisasikan pada bulan April, pembayaran triwulan II direalisasikan pada bulan Juli, pembayaran triwulan III direalisasikan pada bulan Oktober, dan pembayaran triwulan IV sampai dengan Bulan November direalisasikan pada bulan Desember tahun berkenan dan kekurangan pembayaran bulan Desember di tahun berkenan dibayarkan bersamaan pada pembayaran triwulan pertama tahun berikutnya. Namun, realisasinya atas penerimaan dari bagi hasil triwulan II dan triwulan III baru disetorkan secara bersama-sama dengan penyetoran bagi hasil retribusi triwulan IV yaitu pada Desember 2023.

e. Pengenaan PPh atas jasa giro pada satker Ditjen Diktiristek senilai Rp221.538.511,45 tidak sesuai ketentuan

1) Universitas Jember (Unej) senilai Rp20.671.511,60

Berdasarkan pemeriksaan enam rekening koran yang dimiliki Unej, selama tahun 2023, jasa giro pada rekening tersebut dikenakan Pph senilai Rp45.504.099,60. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 terdapat transaksi pengembalian potongan pajak atas jasa giro senilai Rp24.832.588,00 melalui *autodebet* ke rekening yang sama yaitu rekening 0021001002666303 pada BRI a.n RPL 131 BLU UNEJ untuk OPS UKOM. Pengembalian potongan pajak atas bunga jasa giro oleh BRI bersamaan dengan pengembalian atas potongan pajak jasa giro tahun 2022 senilai Rp97.328.094,00 sedangkan pada tiga rekening BRI yang lainnya, belum dilakukan pengembalian karena jumlahnya kecil. Sementara itu, pihak Bank Mandiri dan BSI belum melakukan pengembalian potogan pajak atas bunga jasa giro karena tidak ada PKS atas rekening tersebut.

Wakil Rektor IV Unej pada tanggal 6 November 2023 telah bersurat kepada Pimpinan BSI, BRI, dan BTN agar dilakukan addendum atas tiga PKS Perbankan yang telah ada, Namun demikian, sampai dengan bulan Maret 2024, masih terdapat potongan pajak atas jasa giro yang belum dikembalikan senilai Rp20.671.511,60 (Rp45.504.099,60 – Rp24.832.588,00).

2) Universitas Mulawarman (Unmul) senilai Rp131.525.843,85

Pendapatan jasa giro pada dua rekening operasional BLU Unmul dikenakan Pph senilai Rp131.525.843,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36. Jasa Giro Dikenakan Pajak Penghasilan pada Unmul

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Pph (Rp)
1	0001470130000348	RPL 046 BTN Samarinda	72.514.505,40
2	11509606	RPL 046 BPD Kaltimtara	59.011.338,45
Jumlah			**131.525.843,85**

Koordinator Keuangan Unmul menjelaskan bahwa, untuk menindaklanjuti hasil LHP Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2022 atas pengenaan Pph tersebut, Unmul sudah mengirimkan surat kepada PT BTN (Persero) Tbk dan Bank Kaltimtara Kantor Cabang Utama sebanyak dua kali Tahun 2023 dan satu kali Tahun 2024. Namun hingga pemeriksaan dilakukan tanggal 27 Maret 2023, belum ada tanggapan dari dua bank atas ketiga surat tersebut.

3) Universitas Negeri Medan (Unimed) senilai Rp69.341.156,00

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito atas dana yang tersimpan pada Bank Sumatera Utara (Sumut) yang dikenakan Pph senilai Rp69.341.156,00. Atas permasalahan ini, menurut Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa Unimed sudah pernah mengirimkan surat kepada Bank Sumut terkait permohonan penghentian pengenaan pajak atas dana Unimed yang tersimpan di Bank Sumut namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, surat tersebut belum dapat ditunjukkan kepada Tim BPK.

f. Pihak ketiga belum melakukan pembayaran kerjasama senilai Rp144.658.928,00

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pembayaran dan kerjasama menunjukkan terdapat pendapatan yang belum dilakukan pembayaran pihak ketiga dengan uraian sebagai berikut.

1) Ditjen Kebudayaan

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Nomor 556/594/416-116/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Laporan Bagi Hasil yang Belum Terbayar, diketahui penerimaan atas bagi hasil pelestarian kawasan Cagar Budaya Trowulan yang belum dibayarkan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto senilai Rp119.213.750,00 yaitu atas Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya terkait dengan bagi hasil atas pendapatan tiket museum/candi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Bagi Hasil yang Belum Disetor oleh Pemkab Mojokerto

No.	Nama Museum/ Candi	Nilai Bagi Hasil (Rp)
1	Candi Brahu	13.231.500,00

No.	Nama Museum/ Candi	Nilai Bagi Hasil (Rp)
2	Candi Bajang Ratu	12.448.500,00
3	Candi Tikus	9.862.500,00
4	Museum Trowulan	83.671.250,00
Jumlah		**119.213.750,00**

Ditjen Kebudayaan dhi MCB belum memiliki mekanisme monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan dan realisasi dari PKS tersebut di atas sehingga tidak mengetahui hak pendapatan dari pemda.

2) Untan

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah/lahan untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukung antara PT TS dengan Untan Nomor 10140/UN22/KS/2018 Nomor PKS.519/LG.05/AR.004/IV/2018 tanggal 30 April 2018 diketahui bahwa jangka waktu perjanjian selama lima tahun terhitung efektif sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 dengan harga sewa Rp254.613.780,00. Berdasarkan data rekapitulasi pendapatan dan wawancara dengan Bendahara Penerimaan menjelaskan PT TS telah melakukan pembayaran senilai Rp229.168.602,00 pada tanggal 9 Juli 2018, sehingga masih terdapat pendapatan sewa yang belum dibayar senilai Rp25.445.178,00 (Rp254.613.780,00 – Rp229.168.602,00).

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Lampiran 1

1) PSAP Nomor 02 Paragraf 24 yang menyatakan bahwa Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) PSAP Nomor 12 Paragraf 26 yang menyatakan bahwa Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU

1) Paragraf 76 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan.

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Paragraf 78 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LO pada BLU yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

c. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 28 Tahun 2020

1) Pasal 1 Ayat (11) yang menyatakan bahwa Sewa adalah Pemanfaatan BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

2) Pasal 29 Ayat (7) yang menyatakan bahwa Sewa BMN/D dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat: (a) para pihak yang terkait dalam perjanjian, (b) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu, (c) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, dan (d) hak dan kewajiban para pihak.

3) Pasal 29 ayat (9) yang menyatakan bahwa Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa BMN/D.

d. PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022

1) Pasal 31:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan, hasil per investasi dana, dan/atau kebijakan Pemerintah.

2) Pasal 35:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam penetapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah BLU ditetapkan.

c) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Menteri/Pimpinan Lembaga menjelaskan alasan keterlambatan penyampaian usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan.

3) Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penetapan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dituangkan dalam bentuk PMK.

4) Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau Pemimpin BLU.

5) Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk pertanggungjawaban pendapatan sebagaimana dimaksud dala Pasal 63 ayat (1) dan/atau belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang dapat digunakan langsung, BLU mengajukan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU kepada KPPN paling kurang satu kali dalam satu triwulan.

6) Pasal 69:

   a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaporkan sebagai PNBP Kementerian Negara/Lembaga.

   b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan pertanggungjawaban pendapatan BLU berupa pengesahan pendapatan kepada KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

7) Pasal 74 Ayat (5) yang menyatakan bahwa bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dikenakan pajak.

8) Pasal 76:

   a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan yang berasal dari pendapatan dari jasa layanan, hasil investasi, hibah, dan sumber penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disetorkan langsung ke Rekening Operasional Penerimaan BLU.

   b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal penerimaan BLU diterima oleh fungsi kasir, fungsi kasir menyetorkan penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja saat penerimaan diterima ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kurang saji pendapatan BLU dari penerimaan yang tidak disetor ke kas BLU senilai Rp5.669.893.081,00:

b. Kurang saji belanja senilai Rp5.320.937.272,00:

c. Kehilangan pendapatan senilai Rp15.000.000,00 atas pemberian diskon penyewaan BMN pada PPNS yang belum memiliki pedoman;

d. Pendapatan dari pemanfaatan BMN yang terlambat diterima senilai Rp233.551.000,00 tidak dapat segera dimanfaatkan masing-masing pada PTN dan Politeknik;

e. Potensi penyalahgunaan atas Pendapatan BLU yang belum memiliki dasar hukum yang jelas, pendapatan yang dipungut lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan dan penatausahaan pendapatan hasil pengelolaan area perkebunan yang tidak tertib;

f. Kesalahan pengklafisikasian penerimaan/pendapatan BLU MCB atas PNBP satker dalam Penyajian LK Ditjen Kebudayaaan;

g. Penyajian penerimaan/pendapatan BLU MCB tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya;

h. Berkurangnya pendapatan senilai Rp221.538.511,45 atas jasa giro yang dipotong pajak; dan

i. Potensi kurangnya penerimaan/pendapatan senilai Rp144.658.928,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA terkait kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan BLU;

b. Penanggung jawab pengelola pemanfaatan BMN masing-masing satker kurang optimal dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya;

c. Kepala MCB tidak cermat dalam menerapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU;

d. Dirjen Kebudayaan kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan likuidasi dan penggabungan satker di bawah Ditjen Kebudayaan dalam rangka pembentukan BLU MCB; dan

e. MCB tidak membuat POS atau dokumen sejenis yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan yang ada di MCB.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan pengelolaan Pendapatan BLU secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Kepala BSKAP supaya memerintahkan Kepala BPPP untuk:

   1) melaporkan semua PKS dengan pihak ketiga atas dukungan pelaksanaan SNPMB kepada Kepala BSKAP sebagai bahan monev;

   2) segera menyelesaikan harmonisasi peraturan pengelolaan pendapatan BLU;

b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan Rektor Untan, Undana, UHO, UPR, UNMUL, Unimed, dan Direktur Polsri, Polines, PPNS memerintahkan pengelola pendapatan BLU agar menyetorkan seluruh penerimaan BLU ke kas BLU sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Direktur PPNS untuk menetapkan standar operasional prosedur terkait pemberian diskon/potongan harga atas pemanfaatan BMN;

d. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan Rektor Untan dan Direktur Polsri, Polban, PNUP memerintahkan penanggung jawab pengelola pemanfaatan BMN masing-masing satker memastikan calon penyewa BMN telah membayar sewa sebelum perjanjian ditandatangani;

e. Kepala BSKAP untuk memerintahkan Kepala BPPP supaya membuat standarisasi tarif pembuatan soal;

f. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan seluruh Rektor PTN dan Direktur Politeknik untuk menginventarisasi sumber pendapatan kerjasama dan/atau pemanfaatan BMN serta menetapkan tarif kerjasama/pemanfaatan BMN tersebut ke dalam SK Rektor/Direktur sebagai dasar pemungutan pendapatan;

g. Dirjen Diktiristek memerintahkan Rektor Untan segera:

   1) memperpanjang PKS yang telah berakhir;

2) merekonsiliasi pendapatan dengan PT. Telekomunikasi Seluler untuk memastikan hak Untan atas Kerjasama sewa lahan.

h. Dirjen Kebudayaan untuk:

1) menuntaskan proses likuidasi dan penggabungan satker di bawah Ditjen Kebudayaan dalam rangka pembentukan BLU MCB;

2) memerintahkan Kepala MCB agar:

a) menerapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU dalam mengelola pendapatan BLU;

b) membuat POS atau dokumen sejenis yang mengatur tentang pengelolaan Pendapatan di MCB beserta monitoringnya;

c) memerintahkan Kepala MCB melakukan rekonsiliasi dengan Pemkab Mojokerto terkait penerimaan bagi hasil kerjasama pelestarian kawasan Cagar Budaya; dan

i. Dirjen Diktiristek untuk memerintahkan Rektor Unej, Unmul dan Unimed berkoordinasi dengan bank mitra terkait penghentian pemungutan pajak penghasilan atas jasa giro pada rekening yang digunakan BLU.

B. Belanja

1. Kemendikbudristek Belum Menetapkan Kebijakan Penggunaan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Sesuai Dengan Amanat PP Nomor 18 Tahun 2022 Sehingga Pelakasanaan *Automatic Adjustment* Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Tidak Memiliki Kriteria Yang Jelas

UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengaturan prioritas anggaran pendidikan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007, ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengenai frasa "*gaji pendidik dan*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengalokasian dana pendidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) diatur dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022. Dalam PP tersebut menyatakan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari Belanja Negara.

LK Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (*audited*) pada bagian Catatan Nomor B.3 Catatan Penting Lainnya pada angka 13 Pengeluaran Negara untuk Pendidikan (*mandatory spending*), telah mengungkapkan anggaran pendidikan melalui komponen belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan pembiayaan senilai Rp624.252.487.592.000,00 dengan realisasi senilai Rp513.387.161.300.633,00. Anggaran dan realisasi bidang pendidikan tersebut juga

telah dirinci di dalam Lampiran 3.E LKPP Tahun 2023 (*audited*), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 38. Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Komponen Anggaran Pendidikan	Anggaran Awal (Perpres Nomor 130 Tahun 2022)	Anggaran Perubahan(Perpres Nomor 75 Tahun 2023)	Realisasi
1	**Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat**	**237.140.125.629.000**	**249.157.344.329.000**	**187.390.599.800.267**
	• Anggaran Pendidikan pada K/L	161.562.690.962.000	173.579.909.662.000*	184.628.605.678.286
	• Anggaran Pendidikan pada BA BUN	75.577.434.667.000	75.577.434.667.000	2.761.990.121.981
2	**Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah**	**305.595.143.263.000**	**305.595.143.263.000**	**305.996.561.500.366**
	• DBH dan DAU yang diperkirakan untuk pendidikan	174.847.718.165.000	174.847.718.165.000	177.121.046.742.796
	• DAK pendidikan	128.668.425.098.000	128.668.425.098.000	126.229.278.186.884
	• Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.079.000.000.000	2.079.000.000.000	2.646.236.570.686
3	**Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan**	**69.500.000.000.000**	**69.500.000.000.000**	**20.000.000.000.000**
Anggaran *Mandatory Spending* Pendidikan		**612.235.268.892.000**	**624.252.487.592.000**	**513.387.161.300.633**
Total Belanja Negara		**3.061.176.344.456.000**	**3.117.176.344.456.000**	
%		**20,00%**	**20,03%**	

Sesuai tabel di atas, besaran anggaran *mandatory spending* Bidang Pendidikan telah sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja negara.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2021 No 50c/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 telah mengungkapkan permasalahan terkait *mandatory spending*, yaitu **Pemerintah belum memiliki pengaturan lebih lanjut atas kriteria dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *mandatory spending* dalam APBN**. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan K/L terkait antara lain untuk menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *mandatory spending* dalam APBN. Tindak Lanjut atas hal tersebut Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan.

Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L melalui pemblokiran sementara anggaran Belanja K/L. Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan AA, antara lain: (1) belanja pegawai dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya), (2) belanja modal yang dapat diefisienkan dan tidak mendesak atau dapat ditunda, (3) bantuan sosial yang tidak permanen, serta (4) kegiatan yang masih diblokir dan diperkirakan tidak dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir Semester I Tahun 2023. Sedangkan anggaran yang dikecualikan dari kebijakan AA yaitu: (1) belanja terkait bantuan sosial yang permanen, meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako; (2) belanja terkait tahapan Pemilu; (3) belanja terkait IKN; (4) belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak; dan (5) belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*). Anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan tidak termasuk anggaran yang dikecualikan dari kebijakan AA.

Pemeriksaan lebih lanjut atas AA ditemukan permasalahan kebijakan AA membatasi upaya untuk merealisasikan anggaran Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

a. Kemendikbudristek belum menyusun kebijakan penggunaaan anggaran Pendidikan turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2022

   Dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2021, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penetapan kriteria anggaran pendidikan merupakan kewenangan dari Kemendikbudristek. Namun, hingga saat ini belum ditetapkan kriteria lebih lanjut melalui Permendikbudristek. Selain itu, Direktorat Jenderal Anggaran telah menyusun SOP Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penyusunan Anggaran. Atas hal tersebut Kepala Bagian TU Biro Perencanaan Kemendikbudtristek juga menjelaskan bahwa belum menyusun turunan atas peraturan tersebut dikarenakan adanya rekomendasi dari Direktorat HPP Kemenkeu terkait peraturan turunan tersebut ditetapkan dalam bentuk Kepmen. Rekomendasi tersebut belum sejalan dengan tujuan penyusunan turunan PP tersebut, turunan yang akan disusun mengatur juga K/L lainnya di luar Kemendikbudristek yang terkait dengan bidang Pendidikan.

b. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* belanja kementerian/lembaga TA 2023 pada Kemendikbudristek dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39. Perhitungan AA Tahun 2023 pada Kemendikbudristek

No	Uraian	AA Nasional (Triliun	AA Kemendikbud (Triliun Rp)
1	Total AA TA 2023		Rp4,91
	a. Belanja Pegawai	Rp12,79	Rp0,46
	b. Belanja Barang	Rp26,61	Rp4,14
	c. Belanja Modal	Rp10,82	Rp0,31
2	Blokir Belanja Pegawai (dan revisi DIPA)	Rp50,23	Rp1,46

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa anggaran Kemendikbudristek yang mendapat AA adalah senilai Rp4,91 triliun seluruhnya merupakan anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan. Selanjutnya, AA tersebut diikuti dengan revisi DIPA khusus anggaran belanja pegawai senilai Rp1,46 triliun.

Berdasarkan penjelasan dari Biro Perencanaan Kemendikbudristek, sampai dengan 27 Juni 2023 terdapat pemblokiran sebanyak 153 Rincian Outout (RO) senilai Rp4.920.016.382.000,00 **(Rincian pada Lampiran B.1.1**). Pemblokiran tersebut berdampak kepada anggaran yang mendukung output Prioritas Nasional yang pada akhirnya juga menjadi objek yang diblokir. Dengan demikian blokir AA menghambat target pelaksanaan program dan kegiatan serta menghambat target pencapaian output yang sudah ditetapkan. Untuk dapat dilakukan proses buka blokir AA, Kemendikbudristek juga harus melakukan pembahasan anggaran kembali atas anggaran yang sudah disetujui pada saat anggaran tersebut diusulkan

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023 Pasal 23:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran Pendidikan direncanakan senilai Rp612.235.268.892.000,00 (enam ratus dua belas triliun dua ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk investasi pemerintah pada pos pembiayaan untuk dana abadi di bidang pendidikan.

b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

c. PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 80

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran pendidikan dalam APBN setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.

2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama- sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

d. PMK Nomor 86 Tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBN, Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi anggaran fungsi pendidikan pada seluruh kementerian negara/lembaga meliputi: (a) Sub fungsi pendidikan anak usia dini; (b) Sub fungsi pendidikan dasar; (c) Sub fungsi pendidikan menengah; (d) Sub fungsi pendidikan non formal dan formal; (e) Sub fungsi pendidikan tinggi; (f) Sub fungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan; (g) Sub fungsi pendidikan keagamaan; (h) Sub fungsi litbang pendidikan; dan (i) Sub fungsi pendidikan lainnya.

e. Surat Edaran (SE) Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendidikan yang menyatakan bahwa Kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai dengan anggaran pendidikan antara lain:

1) Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah;

2) Pelatihan keterampilan untuk masyarakat umum yang tidak berbasis pada satuan Pendidikan;

3) pendidikan pascasarjana (master, doktor) bagi pegawai kementerian/lembaga;

4) kegiatan yang sebelumnya dibiayai melalui fungsi selain fungsi Pendidikan; dan/atau

5) satuan pendidikan menengah milik kementerian/lembaga yang menjadi kewenangan Pemda sesuai dengan UU tentang Pemda.

Hal tersebut mengakibatkan anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang sudah dialokasikan tidak dapat direalisasikan dan memberikan manfaat sesuai tujuan.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kemendikbudristek selaku kementerian teknis tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan usulan kriteria Program/kegiatan (RO) yang bisa dikecualikan dari kebijakan AA; dan
b. Kemendikbudristek belum menyusun kebijakan penggunaan anggaran Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan menjelaskan bahwa:

a. Blokir AA merupakan instrumen kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan untuk mengatur *cash flow* pemerintah. Tren kenaikan jumlah anggaran yang diblokir pada DIPA Kemendikbudristek terus meningkat pada setiap tahunnya.
b. Tahun 2023 total anggaran Kemendikbudristek yang dibokir AA senilai Rp4,9 triliun (6,13% dari total pagu awal).
c. Besaran blokir AA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dengan kebijakan waktu pembukaan blokir ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, berdasarkan hasil pembahasan kembali pada saat proses buka blokir (sebagai salah satu syarat buka blokir)
d. Besarnya anggaran yang diblokir berdampak kepada anggaran yang mendukung output Prioritas Nasional yang pada akhirnya juga menjadi objek yang diblokir. Dengan demikian blokir AA menghambat target pelaksanaan program dan kegiatan serta menghambat target pencapaian output yang sudah ditetapkan.
e. Hal ini terjadi salah satu penyebabnya karena lamanya proses buka blokir AA yang mengharuskan dilakukan pembahasan anggaran kembali atas anggaran yang sudah disetujui pada saat anggaran tersebut diusulkan.
f. Hal tersebut berdampak juga pada rendahnya capaian target realisasi anggaran. Sehingga agar lebih efisien diharapkan proses buka blokir AA tersebut seharusnya tidak mengharuskan kembali dilakukannya pembahasan anggaran, karena persyaratan administrasi dan data dukung lainnya sudah terpenuhi.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyusun dan menetapkan aturan turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2022 terkait mekanisme usulan dan kriteria penggunaan anggaran pendidikan melalui Permendikbudristek.

2. Pengelolaan Belanja Pegawai pada Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan

Kemendikbudristek menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pegawai Tahun 2023 senilai Rp24.437.508.594.000,00 dan Rp23.956.235.896.196,00 atau 98,03% dari anggaran. Belanja pegawai terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjungan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan pajak penghasilan, uang makan, tunjangan umum, dan tunjangan lembur.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Belanja Pegawai ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

a. Penatausahaan pembayaran tunjangan tidak sesuai ketentuan teknis terkait pengelolaan belanja pegawai

1) Pegawai dengan status tugas belajar dibayarkan tunjangan kinerja secara penuh

a) Ditjen GTK

Hasil pemeriksaan terhadap realisasi Belanja Pegawai pada BBGP/BGP menunjukkan bahwa atas tiga pegawai dengan status tugas belajar, Bendahara Gaji belum melakukan penyesuaian pembayaran tunjangan kinerja menggunakan perhitungan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tugas belajar. Berdasarkan perhitungan Bendahara Gaji, terdapat selisih pembayaran tunjangan kinerja atas belum disesuaikannya tunjangan kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 40. Selisih Perhitungan Pembayaran Tukin

No.	Satker	Nama	Perguruan Tinggi	Periode	Selisih (Rp)
1	BGP Prov. Bali	NMA	Undiskha	Okt s.d. Des 2023	4.699.140,00
2	BGP Prov. Bali	II	UT	Okt s.d. Des 2023	4.212.480,00
3	BBGP Prov. Jawa Barat	IRH	Unpad	Agust s.d. Okt 2023	4.699.140,00
Jumlah					**13.610.760,00**

Penjelasan pada tabel di atas diuraikan sebagai berikut.

(1) BGP Prov. Bali

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) BGP Prov. Bali menjelaskan bahwa berkas untuk pengajuan SK Tugas Belajar telah diserahkan ke Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, a.n NMA terdapat kekurangan dokumen berupa dokumen perjanjian tugas belajar, sedangkan atas nama II telah lengkap dan Biro SDM belum menerbitkan SK tugas belajar atas nama pegawai tersebut.

(2) BBGP Prov. Jawa Barat

PPABP BBGP Prov. Jawa Barat menjelaskan bahwa SK tugas belajar belum terbit karena terdapat kekurangan dokumen berupa surat persetujuan dari Kepala BBGP Prov. Jawa Barat. Kekurangan dokumen tersebut baru dilengkapi pada April 2024. Atas kondisi tersebut, terdapat potensi kelebihan pembayaran tunjangan pada Tahun 2023 pada BBGP Prov. Jawa Barat karena kurangnya penyesuaian perhitungan pembayaran tunjangan kinerja sejak Agustus s.d. Oktober 2023 yang seharusnya telah menggunakan perhitungan tunjangan kinerja bagi pegawai pelajar senilai Rp4.699.140,00.

b) Itjen

Terdapat dua orang pegawai Itjen yang melakukan tugas belajar namun masih mendapatkan tunjangan kinerja 100% sampai dengan terbitnya SK pengangkatan kembali, sehingga terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja senilai Rp22.924.479,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 41. Pemberian Tukin pada Pegawai Tugas Belajar

No	Nama	Bulan	Jumlah Neto (Rp)	Pajak (Rp)	Jumlah Bruto (Rp)	Seharusnya (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
1	FRA	Sep-22	5.979.200,00	298.960,00	6.278.160,00	3.587.520,00	2.391.680,00
		Okt-22	5.979.200,00	298.960,00	6.278.160,00	3.587.520,00	2.391.680,00
		Nov-22	5.973.221,00	298.661,00	6.271.882,00	3.583.933,00	2.389.288,00
		Des-22	5.979.200,00	298.960,00	6.278.160,00	3.587.520,00	2.391.680,00
		Jan-23	5.946.314,00	297.316,00	6.243.630,00	3.567.788,00	2.378.526,00
		Feb-23	5.967.242,00	298.362,00	6.265.604,00	3.580.345,00	2.386.897,00
		Mar-23	3.574.964,00	178.748,00	3.753.712,00	5.967.242,00	(2.392.278,00)
							11.937.473,00
2	EDH	Agu-21	4.592.852,00	229.643,00	4.822.495,00	2.755.711,00	1.837.141,00
		Sep-21	4.569.877,00	228.494,00	4.798.371,00	2.741.926,00	1.827.951,00
		Okt-21	4.595.150,00	229.758,00	4.824.908,00	2.757.090,00	1.838.060,00
		Nov-21	4.574.475,00	228.724,00	4.803.199,00	2.744.685,00	1.829.790,00
		Des-21	4.595.150,00	229.758,00	4.824.908,00	2.757.090,00	1.838.060,00
		Jan-22	4.540.009,00	227.000,00	4.767.009,00	2.724.005,00	1.816.004,00
							10.987.006,00
TOTAL							**22.924.479,00**

Untuk pegawai atas nama FRA pada bulan Maret telah mendapatkan SK pengangkatan kembali, namun pembayaran tukin diberikan 60% dari yang seharusnya diterima, sehingga pada bulan Maret 2023 terjadi kekurangan pembayaran tukin kepada pegawai yang bersangkutan.

2) Perhitungan pembayaran tunjangan kinerja tidak sesuai dengan data kehadiran dalam aplikasi SDM

Tunjangan kinerja pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja setiap bulannya sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya. Capaian kinerja pegawai dimaksud melalui penghitungan terhadap capaian kerja dan kehadiran. Pada Kemendikbudristek, komponen capaian kerja setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan tunjangan kinerja pegawai senilai 90% pada bulan Januari s.d. September 2023 dan senilai 60% pada bulan Oktober s.d Desember 2024. Sedangkan komponen kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan tunjangan kinerja pegawai senilai 10% pada bulan Januari s.d. September 2023 dan senilai 40% pada bulan Oktober s.d Desember 2023. BBPMP Prov. Jawa Barat dan BPMP Prov. Kalimantan Timur menggunakan aplikasi kehadiran sehingga diharapkan resiko atas kesalahan perhitungan absensi pegawai terminimalisir.

Hasil pemeriksaan atas pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2023 pada BBPMP Prov. Jawa Barat dan BPMP Prov. Kalimantan Timur menunjukkan terdapat kelebihan

pembayaran Tunjangan Kinerja senilai Rp6.705.111,00 (Rp5.285.213,00 + Rp1.419.898,00).

a) BBPMP Prov. Jawa Barat

Hasil perbandingan perhitungan tunjangan kinerja antara aplikasi absensi dengan rekapitulasi pembayaran tunjangan kinerja menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja satu pegawai a.n SS senilai Rp5.285.213,00. Dalam aplikasi absensi menunjukkan yang bersangkutan cuti sakit dari tanggal 6 Maret s.d. 30 April 2023, namun tidak dilakukan pemotongan 60% untuk tunjangan kinerja Bulan April.

Bagian Kepegawaian BBPMP Prov. Jawa Barat menjelaskan status kepegawaian SS saat ini, yang bersangkutan telah pensiun TMT 1 November 2023.

b) BPMP Prov. Kalimantan Timur

Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada 29 orang pegawai BPMP Prov. Kalimantan Timur senilai Rp1.419.898,00 dikarenakan tunjangan kinerja Bulan Desember 2023 dibayarkan penuh dengan perhitungan absensi 100% (tidak ada potongan terkait absen). Berdasarkan dokumen pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2024, diketahui belum ada perhitungan pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan absensi riil bulan Desember 2023 dengan rincian pada **Lampiran B.2.1**. Hal tersebut diakui oleh Bendahara Gaji dan Bagian Kepegawaian BPMP Prov. Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa tunjangan kinerja pada Bulan Desember 2023 dibayarkan 100% tanpa memperhitungkan absen dan pada bulan Januari 2024 tidak dilakukan penghitungan pemotongan atas absensi riil bulan Desember 2023.

3) Tunjangan umum, tunjangan fungsional, dan tunjangan tugas belajar masih diberikan pada pegawai yang cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, dan tugas belajar

Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja pegawai menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan umum, tunjangan fungsional, dan tunjangan tugas belajar bagi pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, dan tugas belajar tidak sesuai ketentuan dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Kelebihan pembayaran tunjangan umum pada pegawai yang melaksanakan cuti besar dan tugas belajar lebih dari 6 bulan senilai Rp47.855.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran tunjangan umum menunjukkan bahwa 17 satker pada Ditjen Diksi membayarkan tunjangan umum kepada pegawai yang sedang cuti besar serta melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan senilai Rp47.855.000,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 42. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum

No	Nama Satker	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum (Rp)
1.	AKN Rejang Lebong	9.620.000,00
2.	BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	2.590.000,00
3.	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	2.590.000,00
4.	Poliwangi	5.180.000,00
5.	Politeknik Negeri Fakfak	740.000,00
6.	Politeknik negeri Indramayu	1.850.000,00
7.	Politeknik Negeri Lhoksumawe	10.500.000,00

No	Nama Satker	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum (Rp)
8.	Politeknik Negeri Sambas	7.770.000,00
9.	Politeknik Negeri Tual	1.480.000,00
10.	Politkenik Negeri Nusa Utara	2.220.000,00
11.	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	555.000,00
12.	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	185.000,00
13.	BBPPMPV BOE Malang	740.000,00
14.	Setditjen Diksi	555.000,00
15.	Polimedia	370.000,00
16.	Politeknik Negeri Samarinda	540.000,00
17.	Polban	370.000,00
Jumlah		**47.855.000,00**

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2**.

PPABP masing-masing satker menyatakan bahwa pemberian tunjangan umum bagi pegawai yang tugas belajar karena pegawai tersebut dihentikan pembayaran tunjangan fungsionalnya sehingga kepada pegawai tersebut diberikan tunjangan umum, sedangkan bagi pegawai yang sedang melaksanakan cuti besar, tunjangan umum diberikan karena PPABP tidak mendapat pemberitahuan cuti dari bagian SDM.

b) Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pada pegawai yang cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, dan tugas belajar senilai Rp1.582.274.550,00 serta potensi kelebihan pembayaran senilai Rp229.882.444,00

(1) Ditjen Diksi

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran tunjangan fungsional menunjukkan bahwa 25 satker pada Ditjen Diksi membayarkan tunjangan fungsional kepada pegawai yang sedang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan negara (CLTN), dan tugas belajar senilai Rp655.202.250,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 43. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional

No	Nama Satker	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional (Rp)
1.	Poliwangi	11.200.000,00
2.	Politeknik Negeri Fakfak	5.600.000,00
3.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)	33.050.000,00
4.	Politeknik Negeri Kupang	46.200.000,00
5.	Polinela	27.150.000,00
6.	Politeknik Negeri Lhoksumawe	11.500.000,00
7.	Politeknik Negeri Malang (Polinema)	102.825.000,00
8.	Politeknik Negeri Medan	40.900.000,00
9.	Politeknik Negeri Tanah Laut	14.300.000,00
10.	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	40.375.000,00
11.	Politeknik Negeri Jember	73.150.000,00
12.	Politeknik Negeri Nusa Utara	11.900.000,00
13.	Politeknik Negeri Tual	62.300.000,00
14.	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	12.530.000,00
15.	Politeknik Negeri Ambon	25.900.000,00
16.	Direktorat SMK	1.020.000,00

No	Nama Satker	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional (Rp)
17.	Politeknik Negeri Ketapang	2.100.000,00
18.	Polnep	2.800.000,00
19.	Polsri	5.600.000,00
20.	Polimedia	40.717.250,00
21.	Polnes	13.475.000,00
22.	Politeknik Negeri Bali (PNB)	31.750.000,00
23.	Politeknik Negeri Samarinda	3.760.000,00
24.	PENS	30.150.000,00
25.	Polban	4.950.000,00
Jumlah		**655.202.250,00**

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran B.2.3**.

Hasil wawancara dengan PPABP pada masing-masing satker menyatakan bahwa pemberian tunjangan fungsional bagi pegawai yang cuti besar, CLTN, dan tugas belajar karena:

(a) PPABP tidak mengetahui bahwa untuk pegawai yang melaksanakan cuti besar, CLTN, dan tugas belajar tidak mendapatkan tunjangan fungsional.

(b) PPABP tidak mendapatkan pemberitahuan atas pegawai yang melaksanakan cuti besar dan CLTN dari Bagian Kepegawaian.

Selain itu, hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran tunjangan belajar menunjukkan bahwa sembilan satker pada Ditjen Diksi masih membayarkan tunjangan belajar yang direalisasikan menggunakan MAK tunjangan fungsional senilai Rp420.880.000,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 44. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Tugas Belajar yang Menggunakan MAK Fungsional

No	Nama Satker	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Belajar (Rp)
1.	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	9.675.000,00
2.	Polban	69.725.000,00
3.	Polibatam	128.800.000,00
4.	Politeknik Negeri Madiun	7.000.000,00
5.	Politeknik Negeri Padang	23.400.000,00
6.	Politeknik Negeri Tanah Laut	8.400.000,00
7.	PNUP	55.805.000,00
8.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	81.675.000,00
9.	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	36.400.000,00
Jumlah		**420.880.000,00**

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran B.2.4**.

Hasil wawancara dengan PPABP masing-masing satker diketahui bahwa pembayaran tunjangan tugas belajar dibayarkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS Kemendikbudristek.

(2) Ditjen Diktiristek

Hasil pengujian atas dokumen pembayaran tunjangan fungsional dan SK tugas belajar menunjukkan bahwa terdapat pembayaran tunjangan fungsional pada delapan PTN senilai Rp736.074.744,00 kepada orang dosen yang telah melaksanakan tugas belajar selama lebih dari enam bulan, baik pegawai yang SK tubelnya belum diterbitkan, maupun yang telah dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 45. Pembayaran Tunjangan Fungsional kepada Dosen Yang Melaksanakan Tugas Belajar

No	PTN	Nilai Pembayaran (Rp)	Lampiran
A	**SK Tubel sudah diterbitkan**		
1	Untan	74.339.875,00	B.2.5
2	UPN Veteran Jawa Timur	59.952.425,00	B.2.6.a dan B.2.6.b
3	Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	79.925.000,00	B.2.7
4	Unimed	65.475.000,00	B.2.9
5	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)	157.500.000,00	B.2.10
6	Institut Teknologi Sumatera (Itera)	64.050.000,00	B.2.11
7	UPN Veteran Jakarta	4.950.000,00	B.2.12
	Jumlah A	**506.192.300,00**	
B	**SK Tubel belum terbit**		
1	Unimed	42.100.000,00	B.2.9
2	Untirta	119.940.000,00	B.2.10
3	UMRAH	67.842.444,00	B.2.8
	Jumlah B	**229.882.444,00**	
	Total (A + B)	**736.074.744,00**	

Dengan demikian, terhadap pembayaran tunjangan fungsional yang dibayarkan kepada pegawai yang SK tubelnya sudah terbit, menjadi kelebihan pembayaran senilai Rp506.192.300,00 sedangkan terhadap pembayaran tunjangan fungsional kepada pegawai yang SK tubelnya belum terbit, menjadi potensi kelebihan pembayarn senilai Rp229.882.444,00.

Atas hal tersebut Bendahara Gaji menyatakan bahwa, tetap dibayarkannya tunjangan fungsional kepada dosen yang sedang menjalankan tugas belajar karena dosen terlambat menyampaikan SK tugas belajar dosen tersebut kepada Bagian Keuangan/Bendahara Gaji.

4) Pembayaran tunjangan kinerja pada Direktorat Belmawa dan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (RTPM) tidak sesuai pedoman penataan sistem tunjangan kinerja pegawai negeri

Pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kemendikbudristek mengacu pada Perpres Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikbud yang telah diubah dengan Perpres Nomor 136 Tahun 2018. Kemendikbudristek telah menyusun beberapa ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan pemberian tukin kepada pegawai di Kemendikbudristek. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kemendikbudristek Tahun 2023 menggunakan dua mekanisme perhitungan sebagai berikut.

a) Periode Januari – September 2023

Perhitungan tukin pada periode ini berdasarkan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikbud pada Pasal 2 yaitu berdasarkan kelas jabatan dan memperhitungkan bobot komponen capaian kinerja senilai 90% dan kehadiran 10%. Ketentuan ini berlaku sehubungan dengan adanya Pandemi COVID-19.

b) Periode Oktober – Desember 2023

Perhitungan tukin pada periode ini berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tukin Pegawai di Lingkungan Kemendikbud yaitu tukin dibayarkan berdasarkan capaian kinerja pegawai yang dilakukan melalui perhitungan komponen capaian kerja senilai 60% dan kehadiran senilai 40% setiap bulan. Perubahan bobot komponen dalam perhitungan tukin dilakukan seiring dengan terbitnya SE Mendikbudristek Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kemendikbudristek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Pegawai Negeri, pembayaran tunjangan kinerja hanya berdasarkan kelas jabatan pegawai tanpa adanya pembobotan. Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada pegawai yang memenuhi kondisi sebagai berikut.

a) Mendapatkan nilai kerja pada tahun berjalan di bawah nilai Baik;

b) Tidak masuk kerja pada bulan berjalan;

c) Terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan

d) Pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah mengungkapkan permasalahan antara lain pembayaran tunjangan kinerja pada Ditjen Diktiristek tidak sesuai pedoman penataan sistem tunjangan kinerja pegawai negeri senilai Rp579.248.538,00. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan Biro SDM agar meninjau ulang Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020 agar mengacu pada ketentuan terkait sistem tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPanRB Nomor 63 Tahun 2011. Namun atas rekomendasi tersebut belum ada tindak lanjut dari Biro SDM dan kajian atau usulan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Hasil pemeriksaan dokumen pembayaran tunjangan kinerja pada Direktorat Belmawa dan Direktorat RTPM diketahui masih ditemukan kondisi yang sama pada Tahun 2023. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa capaian kerja seluruh pegawai setiap bulan dinyatakan tercapai, sehingga pengurangan tunjangan kinerja hanya berdasarkan komponen kehadiran yang bobotnya 10% atau 40%. Dengan demikian, perhitungan besaran pengurang kehadiran tidak diperhitungkan terhadap seluruh nilai tunjangan kinerja melainkan hanya senilai tunjangan kinerja dari bobot komponen kehadiran.

Hasil perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan ketentuan Kemendikbudristek dan ketentuan PermenPANRB diperoleh total selisih senilai Rp67.320.108,15, yang terdiri dari Direktorat Belmawa senilai Rp38.614.434,60 dan Direktorat RTPM senilai Rp28.705.673,55. Rincian perhitungan pada **Lampiran B.2.13 dan B.2.14**

b. Pembayaran gaji bagi pegawai yang diberhentikan sementara dari ASN

Hasil pengujian atas dokumen pembayaran, SK Kepegawaian, dan aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (Sister) pada UPN Veteran Jakarta diketahui terdapat pembayaran gaji bagi pegawai yang diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan dokumen SK Mendikbudristek, diketahui terdapat dua ASN di lingkungan UPN Veteran Jakarta yang diangkat menjadi anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Atas hal dimaksud, Mendikbudristek telah memberhentikan sementara dua ASN dimaksud dengan uraian sebagai berikut.

1) Sdr. MNH sesuai SK Mendikbudristekdikti Nomor 25755/M/11/2023 tanggal 05 Mei 2023; dan
2) Sdr. AA sesuai SK Mendikbudristekdikti Nomor 25754/M/11/2023 tanggal 05 Mei 2023.

Dengan demikian, terhitung mulai bulan Juni 2023, kedua ASN tersebut seharusnya tidak diberikan penghasilan sebagai PNS.

Hasil penelaahan lebih lanjut terhadap daftar nominatif pembayaran gaji UPN Veteran Jakarta menunjukkan bahwa kedua ASN tersebut tetap menerima gaji bulan Juni s.d Desember 2023 dan Gaji ke-13 senilai Rp60.348.600,00 (sdri AA senilai Rp35.689.900,00 dan sdr MNH senilai Rp24.658.700,00). Perhitungan pada **Lampiran B.2.15**

Bendahara Gaji menjelaskan bahwa kedua pegawai tersebut tetap dibayarkannya gaji tersebut karena Bendahara Gaji tidak memeroleh SK pemberhentian sementara sehingga tidak mengetahui bahwa kedua pegawai tersebut dihentikan sementara sebagai ASN.

c. Kelebihan pembayaran gaji pokok dan tunjangan sertifikasi kepada Dosen yang sedang melaksanakan CLTN

Berdasarkan hasil reviu atas dokumen daftar nominatif pembayaran gaji dan dokumen CLTN tahun 2023 pada Undana, diketahui terdapat satu pegawai a.n YRBB, yang melaksanakan CLTN namun gaji pokok dan tunjangan sertifikasi dosennya masih dibayarkan senilai Rp17.830.220,00.

Hasil konfirmasi dengan PPABP, diketahui bahwa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dihentikan apabila sudah ada dokumen keputusan/surat izin CLTN. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Koordinator Kepegawaian, BUK, Undana diketahui bahwa dokumen CLTN merupakan dokumen yang memerlukan izin dan proses pengajuannya sampai ke Pusat dhi. Biro SDM, Kemendikbudristek. Saat proses penerbitan izin CLTN tersebut, terdapat jeda waktu satu bulan lebih cepat antara pelaksanaan cuti pegawai dimaksud dibandingkan dengan keluarnya surat izin cuti dari Biro SDM, Kemendikbudristek, sehingga pembayaran gaji pokok tetap dibayarkan. Sedangkan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, Koordinator Kepegawaian menjelaskan bahwa pembayaran sertifikasi dosen yang dilakukan merupakan atas kinerja dosen pada semester sebelumnya.

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 diketahui bahwa bahwa PNS yang melaksanakan CLTN tidak berhak menerima penghasilan PNS. Selain itu, Koordinator Kepegawaian menjelaskan saat dokumen izin CLTN diusulkan ke Biro SDM, Bagian Kepegawaian, BUK, Undana tidak pernah melakukan koordinasi dengan Biro SDM, karena saat dokumen izin CLTN keluar, dokumen CLTN tersebut dikirim oleh Biro SDM langsung kepada yang bersangkutan.

d. Kekurangan pembayaran kenaikan gaji berkala

Sesuai dengan Peraturan Gaji PNS, gaji pokok diberikan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selain golongan ruang, masa kerja juga diperhitungkan dalam besaran pembayaran gaji pokok yang disebut dengan kenaikan gaji berkala. Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap dua tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pembayaran gaji pokok PNS pada UPN Veteran Jawa Timur diketahui bahwa terdapat sebanyak 71 PNS yang tidak dibayarkan kenaikan gaji berkalanya senilai Rp11.525.500,00. Rincian pada **Lampiran B.2.16.**

e. Pembayaran belanja pegawai Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tidak akurat

TPG non PNS diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan non PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Anggaran dan realisasi TPG non PNS masing-masing senilai Rp6.859.317.259.000,00 dan Rp6.791.828.996.800,00 dengan realisasi penerima TPG sebanyak 252.627 orang.

Adapun penetapan besaran TPG non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerima TPG tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Guru Non PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda diberikan:
   a) Setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada SK *inpassing* atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK *inpassing* atau penyetaraan; dan
   b) Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan.
2) Penerima TPG berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan setara 1 (satu) kali gaji pokok sesuai SK pengangkatan.
3) Besaran TPG diberikan berdasarkan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (SIM-Tun) yang diterbitkan/dikelola oleh Setditjen GTK.

Dalam pengelolaan pembayaran TPG non PNS digunakan beberapa sumber data dan aplikasi atau sistem informasi sebagai berikut:

1) Dapodik (Data Pokok Pendidikan) pada **https://dapo.kemdikbud.go.id** ;
2) Sistem Informasi Konsorsium Sertifikasi Guru (SIM-Tun) melalui **https://simtun.kemdikbud.go.id** ;

3) Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) pada **https://simbar.kemdikbud.go.id** ;

4) Data ASN (Data PNS/ASN Guru) melalui https://info.gtk.kemdikbud.go.id.

Secara umum alur penyaluran TPG non PNS dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Alur Penyaluaran TPG Non PNS

Pada Tahun 2023 Puslapdik merealisasikan pembayaran TPG Non PNS kepada Guru non PNS sebanyak 252.627 orang dengan total nilai senilai Rp6.791.828.996.800,00. Mekanisme pembayaran TPG sebagaimana dijelaskan di atas, telah melalui proses verval data secara berjenjang yaitu oleh: (1) Operator sekolah menggunakan bantuan aplikasi Dapodik, (2) Operator Dinas Pendidikan pada Pemda menggunakan SIM-Tun, dan (3) Ditjen GTK dan Puslapdik sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Tunjangan Profesi (SKTP). Setelah keseluruhan persyaratan terpenuhi, maka prosedur realisasi pembayaran dilaksanakan menggunakan aplikasi SIM-Bar.

Hasil pemeriksaan masih menemukan permasalahan ketidakakuratan realisasi pembayaran sebagai berikut.

1) Kekurangan pembayaran TPG non PNS Tahun 2023

Hasil pengujian secara populasi data hak bayar yang diperoleh dari GTK melalui aplikasi SIM-Tun dibandingkan dengan data realisasi pembayaran TPG non PNS yang diperoleh dari Puslapdik menunjukkan terdapat kekurangan pembayaran TPG non PNS Tahun 2023 kepada guru non PNS sebanyak 7.481 orang dengan total nilai Rp56.949.999.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46. Rincian Kekurangan Pembayaran TPG Non PNS Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Kewajiban bayar Pemerintah Pusat (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	Kekurangan Pembayaran (Rp)
1	DIKDAS	1.695	29.099.150.300	17.123.893.900	11.975.256.400
2	DIKMENSUS	4.743	110.814.908.500	74.115.240.800	36.699.667.700
3	PAUD	695	16.407.749.900	11.099.871.500	5.307.878.400
4	TENDIK	348	7.305.236.200	4.338.039.700	2.967.196.500
Jumlah		**7.481**	**163.627.044.900**	**106.677.045.900**	**56.949.999.000**

Perhitungan di atas telah memperhitungkan kelebihan pembayaran Tahun 2022. Berdasarkan konfirmasi data dan penelusuran yang dilakukan oleh Puslapdik, atas data temuan kekurangan pembayaran tersebut per 01 April 2024 telah dimasukkan ke dalam SK Kurang Bayar/*Carry Over* (CO) Tahun 2024 sebanyak 6.957 orang guru Non PNS senilai Rp53.321.469.122,00, sehingga masih terdapat kurang bayar yang belum masuk

SK CO adalah 524 guru Non PNS senilai Rp3.628.529.878,00 dengan rincian pada **Lampiran B.2.17**.

2) Kelebihan pembayaran TPG non PNS Tahun 2023

Hasil pengujian secara populasi data realisasi pembayaran TPG non PNS yang diperoleh dari Puslapdik dibandingkan dengan data hak bayar yang diperoleh dari Ditjen GTK melalui aplikasi SIM-Tun menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran TPG non PNS Tahun 2023 kepada guru non PNS sebanyak 2.708 orang dengan total nilai Rp23.281.299.200,00 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 47. Rincian Kelebihan Pembayaran TPG Non PNS TA 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Kewajiban bayar Pemerintah Pusat (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	DIKDAS	47	1.154.509.100	1.419.306.400	-264.797.300
2	DIKMENSUS	2.541	83.704.096.500	105.455.042.100	-21.750.945.600
3	PAUD	56	1.150.260.100	1.895.084.300	-744.824.200
4	TENDIK	64	1.940.156.600	2.460.888.700	-520.732.100
Jumlah		**2.708**	**87.949.022.300**	**111.230.321.500**	**-23.281.299.200**

Data lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran B.2.17**.

Koordinator Kelompok Kerja Aneka Tunjangan (Pokja Antun) Puslapdik menjelaskan kekurangan dan kelebihan pembayaran TPG non PNS telah terjadi sejak tahun anggaran sebelumnya dan menjadi transaksi yang muncul setiap tahun. Atas transaksi kelebihan dan kekurangan pembayaran TPG non PNS, Pokja Antun melakukan mekanisme *rebalancing* saldo pembayaran dengan cara menambah perhitungan pembayaran pada tahun berikutnya apabila terjadi kurang bayar, dan mengurangi perhitungan pembayaran pegawai pada periode tahun selanjutnya apabila yang bersangkutan menerima kelebihan pembayaran. Menurut Koordinator Pokja Antun kondisi ketidakakuratan ini terjadi setiap tahun diantaranya terjadi karena:

a) Keterlambatan proses *updating* data guru dalam aplikasi Dapodik, baik karena keterbatasan sumber daya teknologi informasi maupun SDM yang berdampak pada keterlambatan pengusulan SK calon penerima tunjangan;

b) Penerbitan SK Penerima Aneka Tunjangan Guru Non PNS yang tidak tepat waktu sehingga berpengaruh terhadap proses pencairan;

c) Perpindahan status guru non PNS ke guru PPPK menyebabkan keterlambatan pencairan tunjangan di Semester II Tahun 2023;

d) Kelebihan pembayaran terjadi karena adanya kesalahan pengajuan pembayaran, dimana pegawai dengan nama yang sama diajukan untuk menerima pembayaran lebih dari jumlah bulan yang seharusnya dibayarkan; dan

e) Terdapat Guru yang meninggal, pensiun, maupun rekening yang diajukan tidak aktif sehingga pembayaran tetap terealisasi namun demikian harus dilakukan retur atas transaksi tersebut.

f. Potensi kelebihan pembayaran TPG non PNS terhadap Guru yang telah alih status menjadi PPPK senilai Rp573.882.900,00

Dengan adanya program seleksi dan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, Dirjen GTK menerbitkan SE Nomor 1355/B/HK.04.01/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang mekanisme Penerbitan SKTP dan SK Penerima Tunjangan Khusus (SKTK) Bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru yang sebelumnya berstatus sebagai Guru Non PNS yang telah berganti status menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru, agar melakukan *update* data pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang akan digunakan untuk mendukung proses penerbitan Nomor Induk (NI) PPPK untuk JF guru. Wewenang pembayaran gaji guru Non PNS yang beralih status karena diterima menjadi PPPK adalah menjadi tanggung jawab Pemda dimana pembayaran untuk gaji PPPK bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dikelola oleh masing-masing Pemda.

Hasil pengujian atas data realisasi pembayaran TPG non PNS yang diperoleh dari Puslapdik dibandingkan dengan data hak bayar yang dari aplikasi SIM-Tun, dan realisasi pembayaran gaji PPPK oleh Pemda dari aplikasi SIM-Bar menunjukkan bahwa terdapat pembayaran TPG non PNS kepada guru yang sebelumnya masih berstatus guru non PNS namun telah diterbitkan SKTP oleh pemda karena telah memenuhi persyaratan sebagai PPPK.

Kondisi ini dapat menimbulkan potensi kelebihan pembayaran dimana Pemda yang berdasarkan atas *cut off* terbitnya SKTP PPPK tersebut akan membayarkan gaji PPPK melalui APBD. Pemda dalam hal ini belum menjadikan data dari aplikasi pembayaran SIM-Bar yang digunakan oleh Puslapdik sebagai dasar untuk melakukan verval pembayaran gaji PPPK yang telah diterbitkan SKTP-nya.

Pengujian dengan cara membandingkan perhitungan jumlah bulan pembayaran TPG non PNS oleh Puslapdik dan jumlah bulan pembayaran gaji PPPK oleh pemda dari aplikasi SIM-Bar selama tahun 2023, ditemukan terdapat 76 orang guru non PNS dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang sama menerima pembayaran lebih dari 12 kali (bulan) selama tahun 2023 oleh Puslapdik dan Pemda sehingga terjadi potensi kelebihan pembayaran senilai Rp573.882.900,00. Rekapitulasi pembayaran ganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48. Rincian Potensi Kelebihan Pembayaran TPG Non PNS atas Guru yang Diangkat menjadi PPPK di Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru yang Dibayarkan >12 bulan dalam Setahun (Orang)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	TENDIK	4	34.299.000
2	DIKDAS	12	60.226.200
3	DIKMENSUS	60	479.357.700
Jumlah		**76**	**573.882.900**

Data rincian dapat dilihat pada **Lampiran B.2.18**.

g. Pengelolaan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) kurang memadai

TPD adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Pembayaran TPD berpedoman pada beberapa ketentuan, diantaranya PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang TPG dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Ketentuan dimaksud menjelaskan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang

memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan, yakni senilai satu kali gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 SKS pada setiap semester.

Pemenuhan BKD diinput oleh masing-masing dosen melalui aplikasi Sister Kemendikbudristek pada laman https://sister.kemdikbud.go.id Verifikasi atas data capaian BSK dilakukan oleh asesor dan Tim di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP), yang menghasilkan dua status penilaian yakni "memenuhi BKD" (M) dan "tidak memenuhi BKD" (TM). Hasil dari Sister tersebut kemudian diverifikasi dan diproses oleh LPPMP sebagai dasar proses pembayaran TPD kepada masing-masing dosen.

TPD PNS dianggarkan oleh Ditjen Diktiristek sedangkan TPD Non PNS dianggarkan pada 16 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Setjen. Pemeriksaan atas pengelolaan TPD baik PNS maupun non PNS menunjukkan hal sebagai berikut.

1) LLDikti

a) Keterlambatan dan ketidakakuratan pembayaran TPD pada awal Tahun 2023

Pada periode awal Tahun 2023, LLDikti menggunakan aplikasi SERUNI *Advance* dalam mengelola pembayaran TPD sesuai dengan Surat Sekjen nomor 73583/A.A1/PR.07.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Mekanisme Penyaluran TPD dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS dan non PNS di Lingkup LLDikti melalui Aplikasi SERUNI *Advance*. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada LLDikti diketahui bahwa penerapan SERUNI *Advance* tidak berjalan mulus dikarenakan terjadi anomali atas hasil pemrosesan data pembayaran seperti:

(1) Database dosen tidak lengkap. Terdapat kondisi dimana dosen aktif yang datanya tidak muncul pada proses pembayaran;

(2) Pangkat dan golongan dosen tidak akurat sehingga memengaruhi besaran pembayaran TPD; dan

(3) Status BKD tidak akurat. Terdapat kondisi dosen yang telah memenuhi BKD namun terbaca TM sehingga tidak dapat diproses pembayaran.

Dengan adanya permasalahan tersebut, terjadi keterlambatan pembayaran TPD bulan Januari dan Februari 2023 diseluruh LLDikti kepada 42.669 dosen senilai Rp266.546.065.535 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49. Keterlambatan Pembayaran TPD Bulan Januari dan Februari 2023

No	Satker	Dosen (Orang)	Nilai (Rp)
1	[723009] LLDikti Wilayah I Medan	2.409	16.472.903.600
2	[723010] LLDikti Wilayah II Palembang	2.836	18.613.684.700
3	[723011] LLDikti Wilayah III DKI Jakarta	889	7.530.709.800
4	[723012] LLDikti Wilayah IV Bandung	9.124	59.963.035.700
5	[723013] LLDikti Wilayah V Yogyakarta	3.902	27.371.782.100
6	[723014] LLDikti Wilayah VI Semarang	5.555	21.103.295.550
7	[723015] LLDikti Wilayah VII Surabaya	243	1.335.834.800

No	Satker	Dosen (Orang)	Nilai (Rp)
8	[723016] LLDikti Wilayah VIII Denpasar	3.174	20.214.688.900
9	[723017] LLDikti Wilayah IX Makassar	4.349	30.682.164.700
10	[723018] LLDikti Wilayah X Padang	4.724	30.062.850.085
11	[723019] LLDikti Wilayah XI Banjarmasin	1.853	10.653.734.300
12	[723020] LLDikti Wilayah XII Ambon	657	4.198.572.100
13	[723021] LLDikti Wilayah XIII Banda Aceh	687	4.466.412.200
14	[723022] LLDikti Wilayah XIV Biak	469	2.761.344.600
15	[723023] LLDikti Wilayah XV Kupang	710	4.354.751.000
16	[723024] LLDikti Wilayah XVI Gorontalo	1.088	6.760.301.400
Jumlah		**42.669**	**266.546.065.535**

Oleh karena aplikasi banyak mengandung kelemahan, maka penerapan SERUNI *Advanced* untuk seluruh LLDikti dibatalkan dan berimbas kepada pengajuan pembayaran secara susulan pada periode-periode selanjutnya karena dilakukan secara manual seperti tahun sebelumnya.

b) Belum ada kebijakan yang seragam dalam pengelolaan pembayaran TPD

Berdasarkan keterangan yang didapat dari 16 LLDikti, diketahui terdapat perbedaan kebijakan dalam pengelolaan pembayaran TPD yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50. Perbedaan Kebijakan dalam PengelolaanPembayaran TPD oleh LLDikti

No	LLDikti Wilayah	Pengunaan Aplikasi	Periode Pembayaran	SPTJM dari Perguruan Tinggi	Pengaruh Cuti	Carry Over TPD
1	I Medan	Ada	Per Bulan	Per Semester	Tidak Berpengaruh	Ada
2	II Palembang	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Tidak Ada
3	III DKI Jakarta	Ada	Per Bulan	Per Semester	Status Cuti di PD DIKTI	Ada
4	IV Bandung	Ada	Per Bulan	Per Bulan	Hanya Cuti Besar	Ada
5	V Yogyakarta	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Hanya Cuti Besar	Ada
6	VI Semarang	Ada	Per Bulan	Per Bulan	Semua Jenis Cuti	Ada
7	VII Surabaya	Ada	Per Bulan	Per Bulan	Semua Jenis Cuti	Ada
8	VIII Denpasar	Manual	Per Bulan	Per Semester	Semua Jenis Cuti	Tidak Ada
9	IX Makassar	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Ada
10	X Padang	Ada	Per Bulan	Per Semester	Tidak Berpengaruh	Tidak Ada
11	XI Banjarmasin	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Hanya Cuti Besar	Tidak Ada
12	XII Ambon	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Ada
13	XIII Banda Aceh	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Tidak Ada
14	XIV Biak	Manual	Per 3-bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Tidak Ada
15	XV Kupang	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Hanya Cuti Besar	Tidak Ada
16	XVI Gorontalo	Manual	Per Bulan	Per Bulan	Tidak Berpengaruh	Ada

Penjelasan lebih lanjut atas perbedaan kebijakan pembayaran TPD oleh LLDikti adalah sebagai berikut:

(1) Penggunaan aplikasi bantuan bertujuan untuk membantu proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan setiap periode pembayaran. Terdapat dua poin penting verval dalam proses pembayaran TPD, yaitu verval terpenuhinya BKD dan verval status keaktifan dosen. Verval terpenuhinya BKD berkaitan dengan output yang dihasilkan Aplikasi Sister, yaitu Laporan BKD yang menunjukkan bahwa dosen tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban BKD. Verval status keaktifan dosen, pangkat, golongan dan masa kerja dosen dilakukan oleh Bagian Sumber Daya LLDikti;

(2) Terdapat 15 LLDikti yang membayarkan TPD per bulan dan satu LLDikti membayarkan TPD per triwulan yaitu LLDikti Wilayah XIV Biak;

(3) Terdapat 12 LLDikti menerapkan SPTJM yang dibuat setiap pengajuan pembayaran/per bulan, dan 4 LLDikti menerapkan SPTJM yang dibuat per semester/enam bulanan;

(4) LLDikti menerapkan kebijakan yang berbeda-beda atas cuti yang dapat memengaruhi status keaktifan dosen, yaitu:

(a) tidak berpengaruh terhadap keaktifan dosen;

(b) berpengaruh terhadap keaktifan dosen jika cuti terdata di PD DIKTI;

(c) berpengaruh terhadap keaktifan dosen hanya untuk cuti besar (melahirkan, haji, umroh), cuti sakit diatas satu bulan, CLTN;

(d) berpengaruh terhadap keaktifan dosen atas semua jenis cuti, sampai dengan cuti tahunan;

(5) Terdapat tujuh LLDikti yang tidak memiliki *carry over* pembayaran TPD, yaitu pembayaran TPD periode tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024.

c) Pembayaran TPD tidak tepat waktu

Salah satu syarat agar seorang dosen bersertifikasi dapat dibayarkan TPD adalah dosen tersebut harus memenuhi BKD yang terdata dalam Aplikasi Sister setiap semester dan telah dinilai oleh dua orang Assessor yang terdaftar di Ditjen Diktiristek. Berdasarkan Keputusan Dirjen Diktiristek Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (POBKD) diatur syarat pembayaran TPD Tahun 2023 dengan status pemenuhan BKD disetiap semesternya sehingga syarat pembayaran TPD Tahun 2023 sebagai berikut:

(1) Pembayaran TPD bulan Januari dan Februari, harus memenuhi status BKD semester genap 2021-2022;

(2) Pembayaran TPD bulan Maret s.d. Agustus, harus memenuhi status BKD semester ganjil 2022-2023; dan

(3) Pembayaran TPD bulan September s.d. Desember, harus memenuhi status BKD semester genap 2022-2023.

d) Pembayaran TPD kepada Dosen yang tidak memenuhi status BKD

Terdapat pembayaran TPD pada 13 LLDikti senilai Rp6.003.487.254,00 kepada 336 dosen yang tidak memenuhi status BKD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 51. Rincian Pembayaran TPD Non PNS kepada Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD di Tahun 2023

No	Satker	Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD	
		Jumlah (orang)	Nilai (Rp)
1	[723009] LLDikti Wilayah I Medan	12	124.841.655
2	[723011] LLDikti Wilayah III DKI Jakarta	14	166.791.800
3	[723012] LLDikti Wilayah IV Bandung	26	213.881.000
4	[723013] LLDikti Wilayah V Yogyakarta	1	3.204.700
5	[723014] LLDikti Wilayah VI Semarang	127	2.951.695.516
6	[723015] LLDikti Wilayah VII Surabaya	8	50.032.900

No	Satker	Dosen yang Tidak Memenuhi Status BKD	
		Jumlah (orang)	Nilai (Rp)
7	[723017] LLDikti Wilayah IX Makassar	86	1.547.766.400
8	[723018] LLDikti Wilayah X Padang	33	582.091.000
9	[723019] LLDikti Wilayah XI Banjarmasin	1	18.453.000
10	[723020] LLDikti Wilayah XII Ambon	13	93.308.783
11	[723022] LLDikti Wilayah XIV Biak	3	51.506.000
12	[723023] LLDikti Wilayah XV Kupang	4	13.098.000
13	[723024] LLDikti Wilayah XVI Gorontalo	8	186.816.500
Total		**336**	**6.003.487.254**

Data lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran B.2.19.**

Hasil konfirmasi atas dosen yang tidak memenuhi status BKD namun tetap dilakukan pembayaran TPD adalah sebagai berikut:

(1) Terdapat perbedaaan antara database Aplikasi Sister (file CSV) dengan informasi yang ditampilkan pada laman https://sister.kemdikbud.go.id atau unduhan Laporan BKD;

(2) Terdapat perbedaan antara status pada Laporan Kinerja Dosen dengan data Rekap BKD pada aplikasi Sister; dan

(3) Terdapat dua status yaitu M dan TM atas dosen dengan NIDN yang sama dan didalam periode penilaian yang sama.

e) Pembayaran dosen yang baru mendapatkan sertifikat pendidik di Tahun 2022 tidak memenuhi status BKD genap 2021-2022

Bagi dosen yang baru mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2022, maka TPD baru dibayarkan di tahun 2023. Terdapat pembayaran TPD Bulan Januari dan Februari 2023 atas dosen yang baru lulus sertifikasi tahun 2022 namun tidak memenuhi status BKD senilai Rp1.111.111.297,00 kepada 196 dosen yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52. Pembayaran TPD kepada Dosen Lulus Sertifikasi Namun Tidak Memenuhi Status BKD

No	Satuan Kerja	Dosen (Orang)	Nilai (Rp)
1	[723009] LLDikti Wilayah I Medan	1	5.269.080
2	[723011] LLDikti Wilayah III DKI Jakarta	103	567.350.200
3	[723012] LLDikti Wilayah IV Bandung	5	28.922.000
4	[723014] LLDikti Wilayah VI Semarang	39	215.625.000
5	[723016] LLDikti Wilayah VIII Denpasar	1	5.546.400
6	[723017] LLDikti Wilayah IX Makassar	23	157.153.400
7	[723018] LLDikti Wilayah X Padang	1	5.781.000
8	[723020] LLDikti Wilayah XII Ambon	15	78.165.417
9	[723022] LLDikti Wilayah XIV Biak	1	5.781.000
10	[723023] LLDikti Wilayah XV Kupang	6	36.140.800
11	[723024] LLDikti Wilayah XVI Gorontalo	1	5.377.000
TOTAL		**196**	**1.111.111.297**

Data lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran B.2.20**.

Hasil konfirmasi kepada LLDikti diketahui bahwa pembayaran tersebut mengacu kepada PMK Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran TPG dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa TPD diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional. Namun pembayaran TPD bulan Januari dan Februari 2023 kepada Dosen Lulus Sertifikasi Tahun 2022 tersebut belum memenuhi persayaratan dibayarkannya TPD yaitu harus memenuhi BKD sesuai POBKD setiap semesternya.

2) Ditjen Diktiristek

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat dosen dengan status TM namun masih dibayarkan TPD PNS dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 53. Kelebihan Pembayaran TPD PNS pada Ditjen Diktiristek

No	PTN	Jumlah Dosen	Kelebihan Pembayaran TPD (Rp)	Perhitungan
1	UHO	**7**	133.165.810,00	**Lampiran B.2.21**
2	UPN Veteran Jakarta	1	13.646.560,00	**Lampiran B.2.22**
Jumlah			**146.812.370,00**	

Atas permasalahan tersebut pihak PTN menjelaskan sebagai berikut.

a) Kepala LPPMP UHO menjelaskan alasan tetap dibayarkannya TPD PNS kepada tujuh dosen yang status BKD-nya TM di dalam aplikasi Sister karena menggunakan penilaian secara *offline* diluar sistem Sister. Namun demikian tidak terdapat bukti bahwa dokumen telah dinilai oleh asesor dengan seksama sesuai rubik POBKD 2021 dan penilaian asesor telah dinilai valid sebagaimana yang tertuang di dalam aplikasi Sister.

b) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) mengakui bahwa terdapat pembayaran TPD PNS senilai Rp13.646.560,00 kepada satu dosen tetap tidak memenuhi BKD.

Lebih lanjut terkait perbaikan penilaian BKD, perbaikan penilaian BKD seharusnya tetap menggunakan aplikasi Sister dan tidak dilakukan secara *offline* diluar sistem Sister. Dengan adanya perbaikan penilaian BKD dalam Sister maka penilaian kinerja dosen akan terpenuhi sesuai rubrik yang telah ditetapkan dalam Pedoman Operasional BKD.

h. Pemotongan PPh tunjangan kinerja pegawai menggunakan mekanisme PPh Pasal 21 Final

Pemeriksaan atas dokumen perhitungan dan pembayaran tukin menunjukkan Bendahara Gaji masih melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan kinerja secara final. Tunjangan tersebut tersebut dikenakan Pph dengan mekanisme PPh Pasal 21 Final. Pegawai golongan IV dipotong pajak 15%, golongan III dipotong pajak 5% dan golongan II tidak dipotong pajak. Hal tersebut terjadi pada Itjen dan BPP Bahasa dengan uraian dalam tabel berikut.

Tabel 54. Pemotongan PPh Final atas Tunjangan Kinerja

Eselon I	Jumlah Pegawai	Nilai Pajak Final	Nilai Pajak PPh Ps 21	Selisih	Lampiran
Itjen	362	4.916.570.161,00	2.537.757.437,00	2.378.812.724,00	**Lampiran B.2.23**

BPP Bahasa	454	2.025.531.046,42	1.519.699.842,22	505.831.204,20	**Lampiran B.2.24 s.d. B.2.34**
Jumlah	**816**	**6.942.101.207,42**	**4.057.457.279,22**	**2.884.643.928,20**	

BPP Bahasa telah bersurat kepada Kepala Biro Umum Nomor 3882/I1/KU.01.02/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal permohonan penggunaan aplikasi SISMINRA agar mekanisme perhitungan tukin dapat sesuai ketentuan berlaku, namun Biro Umum belum memberikan tanggapan sehingga BPP Bahasa masih menghitung pengenaan pajak atas tunjangan kinerja dengan menggunakan dasar PPh Pasal 21 Final.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

a. PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan antara lain melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan diantaranya beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

b. PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

   1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; dan

   2) Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pemberian tunjangan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PP Nomor 80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD

   1) Pasal 2:

      a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa PPH Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD.

      b) Ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      c) Besarnya PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

d. PMK Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran TPG dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

1) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa TPD diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional;

2) Pasal 13 yang menyatakan bahwa Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor dihentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan SK dari pejabat yang berwenang;

e. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1) Pasal 188

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab terhadap antara lain kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

2) Pasal 190 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM memiliki tugas dan wewenang di antaranya huruf e. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP.

f. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikbud yang diubah terakhir dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020

1) Pasal 6

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tunjangan kinerja Pegawai bagi pegawai pelajar dibayarkan senilai 60% (enam puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai yang diterima dalam kelas jabatan yang didudukinya sebelum melaksanakan tugas belajar.

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Tunjangan kinerja Pegawai bagi pegawai pelajar dibayarkan sejak secara nyata melaksanakan tugas belajar yang dibuktikan dengan Keputusan Tugas Belajar oleh pejabat yang berwenang menetapkan tugas belajar.

c) ayat (3) yang menyatakan bahwa Tunjangan kinerja pegawai bagi pegawai belajar dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya dari bulan berakhirnya jangka waktu tugas belajar.

2) Pasal 38 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pegawai yang menjalani cuti sakit pembayaran Tunjangan Kinerja, pegawainya diatur sebagai berikut:

a) Dalam rentang waktu tiga sampai 14 (empat belas) hari dan kemudian diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dibayarkan senilai 100%.

b) Dalam rentang waktu diatas 1 (satu) bulan dan diperpanjang terus setiap bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan senilai 40%.

c) Dalam rentang waktu diatas enam bulan sampai dengan satu tahun dan kemudian diperpanjang terus setiap bulan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan.

g. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian TPD dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada:

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila memenuhi persyaratan:

a) melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:

b) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

c) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

d) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.

2) Pasal 5

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural, diangkat sebagai pejabat negara, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus bagi lektor kepala.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa TPD yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan kembali setelah aktif sebagai dosen pada perguruan tinggi.

3) Pasal 6 yang menyatakan bahwa Tunjangan profesi bagi dosen dihentikan apabila meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk lektor kepala, lektor, dan asisten ahli, mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas, diberhentikan dari jabatan akademik profesor, lektor kepala, lektor, dan asisten ahli, dan/atau tidak lagi memiliki NIDN;

4) Pasal 17 yang menyatakan bahwa TPD dan tunjangan kehormatan Profesor diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS Kemendikbudristek Pasal 18 ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa Hak Pegawai Pelajar, paling sedikit meliputi:

1) Mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan;

2) Mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja;

3) Mendapatkan biaya Tugas Belajar;

4) Mendapatkan kenaikan pangkat;

5) Mendapatkan kenaikan gaji berkala;

6) Mendapatkan penilaian dalam penilaian prestasi kerja pegawai; dan

7) Masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

i. Peraturan MenPANRB Nomor Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30 menyatakan bahwa Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

1) Diberhentikan sementara dari PNS;

2) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik Dosen;

3) Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

4) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

j. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum bagi PNS Lampiran I Bagian IV Penghentian Pembayaran Tunjangan Umum:

1) Angka I huruf C dan I yang menyatakan bahwa Pembayaran tunjangan umum dihentikan apabila PNS yang bersangkutan antara lain:

a) Menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara; dan

b) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Khusus bagi PNS yang tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari enam bulan, Tunjangan Umum dihentikan mulai bulan ketujuh. Tunjangan Umum dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

k. Peraturan BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Lampiran Bagian III Penghentian Pembayaran Tunjangan Fungsional

1) Angka 1 huruf a dan b yang menyatakan bahwa Pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan:

a) Dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;

b) Menjalani cuti besar.

2) Angka 2 menyatakan bahwa khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan jabatan fungsionalnya dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

l. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional yang berlaku tanggal 5 Agustus 2023

1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Hal lain dalam penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a) Menjalani cuti di luar tanggungan negara;

b) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF;

c) Menjalani cuti besar.

2) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhitung mulai bulan berikutnya dan ditetapkan dengan keputusan PPK atau pejabat yang mendapat delegasi wewenang dari PPK.

3) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 dihentikan Tunjangan Fungsionalnya terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh).

4) Keputusan Dirjen Diktiristek Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen pada Bab V Penghargaan dan Sanksi Dosen yang menyatakan bahwa Hasil penilaian BKD-nya dengan status TM dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut point 3 ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen atau ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor;

m. Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Bab IV Pasal 39:

1) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi komisioner atau lembaga nonstruktural diberhentikan sementara sebagai PNS.

2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemberhentian sementara bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

3) Ayat (6) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak diberikan penghasilan sebagai PNS.

4) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Tidak diberikan penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terhitung mulai bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

n. PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Pegawai Negeri pada Lampiran Bab II bagian II.4 yang menyatakan bahwa Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada

1) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja;

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

2) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja.

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

o. Persekjen Kemendikbudrsitek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PerSekjen Kemendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS, Lampiran:

1) Poin D, Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS, angka 2:

a) huruf a yang menyatakan bahwa Puslapdik melakukan sikronisasi data Guru Non-PNS antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-tun) pada Kementerian.

b) huruf b yang menyatakan bahwa Puslapdik melakukan validasi data Guru Non-PNS sesuai dengan persyaratan penerima TPG Non-PNS melalui SIM-Tun.

2) Poin D, Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS, angka 3, Pembayaran Tunjangan Profesi huruf a yang menyatakan bahwa Puslapdik membayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf D.

3) Poin H, Pengendalian dan Pengawasan yang menyatakan bahwa Pengendalian pembayaran TPG Non-PNS dilakukan melalui:

a) pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan oleh instansi terkait.

b) upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan TPG Non-PNS.

Hal tersebut mengakibatkan

a. Potensi kelebihan pembayaran tunjangan senilai Rp243.493.204,00 terdiri atas:

1) Tunjangan kinerja pada Ditjen GTK senilai Rp13.610.760,00;

2) Tunjangan fungsional pada Ditjen Diktiristek senilai Rp229.882.444,00;

b. Kelebihan pembayaran tunjangan senilai Rp1.805.257.848,15 terdiri atas:

1) Tunjangan Kinerja pada Itjen senilai Rp22.924.479,00;

2) Tunjangan Kinerja pada Ditjen PDM senilai Rp6.705.111,00;

3) Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional pada Ditjen Diksi Rp1.123.937.250,00 (Rp47.855.000,00 + Rp655.202.250,00 + Rp420.880.000,00);

4) Tunjangan Kinerja, Gaji dan Tunjangan Sertifikasi pada Ditjen Diktiristek senilai Rp651.691.008,15 (Rp67.320.108,15 + Rp60.348.600,00 + Rp17.830.000,00 + Rp506.192.300,00);

c. Potensi kekurangan pembayaran kenaikan gaji berkala senilai Rp11.525.500,00 pada pegawai UPN Veteran Jawa Timur;

d. Kekurangan pembayaran TPG Non-PNS senilai Rp3.628.529.878,00;

e. Kelebihan pembayaran TPG Non-PNS senilai Rp23.281.299.200,00;

f. Potensi kelebihan pembayaran atas alih status guru yang menjadi PPPK senilai Rp573.882.900,00;

g. Hak Dosen non PNS terlambat diterimakan atas keterlambatan pembayaran TPD Non PNS;

h. Potensi perbedaan jumlah dan waktu diterimanya TPD untuk Dosen Non PNS antar wilayah LLDikti atas ketidakseragaman mekanisme pembayaran TPD Non PNS;

i. Potensi kelebihan TPD non PNS atas ketidaksesuaian status BKD di aplikasi Sister dengan unduhan laporan BKD dari aplikasi yang sama senilai Rp7.114.598.551,00 (Rp6.003.487.254,00 + Rp1.111.111.297,00);

j. Kelebihan pembayaran atas pembayaran TPD PNS dengan status "tidak memenuhi" BKD Rp146.812.370,00 pada UHO dan UPN Veteran Jakarta; dan

k. Potensi kelebihan/kekurangan pungut PPh Pasal 21 atas tarif pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA terkait tidak melakukan rekonsiliasi secara periodik terkait administrasi pegawai yang berkompensasi keuangan;

b. Pusladik tidak mempunyai mekanisme yang mengatur batas waktu pengajuan pembayaran TPG Non PNS;

c. Sesditjen dan Kepala Puslapdik kurang optimal dalam berkoordinasi dengan Pemda terkait penyelesaian pembayaran TPG atas guru Non PNS yang beralih menjadi PPPK;

d. Sekjen belum optimal dalam melakukan rekonsiliasi dengan Dirjen Diktiristek dan memutakhirkan data kepegawaian dosen PNS dan Non PNS dalam rangka pembayaran TPD PNS maupun TPD Non PNS;

e. Sekjen belum menyusun panduan untuk pembayaran TPD Dosen Non PNS yang berlaku secara seragam pada LLDikti di seluruh Indonesia; dan

f. Irjen dan Kepala BPP Bahasa tidak menerapkan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan pengelolaan belanja pegawai secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Terkait hal tersebut, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Ditjen PDM telah mengembalikan ke kas negara sebesar Rp6.705.111,00 (BPMP Prov. Kalimantan Timur senilai Rp1.419.898 pada tanggal 26 April 2024 dengan NTPN B0CD60NA04DK20B6 dan BBPMP Prov. Jawa Barat senilai Rp5.285.213 pada tanggal 2 April 2024 dengan NTPN 7BF8EIJNFUV9AB9E);
b. Dirjen Diksi telah mengembalikan ke kas negara senilai Rp231.350.000,00; dan
c. ITK telah mengembalikan ke Kas Negara senilai Rp79.225.000,00 pada tanggal 24 April 2024 dengan NTPN 820240424284136.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan bagian kepegawaian dan bagian keuangan untuk melakukan rekonsiliasi secara periodik per bulan terkait administrasi pegawai yang berkompensasi keuangan;
b. Sekjen supaya:
    1) membuat mekanisme yang mengatur batas waktu pengajuan pembayaran TPG Non PNS;
    2) memerintahkan Kepala Puslapdik untuk mengkompensasikan kekurangan/kelebihan pembayaran TPG Non PNS pada pembayaran berikutnya;
    3) melakukan rekonsiliasi dengan Dirjen Diktiristek dan memutakhirkan data kepegawaian dosen PNS dan Non PNS termasuk didalamnya BKD dalam rangka pembayaran TPD PNS maupun TPD Non PNS;
    4) membuat kebijakan pembayaran TPD Non PNS yang berlaku untuk seluruh LLDikti;
    5) membuat kajian terkait adanya suatu unit kerja yang mempunyai tupoksi sebagai koordinator LLDikti di seluruh Indonesia;
c. Dirjen GTK dan Sekjen memerintahkan Sesditjen GTK dan Kepala Puslapdik berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait guru yang telah alih status menjadi PPPK;
d. Irjen dan Kepala BPP Bahasa supaya menerapkan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Dirjen GTK dan Dirjen Diktiristek memerintahkan Kepala BGP Prov Bali, Kepala BGP BBGP Prov. Jawa Barat, Rektor Untan, UPN Veteran Jawa Timur, UMRAH, Unimed, Untirta, Itera dan UPN Veteran Jakarta untuk memerintahkan bagian kepagawaian masing untuk mempercepat penerbitan SK Tugas belajar sebagai dasar perhitungan Kembali tunjangan yang telah dibayarkan;
f. Seluruh Pimpinan Unit Utama memerintahkan PPK terkait menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan atau gaji ke kas Negara/Kas BLU senilai Rp1.866.140.107,15 terdiri dari:
    1) Tunjangan kinerja pada Itjen senilai Rp22.924.479,00;

2) Tunjangan umum dan tunjangan fungsional pada Ditjen Diksi Rp892.587.250,00; dan

3) Tunjangan kinerja, gaji, tunjangan sertifikasi dan TPD PNS pada Ditjen Diktiristek senilai Rp719.278.378,15.

3. Penganggaran dan Proses Pengadaan Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan

Kemendikbudristek menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang pada LRA Tahun 2023 (*audited*) masing-masing senilai Rp32.051.749.291.000,00 dan Rp29.763.154.764.125,00 atau 92,86%. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertangungjawaban Belanja Barang dan Jasa diketahui terdapat permasalahan dalam penganggaran dan proses pengadaan belanja barang sebagai berikut:

a. Penganggaran Belanja Barang tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak terbayarkan menggunakan DIPA Tahun 2023 pada Ditjen GTK

Hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran mata anggaran 521xx, 522xx, 523xx dan 524xx diketahui bahwa enam satker Ditjen GTK melaksanakan kegiatan pada tahun 2023 namun tidak dapat terbayarkan melalui DIPA Tahun 2023. Atas kegiatan tersebut, Setditjen GTK mengakui sebagai tunggakan belanja yang akan dibayarkan menggunakan DIPA satker Tahun 2024 dan dibukukan sebagai saldo Utang pada Pihak Ketiga pada Neraca per 31 Desember 2023. Rincian kegiatan tersebut pada tabel berikut:

Tabel 55. Daftar Belanja Barang Satker yang Tidak Terbayarkan Menggunakan DIPA TA 2023

No.	Nama Satker	Mata Anggaran Kegiatan								Jumlah (Rp)
		521211	521213	522151	523111	523121	524111	524112	524119	
1	BGP Sumbar		15.550.000	12.800.000					1.451.172.051	1.479.522.051
2	BGP Banten								75.996.600	75.996.600
3	BGP Malut	3.980.000		57.400.000					18.892.000	80.272.000
4	BGP NTB			21.600.000						21.600.000
5	BGP Papbar								474.220.400	474.220.400
6	BGP Maluku				485.100	1.718.000	39.519.981	3.626.600		45.349.681
	Jumlah									**2.176.960.732**

Penjelasan secara rinci atas kondisi pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

1) Tunggakan pelaksanaan kegiatan pada BGP Prov. Sumatera Barat (Sumbar) karena ketidakcukupan anggaran Tahun 2023

Kegiatan belanja barang BGP Sumbar yang belum dapat terbayarkan menggunakan DIPA Tahun 2023 senilai Rp1.479.522.051,00, rincian pada **Lampiran B.3.1**. Dengan demikian terdapat kegiatan yang direalisasikan melebihi pagu anggaran yang ada.

Kegiatan yang tidak dapat terbayarkan pada Tahun 2023, diantaranya atas pembayaran honor narasumber, honor panitia, paket *fullboard/fullday* hotel, transpor panitia, peserta, dan narasumer, serta uang harian panitia, peserta, dan narasumber pada empat kegiatan yaitu:

a) Refleksi Diseminasi Program Guru Penggerak (PGP) yang diselenggarakan tanggal 26 s.d. 28 Desember 2023;

b) Refleksi, Diseminasi, dan Kemitraan Guru Penggerak Prov. Sumbar yang diselenggarakan pada 27 s.d. 29 Desember 2023;

c) Refleksi dan Diseminasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak (PSP) yang diselenggarakan pada 27 s.d. 29 Desember 2023;

d) Kegiatan Pencanangan ZI WBK BGP Prov. Sumbar yang diselenggarakan pada tanggal 29 s.d. 30 Desember 2023.

Selain itu, terdapat tunggakan atas pembayaran paket *fullboard/fullday* hotel untuk kegiatan:

a) *Meeting* penguatan Narasumber Berbagi Praktik Baik (NSBPB) Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan pada 17 s.d. 19 Desember 2023;

b) *Workshop* Sosialisasi Perdirjen GTK terkait peran Pengawas Sekolah yang diselenggarakan pada 13 dan 17 s.d. 19 Desember 2023;

c) *Workshop* peningkatan literasi digital pada 17 s.d. 19 Desember 2023;

d) Penginapan panitia pusat dan narasumber kegiatan seminar PAUD di Universitas Negeri Padang (UNP) yang diselenggarakan pada 26 s.d. 28 Desember 2023.

Terjadi kesalahan pembebanan karena kesalahan dalam pelaksanaan revisi DIPA BGP Prov. Sumbar sehingga sampai dengan pengajuan TUP terakhir pada 16 Desember 2023 masih terdapat sisa Pagu Anggaran BGP Prov. Sumbar. Aplikasi SAKTI secara sistem tidak memblokir dan/atau tidak memberikan peringatan/pemberitahuan pada saat pengajuan tagihan melebihi pagu anggaran sehingga bendahara pengeluaran masih tetap dapat menginput tagihan.

Namun, pada saat penihilan TUP Januari 2024, Bendahara Pengeluaran tidak dapat membayarkan seluruh tagihan hotel yang terbit pada Desember 2023 serta seluruh belanja perjalanan dinas atas empat kegiatan yang diselenggarakan akhir tahun sehingga atas tunggakan tersebut dicatat Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp1.479.522.051,00 dan telah dibayarkan menggunakan DIPA 2024 sesuai SP2D Nomor 240101701000030 tanggal 13 Februari 2024.

2) Kesalahan pelaksanaan pada saat revisi DIPA pada BGP Prov. Banten

Nilai belanja barang BGP Prov. Banten yang belum dapat terbayarkan menggunakan DIPA 2023 senilai Rp75.996.600,00 berupa pembayaran transpor acara *Capacity Building*, rincian pada **Lampiran B.3.2**. PPK menjelaskan bahwa pelaksanaan Revisi DIPA BGP Prov. Banten terakhir pada 16 Desember 2023 telah mencakup seluruh kegiatan *Capacity Building*, namun hanya melalui modul perencanaan Aplikasi SAKTI satker dan belum mendapatkan pengesahan dari KPPN.

Atas kondisi tersebut, pada saat penihilan TUP bulan Januari 2024 terhadap pembayaran transpor acara *Capacity Building*, KPPN tidak mengakui belanja barang sehingga masih mencatat sisa kas senilai Rp75.996.600,00 di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. BGP Prov. Banten mencatat pada Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp75.996.600,00 dan telah dibayarkan menggunakan DIPA 2024 sesuai SP2D Nomor 240201303000127 tanggal 31 Januari 2024.

3) Tunggakan kegiatan lokakarya PGP Angkatan 9 pada BGP Prov. Maluku Utara karena ketidakcukupan anggaran Tahun 2023

Nilai belanja barang yang belum dapat terbayarkan melalui DIPA 2023 pada BGP Prov. Maluku Utara senilai Rp80.272.000,00, berupa pembayaran belanja pelaksanaan

kegiatan lokakarya PGP Angkatan 9 BGP Prov. Maluku Utara atas pembayaran konsumsi pengajar praktik, honorarium pengajar praktik dan fasilitator PMO, serta transpor pengajar praktik, rincian pada **Lampiran B.3.3**. PPK dan bendahara pengeluaran menjelaskan bahwa tunggakan belanja tersebut dikarenakan penggantian transpor peserta lokakarya yang melebihi anggaran pada saat pengajuan TUP terakhir.

Atas tunggakan tersebut dicatat Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp80.272.000,00 dan telah dibayarkan menggunakan DIPA 2024 sesuai SP2D Nomor 240621302001213 tanggal 20 Februari 2024.

4) Tunggakan pembayaran honorarium instruktur PGP Angkatan 9 pada BGP Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB) karena ketidakcukupan anggaran

   Nilai belanja yang belum dapat terbayarkan melalui DIPA 2023 pada BGP Prov. NTB merupakan pembayaran honorarium instruktur PGP Angkatan 9 pada BGP NTB senilai Rp21.600.000,00.

   PPK dan bendahara pengeluaran menjelaskan bahwa tunggakan belanja tersebut dikarenakan penggantian transpor peserta lokakarya yang melebihi anggaran pada saat pengajuan TUP terakhir dan mengakibatkan honorarium instruktur PGP tidak dapat terbayarkan di tahun 2023. Atas tunggakan tersebut dicatat Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp21.600.000,00 dan telah dibayarkan menggunakan DIPA 2024 sesuai SP2D Nomor 240381701000024 tanggal 6 Februari 2024.

5) Tunggakan pembayaran tagihan hotel atas belanja paket *Fullday/Fullboard* pada BGP Prov. Papua Barat karena ketidakcukupan anggaran Tahun 2023

   BGP Prov. Papua Barat merealisasikan anggaran belanja barang senilai Rp22.751.893.920,00 atau 99,53% dari anggaran senilai Rp22.858.589.000,00. Terdapat belanja barang BGP Sumbar yang masih belum dapat terbayarkan menggunakan DIPA 2023 senilai Rp474.220.400,00 dan diketahui kegiatan tersebut direalisasikan melebihi pagu anggaran. Belanja tersebut berupa paket *fullboard/fullday* hotel atas kegiatan:

   a) Paket *meeting* seleksi presentasi dan wawancara apresiasi GTK tingkat Prov. Papua Barat senilai Rp79.213.740,00;

   b) Pekan karya komunitas belajar Tahun 2023 dan apresiasi GTK tingkat Prov. Papua Barat dan Papua Barat Daya Tahun 2023 senilai Rp200.206.660,00;

   c) Sosialisasi peran pengawas dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Satuan Pendidikan senilai Rp98.800.000,00;

   d) Pelatihan kompetensi TIK melalui pemanfaatan *Chromebook* Prov. Papua Barat Daya Tahun 2023 senilai Rp96.000.000,00.

   PPK dan Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa revisi DIPA terakhir dikarenakan tambahan program kegiatan dari Setditjen dan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Ditejn GTK yang wajib dilaksanakan oleh BGP Prov. Papua Barat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui pengajuan TUP terakhir oleh Bendahara Pengeluaran, namun pada saat penihilan diketahui tagihan paket *Fullday*/*Fullboard* hotel tidak dapat terbayarkan karena pagu anggaran telah habis.

Atas tunggakan tersebut dicatat Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp474.220.400,00 dan telah dibayarkan menggunakan DIPA 2024 sesuai SP2D Nomor 240651701000003 tanggal 5 Februari 2024.

6) Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum dibayar pada BGP Prov. Maluku

Bendahara pengeluaran BGP Prov. Maluku mengelola UP berupa uang tunai dan KKP. KKP pada BGP Maluku dipergunakan oleh Kepala BGP, PPK, dan Bendahara Pengeluaran. Terdapat tunggakan atas tagihan transaksi KKP BGP Maluku periode Desember 2023 yang baru terbit pada 13 Januari 2024 senilai Rp49.226.581,00 dengan rincian pada **Lampiran B.3.4**. Atas tagihan tersebut belum dicatat kedalam saldo Utang Pihak Ketiga pada Neraca BGP Maluku Tahun 2023.

PPK dan Bendahara Pengeluaran BGP Prov. Maluku menjelaskan bahwa untuk menghindari penagihan KKP lewat tahun 2023 maka pembatasan transaksi menggunakan KKP telah dilaksanakan pada awal Desember 2023. Bendahara Pengeluaran melaksanakan penihilan Uang Persediaan (UP) pada 31 Desember 2023 tanpa memperhitungkan tagihan KKP yang terbit di Januari 2024. Namun, masih terdapat transaksi hingga 27 Desember 2023 menggunakan KKP, diantaranya untuk pembelian tiket dan pembelian barang berupa peralatan dan mesin tanpa memperhatikan batas penihilan UP.

Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan terdapat pembelian satu tiket senilai Rp3.866.900,00 pada 8 Desember 2023 rute Jakarta – Ambon atas nama Sdri. VYS menggunakan KKP Kepala satker dalam rangka kepulangan pegawai tersebut dari menghadiri kegiatan koordinasi penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Triwulan IV Ditjen GTK. Berdasarkan penelusuran pada undangan dan konfirmasi kepada pelaksana perjalanan, pembelian tiket tersebut mendapatkan penggantian biaya secara tunai dari Setditjen GTK. Sampai saat pemeriksaan dilaksanakan, pelaksana perjalanan belum membayarkan tagihan KKP tersebut.

Total tagihan KKP BGP Prov. Maluku yang belum dibukukan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp45.349.681,00 (Rp49.226.581,00 – Rp3.866.900,00 – Rp10.000,00). PPK menjelaskan bahwa tagihan KKP tersebut telah dibayarkan pada Bank Penerbit KKP pada 21 April 2024 senilai Rp43.565.581,00 dengan menggunakan DIPA 2024.

b. Proses Pengadaan Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan

1) Setjen

a) Harga satuan biaya dukungan lainnya pada Pengadaan *Public Cloud Platform* Pendidikan senilai Rp1.526.390.575,48 tidak diatur dalam kontrak

Paket Pekerjaan Pengadaan *Public Cloud Platform* Pendidikan dilaksanakan oleh PT DSJ berdasarkan kontrak payung Nomor 1109//J1/LK.00.00/PPK/2022 tanggal 1 April 2022. Terdapat dua kali addendum kontrak yaitu Nomor 0001/J1/LK.00.00/ADD/223 tanggal 2 Januari 2023 dan No. 4677/J1/PPK/2023 tanggal 1 Oktober 2023. Addendum kontrak kedua mengatur perubahan jumlah layanan dan harga satuan yang semula 93 SKU menjadi 54.431 SKU. Selain itu terdapat penambahan klausul kontrak payung mengenai kewajiban PPK membayar berdasarkan BAST sesuai dengan pemakaian setiap bulan dan memeriksa besaran pemakaian *public cloud platform* pendidikan yang digunakan.

Tagihan biaya layanan GCP dihitung berdasarkan volume item pekerjaan dikali dengan harga satuan yang telah disepakati dalam kontrak. Salah satu item pekerjaan yang ditagihkan dalam sewa *cloud* adalah Biaya Dukungan Lainnya. Harga satuan Biaya Dukungan Lainnya dalam kontrak adalah Rp24.500.000,00 dengan satuan volume Paket.

Berdasarkan pemeriksaan lembar kerja perhitungan tagihan sewa *cloud* diketahui bahwa nilai pekerjaan Biaya Dukungan Lainnya ternyata bukan dari perhitungan volume dikali dengan harga satuan, melainkan diperoleh dari biaya yang berasal dari *Billing Console*. Harga satuan yang disepakati digunakan sebagai perhitungan untuk mendapatkan jumlah volume item pekerjaan dengan perhitungan nilai biaya dari *Google Billing Console* dibagi dengan harga satuan Rp24.500.000,00. Dengan menggunakan perhitungan tersebut maka diperoleh harga satuan yang bervariasi (rincian pada tabel 4), sedangkan harga satuan untuk Harga satuan Biaya Dukungan Lainnya yang disepakati dalam kontrak adalah Rp24.500.000,00.

Dengan demikian harga satuan yang digunakan untuk perhitungan pembayaran Biaya Dukungan Lainnya merupakan harga satuan yang tidak diatur dalam kontrak. Biaya Dukungan Lainnya ditagihkan untuk bulan Januari s.d. September 2023 senilai Rp1.526.390.575,48 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 56. Rincian Biaya Dukungan Lainnya Tagihan Januari s.d. September 2023

No.	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan Hasil Perhitungan Bersama	Nilai Pekerjaan Hasil Perhitungan Bersama (Rp)	Tidak Ada Pada Padanan Komponen Namun Terpakai (Rp)	Jumlah (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)*(d)	(f)	(g)=(e)+(f)
1	Januari	24.500.000,00	0,85	20.825.000,00	0	20.825.000,00
2	Februari	24.500.000,00	3,46	84.770.000,00	2.042.420,77	86.812.420,77
3	Maret	24.500.000,00	0,99	24.255.000,00	5.921.002,22	30.176.002,22
4	April	24.500.000,00	1,18	28.910.000,00	5.828.780,98	34.738.780,98
5	Mei	24.500.000,00	2,60	63.700.000,00	5.202.374,67	68.902.374,67
6	Juni	24.500.000,00	2,45	60.025.000,00	8.490.028,48	68.515.028,48
7	Juli	24.500.000,00	11,36	278.320.000,00	6.361.887,39	284.681.887,39
8	Agustus	24.500.000,00	15,10	369.950.000,00	64.645.842,41	434.595.842,41
9	September	24.500.000,00	17,21	421.645.000,00	75.498.238,56	497.143.238,56
Jumlah				**1.352.400.000,00**	**173.990.575,48**	**1.526.390.575,48**

b) Pengadaan paket pekerjaan pengembangan Aplikasi dan Kajian *E-Planning* Tahun 2023 pada Biro Perencanaan dilaksanakan secara proforma

Pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* Tahun 2023 pada Biro Perencanaan bertujuan untuk menyempurnakan modul-modul yang terintegrasi dalam *Single Sign On* (SSO) aplikasi *E-Planning* Biro Perencanaan. Terdapat delapan modul pada aplikasi *E-Planning* yaitu *Dashboard* DAK, Portal *E-Planning*, Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL), DAK Fisik, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), DAK Non Fisik, Seruni *Advance*, dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Selain belanja jasa konsultan kegiatan pengembangan dan kajian aplikasi *E-Planning*, terdapat belanja jasa konsultan lainnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 57. Daftar Belanja Jasa Konsultan Biro Perencanaan Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Jumlah Paket	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Pengembangan SPASIKITA	2 Paket	73.400.000,00	146.800.000,00
2	Kajian Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	2 kajian	39.700.000,00	79.400.000,00
3	Pengembangan Aplikasi dan Kajian E-Planning	8 paket	98.249.000,00	785.992.000,00
4	Penyusunan Rencana Strategis	1 paket	60.000.000,00	60.000.000,00
Jumlah				**1.072.192.000,00**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas delapan pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* senilai Rp785.992.000,00 terdapat permasalahan sebagai berikut:

(1) Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (KAK/ToR) pengembangan Aplikasi *E-Planning* tidak menguraikan rencana kegiatan secara lengkap

Hasil analisis terhadap dokumen KAK pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* pada Biro Perencanaan menunjukkan KAK belum memuat hal-hal sebagai berikut: sumber pendanaan, orang yang bertanggung jawab melaksanakan dalam pencapaian output, waktu kegiatan tersebut dimulai, lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, alur kegiatan tersebut dilaksanakan, penentuan pengadaan secara swakelola atau kontraktual (pengadaan langsung/Surat Perintah Kerja (SPK)/penunjukkan langsung), dan tidak memuat tanda tangan pengesahan oleh Kepala Biro Perencanaan. Selain itu pembuatan KAK juga tidak sesuai format seperti yang diatur pada PMK Nomor 232/PMK.02/2020.

Berdasarkan keterangan PPK, KAK pada masing-masing paket pekerjaan tidak dibuat oleh para koordinator yang membidanginya namun diperoleh dari Sdr. J, yaitu salah satu dari empat orang tim teknis non pegawai Kemendikbudristek yang melaksanakan delapan paket pekerjaan tersebut.

(2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengembangan aplikasi yang dibuat tidak didukung kertas kerja dan dokumentasi yang memadai

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* pada Biro Perencanaan, HPS belum didukung dokumentasi kertas kerja hasil survey harga pasar setempat, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L atau Pemda, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi, daftar harga/biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha, hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, informasi harga yang diperoleh dari toko daring dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan PPK, HPS ditetapkan dengan cara menggunakan HPS yang sama persis dengan HPS pekerjaan jasa konsultan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022. HPS pada delapan paket pekerjaan di Tahun 2023 dibuat sama dalam hal jumlah harga satuan kegiatan, jumlah personil, serta nilai total HPS-nya. PPK menjelaskan bahwa penggunaan HPS tahun sebelumnya sudah berjalan sejak yang bersangkutan pertama kali menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Tahun 2017. Sedangkan untuk Tahun 2016 ke bawah yang

bersangkutan tidak dapat memastikan apakah pekerjaan jasa konsultan sudah menggunakan HPS yang sama karena belum menjadi pengelola PBJ.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Sdr. J dijelaskan bahwa proses bisnis pada setiap modul berbeda-beda sehingga menyebabkan kompleksitas pekerjaan pada tiap modul berbeda juga. Dengan demikian jumlah orang dan waktu pengerjaan pada tiap pekerjaan semestinya berbeda dan akan membentuk HPS yang berbeda. Penjelasan tersebut kontradiktif dengan proses penyusunan delapan HPS.

(3) Pemecahan kontrak pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* untuk menghindari lelang

Pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* merupakan pekerjaan pengembangan modul-modul yang terdapat didalam satu aplikasi SSO milik Biro Perencanaan yaitu *E-Planning*. Menurut keterangan Sdr. J jika melihat dari segi rancangan sistem analisis, *intersection* pada tiap modul, dan jenis kebutuhan pengembangannya berbeda-beda namun kemudian dijadikan satu wadah dalam aplikasi *E-Planning*. Secara teknologi, delapan modul di dalam aplikasi *E-Planning* adalah sama karena memiliki *backend database* dan teknologi *webservice* yang sama.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi pemecahan kontrak, karena masing-masing pengadaan memiliki nilai SPK/kontrak di bawah Rp100.000.000,00 dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian PPK dapat melakukan pengadaan langsung tanpa harus melakukan tender.

Berdasarkan hasil wawancara kepada PPK diketahui bahwa PPK menunjuk tujuh perusahaan yang berbeda-beda agar dapat melaksanakan pekerjaan melalui pengadaan langsung, masing-masing perusahaan diberikan *fee* senilai 10% s.d 15% sebagai upah pinjam bendera. Selain itu, indikasi pemecahan kontrak juga ditemukan bukti sebagai berikut:

(a) KAK tidak dibuat oleh para koordinator;

(b) HPS tidak dibuat secara nyata (menggunakan HPS yang sama persis antar paket pekerjaan Tahun 2023 dan paket pekerjaan jasa konsultan Tahun 2022)

(c) Peserta yang tidak memenuhi kualifikasi, yaitu: Sertifikat Badan Usaha PT PMK merupakan klasifikasi aktivitas konstruksi arsitektur, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis, dan aktivitas desain interior;

(d) Tidak adanya RAB kontrak pada semua paket pekerjaan;

(e) Adanya pembatasan lingkup karena Biro Perencanaan tidak mampu menghadirkan tujuh penyedia yang melakukan perikatan untuk dilakukan wawancara.

(4) Pelaksanaan delapan paket pekerjaan mendahului kontrak dan dikerjakan oleh pihak yang tidak berkontrak

Delapan paket pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* dilaksanakan secara bersamaan sesuai SPK yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 s.d 16 November 2023. Hasil konfirmasi kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, PPK, Pejabat Pengadaan dan Sdr. J diketahui bahwa pelaksanaan delapan paket pekerjaan sudah dikerjakan sebelum adanya kontrak.

PPK menjelaskan bahwa delapan paket pekerjaan tidak dilaksanakan oleh tujuh Penyedia berkontrak dan mengakui hanya menggunakan tujuh perusahaan tersebut sebagai sarana pinjam bendera dengan biaya senilai 10% s.d 15% dari nilai kontrak. Delapan paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh tim yang terdiri dari empat orang yang tidak terdaftar secara resmi dan tidak semestinya mengerjakan paket pekerjaan tersebut karena bukan pihak yang berkontrak dengan Biro Perencanaan. Selain itu, Sdr. J juga menjelaskan empat orang tersebut terdiri dari dirinya sendiri (*Freelance*) sebagai leader yang mendesain kebutuhan pengembangan aplikasi sesuai permintaan dari para koordinator, Sdr. R (Dosen Lektor Kepala pada UT) dan Sdr. J (Pegawai Biro Keuangan) yang bertugas melakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi *E-Planning* dan Sdr. M selaku admin.

Menurut keterangan Sdr J dan Sdr. R, pelaksanaan pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* mengikuti siklus pelaksanaan kegiatan pada modul tersebut. Pengembangan modul RKT-Renja dikerjakan pada Januari s.d Mei 2023, modul DAK Fisik dikerjakan pada April s.d Oktober 2023, modul RKA-KL dikerjakan pada April s.d Oktober 2023, modul PHLN dikerjakan pada Maret s.d Desember 2023, dan modul SBSN dikerjakan pada Desember 2022 s.d Januari 2023. Sedangkan perikatan yang dibuat seluruhnya pada Oktober 2023.

(5) Pembayaran Paket Pekerjaan Mendahului Surat Perintah Membayar

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melakukan pembayaran delapan paket pekerjaan secara bersamaan yaitu pada 29 November 2023 Pembayaran tersebut menggunakan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) Nihil. Pembayaran delapan paket pekerjaan kepada perusahaan dilakukan secara setor tunai oleh BPP dengan menggunakan jasa *office boy* a.n AR senilai Rp785.991.000,00 berdasarkan bukti setor Bank Mandiri dan BNI pada tanggal 24 November 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha, PPK, Pejabat Pengadaan, BPP dan sdr. J diketahui bahwa setelah tujuh penyedia menerima pembayaran setor tunai dari Bendahara, penyedia melakukan tarik tunai dan memberikan sejumlah uang yang telah dipotong *fee* kepada PPK. PPK kemudian melakukan pembayaran secara tunai kepada sdr. J secara tunai dengan bukti tanda terima uang pada 30 November 2023 senilai Rp550.000.000,00. Tanda terima uang tersebut hanya berupa selembar kertas tanpa nomor kuitansi, tanpa nama pihak yang menyerahkan, tidak ada materai dan hanya ditandatangani sepihak oleh Sdr. J. Jumlah uang tersebut kemudian diberikan kepada tiga orang (tim teknis yang melaksanakan kegiatan tersebut) yaitu sdr. R Senilai Rp120.000.000,00, sdr. J senilai Rp60.000.000,00 dan Sdr. M senilai Rp60.000.000,00 dan sisanya menjadi bagian dari Sdr. J. Berdasarkan

uraian penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembayaran paket pekerjaan senilai Rp550.000.000,00 tidak berdasarkan kontrak dan dokumen administrasi yang legal. Lebih lanjut diketahui bahwa pengelola keuangan pada Biro Perencanaan menerima bagian imbalan dari selisih antara pencairan dana dari SP2D dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada Sdr. J yaitu senilai Rp235.991.000,00 (Rp785.991.000,00 – Rp550.000.000,00).

(6) Indikasi dokumen Berita Acara Pembayaran dan kuitansi pembayaran dibuat tidak sesuai kondisi senyatanya

Pelaksanaan administrasi seperti melakukan input dokumen KAK, HPS dan lainnya di aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemendikbudristek dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. BPP melakukan pencairan dana pada tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GUP. Berdasarkan berita acara pembayaran, kuitansi, dan bukti setor tunai yang dilakukan BPP melalui *office boy* diketahui bahwa dokumen berita acara pembayaran dan kuitansi pembayaran berindikasi dibuat tidak sesuai kondisi kenyataan karena tidak menunjukkan tanggal transaksi yang sebenarnya, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 58. Rincian Tanggal Transaksi Dokumen Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran

No	Uraian	Nomor Kontrak	Tanggal BA Pembayaran	Tanggal Kuitansi	Tanggal SPM
1	Pengembangan Modul Pengendalian Pelaksanaan SBSN	1060/PBJ/RO REN/X/2023	9 Nov 2023	16 Nov 2023	24 Nov 2023
2	Desain dan Pengembangan Dashboard Anggaran SBSN	1074/PBJ/RO REN/X/2023	16 Nov 2023	16 Nov 2023	24 Nov 2023
3	Pengembangan Modul Penyusunan Proposal Anggaran SBSN	1088/PBJ/RO REN/X/2023	16 Nov 2023	16 Nov 2023	24 Nov 2023
4	Desain dan Pengembangan Dashboard Anggaran PHLN	1102/PBJ/RO REN/X/2023	16 Nov 2023	16 Nov 2023	24 Nov 2023
5	Penyempurnaan Modul Evaluasi Usulan RKT-RENJA 2024	1116/PBJ/RO REN/X/2023	16 Nov 2023	16 Nov 2023	24 Nov 2023
6	Penyempurnaan Modul Evaluasi Usulan RKA-KL 2024	1130/PBJ/RO REN/X/2023	16 Nov 2023	16 Nov 2023	24 Nov 2023
7	Penyempurnaan Modul Aplikasi Penilaian DAK Fisik 2024	1144/PBJ/RO REN/X/2023	16 Nov 2023	16 Nov 2023	24 Nov 2023
8	Desain dan Pengembangan Dashboard DAK Fisik 2024	1160/PBJ/RO REN/X/2023	16 Nov 2023	16 Nov 2023	24 Nov 2023

2) Itjen

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium pada Itjen menunjukkan terdapat pembayaran honorarium untuk kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tugas unit kerja Itjen yang terjadi pada Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan (PLP) dan Bidang Tata Laksana Kepegawaian (TLK) dengan rincian kegiatan yang tertuang dalam SK tim kegiatan sebagai berikut.

Tabel 59. Realisasi SK Kegiatan pada Bagian PLP dan TLK

No.	Unit Kerja	Nama SK	Jangka Waktu Pembayaran	Realisasi Pembayaran (Rp)
1	PLP	SK Tim *Clearence*	Jan – Des 2023	107.125.000,00
		SK Tim Penginputan SIPTL	Jan – Des 2023	172.033.000,00
2	TLK	SK Tim Penilai Angka Kredit	Jan – Juni 2023	42.075.000,00
		SK Tim Sekretariat Penilai Angka kredit	Jan – Juni 2023	49.560.000,00
		SK Tim Sekretariat Perhitungan Angka kredit	Juni – Des 2023	38.085.000,00
		SK Tim Evaluasi Pengendalian LHKPN/LHKASN	Jan – Agust 2023	64.600.000,00
Jumlah				**473.478.000,00**

Hasil klarifikasi dengan PPK Bagian PLP dan TLK diketahui bahwa atas SK – SK Tim kegiatan tersebut tidak sama dengan tugas Bagian mereka dengan alasan melibatkan sistem dan mengikutsertakan Eselon I atau K/L lainnya. Namun berdasarkan penjelasan PMK Nomor 83/PMK.2/2023 tentang SBM pada poin 17.2 bahwa untuk ASN diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokok sehari hari. Penjelasan lebih lanjut terkait kesesuaian antara Tugas Tim dalam SK dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 60. Kesesuaian antara Tugas Tim dalam SK dengan SOTK

Nama SK	Nomor SK	Tugas Tim dalam SK	Tusi sehari hari berdasar SOTK Nomor 384/O/2021
Unit Kerja PLP			
SK Tim *Clearence*	0530/G.G1/ LK.03.00/2023	Tim Pemeriksa Bebas Temuan bertugas membuat surat informasi hasil penelusuran riwayat pelanggaran pegawai	Melaksanakan penyiapan surat keterangan bebas temuan di lingkungan Kementrian
SK Tim Penginputan SIPTL	0531/G.G1/ LK.03.000/2023	Tim Penginputan SIPTL bertugas untuk menginput Sistem Informasi PTLHP BPK	- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen, BPKP dan BPK - Melaksanakan rekonsiliasi, pemutakhiran dan penyajian data hasil pengawasan Itjen, BPKP dan BPK
Unit Kerja TLK			
SK Tim Penilai Angka Kredit (PAK)	0505/G.G1/ KP.04.01/2023	Mengadiministrasikan dan Menilai DUPAK Auditor serta menyusun konsep SK PAK Auditor	Melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Itjen
SK Tim Sekretariat PAK	0505/G.G1/ KP.04.01/2023	Mengadiministrasikan dan Menilai DUPAK Auditor serta menyusun konsep SK PAK Auditor	Melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Itjen
SK Tim Sekretariat Perhitungan Angka kredit	0505/G.G1/ KP.04.01/2023	Mengadiministrasikan dan Menilai DUPAK Auditor serta menyusun konsep SK PAK Auditor	Melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Itjen
SK Tim Evaluasi Pengendalian LHKPN/LHKASN	0508/G.G1/ KP.04.03/2023	Tim Evaluasi Data LHKPN dan LHKASN bertugas menudukung kegiatan evaluasi pengendalian data LHKPN dan LHKASN serta pengelolaan aplikasi e-LHKPN dan e-	Melaksanakan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Itjen dan Kementrian

Nama SK	Nomor SK	Tugas Tim dalam SK	Tusi sehari hari berdasar SOTK Nomor 384/O/2021
		LHKASN dilingkungan Kemendikbudristek	

Pada bidang TLK terdapat SK kegiatan yang selain merupakan bagian dari tusinya, atas kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan selama empat tahun berturut – turut namun terhadap kegiatan tersebut tetap diberikan pembayaran honor kegiatan yaitu kegiatan berupa SK Tim Penilai Angka Kredit Auditor, Penguji Karya Tulis Ilmiah dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit. Hasil wawancara dengan PPK Bidang TLK, SK yang dibayar selama empat tahun berturut turut dilaksanakan karena berhubungan dengan koordinasi pihak/bagian diluar bidang TLK sehingga dibutuhkan SK untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Rincian kegiatan yang merupakan bagian dari tusi TLK dan dibayarkan lebih dari tiga tahun berturut turut sebagai berikut.

Tabel 61. Realisasi SK Kegiatan TLK di Tahun Ke-4

No.	Nama SK	Jangka Waktu Pembayaran	Realisasi Pembayaran di tahun 2023 (Rp)
1	SK Tim Penilai Angka kredit	Januari – Juni 2023	42.075.000,00
2	SK Tim Sekretariat Penilai Angka kredit	Januari – Juni 2023	49.560.000,00
3	SK Tim Sekretariat Perhitungan Angka kredit	Juni – Desember 2023	38.085.000,00
4	SK Tim Penguji Karya Tulis ilmiah	Januari – Juni 2023	51.900.000,00
Jumlah			**181.620.000,00**

3) Ditjen Kebudayaan

Pemeriksaan atas proses pengadaan atas Belanja Barang pada satker Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (PPK) Ditjen Kebudayaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a) PPK tidak menyusun HPS untuk penggunaan Biaya Konsultansi kegiatan *SangiRUN Night Trail* senilai Rp137.000.000,00

Realisasi Penyelenggaraan *Event* Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK yaitu *SangiRUN Night Trail* dengan nilai realisasi senilai Rp2.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp2.500.000.000,00. Rincian atas Mata Anggaran Keluaran (MAK) yang menjadi bagian dari anggaran kegiatan *SangiRUN Night Trail* 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 62. Rincian Anggran SangiRun Night Trail Direktorat PPK

No.	Kode MAK	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	[521211] Belanja Bahan	268.494.000	268.494.000	100%
2	[521219] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	281.550.000	281.550.000	100%
3	[522141] Belanja Sewa	124.350.000	124.350.000	100%
4	[522151] Belanja Jasa Profesi	106.200.000	106.200.000	100%
5	[522191] Belanja Jasa Lainnya	1.293.210.000	1.293.210.000	100%
6	[524111] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	359.596.000	359.596.000	100%
7	[524113] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.600.000	66.600.000	100%
Total		**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**100%**

Berdasarkan pemeriksaan uji petik terhadap belanja jasa lainnya (522191) senilai Rp1.293.210.000,00 terdapat realisasi untuk biaya konsultan untuk kegiatan

SangiRun Night Trail Tahun 2023 yang dilakukan oleh KLK senilai Rp137.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

(1) *Supervising* senilai Rp52.500.000,00;

(2) Konsep Kreatif dan Proposal Kegiatan *SangiRun Night Trail* senilai Rp49.500.000,00; dan

(3) Operasional senilai Rp35.000.000,00.

Harga yang diberikan berdasarkan negoisasi atas surat penawaran yang disampaikan oleh KLK kepada Direktorat PPK. Berdasarkan Surat Nomor 01/LK/SK-PPK/08/2023 yang ditandatangani oleh *Creative Director* KLK kepada Direktur PPK Kemendikbudristek diketahui informasi sebagai berikut.

(1) Pada tahun 2021, KLK memperoleh amanat dari Direktorat PPK untuk membuat kegiatan di Situs Sangiran dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia tentang keberadaan Situs Sangiran. Atas amanat tersebut, KLK membuat konsep kreatif kegiatan berupa *Night Trail SangiRun* 2021 dan disetujui oleh Direktur PPK yang menjabat pada tahun tersebut.

(2) Pada tahun 2022, KLK diberikan amanah oleh Direktur PPK untuk menyelenggarakan *Night Trail SangiRun* 2022 dengan konsep kreatif baru yang bertujuan agar masyarakat mendapat manfaat dari kegiatan tersebut dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatandan mengekspose hasil karya masyarakat setempat. Atas amanah tersebut, komunitas luar kotak berlaku sebagai konseptor dan kurator tata pamer atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

(3) Pada tahun 2023, KLK menyiapkan konsep *SangiRun* 2023 dengan tujuan mendatangkan masyarakat di luar Situs Sangiran untuk mengunjungi museum dan juga desa budaya yang ada di Situs Sangiran.

(4) Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sejak tahun 2021 KLK selalu menyiapkan konsep kreatif untuk kegiatan *SangiRun* sehingga pelaksanaan di tahun ketiga bisa menjadi *flagship carrier* yang diampu oleh Direktorat PPK. Atas dasar tersebut, KLK mengajukan anggaran atas kerja intelektual dan konsep kreatif yang telah dibuat oleh KLK selama tiga tahun jika Direktorat PPK ingin mengambil alih kegiatan *SangiRun* 2023 dari KLK.

(5) Besaran pengajuan anggaran atas kerja intelektual dan konsep kreatif yang telah dibuat oleh KLK selama tiga tahun adalah sebagai berikut.

   (a) Konsep Kreatif senilai Rp75.000.000,00 untuk satu kegiatan;

   (b) *Supervising* senilai Rp75.000.000,00 untuk tiga bulan;

   (c) *Branding Identity, Logo Type, Art & Communication* senilai Rp65.000.000,00 untuk satu kegiatan;

   (d) Operasional senilai Rp35.000.000,00 untuk satu kegiatan; dan

   (e) Perhitungan PPN dan PPh senilai Rp32.500.000,00.

Berdasarkan surat permintaan tersebut, kemudian Direktorat PPK melakukan pembahasan/ negosiasi dengan pihak KLK dan menyepakati nilai yang dianggarkan

dalam RAB kegiatan *SangiRun Night Trail* yaitu *Supervising* senilai Rp52.500.000,00; Konsep Kreatif dan Proposal Kegiatan *SangiRun Night Trail* senilai Rp49.500.000,00; dan Operasional senilai Rp35.000.000,00. Kesepakatan atas besaran nilai RAB tersebut hanya berdasarkan kesepakatan bersama dan tim kerja tidak dapat menjelaskan data pendukung untuk penyusunan komponen yang menjadi dasar penetapan nilai RAB tersebut.

b) Proses perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran atas kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) belum sepenuhnya tertib

Kegiatan atas *output* Konferensi dan *Event* pada Setditjen Kebudayaan terdiri dari tiga kegiatan yaitu PKN dengan alokasi anggaran senilai Rp81.579.750.000,00, Festival Qatar dengan alokasi anggaran senilai Rp23.228.402.000,00, dan Kongres Kebudayaan Indonesia dengan alokasi anggaran senilai Rp15.371.150.000,00. Kegiatan PKN dilakukan sejak 27 Maret Tahun 2023 seiring dengan Keputusan Dirjen Kebudayaan Nomor 5943/F.F1/Kb.03/2023 tentang Dewan Kurator PKN Tahun 2023.

Berdasarkan KAK, pelaksanaan PKN di Tahun 2023 mengusung konsep rangkaian kegiatan yang dikurasi oleh delapan kurator dan dibantu dengan asisten kurator masing-masing. Delapan kurator itu menghasilkan delapan kuratorial atau rangkaian program tersendiri yang dimulai dengan kegiatan pameran, pertunjukan, forum, dan diskusi di daerah dengan mendorong kolaborasi dan pertukaran di antara para praktisi seni dan budaya. Pelaksanaan PKN ditutup dengan rangkaian acara puncak yang diselenggarakan pada 40 titik penyelenggaraan di Jakarta mulai tanggal 20 s.d 29 Oktober 2023.

Atas kegiatan PKN, alokasi anggaran per masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 63. Rincian MAK Kegiatan PKN

MAK	Jenis Belanja Kegiatan PKN	Alokasi Anggaran (Rp)
521211	Belanja Bahan	7.170.594.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	205.600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	210.500.000
522141	Belanja Sewa	3.435.740.000
522151	Belanja Jasa Profesi	1.340.200.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	51.472.912.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.402.200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.385.800.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.656.204.000
Jumlah		**81.579.750.000**

Reviu atas dokumen perencanaan menunjukkan bahwa dokumen Rincian Kertas Kerja Satker atas pelaksanaan kegiatan PKN mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan revisi DIPA Setditjen Kebudayaan dengan rincian berikut.

Tabel 64. Revisi DIPA Kegiatan PKN

DIPA (Revisi)	Tanggal	RKK Satker atas Kegiatan PKN	
		Alokasi Anggaran (Rp)	Keterangan
0	30 November 2022	79.000.000.000	Tidak ada detail atas belanja jasa lainnya senilai Rp54.045.750.000,00
1	30 November 2022	79.000.000.000	Dilakukan detail termasuk untuk belanja jasa lainnya senilai Rp54.045.750.000,00 sebanyak 14 komponen
8	09 Oktober 2023	87.000.000.000	Terjadi perubahan total anggaran (penambahan) Dilakukan detail termasuk untuk belanja jasa lainnya senilai Rp56.212.750.000,00 sebanyak 14 komponen
9	09 November 2023	87.000.000.000	Terdapat pergeseran per jenis belanja dari DIPA Sebelumnya Dilakukan detail termasuk untuk belanja jasa lainnya senilai Rp53,212,750,000,00 sebanyak 14 komponen
10	29 November 2023	81,693,250,000	Terjadi perubahan total anggaran (pengurangan) Dilakukan detail termasuk untuk belanja jasa lainnya senilai Rp51.975.452.000,00 sebanyak 14 komponen
11	25 Desember 2023	81.579.750.000	Terjadi perubahan total anggaran (pengurangan) Dilakukan detail termasuk untuk belanja jasa lainnya senilai Rp51.472.912.000,00 sebanyak 14 komponen

Hasil Pemeriksaan dan wawancara kepada PPK dan Koordinator kegiatan menunjukkan adanya kelemahan:

(1) Kegiatan PKN yang diselenggarakan tidak memiliki Juknis dan Prosedur Operasional Standar (POS) dalam pelaksanakan kegiatan

PPK tidak membuat aturan atau POS sebagai panduan dalam mekanisme perencanaan, pelaksanan, dan pertanggungjawaban. PPK hanya menetapkan penanggung jawab yang berasal dari internal Setditjen Kebudayaan atau penggelolaan keuangan untuk setiap kurator yang fungsinya hanya untuk melakukan verifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana apakah telah sesuai dengan RAB atau SBM.

(2) Hasil penyusunan RAB setiap kurator tidak ditetapkan dan ditandatangani dan dituangkan sebagai berita acara pengesahan sebagai dokumen resmi antara PPK dengan kurator.

Delapan kurator yang telah ditetapkan, memiliki kebebasan dalam menyusun dan merencanakan konsep yang akan ditampilkan. Atas konsep tersebut, kurator menyusun RAB bersama-sama asisten kurator dan tim ahli untuk mendukung gagasan yang direncanakan. RAB disusun akan disampaikan dan dibahas bersama PPK, namun setelah RAB disetujui tidak ada berita acara untuk pengesahan besaran RAB yang telah disepakati. Selanjutnya RAB tersebut dapat diubah pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kertas kerja satker pada DIPA tidak menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Penelaahan atas dokumen perencanaan menunjukkan detail komponen pada kertas kerja satker sebagai bagian dari DIPA tidak dapat dijadikan acuan realisasi pelaksanaan PKN di Tahun 2023.

Pada belanja jasa lainnya, yang merupakan alokasi jenis belanja terbesar pada Kegiatan PKN yaitu senilai Rp51.472.912.000,00 pada kertas kerja satker terdiri dari 14 detail komponen Belanja Jasa Lainnya dengan rincian berikut.

Tabel 65. Rincian Kertas Kerja Satker Belanja Jasa Lainnya PKN

No	Detail	Volume	Harga Satuan (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Video Mixer	6.0 unit	1.750.000	10.500.000
2.	Aktivasi Pra PKN menggunakan Influencer	10.0 keg	207.150.000	2.071.500.000
3.	Sistem Registrasi	1.0 keg	200.000.000	200.000.000
4.	Video Mapping Backdrop Panggung Utama	5.0 keg	150.000.000	750.000.000
5.	Live Streaming Pembukaan Penutupan	2.0 keg	862.278.000	1.724.556.000
6.	Kurator Artistik	3.0 ok	250.000.000	750.000.000
7.	Pengisi Acara	140.0 keg	50.000.000	7.000.000.000
8.	MC dan Moderator Eksternal	75.0 ok	5.000.000	375.000.000
9.	Pendukungan Minuman Tradisional	5.0 keg	331.500.000	1.657.500.000
10.	Produksi Sesi Perang Bintang	2.0 keg	150.000.000	300.000.000
11.	ManPower PKN	1.0 keg	1.225.170.000	1.225.170.000
12.	Konstruksi Venue Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional	1.0 keg	24.985.900.000	24.985.900.000
13.	Artistik Design Area Istora Dan Sekitarnya	1.0 keg	3.810.694.000	3.810.694.000
14.	Parade Budaya Nusantara	1.0 keg	6.612.092.000	6.612.092.000
Jumlah				**51.472.912.000**

Pemeriksaan lebih lanjut atas kegiatan PKN menunjukkan kertas kerja satker pada dokumen perencanaan penganggaran tersebut tidak sejalan/tidak relevan dengan konsep pelaksanaan PKN Tahun 2023. Sedangkan, untuk proses pembebanan pada DIPA, dilakukan dengan mencocokkan jenis belanja enam digit tanpa melihat detail komponennya. Hal ini disebabkan detail komponen pada kertas kerja satker yang merupakan bagian dari DIPA tidak relevan dengan pelaksanaan PKN.

Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan PKN tidak didukung oleh dokumen perencanaan dan penganggaran yang memadai sebagai bentuk pengendalian atas pelaksanaan PKN agar dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

c) Pengadaan barang dan jasa pada belanja jasa lainnya pada kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan pada Setditjen Kebudayaan belum sesuai ketentuan

Belanja jasa lainnya pada Setditjen Kebudayaan diantaranya dialokasikan untuk kegiatan monev senilai Rp1.200.000.000,00. Realisasi belanja dilakukan melalui sembilan paket pengadaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Berikut rincian paket kegiatan belanja jasa lainnya.

Tabel 66. Alokasi Anggaran Kegiatan Monev Kegiatan Ditjen Kebudayaan

No	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Ditjen Kebudayaan	200.000.000
2	Survei Layanan Publik DAK Museum	200.000.000
3	Survei Layanan Publik DAK Taman Budaya	200.000.000
4	Survei Dampak Program Ditjenbud	200.000.000
5	Survei Impact Progran Ditjenbud	200.000.000
6	Survei Kepuasan Layanan Publik Website Januari-Februari	50.000.000

No	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
7	Survei Kepuasan Layanan Publik Website Maret-April	50.000.000
8	Survei Kepuasan Layanan Publik Website Mei-Juni	50.000.000
9	Survei Kepuasan Layanan Publik Website Semester I	50.000.000
Jumlah		**1.200.000.000**

Uji petik pada kegiatan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

(1) Penentuan jenis kontrak pekerjaan pengadaan untuk kegiatan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan

Pelaksanaan kegiatan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan dilakukan melalui lima kontrak pengadaan langsung dengan rincian berikut.

Tabel 67. Daftar Kontrak Kegiatan Monev Kegiatan Ditjen Kebudayaan

No	Kegiatan	Nomor SPK	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Penyelesaian Kegiatan
1.	Survei layanan publik DAK Taman Budaya	2062/F1/ SPK/VIII/2023	PT. JICC	197.600.000	60 hari
2.	Survey Dampak Program Ditjenbud	1631/F1/ SPK/VII/2023	CV SCL	188.589.000	75 hari
3.	Survey Impact Program Ditjenbud	1484/F1/ SPK/VII/2023	PT SP	188.589.000	78 hari
4.	Survey Kepuasan Pengunjung Kongres Kebudayaan Indonesia	3063/F1/ SPK/XI/2023	PT SWI	196.900.000	40 hari
5.	Survey Pekan Kebudayaan Nasional	3048/F1/ SPK/XI/2023	PT. JICC	197.500.000	40 hari

Hasil konfirmasi dan wawancara dengan PPK dan tim teknis diketahui bahwa dalam menyusun dokumen pengadaan, PPK dan tim teknis tidak dapat mengindentifikasi dan membuat perhitungan RAB pengadaan dengan jumlah yang pasti. Proses pemilihan penyedia dilakukan melalui pengadaan langsung. Selain itu dalam penyusunan HPS, PPK menyerahkan kepada pejabat pengadaan yang selanjutnya menyerahkan kepada calon penyedia untuk membuat RAB sesuai pagu anggaran yang telah ada untuk masing-masing pekerjaan. Selanjutnya calon penyedia menyusun HPS, dirinci per item dengan uraian komponen barang/jasa yang dibutuhkan dengan metode harga satuan baik satuan unit/volume.

Setelah harga disusun oleh calon penyedia selanjutnya diberikan kepada PPK sebagai dokumen penawaran dari penyedia. Dokumen penawaran tersebut selanjutnya dilakukan negosiasi antara PPK dan calon penyedia untuk mendapatkan kesepakatan harga pekerjaan. Atas kondisi tersebut PPK tidak memiliki kertas kerja dan data dukung untuk menyusun HPS.

Hasil reviu atas dokumen kontrak/SPK diketahui bahwa SPK yang ditandatangani merupakan kontrak berjenis kontrak lumsum di mana dalam proses pengadaan sebelum penayangan pada SPSE calon penyedia tidak menyusun RAB secara *lumpsum* melainkan secara harga satuan. Hal ini dikarenakan sebelumnya PPK belum memiliki pengalaman dalam membuat perikatan kontrak dan pagu anggaran yang tersedia hanya senilai Rp200.000.000,00.

(2) Ketidaksesuaian durasi waktu pelaksanaan kegiatan pada SPK untuk kegiatan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan dengan perhitungan waktu pada HPS

Hasil reviu atas lima paket pekerjaan kegiatan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan diketahui dengan dokumen HPS menunjukkan terdapat adanya perbedaan durasi waktu dalam SPK. Namun adanya perbedaan tersebut tidak mengubah besarnya nilai kontrak pada masing-masing SPK. Hal tersebut disebabkan jenis kontrak yang diubah oleh PPK menjadi kontrak *lumpsum*. Berikut rincian atas ketidaksesuaian durasi tersebut.

(a) Survei Dampak Program Ditjen Kebudayaan

Tabel 68. Perbedaan Waktu Survei Dampak pada HPS/Penawaran dan Durasi SPK

No	Uraian	Nilai Satuan per Bulan (Rp)	Jangka Waktu	
			HPS	SPK
1.	Ketua Tim	13.750.000	3 bulan	78 hari
2.	Ahli Monitoring	11.750.000	3 bulan	78 hari
3.	Peneliti 1	10.000.000	3 bulan	78 hari
4.	Peneliti 2	6.750.000	3 bulan	78 hari
5.	Peneliti 3	5.750.000	3 bulan	78 hari
6.	Peneliti 4	5.750.000	3 bulan	78 hari
7.	ATK	1.200.000	3 bulan	78 hari

(b) Survey *Impact Program* Ditjen Kebudayaan

Tabel 69 Perbedaan Waktu Survei Impact pada HPS/Penawaran dan Durasi SPK

No	Uraian	Nilai Satuan per Bulan (Rp)	Jangka Waktu	
			HPS	SPK
1.	Ketua Tim	13.750.000	3 bulan	78 hari
2.	Ahli Monitoring	11.750.000	3 bulan	78 hari
3.	Peneliti 1	10.000.000	3 bulan	78 hari
4.	Peneliti 2	6.750.000	3 bulan	78 hari
5.	Peneliti 3	5.750.000	3 bulan	78 hari
6.	Peneliti 4	5.750.000	3 bulan	78 hari
7.	ATK	1.200.000	3 bulan	78 hari

(c) Survei Kepuasan Pengunjung Kongres Kebudayaan Indonesia

Tabel 70. Perbedaan Waktu Survei Kepuasan pada HPS/Penawaran dan Durasi SPK

No	Uraian	Nilai Satuan per Bulan (Rp)	Jangka Waktu	
			HPS	SPK
1.	Ketua Tim	9.500.000	2 bulan	40 hari
2.	Ahli Statistik	8.500.000	2 bulan	40 hari
3.	Ahli Basis Data	8.500.000	2 bulan	40 hari
4.	ATK	1.000.000	2 bulan	40 hari
5.	Pengolahan Data	15.000.000	2 bulan	40 hari
6.	Aplikasi Survey	45.000.000	2 bulan	40 hari
7.	Website Survey	10.000.000	2 bulan	40 hari
8.	Biaya Internet	800.000	2 bulan	40 hari

(d) Survei Layanan Publik Taman Budaya

Tabel 71. Perbedaan Waktu Survei Layanan pada HPS/Penawaran dan Durasi SPK

No	Uraian	Nilai Satuan per Bulan (Rp)	Jangka Waktu	
			HPS	SPK
1.	Ketua Tim	7.500.000	4 bulan	60 hari
2.	ATK	750.000	4 bulan	60 hari
3.	Biaya Internet dan Komunikasi	500.000	4 bulan	60 hari

Kondisi tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan dasar perhitungan HPS dan dokumen penawaran dengan pelaksanaan pada empat kegiatan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan.

4) Ditjen GTK

a) BBGP Prov. Jawa Tengah tidak menggunakan SPK atas 244 transaksi belanja dengan nilai di atas Rp50.0000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00

Pada Tahun 2023 BBGP Prov. Jawa Tengah merealisasikan belanja bahan senilai Rp39.567.475.296,00 atau 99,42% dari anggaran senilai Rp39.798.084.000,00. Atas jumlah realisasi belanja bahan tersebut, Pejabat Pengadaan BBGP Prov. Jawa Tengah merealisasikan 244 transaksi pengadaan belanja bahan dengan pihak ketiga senilai Rp19.591.579.310,00.

Hasil pengujian atas bukti pertanggungjawaban belanja bahan diketahui bahwa mekanisme yang digunakan oleh BBGP Prov. Jateng dalam merealisasikan seluruh belanja bahan adalah dengan metode pengadaan langsung. Diantara 244 transaksi pengadaan, terdapat 146 transaksi dengan total senilai Rp17.981.444.279,00 dalam bentuk belanja bahan dengan nilai pengadaan di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00.

Mekanisme pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk mendapatkan penyedia barang yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00. Namun demikian, atas transaksi pengadaan langsung dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000,00 harus dilengkapi dengan SPK.

Pejabat pengadaan BBGP Prov. Jateng menjelaskan bahwa dikarenakan beban pekerjaan dan terbatasnya ketersediaan SDM yang dimiliki, maka pejabat pengadaan tidak sepenuhnya melakukan langkah-langkah yang telah diatur sesuai ketentuan untuk melaksanakan prosedur pengadaan langsung.

Dalam hal terdapat permintaan pengadaan barang oleh unit teknis yang akan melakukan kegiatan, pejabat pengadaan akan secara langsung menghubungi pihak ketiga yang sudah pernah bertransaksi dengan BBGP tanpa melakukan permintaan penawaran yang dilengkapi proses klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga secara formal. Pejabat pengadaan memesan barang yang dimaksud secara lisan dan kemudian akan melampirkan bukti transaksi dalam bentuk kuitansi pembelian untuk diajukan permintaan pembayarannya kepada bendahara. Proses serah terima barang yang dibeli tidak dilengkapi dengan dokumentasi valid BAST barang dengan PPK. Barang yang dibeli tidak seluruhnya dilakukan pemeriksaan pada saat serah terima disebabkan PPK tidak memiliki personel yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan fungsi tersebut.

b) Indikasi pemecahan pengadaan barang atas 774 transaksi realisasi belanja bahan dengan seluruhnya senilai Rp14.036.289.203,00

Pada Tahun 2023, BBGP Prov. Jatim merealisasikan belanja bahan senilai Rp33.878.943.844,00 meningkat 183,05% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang senilai Rp11.969.304.638,00. Peningkatan ini antara lain disebabkan program kerja BBGP Prov. Jatim telah dilaksanakan secara penuh pada Tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana operasional unit kerja baru berjalan secara maksimal pada triwulan terakhir.

Berdasarkan pengujian atas dokumentasi pertanggungjawaban belanja bahan, diketahui PPK BBGP Prov. Jatim merealisasikan 1.073 transaksi belanja bahan dengan pihak ketiga senilai Rp20.697.517.567,00 dengan rincian penyedia transaksi sebagai berikut.

Tabel 72. Rincian Penyedia Belanja Bahan pada BBGP Jatim

No.	Penyedia	Jumlah Transaksi	Nilai Total Transaksi (Rp)
1	Koperasi BSB P4TKPKN	1.013	18.713.996.991,00
2	CV A	44	1.387.456.764,00
3	CV AJL	3	204.101.500,00
4	PT RGI	13	391.962.312,00
Jumlah		**1.073**	**20.697.517.567,00**

Realisasi belanja bahan yang direalisasikan PPK BBGP Prov. Jatim mayoritas digunakan untuk pembelian belanja bahan pendukung pelaksanaan program PGP dan PSP yang dilaksanakan di 38 wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dalam melaksanakan kegiatan lokakarya atau pertemuan secara luring, BBGP Prov. Jatim melaksanakan pengadaan kelengkapan peserta dan narasumber berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dan seminar *kit*. Kelengkapan tersebut diadakan untuk dikirimkan ke lokasi Kantor BBGP Prov. Jatim yang berada di Junrejo Kota Batu untuk kemudian dibawa oleh masing-masing panitia pelaksana ke lokasi kegiatan di kabupaten atau kota tertentu.

Hasil pengujian atas dokumen pelaksanaan pengadaan langsung menunjukkan bahwa terdapat kontrak pengadaan belanja bahan yang direalisasikan untuk menghasilkan barang dengan jenis yang sama, waktu pelaksanaan yang identik, dan dilaksanakan oleh penyedia yang sama namun dengan kontrak yang saling terpisah untuk pengadaan kelengkapan peserta lokakarya dan ATK Pendukung Kegiatan. Rincian pengadaan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 73. Rincian Pengadaan Kelengkapan Peserta Lokakarya dan ATK Pendukung Kegiatan Berindikasi Pemecahan Kontrak

No.	Nama Kegiatan	Penyedia	Jumlah Kontrak	Nilai Total Transaksi (Rp)
1	Workshop pendidikan inklusif PSP Tahap 2	Koperasi BSB	4	248.428.088,00
2	Lokakarya 5 PGP Angkatan 7	Koperasi BSB	3	270.954.314,00
3	Lokakarya 7 PGP Angkatan 7	Koperasi BSB	4	347.303.136,00
4	Rapat Koordinasi Penguatan Fasilitator PSP	Koperasi BSB	2	237.436.261,00
5	Lokakarya 2 PGP Angkatan 7	Koperasi BSB	33	481.391.305,00
6	Lokakarya 3 PGP Angkatan 7	Koperasi BSB	31	696.073.984,00
7	Lokakarya 4 PGP Angkatan 7	Koperasi BSB	33	407.925.954,00

No.	Nama Kegiatan	Penyedia	Jumlah Kontrak	Nilai Total Transaksi (Rp)
8	Lokakarya 5 PGP Angkatan 7	Koperasi BSB	29	857.686.314,00
9	Lokakarya 6 PGP Angkatan 7	Koperasi BSB	33	473.901.030,00
10	Lokakarya 7 PGP Angkatan 7	Koperasi BSB	41	1.075.910.521,00
11	Lokakarya 1 PGP Angkatan 8	Koperasi BSB	31	317.517.994,00
12	Lokakarya 5 PGP Angkatan 8	Koperasi BSB	31	487.651.753,00
13	Lokakarya 6 PGP Angkatan 8	Koperasi BSB	31	328.486.347,00
14	Lokakarya 7 PGP Angkatan 8	Koperasi BSB	31	354.987.055,00
15	Lokakarya 3 PGP Angkatan 9	Koperasi BSB	50	1.099.738.829,00
16	Lokakarya Disiplin Positif PSP Angkt. 3	Koperasi BSB	52	694.794.143,00
17	Lokakarya ke-1 PGP Angkt. 9	Koperasi BSB	62	1.342.660.289,00
18	Lokakarya ke-4 PGP Angkt. 8	Koperasi BSB	31	318.309.311,00
19	Lokakarya kepemimpinan PSP Angkt. 2	Koperasi BSB	16	211.089.052,00
20	Lokakarya kurikulum 2 Pelajar Pancasila	Koperasi BSB	20	356.336.018,00
21	Lokakarya Orientasi Program PSP Angkt. 8	Koperasi BSB	31	347.286.288,00
22	Lokakarya Pembelajaran 1 PSP Angkt. 3	Koperasi BSB	34	478.559.128,00
23	Lokakarya Pembelajaran 2 PSP Angkt. 3	Koperasi BSB	34	272.868.692,00
24	Lokakarya refleksi akhir tahun PSP Angkt. 2	Koperasi BSB	18	331.216.603,00
25	Penguatan IKM bagi pengawas sekolah	Koperasi BSB	10	342.413.309,00
26	Lokakarya Pembelajaran PSP Angkt. 2	Koperasi BSB	18	490.181.952,00
27	Lokakarya Perencanaan PSP Angkt. 3	Koperasi BSB	61	1.165.181.533,00
Total			**774**	**14.036.289.203,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa PPK dan Pejabat Pengadaan melaksanakan proses pengadaan sebanyak 774 transaksi untuk mendukung 27 kegiatan. Nilai pengadaan untuk masing-masing kontrak kegiatan apabila digabungkan akan berjumlah melebihi Rp200.000.000,00 sehingga sesuai ketentuan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, prosedur pengadaan yang seharusnya digunakan adalah dengan mekanisme lelang.

Hasil klarifikasi dengan PPK dan Pejabat Pengadaan BBGP Prov. Jawa Timur menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme pengadaan langsung dilaksanakan karena lemahnya perencanaan untuk mempersiapkan banyaknya kegiatan yang harus diampu oleh personel unit pengadaan BBGP Prov. Jatim dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, jika pengadaan menggunakan proses tender, dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang sebagaimana yang diajukan oleh unit pelaksana kegiatan secara tepat waktu.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PPK dan Pejabat Pengadaan tidak dapat menunjukkan hasil survei atau perbandingan harga dengan penyedia yang lain dalam hal pemilihan penyedia sehingga tidak dapat diyakini apakah harga yang disepakati dalam kontrak adalah harga yang terbaik dan ekonomis.

c) Pelaksanaan Swakelola Tipe III atas realisasi Belanja Jasa Non Operasional senilai Rp27.445.399.064,00 pada Ditjen GTK tidak sepenuhnya sesuai ketentuan

Pada Tahun 2023 Ditjen GTK merealisasikan belanja barang non operasional lainnya senilai Rp108.789.638.926,00. Belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk pembelian barang dan/atau jasa habis pakai yang realisasinya

dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya digunakan untuk pelayanan yang bersifat eksternal.

Hasil pengujian secara uji petik atas rincian realisasi belanja barang non operasional lainnya pada Kemendikbudristek menunjukkan bahwa terdapat kontrak swakelola tipe III yang dilaksanakan oleh Yayasan ATT pada Kemendikbudristek pada TA 2023 dengan detail sebagai berikut.

Tabel 74. Rincian Kontrak Swakelola Tipe III oleh Yayasan ATT

No.	Unit Kerja	Nilai Kontrak (Rp)
1	Ditjen GTK	27.445.399.064,00
2	Ditjen PDM	8.372.488.800,00
3	Ditjen Vokasi	5.397.239.183,00
	Jumlah	**41.215.127.047,00**

Yayasan ATT merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan bentuk yayasan yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.06-0024003 tanggal 19 April 2021 dengan salah satu bidang spesialisasinya adalah pendidikan. Lembaga ini telah menjadi pelaksana pekerjaan swakelola tipe III pada Kemendikbudristek dimulai sejak 2021 sehingga pada TA 2024 merupakan tahun ke-4 bagi Yayasan ATT melaksanakan pekerjaan dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam pencapaian Prioritas Nasional yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kebijakan Merdeka Belajar.

Dalam melaksanakan fungsinya, Yayasan ATT dianggap sebagai ormas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dalam hal menyediakan anggotanya yang kompeten sesuai keahlian untuk menjadi mitra pelaksana dalam melaksanakan kajian, reviu, desain, penyusunan pedoman/panduan/modul, dan hal lainnya yang dibutuhkan serta memberikan masukan kepada pemangku kepentingan pada direktorat teknis terkait di lingkungan Ditjen GTK.

Pengujian lebih lanjut atas bukti pendukung pengadaan dan laporan hasil penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Yayasan ATT menunjukkan kondisi sebagai berikut.

(1) Yayasan ATT tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana swakelola tipe III

Pada Tahun 2023, Yayasan ATT melakukan perikatan kontrak swakelola tipe III dengan Pejabat Penandatangan Kontrak Ditjen GTK sesuai dengan addendum ke-4 kontrak Nomor 3250/B6/KU.01.02/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dengan total senilai Rp27.395.399.064,00. Nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui DIPA yang berbeda pada masing-masing satker pada Ditjen GTK dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75. Rincian DIPA Pembayaran Swakelola Tipe III oleh Yayasan Artikel Tiga Tiga pada Ditjen GTK

No.	Unit Kerja	Nilai Kontrak (Rp)
1	DIPA Setditjen GTK	576.300.000,00
2	DIPA Dit. Guru Paud dan Dikmas	3.338.348.447,00

No.	Unit Kerja	Nilai Kontrak (Rp)
3	DIPA Dit. Guru Dikdas	7.908.641.114,00
4	DIPA Dit. Guru Dikmen Diksus	6.572.010.061,00
5	DIPA Dit KSPSTK	7.245.954.992,00
6	DIPA Dit. PPG	1.754.144.450,00
	Jumlah	**27.395.399.064,00**

Berdasarkan nilai kontrak perjanjian swakelola tipe III yang telah disepakati, kontrak terdiri dari dua unsur utama pembentuk harga yaitu: 1) digunakan untuk pembayaran tenaga pelaksana manajemen dan tenaga pelaksana program serta 2) dibayarkan untuk biaya operasional kegiatan.

Dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tipe III, Yayasan ATT melibatkan 102 tim pelaksana dan 12 personel tim manajemen. Hasil pemeriksaan terhadap personel tim pelaksana dan tim manajemen menunjukkan bahwa atas 114 jumlah personel yang melaksanakan pekerjaan pada kontrak dimaksud, hanya 12 yang merupakan personel tetap pada Yayasan ATT. Sedangkan 102 tenaga pelaksana lainnya merupakan personel yang dipekerjakan berdasarkan kontrak tahunan perorangan Yayasan ATT bukan sebagai pegawai atau anggota, namun terbatas untuk perikatan dalam melaksanakan luaran/output tertentu yang diatur dalam kontrak untuk mendukung kegiatan Ditjen GTK.

Tenaga pelaksana yang dipekerjakan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan diantaranya sebanyak satu personel tidak melaksanakan pekerjaan secara *fulltime* dalam mengerjakan kontrak dengan Ditjen GTK. Hasil pengujian secara uji petik kepada personel yang dipekerjakan menunjukkan terdapat tenaga pelaksana yang berstatus sebagai dosen tidak tetap pada PTN dan berafiliasi dengan lembaga penelitian lainnya.

Direktur Eksekutif Yayasan ATT menjelaskan bahwa untuk melengkapi kebutuhan tenaga pelaksana sesuai persyaratan yang dibutuhkan dalam KAK kontrak swakelola tipe III dengan Ditjen GTK, maka Yayasan ATT melaksanakan rekrutmen terbuka yang diumumkan melalui sosial media dan kanal lainnya. Rekrutmen tersebut terbuka untuk diikuti oleh semua pihak yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa status tenaga pelaksana yang dipekerjakan dan disediakan bukan merupakan anggota atau personel tetap organisasi kemasyarakatan dalam hal ini adalah Yayasan ATT.

Karakteristik pelaksanaan kontrak yang mengandung unsur fleksibilitas pada swakelola tipe III, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang memiliki kemampuan menyediakan personel tetapnya untuk menghasilkan output sebagaimana diharapkan dalam kontrak. Dalam hal kontrak dengan Ditjen GTK, Yayasan ATT bertindak sebagaimana penyedia jasa konsultan, dimana untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak, maka lembaga tersebut melakukan rekrutmen terbuka tenaga pendukung pelaksana yang tersedia di pasar tenaga kerja.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan swakelola tipe III yang mensyaratkan organisasi kemasyarakatan harus mempunyai personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dan hanya membolehkan rekrutmen

tenaga ahli/tenaga pendukung dari luar pelaksana paling banyak 10% dari jumlah tim pelaksana.

(2) Penunjukan Yayasan ATT sebagai pelaksana pekerjaan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan

Dalam penentuan pelaksana pekerjaan, PPK tidak melakukan survei dan pencarian informasi terkait ketersediaan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud.

PPK beranggapan bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang bersifat spesifik dan terkait dengan fungsi Kemendikbudristek, hanya dapat dilaksanakan oleh Yayasan ATT yang telah menjalankan kontrak dengan Ditjen GTK sejak tahun 2021. Justifikasi dan pertimbangan secara tertulis yang digunakan sebagai dasar pemilihan pelaksana hingga proses pengujian dokumen pendukung oleh pemeriksa belum diberikan oleh PPK sehingga belum dapat diperoleh alasan yang valid atas pemilihan Yayasan ATT secara berturut-turut selama tiga tahun anggaran.

(3) Penentuan nilai gaji tenaga pelaksana tidak didasarkan atas standar yang jelas

Hasil pengujian atas gaji yang dibayarkan kepada 114 tenaga pelaksana dan tenaga pendukung menunjukkan bahwa nilai gaji yang dibayarkan oleh Yayasan ATT berada pada kisaran antara Rp8.365.396,00 s.d Rp74.558.241,00 per bulan. Penentuan nilai gaji yang diberikan berdasarkan kertas kerja perhitungan yang dibuat dalam evaluasi RAB yaitu nilai yang dibayarkan.

Perhitungan pembayaran kepada tenaga ahli dan penentuan rate harga yang berbeda kepada masing-masing tenaga pendukung tidak memiliki dasar penentuan yang jelas, antara lain kualifikasi: dasar pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, atau kondisi lain yang menjadi variabel penentu pembayaran. Penentuan nilai gaji yang diberikan, sepenuhnya menjadi kewenangan Yayasan ATT namun demikian hal tersebut tidak didukung oleh dasar yang didukung oleh ketentuan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji secara akuntabel.

5) Ditjen Diktiristek

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Perorangan pada Direktorat Sumber Daya (Ditdaya) menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut.

a) Perencanaan Belanja Jasa Konsultan tidak mempertimbangkan tugas fungsi sarana prasarana Ditdaya

Ditdaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penjaminan mutu, fasilitasi, bimbingan teknis (bimtek), pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya pendidikan tinggi akademik serta urusan ketatausahaan direktorat. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sarana perguruan tinggi negeri, sekaligus untuk mendorong kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan untuk meningkatkan inovasi, maka perlu dilakukan upaya revitalisasi sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang sedang dilaksanakan oleh Ditdaya saat ini terdiri dari tiga skema pembiayaan yaitu SBSN, PHLN, dan KDP.

Berdasarkan hasil reviu dokumen yaitu dengan membandingkan dokumen KAK, SPK Belanja Jasa Konsultan dengan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Koordinator Sarana Prasarana Ditdaya 2023, menunjukkan terdapat kesamaan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.

Reviu dokumen lebih lanjut dengan membandingkan dokumen pengelolaan PHLN yang dilaksanakan Ditdaya menunjukkan bahwa untuk proyek *Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth in* Indonesia (AKSI) dan proyek *Higher Education for Technology and Innovation* (HETI) masing-masing telah melakukan perikatan untuk *Project Management Consultant* (PMC) dan tenaga konsultan perorangan terkait manajemen dan keuangan guna membantu pelaksanaan tugas Ditdaya selaku *Project Management Unit* (PMU).

Berdasarkan konfirmasi kepada PPK Sarana dan Prasarana Ditdaya terkait latar belakang pengadaan jasa konsultan perorangan diketahui beberapa hal antara lain sebagai berikut.

(1) Jasa konsultan diperlukan untuk membantu dalam setiap pengambilan keputusan dari Dirjen Diktiristek, Direktur Sumber Daya selaku KPA, PPK dan Pokja terkait dengan sinkronisasi antara aturan dari masing - masing lender dengan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa;

(2) Khusus untuk Proyek JICA, KFW dan SFD tidak memiliki PMC. Oleh karena itu diperlukan jasa konsultan perorangan untuk keperluan koordinasi, memberikan masukan bagi Dirjen Diktiristek selaku *Executing Agency*, Direktur Sumber Daya Selaku KPA dan PPK serta pendampingan kepada Kelompok Kerja (Pokja);

(3) Selain itu jasa konsultan, juga diberi tugas tambahan untuk memonitor dan mendampingi proyek SBSN yang merupakan tanggung jawab Ditdaya. Tugas tambahan lainnya adalah memberikan masukan dan menyiapkan bahan - bahan rapat bilateral antara Bappenas dan Kemenkeu serta masing - masing lender.

(4) Khusus untuk PTNBH, DIPA masing -masing PTNBH berada di Ditdaya. Oleh karena itu terkait realisasi pembayaran atas progres pekerjaan SBSN dilakukan melalui Ditdaya, sehingga perlu diperiksa dan dipastikan sesuai dengan aturan pembayaran dari masing - masing lender. Selain itu konsultan perorangan juga menyiapkan konsep surat Dirjen Diktiristek terkait kegiatan SBSN dan memberikan masukan kepada PTN penerima SBSN untuk peralatan pendidikan dan riset yang wajib menggunakan produk TKDN maupun import sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

b) Penyusunan HPS Belanja Jasa Konsultan Perorangan belum didukung kertas kerja dan dokumentasi

Hasil konfirmasi kepada PPK Sarana dan Prasarana Ditdaya terkait penyusunan dan penetapan HPS diketahui beberapa hal sebagai berikut:

(1) HPS disusun berdasarkan pada empat hal yaitu pagu yang tersedia dalam DIPA Ditdaya, tarif berdasarkan standar INKINDO, kontrak sejenis (*Project*

Management Specialist) pada PMSC Proyek AKSI Asia Development Bank (ADB), Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 16 Kemendikbudristek;

(2) Dari empat sumber itu nilai yang terendah adalah pagu anggaran maka yang diambil sebagai dasar HPS adalah pagu anggaran.

Analisa lebih lanjut terhadap dokumen penyusunan dan penetapan HPS Belanja Jasa Konsultan Perorangan tersebut menunjukkan pemilihan pagu anggaran sebagai dasar penetapan HPS belum didukung kertas kerja dan dokumentasi yang memadai dikarenakan tidak ada dokumentasi dan formulasi penetapan nilai Rp27.000.000,00 sebagai honor per bulan yang dibayarkan.

c) Pelaksanaan Jasa Konsultan Perorangan belum didukung laporan secara lengkap

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban jasa konsultan perorangan menunjukkan bahwa dokumentasi pelaksanaan pekerjaan tidak lengkap. Dokumen pertanggungjawaban jasa konsultan per bulan hanya menguraikan poin-poin pelaksanaan tugas/kegiatan yang dilaksanakan per hari. Konfirmasi kepada PPK Sarana dan Prasarana Ditdaya diketahui atas dokumentasi hasil pekerjaan memang belum dilaksanakan dengan rinci dan diadministrasikan dengan baik.

6) Ditjen Diksi

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan pada PNJ dan Polimedia diketahui bahwa terdapat indikasi pemecahan kontrak atas paket pekerjaan dengan penjelasan sebagai berikut.

a) PNJ

Tahun 2023 PNJ melakukan pengadaan sembilan paket pekerjaan pengadaan jasa cleaning service dan satuan pengamanan senilai Rp1.102.887.120,00 yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 76. Rincian Sembilan Paket Belanja Pemeliharaan

No.	Nama Pekerjaan	Nomor SPK	Tanggal SPK	Jangka Waktu	Penyedia	Nilai (Rp)
1	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* dan Satuan Pengamanan PSDKU dan PNJ Bulan Januari Tahun 2023	23/PL3.B/ PL.02.00/2023	6 Januari 2023	1 bulan (berakhir 31 Januari 2023)	CV PP	60.597.120,00
2	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* dan Satuan Pengamanan PSDKU dan PNJ Tahun 2023	122/PL3.B/ PL.02.00/2023	3 Februari 2023	1 bulan (berakhir 28 Februari 2023)	CV PP	60.597.120,00
3	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* dan Satuan Pengamanan PSDKU dan PNJ Bulan Mei dalam Rangka Operasional dan Pemeliharaan Kantor PNJ TA 2023	401/PL3.B/ PL.02.00/2023	28 April 2023	31 hari kalender (berakhir 31 Mei 2023)	CV PP	60.597.120,00
4	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* dan Satuan Pengamanan PSDKU dan PNJ Bulan April Tahun 2023	342/PL3.B/ PL.02.00/2023	3 April 2023	30 hari kalender (berakhir 30 April 2023)	CV PP	60.597.120,00
5	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* dan Satuan Pengamanan PSDKU dan PNJ Bulan Juni Tahun 2023	549/PL3.B/ PL.02.00/2023	6 Juni 2023	1 bulan (berakhir 30 Juni 2023)	CV PP	60.597.120,00
6	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* Bulan Januari Tahun 2023	15/PL3.B/ PL.02.00/2023	5 Januari 2023	1 bulan (berakhir 31 Januari 2023)	PT TJB	199.975.380,00
7	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* Bulan Februari Tahun 2023	119/PL3.B/ PL.02.00/2023	3 Februari 2023	1 bulan (berakhir 28 Februari 2023)	PT TJB	199.975.380,00
8	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* Bulan Mei dalam Rangka Operasional dan Pemeliharaan Kantor PNJ TA 2023	395/PL3.B/ PL.02.00/2023	28 April 2023	31 hari kalender (berakhir 31 Mei 2023)	PT TJB	199.975.380,00

No.	Nama Pekerjaan	Nomor SPK	Tanggal SPK	Jangka Waktu	Penyedia	Nilai (Rp)
9	Pengadaan Jasa *Cleaning Service* Bulan Juni Tahun 2023	543/PL3.B/ PL.02.00/2023	6 Juni 2023	1 bulan (berakhir 30 Juni 2023)	PT TJB	199.975.380,00
Jumlah						1.102.887.120,00

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban atas pengadaan sembilan paket pekerjaan jasa *cleaning service* dan satuan pengamanan tersebut diketahui bahwa:

a) Sembilan paket pekerjaan dilaksanakan oleh dua penyedia yaitu CV PP sebanyak lima paket pekerjaan dengan masing-masing paket pekerjaan senilai Rp60.597.120,00 dan PT TJB sebanyak empat paket pekerjaan dengan masing-masing paket pekerjaan senilai Rp199.975.380,00.

b) Sembilan paket tersebut melalui mekanisme penunjukan langsung;

c) Penamaan sembilan paket pekerjaan tersebut pada kontrak/SPK antara satu dengan yang lainnya dibuat berbeda dan dipisahkan berdasarkan periode bulan dan lokasi pemeliharaan. Pada lima paket pekerjaan jasa *cleaning service* dan satuan pengamanan untuk pemeliharaan di lokasi Prodi Diluar Kampus Utama (PSDKU) memiliki nilai kontrak yang sama yaitu senilai Rp60.597.120,00 untuk setiap SPK, dan tidak terdapat perbedaan rincian item pekerjaan, volume, maupun harga satuan. Hal serupa ditemukan pada empat paket pekerjaan jasa *cleaning service* dan satuan pengamanan untuk pemeliharaan di lokasi selain PSDKU, dimana keempat kontrak memiliki nilai yang sama yaitu senilai Rp199.975.380,00 dan tidak terdapat perbedaan rincian item pekerjaan, volume, maupun harga satuan.

Atas permasalahan tersebut PPK menjelaskan bahwa PNJ berubah status dari satker PNBP ke satker BLU pada Tahun 2021. Perubahan tersebut pada sumber dana pengadaan yang semula dari anggaran RM beralih menggunakan anggaran BLU yang jumlahnya terbatas dan fluktuatif dari tahun ke tahun sehingga-PPK mengambil kebijakan agar pengadaan jasa *cleaning service* dan satuan pengamanan untuk tahun 2023 dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung agar nilai kontrak/nilai pekerjaan tidak melebihi kapasitas anggaran BLU. Selain itu, pemecahan kontrak menjadi beberapa periode bulan merupakan kebijakan yang diambil oleh PPK untuk menjamin keterbayaran setiap pengadaan jasa *cleaning service* dan satuan pengamanan.

b) Polimedia

Pada Tahun 2023 Polimedia melaksanakan pengadaan empat paket pekerjaan perawatan toilet senilai Rp761.906.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77. Rincian Empat Paket Belanja Pemeliharaan Perawatan Toilet

No	Uraian Pekerjaan	Nomor SPK	Tanggal SPK	Jangka Waktu	Penyedia	Nilai (Rp)
1	Perawatan Toilet Pria Lantai 2 Gedung A	10/PL27.27.6/PL .Prwt. Toilet.Lt.2.Gd.A/ LK/2023	23 Mei 2023	21 Hari Kalender dari 24 Mei 2023 s.d 13 Juni 2023	PT. TMG	191.756.000,00
2	Perawatan Toilet Pria Lantai 3 Gedung A	05/PL27.6/PL.Prwt. Toilet.Lt.3.Gd.A/ LK/2023	9 Oktober 2023	21 Hari Kalender dari10 Oktober 2023 s.d 30 Oktober 2023	PT. CAP	191.756.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Nomor SPK	Tanggal SPK	Jangka Waktu	Penyedia	Nilai (Rp)
3	Perawatan Toilet Wanita Lantai 2 Gedung A	10/PL.27.25/PL. Prwt.Toilet. Wanita.Lt.2.Gd. A/LK/2023	14 Juni 2023	21 Hari Kalender dari 15 Juni 2023 s.d 5 Juli 2023	PT. PPA	189.197.000,00
4	Perawatan Toilet Wanita Lantai 3 Gedung A f	10/PL.27.25/PL. Prwt.Toilet. Wanita.Lt.3.Gd. A/LK/2023	29 September 2023	21 Hari Kalender dari 30 Sept 2023 s.d 20 Oktober 2023	PT. VKA	189.197.000,00
Jumlah						**761.906.000,00**

PPK melaksanakan pengadaan pekerjaan perawatan toilet tersebut dengan metode pengadaan langsung dengan nilai untuk masing-masing kontrak di bawah Rp200.000.000,00. Dengan demikian, PPK dapat langsung melakukan penunjukan penyedia tanpa harus melakukan tender. Judul atau penamaan dokumen SPK dibuat berbeda dan dipisah untuk setiap toilet yang dilakukan perawatan. Tidak terdapat perbedaan item beserta nilai pekerjaan pada empat paket pekerjaan tersebut yang terdiri dua paket pekerjaan perawatan toilet pria dan dua paket pekerjaan toilet wanita. Secara rinci item pekerjaan perawatan toilet pria dan perawatan toilet wanita yang sama tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 78. Rincian Item Pekerjaan yang Sama pada Perawatan Toilet Pria dan Wanita

(dalam rupiah)

No	Keterangan / Pekerjaan	Pekerjaan Perawatan Toilet Pria Lantai 2 Gedung A	Pekerjaan Perawatan Toilet Pria Lantai 3 Gedung A	Pekerjaan Perawatan Toilet Wanita Lantai 2 Gedung A	Pekerjaan Perawatan Toilet Wanita Lantai 3 Gedung A
1	Nilai Kontrak (Rp)	191.756.000,00	191.756.000,00	189.197.000,00	189.197.000,00
2	Pekerjaan Pendahuluan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Pekerjaan Pembongkaran	9.860.000,00	9.860.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00
4	Pekerjaan Pasangan dan pengecatan	96.223.312,54	96.223.312,54	114.135.700,67	114.135.700,67
5	Pekerjaan Instalasi	10.056.510,12	10.056.510,12	12.116.585,07	12.116.585,07
6	Pekerjaan Sanitair	52.613.369,11	52.613.369,11	28.921.079,94	28.921.079,94
7	Sub Total	172.753.191,77	172.753.191,77	170.448.365,68	170.448.365,68
8	PPN 11%	19.002.851,09	19.002.851,09	18.749.320,22	18.749.320,22
9	Total	191.756.042,86	191.756.042,86	189.197.685,90	189.197.685,90
10	Pembulatan	191.756.000,00	191.756.000,00	189.197.000,00	189.197.000,00

Hasil wawancara dengan PPK menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan tender dengan alasan:

(1) Terdapat pekerjaan yang mendesak pada toilet pria lantai 2 yang harus segera diperbaiki;

(2) Pada pekerjaan renovasi toilet di Semester II Tahun 2023 terdapat perbedaan mata anggaran yang digunakan; dan

(3) Tidak terdapat biaya proses pelaksanaan tender (biaya pengelola kegiatan/proses tender, biaya konsultan perencana, dan konsultan pengawas).

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021

1) Pasal 1 angka 40 yang menyatakan bahwa Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00;

2) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf memiliki tugas:

a) menyusun perencanaan pengadaan;

b) melaksanakan konsolidasi PBJ;

c) menetapkan spesifikasi teknis/ KAK;

d) menetapkan rancangan kontrak;

e) menetapkan HPS;

f) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

g) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h) melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00;

i) mengendalikan kontrak;

j) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

k) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.

3) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

a) pelaksanaan Kontrak;

b) kualitas barang/jasa;

c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d) ketepatan waktu penyerahan; dan

e) ketepatan tempat penyerahan.

4) Pasal 20 ayat (2) butir d yang menyatakan bahwa Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi;

5) Pasal 25 yang menyatakan bahwa Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

a) Menetapkan HPS;

b) Menetapkan rancangan kontrak;

c) Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan atau

d) Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

6) Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

7) Pasal 28

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bentuk Kontrak terdiri atas a. bukti pembelian/pembayaran; b. kuitansi; c. SPK; d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00;

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruski dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:

1) Pasal 49:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan biaya selain yang diatur dalam SBM dapat menggunakan:

(1) harga pasar; dan

(2) satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/instansi teknis yang berwenang;

b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penggunaan satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

2) Pasal 57 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan RKA-KL pada level satker dilengkapi dengan kertas kerja satker yang memuat rincian belanja;

3) Pasal 58:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa RKA-KL disusun berdasarkan RKP, Renja KL, pagu anggaran KL, dan standar biaya;

b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa RKA-KL disusun sesuai dengan muatan dalam format RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan angka dasar dan kegiatan/keluaran baru;

4) Pasal 186 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPA bertanggung jawab secara format dan materiil kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

c. PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023 pada Lampiran I Angka 9 Nomor 9.5 yang menyatakan bahwa biaya honorarium petugas survei per orang senilai Rp8.000,00.

d. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia pada Lampiran I

1) Angka 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS

Angka 2.2.2 yang menyatakan bahwa Proses menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

a) harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;

b) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/Pemda;

c) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana PBJ akan dilaksanakan;

d) daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;

e) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;

f) hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

g) perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

h) informasi harga yang diperoleh dari toko daring;

i) informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau

j) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Angka 2.2.3 yang menyatakan bahwa Penetapan dan Pendokumentasian menyatakan bahwa PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

a) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

b) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS. Penetapan HPS dikecualikan untuk:

a) PBJ dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b) *E-purchasing*; dan

c) Tender *pekerjaan* terintegrasi.

e. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Swakelola

1) Poin 1.5.2 C yang menyatakan bahwa Swakelola tipe III dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil, dengan persyaratan:

a) Memiliki struktur organisasi/pengurus;

b) Mempunyai personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan;

c) Dalam hal calon pelaksana akan melakukan kemitraan, harus mempunyai PKS kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.

2) Poin 5.1.1 yang menyatakan bahwa PPK melakukan survei pasar sebelum menyampaikan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola. Apabila hanya ada 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang dinilai mampu, PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola untuk melaksanakan Swakelola. Dalam hal calon pelaksana Swakelola bersedia, maka PA/KPA melakukan penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana Swakelola. selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe III, PPK dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola. Pada mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola, calon pelaksana Swakelola yang berminat menjadi pelaksana Swakelola tipe III mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK.

Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas/Organisasi Profesi atau pegawai Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan tenaga ahli tertentu di luar dari tenaga ahli yang dimiliki oleh pelaksana Swakelola atau membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain anggota Ormas/Organisasi Profesi atau pegawai PTS, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli/pendukung lapangan. Dalam hal dibantu oleh tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang. Tenaga ahli/pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Bertambahnya beban negara untuk membiayai kegiatan Tahun 2023 pada Ditjen GTK yang tidak tersedia anggarannya pada DIPA Tahun 2023 senilai Rp2.176.960.732,00;

b. Penambahan beban negara atas biaya dukungan lainnya pada Pengadaan *Public Cloud Platform* Pendidikan di Setjen senilai Rp1.526.390.575,48;

c. Biro Perencanaan Setjen, Ditjen Kebudayaan dan Ditjen Diksi kehilangan kesempatan memperoleh jasa dengan kualitas dan harga yang paling menguntungkan;

d. Nilai pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian E-Planning senilai Rp550.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

e. Pemborosan belanja honorarium output kegiatan di Itjen senilai Rp525.378.000,00 (Rp473.478.000,00 + Rp51.900.000,00);

f. Pelaksanaan kegiatan PKN pada Setditjen Kebudayaan Tahun 2023 tidak dapat dievaluasi keberhasilan outputnya;

g. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada kegiatan monev Kegiatan Ditjen Kebudayaan pada Satker Setditjen Kebudayaan tidak mencerminkan proses pengadaan yang efisien dan ekonomis;

h. PPK tidak mendapatkan harga yang kompetitif dalam proses pengadaan peralatan kit seminar di unit kerja BBGP Prov. Jatim dan BBGP Prov. Jateng;

i. Realisasi pembayaran gaji/upah tenaga pelaksana dan manajemen dari pekerjaan swakelola pada Ditjen GTK berpotensi tidak efisien;

j. Risiko pemborosan akibat kesamaan lingkup pekerjaan antara jasa konsultan perorangan dengan Koordinator Sarana dan Prasarana pada Ditjen Diktiristek;

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. PPK terkait kurang cermat dalam menjalankan tugasnya;

c. Pejabat Pengadaan terkait kurang mematuhi ketentuan penyusunan HPS;

d. Koordinator kegiatan pada satker terkait terkait kurang mematuhi ketentuan penyusunan KAK.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan proses penganggaran dan pengadaan belanja barang secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Sekjen, Dirjen GTK, Dirjen Kebudayaan, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Irjen supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Sekjen, Dirjen GTK, Dirjen Kebudayaan, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Irjen memerintahkan:

1) PPK terkait supaya lebih cermat dalam menjalankan tugasnya;
2) Pejabat Pengadaan terkait supaya mematuhi ketentuan penyusunan HPS;
3) Koordinator kegiatan pada satker terkait supaya mematuhi ketentuan penyusunan KAK;

c. Irjen supaya membuat kajian terkait pemberian honorarium atas kegiatan yang beririsan dengan tupoksi Itjen;

d. Dirjen Kebudayaan memerintahkan Sesditjen Kebudayaan untuk menyusun juknis pelaksanaan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan;

e. Dirjen Diktiristek memerintahkan KPA Ditdaya supaya memerintahkan PPK menyampaikan laporan pelaksanaan hasil pekerjaan secara lengkap.

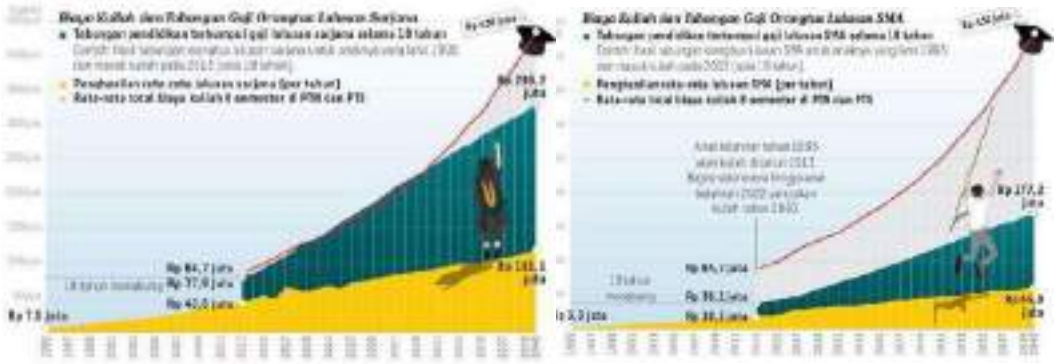
4. Pengelolaan BPPTNBH Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan sehingga Hak dan Kewajiban Pemerintah Kepada PTNBH belum dapat Disajikan Secara Tepat

Kemendikbudristek menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang pada LRA Tahun 2023 (*audited*) masing-masing senilai Rp32.051.749.291.000,00 dan Rp29.763.154.764.125,00 atau 92,86%. Realisasi belanja dimaksud diantaranya merupakan Bantuan Pendanaan PTNBH (MAK 521216) pada Setditjen Diktiristek senilai Rp2.333.851.265.509,00.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH, BPPTNBH diberikan dalam bentuk subsidi untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Subsidi pada PTNBH tersebut merupakan bagian dari 20% alokasi anggaran fungsi pendidikan.

Pemberian subsidi tersebut tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTNBH tetapi juga dapat meningkatkan anggaran investasi dan pengembangan, sehingga diharapkan dapat mendorong PTNBH untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu tetapi terjangkau oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bahwa konsep subsidi dalam APBN adalah transfer dana dari Pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah.

Selain itu subsidi pendidikan tinggi juga terkait dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi. APK yang mengalami peningkatan dari 11,5% pada tahun 1996 ke 25,26% pada tahun 2015. Akan tetapi, dari hasil trend, diketahui bahwa terdapat pertumbuhan biaya kuliah yang mengakibatkan terdapatnya kesenjangan antara kelompok pendapatan tertinggi yang mengalami peningkatan APK senilai 59,61% dan kelompok pendapatan terendah yang hanya mengalami kenaikan APK senilai 5,08%.



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Biaya Kuliah

Pada Tahun 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terkait pengelolaan BBPTNBH sebagaimana dimuat dalam LHP Nomor 14/LHP/XIX/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. LHP tersebut antara lain mengungkapkan permasalahan terkait ketidaksesuaian penentuan alokasi dasar BPPTNBH pada seluruh PTN dengan agregat senilai Rp1.276.867.963.308,00. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan Dirjen Diktiristek agar:

a. Memerintahkan Setditjen Diktiristek untuk menyusun konsep revisi juklak/juknis/aturan turunan dan menyampaikannya kepada Dirjen Diktiristek;

b. Menetapkan pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam penetapan usulan alokasi subsidi BPPTNBH;

c. Menetapkan mekanisme koordinasi antara Ditjen Diktiristek dan PTN, yang antara lain mengatur tahapan maupun rentang waktu penyampaian SSBOPT dari PTN kepada Ditjen Diktiristek;

d. Menetapkan juklak/juknis/aturan turunan yang lengkap untuk mengatur definisi sumber data yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi BOPTN dan BPPTNBH, afirmasi pada perhitungan BOPTN, dan rumus usulan alokasi kebutuhan BPPTNBH; dan

e. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi tersendiri untuk menghimpun data dari PTN dalam proses perhitungan alokasi BOPTN dan BPPTNBH.

Atas kondisi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Setditjen Diktiristek dengan menerbitkan Kepdirjen DIKTI Nomor 107/E/KPT/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Juknis BPPTNBH Non-Penelitian Tahun 2024.

Hasil permintaan keterangan lebih lanjut kepada PPK BPPTNBH Tahun 2023 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Proses perhitungan besaran alokasi subsidi BPPTNBH Tahun 2023 oleh Setditjen Diktiristek tidak didukung dengan peraturan turunan dari PP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH

Penentuan alokasi subsidi BPPTNBH sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) dibahas antara Setditjen Dikti dengan forum rektor PTNBH. Forum rektor tersebut kemudian memutuskan penggunaan rumus Penentuan alokasi subsidi BPPTNBH tersebut. Karena PMK Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban BPPTNBH belum mengatur rumus usulan

kebutuhan alokasi subsidi BPPTNBH. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekosongan peraturan dalam menentukan usulan alokasi subsidi BPPTNBH karena belum ditetapkannya rumus usulan alokasi subsidi dan mekanisme penyesuaian/*smoothing* ke dalam juklak/juknis/peraturan turunan.

b. Setditjen Diktiristek belum menjelaskan definisi data sumber perhitungan alokasi dasar BPPTNBH

Hasil pemeriksaan pada kertas kerja penentuan alokasi BPPTNBH menunjukkan bahwa perhitungan alokasi dasar BPPTNBH dilakukan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

1) Alokasi Dasar = Biaya – Penerimaan Pendidikan.

2) Biaya = Biaya Kuliah Tunggal (BKT) per Prodi x Jumlah Mahasiswa per Prodi.

Dalam rumus alokasi tersebut menunjukkan bahwa, terdapat tiga faktor untuk menghitung alokasi dasar, yaitu jumlah mahasiswa, BKT, dan penerimaan pendidikan. Adapun dasar penggunaan ketentuan ini dalam menghitung BKT adalah:

1) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa:

   a) SSBOPT ditetapkan sebagai dasar Kementerian dalam mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk PTN; dan

   b) SSBOPT menjadi dasar untuk menetapkan BKT.

2) Setditjen Diktiristek dalam menentukan BKT menggunakan Kepmendikbud Nomor 81/E/KPT/2020 tentang BKT pada PTN yang berbentuk Universitas dan Institut, sehingga ketentuan ini yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran untuk PTN.

Sedangkan dalam menentukan jumlah mahasiswa dan pendapatan pendidikan, Setditjen Diktiristek melakukan proses klarifikasi kepada PTN. Akan tetapi, pengambilan data tersebut rawan menjadi multitafsir, karena dalam Kepmenristekdikti Nomor 140/M/KPT/2019 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan BOPTN non-penelitian belum mengatur secara rinci titik *cut off* data mahasiswa dan komponen pendapatan pendidikan apa saja yang digunakan sebagai parameter. Sebagai contoh, bulan Mei-Juni jumlah mahasiswa akan meningkat signifikan karena merupakan masa penerimaan mahasiswa baru.

Perbedaan data mahasiswa dimaksud menyebabkan perhitungan hasil akhir alokasi BPPTNBH akan berbeda serta tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan pemeriksaan, Ditjen Diktiristek tidak mempunyai informasi terkait data rincian jumlah mahasiswa setiap jurusan pada PTN sebagai data pembanding sehingga tidak dapat dilakukan pengujian atas rincian perbedaan alokasi BPPTNBH. Sedangkan perhitungan biaya kuliah membutuhkan data jumlah mahasiswa per prodi dengan nilai BKT per prodi.

Belum adanya penjelasan lebih detail atas data jumlah mahasiswa yang digunakan dalam menghitung biaya kuliah dan item penerimaan PTN, dapat berpengaruh pada akurasi perhitungan alokasi dasar BPPTNBH yang disalurkan kepada PTN. Hal tersebut dapat berpotensi penghitungan BPPTNBH masing-masing Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan riil biaya operasional perguruan tinggi.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa salah satu komponen yang diperhitungkan dalam menentukan alokasi BPPTNBH adalah jumlah mahasiswa. Komponen dimaksud digunakan untuk menghitung Biaya Kuliah. Adapun pengertian dari Biaya Kuliah adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memperhitungkan jumlah mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana, jenis program studi, kualitas, serta Indeks Kemahalan Wilayah. Namun demikian, tidak terdapat penjelasan rinci, apakah jumlah mahasiswa pada Semester ganjil atau genap, jumlah total mahasiswa atau mahasiswa aktif tiap prodi, jumlah mahasiswa sarjana dari jalur khusus atau hanya mahasiswa regular, atau jumlah mahasiswa sesuai data PDDikti.

Hasil penyandingan tiga sumber data pada kertas kerja perhitungan alokasi dasar, data PDDikti, serta hasil klarifikasi kepada PTN, terkait jumlah mahasiswa aktif semester ganjil 2021 yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi, diketahui terdapat perbedaan penyajian jumlah mahasiswa. Bagian Perencanaan Setditjen Diktiristek menjelaskan bahwa dalam Kertas Kerja Perhitungan Alokasi BOPTN dan BPPTNBH merupakan hasil klarifikasi kepada masing-masing PTN. Namun data yang disampaikan hanya berupa *file excel* tanpa ada validasi dari PTN yang bersangkutan.

c. Perhitungan alokasi BPPTNBH belum mempertimbangkan dana pendidikan lain serta seluruh bantuan pendanaan APBN yang digunakan untuk pendanaan operasional perguruan tinggi

PMK Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian BPPTNBH menjelaskan bahwa usulan kebutuhan alokasi BPPTNBH antara lain paling sedikit memuat perhitungan satuan biaya operasional pada Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTNBH serta realisasi penerimaan dan saldo kas PTNBH pada tahun sebelumnya.

Hasil permintaan keterangan kepada Koordinator Perencanaan Setditjen Dikti diketahui bahwa proses penganggaran Tahun 2023 dilaksanakan pada Tahun 2022 (dengan menggunakan basis data tahun 2021 yang tersedia). Namun demikian, periode proses penganggaran merupakan penyusunan pagu indikatif (yang dilakukan pada awal tahun 2022) sementara, penetapan alokasi BOPTN dan BPPTNBH dilakukan pada periode Oktober 2022. Sesuai periodisasi dimaksud, periode penarikan data yang terkini dapat dilaksanakan pada akhir tahun. Sehingga, penetapan alokasi BOPTN dan BPPTNBH dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan riil atas biaya operasional di setiap perguruan tinggi.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1) Kepmenristekdikti Nomor 140/M/KPT/2019 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan BOPTN Non-penelitian menjelaskan bahwa penerimaan PTN adalah Penerimaan PTN yang berasal dari PNBP yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana. Namun demikian, ketentuan dimaksud belum merinci secara detail batasan penerimaan PTN, apakah terbatas pada penerimaan dari UKT atau termasuk penerimaan pendidikan lainnya seperti iuran pendidikan institusi/sumbangan pendidikan, penerimaan wisuda, dan penerimaan mahasiswa dari sarjana non UKT.

2) Saldo kas belum diperhitungkan dalam penentuan alokasi BPPTNBH. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pendidikan PTN disajikan dalam LK masing- masing PTN. Namun demikian, data penerimaan pendidikan yang digunakan untuk perhitungan alokasi BPPTNBH tidak disajikan secara terpisah. Dengan adanya data penerimaan pendidikan yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi, akan memudahkan Setditjen Diktiristek dalam melakukan perhitungan alokasi.

   Hasil pengujian atas kertas kerja alokasi menunjukkan bahwa Setditjen Diktiristek tidak menggunakan data terkini dalam proses perhitungan alokasi BOPTN dan BPPTNBH Tahun 2023. Data status akreditasi prodi, jumlah mahasiswa, dan penerimaan pendidikan sebagai dasar perhitungan BOPTN dan BPPTNBH masih menggunakan data Tahun 2021. Namun demikian, saldo kas yang disajikan pada laporan keuangan BPPTNBH baru disampaikan kepada Setditjen Diktiristek pada akhir tahun, sementara itu, proses penganggaran pada Setditjen Diktiristek mengacu pada KAK. Pada KAK dinyatakan bahwa pada bulan Januari tahun berkenaan, PTNBH telah menyusun RKA sesuai alokasi BPPTNBH. Pada bulan Februari dan April, setiap PTNBH telah melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana BPPTNBH.

3) Bantuan yang diterima PTNBH dari sumber dana APBN belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam perhitungan alokasi BPPTNBH

   UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam APBN. Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari APBN dimaksud dialokasikan kepada PTNBH sebagai biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTNBH diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH. Sesuai peraturan tersebut, BPPTNBH diantaranya digunakan untuk:

   a) biaya operasional, untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

   b) biaya dosen merupakan bantuan biaya untuk dosen Non PNS yang digunakan untuk gaji dan tunjangan, tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan, dan/atau honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTNBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   c) biaya investasi merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya.

   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa skema bantuan APBN pada Kemendikbudristek kepada PTNBH dilakukan melalui penyaluran BPPTNBH dan beberapa skema bantuan pendanaan, antara lain sebagai berikut.

a) Insentif IKU, yang dilaksanakan oleh Setditjen Diktiristek melalui penyaluran insentif kepada PTNBH yang berhasil meningkatkan capaian IKU atau mencapai target *(gold standard);*

b) *Matching Fund*, merupakan pendanaan Setditjen Diktiristek yang bertujuan untuk penguatan kolaborasi riset dan inovasi antara Peguruan Tinggi (PT) dengan Dunia Usaha- Dunia Industri (DUDI) untuk secara bersama-sama membentuk sebuah ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

c) *Competitive Fund*, yakni pendanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dit. RTPM.

d) Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) direalisasikan melalui DIPA Dit. Kelembagaan dan Dit. Sumber Daya pada Ditjen Diktiristek. PHLN direalisasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana di PTNBH.

e) Program Bantuan Biaya Pendidikan (PIP Pendidikan Tinggi) merupakan bantuan yang dikelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PLPP) pada Sekretariat Jenderal yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan Mahasiswa yang yang dibayarkan kepada Perguruan Tinggi.

Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), merupakan bantuan pendanaan pada Dit. Kelembagaan. PKKM yang disalurkan kepada PTNBH dapat digunakan antara lain untuk peralatan untuk mendukung implementasi kurikulum sesuai keunggulan program studi atau untuk pengembangan *teaching industry*, serta pelaksanaan FGD untuk membiayai kegiatan lokakarya/FGD di dalam kampus atau di luar kampus untuk merencanakan kegiatan dalam rangka implementasi program MBKM, serta kegiatan lain yang relevan dengan transformasi pendidikan tinggi yang akan dilakukan di program studi.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa belum terdapat rekonsiliasi data bantuan pendanaan APBN pada seluruh unit utama Kemendikbud yang disalurkan kepada PTNBH. Hal ini menyebabkan Setditjen Diktiristek tidak memeroleh informasi yang lengkap terkait seluruh dana APBN yang dikelola setiap PTNBH.

d. Perhitungan BPPTNBH belum didukung aturan yang rinci terkait Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung

Kepmenristekdikti Nomor 140/M/KPT/2019 dan PMK Nomor 100/PMK.02/2020 mengatur bahwa perhitungan alokasi BPPTNBH membutuhkan variabel biaya operasional. Adapun perhitungan biaya operasional di tingkat PTN mengacu pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang SSBOPT pada PTN di Lingkungan Kemendikbud. Sesuai aturan tersebut, SSBOPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan. SSBOPT ditetapkan sebagai dasar bagi Kemendikbudrsitek untuk mengalokasikan APBN untuk PTN. Selain itu, SSBOPT akan digunakan oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.

Selain itu, ketentuan dimaksud menjelaskan bahwa perhitungan SSBOPT menggunakan metode penghitungan biaya berdasarkan aktivitas (*activity-based costing*) dengan model

pembiayaan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan uraian sebagai berikut.

1) Biaya Langsung (BL) yaitu biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi BL merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi, sedangkan Biaya Tidak Langsung (BTL) merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi. BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai dengan kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap Prodi yang diselenggarakan oleh PTN. BL terdiri dari empat jenis, dengan uraian sebagai berikut:

   a) kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, *studium generale*, tugas, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester;

   b) kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, dan kuliah kerja nyata;

   c) kegiatan tugas akhir/skripsi: tugas akhir, skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda;

   d) bimbingan konseling dan kemahasiswaan: orientasi Mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.

2) BTL yaitu biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi BTL merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi, meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara prodi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Termasuk dalam komponen BTL adalah:

   a) biaya administrasi umum: seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (rektor/direktur, wakil rektor/wakil direktur, kepala pusat dan lembaga, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan lain-lain), bahan habis pakai, perjalanan dinas;

   b) pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana: seperti pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus dan peralatan, bahan bakar generator dan angkutan kampus, utilitas (air, listrik, telepon), langganan *bandwidth* koneksi internet dan lain-lain;

   c) pengembangan institusi: penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, operasional senat, pengembangan koleksi perpustakaan, dan lain-lain;

   d) biaya operasional lainnya: pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, *career center, office consumables* (bahan habis pakai – alat tulis kantor), dan lain-lain.

Selanjutnya, BOPT keseluruhan dari penghitungan BL dan BTL dibagi dengan lama masa studi untuk memperoleh BOPT per tahun, yang kemudian dijadikan sebagai

SBOPT. Dalam hal ini SBOPT menjadi standar biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan oleh prodi dalam satuan per mahasiswa per tahun.

Dalam menghitung alokasi BPPTNBH Setditjen Diktiristek menggunakan SSBOPT yang telah diturunkan menjadi BKT dalam Kepmendikbud Nomor 81/E/KPT/2020 tentang BKT pada PTN yang berbentuk Universitas dan Institut. Selanjutnya, tarif pada BKT dikalikan dengan jumlah mahasiswa per prodi sehingga menghasilkan Biaya Kuliah. Biaya Kuliah ini kemudian diperhitungkan dengan penerimaan pendidikan sehingga menghasilkan nilai alokasi dasar yang akan dipenuhi dari BPPTNBH.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa, proses penganggaran BPPTNBH Tahun 2023 pada Setditjen Diktiristek berpedoman pada PMK Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian BPPTNBH. Sesuai ketentuan dimaksud, usulan kebutuhan alokasi BPPTNBH dituangkan oleh Ditjen Diktiristek dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L) alokasi anggaran Kemendikbudristek. Dana BPPTNBH kemudian dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Kemendikbudristek, sebagai dasar penerbitan DIPA.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada TA 2023, terdapat alokasi belanja pegawai baik PNS maupun non PNS yang disalurkan kepada PTNBH dan belanja barang melalui skema bantuan pendanaan dari DIPA Kemendikbudristek maupun rencana kegiatan anggaran PTNBH yang bersumber dari APBN. Belanja pegawai dan belanja barang tersebut direalisasikan melalui DIPA beberapa unit utama Kemendikbud. Namun demikian Setditjen Diktiristek belum memperhitungkan seluruh komponen belanja tersebut sebagai bagian penerimaan APBN dalam proses perhitungan alokasi BPPTNBH.

Hasil penghitungan kembali alokasi dasar BPPTNBH TA 2023 dengan menggunakan variabel biaya pendidikan serta penerimaan PTN tahun 2021, menunjukkan bahwa kebutuhan biaya operasional dari PTNBH senilai Rp19.189.469.238.000,00 dengan pendapatan dari UKT senilai Rp7.719.175.968.149,00. Hal tersebut menujukkan terdapat selisih (gap) secara agregat senilai Rp11.470.293.269.851,00 (Rp19.189.469.238.000,00 – Rp7.719.175.968.149,00). sementara sesuai alokasi DIPA Setditjen Dikti TA 2023, diketahui bahwa pagu BPPTNBH TA 2023 senilai Rp2.197.373.966.000,00. Informasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian penentuan alokasi dasar pada seluruh PTNBH dengan nilai agregat yang tidak sesuai senilai Rp9.272.919.303.851,00 (Rp11.470.293.269.851,00 - Rp2.197.373.966.000,00). Namun kekurangan alokasi bantuan tersebut belum memperhitungkan penerimaan PTNBH yang bersumber dari APBN lainnya berupa insentif IKU, *Matching Fund, Competitive Fund*, realisasi belanja pegawai, KIP kuliah (selain biaya biaya hidup), SBSN, dana abadi perguruan tinggi, dan program kompetisi kampus merdeka.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk PTNBH

diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2020:

   1) Pasal 8:

      a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Besaran biaya operasional PTNBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan berdasarkan:

         (1) perhitungan standar satuan biaya operasional PTNBH;

         (2) penerimaan PTNBH; dan efisiensi dan mutu Perguruan Tinggi.

      b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar satuan biaya operasional PTNBH diatur dengan Peraturan Menteri.

   2) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTNBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

      a) target kinerja;

      b) kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan

      c) perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTNBH.

c. PMK Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian BPPTNBH, Pasal 2:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyediaan BPPTNBH, PTNBH menyusun usulan kebutuhan alokasi BPPTNBH.

   2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa usulan kebutuhan alokasi BPPTNBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

      a) target kinerja;

      b) kebutuhan biaya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di luar gaji dan tunjangan PNS pada PTNBH;

      c) perhitungan satuan biaya operasional pada Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTNBH; dan

      d) realisasi penerimaan dan saldo kas PTNBH pada tahun sebelumnya.

   3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Rektor PTNBH menyampaikan usulan kebutuhan alokasi BPPTNBH kepada Mendikbud.

d. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang SSBOPT pada PTN di Lingkungan Kemendikbud, pada:

   1) Lampiran Penghitungan SSBOPT pada Huruf C. Model Pembiayaan; Angka 1 mengenai Rujukan, yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam Permendikbud

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, biaya operasional tersebut dihitung per Mahasiswa per tahun dan didefinisikan sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

2) Lampiran Penghitungan SSBOPT pada Huruf C. Model Pembiayaan; Angka 4 mengenai Penghitungan BOPT dan SSBOPT, yang menyatakan bahwa BL adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi. BL dihitung pada tingkat aktivitas, yang didasari atas asumsi pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan praktik baik (*good practices*) yang selama ini sudah berjalan. BTL adalah biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Prodi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum Prodi namun mutlak diperlukan dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Studi.

Hal tersebut mengakibatkan nilai alokasi BPPTNBH kepada PTNBH berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan riil biaya operasional perguruan tinggi.

Hal tersebut disebabkan:

a. Belum adanya pedoman penerimaan PTNBH yang bersumber dari seluruh APBN menjadi dasar dalam perhitungan alokasi anggaran BPPTNBH;
b. Belum adanya pedoman teknis perhitungan BL dan BTL dan mekanisme verifikasi dalam penetapan usulan alokasi subsidi BPPTNBH;
c. Koordinasi antara Ditjen Diktiristek, satker utama lain dan PTNH, yang antara lain mengatur alokasi dana APBN dan tahapan maupun rentang waktu penyampaian SSBOPT dari PTN kepada Ditjen Diktiristek kurang optimal; dan
d. Belum terdapat juklak/juknis/aturan turunan yang lengkap untuk mengatur definisi sumber data yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi BPPTNBH dan rumus usulan alokasi kebutuhan BPPTNBH.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan pengelolaan BPPTNBH secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan serta melibatkan PTNBH untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi pengelolaan BPPTNBH dengan peraturan terkait, dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, serta memerintahkan Dirjen Dikti untuk melakukan rekonsiliasi data penyaluran dana APBN ke PTNBH dengan unit utama terkait lainnya sebagai dasar pengajuan usulan BPPTNBH.

5. Penatausahaan dan Pertangungjawaban atas Realisasi Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan

Kemendikbudristek menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang pada LRA Tahun 2023 (*audited*) masing-masing senilai Rp32.051.749.291.000,00 dan Rp29.763.154.764.125,00 atau 92,86%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertangungjawaban Belanja Barang dan Jasa diketahui terdapat permasalahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban atas realisasi belanja barang yaitu sebagai berikut:

a. Realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan pada masa darurat COVID-19 telah dicabut

BPP Bahasa menganggarkan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 senilai Rp335.778.603.000,00 dengan realisasi senilai Rp325.249.674.322,00 (96,86%) yang diantaranya dianggarkan dan direalisasikan untuk penangangan pandemi COVID-19 senilai Rp115.291.000,00 dan Rp111.913.078,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 79. Anggaran dan Realisasi Penanganan Pandemi COVID-19

Kode Akun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	31.486.000,00	30.358.078,00
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	51.955.000,00	51.955.000,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	31.850.000,00	29.600.000,00
	Jumlah	**115.291.000,00**	**111.913.078,00**

Belanja barang dan jasa pada tabel di atas digunakan antara lain untuk biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet, biaya konsumsi rapat, pengadaan APD/alat uji medis/rapid test dan sejenisnya, insentif tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang terlibat dalam penanganan COVID-19, santunan kematian untuk nakes yang terlibat dalam penanganan pandemik COVID-19, biaya penggantian penanganan pasien COVID-19 dan belanja penanganan kesehatan lainnya, pembayaran honrarium narasumber/pembahas/moderator kegiatan melalui sarana *teleconference*/video *conference*.

Pada tanggal 22 Juni 2023, Presiden melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2023 mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dan keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023. Namun demikian berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja Semester II Tahun 2023, terdapat realisasi pengeluaran untuk penanganan pandemik COVID-19 pada enam satker di BPP Bahasa senilai Rp46.313.763,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 80. Rincian Pengeluaran Penanganan Pandemik COVID-19 Semester II Tahun 2023

No	Satker	Jumlah (Rp)
1	BB Prov. Jawa Barat	2.750.900
2	BB Prov. Kalimantan Tengah	250.000
3	KB Prov. Gorontalo	1.367.113
4	KB Prov. Sulawesi Tenggara	17.515.750
5	KB Prov. Banten	9.430.000
6	Pusbanglin Bahasa dan Sastra	15.000.000
	Jumlah	**46.313.763**

Atas realisasi tersebut BPP Bahasa menjelaskan sebagai berikut.

1) BB Prov. Jawa Barat menjelaskan bahwa aturan pengalihan semua akun COVID-19 ke akun yang lain baru terbit di bulan Agustus 2023, sedangkan rentang Januari s.d. Agustus sudah ada realisasi belanja akun COVID-19 (realisasi pada Semester I senilai Rp6.565.800,00 dan bulan Agustus senilai Rp2.750.900,00) sehingga pengalihan akun hanya dapat dilaksanakan pada sisa anggaran yang belum terealisasi, sedangkan yang sudah terealisasi tidak dapat serta merta diganti akun lain karena akan menyebabkan pagu minus belanja 52.

2) BB Prov.Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa pengeluaran senilai Rp250.000,00 dilakukan Bulan Desember 2023 untuk pembayaran penyediaan *zoom meeting* untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara hibrida maupun daring. Bentuk kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dan/atau peserta secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya Cipta Karya Cerita Anak Berbahasa Daerah dan Terjemahan, Penyuluhan Daring Seri I, Bengkel Apresiasi Sastra: Musikalisasi Puisi, Koordinasi Pembuatan Konten Kebahasaan (Krida Dubas), Koordinasi dengan Koordinator Guru Master Revitalisasi Bahasa Daerah, dan rapat-rapat jarak jauh;

3) Kantor Bahasa (KB) Prov. Gorontalo menjelaskan bahwa pengeluaran senilai Rp1.367.113,00 dilakukan bulan Juli dan September, setelah transaksi dibukukan dalam anggaran COVID-19, terbit aturan pengalihan akun covid. Karena sudah terbaca pada akun COVID-19, maka tidak bisa dihilangkan atau dihapus;

4) KB Prov. Sulawesi Tenggara menjelaskan sebagai berikut.

   a) Pengeluaran bulan Juli, September, November dan Desember senilai Rp1.715.750,00 untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan *zoom meeting*/rapat pertemuan daring sesuai dengan juknis pelaksanaan kegiatan dan jadwal kebutuhan,

   b) Pengeluaran bulan Juli senilai Rp15.800.000,00 untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan pembinaan lomba dan kurasi hasil resensi dan bedah buku di laksanakan pada semester dua karena merupakan kegiatan lanjutan dari pembinaan resensi sebelumnya yang dilaksanakan di sekolah pada bulan Mei. Pembinaan lanjutan melibatkan siswa terpilih dengan resensi tulisan terbaik. Kegiatan harus dilaksanakan dengan jeda waktu tertentu karena setiap pertemuan peserta diminta untuk membuat tulisan resensi dari buku yang berbeda sehingga dibutuhkan waktu lebih untuk peserta membaca buku dan menuliskan resensinya.

5) KB Prov. Banten menjelaskan bahwa pengeluaran senilai Rp9.430.000,00, dibayarkan mundur satu bulan dari bulan pelaksanaan kegiatan, yaitu pada bulan Juli karena keterlambatan pengumpulan data nomor ponsel dari peserta ke panitia, sehingga pengiriman pulsa terkendala;

6) Pusbanglin Bahasa dan Sastra menjelaskan bahwa kegiatan Peningkatan Kemahiran Berhahasa senilai Rp15.000.000,00 dilaksanakan selama bulan Juni-Juli 2023, dan dibayarkan bulan Juli 2023 sebelum adanya surat edaran.

b. Dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang kurang memadai

1) Setjen

Dokumen Pertanggungjawaban Belanja pada Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Belum Lengkap

Pada tahun 2023, BPTI mengelola anggaran belanja senilai Rp268.143.659.000,00 dengan realisasi senilai Rp242.301.977.590,00 (90,36%). Dalam merealisasikan belanja, Bendahara Pengeluaran melakukan 12 kali GUP termasuk GUP Nihil, dan sepuluh kali Tambahan Uang Persediaan (TUP). Hasil pemeriksaan atas seluruh dokumen pertanggungjawaban GUP dan uji petik dokumen pertanggungjawaban TUP tahun 2023 menunjukkan terdapat realisasi yang belum ada dokumen pertanggungjawaban TUP 1, 2, dan 7 senilai Rp562.700.648,00. Rincian selisih dokumen pertanggungjawaban TUP **Lampiran B.5.1**.

2) Ditjen Kebudayaan

a) Pertanggungjawaban atas penggantian TUP pada Direktorat PPK belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang memadai

Berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Direktorat PPK, terdapat salah satu komponen Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK yaitu *SangiRUN Night Trail* dengan realisasi senilai Rp2.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp2.500.000.000,00. Rincian atas MAK yang menjadi bagian dari anggaran kegiatan *SangiRUN Night Trail* 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 81. Rincian Anggran SangiRun Night Trail Direktorat PPK

No	Kode MAK	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	[521211] Belanja Bahan	268.494.000	268.494.000	100%
2	[521219] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	281.550.000	281.550.000	100%
3	[522141] Belanja Sewa	124.350.000	124.350.000	100%
4	[522151] Belanja Jasa Profesi	106.200.000	106.200.000	100%
5	[522191] Belanja Jasa Lainnya	1.293.210.000	1.293.210.000	100%
6	[524111] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	359.596.000	359.596.000	100%
7	[524113] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.600.000	66.600.000	100%
Jumlah		**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**100%**

Kegiatan *SangiRun Night Trail* diselenggarakan pada 4 s.d. 5 November 2023. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPK bekerjasama dengan instansi dan komunitas dalam rangka pemajuan Situs Manusia Purba Sangiran yang telah masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kegiatan tersebut terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Lomba lari 25k, lomba lari 5k, *workshop*, dan lomba kuliner khas Sangiran, *Workshop* Pertunjukan Seni Budaya Khas Sangiran dan Karnaval. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dan Karanganyar.

Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh Pokja Diplomasi yang ada pada Direktorat PPK melalui Keputusan Direktur PPK Nomor 1479/F5/KB.00/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat PPK. Dalam pelaksanaannya ditunjuk seorang koordinator dan kemudian didukung oleh anggota tim yang salah satu tugas

dan fungsinya adalah mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang tersedia atas kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada pengelola keuangan atas kegiatan *SangiRUN Night Trail*, pelaksanaan pertanggungjawaban penihilan TUP dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 yang diajukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00327T/690434/2023 tanggal 13 November 2023 yang dalam penyusunannya hanya melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Pajak atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Keterangan lainnya menjelaskan bahwa nilai yang menjadi dasar penyusunan SPTJB tidak didasarkan pada pengeluaran/bukti rill dari belanja yang dilaksanakan melainkan hanya berdasarkan item pengeluaran dan besaran anggaran yang ada pada POK terkait kegiatan *SangiRUN Night Trail*. Untuk bukti pengeluaran/kuitansi atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada MAK Belanja Jasa Lainnya senilai Rp1.293.210.000,00 baru diperoleh pada bulan Desember 2023 atas permintaan dari penanggung jawab keuangan kepada pihak penyedia dengan meminta agar nilai yang tertera pada kuitansi disesuaikan dengan yang tercantum pada SPTJB yang sudah dijadikan dasar saat pertanggungjawaban penihilan TUP. Permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa saat pengajuan Penihilan atas TUP, yang bersangkutan tidak meminta bukti-bukti pendukung pembayaran sebagai lampiran SPTJB.

b) Pengadaan Barang dan Jasa dalam memenuhi kebutuhan *SangiRun Night Trail* tidak dilakukan melalui SPK senilai Rp394.353.000,00

Terdapat pengadaan barang dan jasa pada kegiatan *SangiRun Night Trail* yang nilainya di atas Rp50.000.000,00, yang dilakukan tanpa melalui perikatan atau PKS. Koordinator kegiatan dan pengelola keuangan yang juga sekaligus Bendahara Pengeluaran BP pada Direktorat PPK, menjelaskan bahwa tim hanya berfokus agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut hanya berdasarkan kuitansi yang tidak dirinci jenis belanjanya.

Berikut ini daftar pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui perikatan PKS adalah sebagai berikut.

Tabel 82. Daftar Pengadaan Melebihi Rp50.000.000,00

No	MAK	Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Pelaksana
1	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Doorprize lari SangiRun Night trail Kegiatan SangiRun Night Trail dalam rangka Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK	58.000.000	CV U
2	522191 - Belanja Jasa Lainnya	Medali Finisher Kegiatan SangiRun Night Trail dalam rangka Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK, pada tanggal 6 September 2023 sejumlah 700pcs x 1 kali x Rp. 115.000-,	80.500.000	CV U
3	522191 - Belanja Jasa Lainnya	Kaos Pelari 5K Kegiatan SangiRun Night Trail dalam rangka Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK, pada	72.105.000	CV U

No	MAK	Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Pelaksana
		tanggal 6 September 2023 sejumlah 570pcs x kali x Rp. 126.500-,		
4	522191 - Belanja Jasa Lainnya	Racepack Kegiatan SangiRun Night Trail dalam rangka Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK, pada tanggal 6 September 2023 sejumlah 700pcs x kali x Rp109.500-,	76.650.000	CV U
5	522191 - Belanja Jasa Lainnya	Start Finish Gate (prehistoric concept) Kegiatan SangiRun Night Trail dalam rangka Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK, pada tanggal 6 September 2023 sejumlah1 set	54.598.000	CV U
6	522191 - Belanja Jasa Lainnya	Supervising Kegiatan SangiRun Night Trail dalam rangka Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK, pada tanggal 6 September 2023 sejumlah 5 org x 2 bln x Rp. 5.250.000,00	52.500.000	LK
Jumlah			**394.353.000**	

3) Ditjen Diktiristek

Pengelolaan Belanja Barang pada Unmul Tidak Tertib

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 antara lain memuat permasalahan adanya belanja Tahun 2022 yang belum disahkan oleh unit kerja di lingkungan Unmul, serta pengeluaran kas sebagai dana talangan. BPK merekomendasikan kepada Dirjen Diktiristek meninjau kembali kebijakan mekanisme pemberian dana talangan di PTN. Atas rekomendasi tersebut, Ditjen Diktiristek belum meninjau kembali kebijakan terkait mekanisme penggunaan langsung pendapatan dan pemberian dana talangan di PTN.

Wawancara dengan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Unmul menjelaskan bahwa proses penatausahaan belanja di lingkungan Unmul dilakukan melalui pencatatan belanja dalam buku pembantu. Buku Pembantu tersebut terdiri dari Buku Pembantu Kas (tunai dan bank), Buku Pembantu Uang Muka, dan Buku Pembantu BPP pada setiap fakultas/unit kerja.

Penyusunan LPJ diawali dengan menyiapkan rekening koran dan Buku Pembantu yang berasal dari SIMKEU RBA. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat LPJ Bendahara BLU dengan melakukan penginputan angka berupa saldo penambahan dan pengurangan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan dokumen yang telah disiapkan. Adapun untuk penginputan angka berupa saldo awal berdasarkan LPJ Bendahara BLU tahun 2022. LPJ yang telah selesai diinput kemudian dicetak untuk selanjutnya ditandatangani oleh KPA, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. LPJ yang telah ditandatangani kemudian dikirimkan melalui email ke KPPN dan diunggah kembali pada aplikasi aplikasi https://sprint.kemenkeu.go.id.

Berdasarkan LK Unmul Tahun 2023 saldo Kas pada BLU serta Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan senilai Rp219.404.777.316,00. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh Rekening Koran Unmul per 31 Desember 2023 menunjukkan saldo senilai Rp201.241.449.840,00, sehingga terdapat selisih senilai Rp18.163.327.476,00 (Rp219.404.777.316,00 - Rp201.241.449.840,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 83. Selisih Pembukuan Bendahara

(dalam rupiah)

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Buku Pembantu (Rp)	Saldo Rekening Koran (Rp)	Selisih (Rp)
1	BP Kas (Tunai & Bank)	201.211.124.168,00	201.211.124.174,00	(6,00)
2	BP UM	15.675.108.450,00	0,00	15.675.108.450,00
3	BP BPP	2.518.544.698,00	30.325.666,00	2.488.219.032,00
Jumlah		**219.404.777.316,00**	**201.241.449.840,00**	**18.163.327.476,00**

Berdasarkan penjelasan tim Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Bendahara Pengeluaran Unmul diperoleh informasi bahwa permasalahan tersebut merupakan dampak atas penyelesaian LPJ pada BPP dan pelaksana kegiatan. Bendahara Pengeluaran juga telah melakukan pengendalian pengelolaan kas sebagai berikut.

a) Bendahara dan BPP telah melakukan *cash opname* sepengetahuan atasan masing masing yang dituangkan dalam BA cash opname;

b) Rekonsiliasi antar BP dengan BPP juga telah dilakukan.

Selain itu, terdapat pemahaman berbeda antar BPP terkait dengan LPJ yang disajikan sebagai realisai belanja. Terdapat pemahaman BPP dimana bendahara yang mencatat dana masuk ke pelaksana kegiatan sebagai realisasi belanja, dan terdapat BPP yang menyajikan realisasi belanja berdasarkan data rekap BKU yang telah didukung bukti pertanggungjawaban. BPP yang memasukkan data Operasional Belanja

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa :

a) Terdapat mekanisme *cash opname* yang dilaksanakan hanya sebatas mencocokkan input data pada modul aplikasi SAKTI dengan uang yang keluar dari rekening koran tanpa melakukan verifikasi dengan SPJ yang ada di Bendahara;

b) Pelaksanaan rekonsiliasi hanya sebatas proses input data realisasi belanja pada aplikasi SAKTI dan data dukung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, *cash opname* dan rekonsilisasi tanpa dilakukan verifikasi ke kelengkapan dokumen sumber. Atas selisih senilai Rp18.163.327.476,00 telah dimintakan klarifikasi kepada Bendahara dan tim SPI. Namun demikian, sampai dengan akhir pemeriksaan pihak Unmul belum dapat menyajikan SPJ per unit, sedangkan kegiatan kegitan pada masing masing unit telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Keppres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia yang diantaranya menyatakan bahwa Mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-l9; dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023.

b. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, pada:

1) Pasal 1

a) Poin 36 yang menyatakan bahwa Belanja berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas;

b) Poin 74 yang menyatakan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN; dan

c) Poin 86 yang menyatakan bahwa Tunggakan adalah tagihan atas pekerjaan/penugasan yang telah diselesaikan dan telah tersedia alokasi anggarannya tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

2) Pasal 46 ayat (4) yang menyatakan bahwa Untuk mengesahkan/ mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan SPP-PTUP ayat 6 menyatakan bahwa SPP-PTUP disertai dengan SPBy dan kelengkapannya sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1).

3) Pasal 188 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang diantaranya pada huruf a yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, huruf k yaitu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, serta huruf n yaitu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

4) Pasal 190 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM memiliki tugas dan wewenang diantaranya pada huruf e yaitu melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP.

c. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU pada Pasal 170 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib; dan

d. PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti, pada:

1) Pasal 45

a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Mekanisme penatausahaan dana titipan yang bersumber selain dari SP2D LS Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) operator melakukan pencatatan transaksi kas masuk lainnya dalam pembukuan bendahara saat dana titipan diterima oleh bendahara; dan

(2) operator melakukan pen catatan transaksi kas keluar dana titipan saat penyaluran dana titipan kepada pihak yang berhak pada pencatatan kas keluar Bendahara pengeluaran.

b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat pengembalian/penyetoran dana titipan, operator melakukan pencatatan atas transaksi pengembalian/penyetoran kembali sisa dana titipan pada pembukuan bendahara.

e. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 42/PMP.05/2017

1) Bab V Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU, yang antara lain menyatakan bahwa Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BLU, meliputi Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Kas dan Bank BLU, Setara Kas BLU, Kas Lainnya di BLU dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas dan Bank BLU merupakan akun untuk mencatat transaksi pengesahan penerimaan pendapatan BLU, pengesahan pengeluaran belanja BLU, pengesahan kas atas pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan BLU, pengesahan kas atas penyelesaian utang dari pengakuan beban BLU dan pengesahan saldo kas tunai/bank BLU sebagai pertanggungjawaban dan penyajian pelaporan Kas dan Bank BLU. Pengesahan untuk menyajikan Kas dan Bank BLU dihasilkan dengan melakukan reklasifikasi atas pencatatan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan. Pengesahan Kas dan Bank BLU dimaksud dilakukan dengan KPPN mitra kerja BLU selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum.

2) Bab IX Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya BLU, yang antara lain menyatakan bahwa Aset Lainnya BLU adalah aset BLU selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset Lainnya BLU secara struktur bagan akun standar pada segmen akun terdiiri dari 1) Aset kemitraan clengan pihak ketiga; 2) dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan; dan 3) Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya. Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana operasional BLU atau Kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau trust fund yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan.

f. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016

1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN.

2) Pasal 19:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis-jenis uang/surat berharga yang harus ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP meliputi: : (a). Uang Persediaan; (b). Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS Bendahara; (c). Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi Bendahara selaku wajib pungut; (d). Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara; dan (e). Uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dikelola oleh Bendahara

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alasan apapun

3) Pasal 22:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melaksanakan pembayaran UP setelah menerima SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa SPBy sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa: a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK.

4) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

g. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyatakan diantaranya

1) Sesuai Kepres Nomor 17 Tahun 2023, status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan status pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, sehingga dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus COVID-19 semestinya digunakan s.d. semester I 2023 atau s.d. berakhirnya status pandemi COVID-19.

2) Berdasarkan hal tersebut di atas, agar seluruh Satker K/L termasuk satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai semester II tahun 2023.

3) Bagi satker yang masih menggunakan akun belanja khusus Covid-19, agar melakukan revisi/koreksi dokumen sumber sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai panduan, terlampir mapping dari akun belanja khusus COVID-19 ke akun reguler.

4) Apabila revisi/koreksi dokumen sumber tidak dapat dilakukan karena alasan dan pertimbangan tertentu, agar dapat dilakukan pengungkapan dalam CaLK pada penyusunan LKKL.

Hal tersebut mengakibatkan

a. Akun belanja COVID-19 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya; dan

b. Realisasi Belanja barang pada BPTI, Direktorat PPK, dan Unmul senilai Rp20.413.591.124,00 (Rp562.700.648,00 + Rp18.163.327.476,00 + Rp1.293.210.000,00 + Rp394.353.000,00) tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai.

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA terkait kurang optimal dalam mengendalikan pengelolaan keuangan pada satker yang dipimpinnya;

b. PPK terkait kurang optimal dalam melaksanan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya;

c. Bendahara Pengeluaran dan BPP belum melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan

d. Rektor Unmul belum menyusun SOP pengendalian atas pencatatan belanja secara periodik di tingkat unit kerja.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan penatausahaan dan pertangungjawaban atas realisasi belanja barang secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Sekjen, Kepala BPP Bahasa, Dirjen Kebudayaan, dan Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan masing-masing KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sekjen memberikan sanksi kepada KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan BPP BPTI atas realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban;

c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unmul:

   1) Menyusun SOP pengendalian atas pencatatan belanja secara periodik di tingkat unit kerja, dengan melibatkan SPI, serta melaksanakan sosialisasi mekanisme penginputan dokumen sumber belanja melalui aplikasi SAKTI.

   2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Keuangan Unmul, Koordinator Keuangan, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan BPP karena lalai dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan;

d. Irjen menginventarisasi dan memverifikasi atas bukti pertangungjawaban yang kurang memadai dan menyampaikan hasilnya kepada BPK pada:

   1) BPTI senilai Rp562.700.648,00;

   2) Unmul senilai Rp18.163.327.476,00;

   3) Direktorat PPK pada Ditjen Kebudayaan senilai Rp1.687.563.000,00.

6. Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Kemendikbudristek menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang pada LRA Tahun 2023 (*audited*) masing-masing senilai Rp32.051.749.291.000,00 dan Rp29.763.154.764.125,00 atau 92,86%. Dari jumlah tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dalam Negeri senilai Rp5.063.503.358.877,00 dan Belanja Perjalanan Luar Negeri senilai Rp114.057.434.656,00.

Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas diketahui terdapat kegiatan perjalanan dinas di lingkungan Kemendikbudristek yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait perjalanan dinas dengan uraian sebagai berikut.

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Hasil pemeriksaan uji petik terhadap bukti pertanggungjawaban biaya transpor perjalanan dinas dalam negeri diketahui terdapat perhitungan komponen biaya tidak sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut:

1) Ditjen PDM

Pemeriksaan pertanggungjawaban perjalan dinas Ditjen PDM menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp16.282.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 84. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Ditjen PDM

Nomor	Komponen Perjalanan Dinas	Satker	Nilai Kelebihan (Rp)	Keterangan	Rincian
1	Uang penginapan	Dit. PAUD dan Dit. SMP	1.157.400,00	➢ bukti pertanggungjawaban tidak dilengkapi dengan bukti penginapan (seharusnya hanya dibayarkan 30% dari tarif SBM), dan ➢ bukti penginapan melebihi SBM Tahun 2023	**Lampiran B.6.1**
2	Uang harian	Dit. PAUD dan BPMP Prov. Kaltim	6.950.000,00	➢ Pembayaran perjalanan dinas dalam kota menggunakan standar uang harian luar kota; dan ➢ Uang harian dibayarkan di luar tanggal surat tugas	**Lampiran B.6.2**
3	Transportasi	Dit. PAUD, Dit. SMP, dan BPMP Prov. Kaltim	8.175.000,00	➢ tidak ada bukti atas transportasi yang digunakan; ➢ pembayaran ganda atas taksi; dan ➢ pembayaran uang transportasi perjalanan dinas tidak sesuai dengan bukti yang ada	**Lampiran B.6.3**
	Jumlah		**16.282.400,00**		

2) Ditjen Kebudayaan

Pemeriksaan pertanggungjawaban perjalanan dinas Ditjen Kebudayaan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pada Setditjen Kebudayaan senilai Rp106.524.580,00 dengan uraian sebagai berikut.

a) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang sudah dibayarkan secara kontraktual senilai Rp44.431.228,00

Setditjen Kebudayaan melaksanakan kegiatan *Survey Impact* Program Ditjen Kebudayaan dengan PT SPL sebagai pelaksana berdasarkan SPK Nomor 1484/F1/SPK/VII/2023 senilai Rp188.589.000,00. Dalam kegiatan *survey impact* tersebut, terdapat perjalanan dinas dalam rangka monev Ditjen Kebudayaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 11127/F1/PR.07.04.2023 di Jawa Tengah serta kegiatan pendampingan DAK melalui Surat Tugas Nomor 0858/F1/PR.07.04/2023 di Jambi.

Pada kedua penugasan tersebut terdapat kegiatan pelaksana survei yang dilaksanakan oleh enam orang dari pihak penyedia barang/jasa (dua orang untuk penugasan di Jambi dan empat orang untuk penugasan di Jawa Tengah). Biaya untuk

transpor, uang taksi, uang harian, dan penginapan dalam rangka pelaksanaan survei dibebankan pada MAK perjalanan dinas, dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 85. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Petugas Survei di Jambi dan Jawa Tengah

Daerah	Petugas Survei	Jumlah Hari	Total SPJ Perjadin (Rp)
Jambi	RRA	5	7.984.243,00
Jambi	AR	5	9.842.820,00
Jateng	RW	4	7.655.262,00
Jateng	RRA	4	7.346.370,00
Jateng	DPA	4	6.718.543,00
Jateng	AR	4	4.883.990,00
Jumlah			**44.431.228,00**

Biaya senilai Rp44.431.228,00 untuk perjalanan dinas personel penyedia jasa seharusnya tidak dibebankan lagi ke dalam anggaran Setditen Kebudayaan karena segala biaya terkait dengan pelaksanaan survei tersebut sudah termasuk dalam kegiatan kontraktual sebagaimana yang tercantum dalam SPK yang dilakukan dengan metode *lumpsum.*

b) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pelaksanaan *Fullboard Meeting* Lokakarya Aplikasi e-Monev tahun 2023 senilai Rp62.093.352,00

Pelaksanaan *Fullboard Meeting* Lokakarya Aplikasi e-Monev tahun 2023 dilaksanakan tanggal 2 s.d. 5 Agustus 2023 di AHM menunjukkan permasalahan berikut.

(1) Kelebihan pembebanan biaya sewa kendaraan senilai Rp8.160.000,00

Terdapat dokumen pertanggungjawaban pembayaran biaya sewa kendaraan senilai Rp13.440.000,00 yang dijadikan sebagai komponen biaya taksi daerah (Bandara menuju Hotel/tempat kegiatan) kepada 60 dari 100 peserta kegiatan. Berdasarkan bukti pengeluaran atas sewa kendaraan tersebut, diperoleh informasi sewa kendaraan tersebut untuk masa sewa dua s.d. tiga hari dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 86. Sewa Kendaraan Kegiatan Lokakarya Aplikasi e-Monev

No	Jenis Kendaraan	Biaya Sewa per Hari (Rp)	Jumlah Unit	Tanggal Sewa	Jumlah Hari	Nilai (Rp)
1	Hiace	2.400.000	1	2 s.d. 3 Agustus 2023	2	4.800.000
2	BRV	960.000	1	2 s.d. 4 Agustus 2023	3	2.880.000
3	inova	960.000	1	2 s.d. 4 Agustus 2023	3	2.880.000
4	Xenia	960.000	1	2 s.d. 4 Agustus 2023	3	2.880.000
Total						**13.440.000**

BPP menjelaskan bahwa senilai Rp13.440.000,00 merupakan biaya sewa kendaraan untuk 2 s.d. 3 hari penyewaan. Atas nilai sewa kendaraan tersebut seluruhnya dibagi sama rata kepada 60 peserta. Di sisi lain terdapat bukti pertanggungjawaban lain atas biaya taksi untuk kepulangan peserta dari hotel kegiatan menuju bandara, terpisah dari dokumen penyewaan kendaraan.

Oleh karena itu, nilai yang seharusnya dapat dibebankan hanya atas sewa kendaraan selama satu hari, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2023 untuk

kedatangan pegawai yaitu senilai Rp5.280.000,00 (Rp2.400.000,00 + Rp960.000,00 + Rp960.000,00 +Rp960.000,00). Sedangkan sisanya senilai Rp8.160.000,00 (Rp13.440.000,00 – Rp5.280.000,00) tidak dapat dibebankan menjadi biaya taksi perjalanan dinas.

(2) Realisasi belanja perjalanan dinas senilai Rp53.933.352,00 tanpa bukti pertanggungjawaban yang memadai

Pada pelaksanaan *Fullboard Meeting* Lokakarya Aplikasi e-Monev tahun 2023, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas senilai Rp53.933.352,00 atas 14 peserta dengan rincian pada **Lampiran B.6.4**. Sampai dengan pemeriksaan berakhir BPP belum dapat menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut.

3) Setjen

Pemeriksaan pertanggungjawaban perjalanan dinas Setjen menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp162.476.000,00 dan pemborosan senilai Rp1.925.618.500,00 dengan uraian sebagai berikut.

a) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp107.876.000,00 dan pemborosan senilai Rp119.110.000,00 pada BPTI

(1) Terdapat perjalanan dinas untuk kegiatan upacara Peringatan Hari Pancasila 1 Oktober 2023 di lingkungan kantor BPTI senilai Rp7.560.000,00 yang direalisasikan sebagai uang transportasi dan uang harian kepada 21 pegawai. Realisasi belanja perjadin tersebut tidak dilampiri dengan Surat Tugas. Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa pembayaran biaya perjadin dilakukan karena adanya permintaan dari pegawai yang melaksanakan perjadin. Sampai pemeriksaan berakhir Bendahara Pengeluaran belum dapat menyampaikan bukti dokumentasi pelaksanaan upacara tersebut. Rincian penerima dapat dilihat pada **Lampiran B.6.5**.

(2) Pelaksanaan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMP dan SMA Tingkat Nasional TA 2023 oleh BPTI mengundang 19 orang melalui surat Kepala BPTI Nomor 2337/J7.1/PN.01/2023 tanggal 28 Oktober 2023 untuk hadir dalam acara tersebut pada tanggal 6 s/d 8 November 2023. Para undangan tersebut menerima perjalanan dinas biasa dalam kota dengan tarif DKI Jakarta masing-masing senilai Rp360.000,00 per hari berupa uang transport lokal senilai Rp150.000/hari dan uang harian perjalanan dinas senilai Rp210.000,00/hari. Dengan demikian selama tiga hari setiap orang menerima biaya perjalanan dinas senilai Rp1.080.000,00 (3 hari x Rp360.000,00).

Melalui hasil konfirmasi secara uji petik atas daftar peserta yang berasal dari BKHM, terdapat lima peserta yang bukan pegawai BKHM serta tidak ada dokumen surat tugas baik dari pimpinan/lembaganya maupun dari BKHM. Atas kondisi tersebut pertanggungjawaban pembayaran biaya perjalanan dinas lima personil tersebut tidak dapat dibayarkan senilai Rp5.400.000,00 (Rp1.080.000,00 x 5).

(3) Pelaksanaan OPSI SMP dan SMA Tingkat Nasional TA 2023 oleh BPTI melibatkan Universitas Tarumanegara (Untar) dalam bentuk fasilitas lokasi pameran dan acara pembukaan, serta turut serta berperan sebagai panitia

kegiatan sesuai yang tercantum dalam SK Rektor Untar Nomor 9286-KR/UNTAR/XI/2023 tanggal 4 November 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan OPSI Tahun 2023 Untar.

Hasil konfirmasi atas nilai belanja perjadin dan honor jasa profesi dengan pihak Untar, diketahui terdapat selisih pembayaran antara nilai SPJ keuangan BPTI dengan nilai yang diterima oleh pihak Untar. Total nilai yang dipertanggungjawabkan oleh BPTI atas personil yang berasal dari Untar senilai Rp108.070.000,00, namun berdasarkan konfirmasi pihak Untar total uang yang diterima adalah senilai Rp65.850.000,00 (uang harian, transport, honor narasumber, dan honorarium pengisi acara), sehingga terdapat selisih pembayaran dengan yang diterima senilai Rp42.220.000,00 dengan rincian perhitungan pada **Lampiran B.6.6.**

(4) Penyusunan laporan OPSI Jenjang SMP dan SMA Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 12 Desember 2023 di Hotel Am Jakarta dengan realisasi belanja paket *meeting* dalam kota. Hasil pemeriksaan menunjukkan:

a) Narasumber tidak hadir namun dibayarkan honorariumnya senilai Rp3.720.000,00

Hasil konfirmasi kepada kedua narasumber yang berasal dari Asosiasi Peneliti Muda Indonesia (APMI) pada kegiatan penyusunan Laporan OPSI Jenjang SMP dan SMA Tahun 2023, klarifikasi kepada PPK kegiatan dan foto dokumentasi kegiatan, diketahui bahwa keduanya tidak hadir dan tidak menerima honorarium narasumber sebagaimana yang tertera pada kuitansi pembayaran. Lebih lanjut diketahui bahwa tanda tangan yang terdapat pada kuitansi bukan tanda tangan narasumber. Tidak hadirnya kedua narasumber menunjukkan bahwa hak tagih atas biaya transportasi dan honor jasa profesi narasumber senilai total Rp3.720.000,00 tidak dapat dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87. Kelebihan Pembayaran Biaya Narasumber

Nama	Belanja Perjadin (Rp)	Belanja Jasa Profesi nett PPh (Rp)	Hasil Konfirmasi	Lebih Bayar
Sdri. IK	150.000,00	1.710.000,00	Tidak datang	1.860.000,00
Sdr POWA	150.000,00	1.710.000,00	Tidak datang	1.860.000,00
	300.000,00	**3.420.000,00**		**3.720.000,00**

b) Output kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh panitia kegiatan

Output kegiatan Penyusunan Laporan OPSI Jenjang SMP dan SMA Tahun 2023 tumpang tindih dengan tupoksi panitia kegiatan Kegiatan OPSI Jenjang SMP dan SMA Tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 6 s/d 11 November 2023 di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut disusun panitia kegiatan melalui SK Kepala BPTI Nomor 2367/J7.1/PN.00/2023 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara OPSI Jenjang SMP/MTS dan SMA/MA Tahun 2023. Dalam SK tersebut ditetapkan nama dan tugas panitia kegiatan. Salah satu tugas panitia yang dijabarkan dalam SK adalah membuat laporan kegiatan. Pemeriksaan atas hasil laporan kegiatan yang disusun oleh Panitia kegiatan OPSI Jenjang SMP dan SMA Tahun 2023

dengan laporan yang disusun dari kegiatan Penyusunan Laporan OPSI Jenjang SMP dan SMA Tahun 2023 memiliki kesamaan. Dengan demikian terdapat pemborosan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan OPSI Jenjang SMP dan SMA Tahun 2023 senilai Rp119.110.000,00.

(5) BPTI melaksanakan dua Belanja Paket *Meeting* Luar Kota pada waktu dan tempat yang sama yaitu kegiatan Penyusunan Laporan Bidang Seni Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Bidang Olah Raga Tahun 2023 pada 1 s.d. 4 Desember 2023 di Hotel Bigland Bogor. Kegiatan dilaksanakan secara *fullboard* melalui dua kontrak kerja sistem harga satuan dengan perusahaan yang sama yaitu PT BBE. Pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian belanja perjadin senilai Rp48.976.000,00 dengan rincian berikut:

(a) Bukti tiket pesawat kepulangan narasumber AS tidak terdaftar dalam data *manifest* penerbangan GA 0212 tanggal 4 Desember 2023 dengan harga tiket senilai Rp1.230.000,00 dan bukti pertanggungjawaban transport Bandara kepulangan senilai Rp246.000,00 tidak dilengkapi bukti (hanya menggunakan DPR).

(b) Peserta a.n ASY dan SR menjadi peserta kedua kegiatan tersebut. Dalam daftar nominatif biaya perjalanan dinas, keduanya hanya mengikuti kegiatan pada hari pertama dan hari terakhir. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran paket *meeting* peserta yang sama selama tiga hari dengan total nilai senilai Rp4.500.000,00 (Rp750.000,00 x 3 hari x 2 pax).

(c) RAB kedua kontrak kegiatan dengan hotel telah meliputi fasilitas satu unit layar dan LCD proyektor. Namun, dalam dokumen pertanggungjawaban kedua kegiatan ditemukan dua kuitansi pembayaran kepada pihak ketiga lain (PT CMI) atas penyewaan layar dan LCD proyektor senilai Rp15.000.000,00/kuitansi atau total senilai Rp30.000.000,00. Sesuai dengan bukti dokumentasi (foto kegiatan), kedua kegiatan dilaksanakan pada ruangan yang sama dan hanya menggunakan dua unit layar dan LCD proyektor. Dengan demikian, atas duplikasi tersebut terdapat kelebihan pembayaran sewa layar dan LCD proyektor senilai Rp30.000.000,00.

(d) Duplikasi biaya sewa komputer dan printer yang dipertanggungjawabkan di kedua kegiatan masing-masing senilai Rp10.000,000,00. PPK menjelaskan bahwa laptop dan printer dibutuhkan oleh Tim Keuangan, namun dari daftar peserta tidak ada peserta dari bagian keuangan yang mengikuti kegiatan. BPP telah mengirimkan bukti dokumentasi unit printer yang disewa, namun lokasi pengambilan foto berbeda dan tidak sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan.

(e) Duplikasi belanja bahan pencetakan *backdrop*, spanduk, dan *banner*. Sesuai dengan bukti dokumentasi, kedua kegiatan dilaksanakan pada ruangan yang sama dan hanya menggunakan satu unit *backdrop* yang sama. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran biaya *backdrop*, spanduk, dan *banner* senilai Rp3.000.000,00.

b) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp8.850.000,00 pada Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas)

Pada kegiatan BOS kinerja, pembayaran biaya transportasi menggunakan bukti Daftar Pengeluaran Riil (DPR) yang bersifat *lumpsum* tanpa disertai bukti pertanggungjawaban senilai Rp8.850.000,00 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 88. Rekapitulasi Biaya Transportasi Menggunakan DPR

Kegiatan	Kota Lokasi Kegiatan	Nilai (Rp)
Bos Kinerja Regional 1	Tangerang	6.900.000,00
Bos Kinerja Regional 3	Makassar	300.000,00
Bos Kinerja Regional 4	Surabaya	900.000,00
Bos Kinerja Regional 6	Jakarta	750.000,00
Jumlah		**8.850.000,00**

Rincian perjalanan dinas dalam ***Lampiran B.6.7*****.**

c) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp45.750.000,00 pada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pusdatin menunjukkan terdapat pelaksanaan kegiatan di beberapa hotel di DI Yogyakarta, Kota Makassar, Kabupaten Kediri, dan Kota Tanjung Pinang. Konfirmasi kepada pihak hotel lokasi kegiatan, diketahui terdapat pelaksana perjadin pada kuitansi yang tidak terdata sebagai tamu hotel, sebagai berikut:

Tabel 89. Hasil Konfirmasi Hotel atas Lima Kegiatan Pusdatin

Nama Hotel	Nama Kegiatan	Tanggal	Pelaksana Perjadin Tidak Terdata	Nilai Kuitansi (Rp)
Th Hotel Yogyakarta	Verifikasi dan Validasi Data Master Kebahasaan (Komunitas Literasi dan Sastra)	21 s.d. 24 Februari 2023	10 orang	22.815.000,00
CL Hotel Yogyakarta	Pengelolaan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Warisan Budaya Tak Benda untuk Platform Digital	5 s.d. 8 Juli 2023	1 orang	2.520.000,00
FP by S Makassar	Verifikasi dan Validasi Data Master Kebahasaan (Komunitas Literasi dan Sastra)	11 s.d. 14 Juli 2023	7 orang	15.645.000,00
GS Hotel Kediri	Verifikasi dan Validasi Data Master Kebahasaan (Cagar Budaya dan Museum)	10 s.d. 13 Oktober 2023	1 orang	2.400.000,00
NDL Hotel Bintan	Pengelolaan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Warisan Budaya Tak Benda untuk Platform Digital	10 s.d. 13 Oktober 2023	1 orang	2.370.000,00
Jumlah			**20 orang**	**45.750.000,00**

Para pelaksana perjadin menyatakan benar telah melaksanakan perjalanan dinas pada daerah tersebut dan menginap pada hotel yang dimaksud. Namun, satu kamar diisi oleh dua orang dan tidak ada yang mendapatkan satu kamar sendiri. Biaya akomodasi dikoordinasikan oleh PPK sehingga para pelaksana perjadin tidak mengetahui mengenai nilai pada kuitansi hotel yang dipertanggungjawabkan.

d) Pemborosan pada paket *meeting* senilai Rp1.806.508.500,00 pada Biro Perencanaan

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas paket *meeting* Biro Perencanaan diketahui terdapat 16 kegiatan paket *meeting* senilai Rp1.806.508.500,00 yang dilakukan oleh pegawai Kemendikbudristek tanpa melibatkan peserta dari K/L lainnya. Berdasarkan laporan kegiatan diketahui terdapat dua kegiatan diikuti peserta dari internal Biro Perencanaan, enam kegiatan diikuti peserta dari Eselon I lainnya, dan enam kegiatan belum diserahkan laporan kegiatan dengan rincian pada **Lampiran B.6.8.**

4) Ditjen GTK

Pemeriksaan pertanggungjawaban perjalanan dinas Ditjen GTK menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp54.714.000,00 dengan uraian sebagai berikut

a) Pembayaran biaya taksi menggunakan DPR senilai Rp37.724.000,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas menunjukkan bahwa masih terdapat pembayaran biaya taksi yang dibayarkan menggunakan DPR senilai Rp37.724.000,00, sesuai tabel berikut.

Tabel 90. Biaya Transpor Taksi Menggunakan DPR

No	Satker	Nilai (Rp)
1	Setditjen	1.024.000,00
2	Direktorat KSPSTK	9.600.000,00
3	Direktorat. PAUD Dikmas	9.850.000,00
4	Direktorat PPG	2.850.000,00
5	Direktorat Dikmen DIksus	4.500.000,00
6	Direktorat Dikdas	9.900.000,00
	Total	**37.724.000,00**

*Rincian pada **Lampiran B.6.9.***

Bendahara Pengeluaran dan BPP satker terkait menjelaskan bahwa pembayaran biaya transpor pengganti taksi tidak ditagihkan sesuai Estimasi Biaya Taksi pada SBM, melainkan disesuaikan dengan transpor lokal senilai Rp150.000,00. Hal tersebut dikarenakan pelaksana perjalanan dinas telah menyerahkan bukti pertanggungjawaban transpor tiket namun tanpa disertai bukti taksi sehingga biaya taksi diberikan menggunakan DPR sesuai tarif transpor lokal.

b) Perhitungan transpor daerah menggunakan tarif sewa kendaraan senilai Rp16.990.000,00

Pada Direktorat KSPSTK terdapat komponen taksi/transpor daerah pada tiga kegiatan yang diperhitungkan senilai tarif sewa kendaraan selama hari perjalanan dinas senilai Rp28.350.000,00. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi sehingga perhitungan biaya taksi seharusnya untuk hari kedatangan dan hari keberangkatan saja yaitu senilai Rp11.360.000,00, rincian pada **Lampiran B.6.10.**

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran transpor daerah karena selisih perhitungan taksi senilai Rp16.990.000,00 (Rp28.350.000,00 - Rp11.360.000,00).

5) Ditjen Diksi

Pemeriksaan pertanggungjawaban perjalanan dinas Ditjen Diksi secara uji petik menunjukkan terdapat pembayaran biaya transpor kepada pengajar, narasumber, dan moderator pada PNJ tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran (*at cost*) melainkan diberikan secara *lumpsum* per orang senilai Rp400.000,00. Total biaya transpor *lumpsum* tahun 2023 senilai Rp21.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91. Pembayaran Transpor Tidak Sesuai Ketentuan

No	Jabatan dalam Kegian	Nilai Transport yang Dibayarkan (Rp)
1	Pengajar	7.200.000,00
2	Narasumber	13.800.000,00
3	Moderator	800.000,00
Jumlah		**21.800.000,00**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran B.6.11**.

PPK memberikan kebijakan bahwa bukti pengeluaran transpor tersebut berupa Form Transport yang ditandatangani oleh penerima biaya transpor dan PPK sesuai dengan Keputusan Direktur PNJ Nomor 1301/PL3/KU.03.00/2020. PNJ sebagai satker yang menerapkan pola keuangan BLU, dalam merealisasikan pertanggungjawaban belanja berupa perjalanan dinas seharusnya tetap mengacu pada SBM sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAK/L yang telah diubah dengan PMK Nomor 232/PMK.02/2020. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp21.800.000,00.

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. Hasil pemeriksaan uji petik terhadap bukti pertanggungjawaban biaya transpor perjalanan luar negeri diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebagai berikut.

Tabel 92. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Satker	Kelebihan Bayar (Rp)
1	Setjen	13.930.637,80
2	Ditjen PDM	18.440.776,00
3	Ditjen GTK	7.997.820,00
4	Ditjen Diktiristek	92.862.222,00
5	Ditjen Diksi	52.144.962,00
	Total	**185.376.417,80**

Berikut penjelasan atas kelebihan bayar perjalanan luar negeri di atas.

1) Biro Perencanaan - Setjen mengirimkan dua pegawai pada kegiatan *Regional Meeting of Education Statisticians* di Bangkok, Thailand pada tanggal 16 s.d. 21 Oktober 2023. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen diketahui tidak terdapat *exit permit* atau ijin berangkat ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara, karena waktu pelaksanaan yang sudah dekat, sehingga pelaksana perjadin tidak menggunakan paspor

dinas. Biro Perencanaan membayarkan komponen uang harian selama enam hari, sedangkan tiket dan akomodasi dibiayai oleh pihak penyelenggara. Berdasarkan undangan dan laporan kegiatan perjadin, diketahui kegiatan dilaksanakan selama empat hari yaitu tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2023. Dengan demikian tidak terdapat agenda kegiatan pada saat hari keberangkatan dan hari kepulangan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran perjadin senilai Rp9.998.208,00 dengan rincian berikut.

Tabel 93. Besaran Biaya Perjadin LN Biro Perencanaan

No	Nama	Rincian Biaya	Jumlah Dibayarkan (Rp)	Jumlah Seharusnya (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	CDA	US$264 x 6 hari x Rp15.780	24.995.520,00	19.996.416,00	4.999.104,00
2	AH	US$264 x 6 hari x Rp15.780	24.995.520,00	19.996.416,00	4.999.104,00
	Jumlah				**9.998.208,00**

2) LLDikti Wilayah V Yogyakarta – Setjen mengirimkan satu orang pelaksana perjadin atas nama AJ, berdasarkan Surat Tugas Nomor 4648/LL5/HM.00.06/2023 tanggal 27 September 2023 untuk kegiatan di Bangkok, Thailand. Jangka waktu perjalanan dinas selama enam hari terhitung pada 15 s.d. 20 Oktober 2023. Berdasarkan dokumen pembayaran diketahui pelaksana perjadin menerima rincian biaya perjalanan dinas sebagai berikut.

Transpor	Rp8.967.820,00
Uang harian (6 hari x Rp3.277.024,83)	Rp19.662.148,98
Akomodasi	Rp11.599.180,00
Jumlah	**Rp40.229.148,98**

Laporan kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan selama empat hari yaitu tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023. Tidak terdapat agenda kegiatan pada saat hari keberangkatan dan hari kepulangan, sehingga uang harian yang diterima maksimal senilai 40% dari tarif uang harian atau senilai Rp15.729.719,18 ((4 hari x Rp3.277.024,83)+(40% x 2 hari x Rp3.277.024,83)). Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran perjadin senilai Rp3.932.429,80 (Rp19.662.148,98 - Rp15.729.719,18).

3) Direktorat SMP – Ditjen PDM mengirimkan dua pegawai atas nama NN ke Madrid dan IRNK dan Australia. Terdapat kelebihan uang harian perjalanan dinas Luar Negeri senilai Rp18.440.776,00, dengan rincian pada **Lampiran B.6.12**. Kelebihan uang harian tersebut dikarenakan a) Perjalanan dinas luar negeri tidak dilakukan pemotongan uang harian, dimana tidak ada penginapan saat transit perjalanan, pada perjalanan ke negara tujuan, dan b) Perjalanan dinas luar negeri juga membayarkan uang penginapan dan uang harian.

4) Setditjen GTK – Ditjen GTK mengirimkan dua orang peserta dan satu orang pengawas untuk menghadiri kegiatan Konferensi UNESCO di Seoul, Korea Selatan. Komponen biaya yang dibayarkan oleh Ditjen GTK kepada dua orang peserta adalah senilai 30% uang harian selama empat hari, sedangkan tiket dan akomodasi dibiayai oleh penyelenggara. Dalam dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pengawas a.n AAS, menerima uang harian 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, yaitu senilai Rp26.659.400,00 (4 hari x Rp6.664.850,00). Perhitungan uang harian sesuai ketentuan seharusnya senilai Rp18.661.580,00 [(40% x 2 hari x Rp6.664.850,00)

+ (2 hari x Rp6.664.850,00)]. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp7.997.820,00 (Rp26.659.400,00 – Rp18.661.580,00).

5) Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban atas Belanja Perjalanan Luar Negeri Tahun 2023 pada Ditjen Diktiristek yaitu pada UMRAH, Universitas Musamus, dan Unmul menunjukkan bahwa terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri senilai Rp92.862.222,00 sebagaimana pada **Lampiran B.6.13** s.d. **B.6.20** dengan penjelasan berikut:

   a) Terdapat pembayaran biaya transportasi darat kepada pelaksana perjadin. Selain menerima biaya transportasi darat tersebut, masing-masing pelaksana telah menerima uang harian yang sudah termasuk uang transportasi darat;

   b) Terdapat pembayaran uang harian pada hari pergi dan pulang kepada pelaksana perjadin senilai 100% sesuai tarif uang harian. Sesuai ketentuan seharusnya pembayaran uang harian pada hari pergi dan pulang paling tinggi senilai 40% dari tarif uang harian.

6) Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan luar negeri delapan pegawai Polimedia dan lima pegawai POLSRI menunjukkan bahwa terdapat pembayaran uang harian penuh (100%) pada hari perjalanan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri senilai Rp52.144.962,00 masing-masing pada Polimedia senilai Rp31.267.659,60 dan POLSRI senilai Rp20.877.302,40 dengan rincian pada **Lampiran B.6.21.**

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, pada Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

b. PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023

   1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa SBM Tahun 2023 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.

   2) Lampiran I Penjelasan SBM yang berfungsi sebagai Batas Tertinggi Nomor 31 yang menyatakan bahwa Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/pegawai ASN/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk Uang Makan, Transpor Lokal, Uang Saku, dan Uang Penginapan.

   3) Lampiran I Nomor 30.1 tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menyatakan bahwa tarif uang harian luar kota, dalam kota lebih dari delapan jam, dan diklat.

c. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2023:

1) Pasal 10 ayat (5) huruf b yang menyatakan bahwa Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan antara lain biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pertangungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c) tiket pesawat, boarding pass, airpot tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d) Daftar pengeluaraan Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

3) Pasal 36 yang menyatakan bahwa Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dana atau/ Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

d. PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Luar Negeri dan diubah terakhir dengan PMK Nomor 181/PMK.05/2019 pada:

1) Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

a) Lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung satu hari.

b) Lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari.

c) Lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari.

2) Pasal 13 ayat (4) yang menyatakan bahwa Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a) biaya penginapan;

b) uang makan;

c) uang saku; dan

d) uang transportasi lokal.

3) Pasal 15:

a) Ayat (5) yang menyatakan bahwa uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) paling tinggi senilai 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian.

b) Ayat (5a) yang menyatakan bahwa uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan senilai 100% (seratus persen) dari tarif uang harian dalam hal:

(1) diperlukan penginapan pada waktu transit yang tidak ditanggung oleh penyedia moda transportasi; dan/ atau

(2) diperlukan penginapan setibanya di tempat tujuan di luar negeri.

e. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa Biaya perjalanan dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:

1) bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;

2) melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (*mark up*);

3) pelaksanaan perjalanan dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau

4) pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.

f. SE Sekjen Kemendikbudristek Nomor 15 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1) Huruf C Rapat/Pertemuan di Luar Kantor angka 8 poin b yang menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan di luar kantor yang mengundang peserta dari dalam/luar daerah penyelenggaraan kegiatan diwajibkan memberikan bukti pengeluaran sebagai biaya penggantian, sebagai berikut:

a) tiket keberangkatan dan kepulangan pesawat/kereta/bus/kapal/travel;

b) *boardingpass* keberangkatan pesawat/kereta;

c) bukti pengeluaran biaya transportasi keberangkatan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/terminal/pelabuhan keberangkatan (*at cost*);

d) bukti pengeluaran biaya transportasi kedatangan dari bandara/stasiun/ terminal/pelabuhan kedatangan menuju ke tempat tujuan (*at cost*);

e) untuk biaya transportasi kepulangan dari lokasi kegiatan menuju bandara/ stasiun/terminal/pelabuhan ke tempat kedudukan semula, maka dapat diganti senilai biaya transportasi keberangkatan/kedatangan.

2) Huruf D Perjalanan Dinas Biasa

a) Angka 2 huruf a yang menyatakan bahwa Unsur biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas: uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas meliputi komponen: uang makan, uang transpor lokal, dan uang saku;

b) Angka 5 yang menyatakan bahwa Biaya taksi merupakan biaya dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Satuan biaya taksi dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran (*at cost*);

c) Angka 7 yang menyatakan bahwa Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan, maka penggantian biaya transportasi dibayarkan senilai bukti pengeluaran (*at cost*), berupa: kuitansi/bukti pembelian bahan bakar kendaraan dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran dan ketersediaan anggaran serta besaran penggantian ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari PPK serta bukti biaya tarif tol.

3) Huruf E. Angka 1. Satuan biaya transportasi DKI Jakarta menuju tempat tujuan ke wilayah Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Kepulauan Seribu dan sebaliknya merupakan estimasi sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) dan dibayarkan sesuai bukti pengeluaran (*at cost*).

Hal tersebut mengakibatkan.

a. Kelebihan pembayaran perjalanan dalam negeri senilai Rp547.173.397,80 dengan rincian

1) Perjalanan dalam negeri senilai Rp361.796.980,00 terdiri dari:

a) Ditjen PDM senilai Rp16.282.400,00;

b) Ditjen Kebudayaan senilai Rp106.524.580,00;

c) Setjen senilai Rp162.476.000,00;

d) Ditjen GTK senilai Rp54.714.000,00; dan

e) Ditjen Diksi-PNJ senilai Rp21.800.000,00;

2) Perjalanan luar negeri senilai Rp185.376.417,80 terdiri dari:

a) Setjen senilai Rp13.930.637,80;

b) Ditjen PDM senilai Rp18.440.776,00;

c) Ditjen GTK senilai Rp7.997.820,00;

d) Ditjen Diktiristek-UMRAH, Universitas Musamus, Unmul senilai Rp92.862.222,00; dan

e) Ditjen Diksi – Polimedia dan Polsri senilai Rp52.144.962,00;

b. Pemborosan dari belanja perjalanan dinas senilai Rp1.925.618.500,00 (Rp119.110.000,00 + Rp1.806.508.500); dan

c. Keputusan Direktur PNJ terkait SBM Internal pada PNJ tidak mengacu pada SBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA belum optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. PPK, Bendahara Pengeluaran, dan BPP dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentang mekanisme pembayaran belanja dan ketentuan tentang perjalanan dinas serta kurang cermat dalam:

   1) melaksanakan pengujian atas kebenaran materiil bukti pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas; dan

   2) menatausahakan dan mengarsipkan bukti pengeluaran atas kegiatan yang dikelolanya.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan penatausahaan belanja perjalanan dinas secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Terkait hal tersebut, telah dilakukan tindak lanjut berupa penyetoran sebagai berikut:

No	Satker	NTPN	Tanggal	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	**Setjen**				18.848.208,00
	Biro Perencanaan	34E0F6U8EUGK5A30	3 Mei 2024	9.998.208,00	
	Pusprenas	**4 kali penyetoran**	22 Mei 2024	8.850.000,00	
2	**Ditjen PDM**				34.983.176,00
	Direktorat PAUD	6C1557QLUP0M6CK4	25 April 2024	862.400,00	
	Direktorat SMP	DE71C6UBEUE8P37B	25 April 2024	295.000,00	
	Direktorat PAUD	890461JNFUVVBCMI	25 April 2024	3.290.000,00	
	Direktorat SMP	12C1F48VVEN3I5HP	25 April 2024	18.440.776,00	
	BPMP Prov. Kaltim	12C1F48VVEN3I5HP	26 April 2024	9.545.000,00	
	Direktorat PAUD	890461JNFUVVBCMI	25 April 2024	1.804.500,00	
	Direktorat SMP	AE9A23CIFK4N54LF	25 April 2024	745.500,00	
3	**Ditjen Kebudayaan**				106.524.580,00
		08AD37QLUP2VHC2L	2 Mei 2024	8.160.000,00	
		2329D55DF9BRDR1C	3 Mei 2024	53.933.352,00	
		A377748VVEPJ60IS	7 Mei 2024	44.431.228,00	
4	**Ditjen GTK**				
	Perjalanan LN	2A2270NA04DJ2ORL	26 April 2024	7.997.820,00	62.711.820,00
	Setditjen	977801JNFVVFDR1	26 April 2024	1.024.000,00	
	Dit KSPSTK	F84EA6U8EUE9RPLD	25 April 2024	9.600.000,00	
	Dit. Paud Dikmas	76A982G4VPIBQJ3B	25 April 2024	9.850.000,00	
	Dit. PPG	C07777QLUP0M8LQN	25 April 2024	2.850.000,00	
	Dit. Diksus Dikmen	E87FE61QV3RUFHES	26 April 2024	4.500.000,00	
	Dit, DIkdas	646CD2G4VPIBRE5M	26 April 2024	9.900.000,00	
		CBA216U8EUEAU3E4	26 April 2024	16.990.000,00	
5	Ditjen Diktiristek	ke RPL 088 BLU PN	29 April 2024	21.800.000,00	21.800.000,00

BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Sekjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Dirjen PDM, Dirjen Kebudayaan, dan Dirjen GTK, agar mengevaluasi kebjikan internal terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketenuan perundangan.

b. Sekjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi memerintahkan masing-masing PPK menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Kas Negara/Kas BLU dengan rincian:

   1) Setjen senilai Rp157.558.429,80;

   2) Ditjen Diksi – PNJ senilai Rp21.800.000,00, Polimedia senilai Rp31.267.659,60 dan Polsri senilai Rp20.877.302,40; dan

   3) Ditjen Diktiristek-UMRAH, Universitas Musamus, Unmul senilai Rp71.062.222,00.

c. Dirjen Diksi memerintahkan Direktur PNJ supaya memutakhirkan Keputusan Nomor 1301/PL3/KU.03.00/2020 tentang SBM Internal PNJ sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Kelebihan Bayar atas Pertanggungjawaban Belanja Barang Senilai Rp6.835.419.102,15 dan Terdapat Kekurangan Pemotongan/Pemungutan Pajak atas Belanja Barang Senilai Rp1.559.030.234,20

Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 menyajikan anggaran Belanja Barang Tahun 2023 senilai Rp32.050.841.101.000,00 dan terealisasi senilai Rp29.760.647.425.739,00 (92,85%). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertangungjawaban Belanja Barang dan Jasa diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Belanja Pemeliharaan

Anggaran Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 senilai Rp219.128.446.000,00 dan terealisasi senilai Rp211.046.954.935,00 (96,31%). Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Kurang volume senilai Rp432.402.164,35 atas pekerjaan pemeliharaan pada delapan satker dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 94. Kurang Volume Belanja Pemeliharaan

No	Unit Eslon I	Nama Satker	Jumlah Kontrak Pekerjaan	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	Setjen	Biro Umum dan PBJ	20	305.386.884,00	**Lampiran B.7.1**
		BPTI	3	16.643.420,00	
		Pusdiklat	5	33.969.840,00	
		LLDikti VI Jawa Tengah	1	7.740.152,00	
		Jumlah Setjen		**363.740.296,00**	
2	Ditjen PDM	Direktorat SMA	5	22.542.816,67	**Lampiran B.7.2**
		Direktorat PMPK	2	2.287.299,68	
		BBPMP Prov. Jawa Barat	2	1.489.572,00	
		Jumlah Ditjen PDM		**26.319.688,35**	
3	Ditjen Kebudayaan	Setditjen Kebudayaan	1	**42.342.180,00**	**Lampiran B.7.3**
Jumlah			**39**	**432.402.164,35**	

2) Perbedaan spek pemasangan lampu pada pekerjaan penggantian lampu PJU dan penataan lampu Wisma Arga Mulia pada Setjen senilai Rp22.725.000,00

Pekerjaan Penggantian Lampu PJU dan Penataan Lampu Taman Wisma Arga Mulya dilaksanakan dengan SPK Nomor 6779/A7/RT.02.02/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan nilai kontrak senilai Rp141.844.680,00. Pekerjaan telah lunas dibayar berdasarkan kuitansi Nomor 056.MIJ/XI/2023 tanggal 9 November 2023 senilai Rp141.844.680,00 dan telah diserahkan sesuai BAST Nomor 38885/A7/RT.02.02/2023 tanggal 9 November 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan analisis dokumen pembayaran terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang diterima yaitu pekerjaan pemasangan 15 unit Lampu LED Philips yang seharusnya Philips IP 66 80-100 watt senilai Rp2.865.000,00 namun yang terpasang adalah Philips BRP 121 50-70 watt.

Berdasarkan penelusuran toko online menunjukkan harga rata-rata atas item lampu dimaksud senilai Rp1.350.000,00 ((Rp1.150.000,00 + Rp1.750.000,00 + Rp1.150.000,00)/3) sehingga dapat diperhitungkan selisih atas harga kontrak dengan harga yang sebenarnya/harga pasar senilai Rp1.515.000,00 (Rp2.865.000,00 – Rp1.350.000,00) untuk satu buah lampu atau seluruhnya untuk 15 lampu adalah senilai Rp22.725.000,00 (15 x Rp1.515.000,00).

3) Realisasi Belanja BBM pada Itjen Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja pemeliharaan tahun 2023 pada Itjen terdapat permasalahan sebagai berikut.

a) Bukti pertangungjawaban belanja BBM tidak dapat ditelusuri senilai Rp32.737.079,00

Pertanggungjawaban belanja BBM pada bulan Agustus s.d. November 2023 dibayarkan setelah pengguna kendaraan memberikan/melampirkan bukti nota pembelian BBM kepada Pengelola BMN. Selanjutnya, Pengelola BMN membuat kuitansi beserta tanda terima biaya BBM untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Tim Rumah Tangga selaku PPK. Kemudian Pengelola BMN melakukan pembayaran transfer/tunai kepada pengguna kendaraan atas belanja BBM sesuai jumlah nota pembelian yang dilampirkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian antara nota pembelian BBM dengan tanda terima pembayaran senilai Rp32.737.079,00 (secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran B.7.4)**. Pengelola BMN tidak membuat rekapitulasi sesuai bukti pertanggungjawaban dan kondisi fisik bukti pertanggungjawaban saat ini sulit untuk dapat dibaca karena sudah tidak terlihat, serta tidak terdapat bukti pendukung lainnya.

Hasil klarifikasi dengan PPK Bidang Rumah Tangga dan Pengelola BMN menjelaskan bahwa besaran nominal pagu pembayaran uang BBM dan penggunaan juru bayar BBM merupakan kebijakan Kepala Bidang Rumah Tangga sebelumnya, besaran tersebut disesuaikan dengan jabatan pegawai. Itjen selama ini belum memiliki SOP terkait pengelolan pembelian BBM namun mulai bulan Juni sampai dengan November 2023 uang BBM dibayarkan berdasarkan penggantian atau nota sehingga nominalnya tidak sama setiap bulannya kecuali untuk Irjen dan Sekretaris

besaran yang dibayarkan sama setiap bulannya karena intensitas kegiatan yang lebih banyak. Mengenai SPJ yang tidak lengkap dan sulit untuk ditelusuri, hal tersebut dikarenakan tidak semua pengguna kendaraan memberikan bukti pembelian BBM karena nota pembelian hilang, lupa meminta kepada SPBU serta tinta di bukti pembelian sudah hilang dan juga pengelola BMN yang bertanggung jawab atas bukti BBM tidak melakukan pengadministrasian dengan baik.

b) Belanja BBM belum dipertanggungjawabkan senilai Rp6.212.269,00

Terdapat pembayaran uang BBM selama tahun 2023 tidak melalui BPP Bidang Rumah Tangga melainkan melalui salah satu pengelola BMN yang juga memegang salah satu kendaraan dinas jenis motor selaku juru bayar. Penunjukan juru bayar selama tahun 2023 hanya berdasarkan kebijakan Kepala Bidang Rumah Tangga tanpa disertai dengan surat ketetapan. Hasil pemeriksaan diketahui terdapat selisih antara bukti kuitansi yang dibayarkan bendahara senilai Rp78.490.101,00 dengan bukti slip pembayaran ke masing – masing pegawai pemegang kendaraan dinas senilai Rp72.277.832,00 atau selisih senilai Rp6.212.269,00 selama Tahun 2023, dengan rincian pada **Lampiran B.7.5**. Hasil Klarifikasi dengan bendahara pengeluaran pembantu bahwa selisih uang tersebut masih berada pada pengelola BMN selaku juru bayar.

b. Belanja Jasa

Anggaran Belanja Jasa Tahun 2023 senilai Rp3.658.776.603.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.518.942.005.548,00 (96,18%). Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Belanja Jasa menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Setjen

a) Kelebihan Bayar Jasa Konsultansi pada Biro Umum dan PBJ senilai Rp174.575.000,00

Pekerjaan Jasa Konsultansi SKM Bidang Komunikasi dan Media sesuai SPK Nomor 0601/A7/KU.01.02/2023 tanggal 5 Januari 2023 dengan penyedia CV GSM dan nilai kontrak senilai Rp3.987.131.304,00. Kontrak tersebut mengalami tiga kali addendum yaitu:

(1) Addendum 1 Nomor 0723/A7/KU.01.02/2023 tanggal 30 Januari 2023, merngubah personil tenaga ahli;

(2) Addendum 2 Nomor 34723/A7/KU.01.02/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yaitu pengurangan biaya perjalanan dinas, bertambahnya harga pada komponen dokumen laporan, dan penambahan uraian pekerjaan baru yaitu biaya peralatan pendukung; dan

(3) Addendum 3 Nomor 43638/A7/KU.01.02/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja antara lain melalui analisis kontrak, SPM dan SP2D, serta pemeriksaan fisik Tim BPK dengan perwakilan penyedia pada tanggal 28 Maret 2023 diketahui terdapat permasalahan berikut:

(1) Terdapat item sewa alat operasional berupa delapan printer, empat *scanner* dan satu mesin *fotocopy* dalam kontrak seluruhnya senilai Rp139.200.000,00,

seluruh peralatan tidak ditemukan di ruang kerja tim SKM Bidang Komunikasi dan Media di Gedung A lantai 2 Kemedikbudristek. Alat operasional berupa mesin foto copy, *scanner* dan *printer* yang ada dalam ruangan tersebut adalah BMN milik Biro Umum dan PBJ. Adapun rincian alat operasional yang tidak ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 95. Biaya Operasional Sewa Alat

No	Sewa Alat	Unit	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Printer	8	12	850.000,00	81.600.000,00
2	*Scanner*	4	12	450.000,00	21.600.000,00
3	Mesin *Fotocopy*	1	12	3.000.000,00	36.000.000,00
Jumlah					**139.200.000,00**

(2) Biaya sewa peralatan pendukung tidak dilaksanakan sesuai kegiatan senyatanya

Dalam RAB kontrak, biaya sewa alat dokumentasi per kegiatan senilai Rp7.075.000,00 atau nilai total sewa alat senilai Rp84.900.000,00. Untuk pelaksanaan kegiatan dokumentasi mengikuti dengan pelaksanaan perjalanan dinas yang disampaikan pihak CV GSM kepada PPK, selama bulan Oktober s.d. Desember 2023, sedangkan sesuai bukti pendukung untuk jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tim SKM adalah sebanyak tujuh kegiatan sesuai rincian dalam tabel berikut.

Tabel 96. Pelaksanaan Perjalanan Dinas SKM Oktober s/d Desember 2023

No	Kota Tujuan Perjalanan Dinas	Tanggal Pelaksanaan
1	Tual, Maluku Utara	11-13 Oktober 2023
2	Bandung, Jawa Barat	14 Oktober 2023
3	Balikpapan, Kalimantan Timur	30 Oktober - 2 November 2023
4	Singapura	15-17 November 2023
5	Toba, Sumatra Utara	22-23 November 2023
6	Jakarta, DKI Jakarta	24-26 November 2023
7	Jakarta, DKI Jakarta	10-11 Desember 2023

Berdasarkan jumlah kegiatan perjalanan dinas tersebut, maka biaya peralatan pendukung berupa sewa alat dokumentasi hanya terealisasi tujuh kegiatan dari 12 kegiatan. Atas tujuh kegiatan tersebut terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebanyak lima kegiatan senilai Rp35.375.000,00 (Rp7.075.000,00 x 5).

b) Kelebihan pembayaran paket pekerjaan pengadaan pengembangan *Platform Digital* Pendidikan pada Pusdatin minimal senilai Rp126.602.312,00

Paket Pekerjaan Pengadaan Pengembangan Platform Digital Pendidikan dilaksanakan oleh PT TI Tbk berdasarkan kontrak payung Nomor 0001/J1/KPA/2023 tanggal 2 Januari 2023. Setiap bulan Pusdatin membuat surat pesanan dengan merinci kebutuhan atas komponen biaya tenaga ahli, biaya pendukung lainnya (perangkat lunak), dan biaya lainnya. Pada akhir bulan dilakukan rekonsiliasi pemakaian antara Pusdatin dengan PT TI Tbk untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi digunakan sebagai dasar tagihan kepada Pusdatin. Berdasarkan pengujian dokumen kertas kerja rekon dengan dokumen pembayaran per bulan diketahui untuk bulan Januari s.d. November 2023 tidak terdapat perbedaan (sesuai).

Pada bulan Desember 2023 PPK mengajukan SPM penampungan pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) tanggal 19 Desember 2023, dengan nilai sesuai surat pesanan pekerjaan bulan Desember senilai Rp34.699.997.767,00. Pekerjaan telah selesai pada akhir tahun sebagaimana dituangkan dalam BAST Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor 6620/J1/PPK/2023 tanggal 31 Desember 2023. SPM RPATA telah dilakukan penihilan dan Pusdatin melakukan pembayaran sesuai tagihan yang disampaikan PT TI Tbk senilai Rp33.847.020.143,00 sesuai SPM Nomor 00009 A tanggal 8 Januari 2024.

Hasil pemeriksaan diketahui rekonsiliasi oleh Tim Verifikator Pengembangan Platform Digital dan PT TI Tbk atas tagihan bulan Desember 2023 dilaksanakan setelah tagihan dibayarkan yaitu pada tanggal 11 Januari 2024. Hasil rekonsiliasi diketahui bahwa nilai yang seharusnya dibayarkan senilai Rp33.720.417.831,00. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran kepada PT TI Tbk senilai Rp126.602.312,00 (Rp33.847.020.143,00 – Rp33.720.417.831,00). Kelebihan pembayaran tersebut telah disampaikan kepada PT TI Tbk dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pusdatin selaku Pihak I dan PT TI Tbk selaku Pihak II.

c) Kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya atas pekerjaan paket Profil Tim Gala Siswa Indonesia pada BPTI senilai Rp26.500.000,00

Pekerjaan paket *Profile* Tim Gala Siswa Indonesia (GSI) dalam rangka Penyusunan Laporan Ajang Bidang Olahraga tanggal 1 s.d. 4 Desember 2023, dilaksanakan oleh PT KIK. Bukti pertanggungjawaban berupa dokumen kuitansi nomor 132/ADM-KIK/KWT/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 senilai Rp49.950.000,00, dengan kegiatan pokok yang dilakukan yaitu honor *key person* sebanyak 8 orang yang terdiri dari Pemimpin Redaksi, Editor majalah, Editor Foto, Photografer, Asisten Fotografer, Penulis, Riset/Dokumentasi data dan *Layouter*/desain grafis. Lebih lanjut PPK menjelaskan bahwa *output* kegiatan adalah *softcopy* Buku Profil Peserta GSI Tahun 2023 untuk diarsipkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan melalui Berita Acara Wawancara (BAW) dengan perwakilan dari PT KIK yaitu Sdr BS diketahui bahwa pada pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan oleh tiga orang personil, dimana terdapat satu personil yang melaksanakan lebih dari satu pekerjaan. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa *photographer* dan asisten *photographer* tidak terealisasi karena terdapat kendala dalam proses dokumentasi. Selain itu, seluruh foto yang disusun pada *Profile* Tim GSI didapatkan penyedia dari panitia kegiatan bukan berdasarkan hasil pekerjaan penyedia sendiri. Berdasarkan uraian kondisi diatas, terdapat kelebihan belanja jasa lainnya senilai Rp26.500.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 97. Kelebihan Pembayaran Biaya Personil Pekerjaan Paket Profile Tim GSI

Key Person	RAB					Hasil Pemeriksaan	
	Jml personil	Satuan	Hari	Harga Satuan (Rp)	Nama Personil	Dapat Dibayar (Ya/Tidak)	Lebih bayar (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 2 x 5*
Pemimpin redaksi	1	orang	1	8.000.000,00	BS	Ya	
Editor majalah	1	orang	1	6.000.000,00	BS	Tidak	6.000.000,00

Key Person	RAB					Hasil Pemeriksaan	
	Jml personil	Satuan	Hari	Harga Satuan (Rp)	Nama Personil	Dapat Dibayar (Ya/Tidak)	Lebih bayar (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 2 x 5*
Editor Foto	1	orang	1	4.500.000,00	BS	Tidak	4.500.000,00
Photografer	1	orang	1	4.000.000,00	n/a	Tidak	4.000.000,00
Asisten Fotografer	1	orang	1	2.500.000,00	n/a	Tidak	2.500.000,00
Penulis	2	orang	1	3.500.000,00	Yn	Ya, 1 orang	3.500.000,00
Riset/Dokumentasi data	2	orang	1	3.000.000,00	BS	Tidak	6.000.000,00
Layouter / desain grafis	1	orang	1	7.000.000,00	Im	Ya	
Total							**26.500.000,00**

PPK menjelaskan bahwa *key person* yang ditugaskan oleh rekanan untuk melaksanakan pekerjaan Paket *Profile* Tim GSI adalah ranah internal rekanan. PPK tidak meminta identitas atau bukti keahlian personil karena tidak tahu informasi tersebut diperlukan dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.

d) Belanja layanan *Public Cloud Platform* Pendidikan Tahun 2023 tidak sesuai ketentuan

Tahun 2023 Pusdatin melaksanakan pekerjaan Pengadaan *Public Cloud Platform* Pendidikan. Paket Pekerjaan Pengadaan *Public Cloud Platform* Pendidikan dilaksanakan oleh PT DSJ berdasarkan kontrak payung Nomor 1109/J1/LK.00.00/PPK/2022 tanggal 1 April 2022. Terdapat dua kali addendum kontrak yaitu Nomor 0001/J1/LK.00.00/ADD/223 tanggal 2 Januari 2023 dan Nomor 4677/J1/PPK/2023 tanggal 1 Oktober 2023. Addendum kontrak kedua mengatur perubahan jumlah layanan dan harga satuan yang semula 93 SKU menjadi 54.431 SKU. Selain itu terdapat penambahan klausul kontrak payung mengenai kewajiban PPK membayar berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan pemakaian setiap bulan dan memeriksa besaran pemakaian *public cloud platform* pendidikan yang digunakan.

Hasil pemeriksaan pekerjaan sewa *public cloud* diketahui terdapat beberapa permasalahan yang diuraikan sebagai berikut.

(1) Kelebihan pembayaran senilai Rp3.408.237.716,88

Berdasarkan data volume penggunaan (*usage*) sewa *cloud* dan perhitungan bersama PT DSJ atas layanan GCP dan layanan Non GCP diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran sewa *cloud* karena selisih volume penggunaan senilai Rp3.408.237.716,88. Rincian kelebihan pembayaran perbulan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 98. Rincian Kelebihan Pembayaran Sewa Cloud Per Bulan

No	Bulan	Nilai yang Dibayarkan (Rp)	Nilai Perhitungan Bersama (Rp)	Tidak Memenuhi (Rp)	Tidak Ada Dalam Padanan Komponen Namun Terpakai (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e) – (f)
1	Januari	4.090.074.267,87	3.652.058.414,16	32.693.178,52	-	32.693.178,52
2	Februari	4.236.936.496,48	3.479.532.018,08	337.527.888,65	2.042.420,77	335.485.467,88
3	Maret	4.709.330.267,12	4.042.005.334,47	200.634.545,77	5.921.002,22	194.713.543,55

No	Bulan	Nilai yang Dibayarkan (Rp)	Nilai Perhitungan Bersama (Rp)	Tidak Memenuhi (Rp)	Tidak Ada Dalam Padanan Komponen Namun Terpakai (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e) – (f)
4	April	4.854.409.079,45	4.158.721.524,45	214.619.988,53	5.828.780,98	208.791.207,55
5	Mei	4.790.814.368,63	4.094.951.599,11	221.097.381,64	5.202.374,67	215.895.006,97
6	Juni	5.767.899.006,42	4.789.130.571,90	407.174.839,29	8.490.028,49	398.684.810,80
7	Juli	6.071.086.932,20	5.127.122.028,74	342.325.657,93	6.361.887,39	335.963.770,54
8	Agustus	6.329.667.553,99	5.273.869.113,09	428.534.088,70	64.645.842,41	363.888.246,29
9	September	6.629.194.782,28	5.542.955.011,47	429.292.540,13	75.498.238,56	353.794.301,57
10	Oktober	8.944.282.825,04	7.740.685.215,77	317.227.239,22	-	317.227.239,22
11	November	6.691.055.737,67	5.694.104.437,94	333.873.704,11	-	333.873.704,11
12	Desember	6.245.610.900,57	5.309.449.247,12	317.227.239,88	-	317.227.239,88
		69.360.362.217,72	**58.904.584.516,30**	**3.582.228.292,37**	**173.990.575,49**	**3.408.237.716,88**

Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran B.7.6.**

(2) Kelebihan pembayaran tagihan Desember senilai Rp445.444.837,00

Pada Desember 2023 PPK mengajukan SPM penampungan RPATA tanggal 19 Desember 2023, dengan nilai sesuai surat pesanan pekerjaan bulan Desember senilai Rp6.691.055.738,00. Pekerjaan telah selesai pada akhir tahun sebagaimana dituangkan dalam BAST Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor 6621/J1/PPK/2023 tanggal 31 Desember 2023. SPM RPATA telah dilakukan penihilan dan Pusdatin melakukan pembayaran sesuai BAST senilai Rp6.691.055.738,00. Hasil pemeriksaan diketahui BAST tidak sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pusdatin dengan PT DSJ yaitu senilai Rp6.245.610.901,00. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran kepada PT DSJ senilai Rp445.444.837,00 (Rp6.691.055.738,00 - Rp6.245.610.901,00).

e) Kelebihan pembayaran pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* Tahun 2023 pada Biro Perencanaan minimal senilai Rp235.991.000,00

Biro Perencanaan melaksanakan pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* senilai Rp785.991.000,00. Paket pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* terbagi kedalam delapan kegiatan yang dilaksanakan oleh tujuh penyedia dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 99. Daftar Pengembangan Aplikasi dan Kajian E-Planning Tahun 2023

No	Uraian	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nama Penyedia	Nilai (Rp)
1	Pengembangan Modul Pengendalian Pelaksanaan SBSN	1060/PBJ/ROREN/X/2023	17 Oktober 2023	PT PMK	98.679.000,00
2	Desain dan Pengembangan Dashboard Anggaran SBSN	1074/PBJ/ROREN/X/2023	17 Oktober 2023	PT SI	99.067.500,00
3	Pengembangan Modul Penyusunan Proposal Anggaran SBSN	1088/PBJ/ROREN/X/2023	17 Oktober 2023	PTJAS	98.956.500,00
4	Desain dan Pengembangan Dashboard Anggaran PHLN	1102/PBJ/ROREN/X/2023	17 Oktober 2023	CV PCU	97.347.000,00

No	Uraian	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nama Penyedia	Nilai (Rp)
5	Penyempurnaan Modul Evaluasi Usulan RKT-RENJA 2024	1116/PBJ/ROREN/X/2023	17 Oktober 2023	PT IRP	98.512.500,00
6	Penyempurnaan Modul Evaluasi Usulan RKA-KL 2024	1130/PBJ/ROREN/X/2023	17 Oktober 2023	CV PCU	97.569.000,00
7	Penyempurnaan Modul Aplikasi Penilaian DAK Fisik 2024	1144/PBJ/ROREN/X/2023	17 Oktober 2023	CV APP	97.791.000,00
8	Desain dan Pengembangan Dashboard DAK Fisik 2024	1160/PBJ/ROREN/X/2023	17 Oktober 2023	CV DNP	98.068.500,00
Jumlah					**785.991.000,00**

Pembayaran pekerjaan pengembangan aplikasi dan kajian *E-Planning* Tahun 2023 menggunakan mekanisme GUP Nihil. Pembayaran delapan paket pekerjaan kepada perusahaan dilakukan secara setor tunai oleh BPP dengan menggunakan jasa *office boy* atas nama AR senilai Rp785.991.000,00 berdasarkan bukti setor Bank Mandiri dan BNI pada tanggal 24 November 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha, PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Sdr. Jf (yang merupakan salah satu dari empat orang tim teknis non pegawai di Kemendikbudristek yang melaksanakan delapan paket pekerjaan tersebut) diketahui bahwa setelah tujuh penyedia menerima pembayaran setor tunai dari Bendahara, penyedia melakukan tarik tunai dan memberikan sejumlah uang yang telah dipotong *fee* kepada PPK. PPK kemudian melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. Jf. Pembayaran kepada Sdr. Jf dilakukan secara tunai dengan bukti tanda terima uang pada 30 November 2023 senilai Rp550.000.000,00. Tanda terima berupa selembar kertas tanpa nomor kuitansi, tanpa nama pihak yang menyerahkan, tidak ada materai dan hanya ditandatangani sepihak oleh Sdr. Jf. Jumlah uang tersebut kemudian diberikan kepada tiga orang yaitu Sdr. Rf senilai Rp120.000.000,00, Sdr. Jd senilai Rp60.000.000,00 dan Sdri. Mr senilai Rp60.000.000,00 dan sisanya senilai Rp310.000.000,00 menjadi bagian dari Sdr. Jf.

Lebih lanjut diketahui bahwa pengelola keuangan pada Biro Perencanaan menerima bagian imbalan dari selisih antara jumlah uang dikeluarkan dari Kas Negara dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada Sdr. Jf yaitu senilai Rp235.991.000,00 (Rp785.991.000,00 – Rp550.000.000,00).

2) Ditjen Diktiristek

Kelebihan pembayaran Belanja Jasa Profesi pada Ditdaya senilai Rp76.950.000,00

Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen Belanja Barang dan Jasa diketahui terdapat realisasi Belanja Jasa Konsultan Perorangan yang dilaksanakan selama 12 bulan senilai Rp324.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a) terdapat dua SK yang digunakan sebagai dasar pembayaran yaitu SK Nomor 1249/E4/DT.04.00/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan kontrak Jasa Konsultansi Nomor 04.1/E4.5/KU/04/2023 tanggal 4 April 2023;

b) jangka waktu kontrak Jasa Konsultansi adalah 4 April s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai kontrak senilai Rp243.000.000,00 untuk sembilan bulan atau senilai Rp27.000.000,00 per bulan;

c) sementara atas pembayaran jasa konsultansi pada bulan Januari s.d Maret 2023 dibayarkan berdasarkan SK Direktur Sumber Daya Nomor 1249/E4/DT.04.00/2023 tanggal 2 Januari 2022 senilai Rp27.000.000,00 per bulan.

d) jabatan tenaga ahli beserta besaran tarif honor tidak diatur dalam SBM TA 2023 yang diatur pada PMK Nomor 83/PMK/02/2022.

Hasil konfirmasi kepada PPK Sarana dan Prasarana Ditdaya diketahui bahwa terkait dasar pembayaran honor untuk bulan Januari s.d. Maret dengan menggunakan SK Direktur Sumber Daya, dikarenakan Direktur Sumber Daya selaku KPA menugaskan saudara Drs. MKP, M.M selaku konsultan perorangan untuk melakukan tugas - tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek khususnya PHLN sembari menunggu proses dan hasil seleksi konsultan. Atas honorarium bulan Januari – Maret 2023 tersebut tidak dapat dibayarkan karena tidak diatur dalam SBM Tahun 2023 dan dasar pembayarannya hanya berdasarkan SK Direktur Sumber Daya seluruhnya senilai Rp76.950.000,00 ((Rp27.000.000,00 - (5% x Rp27.000.000,00)) x 3 bulan).

c. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

Anggaran Belanja Barang Operasional Tahun 2023 senilai Rp1.801.517.417.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.749.020.727.912,00 (97,09%) dan Belanja Barang Non Operasional senilai Rp7.713.873.369.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.256.384.948.689,00 (94,07%). Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Belanja Operasional dan Non Operasional menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Kelebihan pembayaran belanja honorarium

Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban belanja honorarium menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp634.300.000,00 dengan rincian pada rincian sebagai berikut.

Tabel 100. Kelebihan Pembayaran Honorarium

No	Unit Eselon I	Satker	Kelebihan Bayar Nilai (Rp)	Uraian Kelebihan	Keterangan
1	Setjen	Biro Perencanaan	62.150.000,00	Pegawai menerima honorarium tim pelaksana kegiatan lebih dari dua tim yang diperkenankan	**Lampiran B.7.7**
		Pusdatin	444.090.000,00	SK tim kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan	**Lampiran B.7.8**
		BPTI	92.150.000,00	panitia pengadaan yang berperan sebagai pejabat pengadaan	**Lampiran B.7.9**
		Jumlah Setjen	**598.390.000,00**		
2	Itjen		**25.830.000,00**	pegawai menerima honorarium tim pelaksana kegiatan lebih dari dua tim yang diperkenankan	**Lampiran B.7.10**
3	Ditjen Diktiristek	UMRAH	**10.080.000,00**	honorarium Petugas Survei yang melebihi tarif pada SBM tahun 2023	**Lampiran B.7.11**
Jumlah			**634.300.000,00**		

2) Kelebihan pembayaran remunerasi pada UHO senilai Rp71.477.504,00

Hasil pengujian dokumen pembayaran remunerasi serta permintaan keterangan dengan pihak-pihak terkait pada UHO menunjukkan:

a) Pegawai purna tugas/pensiun masih diberikan remunerasi

Hasil penyandingan dokumen pembayaran remunerasi dengan SK Pensiun menunjukkan bahwa terdapat pembayaran remunerasi senilai Rp29.828.212,00 kepada lima orang pegawai/dosen yang telah memasuki masa purna tugas/pensiun. Atas hal tersebut Ketua Tim Remunerasi UHO mengakui bahwa setelah TMT pensiun pada bulan berikutnya dan seterusnya seharusnya sudah tidak diberikan remunerasi.

b) Pegawai yang melakukan cuti belum dilakukan pemotongan remunerasi

Hasil penyandingan dokumen pembayaran remunerasi dengan data absensi kehadiran menunjukkan bahwa terdapat pembayaran remunerasi senilai Rp41.649.292,00 kepada 43 dosen yang belum dilakukan pemotongan atas ketidakhadiran. Klarifikasi lebih lanjut kepada Ketua Tim Remunerasi menyatakan bahwa salah satu faktor pencairan remunerasi adalah kehadiran, sehingga atas ketidakhadiran pegawai dilakukan pemotongan nilai remunerasi.

3) Belanja barang berupa biaya penelitian pada Ditjen Diktiristek tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp43.160.957,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat biaya penelitian yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pada dua kegiatan penelitian senilai Rp43.160.957,00, dengan rincian sebagai berikut.

a) Penelitian berjudul Tingkat Kontaminasi Sampah Laut (*Marine Debris*) dan Dampaknya terhadap Sumber Daya Padang Lamun di Perairan Pulau Bintan dengan realisasi biaya penelitian senilai Rp89.800.000,00. Biaya penelitian yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp9.255.850,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Biaya peralatan dan konsumsi kegiatan pengumpulan data pelaksanaan FGD senilai Rp7.557.850,00; dan

(2) biaya konsumsi dalam rangka rapat penyusunan laporan dan luaran senilai Rp1.698.000,00.

b) Penelitian berjudul *Emerging Pollutants* (I.E. Antibiotics), *A Proposal For New Environmental Monitoring Parameters In Marine Environment* dengan realisasi biaya penelitian senilai Rp238.559.000,00. Biaya penelitian yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp33.905.107,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Biaya akomodasi dalam rangka kegiatan *Supporting International Seminar* (*principal investigator* ADS)-China senilai Rp7.905.107,00; dan

(2) biaya publikasi senilai Rp26.000.000,00 yang terdiri dari biaya publikasi buku ajar senilai Rp9.000.000,00 dan biaya *Publication Fee Manuscript* senilai Rp17.000.000,00. Penjelasan dari Ketua Tim Peneliti diketahui bahwa biaya publikasi tersebut diperuntukkan untuk pembayaran biaya publikasi artikel hasil

penelitian. Pembayaran atas publikasi tersebut masih menunggu tagihan dari perusahaan Hindawi sebagai *publisher* dan atas dana senilai Rp26.000.000,00 tersebut masih berada di Ketua Tim Penelitian.

4) Pertanggungjawaban atas Belanja Barang senilai Rp104.052.450,00 pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, Ditjen Kebudayaan tidak sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban realisasi belanja operasional dan non operasional dengan menggunakan mekanisme TUP menunjukkan permasalahan berikut.

a) Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang Operasional dan Barang Non Operasional senilai Rp89.971.450,00

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja barang senilai Rp228.687.750,00 pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, melalui pemeriksaan fisik dan permintaan keterangan kepada tim teknis yang melakukan pengadaan dan PPK kegiatan. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp89.971.450,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 101. Rincian Uji Petik Pertanggungjawaban atas Kuitansi pada BPK Wilayah XI

No	Uraian	Tanggal Kuitansi	Nilai Kuitansi	Nilai Bukti Pertanggung jawaban (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	Belanja gorden ruang rapat seperti perincian terlampir	12 Des 2023	16.178.250,00	11.500.000,00	4.678.250,00	Keterangan PPK kegiatan dan Catatan tagihan Penyedia Nilai yang dibayarkan senilai Rp11.500.000
2	Belanja belanja gorden ruang kepala, ruangan Kasubbag Umum, dan Ruang Layanan dan Laktasi	24 Mar 2023	13.542.000,00	10.593.000,00	2.949.000,00	Keterangan PPK kegiatan dan Catatan tagihan Penyedia Nilai yang dibayarkan senilai Rp10.593.000
3	Belanja Bahan Penataan Lingkungan di Pengelolaan Informasi Majapahit berupa 5 buah cangkul dll. seperti perincian terlampir	10 Nov 2023	49.212.000,00	37.052.000,00	12.160.000,00	Hasil Pemeriksaan Fisik terdapat kekurangan Volume pada Item Spandex, Pasir Urug, Bata Merah, Semen PC
4	Belanja Bahan Penataan Lingkungan di Pengelolaan Informasi Majapahit berupa 536 Tanaman Hias seperti perincian terlampir	10 Nov 2023	49.765.500,00	27.381.300,00	22.384.200,00	Hasil Pemeriksaan Fisik terdapat kekurangan Volume pada Item Pohon Pengarah, Cetak Stiker, Pohon Peneduh, dan Tanaman Hias
5	Belanja Barang Pemasangan Atap Gapura Bajangratu Sisi Timur	6 Des 2023	49.995.000,00	26.095.000 ,00	23.900.000,00	Hasil Pemeriksaan Fisik terdapat kekurangan Volume pada beberapa item RAB
6	Belanja Barang Pemasangan Atap Gapura Bajangratu Sisi Barat	6 Des 2023	49.995.000,00	26.095.000,00	23.900.000,00	Hasil Pemeriksaan Fisik terdapat kekurangan Volume pada beberapa item RAB
Jumlah			**228.687.750,00**	**138.716.300,00**	**89.971.450,00**	

b) Bukti pertanggungjawaban pembayaran atas Belanja Barang senilai Rp14.081.000,00 tidak memadai

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat bukti pertanggungjawaban belanja barang yang hanya dilengkapi lampiran nota pembelian kosong. Hasil klarifikasi kepada pegawai yang melakukan pembelian diketahui bahwa informasi atas pembelian telah diberikan oleh pegawai yang melakukan pembelian kepada bendahara pengeluaran, namun menurut bendahara pengeluaran informasi tersebut hanya secara lisan dan tidak ada dokumen pendukungnya. Dengan demikian maka atas kuitansi pertanggungjawaban senilai Rp14.081.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 102. Rincian Belanja Barang yang Tidak Dilampiri Bukti Pertanggungjawban Memadai

No	MAK	Tanggal Kuitansi Pembayaran	Nilai (Rp)
1	Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Jamuan Tamu Kunjungan Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Situbondo tanggal 7 Agustus 2023 (Pembelian Makan dan Snack)	12 Des 2023	1.340.000,00
2	Belanja Sewa Kesenian Kegiatan Pembukaan Pameran Hari Guru Nasional (HGN) di Malang berupa Tarian Gading Alit Malang (5 orang penari, Rias, Kostum, Transpor, Konsumsi)	25 Nov 2023	3.500.000,00
3	Belanja Biaya Keperluan Sehari-hari perkantoran berupa pembelian aqua botol dan aqua galon	12 Des 2023	2.876.000,00
4	Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Magang Bersertifikat Kebudayaan tanggal 4 dan 5 Desember 2023 untuk 35 orang selama 2 hari berupa pembelian makan dan snack	5 Des 2023	4.690.000,00
5	Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Monitoring Penghentian Linggan di Sektor XIV Kumitir tanggal 2 Desember 2023	12 Des 2023	1.675.000,00
Jumlah			**14.081.000,00**

Berikut hasil konfirmasi dan permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran dan pegawai yang melakukan belanja sebagai berikut.

(1) Dasar pembuatan kuitansi atas belanja konsumsi untuk kegiatan jamuan tamu kunjungan koordinasi dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo adalah daftar presensi dari kegiatan tersebut, bukan berdasarkan nota pembelian yang dikeluarkan dari toko yang dijadikan lampiran oleh PIC kegiatan. Penghitungan nilai berdasarkan informasi lisan dari PIC.

(2) Dasar pembuatan kuitansi atas belanja sewa kesenian kegiatan pembukaan pameran HGN pada tanggal 25 November 2023 adalah penawaran *pricelist* oleh penyedia dan bukan atas nota toko yang diterima.

(3) Dasar pembuatan kuitansi atas belanja biaya keperluan sehari-hari perkantoran pembelian air mineral botol dan air mineral galon tanggal 12 Desember 2023 adalah rekapan dari pembelian aqua yang disampaikan oleh sekretariat dan tidak berdasarkan nota yang terlampir.

(4) Dasar pembuatan kuitansi atas belanja konsumsi kegiatan rapat monitoring dan evaluasi Program Magang Bersertifikat Kebudayaan tanggal 4 dan 5 Desember 2023 untuk 35 orang selama dua hari berupa pembelian makan dan *snack* adalah presensi dari kegiatan tersebut dan bukan berdasarkan nota yang dilampirkan oleh penanggung jawab kegiatan dan penghitungan nilai berdasarkan keterangan lisan dari penanggung jawab.

(5) Dasar pembuatan kuitansi atas belanja konsumsi kegiatan rapat koordinasi penghentian Linggan di sektor XIV Kumitir tanggal 2 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 adalah presensi dari kegiatan tersebut bukan berdasarkan nota yang dilampirkan oleh penanggung jawab kegiatan dan penghitungan nilai berdasarkan keterangan lisan dari penanggung jawab.

d. Pertanggungjawaban belanja atas penyelenggaraan e*vent* yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tidak sesuai ketentuan senilai Rp990.133.915,00

1) Pertanggungjawbaan pelaksanaan OPSI jenjang SMP dan SMA Tingkat Nasional Tahun 2023 pada Setjen tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran minimal senilai Rp906.865.672,00

Pada Tahun 2023 BPTI melaksanakan kegiatan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMP dan SMA Tingkat Nasional TA 2023 dengan realisasi Rp9.668.464.170,00. Untuk mendukung kelancaran acara tersebut, BPTI melakukan sejumlah perikatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pihak ketiga yang terlibat dalam Kegiatan OPSI Jenjang SMP dan SMA TK Nasional TA 2023. Pengadaan dilakukan melalui e-katalog dan penunjukan langsung.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan ditemukan beberapa permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

a) Kelebihan pembayaran atas jasa *Event Organizer* senilai Rp382.671.000,00

Jasa *Event Organizer* pada kegiatan OPSI SMP dan SMA Tingkat Nasional Tahun 2023 dilaksanakan oleh PT BMS. Penyedia telah melakukan survei awal untuk menyusun detail paket pada tanggal 14 Oktober 2023. Awalnya RAB acara dipersiapkan untuk kebutuhan *outdoor*. Namun karena terdapat kendala, acara dipindahkan ke Untar. Berdasarkan analisis, perpindahan lokasi acara menyebabkan perbedaan kebutuhan antara kebutuhan sebenarnya, dibandingkan dengan item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak, antara lain kebutuhan genset, AC, *misty fan*, ukuran panel *booth* pameran, panggung, tipe LED, dan kain hitam sebagai *backdrop* panggung. Atas perubahan kebutuhan ini, PPK tidak melakukan addendum kontrak.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak, RAB dan dokumentasi kegiatan serta konfirmasi dengan pihak rekanan menunjukkan terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan seluruhnya senilai Rp382.671.600,00 dari tiga kontrak pekerjaan sesuai rincian dalam tabel berikut dan perhitungan pada **Lampiran B.7.12**.

Tabel 103. Kelebihan Pembayaran atas Jasa Event Organizer kegiatan OPSI SMP dan SMA Tingkat Nasional TA 2023

No	Uraian Pekerjaan	No & tgl Surat Pesanan (SP)	Nilai SPK (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
1	Pengadaan Belanja Jasa	20513/BPTI.PPK-01/EP/XI/SP/2023 tanggal 03 November 2023	971.472.000,00	186.671.600,00

No	Uraian Pekerjaan	No & tgl Surat Pesanan (SP)	Nilai SPK (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
2	Pengadaan Belanja sewa	20511/BPTI.PPK-01/EP/XI/SP/2023 tanggal 03 November 2023	491.397.000,00	174.625.000,00
3	Pengadaan Belanja bahan	20509/BPTI.PPK-01/EP/XI/SP/2023 tanggal 03 November 2023	216.853.950,00	21.375.000,00
Jumlah			**1.679.722.950**	**382.671.600,00**

Hasil wawancara dengan PPK, SDM yang tersedia hanya fokus pada ajang lomba sehingga perubahan yang terjadi di lapangan tidak terlaporkan dengan baik dan menimbulkan adanya selisih antara barang yang dipesan dengan realisasi yang terpasang. PPK tidak melakukan verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan rekanan, karena berasumsi KAK akan sesuai dengan realisasi yang dikerjakan pihak ketiga. Atas kekurangan realisasi pekerjaan tersebut PPK BPTI akan meminta penyedia/rekanan mengembalikan ke Kas Negara.

b) Kelebihan pembayaran sewa tenda senilai Rp6.480.000,00

Pekerjaan sewa tenda dalam rangka pelaksanaan OPSI SMP dan SMA Tingkat Nasional dilaksanakan oleh PT DCI telah dibayar melalui Kuitansi Nomor 88/DUCIT-KWT/XI/2023 senilai Rp48.751.200,00 tanggal 11 November 2023. Melalui hasil pemeriksaan diketahui volume tenda terpasang sebanyak 96 unit. Sedangkan dalam RAB sebanyak 150 tenda sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 54 tenda. Harga satuan tenda senilai Rp120.000,00, sehingga kelebihan pembayaran senilai senilai Rp6.480.000,00 (Rp120.000,00 x 54).

c) Duplikasi atas pekerjaan produksi *Mini Stage* senilai Rp49.950.000,00

Pekerjaan produksi *Mini Stage* dalam rangka pelaksanaan OPSI SMP dan SMA Tingkat Nasional dilaksanakan oleh PT. MANC dan telah dibayar melalui Kuitansi Nomor 22/MAN-KWT/XI/2023 senilai Rp49.950.000,00 tanggal 11 November 2023. Melalui hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh item pekerjaan tumpang tindih dengan kontrak yang dilaksanakan oleh rekanan lain (pekerjaan *mini stage*, dengan rekanan PT BMS dengan Surat Pesanan Nomor SP 20513/BPTI.PPK-01/EP/XI/SP/2023) sehingga terdapat duplikasi item pekerjaan dan pekerjaan senilai Rp49.950.000,00 tidak sah untuk dibayarkan.

d) Pertanggungjawaban percetakan sertifikat tidak valid senilai Rp15.133.672,00

Pekerjaan percetakan sertifikat dalam rangka pelaksanaan OPSI SMP dan SMA Tingkat Nasional dipertanggungjawabkan dalam bentuk nota kuitansi pembuatan 531 sertifikat oleh rekanan CV KL dengan total harga tertera pada kuitansi senilai Rp18.018.018,00, dengan harga satuan yang tertera senilai Rp33.932,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sertifikat cetak hanya diberikan kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang peraih medali sebanyak 85 peserta, sedangkan peserta lainnya mendapatkan e-sertifikat sehingga terdapat selisih biaya cetak senilai Rp15.133.672,00 ((531-85) lembar x Rp33.932,00).

e) Duplikasi pengadaan buket bunga senilai Rp2.225.000,00

Pekerjaan buket bunga pelaksanaan OPSI SMP dan SMA Tingkat Nasional dipertanggungjawabkan dalam bentuk nota kuitansi pembelian dua buah buket bunga dengan *stand* kaki besi dengan harga Rp2.225.000,00 oleh rekanan CV DI. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan buket bunga tumpang tindih dengan

pekerjaan pengadaan belanja sewa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan OPSI Nasional Nomor SP 20511/BPTI.PPK-01/EP/XI/SP/2023 tanggal 03 November 2023 dengan rekanan PT. BMS, sehingga terdapat duplikasi item pekerjaan seluruhnya senilai Rp2.225.000,00 dan tidak sah untuk dibayarkan.

f) Pembelian batik berindikasi tidak sesuai dengan senyatanya senilai Rp35.000.000,00

Pembelian batik lengan panjang untuk undangan dipertanggungjawabkan dalam bentuk nota kuitansi pembelian hem lengan panjang sebanyak 100 unit dengan harga satuan Rp350.000,00 per buah atau seluruhnya senilai Rp35.000.000,00 dengan bukti berbentuk *invoice* nomor 108/RBD-MLW/JKT/XI/2023 dari PT. BDHS tanggal 1 November 2023.

Hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa jumlah undangan yang diberikan batik sejumlah 10 orang. Hal ini dibenarkan oleh PPK, bahwa menurut keterangan PPK, undangan yang difasilitasi untuk mendapatkan batik sebanyak 10 orang. Kuitansi dibuat oleh petugas keuangan dan terdapat salah ketik pada bagian jumlah tertulis sebanyak 100 buah seharusnya 10 buah sesuai jumlah undangan. Namun berdasarkan hasil konfirmasi BPK kepada sejumlah nama dalam daftar undangan, diperoleh informasi bahwa para undangan tersebut tidak mendapatkan batik saat hadir sebagai tamu undangan dalam acara Kegiatan OPSI Jenjang SMP dan SMA Tingkat Nasional TA 2023.

Pemeriksaan lebih lanjut melalui konfirmasi ke penyedia batik tersebut dengan alamat sesuai nota, diketahui bahwa pihak toko tidak mengakui adanya transaksi tersebut. *Invoice* nomor 108 yang tertera pada kuitansi diterbitkan toko bukan untuk BPTI namun untuk instansi lain pada bulan Juni 2023. Selain itu, kertas dengan kop surat pembelian tersebut berbeda dengan kop surat resmi milik toko dan tanda tangan penjual berindikasi juga dipalsukan. Dengan demikian, atas kondisi tersebut terdapat pembelian barang yang berindikasi tidak sesuai dengan senyatanya senilai Rp35.000.000,00 (100 buah x Rp350.000,00).

g) Pembelian paket obat-obatan tidak sesuai ketentuan senilai Rp119.310.000,00

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban atas empat paket belanja bahan seluruhnya senilai Rp119.310.000,00 yang terdiri dari satu paket obat-obatan untuk satu kegiatan serta tiga paket kesehatan yang direncanakan untuk peserta, pendamping, panitia, tim juri, dan LO sebagai berikut.

(1) Dua buah nota paket obat-obatan dengan nota Toko Unimed Pasar Pramuka, masing-masing senilai Rp49.400.000,00 dan Rp30.000.000,00. Kedua nota tersebut tidak memuat keterangan tanggal pembelian dan tidak dibubuhkan informasi identitas pihak pembeli. Berdasarkan hasil konfirmasi ke toko tersebut, pihak toko tidak mengakui adanya transaksi tersebut. Selain itu, Toko Unimed merupakan toko yang menjual alat kesehatan dan bukan toko yang menjual obat-obatan.

(2) Nota manual tulisan tangan berisi pembelian obat-obatan dan alat Kesehatan dengan nota PT NN senilai Rp22.100.000,00. Nota tidak dibubuhi materai dan informasi pihak pembeli. Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan Tim BPK ke PT NN sesuai nota tersebut, PT NN tidak menjual item yang tertera pada nota tersebut.

(3) Realisasi belanja bahan paket kesehatan senilai Rp17.810.000,00 yang dipertanggungjawabkan pembayaran diterima oleh PT FM. Hingga pemeriksaan selesai pihak BPP tidak dapat menunjukkan bukti pembelian paket kesehatan tersebut.

Berdasarkan uraian atas kondisi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran tiga paket obat-obatan senilai Rp101.500.000,00 (Rp49.400.000,00 + Rp30.000.000,00 + Rp22.100.000,00) dan pertanggungjawaban belanja paket kesehatan senilai Rp17.810.000,00 tidak sah dibayarkan.

h) Belanja jasa profesi tidak sesuai ketentuan senilai Rp120.080.000,00

(1) Pembayaran honor dilakukan kepada Tim Juri, Tim Kesehatan, Tim IT, Tim Publikasi dan Narasumber Pemateri. Hasil konfirmasi kepada tim media, terdapat perbedaan nominal honor yang diterima dengan nilai yang dipertanggungjawabkan dengan selisih senilai Rp25.650.000,00 dengan rincian perhitungan dalam **Lampiran B.7.13**. Menurut keterangan PPK dan BPP, bahwa uang hasil pemotongan honor pemotongan dipakai untuk keperluan operasional, antara lain konsumsi, membayar tenaga kebersihan dan membayar Patwal. Dari hasil penelusuran anggaran belanja kegiatan, atas kegiatan yang dijelaskan PPK dan BPP sudah tersedia anggaran untuk keperluan seperti yang disampaikan oleh PPK dan BPP sehingga alasan penggunaan uang pemotongan honor tersebut tidak tepat.

(2) Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa selain honor Tim Media, dilakukan pembayaran honor jasa profesi kepada Tim IT (empat orang) dan Tim Publikasi (empat orang). Honor tersebut diberikan dengan tarif narasumber senilai Rp900.000/jam x 3 jam x 4 hari = Rp10.800.000,00/orang. Hasil penelusuran belanja pada Satker BPTI diketahui bahwa Tim IT tersebut telah memiliki kontrak kerja dengan pihak BPTI melalui Paket Pengadaan *Maintenance* dan Pengembangan Aplikasi OPSI senilai Rp149.850.000,00. Selain itu, terdapat realisasi belanja Produksi Konten Publikasi OPSI (PT ABC) senilai Rp32.000.00,00. Pembayaran atas kompentensi jasa profesi tidak tepat dilakukan, dan seharusnya personil tersebut masuk ke dalam susunan kepanitiaan dengan honor tim panitia kegiatan. Dengan demikian, atas permasalahan tersebut terdapat kelebihan pembayaran belanja jasa profesi senilai Rp79.040.000,00 terdiri dari pembayaran Tim IT senilai Rp39.520.000,00 dan pembayaran Tim Publikasi senilai Rp39.520.000,00 dengan rincian perhitungan dalam **Lampiran B.7.13**.

(3) Pembayaran honor jasa profesi juga diberikan kepada Narasumber Pemateri. Melalui hasil pemeriksaan laporan kegiatan, foto, dan video dokumentasi, dari 14 orang narasumber pemateri yang dibayar, terdapat enam orang yang tidak berhak dibayar karena tidak melaksanakan tugas sebagai narasumber. Atas permasalahan tersebut terdapat kelebihan pembayaran narasumber seluruhnya senilai Rp15.390.000,00 dengan rincian perhitungan pada **Lampiran B.7.13**.

i) Belanja jasa sewa bus tidak sesuai ketentuan senilai Rp176.016.000,00

Pengadaan jasa sewa kendaraan pendukung kegiatan OPSI Tingkat Nasional dilaksanakan oleh PT FSM melalui Surat Pesanan *E-Purchasing* Nomor 20507/BPTI.PPK-01/EP/XI/SP/2023 tanggal 03 November 2023 senilai Rp271.390.560,00. Hasil pemeriksaan dokumen Surat Pesanan, RAB, dan susunan

acara kegiatan OPSI Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 06 s.d. 11 November 2023 menunjukkan bahwa pekerjaan jasa sewa bus dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp176.016.000,00 dengan uraian sebagai berikut.

(1) Tidak terdapat kertas kerja penyusunan HPS

Hasil wawancara dan analisis atas bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa terdapat dokumen HPS yang dilakukan PPK, namun kertas kerja atas proses penyusunannya tidak didokumentasikan serta tidak dapat ditunjukkan kepada BPK, sehingga tidak dapat dijadikan sarana untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

(2) Pekerjaan utama dilaksanakan oleh pihak di luar kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp176.016.000,00

Pemilihan PT FSM dilakukan melalui metode *e-purchasing* dari portal e-katalog LKPP. Menurut laman e-katalog, PT FMS memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kode N77100 yaitu aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya. Sesuai klasifikasi tersebut maka semestinya KBLI N77100 tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai penyedia jasa sewa bus Kegiatan OPSI, karena bus dibutuhkan lengkap dengan operatornya.

Dalam dokumen Surat Pesanan dan rincian paket sewa bis, penyewaan bus terdiri dari bis besar sebanyak 11 unit dan bis medium enam unit selama empat hari (tanggal 6, 7, 9, dan 10 November 2023) dan tujuh unit Avanza selama enam hari (tanggal 6 s/d 11 November 2023). Menurut bukti dokumentasi, armada yang didatangkan adalah bus berukuran medium, dan kendaraan minibus (Toyota Hiace dan Elf).

Selain itu, terindikasi terdapat ketidaksesuaian jumlah hari pemakaian bus. Menurut dokumentasi kegiatan, pemakaian armada dari belanja sewa kendaraan hanya terealisasi selama dua hari pelaksanaan kegiatan yaitu pada acara persiapan tanggal 06 November 2023 dan acara pembukaan OPSI tanggal 07 November 2023. Pada kedua acara tersebut, peserta kegiatan yaitu para kontestan OPSI, Tim Juri dan Tim Panitia kegiatan menggunakan armada kendaraan bis sebagai alat transportasi PP dari Hotel Pen ke Untar.

Menurut keterangan PPK, semestinya dalam rangkaian Kegiatan OPSI terdapat agenda ekskursi pada hari ketiga dan keempat. Namun karena jadwal acara yang padat, kegiatan ekskursi dibatalkan. Menurut dokumen Buku Panduan yang dicetak dan merupakan buku petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dibagikan pada peserta, pada bagian jadwal kegiatan tidak tercantum agenda ekskursi. Agenda acara tanggal 8 s.d. 11 November 2023 seluruhnya berlokasi di Hotel Pen. Dengan tercetaknya jadwal dalam buku panduan tersebut, pembatalan acara yang disampaikan oleh PPK tidak terjadi secara mendadak, namun agenda acara telah disusun dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan uraian kondisi diatas, terdapat kelebihan pembayaran sewa kendaraan atas ketidaksesuaian spesifikasi dan kelebihan pembayaran sewa kendaraan bus

atas selisih hari penggunaan senilai Rp176.016.000,00. Perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran B.7.14.**

2) Terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan pengeluaran kegiatan dan nilai belanja kegiatan *SangiRun Night Trail* yang telah dipertanggungjawabkan senilai Rp83.268.243,00 pada Direktorat PPK Ditjen Kebudayaan

Pada Tahun 2023 Ditjen Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan *SangiRun Night Trail* dengan realisasi senilai Rp1.953.674.787,00. Hasil reviu menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut berupa nota pembelian yang berasal dari toko/penyedia dan/atau catatan pembayaran yang dilakukan oleh tim pengelola keuangan.

Nilai pembayaran kepada penyedia berdasarkan SPTJB penihilan adalah nilai bersih setelah dilakukan pemotongan atas PPN dan pajak penghasilan atas nilai pertanggungjawaban pengeluaran yang dilakukan. Hasil pembandingan atas pertanggungjawaban tersebut dengan pembayaran riil kepada penyedia menunjukkan informasi sebagai berikut.

a) Terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp31.407.543,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 104. Kelebihan Pembayaran *Sangirun Night Trail* Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penyedia	Nilai SPTJB (termasuk PPN dan PPh)	Nilai SPTJB Netto	Pembayaran Rill kepada Penyedia	Selisih
1	Pembayaran Catering	Dl	162.950.000,00	141.870.500,00	147.415.380,00	5.544.880,00
2	Pembayaran Sewa Mobil	FRC	5.000.000,00	4.350.000,00	5.000.000,00	650.000,00
3	Pembelian ATK	Panitia	15.364.787,00	13.438.837,00	17.687.500,00	4.248.663,00
4	Pembelian souvenir	AK	15.364.787,00	20.445.000,00	23.500.000,00	3.055.000,00
5	Pembayaran kaos peserta	Adb	3.000.000,00	2.610.000,00	2.700.000,00	90.000,00
6	Pembayaran jasa konsultan	LK	137.000.000,00	119.190.000,00	137.000.000,00	17.810.000,00
7	Pembayaran konsumsi	KE	3.300.000,00	2.871.000,00	2.880.000,00	9.000,00
Total			**341.979.574,00**	**304.775.337,00**	**336.182.880,00**	**31.407.543,00**

Nilai pembayaran kepada Penyedia berdasarkan SPTJB diperoleh dari Nilai Rekap Belanja sesuai SPTJB (Bruto) dikurangi nilai perhitungan PPN dan Pajak Penghasilan yang telah dihitung dan dibayar berdasarkan SPTJB. Sedangkan pembayaran riil kepada penyedia berdasarkan nota asli dan catatan pengelolaan keuangan. Selisih atas pehitungan tersebut senilai Rp31.407.543,00 merupakan kelebihan pembayaran kepada penyedia.

b) Terdapat pembayaran kepada pihak ketiga yang lebih kecil dari dokumen pertanggungjawabnnya senilai Rp51.860.700,00

Nilai pembayaran kepada Penyedia berdasarkan SPTJB diperoleh dari Nilai Rekap Belanja sesuai SPTJB (Bruto) dikurangi nilai perhitungan PPN dan Pajak

Penghasilan yang telah dihitung dan dibayar berdasarkan SPTJB. Selisih pembayaran senilai Rp51.860.700,00 merupakan nilai uang yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari pembayaran sebenarnya yang dilakukan kepada pihak ketiga.

Tabel 105. Rincian Pembayaran kepada Penyedia Lebih Kecil dari Dokumen Pertanggungjawaban

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai SPTJB (termasuk PPN dan PPh)	Nilai SPTJB Netto	Pembayaran Rill kepada Penyedia	Selisih
1	Pembayaran kepada CV.Rf	82.650.000,00	71.905.500,00	55.750.000,00	16.155.500,00
2	Pembayaran kepada Omah Gedang	12.000.000,00	10.440.000,00	10.000.000,00	440.000,00
3	Pembelian oleh MCB melalui : KS, Toko KY, APS	8.250.000,00	7.177.500,00	5.712.000,00	1.465.500,00
4	Pemberian Uang kepada Desa Peserta Kegiatan	133.750.000,00	116.362.500,00	110.395.500,00	5.967.000,00
5	Pembayaran kepada Unicone	1.054.460.000,00	910.420.200,00	899.219.000,00	11.201.200,00
6	Pembayaran kepada SB	72.450.000,00	63.031.500,00	49.975.000,00	13.056.500,00
7	Pembayaran kepada Pemadam Kebakaran	17.500.000,00	15.575.000,00	12.000.000,00	3.575.000,00
Total		**1.381.060.000,00**	**1.194.912.200,00**	**1.143.051.500,00**	**51.860.700,00**

Atas uang senilai Rp51.860.700,00 tersebut, seharusnya masih di dalam pengelolaan Direktorat PPK.

e. Kekurangan pemotongan/pemungutan PPN dan PPh atas Belanja Barang dan Jasa Kemendikbudristek senilai Rp1.697.130.184,20

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja barang yaitu melalui analisis kontrak, SPM dan SP2D, serta konfirmasi kepada PPK masing-masing belanja, dan Bendahara Pengeluaran satker, diketahui bahwa permasalahan sebagai berikut.

1) Kekurangan pemotongan/pemungutan pajak pada 34 satker dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 106. Kekurangan Pemotongan Pajak

No	Unit Eselon I	No	Satker	Kegiatan	Jumlah Kontrak /SPK	Pajak Belum Dipungut		Keterangan
						Jenis	Nilai (Rp)	
1	Setjen	1	Biro Perencanaan	Paket Meeting	5	PPh Ps 23	35.382.272,38	Lampiran B.7.15
		2	BKHM	Survey	1	PPN	118.291.159,82	
		3	Biro Umum dan PBJ	Jasa Konsultansi	1	PPN	246.318.457,30	
		4	BPTI	Paket Meeting	10	PPh Ps 23	27.561.818,18	
				Belanja Sewa	3	PPh Ps 23	107.007.009,01	
				Belanja Sewa	3	PPh Ps 23	19.455.819,82	
				Belanja Bahan	195	PPh Ps 22	75.964.410,63	
				Paket Meeting	18	PPh Ps 23	15.477.272,73	
				Belanja Bahan	112	PPN	346.162.086,94	
				Belanja Bahan	112	PPh Ps 23	62.938.561,26	
	Jumlah						**1.054.558.868,07**	
2	Itjen	1	Bagian PLP	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	5.270.400,00	Lampiran B.7.16
		2	Inspektorat II	Paket Meeting	2	PPh Ps 23	1.374.000,00	
	Jumlah						**6.644.400,00**	

No	Unit Eselon I	No	Satker	Kegiatan	Jumlah Kontrak /SPK	Pajak Belum Dipungut		Keterangan
						Jenis	Nilai (Rp)	
2	Ditjen PDM	5	Setditjen PDM	Paket Meeting	5	PPh Ps 23	15.199.090,91	Lampiran B.7.17
		6	Direktorat SMP	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	2.901.818,18	
		7	Direktorat SMA	Paket Meeting	16	PPh Ps 23	69.704.545,45	
		8	BBPMP Prov.Jateng	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	6.015.454,55	
		9	BBPMP Prov.Jatim	Paket Meeting	3	PPh Ps 23	8.803.636,36	
		10	BBPMP Prov. Sulsel	Paket Meeting	12	PPh Ps 23	29.669.090,91	
		11	BPMP Prov.Sumbar	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	1.341.818,18	
		12	BPMP Prov.Lampung	Paket Meeting	6	PPh Ps 23	12.768.000,00	
		13	BPMP Prov.Kep. Riau	Paket Meeting	3	PPh Ps 23	6.628.254,55	
		14	BPMP Prov.Sulut	Paket Meeting	3	PPh Ps 23	9.312.727,27	
		15	BPMP Prov.Sulbar	Paket Meeting	3	PPh Ps 23	3.763.636,36	
	Jumlah						**166.108.072,72**	
3	BPP Bahasa	16	BB Prov. Bali	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	763.636,36	Lampiran B.7.18
		17	BB Prov. DI Yogyakarta	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	276.181,82	
		18	BB Prov. Jawa Timur	Paket Meeting	4	PPh Ps 23	1.673.181,82	
		19	BB Prov. Papua	Paket Meeting	4	PPh Ps 23	2.933.636,36	
		20	BB Prov. Sulteng	Paket Meeting	3	PPh Ps 23	2.033.454,55	
		21	KB Prov. Bengkulu	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	785.454,55	
		22	BB Prov. Sulut	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	379.181,82	
		23	KB Prov. Gorontalo	Paket Meeting	24	PPh Ps 23	7.214.000,00	
		24	KB Prov. Maluku	Paket Meeting	5	PPh Ps 23	3.691.490,91	
	Jumlah						**19.750.218,19**	
4	Ditjen GTK	25	Direktorat KSPSTK	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	8.727.272,73	Lampiran B.7.19
		26	BBGP Prov. Jawa Barat	Paket Meeting	6	PPh Ps 23	26.689.018,17	
		27	BBGP Prov. DI Yogyakarta	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	1.960.000,00	
		28	BGP Prov. Banten	Paket Meeting	1	PPh Ps 23	4.644.000,00	
	Jumlah						**42.020.290,90**	
5	Ditjen Diktiristek	29	Setditjen Diktiristek	Paket Meeting	52	PPh Ps 23	139.759.530,91	Lampiran B.7.20
		30	Universitas Tanjungpura	Belanja Jasa	12	PPh Ps 23	97.297.117,12	
		31	Universitas HaluOleo	Langganan E-Journal	1	PPh Ps 23	21.600.000,00	
				Pekerjaan E-Book	1	PPh Ps 23	3.509.009,01	
	Jumlah						**262.165.657,04**	
6	Ditjen Diksi	32	Politeknik Negeri Banjarmasin	Paket Meeting	2	PPh Ps 23	535.454,55	Lampiran B.7.21
		33	Politeknik Negeri Indramayu	Paket Meeting	2	PPh Ps 23	2.327.272,73	
		34	Politeknik Negeri Kupang	Paket Meeting	7	PPh Ps 23	4.920.000,00	
	Jumlah						**7.782.727,28**	
	Total						**1.559.030.234,200,20**	

Terkait pemotongan PPh Pasal 23 atas kegiatan paket *meeting* mengacu pada ketentuan SE Sekjen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas di Kemendikbudristek, yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2023. Hal ini menyebabkan pembayaran kegiatan paket *meeting* yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d Mei 2023 yang menggunakan mekanisme LS belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

2) Kelebihan pembayaran atas komponen PPN pada Pekerjaan Langganan *E-Journal* dan *E-Book* di Universitas Halu Oleo senilai Rp138.099.549,55

Dalam RAB pekerjaan Langganan *E-Journal* menetapkan bahwa nilai PPN untuk pekerjaan *E-Journal* senilai Rp118.800.000,00 ((Rp1.198.800.000,00 x 100/111) x

11%) dan pekerjaan *E-Book* senilai Rp19.299.549,55 ((Rp194.750.000,00 x 100/111) x 11%).

Bendahara Pengeluaran/BPP telah membayarkan kontrak melalui transfer ke rekening penyedia. Pembayaran pekerjaan Langganan *E-Journal* telah dibayar lunas melalui penerbitan SPM nomor 02070T dan SP2D nomor 230601302015872 tanggal 28 November 2023, sementara pekerjaan Langganan *E-Book* telah dibayar lunas melalui penerbitan SPM nomor 02291T dan SP2D nomor 230601302017890 tanggal 12 Desember 2023. Seluruh dokumen pembayaran dimaksud menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran dan BPP tidak melakukan pemotongan PPN atas kedua pekerjaan tersebut sebagaimana tertera pada kontrak/kesepakatan.

Atas hal dimaksud, Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa tidak dilakukannya pemotongan PPN tersebut berpedoman pada PMK Nomor 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan dimaksud menjelaskan bahwa buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta Buku umum yang mengandung unsur pendidikan, dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Hasil permintaan keterangan lebih lanjut kepada PPK menjelaskan bahwa adanya komponen PPN dalam kontrak dilakukan karena ketidakpahaman PPK dalam menyusun kontrak yang terdiri dari barang/jasa yang dibebaskan atau bukan merupakan objek PPN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas komponen PPN yang sudah tertera pada kontrak senilai Rp138.099.549,55 (Rp118.800.000,00 + Rp19.299.549,55).

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan senilai 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

b. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018

   1) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

   2) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.

3) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

   a) pelaksanaan kontrak;

   b) kualitas barang/jasa;

   c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

   d) ketepatan waktu penyerahan; dan

   e) ketepatan tempat penyerahan.

c. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

d. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah;

   1) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah.

   2) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek potongan atau pemungutan PPh.

   3) Pasal 8 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari PPh Pasal 23.

   4) Pasal 13 ayat (1) huruf d yang menyatakan Pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, meliputi pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap berupa imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

   5) Pasal 23 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/ atau dipungut pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

   6) Lampiran Romawi VI, huruf A Angka 1.b.2) yang menyebutkan Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 23 senilai 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD, atau anggaran pendapatan dan belanja desa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

e. PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN pada Pasal 11:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   2) Ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

   3) Ayat (5) yang menyatakan bahwa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

f. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, pada:

   1) Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan senilai 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; dan

   2) Pasal 1 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD;

g. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 2 ayat (7) yang menyatakan bahwa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;

h. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016 pada Pasal 26, pada:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP harus memperhitungkan dan memungut/memotong pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan kepadanya.

   2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyetorkan pajak atas tagihan dalam SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara.

i. PMK Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN Atau APBD Pasal 2:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD.

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:

   a) PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   b) Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).

j. SE Sekjen Kemendikburistek Nomor 15 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Kemendikbudristek pada Poin B.13 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan di hotel dengan paket *meeting fullboard/fullday/halfday* yang dibayarkan atas beban APBN, dikenakan PPh Pasal 23 senilai 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk pajak daerah dan tidak terutang PPN, diatur dengan ketentuan:

   1) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif berkenaan; dan

   2) Disetor dengan kode jenis setoran pajak 411124-104 atas nama Bendahara satker Kemendikbudristek, selanjutnya satker tersebut membuat bukti potong dan diserahkan kepada pihak hotel.

k. SPK/Perjanjian, SSUK (Syarat – Syarat Umum Kontrak) atas masing-masing SPK butir 1 lingkup pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran dari kurang volume belanja pemeliharaan senilai Rp455.127.164,35 yang terdiri dari:

   1) Setjen senilai Rp386.465.296,00 (Rp363.740.296,00 + Rp22.725.000,00);

   2) Ditjen PDM senilai Rp26.319.688,35; dan

   3) Ditjen Kebudayaan senilai Rp42.342.180,00;

b. Kelebihan pembayaran atas realisasi BBM Itjen senilai Rp38.949.348,00 (Rp32.737.079,00 + Rp6.212.269,00).

c. Kelebihan pembayaran dari belanja jasa senilai Rp4.494.300.865,88 yang terdiri dari:

   1) Setjen senilai Rp4.417.350.865,88 (Rp174.575.000,00+ Rp126.602.312,00+ Rp26.500.000,00+ Rp3.408.237.716,88+ Rp445.444.837,00+ Rp235.991.000,00); dan

   2) Ditjen Diktiristek senilai Rp76.950.000,00;

d. Kelebihan pembayaran dari belanja operasional/non operasional senilai Rp852.990.911,00 yang terdiri dari:
   1) Setjen senilai Rp598.390.000,00;
   2) Itjen senilai Rp25.830.000,00;
   3) Ditjen Diktiristek senilai Rp124.718.461,00 (Rp10.080.000,00+Rp71.477.504,00+ Rp43.160.957,00); dan
   4) Ditjen Kebudayaan senilai Rp104.052.450,00.
e. Kelebihan pembayaran dari penyelenggaraan *event* senilai Rp990.133.915,00 yang terdiri dari:
   1) Setjen senilai Rp906.865.672,00; dan
   2) Ditjen Kebudayaan senilai Rp83.268.243,00.
f. Kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp1.559.030.234,20 yang terdiri dari:
   1) Setjen senilai Rp1.054.558.868,07;
   2) Itjen senilai Rp6.644.400,00;
   3) Ditjen PDM senilai Rp166.108.072,72;
   4) BPP Bahasa senilai Rp19.750.218,19
   5) Ditjen GTK senilai Rp42.020.290,90;
   6) Ditjen Diktiristek senilai Rp262.165.657,04; dan
   7) Ditjen Diksi senilai Rp7.782.727,28.
g. Kelebihan pembayaran PPN pada UHO senilai Rp138.099.549,55.

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA satker terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. PPK satker terkait tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan proses serah terima hasil pekerjaan;
c. Bendahara/BPP terkait kurang cermat dalam melaksakan tugas yang menjadi kewajibannya; dan
d. Itjen belum memiliki SOP terkait pengelolan pembelian BBM.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan kepatuhan sebagian telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara dan sisanya dalam proses, sedangkan terkait dengan penyajian telah dilakukan penyesuaian/koreksi pada Laporan Keuangan tahun 2023. Satker yang telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut.

Satker	Tanggapan/Nilai	Tanggal	No NTPN
Kelebihan pembayaran dari kurang volume belanja pemeliharaan sebesar Rp459.044.062,35			
1) Setjen	**33.969.840,00**		
	1.989.560,00	04/04/2024	19CEA61QV3R9J6CI
	2.950.000,00	04/04/2024	DB9961JNFUVBI6ME
	7.443.000,00	04/04/2024	E630A2G4VPHNV8EN
	3.659.795,00	04/04/2024	76B4961QV3R9J9O4
	17.927.485,00	04/04/2024	A78661JNFUVBI9AQ
2) Ditjen PDM	**26.319.688,68**		
	1.052.667,00	19/03/2024	2E0270NA04AD03NP
	8.193.900,00	19/03/2024	3E1D83CIFK1172V5
	3.050.000,00	18/03/2024	706D948VVEJUI6CU
	1.300.000,00	19/03/2024	6353361QV3ONE18B
	8.946.250,00	18/03/2024	BA0DF61QV3ONC7I4
	988.582,00	19/03/2024	F86500NA04A3GDQV
	500.990,00	19/03/2024	DA12955DF961HE3C
	1.485.011,60	25/04/2024	A909B61QV3RSC5U4
	802.288,08	25/04/2024	2ED0E2G4VPIAO9G
3) Ditjen Kebudayaan	**42.342.180,00**	**17 Mei 2024**	**D2EC055DF9C4SB2T**
Kelebihan pembayaran atas realisasi BBM Itjen (Rp32.737.079,00 + Rp6.212.269,00)			
Itjen	**38.949.708,00**		
	6.212.629,00	16/05/2024	84AE761QV3UJHOQB
	32.737.079,00	18/05/2024	BE84D6U8EUGVUP15
Kelebihan pembayaran dari belanja jasa sebesar Rp4.494.300.865,80			
1) Setjen	**808.038.150,00**		
	445.444.838,00	15/03/2024	782F455DF966LI90
	126.602.312,00	23/04/2024	83E453CIFK4IO4EF
	9.779.000,00	29/11/2023	FBB9680J40SHJEVN
	9.817.500,00	29/11/2023	CCFAA3IFKRHCGITO
	9.806.500,00	29/11/2023	A883B80J40SHJEVN
	9.647.000,00	18/12/2023	A8F8C2M2860N5MF5
	9.762.500,00	29/11/2023	CEE51745K5QT4ANS
	9.669.000,00	18/12/2023	5A58880J75F03JF7
	9.691.000,00	27/11/2023	E23F45BAKIFH7ERE
	9.718.500,00	27/11/2023	CACEF745K7L867U8
	1.778.000,00	29/11/2023	7745E3IFKRH7QQVS
	1.785.000,00	29/11/2023	BA2773IFKRHC6SBK
	1.783.000,00	29/11/2023	04F441PKL6RQETAI
	1.754.000,00	18/12/2023	76DF3745NASLAV6K
	1.775.000,00	29/11/2023	DECA2745K5QSOBT8
	1.758.000,00	18/12/2023	BA7673IFO0J2EBE0
	1.762.000,00	27/11/2023	DCCF72M2530NAH9D
	1.767.000,00	27/11/2023	30EE80T75DKHBIIV
	143.938.000,00	08/05/2024	2BC0555DF9BVJG62
2) Ditjen Diktiristek	76.950.000,00	26/04/2024	F256D0NA04DJ1JQT
Kelebihan pembayaran dari belanja operasional/non operasional sebesar Rp881.186.911			
1) Setjen (Honor)	**16.575.000,00**		
	6.375.000,00	03/05/2024	2FB091JNFV29NNB8
	4.250.000,00	03/05/2024	C61EC61QV3U7OOM7
	5.950.000,00	03/05/2024	AB5390NA04FTANUK
2) Itjen (Honor)	**25.830.000,00**		
	8.730.000,00	14/05/2024	EA1DC0NA04G1ONTO
	17.100.000,00	15/05/2024	9E3BC55DF9C5V0OQ
Kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor sebesar Rp1.559.030.234,20			
1) Setjen	**11.480.100,00**	08/05/2024	2AC1E670JM87LKJ8
2) Itjen	**6.644.400,00**		
	984.000,00	30/04/2024	9BD7D7463I9J0S7J
	390.000,00	30/04/2024	940B54ETK2IEBSCJ
	1.440.000,00	07/05/2024	DB8C92M2NBUFRFLJ
	3.830.400,00	21/05/2024	D030FOT7NOP2993S
3) Ditjen PDM	**166.108.072,72**		
	4.461.818,00	28/02/2024	D29750T7ELQJJ72Q
	1.829.818,00	28/02/2024	B588E670DL9CHT87
	3.020.182,07	28/02/2024	19BA5745TFRABK5H
	3.400.000,00	28/02/2024	700105BAT0MLR31N
	2.487.273,00	28/02/2024	OA011OT7ELQQLQ1E
	2.901.819,00	25/04/2024	7232D48VVEN3I6V2
	3.068.182,00	29/02/2024	92FBA6700LF5REB0
	5.432.727,27	25/04/2024	C32C95BB3SKM8L3J

Satker	Tanggapan/Nilai	Tanggal	No NTPN
	2.618.181,82	25/04/2024	FEF073IG47FUG3DB
	2.036.363,64	05/03/2024	301443IFU584PC47
	4.472.727,27	15/03/2024	C97EB102FPSUISSM
	3.490.909,09	15/03/2024	01BE71SFVKFBH5J5
	4.090.909,09	15/03/2024	5088F00PUQUK9EH6
	5.600.000,00	04/03/2024	505FF1PL1E5I1PIQ
	4.090.909,09	15/03/2024	C8C693IFU58694DV
	2.727.272,73	26/04/2024	5A8280T7KNOQ15SO
	10.080.097,64	08/03/2024	6620D2M2EAL689K2
	4.596.363,64	15/03/2024	BDE9000PUQULHSF0
	2.018.181,82	20/03/2024	08CAD4ETDVQK2BJ3
	2.210.909,09	25/04/2024	6B7E80T7KNOQS59T
	3.068.181,82	29/02/2024	92FBA67ODLF5REBO
	9.250.909,09	26/03/2024	5A4161PKUG2SN43S
	2.981.818,18	08/03/2024	5A1D467ODKVDI8P5
	6.015.455,00	25/04/2024	8158A1PL4IG4IGLH
	1.570.909,00	26/04/2024	0057206GIP8H7NHQ
	5.661.818,00	26/04/2024	889o05H100MRNA7K
	1.570.909,00	26/04/2024	786D53O613I2UO83
	2.280.000,00	26/04/2024	4A50D67OJNCELOUT
	1.963.636,00	26/04/2024	E153F5BB3S04119K
	1.380.000,00	26/04/2024	AEA9D5BB3SQ4U3BK
	3.621.818,00	26/04/2024	778801PL4IGJS6IK
	2.360.000,00	26/04/2024	D5BDB67OJNCG8B4S
	2.036.364,00	26/04/2024	8E16667OJNCF86QK
	2.032.727,00	26/04/2024	CE2CC5BB3SQ78EAN
	3.400.000,00	26/04/2024	2094C5BB3SPS0TGQ
	2.080.000,00	26/04/2024	D9BB63IG47LAI8M3
	1.680.000,00	26/04/2024	B201A4ETK27LD07G
	3.554.545,00	26/04/2024	E8D274ETK27EVPUJ
	3.280.000,00	26/04/2024	E06D01PL4IGEVVI0
	1.329.730,00	28/02/2024	B1E281PKUGA70F4E
	12.089,00	26/04/2024	9C9C767OJND9D7V4
	1.559.272,73	26/04/2024	4AF862M2KD3U0UJS
	2.458.363,64	26/04/2024	096490004TCOSJIP
	1.961.345,45	26/04/2024	140F22BB3SR3CJUI
	3.458.472,73	26/04/2024	2A7382M2KD3U7KE8
	954.981,82	26/04/2024	7B26B017KNV5FG0B
	1.309.100,00	26/04/2024	6DB872M2KD2IOGA7
	1.680.000,00	08/03/2024	2D8B83LAV9AH1AVH
	1.020.000,00	08/03/2024	2DBB65E5UUFA3CQ3
	981.237,00	30/04/2024	9BD6A0T7KOII89PF
	2.207.273,00	30/04/2024	0748A1PL434U3HHN
	3.439.746,00	30/04/2024	385625BB3TEGH0U3
	3.272.727,00	02/05/2024	95CAE12TKH2C28B6
	2.200.000,00	02/05/2024	B553F12TKH2C3HFG
	3.840.000,00	02/05/2024	966205H13LA1IMC
4)BPP Bahasa	**10.516.060,00**		
	840.000,00	7 Mei 2024	623CB5BB6RR5P6TF
	303.800,00	2 Mei 2024	210CA2M2NB22103N
	1.840.500,00	8 Mei 2024	4D7894ETN1H47DQ7
	960.000,00	10/11/2023	ABE663977DSVF2J5
	2.267.000,00	05/02/2024	F12F33CIFK71D9H0
	2.236.800,00	2 Mei 2024	4A8796U8EUGI1CT6
	864.000,00	26/04/2024	F2A174ETK2B2NR89
	417.100,00	26/04/2024	10BBC00Q4TFA9ITN
	216.216,00	2 Mei 2024	FC6766QT9FLIU76L
	144.144,00	2 Mei 2024	48F245229QGQ47AP
	426.500,00	2 Mei 2024	895B967OMLF25DJM
5)Ditjen GTK	9.600.000,00	01/03/2024	5D0B52MICI5JV8C9
7)Ditjen Diksi	**8.015.455,00**		
Politeknik Negeri Indramayu	780.000,00	01/04/2024	8DAB54ETH0V9RR8V
	1.780.000,00	01/04/2024	38E7067OGM43Q1F1
Politeknik Negeri Banjarmasin	276.364,00	29/04/2024	031FC5BB3T5MOJIG
Politeknik Negeri Banjarmasin	259.091,00	29/04/2024	D57B10T7KO9MCBB9
Politeknik Negeri Kupang	4.920.000,00		761BE00PRP3PF9KC

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Sekjen untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK senilai Rp6.497.484.510,87 yang terdiri dari:
   1) Kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp5.450.488.843,80; dan
   2) Kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp1.043.078.768,07.
b. Dirjen Diktiristek untuk menyetorkan ke Kas Negara/Kas BLU dan menyampaikan bukti setor ke BPK senilai Rp524.983.667,59 terdiri dari:
   1) Kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp124.718.461,00; dan
   2) Kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp262.165.657,04;
   3) Kelebihan pembayaran atas komponen PPN pada Pekerjaan Langganan *E-Journal* dan *E-Book* di Universitas Halu Oleo senilai Rp138.099.549,55
c. Dirjen Kebudayaan untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp187.320.693,00;
d. Dirjen GTK untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp32.420.290,90;
e. Kepala BPP Bahasa untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai senilai Rp9.234.158,19;
f. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UHO untuk lebih cermat memungut pajak sesuai ketentuan; dan
g. Irjen untuk menyusun SOP terkait pengelolaan belanja BBM.

8. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Banpem untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan

LRA Kemendikbudristek Tahun 2023 (*audited*) menyajikan anggaran Belanja Bantuan Pemerintah (Banpem) untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada MAK 52123x dan MAK 526xxx dan masing-masing senilai Rp4.078.415.310.000,00 dan Rp619.678.976.000,00, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp3.308.592.565.982,00 (81,12%) dan Rp604.287.930.591,00 (97,52%). Adapun rincian belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda pada masing-masing unit utama Kemendikbudristek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 107. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Kemendikbudristek TA 2023

Eselon I	Belanja Banpem 52123x dan 526xxx (Neto)					
	Belanja Banpem 52123x			Belanja Banpem 526xxx		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Setjen	184.471.871.000	176.462.178.923	95,7	166.128.145.000	163.312.144.642	98,3
Ditjen PDM	42.714.630.000	42.159.051.770	98,7	23.897.040.000	23.591.268.978	98,7

Eselon I	Belanja Banpem 52123x dan 526xxx (Neto)					
	Belanja Banpem 52123x			Belanja Banpem 526xxx		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BSKAP	317.794.299.000	313.286.339.608	98,6	0	0	0
BPP Bahasa	13.090.060.000	13.058.899.119	99,8	451.300.000	449.345.550	99,6
Ditjen Kebudayaan	2.968.137.000	2.940.000.000	99,1	75.340.725.000	72.621.581.065	96,4
Ditjen GTK	6.815.718.000	6.803.486.000	99,8	134.507.222.000	133.958.093.713	99,6
Ditjen Diktiristek	1.835.674.000	1.734.068.979	94,5	2.323.525.342.000	1.573.515.637.099	67,7
Ditjen Diksi	49.988.587.000	47.843.906.192	95,7	1.354.565.536.000	1.341.144.494.935	99,0
Jumlah	**619.678.976.000**	**604.287.930.591**	**97,5**	**4.078.415.310.000**	**3.308.592.565.982**	**81,1**

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertangungjawaban dan pemeriksaan fisik secara uji petik belanja banpem untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada satker di Kemendikbudristek menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

a. Perencanaan Belanja Banpem belum memadai

1) Juknis ADEM pada Puslapdik Setjen belum mengatur secara rinci atas komponen penggunaan biaya pendidikan

Sejak Tahun 2023 Bantuan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dilimpahkan pengelolaannya dari Ditjen PDM kepada Puslapdik Setjen. Pemberian banpem melalui Puslapdik diatur dalam Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Juknis Pengelolaan Banpem Beasiswa ADIK. Terdapat tiga jenis bantuan ADEM yang diatur dalam juknis yaitu:

a) Beasiswa ADEM Wilayah Papua adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang tinggal dan berasal dari Wilayah Papua untuk melanjutkan pendidikan menengah di luar Wilayah Papua.

b) Beasiswa ADEM daerah khusus adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang tinggal dan berasal dari daerah khusus untuk melanjutkan pendidikan menengah.

c) Beasiswa ADEM repatriasi adalah beasiswa yang diberikan kepada anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia untuk melajutkan pendidikan menengah.

Dalam juknis disebutkan komponen biaya bantuan ADEM adalah biaya pendidikan dan biaya operasional bantuan ADEM. Biaya pendidikan disalurkan ke sekolah dengan perhitungan Rp1.000.000,00/siswa/bulan. Biaya pendidikan digunakan untuk mendukung biaya personal dan biaya sekolah penerima bantuan ADEM selama dalam melaksanakan pendidikan. Sedangkan biaya operasional digunakan antara lain untuk penjemputan dan pemulangan siswa, pendidikan wawasan kebangsaan, pengelolaan program, evaluasi program, dan pembinaan penerima bantuan ADEM. Juknis belum mengatur lebih rinci komponen dan batasan nilai yang dapat digunakan oleh pihak sekolah. Hasil pemeriksaan lapangan dan uji petik LPJ sekolah ditemukan realisasi penggunaan bantuan ADEM yang beragam dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 108. Pembelian Aset dari Dana Bantuan

No.	Nama Sekolah	Hasil Pemeriksaan	Nilai Penggunaan (Rp)
1	SMA Kristen Satya Wacana	Perbaikan asrama siswa antara lain pembelian bahan baku dan biaya tukang	15.968.500,00

No.	Nama Sekolah	Hasil Pemeriksaan	Nilai Penggunaan (Rp)
		Belanja pendukung sarana prasarana asrama antara lain pembelian CCTV, braket, tempat tidur, dan lemari pakaian.	34.131.500,00
2	SMA Kristen Hidup Baru	Terdapat pembelian kulkas yang digunakan di asrama siswa.	1.600.000,00
3	SMA Santo Arnoldus Janssen Kupang	Terdapat pembelian kasur dan lemari.	5.427.000,00
4	SMKN 2 Kuripan	Terdapat pembelian tempat tidur dan lemari pakaian.	1.275.000,00
5	SMKN 1 Rangkas Bitung	Terdapat pembelian tempat tidur dan lemari pakaian.	2.000.000,00
6	SMAN 7 Pekanbaru	Terdapat pembelian lemari pakaian.	3.450.000,00
7	SMAN 1 Padang	Terdapat pembelian loker, pompa air, magic com, kipas angin, Kasur, meja belajar, dan setrika listrik.	6.770.000,00
8	SMAN 1 Banjaran	Terdapat pembelian setrika, magic com, lemari baju, karpet, Kasur, dan kompor gas.	2.559.000,00
9	SMA Katolik 1 Surakarta	Terdapat pembelian laptop dari dana ADEM.	*).
Jumlah			**73.181.000,00**

**) Informasi nilai laptop tidak diperoleh*

Pengeluaran biaya renovasi dan pembelian aset tersebut di atas tidak diatur dalam juknis dan tidak sesuai dengan peruntukan yaitu mendukung biaya personal dan biaya sekolah.

2) Alokasi anggaran perjalanan dan konsumsi pada Program Pembinaan UMKM Berbasis Kemitraan Tahun 2023 Setditjen Diktiristek melebihi ketentuan Juknis

Untuk mewujudkan pengelolaan program yang baik, Dirjen Diktiristek menetapkan Keputusan Dirjen Diktiristek Nomor 145/E/KPT/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Juknis Program Pembinaan UMKM Berbasis Kemitraan Tahun 2023. Juknis tersebut mengatur diantaranya tentang tujuan program, kriteria penerima, proses seleksi penerima, penyaluran bantuan sampai dengan pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana serta monitoring dan evaluasi.

Dalam juknis antara lain mengatur bahwa komponen biaya perjalanan dalam negeri dan konsumsi dianggarkan maksimal senilai 15% dibandingkan seluruh komponen biaya pelaksanaan program UMKM berbasis kemitraan. Hasil penilaian pada tahap ini akan menghasilkan rekomendasi kepada Dirjen Diktiristek untuk dinilai layak atau tidaknya suatu proposal. Penetapan pemenang ditetapkan oleh PPK Setditjen Diktiristek dan diketahui oleh KPA Setditjen Diktiristek.

Hasil analisa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal usulan yang telah lulus seleksi dan mendapatkan pendanaan diketahui bahwa terdapat empat PTS yang mengusulkan alokasi anggaran untuk perjalanan dan konsumsi yang melebihi 15% dari total RAB dan disetujui oleh tim *reviewer* untuk kemudian ditetapkan dalam SK Dirjen Diktiristek.

Tabel 109. Alokasi Perjalanan dan Konsumsi PTS Melebihi Ketentuan

No	Nama PTS	Jumlah Komponen Perjalanan dan Konsumsi (Rp)	Total RAB (Rp)	Batas 15%
1	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	33.632.000,00	221.776.000,00	**15,16%**

No	Nama PTS	Jumlah Komponen Perjalanan dan Konsumsi (Rp)	Total RAB (Rp)	Batas 15%
2	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	17.090.000,00	103.350.000,00	**16,54%**
3	Universitas Surabaya	13.563.000,00	77.273.000,00	**17,55%**
4	Universitas Tarumanagara	74.640.000,00	420.000.000,00	**17,77%**
Jumlah			**822.399.000,00**	

Atas kondisi tersebut tim PPK UMKM menjelaskan bahwa pada proses evaluasi terhadap usulan RAB dalam proposal, PTS pengusul dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki RAB sesuai hasil rekomendasi tim reviu dan mengunggah kembali ke dalam sistem kedaireka. Akan tetapi, beberapa PTS memang belum mengunggah kembali dokumen ke dalam aplikasi sesuai dengan hasil rekomendasi perbaikan RAB.

3) Juknis *Matching Fun* pada Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (APTV) Tahun 2023 belum mengatur pencatatan aset dari belanja bahan melalui MAK 521211

Program *Matching Fund* adalah program pendanaan yang merupakan program penguatan kolaborasi antara Perguruan Tinggi dengan mitra industri, masyarakat maupun dunia kerja untuk secara bersama-sama membentuk ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Juknis ditetapkan dengan Peraturan Dirjen Diksi Nomor 28 Tahun 2023 tentang Juknis Banpem PTV Penerima Bantuan Pendanaan *Matching Fund* dan Hilirisasi Produk Penelitian Terapan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada dua satker penerima dana *Matching Fund* Vokasi yaitu PNUP dan PNJ senilai Rp688.306.650,00 (Rp276.200.000,00 + Rp412.106.650,00) menunjukkan hal sebagai berikut.

a) PNUP

PNUP merealisasikan dana *Matching Fund* diantaranya menggunakan MAK 521211 senilai Rp276.200.000,00 yang digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor senilai Rp3.250.000,00 dan pembelian bahan pembuatan *protoype* peralatan CEMS (*Continous Emission Monitoring System*) senilai Rp272.950.000,00. PNUP telah mencatat pembelian tersebut sebagai aset tetap peralatan dan mesin.

b) PNJ

PNJ merealisasikan dana *Matching Fund* diantaranya menggunakan MAK 521211 senilai Rp412.106.650,00 (rincian pada **Lampiran B.8.1**) diantaranya digunakan untuk pembelian bahan untuk *prototype* kendaraan listrik, bubungan atap, dan lainnya hasil dari penelitian *Matching Fund*. Belanja bahan tersebut tidak dicatat dalam aset tetap. Hal tersebut dikarenakan pengelola barang tidak dapat mencatat nilai aset karena tidak mengetahui masa manfaat dari belanja bahan tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan pencatatan terhadap aset yang dihasilkan dari realisasi dana *Matching Fund* pada PNUP dan PNJ. Hasil analisis terhadap juknis *Matching Fund*, diketahui bahwa juknis tidak mengatur pencatatan aset yang dihasilkan dari dana *Matching Fund*.

PPK *Matching Fund* menjelaskan bahwa untuk belanja dari anggaran 521211 yang menghasilkan aset belum diatur pada juknis, karena tidak semua rekacipta dapat

dikategorikan menjadi aset dan perlu identifikasi dan valuasi secara rinci oleh perguruan tinggi.

b. Pelaksanaan Banpem belum sesuai ketentuan

1) Rekening penampungan bantuan pada BPTI tidak ditetapkan dengan SK Penetapan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran banpem oleh BPTI, Bendahara Pengeluaran dapat membuka rekening penampungan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk. Pembukaan rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung dana bantuan sebelum disalurkan atau pindah buku ke rekening penerima bantuan setelah ditetapkan melalui SK Penerima Banpem.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses pencairan dan penyaluran banpem BPTI, diketahui bahwa terdapat dokumen PKS antara PPK dengan PT BNI Nomor 1318/J7.1/PN.00/2023 dan Nomor INS2/020/PKS/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Penyaluran Uang Pembinaan Pemenang Bersumber dari DIPA BPTI. Hasil konfirmasi kepada PT BNI diketahui bahwa BPTI memiliki rekening pada BNI dengan Nomor 1515129092 an. rekening RPL 088 PS BPTI untuk Hadiah Lomba yang dibuka sejak tanggal 25 Oktober 2022 dan telah bersaldo nihil per 31 Desember 2023. Atas rekening tersebut masih aktif dan digunakan untuk kegiatan ajang pada TA 2024.

Berdasarkan keterangan dari Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa rekening tersebut dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran dan sampai saat pemeriksaan tanggal 30 April 2024 belum ditetapkan dengan SK Kepala BPTI serta atas pembukaan rekening tersebut juga belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan.

2) Pengadaan barang dalam rangka pemberian bantuan pada masyarakat dalam bentuk barang belum sesuai ketentuan

a) Kekurangan pengenaan denda keterlambatan pada pengadaan Banpem berupa barang pada Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Vokasi (P3TV) PTS Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya (KLSD) PTV senilai Rp3.840.732,67

Direktorat KLSD PTV merealisasikan banpem berupa barang pada P3TV PTS senilai Rp12.953.387.750,00 melalui 13 penyedia barang diantaranya dengan PT. SEI , PT. SaEI, PT. PJS, dan CV PS. Rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut.

Tabel 110. Rincian Kontrak P3TV PTS

No.	Nama Penyedia	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1.	PT SEI	008/D5/PPPTV/SPK/KLSD/IX/2023	1.060.700.000,00
2.	PT SaEI	011/D5/PPPTV/SPK/KLSD/IX/2023	1.033.981.250,00
3.	PT. PJS	012/D5/PPPTV/SPK/KLSD/IX/2023	1.263.056.000,00
4.	CV PS	013/D5/PPPTV/SPK/KLSD/IX/2023	308.769.100,00

Pengadaan barang P3TV PTS dilakukan dengan metode *e-katalog*. Dalam kontrak disebutkan bahwa barang dikirim langsung oleh penyedia ke PTS penerima bantuan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Pekerjaan berakhir dibuktikan dengan BAST antara penyedia dengan PTS penerima bantuan.

Atas keterlambatan pengiriman barang tersebut, PPK telah mengenakan denda senilai Rp7.122.250,00 yang langsung dipotong dari nilai pembayaran masing-masing pekerjaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 111. Rincian Keterlambatan Pengiriman Barang

No	Nama Penyedia	PTS Penerima	Nama Barang	Nilai Denda Keteralambatan (Rp)
1.	PT SEI	Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah Riau	1 unit Infusion Pump Nity I-1	342.000,00
2.	PT SaEI	Politeknik Cendrawasih, Palu	1 unit BOD Incubator 1 unit Shaker	1.799.250,00
3.	PT. PJS	Politeknik Amamapare, Papua	1 unit Industrial Motor and Transformer Training System	3.925.000,00
4.	CV PS	Politeknik Amamapare, Papua	1 unit Programmable Logic Controller Trainning Set	1.056.000,00
Jumlah				**7.122.250,00**

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPK diketahui bahwa pengenaan denda dikenakan pada hari ke-8 setelah tanggal kontrak berakhir dan tidak langsung dikenakan setelah tanggal kontrak berakhir. Hal tersebut mengakibatkan masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp3.840.732,67 dengan rincian pada **Lampiran B.8.2.**

b) Kekurangan volume pekerjaan yang menggunakan dana Banpem dalam bentuk uang pada Direktorat SMK senilai Rp40.822.229,93

1) SMK Purnama 1 Jakarta

Banpem Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan kegiatan yang mencakup proses/mekanisme/sistem pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu melalui peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, serta menjadi rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.

Hasil pemeriksaan pada SMK Purnama 1 Jakarta diketahui bahwa sekolah memperoleh dana bantuan dalam bentuk uang senilai Rp1.888.000.000,00 dengan rincian realisasi penggunaan dana sebagai berikut:

Tabel 112. Rincian realisasi Dana Banpem pada SMK Purnama 1 Jakarta

No.	Kegiatan	Realisasi Dana (Rp)
1	Penguatan Proses Pembelajaran	125.000.000,00
2	Pengadaan Peralatan Praktik	978.582.000,00
3	Redesain Ruang Praktik	784.418.000,00
Jumlah		**1.888.000.000,00**

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 26 Maret 2024 atas realisasi penggunaan dana redesain ruang praktik, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp31.503.171,82. Rincian kekurangan volume pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran B.8.3.**

Pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan pada dokumen yang telah disepakati antara sekolah dan Direktorat SMK. Berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolah menyatakan bahwa kekurangan volume pekerjaan tersebut dikarenakan sekolah lalai dalam menatausahakan dokumen perubahan realisasi pekerjaan.

2) SMK Negeri 15 Jakarta

Banpem pengembangan *Teaching Factory* SMK merupakan upaya menjadikan SMK yang mampu menunjukkan kinerja pencetak lulusan yang memiliki *hardskills* dan *softskills* serta mampu beradaptasi di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, kinerja pembelajaran berbasis produksi/*Production Based Education Training* (PBET) SMK, dan pembelajaran berbasis projek yang sesuai dinamika kemajuan teknologi serta usaha hilirisasi produk barang dan jasa secara terpadu antara SMK dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Hasil pemeriksaan pada SMK Negeri 15 Jakarta diketahui bahwa sekolah memperoleh dana bantuan senilai Rp300.000.000,00 dengan rincian realisasi penggunaan dana sebagai berikut:

Tabel 113. Rincian Penggunaan Dana Banpem SMK Negeri 15 Jakarta

No.	Kegiatan	Realisasi Dana (Rp)
1	Penguatan dan Pelaksanan Pembelajaran	53.800.000,00
2	Pengadaan Peralatan Praktik	93.840.162,00
3	Pekerjaan Fisik	152.359.838,00
Jumlah		**300.000.000,00**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 20 Maret 2024 atas realisasi penggunaan dana pekerjaan fisik, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp9.323.287,00, rincian perhitungan pada **Lampiran B.8.4**.

3) Bantuan yang diterima oleh penerima Banpem pada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) tidak digunakan

Tabel 114. Penerima Banpem Tidak Merealisasikan Bantuan yang Diterimanya

Nama Bantuan	Nomor SK Penetapan	Tanggal SK Penetapan	Provinsi	Nama	Nilai Bantuan (Rp)
Bantuan Operasional Pencetakan Braille	4003/C6/KU. 07.00/2023	18 Okt 2023	Papua	SLBN Pembina Papua	50.000.000
Bantuan Operasional Sekolah Inklusi	3742/C6/KU. 07.00/2023	18 Okt 2023	D.I. Yogyakarta	SMP NEGERI 3 SENTOLO	25.000.000
Bantuan Operasional Sekolah Inklusi	3742/C6/KU. 07.00/2023	18 Okt 2023	Jawa Timur	SD NEGERI 2 KREBET	25.000.000
Jumlah					**100.000.000**

Masing-masing sekolah menjelaskan sebagai berikut:

a) Kepala SLBN Pembina Papua, Prov. Papua menjelaskan bahwa alat cetak *braille* rusak, tidak bisa digunakan karena terjadi kerusakan pada saat proses pencetakan. Sehingga kegiatan dihentikan dan dana bantuan dikembalikan seluruhnya ke Kas Negara pada tanggal 29 Januari 2024 senilai Rp50.000.000,00.

b) Operator SMPN 3 Sentolo, Prov. DIY menjelaskan bahwa tidak menerima dana bantuan operasional sekolah inklusi pada rekening yang didaftarkan untuk penyusunan Perjanjian Penyaluran Banpem antara PPK Direktorat PMPK dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Sentolo, yaitu rekening BPD DIY dengan Nomor 0230231000882. Dari hasil konfirmasi dengan pihak bank penyalur diperoleh keterangan bahwa dana tersebut telah disalurkan ke rekening BPD DIY dengan Nomor 023231000254. Operator SMPN 3 Sentolo memberi konfirmasi bahwa

rekening tersebut adalah rekening BOS yang sudah lama tidak lagi digunakan. Operator SMPN 3 Sentolo menerangkan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan BPD DIY dan diketahui bahwa dana Banpem tersebut masih utuh dan telah dikembalikan ke Kas Negara pada tanggal 18 April 2024 senilai Rp25.000.000,00.

c) Operator SDN 2 Krebet, Prov. Jawa Timur menjelaskan bahwa sekolah menerima dana bantuan operasional sekolah inklusi akan tetapi tidak mengetahui bahwa dana tersebut sudah masuk ke rekening. Oleh karena itu dana tersebut tidak dipergunakan. Dari hasil konfirmasi dan bukti rekening koran rekening, diperoleh keterangan bahwa dana tersebut masih utuh dan telah dikembalikan ke Kas Negara pada tanggal 18 April 2024 senilai Rp25.000.000,00.

4) Penerima Banpem menerima lebih dari satu jenis Banpem pada Direktorat Kursus dan Pelatihan (Suslat)

Banpem Penyelenggaraan Uji Kompetensi (UJK) merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Bantuan UJK ditetapkan dalam lima SK dengan jumlah penerima sebanyak 6.346 anak dengan sasaran yaitu peserta didik kursus dan pelatihan dan warga masyarakat yang belajar mandiri dengan kriteria berusia 17 sampai dengan 30 tahun, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di dalam atau luar negeri, bukan penerima banpem program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Tahun 2023 dan tidak berstatus sebagai peserta didik pada pendidikan formal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan membandingkan antara data anak penerima bantuan penyelenggaraan UJK dengan data anak penerima bantuan program PKK dan PKW, diketahui bahwa terdapat 11 peserta didik yang menerima bantuan UJK dan menerima bantuan program PKK atau PKW dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115. Daftar Penerima Bantuan UJK dan PKK atau PKW

No.	Nama Penerima	Keterampilan UJK	Keterampilan Program PKK	Keterampilan Program PKW	Nilai Bantuan UJK (Rp)
1	LN	Membatik	Membatik		700.000,00
2	DAFH	Perhotelan		Barista	500.000,00
3	TD	Perhotelan		Barista	500.000,00
4	AP	Perhotelan		Barista	500.000,00
5	DAF	Perhotelan		Barista	500.000,00
6	N	Bordir Manual		Tata Busana	600.000,00
7	DAP	Bordir Manual		Tata Busana	600.000,00
8	MD	Tata Rias Pengantin		Tata Rias Pengantin	800.000,00
9	R	Tata Rias Pengantin		Tata Rias Pengantin	800.000,00
10	Na	Tata Rias Pengantin		Barista	800.000,00
11	MA	Bahasa Inggris		Tata Rias Pengantin	500.000,00
Jumlah					**6.800.000,00**

Hasil konfirmasi dengan Kasubag TU dan operator program diketahui bahwa sebelas peserta didik tersebut telah mengikuti uji kompetensi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu dijelaskan bahwa *database* pada program PKK sudah terhubung dengan *database* program PKW dan UJK sehingga peserta didik yang sudah mendaftar pada program PKK tidak bisa mendaftar di bantuan lainnya. Atas satu peserta

didik yang mendapat bantuan UJK dan program PKK dijelaskan bahwa pada saat peserta didik melakukan pendaftaran bantuan, *sistem* program UJK sedang mengalami *down* sehingga anak tersebut lulus menjadi penerima dua bantuan dari Direktorat Suslat. Berdasarkan keterangan lebih lanjut, *database* program PKW belum terhubung dengan *database* program UJK sehingga masih terdapat sepuluh siswa yang lulus menjadi penerima bantuan UJK dan program PKW.

5) Honor Narasumber atas penggunaan dana Banpem belum dipungut PPh senilai Rp1.926.250,00

a) Pajak atas honor Narasumber Direktorat Suslat belum dipungut senilai Rp241.250,00

Banpem PKK merupakan program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada SMK Al Ibrahimy, diketahui bahwa sekolah memperoleh dana bantuan senilai Rp58.000.000,00 untuk 20 peserta didik.

Dana diterima sekolah pada tanggal 13 Oktober 2023. Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka sebanyak 115 Jam Pelajaran (JP) pada tanggal 7 November 2023 s.d. 5 Januari 2024, dan uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024. Pelaksanaan uji kompetensi baru dilaksanakan pada Bulan Februari 2024 dikarenakan pembelajaran teori sebanyak 115 JP selesai pada Bulan Januari 2024. Sekolah telah mendaftar pada LSK di Surabaya namun, tidak mendapat pemberitahuan lebih lanjut. Selanjutnya, sekolah berkoordinasi dengan Direktorat Suslat dan diarahkan untuk melaksanakan UJK di *Cottage Skill Course*. Sampai dengan tanggal 24 Februari 2024, sertifikat hasil uji kompetensi belum diterima sekolah dikarenakan masih dalam proses penilaian.

Untuk melaksanakan program tersebut, Kepala Sekolah membentuk Pengurus PKK dan Instruktur yang ditetapkan dengan SK Nomor 0118/SMK/SK/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 dan SK Nomor 0120/SMK/Sk/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dana bantuan, diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium pengurus dan instruktur yang belum dipungut dan disetorkan pajaknya ke Kas Negara senilai Rp241.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 116. Rincian Pembayaran Honor Belum Dipotong Pajak

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Honor yang Diterima (Rp)	% Pajak	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	% Pajak Pasal 17	Pajak yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	LR	Penanggung Jawab	1.200.000,00	50%	600.000,00	5%	30.000,00
2	MI	Bendahara	900.000,00	50%	450.000,00	5%	22.500,00
3	FA	Sekretaris	900.000,00	50%	450.000,00	5%	22.500,00
4	HM	Teknisi	900.000,00	50%	450.000,00	5%	22.500,00
5	IH	Instruktur	2.500.000,00	50%	1.250.000,00	5%	62.500,00
6	AY	Instruktur	2.500.000,00	50%	1.250.000,00	5%	62.500,00
7	JS	Instruktur	750.000,00	50%	375.000,00	5%	18.750,00
Jumlah							**241.250,00**

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Sekolah, panitia belum mengetahui jika pembayaran honorarium dikenakan pajak sehingga tidak melakukan pemotongan dan penyetoran pajak ke Kas Negara.

b) Pajak atas honor Narasumber Banpem program SMK PK skema pemadanan dukungan baru belum dipungut senilai Rp1.685.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik pada SMK Purnama 1 Jakarta, penerima dana banpem Program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan Baru, terdapat realisasi dana penguatan proses pembelajaran senilai Rp125.000.000,00 yang terdiri dari tujuh kegiatan. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat komponen pembayaran honor narasumber sebanyak 14 orang narasumber dengan total pembayaran senilai Rp34.400.000,00.

Narasumber kegiatan berasal dari pihak eksternal yaitu dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, instansi pemerintah lainnya dan diberikan imbalan atau honorarium atas jasanya dalam penyelenggaraan kegiatan. PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Perkerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berupa honorarium dan imbalan kepada Peserta Kegiatan berupa honorarium.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana, diketahui bahwa atas honorarium yang telah dibayarkan kepada 14 orang narasumber tersebut, sekolah belum memungut dan menyetorkan pajaknya dengan total senilai Rp1.685.000,00 sebagaimana pada tabel di bawah ini dan rincian dapat dilihat pada **Lampiran B.8.5**.

Tabel 117. Rincian Pembayaran Honor Narasumber

No	Kegiatan	Jumlah Narasumber	Honor yang Diterima (Rp)	Pajak yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Sosialisasi SMK PK	3	3.000.000,00	200.000,00
2	*In House Training* Implementasi Kurikulum Merdeka dan Rapat Kerja Sekolah PK	1	2.000.000,00	300.000,00
3	Workshop Penyelarasan Pembelajaran Berbasis DUDI	2	10.800.000,00	270.000,00
4	Magang Industri	1	2.600.000,00	65.000,00
5	Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus	6	12.000.000,00	250.000,00
6	Workshop Peningkatan Kapabilitas GKT	1	4.000.000,00	600.000,00
Jumlah		**14**	**34.400.000,00**	**1.685.000,00**

Hasil konfirmasi dengan Wakahumas selaku tim pembelajaran dana banpem diketahui bahwa tim belum mengetahui jika pembayaran honorarium dikenakan pajak sehingga tidak melakukan pemotongan dan penyetoran pajak ke Kas Negara.

6) Jasa Giro rekening bantuan SMK Semen Gresik belum disetor senilai Rp554.414,00

SMK Semen Gresik memperoleh dana banpem Program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan senilai Rp942.575.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebagai berikut.

Tabel 118. Rincian Realisasi Dana Banpem

No.	Kegiatan	Realisasi Dana (Rp)
1	Penguatan Proses Pembelajaran	125.000.000,00
2	Pengadaan Peralatan Praktik	817.575.000,00
Jumlah		**942.575.000,00**

Hasil pemeriksaan terhadap penggunaan dana banpem tersebut, diketahui bahwa terdapat dana di rekening koran sekolah penerima dana bantuan per tanggal 25 Januari 2024 yaitu jasa giro senilai Rp554.414,00. Berdasarkan Juknis Banpem SMK PK, bunga jasa giro dapat disetorkan dengan pembuatan *billing* melalui *website* SIMPONI. Namun, sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 sekolah belum menerima *e-billing* dari Direktorat SMK.

c. Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Banpem belum sesuai ketentuan

1) Aplikasi Banpem pada Biro Keuangan dan BMN tidak memberikan informasi yang memadai

Sesuai pedoman/juknis penyaluran banpem, pihak penerima bantuan wajib menyampaikan LPJ yang berisikan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilengkapi dengan foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh bantuan tersebut. Berdasarkan LPJ banpem yang telah diterima Biro Keuangan dan BMN, sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 diketahui bahwa dari total 2.275 satuan pendidikan/lembaga penerima bantuan, masih terdapat 56 satuan pendidikan/lembaga penerima dana bantuan yang belum menyampaikan LPJ atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 119. Penerima Bantuan Tahun 2023 yang Belum Menyampaikan LPJ per 31 Maret 2024

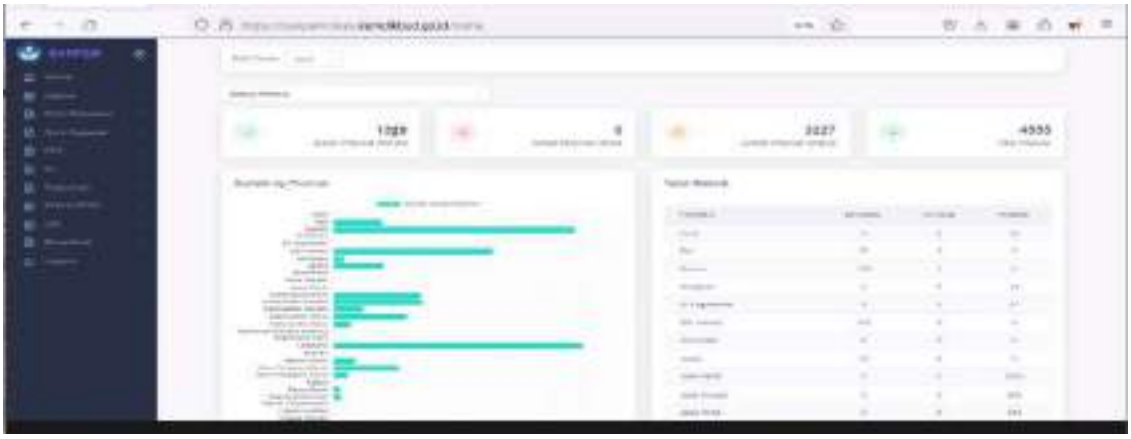
No	Jenis Bantuan	Akun	Realisasi SP2D		Belum LPJ		
			Nilai (Rp)	Lembaga	Nilai (Rp)	Lembaga	%
1	Bantuan Operasional	521233	1.840.000.000,00	78	95.000.000.00	4	5,13
2	Bantuan Sarpras (barang)	526112	12.210.000,00	1	12.210.000.00	1	100
3	Bantuan Sarpras	526122	27.455.500.000,00	1.016	360.000.000.00	13	1,28
4	Bantuan Rehab	526123	32.766.860.000,00	1.004	964.000.000.00	31	3,09
5	Bantuan Lainnya	526311	7.348.025.000,00	176	115.500.000.00	7	3,98
	JUMLAH		**69.422.595.000,00**	**2.275**	**1.546.710.000.00**	**56**	**2,46**

Berdasarkan SK Kepala Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 Nomor 45079/A2/KU.07.00/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Pengelola Banpem, terdapat empat orang petugas Verifikator LPJ yang bertugas untuk melakukan konfirmasi kepada penerima bantuan yang belum menyerahkan LPJ setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam juknis yaitu 30 hari sejak dana diterima. Hasil konfirmasi kepada PPK menyatakan bahwa akan terus berupaya menghubungi para penerima bantuan untuk melakukan kewajibannya dalam menyampaikan LPJ penggunaan dana bantuan Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan penyaluran Banpem Tahun 2023, Biro Keuangan dan BMN memiliki aplikasi berbasis web yaitu Aplikasi Banpem Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023. Aplikasi Banpem bertujuan untuk dapat mengolah data proposal masuk, merekapitulasi data, mengkonsepkan data, serta mengarsipkan *softcopy* data SK, PKS

dan LPJ. Aplikasi tersebut dapat di akses pada laman http://banpemrokeu.kemdikbud.go.id.

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Maret 2024, informasi yang diperoleh dari aplikasi http://banpemrokeu.kemdikbud.go.id. tidak sesuai dengan nilai realisasi banpem yang telah disalurkan oleh Biro Keuangan dan BMN TA 2023. Hasil penelusuran pada *dashboard* aplikasi jumlah proposal diterima sebanyak 1.328 proposal. Data tersebut tidak sesuai dengan jumlah rincian penyaluran TA 2023 yaitu sebanyak 2.275 proposal sehingga terdapat selisih sebanyak 947 proposal. Tampilan menu *Home* aplikasi banpem sebagai berikut.



Gambar 3. Tampilan Menu *Home* Aplikasi Banpem

Penelusuran lebih lanjut atas menu LPJ Banpem dan hasil olah data menu *download* rekap MOU menunjukkan bahwa terdapat 2.240 data penerima bantuan. Dari data tersebut yang telah menyampaikan LPJ hanya sebanyak 1.125 penerima bantuan. Jumlah tersebut berbeda dengan data rincian LPJ yang diterima BPK dari Tim Banpem yaitu sebanyak 2.219 lembaga yang dinyatakan telah menyerahkan LPJ sampai dengan 31 Maret 2024, sehingga terdapat selisih LPJ yaitu sebanyak 1.094 lembaga (2.219 – 1.125).

Sampai dengan tanggal 22 April 2024, berdasarkan unduhan data pada aplikasi diketahui bahwa dari banpem Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp69.422.595.000,00 kepada 2.275 penerima, sejumlah 1.709 penerima sudah menyampaikan LPJ dengan nilai Rp52.678.885.000,00 sehingga penerima yang belum menyampaikan LPJ sebanyak 566 orang/lembaga senilai Rp16.743.710.000,00. Selanjutnya, diketahui bahwa tampilan menu utama pada aplikasi Banpem Biro Keuangan atas penyaluran Bantuan Tahun 2023 per 7 Mei 2024 menunjukkan jumlah penerima bantuan sebanyak 2.291 lembaga penerima dengan total bantuan senilai Rp69.930.175.000,00. Namun tampilan pada aplikasi pada tanggal 11 Mei 2024 menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan Tahun 2023 sebanyak 2.314 lembaga penerima Bantuan dengan total senilai Rp70.587.175.000,00. Seharusnya jumlah penerima bantuan tidak akan berubah setelah tanggal 31 Desember 2023. Perbedaan data atas jumlah penerima dan total bantuan yang disalurkan Tahun 2023 belum dapat dijelaskan oleh PPK ataupun tim pengelola bantuan.

Sedangkan atas perbedaan data pada aplikasi dengan data manual jumlah LPJ yang diterima PPK dan Tim Pengelola banpem Biro Keuangan menyatakan bahwa atas

penyaluran banpem TA 2023 yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2023, namun input data banpem berupa proposal yang diterima, pengarsipan *softcopy* data SK, PKS dan LPJ ke dalam aplikasi baru dilakukan sejak bulan Desember 2023. Verifikasi proposal saat penyaluran awal tahun 2023 masih dilakukan secara manual, sedangkan untuk LPJ yang telah di terima sampai dengan 31 Maret 2024 belum seluruhnya diinput ke dalam aplikasi Banpem.

2) Penerima Banpem belum menyampaikan LPJ atau LPJ tidak lengkap

a) Penerima Banpem ADEM pada Puslapdik belum menyampaikan LPJ dan LPJ yang disampaikan belum lengkap senilai Rp1.392.000.000,00

Dalam juknis disebutkan komponen biaya bantuan ADEM adalah biaya pendidikan dan biaya operasional bantuan ADEM. Biaya pendidikan disalurkan ke sekolah dengan perhitungan Rp1.000.000,00/siswa/bulan. Biaya pendidikan digunakan untuk mendukung biaya personal dan biaya sekolah penerima bantuan ADEM selama dalam melaksanakan pendidikan. Sedangkan biaya operasional digunakan antara lain untuk penjemputan dan pemulangan siswa, pendidikan wawasan kebangsaan, pengelolaan program, evaluasi program, dan pembinaan penerima bantuan ADEM.

Hasil pemeriksaan atas penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan beasiswa ADEM ditemukan permasalahan sebagai berikut.

(1) Sekolah belum menyampaikan LPJ sesuai yang diatur dalam Juknis

Puslapdik pada Tahun 2023 telah menyalurkan biaya pendidikan bantuan ADEM kepada 299 sekolah dengan realisasi senilai Rp74.246.000.000,00 melalui bank penyalur ke rekening sekolah. Dalam juknis bantuan ADEM disebutkan sekolah menyampaikan LPJ penyaluran dan penggunaan dana beasiswa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Wawancara dengan pengelola bantuan menyebutkan mekanisme pelaporan bantuan ADEM yaitu mengunggah LPJ dalam aplikasi Simadem. Pengelola bantuan memantau dan memverifikasi LPJ melalui aplikasi tersebut. Jika terdapat LPJ yang belum sesuai maka pengelola meminta sekolah untuk memperbaiki LPJ. Hasil pengujian atas LPJ diketahui sebanyak 208 sekolah dengan bantuan senilai Rp56.640.000.000,00 telah mengunggah LPJ per 31 Desember 2023. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sekolah yang belum menyampaikan LPJ sebanyak 91 sekolah dengan bantuan senilai Rp17.606.000.000,00.

Hasil pengujian pelaporan per 17 April 2024 pada aplikasi Simadem dengan sekolah penerima, diketahui terdapat 15 sekolah belum mengunggah LPJ dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 120. Sekolah Belum Mengupload LPJ

No.	NPSN	Nama Sekolah	Nilai Bantuan (Rp)
1	10307523	SMAN 1 Bukittinggi	120.000.000,00
2	10310780	SMKN 1 Sumatera Barat	60.000.000,00
3	10310903	SMAN 1 Sumatera Barat	120.000.000,00
4	20246335	SMAS Plus Yaspida	12.000.000,00
5	20247286	SMAS Nasional	24.000.000,00
6	20252607	SMKS Terpadu 1 Yaspida Sukabumi	12.000.000,00

No.	NPSN	Nama Sekolah	Nilai Bantuan (Rp)
7	20319334	SMKN 2 Demak	24.000.000,00
8	30105203	SMAN 9 Pontianak	120.000.000,00
9	30302954	SMKN 1 Tanjung	108.000.000,00
10	30311402	SMKN 2 Simpang Empat	120.000.000,00
11	30313385	SMKS DDI	36.000.000,00
12	69756883	SMKS Mutiara Bangsa Sebatik	132.000.000,00
13	69862591	SMAN 2 Sumatera Barat	108.000.000,00
14	69946230	SMK Abdurrahman Wahid Karanggeneng	120.000.000,00
15	70003746	SMK Peternakan Ciamis	60.000.000,00
Jumlah			**1.176.000.000,00**

(2) Empat Sekolah belum lengkap menyampaikan LPJ

Dalam juknis bantuan ADEM disebutkan penyaluran biaya pendidikan ke sekolah dilakukan satu kali dalam satu tahun. Hasil pengujian data penyaluran diketahui penyaluran bantuan ADEM dilakukan ke sekolah dua kali dalam satu tahun. Konfirmasi kepada pengelola ADEM meyebutkan penyaluran dilakukan dua kali dengan memisahkan antara penyaluran untuk siswa baru dan siswa lanjutan (*ongoing*). Penyaluran bantuan siswa baru dilakukan setelah siswa telah sampai ke sekolah untuk memastikan tidak ada siswa yang mengundurkan diri.

Berdasarkan wawancara dengan sekolah yang diuji petik dan pengujian aplikasi Simadem diketahui pelaporan LPJ dibuat terpisah sesuai dana yang diterima untuk siswa baru dan siswa *ongoing.* Hasil pengujian diketahui terdapat empat sekolah yang menerima penyaluran siswa baru dan *ongoing* namun baru menyampaikan LPJ siswa baru dan belum menyampaikan LPJ siswa *ongoing* dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 121. Sekolah Belum Lengkap Melaporkan LPJ

No.	NPSN	Nama Sekolah	Nilai Bantuan Siswa Baru/ Sudah LPJ (Rp)	Nilai Bantuan Siswa *Ongoing*/ Belum LPJ (Rp)
1	20402838	SMK Muhammadiyah 3 Wates	24.000.000,00	48.000.000,00
2	20533641	SMAN 9 Malang	36.000.000,00	24.000.000,00
3	30105243	SMKN 1 Pontianak	84.000.000,00	120.000.000,00
4	40313196	SMKS Pelayaran Katangka Makassar	24.000.000,00	24.000.000,00
Jumlah			**168.000.000,00**	**216.000.000,00**

b) Penerima bantuan penghargaan dalam bentuk uang pada Pusbanglin BPP Bahasa belum menyampaikan LPJ senilai Rp181.757.700,00

Hasil analisis Juknis Penyaluran Banpem Bidang Kebahasaan dan Kesastraan yaitu pada Keputusan KPA Pusbanglin BPP Bahasa Nomor 0568/I/Hk.06/2022 tanggal 31 Oktober 2023 menunjukkan bahwa berdasarkan juknis tersebut, jenis banpem fasilitasi wajib membuat laporan pelaksanaan atas banpem Bidang Kebahasaan dan Kesastraan yaitu Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2023 yang disampaikan oleh penerima Bantuan Fasilitasi paling lambat tujuh hari kalender setelah kegiatan terlaksana. Sedangkan, bantuan penghargaan perseorangan tidak diminta untuk menyampaikan LPJ karena bantuan penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada komunitas sastra atau perseorangan atas kinerjanya

yang luar biasa dalam aktivitas kesastraan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem kesastraan.

Berdasarkan PKS antara BPP Bahasa dengan penerima bantuan ditetapkan tahapan proses pembayaran dan pertangungjawaban atas bantuan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan yaitu Penguatan Komunitas Sastra, yang dibagi dalam dua tahapan, yaitu:

(1) Tahap pertama dibayarkan 70% dari total bantuan; dan

(2) Tahap kedua dibayarkan 30% dari total bantuan apabila dana tahap pertama telah digunakan senilai 80%.

Penyaluran bantuan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan yaitu Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2023 dilakukan dalam dua periode bantuan yaitu:

(1) Periode I diberikan Bantuan Fasilitasi kepada 28 lembaga/komunitas sastra senilai Rp2.774.163.900,00 yang disalurkan Tahap I senilai Rp1.941.914.730,00 dan Tahap II senilai Rp832.249.170,00; dan

(2) Periode II diberikan Bantuan Fasilitasi kepada 17 lembaga/komunitas sastra senilai Rp1.676.593.800,00 yang disalurkan Tahap I senilai Rp1.173.615.660,00 dan Tahap II senilai Rp502.978.140,00.

Penelusuran atas penyampaian Laporan Pelaksanaan Belanja Barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 dari 45 lembaga/komunitas penerima bantuan, masih terdapat lima penerima Bantuan Fasilitasi yang belum menyampaikan LPJ Tahap II senilai Rp181.757.700,00 yaitu:

(1) Bantuan periode I, sebanyak tiga penerima bantuan periode I belum menyampaikan LPJ Tahap II senilai Rp110.654.700,00; dan

(2) Bantuan periode II, sebanyak dua penerima bantuan periode II belum menyampaikan LPJ Tahap II senilai Rp71.103.000,00

Secara rinci dapat dilihat dalam **Lampiran B.8.6.**

Selain itu terdapat kelemahan dalam pelaksanaan dan pelaporan yang dikirim komunitas diantaranya:

(1) Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai ketentuan, dimana seharusnya dipotong senilai 2,5% tetapi dipotong senilai 5%-6% pada Yayasan Cita Cerita Anak, Ruang Rupa Metamorfosa dan Komunitas Jangka Nusantara.

(2) BKU belum dilampirkan pada LPJ pada Kampung Seni Tegal, Plak Plik Ngataku, dan Yayasan Cita Cerita Anak.

(3) Penerima bantuan fasilitasi yang menggunakan komponen tidak sesuai proporsi biaya pada Kampung Seni Tegal yaitu untuk pembayaran jasa penyutradaraan, jasa pemain, dan jasa pemusik melebihi proporsi 20%.

Rincian penjelasan pada **Lampiran B.8.7**.

c) LPJ atas Banpem pada Ditjen Diksi belum disampaikan senilai Rp5.019.750.000,00

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa meskipun juknis banpem telah mencantumkan mekanisme penyampaian LPJ namun penerima banpem belum tertib dalam menyerahkan LPJ sesuai juknis pada satker sebagai berikut.

(1) Direktorat SMK senilai Rp4.396.500.000,00

Tim verifikator Banpem pada Direktorat SMK melakukan verifikasi LPJ Banpem melalui aplikasi Takola. Berdasarkan data tarikan dari aplikasi Takola, sampai dengan 31 Maret 2024 terdapat penerima bantuan yang belum menyampaikan LPJ senilai Rp4.396.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 122. LPJ atas Banpem yang Belum Disampaikan Tahun 2023 pada Direktorat SMK

No	Banpem	Jumlah Sekolah	Saldo (Rp)
1	Pengembangan SMK Berbasis Industri 4.0 Tahun 2023	0	0,00
2	Pelaksanaan Kelas Industri di SMK	2	100.000.000,00
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Tahun 2023	4	84.000.000,00
4	Pengembangan *Teaching Factory* SMK Tahun 2023	0	0,00
5	SMK yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tahun 2023	13	650.000.000,00
6	Pelaksanaan Sertifikasi Bahasa Asing Lainnya Non-Bahasa Inggris Tahun 2023	0	0,00
7	Program SMK PK Tahun 2023	14	3.562.500.000,00
Jumlah		**33**	**4.396.500.000,00**

Rincian atas saldo LPJ yang belum disampaikan pada Direktorat SMK dapat dilihat pada **Lampiran B.8.8.**

(2) Direktorat Suslat senilai Rp374.250.000,00

Berdasarkan data dari aplikasi banper.binsuslat.kemdikbud.go.id, diketahui bahwa sampai dengan 31 Maret 2024 LPJ banpem yang belum diterima Direktorat Suslat senilai Rp374.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 123. LPJ atas Banpem yang Belum Disampaikan Tahun 2023 pada Direktorat Suslat

No	Banpem	Jumlah Lembaga	Jumlah Penerima	Saldo (Rp)
1	Program PKW Tahun 2023	5	99	274.250.000,00
2	Program PKK Tahun 2023	1	20	100.000.000,00
Jumlah		**6**	**119**	**374.250.000,00**

Rincian atas saldo LPJ yang belum disampaikan pada Direktorat Suslat dapat dilihat pada **Lampiran B.8.9.**

(3) Delapan penerima banpem PKM pada Direktorat APTV belum mengisi *logbook* keuangan per 31 Desember 2023 senilai Rp54.000.000,00

Logbook keuangan digunakan untuk mengetahui jumlah penggunaan dan sisa dana PKM oleh mahasiswa penerima Banpem. Dengan belum mengisi *logbook* keuangan, tim pengelola PKM tidak bisa mengetahui pengeluaran riil dan sisa dana bantuan PKM. Sehingga perhitungan piutang per 31 Desember 2023 tidak dapat dilakukan. Selain itu sesuai aplikasi SIMBelmawa, diketahui bahwa mahasiswa penerima banpem masih lalai dalam mengisi *logbook* keuangan.

Hasil pengujian data Tim IT per 15 Desember 2023 (setelah SIM Belmawa ditutup) diketahui bahwa masih terdapat delapan penerima bantuan dengan total senilai Rp54.000.000,00 yang belum mengisi *logbook* keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 124. Penerima Dana PKM yang Belum Mengisi *Logbook* Keuangan

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Penerima (mahasiswa)	Dana yang Disetujui (Rp)
1	POLBAN	1	6.000.000,00
2	Politeknik Negeri Bengkalis	2	14.250.000,00
3	Politeknik Negeri Jember	2	15.000.000,00
4	Politeknik Negeri Lhoksumawe	1	6.000.000,00
5	Politeknik Negeri Ujung Pandang	1	6.000.000,00
6	Politeknik Perikanan Negeri Tual	1	6.750.000,00
Jumlah		**8**	**54.000.000,00**

Rincian penerima bantuan yang belum mengisi *logbook* pada **Lampiran B.8.10**.

Atas mahasiswa yang belum mengisi *logbook* tersebut, pengelola PKM telah mengirimkan surat kepada Direktur tentang Penggunaan Dana PKM sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Atas tindak lanjut surat tersebut, mahasiswa penerima bantuan seluruhnya telah mengisi *logbook* keuangan di bulan Januari 2024 dan tidak terdapat sisa dana.

(4) Pertanggungjawaban dana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) pada Direktorat APTV belum mengisi *logbook* keuangan senilai Rp195.000.000,00

Dalam Juknis disebutkan bahwa Organisasi Mahasiswa penerima dana P2MD dalam melaksanakan kegiatan, wajib mengisikan catatan harian (*logbook*) yang terdiri atas catatan kegiatan dan catatan keuangan. Dalam *logbook* tersebut dapat dilihat progres kegiatan dan keuangan, termasuk didalamnya penerima Banpem wajib mengunggah bukti pengeluaran keuangan. Selain mengisi *logbook*, penerima Banpem juga diwajibkan untuk menyusun laporan dan menyampaikan LPJ beserta kelengkapannya melalui laman kemahasiswaanptvp.kemendikbud.go.id. Kelengkapan laporan akhir terdiri atas panduan aplikasi/program, tautan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, tautan video pelaksanaan kegiatan, poster kegiatan, isian profil, dan surat pernyataan pelaksanaan kegiatan.

Periode penyampaikan Laporan Akhir adalah 30 November 2023 untuk *batch* 1 dan 6 Desember 2023 untuk *batch* 2. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan P2MD, diketahui permasalahan sebagai berikut:

Mahasiswa penerima banpem P2MD diwajibkan mengisi *logbook* dalam laman kemahasiswaanptvp.kemendikbud.go.id. Dengan mengisi *logbook* tersebut, dapat diketahui jumlah dana yang digunakan dan sisa dana yang harus disetor ke Kas Negara.

Hasil tarikan data dari laman per tanggal 13 Desember 2023 oleh tim IT P2MD setelah laman kemahasiswaanptvp.kemendikbud.go.id ditutup, diketahui masih terdapat delapan penerima dana P2MD yang belum mengisi *logbook* keuangan

sehingga terlihat dana P2MD tidak digunakan senilai Rp195.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 125. Penerima Dana P2MD yang Belum Mengisi *Logbook* Keuangan

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Penerima Dana P2MD (mahasiswa)	Dana P2MD yang Disetujui (Rp)
1	Polban	1	28.000.000,00
2	Politeknik Negeri Jakarta	3	68.500.000,00
3	Politeknik Negeri Kupang	1	20.000.000,00
4	Politeknik Negeri Padang	1	25.000.000,00
5	Polines	1	25.000.000,00
6	Universitas Jambi	1	28.500.000,00
	Jumlah	**8**	**195.000.000,00**

Rincian penerima dana P2MD yang belum mengisi *logbook* keuangan pada **Lampiran B.8.11.**

Lebih lanjut, diketahui bahwa delapan penerima dana P2MD tersebut telah mengisi logbook keuangan pada bulan Januari 2024. Dengan baru diisinya *logbook* pada bulan Januari 2024, perhitungan piutang per 31 Desember 2023 tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab pengelola P2MD, hal tersebut karena penerima banpem kurang memahami pentingnya mengisi *logbook* keuangan.

d) Kegiatan pengabdian masyarakat dari dana banpem Direktorat RTPM tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp13.368.000,00

Hasil pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diketahui terdapat tiga kegiatan pada tiga PTS yang penggunaan dananya tidak didukung bukti pertanggungjawaban dengan senilai Rp13.368.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Universitas Yarsi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui *Packaging* Produk, Pemasaran Berbasis Medsos dan Akses KUR Perbankan Berbasis Digital pada Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Jawa Barat, dengan Ketua Tim HB. Biaya pengabdian yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp3.417.000,00 dengan rincian pada **Lampiran B.8.12**.

(2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul PKM Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila Melalui Program Pendampingan Penyusunan Buku Ramah Cerna Berbasis *Human* Security untuk Mahasiswa Calon Guru SD, dengan Ketua Tim SA. Biaya pengabdian yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp6.151.000,00 dengan rincian pada **Lampiran B.8.13**.

(3) Universitas Indraprasta PGRI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul Penerapan *Eco Enzym* Berbasis Teknologi Sensor di kelurahan Halim Perdana Kusuma, dengan Ketua

Tim PP. Biaya pengabdian yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp3.800.000,00 dengan rincian pada **Lampiran B.8.14**.

3) Penggunaan Banpem tidak didukung bukti pertanggungjawaban memadai

a) Pembayaran transport narasumber banpem Program SMK PK berbasis industri 4.0 tidak berdasarkan bukti *at cost* sebesar Rp4.000.000,00

SMK Semen Gresik penerima dana banpem Program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan dan SMK Miftahul Ulum Surabaya, adalah penerima dana banpem Pengembangan SMK Berbasis Industri 4.0. Terdapat pembayaran transport narasumber kegiatan total senilai Rp4.000.000,00 tidak berdasarkan pada bukti *at cost* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126. Rincian Pembayaran Transport Narasumber

No	Nama Sekolah	Nama Kegiatan	Jumlah (orang)	Harga Satuan (Rp)	Total Pembayaran (Rp)	Ket
1	SMK Semen Gresik	*Workshop* RTL *Reskilling Upskilling*	1	800.000,00	800.000,00	1 kali perjalanan
		Workshop Pembelajaran Guru di Sekolah	2	800.000,00	1.600.000,00	1 kali perjalanan
2	SMK Miftahul Ulum	Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum Berbasis Industri dalam Kurikulum Merdeka	1	1.600.000,00	1.600.000,00	2 kali perjalanan
Jumlah					**4.000.000,00**	

Hasil konfirmasi dengan Kepala Sekolah diketahui bahwa pembayaran transport narasumber mengikuti tarif yang ada pada RAB yaitu senilai Rp800.000,00 untuk satu kali perjalanan. Sekolah belum mengetahui jika pembayaran transport harus menggunakan bukti *at cost* sehingga, sekolah tidak meminta bukti perjalanan kepada narasumber. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari PPK banpem Program SMK PK pemahaman terkait pembayaran transport dan pajak telah diinformasikan pada saat dilaksanakannya bimtek penerima bantuan.

b) Penyaluran dana PKM sebesar 20% tidak sesuai ketentuan senilai Rp13.200.000,00 pada Direktorat APTV

PKM merupakan program yang dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Juknis diatur dalam Perdirjen Diksi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Juknis Banpem Program Kreativitas Mahasiswa PTV Tahun 2023.

Dalam Juknis diatur bahwa pencairan bantuan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I senilai 80% dan tahap II senilai 20% saat kelompok mahasiswa penerima Skema Pendanaan telah mengunggah laporan akhir. Hasil pemeriksaan terhadap rekapitulasi SP2D penyaluran dana PKM skema pendanaan dan hasil penarikan data per tanggal 15 Desember 2023 diketahui bahwa seluruh pembayaran tahap 2 telah direalisasikan pada bulan Oktober – Desember 2023 dan masih terdapat laporan akhir yang belum diunggah sebanyak sembilan kelompok mahasiswa penerima bantuan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 127. Rekapitulasi Kelompok Mahasiswa yang Belum Mengunggah Laporan Akhir

No	Nama Perguruan Tinggi	Nama Ketua	Dana yang Diperoleh (Rp)
1	Politeknik Negeri Padang	JA	6.000.000,00
2	Politeknik Negeri Bengkalis	AA	8.250.000,00
3	Polines	RCP	7.750.000,00
4	Polines	ADK	8.500.000,00
5	Polines	IM	7.750.000,00
6	PNUP	ANHH	6.000.000,00
7	Politeknik Negeri Jember	EAS	7.250.000,00
8	Politeknik Negeri Jember	RF	8.500.000,00
9	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	MMAA	6.000.000,00
	Jumlah		**66.000.000,00**

Dengan belum diunggahnya laporan akhir, seharusnya 20% belum dibayarkan senilai Rp13.200.000,00 (20% x Rp66.000.000,00).

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Pengelola PKM, sisa 20% dicairkan pada saat seluruh kelompok mahasiswa penerima dana bantuan PKM hadir dalam kegiatan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM Vokasi yang dilakukan secara daring pada tanggal 20 – 24 September 2023.

4) Sisa dana Banpem belum dikembalikan

a) Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Direktorat RTPM belum dikembalikan senilai Rp63.793.000,00

Terdapat tiga penerima bantuan pada dua PTS yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai ketentuan dan belum mengembalikan dana bantuan pengabdian kepada masyarakat senilai Rp63.793.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 128. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang Tidak Sesuai Ketentuan

No	Nama dan Institusi	Dana Disetujui (Rp)	Dana yang Harus Dikembalikan (Rp)	Keterangan
1	CS Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri (LLDikti X)	43.543.000	43.543.000	a. Tidak hadir monev tahap kesatu dan monev susulan tahap kesatu, serta tidak mengunggah laporan kemajuan. b. Wajib mengembalikan dana 70% dan tidak direkomendasikan untuk menerima pencairan dana 30%. c. Penutupan akses usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang terkena sanksi selama 2 tahun terhitung sejak tahun 2024. d. Wajib mengembalikan dana kepada Kas Negara sesuai besaran dana.
2	AL Universitas Pasifik Morotai (LLDikti XII)	32.500.000	9.750.000	a. Hasil penilaian pelaksanaan monev di bawah standar minimum dan adanya duplikasi pada program

No	Nama dan Institusi	Dana Disetujui (Rp)	Dana yang Harus Dikembalikan (Rp)	Keterangan
3	MP Universitas Pasifik Morotai (LLDikti XII)	35.000.000	10.500.000	Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu Perguruan Tinggi. b. Tidak direkomendasikan untuk menerima pencairan dana 30%. c. Penutupan akses dosen yang terkena sanksi selama 2 tahun terhitung sejak tahun 2024. d. Wajib mengembalikan dana kepada Kas Negara.
Jumlah		**111.043.000,00**	**63.793.000,00**	

Direktorat RTPM telah menyampaikan surat tentang permohonan pengembalian dana program Pengabdiaan Masyarakat yang ditujukan kepada LLDikti X dan LLDikti XII sebagai berikut.

(1) Surat kepada LLDikti X Nomor 1508/E5/DT.06.01/2023 tanggal 23 November 2023 terkait surat permohonan pengembalian dana program Pengabdian kepada masyarakat senilai Rp43.543.000,00; dan

(2) Surat kepada LLDikti XII Nomor 1508/E5/DT.06.01/2023 tanggal 23 November 2023 terkait surat permohonan pengembalian dana program Pengabdian kepada masyarakat Rp20.250.000,00.

Surat permohononan pengembalian dana tersebut sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari LLDikti X dan LLDikti XII.

b) Sekolah belum mengembalikan sisa dana ADEM senilai Rp8.000.000,00

Hasil pemeriksaan kunjungan ke sekolah diketahui terdapat siswa baru yang mengundurkan diri dari program ADEM pada SMA Kristen Hidup Baru dan sudah tidak melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Atas hal tersebut sekolah belum mengembalikan sisa bantuan ADEM senilai Rp8.000.000,00 ke Kas Negara.

c) Sisa dana Banpem PKM pada Direktorat APTV senilai Rp8.324.709,00 belum dikembalikan ke Kas Negara

Dalam Juknis PKM disebutkan bahwa apabila ada sisa dana yang tidak digunakan disetorkan ke rekening Kas Negara dengan terlebih dahulu pengajuan lembar SIMPONI kepada Dit APTV dan mengirimkan salinan bukti setor yang sudah divalidasi ke Dit APTV. Namun juknis tersebut belum mengatur jangka waktu penyetoran ke Kas Negara.

Hasil pemeriksaan terhadap bukti setor sisa dana PKM, diketahui s.d. tanggal 20 Maret 2024 masih terdapat sisa dana yang belum disetorkan oleh 29 mahasiswa penerima dana PKM dengan total senilai Rp8.324.709,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 129. Rekapitulasi Sisa Dana PKM yang Belum Disetorkan

No	Nama Perguruan Tinggi	Jml Mahasiswa Penerima Bantuan	Dana yang Disetujui (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	Politeknik Elbajo Commodus	1	6.000.000,00	5.610.000,00	390.000,00

No	Nama Perguruan Tinggi	Jml Mahasiswa Penerima Bantuan	Dana yang Disetujui (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Sisa Dana (Rp)
2	Polban	2	12.750.000,00	11.390.191,00	1.359.809,00
3	Politeknik Negeri Bengkalis	1	8.250.000,00	8.127.000,00	123.000,00
4	Politeknik Negeri Jember	6	45.000.000,00	44.105.813,00	894.187,00
5	Politeknik Negeri Madura	1	6.000.000,00	5.693.500,00	306.500,00
6	Politeknik Negeri Padang	1	6.000.000,00	4.339.901,00	1.660.099,00
7	Polnes	8	57.250.000,00	55.040.509,00	2.209.491,00
8	Polsri	4	24.250.000,00	23.710.075,00	539.925,00
9	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	2	13.750.000,00	13.114.000,00	636.000,00
10	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	2	15.000.000,00	14.798.500,00	201.500,00
11	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	1	6.000.000,00	5.995.802,00	4.198,00
Total		**29**	**200.250.000,00**	**191.925.291,00**	**8.324.709,00**

Rincian sisa dana PKM pada **Lampiran B.8.15.**

Hasil konfirmasi dengan lima penerima bantuan PKM diketahui bahwa sisa dana tersebut belum disetorkan karena:

(1) Masih ada kegiatan, sehingga belum memproses pengembalian dana; dan

(2) Belum berkomunikasi dengan pihak kampus terkait sisa dana, sehingga dana masih berada di bendahara kelompok mahasiswa atau masih di rekening kampus.

d) Sisa dana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) pada Direktorat APTV di lima PTPPV belum disetorkan senilai Rp9.097.318,00

Hasil tindak lanjut dari surat tersebut, sampai dengan 20 Maret 2024 masih terdapat tujuh penerima dana P2MD yang belum menyetorkan sisa dana total senilai Rp9.097.318,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 130. Rekapitulasi Sisa Dana Banpem P2MD yang Belum Disetorkan

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Penerima Banpem	Dana yang disetujui (Rp)	Dana Digunakan (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	Politeknik Negeri Padang	1	25.000.000,00	24.995.500,00	4.500,00
2	Polsri	3	85.000.000,00	83.533.440,00	1.466.560,00
3	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	1	30.000.000,00	26.893.500,00	3.106.500,00
4	STMIK Widya Utama	1	29.000.000,00	28.999.792,00	208,00
5	UNSOED	1	26.000.000,00	21.480.450,00	4.519.550,00
Jumlah		**7**			**9.097.318,00**

Rincian sisa dana P2MD yang belum disetorkan pada **Lampiran B.8.16.**

Hasil konfirmasi dengan dua penerima P2MD dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dan Unsoed diketahui bahwa penerima bantuan:

(1) Tidak mengetahui prosedur pengembalian sisa dana P2MD; dan

(2) Terjadi kesalahan informasi antara penerima dana dengan pihak kampus terkait prosedur pengembalian dana, sehingga sisa dana belum disetorkan.

e) Pertanggungjawaban sisa dana Program Pembinaan UMKM Berbasis Kemitraan Tahun 2023 pada Setditjen Diktiristek melewati tahun anggaran berkenaan

Berdasarkan juknis program UMKM disebutkan bahwa, PTS pelaksanaan program bertanggungjawab dalam:

(1) Laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran kepada PPK Setditjen Diktiristek yang meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian indikator, dan laporan serapan keuangan; dan

(2) Laporan Akhir Pelaksanaan Program yang meliputi laporan pelaksanaan program, capaian luaran dan indikator kinerja, laporan serapan dana akhir yang didukung oleh data (kelengkapan/lampiran) yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan setelah selesai pelaksanaan program di tahun berjalan.

Berdasarkan laporan anggaran dan realisasi penggunaan dana bantuan program UMKM oleh PTS penerima yang dilaporkan melalui aplikasi https://program.kedaireka.id/ diketahui bahwa, masih terdapat sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2023 senilai Rp555.247.898,00. Hal ini terjadi karena nilai laporan realisasi penggunaan dana oleh PTS penerima lebih kecil dari rencana anggaran biaya yang telah diberikan Setditjen berdasarkan kontrak, rincian dapat dilihat pada **Lampiran B.8.17**. Sisa dana yang tersebut baru dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp555.247.898,00 pada bulan Maret 2024.

Lebih lanjut, koordinator pelaksana program Sesditjendikti menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran sisa dana program yang melampaui tahun anggaran disebabkan karena proses verifikasi dokumen realisasi pertanggungjawaban PTS penerima, pengajuan kode *billing* kepada Setditjen Diktiristek dan penyetoran sisa dana ke Kas Negara membutuhkan waktu. Sehingga, baru dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

5) Bantuan penelitian belum dilengkapi luaran wajib program senilai Rp676.182.902.850,00

a) Penerima bantuan pembinaan UMKM berbasis kemitraan tahun 2023 Setditjen Diktiristek senilai Rp2.063.211.850,00 belum melengkapi unggahan berupa bukti dukung atas luaran wajib

Berdasarkan juknis, Program UMKM mempunyai luaran wajib, yaitu: menghasilkan produk baik dalam bentuk barang/aset berwujud (misal perangkat keras termasuk alat produksi) maupun barang/aset tak berwujud (antara lain berupa sistem informasi, model intervensi, strategi bisnis, manajemen usaha, pemasaran, tata kelola, desain produk, dan formula). Luaran tersebut harus diunggah dalam aplikasi https://program.kedaireka.id/umkm/ dengan dilengkapi laporan akhir kegiatan, laporan penggunaan dana serta bukti setoran pengembalian sisa dana. Berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan, PTS penerima harus mengunggah LPJ paling lambat tanggal 29 Desember 2024.

Hasil analisa secara uji petik terhadap luaran wajib PTS penerima diketahui bahwa, terdapat 10 PTS penerima dengan total bantuan senilai Rp2.063.211.850,00 yang

belum melengkapi unggahan berupa bukti dukung atas luaran wajib yang dijanjikan dalam proposal kegiatan. Rincian dalam **Lampiran B.8.18**.

Koordinator pelaksana program Sekditjen Diktiristek menjelaskan bahwa, terdapat bukti pendukung yang belum lengkap diunggah oleh masing-masing PTS penerima. Tim pelaksana program UMKM juga belum melakukan verifikasi atas *output* yang dihasilkan oleh PTS penerima bantuan termasuk bukti pendukung luaran wajibnya. Kondisi tersebut dijelaskan karena padatnya waktu verifikasi di akhir bulan Desember 2023. Sehingga rencananya kegiatan tersebut akan dilakukan pada awal tahun 2024.

b) Dana bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Direktorat RTPM belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan senilai Rp674.119.691.000,00 atas penelitian yang belum memenuhi kriteria luaran

Panduan mengatur bahwa peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan *output* riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui aplikasi Basis Informasi Penelitian dan Pengabdaian kepada Masyarakat (BIMA). Tahap pelaporan akhir pelaksanaan program merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program secara tertulis yang dilakukan oleh peneliti/pelaksana pada skema pendanaan monotahun dan multitahun di tahun terakhir pelaksanaan. Ketua tim berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan mengikuti ketentuan antara lain melaporkan luaran pada pelaporan akhir pelaksanaan.

Hasil pemeriksaaan atas data realisasi belanja penelitian Tahun 2023 dan 2022 pada aplikasi BIMA diketahui sampai dengan pemeriksaan berakhir, terdapat penelitian yang belum memenuhi kriteria luaran senilai Rp674.119.691.000,00 dengan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 131. Penelitian Tahun 2023 dan 2022 yang Belum Memenuhi Kriteria Luaran

No	Program	Dana Bantuan (Rp)	Memenuhi Kriteria Luaran (Rp)	Belum Memenuhi Kriteria Luaran (Rp)
I	**Tahun 2023**			
1	Penelitian	697.233.328.000,00	392.588.653.000,00	304.644.675.000,00
2	Pengabdian kepada Masyarakat	74.582.522.000,00	54.427.813.000,00	20.154.709.000,00
3	Kosabangsa	25.484.810.000,00	5.049.610.000,00	20.435.200.000,00
4	Prototipe	8.774.600.000,00	7.468.610.000,00	1.305.990.000,00
	Jumlah I	**806.075.260.000,00**	**459.534.686.000,00**	**346.540.574.000,00**
II	**Tahun 2022**			
1	Penelitian	723.759.751.000,00	419.081.649.000,00	304.678.102.000,00
2	Pengabdian kepada Masyarakat	50.144.236.000,00	31.846.401.000,00	18.297.835.000,00
3	Kosabangsa	7.222.480.000,00	2.619.300.000,00	4.603.180.000,00
4	Prototipe	1.997.000.000,00	1.997.000.000,00	-
	Jumlah II	**783.123.467.000,00**	**455.544.350.000,00**	**327.579.117.000,00**
	Jumlah I + II	**1.589.198.727.000,00**	**915.079.036.000,00**	**674.119.691.000,00**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran B.8.19** s.d. **B.8.23**.

Atas penelitian yang belum memenuhi kriteria luaran senilai Rp674.119.691.000,00 tersebut, Direktorat RTPM belum menyajikan dalam LK sebagai Belanja Dibayar di Muka. PPK menjelaskan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi bantuan untuk melakukan memverifikasi laporan dan penilaian hasil/validasi luaran penelitian oleh Direktorat RTPM dilakukan pada bulan Juni setiap tahun, sehingga PPK belum dapat menyajikan data dukung penyajian beban dibayar dimuka pada saat penyusunan LK.

d. Monev Banpem kurang memadai

1) Setditjen Diktiristek belum melakukan verifikasi laporan kemajuan dan penggunaan dana program UMKM secara memadai dan menyusun laporan akhir pelaksanaan program

Tim program UMKM berbasis kemitraan Setditjen Diktiristek bertugas untuk melakukan monev program melalui aplikasi sistem pelaporan. Monev dilakukan atas realisasi keuangan yang diinput oleh PTS dan capaian target luaran yang ditargetkan dalam proposal kegiatan. Salah satu kewajiban dari Tim program UMKM Setditjen Diktiristek adalah melakukan verifikasi atas laporan akhir kegiatan dan evaluasi dampak setelah program berakhir, serta menyusun laporan akhir pelaksanaan program. Penerima mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah. Apabila dari hasil monev terdapat dokumen pertanggungjawaban yang belum sesuai, maka akan diminta untuk diperbaiki dan diunggah kembali melalui akun masing-masing PTS.

Hasil konfirmasi kepada tim pelaksana program diketahui bahwa Setditjen Diktiristek belum melakukan verifikasi laporan kemajuan dan penggunaan dana program UMKM, serta menyusun laporan akhir pelaksanaan program. Proses verifikasi dan evaluasi luaran direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Hal tersebut mempertimbangkan kelanjutan program UMKM, dampak bantuan terhadap UMKM, dan melihat respon dari penerima manfaat. Adapun yang termasuk kriteria keberhasilan antara lain berupa Ketercapaian luaran, Program berkelanjutan, UMKM merasakan dampat positif dari pelaksanaan program, namun tidak terbatas hanya profit, perluasan cakupan usaha mitra, peningkatan kapasitas UMKM dalam mengelola usaha, memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar.

2) Penyaluran dana bantuan penelitian sampai dengan penerima tidak didukung dengan pengendalian yang memadai

Penyaluran dana bantuan penelitian kepada peneliti sebagai penerima pada PTN dan melalui LLDikti pada PTS berpedoman pada PMK Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban APBN, serta Keputusan Dirjendiktiristek Nomor 29/E/KPT/2023 tentang Juknis Bantuan Pendanaan Program Operasional PTN untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Juknis tersebut mengatur bahwa penyaluran dana bantuan penelitian dilaksanakan secara sekaligus sebelum pelaksanaan penelitian atau bertahap, sebagaimana diatur dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pembayaran secara sekaligus dapat dilaksanakan terhadap penelitian dengan nilai kontrak sampai dengan Rp100.000.000,00. Pembayaran secara bertahap dilaksanakan terhadap penelitian dengan nilai kontrak di atas Rpl00.000.000,00. Proses pembayaran secara bertahap

dilakukan dua kali pembayaran yaitu pembayaran Tahap I 70% dan pembayaran Tahap II 30%.

Hasil permintaan keterangan dengan PPK dan Pengelola penelitian pada Direktorat RTPM menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan penelitian dilakukan melalui transfer kepada masing-masing peneliti/pelaksana melalui dua tahap yakni.

a) Tahap I pencairan 70% dari total dana penelitian, dilakukan setelah kontrak ditandatangani; dan

b) Tahap II pencairan 30%, setelah peneliti menyampaikan laporan kemajuan penelitian yang telah dilengkapi rekomendasi dari *reviewer*.

Hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada PPK dan Pengelola Penelitian bahwa atas penyaluran dana bantuan penelitian diketahui:

a) Penyaluran dana bantuan dari Direktorat RTPM ke rekening penampungan LLDikti I s.d LLDikti XVI untuk diteruskan ke PTS. Penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan berjenjang mulai Direktorat RTPM sampai dengan penerima yaitu peneliti/pelaksana. Penyaluran dana bantuan tersebut berdasarkan kontrak berjenjang yaitu kontrak Direktorat RTPM dengan LLDikti, kontrak LLDikti dengan PTS, dan kontrak PTS melalui LPPM dengan Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian.

b) Penyaluran dana bantuan dari Direktorat RTPM ke rekening penampungan PTS. Penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan berjenjang mulai Direktorat RTPM sampai dengan penerima yaitu peneliti/pelaksana. Penyaluran dana bantuan tersebut berdasarkan kontrak berjenjang yaitu kontrak Direktorat RTPM dengan PTN dan kontrak PTN melalui LPPM dengan Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian.

c) Monitoring atas penyaluran dana bantuan penelitian hanya sampai dengan rekening LLDikti dan PTN. Namun PPK dan Pengelola Penelitian tidak melakukan monitoring penyaluran dana bantuan penelitian sampai dengan penerima yaitu peneliti (LPPM PTS dan PTN dan Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian).

3) Direktorat PMPK belum melakukan evaluasi kelulusan peserta Banpem Keaksaraan Utama Mandiri

Direktorat PMPK pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (BOP KUM) kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi yang menekankan pada peningkatan keberaksaraan dan pengenalan kemampuan berusaha. Pendidikan KUM bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada kemampuan berusaha mandiri dan meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri agar menjadi warga masyarakat yang produktif.

Pada tahun 2023, BOP KUM dianggarkan senilai Rp10.638.000.000,00 dengan sasaran 17.730 orang pada 450 PKBM di 75 Kabupaten/Kota. Dari hasil uji petik terhadap 91 LPJ Banpem, diketahui bahwa tujuan pemberian BOP KUM belum sepenuhnya

tercapai. Terdapat 31 PKBM yang tidak menyebutkan peserta didik yang dinyatakan lulus/memperoleh SUKMA-L. Rincian dapat dilihat di **Lampiran B.8.24**.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikenakan tarif pajak 5%.

b. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah Pasal 11 yang menyatakan bahwa PPK pada pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c) memiliki tugas antara lain: mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA, dan menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.

c. Petunjuk Teknis Akuntansi 15 tentang Penentuan Kapitalisasi, Perolehan awal, dan Pengeluaran Setelah Perolehan Atas Suatu Aset Tetap pada romawi II:

   1) Huruf A angka 8 yang menyatakan bahwa Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca. Berikut adalah ketentuan terkait kapitalisasi BMN:

      a) Kapitalisasi BMN meliputi:

         (1) Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau

         (2) Peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat.

      b) Nilai satuan minimum Kapitalisasi BMN sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk:

         (1) Peralatan dan mesin; atau

         (2) Aset tetap renovasi-peralatan dan mesin.

   2) Huruf D angka 3 huruf a poin 2) yang menyatakan bahwa Ketidaktepatan dalam penentuan jenis belanja dapat terjadi baik pada saat perolehan awal maupun pengeluaran setelah perolehan awal atas suatu aset tetap, yang dapat meliputi penggunaan Belanja Barang (Belanja Barang Ekstrakomptabel/Belanja Pemeliharaan) untuk perolehan aset tetap dengan nilai per satuan barang sama dengan atau lebih dari nilai minimum kapitalisasi.

   3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: huruf g melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

d. PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Banpem pada K/L sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2016

1) Pasal 21:

   a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima Banpem harus menyampaikan LPJ bantuan kepada PPK sesuai dengan PKS setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:

      (1) laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana;

      (2) pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.

2) Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, harus menyampaikan LPJ bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi

   a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:

      (1) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;

      (2) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan PKS; dan

      (3) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan

   b) Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

e. PMK Nomor 82/PMK.05/2017 ttentang Pengelolaan Rekening Milik K/L

   1) Pasal 2 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Rekening Penyaluran dana Bantuan.

   2) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Bank Umum dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kuasa BUN di daerah.

f. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Banpem di Kemendikbud sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020

   1) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan masing-masing Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab terhadap program bantuan.

   2) Pasal 16 yang menyatakan bahwa KPA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran dana Bantuan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

   3) Pasal 17:

      a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan, KPA harus menyusun dan menyampaikan LPJ kepada PA.

      b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta terhindar dari penyimpangan.

      c) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Penerima bantuan harus menyampaikan LPJ kepada KPA.

d) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai LPJ diatur sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab terhadap program Bantuan.

g. PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023 Lampiran II – SBM TA 2023 yang Berfungsi Sebagai Estimasi pada bagian Penjelasan

1) Angka 3 - Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) yang menyatakan bahwa Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota PP merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/ atau air) dapat diberikan secara *at cost.*

2) Angka 17 - Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

h. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VII huruf B angka 2 tentang Jenis-jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang menyatakan bahwa Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

i. PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan Bukan Pegawai.

2) Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa uang dilakukan yang dapat berupa honorarium.

3) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bukan Pegawai yaitu senilai 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (e).

j. SE Sekjen Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Kemendikbudristek Huruf B. Rapat/Pertemuan di Luar Kantor pada Angka 7 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan di luar kantor yang mengundang peserta dari dalam/luar daerah penyelenggara kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:

1) Bukti pengeluaran biaya transportasi keberangkatan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/terminal/pelabuhan keberangkatan (*at cost*).

2) Bukti pengeluaran biaya transportasi kedatangan dari bandara/stasiun/terminal/ pelabuhan kedatangan menuju ke tempat tujuan (*at cost*).

k. Peraturan/Keputusan Kepala Satker terkait tentang Petunjuk Teknis Banpem.

l. Surat Perjanjian Kontrak beserta Addendumnya masing Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin pada P3TV PTS untuk diserahkan kepada PTS, yaitu pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang mengatur:

   Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam Kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Potensi pembelian barang yang mendukung tujuan program banpem atas juknis yang tidak mengatur ketentuan terkait peruntukan;

b. Potensi aset tidak tercatat akibat juknis banpem *Matching Fund* yang tidak mengatur pencatatan atas aset yang dihasilkan dari realisasi belanja barang;

c. Kekurangan penerimaan Negara senilai Rp6.321.396,67 atas:

   1) denda pada Direktorat KLSD PTV yang belum dipungut senilai Rp3.840.732,67;

   2) pajak penghasilan honorarium yang belum dipungut senilai Rp1.926.250,00; dan

   3) jasa giro dana banpem belum disetor ke Kas Negara senilai Rp554.414,00;

d. Kelebihan pembayaran senilai Rp44.826.458,82 atas:

   1) kekurangan volume pada SMK Purnama 1 Jakarta senilai Rp31.503.171,82 dan SMK Negeri 15 Jakarta senilai Rp9.323.287,00;

   2) biaya transport yang dipertanggungjawabkan bukan *at cost* senilai Rp4.000.000,00;

e. Tujuan pemberian Banpem Pencetakan Braille dan BOS Inklusi dan Bantuan Keaksaraan Utama Mandiri pada Ditjen PDM tidak tercapai serta potensi penggunaan dana ADEM pada Puslapdik tidak tepat sasaran;

f. Hilangnya kesempatan peserta didik untuk memperoleh bantuan UJK pada Direktorat Suslat;

g. Aplikasi banpem pada Biro Keuangan dan BMN yang menghasilkan informasi yang kurang valid tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan;

h. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja banpem tidak akuntabel senilai Rp6.606.875.700,00 atas LPJ dan bukti pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang belum disampaikan pada:

   1) Puslapdik senilai Rp1.392.000.000,00

   2) BPP Bahasa senilai Rp181.757.700,00.

   3) Ditjen Diksi senilai Rp5.019.750.000,00

   4) Ditjen Diktiristek senilai Rp13.368.000,00

i. Potensi kelebihan pembayaran senilai Rp94.415.027,00 terdiri atas:

   1) pembayaran Program PKM 20% namun laporan belum diunggah senilai Rp13.200.000,00;

2) sisa dana bantuan PKM dan bantuan P2MD yang belum dikembalikan senilai Rp17.422.027,00 (Rp8.324.709,00 + Rp9.097.318,00);

3) sisa dana bantuan yang tidak digunakan pada program pengabdian kepada masyarakat pada Direktorat RTPM senilai Rp63.793.000,00;

j. Kurang setor atas peserta yang mengundurkan diri dari bantuan ADEM pada Puslapdik senilai Rp8.000.000,00;

k. Penerimaan negara tidak dapat segera dimanfaatkan atas keterlambatan penyetoran sisa dana bantuan program pembinaan UMKM senilai Rp555.247.898,00;

l. Luaran wajib banpem penelitian senilai Rp676.182.902.850,00 tidak dapat dievaluasi kualitasnya;

m. Belum memadainya monev mengakibatkan efektivitas dari pelaksanaan masing-masing program banpem tidak diketahui.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kemendikbudristek belum mempunyai kebijakan akuntansi banpem dana penelitian.

b. KPA terkait belum optimal dalam menerapkan sanksi kepada penerima bantuan yang tidak mematuhi juknis, menetapkan batas waktu penyetoran sisa dana bantuan pemerintah ke Kas Negara, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja banpem yang menjadi tanggung jawabnya.

c. PPK, Bendahara dan Tim Pengelola Banpem terkait belum optimal dalam:

1) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan banpem;

2) melaksanakan pengendalian atas penyaluran dana bantuan Penelitian dan Pengabdian TA 2023;

3) menindaklanjuti penagihan atas dana bantuan yang belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara;

4) menyusun juknis secara lengkap dalam mengatur pencatatan aset dari belanja MAK 521211;

5) mengenakan denda keterlambatan;

6) penggunaan aplikasi pengelolaan banpem;

d. Ketua Tim Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak melaksanakan pengendalian atas penyaluran dana bantuan Penelitian dan Pengabdian TA 2023;

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan kepatuhan sebagian telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara, dengan uraian sebagai berikut.

a. Denda keterlambatan pada Direktorat KLSD PTV senilai Rp3.840.732,67 dari empat penyedia jasa dengan rincian sebagai berikut:

1) PT PJS, NTPN C9DD07QLUP30IG3Q tanggal 3 Mei 2024 senilai Rp1.144.740,00;

2) PT PS, NTPN B53E56U8EUGK5G6U tanggal 3 Mei 2024 senilai Rp671.496,00;

3) PT SaEI, NTPN 2BC4B61QV3U7ONSC tanggal 3 Mei 2024 senilai Rp1.428.380,00;

4) PT SuEI, NTPN D7B0C55DF9BRBFPV tanggal 3 Mei 2024 senilai Rp596.116,67.

b. Kekurangan volume pekerjaan pada SMK Purnama 1 Jakarta telah disetorkan dengan NTPN Nomor 009B66U8EUGTP2OM tanggal 14 Mei 2024 senilai Rp31.498.943,00 dan NTPN Nomor 0C2C048VVEPQN1QS tanggal 15 Mei 2024 senilai Rp4.229,00.

c. Kekurangan volume pekerjaan pada SMK Negeri 15 Jakarta telah disetorkan dengan NTPN 682672G4VPKO85O8 tanggal 6 Mei 2024 senilai Rp9.323.287,00.

d. Jasa giro SMK Semen Gresik telah disetorkan dengan NTPN A21423CIFK1QVJO5 tanggal 2 April 2024 senilai Rp554.414,00.

e. Pembayaran transport kepada narasumber yang tidak berdasarkan bukti *at cost* senilai Rp4.000.000,00 pada:

1) SMK Semen Gresik telah disetorkan dengan NTPN 6DC8961QV3UAUQIP tanggal 8 Mei 2024 senilai Rp2.400.000,00;

2) SMK Miftahul Ulum telah disetorkan dengan NTPN 985B60NA04A089FV tanggal 5 Maret 2024 senilai Rp1.600.000,00.

f. Pajak atas honor narasumber pada:

1) SMK Purnama 1 Jakarta senilai Rp2.520.000,00. Nilai tersebut lebih besar dari temuan BPK yaitu senilai Rp1.685.000,00 karena pihak sekolah kurang cermat dalam melakukan perhitungan dan tidak berkoordinasi dengan Direktorat SMK maupun BPK.

2) SMK Al Ibrahimy telah disetorkan dengan NTPN 1AA0C30640SAEK tanggal 7 Mei 2024 senilai Rp241.250,00.

g. Puslapdik telah mengembalikan ke kas negara senilai Rp8.000.000,00 tanggal 6 Mei 2024 NTPN F35C52G4VPKM7F5S.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Sekjen supaya:

1) menyusun kebijakan akuntansi banpem dana penelitian;

2) memerintahkan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk memutakhirkan penginputan proposal dan LPJ pada aplikasi banpem dan segera melakukan validasi atas inputan secara tepat waktu;

3) merevisi juknis ADEM dengan melengkapi ketentuan terkait komponen biaya pendidikan;

b. Sekjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Kepala BPP Bahasa supaya:

1) mengoptimalkan pengendalian atas penyaluran dana banpem;

2) mengevaluasi kepatuhan penerima banpem untuk menjadi pertimbangan pemberian bantuan selanjutnya;

3) memerintahkan kepada PPK, Bendahara, Tim Pengelola Banpem agar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan banpem dengan tertib;

c. Dirjen Diksi menyusun juknis secara lengkap dalam mengatur pencatatan aset dari belanja MAK 521211;

d. Dirjen Diktiristek memerintahkan Direktur RTPM berkoordinasi dengan LLDikti X dan LLDikti XII atas sisa dana bantuan yang tidak digunakan pada program pengabdian kepada masyarakat pada Direktorat RTPM senilai Rp63.793.000,00.

9. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Dikdasmen Belum Memadai

Pada Tahun 2023 Puslapdik mengganggarkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang (akun 572111) untuk Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang kemudian disebut dengan PIP Dikdasmen, senilai Rp9.628.223.300.000,00 dan direalisasikan senilai Rp9.628.223.300.000,00 (100,00%).

Puslapdik menyalurkan belanja bansos untuk PIP Dikdasmen ke dalam empat jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 132. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bansos PIP Dikdasmen Tahun 2023

No	Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang (PIP SD)	4.212.276.300.000,00	4.212.276.300.000,00	100,00
2	572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang (PIP SMP)	2.711.107.500.000,00	2.711.107.500.000,00	100,00
3	572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang (PIP SMA)	1.175.672.500.000,00	1.175.672.500.000,00	100,00
4	572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang (PIP SMK)	1.529.167.000.000,00	1.529.167.000.000,00	100,00
Total			**9.628.223.300.000,00**	**9.628.223.300.000,00**	**100,00**

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah mengungkapkan permasalahan penerimaan ganda bantuan sosial PIP Kemendikbudristek dan PIP Kemenag dan terdapat proses aktivasi rekening melalui kuasa penerima PIP di daerah yang tidak termasuk dalam katagori khusus. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek antara lain untuk melakukan koordinasi dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan untuk sinkronisasi data penerima beasiswa dan mengatur pelaporan atas aktivasi rekening SimPel dan penarikan dana PIP melalui Kuasa Penerima PIP. Rekomendasi tersebut baru ditindaklanjuti dengan penerbitan Instruksi Menteri Nomor 23785/MPK.A/RHS/KU.08/2023 tanggal 21 Juli 2023.

Bantuan Sosial PIP Dikdasmen merupakan program pemerintah melalui Kemendikbudristek yang bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh

satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan/atau menarik Peserta Didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Pada tahun 2023, Puslapdik menyelenggarakan PIP Dikdasmen dengan mengacu pada Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen. Secara besaran bantuan, program PIP Dikdasmen Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 133. Besaran PIP per Jenjang Pendidikan

Sasaran Penerima PIP	Besaran Dana pada Tahun Pelajaran Semester Genap	Besaran Dana pada Tahun Pelajaran Semester Gasal
SD/ SDLB/Paket A	Rp225.000,00 (Kelas 6)	Rp225.000,00 (Kelas 1)
	Rp450.000,00 (Kelas 1,2,3,4,5)	Rp450.000,00 (Kelas 2,3,4,5,6)
SMP/SMPLB/Paket B	Rp375.000,00 (Kelas 9)	Rp375.000,00 (Kelas 7)
	Rp750.000,00 (Kelas 7 dan 8)	Rp750.000,00 (Kelas 8 dan 9)
SMA/SMALB/Paket C/ SMK	Rp500.000,00 (Kelas 12)	Rp500.000,00 (Kelas 10)
	Rp1.000.000,00 (Kelas 10 & 11)	Rp1.000.000,00 (Kelas 11 dan 12)
SMK Proram 4 Tahun	Rp500.000,00 (Kelas 13)	Rp500.000,00 (Kelas 10)
	Rp1.000.000,00 (Kelas 10, 11, dan 12)	Rp1.000.000,00 (Kelas 11, 12, dan 13

Puslapdik menerapkan kebijakan berupa penetapan peserta didik yang baru ditetapkan sebagai penerima baru di Tahun 2023 melalui SK Nominasi, untuk melakukan aktivasi rekening Simpanan Pelajar (SimPel) terlebih dahulu dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Puslapdik. Setelah melakukan aktivasi, peserta didik tersebut kemudian ditetapkan ke dalam SK Pemberian. Dengan kata lain, apabila peserta didik yang terdaftar pada SK Nominasi tidak melakukan aktivasi rekening SimPel, maka peserta didik tidak akan masuk ke dalam SK Pemberian atau tidak ditetapkan menjadi penerima PIP Dikdasmen. Namun, Puslapdik menyebutkan bahwa calon penerima PIP Dikdasmen yang ditetapkan pada SK Nominasi dan belum melakukan aktivasi rekening SimPel dapat direlaksasi dan ditetapkan sebagai penerima PIP Dikdasmen pada SK Pemberian.

Sampai dengan 31 Desember 2023, sisa dana PIP Dikdasmen yang belum diaktivasi oleh peserta didik senilai Rp484.052.300.000,00. Dengan diterapkannya kebijakan relaksasi untuk penyaluran s.d. tanggal 29 Februari 2024, maka sisa dana yang belum diaktivasi menjadi senilai Rp325.311.000.000,00. Adapun rekapitulasi penyaluran PIP Dikdasmen dirinci pada tabel berikut.

Tabel 134. Rincian Penyaluran PIP Dikdasmen Per Jenjang Pendidikan Tahun 2023 per 29 Februari 2024

	Penyaluran		Sudah Aktivasi		Belum Aktivasi	
	Siswa	Nominal (Rp)	Siswa	Nominal (Rp)	Siswa	Nominal (Rp)
SD	10.386.997	4.212.276.300.000,00	10.134.342	4.112.019.675.000,00	252.655	100.256.625.000,00
SMP	4.471.118	2.711.107.500.000,00	4.369.416	2.643.595.125.000,00	101.702	67.512.375.000,00
SMA	1.390.682	1.175.672.500.000,00	1.316.459	1.107.367.000.000,00	74.223	68.305.500.000,00
SMK	1.860.322	1.529.167.000.000,00	1.757.291	1.439.930.500.000,00	103.031	89.236.500.000,00
	18.109.119	**9.628.223.300.000,00**	**17.577.508**	**9.302.912.300.000,00**	**531.611**	**325.311.000.000,00**

Dalam menyalurkan PIP Dikdasmen ke rekening siswa penerima, Puslapdik bekerjasama dengan beberapa bank penyalur seperti BRI, BNI, dan BSI. Atas sisa dana bantuan yang rekeningnya tidak diaktivasi oleh penerima, seluruh bank penyalur tersebut telah melakukan pengembalian ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 135. Rincian Pengembalian Sisa Dana PIP Dikdasmen 2023

Jenjang Pendidikan	Bank Penyalur	Jumlah Siswa	Nilai Pengembalian (Rp)	Tanggal Pengembalian ke Kas Negara
SD	BSI	190	81.225.000,00	14 Maret 2024
	BRI	252.465	100.175.400.000,00	14 Maret 2024
SMP	BSI	221	161.625.000,00	14 Maret 2024
	BRI	101.481	67.350.750.000,00	14 Maret 2024
SMA	BSI	226	219.000.000,00	14 Maret 2024
	BNI	73.997	68.086.500.000,00	13 Maret 2024
SMK	BSI	138	130.500.000,00	14 Maret 2024
	BNI	102.893	89.106.000.000,00	13 Maret 2024
Total		**531.611**	**325.311.000.000,00**	

Selanjutnya, atas hasil pemeriksaan pengelolaan bantuan sosial PIP Dikdasmen TA 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Proses pembersihan data calon penerima PIP belum optimal

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bansos PIP tepat sasaran, Puslapdik melalui Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 mengatur mekanisme pengolahan data calon penerima PIP Dikdasmen salah satunya dengan mempertimbangkan beberapa variabel pendukung seperti jenis pekerjaan orang tua dan penghasilan orang tua. Selain itu, Puslapdik juga menggunakan empat tenaga jasa konsultan untuk melakukan pembersihan data detail peserta didik yang akan ditetapkan sebagai penerima. Rincian atas seluruh tenaga jasa konsultan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 136. Tenaga Jasa Konsultan Database Administrator PIP

No	Penyedia Jasa	Uraian Pekerjaan sesuai SPK	No danTanggal SPK	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sdr. SI	Jasa Konsultansi Perorangan Paket Konsultan Database Administrator PIP SD	1434/J5/PL-PIP/2023 17 Maret 2023	99.644.700,00
2	Sdr. FR	Jasa Konsultansi Perorangan Paket Konsultan Database Administrator PIP SMP	1435/J5/PL-PIP/2023 17 Maret 2023	99.644.700,00
3	Sdr. FW	Jasa Konsultansi Perorangan Paket Konsultan Database Administrator PIP SMA	1436/J5/PL-PIP/2023 17 Maret 2023	99.644.700,00
4	Sdr. VR	Jasa Konsultansi Perorangan Paket Konsultan Database Administrator PIP SMK	1437/J5/PL-PIP/2023 17 Maret 2023	99.644.700,00

Setiap tenaga jasa konsultan dalam melakukan pekerjaannya memiliki jangka waktu pengerjaan yang sama namun pada termin yang berbeda-beda. Rincian atas termin pengerjaan masing-masing tenaga jasa konsultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 137. Jangka Waktu dan Termin Pekerjaan Tenaga Jasa Konsultan *Database* Administrator PIP Dikdasmen

No	Penyedia Jasa	Jangka Waktu Pengerjaan	Termin Pekerjaan
1	Sdr. SI	17 Maret 2023 – 7 November 2023 (235 hari)	Term I: April – Juni 2023 Term II: Juli – September 2023 Term III: Oktober – November 2023

No	Penyedia Jasa	Jangka Waktu Pengerjaan	Termin Pekerjaan
2	Sdr. FR	17 Maret 2023 – 7 November 2023 (235 hari)	Term I: April – Juni 2023 Term II: Juni – Agustus 2023 Term III: September – November 2023
3	Sdr. FW	17 Maret 2023 – 7 November 2023 (235 hari)	Term I: Maret - Mei 2023 Term II: Juni – Agustus 2023 Term III: September – November 2023
4	Sdr. VR	17 Maret 2023 – 7 November 2023 (235 hari)	Tidak ada termin

Berdasarkan laporan seluruh pekerjaan konsultan, diketahui bahwa pembersihan data siswa meliputi kelayakan memperoleh PIP Dikdasmen, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Namun, berdasarkan hasil pengujian data penerima, masih ditemukan siswa penerima PIP Dikdasmen yang tidak memenuhi persyaratan data detail penerima, dengan rincian sebagai berikut

1) PIP Dikdasmen diberikan atas peserta didik dengan status tidak diusulkan oleh Satuan Pendidikan

   Dalam menetapkan peserta didik sebagai penerima PIP Dikdasmen, salah satu sumber data yang digunakan oleh Puslapdik adalah usulan dari satuan Pendidikan melalui usulan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Satuan Pendidikan melakukan verifikasi peserta didik sebagai calon penerima PIP Dikdasmen untuk kemudian mengusulkan peserta didik yang bersangkutan sebagai calon penerima dengan cara menandai status "Layak PIP" dan memilih alasan "Layak PIP" pada Dapodik. Satuan Pendidikan juga diperbolehkan untuk tidak mengusulkan peserta didik sebagai penerima PIP Dikdasmen dengan beberapa opsi alasan seperti peserta didik sudah mampu, peserta didik menolak, dan peserta didik dilarang Pemda setempat karena sudah menerima bantuan serupa. Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian data Dapodik per 31 Desember 2023, Puslapdik masih menetapkan peserta didik penerima PIP Dikdasmen yang tidak diusulkan oleh satuan pendidikan dengan total penerima sebanyak 8.453 orang dengan total nilai bantuan senilai Rp4.821.600.000,00.

   Penerima PIP Dikdasmen yang tidak diusulkan sebagai penerima PIP Dikdasmen pada jenjang SD, sebanyak 3.663 penerima dengan total nilai bantuan senilai Rp1.460.475.000,00, jenjang SMP sebanyak 2.818 penerima dengan total nilai bantuan senilai Rp1.520.625.000,00, jenjang SMA, sebanyak 1.127 penerima dengan total nilai bantuan senilai Rp1.060.000.000,00, dan jenjang SMK, sebanyak 845 penerima dengan total bantuan senilai Rp780.500.000,00. Rincian alasan tidak diusulkan atas kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 138. Rekapitulasi Penerima PIP Dikdasmen dengan status "Tidak Diusulkan Menerima PIP" Jenjang SD

Alasan Tidak Diusulkan	Jumlah Penerima	Nilai Bantuan (Rp)
Dilarang pemda karena menerima bantuan serupa	307	91.800.000,00
Sudah mampu	549	213.300.000,00
Menolak	104	36.900.000,00
Tidak ada keterangan alasan	2.694	1.114.425.000,00
Pemegang PKH/KPS/KKS	9	4.050.000,00
Total	**3.663**	**1.460.475.000,00**

Rincian atas tabel tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.9.1.**

Tabel 139. Rekapitulasi Penerima PIP Dikdasmen dengan status "Tidak Diusulkan Menerima PIP" Jenjang SMP

Alasan Tidak Layak Diusulkan	Jumlah Penerima	Nilai Bantuan (Rp)
Dilarang pemda karena menerima bantuan serupa	444	213.375.000,00
Sudah mampu	806	464.625.000,00
Menolak	283	157.500.000,00
Tidak ada keterangan alasan	1.282	684.000.000,00
Pemegang PKH/KPS/KKS	1	375.000,00
Siswa Miskin/Rentan Miskin	2	750.000,00
Total	**2.818**	**1.520.625.000,00**

Rincian atas tabel tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.9.2.**

Tabel 140. Rekapitulasi Penerima PIP Dikdasmen dengan status "Tidak Diusulkan Menerima PIP" Jenjang SMA

Alasan Tidak Diusulkan	Jumlah Penerima	Nilai Bantuan (Rp)
Dilarang pemda karena menerima bantuan serupa	213	207.000.000,00
Sudah mampu	296	291.500.000,00
Menolak	136	128.000.000,00
Tidak ada keterangan alasan	482	433.500.000,00
Total	**1.127**	**1.060.000.000,00**

Rincian atas tabel tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.9.3.**

Tabel 141. Rekapitulasi Penerima PIP Dikdasmen dengan status "Tidak Diusulkan Menerima PIP" Jenjang SMK

Alasan Tidak Diusulkan	Jumlah Penerima	Nilai Bantuan (Rp)
Dilarang pemda karena menerima bantuan serupa	95	80.500.000,00
Sudah mampu	327	311.000.000,00
Menolak	192	183.500.000,00
Tidak ada keterangan alasan	230	204.500.000,00
SIswa Miskin/Rentan Miskin	1	1.000.000,00
Total	**845**	**780.500.000,00**

Rincian atas tabel tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.9.4.**

Pengujian lebih lanjut atas data dapodik, ditemukan kondisi masih terdapat peserta didik yang memiliki status layak mendapatkan PIP Dikdasmen namun tidak ditetapkan sebagai penerima PIP Dikdasmen. Beberapa alasan layak PIP Dikdasmen yang terdata pada dapodik tersebut di antaranya adalah peserta didik merupakan siswa miskin/rentan miskin, pemegang PKH/KPS/KKS, terkena dampak bencana alam, yatim piatu/panti asuhan/panti sosial, tinggal di daerah konflik, memiliki kelainan fisik, dan berasal dari keluarga terpidana. Kondisi ini juga merupakan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memilih penerima PIP Dikdasmen yang telah diatur oleh Puslapdik pada Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022.

Rekapitulasi hasil pengujian data dapodik ditunjukkan pada tabel di bawah ini atas jumlah peserta didik yang diusulkan layak PIP Dikdasmen pada dapodik, namun sampai pada tahun 2023 tidak ditetapkan sebagai penerima PIP Dikdasmen.

Tabel 142. Rekapitulasi Siswa Layak PIP Dikdasmen Belum Menjadi Penerima PIP

Jenjang	Jumlah
SD	4.115.438
SMP	2.637.400
SMA/SMK	3.341.915
Total	**10.094.753**

b. Pelaksanaan aktivasi rekening penerima secara keseluruhan belum optimal

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, tercatat sebanyak 531.611 siswa penerima PIP Dikdasmen yang tidak melakukan aktivasi rekening sehingga dananya tidak dapat dicairkan dan pada akhirnya dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp325.311.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut melalui konfirmasi secara uji petik kepada peserta didik pada 35 satuan Pendidikan yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang di dalamnya terdapat siswa yang belum atau pun tidak melakukan aktivasi rekening, ditemukan beberapa hal yang menjadi penyebab siswa tidak melakukan aktivasi, dengan rincian sebagai berikut.

1) Terdapat siswa yang mengalami penolakan aktivasi dari bank penyalur

   Berdasarkan penjelasan dari satuan Pendidikan yang menjadi *sampling* pemeriksaan, diketahui bahwa s.d. tanggal 20 Februari 2024 terdapat siswa pada satuan pendidikan tersebut yang belum melakukan aktivasi rekening karena ditolak oleh bank penyalur dengan alasan masih banyak antrean bantuan lainnya atau bank sedang mengalami kondisi *overload*.

2) Terdapat sekolah yang tidak memperoleh informasi terkait penetapan siswa sebagai penerima PIP Dikdasmen

   Mengacu pada Persekjen Nomor 14 Tahun 2022, penyampaian informasi SK Penerima KIP, SK Nominasi PIP, dan SK Pemberian PP Dikdasmen merupakan tanggung jawab Puslapdik, Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota, serta satuan Pendidikan. Selain itu, pada PKS dengan Bank Penyalur, disebutkan bahwa salah satu kewajiban bank penyalur adalah memberitahukan kepada penerima dana melalui Dinas Pendidikan maupun satuan Pendidikan yang bersangkutan bahwa rekening telah siap diaktivasi. Hasil konfirmasi kepada siswa menunjukkan terdapat sekolah yang tidak memperoleh informasi penetapan siswanya sebagai penerima PIP Dikdasmen sehingga siswa di sekolah terkait tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas akhir yang ditentukan.

3) Terdapat satuan pendidikan yang tidak mengetahui adanya aplikasi SIPINTAR

   Aplikasi SIPINTAR merupakan sebuah sistem informasi yang dapat diakses oleh satuan Pendidikan untuk memperoleh informasi PIP, termasuk informasi mengenai SK Nominasi dan SK Pemberian. Namun berdasarkan hasil konfirmasi ke beberapa satuan pendidikan, diketahui bahwa terdapat satuan Pendidikan yang tidak mengetahui adanya aplikasi SIPINTAR sehingga tidak mendapatkan informasi jika terdapat siswanya yang masuk pada SK Nominasi sehingga siswa tersebut tidak melakukan aktivasi rekening SimPel.

c. Penyaluran dana PIP Dikdasmen melalui bank terlambat masuk ke rekening penerima melebihi 30 hari dari tanggal SP2D

Puslapdik melalui Persekjen Nomor 14 Tahun 2022 juga menetapkan bahwa bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana dari rekening penyalur ke rekening SimPel penerima PIP selambat-lambatnya 30 hari sejak terbit SP2D. Selain itu, pada dokumen PKS disebutkan bahwa bank penyalur memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyaluran untuk setiap tahap penyaluran berdasarkan Surat Perintah Penyaluran (SPPN) paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak SP2D terbit.

Berdasarkan laporan BRI sebagai salah satu bank penyalur, BRI dalam melakukan pemindahbukuan dana tidak pernah melebihi 30 hari. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen buku tabungan siswa penerima secara uji petik, masih ditemukan tanggal dana PIP pada jenjang SD dan SMP yang masuk ke rekening penerima melebihi 30 hari dari tanggal SP2D yang terjadi di seluruh jenjang pendidikan. Rincian atas kondisi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.9.5.**

d. Sistem pengendalian atas aktivasi rekening SimPel melalui kuasa penerima kurang optimal

Puslapdik menggunakan Persekjen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen sebagai acuan dalam pelaksanaan aktivasi rekening SimPel dan penarikan dana PIP melalui Kuasa Penerima PIP. Puslapdik menetapkan pelaksanaan aktivasi rekening SimPel dan penarikan dana PIP melalui Kuasa Penerima PIP hanya dapat dilakukan pada lokasi tempat tinggal dan satuan Pendidikan Peserta Didik yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian, daerah yang sedang mengalami bencana, dan daerah lain yang sulit mengakses bank penyalur.

Berdasarkan hasil konfirmasi secara uji petik di sembilan Satuan Pendidikan di Jawa Barat, diketahui bahwa pada Tahun 2023, baik pelaksanaan aktivasi rekening SimPel maupun penarikan dana PIP Dikdasmen melalui kuasa penerima sudah memiliki persyaratan yang lebih ketat. Dengan kata lain, Puslapdik melalui bank penyalur telah melakukan mitigasi risiko penyalahgunaan aktivasi rekening dan pencairan dana dengan lebih baik. Namun, masih ditemukan kondisi berupa praktik aktivasi rekening yang tidak sesuai dengan persyaratan lokasi tempat tinggal dan satuan Pendidikan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh bank penyalur, diketahui bahwa terdapat salah satu sekolah di Jawa Barat yang melakukan aktivasi secara kuasa dan kemudian atas hasil konfirmasi kepada kepala sekolah terkait, diketahui bahwa atas nama-nama peserta didik yang melakukan aktivasi rekening secara kuasa tersebut bukan dilakukan oleh pihak sekolah, melainkan oleh pihak pemangku kepentingan. Sementara itu, secara lokasi satuan Pendidikan dan jaraknya ke bank penyalur, pelaksanaan aktivasi secara kuasa di satuan Pendidikan tersebut tidaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

1) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dilaksanakan pertama kali setelah penerima bantuan sosial mendapatkan pemberitahuan dari bank penyalur.

2) Pasal 12 yang menyatakan bahwa Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pasal 14:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara nontunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.

4) Pasal 15 ayat (1) huruf b, menyatakan Tim pengendali bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai.

b. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang PIP Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran: a. Peserta Didik pemegang KIP; b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: 1. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan; 2. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera; 3. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; 4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam; 5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah; 6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau 7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

c. Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen

1) Poin B Nomor 2f yang menyatakan bahwa Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana dari rekening penyalur ke rekening SimPel penerima PIP Dikdasmen selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbit SP2D yang wajib dituangkan dalam PKS antara bank penyalur dan Puslapdik; dan

2) Poin C Nomor 1 yang menyatakan bahwa Puslapdik menyampaikan informasi SK Penerima KIP, SK Nominasi PIP, dan SK Pemberian PIP Dikdasmen kepada dinas Pendidikan Prov., dinas Pendidikan kabupaten/kota bagi peserta didik yang berasal dari DTKS dan usulan dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan bagi peserta didik yang berasal dari usulan pemangku kepentingan.

d. Addendum II PKS antara Kemendikbudristek dan PT BNI (Persero) Tbk tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar TA 2022 s.d 2024; dan Addendum II PKS antara Kemendikbudristek dan PT BRI (Persero) Tbk tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar TA 2022 s.d 2024. Pada Bab IB Pelaksanaan Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak. Poin 2 Pihak Kedua, poin b. Kewajiban.

1) Poin 5 yang menyatakan bahwa Menyalurkan dana bansos PIP ke rekening penerima sejak dana bansos PIP masuk ke rekening penyalur dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sepanjang SPPN dan Daftar Penerima Dana yang valid dan sah telah diterima oleh pihak kedua dan besarnya dana bansos PIP pada rekening penyalur mencukupi.

2) Poin 17 yang menyatakan bahwa Memberikan jaminan kepada pihak pertama bahwa pihak kedua memberitahkan kepada penerima dana melalui Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota setempat dan/atau satuan pendidikan bersangkutan bahwa

rekening telah siap untuk diaktivasi dan/atau dana bansos PIP sudah masuk ke rekening penerima.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penyaluran dana bansos PIP tidak tepat sasaran;
b. Penyerapan anggaran dana bansos PIP tidak optimal;
c. Dana Bansos PIP Dikdasmen tidak dapat segera dimanfaatkan oleh siswa penerima; dan
d. Adanya risiko penyalahgunaan aktivasi rekening SimPel secara kuasa.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Puslapdik kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial PIP Dikdasmen;
b. Koordintor dan Subkoordinator PIP Dikdasmen kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi atas data usulan penerima PIP serta memastikan informasi SK Nominasi sampai kepada satuan Pendidikan;
c. Puslapdik belum memiliki alat kendali dalam memastikan pelaksanaan aktivasi rekening dan pencairan secara kuasa; dan
d. Bank penyalur belum sepenuhnya melaksanakan sistem pengendalian atas ketepatan waktu pemindahbukuan dengan optimal.

Atas temuan tersebut, Plt. Kepala Puslapdik menyatakan bahwa secara umum sependapat dengan temuan BPK dan menjelaskan bahwa:

a. Peserta didik dengan status Tidak Layak PIP dimaksud merupakan usulan pemangku kepentingan yang berasal dari Komisi X DPR RI yang telah mendapatkan rekomendasi dari anggota Komisi X DPR RI;
b. Selain itu rekapitulasi BPK terhadap siswa Layak PIP namun belum menjadi penerima PIP sejumlah SD 4.115.438 siswa, SMP 2.637.400 siswa, SMA/SMK 3.341.915 siswa dengan total 10.094.753 siswa. Hal ini dikarenakan sebagian siswa tersebut tidak memiliki data valid, lengkap dan logis, sebagian lainnya tidak terdapat pada data DTKS penerima bantuan sosial, Data P3KE desil 1 dan 2, usulan dinas pendidikan dan usulan pemangku kepentingan; dan
c. Puslapdik telah menyampaikan surat pemberitahuan SK Pemberian dan SK Nominasi PIP kepada Dinas Pendidikan yang didalamnya terdapat informasi agar dinas pendidikan menyampaikan kepada satuan pendidikan di wilayahnya.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Sekjen supaya:

a. Meninjau kembali PKS dengan Bank Penyalur PIP untuk memasukkan perihal:
   1) sanksi kepada Bank apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajibannya;

2) mekanisme monitoring dan pelaporan yang tersistem untuk aktivasi dan pencairan yang dilakukan secara kuasa.

b. Memerintahkan Kepala Puslapdik, Koordinator, dan Subkoordinator PIP agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi atas data usulan penerima PIP dan memastikan informasi SK Nominasi sampai kepada satuan pendidikan;

c. Memerintahkan Kepala Puslapdik untuk:

1) melakukan *cleansing data* untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku sebelum dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan atau pihak lainnya;

2) memedomani Persekjen 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen pada penyaluran Tahun 2024.

10. Pengelolaan Belanja Bansos Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tidak Sesuai Ketentuan

Pada Tahun 2023, Puslapdik Setjen mengganggarkan Belanja Bansos untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang (akun 572111) untuk Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang kemudian disebut dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dan program bantuan sosial Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) senilai Rp11.898.856.602.000,00 dan direalisasikan senilai Rp11.766.300.101.526,00 (98,89%). Rincian atas realisasi belanja bansos untuk KIPK dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 143. Rincian Program Belanja Bansos untuk Bidikmisi/KIPK Tahun 2023

No	Program	Keterangan	Bantuan Biaya Hidup (Rp)	Bantuan Biaya Pendidikan (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Bidikmisi *on Going*	Genap 2022/2023	414.300.600.000,00	236.757.600.000,00	651.058.200.000,00
		Gasal 2023/2024	5.930.400.000,00	3.391.200.000,00	9.321.600.000,00
2	KIPK *on Going*	Genap 2022/2023	3.005.388.300.000,00	1.779.250.398.415,00	4.784.638.698.415,00
		Gasal 2023/2024	2.891.129.400.000,00	1.714.298.956.127,00	4.605.428.356.127,00
3	KIPK baru	Gasal 2023/2024	943.200.300.000,00	568.653.699.000,00	1.511.853.999.000,00
4	Bantuan Biaya Pendidikan	Gasal 2023/2024	0,00	203.999.247.984,00	203.999.247.984,00
Jumlah			**7.259.949.000.000,00**	**4.506.351.101.526,00**	**11.766.300.101.526,00**

Atas realisasi belanja bansos KIPK, Puslapdik juga melakukan pengembalian belanja senilai Rp1.399.259.707,00 sehubungan adanya gagal salur karena nomor rekening penerima tidak valid maupun pengembalian yang dilakukan oleh perguruan tinggi karena status mahasiswa penerima yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima. Rincian pengembalian belanja KIPK atas realisasi TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran B.10.1**.

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan belanja bansos yaitu Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial PIP Pendidikan Tinggi Tidak Sesuai Ketentuan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek antara lain agar menginstruksikan Sekjen melalui Kepala Puslapdik agar memerintahkan PPK beasiswa pendidikan tinggi untuk menelusuri dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp6.027.950.278,00, mengumpulkan data riil UKT atas seluruh mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan alokasi dana KIPK serta melakukan perhitungan ulang nilai UKT

rata-rata dan selanjutnya menyesuaikan nilai UKT pada pembayaran berikutnya, melakukan pemutakhiran dan perbaikan data NIK terhadap seluruh penerima beasiswa dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) serta Dinas Pendidikan untuk sinkronisasi data penerima beasiswa. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dalam hal pemutakhiran data NIK saja. Sementara itu, untuk hasil penelusuran dan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran beserta hasil pengumpulan data riil UKT seluruh mahasiswa penerima KIPK belum ditindaklanjuti.

Program KIPK diberikan kepada mahasiswa baru di tahun ajaran terkait dan tidak diberikan mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan di tahun berjalan (mahasiswa lama/*on going*), sehingga pada penyaluran bansos setiap angkatan penerima KIPK akan selalu mengalami penurunan jumlah penerima dan nilai bantuan. Namun, penerima KIPK bisa dibatalkan dan digantikan oleh mahasiswa lain untuk mengisi kuota yang kosong. Akan tetapi pembatalan dan penggantian mahasiswa penerima hanya dapat dilakukan pada semester gasal atau tahun ajaran baru. Rincian jumlah penerima Bidikmisi/KIPK *on going* dan KIPK baru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 144. Rincian Jumlah Penerima Bansos Bidikmisi/KIPK TA 2023

No.	Program	Keterangan	Jumlah Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa
1.	Bidikmisi *on Going*	Genap 2022/2023	1.744	130.978
		Gasal 2023/2024	101	1.413
2.	KIPK *on Going*	Genap 2022/2023	7.011	1.003.724
		Gasal 2023/2024	4.469	541.841
3.	KIPK baru	Gasal 2023/2024	3.784	161.973
4.	Bantuan Biaya Pendidikan	Gasal 2023/2024	2.708	88.186
Jumlah			**19.817**	**1.928.115**

Pada tahun 2023 Sekjen Kemendikbudristek menetapkan Peraturan Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi yang mengatur pelaksanaan jenis skema bantuan baru pada program bansos KIPK, yaitu skema Bantuan Biaya Pendidikan. Pada skema baru ini, penerima bantuan tidak memperoleh komponen bantuan biaya hidup melainkan hanya memperoleh bantuan biaya Pendidikan berupa UKT yang disalurkan ke rekening perguruan tinggi. Mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengajukan ini tidak boleh melebihi semester lima untuk jenjang S1/D4 dan semester tiga untuk jenjang D3. Kemudian secara nilai bantuan, pada skema ini bantuan biaya Pendidikan per mahasiswa sudah ditentukan nilainya, yakni maksimal Rp2.400.000,00 per semester tanpa mempertimbangkan akreditasi prodinya.

Pada skema lain penyaluran KIPK, mahasiswa penerima masih tetap memperoleh komponen bantuan biaya hidup senilai Rp4.200.000,00 per semester untuk penerima Bidikmisi *on going* dan KIPK *on going* angkatan 2020. Sementara itu, untuk besaran bantuan biaya hidup penerima bansos KIPK *on going* angkatan 2021-2022 dan KIPK baru angkatan 2023, Puslapdik melakukan penetapan berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi. Secara rinci, nilai besaran indeks harga lokal dituangkan pada Keputusan Kepala Puslapdik Kemendikbudristek Nomor. 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Puslapdik Nomor. 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program KIPK untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022.

Komponen bantuan biaya Pendidikan untuk penerima Bidikmisi *on going* dan KIPK *on going* angkatan 2020 juga masih tetap, yaitu Rp2.400.000,00 per semester. Kemudian untuk KIPK *on* going angkatan 2021 dan 2022 serta KIPK baru angkatan 2023, Puslapdik menetapkan bantuan biaya pendidikan yang bervariasi tergantung akreditasi prodi penerima KIPK.

Tabel 145. Nilai Maksimal Bantuan Biaya Pendidikan KIPK Angkatan 2021-2023 Berdasarkan Akreditasi Prodi

Akreditasi Prodi	Maksimal Nilai Bantuan (Rp)
A/Unggul	12.000.000,00
B/Sangat Baik	4.000.000,00
C/Baik	2.400.000,00

Namun, selain dalam hal akreditasi, Puslapdik juga menetapkan bahwa Perguruan Tinggi mengusulkan biaya Pendidikan dengan besaran maksimum senilai besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi pada prodi penerima KIPK.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Bantuan Sosial KIPK TA 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Penerima dana bantuan dengan status akademik tidak aktif

Merujuk pada Persekjen Nomor 13 Tahun 2023 yang mewajibkan status aktif mahasiswa penerima bantuan, seharusnya seluruh penerima bansos KIPK masih tercatat sedang menempuh studi di perguruan tinggi pada semester saat disalurkannya bantuan KIPK. Namun hasil pengujian data atas status mahasiswa penerima Bidikmisi *on going*, KIPK *on going*, KIP Baru, dan Bantuan Biaya Pendidikan pada PDDikti, menunjukkan bahwa terdapat penerima yang sudah tidak aktif dengan kategori alasan *drop out*/putus studi, keluar, atau nonaktif pada semester yang sama dengan semester penyaluran bantuan KIPK kepada penerima. Rekapitulasi atas kondisi tersebut pada semester genap 2022/2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 146. Rekapitulasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi/KIPK yang Statusnya Tidak Aktif Semester Genap 2022/2023

No	Jenis Program	Jumlah Penerima	Bantuan Biaya Hidup (Rp)	Bantuan Biaya Pendidikan (Rp)	Total Bantuan (Rp)
1.	Bidikmisi *on going*	233	978.600.000,00	559.200.000,00	1.537.800.000,00
2.	KIPK *on going* - PTN	200	985.500.000,00	575.039.941,00	1.560.539.941,00
3.	KIPK *on going* - PTS	65	337.200.000,00	166.100.000,00	503.300.000,00
	Total	**498**	**2.301.300.000,00**	**1.300.339.941,00**	**3.601.639.941,00**

Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.2 s.d. B.10.4.**

Selanjutnya, rekapitulasi atas kondisi yang terjadi pada semester gasal 2023/2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 147. Rekapitulasi Nilai Bantuan Penerima Bidikmisi/KIPK yang Statusnya Tidak Aktif Semester Gasal 2023/2024

No	Jenis Program	Jumlah Penerima	Bantuan Biaya Hidup (Rp)	Bantuan Biaya Pendidikan (Rp)	Total Bantuan (Rp)
1.	Bidikmisi *on going*	5	21.000.000,00	12.000.000,00	33.000.000,00
2.	KIPK *on going* - PTN	1.763	10.176.300.000,00	4.571.801.672,00	14.748.101.672,00
3.	KIPK *on going* - PTS	4.367	23.253.000.000,00	14.410.327.400,00	37.663.327.400,00

No	Jenis Program	Jumlah Penerima	Bantuan Biaya Hidup (Rp)	Bantuan Biaya Pendidikan (Rp)	Total Bantuan (Rp)
4.	KIPK Baru	542	2.859.900.000,00	1.936.159.000,00	4.796.059.000,00
5.	Bantuan Biaya Pendidikan	94	0	233.314.000,00	233.314.000,00
	Total	**6.771**	**36.310.200.000,00**	**21.163.602.072,00**	**57.473.802.072,00**

Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.5 s.d. B.10.9.**

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Puslapdik, diketahui bahwa berdasarkan Persekjen Kemendikbudristek Nomor 13 tahun 2023, mulai semester Ganjil 2023/2024 seluruh keaktifan mahasiswa baru wajib terdata di sistem PDDikti yang tersinkronisasi di SIM KIPK sebagai syarat pencairan. Sementara itu, keaktifan mahasiswa penerima KIPK *on going* masih berdasarkan pada penetapan SK Pimpinan Perguruan Tinggi sehingga masih sangat memungkinkan penerima *on going* tidak aktif bisa disalurkan karena ada SK pimpinan Perguruan Tinggi (PT) sebagai mahasiswa aktif atau diinput pada PDDIKT meskipun mahasiswanya sudah tidak aktif.

b. Penetapan nilai bantuan biaya pendidikan KIPK mahasiswa baru 2023 melebihi nilai rata-rata biaya pendidikan mahasiwa bukan penerima KIPK

Dalam mengusulkan besaran biaya bantuan Pendidikan untuk mahasiswa, perguruan tinggi harus mengacu kepada besaran rata-rata biaya Pendidikan mahasiswa yang bukan penerima KIPK pada prodi yang bersangkutan. Secara teknis pengusulan, PTN dan LLDikti menyampaikan usulan besaran biaya Pendidikan kepada Puslapdik melalui sistem KIPK pada laman *https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.*

Berdasarkan hasil analisis data usulan perguruan tinggi dan besaran nilai bantuan biaya Pendidikan pada 100 Perguruan Tinggi dengan 900 prodi menunjukkan 57 perguruan tinggi dengan kondisi sebagai berikut.

Tabel 148. Penyampaian Data UKT dari 57 Perguruan Tinggi

Kondisi	Jumlah Perguruan Tinggi
Tidak menyampaikan data UKT pada sistem KIPK	3
Menyampaikan data UKT namun tidak mengisi nilai rata-rata valid UKT (diisi Rp0,00 – Rp51.512,00	15
Mengusuljan biaya Pendidikan lebih tinggi dari nilai rata-rata biaya Pendidikan non KIPK	39

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa:

1) Terdapat 18 perguruan tinggi yang tidak dapat dilakukan pengujian untuk menilai ketepatan penetapan UKT per prodi sesuai ketentuan karena perguruan tinggi tidak menyampaikan data UKT (**Lampiran B.10.10**) dan/atau menyampaikan data UKT namun anomali (**Lampiran B.10.12**).

2) Terdapat 39 perguruan tinggi yang mengusulkan biaya pendidikan lebih tinggi dari nilai rata-rata biaya Pendidikan non KIPK sehingga terdapat kelebihan nilai bantuan senilai Rp2.595.362.148,00. Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.11.**

c. Terdapat mahasiswa penerima KIPK yang berasal dari Prodi yang tidak terakreditasi

Mengacu pada Peraturan Sekjen Nomor 13 Tahun 2023, disebutkan bahwa salah satu persyaratan penerima KIPK adalah harus telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada prodi yang terakreditasi. Berdasarkan hasil analisis data akreditasi prodi selama tahun

2023 yang disampaikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ditemukan bahwa masih terdapat mahasiswa baru Tahun 2023 yang menerima KIPK maupun Bantuan Biaya Pendidikan namun terdaftar pada prodi yang belum terakreditasi dengan rincian sebagai berikut.

1) Pada program KIPK Baru, ditemukan sebanyak 146 mahasiswa penerima yang berasal dari 11 prodi berbeda yang tidak terakreditasi.
2) Program Bantuan Biaya Pendidikan, ditemukan sebanyak 126 mahasiswa penerima yang berasal dari 11 prodi berbeda yang tidak terakreditasi.

Rekapitulasi atas nilai bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 149. Rekapitulasi Nilai Bantuan Penerima dari Prodi Tidak Terakreditasi

Nama Program	Bantuan Biaya Hidup (Rp)	Bantuan Biaya Pendidikan (Rp)	Total Bantuan (Rp)
KIPK Baru	814.200.000,00	430.200.000,00	1.244.400.000,00
Bantuan Biaya Pendidikan	0,00	301.200.000,00	301.200.000,00
Total	**814.200.000,00**	**731.400.000,00**	**1.545.600.000,00**

Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.13 s.d B.10.16.**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Puslapdik, diketahui bahwa kondisi tersebut dapat terjadi apabila status akreditasi prodi masih tercatat aktif pada saat penetapan mahasiswa penerima KIPK, namun pada saat periode usulan pencairan, masa akreditasi prodi sudah kadaluarsa. Pihak Puslapdik menyatakan bahwa untuk kondisi demikian, pencairan dana bantuan tetap dilakukan.

d. Penetapan nilai bantuan biaya pendidikan KIPK baru 2023 melebihi nilai batas ketentuan akreditasi

Berdasarkan hasil analisis data penyaluran bantuan Pendidikan pada KIPK Baru dan data akreditasi prodi pada tahun 2023, masih ditemukan adanya penetapan nilai Bantuan Pendidikan melebihi batas maksimal akreditasi prodi dengan total kelebihan nilai bantuan biaya Pendidikan senilai Rp3.682.466.000,00. Rekapitulasi atas kelebihan nilai bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 150. Rekapitulasi Kelebihan Nilai UKT Tidak Sesuai Akreditasi

No	Akreditasi PT	Akreditasi atas Nilai UKT Diterima	Jumlah Prodi Tidak Sesuai Akreditasi UKT	Total Kelebihan (Rp)
1.	B/Baik Sekali	A/Unggul	76	1.241.240.000,00
2.	C/Baik	B/Baik Sekali	136	2.441.226.000,00
	Total		**212**	**3.682.466.000,00**

Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.17 s.d B.10.18.**

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak Puslapdik, diketahui bahwa seluruh pengelola perguruan tinggi mengacu pada perhitungan nilai biaya pendidikan mahasiswa KIPK dengan berdasarkan pada akreditasi prodi. Usulan besaran biaya pendidikan ini melalui SIM KIPK yang sudah memberikan batasan maksimal sesuai dengan besaran akreditasi prodinya.

e. Nilai UKT penerima KIPK angkatan 2021 yang anomali

Berdasarkan hasil pengujian data penyaluran bantuan biaya Pendidikan KIPK pada semester genap 2022/2023 dan semester gasal 2023/2024, ditemukan adanya data-data anomali atas penyaluran komponen biaya bantuan pendidikan pada penerima KIPK *on going* angkatan 2021.

Data anomali ini ditemukan pada 3 perguruan tinggi, yaitu Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). Adapun data anomali tersebut terdiri dari nilai bantuan Pendidikan pada semester genap 2022/2023 hanya senilai Rp1,00 sampai dengan Rp8.000,00, kemudian di semester gasal 2023/2024 nilai bantuan Pendidikan sudah sesuai dengan nilai bantuan saat pertama kali ditetapkan. Sementara itu juga ditemukan data penyaluran di semester gasal 2023/2024 hanya senilai Rp5,00, namun pada semester sebelumnya nilai bantuan sudah sesuai. Rekapitulasi jumlah mahasiswa penerima dengan nilai bantuan biaya Pendidikan yang anomali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 151. Rekapitulasi Penerima KIPK *on Going* Angkatan 2021 dengan Nilai Anomali

No	Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa
1.	Universitas Negeri Makassar	38
2.	Universitas Hasanuddin	4
3	Universitas Singaperbangsa Karawang.	1

Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.19.**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Puslapdik, diketahui bahwa kondisi nilai UKT yang anomali tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan input karena pada aplikasi KIPK hanya terdapat batasan maksimal usulan berdasarkan akreditasi prodi, namun tidak ada batasan minimal usulan.

f. Mahasiswa penerima KIPK angkatan 2020, 2021, dan 2022 baru terdata pada penyaluran Gasal 2023/2024

Pada penyaluran bansos KIPK untuk angkatan tahun berjalan (*on going)*, jika ada mahasiswa penerima *on going* yang dibatalkan maka perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengganti kuota penerima dengan mahasiswa lain yang sebelumnya belum menerima KIPK. Namun demikian, atas hasil pengujian data penerima KIPK *on going* semester genap 2022/2023 dan gasal 2023/2024, ditemukan adanya 21 nama penerima baru dari tiga PTN berbeda yang baru menerima bantuan di semester gasal 2023/2024 dan tidak terdata sebagai penerima di semester genap 2022/2023. Kemudian hal yang sama juga ditemukan pada kategori penerima dari PTS yaitu sebanyak 1.310 penerima *on going* baru yang berasal dari sepuluh perguruan tinggi berbeda. Rekapitulasi atas nama-nama penerima KIPK *on going* yang baru tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 152. Rekapitulasi Data Penerima KIPK *on Going* yang Tidak Terdaftar di Semester Sebelumnya

No.	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa	Bantuan Biaya Hidup (Rp)	Bantuan Biaya Pendidikan (Rp)
	PTN			
1	Universitas Negeri Padang	18	81.000.000,00	43.200.000,00
2	Universitas Negeri Yogyakarta	2	8.400.000,00	4.800.000,00
3	Universitas Teuku Umar	1	4.200.000,00	2.400.000,00

No.	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa	Bantuan Biaya Hidup (Rp)	Bantuan Biaya Pendidikan (Rp)
	Jumlah PTN	**21**	**93.600.000,00**	**50.400.000,00**
	PTS			
4	Universitas Winaya Mukti	1064	6.574.200.000	3.574.400.000,00
5	Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi	81	429.600.000,00	252.000.000,00
6	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti	78	460.800.000,00	242.350.000,00
7	Universitas Bina Insani	38	172.800.000,00	97.600.000,00
8	STMIK Mercusuar	28	117.600.000,00	67.200.000,00
9	Universitas Pertiwi	9	54.300.000,00	29.600.000,00
10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama	5	34.200.000,00	18.400.000,00
11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BII Bekasi	3	22.500.000,00	12.000.000,00
12	Universitas Indonesia Timur	3	22.500.000,00	12.000.000,00
13	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten	1	7.500.000,00	4.000.000,00
	Jumlah PTS	**1.310**	**7.896.000.000,00**	**4.309.550.000,00**
	Total	**1.331**	**7.989.600.000,00**	**4.359.950.000,00**

Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.20 s.d B.10.21.**

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Tim Pokja KIPK, menginformasikan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena penerima KIPK *on going* yang baru terdata pada penyaluran semester gasal 2023/2024 ini merupakan data mahasiswa penerima KIPK *on going* yang migrasi/berpindah dari PTS yang dicabut izin pendirian/ditutup dan dipindahkan ke PTN atau PTS yang akan menerima. Sebagai contoh terdapat kondisi pada Universitas Negeri Padang (UNP) disebabkan oleh adanya migrasi data penerima KIPK yang berasal dari STIPER Sawahlunto Sijunjung, di mana STIPER Sawahlunto Sijunjung mengalami penyatuan institusi dengan UNP. Sementara itu, untuk perguruan tinggi lain belum memberikan konfirmasi.

g. Mahasiswa penerima KIPK merupakan penerima beasiswa lain

1) Penerima KIPK merupakan penerima Beasiswa ADik

Hasil pengujian menunjukkan terdapat mahasiswa penerima KIPK yang juga tercatat sebagai penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Nilai rekapitulasi bantuan biaya hidup dan biaya Pendidikan atas penerima KIPK yang juga menerima beasiswa ADik dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 153. Rekapitulasi Nilai Bantuan Ganda KIPK dan ADik

Program/Semester	Bantuan Biaya Hidup (Rp)	Bantuan Biaya Pendidikan (Rp)	Total Bantuan (Rp)
KIPK baru	22.800.000,00	14.876.000,00	37.676.000,00
KIPK *on going*	111.900.000,00	55.300.000,00	167.200.000,00
Total	**134.700.000,00**	**70.176.000,00**	**204.876.000,00**

Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.22 s.d B.10.23.**

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Puslapdik, diketahui bahwa atas status penerima KIPK dan ADik telah dilakukan integrasi data penerima. Namun, kondisi penerima ganda ini bisa terjadi karena perbedaan identitas penerima yaitu NIK.

2) Penerima KIPK merupakan penerima Beasiswa Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Pemeriksaan LKPD BPK serta pengujian data penerima bansos Bidikmisi dan KIPK dan data penerima beasiswa yang bersumber dari APBD, juga ditemukan terdapat penerima bansos KIPK yang juga terdata sebagai penerima beasiswa pemda.

Tabel 154. Rekapitulasi Potensi Bantuan Ganda Bidikmisi/KIPK dan Beasiswa Pemda

Program/Semester	Jumlah Penerima	Biaya Hidup (Rp)	UKT (Rp)	Nilai (Rp)
Bidikmisi *on going*/Genap	35	147.000.000,00	84.000.000,00	231.000.000,00
Bidikmisi *on going*/Gasal	1	4.200.000,00	2.400.000,00	6.600.000,00
KIPK *on going* PTN/Genap	29	132.900.000,00	71.452.917,00	204.352.917,00
KIPK *on going* PTN/Gasal	29	134.400.000,00	69.502.917,00	203.902.917,00
KIPK *on going* PTS/Genap	45	216.900.000,00	134.550.000,00	351.450.000,00
KIPK *on going* PTS/Gasal	39	187.200.000,00	118.550.000,00	305.750.000,00
KIPK baru/Gasal	11	63.600.000,00	44.916.000,00	108.516.000,00
Bantuan Biaya Pendidikan	21		48.360.000,00	48.360.000,00
Total	**210**	**886.200.000,00**	**573.731.834,00**	**1.459.931.834,00**

Rincian atas data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran B.10.24 s.d B.10.31.**

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Puslapdik, diketahui bahwa kondisi terjadi karena jadwal penetapan penerima pada masing-masing perguruan tinggi yang berbeda dan belum adanya integrasi data penerima dengan pemda. Puslapdik telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar dalam melakukan perlu berkoordinasi langsung dengan perguruan tinggi.

Selain itu, terdapat penyaluran ganda KIPK Kemendikbudristek dengan KIPK Kemenag. Atas permasalahan tersebut telah dimuat dalam LHP atas LK Kemenag Tahun 2023.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

1) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.

2) Pasal 15 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Tim pengendali bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai.

b. Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikti, pada Lampiran

1) Bab I Poin C. Penerima PIP Dikti yang menyatakan bahwa:

a) bagi mahasiswa baru penerima Program KIPK harus memenehi persyaratan mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif;

b) bagi mahasiswa aktif lanjutan *(on going)* penerima Program KIPK harus terdaftar dan tercatat sebagai mahasiswa aktif;

c) tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari: 1) APBN; 2) APBD; dan/atau 3) sumber lain yang membiayai biaya pendidikan.

2) Bab I Poin E. Komponen Pembiayaan PIP Dikti yang menyatakan bahwa:

a) Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIPK lanjutan *(on going)* sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIPK di semester pertama oleh Puslapdik.

b) Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIPK baru diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi kepada Puslapdik dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) biaya pendidikan yang diusulkan harus berdasarkan hitungan besaran rata-rata biaya Pendidikan Mahasiswa non-KIPK pada prodi penerima Program KIPK;

(2) tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada prodi penerima Program KIPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh Mahasiswa non-KIPK dan kemudian dibagi dengan jumlah Mahasiswa non-KIPK pada tahun akademik berjalan atau satu tahun sebelumnya.

3) Bab II Poin B. Pengelola PIP Dikti

a) Angka 1.d. yang menyatakan bahwa Tim PIP PTN memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan Puslapdik.

b) Angka 2.f yang menyatakan bahwa Tim PIP LLDikti memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Dikti dari Perguruan Tinggi Swasta untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Dikti kepada Puslapdik.

4) Bab III Poin E. Komponen Pembiayaan PIP Dikti

a) Angka 1) yang menyatakan bahwa Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIPK lanjutan *(on going)* sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIPK di semester pertama oleh Puslapdik.

b) Angka 2) yang menyatakan bahwa Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIPK Baru diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi kepada Puslapdik dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) biaya pendidikan yang diusulkan harus berdasarkan hitungan besaran rata-rata biaya Pendidikan Mahasiswa non-KIPK pada prodi penerima Program KIPK;

(2) tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada prodi penerima Program KIPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh Mahasiswa non-KIPK dan kemudian dibagi dengan jumlah Mahasiswa non-KIPK pada tahun akademik berjalan atau satu tahun sebelumnya.

c) Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIPK sebagaimana dimaksud pada huruf g) dan h) paling banyak senilai:

(1) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada prodi dengan akreditasi A atau akreditasi unggul;

(2) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada prodi dengan akreditasi B atau akreditasi sangat baik; dan

(3) Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada prodi dengan akreditasi C atau akreditasi baik.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Mahasiswa lain kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan KIPK atas penyaluran bantuan yang lebih bayar; dan

b. Potensi kelebihan pembayaran bantuan sosial Bidikmisi/KIPK senilai Rp70.563.677.995,00 yang terdiri dari:

1) Biaya hidup senilai Rp40.446.600.000,00 (Rp2.301.300.000,00 + Rp36.310.200.000,00 + Rp814.200.000,00 + Rp134.700.000,00 + Rp886.200.000,00) atas penerima yang statusnya tidak aktif pada penyaluran genap 2022/2023 dan gasal 2023/2024, penerima KIPK dari prodi yang tidak terakreditasi, dan penerima yang juga mendapatkan beasiswa ADik.

2) Biaya pendidikan senilai Rp30.117.077.995,00 (Rp1.300.339.941,00 + Rp21.163.602.072,00 + Rp731.400.000,00 + Rp2.595.362.148,00 + Rp3.682.466.000,00 + Rp70.176.000,00 + Rp573.731.834,00) atas biaya pendidikan penerima yang statusnya tidak aktif pada penyaluran genap 2022/2023 dan gasal 2023/2024, biaya UKT di atas nilai rata-rata UKT non-KIPK, biaya pendidikan dari prodi yang tidak terakreditasi, biaya Pendidikan yang melebihi batas maksimal akreditasi prodi, dan biaya pendidikan penerima yang juga mendapatkan beasiswa ADik.

c. Potensi perguruan tinggi tidak memperoleh bantuan pendidikan KIPK sesuai jumlah yang menjadi haknya.

Hal tersebut disebabkan:

a. PPK KIPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi data calon penerima bantuan;

b. Pengelola aplikasi KIPK tidak menyediakan aplikasi yang kredibel dalam memuat data besaran nilai UKT dan akreditasi prodi;

c. Pokja belum melakukan monitoring atas pengelolaan bantuan sosial PIP Dikti secara memadai.

Atas temuan tersebut, Plt. Kepala Puslapdik Kemendikbudristek menyatakan bahwa secara umum sependapat dengan temuan BPK dan menjelaskan bahwa:

a. Penyaluran KIPK pada mahasiswa tidak aktif karena pada saat penetapan mahasiswa KIP Kuliah, status akreditasi prodi masih tercatat aktif, namun masuk waktu/periode usulan pencairan masa aktif dari akreditasi prodi kedaluwarsa sehingga pengumuman dan penetapan penerima KIP Kuliah masih terakomodir untuk proses pencairan. Kondisi ini juga bisa terjadi pada penetapan *on going* saat penetapan pertama terakreditasi namun dalam pencairan *on going*nya akreditasinya kedaluwarsa. Kondisi seperti ini tetap kami cairkan dengan persyaratan prodi sedang dalam usulan reakreditasi prodi ke lembaga akreditasinya.

b. Atas nilai UKT yang anomali bisa terjadi kesalahan input, karena di SIM KIP Kuliah hanya memberikan batasan maksimal usulan berdasarkan akreditasinya.

c. Status penerima KIP Kuliah dan ADik telah dilakukan integrasi data penerima. Kondisi ini bisa terjadi karena perbedaan identitas penerima yaitu NIK. Namun kami akan terus berupaya memastikan kondisi seperti ini tidak terjadi lagi.

d. Berdasarkan PerSekjen Nomor 13 Tahun 2023 bahwa Penerima Mahasiswa KIP Kuliah tidak diperkenankan untuk bantuan lain yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang membiayai komponen yang sama. Kondisi ini terjadi karena jadwal penetapan penerima pada masing-masing perguruan tinggi yang berbeda dan belum adanya integrasi data penerima dengan pemda. Kami telah melakukan koordinasi agar dalam melakukan penetapan pemerintah daerah perlu berkoordinasi langsung dengan perguruan tinggi.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Sekjen Kemendikbudrisek melalui Kepala Puslapdik agar:

   1) Melakukan koordinasi secara periodik dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk sinkronisasi data penerima beasiswa;

   2) Melakukan koordinasi secara periodik dengan BAN-PT untuk sinkronisasi data akreditasi prodi;

   3) Memperbaiki aplikasi KIPK agar dapat memuat data UKT dan Akreditasi Prodi dengan akurat;

   4) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan verifikasi data calon penerima bantuan dan Pokja yang belum melakukan monitoring atas pengelolaan bantuan sosial PIP Pendidikan Tinggi secara memadai;

b. Irjen agar melakukan penelusuran atas potensi kelebihan pembayaran bantuan sosial Bidikmisi dan KIPK senilai Rp70.563.677.995,00.

11. Pelaksanaan Belanja Modal pada Beberapa Satker Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan dan Kondisi Sebenarnya

Pada Tahun 2023 Kemendikbudristek menganggarkan Belanja Modal senilai Rp6.511.205.514.000,00 dan telah direalisasikan Rp5.603.412.917.284,00 atau 86,06%. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen SPK dan kontrak serta pemeriksaan lapangan pada satker-satker Kemendikbudristek diketahui beberapa kelemahan sebagai berikut:

a. Kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal senilai Rp1.902.966.846,71

Hasil pemeriksaan atas dokumen kelengkapan bukti pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik atas hasil 31 pekerjaan pada 18 satker menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 155. Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan pada 18 Satker

No	Uraian	No SPK/Kontrak	Satker	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kurang Volume (Rp)	Perhitungan
I. Ditjen Diktiristek						
1.	Renovasi Auditorium lt. 2 Gedung Ditjendiktiristek	3159/SP/E1-CATALOGUE/ 2023 537113	Setditjen	2.970.073.500,00	31.818.020,00	**Lampiran B.11.1**
2	Pembangunan *Science Techno Park* UI	7811/E3.1/SPK. KL/XII/ 2022	Direktorat Kelembagaan	128.098.973.475,00	112.447.011,65	**Lampiran B.11.2**
3	Renovasi Ruang Kerja Kantor Pegawai	1056/E2/PPK/LK.00.03/2023	Direktorat Belmawa	1.489.187.724,00	23.965.391,43	**Lampiran B.11.3**
4	Pengadaan Interior Ruang Rapat, Ruang Keuangan dan Plafon Ruang Kerja	1112/E2/PPK/LK.00.03 /2023		144.514.896,00	1.180.238,40	**Lampiran B.11.4**
5	Pembangunan Gedung Workshop Teknik Mesin Fakultas Teknik	18.04/UN63/SP-PPK-K-L/ 2022	UPN Veteran Jawa Timur	15.082.679.000,00	56.936.781,20	**Lampiran B.11.5**
6	Pekerjaan Konstruksi Kelanjutan Pembangunan Gedung *Research Center* 2023	18.03/UN63/SP-PPK-K-L/ 2023		9.855.186.000,00	5.833.083,03	**Lampiran B.11.6**
7	Pekerjaan Saluran FT-BAKPK	29.03/UN63/SPK-PPK-JP-PL/2023		390.775.000,00	52.623.627,03	**Lampiran B.11.7**
8	Pembangunan Pengembangan Sarana Gedung Parkir Motor	020/UN61/T/SP-UM/2023	UPNVJ	3.427.506.980,00	53.542.298,50	**Lampiran B.11.8**
9	Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung Gedung Satu Gurindam	588/UN53.23/LK/2023	UMRAH	9.937.713.499,26	45.931.792,02	**Lampiran B.11.9**
10	Pekerjaan Pusat Pengembangan Karakter Mahasiswa	Add.I.898/UN53.25/LK/2023		4.430.929.000,00	10.656.482,18	**Lampiran B.11.10**
11	Pembangunan Gedung Kuliah PPG	87-2/UN.29.PPK-PNBPBLU.05/2023	UHO	15.153.543.261,73	52.120.605,66	**Lampiran B.11.11**
12	Pembangunan Gudang BMN	157/UN29.PPK-PNBPBLU.08/2023		3.766.949.000,00	31.048.408,36	**Lampiran B.11.12**
13	Pembangunan Pagar Depan UHO Lanjutan	196-3/UN29/PPBJ-UHO/ 2023		492.869.755,00	12.462.379,59	**Lampiran B.11.13**

No	Uraian	No SPK/Kontrak	Satker	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kurang Volume (Rp)	Perhitungan
14	RenovasiGedung D5 Faklutas Pertanian	170-1/UN.29/PPK-BOPTN/IX/2023		3.827.976.133,00	31.368.640,51	**Lampiran B.11.14**
15	Renovasi Gedung Kuliah Lingkup FEB	196-1/UN.29/PPK-BOPTN/X/2023		2.407.541.000,00	27.057.574,26	**Lampiran B.11.15**
Jumlah I				**201.476.418.223,99**	**548.992.333,82**	
II. Ditjen Diksi						
16	Pembangunan Gedung Teknik Mesin Kampus 2 PNUP	2600/PPK-BLU.SBSN/2023	PNUP	56.353.365.290,00	94.081.787,39	**Lampiran B.11.16**
17	Pembangunan Fasad Gedung Direktorat dalam Rangka Prasarana Pendukung Pembelajaran PNJ	1279/PL3.B/RT.01.00-AD/2023	PNJ	6.455.960.126,00	32.077.566,61	**Lampiran B.11.17**
18	Pembangunan Tugu Ikonik Monumen dalam Rangka Pembangunan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran Politeknik	Nomor936/PL3.B/RT.01.00-AD/2023		1.826.798.533,00	6.076.590,13	**Lampiran B.11.18**
19	Renovasi Gedung Akuntansi dalam Rangka Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran PNJ	1943/PL3.B/RT.01.00-AD/2023		646.508.992,00	1.776.533,84	**Lampiran B.11.19**
20	Pembangunan Gedung *Smart Automation Workshop*	1545.01/PL14/LP.1/2023	PENS	108.241.835.000,00	251.380.858,69	**Lampiran B.11.20**
Jumlah II				**173.524.467.941,00**	**385.393.336,66**	
III. Setjen						
21	Rehab Ruang Teknis	630/J2/PBJ.1/SPK/2023	Pusdiklat	193.539.600,00	8.697.909,42	**Lampiran B.11.21**
22	Pekerjaan Rehab Pintu Masuk Gedung Asrama Nusantara	532/J2/PBJ.1/SPK/2023		112.814.850,00	3.136.000,00	**Lampiran B.11.22**
23	Rehab Lantai Kantin Paramitha	642/J2/PBJ.1/SPK/2023		195.970.500,00	2.687.520,00	**Lampiran B.11.23**
24	Penataan Ruang Kerja Lantai 14 Sayap Kiri Gedung C	31887/A7/RT.02.00/2023	Biro Umum dan PBJ	197.276.415,00	10.029.155,00	**Lampiran B.11.24**
25	Penataan Ruang Kerja Lantai 14 Sayap Kanan Gedung C	31887/A7/RT.02.00/2023		197.303.055,00	2.540.900,00	**Lampiran B.11.25**
26	Renovasi Gedung dan Bangunan Fasad	1024/LL4/LL/2023	LL Dikti Wilayah IV Bandung	249.807.159,00	8.599.080,00	
Jumlah III				**1.146.711.579,00**	**35.690.564,42**	
IV. Ditjen GTK						
27	Renovasi Gedung Bernoulli	03-084/S-CVDR1.BBGP/XII/2023	BBGP Prov. DIY	3.304.958.339,00	46.552.282,90	**Lampiran B.11.26**
28	Pekerjaan Renovasi Gedung Yudhistira	6709/B7.3/LK.00.00/2023	BBGP Prov. Jateng	541.375.000,00	8.661.924,17	**Lampiran B.11.27**
29	Pekerjaan Pemagaran Lahan BGP Prov Banten	2783/B7.13/LK.00.00/2023	BGP Prov. Banten	1.387.355.000,00	67.126.036,05	
Jumlah IV				**5.233.688.339,00**	**122.340.243,12**	

No	Uraian	No SPK/Kontrak	Satker	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kurang Volume (Rp)	Perhitungan
V. Ditjen PDM						
30	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	0516/KONTRAK/BPMP.Kaltim/2023	BBMP Prov Kaltim	4.726.713.800,00	59.347.386,63	**Lampiran B.11.28**
Jumlah V				**4.726.713.800,00**	**59.347.386,63**	
VI. Ditjen Kebudayaan						
31	Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung C dan *Entrance* Museum Nasional	727/F7.1.12/KS.08.02/2023	BPK W XXII Papua	49.111.215.00,00	751.202.982,06	**Lampiran B.11.29**
Jumlah VI				**49.111.215.00,00**	**751.202.982,06**	
Total (I s.d VI)					**1.902.966.846,71**	

b. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada 11 satker senilai Rp2.793.103.098,23 belum dikenakan

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan BPK dengan masing-masing PPK menunjukkan terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp2.793.103.098,23 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 156. Rincian Denda Keterlambatan pada 11 Satker

No	Uraian	No SPK/Kontrak	Satker	Nilai Kontrak / Sisa Pekerjaan Belum Selesai Tanpa PPN (Rp)	Hari Terlambat	Nilai Keterlambatan (Rp)
I. Ditjen Diktiristek						
1.	Pengadaan Peralatan *Teaching Factory* Alat Kesehatan dan Elektronika UI Paket AL2-P2309-7524663	3445/E3.4/SPK.KL/XI/2023	Direktorat Kelembagaan	13.055.000.000,00 / 13.055.000.000,00	3	40.265.000,00
2	Pengadaan Peralatan *Teaching Factory* Alat Kesehatan dan Elektronika UI Paket AL2-P2311-806591	4499/E3.4/SPK.KL/XI/2023		6.950.000.000,00 / 6.950.000.00,00	2	13.900.000,00
3	Pengadaan Peralatan *Lab. Research* Tahap 4.7	25.03/UN63/SPK-PPK-B-EP/2023	UPN Veteran Jatim	4.225.300.000,00 / 4.225.300.000,00	38	144.649.909,91
4	Pengadaan Peralatan *Lab. Research* Tahap 4.28	55.03/UN63/SP-PPK-B-EP/2023		3.326.656.700,00 / 194.566.700,00	38	6.660.841,98
5	Pengadaan Peralatan *Lab. Research* Tahap 4.09	27.03/UN63/SPK-PPK-B-EP/2023		7.504.450.000,00 / 7.335.000.000,00	12	79.297.297,30
6	Pengadaan Peralatan *Lab. Research* Tahap 4.24	42.03/UN63/SP-PPK-B-EP/2023		28.286.292.400,00. / 3.296.000.000,00	12	35.632.432,43
7	Pengadaan Peralatan *Lab. Research* Tahap 4.09	20.03/UN63/SP-PPK-B-EP/2023		6.118.544.605,00 / 2.070.000.000,00	15	27.972.972,97
8	Pembangunan Gedung *Research Center* 2023	18.03/UN63/SP-PPK-K-L/2023		9.855.186.000,00 / 41.479.384,50	50	2.078.969,23
9	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu II	4894/IT10.B/LK.07/2023	Institut Teknologi Kalimantan	69.712.903.500,00 / 18.916.690.571,35	90	1.702.502.151,42

No	Uraian	No SPK/Kontrak	Satker	Nilai Kontrak / Sisa Pekerjaan Belum Selesai Tanpa PPN (Rp)	Hari Terlambat	Nilai Keterlambatan (Rp)
10	Pembangunan Gedung Kuliah PPG	87-2/UN.29.PPK-PNBPBLU.05/2023	UHO	15.153.543.261,73 / 120.489.811,31	Denda maksimal 5%	6.024.490,57
11	Paket *The Development and Upgrading of State University of Jakarta (Phase 2) Civil Works*	16/UN60/SP/PPK/ 2023	Univ Timor	644.000.000,00 / 644.000.000,00	27	17.388.000,00
12	Pembangunan Gedung Pembinaan Karakter Mahasiswa	10808/UN20.6.6/HK/ 2023	Univ Bengkulu	1.430.949.340,00 / 1.165.127,12	9	10.486.144,06
13	Pekerjaan Pembangunan Gedung Satu Gurindam	246/UN53.22/LK/2023	UMRAH	57.147.741.175,61 / 5.774.290,14	65	375.328.859,33.
14	Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung Gedung Satu Gurindam	588/UN53.23/LK/ 2023		9.937.713.499,26 / 9.847.747,75	27	265.889.189,19
	Jumlah I					**2.728.076.258,39**
II. Ditjen Diksi						
15	Pekerjaan Pematangan Lahan untuk Jurusan Teknik Sipil	2605/PPK-BLU.SBSN/2023	PNUP	4.590.000.000,00 / 413.513.513,51	50	20.675.675,68
	Jumlah II					**20.675.675,68**
III. Setjen						
16	Rehap Lantai Kantin Paramitha	642/J2/PBJ.1/SPK/2023	Pusdiklat	195.970.500,00 / 195.970.500,00	7	1.371.793,50
17	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tipe 120	1327/LL14/LK.01.00/2023	LL Dikti Wilayah XIV	1.925.389.861,01 / 314.223.625,32	36	11.312.050,51
18	Pekerjaan Pembangunan Pagar Kawasan Kantor	1326/LL14/LK.00.00/2023		1.997.201.137,94 / 597.163.140,24	51	30.455.320,15
	Jumlah III					**43.139.164,16**
	Pengadaan Sarana Kantor	SP No 01/Sarana Kantor/TU-RT/Itjen/2023	Itjen	1.363.500.000,00 / 303.000.000,00	4	1.212.000.,00
	Jumlah IV					**1.212.000,00**
	Total (I s.d IV)					**2.793.103.098,23**

Rincian perhitungan dengan keterlambatan pada **Lampiran B.11.30**

c. Kekurangan volume dua pekerjaan pada Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berpotensi kelebihan bayar senilai Rp1.441.675.391,35

Hasil pemeriksaan lapangan selain adanya kelebihan bayar terdapat juga adanya potensi kelebihan bayar pada

1) Pekerjaan Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB *Innovation Park* (IIP) Bandung Teknopolis.

Realisasi MAK 526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Direktorat Kelembagaan diantaranya digunakan untuk Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB *Innovation Park* (IIP) Bandung Teknopolis.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh penyedia WG – WIKA KSO sesuai kontrak nomor 0929/LU-J/DIPA/PERJ/2022 tanggal 30 Juni 2022 senilai Rp397.966.743.365,67 dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 732 hari kalender yaitu dari tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2024. Metode pemilihan penyedia adalah melalui proses tender pascakualifikasi. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya potensi kekurangan volume pekerjaan dimana pekerjaan masih berlangsung sampai dengan Juli 2024 senilai Rp1.309.468.812,14 pada pekerjaan Persiapan dan pekerjaan Struktur lantai *basement*. Perhitungan kekurangan volume pada **Lampiran B.11.31.**

2) Paket *The Development and Upgrading of State university of Jakarta (Phase-2) Civil Works* (UNJ)

Realisasikan Belanja Modal Tahun 2023 pada UNJ diantaranya untuk melaksanakan pembayaran pekerjaan Paket *The Development and Upgrading of State university of Jakarta (Phase-2) Civil Works*.

Pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia PT JKMP, Tbk sesuai Kontrak Nomor 03/KTR/PIU-SFD/UNJ/03/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan nilai kontrak senilai Rp424.666.324.282,94. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 990 hari kalender yaitu dari tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2024. Hasil pemeriksaan fisik atas hasil pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan PPK, Penyedia Barang/Jasa, dan Manajemen Konstruksi, diketahui terdapat kelebihan perhitungan pembesian pada kolom KA-1 lantai tiga gedung A yang berpotensi kelebihan pembayaran senilai Rp132.206.579,21. Perhitungan kelebihan penghitungan pembesian pada **Lampiran B.11.32.**

d. Pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII Papua tidak sesuai ketentuan

Realisasi Belanja Modal pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII adalah Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung A Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII Papua senilai Rp2.053.494.000,00. Pekerjaan Renovasi Gedung A Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII dilakukan oleh CV CMP melalui perjanjian Nomor 013/Barjas/08/2023 dengan nilai kontrak awal senilai Rp1.935.250.400,00 dengan waktu pekerjaan selama 140 hari kalender sejak 5 Agustus s.d. 22 Desember 2023. Hasil pemeriksaan melalui daring dan wawancara dengan PPK menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Pemberian kesempatan pekerjaan sampai dengan Maret 2024 dilakukan tanpa didukung dengan Addendum Kontrak dan nilai denda keterlambatan yang dipungut tidak sesuai Perjanjian

Pada Tanggal 8 Desember 2023, melalui Addendum Kontrak I Nomor 049/Barjas/12/2023 berupa penambahan item baru pekerjaan dan perbaikan volume yang mengalami perbedaan dari kebutuhan. Perubahan nilai kontrak menjadi senilai Rp2.053.494.000,00. Pengajuan permohonan addendum pertama ini diajukan oleh penyedia melalui surat pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor Permohonan/BPKXXII/ADD-CCO/X/2023, (surat tidak bernomor). Pada tanggal 25 November 2023 sebelum adanya penandatanganan addendum kontrak, PPK melakukan rapat dengan para pihak baik penyedia dan pengawas yakni CV STK yakni rapat *Show Cause Meeting* (SCM). Dari hasil rapat diketahui informasi antara lain: Pekerjaan s.d.

minggu ke-16 atau tanggal 25 November 2023 baru terealisasi 27,122%, di mana menurut rencana seharusnya 57,063% sehingga terjadi keterlambatan atau deviasi minus senilai 29,94%; Jumlah tenaga kerja yang tidak cukup dan kurang optimal; Bahan material yang tidak disediakan di lokasi pekerjaan oleh penyedia; dan Pekerjaan pengecoran dan pembesian yang tidak maksimal.

Tanggal 18 Desember 2023, kembali dilakukan Addendum II Nomor 073/Barjas/12/2023 yang mengatur penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 149 hari kalender sehingga batas akhir pekerjaan menjadi 31 Desember 2023. Pengajuan Addendum ke-2 diajukan oleh penyedia melalui surat tertanggal 8 Desember 2023 dengan nomor Permohonan/BPKXXII/ADD-CCO/XII/2023, (surat tidak bernomor). Berdasarkan Laporan Pengawas pekerjaan per 8 Desember 2023 (Minggu ke-18) diketahui bahwa progres pekerjaan baru senilai 45,90%.

Tanggal 31 Desember 2023 PPK melakukan addendum III terkait perpanjangan waktu pekerjaan dengan Nomor 079/Barjas/12/. Berdasarkan addendum III, pekerjaan diselesaikan selambat-lambatnya 30 Januari 2024 dan mulai dari tanggal 1 Januari 2024 dikenakan denda keterlambatan sebanyak 1/1000 dari nilai kontrak per hari dan penyedia harus memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan selesainya pekerjaan. Pada saat PPK melakukan addendum ke 3 tidak diketahui progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV CMP karena laporan supervisi yang disampaikan oleh pengawas hanya sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 sesuai dengan masa kontrak SPK antara pengawas dengan PPK. Menurut laporan per 23 Desember 2023 pekerjaan yang telah terealisasi baru senilai 65,469%. Dengan demikian pemberian perpanjangan waktu ini didasarkan penilaian PPK bersama KPA, CV CMP sebagai penyedia barang yang diyakini mampu menyelesaikan sisa pekerjaan dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.

Pada 28 Januari 2024, CV CMP menyampaikan permohonan kesempatan penyelesaian pekerjaan renovasi gedung A. Permohonan tersebut dijawab PPK BPK Wilayah XXII pada 29 Januari 2024 melalui surat Nomor 001/Barjas/01/2024 dengan memberikan kesempatan terakhir penyelesaian pekerjaan sampai dengan 30 Maret 2024, dengan pengenaan denda 1/1000 per hari kalender keterlambatan mulai tanggal kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2023. Namun pemberian kesempatan hingga 30 Maret 2024 dilakukan tanpa didukung dengan addendum kontrak. Sehingga, kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan yang berlaku adalah Addendum Kontrak III Nomor 079/Barjas/12/2023 tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan addendum kontrak III tersebut, pekerjaan diselesaikan selambat-lambatnya 30 Januari 2024.

Pada tanggal 21 Maret 2024, PPK bersama-sama Konsultan Pengawas, dan Penyedia Barang CV CMP, menandatangani Berita Acara Penyataan Selesainya Pekerjaan Renovasi Gedung A Nomor 010a/Barjas/03/2024. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor 012/Barjas/03/2024 dilakukan perhitungan denda keterlambatan penyelesaian dengan perhitungan jumlah hari keterlambatan adalah sebanyak 40 hari sehingga denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia Barang sesuai BA denda keterlambatan senilai Rp73.999.784,00.

Dasar pengenaan 40 hari keterlambatan ini tidak sesuai dengan kontrak yang menjadi dasar hukum yang berlaku yaitu addendum kontrak III yang menyatakan keterlambatan dimulai dari 1 Januari 2024, sehingga jumlah hari keterlambatan yang seharusnya

adalah 81 hari. Berdasarkan addendum kontrak III tersebut denda yang seharusnya dikenakan sampai dengan waktu penyelesian pekerjaan adalah Rp149.849.594,60 (Rp1.849.994.995,00 x 81 hari x 1/1000), sehingga terdapat kekurangan pengenaan denda yang belum dipungut senilai Rp75.849.810,60 (Rp149.849594,60 – Rp73.999.784,00).

2) Pembayaran Konsultan Pengawas pembangunan Gedung A mendahului penyelesaian pekerjaan

Untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan renovasi Gedung A, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII melakukan perjanjian kontrak dengan konsultan pengawas CV STK dengan nilai kontrak senilai Rp144.938.250,00 melalui SPK Nomor 015/Barjas/08/2023 tanggal 5 Agustus 2023. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 140 hari kalender s.d 23 Desember 2023. Lingkup pekerjaan adalah sampai dengan tahap serah terima petama dan tahap serah terima akhir yang dapat melewati tahun anggaran yang merupakan layanan purna konsultan. Dimana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII Papua megalami tiga kali addendum dan dua kali pemberian kesempatan sehingga pekerjaan tersebut berakhir dan serah terima pada Maret 2024.

Merujuk Petunjuk Teknis RPATA, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII melakukan pengisian RPATA atas konsultan pengawas renovasi pekerjaan Gedung A tanggal 18 Desember 2023 senilai Rp144.938.250,00. Meskipun pekerjaan belum selesai, namun BPK Wilayah XXII pada tanggal 29 Desember 2023 telah melakukan pencairan/pembayaran pembayaran RPATA kepada konsultan pengawas CV STK.

e. Selisih harga timpang atas pembayaran pembangunan jalan penghubung Gedung Satuan Gurindam pada UMRAH senilai Rp581.125.805,25

Pembangunan Jalan Penghubung Gedung Satu Gurindam pada UMRAH dilaksanakan oleh PT BSP berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 588/UN53.23/LK/2023 tanggal 2 Agustus 2023 dengan nilai pekerjaan senilai Rp9.937.713.499,26. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Agustus s.d 29 Desember 2023. Pekerjaan tersebut telah dibayar melalui empat termin pembayaran dengan total senilai Rp9.243.253.597,68 (termasuk PPN).

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat selisih harga timpang senilai Rp581.125.805,25. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa bagian pekerjaan yang baru dilakukan koreksi harga timpang pada saat sebelum *addendum* 2 bukan pada saat evaluasi harga.

Atas selisih harga timpang tersebut, PPK menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan *addendum* 2, PPK bersama tim teknis, konsultan pengawas, dan penyedia melaksanakan reviu internal. Salah satu hasil reviu internal tersebut yaitu ditemukan bahwa pada *addendum* 1 belum dilakukan koreksi harga timpang. Konsultan pengawas menyarankan agar dilaksanakan koreksi harga timpang pada *addendum* 2, dengan berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Pemerintah. Berdasarkan saran dari konsultan pengawas, PPK kemudian menyetujui melakukan koreksi harga timpang pada *addendum* 2 dan sebelum dilakukan penandatangan Berita Acara Addendum 2, pihak UMRAH mengundang BPKP Perwakilan Prov. Kepualauan Riau untuk dapat mendampingi proses reviu usulan perubahan tersebut melalui surat nomor

0058/UN53.005/WS.01.05/2023, kemudian BPKP mengeluarkan surat tugas nomor PE.07.02/ST-1026/PW28/2/2023.

Pokja tidak mengetahui bahwa berdasarkan hasil reviu PPK, tim teknis, MK, dan penyedia sebelum Addendum kedua, koreksi atas harga timpang belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan menurut Pokja, koreksi atas harga timpang telah dilakukan bersamaan dengan koreksi aritmatik, namun Pokja mengakui tidak melakukan klarifikasi harga timpang tersebut. Pokja memahami bahwa harga satuan timpang hanya berlaku untuk pekerjaan yang mengalami perubahan volume (*addendum*) sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Atas hal tersebut, UMRAH pernah menghubungi Pokja untuk meminta data koreksi aritmatik yang didalamnya terdapat perhitungan persentase harga timpang dalam format file *excel*. Pokja tidak memiliki kapasitas mengapa koreksi harga timpang dilaksanakan pada addendum 2, hal dikarenakan hal tersebut sudah pada tahapan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan wewenang PPK.

f. Kontrak perjanjian tidak mengatur cara pengukuran dan cara pembayaraan hasil pekerjaan secara memadai pada Ditjen Diksi

Terdapat tiga paket pekerjaan dimana kontrak (Rencana Kerja dan Syarat/RKS) tidak mengatur cara pengukuran dan cara pembayaran secara memadai atas item/uraian pekerjaan senilai Rp6.599.217.196,87 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 157. Rekapitulasi Kontrak Pekerjaan yang Tidak Mengatur Cara Pengukuran dan Cara Pembayaran Hasil Pekerjaan

No.	Nama Pekerjaan	Item Pekerjaan	Jumlah Harga Item Pekerjaan (Rp)
1	Pembangunan Gedung Teknik Mesin Kampus 2 PNUP	Pek. Kolom KB 01 (H beam uk 250)	1.259.004.303,33
		Pek. Kolom KB 01 (H beam uk 200)	973.902.120,00
		Pekerjaan IWF 200	253.323.392,00
		Pekerjaan IWF 250	665.513.799,22
		Pekerjaan IWF 300	140.115.360,00
		Pekerjaan IWF 400	38.264.688,00
		Pekerjaan IWF 450	439.450.544,00
		Pek. Rangka Kuda- Kuda, IWF 200	2.128.827.904,73
		Pek. Siku 2 L 50	301.941.277,20
Jumlah (1)			**6.200.343.388,48** *(Lampiran B.11.33)*
2	Pembangunan Fasad Gedung Direktorat Prasarana Pendukung Pembelajaran PNJ	Pekerjaan Kolom WF 150	106.118.632,11
		Pekerjaan Balok WF 150	44.746.121,88
		Pekerjaan Balok WF 150	31.983.573,74
Jumlah (2)			**182.848.327,73** *(Lampiran B.11.34)*
3	Pembangunan Tugu Ikonik Monumen Pembangunan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran PNJ	Pembesian Beton	216.025.480,66 (Lampiran B.11.35)
Jumlah (3)			**216.025.480,66**
Jumlah (1) + (2) + (3)			**6.599.217.196,87**

Perhitungan berat Pembesian Beton, Kolom H Beam, Balok IWF 200, 250, 300, dan 400, serta Rangka Kuda-Kuda IWF 200 dan Pekerjaan Siku yang dibayarkan menggunakan berat pada tabel profil konstruksi baja, sehingga berat baja yang digunakan bukan berasal

dari hasil pengukuran/pengujian berat aktual sampel baja dengan frekuensi/jumlah minimal pengujian/pengukuran yang ditentukan untuk masing-masing baja karena tidak diatur dalam spesifikasi teknis kontrak.

g. Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai ketentuan dan jaminan pelaksanaan berpotensi tidak bisa dicairkan senilai Rp1.214.359.677,00

1) Penyelesaian Gedung KB Gorontalo tidak sesuai ketentuan dan jaminan pelaksanaan Rp1.065.063.250,00 tidak diakui oleh Bank Penerbit

KB Prov. Gorontalo melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KB Prov. Gorontalo, dengan SPK Nomor 018/Pengadaan/KBPG/2023, tanggal 8 Mei 2023 dengan penyedia jasa PT AM. Harga kontrak termasuk PPN senilai Rp19.453.209.990,00. Jangka waktu kontrak 210 hari kalender 10 Mei 2023 s.d. 5 Desember 2023. Masa pemeliharaan selama 210 hari kalender atau 6 bulan.

Pekerjaan mengalami dua kali addendum dengan uraian sebagai berikut:

a) Addendum 01 Nomor 018/Pengadaan/KBPG/2023 tanggal 17 Juli 2023 yaitu tidak mengubah nilai dan jangka waktu pekerjaan; dan

b) Addendum II Nomor 104/Pengadaan/KBPG/2023 tanggal 10 November 2023 yaitu perubahan nilai pekerjaan yang semula senilai Rp19.453.209.990,00 menjadi Rp21.301.265.000,00, perubahan jangka waktu pekerjaan yang semula selama 210 hari menjadi 236 hari kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Saldo pembentuk RPATA senilai Rp6.390.379.501,00 senilai 15% dari nilai Kontrak. BAPK kemajuan fisik pekerjaan tanggal 31 Desember 2023 senilai 74,47%. Pekerjaan dilanjutkan ke tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Pemberian kesempatan Pertama (s.d. 31 Januari 2024):

(1) Pada tanggal 28 Desember 2023 PT AM menyampaikan Surat Pernyataan dalam Rangka Permohonan Pemberian Kesempatan untuk Melanjutkan Pekerjaan ke Tahun Anggaran Selanjutnya, yang diantaranya menyatakan pekerjaan akan diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2024;

(2) PPK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2024 melalui Surat Keterangan Pemberian Kesempatan I Nomor 161/Pengadaan/KBPG/2023 tanggal 28 Desember 2023; dan

(3) Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 31 hari selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2024 dituangkan dalam Perubahan Kontrak Nomor 162/Pengadaan/KBPG/2023 tanggal 28 Desember 2023.

b) Pemberian kesempatan Kedua (s.d. 29 Februari 2024):

(1) PT AM tidak dapat menyelesaikan pada tanggal 31 Januari 2024, sehingga membuat Surat Pernyataan Dalam Rangka Permohonan Pemberian Kesempatan untuk Melanjutkan Pekerjaan ke Tahun Anggaran Selanjutnya yang kedua kalinya dengan Nomor 142/PT. AM/PK-2/2024 tanggal 30 Januari 2024 diantaranya menyatakan pekerjaan akan diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 29 Februari 2024;

(2) PPK memberikan kesempatan kedua atas penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 29 Februari 2024 melalui Surat Keterangan Pemberian Kesempatan II Nomor: 168/Pengadaan/KBPG/2024 tanggal 30 Januari 2024; dan

(3) Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 29 hari selambat-lambatnya tanggal 29 Februari 2024 dituangkan dalam Perubahan Kontrak Nomor 163/Pengadaan/KBPG/2024 tanggal 31 Januari 2024.

Pekerjaan dinyatakan tidak selesai sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 186/Pengadaan/KBPG/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan progres pekerjaan sebesar 96,50%. Pekerjaan telah diputus kontrak sesuai Surat PPK Nomor 190/Pengadaan/KBPG/2024, tanggal 29 Februari 2024 tentang Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung KB Prov. Gorontalo. Denda keterlambatan dihitung satu permil atas item pekerjaan yang belum selesai terhitung dari tanggal 1 Januari s.d. 29 Februari 2024 (60 hari keterlambatan) sehingga denda keterlambatan yang dikenakan adalah senilai Rp1.151.419.729,73 (Rp19.190.328.828,83/1.000 x 60 hari).

Pembayaran RPATA Tahun 2024 dilakukan sesuai SPM No 00054A tanggal 8 Maret 2024 senilai Rp4.617.049.189,00 atas pembayaran tersebut telah memperhitungkan pengurangan denda keterlambatan yang dikenakan senilai Rp1.151.419.729,73. Jaminan pelaksanaan ditetapkan senilai 5% dari nilai kontrak atau senilai Rp1.065.063.250,00 (5% x Rp21.301.265.000,00) dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bekasi Juanda No BG15605117429 tanggal 5 Februari 2024, berlaku selama 30 hari kalender mulai tanggal 31 Januari s.d. 29 Februari 2024. Namun berdasarkan surat dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bekasi Juanda kepada PPK KB Prov. Gorontalo No R04.Br.BJN/047/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal konfirmasi keaslian bank garansi menyatakan bahwa Bank Garansi tersebut tidak tercatat dalam administrasi dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak dapat dicairkan.

2) Pekerjaan yang tidak selesai pada LL Dikti XIV Biak dan jaminan pelaksanaan senilai Rp149.296.427,00 tidak dicairkan

Pada Tahun 2023 LLDikti Wilayah XIV Biak melaksanakan pekerjaan konstruksi antara lain pembangunan rumah dinas tipe 120, pembangunan rumah dinas tipe 70, pembangunan pagar kawasan kantor dan pembangunan rumah genset. Pekerjaan pembangunan rumah dinas tipe 120 dan pembangunan pagar Kawasan kantor mengalami keterlambatan sedangkan pembangunan rumah dinas tipe 70 dan pembangunan rumah genset tidak selesai pengerjaannya. Atas dua pekerjaan tersebut PPK belum mencairkan jaminan pelaksanaannya senilai Rp149.296.427,00 (Rp49.678.867,00+Rp99.617.560,00).

Menurut keterangan PPK, pekerjaan pembangunan rumah genset tidak selesai pengerjaannya karena penyedia tidak dapat mengkonfirmasi kepastian pembelian mesin genset sampai dengan akhir tahun 2023. Prestasi pekerjaan pembangunan rumah dinas tipe 70 per 31 Desember 2023 tidak mencapai 50% sehingga PPK memutuskan untuk menghentikan pekerjaan. PPK hanya membayar kepada penyedia senilai uang muka saja dan telah melakukan penihilan RPATA.

h. Perencanaan dan pelaksanaan pembebasan tanah untuk Situs Kumitir, Situs Klinterejo dan Situs Sentonorejo pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI kurang optimal

Pada Juni 2023, setelah DIPA Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI terbit, satker mengajukan usulan penambahan anggaran BUN Tahap II ke Kementerian Keuangan melalui Setditjen Kebudayaan untuk pembebasan lahan di Kawasan Situs Kumitir dan Klinterejo dengan risalah rincian RAB terkait Pengadaan Tanah sebagai berikut.

Tabel 158. Usulan Anggaran BA BUN BPK Wilayah XI

No	Uraian	Rincian Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Tanah		
	- Pembebasan Lahan	49.998, x 800.000,00 2 m2	39.998.560.000,00
	- Biaya Notaris	200.000.000,00	200.000.000,00
	- Biaya Sertifikasi Lahan	1.652.449.000,00	1.652.449.000,00
2	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	67.800.000,00	67.800.000,00
Jumlah			**41.918.809.000,00**

Pada bulan September, tambahan anggaran BUN disetujui DJA dan telah dilakukan revisi anggaran pada DIPA Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI.

Besaran harga satuan per meter persegi atas tambahan anggaran pada RAB dan KAK pada usulan BUN senilai Rp800.000,00. Harga tersebut dihitung berdasarkan harga perkiraan yang diperoleh dari harga pasaran tanah dari Surat Keterangan Harga Tanah yang diterbitkan pada Bulan Februari 2023 oleh Kepala Desa Kumitir dan Klinterejo yang menjadi lokasi pembebasan lahan dengan kisaran Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 per meter persegi.

Pada proses pelaksanaannya, lahan yang dibebaskan untuk Situs Kumitir pada Desember Tahun 2023 adalah seluas 26.873 m² dengan total nilai Rp10.099.400.000,00 dan pada Situs Klinterejo adalah seluas 17.341 m² dengan total nilai Rp7.616.384.514,00. Adapun pembebasan lahan tersebut tidak dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan yang direncanakan dikarenakan adanya kendala berupa tidak berhasilnya proses negosiasi harga per m² dengan seluruh pemilik lahan yang rencananya dibebaskan.

Realisasi pembebasan lahan pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI mengalami perubahan dari rencana awal, yang semula direncanakan seluruhnya untuk Situs Kumitir dan Situs Klinterejo, namun dengan pertimbangan tidak seluruh rencana pembebasan lahan dapat direalisasikan, dikarenakan harga lahan permeter persegi di bawah harga yang dialokasikan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI berinisiatif melakukan optimalisasi pembebasan lahan di kawasan lain dengan alokasi anggaran yang tersisa. Optimalisasi pembebasan lahan pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI pada tahun 2023 dilakukan melalui proses pembebasan lahan seluas 2.958 m² di Sentonorejo dengan nilai Rp2.958.000.000,00. Realisasi pembebasan lahan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 159. Rincian Rencana dan Realisasi Pengadaan Lahan BPK W XI Jatim

No	Lokasi	Rencana	Realisasi	
		Luasan (m²)	Luasan (m²)	Nilai (Rp)
1	Situs Kumitir	29.988	26.873	10.099.400.000
2	Situs Klinterejo	20.000	17.341	7.616.384.514

No	Lokasi	Rencana	Realisasi	
		Luasan (m^2)	Luasan (m^2)	Nilai (Rp)
3	Situs Sentenorejo	0	2.958	2.958.000.000
Jumlah		49.998	44.172	**20.673.784.514**

Keseluruhan pembebasan lahan pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Tahun 2023 menggunakan mekanisme pembelian langsung dikarenakan luas tanah yang rencananya dibebaskan tidak melampaui 5.000 m². Mekanisme pembebasan lahan dengan pembelian langsung tersebut dikategorikan sebagai Tanah Skala Kecil sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Bab VIII Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasal 126.

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI melakukan proses penunjukan langsung kantor jasa penilai publik (KJPP) sebanyak tiga KJPP sebagai *appraisal* yang menentukan harga tanah yang akan dilakukan pembebasan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan W XI. Proses pembebasan lahan melalui pembelian langsung dilakukan melalui proses sosialisasi, negosiasi awal, pengukuran lahan oleh BPN dan negosiasi harga, untuk selanjutnya difinalisasi dengan jual beli melalui notaris dan pembayaran ke rekening langsung pemilik lahan yang dibebaskan. Proses sosialisasi kepada masyarakat telah lebih dulu dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI sebelum terbitnya laporan resmi dari KJPP.

Selanjutnya proses pembebasan lahan diakhiri melalui proses Surat Pengalihan Hak dengan rincian berikut.

Tabel 160. Waktu Pengalihan Hak dan Tanggal Laporan KJPP

No	Lokasi	Waktu Pengalihan Hak dari Masyarakat	Tgl Laporan KJPP	Nama KJPP
1	Situs Kumitir	16-20 Desember 2023	27 Des 2023	Pung's Zulkarnain dan Rekan
2	Situs Klinterejo	20 Desember 2023	20 Des 2023	Andi Tiffani dan Rekan
3	Situs Sentonorejo	20 Desember 2023	20 Des 2023	Febriman Siregar dan Rekan

Tabel di atas menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan wilayah Situs Klinterjo, Situs Sentonorejo, dan Situs Klinterejo dilakukan sebelum adanya laporan resmi KJPP yang seharusnya mendasari harga acuan pelaksanaan. Hasil Klarifikasi tim pengadaan pembebasan lahan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI meminta risalah hasil penilaian yang terbit sebelum terbitnya laporan resmi dari KJPP, sebagai dasar pelaksanaan negosiasi dan sosialisasi. Namun demikian, risalah tersebut tidak diminta dan disampaikan secara legal formal oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI dan KJPP sehingga tidak dapat menjadi dasar pelaksanaan aktivitas oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor12 Tahun 2021

   1) Pasal 7 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa Ssemua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

2) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa PPK dalam PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: mengendalikan kontrak;

3) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

   a) pelaksanaan kontrak;

   b) kualitas barang/jasa;

   c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

   d) ketepatan waktu penyerahan; dan

   e) ketepatan tempat penyerahan.

4) Pasal 27 Ayat (6) yang menyatakan bahwa HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;

   b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;

   c) nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

5) Pasal 78:

   a) Ayat (3) huruf d,e dan f yang menyatakan bahwa Dalam hal penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit dan terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak maka penyedia dikenai sanksi administratif;

   b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa: sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian, dan/atau sanksi denda;

   c) Ayat (5) huruf f yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

6) Pasal 79 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak senilai 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

b. PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran

1) Pasal 7 yang menyatakan bahwa Pembayaran kepada penyedia atas penyelesaian pekerjaan hanya dilakukan setelah: a) Pekerjaan terselesaikan 100%, b) Masa Kontrak berakhir, c) Batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir;

2) Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya;

3) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal KPA memutuskan memberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, PPK dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak;

4) Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan; b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; c. tidak boleh mengubah volume dan nilai Kontrak; d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; dan e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan;

5) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir;

6) Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa Satker menyampaikan perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan BAPP per tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan ke KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir Kontrak.

c. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1) Pasal 118 ayat (14) yang menyatakan bahwa Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L melalui penerbitan SP SABA tidak diperkenankan untuk: a. dihitung dalam pemenuhan target kebijakan penghematan belanja Kementerian/Lembaga; dan b. dilakukan pergeseran anggaran antar RO.

2) Pasal 186

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa KPA bertanggung jawab secara format dan materiil kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang antara lain:

(1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

(2) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.

(3) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

d. Peraturan LKPP Nomor12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia pada Lampiran II Poin 4.2.7 huruf d Evaluasi Harga angka 3) Evaluasi Harga Timpang

   1) Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.

   2) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.

   3) Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.

e. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia pada Bagian VII poin 7.12.b yang menyatakan bahwa pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

f. SPK beserta Addendumnya masing-masing pekerjaan, yaitu pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menyatakan bahwa:

   1) Hak dan Kewajiban Penyedia antara lain: melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

   2) Hak dan Kewajiban PPK antara lain: mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

   3) Prestasi pekerjaan, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan antara lain: pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

   4) Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam kontrak dan belum diserahterimakan.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.902.966.846,71 dengan rincian:

   1) Ditjen Diktiristek senilai Rp548.992.333,82;

   2) Ditjen Diksi senilai Rp385.393.336,66;

3) Setjen senilai Rp35.690.564,42;

4) Ditjen GTK senilai Rp122.340.243,12;

5) Ditjen PDM senilai Rp59.347.386,63; dan

6) Ditjen Kebudayaan senilai Rp751.202.982,06.

b. Kekurangan penerimaan negara atau BLU dari denda keterlambatan yang tidak dipungut senilai Rp2.793.103.098,23 dengan rincian:

1) Ditjen Diktiristek senilai Rp2.728.076.258,39;

2) Ditjen Diksi senilai Rp20.675.675,68;

3) Setjen senilai Rp43.139.164,16;

4) Itjen senilai Rp1.212.000,00.

c. Potensi kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan senilai Rp1.441.675.391,35 pada Ditjen Diktiristek yang terdiri dari:

1) Direktorat Kelembagaan (Project ITB) senilai Rp1.309.468.812,14;

2) UNJ senilai Rp132.206.579,21.

d. Kekurangan perhitungan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp75.849.810,60.

e. Pelaksanaan pembangunan Gedung A Kantor BPK Wilayah XXII Papua terlambat penyelesaian dan kualitas atas pembangunan tidak dapat diketahui kesesuaiannya.

f. Pemborosan atas harga satuan timpang pada UMRAH senilai Rp581.125.805,25.

g. *Output* atas item pekerjaan secara parsial maupun secara keseluruhan konstruksi pada PNUP dan PNJ berpotensi tidak dapat memenuhi *output* yang sudah direncanakan atas hasil pekerjaan yang tidak dapat diukur telah memenuhi spesifikasi teknis.

h. Indikasi kerugian negara dari jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan senilai Rp1.214.359.677,00 yang terdiri dari

1) Badan Bahasa senilai Rp1.065.063.250,00;

2) Setjen senilai Rp149.296.427,00.

i. Pembebasan tanah melalui dana yang bersumber dari BA BUN pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI tidak mencerminkan proses pengadaan yang efisien dan ekonomis.

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA masing-masing satker belum optimal dalam memberikan monitoring, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. PPK masing masing satker tidak optimal dalam mengendalikan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya;

c. Kelompok Kerja Perencanaan kurang cermat dalam menyusun anggaran pelaksanaan tanah;

d. Penyedia/Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan dan melakukan perhitungan volume hasil pekerjaan sesuai dengan pekerjaan terpasang.

Atas permasalahan tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan kepatuhan sebagian telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara dengan uraian sebagai berikut.

Satker	Nilai Penyetoran (Rp)	Tanggal	No NTPN
Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.121.221.129,30 dengan rincian			
1)Ditjen Diktiristek	**77.749.812,02**		
a) Setditjen	31.818.020,00	25/04/2024	80B6D3CIFK4N50PN
b) Umrah	45.931.792,02		memotong tagihan pembayaran
2) Ditjen Diksi	**134.012.478,58**		
PNJ	6.076.590,13	03/05/2024	RPL 088 BLU PNJ
	32.077.566,61	03/05/2024	RPL 088 BLU PNJ
	1.776.533,84	30/04/2024	RPL 088 BLU PNJ
PNUP	94.081.788,00	30/04/2024	AF9EDONA04DN7VH9
3)Setjen	**23.120.509,42**		
a) Pusdiklat	8.697.909,42	04-Apr-24	0160861QV3R9JDC0
	2.687.520,00	04-Apr-24	16B626U8EUDM0F3N
	3.136.000,00	04-Apr-24	2AAA561QV3R9JFIG
b) LL Dikti IV Bandung	8.599.080,00		D04022G4VPKP8B9R
4)Ditjen GTK	**75.787.960,22**		
	8.661.924,17	26/04/2024	OFD246U8EUE8Q4C7
	67.126.036,05	26/04/2024	95D0B45KPV7OSFLS
5)Ditjen PDM	**59.347.387,00**	**26/04/2024**	**D24437QLUP0NA67N**
6)Ditjen Kebudayaan	**751.202.982,06**	**30/04/2024**	**CB61 10JUQKV3SF3G**
Kekurangan penerimaan negara atau BLU dari denda keterlambatan yang tidak dipungut senilai Rp2.731.374.329,58 dengan rincian			
1) Ditjen Diktiristek	**2.709.486.654,58**		
a) Direktorat Kelembagaan	54.165.000,00	27-Feb-24	A59E561QV3LVD65J dan E1D7A0NA047KV5RF
b) ITK	1.702.502.152,00	29-Apr-24	Memotong termin pembayaran
c) Umrah	641.218.048,58	3 April dan 20 Maret 2024	Memotong SP2D
d)UPN Jatim	27.972.973,00	13/05/2024	114103CIFK77SJP2
	35.632.432,00	13/05/2024	E645B7QLUP35TJF0
	6.660.842,00	16/05/2024	99EF82G4VPL1TC26
	79.297.297,00	13/05/2024	7E04F2G4VPKRFG25
	144.649.910,00	15/05/2024	CB8B37QLUP3CBBTC
e) Univ Timor	17.388.000,00	27/02/2024	264867NAP7M0E4G8
2) Ditjen Diksi	**20.675.675,68**	**30/04/2024**	**RPL 054 PNUP**
3) Itjen	**1.212.000,00**	**20-Feb-24**	**5BE4948VVEGSTB4K**

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sekjen, Dirjen GTK, Dirjen PDM, dan Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa.

b. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sekjen, dan Dirjen GTK memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetorkan kekurangan volume pekerjaan ke Kas Negara/Kas BLU senilai Rp781.745.717,78, dengan rincian:

   1) Ditjen Diktiristek senilai Rp471.242.521,80;

   2) Ditjen Diksi senilai Rp251.380.858,08;

   3) Setjen senilai Rp12.570.055,00;

   4) Ditjen GTK senilai Rp46.552.282,90.

c. Dirjen Diktiristek dan Sekjen memerintahkan PPK supaya menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara/Kas BLU minimal senilai Rp61.728.767,97;

   1) Ditjen Diktiristek senilai Rp18.589.603,81;

   2) Setjen senilai Rp43.139.164,16.

d. Dirjen Kebudayaan memerintahkan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII agar memerintahkan PPK supaya menarik dan menyetorkan kekurangan pungut denda keterlambatan ke Kas Negara minimal senilai Rp75.849.810,60.

e. Dirjen Diktiristek memerintahkan Rektor UMRAH supaya memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam memperhitungkan penyesuaian harga satuan pekerjaan yang mengalami perubahan volume (*addendum*).

f. Dirjen Diksi memerintahkan Rektor PNUP supaya memerintahkan PPK agar dalam pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga mencantumkan persyaratan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup pengukuran dan pembayaran atas hasil pekerjaan.

g. Sekjen dan Kepala BPP Bahasa memerintahkan PPK terkait supaya menyelesaikan dan dapat mencairkan jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh pihak ketiga.

h. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sekjen, Dirjen GTK, Dirjen PDM, BPP Bahasa, dan Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan Kelompok Kerja/Pokja Perencanaan lebih cermat dalam menyusun program kerja dan perencanaan anggaran yang akan dilakukan.

12. Penganggaran dan Penggunaan Mata Anggaran Penerimaan dan MAK Tidak Tepat dan Tidak Konsisten pada Kemendikbudristek

LRA Kemendikbudristek Tahun 2023 (*audited*) menyajikan PNBP, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut.

Tabel 161. LRA Kemendikbudristek Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023		
		Estimasi/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PNBP	9.397.245.197.000,00	11.868.375.576.289,00	126,29
2	Belanja Pegawai	24.437.508.594.000,00	23.956.235.896.196,00	98,03

No	Uraian	31 Desember 2023		
		Estimasi/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Belanja Barang	32.051.749.291.000,00	29.763.154.764.125,00	92,86
4	Belanja Modal	6.510.423.174.000,00	5.603.293.925.284,00	86,07
5	Belanja Bantuan Sosial	21.528.079.902.000,00	21.394.118.941.819,00	99,38

Hasil pemeriksaan menemukan adanya kesalahan penganggaran dan penggunaan Mata Anggaran Penerimaan (MAP), MAK dua digit akun dan empat/enam digit akun, penggunaan MAK Belanja tidak konsisten, dan penganggaran kegiatan yang menggunakan sumber dana RM kurang tepat dalam merealisasikan belanja dengan uraian sebagai berikut:

a. Penggunaan MAP yang tidak tepat pada BPMP Prov. Papua di Ditjen PDM

Pada BPMP Prov. Papua terdapat pembayaran angsuran atas Piutang Kerugian negara yang dibayarkan oleh Sdr. AH pada 7 Desember 2023 senilai Rp50.000.000,00. Pembayaran tersebut dicatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL). Seharusnya pembayaran ini masuk ke dalam akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian. BPMP Prov. Papua belum melakukan perbaikan transaksi PNBP terkait ke KPPN.

b. Kesalahan penganggaran dan penggunaan MAK pada level akun dua digit pada akun Belanja Barang (kode akun 52) digunakan untuk pembelian barang aset tetap (kode akun 53 Belanja Modal) atau sebaliknya

Tabel 162. Rincian Kesalahan Penganggaran dan Penggunaan MAK Belanja Barang Seharusnya Belanja Modal

Satker	Kode Akun Digunakan	Kode Akun Seharusnya	Nilai (Rp)	Jenis Transaksi yang Dilakukan
Setjen				
Biro Umum dan PBJ	52	53	391.735.206,00	Penataan sarana fasilitas lingkungan Wisma Argamulya dan Pembayaran
	52	53	1.738.277.470,00	Pembelian Iphone 15Pro 256GB
	52	53	98.151.750,00	Pengadaan Acer Travelmate P414 Core I7
BPTI	52	53	158.564.166,00	Pemeliharaan Gedung Kantor BPTI Tahap 2 yang dapat dikapitalisasi
Pusdiklat	52	53	168.831.000,00	Perbaikan Kanopi Mobil Lobi Bawah Gedung Pancasila dan Garuda
Ditjen PDM				
Direktorat SMA	52	53	1.326.214.458,00	Pengadaan Dekorasi dan Furnitur Loby Gedung A Direktorat SMA.
BBPMP Prov. Jawa Barat	52	53	256.965.245,00	Pengdaan Meja Kerja Lantai 2.
BPMP Prov. Kalimantan Timur	52	53	1.981.850.000,00	Paket Penyedia Pemeliharaan Lantai 2 Direktorat SMA yang dapat dikapitalisasi
Ditjen Kebudayaan				
Balai Media Kebudayaan	52	53	27.017.355.877,00	Produksi 265 konten siaran (**Lampiran B.12.1)**
Setditjen Kebudayaan	52	53	464.184.345,00	Pembangunan Gudang Lokasi Galeri Nasional.

Satker	Kode Akun Digunakan	Kode Akun Seharusnya	Nilai (Rp)	Jenis Transaksi yang Dilakukan
Setditjen Kebudayaan	52	53	119.800.000,00	Pembelian augmented reality yang merupakan aset tetap peralatan dan mesin.
BPK Wilayah XI	52	53	256.477.710,00	Belanja Jasa Konsultansi pembayaran jasa Kantor Jasa Penilai Publik untuk pembebasan tanah.
Ditjen GTK				
Setditjen GTK	52	53	196.581.000,00	Pembelian 2 Unit *Smartphone* dan 2 Unit Laptop.
Dit. PPG	52	53	127.000.000,00	Pembelian 1 Unit *Digital Flip* 75 Inci + OPS.
BGP Prov. Sulteng	52	53	11.291.351,00	Pembelian 4 Unit Printer.
BGP Prov. Maluku	52	53	1.299.000,00	Pembelian peralatan APP USB-C *Charge Cable* (2M) dan FTK 8 IN 1 USB-C *Portable Hub Gray*
Ditjen Diktiristek				
Unmul	52	53	82.860.800,00	Nilai di atas kapitalisasi, Belanja Meubelair dan Peralatan Kantor
Ditjen Diksi				
3 Politeknik Negeri	52	53	3.182.007.680,00	Belanja Barang Menghasikan Aset Tetap (**Lampiran B.12.2**
Jumlah			**37.579.447.058,00**	

Tabel 163. Rincian Kesalahan Penganggaran dan Penggunaan MAK Belanja Modal Seharusnya Belanja Barang

Satker	Kode Akun Digunakan	Kode Akun Seharusnya	Nilai (Rp)	Jenis Transaksi yang Dilakukan, antara lain
Ditjen Diktiristek				
Unmul	53	52	33.437.005,00	Nilai di bawah kapitalisasi Belanja Peralatan dan Mesin
	53	52	61.610.000,00	Nilai di bawah kapitalisasi Belanja Peralatan dan Mesin
	53	52	23.979.000,00	Nilai di bawah kapitalisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Ditjen Diksi				
19 Satker (3 Direktorat dan 16 Politeknik)	53	52	1.745.114.729,00	Belanja Modal Menghasilkan Barang Ekstrakomptabel sebanyak 86 barang (**Lampiran B.12.3)**
Jumlah			**1.864.140.734,00**	

c. Kesalahan penganggaran dan penggunaan MAK pada level akun empat/enam digit pada akun Belanja Barang dan Belanja Modal

Tabel 164. Rincian Kesalahan Penganggaran dan Penggunaan MAK pada Level Akun Empat Digit

Satker	Kode Akun Digunakan	Kode Akun Seharusnya	Nilai (Rp)	Jenis Transaksi yang Dilakukan, Antara Lain
BSKAP				
Pusat Asesmen Pendidikan	521219	521233	45.657.973.634,00	Belanja yang disalurkan kepada dinas pendidikan pada 34 pemerintah Prov.
Sekretariat BSKAP	521811	521111	25.381.991,00	Akun COVID-19 untuk pembelian hand sanitizer dan lisensi zoom
Pusat Asesmen Pendidikan	521811	521111	38.097.659,00	Akun COVID-19 - untuk pembayaran lisensi zoom serta langganan *Kahoot!. Atlasian* dan *google storage*
Ditjen Kebudayaan				
Direktorat PPK	522191	521233	1.150.000.000,00	Pendampingan pemanfaatan potensi budaya desa
	522191	521233	5.400.000.000,00	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa (DPKD)
	522191	521233	3.543.000.000,00	Pemberian dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di desa dalam rangka pemanfaatan potensi budaya desa
	522191	521211 dan 521219	361.555.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CB dan OPK
	522151	521233	7.558.200.000,00	Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah
Ditjen GTK				
BGP Prov. Gorontalo	521131	521111	8.438.550,00	Akun COVID-19 digunakan utk Paket online meeting dan lisensi aplikasi video conference
BGP Prov. Sulawesi Barat	521131	521111	14.727.255,00	Akun COVID-19 digunakan utk Lisensi online meeting (workspace) dan biaya komunikasi pegawai
BGP Prov. Sulawesi Tenggara	521131	521111	3.400.000,00	Kesalahan penggunaan akun COVID-19 - Masker dan sanitizer
BGP Prov. Sulawesi Utara	521131	521111	6.382.003,00	Akun COVID-19 - digunakan utk Lisensi aplikasi video conference, belanja masker, sanitizer, penyemprotan disinfektan, dan penambah daya tahan tubuh
Direktorat KSPSTK	521131	521111	220.000.000,00	Akun COVID-19 - digunakan utk Belanja Masker (APD) dan penambah daya tahan tubuh, penyemprotan disinfektan
Direktorat PPG	522192	521113	36.650.000,00	Akun COVID-19 - digunakan utk Penambah daya tahan tubuh, masker, penyemprotan disinfektan, paket data dan komunikasi Es. II dan Es. III (setara kebawah)
BGP Prov. Banten	531111	533111	3.005.513.921,00	Pekerjaan Jasa Konsultansi dan Konstruksi pemagaran menggunakan akun belanja modal tanah.
Ditjen Diktiristek				
UPN Veteran Jawa Timur	523111	523199	1.222.255.010,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tas aset yang bukan milik entitas
UPN Veteran Jawa Timur	521213	521115	1.397.183.600,00	Pembayaran gaji pegawai AMN yang dibayarkan setiap bulan.
Unmul	525162	525164	25.000.000,00	Belanja Buku

Satker	Kode Akun Digunakan	Kode Akun Seharusnya	Nilai (Rp)	Jenis Transaksi yang Dilakukan, Antara Lain
	532111	536111	230.076.540,00	Pengadaan Alat Pendukung Pendidikan
	536111	534131	49.700.000,00	Pengadaan Jaringan Internet di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Setditjen Diksi				
3 Satker Politeknik	521111	521811	117.683.390,00	Kesalahan MAK Belanja Barang Menghasilkan Persediaan sebanyak 258 barang (**Lampiran B.12.4)**
	521119	521832	22.767.210,00	
	521211	521821	651.786.743,00	
	521219	521811	118.714.500,00	
	525112	521821	21.090.000,00	
		525121	426.552.700,00	
		525126	732.883.558,00	
	532111	532211	1.535.320,00	
Politeknik Negeri Banjarmasin	521811	521111	2.314.000,00	Realisasi digunakan untuk pengadaaan alat-alat rumah tangga perkantoran.
Jumlah			**72.048.862.584,00**	

d. Penggunaan MAK Belanja kurang tepat dan tidak konsisten

Tabel 165. Rincian Penggunaan MAK Tidak Konsisten

Satker	Kode Akun Digunakan	Kode Akun Seharusnya	Nilai (Rp)	Jenis Transaksi yang Dilakukan, antara lain
Ditjen PDM				
Direktorat PAUD	526312	521233	4.000.000.000,00	BOP - PAUD ABK menggunakan akun **526312** sedangkan pada Dit. PMPK, Dit. SD, Dit.SMA, dan Dit. SMP menggunakan kode MAK **521233**
Direktorat PAUD	526312	521233	3.300.000.000,00	PSP PAUD menggunakan akun **526312** sedangkan pada Dit. PMPK, Dit. SD, Dit. SMA, dan Dit. SMP menggunakan kode MAK **521233**
Direktorat SMP	526311	576112	1.150.071.000,00	Belanja penanganan dampak terjadinya bencana menggunakan akun **526311** sedangkan Dit. PMPK menggunakan MAK **576112** –
BSKAP				
Sekretariat BSKAP	521111 521114 521115 521119 521131 521211 521219 521811 522141 522151 524111 524113 524114 524119	521233	25.687.675.705,00	Ketidakkonsistenan penggunaan akun pada BAN Pusat menggunakan akun **521111, 521114, 521115, 521119, 521131, 521211, 521219, 521811, 522141, 522151, 524111, 524113, 524114, 524119, 524219, 532111, 536111, dan 536112** senilai total Rp25.687.675.705,00 sedangkan BAN Prov. menggunakan akun **521233**.

Satker	Kode Akun Digunakan	Kode Akun Seharusnya	Nilai (Rp)	Jenis Transaksi yang Dilakukan, antara lain
	524219 532111 536111 536112			
BPPP	521219	525119	75.763.450.700,00	Pencairan kegiatan SNBT dari rupiah murni (RM) menggunakan akun **521219.** Pencairan menggunakan dana yang **PNBP BLU** akun **525119**
Jumlah			**109.901.197.405,00**	

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V tentang Klasifikasi Menurut Jenis Belanja yang antara lain menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Lampiran I pada PSAP nomor 02, Paragraf 22 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

c. PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar pada Lampiran Bab 2 Angka 3 Segmen Akun:

   1) Huruf b yang menyatakan bahwa Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserah atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan; dan

   2) Huruf c yang menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satker K/L.

d. PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 187/PMK.02/2019, Lampiran III Klasifikasi Jenis Belanja, Bagian B Kode Klasifikasi Jenis Belanja

   1) Kode akun 52: belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk:

      a) Belanja Barang diantaranya meliputi:

         (1) Belanja barang untuk kegiatan operasional, meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional satker, belanja keperluan atase pertahanan luar negeri, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya;

(2) Belanja barang untuk kegiatan non-operasional, meliputi belanja bahan, belanja barang transito, belanja honor keluaran *(output)* kegiatan, belanja rugi selisih kurs uang persediaan untuk satker perwakilan RI di luar negeri dan atase teknis, belanja biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja pencairan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri badan hukum, belanja denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, belanja dalam rangka *refund* dana pinjaman hibah luar negeri (PHLN), dan belanja barang non-operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan;

(3) Belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC);

(4) Belanja kontribusi pada organisasi internasional dan *trust fund*, serta belanja kontribusi dukungan pemerintah berupa dana dukungan kelayakan, fasilitas penyiapan proyek, dan ketersediaan layanan; dan

(5) Belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional.

b) Belanja jasa seperti belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada BLU, dan belanja jasa lainnya; dan

c) Belanja Pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapitalisasi kinerja aset tetap atau aset lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

2) Kode akun 53: Belanja Modal dipergunakan antara lain:

a) Angka 1. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan /dipakai.

b) Angka 2, Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memeroleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

c) Angka 3, Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memeroleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran

setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

d) Angka 4, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memeroleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan *(subsequent expenditure)* jalan, irigasi, dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

e) Angka 5, Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

e. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU pasal Pasal 132 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain pada poin b yang menyatakan biaya berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama tidak boleh dibebankan pada APBN (rupiah murni).

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Salah saji atas LRA TA 2022 senilai Rp39.443.587.792,00 terdiri dari:

Kurang saji atas:

1) Belanja Modal senilai Rp37.579.447.058,00;
2) Belanja Barang senilai Rp1.864.140.734,00;

Lebih saji atas:

1) Belanja Barang senilai Rp37.579.447.058,00; dan
2) Belanja Modal senilai Rp1.864.140.734,00.

b. LRA tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, terdiri dari:

1) Pendapatan senilai Rp50.000.000,00; dan
2) Belanja senilai Rp181.950.059.989,00 (Rp72.048.862.584,00 + Rp109.901.197.405,00).

c. Hilangnya kesempatan penggunaan alokasi dana senilai Rp75.763.450.700,00 untuk membiayai kegiatan lain yang seharusnya menggunakan rupiah murni.

Hal tersebut disebabkan:

a. KPA terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses penyusunan anggaran;

b. PPK terkait kurang cermat dalam pengeluaran belanja dengan kesesuaian MAK dan perencanaan program; dan

c. Bagian perencanaan pada masing-masing satker terkait kurang cermat dalam menganalisa dan mereviu atas penyusunan dan revisi anggaran pada RKA-K/L satker.

Atas permasalahan tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kemendikbudristek akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan anggaran termasuk peningkatan pemahaman terkait dengan penggunaan Bagan Akun Standar.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Sekjen, Dirjen PDM, Kepala BSKAP, Dirjen Kebudayaan, Dirjen GTK, Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan:

a. KPA terkait lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses penyusunan anggaran serta melakukan perencanaan dalam memanfaatkan efisiensi anggaran sesuai ketentuan supaya penentuan akun belanja menjadi tepat;

b. PPK terkait lebih cermat dalam pengeluaran belanja dengan kesesuaian MAK dan perencanaan program; dan

c. Bagian perencanaan pada setiap satker terkait lebih cermat dalam menganalisis dan mereviu atas penyusunan anggaran ke dalam RKAKL satker.

C. Aset

1. Pengelolaan Kas pada Setjen dan Ditjen Diktiristek Tidak Sesuai Ketentuan Penatausahaan Kas

Neraca Kemendikbudristek menyajikan nilai Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp246.794.664.148,00 dan Rp387.807.761.075,00 dibandingkan 31 Desember 2022 terjadi penurunan senilai (Rp141.013.096.927,00) atau turun 36,36% Rincian Kas pada Kemendikbudristek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 166. Rincian Kas pada Kemendikbudristek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Kas	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenakan/Penurunan (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.872.433.714,00	26.814.183.293,00	(20.941.749.579,00)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	6.197.006.468,00	7.208.516.192,00	(1.011.509.724,00)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	234.725.223.966,00	353.785.061.590,00	(119.059.837.624,00)
Jumlah		**246.794.664.148,00**	**387.807.761.075,00**	**(141.013.096.927,00)**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas pada Kemendikbudristek menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) pada BKHM tidak sesuai ketentuan

1) Selisih saldo kas dengan saldo pembukuan senilai Rp1.187.391.470,00

Pada bulan September 2023, terjadi pergantian Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat Atdikbud yaitu dari Sdr. DA yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran lama periode Tahun 2021 s.d 31 Agustus 2023 yang diangkat berdasarkan SK Nomor 88933/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 digantikan oleh Sdr. RH berdasarkan SK Nomor 29725/MPK.A/KU.00.00/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kantor Pusat Atdikbud.

Bendahara Pengeluaran Sdr. RH menjelaskan bahwa selama dirinya menjadi Bendahara Pengeluaran periode 1 September s.d. 31 Desember 2023 tidak ada transaksi yang dibukukan sehubungan tidak ada kegiatan yang dilakukan mengingat saldo kas bendahara pengeluaran baik *cash on hand* maupun rekening bank sudah nihil. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas dan Serah Terima antar Bendahara Pengeluaran tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani kedua bendahara dan diketahui oleh PPK atas nama KPA, dinyatakan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut pembukuan adalah senilai Rp1.189.898.000,00 sesuai dengan posisi saldo BKU per 31 Agustus 2023 dengan Nomor bukti terakhir 135/GUP/723005/SPTB/2023. Sementara itu, saldo kas tunai di brankas adalah nihil dan saldo di rekening BNI nomor 9892067230051000 a.n. BPG 088 Kanpus Atdikbud senilai Rp2.506.530,00, sehingga terdapat selisih kas senilai Rp1.187.391.470,00 (Rp1.189.898.000,00 – Rp2.506.530,00).

Berdasarkan klarifikasi Sdr. DA yang dituangkan dalam BAP yang ditandatangani Kepala Subbag Tata Usaha BKHM, Plt Kepala BKHM dan PPK Kantor Pusat Atdikbud dinyatakan bahwa selisih tersebut merupakan uang TUP terakhir Rp989.898.000,00 dan GUP terakhir Rp169.835.000,00. Sdr. DA menyatakan bahwa belum dipertanggungjawabkannya TUP/GUP karena ada uang GUP/TUP yang digunakan untuk membayar tunggakan pribadi kepada rekanan sehubungan pinjaman yang dilakukannya termasuk pemberian *fee* senilai 5-10% dari nilai pinjaman tersebut kepada rekanan. Rincian penggunaan TUP dan GUP terakhir menurut penjelasan Sdr. DA adalah sebagai berikut.

Tabel 167. Rincian Penggunaan TUP dan GUP

Pembayaran Kegiatan	Rp404.565.000,00
Pembayaran Pinjaman ke rekanan	Rp785.000.000,00
Jumlah	**Rp1.189.565.000,00**
Selisih Kas	Rp1.187.391.470,00
Selisih	**(Rp2.173.530,00)**

Sdr. DA belum dapat menjelaskan selisih penggunaan TUP dan GUP dengan nilai selisih kas.

Pengujian lebih lanjut atas pernyataan Sdr. DA terhadap pembayaran senilai Rp404.565.000,00 telah dibukukan sebelumnya senilai Rp401.865.000,00 dan terdapat

penggunaan yang telah dibayarkan oleh BKHM senilai Rp2.700.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 168. Nilai Penggunaan TUP dan GUP Menurut Sdr. DA

No	Uraian	Nilai yang Dibayarkan BKHM (Rp)
1	Pembayaran Hotel Grand Zuri untuk kegiatan tanggal 22-27 Mei 2023	200.000.000,00
2	Pembayaran Hotel Grand Zuri untuk kegiatan tanggal 15-17 Mei 2023	40.000.000,00
3	Pembayaran Hotel Santika untuk kegiatan tanggal 15-17 Juni 2023	39.200.000,00
4	Perjadin tanggal 24-26 Maret 2023	39.390.000,00
5	Perjadin tanggal 11-13 Juli 2023	24.240.000,00
6	Pembelian ATK Rakor Atdikbud di Bali	22.755.000,00
7	Biaya Tranport dan UH kegiatan di Hotel Century Park tgl 24 Juli 2023	5.600.000,00
8	Biaya Tranport dan UH kegiatan di Hotel Century Park tgl 25 Juli 2023	5.600.000,00
9	Biaya Tranport dan UH kegiatan di Hotel Le Meridien tgl 27 Juli 2023	5.600.000,00
10	Biaya Tranport dan UH kegiatan di Hotel Le Meridien tgl 28 Juli 2023	5.600.000,00
11	Penggantian tiket Perjadin	13.880.000,00
	Jumlah	**401.865.000,00**
12	Honor Narsum kegiatan tgl 24-28 Juli 2023 (dibayarkan menggunakan DIPA BKHM)	2.700.000,00
	Total	**404.565.000,00**

Lebih lanjut, pembayaran tersebut telah dicatat dalam BKU sebelumnya senilai Rp427.550.000,00 yaitu pengeluaran atas lima SP2D (GTUP 3, GUP5, GTUP2, GUP6, dan GTUP 3 Penihilan ke 2) dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 169. Pencatatan BKU Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Atdikbud

No.	No SP2D	Akun	Uraian	Nilai (Rp)
1	GTUP 3 No SP2D 230881701007536	524119 – Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	Transpor Jakarta-Tangerang tanggal 22-27 Mei 2023, untuk kegiatan pembekalan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Indonesia di luar negeri	200.000.000,00
		524119 – Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	Perjalanan Dinas Jakarta-Tangerang Selatan, tanggal 15-17 Mei 2023, Bimtek PSP BMN pada Satker Atdikbud	40.000.000,00
		524219 - Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	Penggantian tiket ke Den Haag, Belanda dalam rangka ikut orang tua penugasan sebagai Atdikbud pada Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda	18.530.000,00
2	GUP 5 No SP2D 230881303008674	524119 – Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	Paket Meeting Luar Kota dalam rangka diskusi Kelompok terpumpum Mengukur Capaian Kinerja Atase Teknis pada Perwakilan RI di Luar Negeri	39.200.000,00
3	GTUP 2 No SP2D 230881701004065	524111 – Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Menyusun RAB dan KAK serta Penginputan pada Aplikasi SAKTI untuk Pagu Indikatif TA 2024 untuk 21 Satker Atdikbud dan Kantor Wakil Tetap RI untuk UNESCO serta Satker Kantor Pusat Atdikbud	39.390.000,00
4	GUP 6 No SP2D 230881303010548	524111 – Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan dinas ke Bogor penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian BMN untuk 21 Satker Atdikbud serta KWRI UNESCO	18.530.000,00

No.	No SP2D	Akun	Uraian	Nilai (Rp)
		524114 – Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	Kegiatan rekonsiliasi sisa UP dan Kas BP s.d Juni 2023 untuk Satker Atdikbud dan KWRI UNESCO di Hotel Century Park, Jakarta	5.600.000,00
		524114 – Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	Kegiatan revaluasi Kas BP SM I T.A 2023 untuk Satker Atdikbud dan KWRI UNESCO di Jakarta	5.600.000,00
		524114 – Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	Kegiatan revaluasi Kas BP Semester I T.A 2023 untuk Satker Atdikbud dan KWRI UNESCO di Jakarta	5.600.000,00
		524114 – Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	Kegiatan rekonsiliasi sisa UP dan Kas BP s.d Juni 2023 Satker Atdikbud dan KWRI UNESCO di Hotel Century Park, Jakarta	5.600.000,00
5	GTUP 3 (penihilan kedua) No SP2D 230881701009007	521211 – Belanja Bahan	Seminar kit tanggal 23 Juni 2023 Pelaksanaan rapat kerja Atdikbud yang dilaksanakan di Bali	49.500.000,00
Jumlah				**427.550.000,00**

Sdr. DA juga menyatakan bahwa pembayaran kegiatan/belanja tidak selalu dibayarkan sesuai tanggal yang tercatat pada pembukuan GUP dan TUP pada BKU. Oleh karen itu, pernyataan Sdr. DA terkait penggunaan TUP dan GUP terakhir dan pembukuan BKU oleh Sdr. DA tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

2) Bendahara Pengeluaran melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga

Sdr. DA pertama kali menjadi Bendahara pada tahun 2009 di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN). Pada tahun 2011 s.d. 2012 Sdr. DA digantikan oleh orang lain, namun kemudian pada tahun 2013 s.d. 2019 ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran Biro PKLN. Sdr. DA menyatakan bahwa mulai melakukan pinjaman kepada rekanan pada tahun 2013 untuk membiayai kegiatan operasional kantor yang dananya belum cair. Sdr. DA menjanjikan kepada rekanan akan memberikan *fee* senilai 5-10% dari nilai pinjaman.

Pada tahun 2019, terjadi restrukturisasi organisasi dimana Biro PKLN dibagi menjadi Biro Perencanaan dan BKHM dan pada tahun 2019 s.d. 2020, Sdr. DA tidak lagi menjabat. Namun pada tahun 2019 tersebut, berdasarkan pengakuan Sdr. DA masih memiliki hutang kepada rekanan dan bank yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor dan menjadi tanggungan pribadi yang bersangkutan. Menurut pengakuan Sdr. DA atas seluruh hutang kepada rekanan selain hutang bank telah selesai dibayarkan. Namun, pencatatan dan dokumen pendukung yang menunjukkan jumlah hutang yang dipinjam dan yang telah dibayarkan kepada rekanan tidak dapat ditunjukkan kepada BPK.

Pada tahun 2021, Sdr. DA ditugaskan kembali menjadi Bendahara Pengeluaran di Kantor Pusat Atdikbud, yang bersangkutan kembali melakukan pinjaman kepada rekanan dengan menjanjikan *fee* senilai 5-10%. Sdr. DA menyatakan pemberian *fee* dilakukan berdasarkan inisiatif pribadi dan tidak ada pegawai kantor ataupun pimpinan yang mengetahui. Pinjaman diterima Sdr. DA secara tunai dan ditransfer ke beberapa rekening pribadi. BPK telah meminta rekening koran pribadi, namun sampai dengan 28 April 2024 Sdr. DA belum menyampaikan rekening koran dimaksud.

Sdr. DA menyatakan bahwa pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan dan digunakan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari karena gaji yang tidak mencukupi dan telah habis dipotong untuk cicilan bank. Selanjutnya, pemberian *fee* kepada rekanan diambilkan dari pertanggungjawaban realisasi belanja tahun berjalan. Saat ini, Sdr. DA menyatakan masih memiliki sejumlah hutang kepada pihak rekanan. Hasil wawancara dengan salah satu rekanan yang memberikan pinjaman diketahui bahwa masih ada hutang pokok yang belum dilunasi Sdr DA senilai Rp550.000.000,00 dan hutang *fee* senilai Rp110.000.000,00, sehingga total hutang Bendahara Pengeluaran Sdr. DA kepada salah satu rekanan senilai Rp660.000.000,00. Alasan rekanan bersedia memberikan pinjaman karena yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan menjanjikan *fee* senilai 10% dari nilai pokok pinjaman dan selama ini pinjaman lancar dibayarkan.

Pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa Sdr. DA juga melakukan peminjaman kepada rekanan lainnya. Berdasarkan surat yang diterima BKHM dari rekanan tersebut, Bendahara Pengeluaran Sdr. DA masih memiliki pokok hutang senilai Rp900.000.000,00 dan *fee* pinjaman.

3) Pengendalian atas pengelolaan keuangan belum memadai

Dalam pengelolaan keuangan, Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab langsung kepada PPK dan KPA. Selama tahun 2023, terdapat enam kali GUP dan empat kali TUP. Uang kas untuk operasional satker yang diterima dari Kas Negara selalu ditarik secara tunai hampir seluruhnya dari rekening oleh Bendahara Pengeluaran dengan sepengetahuan KPA. Penarikan tunai tersebut dilakukan dengan Surat Pendebetan Rekening (SPR) yang ditandatangani KPA dan Bendahara Pengeluaran. Rincian penarikan uang tunai selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 170. Daftar Penarikan Uang Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	No SPR	Nilai SP2D (Rp)	Nilai Penarikan (Rp)	Tgl Penarikan R/K
1	UP	2079/A6/KU.01.02/203	200.000.000	200.000.000	20 Januari 2023
2	GUP 1	5454/A6/KU.01.00/2023	189.112.000	189.000.000	17 Februari 2023
3	GUP 2	9580/A6/KU.01.00/2023	153.490.500	153.000.000	21 Maret 2023
4	GUP 3	-/A6/KU.01.00/2023	192.831.000	192.000.000	5 April 2023
5	GUP 4	15339/A6/KU.01.02/2023	198.646.130	198.000.000	15 Mei 2023
6	GUP 5	- /A6/KU.01.00/2023	114.429.200	114.000.000	27 Juni 2023
7	GUP 6	-/A6/KU.01.00/2023	102.600.200	102.000.000	28 Juli 2023
8	TUP 1	4039/A6/KU.01.00/2023	814.285.000	814.285.000	7 Februari 2023
9	TUP 2	8755/A6/KU.01.00/2023	953.161.000	953.161.000	15 Maret 2023
10	TUP 3	13945/A6/KU.01.00/2023	1.204.943.500	1.204.943.500	5 Mei 2023
11	TUP 4	22481/A6/KU.01.00/2023	989.898.000	989.898.000	14 Juli 2023

Hasil wawancara dengan Sdr. DA dan PPK mengungkapkan bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan kas oleh KPA. Selain itu, transaksi pembayaran dilakukan secara tunai kepada pihak penerima. Sdr. DA tidak pernah melakukan transfer melalui aplikasi *Cash Management System* (CMS), termasuk pembayaran kepada penyedia hotel untuk keperluan pembayaran paket meeting *fullday*/*fullboard*. Dalam melakukan pembayaran, Sdr. DA meminta bantuan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pegawai *Cleaning Service* (CS) untuk setor tunai ke rekening tujuan.

Berdasarkan wawancara, pegawai PPNPN dan CS mengungkapkan terdapat beberapa kali uang tunai untuk pembayaran ke hotel dimasukkan terlebih dahulu ke rekening pribadi untuk kemudian ditransfer ke rekening hotel jika bank sudah tutup.

Selain itu, selama tahun 2023 seluruh nilai TUP selalu dinihilkan seluruhnya dan tidak ada sisa dana. Atas kondisi tersebut, PPK menyatakan tidak melakukan validasi atas kebenaran dan kesesuaian penggunaan TUP dengan rencana penggunaan. PPK melakukan kontrol pengelolaan keuangan dengan menanyakan ketersediaan dana secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran saat akan melaksanakan kegiatan dan rutin mengecek ketersediaan anggarana melalui SAKTI.

4) Realisasi belanja tidak dapat diyakini kebenarannya

LRA Kantor Pusat Atdikbud Tahun 2023 merealisasikan Belanja senilai Rp5.082.692.030,00 yang seluruhnya merupakan Realiasi Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 171. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kantor Pusat Atdikbud

Akun	Nama Akun	Nilai(Rp)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	96.000.000
521211	Belanja Bahan	125.465.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	282.700.000
522141	Belanja Sewa	6.450.000
522151	Belanja Jasa Profesi	25.882.500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.125.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	777.842.615
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56.920.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.277.608.400
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.430.635.515
Jumlah		**5.082.629.030**

Dari realisasi belanja senilai Rp5.082.629.030,00 pada tanggal 24 April 2023, Sdr. DA telah menyampaikan sebagian dokumen pertanggungjawaban belanja senilai Rp2.164.800.358,00, sedangkan sisanya senilai Rp2.917.828.672,00 (Rp5.082.629.030,00 - Rp2.164.800.358,00) belum ada bukti pertanggungjawaban. Rincian nilai pertanggungjawaban dapat dilihat pada **Lampiran C.1.1**. Ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban menyebabkan 57% nilai realisasi belanja Kantor Pusat Atdikbud tahun 2023 tidak dapat dilakukan pengujian.

Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang disampaikan, diketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan tidak dilengkapi dokumen administrasi seperti SPBy, SPP, SPM, dan daftar nominatif. Selain itu, beberapa dokumen perjadin tidak disertai tiket pesawat dan surat tugas. Kelengkapan administrasi baru disampaikan oleh PPK ke BPK pada 21 Maret 2024. Verifikasi kelengkapan bukti yang pertanggungjawaban pelaksanan kegiatan tidak dilakukan oleh PPK secara memadai.

a) Duplikasi pencatatan realisasi belanja pada DIPA Atdikbud Pusat dan DIPA BKHM

Pada saat pemberhentian Bendahara Pengeluaran Sdr. DA tanggal 31 Agustus 2023, satker Atdikbud Pusat masih mempunyai tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dan pegawai. PPK menjelaskan bahwa atas tunggakan tersebut berdasarkan arahan pimpinan satker, pembayarannya dialihkan ke DIPA satker BKHM.

Atas pengalihan pembayaran dengan menggunakan anggaran pada DIPA BKHM tersebut, diketahui bahwa pencatatan realisasi belanja pada BKHM berdasarkan bukti tagih dari Pihak Ketiga sedangkan pada Kantor Pusat Atdikbud tidak selalu disertai dengan bukti pembayaran riil dengan uraian berikut.

(1) Bendahara Pengeluaran BKHM menyatakan bahwa pembayaran dengan menggunakan anggaran DIPA BKHM dilakukan berdasarkan bukti tagihan yang diberikan oleh pihak ketiga. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran BKHM pada 2 April 2024, nilai tunggakan yang dialihkan pembayarannya ke DIPA BKHM adalah senilai Rp837.053.707,00.

(2) Pada rincian pembukuan BKU yang dibuat oleh Sdr. DA, diketahui bahwa atas tunggakan tersebut telah dibukukan sebagai realisasi belanja senilai Rp704.593.780,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 172. Pembayaran Belanja Kantor Pusat yang Dialihkan ke DIPA BKHM

No	Uraian Tunggakan	Nilai yang Dialihkan ke BKHM (Rp)	Tgl Pembayaran BKHM	Pembukuan Realisasi dan No SP2D	Nilai Pembukuan Realisasi (Rp)
1	Honor Narasumber tanggal 10-12 April 2023	1.800.000,00	22-08- 2023	GTUP 3 No SP2D 230881701007536	3.150.000,00
2	Honor Narasumber tanggal 22-27 Mei 2023	1.350.000,00	22-08- 2023		
3	Honor Narasumber tanggal 22-27 Mei 2023	1.500.000,00	22-08- 2023	Belum dibukukan sebagai realisasi belanja	-
4	Honor Narasumber kegiatan *Fullday* tanggal 24&25 dan 27&28 Juli 2023	2.700.000,00	22-08- 2023	Belum dibukukan sebagai realisasi belanja	-
5	*Fullboard* Hotel Bintang Bali Resort kegiatan Rakor tanggal 2-8 Juli 2023	324.276.000,00	21-11- 2023	GTUP 3 (penihilan kedua) No SP2D 230881701009007	313.665.400,00
6	Tiket Luar Negeri dan Domestik pegawai serta guru SILN	227.869.020,00	12-12- 2023	GTUP 2 No SP2D: 230881701004065	84.769.800,00
				GUP 2 No SP2D: 230881303002838	44.049.600,00
				GTUP 3 No SP2D 230881701007536	53.938.600,00
				GTUP 3 No SP2D 230881701007536	8.671.400,00
				GTUP 3 (penihilan kedua) No SP2D 230881701009007	8.510.220,00
				GUP 4 No SP2D 230881303005896	22.597.400,00
				GUP 4 No SP2D 230881303005896	5.332.000,00
7	Tiket Perjadin Rakor di Bali	50.639.360,00	23-08-2023	GTUP 3 (penihilan kedua) No SP2D 230881701009007	50.639.360,00
8	Akomodasi *Fullday* Hotel Century 24 s.d. 25 Juli 2023	17.200.000,00	23-11- 2023	GUP 6 No SP2D 230881303010548	17.200.000,00

No	Uraian Tunggakan	Nilai yang Dialihkan ke BKHM (Rp)	Tgl Pembayaran BKHM	Pembukuan Realisasi dan No SP2D	Nilai Pembukuan Realisasi (Rp)
9	Akomodasi *Fullday* Hotel Le Meridien 27 s.d. 28 Juli 2023	17.320.000,00	23-11- 2023	GUP 6 No SP2D 230881303010548	17.320.000,00
10	Tiket dan Penginapan Keberangkatan Guru CLC dan SILN 15 Orang	110.089.327,00	3-10- 2023	Belum dibukukan sebagai realisasi belanja	-
12	Perjadin tanggal 24-26 Maret 2023	46.030.000,00	28-12- 2023	GTUP 3 No SP2D 230881701004065	42.250.000,00
13	Perjadin tanggal 30 Mei-1 Juni 2023	36.280.000,00	28-12- 2023	GTUP 3 No SP2D 230881701007536	32.500.000,00
Jumlah		**837.053.707,00**			**704.593.780,00**

(3) Proses pertanggungjawabanp Penihilan SP2D GUP dan TUP tidak disertai bukti transaksi belanja yang senyatanya

Berdasarkan daftar SP2D Kantor Pusat Atdikbud Tahun 2023, terdapat penihilan untuk nilai selisih kas TUP senilai Rp989.898.000,00 dengan SP2D Nomor 230881701019996 dan GUP senilai Rp169.835.000,00 dengan SP2D Nomor 230881701028693 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 173. Penihilan Selisih Kas Kantor Pusat Atdikbud Tahun 2023

Uraian		Nilai TUP/ GUP (Rp)	Nilai Nihil (Rp)	Selisih (Rp)
Akun	Keterangan			
TUP		**989.898.000**	**989.898.000**	-
521219 – Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Biaya barang pindahan		32.962.000	
524111 – Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Penyusunan, verifikasi dan Evaluasi laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran pada Satker Kantor Pusat Atdikbud dan Atdikbud		260.960.000	
524219 – Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	Fasilitasi Pembekalan/Orientasi, Penarikan/Penempatan, dan Layanan Kedatangan/Keberangkatan Atdikbud (Malaysia)		53.382.000	
	Fasilitasi Pembekalan/Orientasi, Penarikan/Penempatan, dan Layanan Kedatangan/Keberangkatan Atdikbud (Riyadh)		122.040.000	
	Fasilitasi Pembekalan/Orientasi, Penarikan/Penempatan, dan Layanan Kedatangan/Keberangkatan Guru/Tenaga Kependidikan dan Kepala SILN (Malaysia)		206.274.000	
	Fasilitasi Pembekalan/Orientasi, Penarikan/Penempatan, dan Layanan Kedatangan/Keberangkatan Guru/ Tenaga Kependidikan dan Kepala SILN (Riyadh)		314.280.000	
Jumlah GUP		**200.000.000**	**169.835.000**	**30.165.000**
GUP		**200.000.000**	**169.835.000**	**30.165.000**

Uraian		Nilai TUP/ GUP (Rp)	Nilai Nihil (Rp)	Selisih (Rp)
Akun	Keterangan			
521115 – Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		49.440.000	
524111 – Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		58.170.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			62.225.000	

Selisih Rp30.165.000,00 telah dikembalikan ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2024 dengan rincian penyetoran sisa UP yang masih ada di rekening senilai Rp2.506.530,00 dan senilai Rp27.658.470,00 dilakukan secara pribadi oleh PPK bersama KPA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPK, penihilan TUP dilakukan oleh PPK berdasarkan arahan lisan dari KPA karena ada teguran dari KPPN melalui surat Nomor S-2527/KPN.1203/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Teguran TUP yang Belum Dipertanggungjawabkan pada Satker Kantor Pusat Atdikbud 2023 dan berdasarkan hasil koordinasi KPA dengan Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek. Kedua SP2D tersebut di-Nihil-kan tanpa ada dokumen pertanggungjawaban. Hasil klarifikasi dengan inputer SAKTI Kantor Pusat Atdikbud, menyatakan bahwa nilai penihilan disesuaikan dengan sisa pagu anggaran yang ada. Dokumen penihilan TUP berupa SPTB yang ditandatangani oleh PPK, dengan rincian sebagai berikut.

(a) SPTB Nomor 115/GTUP/723005/SPTB/2023 senilai Rp32.962.000,00.

(b) SPTB Nomor 116/GTUP/723005/SPTB/2023 senilai Rp53.382.000,00.

(c) SPTB Nomor 117/GTUP/723005/SPTB/2023 senilai Rp122.040.000,00.

(d) SPTB Nomor 118/GTUP/723005/SPTB/2023 senilai Rp206.274.000,00.

(e) SPTB Nomor 119/GTUP/723005/SPTB/2023 senilai Rp314.280.000,00.

(f) SPTB Nomor 120/GTUP/723005/SPTB/2023 senilai Rp260.960.000,00.

Sedangkan untuk penihilan GUP senilai Rp169.835.000,00, menurut keterangan PPK, merupakan belanja yang tidak dibayarkan oleh Sdr. DA, yaitu honorarium Pengelola Keuangan Tahun 2023 senilai Rp49.440.000,00 dan belanja perjadin senilai Rp120.395.000,00. Sebagaimana pada uraian permasalahan sebelumnya, bahwa dokumen pertanggungjawaban untuk GUP Nihil berupa dua kegiatan perjadin tersebut yang telah dibukukan sebelumnya pada GUP 4 dan 6 senilai Rp60.780.000,00.

Hasil wawancara dengan KPA, Kasubag TU BKHM, dan PPK menyatakan bahwa sampai dengan bulan Juli 2023, kegiatan pada Kantor Pusat Atdikbud berjalan lancar dan seluruhnya terbayar. Namun, KPA dan PPK tidak mengetahui bahwa jalannya kegiatan tersebut dibiayai dari pinjaman dari rekanan. KPA, Kasubbag TU dan PPK mengetahui adanya pinjaman Sdr. DA pada bulan Agustus 2023 setelah ada tagihan dari pihak hotel dan travel atas *invoice* akomodasi dan tiket yang belum dibayar oleh Sdr. DA. Atas

permasalahan tersebut, KPA selaku Plt. Kepala BKHM bersama Kasubbag TU BKHM, dan PPK Kantor Pusat Atdikbud melakukan BAP kepada Sdr. DA dan yang bersangkutan mengakui bahwa melakukan pinjaman kepada rekanan serta memberikan *fee* senilai 5-10%. Sdr. DA mengakui pinjaman digunakan untuk kepentingannya dan bersedia mengembalikan kekurangan uang serta memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Menurut keterangan KPA, sampai saat ini Sdr. DA belum menyampaikan sertifikat tanah dimaksud.

(4) Kegiatan belanja perjalanan dinas tidak dilaksanakan

Hasil pemeriksaan atas bukti dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang telah disampaikan oleh Sdr. DA menunjukkan terdapat tiga kegiatan yang dilaksanakan di hotel namun bukan kegiatan *fullday*/*fullboard*. Bukti pertanggungjawaban yang disampaikan berupa lembar kunjungan berstempel hotel namun bukan stempel basah, tidak ada nama dan jabatan penandatangan dari pihak hotel, seluruh biaya transportasi dibayarkan dengan DPR, serta tidak ada bukti pembayaran akomodasi hotel, hanya terdapat *invoice*. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada hotel penyelenggara, diketahui bahwa pihak hotel menyatakan terdapat sewa kamar atas kegiatan tersebut. Namun, saat dimintakan bukti penerimaan pembayaran, sampai dengan tanggal 24 April 2024 pihak hotel belum dapat menyampaikan bukti tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, PPK menyatakan perjalanan dinas menerima pembayaran uang harian, transportasi, dan akomodasi atas ketiga kegiatan tersebut. Selanjutnya, BPK melakukan klarifikasi kepada PPK untuk meminta bukti pendukung dokumentasi serta bukti pembayaran hotel, namun sampai pemeriksaan berakhir PPK tidak dapat menyampaikan dokumen dimaksud. Hasil klarifikasi lebih lanjut, Sdr. DA juga tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran akomodasi hotel, kemudian Sdr. DA mengakui bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Rincian kegiatan perjadin tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 174. Belanja Perjadin yang Tidak Dilaksanakan

No	No dan Tanggal ST	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Jumlah Pejalan Dinas	Jumlah Belanja (Rp)
1	8078/A6/KU.01.02/2023 Tgl 7 Maret 2023	Inventarisasi dan Input Data BMN yang akan dilakukan PSP pada Aplikasi SAKTI serta Melakukan Penyelesaian Tindak Lanjut Penghapusan BMN Berupa Kendaraan Dinas Tahun 2022 pada Satker Kanpus Atdikbud	6 s.d. 8 Maret 2023	11 orang	35.882.000
2	6264/A6/KU.01.01/2023 Tgl 24 Februari 2023	Penyusunan Laporan BMN dan CaLBMN untuk 21 Satker Atdikbud dan KWRI UNESCO Tahun 2022	24 s.d. 26 Februari 2023	11 orang	35.750.000
3	1848/A6/KU.10.00/2023 Tgl 17 Januari 2023	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2022 untuk 19 Satker Atdikbud, 1 Satker KWRI UNESCO, dan 1 Satker Kanpus Atdikbud	19 s.d. 21 Januari 2023	10 orang	32.500.000
Jumlah					**104.132.000**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran C.1.2**.

Selain tiga belanja perjalanan dinas di atas, menurut keterangan PPK terdapat lima belanja perjalanan dinas lainnya yang tidak dibayar oleh Sdr. DA senilai Rp133.765.000,00 telah dibukukan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 175. Perjalanan Dinas yang Tidak Dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran

No	No dan Tanggal ST	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Jumlah Belanja (Rp)	Pembukuan BKU
1	13847/A6/ KP.10.00/2023 Tgl 3 Mei 2023	Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 pada 21 Satker Kantor Atdikbud dan KWRI UNESCO di Luar Negeri yang Mencakup Penyusunan TOR dan RAB pada Aplikasi SAKTI	4 s.d. 6 Mei 2023	42.250.000	GUP 4 No SP2D 230881303005896 senilai Rp42.250.000,00
2	22435/A6/ KP.10.00/2023 Tgl 11 Juli 2023	Menyusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN untuk 21 Satker Atdikbud serta KWRI UNESCO di Luar Negeri	11 s.d. 13 Juli 2023	19.990.000	GUP 6 No SP2D 230881303010548 senilai Rp18.530.000,00
3	23790/A6/ LK.01.03/2023 Tgl 20 Juli 2023	Pemetaan atau Dokumentasi dan Persiapan Open House BMN yang Berada di Gudang Kemendikbudristek, Ciketing	20 s.d. 22 Juli 2023	14.450.000	GUP 6 No SP2D 230881303010548 senilai Rp14.450.000,00
4	26288/A6/ KU.01.02/2023 Tgl 10-08- 2023	Menyusun Laporan Keuangan Semester I TA 2023 untuk 19 Satker Atdikbud, KWRI UNESCO dan Satker Kanpus Atdikbud	10 s.d. 12 Agustus 2023	37.100.000	-
5	26896/A6/ KP.10.00/2023 Tgl 11-08- 2023	Penyusunan Dokumen Pendukung Pagu Anggaran TA 2024 dalam rangka Reviu APIP melalui Aplikasi e-Planning Kemendikbudristek	13 s.d. 15 Agustus 2023	19.975.000	-
Jumlah				**133.765.000**	

Menurut keterangan PPK, kegiatan nomor 1, 2, 4, dan 5 pada tabel di atas juga dibukukan pada GUP Nihil oleh PPK. Namun, hasil penelusuran pada pembukuan Bendahara Pengeluaran, kegiatan perjadin nomor 1 telah dibukukan pada GUP 4 SP2D Nomor 230881303005896 dan kegiatan perjadin nomor 2 telah dibukukan pada GUP 6 SP2D Nomor 230881303010548. Kegiatan nomor 3 juga telah dibukukan pada GUP 6 SP2D Nomor 230881303010548. Sehingga terdapat realisasi belanja perjalanan dinas yang dibukukan dua kali senilai Rp75.230.000,00 (Rp42.250.000,00 + Rp18.530.000,00 + Rp14.450.000,00) yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Dengan demikian terdapat ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp1.968.458.780,00 (Rp704.593.780,00 + Rp989.898.000,00 + Rp169.835.000,00 + Rp104.132.000,00). Atas ketekoran kas tersebut Plt. Kepala BKHM sebagai KPA Kantor Pusat Atase mengeluarkan SPTJM atas adanya kerugian negara yang ada di Kantor Pusat Atdikbud dan selanjutnya akan memproses sesuai ketentuan yang

berlaku. Terhadap komitmen tersebut, ketekoran kas senilai Rp1.968.458.780,00 telah direklasifikasi ke Aset Lainnya.

b. Penyajian Kas Lainnya dan Setara Kas pada tiga satker di Ditjen Diktiristek tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas penatausahaan Kas Lainnya dan Setara Kas, diketahui terdapat permasalahan pada Universitas Cenderawasih (Uncen), Universitas Pattimura (Unpatti), dan Unimed dengan uraian sebagai berikut.

1) Uncen

Neraca Uncen menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp1.836.035.468,00 dan Rp17.898.667.181,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan Koordinator Bagian Keuangan menunjukkan bahwa atas saldo Kas Lainnya dan Setara pada Neraca Uncen tersebut, terdapat selisih pembukuan lainnya sesuai LPJ Bendahara Pengeluaran senilai Rp150.000.000,00. Hal tersebut merupakan dampak dari pencatatan proses hibah uang tahun 2021 dari Pemerintah Kota Jayapura kepada Uncen. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kota Jayapura dengan Uncen Nomor 900/2526/DPK-KT/2021 Nomor 1181/UN20.3.2/KP/2021 tanggal 3 Desember 2021, menyatakan bahwa Pemkot Kota Jayapura memberikan hibah kepada Uncen berupa uang senilai Rp150.000.000,00. Hibah tersebut dipergunakan untuk Kegiatan Uncen tahun 2021.

Dalam NPHD disebutkan bahwa Uncen berkewajiban sebagai berikut:

a) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program/kegiatan yang dinilai dari hibah daerah yang telah disetujui dengan Pemkot Jayapura dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

b) Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

c) Uncen berkewajiban membuat dan menyampaikan LPJ penggunaan hibah pada TA 2021.

Menindaklanjuti NPHD tersebut, Uncen kemudian membuka rekening penampungan hibah pada Bank Papua dengan nomor rekening 1900102000075 atas nama RPL 063 PDHL UNCEN 2MCM2CDXA. Pemkot Jayapura menyalurkan dana hibah ke Rekening Kerjasama pada Bank Papua dengan nomor rekening 1000102026247 pada tanggal 3 Desember 2021 senilai Rp150.000.000,00, kemudian dana hibah dipindahbukukan ke rekening penampungan hibah pada tanggal 25 April 2022 senilai Rp150.000.000,00.

Dana hibah tersebut telah digunakan untuk kegiatan penertiban asrama. Uncen melaksanakan kegiatan tersebut melalui unit kerja Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tanggal 16 November s.d. 2 Desember 2021. Atas kegiatan tersebut, dijelaskan oleh Koordinator Bagian Keuangan juga bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut ditalangi terlebih dahulu dari dana DIPA karena

menunggu proses pembukaan rekening hibah. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut telah melalui proses verifikasi oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pada bulan April 2022, Uncen melakukan pengesahan hibah melalui KPPN Jayapura yang menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) Nomor 210630600340001 tanggal 31 Desember 2021. Sesuai SPHL tersebut, Uncen dinyatakan telah menerima hibah uang senilai Rp150.000.000,00 dari Pemerintah Kota Jayapura yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Keuangan Uncen dengan melakukan pencatatan nilai hibah melalui menu Daftar SPHL pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Proses pada aplikasi SAIBA tersebut menghasilkan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp150.000.000,00 pada Neraca Uncen per 31 Desember 2022 serta disajikan sebagai realisasi pendapatan hibah pada LRA.

Pada Tahun 2023, Uncen menyesuaikan penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan dari aplikasi SAIBA ke aplikasi SAKTI. Perubahan tersebut dilakukan melalui migrasi data laporan keuangan yang terdapat dalam SAIBA ke dalam aplikasi SAKTI. Hasil migrasi menunjukkan bahwa Uncen masih menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2023 senilai Rp150.000.000,00. Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan menunjukkan bahwa tanggal 11 Juni 2022 telah dilakukan penutupan rekening hibah dengan Nomor rekening 1900102000075 atas nama RPL 063 PDHL UNCEN 2MCM2CDXA. Selain itu, proses perekaman yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada aplikasi SAKTI tidak menghasilkan jurnal yang membentuk saldo kas setara kas pada Laporan Arus Kas Uncen.

Atas permasalahan tersebut, Bendahara Pengeluaran telah melakukan koordinasi dengan KPPN secara lisan, namun sampai dengan 31 Desember 2023, belum terdapat tindak lanjut yang dilakukan KPPN atas pencatatan saldo tersebut, sehingga Uncen tidak dapat melakukan usulan jurnal koreksi.

2) Unpatti

Unpatti menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun per 31 Desember 2023 dan 2022 pada Neraca per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp15.664.525.146,00 dan Rp9.471.616.809,00. Di sisi Kewajiban, Unpatti menyajikan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp17.501.860.072,00 dan Rp10.741.597.451,00. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp17.501.860.072,00 tersebut terdiri dari:

a) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp1.837.334.926,00 yang berada pada RPATA; dan

b) Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU senilai Rp15.664.525.146,00 yang berada pada:

   1) Rekening RPL 061 BLU Unpatti untuk Dana Kelolaan senilai Rp15.664.524.295,00;

   2) Rekening BPP 061 Kedokteran senilai Rp1,00; dan

   3) Rekening BPP 061 LP3MP senilai Rp850,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas serta Utang kepada Pihak Ketiga BLU diketahui hal-hal sebagai berikut.

a) Saldo dana kelolaan senilai Rp691.893.351,00 belum dapat diidentifikasi peruntukannya

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengelolaan Berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran Unpatti diketahui bahwa setiap dana yang masuk ke RPL 061 Unpatti akan disertai dengan surat dari pemberi dana kepada Rektor yang dilampiri bukti transfer uang.

Kemudian berdasarkan surat tersebut, Bendahara Pengeluaran akan menarik dana dari rekening untuk disalurkan sesuai peruntukkannya. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Kas Lainnya dan Setara Kas menunjukkan bahwa terdapat dana pada rekening Unpatti yang belum teridentifikasi sumber dana dan peruntukannya per 31 Desember 2023 senilai Rp691.893.351,00. Dana tersebut berada di RPL 061 BLU Unpatti untuk Dana Kelolaan pada Bank BTN dengan nomor rekening 2401300001958. Adapun rincian tanggal mutasi masuk ke rekening Unpatti sebagai berikut.

Tabel 176. Mutasi Masuk Dana pada Rekening Unpatti yang Belum Teridentifikasi

No	Tanggal Mutasi Masuk ke Rekening	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
1	8 Januari 2021	200.000,00
2	13 September 2022	6.000.000,00
3	31 Oktober 2022	500.000,00
4	23 November 2022	3.000.000,00
5	29 Mei 2023	2.400.000,00
6	31 Mei 2023	199.227.000,00
7	9 Juni 2023	2.400.000,00
8	16 Juli 2023	2.400.000,00
9	27 November 2023	20.000.000,00
10	20 Desember 2023	136.000.000,00
11	29 Desember 2023	197.339.351,00
12	29 Desember 2023	122.427.000,00
Jumlah		**691.893.351,00**

Atas mutasi masuk dana kelolaan senilai Rp691.893.351,00 tersebut diungkapkan pada Lampiran CaLK bahwa dana tersebut belum teridentifikasi.

Sampai saat ini belum terdapat kebijakan dari rektor yang mengatur mekanisme penelusuran serta penggunaan dana yang belum teridentifikasi tersebut.

b) Dana kelolaan untuk KIPK senilai Rp4.680.111.000,00 belum dikembalikan kepada mahasiswa penerima

Terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari dana bantuan UKT dari Kemendikbudristek kepada mahasiswa Unpatti yang berhak menerima KIPK senilai Rp4.680.111.000,00. Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Unpatti belum menyalurkan semua bantuan tersebut kepada 2.039 mahasiswa penerima KIPK sehingga masih tercatat sebagai saldo pada rekening RPL 061 BLU Unpatti untuk Dana Kelolaan.

Kemudian, diketahui bahwa kendala dalam proses penyaluran KIPK terkait temuan Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2023 yang menguraikan permasalahan tentang UKT yang belum dikembalikan kepada mahasiswa penerima program KIPK. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan nilai bantuan UKT yang

ditransfer oleh Kemendikbudristek dengan nilai UKT yang ditetapkan oleh Unpatti. Itjen merekomendasikan agar Unpatti mengembalikan selisih atas UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa berdasarkan ketetapan SK Rektor Unpatti dengan UKT yang telah diterima berdasarkan ketetapan penerima KIPK. Atas rekomendasi tersebut, Unpatti beranggapan akan merugikan Unpatti karena harus menanggung UKT dari mahasiswa yang mendapat bantuan UKT lebih kecil dari nilai UKT yang telah ditetapkan oleh UKT. Terkait hal tersebut, pimpinan Unpatti masih belum mengembalikan dana kepada mahasiswa penerima program KIPK karena masih mempertimbangkan terkait jumlah pengembalian dana yang harus dilakukan kepada mahasiswa penerima program KIPK.

Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa penyaluran akan dilakukan pada 1 April 2024. Hal tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil konsultasi Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dengan Direktorat Belmawa pada 26 Maret 2024 terkait ketentuan pengembalian dana UKT kepada mahasiswa penerima program KIPK.

3) Unimed

Unimed menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun per 31 Desember 2023 dan 2022 pada Neraca per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp13.058.331.236,00 dan Rp7.336.359.604,00. Di sisi Kewajiban, Unimed menyajikan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp14.027.154.773,00 dan Rp7.330.960.002,00. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp14.027.154.773,00 tersebut terdiri dari:

a) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp974.877.617,00 pada RPATA; dan

b) Utang kepada Pihak Ketiga BLU senilai Rp13.052.277.156,00 yang berada pada:

(1) RPL 004 BLU Unimed untuk Dana Kelolaan senilai Rp13.046.223.076,00; dan

(2) Rekening Ops K BLU senilai Rp6.054.080,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas serta Utang Kepada Pihak Ketiga BLU, diketahui terdapat dana masuk Tahun 2023 dari Pemkab Labura untuk beasiswa dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk penyelenggaraan PPG dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 177. Mutasi Masuk Dana Kelolaan pada Rekening Unimed per 31 Desember 2023

No	Uraian	Tanggal Mutasi Masuk ke Rekening	Saldo Masuk Rekening (Rp)	Saldo Rekening per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Terima dana beasiswa mahasiswa Kab. Labura Angkatan 2021 pada WR IV	25 Okt 2023	413.000.000,00	201.500.000,00
2	Terima dana beasiswa mahasiswa Kab. Labura Angkatan 2022 pada WR IV	25 Okt 2023	690.000.000,00	317.000.000,00
3	Terima dana PPG PGP Tahun 2023	29 Nov 2023	255.200.000,00	191.600.000,00
4	Terima dana beasiswa mahasiswa Kab. Labura Angkatan 2023 pada WR IV	23 Nov 2023	803.200.000,00	231.600.000,00
5	Terima dana PPG Dalam Jabatan Gelombang II	4 Des 2023	5.805.000.000,00	4.891.259.718,00
6	Terima dana beasiswa mahasiswa Kab. Labura Angkatan 2020 pada WR IV	22 Des 2023	675.000.000,00	338.400.000,00

No	Uraian	Tanggal Mutasi Masuk ke Rekening	Saldo Masuk Rekening (Rp)	Saldo Rekening per 31 Desember 2023 (Rp)
7	Terima dana PPG Dalam Jabatan Gelombang III	27 Des 2023	6.865.000.000,00	6.865.000.000,00
Jumlah			**15.506.400.000,00**	**13.036.359.718,00**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa belum seluruh dana kelolaan dibayarkan sesuai peruntukkannya per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut.

a) Dana beasiswa mahasiswa Kabupaten Labura

Pemkab Labura menjalin kerjasama dengan Unimed melalui skema beasiswa berupa bantuan UKT dan biaya hidup untuk mahasiswa dari Kabupaten Labura yang melaksanakan pendidikan di Unimed. Mahasiswa Angkatan tahun 2020 mendapatkan beasiswa yang mencakup bantuan UKT dan biaya hidup namun untuk mahasiswa angkatan tahun 2021 s.d. 2023 hanya mendapatkan bantuan UKT saja.

Dana beasiswa disalurkan melalui transfer secara penuh dari Pemkab Labura ke RPL Unimed untuk periode pembayaran UKT dan biaya hidup pada Semester Ganjil 2023/2024 yang berlangsung Juli-Desember 2023 serta Semester Genap 2023/2024 yang berlangsung Januari-Juni 2024. Sesuai PKS, komponen bantuan UKT akan direalisasikan sebagai PNBP Unimed, sementara komponen biaya hidup akan disalurkan oleh Unimed ke rekening masing-masing mahasiswa.

Pada saat pemeriksaan dilakukan tanggal 20 Maret 2024 diketahui seluruh dana beasiswa berupa UKT sudah dipindahkan ke rekening PNBP Unimed, sedangkan untuk biaya hidup senilai Rp76.050.000,00 belum seluruhnya ditransfer ke mahasiswa. Hal ini terjadi karena ada kekhawatiran mahasiswa akan menghabiskan bantuan biaya hidup tersebut sekaligus sebelum masa pemberian beasiswa habis.

b) Dana PPG

Unimed merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk untuk melaksanakan PPG. Penyelenggaraan PPG dilakukan dalam tiga kegiatan. Pelaksanaan PPG Program Guru Penggerak (PGP) dan PPG dalam Jabatan Gelombang II tahun 2023 dilaksanakan pada 16 September s.d. 10 Desember 2023, sedangkan PPG dalam Jabatan Gelombang III tahun 2023 dilaksanakan pada 15 November 2023 s.d. 3 Maret 2024.

Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Koordinator PPG menunjukkan bahwa dana untuk penyelenggaraan PPG PGP dan PPG dalam Jabatan Gelombang II ditransfer LPDP menjelang akhir pelaksanaan PPG. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua Koordinator PPG Unimed hal ini menjadi salah satu penyebab belum seluruh dana PPG bisa disalurkan di tahun 2023. Pembayaran untuk pelaksanaan PPG dilakukan penundaan sampai uang pelaksanaan PPG ditransfer LPDP. Setelah mendapatkan informasi dana diterima dari LPDP diterima di RPL Unimed, kemudian Ketua Koordinator PPG mengajukan permintaan dana sesuai RAB dengan mengajukan surat permintaan dana yang ditujukan kepada Wakil Rektor II Unimed Bidang Umum dan Keuangan. Adapun untuk PPG dalam Jabatan Gelombang III tahun 2023, dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih berlangsung sampai bulan Maret 2024, sehingga per 31 Desember 2023 belum seluruh dana PPG

dari LPDP dapat disalurkan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dokumen hingga 20 Maret 2024 diketahui masih terdapat sisa dana PPG yang belum disalurkan senilai Rp5.919.517.770,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 178. Sisa Dana PPG yang Belum Disalurkan pada Unimed Tahun 2023

No	Uraian	Saldo Rekening per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Rekening per 20 Maret 2024 (Rp)
1	Dana PPG PGP Tahun 2023	191.600.000,00	50.230.060,00
2	Dana PPG Dalam Jabatan Gel. II	4.891.259.718,00	449.974.658,00
3	Dana PPG Dalam Jabatan Gel. III	6.865.000.000,00	5.419.313.052,00
Jumlah		**11.947.859.718,00**	**5.919.517.770,00**

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN sebagaiman telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016

1) Pasal 19:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis-jenis uang/surat berharga yang harus ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP meliputi: : (a) Uang Persediaan; (b) Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS Bendahara; (c) Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi Bendahara selaku wajib pungut; (d). Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara; dan (e). Uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dikelola oleh Bendahara; dan

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alasan apapun.

2) Pasal 22:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melaksanakan pembayaran UP setelah menerima SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA; dan

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa SPBy sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa: a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK.

3) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

b. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1) Pasal 186 ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang: f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara, g. memberikan supervisi, konsultasi, dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran, h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

2) Pasal 188 pada:

a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang: g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan

b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab terhadap: a. kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara

c. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pasal 186:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa KPA bertanggung jawab secara format dan materiil kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya; dan

2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang antara lain memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

d. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas pada angka 2.2.3.3 Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan, yang menyatakan bahwa Selain pengaturan tersebut di atas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah, penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah Provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUN/BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca kementerian/lembaga/SKPD sebagai Kas Lainnya.

e. PMK Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah BAB IV tentang Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga Penerima Hibah huruf H. Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Rupiah paragraf 2 yang menyatakan bahwa Secara umum ringkasan tahapan pengesahan transaksi belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam rupiah (hibah langsung bentuk uang rupiah), sebagai berikut:Proses register hibah:

1) Penerbitan nomor register atas penerimaan hibah langsung bentuk uang yang diterima dari pemberi hibah luar negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko berdasarkan permohonan dari satker; dan

2) Penerbitan nomor register atas penerimaan hibah langsung bentuk uang yang diterima dari pemberi hibah dalam negeri dilakukan oleh Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan berdasarkan permohonan dari Satker

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Selisih Kas di Bendahara Pengeluaran pada satker BKHM yang belum dipertanggungjawabkan minimal senilai Rp1.968.458.780,00 terdiri dari:
   1) Kegiatan yang telah dibukukan BP namun pembayarannya menggunakan DIPA BKHM senilai Rp704.593.780,00;
   2) TUP senilai Rp989.898.000,00 dan GUP senilai Rp169.835.000,00; dan
   3) Belanja Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp104.132.000,00;
b. Belanja Perjalanan Dinas pada satker Kantor Pusat BKHM yang tidak dibayarkan kepada yang berhak senilai Rp75.230.000,00;
c. Realisasi belanja pada satker Kantor Pusat BKHM yang belum ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.917.828.672,00 tidak dapat diyakini kebenarannya**;**
d. Potensi salah saji Kas Lainnya dan Setara Kas pada Uncen;
e. Potensi penyalahgunaan atas dana kelolaan pada dua satker di Ditjen Diktiristek yaitu
   1) Unpatti atas saldo yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya senilai Rp691.893.351,00; dan
   2) Unimed atas dana kelolaan yang belum disalurkan senilai Rp5.995.567.770,00 (Rp76.050.000,00 + Rp 5.919.517.770,00); dan
f. Mahasiswa penerima bantuan pada Unpatti terlambat menerima haknya senilai Rp4.680.111.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Satker Kantor Pusat Atdikbud BKHM
   1) KPA belum optimal dalam mengendalikan pengelolaan keuangan pada satker yang dipimpinnya;
   2) PPK belum optimal dalam melaksanan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya; dan
   3) Bendahara Pengeluaran dan BPP belum melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Dirjen Diktiristek
   1) Belum adanya mekanisme yang terintegrasi antara petugas pengelola dana kelolaan dengan unit kerja yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas hak dan kewajiban dana yang dikelola;
   2) Rektor belum membuat kebijakan terkait pengembalian dana kepada mahasiswa penerima program KIPK; dan
   3) Belum adanya mekanisme yang terintegrasi antara Bendahara Penerima dan Bagian Akademik terkait mahasiswa yang sudah dan belum membayar biaya pendidikan.

4) Belum adanya aturan terkait mekanisme penyaluran beasiswa pada Unimed berupa bantuan biaya hidup mahasiswa Kabupaten Labura;

5) Rektor Unimed belum membuat kebijakan terkait mekanisme pembayaran belanja kegiatan PPG; dan

6) Koordinator Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Uncen kurang cermat berkoordinasi secara tertulis dengan KPPN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan pengelolaan Kas pada satker secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Sekjen Kemendikbudristek supaya:

   1) memerintahkan Kepala BKHM meminta pertanggungjawaban dari Bendahara yang bersangkutan dan memproses Tuntutan Perbendaharaan dan melaporkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK;

   2) memberikan sanksi kepada KPA dan PPK Kantor Pusat Atdikbud BKHM atas kelalaian dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kas di satkernya; dan

   3) memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. DA) atas ketekoran kas yang terjadi pada Kantor Pusat Atdikbud BKHM.

b. Irjen supaya melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.917.828.672,00 pada Kantor Pusat Atdikbud;

c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unpatti untuk:

   1) Menetapkan mekanisme yang terintegrasi antara petugas pengelola dana kelolaan dengan unit kerja yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas hak dan kewajiban dana yang dikelola;

   2) Membuat kebijakan terkait pengembalian dana kepada mahasiswa penerima program KIPK; dan

   3) Menetapkan mekanisme yang terintegrasi antara Bendahara Penerima dan Bagian Akademik terkait mahasiswa yang sudah dan belum membayar biaya pendidikan.

d. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unimed untuk:

   1) Menetapkan mekanisme penyaluran beasiswa pada Unimed berupa bantuan biaya hidup mahasiswa Kabupaten Labura; dan

   2) Membuat kebijakan terkait mekanisme pembayaran belanja kegiatan PPG;

e. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Uncen untuk memerintahkan Koordinator Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Uncen berkoordinasi kembali dengan KPPN dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyajian saldo yang tidak seharusnya sebagai

hasil migrasi data dari aplikasi SAIBA ke aplikasi SAKTI yang masih menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp150.000.000,00.

2. Pengelolaan Kas pada PTN BLU Universitas Manado, Unmul, dan PPNS Tidak Tertib

Neraca (*audited*) Kemendikbudristek menyajikan Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp3.242.933.442.879,00 dan Rp4.709.456.321.354,00 atau menurun senilai Rp1.466.522.878.475,00 atau turun 31,14%. Kas pada BLU merupakan saldo kas yang berfungsi untuk menampung segala penerimaan dan membayar pengeluaran BLU yang berasal dari pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 senilai Rp234.725.223.966,00 menurun senilai Rp119.059.837.624,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp353.785.061.590,00 atau turun sebesar 33,65%.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas pada PTN BLU menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Universitas Negeri Manado

Neraca Universitas Negeri Manado (Unima) per 31 Desember 2023 menyajikan saldo Kas pada BLU senilai Rp6.569.057.823,00 dan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp0,00. Hasil permintaan keterangan dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Unima dan analisis dokumen diketahui terdapat kekurangan nilai saldo Kas pada BLU senilai Rp2.758.060.493,00.

Saldo awal Kas pada BLU Unima per 1 Januari 2023 senilai Rp11.581.859.065,00. Berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) Tahun 2023, Unima mengesahkan pendapatan BLU senilai Rp86.050.587.183,00 dan belanja BLU senilai Rp92.092.814.016,00. Dengan demikian, nilai saldo Kas BLU per 31 Desember 2023 adalah Rp5.539.632.232,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 179. Perhitungan Sisa Kas BLU Unima

Rekening	Saldo (Rp)
a. Saldo Kas BLU per 01 Januari 2023	11.581.859.065,00
b. Pengesahan Pendapatan Tahun 2023	86.050.587.183,00
c. Pengesahan Belanja Tahun 2023	(92.092.814.016,00)
Saldo Akhir Kas BLU ((a+b)-c)	**5.539.632.232,00**

Sedangkan saldo seluruh rekening yang dimilki Unima senilai Rp2.758.060.493,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 180. Saldo Rekening BLU per 31 Desember 2023

No	Rekening	Saldo (Rp)
1	BTN 0001101300007462	3.122.921,00
2	BNI 8810008987	807.066.694,00
3	BRI 145801000048301	1.908.909.935,00
4	BTN 0001101300007420	38.960.943,00
Jumlah		**2.758.060.493,00**

Selisih Saldo Kas pada BLU di Neraca Unima dengan nilai saldo yang terdapat pada rekening tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan saldo Kas pada BLU senilai Rp2.781.571.739,00 (Rp5.539.632.232,00 – Rp2.758.060.493,00).

Atas selisih Saldo Kas pada BLU senilai Rp2.781.571.739,00 tersebut, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan BPP BLU menjelaskan bahwa penatausahaan kas pada Unima hanya dilakukan melalui empat rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Rektorat Unima. Proses realisasi belanja pada Unima dilakukan melalui penyaluran dana secara tunai dari empat rekening kepada setiap penanggung jawab kegiatan atau BPP di masing-masing fakultas/unit kerja. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui sistem uang panjar yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan oleh unit terkait. Mekanisme pertanggungjawaban uang panjar pada Unima merupakan kebijakan tidak tertulis yang berlaku untuk seluruh satker. Sesuai kebijakan tersebut, satker yang mengajukan uang panjar harus menyampaikan surat permohonan pencairan dana kepada Rektor yang disertai dengan RAB. Pengajuan uang panjar dari satker akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi pada Biro Keuangan. Selanjutnya Bagian Keuangan Rektorat, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran melakukan rekonsiliasi bulanan antara data pengesahan pendapatan dengan data pengesahan pengeluaran.

Pada akhir 2023, terdapat kesalahan validasi penggunaan uang panjar yang diusulkan satker sehingga terdapat kelebihan distribusi uang panjar. Hal tersebut mengakibatkan selisih saldo Kas pada BLU senilai Rp2.781.571.738,00. Atas uang panjar tersebut digunakan untuk kegiatan pada tahun 2024 senilai Rp2.781.571.738,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 181. Rekap Penggunaan Uang Panjar Unima

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Pejalanan Dinas	355.796.356,00
2	Belanja Operasional Lainnya	2.058.282,00
3	ATK	280.000.000,00
4	Gaji PPNPN	1.308.185.000,00
5	Honor	1.480.000,00
6	Makan Minum	2.245.000,00
7	Peralatan	391.482.100,00
8	Biaya Asesmen Program RPL	192.325.000,00
9	Toga	248.000.000,00
Jumlah		**2.781.571.738,00**

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakcermatan dalam pengelolaan kas sehingga mengakibatkan kelebihan pendistribusian uang panjar pada 2023 dan uang panjar yang digunakan untuk belanja tahun 2024 senilai Rp2.781.571.738,00 tidak direncanakan dengan baik.

b. Unmul

Unmul menyajikan saldo Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 182. Rincian Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	41.221.480.515,00	33.300.495.866,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
2	Kas pada BLU	160.020.009.478,00	125.558.052.902,00
Jumlah		**201.241.489.993,00**	**158.858.548.768,00**

Pada sisi Kewajiban, Unmul menyajikan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp85.448.413.261,00 dan Rp77.525.762.488,00. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp85.448.413.261,00 tersebut terdiri dari:

1) Saldo Bank Dana Kelolaan senilai Rp41.221.480.515,00;

2) Belanja Pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp43.556.916.067,00; dan

3) Belanja Barang yang masih harus dibayar senilai Rp670.016.679,00.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas, Kas pada BLU, dan Utang kepada Pihak Ketiga BLU diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Selisih kas pada Tahun 2023 senilai Rp40.155,00 belum dapat dijelaskan

   LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah mengungkapkan permasalahan pengelolaan kas tersebut antara lain selisih kas per 31 Desember 2022 senilai Rp5.433.157.065,00. Atas permasalahan tersebut, dalam tanggapan hasil pemeriksaan, Unmul telah menjelaskan saldo senilai Rp1.030.412.418,00 sedangkan sisa saldo senilai Rp4.402.744.647,00 telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dengan melakukan reklasifikasi dari akun Kas pada BLU ke akun Aset Lain-lain BLU dengan penyelesaian melalui Tuntutan Perbedaharaan senilai Rp1.743.188.147,00 dan TGR senilai Rp2.659.556.500,00.

   Sebagaimana telah diuraikan di atas, saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2023 senilai Rp160.020.009.478,00. Hasil pemeriksaan atas data SP3 BLU TA 2023 pada aplikasi SAKTI menunjukkan terdapat selisih kurang kas senilai Rp40.155,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

a)	Saldo awal Kas menurut SAKTI	:	Rp	125.558.052.902,00
b)	Total pengesahan Pendapatan	:	Rp	380.168.661.187,00
c)	Total pengesahan Belanja	:	Rp	345.706.704.611,00
	Saldo akhir Kas menurut SAKTI (a + b - c)	:	Rp	160.020.009.478,00
d)	Saldo rekening koran	:	Rp	160.019.969.323,00
e)	**Selisih Kas (d - c)**	:	**Rp**	**(40.155,00)**

   Selisih kurang kas senilai Rp40.155,0 tersebut disajikan sebagai Kas Non Rekening pada Lampiran CaLK dengan rincian atas saldo Kas pada BLU sebagai berikut.

Tabel 183. Rincian Kas pada BLU Unmul per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Kas pada Bank	160.019.969.323,00	124.527.640.484,00
2	Kas Non Rekening	40.155,00	1.030.412.418,00
	Jumlah	**160.020.009.478,00**	**125.558.052.902,00**

   Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Bendahara Pengeluaran tidak dapat menjelaskan selisih kas tersebut.

2) Dana kelolaan belum dapat diidentifikasi peruntukannya senilai Rp7.991.170.266,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersimpan pada dua rekening dana kelolaan yaitu BNI dengan Nomor rekening 0213883110 dan BTN dengan Nomor rekening 00147-01-30-000044-5 dengan saldo masing-masing per 31 Desember 2023 senilai Rp38.956.854.009,00 dan Rp2.209.233.719,00. Rekening dana kelolaan pada BNI digunakan untuk menampung dana dari pihak ketiga untuk kegiatan kerjasama, beasiswa, dana kegiatan seminar/konferensi, dan pendapatan sewa sedangkan rekening dana kelolaan pada BTN digunakan untuk penerimaan dana hibah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya sebagaimana diungkap pada LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, terdapat permasalahan adanya dana titipan yang belum teridentifikasi peruntukannya dan belum diakui sebagai pendapatan senilai Rp12.227.519.200,00. Dana tersebut merupakan akumulasi dana yang diterima Unmul sejak tahun 2016 s.d. 31 Desember 2022. BPK merekomendasikan Mendikbudristek untuk menginstruksikan Rektor Unmul melakukan identifikasi pihak-pihak untuk penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, sampai dengan 31 Desember 2023 Unmul telah dapat mengidentifikasi peruntukkan dana kelolaan yang diterima dari tahun 2016 s.d. 31 Desember 2022 senilai Rp7.086.864.231,00. Dengan demikian masih terdapat dana kelolaan yang masih belum dapat teridentifikasi senilai Rp5.140.654.969,00 (Rp12.227.519.200,00 – Rp7.086.864.231,00).

Namun, belum seluruh dana yang sudah teridentifikasi tersebut sudah diakui sebagai pendapatan. Masih terdapat sisa saldo senilai Rp1.323.759.332,00 (Rp7.086.864.231,00 – Rp5.763.104.899,00) dari dana yang sudah dapat teridentifikasi yang belum diakui sebagai pendapatan. Menurut penjelasan dari Koordinator Keuangan, hal tersebut terjadi karena masih menunggu proses permintaan dana dari unit pemilik dana.

Lebih lanjut, permasalahan tersebut masih terjadi pada TA 2023 dimana terdapat dana titipan lain-lain pada rekening dana kelolaan dengan saldo dana titipan per 31 Desember 2023 senilai Rp11.999.549.176,00. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dana kelolaan Unmul diketahui hingga 31 Desember 2023 belum seluruh dana titipan dapat teridentifikasi peruntukannya. Dana titipan yang masuk ke rekening pada tahun 2023 dan belum dapat teridentifikasi hingga 31 Desember 2023 senilaiRp2.850.515.297,00. Dengan demikian, total dana titipan yang masuk dari tahun 2016 – 2023 pada rekening dana kelolaan Unmul dan belum dapat teridentifikasi hingga 31 Desember 2023 senilai Rp7.991.170.266,00 (Rp5.140.654.969,00 + Rp2.850.515.297,00).

c. PPNS

Neraca PPNS per 31 Desember 2023 menyajikan saldo Kas pada BLU per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp30.451.314.909,00 dan Rp13.543.114.888,00. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas pada PPNS menunjukkan hal sebagai berikut.

1) Saldo dana kelolaan pada PPNS belum diketahui sumber dananya senilai Rp26.400.000,00

Rekening milik PPNS pada BNI Nomor 6776059899 a.n. RPL 031 BLU PPNS UNTUK DK KERJASAMA memiliki saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp28.642.548,00. Pengelola keuangan PPNS menjelaskan bahwa rekening tersebut merupakan rekening dana kelolaan dan digunakan sejak tahun 2023 untuk menampung dana yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga. Rekening tersebut dibuka pada tahun 2023 dengan ijin KPPN Nomor S-784/KPN.1601/2023 tanggal 20 Januari 2023. Saldo senilai Rp28.642.548,00 tersebut terdiri dari dana yang belum diketahui sumbernya senilai Rp26.400.000,00 dan jasa giro yang belum dilakukan mekanisme pengesahan senilai Rp2.242.548,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 184. Rincian Saldo Dana Kelolaan PPNS yang Belum Diketahui Sumbernya

Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
17 Mei 2023	18.000.000,00	Kredit Lain-lain | 008 RPL 019 BLU LPD 03834 0717PL19DT010103834 0717
03 Oktober 2023	8.400.000,00	Kredit Lain-lain | 008 RPL 019 BLU LPD 09590 3245PL19DT010109590 3245
Jumlah	**26.400.000,00**	

PPNS telah melakukan konfirmasi kepada BNI melalui surat Nomor 0561/PL19/KU.01.02/2024 tanggal 28 Februari 2024 untuk memperoleh informasi penyetor atas transaksi di atas. BNI menjawab melalui surat Nomor SBY/4.04/028 tanggal 28 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan Bank kedua kiriman uang tersebut berasal dari Bank Mandiri dengan nama pengirim RPL 019 BLU LPD. Nama pemilik rekening RPL 019 BLU LPD sampai dengan saat ini belum diketahui.

2) Selisih nilai saldo akun Kas pada BLU PPNS belum dapat dijelaskan senilai Rp41.415.349,00

Saldo awal Kas pada BLU PPNS per 1 Januari 2023 senilai Rp13.543.114.888,00. Berdasarkan SP3B Tahun 2023, PPNS mengesahkan pendapatan BLU senilai Rp47.136.507.102,00 dan belanja BLU senilai Rp30.228.307.081,00. Dengan demikian, nilai saldo Kas dan Bank BLU sesuai aplikasi SAKTI per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp30.451.314.909,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 185. Perhitungan Saldo Kas pada BLU PPNS pada Neraca per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Saldo Kas BLU per 01 Januari 2023	**13.543.114.888,00**
b. Pengesahan Pendapatan Tahun 2023	40.494.025.690,00
c. Transaksi jurnal GLP, atas saldo dana hibah ILO Tahun 2022	93.447.775,00
d. Transaksi jurnal GLP, atas saldo dana pengembalian PNBP PPNS TAYL 2021	6.549.033.637,00
e. Jumlah pengesahan pendapatan dan jurnal GLP (b+c+d)	**47.136.507.102,00**
f. Pengesahan belanja tahun 2023	30.228.307.081,00
g. Saldo Akhir Kas BLU ((a+e)-f)	**30.451.314.909,00**

Kas BLU PPNS tersimpan di tiga rekening pengelolaan operasional PPNS dan dua deposito jangka pendek menunjukkan bahwa saldo rekening kas dan bank BLU PPNS adalah senilai Rp30.409.899.560,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 186. Saldo Kas dan Bank BLU PPNS per 31 Desember 2023

No	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo (Rp)
1	BNI	6776059991	RPL 031 BLU PPNS UNTUK OPS BELANJA	1.113.478,00
2	BNI	6776056774	RPL 031 BLU PPNS UNTUK OPS PENDAPATAN 2	8.340.746.962,00
3	MANDIRI	1400022386289	RPL 031 BLU PPNS UNTUK OPS PENDAPATAN	2.068.039.120,00
4	BANK JATIM	DB.566209	BILYET	13.000.000.000,00
5	BANK JATIM	DB.566210	BILYET	7.000.000.000,00
Jumlah				**30.409.899.560,00**

Dari tabel di atas, diketahui bahwa terdapat selisih Kas dan Bank BLU PPNS berdasarkan saldo Kas dan Bank BLU yang tercatat pada Neraca per 31 Desember 2023 dari aplikasi SAKTI dengan saldo rekening yang dimiliki oleh PPNS senilai Rp41.415.349,00 (Rp30.451.314.909,00 – Rp30.409.899.560,00).

Atas selisih kas tersebut, Pengelola Keuangan PPNS melakukan penelusuran kembali atas transaksi pendapatan dan belanja yang dilakukan pada tahun 2023 dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 187. Hasil Penelusuran Selisih Kas BLU PPNS per 31 Des 2023 tanggal 25 Apr 2024

No	Uraian	Saldo Neraca (Rp)	Saldo Kas Fisik (Rp)
A	**Saldo Kas Akhir Pada Neraca**	**30.451.314.909,00**	
	Koreksi:		
1	Koreksi Saldo Awal dari TAYL 2022 (Pengembalian Belanja)	380.565,00	
2	Koreksi Saldo Awal dari pengembalian UKT KIPK Tahun 2022	-158.500.000,00	
3	Koreksi Pngakuan pendapatan UKT atas pagu minus Pendapatan MAP 424112	158.500.000,00	
4	Koreksi Kelebihan Pengesahan MAP 424112	-48.629.998,00	
5	Koreksi Pendapatan MAP 424113, atas kesalahan pencatatan rekapitulasi Pendapatan	-1.500.000,00	
6	Koreksi Pendapatan MAP 424919, atas Denda PBJ_BLU, yang belum disahkan sebagai pendapatan	4.512.383,00	
7	Koreksi Kelebihan Pengesahan Pendapatan Jasa Giro, MAP 424911	-694.810,97	
8	Koreksi Pendapatan MAP 424421 yang belum disahkan	8.705,00	
9	Koreksi Pendapatan MAP 424923	5.000.000,00	
10	Pendapatan Jasa Giro yang belum disahkan MAP 424911	1.113.478,00	
11	Pendapatan Jasa Giro yang belum disahkan MAP 424911	2.242.548,00	
12	Belanja Belum Disahkan, MAK 525112	-498.510,00	
	Saldo Akhir Pada Neraca Terkoreksi	**30.413.249.269,03**	

No	Uraian	Saldo Neraca (Rp)	Saldo Kas Fisik (Rp)
B	**Saldo Akhir Kas dan Bank Pada Rekening Koran dan Kas Bendahara Pengeluaran**		
1	Bank Mandiri		2.068.039.120,00
2	BNI Ops Pendapatan		8.340.746.962,00
3	Deposito Bank Jatim		20.000.000.000,00
4	BNI Ops Belanja		1.113.478,00
5	BNI DK/ Saldo Jasa Giro		2.242.548,00
	Saldo Bank		**30.412.142.108**,00
6	Tunai/kas di bendahara Pengeluaran	1.699.675,00	1.699.675,00
	Saldo Bank dan Kas		**30.413.841.783**,00
C	**Selisih Saldo Kas Neraca dengan Kas Fisik**		**-592.513,97**
D	**Saldo Akhir Pada Neraca Terkoreksi**		**30.413.249.269,03**

Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa masih terdapat selisih kurang senilai Rp592.513,97. Pengelola Keuangan PPNS menjelaskan bahwa terjadinya selisih kas tersebut disebabkan kompetensi SDM pengelolaan kas BLU yang kurang memadai, jumlah personil pengelolaan yang kurang, kurangnya koordinasi antara penyusun LK dengan Bendahara terkait, dan PPNS belum pernah mengadakan pelatihan pengelolaan Keuangan BLU kepada pengelola Keuangan PPNS. Sampai dengan pemeriksaan berakhir Pengelola Keuangan PPNS masih belum dapat menjelaskan selisih tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 42/PMP.05/2017:

1) Bab V Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU, yang antara lain menyatakan bahwa Kas dan Setara Kas yang dikelola BLU merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BLU, meliputi Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Kas dan Bank BLU, Setara Kas BLU, Kas Lainnya di BLU dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas dan Bank BLU merupakan akun untuk mencatat transaksi pengesahan penerimaan pendapatan BLU, pengesahan pengeluaran belanja BLU, pengesahan kas atas pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan BLU, pengesahan kas atas penyelesaian utang dari pengakuan beban BLU dan pengesahan saldo kas tunai/bank BLU sebagai pertanggungjawaban dan penyajian pelaporan Kas dan Bank BLU. Pengesahan untuk menyajikan Kas dan Bank BLU dihasilkan dengan melakukan reklasifikasi atas pencatatan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan. Pengesahan Kas dan Bank BLU dimaksud dilakukan dengan KPPN mitra kerja BLU selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum.

2) Bab IX Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya BLU, yang antara lain menyatakan bahwa Aset Lainnya BLU adalah aset BLU selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset Lainnya BLU secara struktur bagan akun standar pada segmen akun terdiiri dari 1) Aset kemitraan clengan pihak ketiga; 2) dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan; dan 3) Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya. Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana operasional BLU atau Kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan penyerahan

dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan.

b. PMK Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi BLU Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa Rekening Dana Kelolaan BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional BLU dan rekening pengelolaan kas BLU pada bank umum, untuk menampung dana yang dapat berupa: a. dana bergulir; dan/atau b. dana yang belum menjadi hak BLU.

c. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU:

   1) Pasal 170 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib; dan

   2) Pasal 170 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen sumbernya yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLU secara transaksional.

d. Keputusan Setjen Kemenristekdikti Nomor 127/A/KPT/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pencatatan Kas pada Satker di Lingkungan Kemendikbudristek:

   1) Lampiran Romawi I Huruf D Angka 4 tentang Ketentuan Khusus Pengelolaan Kas-BLU pada huruf b yang menyatakan bahwa PNBP-BLU yang digunakan secara langsung tidak diperbolehkan untuk:

      a) Membiayai belanja yang tidak tercantum dalam RBA tahun yang bersangkutan;

      b) Pemberian uang muka program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RBA;

      c) Pengeluaran Kas BLU di luar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RBA; dan

      d) Dana talangan beasiswa atau pinjaman pegawai.

   2) Lampiran Romawi II Huruf H Angka 3 huruf b tentang Pengesahan Pendapatan dan Belanja Kas Lainnya dan Setara Kas Satker BLU pada angka 4) yang menyatakan bahwa dalam hal belum tersedia akun belanja yang mewadahi kegiatan kerjasama dalam RBA/DIPA, maka satker melakukan revisi RBA/DIPA melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebelum proses pengeluaran belanja tersebut dilaksanakan.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Pemberian uang panjar pada Unima senilai Rp2.781.571.739,00 berpotensi disalahgunakan;

b. Potensi penyalahgunaan atas dana kelolaan yang belum diidentifikasi peruntukannya pada Unmul senilai Rp7.991.170.266,00 dan pada PPNS senilai Rp26.400.000,00; dan

c. Potensi penyalahgunaan nilai Kas pada BLU PPNS yang belum dapat diidentifikasi senilai Rp41.415.349,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi belum mempunyai juknis akuntansi terkait dana kelolaan di PTN;
b. KPA PTN/PTV terkait kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Kas yang dikelola BLU yang menjadi tanggung jawabnya;
c. Kepala Biro Keuangan PTN terkait lalai dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan;
d. Kepala Biro Keuangan Unima tidak dalam cermat dalam memverifikasi dan menvalidasi batas pagu pemberian uang panjar dan batas akhir pertanggungjawabannya;
e. Bendahara Pengeluaran PTN tidak optimal dalam mengidentifikasi dana-dana yang masuk ke rekening yang dikelolanya; dan
f. SPI PTN/PTV kurang optimal dalam melakukan pendampingan pengelolaan kas di BLU.

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menjelaskan sebagai berikut.

a. Rektor Unima menyatakan sependapat dengan permasalahan tersebut. Penggunaan uang panjar di tahun 2024 senilai Rp2.781.571.739,00 sudah dilengkapi dokumennya dan belanja tersebut sebagian sudah disahkan oleh KPPN.
b. Rektor Unmul menyatakan sependapat dan menjelaskan beberapa hal antara lain:
    1) Sampai saat ini selisih kas BLU senilai Rp40.155,00 masih belum daat ditelusuri;
    2) Kelebihan pengesahan pendapatan Tahun 2022 senilai Rp417.308.017,00 terjadi terkait dengan selisih kas pada LK TA 2022 senilai Rp351.981.003,00;
    3) Atas selisih LPJ Bendahara dengan saldo pada Laporan Keuangan Tahun 2023 dikarenakan terdapat saldo awal tahun 2016 yang masih terbawa hingga tahun 2023 dikarenakan adanya kesalahan dalam pencatatan LPJ Bendahara. Atas selisih tersebut, UNMUL akan melakukan koreksi LPJ Bendahara per 31 Desember 2023;
    4) Atas saldo pada rekening dana kelolaan yang belum teridentifikasi pemiliknya, kedepannya manajemen akan mengevaluasi penggunaan rekening dengan rencana penutupan dan menggunakan rekening baru dengan skema virtual account. UNMUL menyatakan kesulitan dalan menyusun pedoman atas pengelolaan pendapatan karena Juknis atas pengelolaan kas di Kemendikbud belum diperoleh.
c. Direktur PPNS menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya menetapkan pedoman dana kelolaan pada PTN dan Politeknik BLU;

b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor/Direktur untuk memerintahkan:

   1) KPA Unima, Unmul, dan PPNS lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Kas yang dikelola BLU yang menjadi tanggung jawabnya;

   2) Kepala Biro Keuangan Unima, Unmul, dan PPNS melaksanakan tugas sesuai ketentuan pengelolaan kas pada BLU;

c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unima untuk memerintahkan Tim verifikasi Biro Keuangan lebih cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi batas pagu pemberian uang panjar dan batas akhir pertanggungjawabannya;

d. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor Unmul dan Direktur PPNS memerintahkan:

   1) Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam mengidentifikasi pihak yang berhak untuk menggunakan saldo dana kelolaan;

   2) Kepala Biro Keuangan dan Bendahara Pengeluaran menyelesaikan permasalahan selisih kas;

e. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan SPI PTN/PTV lebih optimal dalam melakukan pendampingan pengelolaan kas di BLU.

3. Pengoptimalan Kas Melalui Investasi Jangka Pendek pada Delapan Satker BLU di Ditjen Diksi Tidak Didukung Kebijakan Investasi Jangka Pendek yang Memadai

Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 menyajikan saldo Investasi Jangka Pendek–BLU senilai Rp1.098.388.111.114,00 (*audited*) atau menurun senilai Rp1.062.874.969.626,00 atau 49,18% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp2.161.263.080.740,00. Pada saldo tersebut terdapat saldo Investasi Jangka Pendek yang terdapat di Ditjen Diksi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 188. Saldo Investasi Jangka Pendek pada Ditjen Diksi per 31 Desember 2023

No	Satker BLU	Jumlah Deposito	Nilai (Rp)
1	PNJ	2	35.000.000.000,00
2	Polban	4	63.000.000.000,00
3	Polinema	3	30.000.000.000,00
4	PNB	2	35.000.000.000,00
5	Polibatam	2	12.000.000.000,00
Jumlah		**13**	**175.000.000.000,00**

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.3.1**.

Investasi jangka pendek – BLU merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil. Investasi jangka pendek BLU memenuhi karakteristik investasi sebagai berikut.

a. Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan dapat dicairkan kedalam bentuk uang dalam jangka waktu 3 bulan sampai 12 bulan;

b. Investasi memiliki tingkat resiko rendah; dan

c. Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Investasi jangka pendek BLU diakui pada saat BLU mengeluarkan sejumlah dana dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka pendek. Hasil yang diperoleh dari investasi jangka pendek BLU berupa pendapatan bunga atau bagi hasil merupakan pendapatan BLU yang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra kerja.

Bertambahnya satker BLU PTV pada Tahun 2023 mengakibatkan terjadinya peningkatan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU di samping pula adanya kebijakan penggunaan *idle cash* BLU untuk peningkatan saldo Kas BLU sebagaimana terakhir diatur dalam PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang BLU.

Selain investasi jangka pendek pada lima satker yang tercatat sebagai saldo dalam Neraca per 31 Desember 2023, terdapat tiga satker BLU lain yang mengoptimalkan kas melalui investasi jangka pendek namun tidak tercatat sebagai saldo Investasi Jangka Pendek dalam Neraca per 31 Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Politeknik Negeri Jember

Politeknik Negeri Jember (Polije) menempatkan dana investasi jangka pendek berupa deposito senilai Rp10.008.428.126,00 pada BSI dengan nomor seri Instrumen investasi AB00377194/7000000177961404 tertanggal 27 September 2023 dengan jangka waktu 12 bulan. Deposito tersebut tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebagai saldo Kas pada BLU. Penyusun laporan keuangan Polije menjelaskan pencatatan deposito ke dalam akun Kas pada BLU karena saldo tersebut merupakan sisa PNBP Tahun 2021 dan 2022.

b. Polnep

Polnep menempatkan dana investasi jangka pendek berupa deposito senilai Rp5.000.000.000,00 pada BTN Syariah dengan nomor bilyet 3000031894 tanggal 19 September 2023 dengan jangka waktu 1 bulan dan telah berakhir tanggal 19 Oktober 2023. Deposito tersebut telah ditutup dan dicairkan pada tanggal 28 Desember 2023 sehingga tidak tercatat sebagai saldo Investasi Jangka Pendek dalam Neraca per 31 Desember 2023 melainkan tercatat pada Kas BLU.

c. PPNS

PPNS menempatkan dana investasi jangka pendek berupa deposito senilai Rp20.000.000.000,00 pada Bank Jatim masing-masing senilai Rp13.000.000.000,00 dengan nomor bilyet DB.566209 tanggal 23 Desember 2023 dan senilai Rp7.000.000.000,00 dengan nomor bilyet DB.566210 tanggal 23 Desember 2023 dengan jangka waktu satu bulan dan akan berakhir pada tanggal 23 Januari 2024. Deposito tersebut tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebagai saldo Kas pada BLU karena hanya memiliki jangka waktu satu bulan dan tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai Investasi Jangka Pendek.

Tabel 189. Rincian Investasi Jangka Pendek yang Tidak Tercatat dalam Neraca

No	Satker BLU	Jumlah Deposito	Nilai (Rp)
1	Polije	1	10.008.428.126,00
2	Polnep	1	5.000.000.000,00
3	PPNS	2	20.000.000.000,00
Jumlah		**4**	**35.008.428.126,00**

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.3.2**.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen terkait investasi jangka pendek – BLU menunjukkan bahwa pengoptimalan kas melalui investasi jangka pendek pada delapan satker BLU yaitu PNJ, Polban, Polinema, Polibatam, PNB, Polije, Polnep, dan PPNS tidak didukung kebijakan investasi jangka pendek yang memadai dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pengoptimalan Kas melalui Investasi Jangka Pendek pada tujuh satker BLU tidak didukung kebijakan Investasi Jangka Pendek yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik

Tujuh politeknik yaitu PNJ, Polinema, Polibatam, PNB, Polije, Polnep, dan PPNS belum memiliki kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022.

Berdasarkan penjelasan pengelola keuangan, keputusan penempatan investasi jangka pendek dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.

1) PNJ sebagai satker BLU telah memulai melakukan investasi dalam deposito. Dana awal yang diinvestasikan berasal dari saldo awal BLU yang memang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berjalan, sehingga tidak mengganggu berlangsungnya kegiatan yang telah direncanakan. Hasil investasi tersebut direncanakan untuk dialokasikan dalam pembiayaan terkait dengan remunerasi dan lainnya yang dapat mengoptimalisasi proses bisnis.

2) Polinema menempatkan deposito berdasarkan SOP manajemen kas atas pemanfaatan *idle cash*, dan sesuai dengan arahan dari pimpinan untuk menunjuk bank sebagai penempatan deposito dan setelah tim manajemen kas melakukan kajian mengenai penawaran/ hasil *beauty contest*. Kebijakan investasi juga dilaporkan pada saat rapat Dewan Pengawas baik nominal penempatan, nama bank mitra, suku bunga imbal hasil dan realisasi besaran bunga deposito. Rekomendasi Dewan Pengawas yang tertuang dalam laporan Dewan Pengawas salah satunya adalah rekomendasi penempatan deposito pada rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

3) Polibatam menempatkan deposito seluruhnya dalam bentuk deposito berjangka enam bulan dengan sistem *Automatic Roll Over* (ARO) sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta penempatan investasi pada masing-masing Bank telah melalui prosedur pemilihan Bank Mitra yang tepat dengan mekanisme *beauty contest*, sehingga penutupan maupun pembukaan rekening deposito merupakan bagian dari optimalisasi keuntungan investasi yang diharapkan.

4) PNB menempatkan investasi berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran 2023 yang menyebutkan bahwa PNB akan mempertimbangkan jangka waktu deposito untuk jangka waktu pendek selama 1 (satu) bulan, guna menjaga likuiditas.

5) Polije menempatkan investasi jangka pendek atas sisa PNBP tahun 2021 dan 2022 dalam rangka optimalisasi kas.

6) Polnep menempatkan investasi berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran 2023 yang menyebutkan bahwa untuk tahun 2023, investasi Polnep berasal dari dana APBN dan BLU.

7) PPNS menempatkan investasi jangka pendek berdasarkan SK Direktur PPNS Nomor 3797/PL19/KU.01.02/2023 tentang Kebijakan Optimalisasi Kas PPNS. Rencana Bisnis dan Anggaran PPNS belum menyebutkan tentang kebijakan atau rencana investasi jangka pendek dalam rangka optimalisasi kas.

b. Kebijakan Investasi Jangka Pendek pada Polban tidak mengatur sistem pengawasan dan pelaporan

Polban telah memiliki kebijakan terkait investasi jangka pendek yang ditetapkan melalui SK Direktur Polban Nomor B/1468/PL1/HK.02.00/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Kebijakan Investasi Jangka Pendek. Namun kebijakan tersebut tidak mengatur sistem pengawasan dan pelaporan pengelolaan investasi jangka pendek sebagaimana ketentuan dalam PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 pada:

a. Pasal 84:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan kegiatan manajemen kas aktif berupa penempatan kas pada instrument keuangan dengan risiko rendah; dan

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penempatan kas pada Rekening Pengelolaan Kas BLU berbentuk deposito *on call* dan/atau deposito berjangka pada Bank Umum.

b. Pasal 85:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, BLU harus mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan bauran instrumen investasi; dan

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bauran instrument investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kredibilitas bank, jatuh tempo, nominal, dan ketentuan penalti.

c. Pasal 86:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BLU menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU;

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kebijakan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a) batas maksimum proporsi kas BLU yang dapat ditempatkan pada satu pihak;

b) sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek; dan

c) pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penempatan investasi jangka pendek berpotensi mempengaruhi likuiditas kas operasional BLU karena belum ada kebijakan batas maksimum proporsi kas BLU yang dapat diinvestasikan; dan

b. Potensi penyalahgunaan wewenang transaksi investasi jangka pendek karena belum adanya sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek serta pembatasan wewenang untuk setiap level manajemen.

Hal tersebut disebabkan Direktur Politeknik terkait belum menyusun pedoman investasi jangka pendek yang memadai sesuai PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022.

Atas permasalahan tersebut masing-masing Direktur Politeknik terkait menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur PNJ, Polban, Polinema, Polibatam, PNB, Polije, Polnep, dan PPNS untuk menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang meliputi sistem pengawasan, pelaporan, serta pembatasan wewenang sesuai ketentuan.

4. Monev Pertanggungjawaban atas Kegiatan pada Akun BDDM dari Belanja Banpem Belum Memadai

Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 menyajikan saldo Belanja Dibayar Dimuka (BDDM) per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 (*audited*) masing-masing senilai Rp110.376.854.608,00 dan Rp596.337.821.689,00. BDDM merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran belanja namun barang atau jasa belum diterima. Termasuk di dalam BDDM adalah bantuan pemerintah (banpem) dalam bentuk uang yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan penerima belum menyampaikan LPJ atau BAST. Dari saldo BDDM per 31 Desember 2023 senilai Rp110.376.854.608,00, senilai Rp71.226.114.097,00 merupakan saldo BDDM yang berasal dari belanja banpem dengan rincian sebagai berikut

Tabel 190. BDDM dari Belanja Banpem per Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Setjen	18.142.547.224,00	34.170.691.688,00
2	Itjen	0,00	0,00
3	Ditjen PDM	1.526.053.100,00	7.212.189.045,00
4	BSKAP	0,00	0,00
5	Ditjen Kebudayaan	1.084.126.143,00	1.814.947.000,00
6	Ditjen GTK	0,00	97.700.000,00
7	Ditjen Diktiristek	15.635.887.930,00	22.832.016.479,00
8	Ditjen Diksi	34.655.742.000,00	253.338.985.999,00
9	BPP Bahasa	181.757.700,00	-

No	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jumlah		71.226.114.097,00	319.466.530.211,00

Permasalahan penatausahaan BDDM dari belanja banpem yang belum dipertanggungjawabkan belum memadai telah diungkapkan dalam LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, antara lain terdapat BDDM yang berasal dari banpem periode 2016 – 2021 yang LPJnya belum disampaikan penerima banpem, belum seluruh juknis banpem mengatur mekanisme pertanggungjawaban banpem, dan penyelesaian permasalahan banpem yang berulang.

Dalam LHP tersebut, BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek diantaranya agar:

a. Membuat sistem monitoring dan evaluasi banpem secara menyeluruh dari tingkat satker sampai Kementerian;

b. Menginstruksikan KPA pada unit kerja Eselon I agar dalam Menyusun pasal-pasal dalam juknis/juklak yang dapat mengendalikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban penerima bantuan; dan

c. Irjen Kemendikbudristek melakukan verifikasi atas LPJ atas banpem tahun 2016 s.d. 2021 yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp38.958.646.510,00.

Berdasarkan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2023 adalah Kemendikbudristek belum menyusun sistem monev banpem secara menyeluruh serta belum ada hasil verifikasi Irjen Kemendikbudristek atas LPJ banpem tahun 2016 s.d. 2021.

Hasil pemeriksaan atas saldo BDDM yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa masih ditemukan permasalahan terkait penatausahaan BDDM dari belanja banpem yang belum memadai pada satker Setjen, Ditjen PDM, Ditjen Diktiristek, dan Ditjen Diksi dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Penyelesaian BDDM Tahun 2016-2022 berlarut-larut senilai Rp41.324.266.746,00

Hasil pemeriksaan menunjukkan penyelesaian BDDM Tahun 2016-2022 berlarut-larut senilai Rp41.324.266.746,00 terjadi di satker sebagai berikut.

1) Setjen

Saldo BDDM yang berasal dari Belanja Banpem pada Setjen per 31 Desember 2023 senilai Rp113.159.749.865,00 terdiri dari BDDM dari belanja banpem tahun 2023 senilai Rp103.434.661.719,00 dan belanja banpem sebelum tahun 2023 senilai Rp9.725.088.146,00 yang terdapat pada Puslapdik dan Biro Keuangan dan BMN, dengan rincian sebagai berikut.

a) Puslapdik senilai Rp9.510.088.146,00

Saldo BDDM pada PLPP merupakan bantuan pendidikan ADik yang disalurkan tahun 2022 melalui perguruan tinggi untuk diberikan kepada mahasiswa namun laporan dari pihak kampus sampai saat ini belum diterima Puslapdik sebanyak 2.502 orang senilai Rp9.510.088.146,00, sedangkan penyaluran ADik Tahun 2023 sudah melalui Kementerian Keuangan melalui LPDP. Adapun rincian penyaluran bantuan ADik Tahun 2022 senilai Rp114.806.771.885,00 kepada 7.230 mahasiswa.

Mahasiswa yang telah menyampaikan LPJ sebanyak 4.728 mahasiswa dengan bantuan senilai Rp105.296.683.739,00.

b) Biro Keuangan dan BMN senilai Rp215.000.000,00

Penyaluran Banpem Tahun 2019 s.d 2021 pada Biro Keuangan dan BMN yang belum diterima LPJ-nya sebanyak delapan penerima bantuan senilai Rp215.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 191. Penerima Bantuan yang Belum Menyampaikan LPJ

Tahun	Jumlah Penerima	Nilai Bantuan (Rp)
2019	1	25.000.000,00
2020	5	145.000.000,00
2021	2	45.000.000,00
Jumlah	**8**	**215.000.000,00**

Berdasarkan penjelasan Tim Pengelola Banpem Biro Keuangan dan BMN, permasalahan yang dihadapi adalah lokasi penerima bantuan yang terlalu jauh sehingga memerlukan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai bantuannya. Upaya yang telah dilakukan Tim Pengelola Banpem untuk memperoleh LPJ atas penyaluran Banpem sebelum tahun 2022 dan kendalanya diuraikan sebagai berikut:

(1) Menghubungi pimpinan lembaga/satuan pendidikan, namun nomor telepon yang ada pada proposal dan MOU sudah tidak bisa dihubungi/sudah pensiun; dan

(2) Mengirimkan surat teguran kepada Lembaga/satuan Pendidikan yang bersangkutan namun tidak mendapatkan respon dari penerima.

2) Ditjen PDM senilai Rp1.526.053.100,00

Saldo BDDM yang berasal dari Belanja Banpem pada Ditjen PDM per 31 Desember 2023 senilai Rp1.526.053.100,00 yang merupakan BDDM dari belanja banpem sebelum tahun 2023. Penjelasan dari masing-masing PPK terkait-saldo BDDM tersebut sebagai berikut.

a) Direktorat SMA

BDDM yang berasal dari tahun 2018, merupakan Banpem senilai Rp417.690.000,00 untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMAS Ar-Rahim tetapi tidak selesai dilaksanakan. Permasalahan tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Dompu, NTB. Hasil wawancara dengan pengelola banpem Direktorat SMA diketahui pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2023 telah dilakukan permintaan keterangan oleh Polres Dompu kepada PPK, BPP, PPSPM dan petugas verifikasi terkait. Namun hingga April 2024, pengelola bantuan belum memperoleh informasi lagi terkait kelanjutan kasus tersebut.

Dari penjelasan PPK Banpem terkait, diketahui bahwa untuk BDDM yang berasal dari tahun 2018, belum bisa diselesaikan karena masih menunggu putusan pengadilan *inkracht*.

b) Direktorat SD

BDDM senilai Rp725.863.100,00 merupakan nilai Banpem yang belum lengkap LPJ, yaitu Banpem pada tahun 2018 senilai Rp108.113.100,00 dan tahun 2020 senilai Rp617.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 192. Rincian Banpem yang Belum Diterima LPJnya pada Direktorat SD

Banpem Tahun	Penerima Bantuan	Bentuk Banpem	BDDM per 31 Des 2023 (Rp)
2018	SDN Beriwit 7, Kalteng	pembangunan ruang perpustakaan	108.113.100
2020	SD Yppk Ugapuga, Papua	Bantuan TIK	88.250.000
	SD Inpres Uwotakaida, Papua		88.250.000
	SD Yppk St Stefanus Bomomani, Papua		88.250.000
	SD Negeri Unito, Papua		88.250.000
	SD Yppk Santo Paulus Tuguda, Papua		88.250.000
	SD Inpres Abouyaga, Papua		88.250.000
	SD Yppk St. Stefanus Apogomakida, Papua		88.250.000
Jumlah			**725.863.100**

Dari penjelasan PPK Banpem terkait, diketahui bahwa untuk BDDM yang berasal dari tahun 2018 dan 2020, belum dapat diselesaikan karena terkendala kesulitan komunikasi dengan penerima Banpem.

c) Direktorat PAUD

BDDM senilai Rp382.500.000,00 merupakan nilai Banpem yang belum lengkap LPJ, yaitu Banpem pada tahun 2016 senilai Rp237.500.000,00, tahun 2018 senilai Rp25.000.000,00, tahun 2021 senilai Rp30.000.000,00, dan tahun 2022 senilai Rp90.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 193. Penerima Bantuan yang Belum Menyampaikan LPJ pada Direktorat PAUD

Tahun	Jumlah Lembaga Penerima	Nilai Bantuan (Rp)
2016	5	237.500.000,00
2018	1	25.000.000,00
2021	1	30.000.000,00
2022	3	90.000.000,00
Jumlah	**10**	**382.500.000,00**

Dari penjelasan PPK Banpem terkait, diketahui bahwa atas seluruh BDDM tersebut yang berasal dari tahun 2016 hingga 2022, pada tahun 2023 tidak dilakukan kegiatan pemantauan oleh Direktorat PAUD. Seluruh LPJ tersebut belum bisa diselesaikan karena terkendala kesulitan komunikasi dengan penerima Banpem. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran C.4.1**.

3) Ditjen Diktiristek senilai Rp386.933.500,00

Saldo BDDM yang berasal dari Belanja Banpem pada Ditjen Diktiristek per 31 Desember 2023 senilai Rp15.620.067.927,00 terdiri dari BDDM dari belanja banpem tahun 2023 senilai Rp14.432.344.427,00 dan belanja banpem sebelum tahun 2023 senilai Rp1.187.723.500,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung penyajian saldo BDDM berupa formulir memo jurnal penyesuaian dan rekapitulasi progres penyampaian LPJ

BOPTN dari Sub Bagian Tata Usaha Ditdaya diketahui bahwa terdapat saldo BDDM berupa Belanja Bantuan Pendidikan Non Gelar Tahun 2021 senilai Rp386.933.500,00 kepada sepuluh Perguruan Tinggi yang belum dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penjelasan dari Operator SAKTI Ditdaya, saldo BBDM tersebut berasal dari tarikan data aplikasi transaksi keuangan yang digunakan sebelumnya yaitu aplikasi SAIBA yang kemudian atas saldo tersebut dilakukan migrasi ke aplikasi SAKTI pada Tahun 2022. Monitoring terkait saldo BBDM tersebut dilakukan melalui Forum Dikti. Rincian saldo BBDM dapat dilihat pada **Lampiran C.4.2**.

Hasil konfirmasi kepada penyusun LK Ditdaya TA 2023 terkait perkembangan kemajuan dan kendala penyelesaian saldo BDDM diketahui bahwa atas saldo BDDM berupa Belanja Bantuan Pendidikan Non Gelar 2021 senilai Rp386.933.500,00 terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum melengkapi dokumen pendukungnya sehingga belum dapat tervalidasi oleh PPK Ditdaya, namun demikian PPK Ditdaya sudah melakukan sosialisasi dan melakukan monev ke perguruan tinggi terkait.

4) Ditjen Diksi senilai Rp29.686.192.000,00

Saldo BDDM yang berasal dari Belanja Banpem pada Ditjen Diksi per 31 Desember 2023 senilai Rp34.655.742.000,00 terdiri dari BDDM dari belanja banpem tahun 2023 senilai Rp4.969.550.000,00 dan belanja banpem sebelum tahun 2023 senilai Rp29.686.192.000,00. Hasil pemeriksaan atas penyelesaian saldo BDDM sebelum tahun 2023 yang dilakukan oleh satker-satker di lingkungan Ditjen Diksi menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a) Direktorat SMK

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi pada LHP atas Sistem Pengendalian Interm dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Direktur SMK mengirimkan surat Nomor 0465/D2/WS.01.01/2024 tanggal 17 Februari 2024 kepada Inspektur IV, Itjen Kemendikbudristek perihal permohonan verifikasi dan validasi atas dokumen LPJ banpem tahun 2016 s.d. 2022.

LPJ yang akan diverifikasi dan divalidasi Inspektur IV senilai Rp223.561.653.999,00 merupakan LPJ banpem yang telah diverifikasi oleh tim verifikator Direktorat SMK dan nilai LPJ yang diyakini telah sesuai tersebut seluruhnya menjadi pengurang saldo BDDM dalam Neraca per 31 Desemer 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 194. Mutasi Kurang Saldo BDDM Direktorat SMK per 31 Desember 2023

No	Tahun	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi Kurang (LPJ DIterima) (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
1	Tahun 2016	7.947.169.000,00	616.191.000,00	7.330.978.000,00
2	Tahun 2017	10.603.485.000,00	1.428.025.000,00	9.175.460.000,00
3	Tahun 2018	1.607.000.000,00	657.000.000,00	950.000.000,00
4	Tahun 2019	3.508.069.000,00	852.675.000,00	2.655.394.000,00
5	Tahun 2020	-	-	-
6	Tahun 2021	7.950.000.000,00	150.000.000,00	7.800.000.000,00
7	Tahun 2022	219.857.762.999,00	219.857.762.999,00	-
Jumlah		**251.473.485.999,00**	**223.561.653.999,00**	**27.911.832.000,00**

Pada Tahun 2022, aplikasi Takola yang digunakan penerima bantuan untuk melaporkan LPJ penggunaan dana banpem mengalami peretasan sehingga Direktorat SMK kehilangan data pelaporan banpem Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Direktorat SMK telah melakukan verifikasi kembali atas LPJ yang dikirimkan ulang oleh sekolah penerima banpem Tahun 2022 dengan hasil saldo BDDM senilai Rp0,00 yakni semua LPJ dinyatakan telah selesai. LPJ Tahun 2022 tersebut termasuk dalam LPJ yang akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Itjen. Hasil verifikasi disampaikan oleh Inspektur IV kepada Plt. Direktur SMK dalam dua tahap, yaitu:

(1) Surat Nomor 3072/G5/WS.01.05/2024 tanggal 4 April 2024 kepada Plt. Direktur SMK perihal hasil verifikasi dan validasi terhadap LPJ banpem tahun 2016 s.d. 2022 pada Direktorat SMK; dan

(2) Surat nomor 3524/G5/WS.01.05/2024 tanggal 24 April 2024 kepada Plt. Direktur SMK perihal Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap LPJ banpem Tahun 2016 s.d. 2022 pada Direktorat SMK Ditjen Diksi.

Berdasarkan surat tersebut diketahui bahwa Tim Itjen telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap LPJ banpem tahun 2016 s.d. 2022 pada Direktorat SMK sebanyak 712 sekolah senilai Rp223.561.653.999,00. Dari jumlah tersebut, banpem yang telah diverifikasi namun tidak dapat diyakini pertanggungjawabannya adalah senilai Rp476.946.600,00. Nilai banpem yang tidak dapat diyakini tersebut merupakan sebagian LPJ pada enam sekolah dengan total nilai banpem senilai Rp1.019.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 195. Rincian Hasil Verifikasi Itjen

No	Tahun	Jumlah Sekolah	Nilai Banpem (Rp)	Nilai Bantuan yang Tidak Dapat Diyakini (Rp)
1	Tahun 2017	1	324.360.000,00	324.360.000,00
2	Tahun 2019	2	31.750.000.00	10.405.000,00
3	Tahun 2022	3	663.500.000,00	142.181.600,00
Jumlah		**6**	**1.019.610.000,00**	**476.946.600,00**

Rincian disajikan pada **Lampiran C.4.3**.

Dengan demikian, berdasarkan hasil verifikasi Itjen, nilai banpem senilai Rp1.019.610.000,00 seharusnya masih menjadi saldo BDDM per 31 Desember 2023. Atas hal tersebut telah dilakukan usulan jurnal koreksi dengan menambahkan nilai BDDM senilai Rp1.019.610.000,00.

Atas LPJ dana banpem tahun 2016 s.d. 2022 senilai Rp28.931.442.000,00 (Rp27.911.832.000,00 + Rp1.019.610.000,00) yang belum lengkap sampai dengan pemeriksaan berakhir, Direktur SMK melalui surat nomor 1184/D2/KU.03.02/2024 tanggal 22 April 2024 perihal penjelasan saldo BDDM per 31 Maret 2024 menjelaskan bahwa Direktorat SMK telah berupaya untuk menyelesaikan saldo BDDM dengan melakukan komunikasi secara daring, mengunjungi sekolah terkait dan meminta Tim Itjen Kemendikbudristek untuk memverifikasi sekolah yang masih menunggak LPJ Banpem tahun 2016 s.d 2023. Terdapat beberapa kendala yang dialami untuk mempertanggungjawabkan banpem tersebut, yaitu:

(1) LPJ sudah diterima oleh Tim Direktorat SMK namun melebihi *cut off* 31 Maret 2024;

(2) LPJ belum sesuai dengan pedoman pelaporan;

(3) Bantuan tidak dipergunakan sesuai ketentuan/dalam proses Aparat Penegak Hukum;

(4) Dokumentasi LPJ Hilang;

(5) Kepala Sekolah pelaksana bantuan sudah meninggal;

(6) Kesulitan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah pelaksana bantuan;

(7) Proses pengembalian kerugian negara yang berlarut-larut; dan

(8) Sekolah belum membuat LPJ.

b) Direktorat Suslat

Direktorat Suslat masih memiliki saldo BDDM atas penerima banpem yang belum menyampaikan LPJ Tahun 2020 s.d 2022 dan tercatat sebagai saldo BDDM per 31 Desember 2023 senilai Rp754.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 196. Rincian BDDM Periode 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Lembaga Penerima Banpem	Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah (Rp)
1	Tahun 2020	1	20	75.000.000,00
2	Tahun 2021	3	40	136.000.000,00
3	Tahun 2022	11	202	543.750.000,00
Jumlah		**15**	**262**	**754.750.000,00**

Saldo BDDM dalam tabel tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Hasil wawancara dengan pengelola banpem pada Direktorat Suslat diketahui bahwa LPJ tersebut belum disampaikan karena:

(1) LPJ Tahun 2020 Lembaga penyelenggara telah tutup dan pimpinan lembaga mengalami sakit jiwa. Surat Keterangan Disdik dan Surat Keterangan Rumah Sakit telah disampaikan kepada pengelola banpem;

(2) LPJ Tahun 2021 Pimpinan lembaga meninggal dunia, lembaga bersedia mengembalikan ke Kas Negara dan masih terdapat dana yang belum dipertanggungjawabkan; dan

(3) LPJ Tahun 2022 Belum dilakukan uji kompetensi dikarenakan peserta didik sudah bekerja.

b. BDDM pada Direktorat Belmawa senilai Rp717.600.000,00 belum ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat satu kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan penggunaan dananya sampai dengan pemeriksaan berakhir yaitu kegiatan Bantuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) TA 2019 untuk mahasiswa di lingkungan LLDikti Wilayah XIV Biak senilai Rp717.600.000,00. Penyaluran dana beasiswa PPA dilakukan melalui penyaluran dana dari Direktorat Belmawa ke rekening LLDikti Wilayah XIV Biak, untuk kemudian disalurkan ke rekening masing-masing penerima beasiswa. Total bantuan yang diberikan senilai Rp2.424.000.000,00 dan yang sudah disalurkan

kepada mahasiswa yang berhak senilai Rp1.610.400.000,00, sehingga terdapat sisa bantuan yang masih dikelola LLDikti dan belum disalurkan senilai Rp813.600.000,00 (Rp2.424.000.000,00 - Rp1.610.400.000,00).

Permasalahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dari Itjen. Berdasarkan Kertas Data Audit Itjen pada LLDikti Wilayah XIV Papua dan Papua Barat TA 2019 dengan tanggal pelaksanaan audit pada 21 Agustus s.d. 3 September 2020 yang mengungkapkan temuan antara lain terdapat pengelolaan Beasiswa PPA Tahun 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Laporan dimaksud menguraikan permasalahan terkait pengelolaan Dana Beasiswa PPA Tahun 2019 digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara senilai Rp813.600.000,00 dan tidak dapat dibuktikan pertangungjawabannya, sehingga 339 mahasiswa belum menerima dana beasiswa tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan Itjen dengan Ketua Pelaksana program PPA, Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya, Kabag Umum, Kasubag Perencanaan dan Penganggaran, Ketua SPI, dan Bendahara LLDikti Wilayah XIV Biak, menunjukkan bahwa rincian dana yang belum disalurkan sebagai berikut.

1) Tahap I untuk 17 Mahasiswa dananya yang tidak disalurkan karena rekening pasif, nomor rekening salah, rekening tidak aktif; dan
2) Tahap II untuk 322 Mahasiswa dananya yang tidak disalurkan karena dananya telah digunakan untuk keperluan lainnya yaitu keperluan operasional kantor dan penggunaan dana pribadi yang tidak dapat dibuktikan oleh bukti pertanggungjawabannya (tidak akuntabel) oleh Bendahara.

Atas temuan tersebut, Itjen merekomendasikan Kepala LLDikti Wilayah XIV selaku KPA dan Penanggung Jawab Penyaluran dana Bantuan Beasiswa PPA Tahun 2019 agar:

1) Menginstruksikan Bendahara untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang tidak akuntabel senilai Rp813.600.000,00. Sampai dengan tahun 2022 dana yang sudah dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp96.000.000,00, sehingga masih ada sisa dana yang belum disetor ke Kas Negara senilai Rp717.600.000,00;
2) Menjatuhkan hukuman disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS kepada Bendahara atas penyalahgunaan wewenang; dan
3) Membuat surat tertulis yang ditujukan kepada Irjen untuk dilakukan audit investigasi dan/atau membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) terhadap penyaluran beasiswa PPA Tahun 2019 di lingkungan LLDikti Wilayah XIV.

Berdasarkan surat pernyataan di atas materai tanggal 4 September 2020, Bendahara Pengeluaran LLDikti Wilayah XIV menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangan sebagai bendahara dengan menggunakan sisa dana tersebut tanpa ijin dan tanpa persetujuan atasan langsung maupun Kepala LLDikti XIV. Sisa dana tersebut digunakan Bendahara Pengeluaran untuk keperluan baik pribadi maupun kantor tanpa didukung bukti-bukti pertanggungjawaban.

Selanjutnya atas penggunaan dana tersebut, Bendahara Pengeluaran telah mengembalikan dengan menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp96.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 197. Penyetoran Sisa Dana Bantuan Beasiswa PPA ke Kas Negara

No	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
1.	07/04/2021	3581755DEDAU1GI5	60.000.000,00
2.	27/09/2021	251A30N9V8UF8FS0	11.000.000,00
3.	28/09/2021	A93621JNF3GSOFHD	5.000.000,00
4.	15/11/2022	8AEC52G4V7IRBQB0	10.000.000,00
5.	13/12/2022	3BA6C1JNFD3CDMCP	10.000.000,00
	Jumlah		**96.000.000,00**

Dengan demikian sisa yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp717.600.000,00 (Rp813.600.000,00 – Rp96.000.000,00).

Atas sisa dana tersebut, belum terdapat proses penyelesaian ganti kerugian negara sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berdasarkan hasil penelusuran atas dokumen terkait hal tersebut menunjukkan bahwa Direktur Belmawa melalui Surat Nomor 2009/E2/WS.03.00/2023 tanggal 28 April 2023 telah meminta Kepala LLDikti Wilayah XIV untuk menginstruksikan Bendahara untuk mempertanggungjawabkan sisa dana senilai Rp717.600.000,00 tersebut. Selanjutnya Direktur Belmawa melalui surat telah meminta Kepala LLDikti Wilayah XIV untuk membuat surat tertulis yang ditujukan kepada Irjen untuk dilakukan audit investigasi dan/atau membentuk TPKN terhadap penyaluran beasiswa PPA Tahun 2019 di lingkungan LLDikti Wilayah XIV. Kemudian, Kepala LLDikti Wilayah XIV telah mengirimkan surat Nomor 707/LL14/WS.03.00/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Permohonan Audit Investigasi kepada Irjen. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum terdapat tindak lanjut atas permohonan surat dimaksud. Lebih lanjut Satuan Pengawas Internal LLDikti Wilayah XIV menjelaskan bahwa TPKN belum dibentuk karena masih menunggu pelaksanaan audit oleh Itjen.

c. Ditjen Dikti belum mempunyai kebijakan pencatatan BDDM yang berasal dari Belanja Banpem Penelitian

Permendikbudrsitek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek menyatakan bahwa Direktorat RTPM mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi akademik dan profesi yang berasal dari pendidikan akademik. Kegiatan riset (penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa skema, antara lain *Matching Fund*, *Competitive Fund*, dan skema BOPTN Penelitian.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Direktorat RTPM berpedoman pada juknis dan panduan penelitian, yaitu Keputusan Dirjen Dikti Nomor 29/E/KPT/2023 tentang Juknis Bantuan Pendanaan Program BOPTN untuk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Panduan atas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 yang disusun oleh Tim Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Diktiristek. Secara umum, pengelolaan penelitian pada DRTPM dilakukan melalui proses seleksi proposal penelitian, penetapan penerima dana penelitian, penyaluran dana, pelaksanaan, pelaporan kemajuan, dan pemantauan/monitoring dan evaluasi.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan penelitian pada Direktorat RTPM dimuat dalam LHP BPK Nomor 08.b/LHP/XIX/05/202 tanggal 24 Mei 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan Kemendikbudristek Tahun 2022. LHP tersebut antara lain memuat permasalahan adanya penyampaian laporan akhir penelitian tidak tertib dan terdapat penelitian yang belum direviu oleh komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian. BPK merekomendasikan Dirjen Diktiristek menetapkan peraturan terkait pengalokasian BOPTN yang lengkap, dan memerintahkan bagian terkait untuk memedomani aturan tersebut.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan penelitian pada Direktorat RTPM dimuat dalam LHP BPK Nomor 14/LHP/XIX/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Tahun 2022 dan 2023 pada Dirjen Diktiristek pada Kemendikbudristek. LHP tersebut antara lain memuat permasalahan adanya penyampaian laporan kemajuan penelitian yang tidak tertib. BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan Dirjen Diktiristek agar melakukan pemutakhiran juknis panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memantau penyelesaian atas proposal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi terhambat penyelesaiannya.

Rekomendasi tersebut ditindak lanjuti Kemendikbudrsitek melalui penerbitan SE tentang kebijakan akuntansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum mengatur kebijakan pencatatan akuntansi atas belanja penelitian yang belum dipertanggungjawabkan s.d. 31 Desember tahun berkenaan.

Analisis lebih lanjut atas juknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Juknis belum menjelaskan kriteria output kegiatan penelitian yang menjadi dasar pencatatan akuntansi atas penyajian BDDM. Hasil analisis menunjukkan bahwa juknis telah mengatur kriteria tahapan luaran penelitian dan validitas penilaian luaran. Kriteria tahapan luaran penelitian antara lain berupa kategori luaran, jenis luaran, status artikel di jurnal berupa *accepted* atau *published*, dan bukti luaran. Sedangkan validitas penilaian luaran antara lain berupa kriteria kelayakan luaran, bukti pendukung luaran, dan keterangan tidak validnya luaran. Selain itu, juknis menyatakan bahwa peneliti/pelaksana berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir. Ketua Tim peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui aplikasi BIMA.

   Sesuai uraian tersebut, terdapat dua output kegiatan penelitan, yakni laporan akhir penelitian dan luaran. Namun demikian, Ditjen Diktiristek belum menjelaskan output kegiatan penelitian yang menjadi dasar pencatatan akuntansi atas penyajian BDDM. Selain itu, Ditjen Diktiristek juga belum merumuskan kebijakan terkait pencatatan akuntansi atas sisa dana penelitian yang belum dilengkapi laporan akhir penelitian.

2) Ditjen Diktiristek belum mengatur mekanisme rekonsiliasi antara PPK kegiatan penelitian dengan Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Direktorat RTPM. Sesuai juknis, PPK melakukan monitoring penyelesaian kegiatan penelitian melalui aplikasi Bima, namun belum terdapat mekanisme penyampaian data progres laporan akhir kepada Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Hal tersebut menyebabkan Direktorat RTPM tidak memiliki pedoman untuk melakukan monitoring atas sisa dana penelitian yang akan disajikan sebagai BDDM pada laporan keuangan.

d. Perbedaan cara pengakuan saldo BDDM pada satker di lingkungan Ditjen Diksi

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat perbedaan cara pengakuan saldo BDDM di lingkungan Ditjen Diksi dengan uraian sebagai berikut.

1) Direktorat SMK

Secara umum proses pelaksanaan banpem dimulai dari masa persiapan yang dilakukan oleh Direktorat SMK, antara lain berupa sosialisasi atas banpem kepada calon penerima. Calon penerima banpem kemudian mengajukan usulan banpem melalui aplikasi Takola dan dilanjutkan dengan seleksi calon penerima banpem oleh Direktorat SMK, penetapan penerima banpem dengan terbitnya SK penerima banpem, bimtek, penyaluran dana banpem kepada penerima banpem, pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan, supervisi pelaksanaan oleh Direktorat SMK, monitoring dan pelaporan oleh penerima bantuan melalui aplikasi Takola.

Direktorat SMK melakukan monitoring atas kewajiban penerima bantuan untuk melaporkan kegiatan dan penggunaan dana banpem melalui aplikasi Takola. Pada aplikasi Takola, laporan dikategorikan sebagai:

a) Laporan 0% yaitu laporan awal pada saat penerima menerima bantuan;

b) Laporan 50% yaitu laporan pelaksanaan kegiatan dengan jumlah penggunaan dana senilai 50% dan/atau pekerjaan fisik sudah mencapai 50%; dan

c) Laporan Akhir 100% yaitu laporan penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana.

Verifikator melakukan reviu atas kesesuaian laporan tersebut dengan Pedoman Pelaporan banpem Direktorat SMK yang diterbitkan oleh Direktur SMK. Pedoman tersebut merinci dokumen apa saja yang harus ada untuk setiap tahap pelaporan termasuk diantaranya dokumen-dokumen bukti pengeluaran (SPJ) seperti foto kegiatan, foto sebelum dan sesudah untuk pekerjaan fisik, dokumen pengadaan pekerjaan fisik, dokumen pelaksanaan kegiatan (surat undangan, Surat Tugas, daftar hadir dan notulen), surat pemesanan untuk pengadaan peralatan (SPK, nota, kuitansi, BAST), lembar pengesahan laporan akhir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan masih banyak lagi dokumen lain sesuai dengan jenis penggunaan banpem. Jika LPJ dan SPJ dianggap telah sesuai/telah mengirimkan seluruh dokumen sesuai pedoman, akan diakui sebagai laporan yang telah selesai. Namun jika tidak sesuai, verifikator akan memberikan komentar atas kekurangan dokumen dalam laporan dan penerima banpem diharuskan memperbaiki LPJ tersebut.

LPJ yang telah disampaikan oleh penerima bantuan namun belum lulus verifikasi akan tercatat sebagai saldo BDDM sampai dengan laporan tersebut dinyatakan lulus oleh verifikator. Untuk laporan yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan dalam juknis dan pedoman pelaporan, penerima bantuan belum dapat diakui telah menyelesaikan kewajibannya.

Dalam Surat Sekjen Kemendikbudristek Nomor 0641/A.A2/KU.03.02/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Langkah-langkah dan Kebijakan Akuntansi Penyusunan LK Kemendikbudristek Tahun 2023 menyatakan bahwa atas banpem yang telah disalurkan namun belum diterima LPJ, maka diakui sebagai "Belanja Dibayar di Muka" dan menjadi pengurang "Beban Bantuan Pemerintah". Surat tersebut hanya menyebutkan

LPJ diterima. Sedangkan pada Pedoman Pelaporan Banpem Direktorat SMK yang diterbitkan oleh Direktur SMK mengatur sampai dengan kelengkapan dan verifikasi SPJ sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan verifikasi.

2) Direktorat Suslat

Secara umum proses pelaksanaan banpem dimulai dari sosialisasi banpem Direktorat Suslat kepada calon penerima, pembukaan aplikasi dan pengusulan proposal oleh calon penerima bantuan secara *online* pada masing-masing *website* banpem di https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id, seleksi calon penerima bantuan, penetapan penerima banpem melalui SK penerima banpem, bimtek, pemberkasan (MoU dan Laporan Awal), penyaluran dana banpem kepada penerima banpem, pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan, monitoring penyelenggaraan oleh Direktorat Suslat dan pelaporan oleh penerima bantuan melalui *website* masing-masing bantuan.

Direktorat Suslat melakukan monitoring atas kewajiban penerima bantuan untuk melaporkan kegiatan dan penggunaan dana banpem melalui *website* https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id. Pada *website* tersebut, laporan dikategorikan sebagai Laporan Belum Selesai (*website* akan menunjukkan status tahapan pelaksaaan banpem seperti pembelajaran maupun pengisian laporan akhir) dan Laporan Selesai.

Hasil wawancara dengan Kasubag TU diketahui bahwa lembaga penerima banpem wajib melaporkan pelaksanaan pembelajaran harian dan penggunaan dana secara *online* sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Lembaga penerima banpem dianggap telah menyelesaikan kewajibannya ketika lembaga telah menyampaikan LPJ pada masing-masing *website* banpem di https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat satu Juknis Banpem yang tidak mengatur jangka waktu penyampaian LPJ yaitu Juknis Banpem Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Dirjen Diksi Nomor 03 Tahun 2023. Hasil wawancara dengan PPK diketahui bahwa PPK lupa mencantumkan klausul terkait jangka waktu penyampaian LPJ lembaga penerima bantuan saat penyusunan juknis banpem. Pengaturan jangka waktu penyampaian LPJ oleh penerima bantuan dalam juknis diperlukan agar penerima bantuan dapat menyampaikan LPJ tepat waktu sehingga pertanggungjawaban atas penggunaan banpem dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

Kasubag TU menjelaskan bahwa jangka waktu penyampaian LPJ diatur dalam MOU antara PPK dengan penerima bantuan penyelenggaran uji kompetensi, yang di dalamnya mencantumkan pernyataan bahwa penerima banpem menyampaikan laporan paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Pada tahun 2023 lembaga penerima bantuan penyelenggara uji kompetensi telah menyampaikan laporan sebelum tanggal 31 Desember 2023.

3) Direktorat APTV dan Direktorat KLSD

Direktorat APTV dan Direktorat KLSD tidak pernah mencatat saldo BDDM yang berasal dari belanja banpem. Berdasarkan penjelasan tim pokja banpem, diketahui bahwa tim pokja tidak mengetahui prosedur pencatatan BDDM atas LPJ banpem yang belum disampaikan oleh penerima bantuan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada Direktorat APTV dan Direktorat KLSD hanya melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan yang ditentukan sebagai LPJ sesuai juknis dan tidak melakukan verifikasi sampai dengan SPJ. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja pemerintah diketahui bahwa pada Direktorat APTV terdapat penerima banpem yang belum menyampaikan LPJ sampai dengan 31 Maret 2024 senilai Rp265.250.000,00 sebagai berikut.

a) Terdapat tujuh mahasiswa penerima banpem PKM yang belum menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir senilai Rp46.250.000,00; dan

b) Terdapat delapan penerima banpem P2MD yang belum mengunggah Laporan Akhir secara lengkap senilai Rp219.000.000,00.

Terhadap LPJ banpem yang belum disampaikan kepada Direktorat APTV dan Direktorat KLSD per 31 Maret 2023 senilai Rp265.250.000,00 tersebut telah dikoreksi sebagai penambah saldo BDDM pada Neraca Ditjen Diksi Tahun 2023.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan BBP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara

   1) Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Atasan langsung bendahara atau kepala satker wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui; dan

   2) Pasal 8 yang menyatakan bahwa Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

b. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Banpem di Kemendikbud yang telah diubah terakhir dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020:

   1) Pasal 15:

      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan masing-masing Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam juknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan; dan

      b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa juknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar hukum, tujuan penggunaan belanja bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, LPJ bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

   2) Pasal 16 yang menyatakan bahwa KPA melakukan monev terhadap pelaksanaan penyaluran dana bantuan sesuai dengan juknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

   3) Pasal 17:

      a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;

b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya; dan

c) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Penerima bantuan harus menyampaikan LPJ kepada KPA.

4) Pasal 19:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa KPA melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dana bantuan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan di bidang Pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

c. PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Bab IV Transaksi Keuangan dan BMN Huruf C Transaksi Keuangan angka 14 Transaksi Penyesuaian Poin C Belanja/Beban Dibayar Di Muka adalah pengeluaran kas atau belanja yang manfaatnya melampaui TAB, sehingga pada tahun anggaran berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima oleh pemerintah akibat pembayaran tersebut. Selain itu, belanja/beban dibayar di muka juga merupakan pembayaran atau pengeluaran belanja kepada pihak ketiga namun sampai dengan akhir tahun anggaran pemerintah belum menerima barang/jasa sebagai imbal balik dari pihak ketiga tersebut atau belum menerima pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja tersebut sebagaimana yang dipersyaratkan oleh regulasi terkait

d. Surat Nomor 0641/A.A2/KU.03.02/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Langkah-langkah dan Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 Huruf C Angka 3 – Kebijakan Akuntansi dalam rangka penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 (*unaudited*) di lingkungan Kemendikbudristek terkait Banpem yang menyatakan bahwa:

1) Pada tanggal pelaporan, harus dilakukan penyesuaian nilai beban banpem apabila terdapat banpem yang belum disalurkan atau telah disalurkan namun belum diterima pertanggungjawabannya oleh satker pemberi bantuan; dan

2) Penyesuaian beban banpem pada tanggal pelaporan dengan ketentuan antara lain banpem telah disalurkan namun belum diterima LPJ-nya, maka diakui sebagai "Belanja Dibayar di Muka" dan menjadi pengurang "Beban Bantuan Pemerintah".

Hal tersebut mengakibatkan:

a. BDDM tidak menggambarkan manfaat yang akan diterima pada tahun berikutnya;

b. Banpem tahun 2016-2022 yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp41.324.266.746,00 berpotensi tidak akuntabel;

c. Indikasi kerugian negara atas BDDM pada Ditjen Diktiristek senilai Rp717.600.000,00; dan

d. Penyajian BDDM dari belanja banpem pada Ditjen Diksi kurang andal sebagai akibat inkonsistensi pencatatan BDDM.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kemendikbudristek belum mempunyai kebijakan yang mengatur pencatatan BBDM dari Belanja Banpem terutama banpem penelitian;
b. Kepala LLDikti Wilayah XIV tidak segera menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap bendahara di unit kerjanya sesuai ketentuan;
c. Kepala satker Eselon 1 dan KPA pada satker terkait kurang optimal dalam melaksanakan monev, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. PPK Belanja Banpem pada satker terkait kurang optimal dalam berkoordinasi dengan penerima banpem agar segera menyampaikan LPJ.

Atas permasalahan tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan penyajian telah dilakukan penyesuaian/koreksi pada laporan keuangan tahun 2023. Kemendikbudristek berkomitmen terus mengupayakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran banpem.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar:

a. Menyusun kebijakan yang mengatur pencatatan BDDM dari Belanja Banpem terutama Banpem penelitian;
b. Menginstruksikan kepada Sekjen supaya:
    1) Memerintahkan Kepala Puslapdik untuk lebih mengoptimalkan penagihan kepada perguruan tinggi yang menerima mahasiswa ADik agar segera menyampaikan LPJ penggunaan dana yang diterimanya; dan
    2) memerintahkan kepada Kepala LLDikti XIV untuk segera menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap bendahara di unit kerjanya senilai Rp717.600.00,00 sesuai ketentuan;
c. Menginstruksikan Sekjen, Dirjen PDM, Dirjen Diktiristek, dan Dirjen Diksi supaya:
    1) Lebih optimal dalam melaksanakan monev, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang menjadi tanggung jawabnya;
    2) Memerintahkan kepada PPK Belanja Banpem untuk meningkatkan koordinasi dengan penerima banpem agar segera menyampaikan LPJ; dan
d. Irjen melakukan verifikasi atas LPJ atas Banpem tahun 2016 s.d. 2022 yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp41.324.266.746,00.

5. Pengelolaan Piutang pada Unit Kerja di Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan

Neraca Kemendibudristek per 31 Desember 2023 (*audited*) menyajikan saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Piutang Bukan Pajak, dan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebagai berikut.

Tabel 198. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang Bukan Pajak, dan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Neraca per 31 Desember 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	76.301.818.308	95.567.389.128,00	(20,16)
Piutang Bukan Pajak (bruto)	35.134.531.551	44.949.257.892,00	(21,84)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(6.989.290.294,00)	(7.238.069.130,00)	(3,44)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (bruto)	223.868.946.781	229.957.810.576,00	(2,65)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(64.615.387.637,00)	(66.541.790.387,00)	(2,90)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan piutang pada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Penyajian Piutang belum didukung sistem yang memadai

1) Tunggakan UKT pada UNJ, Unsika, UHO, dan UMRAH belum tersaji sebagai piutang

LHP BPK atas SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kemendikbudristek Tahun 2022 Nomor 08.b/LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah mengungkapkan permasalahan penyajian piutang. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek agar: (1) Menginstruksikan Rektor PTN terkait untuk menetapkan pedoman pengelolaan piutang dan melakukan inventarisasi atas seluruh data penanggung piutang; dan (2) Membuat kebijakan akuntansi terkait piutang. Kedua rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan piutang menunjukkan bahwa terdapat beberapa unit kerja Ditjen Diktiristek yang belum melakukan pencatatan tunggakan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang belum lunas per 31 Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut.

Dalam rangka mendukung perkuliahan mahasiswa, Pimpinan PTN memberikan fasilitas pembayaran UKT secara mengangsur bagi mahasiwa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Dalam hal mahasiswa memanfaatkan fasilitas ini, mahasiswa terlebih dahulu mengajukan surat permohonan ke Rektor dengan melampirkan berkas pendukung sebagai bukti penurunan kemampuan ekonomi. Permohonan yang sudah disetujui oleh rektor tersebut, akan menjadi dasar penyesuaian tagihan UKT mahasiwa. Penyesuaian tagihan pada sistem pembayaran dilakukan oleh UPT TIK atau lembaga sejenis.

Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi pembayaran UKT mahasiswa, yaitu Bendahara Penerimaan, Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), dan UPT TIK. Bendahara penerimaan bertugas untuk mencatat penerimaan UKT setiap mahasiswa. UPT TIK bertugas untuk memastikan bahwa pembayaran mahasiswa sudah sesuai dengan tagihan yang terdapat pada sistem pembayaran. BAK bertugas untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa aktif sudah melalukan pembayaran dan tagihan *outstanding* sudah terposting pada sistem akademik (dalam hal sistem akademik dapat mengakomodir hal tersebut). Rekonsiliasi data oleh ketiga pihak ini kemudian menghasilkan data tagihan yang belum terbayarkan per mahasiswa. Data ini kemudian akan menjadi dasar pencatatan piutang pendidikan/piutang operasional BLU oleh Tim Pelaporan LK.

Hasil pemeriksaan pada data sistem pembayaran UKT, data penerimaan pembayaran UKT, dan saldo piutang pada LK menunjukkan bahwa masih terdapat tunggakan UKT yang belum diungkapkan dalam Neraca satker. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 199. Rekapitulasi Tunggakan UKT Belum Lunas per 31 Desember 2023

Kode Semester	Periode Perkuliahan	Jumlah Tunggakan (Rp)	Piutang UKT Mahasiswa yang tersaji pada Neraca Tahun 2023 (Rp)	Lampiran
UNJ				
116	Genap 2021 /2022	27.250.000,00		Lampiran C.5.1
117	Ganjil 2022 /2023	28.520.000,00		
118	Genap 2022 /2023	2.288.236.000,00		
119	Ganjil 2023 /2024	4.467.427.800,00		
Total		**6.811.433.800,00**	**692.365.000,00**	
Unsika				
2023.1	Genap 2022/2023	4.000.000,00		Lampiran C.5.2
2023.2	Ganjil 2023/2024	709.100.000,00		
Total		**713.100.000,00**	**375.666.667,00**	
UHO				
2020.2	Ganjil 2020/2021	14.000.000,00		Lampiran C.5.3
2021.1	Genap 2020/2021	3.200.000,00		
2021.2	Ganjil 2021/2022	5.950.000,00		
	Total	**23.150.000,00**		
	Jumlah	**7.547.683.800,00**	**1.068.031.667,00**	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tiga PTN tersebut terdapat tunggakan UKT senilai Rp7.547.683.800,00 per 31 Desember 2023 yang belum disajikan pada Neraca. Hasil pengujian lebih lanjut atas data tunggakan UKT Mahasiswa serta klarifikasi dengan bendahara penerimaan, staf pada UPT TIK, dan staf pada BAK pada PTN yang menjadi uji petik, menunjukkan bahwa:

a) UNJ

Piutang UKT Mahasiswa senilai Rp692.365.000,00 yang sudah disajikan dalam Neraca merupakan tunggakan UKT Mahasiswa untuk semester Genap 2021 /2022 dan Ganjil 2022 /2023. Tunggakan UKT Mahasiswa senilai Rp6.811.433.800,00 belum dilakukan rekonsiliasi antara bagian UPT TIK dengan Bagian Pelaporan LK sehingga tunggakan UKT yang belum disajikan pada Piutang dari Kegiatan Operasional UNJ senilai Rp6.811.433.800,00. Rincian pada **lampiran C.5.1**.

b) Unsika

Piutang UKT senilai Rp375.666.667,00 merupakan tunggakan UKT Ganjil 2023/2024 yang belum lunas sampai dengan 31 Desember 2023. Tunggakan UKT Mahasiswa senilai Rp713.100.000,00 belum dilakukan rekonsiliasi antara bagian UPT TIK dengan Bagian Pelaporan Laporan Keuangan. sehingga tunggakan UKT yang belum disajikan pada Piutang dari Kegiatan Operasional Unsika senilai Rp713.100.000,00. Rincian pada **lampiran C.5.2**.

c) UHO

UHO tidak menyajikan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 atau senilai Rp0,00. Namun demikian hasil penelusuran pada rekening

operasional penerimaan UHO menunjukkan bahwa pada tahun 2024 masih terdapat pembayaran angsuran UKT untuk semester Ganjil 2020/2021, Genap 2020/2021, dan Ganjil 2021/2022. Bendahara Penerimaan menjelaskan bahwa pembayaran tersebut merupakan kebijakan dari Rektor UHO untuk memberikan fasilitas angsuran UKT selama terjadinya pandemi COVID-19, yakni pada Semester I Tahun 2020 s.d Semester II Tahun 2021.

BPK telah meminta data catatan nilai besaran angsuran UKT Mahasiswa yang menerima fasilitas keringanan tersebut Namun demikian UHO hanya dapat menyampaikan data cicilan UKT Mahasiswa yang mengajukan pembayaran secara mengangsur pada Semester I Tahun 2020, s.d Semester II Tahun 2021 tanpa menyampaikan nilai tunggakannya. Bendahara Penerimaan menjelaskan bahwa nilai tunggakan pada mahasiswa terkait baru dapat diketahui nilainya menjelang mahasiswa terkait akan melaksanakan sidang tugas akhir.- Adapun data mahasiswa yang mengajukan pembayaran secara mengangsur pada Semester I Tahun 2020, s.d Semester II Tahun berjumlah 11.737 mahasiswa dengan rincian terdapat pada **Lampiran C.5.3**.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat Piutang pada Kegiatan Operasional BLU dari Piutang UKT dilingkungan UHO atas 11.737 mahasiswa yang mengajukan angsuran UKT belum disajikan.

d) UMRAH

Pada awal semester ganjil tahun akademik 2023/2024, Rektor UMRAH menerbitkan SE Nomor 3767/UN53.04/KU.01.02/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang kebijakan keringanan pembayaran UKT mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024. Dalam SE tersebut, mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembayaran UKT dapat mengajukan permohonan pembayaran secara mencicil/mengangsur maksimal selama dua kali. Alasan permohonan yang dapat diajukan yaitu pada semester berjalan terjadi penurunan keadaan ekonomi orang tua/wali yang membiayai dikarenakan sedang sakit keras atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Permohonan tersebut dilengkapi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menerbitkan surat tersebut.

Angsuran pertama dibayar senilai 50% dari besaran UKT dan angsuran kedua dibayarkan senilai 50% pada dua minggu sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024. Berdasarkan Kalender Akademik UMRAH, UAS dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 29 Desember 2023. Mahasiswa yang ingin mendapatkan keringanan tersebut melakukan pengajuan dengan melampirkan data dukung yang menggambarkan kondisi penurunan ekonomi dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya UMRAH melakukan proses verifikasi dan validasi atas permohonan dari mahasiswa. Penerima keringanan yang dinyatakan berhak mendapatkan keringanan selanjutnya ditetapkan melalui SK Rektor UMRAH Nomor 1293/UN53/KU/2023 tentang Keringanan UKT Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 UMRAH.

Hasil pemeriksaan atas pembayaran UKT yang dibayarkan secara mencicil tersebut menunjukkan bahwa per 31 Desember 2023 masih terdapat 19 mahasiswa yang belum melunasi cicilannya senilai Rp27.650.000,00. Informasi dimaksud diperoleh dari data yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dengan membandingkan antara

penerimaan pembayaran cicilan di Rekening Bendahara Penerimaan dengan mahasiswa yang mendapatkan keringanan sesuai SK Rektor tersebut secara manual.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan atas nilai tunggakan tersebut sudah dibayarkan di tahun 2024 senilai Rp8.400.000,00 sehingga sisa tunggakan yang belum dibayarkan sampai dengan pemeriksaan berakhir adalah senilai Rp19.250.000,00. Atas tunggakan per 31 Desember 2023 senilai Rp27.650.000,00 tersebut UMRAH belum melakukan penagihan dan menyajikan sebagai Piutang PNBP. Rincian pada **lampiran C.5.4.**

Atas hal tersebut, Bendahara Penerimaan dan Penyusun Laporan Keuangan menjelaskan salah satu hambatan tidak dapat disajikannya Piutang PNBP tersebut adalah bahwa aplikasi sistem akademik UMRAH belum mendukung pencatatan pembayaran cicilan UKT yang diterapkan kepada mahasiswa, sehingga penagihan belum dilakukan secara maksimal.

Koordinator Keuangan pada masing- masing satker menjelaskan bahwa tunggakan UKT belum dapat disajikan sebagai nilai Piutang pada Kegiatan Operasional BLU karena harus terlebih dahulu memastikan status mahasiswa tersebut. Hal ini mempertimbangkan Surat Sekjen Kemenristekdikti Nomor 4247/A.A3/KU/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Perlakuan Akun Piutang satker Pasca Penertiban Data Piutang 2018. Salah satu poin pada surat tersebut menyebutkan bahwa satker dapat melakukan koreksi piutang apabila penanggung piutang terbukti tidak menerima layanan pendidikan (cuti atau *drop out*) atau layanan lainnya yang menimbulkan piutang. Sehingga, hal tersebut menjadi dasar kehati-hatian dalam mengakui piutang.

2) Tunggakan atas IPI belum tersaji pada Piutang satker Ditjen Diktiristek

Pimpinan PTN memberikan fasilitas pemberian cicilan IPI kepada mahasiswa. Besaran IPI per mahasiswa beserta jatuh tempo dan jumlah angsurannya diatur dalam perjanjian antara mahasiswa/orang tua mahasiswa dan pimpinan PTN. Nilai IPI dan jumlah angsurannya yang tertuang pada perjanjian menjadi dasar UPT TIK dalam menyesuaikan tagihan IPI pada sistem pembayaran. Sama halnya dengan UKT, data tunggakan IPI pada tahun berjalan adalah hasil rekonsiliasi antara Bendahara Penerimaan, UPT TIK, dan pihak yang menatausahakan perjanjian IPI/ Bagian Akademik (dapat berupa Kantor WR II, BAK, atau Fakultas).

Hasil pemeriksaan terhadap data tagihan IPI dari UPT TIK dan data pembayaran dari Bagian Keuangan menunjukkan bahwa bahwa terdapat tunggakan IPI yang belum lunas per 31 Desember 2023 namun belum diungkapkan dalam Neraca dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 200. Rekapitulasi Tunggakan IPI Belum Lunas per 31 Desember 2023

PTN	Nilai Tunggakan (Rp)	Piutang IPI yang tersaji pada Neraca TA 2023 (Rp)	Lampiran
Unsika	3.344.600.000,00	12.933.857.500,00	Lampiran C.5.5
UNJ	1.425.500.000,00	663.375.000,00	Lampiran C.5.6
UPNV Jakarta	1.121.850.000,00	0	Lampiran C.5.7
Total	**5.891.950.000,00**	**13.597.232.500,00**	

Nilai tunggakan tersebut belum disajikan pada Neraca karena proses rekonsiliasi antara Bagian Keuangan dengan Bagian Akademik belum teridentifikasi seluruhnya. Hasil pengujian atas rincian data piutang dan data tunggakan IPI Mahasiswa, menunjukkan bahwa:

a) Unsika

Neraca Unsika Tahun 2023 menyajikan piutang IPI pada akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima senilai Rp12.933.857.500,00. Adapun nilai tersebut merupakan nilai tunggakan IPI yang belum lunas sampai dengan 31 Desember 2023 atas mahasiswa baru jalur mandiri pada tahun 2020 s.d. 2022 dan belum termasuk tunggakan IPI atas mahasiswa baru jalur mandiri pada tahun 2023 senilai Rp3.344.600.000,00. Rincian pada **Lampiran C.5.5**.

b) UNJ

Neraca UNJ Tahun 2023 menyajikan piutang IPI pada akun Piutang dari Kegiatan Operasional BLU dengan nilai total Rp663.375.000,00. Adapun angka ini seluruhnya adalah tunggakan IPI mahasiswa baru jalur mandiri pada Tahun 2022 saja dan belum termasuk tunggakan IPI atas mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2021 dan 2023 senilai Rp1.425.500.000,00. Rincian pada **Lampiran C.5.6**.

c) UPN Veteran Jakarta

UPN Veteran Jakarta tidak menyajikan tunggakan IPI pada Neraca Tahun 2023. Namun, berdasarkan data pembayaran IPI pada aplikasi keuangan UPN Veteran Jakarta diketahui bahwa terdapat tunggakan IPI atas mahasiswa baru jalur mandiri Tahun 2023 senilai Rp1.121.850.000,00. Rincian pada **Lampiran C.5.7.**

d) UMRAH

Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, UMRAH telah melakukan pemungutan IPI kepada mahasiswa baru Prodi Kedokteran melalui jalur seleksi mandiri. Pemungutan IPI tersebut berdasarkan SK Rektor UMRAH Nomor 915/UN53/KU/2023 tentang Besaran IPI Mahasiswa Baru Prodi Kedokteran Jalur Seleksi Mandiri di Lingkungan UMRAH.

Berdasarkan SK tersebut pembayaran IPI dapat dilakukan dengan termin pelunasan sebagai berikut.

(1) Termin 1 senilai 50% di Semester Pertama;

(2) Termin 2 senilai 25% di awal Semester Dua; dan

(3) Termin 3 senilai 25% sebelum berakhir Semester Dua.

Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 terdapat 32 mahasiswa yang diterima dan masing-masing mahasiswa wajib membayar IPI senilai Rp150.000.000,00. Sesuai ketentuan dalam SK tersebut kewajiban pembayaran IPI pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 adalah senilai 75.000.000,00 (50% x Rp150.000.000,00).

Hasil pemeriksaan atas pembayaran IPI tersebut menunjukkan bahwa per 31 Desember 2023 masih terdapat 12 mahasiswa yang belum melunasi IPI senilai 50% atau masing-masing mahasiswa senilai Rp75.000.000,00. UMRAH belum

melakukan penagihan dan menyajikan sebagai Piutang PNBP. Selain itu, UMRAH belum melakukan penagihan karena UMRAH belum memiliki mekanisme penagihan piutang PNBP.

Lebih lanjut, Bendahara Penerimaan pada masing-masing Satker menjelaskan bahwa penatausahaan atas IPI yang dilakukannya hanya atas data pembayaran saja dan data perjanjian IPI tidak ditembuskan ke Bendahara Penerimaan.

3) Pencatatan Piutang belum didukung dokumen sumber yang memadai

Hasil pengujian secara uji petik atas penyajian piutang satker di Kemendikbudristek diketahui bahwa terdapat permasalahan pencatatan yang belum didukung dokumen sumber pencatatan yang memadai, dengan uraian sebagai berikut.

a) Unpatti

Unpatti menyajikan menyajikan saldo Piutang Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp369.001.134,00 dan Rp456.405.134,00. Saldo tersebut tidak mengalami mutasi selama tahun 2023. Saldo piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Piutang BLU Pelayanan Pendidikan) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp39.544.750.000,00 dan Rp17.866.375.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pengelolaan piutang dan wawancara dengan petugas terkait diketahui bahwa terdapat data mahasiswa yang perlu diverifikasi dan divalidasi kembali terkait pengakuan piutang pada Unpatti. Data ini akan diperbaiki sesuai hasil verifikasi dan validasi ulang dari Tim Penertiban Piutang Unpatti Tahun 2023 yang ditetapkan melalui SK Rektor Nomor: 194/UN13/SK/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Penertiban Piutang Mahasiswa Unpatti Tahun 2023 karena piutang yang ditagih tidak sesuai dengan aturan pengakuan piutang. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Piutang BLU Pelayanan Pendidikan) ini merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan pendidikan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya oleh mahasiswa.

Saldo Piutang Pelayanan Pendidikan per 31 Desember 2023 merupakan akumulasi seluruh biaya pendidikan yang belum terbayar sampai dengan semester Ganjil 2023/2024, yang belum dilunasi s.d tanggal pelaporan. Jumlah mahasiswa yang belum melunasi piutang biaya pendidikan berjumlah 5.442 mahasiswa. Piutang Biaya Pendidikan dikategorikan seluruhnya sebagai Piutang Lancar senilai Rp39.544.750.000,00, karena atas semua piutang tersebut belum pernah dibuatkan surat tagihannya. Surat Penagihan Piutang direncanakan akan mulai dibuat setelah pembayaran UKT Semester Genap 2023/2024 ditutup. Piutang ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Penetapan Piutang Unpatti Tahun 2023 pada tanggal 7 Januari 2024.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengelolaan piutang di Unpatti dilakukan oleh Sub Bagian Anggaran PNBP pada BUK, dan Tim Unit Bisnis yang ada di Unpatti. Dalam pengelolaan Piutang tersebut Unpatti hanya memiliki SOP pelunasan pendapatan yang masih harus diterima dan pelunasan piutang. Unpatti belum memiliki kebijakan pengelolaan piutang yang ditetapkan melalui peraturan/keputusan Rektor;

(2) Piutang yang ada di Unpatti adalah piutang yang berasal dari UKT mahasiswa, yang tidak membayar UKT pada saat jatuh tempo yakni saat periode pembayaran UKT semester berjalan ditutup. Mahasiswa yang tidak membayar UKT di semester berjalan, akan dicatat dan diinventarisasi piutangnya serta akan dimasukkan dan ditambahkan ke dalam tagihan pada semester berikutnya dan seterusnya. Tagihan tersebut dapat dicetak oleh setiap mahasiswa melalui aplikasi Sirang (https://sirang.unpatti.ac.id/) pada saat periode pembayaran semester berjalan telah dibuka;

(3) Atas piutang tersebut, Kepala BUK menjelaskan bahwa sudah dilakukan penagihan atas piutang-piutang tersebut yakni dengan memasukkan nilai piutang ke dalam tagihan mahasiswa, setiap kali pembayaran UKT semester berjalan dibuka. Tagihan tersebut dapat dicetak oleh setiap mahasiswa melalui aplikasi Sirang (https://sirang.unpatti.ac.id/) pada saat periode pembayaran semester berjalan telah dibuka. Selain itu, data Piutang UKT setiap semester dikirimkan ke pihak Fakultas dan jika periode pembayaran telah ditutup dan mahasiswa ingin melunasi piutangnya, maka pihak Fakultas harus membuat surat permohonan pelunasan pembayaran piutang yang ditandatangani oleh Dekan dan dikirimkan ke Rektor atau Wakil Rektor sehingga bisa diproses oleh Bendahara Penerimaan apabila sudah menerima disposisi atas surat permohonan tersebut;

(4) Kepala BUK menjelaskan bahwa pencatatan melalui mekanisme yang dijelaskan sebelumnya tidak memperhatikan status mahasiswa pada saat itu, apakah masih aktif atau sudah tidak aktif lagi. Seluruh mahasiswa yang terdaftar pada aplikasi Sirang saat itu otomatis akan langsung ditagih pembayaran untuk semester berjalan. Kasubbag Sarana Pendidikan Akademik dari Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat menjelaskan bahwa masih terdapat kemungkinan bahwa mahasiswa yang ditagih pada semester tersebut merupakan mahasiswa yang sudah tidak aktif, baik karena sudah lulus maupun alasan lain. Namun karena belum terdapat keterangan terkait kelulusan atau kondisi lain (*drop out*) yang di-*input* ke dalam aplikasi tersebut maka data mahasiswa tersebut tetap ada di dalam aplikasi Sirang dan tetap ditagih;

(5) Kepala BUK selanjutnya menjelaskan bahwa Unpatti berupaya untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali atas mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam daftar piutang tersebut melalui konfirmasi langsung ke fakultas-fakultas terkait.

b) Unmul

Neraca Unmul per 31 Desember 2023 menyajikan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp12.952.323.000,00 atau tidak terdapat perubahan. Nilai piutang per 31 Desember 2023 tersebut antara lain terdapat piutang yang berstatus lancar senilai Rp3.729.000.000,00 dengan total penyisihan piutang senilai Rp18.645.000,00 (0,5%) dan piutang yang berstatus macet senilai Rp9.223.323.000,00 dengan total penyisihan piutang senilai Rp9.223.323.000,00 (100%). Adapun rincian piutang dari kegiatan operasional BLU Unmul per 31 Desember 2023 dari masing-masing fakultas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 201. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Unmul per 31 Desember 2023

No.	Fakultas	Piutang (Rp)	Piutang Lancar (Rp)	Penyisihan Piutang Lancar (Rp)	Piutang Macet (Rp)	Penyisihan Piutang Macet (Rp)
1	Ekonomi dan Bisnis	1.163.395.000,00	25.800.000,00	(129.000,00)	1.137.595.000,00	(1.137.595.000,00)
2	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	7.034.030.000,00	3.062.800.000,00	(15.314.000,00)	3.971.230.000,00	(3.971.230.000,00)
3	Pertanian	334.173.000,00	139.400.000,00	(697.000,00)	194.773.000,00	(194.773.000,00)
4	Kehutanan	693.220.000,00	125.550.000,00	(627.750,00)	567.670.000,00	(567.670.000,00)
5	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1.395.205.000,00	55.650.000,00	(278.250,00)	1.339.555.000,00	(1.339.555.000,00)
6	Perikanan dan Ilmu Perikanan	215.000.000,00	14.500.000,00	(72.500,00)	200.500.000,00	(200.500.000,00)
7	Teknik	381.100.000,00	119.650.000,00	(598.250,00)	261.450.000,00	(261.450.000,00)
8	Matematika dan IPA	127.310.000,00	26.600.000,00	(133.000,00)	100.710.000,00	(100.710.000,00)
9	Kedokteran	380.000.000,00	24.900.000,00	(124.500,00)	355.100.000,00	(355.100.000,00)
10	Kesehatan Masyarakat	41.250.000,00	14.400.000,00	(72.000,00)	26.850.000,00	(26.850.000,00)
11	Hukum	309.720.000,00	49.150.000,00	(245.750,00)	260.570.000,00	(260.570.000,00)
12	Pascasarjana	383.650.000,00	26.000.000,00	(130.000,00)	357.650.000,00	(357.650.000,00)
13	Farmasi	225.900.000,00	23.000.000,00	(115.000,00)	202.900.000,00	(202.900.000,00)
14	Ilmu Budaya	130.100.000,00	15.200.000,00	(76.000,00)	114.900.000,00	(114.900.000,00)
15	Ilmu Komputer dan TI	138.270.000,00	6.400.000,00	(32.000,00)	131.870.000,00	(131.870.000,00)
Jumlah		**12.952.323.000,00**	**3.729.000.000,00**	**(18.645.000,00)**	**9.223.323.000,00**	**(9.223.323.000,00)**

Pengelolaan piutang pada Unmul mengacu pada Pedoman Akuntansi dan Pengelolaan Piutang di Lingkungan Kemenristekdikti. Unmul mengklasifikasikan Piutang hanya berupa Piutang Lancar dan Piutang Macet. Piutang Lancar per 31 Desember 2022 merupakan piutang yang berasal dari penundaan UKT bulan Juli 2022 yang diakui sebagai piutang per tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan Piutang Macet merupakan piutang yang telah terbit Surat Penagihan Ketiga (SPn 3) namun belum dilakukan pelunasan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan dari Koordinator Keuangan pada BUK Unmul selaku penyusun laporan keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan data piutang pendidikan Unmul bersumber dari data pada Sistem Informasi Keuangan (Simkeuv2) yang merupakan *dashboard* aplikasi yang memproses data tagihan pembayaran UKT, data Piutang serta laporan penerimaan. Adapun data tagihan UKT mahasiswa Unmul bersumber dari data Sistem Informasi Akademik (SIA) yang dikelola oleh Unit Akademik. Data aplikasi SIA sendiri memuat antara lain data registrasi mahasiswa dan status mahasiswa (aktif atau tidak aktif).

Pada tahun 2023, Unit Akademik Unmul melakukan migrasi data aplikasi dari SIA ke aplikasi *Academics Integrated System* (AIS). Dari migrasi data tersebut, Simkeuv2 melakukan proses penarikan database registrasi mahasiswa Angkatan 2016-2022 yang berjalan dengan lancar. Penarikan *database* tersebut bertujuan untuk proses penagihan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terjadi kendala pada penyajian data piutang pendidikan pada tahun 2023. Sinkronisasi melalui penarikan data Simkeuv2 ke aplikasi AIS seharusnya dapat memuat data registrasi mahasiswa yang melakukan

pemutakhiran pembayaran mahasiswa. Terdapat kendala teknis dalam sinkronisasi tersebut, sehingga tidak dapat menyajikan perubahan data Piutang baik dari penambahan piutang Angkatan 2023 maupun pengurangan dari pembayaran Angkatan 2016 s.d. 2023 per Desember 2023. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Unmul melalui unit pengelola aplikasi AIS sedang berupaya melakukan perbaikan atas kondisi tersebut.

Dengan demikian saldo piutang yang disajikan Unmul per 31 Desember 2023 merupakan saldo piutang yang sama per 31 Desember 2022. Unmul belum dapat menyajikan saldo piutang dari kegiatan operasional BLU yang seharusnya, berdasarkan data penambahan Piutang atas mahasiswa Semester 2023 maupun pengurangan Piutang atas mahasiswa yang sudah membayar kewajibannya untuk Angkatan 2016 s.d. 2023.

c) Polimedia

Neraca Polimedia per 31 Desember 2023 menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak senilai Rp3.354.810.000,00, Penyisihan Piutang Tak Tertagih senilai Rp726.755.500,00, dan Piutang Bukan Pajak (Netto) senilai Rp2.628.054.500,00. Rincian Piutang Bukan Pajak pada Polimedia disajikan berdasarkan tahun mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 202. Piutang Bukan Pajak Polimedia

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mahasiswa Tahun 2008 – 2009	17.360.000,00
2	Mahasiswa Tahun 2009 – 2010	11.000.000,00
3	Mahasiswa Tahun 2010 – 2011	39.625.000,00
4	Mahasiswa Tahun 2011 – 2012	24.500.000,00
5	Mahasiswa Tahun 2012 – 2013	213.250.000,00
6	Mahasiswa Tahun 2013 – 2014	324.725.000,00
7	Mahasiswa Tahun 2014 – 2015	118.750.000,00
8	Mahasiswa Tahun 2015 – 2016	251.500.000,00
9	Mahasiswa Tahun 2016 – 2017	132.000.000,00
10	Mahasiswa Tahun 2017 – 2018	348.500.000,00
11	Mahasiswa Tahun 2018 – 2019	532.000.000,00
12	Mahasiswa Tahun 2019 – 2020	1.341.600.000,00
Jumlah		**3.354.810.000,00**

Hasil wawancara dengan Pengelola Keuangan Polimedia diketahui bahwa Polimedia belum bisa menyajikan data piutang per penanggung jawab dan besaran masing-masing karena masih dilakukan penelusuran dokumen sumber untuk mengetahui apakah piutang tersebut merupakan piutang/hak Polimedia atau bukan, seperti apakah berasal dari piutang UKT murni, potongan UKT karena cuti atau kontribusi wisuda dan lain-lain.

Polimedia mengalami kesulitan menelusuri piutang karena inputer data mahasiswa sebelum tahun 2023 berada pada masing-masing prodi dan pernah terjadi salah input, dimana mahasiswa sudah lulus namun tidak diinput kelulusannya sehingga masih membentuk piutang pada semester berikutnya. Mulai tahun 2023, inputer data mahasiswa dipusatkan di Bagian Akademik untuk menghindari hal tersebut. Selain itu, Polimedia juga kesulitan mengakses *database* mahasiswa karena terdapat perubahan pengelola *database* dan beberapa kali perubahan sistem akademik.

d) Polsri

Neraca Polsri per 31 Desember 2023 menyajikan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU senilai Rp4.746.723.683,00 yang merupakan piutang UKT mahasiswa. Kualitas piutang tersebut seluruhnya digolongkan memiliki kualitas lancar dengan nilai Penyisihan senilai Rp23.733.618,00. Rincian piutang terdiri dari mahasiswa aktif dan mahasiswa yang telah lulus. Metode penagihan piutang UKT atas mahasiswa aktif menggunakan surat pengantar Wakil Direktur II kepada setiap jurusan berisi daftar mahasiswa yang belum membayar UKT. Ketua jurusan diminta menginformasikan/memanggil mahasiswa agar segera melakukan pembayaran UKT sebelum tanggal yang ditetapkan. Polsri belum melakukan penagihan atas mahasiswa yang telah lulus. Saat jatuh tempo pembayaran UKT, Polsri belum menerbitkan Surat Tagihan kepada masing-masing mahasiswa sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada K/L dan Bendahara Umum Negara dan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

b. Penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak sesuai Kebijakan Akuntansi

1) Untan

Dalam kebijakan akuntansi Piutang Untan telah mengatur bahwa Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena, adanya tunggakan punggutan pendapatan, perikatan pemerintah, dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Dalam melaksanakan penatausahaan piutang Untan membentuk Tim Penatausahaan PNBP sesuai dengan SK Rektor Nomor 1491/UN22/KU.02.00/2023 yang bertanggungjawab melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pelaporan Pengelolaan Penatausahaan PNBP setiap semester. Salah satu tahapan dalam proses penatausahaan PNBP pada Untan diantaranya adalah proses pengembalian dana. Secara umum, proses pengembalian dana yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan meliputi transaksi pengembalian UKT. Pengembalian UKT yang dilakukan dapat berupa:

a) Pengembalian UKT karena mahasiswa sudah lulus. Diberikan kepada mahasiswa yang sudah membayar untuk semester berikutnya, namun lulus pada semester berjalan.

b) Pengembalian UKT kepada mahasiwa aktif yang mendapatkan bantuan UKT namun sudah terlebih dahulu melakukan pembayaran secara mandiri.

c) Pengembalian UKT kepada mahasiswa yang mendapatkan pemotongan UKT yang ditetapkan oleh Rektor, namun sudah secara penuh membayarkan UKT tersebut pada semester sebelumnya.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan atas transaksi pengembalian dana diketahui terdapat dua transaksi pengembalian sebagai berikut:

Tabel 203. Rincian Pengembalian Dana a.n Dr. AZ

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian P1 Dr. AZ, M.Pd kelebihan potong	17.258.819,00
2	Pengembalian Honor PPG Dalam Jabatan Kategori 1 Gelombang 2 Tanggal 27 Januari 2023 a.n. Dr. AZ, M.Pd (karena pelaksanaan perkuliahan Dr. AZ, M.Pd berhalangan mengajar sehingga digantikan oleh IR, M.Pd)	13.655.939,00
Jumlah		**30.914.758,00**

Berdasarkan konfirmasi ke Bendahara Penerimaan dan Biro Keuangan menjelaskan bahwa, transaksi pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan SPI Untan terkait PNBP berupa *fee* penelitian melalui Lembaga Penelitian Untan tahun 2012 s.d. 2015 senilai Rp1.304.685.373,00 yang tidak disetor ke Kas Negara.

Atas hal tersebut, Untan kemudian menerbitkan SPTJM tanggal 11 Juli 2022 a.n Dr. AZ yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Ketua SPI, dan Kepala Biro Umum Keuangan. Sesuai SPTJM, kerugian tersebut akan dipertanggungjawabkan melalui penyetoran ke Rekening Operasional Penerimaan BLU Untan senilai Rp18.120.650,00/bulan, selama tujuh puluh dua bulan, terhitung mulai bulan Juli 2022 dengan mekanisme pengembalian sebagai berikut:

a) Pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran atas Remunerasi P1 senilai 100%;

b) Pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran atas Remunerasi P2 senilai 60%;

c) Pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran atas pendapatan lain yang diterima dari Untan senilai 100%; dan

d) Penyetoran secara mandiri atas pendapatan dan/atau aset lain yang dimiliki dari luar Untan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pengembalian *Fee* Dana Penelitian dari Agustus 2022 s.d. bulan Desember 2023 diketahui bahwa, telah dilakukan pengembalian dana senilai Rp169.896.361,00. Sehingga masih terdapat piutang atas temuan tersebut per 31 Desember 2023 senilai Rp1.134.789.012,00 (Rp1.304.685.373,00 – Rp169.896.361,00) yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Atas permasalahan tersebut, Koordinator Keuangan menjelaskan bahwa atas temuan SPI tidak dicatat dalam laporan keuangan karena awalnya ada itikad baik dari Dr. AZ untuk segera menyetorkan kerugian atas temuan tersebut ke Kas Negara. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sisa masa kerja Sdr. Dr. AZ selama 4 tahun 9 bulan, sehingga PNBP atas tunggakan piutang TGR yang tidak disajikan tersebut berpotensi tidak tertagih.

2) Ditjen PDM

Neraca Ditjen PDM menyajikan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 senilai Rp6.071.885.698,00 yang terdiri dari Bagian Lancar Tagihan TP/TGR senilai Rp3.264.192.849,00 dan Piutang Tagihan TP/TGR senilai Rp2.807.692.849,00. Seluruh piutang tersebut merupakan piutang dari 93 pegawai BPMP Prov. Papua sesuai dengan LHA Investigasi Itjen Kemdikbudristek. Hasil pemeriksaan atas SKTJM yang menjadi dasar penyajian piutang, diketahui hal sebagai berikut:

a) Penyajian piutang tidak memperhatikan *cut off* dokumen sumber penyajian piutang

Penerbitan SKTJM dilakukan pada tahun 2023 dan 2024. Namun demikian dalam menyajikan piutang TGR, Ditjen PDM mengakui keseluruhan SKTJM tersebut ke dalam Neraca per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 204. Rincian Piutang TGR dan SKTJM yang diterbitkan

No	Piutang TGR	Tersaji dalam Neraca	SKTJM Terbit Tahun 2023	SKTJM Terbit Tahun 2024
1	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	3.264.192.849	2.924.192.849	197.000.000,00
2	Piutang Tagihan TP/TGR	2.807.692.849	2.746.192.849,00	56.500.000,00

b) Terdapat 24 pegawai yang belum membuat SKTJM namun diakui sebagai piutang senilai Rp144.500.000,00. Hasil konfirmasi dengan Tim Akuntansi dan Pelaporan BPMP Prov. Papua, 24 pegawai tersebut telah melunasi di tahun 2024 sehingga tidak dibuatkan SKTJM. Rincian terkait Piutang Tagihan TP/TGR yang belum terdapat SKTJM terlampir pada **Lampiran C.5.8**.

c) Hasil pemeriksaan investigasi Itjen tidak segera ditindak lanjuti dengan proses penyelesaian ganti rugi

Ditjen PDM memiliki TPKN sesuai SK Kepala BPMP Prov. Papua Nomor 0367/C7.33/WS.01.01/2022. Sesuai dengan SK tersebut TPKN BPMP Prov. Papua memiliki tugas antara lain:

(1) Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;

(2) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;

(3) Menghitung jumlah Kerugian Negara;

(4) Menginventarisasi harta kekayaan milik PNS bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

(5) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKN atau Kepala Satker dhi. Kepala BPMP Prov. Papua.

Dari nilai rekomendasi TP/TGR yang berupa penyetoran ke Kas Negara senilai Rp15.522.771.116,00, yang telah diakui sebagai saldo awal Piutang Tagihan TP/TGR senilai Rp6.757.042.698,00. Oleh karena itu, masih terdapat TP/TGR yang belum diakui sebagai piutang senilai Rp8.765.728.418,00. Hal ini dikarenakan:

(1) Pegawai a.n Am belum dibuatkan SKTJM terkait rekomendasi nomor 1 untuk menyetor ke Kas Negara senilai Rp1.111.000.000,00. Hingga saat pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan belum melakukan pengangsuran pengembalian kerugian negara. Berdasarkan konfirmasi dengan Tim Akuntansi dan Pelaporan BPMP Prov. Papua diketahui yang bersangkutan saat ini menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pangkep dan belum diproses pembuatan SKTJM. Hasil konfirmasi dengan tim TPKN Ditjen PDM, diketahui Ditjen PDM belum pernah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab. Pangkep terkait proses pembuatan SKTM;

(2) Pegawai a.n MWL belum dibuatkan SKTJM terkait rekomendasi 1 untuk menyetor ke Kas Negara senilai Rp230.000.000,00. Yang bersangkutan telah melakukan angsuran sebanyak dua kali senilai Rp10.000.000,00. Berdasarkan

konfirmasi dengan Tim Akuntansi dan Pelaporan BPMP Prov. Papua diketahui yang bersangkutan kini telah dimutasikan ke BGP Prov. Papua dan belum diproses pembuatan SKTJM;

(3) Terdapat 53 pegawai belum dibuatkan SKTJM terkait rekomendasi nomor 2 untuk menyetor ke Kas Negara senilai Rp251.000.000,00. Berdasarkan konfirmasi dengan Tim Akuntansi dan Pelaporan BPMP Prov. Papua, diketahui sebagai berikut:

(a) Terdapat 25 pegawai yang telah melunasi kewajiban pengembalian sebelum 31 Desember 2023;

(b) Terdapat 24 pegawai yang telah mutasi/mengundurkan diri/pensiun/meninggal dunia sehingga sulit dicari keberadaannya untuk dibuatkan SKTJM;

(c) Terdapat dua pegawai a.n AH, dan PY telah mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sehingga sulit dicari keberadaannya untuk dibuatkan SKTJM; dan

(d) Terdapat 1 pegawai yang tidak disebutkan namanya pada LHA Investigatif Itjen.

Rincian 53 pegawai yang belum ada SKTJM terlampir pada **Lampiran C.5.9**.

(4) Pegawai a.n AI belum dibuatkan SKTJM terkait rekomendasi nomor 3 untuk menyetor ke Kas Negara senilai Rp7.173.728.418,00. Hingga saat pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan belum melakukan pengangsuran pengembalian kerugian negara. Berdasarkan konfirmasi dengan Tim Akuntansi dan Pelaporan BPMP Prov. Papua, yang bersangkutan telah mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri per tanggal 3 Juli 2023, sehingga sulit dicari keberadaannya untuk dibuatkan SKTJM.

Selain itu, hasil konfirmasi dengan Tim Akuntansi dan Pelaporan BPMP Prov. Papua, diketahui terdapat 13 pegawai yang telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian negara senilai Rp686.575.000,00. Atas penyetoran ini, terdapat sembilan pegawai yang sudah melunasi kewajiban tetapi belum diterbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas oleh TPKN Ditjen PDM. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran C.5.10.**

c. Hak atas royalti tidak dibayar tepat waktu dan belum diakui sebagai Piutang

1) Pusbanglin

Pada tahun 2023, Pusbanglin menerima pendapatan atas royalti atas penerbitan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V senilai Rp54.026.500,00 yang berasal dari penyetoran atas royalti yaitu di bulan Maret 2023 senilai Rp24.035.000,00 (atas penjualan 460 eks periode November 2022 s.d. Maret 2023) dan di bulan November 2023 senilai Rp29.991.500,00 (atas penjualan 574 eks dari bulan April s.d. September 2023).

Selain itu pembayaran royalti dari PT BP hanya satu kali yaitu di Tahun 2021 senilai Rp20.011.750,00 atau senilai penjualan 383 eks. Sehingga sampai dengan kontrak

berakhir masih terdapat kekurangan penerimaan atas sisa royalti, secara rinci sisa royalti yang belum dibayarkan dan menjadi hak dari Pusbanglin sesuai pasal 4 poin (3) huruf f yaitu menyetor royalti dari sisa buku yang belum terjual di akhir kontrak kerja dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 205. Sisa Royalti Belum Dibayarkan atas Penerbitan KBBI Edisi V Cetakan Ketiga

No.	Penerbit	Akhir Perjanjian	Target (eks)	Realisasi (eks)	Sisa (eks)	Harga Satuan (Rp)	Perhitungan Sisa Royalti (10%) (Rp)
1	CV AP	19 April 2023	6.000	1.845	4.155	522.500,00	217.098.750,00
2	PT BP	19 April 2023	3.000	383	2.617	522.500,00	136.738.250,00
Jumlah			**9.000**	**2.228**	**6.772**		**353.837.000,00**

Hasil wawancara dengan pihak PT BP dan CV AP menunjukkan sebagai berikut.

(a) Salah satu klausul kontrak mengatur bahwa Pihak Kedua berkewajiban memberikan Laporan Penjualan KBBI V cetakan ketiga setiap 4 bulan namun selama masa kontrak Pihak PT BP belum pernah mengirimkan laporan penjualan atas cetakan KBBI V cetakan ketiga, sedangkan CV AP mengirimkan laporan penjualan KBBI setiap 5 bulan sekali. Dalam laporan tersebut CV AP menyertakan jumlah penjualan dan besaran royalti yang dibayarkan;

(b) PT BP mengaku belum melakukan pencetakan buku KBBI edisi ketiga dengan alasan keadaan *Force majeur* akibat Covid-19 sehingga kesulitan melakukan penjualan buku sekolah sementara CV AP mengalami kesulitan penjualan akibat regulasi perubahan Kurikulum Merdeka oleh Kemendikbudristek.

Hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan Pusbanglin dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pusbanglin memiliki SOP terkait penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan namun dalam SOP tersebut tidak terdapat mekanisme terkait pencatatan atas piutang pendapatan;

(b) Pusbanglin pernah melakukan pemantauan terkait pencetakan dan penjualan KBBI Edisi V pada CV AP pada Oktober 2023 sedangkan pada PT BP belum pernah dilakukan pemantauan;

(c) Pusbanglin belum melakukan pencatatan atas piutang KBBI karena tidak dicantumkan target PNBP dalam DIPA. Atas hal tersebut akan diajukan koreksi.

2) BB Prov. D.I.Yogyakarta (BB DIY)

Pada tahun 2023, BB Prov. DIY menerima pendapatan atas royalti Kamus Bahasa Jawa Edisi Kedua senilai Rp3.519.000,00 atas penjualan kamus periode 1 Juli 2022 – 31 Desember 2022. Perjanjian penerbitan dengan PT Kn berakhir tanggal 25 Februari 2022 dan belum terdapat pembaharuan surat perjanjian. PT Kn telah mengajukan konsep perpanjangan surat perjanjian penerbitan namun belum ditindak lanjuti oleh BB DIY karena masih menunggu informasi dari BPP Bahasa terkait dasar penetapan royalti Kamus Basa Jawa dari Kemendikbudristek yang menjadi dasar untuk penginputan *billing*.

Hasil konfirmasi dengan PT Kn diketahui beberapa hal sebagai berikut:

(a) Selama Periode Perjanjian Penerbitan Nomor 009/PP/PTKAN/R/19 tanggal 25 Februari 2019 jumlah buku yang tercetak sebanyak 500 eksemplar. Sampai dengan 31 Desember 2023 sisa buku yang belum terjual sebanyak 106 eksemplar;

(b) PT Kn mengirimkan laporan penjualan setiap semester dan dalam laporan tersebut terdapat informasi terkait besaran royalti yang akan dibayarkan;

(c) Untuk periode penjualan dari Januari – Desember 2023 PT Kn telah melakukan penjualan kamus Basa Jawa sebanyak 141 eksemplar atau setara besaran royalti Rp4.225.000,00;

(d) PT Kn mengirimkan Laporan Penjualan dan Royalti untuk Semester I dan Semester II Tahun 2023 kepada Pihak BB DIY namun sampai dengan pemeriksaan berakhir PT Kn belum mendapatkan ID *Billing* PNBP.

Penjelasan Kepala dan Pengelola PNBP BB DIY sebagai berikut:

(a) BB DIY belum memiliki SOP terkait mekanisme terkait penerimaan dan pengelolaan PNBP dan pencatatan atas piutang pendapatan;

(b) BB DIY belum pernah melakukan rekonsiliasi pencatatan dan penyetoran dengan PT Kn;

(c) BB DIY belum melakukan pencatatan atas informasi data dan dokumen terkait laporan penjualan kamus dari PT Kn.

d. Perjanjian kontrak berakhir belum dibuaatkan Addendum

Pendapatan royalti atas kekayaan intelektual pada Pusbanglin merupakan pendapatan royalti yang diperoleh dari kerjasama penerbitan KBBI Edisi V Cetakan Ketiga dengan dua penerbit. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa perjanjian dengan dua penerbit tersebut telah berakhir,dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 206. Rincian Kerjasama Penerbitan KBBI Edisi V Cetakan Ketiga

No	Nomor SPK	Penerbit	Tanggal	Jangka waktu	Berakhir Perjanjian	Jumlah Eksemplar
1	0129/I/KS.08.02/2021	CV AP	19 April 2021	2 tahun	19 April 2023	6.000
2	0130/I/KS.08.02/2021	PT BP	19 April 2021	2 tahun	19 April 2023	3.000

Hasil permintaan keterangan dengan Bendahara Penerimaan Pusbanglin atas kedua penerbit yaitu CV AP dan PT BP menunjukkan hal berikut.

1) PT BP telah mengirimkan surat perihal addendum kerjasama pencetakan dan penerbitan KBBI dengan Nomor 904/DU.11.2022 tanggal 2 November 2022 terkait royalti 3.000 eksemplar (eks) cetakan KBBI yang berisi keinginan untuk memperpanjang masa kontrak dan pengkajian kembali terkait harga jual buku KBBI yang dinilai terlalu mahal (Rp522.500,00 per eks) serta kewajiban PT BP untuk mencetak dan menjual buku KBBI V sebanyak 3.000 eks dapat dibicarakan dan dikaji kembali dan dituangkan pada kontrak yang baru.

   Kepala Pusbanglin telah membalas tersebut dengan surat Nomor 2699/12/HK.07.00/2022 yang menyatakan addendum dapat dilaksanakan namun

diharuskan untuk menyelesaikan/membayar atas sisa royalti cetakan KBBI sesuai kontrak. Terhadap balasan tersebut, belum ada respon dari PT BP.

2) CV AP telah dua kali mengajukan surat permohonan addendum perpanjangan kontrak penjualan cetakan KBBI selama dua tahun untuk dapat membayar kewajiban atas sisa cetakan KBBI yang belum terjual melalui surat Nomor 24/SPPK/AP/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan Nomor 20/SPPK/AP/V/2023 tanggal 22 Mei 2023. Namun kedua surat tersebut belum mendapatkan jawaban dari BPP Bahasa karena masih dalam proses pembahasan dengan pimpinan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab, f. perhitungan *ex officio*, dan g. pelapor secara tertulis;

b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I.01 SAP Berbasis Akrual - Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan halaman 10 Paragraf 35 yang menyatakan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan Keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

   1) Relevan;

   2) Andal;

   3) Dapat dibandingkan; dan

   4) Dapat dipahami.

c. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

   1) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

   2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Atasan langsung bendahara atau kepala satker wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya tujuh hari setelah kerugian negara diketahui;

d. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU pada Paragraf 1 Pengelolaan Piutang

1) Pasal 95:

   a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLU menetapkan pedoman pengelolaan Piutang BLU yang disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

   b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pedoman pengelolaan Piutang BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:

      (1) prosedur dan persyaratan pemberian piutang;

      (2) penatausahaan dan akuntansi piutang;

      (3) tata cara penagihan piutang; dan

      (4) pelaporan piutang.

e. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Bab V Kebijakan Akuntansi Piutang pada:

   1) Huruf A angka Definisi yang menyatakan bahwa Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

   2) Huruf A poin 3.b. yang menyatakan bahwa Pengakuan Piutang Bukan Pajak yang menyebutkan bahwa Piutang PNBP timbul apabila terdapat kewajiban PNBP dari wajib bayar kepada Pemerintah yang belum diterima pembayarannya. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Bukan Pajak, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

      a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

      b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

      Hak pemerintah yang belum diterima pembayarannya, dan pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah namun belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun dicatat dan disajikan sebagai pendapatan yang masih harus diterima.

   3) Huruf B poin 3.b. yang menyatakan bahwa Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

      a) Telah ditandatanganinya SKTJM;

      b) Telah diterbitkan:

         (1) SK pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan atau

         (2) SK Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntuntan ganti kerugian negara bukan bendahara atau

      c) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

f. PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 155/PMK.02/2021 pada:

1) Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan BMN, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

2) Pasal 42 yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP mencatat sebagai Piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai piutang negara dan mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Bayar.

g. PMK Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada K/L, BUN dan Pengurusan Sederhana oleh PUPN yang sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 150/PMK.06/2022 pada:

1) Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Piutang Negara pada K/L yang dipimpinnya bertugas:

a) mengelola Piutang Negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

b) melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara.

2) Pasal 101 huruf g. yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dan BUN melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan Piutang Negara, untuk memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara setiap periode.

h. PMK Nomor 69/PMK.06/2014 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada K/L dan BUN pada:

1) Pasal 3

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa K/L dan PPA BUN wajib melakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), K/L wajib:

(1) menilai dan menentukan Kualitas Piutang yang dikelola K/L yang dipimpinnya; dan

(2) memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

(1) jatuh tempo Piutang; dan/atau

(2) upaya penagihan.

2) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa penentuan Kualitas Piutang yang dikelola oleh K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

a) kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b) kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c) kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d) kualitas macet apabila:

(1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

(2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN.

i. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap PNS Bukan Bendahara di Lingkungan Kemendikbud , pada:

1) Pasal 22 yang menyatakan bahwa Penyelesaian Kerugian Negara dilakukan melalui: a. Penerbitan SKTJM; b. Penerbitan SKP2KS; dan/atau c. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;

2) Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM;

3) Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa Dalam hak pihak yang merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satker atau atasan Kepala Satker dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara; dan

4) Pasal 51, pada:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pihak yang merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2K, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan yang dibuktikan Surat Keterangan Tanda Lunas; dan

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satker atau atasan Kepala Satker.

j. Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang, Bab IV huruf B mengenai pengakuan yang menyatakan bahwa Piutang diakui dan dicatat sebagai aset di Neraca apabila memenuhi kriteria: (1) Harus didukung dengaan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; (2) Jumlah piutang dapat diukur; (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

k. Bultek SAP Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, pada:

   1) Bab III Piutang Berdasarkan Pungutan yang menyatakan bahwa Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria: 1. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau. 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, Pengukuran piutang pendapatan berdasarkan pungutan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, antara lain: disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK.

   2) Bab III Piutang Berdasarkan Pungutan yang menyatakan bahwa Angka 3.2. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria: 1. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau. 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, Angka 3.3 huruf d Pengukuran piutang pendapatan berdasarkan pungutan yang berasal dari peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut. antara lain: disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah. angka 3.5 Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK.

   3) Bagian 3.2 Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan yang menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria: 1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

   4) Bagian 3.3 Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan pada angka 4 yang menyatakan bahwa Pengukuran piutang pendapatan berdasarkan pungutan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, antara lain: disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

   5) Bagian 3.3 Pengungkapan pada CaLK yang menyatakan bahwa Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK.

   6) Bagian 4.4.3 Pengungkapan di CALK, huruf c yang menyatakan bahwa Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN.

l. Kontrak kerjasama antara Pusbanglin Bahasa dan Sastra dengan PT BP Nomor 0130/I/KS.08.02/2021 dan Nomor 003/DU/PJ.4.2021 serta CV AP Nomor 0129/I/KS.08.02/2021 dan Nomor 016/SK/AP/IV/2021 pada Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban pada Ayat (3) yang menyebutkan Pihak Kedua (CV AP dan PT BP) berkewajiban:

   1) Menyetujui harga jual KBBI V Cetakan Ketiga per eksemplar senilai Rp522.500,00 (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

   2) Mencetak KBBI V Cetakan Ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Kontrak Kerjasama ditandatangani;

   3) Melaporkan jumlah pencetakan KBBI V Cetakan Ketiga dan hasil penjualan KBBI V Cetakan Ketiga kepada PIHAK KESATU (Pusbanglin Bahasa dan Sastra) setiap empat bulan;

   4) Menyetor royalti senilai 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan KBBI V Cetakan Ketiga ke Kas Negara melalui rekening Bendahara PNBP Pusbanglin Bahasa dan Sastra, BPP Bahasa setiap empat bulan (sebagaimana lampiran PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemendikbud); dan

   5) Menyetor royalti dari sisa buku yang belum terjual di akhir kontrak kerjasama.

m. Kontrak Kerjasama antara BB Prov. DIY dengan PT Kn No:009/PP/PTKAN/R/19 pada:

   1) Pasal 1 poin 1.4 poin (d) yang menyatakan bahwa Pihak Kedua membayarkan dan/atau menyetorkan kepada Pemerintah (Kas Negara) melalui *billing* yang dibuatkan oleh Bendahara Penerimaan BB Prov. DIY pada setiap akhir bulan Februari dan Agustus pada setiap tahunnya

   2) Pasal 4 poin 4.3 yang menyatakan bahwa Apabila berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis perjanjian ini berakhir namun produk masih tersisa maka pihak kedua tetap berhak memiliki kesempatan selama 12 (dua belas) bulan untuk memasarkan sisa produk dengan harga serta diskon yang ditentukan oleh pihak kedua.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penyajian Piutang dalam LK UNJ, Unsika, UHO, UMRAH, UPN Veteran Jakarta, Unpatti, Unmul, Untan, Polimedia, Polsri, dan Ditjen PDM tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;

b. Tunggakan dari PNBP UKT dan IPI berpotensi tidak diterima apabila tidak segera dilakukan penagihan;

c. Potensi tidak dapat tertagihnya piutang senilai Rp3.354.810.000,00 pada Polimedia;

d. Penerimaan senilai Rp9.900.517.430,00 (Rp1.134.789.012,00 + Rp8.765.728.418,00) pada Untan dan Ditjen PDM yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi tidak segera di-SKTJM-kan berpotensi tidak dapat ditagih; dan

e. Piutang Royati KBBI berpotensi macet senilai Rp353.837.000,00 dan potensi kehilangan PNBP atas royalti Kamus Bahasa Jawa yang belum diperpanjang kerjasamanya.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. KPA terkait kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan piutang di lingkungan satkernya;
b. Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala UPT TIK terkait tidak melakukan rekonsiliasi atas data tunggakan UKT dan/atau IPI yang belum lunas;
c. UNJ, Unsika, UHO, UMRAH belum memiliki sistem informasi pengelolaan tagihan yang dapat mengidentifikasi mahasiswa yang tidak aktif;
d. SPI Untan dan TPKN Ditjen PDM belum optimal dalam melakukan proses penyelesaian TP/TGR; dan
e. Kepala Bagian Keuangan BPMP Prov. Papua, Untan, Pusbanglin, dan BB Prov. DIY, kurang cermat dalam pengelolaan PNBP dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait penagihan tunggakan PNBP.

Atas permasalahan tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan penyajian telah dilakukan penyesuaian/koreksi dan pengungkapan pada laporan keuangan tahun 2023. Kemendikbudristek berkomitmen terus mengupayakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan piutang.

BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan KPA satker terkait lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan piutang di lingkungan satkernya;
b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor UNJ, Unsika, UHO, UMRAH, UPN Veteran Jakarta, Unpatti, Unmul, Direktur Polimedia, dan Polsri menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala UPT TIK untuk melakukan rekonsiliasi atas data tunggakan UKT dan/atau IPI dan menyusun laporan secara periodik;
c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UNJ, Unsika, UHO, UMRAH menyusun sistem informasi pengelolaan tagihan yang dapat mengidentifikasi mahasiswa yang tidak aktif;
d. Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur Polimedia menelusuri piutang yang belum teridentifikasi sebagai akibat perubahan sistem akademik;
e. Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur Polsri mengoptimalkan penagihan atas piutang UKT;
f. Dirjen PDM dan Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Kepala BPMP Prov. Papua dan Rektor Untan segera memproses penyelesaian TP/TGR sesuai ketentuan yang berlaku; dan
g. Dirjen PDM, Dirjen Diktiristek, dan Kepala BPP Bahasa supaya memerintahkan Rektor Untan dan Kepala Bagian Keuangan BPMP Prov. Papua, Untan, Pusbanglin, dan BB Prov. DIY untuk lebih cermat dalam pengelolaan PNBP dan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait penagihan tunggakan PNBP.

6. Pengelolaan Persediaan Kemendikbudristek Belum Memadai

LK Kemendikbudristek Tahun 2023 menyajikan nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp3.165.881.082.827,00 (*audited*) dan Rp3.069.316.541.275,00 (*audited*). Jika dibandingkan 31 Desember 2022 terjadi kenaikan senilai Rp96.564.541.552,00 atau 3,15%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 207. Rincian Saldo Persediaan per Eselon I per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023

No	Eselon I	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1	Setjen	6.850.012.073,00	5.171.177.467,00	1.678.834.606,00	32,47
2	Itjen	218.081.471,00	213.832.670,00	4.248.801,00	1,99
3	Ditjen PDM	13.440.921.383,00	298.293.782.513,00	-284.852.861.130,00	-95,49
4	BSKAP	1.782.378.603,00	443.155.095,00	1.339.223.508,00	302,20
5	BPP Bahasa	2.080.453.885,00	1.932.869.402,00	147.584.483,00	7,64
6	Ditjen Kebudayaan	142.230.289.477,00	144.623.835.525,00	-2.393.546.048,00	-1,66
7	Ditjen GTK	513.267.827,00	1.035.838.647,00	-522.570.820,00	-50,45
8	Ditjen Diktiristek	2.902.179.177.319,00	2.507.407.756.570,00	394.771.420.749,00	15,74
9	Ditjen Vokasi	96.586.500.789,00	110.194.293.386,00	-13.607.792.597,00	-12,35
	Jumlah	**3.165.881.082.827,00**	**3.069.316.541.275,00**	**96.564.541.552,00**	**3,15**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Persediaan Kemendikbudristek Tahun 2023, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan persediaan sebagai berikut.

a. Proses penyelesaian pemindahtanganan barang Persediaan yang diserahkan kepada masyarakat berlarut-larut

1) Ditjen PDM

Direktorat SMA terdapat saldo persediaan senilai Rp271.548.420,00 berupa Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan TIK. Hasil *stock opname* diketahui bahwa barang tersebut tidak berada dalam penguasaan Direktorat SMA karena telah diserahkan ke sekolah/pemda pada tahun 2022. Wawancara dengan operator persediaan Direktorat SMA diketahui bahwa nilai Rp271.548.420,00 tidak dapat dikeluarkan dari aplikasi SAKTI selama belum terdapat BAST. Rincian penerima bantuan yang belum menyampaikan BAST diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 208. Daftar Tiga Sekolah yang Belum Menyampaikan BAST Peralatan TIK

No	Prov.	Kabupaten/Kota	Nama Penerima Bantuan (Sekolah)	Status Sekolah	Nilai Persediaan (Rp)
1	Banten	Kota Tangerang Selatan	SMA IT ALHUSAINY	Swasta	90.516.140,00
2	Kalimantan Timur	Kab. Berau	SMAS PGRI 13 TANJUNG REDEB	Swasta	90.516.140,00
3	NTB	Kab. Lombok Tengah	SMAS ARRAHMAN LINGKOK GODAK KOPAK	Swasta	90.516.140,00
TOTAL					271.548.420,00

Pada website *sarpras-sma.kemdikbud.go.id* pada Banpem Peralatan TIK SMA BA-BUN, dokumen yang diunggah hanya BAST dari penyedia ke sekolah, sedangkan BAST dari Direktorat SMA kepada penerima belum dibuat. Hasil permintaan keterangan dengan pengelola Persediaan Direktorat SMA, dijelaskan bahwa pada

Tahun 2023 BAST tersebut sudah disampaikan kepada ketiga sekolah tersebut, namun BAST belum dikembalikan oleh pihak sekolah ke Direktorat SMA.

2) BSKAP

Kemdikbudristek melalui BSKAP mendapatkan bantuan barang dari Dapartmen *of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia untuk program *The Innovation for Indonesia's School Children* (INOVASI) Fase 2. Program INOVASI Fase 2 tersebut telah berlangsung sejak tahun 2016 dan berakhir pada 31 Desember 2023. Pada akhir masa pelaksanaan program, dilakukan penandatanganan BAST Hibah Berupa Barang dengan Nomor 5199/HI/LK.01.03/2023, tanggal 31 Oktober 2023, dari DFAT yang diwakili oleh *Counsellor Human Development* dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Sekretaris BSKAP selaku KPA Kemdikbudristek. Hibah telah disahkan oleh KPPN dengan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 814656903880735351 tanggal 29 Desember 2023.

BAST hibah telah dilampiri dengan data barang yang diperoleh selama periode 2016-2023, yang dipergunakan dalam rangka menunjang implementasi program INOVASI untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar khususnya kemampuan literasi dan numerasi, senilai Rp1.415.194.370,00 atau setara dengan AUD 139,893.59.

Lebih lanjut, barang-barang yang tertuang dalam lampiran BAST tersebut posisinya telah berada pada masing-masing penerima, yaitu pada Dinas Pendidikan di 16 Kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengurus Barang Sekretariat BSKAP menjelaskan bahwa sebelum penandatanganan hibah barang kepada BSKAP, telah dilakukan inventarisasi barang oleh pihak INOVASI Pusat, INOVASI Daerah, Sekretariat BSKAP, dan perwakilan dari Pemda setempat, untuk mengetahui kondisi barang yang akan diterima oleh Pemda. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa dari 17 Kabupaten penerima, satu diantaranya yaitu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara terkena banjir mengakibatkan barang-barang yang diterima rusak dan hanyut, sehingga tidak diperhitungkan sebagai barang yang diserah terimakan. Dari hasil inventarisasi tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan BAST Sementara antara Sekretaris BSKAP dengan masing-masing Kepala Dinas Pendidikan pada 16 Kabupaten, antara tanggal 1 Agustus s.d. 30 November 2023.

Sekretariat BSKAP mencatat barang-barang tersebut sebagai persediaan melalui SAKTI sebagai Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat. Selain itu, Sekretaris BSKAP telah membuat Surat Permohonan Persetujuan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat melalui surat Nomor 0403/H1/LK.01.03/2023 tanggal 24 Januari 2024 yang ditujukan kepada Sekjen Kemendikbudristek. Namun demikian, Persetujuan Penghapusan Barang dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang belum dapat dilakukan karena belum terbit Persetujuan dari Mendikbudristek selaku Pengguna Barang, sehingga atas barang-barang yang sudah tidak dalam penguasaan BSKAP masih tercatat sebagai persediaan per 31 Desember 2023.

3) Ditjen Kebudayaan

a) Terdapat persediaan barang yang sudah tidak dikuasai oleh Direktorat PK atau telah diberikan kepada Pemda/kelompok masyarakat senilai Rp3.338.204.272,00 dengan rincian berikut.

Tabel 209. Persediaan yang Tidak dalam Penguasaan Satker pada Direktorat PK

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat**	
1	Note Accer Travelmate P273-MG	697.973.760
2	Printer Canon Pixma IX6560	127.534.000
3	Kamera Canon EOS 60D	384.854.976
4	GPS Garmin Oregon 550	135.717.120
5	Timbangan Digi DS-425	163.273.440
6	Exsternal hard-disk WD My Book	54.286.848
7	Caliper Mitutoyo	54.286.848
8	PC HP Pavillion Slimline 400-220D	95.406.300
9	Printer Epson Tipe L355	24.294.600
10	Kamera Canon EOS 600D	76.507.200
11	GPS Garmn Tipe ENTREX 30	27.898.200
12	Exsternal Hardisk/USB 3.0 (WDBU ZG0010BBK-PESN)	8.622.900
13	Digital Meter Bosch Tipe DLE70	27.007.200
14	Caliper Mitutoyo @2014	14.404.500
15	Timbangan Digital DS-425@2014	41.243.400
16	Fasiltas Peralatan pendukung Regnas Cagar Budaya	38.505.000
	Jumlah (A)	**1.971.816.292**
B	**Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat**	
1	Revitalisasi Museum Tenun Ikat Ende (2018)	539.905.000
2	Revitalisasi Museum Etnografi (2018)	424.660.000
3	Revitalisasi Museum Ndalem Natan (2018)	401.822.980
	Jumlah (B)	**1.366.387.980**
Total (A) + (B)		**3.338.204.272**

Penjelasan tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

(1) Persediaan berupa peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp1.971.816.292,00 merupakan hasil pengadaan Tahun 2013 s.d. 2015 dan telah diserahkan kepada masyarakat/penerima barang pada tahun perolehan. Atas pemberian barang tersebut belum dibuat BAST. Keterangan petugas BMN Direktorat PK, hal tersebut dikarenakan adanya kendala perubahan nomenklatur penerima barang dan pengirim barang serta mutasi/perpindahan pegawai yang menerima dan penanggung jawab penerima barang.

(2) Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp1.366.387.980,00 seluruhnya merupakan pekerjaan fisik berupa Revitalisasi Museum Tenun Ikat Ende yang telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dan Revitalisasi Museum Etnografi telah diserahkan kepada Yayasan Kogoya serta Revitalisasi Museum Ndalem Natan telah diserahkan kepada pemilih Yayasan. Meskipun telah diserahkan kepada pihak lain dan tidak lagi dalam penguasaan Direktorat PK, aset tersebut masih dicatat sebagai persediaan karena belum dibuatkan BASTnya.

b) Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp2.085.010.650,00 berpotensi tidak dapat direalisasikan

Hasil wawancara dengan petugas BMN menunjukkan bahwa persediaan aset tetap lainnya dan persediaan berupa barang persediaan lainnya terdiri dari tiga pekerjaan yang bersifat perencanaan seperti masterplan, dan DED, pada tiga objek cagar

budaya yang akan diserahkan kepada pemda setempat dengan nilai Rp2.085.010.650,00 dengan rincian berikut.

Tabel 210. Rincian Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang Belum dapat Diserahkan ke Satker karena Belum Selesai

Uraian	Tahun	Nilai (Rp)
Naskah Masterplan dan DED Kawasan Keraton Tidore	2015	867.834.000
Revitalisasi Cagar Budaya di Lombok	2018	445.806.350
Revitalisasi Rumah Kampung Kapitan	2018	771.370.300
Jumlah		**2.085.010.650**

Pekerjaan perencanaan tersebut dimaksudkan akan dilanjutkan dengan pekerjaan fisik yang selanjutnya akan diserahkan kepada pemda. Namun pada tahun anggaran berikutnya, pekerjaan fisik tidak dilanjutkan karena tidak dianggarkan. Hal tersebut disebabkan adanya pemotongan anggaran sehingga penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dituntaskan.

Para pihak penerima manfaat atas pekerjaan tersebut di atas tidak bersedia menandatangani BAST dengan alasan tidak adanya alokasi anggaran untuk menuntaskan pekerjaan revitalisasi tersebut sehingga Direktorat PK masih mencatat aset tersebut sebagai persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan potensi tidak direalisasikannya serah terima persediaan yang diserahkan kepada masyarakat senilai Rp2.085.010.650,00. Mengingat sifat pekerjaan tersebut merupakan perencanaan pekerjaan fisik yang tertunda dan telah terlalu lama tidak direalisasikan, pelaksanaan revitalisasi dan berpotensi tidak relevannya lagi perencanaan yang telah dibuat.

4) Ditjen Diktiristek

Terdapat persediaan berupa 267 unit sarana/prasarana pada Ditdaya senilai Rp2.375.945.163.014,00 yang merupakan hasil pengadaan Tahun 2018 s.d. 2023 yang belum didukung dokumen persetujuan hibah dari Kemendikbudristek kepada PTNBH yang terdiri dari:

a) 114 unit Tanah dan Bangunan senilai Rp1.705.759.415.200,00; dan

b) 153 unit Peralatan dan Mesin senilai Rp670.185.747.814,00.

Rincian persediaan tanah dan bangunan serta peralatan dan mesin yang belum dipindahtangankan disajikan pada **Lampiran C.6.1**.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pengelola Persediaan pada Ditdaya diketahui bahwa progres fisik atas seluruh sarana/prasarana telah selesai 100%. Namun demikian, pencatatan mutasi keluar terkendala proses pengajuan persetujuan hibah yang belum selesai dilaksanakan oleh PTNBH penerima. Pengajuan persetujuan hibah berpedoman pada PMK 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, yang ditetapkan melalui dua mekanisme sebagai berikut.

a) Persetujuan hibah untuk barang persediaan yang nilainya di bawah 10 milyar rupiah dilakukan melalui mekanisme pengajuan hibah melalui Sekjen Kemendikbudristek selaku Kuasa Pengguna Barang untuk diterbitkan surat persetujuan hibah; dan

b) Persetujuan hibah untuk barang persediaan yang nilainya di atas 10 milyar rupiah dilakukan melalui mekanisme pengajuan hibah melalui Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN untuk diterbitkan surat persetujuan hibah.

Persetujuan hibah BMN tersebut kemudian akan ditindak lanjuti dengan proses serah terima atas tanah dan bangunan, dan peralatan dan mesin kepada PTNBH yang didokumentasikan dengan BAST sebagai dasar penerbitan SK Penghapusan BMN oleh Kemendikbudristek. SK Penghapusan BMN menjadi dokumen sumber bagi Pengelola Persediaan pada Ditdaya untuk melakukan pencatatan mutasi keluar barang persediaan.

Berdasarkan dokumen monitoring persediaan sarana/prasarana pada PTNBH menunjukkan bahwa terdapat tiga PTNBH penerima hibah (UGM, UPI, dan UNESA) yang sudah menyampaikan dokumen proses serah terima untuk mendapatkan persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Kemendikbudristek, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, Menteri Keuangan belum menerbitkan dokumen persetujuan hibah.

5) Ditjen Diksi

Persediaan berupa peralatan mesin untuk diserahkan kepada perguruan tinggi belum dikeluarkan dari saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2023 pada Direktorat APTV dan Direktorat KLSD PTV dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Direktorat APTV

Persediaan senilai Rp2.137.938.424,00 merupakan persediaan berupa peralatan mesin yang telah diserahterimakan kepada pihak perguruan tinggi di lingkungan Ditjen Diktiristek, Ditjen Diksi, dan PTS. Barang tersebut masih tercatat sebagai persediaan karena BAST dan Naskah Hibah antara Direktorat APTV dengan masing-masing satker penerima belum diterbitkan. Persediaan tersebut timbul dari belanja banpem berupa barang pada P3TV PTS dan Program *Matching Fund* Tahun 2022. Rincian persediaan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran C.6.2**.

b) Direktorat KLSD PTV

Persediaan senilai Rp33.532.033.490,00 merupakan persediaan berupa peralatan mesin yang telah diserahterimakan kepada pihak perguruan tinggi di lingkungan Ditjen Diktiristek, Ditjen Diksi dan PTS. Barang tersebut masih tercatat sebagai persediaan karena BAST dan Naskah Hibah antara Direktorat KLSD PTV dengan masing-masing satker penerima belum terbit. Persediaan tersebut timbul atas belanja banpem Tahun 2022 dan 2023 pada P3TV dan Program *Competitive Fund*. Rincian persediaan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran C.6.3.**

Hasil wawnacara dengan operator persediaan masing-masing satker diketahui bahwa sejak diberlakukannya PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, pemindahtanganan barang persediaan berupa peralatan mesin untuk diserahkan kepada perguruan tinggi tersebut harus melalui mekanisme hibah dengan persetujuan dari Pengelola Barang d.h.i Menteri Keuangan yang diproses melalui Biro Umum dan PBJ, Setjen Kemendikbudristek. Hal tersebut yang kemudian menjadi kendala satker untuk mengeluarkan nilai persediaan barang yang secara fisik

sudah tidak dikuasai oleh satker dari saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2023.

b. Pencatatan Persediaan tidak akurat

1) Persediaan belum tercatat

a) PPNS

Terdapat persediaan obat poliklinik yang tidak dicatat sebagai saldo persediaan per 31 Desember 2023. Berdasarkan penjelasan pengelola persediaan obat diketahui bahwa pengelola persediaan obat hanya melaporkan pembelian obat kepada bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran. Pembayaran langsung dilakukan apotek ke bagian keuangan melalui transfer langsung. PPNS belum memiliki ketentuan yang mengatur bahwa obat-obatan dicatat dalam laporan persediaan, sehingga setiap bulan pengelola persediaan obat melakukan perhitungan mandiri dan laporan persediaan obat-obatan tersebut tidak dilaporkan dalam laporan persediaan PPNS. .

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pengelola persediaan obat per 31 Desember 2023 diketahui bahwa terdapat persediaan obat senilai Rp17.916.025,67 yang terdiri dari 118 item jenis obat-obatan dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran C.6.4**. Namun, atas hasil perhitungan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara *Stock Opname*, melainkan hanya dilakukan pencatatan pada file *excel* saja. Obat-obatan tersebut dapat digolongkan sebagai persediaan karena pengadaannya bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola persediaan obat pada poliklinik tidak ditunjuk melalui SK Direktur, namun hanya berdasarkan perintah lisan dari Kepala Unit Poliklinik yang merangkap sebagai dokter poliklinik.

2) Persediaan tidak dicatat dengan kondisi sebenarnya

a) Setjen

Pada tahun 2020 Kemendikbudristek menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Prov. Gangwon, Republik Korea yang dituangkan dalam MoU yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbudristek dan *Superintendent* Prov. Gangwon. Kerjasama yang dijalin kedua belah pihak berupa (1) pelatihan di bidang informasi pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun di Prov. Gangwon Republik Korea, (2) Penyediaan peralatan pendukung pembelajaran dalam jaringan bagi sekolah di tingkat dasar dan menengah di Indonesia, dan (3) Pelatihan informasi pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun di Indonesia. Masa berlaku MoU adalah selama 3 tahun, yakni berlaku sampai 30 Desember 2023.

Menindaklanjuti kesepakatan terkait penyediaan peralatan pendukung pembelajaran dalam jaringan bagi satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, maka dilakukan penandatanganan kesepakatan *Implementing Arrangement on Korean E-Learning Improvement Cooperation* (KLIC) antara *Director of Future Education Department* dengan Kepala BKHM tanggal 28 Juli dan 10 Agustus 2022 yang kemudian diamandemen pada 31 Oktober 2022. *Implementing Arrangement* tersebut antara lain memuat jumlah barang yang akan diserahterimakan ke

Kemendikbudristek. Adapun amandemen pada *Implementing Arragement* dapat dilihat pada **Lampiran C.6.5**.

Pada 20 Oktober 2023 dilakukan amandemen MoU guna memperpanjang jangka waktu MoU menjadi sampai dengan 31 Desember 2024. Berdasarkan *Handover Delivery Certificate*/BAST penerimaan barang No 35912/A6/KS.03.00/2023 tanggal 13 Maret 2023, Kemendikbudristek telah menerima peralatan TIK senilai $420.780. Pengurus Barang melakukan pencatatan berdasarkan item dan jumlah barang yang diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 211. Rincian Barang TIK yang Diterima dari Program KLIC

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah Berdasarkan *Handover*	Jumlah yang Diterima
1	Laptop	Samsung NT551XDA (termasuk tas laptop)	150	150
2	Mouse	Warna hitam (dalam box Laptop Samsung)	150	150
3	Mousepad	Hitam (24 x20 cm)	150	150
4	Earphones	LG LM-03 warna mint	150	150
5	DVD Player	Next 201DVD-COMBO	150	150
6	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S6 Lite	42	42
7	Keyboard PC	Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K480	42	42
8	Earphones Bluetooth	Britz Storm TWS5Plus	42	42
9	Laptop	HP PROBOOK 450 G8	182	182
10	Laptop Bag	Digital Chemi Hitam	180	180
11	Mouse	Digital Chemi Hitam	220	182
12	Mousepad	Putih (Tulisan Dinas Pendidikan Prov Gagwon)	220	220
13	Headset LED	Manhattan (hitam)	100	100
14	Headphone	Shuer SE5222	82	82
15	DVD Player	NEXT-303ODD-AC	182	182
16	Smart TV	Samsung KU75UA8090FXKR	10	10
17	Standing Bracket	Solid Mobile Standing Bracket in Black	10	10
18	Smart TV Wall Kit	Samsung Wall Mount Kit	10	10
19	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S7 FE	40	40
20	Tablet PC Case	Book Cover Samsung	40	40
21	Tablet PC Film	Screen Guard Tablet Samsung Galaxy S7 FE	40	40
22	Wireless Router	IP Time 702	20	20
23	Earphone pouch	Cross Clover	200	150
Jumlah			**2.412**	**2.324**

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan jumlah item yang diterima oleh BKHM dengan dokumen *Handover*, yaitu *mouse* sebanyak 38 item (220-182) dan earphone *pouch* sebanyak 50 item (200-150). Pengurus Barang menyatakan bahwa kedua item tersebut sifatnya bonus atau tambahan, sehingga jumlah yang diberikan menyesuaikan persediaan yang ada.

Atas penerimaan hibah tersebut Setjen telah melakukan hal-hal sebagai berikut;

(1) Telah dilakukan registrasi hibah dengan nomor register 2EPBFPMA tanggal 7 September 2022 berdasarkan Surat No S-633/PR.8/2022 tanggal 7 September

2022 perihal Penerbitan Nomor Register 2EPBFPM (Hibah *Coorperation In The Field of Education Information on Korean E-Learning Improvement Cooperation/KLIC*).

(2) BKHM Setjen telah mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor 29287/A6/LK.01.03/2023 tanggal 1 September 2023 ke KPPN Jakarta III yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) No 29290/A6/LK.01.03/2023 tanggal 1 September 2023.

(3) Barang telah dicatat dalam Modul Persediaan SAKTI pada 27 November 2023 senilai Rp6.508.625.040,00 pada akun Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 212. Rincian Penerima Hibah

Uraian	Jumlah Sekolah	Jumlah Unit
Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta	8	238
Dinas Pendidikan Jawa Barat	12	975
Dinas Pendidikan Prov. Banten	10	846
Dinas Pendidikan Kota Bogor	1	8
Dinas Pendidikan Kota Bekasi	2	30
Dinas Pendidikan Kota Depok	1	15
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak	1	8
Dinas Pendidikan Kota Tangerang	1	179
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	1	9
Fasilitator	2	16
Jumlah	**39**	**2.324**

Rincian nama sekolah dapat dilihat pada **Lampiran C.6.6**.

Sedangkan menurut Saldo Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 pada Laporan Rincian Barang Persediaan senilai Rp817.174.440,00 merupakan sisa persediaan yang belum diserahkan kepada fasilitator senilai Rp51.972.480,00 dan untuk sekolah di wilayah Disdik Prov. DKI senilai Rp765.201.960,00.

Penyerahan barang yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 213. Penyerahan Persediaan kepada Sekolah

No	Uraian	Tgl Penyerahan	BAST	Nilai Hibah (Rp)
1	Disdik Prov. Jawa Barat	21 Desember 2023	44265/A6/LK.01.03/2023	2.721.749.280,00
2	Disdik Prov. Banten	21 Desember 2023	44249/A6/LK.01.03/2023	2.263.277.760,00
3	Disdik Kota Bogor	21 Desember 2023	44114/A6/LK.01.03/2023	25.986.240,00
4	Disdik Kota Bekasi	21 Desember 2023	44177/A6/LK.01.03/2023	85.383.360,00
5	Disdik Kota Depok	21 Desember 2023	44153/A6/LK.01.03/2023	42.691.680,00
6	Disdik Kabupaten Lebak	21 Desember 2023	44248/A6/LK.01.03/2023	25.986.240,00
7	Disdik Kota Tangerang	21 Desember 2023	44067/A6/LK.01.03/2023	500.389.800,00
8	Disdik Kota Tangerang Selatan	21 Desember 2023	44197/A6/LK.01.03/2023	25.986.240,00
Jumlah				**5.691.450.600,00**

Selanjutnya sesuai hasil *stock opname* tanggal 16 Februari 2023 menunjukkan bahwa:

(a) Kesalahan pencatatan dua item barang yang seharusnya dicatat dalam kode barang 00017 Paket Tablet PC Samsung Galaxy S6 Lite dengan harga satuan Rp9.280.800,00 tercatat pada kode barang 00019 Paket Tablet PC Samsung Galaxy S7 FE dengan harga satuan Rp9.280.800,00. Atas hal ini akan diusulkan perubahan pencatatan kode barang;

(b) Mutasi keluar berdasarkan transaksi pada Modul Persediaan SAKTI adalah senilai Rp5.691.450.600,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp277.000.000,00 dengan jumlah barang yang diserahkan berdasarkan BAST senilai Rp5.968.450.600,00; dan

(c) Terdapat selisih barang berupa 28 laptop Samsung, 1 laptop HP, 2 tablet, dan 1 smart TV senilai Rp517.713.960,00. Pengelola BMN menyatakan bahwa barang tersebut telah diserahkan kepada SMPN 105 Jakarta.

Penyerahan barang kepada SMPN 105 Jakarta dilakukan pada 11 Agustus 2023 berdasarkan BAST Sementara No 26420/A.6/KS.03.01/2023 antara Plt Kepala BKHM dengan Kepala SMPN 105 Jakarta. Barang tersebut telah diserahkan kepada SMPN 105 Jakarta sebelum dicatat pada Modul Persediaan SAKTI dan sebagaimana hasil stok opname bahwa barang tersebut saat ini masih tercatat dalam Modul Persediaan SAKTI. Sehingga, BKHM tidak mencatat saldo Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat.

Namun, atas pencatatan barang yang telah diserahkan tersebut tidak dapat dilakukan koreksi kerena belum ada dokumen BAST antara KPB di Kemendikbudristek selaku pemberi barang dengan KPB Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta. Pelaksana kegiatan menjelaskan bahwa pada saat itu penyerahan dilakukan secara *urgent* karena permintaan pihak pemberi hibah untuk dapat segera menyerahkan barang tersebut ke sekolah penerima.

Hingga saat ini, penandatanganan BAST dan penyerahan barang ke sekolah di Wilayah DKI Jakarta masih terkendala karena belum ada respon dari pihak Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta. Kemendikbudristek telah berkorespondensi kepada Pj. Gubernur Prov. DKI Jakarta melalui surat No 1021/A.A6/KS.00.01/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Hibah Bantuan Peralatan TIK Program Kerjasama KLIC, namun belum ada surat balasan dari Pj. Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Selain itu, atas penyerahan barang ke Dinas Pendidikan belum ditetapkan dalam surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing pemda. Dokumen penyerahan hanya berupa BAST dan Surat Kesanggupan Dinas Pendidikan terkait, tanpa ada Naskah Perjanjian Hibah.

b) Ditjen PDM

(1) Selisih jumlah persediaan antara fisik barang dengan catatan pada laporan persediaan

Hasil pengujian fisik persediaan secara uji petik, diketahui terdapat selisih jumlah persediaan antara fisik barang dengan catatan pada laporan persediaan pada empat satker yaitu Direktorat SMA, Direktorat PMPK, BBPMP Prov. Jabar, dan BPMP Prov. Kaltim dengan rincian pada **Lampiran C.6.7.** Pengelola Persediaan pada empat Satker tersebut menjelaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat transaksi keluar di tahun 2024 yang belum

tercatat di kartu stock. Selain itu dijelaskan pula bahwa form keluar selisih persediaan pada saat stok opname persediaan belum dibuat.

(2) Salah kodefikasi barang persediaan

Hasil pengujian dokumen diketahui bahwa terdapat barang yang memiliki nama sama dicatat secara tepisah dan/atau dicatat dengan penamaan yang berbeda dan masing-masing memiliki saldo. Permasalahan ini terjadi pada dua Satker antara lain barang persediaan Slaber lantai, Binder clip 107, Binder clip 155, kertas HVS A4 dan map *Snelhecter* Plastik. Seluruh barang persediaan tersebut merupakan pengadaan pada tahun 2023.

Berdasarkan klarifikasi kepada pengelola persediaan satker BBPMP Prov. Jawa Barat dan BBPMP Prov. Jawa Timur diketahui bahwa kesalahan tersebut disebabkan pada saat penginputan pembelian barang oleh operator modul komitmen salah memasukan kategori barang, sehingga pada proses pendetailan barang pembelian oleh operator persediaan diinput/dibuat barang baru sesuai dengan kategori yang diinput oleh operator modul komitmen, sehingga terdapat nama barang sama dengan kategori yang berbeda. Atas hal tersebut operator persediaan akan mengeluarkan terlebih dahulu barang persediaan dengan kategori yang lama pada saat persediaan keluar, setelah persediaan habis akan menghapus referensi lama tersebut agar tidak terjadi barang yang sama dengan kategori yang berbeda. Rincian masing-masing barang persediaan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran C.6.8**.

c) Ditjen Diksi

Pada Direktorat Suslat terdapat satu item barang persediaan yang tercatat dengan nama yang berbeda sehingga menyulitkan pengelola persediaan dan pengelola gudang persediaan dalam melakukan identifikasi barang persediaan sesuai dengan pencatatannya. Operator GLP persediaan menjelaskan bahwa pada saat melakukan pendetailan persediaan, operator GLP tidak melihat fisik barang dan hanya melakukan pendetailan barang persediaan sesuai dengan nama persediaan pada kwitansi pembelian. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman nama persediaan antara operator GLP dengan pengelola gudang persediaan. Terhadap selisih tersebut akan dilakukan penelusuran dan perbaikan di masa mendatang.

d) Ditjen Diktiristek

Terdapat saldo persediaan pada Ditdaya berupa atas realisasi hibah berupa 286 unit sarana dan prasarana senilai Rp2.446.958.914.419,00. Pencatatan persediaan tersebut tidak dilakukan berdasarkan kuantitas fisik sarana/prasarana yang tertuang dalam suatu kontrak pengadaan, melainkan dicatat secara terpisah, yang disesuaikan dengan jumlah termin pelaksanaan pembayaran kontrak (yang terdiri dari kontrak tahun tunggal maupun tahun jamak). Metode pencatatan tersebut mengakibatkan pencatatan atas satu unit sarana/prasarana menjadi beberapa unit sarana/prasarana, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 214. Saldo Persediaan Berupa Hibah Sarana dan Prasarana kepada PTNBH

No	Sarana/Prasarana yang Tercatat Sebagai Persediaan	Jumlah (unit)	Saldo (Rp)
1	Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	116	1.733.385.520.600,00
2	Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	170	713.573.393.819,00
Jumlah		**286**	**2.446.958.914.419,00**

Rincian sarana/prasarana berupa tanah dan bangunan serta peralatan dan mesin tersebut disajikan pada **Lampiran C.6.9**.

Atas hal tersebut, Pengelola Persediaan pada Ditdaya menjelaskan bahwa metode pencatatan kuantitas sarana/prasarana secara terpisah tersebut merupakan penyesuaian atas proses pencatatan data kontrak pengadaan yang dilakukan di masing-masing PTNBH. Proses pencatatan atas data kontrak pengadaan sarana/prasarana dilakukan oleh operator modul komitmen pada aplikasi SAKTI di masing-masing PTNBH, yang bertugas melakukan perekaman data kontrak secara rinci. Operator modul komitmen merekam kuantitas sarana/prasarana berdasarkan daftar kartu pengawas pada kontrak *single years*/*multiyears*. Sarana/prasarana pada kontrak *single years*/*multiyears* akan direkam berdasarkan termin pelaksanaan pembayaran. Data termin pembayaran yang direkam pada modul komitmen tersebut akan dilaporkan secara detil pada modul pelaporan, sehingga kuantitas fisik sarana/prasarana hasil pengadaan tidak sepenuhnya sesuai dengan kuantitas sarana/prasarana pada aplikasi SAKTI. Pada saat proses penyusunan laporan keuangan, termin pembayaran atas sarana/prasarana dari masing-masing PTNBH akan terkonsolidasi dalam laporan persediaan pada Ditdaya.

Pengelola Persediaan Ditdaya telah menyampaikan kondisi tersebut secara informal kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan agar sistem perekaman kuantitas sarana/prasarana dapat diperbaiki berdasarkan jumlah sarana/prasarana yang tertuang dalam kontrak pengadaan, tidak berdasarkan termin pelaksanaan pembayaran. Namun demikian sampai dengan saat ini, aplikasi SAKTI belum dapat mengakomodir hal tersebut.

e) Ditjen Diksi

Dalam rangka penyajian persediaan pada Neraca, Ditjen Diksi telah melakukan *stock opname* per 31 Desember 2023. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat selisih lebih/kurang jumlah item persediaan antara catatan dengan hasil pemeriksaan fisik pada lima satker dengan rincian pada **Lampiran C.6.10.** Atas selisih tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) Pada Direktorat APTV, pengendalian atas mutasi masuk dan mutasi keluar barang dari gudang belum didukung dengan kartu persediaan per jenis barang. Selain itu, atas barang yang keluar dari gudang belum didukung dengan dokumen permintaan barang dari masing-masing bagian/jurusan/kelompok kerja (pokja). Hanya terdapat surat pengeluaran barang dari gudang persediaan

(2) Pada Direktorat KLSD PTV, pengendalian atas mutasi masuk dan mutasi keluar barang dari gudang telah didukung dengan kartu persediaan per jenis barang hanya untuk persediaan berupa bahan kimia (pembersih lantai, sabun cuci

tangan, dsb). Sedangkan untuk jenis barang persediaan lainnya belum terdapat kartu persediaan. Selain itu, atas barang yang keluar dari gudang belum didukung dengan dokumen permintaan barang dari masing-masing bagian/jurusan/ pokja. Hanya terdapat surat pengeluaran barang dari gudang persediaan

(3) Pada PNUP, pengendalian atas mutasi masuk dan mutasi keluar barang dari gudang belum didukung dengan kartu persediaan per jenis barang. Atas barang yang keluar dari gudang belum didukung dengan dokumen permintaan barang dari masing-masing bagian/jurusan/pokja. Hanya terdapat surat pengeluaran barang dari gudang persediaan.

(4) Pada PPNS pengelola persediaan menjelaskan bahwa:

(a) Terdapat kebutuhan barang yang mendesak untuk digunakan dalam praktikum sehingga pengeluaran barang persediaan dilakukan tanpa disertai bon permintaan. Atas pengeluaran tersebut pengelola persediaan mencatat dalam buku khusus dan selanjutnya akan dilakukan pembuatan bon permintaan pada saat terdapat permintaan barang berikutnya.

(b) Terdapat kondisi barang yang sudah dicatat keluar namun masih dititipkan di gudang (belum diambil oleh yang mengajukan permintaan barang).

(c) Dalam bon permintaan dan pengeluaran barang terdapat nama barang yang ditulis berbeda dengan nama barang yang tercatat dalam pencatatan persediaan dan terdapat penulisan nama barang yang tidak disertai dengan tipe dan spesifikasi barang sehingga pengelola barang kesulitan untuk mencocokan nama barang dalam bon permintaan dengan nama barang yang tercatat dalam aplikasi persediaan di SAKTI karena terdapat jenis barang dengan tipe dan spesifikasi ukuran yang berbeda.

(5) PENS pengelola persediaan menjelaskan bahwa:

(a) Atas selisih tersebut, pengelolaa persediaan tidak menemukan dokumen pendukung yang belum dicatat atas keluar masuknya barang tersebut;

(b) Terdapat kondisi yang mendesak dalam kebutuhan barang persediaan, sehingga terdapat permintaan persediaan yang tidak menggunakan bon permintaan.

3) Persediaan sudah usang dan rusak masih dicatat sebagai Persediaan

Pada Setditjen Diksi terdapat empat item persediaan yang sudah usang dan rusak serta tidak digunakan namun masih dicatat sebagai persediaan sebagai berikut.

Tabel 215. Persediaan Usang dan Rusak pada Setditjen Diksi

No	Nama Persediaan	Jumlah	Harga (Rp)
1	Cardio Check Alat Test Lipid Pro	1	13.282.500,00
2	Tensimeter Digital Omron	1	831.465,00
3	Tensimeter Digital Omron	1	1.265.880,00
4	Pulse Oximeter	1	220.000,00

Adapun barang persediaan yang tercatat sebagai persediaan dianggap sudah tidak dapat digunakan karena alat tersebut sudah *error*. Pengelola persediaan tidak mengeluarkan

barang usang tersebut dari pencatatan persediaan karena pengelola persediaan menganggap barang usang tersebut masuk dalam kategori aset tetap, sehingga dalam pengeluarannya harus dilakukan menggunakan metode penghapusan aset tetap.

4) Penatausahaan Persediaan PTN belum tertib

Kelemahan pencatatan persediaan pada PTN diuraikan sebagai berikut.

a) UPN Veteran Jawa Timur

Pada TA 2023 UPN Veteran Jawa Timur tiga unit laboratorium melakukan pengadaan barang persediaan senilai Rp70.209.125,00, namun atas penggunaan persediaan tersebut tidak diketahui dikarenakan pencatatan mutasi keluar belum secara tertib dilakukan. Pengeluaran barang persediaan pada laboratorium dilakukan dengan berdasarkan permintaan lisan tanpa didukung dokumen tertulis. Sedangkan penyajian saldo akhir persediaan pada ketiga laboratorium dilakukan hanya berdasarkan *stock opname* di akhir tahun 2023.

b) UMRAH

UMRAH tidak melaporakan persediaan yang ada di laboratorium. Hasil pemeriksaan menunjukkan.

(1) Laboratorium FKIP

Pemeriksaan cek fisik pada tanggal 1 Maret 2024 atas bahan praktikum di Laboratorium FKIP diketahui masih terdapat bahan praktikum hasil pengadaan Tahun 2023. Pencatatan mutasi masuk keluar bahan praktikum dilakukan secara manual dalam bentuk rekap *excel* setiap bulan. Namun keterangan Kepala Laboratorium FKIP bahwa selama ini tidak pernah melakukan *stock opname* fisik setiap akhir periode pada TA 2023, sehingga tidak diketahui sisa saldo bahan praktikum dan tidak dilaporkan sebagai persediaan.

(2) Pos Pelayanan Kesehatan

Pemeriksaan fisik pada 1 Maret 2024 atas obat pada Pos Pelayanan Kesehatan UMRAH diketahui masih terdapat persediaan obat hasil pengadaan Tahun 2023. Berdasarkan penjelasan dari pengelola Pos Pelayanan Kesehatan diketahui bahwa pengelolaan obat dikelola oleh Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama.

Penjelasan lebih lanjut dari pengelola diketahui bahwa penerimaan dan pengeluaran obat setiap hari dicatat pada kartu stok obat di setiap tempat obat. Setiap akhir bulan dilakukan pengecekan pada kartu stok obat, kemudian dilakukan pencatatan di buku besar stok obat. Namun keterangan pengelola Pos Pelayanan Kesehatan UMRAH bahwa selama ini tidak pernah dilakukan *stock opname* fisik pada setiap akhir periode TA 2023, sehingga tidak diketahui sisa saldo obat dan tidak dilaporkan sebagai persediaan. Hal tersebut dikarenakan pengelola tidak memahami ketentuan pengelolaan persediaan.

c) Universitas Musamus

Terdapat kelemahan pengendalian pengelolaan persediaan pada tiga fakultas yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan FKIP sebagai berikut:

(1) Petugas Laboratorium tidak pernah melakukan *stock opname* bahan praktikum;

(2) Petugas Laboratorium tidak memiliki buku pencatatan persediaan; dan

(3) Laboratorium pada tidak memiliki gudang penyimpanan bahan praktikum. Bahan praktikum disimpan dalam lemari penyimpanan.

Penjelasan Petugas Laboratorium atas hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

(1) Fakultas Teknik

LPJ penggunaan anggaran bahan habis pakai TA 2023 pada enam prodi berupa pencatatan mutasi masuk dan keluar penggunaan barang bahan laboratorium serta sisa barang dengan saldo nihil/nol. Sedangkan pada prodi lainnya, dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran bahan habis pakai hanya berupa usulan kebutuhan bahan praktikum, tanpa didukung laporan penggunaannya.

(2) Fakultas Pertanian

LPJ penggunaan anggaran bahan habis pakai TA 2023 berupa pencatatan mutasi masuk dan keluar penggunaan barang bahan laboratorium serta sisa barang dengan saldo nihil/nol. Sedangkan prodi lainnya LPJ penggunaan anggaran bahan habis pakai TA 2023 hanya berupa usulan kebutuhan bahan praktikum, tanpa didukung laporan penggunaannya.

(3) FKIP

LPJ penggunaan anggaran bahan habis pakai TA 2023 berupa penggunaan dana praktikum. Namun tidak ada pencatatan mutasi masuk dan keluar penggunaan barang bahan laboratorium serta laporan sisa barang.

5) Sisa barang hasil realisasi Belanja Bahan tidak dicatat

Realisasi belanja bahan pada BBGP yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program PGP dan PSP diantaranya pengadaan *kit* pendukung seminar. Hasil pengujian diketahui bahwa atas pengadaan *kit* pendukung seminar tersebut masih terdapat sisa bahan *kit* pendukung seminar dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 216. Rincian Sisa Belanja Bahan *Kit* Pendukung Seminar pada BBGP

No.	Satker	Jenis	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Sisa	Nilai (Rp)
1	BBG Prov. Jabar	Tas peserta Torch	182.040,00	47	8.555.880,00
		Blocknote	24.918,00	134	3.339.012,00
		Goodie bag	42.000,00	128	5.376.000,00
		Tumbler	105.000,00	125	13.125.000,00
		Kaos merdeka belajar	100.000,00	125	12.500.000,00
		Jumlah			**42.895.892,00**
2	BBGP Prov. Jateng	Koper Polo 17 Inch	220.000,00	3	660.000,00
		Tumbler	82.000,00	3	246.000,00
		Travel Bag	197.250,00	14	2.761.500,00
		Paket *Goodie Bag*	227.000,00	5	1.135.000,00
		Tas Ransel	125.000,00	22	2.750.000,00
		Tas Punggung	130.000,00	10	1.300.000,00
		Tas Punggung	130.000,00	5	650.000,00

No.	Satker	Jenis	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Sisa	Nilai (Rp)
		Kain Batik	295.000,00	13	3.835.000,00
		Tumbler dan Mug	205.000,00	8	1.640.000,00
		Goodie Bag dan Tas	146.750,00	8	1.174.000,00
		Speaker Aktif	135.000,00	50	6.750.000,00
		Tas Ransel	225.000,00	12	2.700.000,00
					25.601.500,00
3	BBGP Prov. DIY	*Kit* Seminar angkatan 8	197.000,00	128	25.216.000,00
		Kit Seminar angkatan 9	199.000,00	37	7.363.000,00
					32.579.000,00

Sedangkan pada BBGP Prov. Jatim masih terdapat sisa bahan 1.431 unit barang minimal senilai Rp22.636.700,00 yang belum didistribusikan kepada penerima dengan rincian yang dijelaskan dalam **Lampiran C.6.11.**

Atas hal tersebut pengurus BMN menjelaskan menjelaskan bahwa terjadinya sisa karena tidak semua peserta kegiatan lokakarya dapat hadir pada saat pelaksanaan acara. Selain itu belum ada petunjuk lebih lanjut dari Kepala Bagian Umum BBGP Jabar untuk memasukkan saldo sisa bahan ke dalam laporan keuangan.

c. Penatausahaan penyimpanan barang persediaan tidak memadai

Hasil pemeriksaan secara uji petik fisik persediaan diketahui bahwa pengamanan atas tempat penyimpanan persediaan pada UPN Veteran Jawa Timur tidak memadai, dengan uraian sebagai berikut.

1) Laboratorium Pengujian Terpadu

Persediaan bahan kimia pada Laboratorium Pengujian Terpadu belum disimpan pada lemari atau gudang terpisah, melainkan diletakkan dan disimpan di bawah salah satu meja di ruang kerja. Laboratorium Pengujian Terpadu belum memiliki lokasi terpisah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan persediaan yang sebagian besar merupakan bahan kimia.

2) Laboratorium Biologi dan Mikrobiologi

Persediaan milik Laboratorium disimpan dalam satu kulkas bergabung dengan persediaan milik dosen.Terdapat persediaan berupa bahan ajar media dengan jumlah lebih dari lima botol milik dosen yang sudah dalam kondisi kadaluwarsa di dalam kulkas tersebut. Keterbatasan kulkas sebagai media penyimpanan bahan ajar menyebabkan penyimpanan persediaan milik laboratorium digabung menjadi satu dengan milik dosen.

Hal tersebut mengakibatkan pengelola persediaan kesulitan mencatat penggunaan persediaan, dikarenakan kesamaan merk maupun kemasan persediaan milik laboratorium dan milik dosen.

d. Pengadaan Persediaan tidak dianggarkan sebagai Belanja Barang Persediaan

1) UMRAH

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Bahan Praktikum dan Belanja Obat menggunakan anggaran belanja bahan habis (521211) yang seharusnya dianggarkan sebagai belanja barang persediaan (521811). Dengan demikian belanja barang bahan praktikum dan obat tidak tercatat sebagai persediaan dan beban persediaan dalam aplikasi SAKTI. Biro

Perencanaan menjelaskan bahwa bahan praktikum dianggarkan sebagai bahan habis pakai dengan pengertian tidak masuk dalam kategori barang persediaan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sisa bahan praktikum yang tidak tercatat sebagai persediaan.

2) Universitas Musamus

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa belanja Bahan Praktikum Laboratorium menggunakan anggaran Belanja Bahan Habis Pakai (521211) yang seharusnya dianggarkan sebagai belanja persediaan (521811). Dengan demikian belanja barang Bahan Praktikum Laboratorium tidak tercatat sebagai persediaan dan beban persediaan dalam aplikasi SAKTI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerinahan,

1) Lampiran I.02, PSAP No. 1, Paragraf 54 yang menyatakan bahwa Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau;

b) berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

2) Lampiran I.05, PSAP No. 5, Paragraf 12 yang menyatakan bahwa Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

3) Lampiran I.05, PSAP No. 5, Paragraf 13 yang menyatakan bahwa Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (b) pada saat diterima atau hak kepemilikan dan/atau kepenguasaannya berpindah.

4) Lampiran I.05, PSAP No. 5, Paragraf 14 yang menyatakan bahwa Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik;

b. PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D, pada:

1) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan BMN/D meliputi huruf: a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) Pengadaan; c) penggunaan; d) Pemanfaatan; e) Pengamanan dan pemeliharaan; f) Penilaian; g) Pemindahtanganan; h) Pemusnahan; i) Penghapusan; j) Penatausahaan; dan k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2) Pasal 4, pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelola BMN berwenang dan bertanggung jawab, antara lain:

a) Huruf g Memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan.

b) Huruf j. Memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

3) Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab, antara lain:

a) Huruf h. Mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

b) Huruf j. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

4) Pasal 42:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN/D yang berada dalam penguasaannya;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pengamanan BMN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;

5) Pasal 58 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan, antara lain huruf f. untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola.

6) Pasal 70 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan tata cara: d) Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang, dan e) Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam BAST barang.

7) Pasal 92 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan, dan pengamanan BMN/D yang berada di dalam penguasaannya.

c. PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:

1) BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipindahtangankan; atau

2) terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN

1) Pasal 18 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi yang berada dalam penguasaannya: a. melalui pelaksanaan opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, untuk BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan; dan b. melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

2) Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya dilalukan dengan berpedoman pada SAP; dan

3) Pasal 47:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, ditatausahakan sebagai aset lancar berupa persediaan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya:

(1) dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai;

(2) tidak disajikan dalam neraca; dan

(3) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK.

4) Pasal 48 yang menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berlaku untuk BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan;

5) Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan BMN yang menyatakan bahwa Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna;

e. PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VI Kebijakan Akuntansi Persediaan yang menyatakan bahwa:

1) Huruf A Definisi menyatakan bahwa suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

2) Huruf D Pengukuran menyatakan bahwa Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO".

3) Huruf E Penyajian menyatakan bahwa persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventatisasi fisik (*stock opname*) persediaan minimal setiap akhir semester dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelola persediaan secara tertib dan adanya efisiensi dalam pelaksanaanya.

f. Permendikbudristek Nomor 125/M/2021 tentang POS Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kemendikbudristek Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan pada POS Pembukuan BMN Pada angka 5 yang menyatakan bahwa melaksanakan input data pengadaan BMN ke dalam aplikasi pencatat BMN dan atau buku kontrol.

g. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

1) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

2) Lampiran pada Bab II tentang Penatausahaan Persediaan yang menyatakan antara lain:

a) Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis barang. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan disusun Laporan Persediaan. Laporan Persediaan disusun menurut Subkelompok Barang dan dilaporkan setiap semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil opname fisik.

b) Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis barang. Buku Persediaan diisi setiap ada mutasi barang persediaan seperti pembelian hibah dan mutasi penggunaan barang persediaan.

c) Laporan Persediaan harus memberikan informasi jumlah persediaan yang rusak atau usang. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Persediaan yang berada dalam penguasaan pihak lain menjadi tidak terpantau;

b. Nilai Persediaan di Ditjen Kebudayaan senilai Rp2.085.010.650,00 tidak jelas status penggunaan dan kelanjutannya;

c. Potensi kurang/lebih catat atas selisih jumlah persediaan antara catatan dengan hasil pengujian fisik dan sisa bahan *kit* pendukung seminar yang tidak dicatat dalam persediaan;

d. Persediaan yang belum dicatat berpotensi hilang atau disalahgunakan; dan

e. Kelemahan pengendalian pengelolaan Persediaan berpotensi hilang, rusak, dan/atau terjadi penyalahgunaan.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada masing-masing Unit Utama belum optimal dalam melakukan pengelolaan Persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pengelola/Pengurus Barang pada masing-masing Unit Utama I kurang cermat dalam menatausahakan persediaan yang dikelolanya.

c. Rektor PTNBH penerima kurang optimal melakukan penyusunan dokumen persyaratan persetujuan pemindahtanganan BMN berupa tanah dan bangunan atau peralatan dan mesin.

d. Kepala unit pengelola persediaan pada masing-masing PTN belum memahami ketentuan pengelolaan persediaan

Atas hal tersebut Kemendikbudristek sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan penjelasan sebagai berikut

a. Terkait dengan penyajian telah dilakukan penyesuaian/koreksi dan pengungkapan pada laporan keuangan tahun 2023;

b. Khusus terkait dengan persediaan pada Ditjen Diktiristek (Ditdaya), telah dilakukan pendetailan persediaan yang berasal dari realisasi belanja banpem kepada PTN-BH berupa 286 unit sarana dan prasarana senilai Rp2.446.958.914.419,00, berdasarkan jumlah barang per satuan gedung dan persatuan peralatan mesin dan telah diungkapkan dalam CaLK dan CaLBMN Kemendikbudristek tahun 2023.

c. Selain itu Kemendikbudristek juga telah mendiskusikan terkait dengan skema penyerahan yang lebih efisien, efektif dan akuntabel, tanpa melalui mekanisme hibah yang prosesnya lama dan panjang, mengingat asset tersebut sejak awal perolehannya sudah berada di PTN-BH bahkan telah dimanfaatkan oleh PTN-BH.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk:
   1) melakukan *stock opname* persediaan secara tertib;
   2) memutakhirkan pencatatan dan penyajian persediaan;
   3) melakukan pengamanan dalam pengelolaan persediaan sesuai ketentuan;
   4) melaporkan kondisi barang persediaan sesuai kondisi sebenarnya;
   5) mengintensifkan proses BAST atas barang yang diserahkan kepada masyarakat;

b. Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan Sesditjen Kebudayaan untuk melakukan reviu keberlanjutan pekerjaan yang bersifat perencanaan seperti masterplan, dan DED, pada tiga objek cagar budaya yang akan diserahkan kepada pemda setempat senilai Rp2.085.010.650,00;

c. Dirjen Diktiristek memerintahkan KPA masing-masing Eselon II supaya:
   1) melakukan inventarisasi atas persediaan yang diserahkan kepada PTNBH dan tidak lagi dalam penguasaan Kemdikbudristek serta melaporkan hasilnya ke BPK;
   2) segera mengajukan proses BAST dan persetujuan hibah kepada PTNBH secara berjenjang ke Presiden melalui Kemendikbudristek selaku Pengguna Barang dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
   3) Menyusun laporan monitoring atas:
      a) Rincian nilai dan kondisi persediaan berupa BMN yang dikuasai oleh PTNBH;
      b) Proses pengajuan persetujuan hibah yang belum selesai dilaksanakan oleh PTNBH penerima;
   4) Memerintahkan
      a) Kuasa Pengguna Barang Ditdaya agar lebih optimal melakukan pengendalian pengelolaan dan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan;

b) Pengelola Persediaan Ditdaya agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Operator Komitmen di PTNBH penerima dalam proses pengusulan pemindahtanganan BMN berupa tanah dan bangunan serta peralatan dan mesin;

d. Dirjen GTK supaya memerintahkan kepada Kepala BBGP Prov. Jawa Barat, Kepala BBGP Prov. Jawa Tengah, Kepala BBGP Prov. Jawa Timur, dan Kepala BBGP Prov. D.I.Yogyakarta untuk memerintahkan pengelola barang agar mengadministrasikan barang sisa belanja bahan (*kit* pendukung seminar) dan memantau distribusinya.

7. Penatausahaan dan Pencatatan Aset Lainnya pada Kemdikbudristek Kurang Memadai

LK Kemendikbudristek Tahun 2023 (*audited*) menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.044.126.059.068,00 dan Rp1.409.286.526.582,00 atau naik senilai Rp634.839.532.486,00. Aset Lainnya diantaranya terdiri dari Aset Tak Berwujud (ATB), Dana Yang Dibatasi Penggunaanya (DPP), Aset Lain-lain, dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

Hasil pemeriksaan atas perincian dan penatausahaan Aset Lainnya pada satuan kerja Kemendikbudistek menunjukkan bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Pengembangan aplikasi belum dicatat sebagai ATB

1) Aplikasi *E-Planning*

Biro Perencanaan telah mengembangkan aplikasi dan kajian *E-Planning* sebelum tahun 2023 dan setiap tahunnya selalu dilakukan pengembangan atau penambahan fitur pada aplikasi. Pengembangan aplikasi menggunakan mata anggaran Belanja Barang dan Jasa, sehingga belum pernah dicatat sebagai ATB.

Pada TA 2023 Biro Perencanaan merealisasikan kegiatan Pengembangan Aplikasi *E-Planning* pada melalui Belanja Jasa Lainnya dengan 8 SPK dengan nilai total senilai Rp785.991.000,00. Sampai saat ini, Biro Perencanaan belum dapat mengidentifikasi harga perolehan atas aplikasi *E-Planning* untuk dicatat sebagai ATB.

2) Lima aplikasi yang masih digunakan pada Setditjen Diksi

Terdapat lima aplikasi yang masih aktif digunakan untuk operasional namun belum dicatat sebagai ATB dalam Neraca per 31 Desember 2023 karena belum dapat diketahui nilai perolehannya. Rincian aplikasi yang belum di catat sebagai ATB sebagai berikut.

Tabel 217. Aplikasi yang Belum Belum Diketahui Nilai Perolehan pada Setditjen Diksi

No	Nama Aplikasi	Tahun *Launching* Aplikasi	Fungsi	Keterangan dari PIC Aplikasi
1	Dapodik Vokasi	2015	Pendataan satuan pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Masih aktif digunakan. Awal pengembangan di PAUDDIKMAS, setelah dilakukan perubahan organisasi tahun 2020, aplikasi Digunakan oleh Ditjen Diksi. Belum dicatat sebagai ATB pada Setditjen Diksi
2	Manajemen Vokasi	2015	Manajemen Dinas Pendidikan untuk LKP	
3	Sikerma	2022	Pendataan Kerja sama yang dilakukan oleh satuan pendidikan vokasi	Masih aktif digunakan. Awal pengembangan dilakukan oleh Setditjen

No	Nama Aplikasi	Tahun *Launching* Aplikasi	Fungsi	Keterangan dari PIC Aplikasi
4	Sidakin	2022	Dashbboard perhitungan IKU Perguruan Tinggi Vokasi (PTV)	Pendidikan Vokasi. Belum dicatat sebagai ATB pada Setditjen Diksi
5	Dashboard Kinerja	2022	Dashboard capaian kinerja satker vokasi	

Pengelola BMN dan penanggung jawab aplikasi Setditjen Diksi menjelaskan akan melakukan penelusuran terkait nilai perolehan dan pengembangan aplikasi yang dilakukan agar dapat tercatat sebagai ATB pada Setditjen Diksi.

3) Aplikasi sistem informasi akademik pada PENS

PENS memiliki aplikasi sistem informasi akademik yang dikembangkan sejak tahun 2002 namun belum dicatat sebagai ATB. Pengembangan sistem informasi akademik dilakukan oleh Unit Pengolahan Data Elektronik (PDE). Unit PDE memiliki pencatatan atas pengembangan aplikasi sistem informasi akademik sejak tahun 2017, walaupun pengembangan aplikasi sistem informasi akademik tersebut sudah dimulai sejak tahun 2002. Kepala Unit PDE telah menyampaikan rincian pencatatan pengembangan aplikasi sistem informasi akademik tersebut, namun nilai yang digunakan merupakan nilai estimasi dari Kepala Unit PDE bukan nilai *riil* dari harga perolehan pengembangan aplikasi tersebut. Rincian pengembangan aplikasi sistem informasi akademik sejak tahun 2017 dapat dilihat pada **Lampiran C.7.1**.

Kepala Unit PDE belum berkoordinasi dengan PPK terkait pencatatan aplikasi sistem informasi akademik tersebut. Selain itu, rincian pencatatan pengembangaan aplikasi sistem informasi akademik belum diserahkan kepada pengelola BMN untuk dilakukan pencatatan. Rincian tersebut hanya diserahkan kepada pihak SPI setiap tahunnya dari tahun 2017. Sedangkan pencatatan pengembangan sejak awal dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 belum dapat disampaikan karena data belum terkumpul seluruhnya.

b. Hak Kekayaan Intelektual belum dicatat sebagai ATB

PENS, PPNS, dan Polimedia memiliki hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar pada DJKI Kementerian Hukum dan HAM, namun belum dicatat sebagai ATB. Kekayaan intelektual tersebut dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) pada Unit Sentra Hak Kekayaan Intelektual pada masing- masing Satker. Uraian kekayaan intelektual diuraikan sebagai berikut.

1) PENS

Hak kekayaan intelektual yang telah *granted*/terdaftar dan bersertifikat sejak tahun 2018 sebanyak 100 buah yang terdiri dari empat desain industri, tiga merek, enam hak paten penuh, dan 87 hak paten sederhana yang merupakan hasil karya dari para dosen, mahasiswa, dan pihak internal PENS yang melakukan penelitian pada lingkup a.n PENS. Atas kekayaan intelektual tersebut belum diketahui nilai perolehannya. Rincian kekayaan intelektual milik PENS yang belum dicatat sebagai ATB dapat dilihat pada **Lampiran C.7.2**.

2) PPNS

Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada DJKI sejak tahun 2020 adalah sebanyak 245 buah yang terdiri dari 237 hak cipta dan delapan hak merek yang merupakan hasil karya dari para dosen, mahasiswa, dan pihak internal PPNS yang melakukan penelitian pada lingkup atas nama PPNS. Hak kekayaan intelektual tersebut belum diketahui nilai perolehannya. Rincian kekayaan intelektual milik PPNS yang belum dicatat sebagai ATB dapat dilihat pada **Lampiran C.7.3**.

3) Polimedia memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada DJKI sejak tahun 2022 sebanyak 114 hak cipta yang merupakan hasil karya dari para dosen, mahasiswa, dan pihak internal Politeknik yang melakukan penelitian pada lingkup atas nama Polimedia. Kekayaan intelektual tersebut belum diketahui nilai perolehannya. Rincian kekayaan intelektual milik Polimedia yang belum dicatat sebagai aset tak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.7.4**.

Hasil penjelasan dari pengelola kekayaan intelektual diketahui bahwa pihak pengelola dan unit terkait akan melakukan penilaian dan atau penulusuran atas nilai perolehan yang dapat diakui dan dicatat sebagai nilai ATB hak kekayaan intelektual. Pengelola kekayaan intelektual belum pernah menyampaikan rincian hak kekayaan intelektual yang terdaftar ke pengelola BMN.

c. Pencatatan ATB tidak dilengkapi dengan identitas barang

1) UPN Veteran Jawa Timur

UPN Veteran Jawa Timur mencatat 21 unit ATB yang berada di Pusat Bahasa UPN Veteran Jawa Timur senilai Rp0,00 berupa *software* komputer, namun tidak diketahui rincian merk dan nama penggunanya (rincian pada **Lampiran C.7.5**). Berdasarkan keterangan dari Kepala Biro Umum dan Keuangan diketahui bahwa ATB tersebut merupakan hasil migrasi dari aplikasi SIMAK BMN ke SAKTI. Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir pengelola BMN masih dalam proses mengidentifikasi dan menginventaris atas ATB hasil migrasi data tersebut.

2) UMRAH

Terdapat 16 barang senilai Rp128.748.000,00 yang tidak dilengkapi dengan penjelasan yang memadai antara lain merek, nomor, dan tanggal Penetapan Status Pengguna (PSP), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 218. ATB UMRAH yang Tidak Dilengkapi dengan Penjelasan yang Memadai

No	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Software Komputer	18/11/2023	29.000.000,00
2.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
3.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
4.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
5.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
6.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
7.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
8.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
9.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
10.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
11.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00

No	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
12.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
13.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
14.	Software Komputer	23/12/2015	2.200.000,00
15.	Software Komputer	23/12/2015	27.500.000,00
16.	Software Komputer	28/10/2015	43.648.000.00
Total			**128.748.000,00**

Hasil konfirmasi kepada Pengelola BMN diketahui bahwa ATB tersebut masih dalam proses penelusuran/inventarisasi dan untuk selanjutnya akan diusulkan untuk dihapuskan.

d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah belum dihapuskan

1) Direktorat SMP

Aset yang sudah tidak dalam penguasaan Direktorat SMP karena telah dihibahkan ke sekolah pada rentang waktu tahun 2004 s.d. 2009 sebanyak 12.229 unit barang dengan nilai perolehan seluruhnya senilai Rp65.406.803.927,00, masih tercatat sebagai Aset Lainnya – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.

Dari nilai tersebut senilai Rp64.891.480.427,00 telah dilakukan reviu oleh Itjen pada tahun 2023 dengan rekomendasi melakukan koreksi melalui cara mengajukan usulan penghapusan aset lain-lain. Hingga pemeriksaan berakhir Direktorat SMP masih melakukan proses penghapusan dengan tahapan usulan sebagai berikut.

Tabel 219. Tahapan Usulan Penghapusan BMN yang telah Dihibahkan Tahun 2007 - 2009

No. Tahap	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Proses	No Surat dan Tanggal Surat
1	1.278	9.782.298.480,00	Disetujui	Surat Sekjen Nomor 1298/MPK.A/LK.01.03/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Persetujuan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat SMP
2	1.980	9.722.166.000,00	Disetujui	Surat Sekjen Nomor 3226/MPK.A/LK.01.03/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Persetujuan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat SMP
3	3.000	9.684.900.000,00	Permohonan Penghapusan	Surat Direktur SMP Nomor 0442/C4/LK.06.03/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN Tahap 4
4	2.250	8.948.940.750,00	Permohonan Penghapusan	Surat Direktur SMP Nomor 0697/C4/LK.05.05/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN Tahap 5
5	1.614	9.456.518.250,00	Permohonan Penghapusan	Surat Direktur SMP Nomor 0697/C4/LK.05.05/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Permohonan

No. Tahap	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Proses	No Surat dan Tanggal Surat
				Persetujuan Penghapusan BMN Tahap 6
6	87	7.312.200.447,00	Penyusunan permohonan penghapusan	-
7	1.774	9.984.456.500,00	Belum proses	-
Total	**11.983**	**64.891.480.427,00**		

Sementara itu senilai Rp515.323.500,00 belum dilakukan reviu oleh Itjen namun telah masuk dalam tahapan usulan penghapusan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 220. Barang yang Belum termasuk ke Dalam Rencana Usulan Penghapusan

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai	Kondisi	Tahun Perolehan
1	Papan Visual/Papan Nama	6	823.500,00	Baik	2004
2	Hub	120	204.000.000,00	Baik	2010
3	Monitor	120	310.500.000,00	Rusak Berat	2010
Jumlah		246	515.323.500,00		

2) BBPMP Prov. Sulawesi Selatan

Aset berupa peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak sebanyak 954 unit senilai Rp4.255.326.900,00 yang sudah tidak dalam penguasaan BPPMP Prov. Sulsel. Peralatan TIK tersebut dihibahkan ke kelompok masyarakat yaitu Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tahun 2009. Rincian jenis barang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 221. Daftar Barang yang Diserahakan ke KKG/MGMP di Tahun 2009

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai	Tahun Perolehan
1	Lap Top	581	4.062.758.700,00	2009
2	Modem	185	99.715.000,00	2009
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	188	92.853.200,00	2009
Jumlah		**954**	**4.255.326.900,00**	

BBPMP Prov. Sulawesi Selatan telah merencanakan untuk mengusulkan proses penghapusan BMN tersebut. Adapun salah satu upaya proses yang dilakukan adalah pada bulan Januari 2024, BBPMP Prov. Sulawesi Selatan telah melakukan monitoring dan pembaharuan BAST ke 11 Kabupaten yang berada pada Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

3) UPN Veteran Jawa Timur

Terdapat Aset Lain-lain yang belum dilakukan proses penghapusan dengan nilai perolehan senilai Rp1.933.352.091.00 (rincian pada **Lampiran C.7.6**) dengan uraian sebagai berikut.

a) Sepuluh unit kendaraan mini bus dengan nilai perolehan Rp1.180.443.000,00 yang dikategorikan dalam kondisi rusak berat dan telah mendapat persetujuan lelang dari KPKNL namun belum dilakukan proses lelang dan penghapusan;

b) Lima unit micro bus dalam kondisi rusak berat yang telah dihibahkan senilai Rp752.909.091,00 namun belum dilakukan penghapusan.

e. Selisih antara nilai mutasi kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan nilai pada SK Penghapusan

Direktorat SMA melakukan penghapusan BMN untuk 2.397 unit barang senilai Rp5.329.106.678,00 yang tertuang dalam Kepmendikbudristek Nomor 6037/C5/KU.05.02/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penghapusan BMN Selain Tanah dan Bangunan pada Direktorat SMA. Sementara pada tahun 2023 dalam aplikasi SAKTI terdapat mutase kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp5.275.460.478,00 karena adanya penghapusan BMN di tahun 2023. Dengan demikian terdapat selisih nilai antara SK penghapusan dengan mutase kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp53.646.200,00 (Rp5.329.106.678,00 – Rp5.275.460.478,00). Atas selisih tersebut Pengelola BMN belum dapat memberikan penjelasan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D Pasal 42:
   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN/Dyang berada dalam penguasaannya.
   2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan BMN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
   3) Penjelasan Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan administrasi antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas BMN.
b. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
   1) Paragraf 77 yang menyatakan bahwa Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan dating.
   2) Paragraf 78 yang menyatakan bahwa set tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
c. PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa Berdasarkan BAST Pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST;
d. PMK Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi ATB
   1) Paragraf 7 yang menyatakan bahwa Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:
      a) Perangkat lunak (*software*) yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan

lainnya. Perangkat lunak (*software*) yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware tertentu.

b) Lisensi dan Waralaba (*franchise*);

c) Hak Paten dan Hak Cipta;

d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka 362anjang;

e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan

f) ATB dalam pengerjaan.

2) Paragraf 10 yang menyatakan bahwa ATB diakui jika:

a) Dapat diidentifikasi;

b) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

c) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

d) Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

e. Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi ATB Berbasis Akrual:

1) Angka 2.2. Kriteria ATB: Dapat diidentifikasi, dapat dikendalikan dan memiliki manfaat ekonomi masa depan.

2) Angka 3.1.1. Pengakuan ATB yang Diperoleh Secara Internal: Untuk melengkapi prinsip-prinsip umum pengakuan dan pengukuran, entitas harus menerapkan persyaratan dan pedoman di bawah ini:

a) Untuk menentukan apakah peroleh internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu:

(1) Tahap penelitian atau riset;

(2) Tahap pengembangan.

b) Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kepemilikan ATB dalam bentuk aplikasi dan kekayaan intelektual yang tidak dicatat pada berpotensi diakui oleh pihak lain dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya;

b. ATB yang disajikan belum mecakup keseluruhan aset yang tak berwujud yang dimiliki Kemendikbudristek; dan

c. Aset Lainnya yang disajikan di Neraca Kemdikbudristek per 31 Desember 2023 senilai Rp71.724.230.918,00 (Rp128.748.000,00 + Rp65.406.803.927,00 + Rp4.255.326.900,00 + Rp1.933.352.091,00) tidak menunjukkan kondisi sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan:

a. KPB satker terkait belum optimal dalam melakukan pengelolaan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian ATB yang dimilikinya;
b. Pengelola BMN pada satker terkait belum sepenuhnya menatausahakan BMN secara memadai;
c. Pengelola BMN terkait kurang aktif dalam memproses penghapusan BMN yang sudah dihentikan dari operasional pemerintah.
d. Pengelola aplikasi dan hak kekayaan intelektual satker terkait belum melakukan inventarisasi atas dokumen-dokumen pemerolehan aplikasi dan kekayaan intelektual sebagai dasar pencatatan di Laporan Keuangan;

Atas hal tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan penatausahaan aset lain secara internal serta akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Seluruh Pimpinan Unit Utama di Kemendikbudristek supaya memerintahkan:
   1) KPB masing-masing satker untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Aset Lainnya yang dimilikinya;
   2) Menginventarisasi seluruh aplikasi dan hak kekayaan intelektual yang dapat dikapitalisasi menjadi ATB;
   3) Menginventarisasi seluruh BMN yang telah dihentikan dari operasional pemerintah, rusak berat dan BMN yang telah dihibahkan kepada pihak lain namun masih tercatat dalam Aset Lainnya untuk diusulkan penghapusannya;
b. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UPN Veteran Jawa Timur dan Rektor UMRAH untuk melengkapi data dan informasi ATB dalam aplikasi SAKTI; dan
c. Dirjen PDM supaya memerintahkan Direktur SMA untuk melakukan penelusuran atas perbedaan antara nilai mutasi kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan nilai pada SK Penghapusan untuk selanjutnya melakukan perbaikan.

8. Pengelolaan Aset Tetap pada Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Memadai

Neraca per 31 Desember 2023 pada Kemendikbudristek menyajikan saldo Aset tetap (*audited*) senilai Rp413.455.948.893.704,00, menurun senilai Rp3.269.798.939.805,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp416.725.747.833.509,00. Berikut perincian aset tetap secara lengkap:

Tabel 222. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	364.155.467.675.559,00	363.734.889.143.504,00	420.578.532.055,00
2	Peralatan dan Mesin	29.683.014.854.455,00	31.043.135.639.428,00	(1.360.120.784.973,00)

No	Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
3	Gedung dan Bangunan	43.298.574.520.466,00	45.477.256.336.354,00	(2.178.681.815.888,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.707.755.895.072,00	1.766.571.830.902,00	(58.815.935.830,00)
5	Aset tetap Lainnya	1.185.956.399.320,00	1.592.363.045.105,00	(406.406.645.785,00)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	4.851.377.020.358,00	5.128.463.104.121,00	(277.086.083.763,00)
Jumlah		**444.882.146.365.230,00**	**448.742.679.099.414,00**	**(3.860.532.734.184,00)**
Akumulasi Penyusutan		(31.426.197.471.526,00)	(32.016.931.265.905,00)	590.733.794.379,00
Nilai Buku Aset Tetap		**413.455.948.893.704,00**	**416.725.747.833.509,00**	**(3.269.798.939.805,00)**

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengelolaan aset tetap dan wawancara dengan pengelola BMN pada satker dibawah Kemendikbudristek menunjukkan terdapat hal-hal berikut:

a. Aset Tetap tidak didukung bukti kepemilikan

1) Tanah belum bersertipikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kemendikbudristek

a) Biro Umum dan PBJ Setjen

(1) Aset Tetap Tanah belum bersertipikat a.n Pemerintah RI c.q Kemendikbudristek pada Biro Umum dan PBJ yaitu Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama seluas 13.081 m^2 beralamat di Jl. Raya Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor senilai Rp19.355.759.000,00 yang digunakan untuk Wisma Arga Mulya. Pada tahun 2023 Biro Umum dan PBJ telah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, KPKNL Bogor, KPKNL Jakarta I, PT. Perkebunan VIII, dan KemenBUMN terkait penyelesaian masalah lebih lanjut. Kepala Biro Umum dan PBJ telah bersurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan nomor 10381/A7/LK.02.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang permohonan Hak Pakai atas tanah di Jalan Raya Puncak Gadog, Tugu Selatan, Cisarua Bogor, namun sampai saat ini belum ada balasan dari Kantor Pertanahan Bogor.

(2) Bukti kepemilikan tanah seluas 1.110 m^2 beralamat di Hos Cokroaminoto 41 Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat senilai Rp84.427.704.000,00 hanya berupa akta jual beli (AJB).

b) Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI

Tanah seluas 155.433 m² senilai Rp209.964.304.801,00 belum bersertifikat atas nama Kemendikbudristek adalah sebagai berikut berikut.

Tabel 223. Tanah Belum Bersertifikat a.n Kemendikbudristek pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI

No	Uraian	Luas (m²)	Nilai (Rp)	Belum Sertifikat a/n Kemendikbudristek	
				Luas (m²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Untuk Bangunan Museum	55.935	159.562.254.000	1.000	1.011.844.000
2	Tanah untuk Bangunan Bersejarah Lainnya	302.945	407.081.016.301	69.708	28.590.587.801

No	Uraian	Luas (m²)	Nilai (Rp)	Belum Sertifikat a/n Kemendikbudristek	
				Luas (m²)	Nilai (Rp)
3	Tanah untuk Makam Bersejarah	107.831	202.677.346.000	84.725	180.361.873.000
Jumlah		**466.711**	**769.320.616.301**	**155.433**	**209.964.304.801**

Rincian pada **Lampiran C.8.1**

c) BGP Prov. Banten

Bukti kepemilikan tanah seluas 31.800 m^2 senilai Rp99.258.932.000,00 masih berupa Hak Guna Bangun Nomor 25/Sukmajaya a.n PT Karya Tunggal Dinamika. Tanah pada BGP Prov. Banten diperoleh dari hasil PSP dari Kementerian Keuangan melalui SK Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-90/KN/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Kemendikbudristek.

d) UPN Veteran Jawa Timur

Empat bidang tanah senilai Rp11.080.220.000 belum memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Pusat c.q Kementerian Pendidikan. Pengelola BMN menjelaskan bahwa atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kemendikbudrsitek pada bulan November tahun 2023, namun sertifikat ketiga tanah tersebut belum diterima pengelola BMN sehingga belum dilakukan pembaharuan data pada database SIMAN per 31 Desember 2023. Sedangkan satu bidang masinh dalam proses balik nama yaitu Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungallow/*Cottage*.

e) BBPPMPV Pertanian

Tanah bangunan Gedung dan kantor di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Tengah Cianjur seluas 442.080 m^2 yang diperoleh—pada tahun 2004 senilai Rp298.735.560.000,00, didukung dokumen kepemilikan sertifikat Nomor 8016198 sesuai surat ukur Nomor GS.Nomor 481 Tahun 1982, a.n Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah berkedudukan di Jakarta. Atas sertifikat tanah yang belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kemendikbudristek, pengelola BMN BBPPMPV Pertanian akan melakukan pengurusan balik nama sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku dengan rencana sebagai berikut.

(1) Surat BPN/ATR Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor IP.02.02/989-32.200/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang merupakan tindak lanjut hasil pengukuran untuk revisi PBT Nomor 79-10.13-2016 telah dibuatkan surat pernyataan menerima hasil pengukuran batas bidang Nomor 2726/064/LK0100/2021 tanggal 21 September 2021 sebagai dasar diterbitkannya peta bidang yang baru. Sampai dengan bulan April 2024 peta bidang yang dimaksud belum diterbitkan oleh Kantor Wilayah BPN/ATR Jawa Barat. Jika peta bidang tanah dimaksud telah terbit, akan dilakukan pengajuan penerbitan sertifikat pengganti ke Kantah BPN/ATR Kabupaten. Cianjur dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah berkedudukan di Jakarta menjadi a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q Kemendikbudristek.

(2) BBPPMPV Pertanian telah menyampaikan surat Nomor 0168/D7.4/LK.02.00/2024 tanggal 05 Februari 2024 kepada KPKNL Bogor untuk dapat membantu proses pembuatan sertifikat pengganti tanah tersebut.

f) Polimedia

Dua bidang tanah yang diperoleh pada tahun 1995 di Makasar dan Medan masih bersertifikat hak pakai atas nama Dep. P& K dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 224. Aset Tetap Tanah Polimedia yang Belum Bersertifikat a.n Pemerintah RI c.q Kemendikbudristek

No	Nama Barang	Luas (m^2)	Nilai Tanah (Rp)	Bukti Kepemilikan	Lokasi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	9.105	37.422.317.000,00	Sertifikat Hak Pakai nomor 11	Makassar
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	6.809	13.941.650.000,00	Sertifikat Hak Pakai nomor 24	Medan
Jumlah		**15.914**	**51.363.967.000,00**		

Atas hal tersebut, pengelola BMN Polimedia menyatakan akan melakukan pengurusan balik nama sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) PNUP

Delapan bidang tanah seluas 43.073 m^2 senilai Rp21.657.738.000,00 belum bersertifikat dan hingga saat ini dokumen kepemilikannya berupa AJB.-Sampai saat ini PNUP belum melakukan upaya untuk mengurus sertifikat atas delapan bidang tanah tersebut. Rincian delapan bidang tanah belum bersertifikat dapat dilihat pada **Lampiran C.8.2.**

h) PNJ

Satu bidang tanah seluas 43.325 m^2 senilai Rp42.316.923.000,00 bersertifikat hak milik yang terdiri atas 18 SHM atas nama pihak ketiga. Sampai saat ini PNJ belum melakukan upaya inventarisasi kemungkinan ada/tidak adanya potensi permasalahan/sengketa hukum atas tanah tersebut. Selain itu diketahui bahwa selama tahun 2023 PNJ tidak menganggarkan belanja untuk biaya pensertifikatan tanah. Rincian 18 SHM atas satu bidang tanah milik PNJ dapat dilihat pada **Lampiran C.8.3.**

i) Politeknik Perikanan Negeri Tual

Satu bidang tanah seluas 11.343 m^2 senilai Rp5.155.394.200,00 didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

2) Tanah tidak didukung bukti kepemilikan

a) Biro Umum dan PBJ

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II yang beralamat di Jalan Garuda 16 Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan seluas 293 m^2 dengan nilai perolehan senilai Rp2.162.763.000,00. tidak didukung bukti kepemilikan. Pengelola BMN pada Biro Umum dan PBJ belum melakukan koordinasi ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk memastikan lokasi objek dan status kepemilikan atas Tanah tersebut.

b) Setditjen Diktiristek

Sebelas bidang tanah milik Setditjen Diktiristek yang digunakan oleh lima PTNBH tidak didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 225. Tanah yang Digunakan PTNBH yang Tidak Didukung Bukti Kepemilikan Berupa Sertifikat

No	PTNBH	Jml Bidang Tanah	Keterangan
1	ITB	3	Sebagian tanah tidak ditemukan bukti kepemilikannya. Setditjen Diktiristek tidak memeroleh informasi terkait kemajuan penyelesaian pengurusan sertifikat atas bidang tanah terkait, dan sebagian masih dalam proses balik nama yang dilakukan secara bertahap
2	UPI	2	Pengurusan sertfiikat masih menunggu penyelesaian proses administrasi BAST dari Pemda
3	UNP	1	Terdapat satu bidang tanah seluas 43 hektar yang berlokasi di Tarok City (Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat). Tanah tersebut diperoleh atas hibah dari bupati Padang Pariaman dan tanah tersebut masih dalam proses pembuatan sertifikat. Dasar UNP mencatat dalam aplikasi simak BMN adalah BAST Hibah antara bupati Padang Pariaman.
4	UNP	4	a. Tanah Mess Belakang Suryani (Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama NUP 2) seluas 220 m² dikuasai UNP belum bersertifikat b. Tanah hibah dari pemkab Padang Pariaman pada Kawasan Tarok City (Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan NUP 27 s.d. 30) seluas 1.468.000 m² belum bersertifikat. Tanah tersebut terbagi menjadi 4 peta bidang antara lain: bidang 745.000 m², 205.000 m², 78.000 m² dan 440.000 m². c. Tanah Kampus Ulu Gadut seluas 27.930 m², dikuasai UNP tetapi sertipikat disimpan di Unand dan tercatat sebagai aset di Unand. Dengan demikian terdapat pencatatan ganda, berdasarkan SK. Menristekdikti nomor T/238/M/HK.04.00/2019 tanggal 29 April 2019 Aset tersebut ditatausahakan oleh UNP. d. d) Tanah ABMA/T yang diserahkan oleh Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri pada tanggal 6 Desember 2018 seluas 2.810 m², di mana sertifikat asli tidak ditemukan. Di atas tanah tersebut juga terdapat Sekolah milik Pemkot Padang.
5	USU	1	Terdapat 3 persil Tanah Rumah Negara seluas 1.227 m2 yang berlokasi di Padang Bulan, Medan. (Jl. Picauly Nomor 22, Jl. Sumarsono Nomor 9, dan Jl. Nazir Alwi Nomor 25) yang belum bersertifikat a.n Pemerintah RI c.q Kemendikbudristek

c) UHO

(1) Kepemilikan dua bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 43.271 m2 dan 31.500 m2 senilai Rp161.905.103.000,00 hanya didukung BAST Nomor 159a/PT42.H/R/1992 tanggal 13 Januari 1992 antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Rektor UHO.

(2) Kepemilikan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 50.000 m2 senilai Rp200.000.000,00 hanya didukung SK DPRD Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 6/DPRD/1981 tanggal 3 September 1981 yang berisi tentang penyerahan harta benda milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Berdasarkan keterangan Koordinator BMN, diketahui bahwa kendala pengurusan sertifikat tiga bidang tanah tersebut adalah UHO belum menerima sertifikat asli atas tiga bidang tanah dari Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara.

d) UMRAH

(1) Kepemilikan tanah dengan lokasi di Anambas seluas 28.000 m^2 senilai Rp560.000.000,00 hanya didukung BAST Nomor 1942A/UN53.0/KS/2021 tanggal 26 Maret 2021 dari Sdr. H. Khairul Syahadat kepada Rektor UMRAH; dan

(2) Kepemilikan tanah dengan lokasi di Anambas seluas 19.900 m^2 senilai Rp398.000.000,00 hanya didukung BAST Nomor 1943B/UN53.0/KS/2021 tanggal 26 Maret 2021 dari Sdri. Kartini kepada Rektor UMRAH.

Pengelola BMN UMRAH menjelaskan bahwa proses pengusulan sertipikat masih mengalami kendala. Hal tersebut berdasarkan surat dari KPKNL Batam kepada Rektor UMRAH Nomor S-1190/KNL.0304/2023 tanggal 17 Juli 2023.KPKNL yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut berindikasi masuk dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran atas tanah atau tidak dapat diterbitkan sertipikat hak pakainya.

e) Unpatti

Tujuh bidang tanah seluas 948.638 m^2 senilai Rp717.652.305.642,00 belum didukung sertipikat. Pengelola BMN UNPATTI menjelaskan bahwa tujuh bidang tanah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga dari tahun 1964 s.d. 1993. Berdasarkan catatan yang dimiliki Pengelola BMN diketahui bahwa bukti hibah hanya berupa BAST, namun semua bukti fisik BAST tersebut tidak ada dalam penguasaan UNPATTI. Hal tersebut dikarenakan proses penyerahan hibah tanah tersebut sudah cukup lama sehingga berkas-berkas pemindahan kepemililikan atau BAST tersebut belum dapat ditemukan sampai saat ini. Sampai pemeriksaan berakhir masih dalam proses penerbitan sertipikat.

f) Universitas Papua (UNIPA)

(1) Tanah dengan lokasi di Wagete, Nabire seluas 30.000 m2 senilai Rp94.830.000.000,00 dengan bukti pencatatan berdasarkan BAST Nomor 0792/J20/PS/2001 tanggal 28 Juli 2001 dari Uncen kepada UNIPA. Selama ini tanah tersebut digunakan UNIPA sebagai kebun percobaan untuk tempat penelitian dataran tinggi. Saat ini UNIPA berupaya melakukan penelusuran dokumen pendukung untuk proses sertifikasi, pemberian batas serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pelepasan dan persertifikatan.

(2) Tanah dengan lokasi di Anggi, Pegunungan Arfak seluas 10.000 m2 senilai Rp3.510.845.600,00 dengan bukti pencatatan berdasarkan BAST Nomor 0792/J20/PS/2001 tanggal 28 Juli 2001 dari Uncen kepada UNIPA. Tanah tersebut digunakan UNIPA sebagai kebun percobaan untuk penelitian dosen dan mahasiswa UNIPA. Proses pembuatan sertipikat telah diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak. Namun saat ini lokasi tersebut sudah menjadi daerah perkotaan sehingga akan disediakan penggantian

lahan di lokasi lain di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak oleh Pemkab Pegunungan Arfak;

(3) Tanah dengan lokasi di Jl. Basuki Rahmat Km 14, Sorong seluas 360.000 m2 senilai Rp360.000.000.000,00 dengan bukti pencatatan berdasarkan BAST Nomor 0792/J20/PS/2001 tanggal 28 Juli 2001 dari Uncen kepada UNIPA. Tanah tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Fakultas Pertanian (Faperta) Uncen pada tanggal 14 September 1976. Status tanah tersebut ditetapkan dengan dasar pengelolaan SK Bupati Nomor 37 Tahun 1976, sedangkan bukti hak atas tanah saat itu belum ada hingga saat ini. UNIPA sudah mengirimkan surat permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada BPN Sorong melalui surat Nomor 71/UN42/PS/2012, namun hingga saat ini belum ada jawaban.

g) Universitas Bengkulu (UNIB)

Dua bidang tanah tahun perolehan 1989 dan 1994 terletak dilokasi Jalan Cimanuk Km. 6,5 yang antara lain digunakan untuk gedung bangunan prodi PGSD FKIP belum bersertipikat a.n. UNIB dengan total luas 96.128 m^2.

b. Aset Tetap Tanah dalam sengketa/dikuasai pihak lain

Aset tetap tanah dalam sengketa/dikuasai pihak lain terdiri atas aset tetap tanah dalam proses peradilan dan aset tetap tanah yang dikuasai pihak lain dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Aset Tetap Tanah dalam proses peradilan

Aset tetap tanah dalam proses peradilan pada enam satker Kemendikbudristek dengan uraian sebagai berikut:

a) Biro Umum dan PBJ

Tanah seluas 1.110 m^2 beralamat di Hos Cokroaminoto 41 Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat senilai Rp84.427.704.000,00. Tanah tersebut digugat oleh Drs. Sumirin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Perdata Nomor 288/PDT.G/B/BTH/PLW/2021/PN.Jkt.Pst. Pihak Tergugat adalah Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan dan Kantah Kota Jakarta Pusat. Hasil putusan gugatan ditolak untuk seluruhnya. Saat ini asset tersebut dikuasai fisiknya oleh Penggugat namun telah dilakukan pengawasan dan pengamanan. Proses sertifikat tanah belum dapat dilakukan karena belum mendapatkan putusan *incraht*.

b) UNIB

Satu bidang tanah di Cimanuk Km 6,5 telah bersertipikat namun bersengketa/dikuasai pihak lain seluas 1.759 m^2 senilai Rp1.032.315.708,00. Telah dilakukan diskusi dan mediasi antara warga dan pihak UNIB terus berlangsung pada rentang tahun 2002 s.d 2019. UNIB kemudian melakukan upaya hukum sebagai berikut.

(1) Pada tanggal 2 Oktober 2019 mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Perkara 51/Pdt.G/2019/PN.Bgl terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah tanpa bukti hak kepemilikan di lokasi tanah hak pakai Nomor 00010. Tanah yang dikuasai warga seluas 1.759 m^2 yang terdiri dari

empat bidang tanah, yaitu tanah yang dikuasai oleh Sdr. JP seluas 247 m^2, Sdr. RF 408 m^2, Sdr. FGVM seluas 504 m^2, dan Sdr. SH seluas 600 m^2. Pada tanggal 12 Maret 2020, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan dari UNIB.

(2) Selanjutnya UNIB mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Perkara 51/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 12 Maret 2020, namun permohonan banding juga ditolak. Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BGL tanggal 3 Juli 2020 yang isinya menolak banding dari UNIB.

(3) UNIB kemudian mengajukan kasasi ke MA pada tanggal 20 Juli 2020. Hasil dari kasasi ini, gugatan dari UNIB tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 2299/K/Pdt/2021 tanggal 8 Februari 2022. Atas ditolaknya kasasi ini, UNIB belum melakukan langkah selanjutnya dan belum berkoordinasi dengan Kemendikburistek.

c) UHO

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 43.271 m2 yang diterima dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara pada Tahun 1992 dalam status sengketa. Tanah dicatat sebagai BMN berdasarkan BAST Tahun 1992 antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Rektor UHO. Dalam Kartu Identitas Barang (KIB), dijelaskan bahwa status tanah tersebut digunakan oleh pihak lain, dan sedang dalam proses pengadilan atas kasus sengketa tanah.

Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat yang mendirikan bangunan permanen di atas tanah tersebut. Kasus sengketa tanah tersebut telah diproses sampai pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atas pengaduan dari masyarakat yang menempati tanah tersebut. Pihak terlapor adalah Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara karena sertifikat tanah tersebut masih a.n Pemerintah Prov. Sulawesi Tengga

Dalam rangka memastikan status tanah dan upaya memperoleh sertifikat asli tanah tersebut, Rektor UHO telah mengirimkan kepada surat kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Tenggara. Pj. Sekretaris Daerah Prov. Prov. Sulawesi Tenggara dengan surat Nomor 5177/UN29.2/LK/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal status hukum tanah di lokasi eks. PGSD. Balasan surat tersebut dikirim pada tanggal 23 Desember 2022, yang menyatakan bahwa tanah tersebut sedang dalam proses kasasi pada MA dengan register perkara nomor 3487K/PDT/2022. Sampai dengan saat ini UHO belum menerima putusan Kasasi dimaksud.

d) Untan

Tanah Untan di Jalan Perdana Pontianak seluas 89.529 m^2 telah bersertifkat namun dalam kondisi sengketa dengan masyarakat sejak tahun 1992. Tanah tersebut digugat warga di Jl. Amali dan Jl. Wak Sidik. Sengketa melalui PTUN perkara nomor 47/G/2017/PTUN.PTK dan hingga 31 Desember 2023 proses hukumnya masih belum selesai.

e) Direktorat SMK

Satu bidang tanah dan satu unit gedung dan bangunan di Jalan Sriwijaya IV Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pembelian tahun 1982 saat ini sedang dalam permasalahan hukum/sengketa dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 226. Tanah milik Direktorat SMK yang sedang dalam Permasalahan Hukum

No	Nama Aset	Luas	Nilai perolehan (Rp)	Status penggunaan
1	Gedung Dan Bangunan (Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan Semi)	2.400 m2	2.068.172.925,00	Digunakan oleh Pihak Lain tidak sesuai ketentuan
2	Tanah Bangunan Mess / Wisma / Asrama	4.357 m2	355.765.753.000,00	Sengketa di pengadilan dengan Pensiunan PNS Kemendikbud

Sengketa tanah tersebut telah berlangsung sejak tahun 2007 dan Kemendikbudristek telah dinyatakan kalah melalui tiga putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai berikut.

Tabel 227. Perkara Hukum Sengketa Tanah Direktorat SMK

No	Lokasi Tanah	Perkara	Penggugat/Tergugat	Putusan Tingkat	Nomor dan Tanggal Putusan	Hasil
1	Tanah di Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	PTUN	Penggugat: Penghuni Mess a.n. Ny. HSI, DKK Tergugat Kakanwil BPN DKI Jakarta, Ka. Kantor pertanahan Kotamadya Jaksel, dan Mendikbud	Pertama	Nomor 167/G/2006/PTUN.JKT tanggal 20 Maret 2007	Dimenangkan *tergugat*
				Banding	Nomor 103/B/2007/PT.TUN-JKT tanggal 19 Nov 2007	Dimenangkan *tergugat*
				Kasasi	Nomor 151 K/TUN/2008 tanggal 24 Agustus 2009	Dimenangkan *penggugat*
				PK	Nomor 48 PK/TUN/2016 tanggal 20 Desember 2016	Menolak permohonan PK Depdiknas
2	Tanah di Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Perkara Perdata	Penggugat: Penghuni Mess a.n. Ny. HSI, dkk Tergugat Depdiknas dan Dirjen Dikdasmen	Pertama	Nomor 1831/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL tanggal 5 Des 2007	Dimenangkan *tergugat*
				Banding	Nomor 95/PDT/2009 tanggal 15 Mei 2009	Dimenangkan *penggugat*
				Kasasi	Nomor 622 K/PDT/2010 tanggal 20 Nov 2020	Dimenangkan *penggugat*
				PK	Nomor 456 PK/PDT/2012 tanggal 23 April 2013	Menolak permohonan PK Depdiknas
3	Tanah dan Bangunan di Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	PTUN	Penggugat: Sdr. SA dan Drs. IT Tergugat Menkeu RI dan Mendikbud	Pertama	Nomor 49/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Juli 2019	Dimenangkan *penggugat*
				Banding	Nomor 271/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 3 Okt 2019	Dimenangkan *penggugat*
				Kasasi	Nomor 142 K/TUN/2020 tanggal 14 April 2020	Dimenangkan *penggugat*
				PK	Nomor 70 PK/TUN/2021 tanggal 10 Juni 2021	Menolak permohonan PK Kemendikbud

Pengelola BMN Direktorat SMK menjelaskan bahwa permasalahan sengketa tanah dan bangunan Tanah dan Bangunan di Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saat ini sedang dilanjutkan proses hukumnya dan dikoordinir oleh Biro

Hukum, Setjen Kemendikbudristek dengan bantuan Tim Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Agung dan juga koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum Nomor 66945/A5/HK.10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 hal Informasi Status Hukum BMN Direktorat SMK berupa Tanah dan Bangunan, disampaikan bahwa telah terbit Surat Perintah Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor PRINT-123/G/Gph.2/03/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang menunjuk Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan pendampingan dalam upaya penyelamatan BMN sebagaimana dimaksud. Biro Hukum Kemendikbudristek bersama Tim JPN Kejaksaan Agung sedang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan objek sengketa berupa akta-akta pemindahan dan pengoperan hak prioritas yang dibuat antara para penghuni Mess/Flat Sriwijaya dengan pihak ketiga (Soraya Aldjufrie dan Drs. Ichsan Talib). Gugatan tersebut tercatat dengan register Perkara Nomor 533/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST tanggal 17 Juni 2022 dan saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain gugatan perdata, Biro Hukum juga sedang melaporkan dugaan tindak pidana pada BARESKRIM POLRI sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/0105/III/2022/Bareskrim tanggal 2 Maret 2022 tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Soraya Aldjufrie, dkk.

Pada Tahun 2023 telah terbit hasil rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tertuang dalam Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PN.SEL tanggal 8 November 2023 dengan kesimpulan menolak gugatan seluruhnya dan menyatakan bahwa:

(1) Tergugat Rekonvensi (Kemendikbudristek) melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*) yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XXVIII, XXVIII, XXIX;

(2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Kemendikbudristek) bukan pemilik dan atau tidak berhak atas objek terperkara *a quo* berupa tanah seluas ± 4.308 m^2 beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu bekas *Eigindom Verponding* (EV) Nomor 1684 seluas ± 4.308 m^2 atas nama *Het Gouvernement Van Nederlands Indie* atau bekas SHP Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional Berkedudukan di Jakarta);

(3) Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Kemendikbudristek) berserta semua pihak yang memperoleh hak atau ijin daripadanya dan atau semua pihak yang ditempatkan olehnya untuk menyerahkan secara langsung dan sekaligus objek terperkara *a quo* berupa tanah seluas ±4.308 m^2 beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas *Eigindom Verponding* (EV) Nomor 1684 seluas ± 4.308 m2 atas nama *Het Gouvernement Van Nederlands Indie* atau bekas SHP Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional Berkedudukan di

Jakarta);

(4) Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Kemendikbudristek) untuk melaksanakan penghapus bukuan BMN atas tanah seluas ±4.308 m^2 beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas *Eigindom Verponding* (EV) Nomor 1684 seluas ± 4.308 m2 atas nama *Het Gouvernement Van Nederlands Indie* atau bekas SHP Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional Berkedudukan di Jakarta);

(5) Menghukum Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp.500.000,00 setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan;

(6) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.967.000,00.

Atas hasil putusan tersebut Kemendikbudristek diwakili oleh JPN JAMDATUN, Kejaksaan Agung selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Mendikbudristek, pada tanggal 26 Februari 2024 telah melakukan pengajuan memori banding Perkara Perdata Nomor 533/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai upaya hukum banding atas putusan yang telah terbit. Rincian atas perkara hukum tersebut dapat dilihat pada **Lampiran C.8.4**.

f) Politeknik Negeri Samarinda

Satu bidang tanah milik Politeknik Negeri Samarinda seluas 539,5 m2 senilai Rp884.822.000,00 (nilai setelah revaluasi) di Jl. Cipto Mangunkusumo Samarinda sedang dalam permasalahan hukum/sengketa.

Pengelola BMN menjelaskan bahwa pada tahun 2006 Politeknik Negeri Samarinda melakukan pengadaan tanah dengan objek tanah seluas 539,5 m^2 dengan pihak penjual adalah Ny. Salasiah (selaku tergugat) senilai Rp728.325.000,00. Tanah tersebut kernudian dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN pada 31 Desember 2007 sebagai aset milik Politeknik Negeri Samarinda. Namun selanjutnya diketahui bahwa tanah yang menjadi objek pengadaan adalah tanah sengketa yang bermasalah dan sedang dalam proses hukum. Dalam proses hukum tanah bermasalah yang menjadi objek jual beli tersebut terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor 2667K/Pdt/2002 tanggal 20 Februari 2007 yang menyebutkan bahwa Ny. Salasiah bukan pemilik sah atas tanah tersebut sehingga segala hubungan hukum termasuk jual-beli yang terjadi atas objek tanah tersebut dianggap tidak sah.

Sebagai tindak lanjut atas putusan MA tersebut, pada tanggal 19 November 2020 telah dilakukan pertemuan antara Politeknik Negeri Samarinda dengan seluruh ahli waris dari Ny. Salasiah yang dituangkan dalam berita acara pertemuan dan telah dibuat surat pernyataan dari pihak yang mewakili ahli waris yaitu Bapak Ahliansyah. Pihak yang mewakili ahli waris menyatakan bersedia untuk mengembalikan uang kepada Politeknik Negeri Samarinda sebagai ganti tanah tersebut senilai Rp728.325.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 19 November 2020. Dalam surat pernyataan tersebut disebutkan juga bahwa pembayaran termin pertama akan dilakukan dalam jangka waktu tiga

bulan dan akan membayar senilai Rp200.000.000,00. Namun sampai dengan bulan Februari 2021 pihak Bapak Ahliansyah tidak melakukan pembayaram. Politeknik Negeri Samarinda telah menyampaikan surat penagihan sebanyak dua kali dengan surat penagihan kedua Nomor 824/PL7/TU/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembayaran Penggantian Pembelian Tanah (tagihan kedua). Pada tanggal 22 April 2021 Bapak Ahliansyah menyampaikan surat kepada Direktur Politeknik Negeri Samarinda yang berisi bahwa yang bersangkutan mencabut surat pernyataan yang sudah dibuat sebelumnya dan minta diberikan waktu untuk menyelesaikan karena terkendala pandemi saat itu.

Politeknik Negeri Samarinda telah berkonsultasi dengan KPKNL melalui surat Nomor 840/PL7/TU/2019 tanggal 22 April 2019 terkait dengan pencatatan aset tetap tanah. Pihak KPKNL menyampaikan jawaban secara lisan bahwa tanah tersebut bisa dihapuskan dari pencatatan aset tetap dengan melengkapi berkas permohonan penghapusan BMN karena sudah terdapat putusan pengadilan. Saat dilakukan proses penghapusan terkendala berkas duplikat/copy putusan MA yang tidak bisa dilegalisir karena Politeknik Negeri Samarinda tidak memiliki putusan MA yang asli. Politeknik Negeri Samarinda sudah melakukan upaya dengan menghubungi pihak ahli waris yang menguasai tanah tersebut untuk mendapatkan keputusan MA yang asli. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum ada respon dari pihak ahli waris yang menguasai tanah tersebut. Politeknik Negeri Samarinda juga telah mengirimkan surat Nomor 2553/PL7/TU/2023 tanggal 11 September 2023 kepada Panitera MA perihal Permintaan Putusan namun belum mendapatkan dokumen Putusan MA yang akan digunakan sebagai dasar penghapusan aset tetap tanah.

Sampai saat ini Politeknik Negeri Samarinda belum menerima uang sebagai ganti tanah yang bermasalah tersebut dan belum melakukan upaya lebih lanjut untuk menagih uang ganti tanah kepada pihak ahli waris Ny. Salasiah.

2) Aset dikuasai pihak lain

Aset tanah Kemendikbud yang dikuasai pihak lain diuraikan sebagai berikut:

a) Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI

Tanah dan Bangunan pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI seluas 107.271 m² hasil pembebasan lahan Tahun 2023 dalam penguasaan pihak lain dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 228. Klasifikasi Tanah dalam Penguasaan Pihak Lain pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI

No	Uraian	Luas (m²)	Nilai (Rp)	Penguasaan Pihak Lain	
				Luas (m²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Untuk Bangunan Museum	55.935	159.562.254.000	1.000	1.011.844.000
2	Tanah untuk Bangunan Bersejarah Lainnya	302.945	407.081.016.301	21.546	7.316.227.000
3	Tanah untuk Makam Bersejarah	107.831	202.677.346.000	84.725	180.361.873.000
	Total	**466.711**	**769.320.616.301**	**107.271**	**188.689.944.000**

Rincian pada **Lampiran C.8.5a.**

b) UNIB

Tanah seluas 16.199 m^2 dikuasai oleh pihak lain yang terdiri atas bidang tanah seluas 15.000 m^2 di Jalan Sebakul dan 1.999 m^2 di Jalan Indragiri. Nilai atas bidang tanah yang dikuasai pihak lain tidak diketahui dan merupakan bagian tanah hibah dari Pemda Prov. Bengkulu.

c) Universitas Padjadjaran (Unpad)

Tanah seluas 183.599 m^2 pada Unpad sebanyak enam bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Permasalahan ini telah diinformasikan kepada Kemendikbudristek namun sampai saat ini belum ada solusi penyelesaian atas permasalahan ini. Rincian pada **Lampiran C.8.5b**.

d) Untan

Terdapat tanah di lingkungan kampus Untan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk berdagang dan berusaha, serta lahan pertanian/perkebunan sawit.

c. Pengamanan fisik atas Tanah belum memadai

1) Tanah Itjen di Jalan Kayu Putih 2, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Ciputat, Kota Tanggerang Selatan, Prov. Banten dengan sertifikat hak pakai Nomor 2 a.n. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terbagi menjadi dua bidang tanah tanah dengan luasan 445M^2 dan luasan 4.884 M^2. Tanah dengan luasan 4.884M^2 belum diberi pengamanan yang memadai karena pagar pengaman berupa pagar beton dan pagar kawat pada sisi kiri telah roboh/ambruk. serta belum terdapat papan plang nama aset dilokasi.

2) Tanah Untan seluas 551.170 m^2 yang berlokasi desa Pa'laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan untuk praktek lapangan khususnya mahasiswa pertanian dan perkebunan. Dari pengamatan fisik atas batas-batas tanah, tidak terdapat pagar pembatas dan/atau papan nama kepemilikan Untan di lahan tersebut, sebagai bagian dari pengamanan fisik sesuai ketentuan.

d. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik terdapat aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 270 aset pada Setjen dan Ditjen PDM meliputi 10 satker dengan harga perolehan senilai Rp7.021.623.450,00 dengan rincian dalam **Lampiran C.8.6a s.d. C.8.6c.** Selain itu, pada Biro Perencanaan Setjen, diketahui terdapat laptop yang tidak diketahui keberadaannya dengan permasalahan diuraikan sebagai berikut.

1) Lima laptop senilai Rp97.970.000,00 masih dalam masa garansi tidak diketahui keberadaannya

Sebanyak lima laptop pembelian tahun 2022 senilai Rp97.970.000,00 tercatat dalam pengajuan aset rusak berat. Kelima laptop tersebut masih dalam masa garansi. Operator aset menjelaskan bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh *service center* tidak diketemukan/mendapat vonis permasalahan yang pasti, kondisi permasalahan timbul pada saat digunakan untuk mengolah data dan pemproses data yang berat. Operator aset hanya menguji secara sampel atas satu unit laptop pembelian tahun 2022 kemudian

menyimpulkan bahwa laptop sejenis lainnya juga rusak berat. Selain itu, juga tidak ada dokumen justifikasi dalam menetapkan status laptop menjadi rusak berat seperti catatan kerusakan pada masing-masing laptop.

2) Sebanyak empat unit laptop tidak dapat ditelusuri senilai Rp62.280.000,00

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan data SIMAN/SAKTI, Biro Perencanaan mempunyai laptop merek Asus Expertbook P1440FB sebanyak tujuh unit yang terdiri dari dua unit kondisi rusak berat dan lima unit kondisi baik yang tercatat di SIMAN/SAKTI. Biro perencanaan hanya mampu menunjukkan Tiga unit laptop merek Asus Expertbook P1440FB yaitu laptop NUP 104, 105 dan 106. Sedangkan sebanyak empat unit laptop merek Asus Expertbook P1440FB tidak dapat ditunjukkan yaitu laptop dengan NUP 107, 108, 109 dan 110 tahun perolehan 2020. Diantara Empat tersebut, Satu unit laptop yaitu Asus Expertbook P1440FB NUP 107 diubah kondisinya menjadi rusak berat oleh operator BMN untuk selanjutnya akan dihapuskan.

Tabel 229. Laptop Tidak Diketahui Keberdaannya pada Biro Perencanaan

No.	Merek/Tipe	Kondisi	NUP Aset	Nilai Perolehan (Rp)
1	Asus expertbook P1440FB	Rusak Berat	107	17.820.000,00
2	Asus expertbook P1440FB	Baik	108	17.820.000,00
3	Asus expertbook P1440FB	Baik	109	17.820.000,00
4	Asus expertbook P1440FB	Baik	110	15.820.000,00
	Jumlah			**62.280.000,00**

e. BMN tidak dilengkapi label BMN/nomor inventaris

Hasil pemeriksaan fisik aset secara sampel pada sembilan satker diketahui terdapat Aset tetap yang tidak dilengkapi oleh label BMN sehingga mempersulit proses inventarisasi dan penelusuran saat cek fisik, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 230. Rincian BMN Tidak Dilengkapi label BMN

No.	Nama Satker	Jumlah Aset	Rentang Tahun Perolehan	Total Harga Perolehan (Rp)
	A. Setjen			
1	Biro Hukum	48	2023	407.475.000,00
2	Biro Perencanaan	51	2007 s.d 2023	1.715.909.405,00
	B. Ditjen PDM			
4	Direktorat PAUD	63	2012 – 2021	834.082.000,00
5	Direktorat PMPK	13	2016 – 2021	247.425.000,00
6	Direktorat SMP	9	2019 - 2020	181.050.000,00
	C. Ditjen Diksi			
7	Setditjen Diksi	24	2023	723.200.000,00
8	PNUP	56	2023	11.962.360.000,00
9	PNJ	45	2023	1.391.329.000,00
Jumlah				**17.462.830.405,00**

Rincian aset tetap yang tidak dilengkapi label BMN dapat dilihat pada **Lampiran C.8.7a s.d. C.8.7d**

Selain itu, hasil pemeriksaan pada BBGP Jawa Tengah menunjukkan peralatan dan mesin belum dilakukan pemutakhiran label barang. Label barang pada peralatan dan mesin masih menggunakan label terdahulu. Sedangkan untuk Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang

sudah mengalami perubahan akibat penggabungan satker karena perubahan SOTK pada Ditjen GTK. Hasil klarifikasi kepada Pengelola BMN menunjukkan bahwa seluruh aset peralatan dan mesin pada BBGP Jateng belum dilakukan pemutakhiran label barang karena belum dilakukan inventarisasi barang sehingga belum bisa dilakukan pelabelan sesuai dengan NUP yang terbaru.

f. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap kurang memadai

Hasil penelaahan atas pencatatatan aset pada aplikasi SIMAN menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

1) Perbedaan luas tanah antara KIB dengan bukti kepemilikan

Terdapat perbedaan pencataan luasan tanah yang tercantum dalam sertifikat dengan yang tercatat dalam KIB dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 231. Perbedaan Luas Tanah antara KIB dengan Bukti Kepemilikan

No	Uraian	NomorSertifikat	Luas (m^2)		Penjelasan Pengelola BMN
			KIB	Sertifikat	
1	**Itjen**				
a	Tanah	Hak Pakai No 15 dan 16	7.798	5.148	KIB belum disesuaikan dengan luasan sertipikat baru karena terkena pekerjaan jalan tol
2	**Untan**				
a	Tanah	Hak Pakai Nomor2	1.727.863	1.943.488	Terjadi karena adanya pengurangan dari penghapusan tanah untuk perumahan dosen dan pegawai Untan.
3	**Polban**				
a	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Nomor00006	1	39.450	Kesalahan penginputan oleh operator BMN yang lama
b	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Nomor6	1	119.010	Kesalahan penginputan oleh operator BMN yang lama
4	**PENS**				
a	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Nomor Sertipikat	9.042	8.786	Selisih antara luasan di sertifikat lama (2021) dengan sertifikat baru yang terbit 2022. KIB belum disesuaikan
5	**UHO**				
a	Tanah Kebun Percobaan		2.035.712	2.097.369	Adanya kemungkinan irisan antara tanah tersebut dengan tanah lokasi transmigrasi
b	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama		653	600	Hasil pengukuran ulang menunjukkan bahwa luas tanah sebenarnya adalah 600 m2
c	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		2.297.578	2.297.878	Merupakan tanah untuk kampus utama UHO. Sampai saat ini, belum diperoleh penjelasan atas perbedaan luas tanah tersebut.

2) Aset Tetap tidak tercatat dalam Laporan Keuangan

a) Direktorat SMA

Satu unit kendaraan roda empat berupa mobil Innova tahun 2007 tidak tercatat di Aset Tetap. Pengelola BMN menjelaskan bahwa data mobil Innova tersebut telah dihapus karena terdapat kesalahan penghapusan data BMN pada saat proses penghapusan BMN di tahun 2015-2016.

Data yang seharusnya dihapus adalah BMN berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) merek Toyota Kijang LGX dengan nilai perolehan senilai Rp77.900.000,00. Berdasarkan pemeriksaan keberadaan, fisik mobil tersebut tidak ada, tetapi datanya masih tercatat di Aset Lain-lain.

b) UMRAH

(1) Terdapat donasi/hibah barang dari PT Esco Bintan Indonesia kepada UMRAH berdasarkan Naskah Perjanjian Donasi Barang Nomor 042/ECO/XII/2023 dan 6988/UN53.0/DV/02.02/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan BAST Nomor 043/ECO/XII/2023 dan 6989/UN53.0/DV/02.02/2023 tanggal 28 Desember 2023. Atas donasi/hibah barang tersebut belum tercatat pada aplikasi SAKTI. Rincian atas barang-barang tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 232. Rincian Donasi Barang dari PT Esco Bintan Indonesia

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga (Rp)
1.	*CO^2 Incubator*	1	114.700.000,00
2.	*Shaker*	1	212.300.000,00
3.	*Laboratory Refrigerator*	1	179.300.000,00
4.	*Ducted Fumehood*	1	308.275.000,00
5.	*Centrifuge*	1	205.600.000,00
Total		**5**	**1.020.175.000,00**

Atas hal tersebut, Pengelola BMN menjelaskan bahwa barang-barang tersebut belum tercatat sebagai BMN milik UMRAH. Aset tersebut sedang dalam proses permohonan penerbitan nomor register hibah melalui surat dari Rektor UMRAH kepada Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Nomor 0919/UN53.0/KU.07.00/2024 tanggal 4 Maret 2024.

(2) Terdapat bangunan berupa rumah di Desa Benan yang belum tercatat sebagai aset pada aplikasi SAKTI. Rumah tersebut pada saat ini dalam kondisi kosong, hanya ditempati jika akan dipakai oleh dosen UMRAH untuk melakukan penelitian. Rumah tersebut dibangun berdasarkan kontrak Nomor 1859/UN53/LK.PPK/PBJ/2021 tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp125.891.060,00 pada tanggal 30 Desember 2021.

Pengelola BMN UMRAH menjelaskan bahwa bangunan tersebut berada di tanah yang dimiliki oleh UMRAH dan dibangun oleh UMRAH namun belum tercatat pada aplikasi SAKTI. Hal ini dikarenakan belanja pembangunan tersebut menggunakan MAK 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan), yang seharusnya menggunakan MAK Belanja Modal. Pengelola BMN UMRAH akan mencatat aset tersebut dan melakukan koreksi nilai aset

tetap pada LK. Saat ini proses penginputan aset tersebut masih dalam proses koordinasi dengan Kemendikbudristek karena akan merubah saldo awal.

c) BBGP DIY

Bangunan berupa selasar kantor belum dicatat dalam SIMAN sebagai Aset Tetap. Hasil klarifikasi dengan Analis BMN BBGP DIY menunjukkan bahwa belum tercatatnya bangunan selasar karena kesulitan dalam memperoleh dokumen sumber sebagai dasar untuk mencatat nilai bangunan tersebut.

3) Informasi berkaitan dengan Aset Tetap dalam aplikasi SIMAN kurang valid dan tidak lengkap

Pemeriksaan terhadap pemberian informasi dalam aplikasi SIMAN atas aset tetap menunjukkan hal sebagai berikut.

a) Perbedaan pencatatan nomor mesin dan nomor rangka antara dokumen pencatatan dengan BPKB pada Biro Umum dan PBJ dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 233. Rincian Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Pencatatannya

No	Nopol B	Nomor Mesin		Nomor Rangka	
		SIMAN	Fisik	SIMAN	Fisik
1.	1442 PQS	L15261038861	Sesuai	MHRRU1830GJ01665	MHRRU1830GJ401665
2.	1716 PQQ	1TR7660450	Sesuai	MHFXW43G504081817	MHFXW43G1D4081817
3.	1786 PQQ	00Y1043	DDYI043	MHKM1CA470K053590	MHKM1CA4JDK053590
4.	1479 PQS	1TRA111913	Sesuai	MHFJW83M1G2309279	MHFJW8EM1G2309279
5.	1481 PQS	1TRA118D73	Sesuai	MHFJW8E104G2309728	MHFJW8EM4G2309728
6	1463 PQS	2G0C015846	2GDCD15846	MHFAB3EM7GO002869	Sesuai
7	1065 PQI	4N15V0Y7521	4N15UDY7521	MMBGUKR10KH017991	Sesuai
8	9892 PQ	JK-0718506	7K 0718506	MHF3IKF6040031746	MHF31KF6040031746
9	6262 PCQ	JBSIE-1165204	JB51E-1166204	MHJB51155K149870	Sesuai
10	6259 PCQ	JBSIE-1105512	JB51E-1105512	MHJB511SSK1122278	MH1JB51155K122278
11	6311 PXQ	JF81E1945907	Sesuai	MH1JF81170K952054	MH1JF8117DK952054
12	6313 PXQ	JF81E1948262	Sesuai	MH1HF81120K954455	MH1JF8112DK954455
13	6314 PXQ	JF81E1945137	Sesuai	MH1JF81140K951458	MH1JF8114DK951458

b) Terdapat 42 kendaraan dinas tidak tercatat nomor polisinya pada sembilan satker senilai Rp7.866.822.925,00, dengan rincian pada **Lampiran C.8.8a ;**

c) Terdapat 67 kendaraan tidak tercatat nomor rangka dan nomor mesinnya pada 14 Satker senilai Rp11.924.804.088,00 dengan rincian pada **Lampiran C.8.8b;**

d) BBPMP Prov. Jawa Barat

(1) Nomor polisi satu kendaraan Toyota Avanza dengan klasifikasi Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) belum diperbaharui. Berdasarkan BPKB, nomor polisi yang baru adalah D 1160 U, sedangkan yang tercatat di SIMAN BMN adalah nomor polisi lama yaitu D 1075 U;

(2) Aset Tetap pos jaga sebanyak 2 unit, dengan klasifikasi Gedung Pos Jaga Permanen dicatat gabungan dalam satu NUP dengan kode barang 4010113001 NUP 1. Keterangan Pengelolan BMN BBPMP Prov. Jawa Barat, hal tersebut

disebabkan nilai kontrak pembangunan 2 pos jaga tersebut tidak memisahkan nilai per satuan pos jaga, sehingga 2 pos jaga dicatat dengan nilai keseluruhan dalam 1 NUP.

e) BKHM

Pengelola BMN menginput jumlah barang ke modul aset tidak sesuai jumlah barang beserta nilai satuan pada SPK yaitu:

(1) Tiga buah lensa kamera pengadaan tahun 2023 dicatat pada satu NUP senilai Rp103.500.000,00;

(2) 797 buah Buku pengadaan tahun 2023 dicatat pada satu NUP senilai Rp199.772.306,00.

f) UPN Veteran Jawa Timur

Dua kendaraan bermotor tidak memiliki BPKB, satu diantaranya tidak dilengkapi dengan nomor polisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 234. KIB Kendaraan Tidak Mecantumkan Nomor BPKB atau Nomor Polisi

No	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Merk	No BPKB	No Polisi
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	14	26 April 2021	1.099.823.357	Toyota Alphard	-	-
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	28 November 2016	784.151.000	Fortuner	-	L1071GX SE

Keterangan dari petugas BMN diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena operator SIMAK BMN tidak memperoleh dokumen BPKB pada saat penginputan di dalam aplikasi. Untuk Toyota Alphard tahun 2021 NUP 14, memiliki nomor BPKB R-00340067 tanggal 15 November 2021 dengan nomor polisi L1982 EP, dan untuk mobil fortuner NUP 1 tahun 2016 memiliki nomor BPKB N-00154442 tanggal 25 Maret 2017. Atas data BPKB dan nomor polisi tersebut memang belum dilakukan *update* pada aplikasi SIMAN.

4) Aset rusak tidak dimutakhirkan kondisinya dalam aplikasi SIMAN

Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik menunjukkan kondisi yang tercantum dalam aplikasi BMN tidak sesuai dangan kondisi barang sesungguhnya.

Tabel 235. Pencatatan Kondisi Aset Tetap Tidak Sesuai Kondisi Sesungguhnya

Satker	Kondisi dalam SIMAN	Kondisi Cek Fisik	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
Direktorat PAUD	Baik	Rusak Berat	4	118.098.600,00
	Rusak Berat	Baik	13	92.194.000,00
		Rusak Ringan	1	2.565.000,00
Direktorat PMPK	Baik	Rusak Berat	1	22.000.000,00
Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda)	Baik	Rusak	5	19.360.000,00
BBPMP Jawa Tengah	Baik	Rusak Berat	43	234.875.000,00
Total			**67**	**489.092.600,00**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran C.8.9a s.d. C.8.9c**

Atas permasalahan tersebut, pengelola BMN Pustanda menjelaskan BMN tersebut merupakan BMN yang diperoleh melalui transfer TKTM dari Sekretariat BPP Bahasa dengan maksud barang tersebut akan digunakan di Pustanda. Saat petugas BMN menerima barang tersebut, menurut pemahaman petugas BMN bahwa barang tersebut masih bisa digunakan untuk operasional pemerintah, namun saat menerima transfer masuk dalam aplikasi SAKTI, BMN tersebut memang sudah dicatat dengan kondisi rusak berat dari satker pengirim. Jadi, petugas BMN beranggapan meskipun status barangnya rusak berat dalam aplikasi namun tetap digunakan untuk operasional, proses reklasifikasinya menunggu sampai barang tersebut tidak digunakan lagi untuk operasional atau barang tersebut diusulkan penghapusannya. Perlakuan BMN rusak berat yang belum direklasifikasi tersebut merupakan pemahaman dari petugas BMN.

5) Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi

Sebanyak 101.773 BMN senilai Rp34.959.937.369,00 pada tiga eselon I dicatat dengan nilai di bawah minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 236. Aset Tetap di Bawah Nilai Minimum Kapitalisasi

No	Eselon I	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Ditjen PDM	8.394	1.569.885.232,00	**Lampiran C.8.10a s.d. C.8.10b**
2	Setjen	2.658	1.318.800.910,00	**Lampiran C.8.10c**
3	Ditjen Diktiristek (UHO)	90.721	32.071.251.227,00	**Lampiran C.8.10d s.d. C.8.10e**
Jumlah		**101.773**	**34.959.937.369,00**	

Atas hal tersebut Koordinator BMN dan Operator BMN menjelaskan antara lain:.

a) Kondisi ini terjadi karena proses migrasi data dari SIMAK ke SAKTI tidak dapat memfilter data aset tetap dengan nilai di bawah satuan minimum tersebut. Data aset tetap baik intrakomptabel maupun ekstrakomptabel termigrasi secara total;

b) Operator BMN belum melakukan pemisahan antara data intrakomptabel dengan ekstrakomptabel. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan inventarisasi BMN yang termasuk di dalamnya proses pemantauan atas aset tetap dengan nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi tersebut.

c) Kapitalisasi Aset Tetap di bawah nilai minimum belum dikeluarkan ke aset ekstrakomptabel kemungkinan karena satker pada saat ada update simak terkait kebijakan kapitalisasi baru masih menggunakan SIMAK versi lama.

6) Aset Tetap dengan nilai Rp1,00

Terdapat Aset Tetap yang dicatat dengan nilai Rp1,00 pada aplikasi SAKTI dengan uraian sebagai berikut.

a) Direktorat PMPK

Berdasarkan pemeriksaan daftar Aset Tetap diketahui terdapat Peralatan dan Mesin dengan Nilai Perolehan Rp1,00 sebanyak 7 unit barang dengan nilai perolehan senilai Rp7,00, (akumulasi penyusutan senilai Rp7,00) pada Direktorat PMPK. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 237. Peralatan dan Mesin dengan Nilai Perolehan Rp1,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	3020104001	Sepeda Motor	2004	7	1,00
2	3020104001	Sepeda Motor	2004	6	1,00
3	3020104001	Sepeda Motor	2004	5	1,00
4	3020104001	Sepeda Motor	2004	4	1,00
5	3020104001	Sepeda Motor	2004	3	1,00
6	3020104001	Sepeda Motor	2004	2	1,00
7	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2004	14	1,00
Jumlah					**7,00**

b) UPN Veteran Jawa Timur

Berdasarkan data rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari SIMAN, diketahui bahwa terdapat 28 aset dari delapan jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat dengan nilai Rp1,00 dengan rincian pada **Lampiran C.8.11**. Berdasarkan hasil wawancara kepada analis BMN diketahui bahwa operator SIMAK BMN tidak memperoleh informasi nilai bangunan berdasarkan dokumen kontrak pengadaan. Proses pencatatan pada aplikasi hanya dilakukan berdasarkan pengamatan atas keberadaan fisik aset di lapangan. Atas hal tersebut pihak UPN Veteran akan berkoordinasi dengan KPKNL untuk melakukan penilaian kembali.

c) Biro Umum dan PBJ

Aset Tanah pada Biro Umum dan PBJ sertipikat hak pakai nomor 2/Ciketing Udik gambar situasi Nomor 3944 Tahun 1989 Kabupaten Bekasi seluas 11.045 m2 berikut dengan fisik tanahnya. Sampai dengan saat ini bukti kepemilika hanya copy atas Sertifikat. Aset tanah tersebut berupa kavling rumah negara golongan III yang diperuntukan pegawai Pusat Perbukuan Kemendikbudristek. Atas tanah tersebut dicatat ke dalam Aplikasi SAKTI senilai Rp11.045,00 atau Rp1,00 per m2.

7) Pengalihan BMN antar satker belum ditindaklanjuti dengan Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM) BMN

Untuk menunjang kegiatan BPTI, maka sesuai BAST antara Ditjen GTK dan BPTI Nomor 1946/B1/LK.01.03/2023 tanggal 7 Maret 2023, Dirjen GTK menyerahkan BMN eks-PPPPTK Bahasa dengan nilai aset total senilai Rp46.625.375.535,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 238. BAST Aset Tetap GTK ke BPTI

No	Nama Aset	Jumlah (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	34.331.496.652,00
2.	Bangunan Air	1.098.243.500,00
3.	Instalasi dan Jaringan	49.717.800,00
4.	Peralatan dan Mesin	11.145.917.583,00
	Jumlah	**46.625.375.535,00**

Namun atas kegiatan serah terima BMN ini belum ditindak lanjuti dengan tahapan transfer masuk dan transfer keluar (TKTM) pada aplikasi SAKTI. Kepala BPTI sudah berusaha menghubungi Dirjen GTK, melalui surat nomor 1257/J3/LK.00.00/2023

tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Permohonan tindak lanjut BAST BMN. Namun hingga pemeriksaan ini berakhir, belum ada informasi lebih lanjut dari Dirjen GTK.

8) Kesalahan kodefikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

a) Direktorat PAUD

Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik atas keberadaan BMN dan pemeriksaan dokumen terdapat 75 unit barang dengan nilai perolehan senilai Rp183.535.000,00 (akumulasi penyusutan senilai Rp3.663.000,00) yang memiliki kesalahan kodefikasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 239. Aset Tetap Salah Kode Barang

No	Tercatat		Seharusnya		Bentuk Fisik	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
	Kode Barang	Nama Barang	Kode Barang	Nama Barang			
1	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	3050201003	Kursi Besi/Metal	Kursi Rangka Besi	70	171.325.000,00
2	3050201019	Meja Makan Kayu	3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	Mainan Model Kayu Meja Makan	1	2.750.000,00
3	3050201999	Meubelair Lainnya	3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	Mainan Model Kayu Meubelair	1	2.750.000,00
4	3050203004	Mesin Cuci	3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	Mainan Model Kayu Mesin Cuci	1	1.320.000,00
5	3050204001	Lemari Es	3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	Mainan Model Kayu Lemari Es	1	1.540.000,00
6	3050205008	Kitchen Set	3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	Mainan Model Kayu Kitchen Set	1	3.850.000,00
Jumlah							**183.535.000,00**

b) Direktorat KLSD PTV

Direktorat KLSD PTV menggunakan MAK 532111 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian barang berupa barang elektronik dengan nilai di atas nilai kapitalisasi aset tetap peralatan mesin senilai Rp1.000.000,00. Namun terjadi kesalahan penginputan kode barang yang digunakan dimana seharusnya menggunakan kode Aset 3050206036 namun terinput pada modul komitmen dengan kode persediaan 1010501004 pada 24 item barang senilai Rp275.900.000,00. Rincian disajikan pada **Lampiran C.8.12**.

c) Politeknik Negeri Padang (PNP)

Terdapat kesalahan penginputan kode barang oleh inputer modul komitmen dimana seharusnya menggunakan kode persediaan namun terinput pada modul komitmen dengan kode aset tetap pada 373 item barang senilai Rp88.265.868,00. Rincian disajikan pada **Lampiran C.8.13**.

d) BBPMP Prov. Jawa Barat

(1) Bangunan masjid kode barang 4010108001 dicatat dengan klasifikasi Bangunan Gedung Pendidikan Permanen kode barang 4010110001; dan

(2) Gedung kantor kode barang 4010101001 dicatat dengan klasifikasi Gedung Olah Raga Tertutup Permanen (kode barang 4010111001.

9) Selisih nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada Ditjen PDM

Berdasarkan perbandingan antara nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin di Neraca (hasil dari aplikasi SAKTI) dengan nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin di SIMAN BMN diketahui terdapat selisih senilai Rp4.370.229.302,00 pada delapan satker dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 240. Selisih Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Nama Satker	Neraca LK Tahun 2023 (Rp)	SIMAN BMN (Rp)	Selisih (Rp)
1	BPMP Prov. Maluku Utara	14.457.469.166,00	14.240.488.320,00	216.980.846,00
2	BPMP Prov. Papua	24.147.691.765,00	23.705.389.241,00	442.302.524,00
3	BPMP Prov. Kalimantan Timur	18.841.781.694,00	17.863.187.399,00	978.594.295,00
4	BPMP Prov. Maluku	16.597.453.207,00	16.285.070.882,00	312.382.325,00
5	BPMP Prov. Sulawesi Utara	11.759.856.429,00	10.975.730.162,00	784.126.267,00
6	BPMP Prov. Sumatera Selatan	9.126.827.091,00	8.960.467.583,00	166.359.508,00
7	BPMP Prov. Sulawesi Tengah	13.122.103.931,00	12.699.594.777,00	422.509.154,00
8	Direktorat PMPK	47.901.884.678,00	46.854.910.295,00	1.046.974.383,00
Jumlah				**4.370.229.302,00**

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Eselon 1 Ditjen PDM menjelaskan bahwa nilai akumulasi penyusutan yang digunakan adminimum alah yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI. Atas perbedaan dengan nilai pada aplikasi SIMAN, kemungkinan karena terdapat kesalahan penarikan data nilai penyusutan oleh SIMAN atas nilai penyusutan.

10) Aset tetap kondisi rusak berat masih tercatat pada Neraca

Hasil pemeriksaan fisik dan dokumen atas kondisi BMN menunjukkan terdapat BMN dengan kondisi rusak berat namun masih tercatat sebagai Aset Tetap dalam SIMAN/Neraca dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 241. Kondisi BMN Rusak Masih Tercatat dalam Aset Tetap

Unit Eselon I/Satker	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
Setjen	Gedung Bangunan dan Peralatan Mesin	1.877	24.764.342.385	
Ditjen PDM	Peralatan Mesin	25.280	117.062.874.128	
Setditjen GTK	Server	7	1.633.525.293	
Universitas Halu Oleo	Peralatan Mesin	2.731	353.723.000	
	Gedung Bangunan	9	15.045.481.586	
Polimedia	Minibus	1	37.044.000	Barang hilang dan yang bertanggung jawab telah dikenakan TGR
	Minibus	1	3.822.000	Mengalami kebakaran.

Rincian pada **Lampiran C.8.14a s.d. C.8.14e**

Penjelasan atas permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut

a) Setjen

1) Aset tetap rusak berat pada Biro Organisasi dan Tata Kelola terdiri dari 17 unit barang merupakan alat penghancur kertas, lemari besi, dan laptop. Barang tersebut yang sudah disimpan di gudang karena sudah rusak berat dan sudah tidak digunakan.

2) Aset tetap rusak berat pada Biro SDM terdiri dari 191 unit barang telah dilakukan persetujuan lelang oleh Sekjen berdasarkan surat nomor 43886/MPK.A/UK.01.03/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Persetujuan Penjualan BMN dengan total nilai limit penjualan senilai Rp25.726.428,00.

3) Aset tetap rusak berat pada PLPP terdiri dari 226 unit dalam proses penghapusan dan disimpan di gudang berdasarkan surat nomor 35303/MPK.A/LK.01.03/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Persetujuan Penjualan BMN dari Sekjen.

b) Ditjen PDM

Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional, namun masih diperlukan inventarisasi kembali untuk direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain.

c) Setditjen GTK

Setdijen GTK telah mengusulkan penghapusan Aset berupa server sebanyak 13 unit ke KPKNL. Namun, persetujuan dari KPKNL hanya tujuh unit yang disetujui untuk dihapuskan. Enam unit yang lain kondisinya diaktifkan kembali dan berubah menjadi baik kembali. Hingga pemeriksaan berlangsung, aset rusak berat yang sudah disetujui untuk dihapuskan masih tercatat dalam saldo peralatan dan mesin dalam neraca, serta belum dilakukan penghapusan.

d) Polimedia

Saat ini sedang dilakukan proses penghapusan sebab lain oleh Tim SPI Polimedia dan Itjen Kemendikbudristek yang selanjutnya akan diajukan ke KPKNL untuk diproses ijin persetujuan penghapusan sebab lain.

11) KDP berpotensi tidak dapat dilakukan pengembangan ke Aset Definitif

Hasil pemeriksaan atas pencatatan KDP pada Ditjen Diksi menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a) KDP berupa DED gedung dan bangunan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan

Ditjen Diksi mencatat KDP berupa gedung dan bangunan senilai Rp127.678.617.806,00 pada 27 satker. dengan rincian pada **Lampiran C.8.15**. KDP tersebut berupa *Detail Engineering Design* (DED) dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan karena selama tahun 2014 s.d 2023 tidak belum ada pembangunan fisik.

Dari saldo tersebut, diantaranya senilai Rp1.112.487.500,00 berupa DED pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebanyak dua unit KDP senilai Rp1.013.234.500,00 dan Politeknik Negeri Samarinda sebanyak satu unit KDP senilai

Rp99.253.000,00 tidak dapat dilanjutkan karena adanya perubahan *master plan*/tata kota/lahan sudah tidak tersedia dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 242. KDP Gedung dan Bangunan yang Tidak Dapat Dilanjutkan Pembangunannya

No	Satker	Perolehan/Pengakuan KDP Awal		Kendala Penyelesaian KDP	Keterangan
		Tahun	Nilai (Rp)		
1	PPNS	2023	96.736.500,00	Ada perubahan master plan sehingga Gedung UPT PP akan digabung Gedung Bengkel Terpadu	DED Gedung UPT PP
		2023	916.498.000,00	Perubahan tata kota dari Pemkab Lamongan, sehingga rencana awal pembangunan gedung kampus II sebagai kampus *teaching factory* tidak dapat dilajutkan.	DED Gedung Kampus II Lamongan
2	Politeknik Negeri Samarinda	2018	99.253.000,00	Gedung sudah tidak bisa dikembangkan lagi karena lahan sekitarnya sudah terisi	-
Jumlah			**1.112.487.500,00**		

Berdasarkan penjelasan dari operator BMN/PPK/KPA pada formulir penjelasan/keterangan terkait pencatatan KDP diketahui bahwa KPA tetap berusaha untuk mencari anggaran agar pembangunan gedung dapat dilanjutkan.

b) KDP berupa gedung dan bangunan tidak dapat dilakukan pengembangan ke aset definitif karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi

Terdapat empat unit KDP berupa gedung dan bangunan pada tiga satker senilai Rp56.196.060,00 yang tidak dapat dilakukan pengembangan ke aset definitif karena nilai pengembangan di bawah nilai kapitalisasi gedung dan bangunan sehingga tertolak otomatis oleh aplikasi SAKTI. Hal tersebut terjadi karena Operator BMN dalam menginput saldo KDP berupa jasa konsultasi/pengawasan membuat NUP baru dan tidak menggabungkan dengan NUP induk dari KDP pekerjaan fisik gedung dan bangunan. Sehingga atas nilai KDP tersebut akan tetap berada di saldo KDP walaupun pembangunan gedung/aset induk telah berpindah ke aset tetap gedung dan bangunan.

Tabel 243. KDP yang Tidak Dapat Dikembangkan ke Aset Definitif

No	Satker	Perolehan/Pengakuan KDP Awal		Keterangan
		Tahun	Nilai (Rp)	
1	PNJ	2023	19.026.510,00	Jasa Konsultasi Konsep Desain Gedung Administrasi Jurusan Tahap 2
		2023	5.294.700,00	Jasa Konsultasi Review DED Fasad Gedung Pasca Sarjana (Tahap 2)
2	AKN Rejang Lebong	2023	10.101.000,00	Pekerjaan pengawasan gudang
3	Politeknik Negeri Cilacap	2023	21.773.850,00	-
Jumlah			**56.196.060,00**	

12) Pengakuan Aset Tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat dari Belanja Modal kurang tepat

a) Ditjen Diktiristek

Laporan Keuangan Ditjen Diktiristek merupakan penggabungan dari 81 satuan kerja belanja pegawai dari 21 PTNBH yang menggunakan dana APBN, sehingga anggaran dan realisasi belanja pegawai PTNBH tersebut masih tersaji dalam LK Ditjen Diktiristek. Pada Tahun 2023, terdapat penambahan jumlah satuan kerja PTNBH, melalui perubahan status pengelolaan keuangan lima PTN BLU menjadi PTNBH yaitu satuan kerja Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Syiah Kuala (USK).

Perubahan status USK ditetapkan melalui PP Nomor 38 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang PTNBH USK. Meskipun pada awal tahun 2023 USK telah beralih status menjadi PTNBH, USK belum membentuk Senat dan Majelis Wali Amanat (MWA) sehingga RKAT PTNBH Tahun 2023 belum tersusun. MWA merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud MWA antara lain mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen Diktiristek kemudian menyusun anggaran belanja TA 2023 untuk USK melalui penetapan DIPA Nomor: SP DIPA-023.17.2.690662/2023 tanggal 30 November 2022. Sesuai DIPA tersebut, USK melaksanakan kegiatan operasional sebelum MWA menetapkan RKAT PTNBH USK.

Sesuai data realisasi belanja yang disajikan dalam aplikasi Monitoring Laporan Keuangan Kemendikbudristek (molk.kemdikbud.go.id) menunjukkan bahwa per 31 Desember 2023, USK telah merealisasikan belanja senilai Rp173.776.156.662,00, diantaranya realisasi Belanja Modal senilai Rp7.217.327.000,00. Salah satu realisasi Belanja Modal USK adalah Pekerjaan pembangunan Gedung Pusat Kolaborasi Akademik dan Pembelajaran Inovatif Kebencanaan (PKAPIK) dan Peralatan Tsunami Wave Flume. Pekerjaan ini bersumber dari APBN melalui skema pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Anggaran SBSN tersebut merupakan re-alokasi dari DIPA Ditdaya ke DIPA USK, sehingga realisasinya disajikan sebagai belanja modal USK (PTN BLU). Rincian atas pekerjaan tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 244. Rincian Pekerjaan Sumber Dana SBSN TA 2023 pada USK

No	Uraian	No Kontrak	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Gedung PKAPIK	430/UN11.SBSN/SPK/2022, 14 Juni 2022	6.560.374.000,00
2	Peralatan *Tsunami Wave Flume*	B/098/UN11.SBSN/SPK/2022, 25 Januari 2022	656.953.000,00

Selanjutnya, PP Nomor 38 Tahun 2022 ditindak lanjuti dengan proses likuidasi satker BLU USK. Atas likuidasi tersebut seluruh aset di masa peralihan dicatat pada

satker Ditjen Diktiristek (PTN BLU- USK). Proses likuidasi tersebut menjadi dasar penerbitan KMK Nomor 426 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal (PNKA) PTNBH USK Per Tanggal 1 Januari 2023. Sesuai KMK tersebut, Ditjen Diktiristek dan USK menyusun BAST Hak dan Kewajiban nomor 7826/UN11/KU.03.03/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang menjadi dasar pencatatan aset yang dikeluarkan dari Neraca Ditjen Diktiristek (PTN BH - USK).

Sesuai KMK Nomor 426 Tahun 2023 menunjukkan bahwa NKA PTNBH USK per tanggal 1 Januari 2023 senilai Rp1.532.599.687.465,00. NKA dimaksud berasal dari nilai aset neto yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan NKA antara USK dan Kemendikbudristek dan merupakan saldo awal kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH USK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan USK diketahui beberapa hal sebagai berikut.

(1) Realisasi belanja modal tersebut telah selesai 100%, namun USK belum melakukan pencatatan pada modul aset tetap pada aplikasi SAKTI USK;

(2) USK tidak memasukkan belanja modal SBSN senilai Rp7.217.327.000,00 tersebut ke dalam PNKA PTNBH, dengan pertimbangan pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan pada bulan Maret 2023 sedangkan PNKA PTNBH USK dicatat per tanggal 1 Januari 2023;

(3) USK melakukan jurnal transaksi keluar (TK) pekerjaan KDP PKAPIK Tahun 2022 s.d 2023 senilai Rp7.217.327.000,00 untuk kemudian tercatat pada transaksi masuk (TM) pada Neraca Setditjen Diktiristek.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Neraca Setditjen Diktiristek belum mereklasifikasikan KDP ke persediaan dalam rangka penyerahan ke PTNBH USK, karena tidak berasal dari realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526112) melainkan dari belanja modal (537112) yang sebelumnya telah direalisasikan oleh USK. Dengan demikian terdapat permasalahan kurang saji saldo PNKA PTNBH USK dan permasalahan pengakuan pencatatan atas realisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap atau KDP.

b) Ditjen Kebudayaan

Daftar rincian Aset Tetap Sesditjen Kebudayaan menunjukkan adanya penyajian Gedung dan Bangunan senilai Rp39.398.291.000,00. Tujuan pengadaan aset tersebut adalah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Hasil reviu atas rincian aset tersebut diketahui bahwa terdapat kesamaan objek aset tetap yang disajikan pada Gedung dan Bangunan dengan objek pada akun persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Menurut PPK dan petugas BMN penyajian atas ketiga aset tersebut ke dalam aset tetap gedung dan bangunan dikarenakan pengadaan pekerjaan dilakukan secara bertahap dan menggunakan MAK Belanja Modal sehingga penyajiannya setiap tahapnya mengikuti jenis MAK yang dianggarkan. Berikut rincian atas aset yang tercatat juga pada Gedung dan bangunan.

Tabel 245. BMN untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang Dicatat sebagai Aset Tetap

No	Kode Barang	NUP	RIncian	Nilai Perolehan (Rp)
1	4.01.01.17001	10	Museum Maritim Belitung	928.800.000
2	4.01.01.17001	11	Museum PDRI	37.759.491.000
3	4.01.01.17001	12	Museum Natuna	710.000.000
Jumlah				**39.398.291.000**

Dengan demikian pencatatan ketiga barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tersebut tidak tepat diklasifikasikan sebagai aset tetap karena tujuan atas pengadaan tersebut diperuntukkan akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda,

g. Aset Tetap dan ATB belum ditetapkan status penggunaannya

Aset Tetap dan ATB belum ditetapkan status penggunaannya pada dua Eselon I dengan uraian sebagai berikut:

1) BPP Bahasa

Belum semua Aset Tetap yang digunakan oleh satker BPP Bahasa telah ditetapkan status penggunaanya. Pengelola BMN tidak segera mengusulkan pembuatan PSP dan menginput SK PSP yang telah terbit atas BMN yang dimiliki atau paling lambat enam bulan setelah BMN tersebut diterima. Lebih lanjut, sesuai *output* Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 31 Desember 2023 diketahui dari total Aset Tetap dan ATB senilai Rp1.416.066.565.718,00 yang telah memiliki SK PSP sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp1.365.207.041.477,00 atau 96,41% sementara yang belum memiliki SK PSP senilai Rp50.859.524.241,00 atau 3,59%, secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 246. Rincian Aset Tetap dan ATB yang Belum/Telah Memiliki SK PSP

No	Uraian	Nilai Neraca	Sudah PSP		Belum PSP	
		(Rp)	Nominal (Rp)	%	Nominal (Rp)	%
1	Tanah	892.987.805.493,00	882.891.793.210,00	98,87	10.096.012.283,00	1,13
2	Peralatan dan Mesin	166.283.437.655,00	147.356.612.794,00	88,62	18.926.824.861,00	11,38
3	Gedung dan Bangunan	335.685.753.742,00	315.105.584.175,00	93,87	20.580.169.567,00	6,13
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.798.773.750,00	4.725.271.250,00	98,47	73.502.500,00	1,53
5	Aset Tetap Lainnya	8.436.517.584,00	7.778.714.534,00	92,20	657.803.050,00	7,80
6	Aset Tak Berwujud	7.874.277.494,00	7.349.065.514,00	93,33	525.211.980,00	6,67
Jumlah		**1.416.066.565.718,00**	**1.365.207.041.477,00**	**96,41**	**50.859.524.241,00**	**3,59**

Rincian pada **Lampiran C.8.16.a s.d. C.8.16.f.**

2) Ditjen Diksi

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Ditjen Pendidikan Vokasi aset tetap yang belum dilakukan penetapan status penggunaannya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 247. BMN yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya

No	Satuan Kerja	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Rincian
1	PENS	Peralatan dan Mesin	3.476	23.102.711.215,00	Lampiran C.8.17.a
		Gedung dan Bangunan	1	112.060.986.580,00	Lampiran C.8.17.b
		Aset Tetap Lainnya	531	49.800.000,00	Lampiran C.8.17.c
2	PPNS	Peralatan dan Mesin	2.014	12.842.301.493,00	Lampiran C.8.18.a
		Aset Tak Berwujud	1	199.500.000,00	Lampiran C.8.18.b

No	Satuan Kerja	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Rincian
3	Polimedia	Tanah	1	243.858.995.948,00	Lampiran C.8.19.a
		Peralatan dan Mesin	1.187	10.233.761.483,00	Lampiran C.8.19.b
		Aset Tetap Lainnya	117	112.357.640,00	Lampiran C.8.19.c
4	POLNEP	Gedung dan Bangunan	17	9.228.087.627,00	Lampiran C.8.20.a
		Peralatan dan Mesin	1.209	3.884.212.000,00	Lampiran C.8.20.b
5	PNJ	Gedung dan Bangunan	8	16.552.113.924,00	Lampiran C.8.21
		Peralatan dan Mesin	1.504	13.901.218.169,00	
		Jalan, Irigasi, Jaringan	1	111.000.000,00	
		Aset Tak Berwujud	55	2.203.034.130,00	
6	PNUP	Peralatan dan Mesin	2.389	9.939.683.842,00	Lampiran C.8.22
		Aset Tetap Lainnya	1.761	195.908.500,00	
		Aset Tak Berwujud	356	3.186.134.093,00	
7	Poliwangi	Peralatan dan Mesin	3.816	15.117.512.180,00	Lampiran C.8.23
		Jalan, Irigasi, Jaringan	40	197.820.000,00	
		Aset Tetap Lainnya	593	228.758.683,00	
8	BPPMPV KPTK	Peralatan dan Mesin	23	3.483.113.010,00	Lampiran C.8.24
9	BBPPMPV BMTI	Peralatan dan Mesin	545	20.387.188.550,00	Lampiran C.8.25
Jumlah			**19.645**	**501.076.199.067,00**	

Hasil wawancara dengan pengelola BMN pada masing-masing satker diketahui bahwa BMN yang belum dilakukan penetapan status penggunaannya akan segera dilakukan pengajuan status pengguna pada tahun 2024.

3) Polines

Laporan Keaungan Polines Tahun 2023 tidak memiliki saldo Aset Tetap Tanah, namun terdapat saldo Gedung Bangunan dan KDP masing-masing senilai Rp223.469.672.481,00 dan Rp8.434.742.813,00.

Berdasarkan hasil inventarisasi BMN oleh DJKN Kanwil IX Semarang pada tahun 2008 diketahui bahwa terdapat pencatatan ganda atas tanah pada Polines dan Undip. Namun karena Polines tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut maka Polines harus mengeluarkan pencatatan tanah dalam Neraca yang dituangkan dalam BA Inventarisasi BMN Nomor 193/WKN.9/2008 Tanggal 22 Agustus 2008. BA tersebut menjelaskan bahwa BMN berupa tanah seluas 111.251 m2 dengan nilai perolehan senilai Rp22.420.303.000,00 dikoreksi/dihapus karena tidak didukung bukti kepemilikan yang sah dan status tanah milik Undip.

Polines telah melakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan atas aset tanah yang telah ditempati dengan melakukan permohonan melalui surat kepada Setjen Kemendikbudristek sebagai berikut:

Tabel 248. Upaya Polines untuk Mendapatkan Pengakuan Aset Tanah

No	Tahun	Ketarangan
1	2018	Direktur Polines mengajukan Surat Nomor 973/PL4.2/PL/2018 tanggal 12 Februari 2018 Sekjen Kemristekdikti perihal Permohonan Penetapan Status Tanah
2	2019	Dalam rangka rencana Pengembangan Ruang Kuliah dengan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu, Direktur Polines mengirimkan surat Nomor 2777A/PL4.7.2/TU/2019 tanggal 29 Maret 2019 kepada Sekjen Kemristekdikti tentang permohonan Rekomendasi untuk Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu yang akan dibangun di atas Aset Tanah Negara yang Penetapan Status Penggunaannya ada di Kemristekdikti (direncanakan menggunakan sumber anggaran PNBP)
3	2019	Sekjen Kemristekdikti memberikan surat balasan Nomor T/2126/A.A3/PL.01.03/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Rekomendasi Rencana Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu yang pada prinsipnya mendukung pelaksanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu di Polines dan memberikan fotocopy Sertifikat Tanah sebagai dokumen – dokumen kelengkapan administrasi.
4	2021	Direktur Polines mengirimkan surat Nomor 2675/PL4.7.2/TU/2021 tanggal 5 Mei 2021 kepada Sekjen Kemendikbudristek perihal Permohonan Pencatatan Aset BMN berupa Tanah dalam SIMAK BMN
5	2023	Samapai saat ini surat Direktur Polines Nomor 2675/PL4.7.2/TU/2021 tanggal 5 Mei 2021 belum mendapat jawaban dari Sekjen Kemendikbudristek .

Surat Polines nomor: 2675/PL4.7.2/TU/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang berisi sebagai berikut.

a) Catatan SIMAK BMN KPB Polines tidak didapatkan nilai aset berupa tanah.

b) Bangunan yang merupakan BMN dengan PSP nomor 086/KM.6/WKN.09/KNL.01/2021 tanggal 7 April 2021 yang dicatatkan pada KPB Polines berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 11 hektar dengan sertifikat yang masih menyatu secara keseluruhan dengan tanah pada kampus Undip.

c) Lokasi kampus Polines berada satu lingkungan yang sama dengan kampus Undip yang berstatus sebagai PTNBH.

d) Polines merupakan satuan kerja pada Kemendikbudristek sebagai pengguna BMN yang memerlukan catatan atas aset pada SIMAK BMN untuk keperluan penatausahaan BMN dan keperluan lainnya yang sesuai dengan pertaturan perundangan yang berlaku.

Tanah yang dipergunakan Polines pada saat ini masih tercatat pada Ditjen Diktiristek. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 40770/A.A2/LK.01.02/2022 tanggal 20 Juni 2022, Setjen Kemendikbudristek telah memberikan jaminan kepada satker BLU yang beririsan dengan PTNBH agar memanfaatkan tanah yang ditempati sesuai dengan tugas fungsi dan kebutuhan serta pendapatan Politeknik karena tanah yang digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh PTNBH adalah BMN yang tercatat dan terlapor dalam Laporan BMN dan LK Kemendikbudristek.

Dampak ketidakjelasan status tanah yang digunakan Polines diantaranya pada tahun 2023, Undip melakukan perluasan lahan Gedung Serba Guna yang berdampak pada aset Polines berupa lapangan tenis seluas 2.163 m2 senilai Rp240.211.000,00.

Direktur Polines telah menyampaikan surat kepada Sekjen Kemendikbudristek Nomor 1003/PL4.7.2/RT.02.01/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Permohonan yang menjelaskan bahwa perluasan lahan gedung serba guna Undip akan berdampak pada

lahan Polines. Atas hal tersebut pihak Polines memohon saran dan arahan Sekjen Kemendikbudristek agar perluasan gedung serba guna Undip tidak berdampak pada tanah/lahan lapang (bagian halaman/lingkungan/lahan yang ditempati oleh Polines) karena merupakan area satu-satunya untuk kegiatan dengan mahasiswa.

Saat ini Polines belum mengajukan penghapusan atas lapangan tenis yang terdampak dari pembangunan Gedung serba guna Undip. Berdasarkan keterangan pengelolan BMN Polines. pihak Undip telah menyediakan pengganti lapangan tenis yang terdampak pembangunan Gedung Serba Guna. Lokasi pengganti tersebut merupakan milik bagian tanah yang tercatat di Ditjen Diktiristek namun belum diperoleh dokumen status penggunaan lapangan tenis pengganti tersebut.

h. Dua unit kendaraan bermotor hasil serah terima dari Balai Arkeologi (eks-satker Kemdikbudristek) terhambat dalam proses balik nama

Aset Tetap pada Balai Arkeologi yang diserahkan kepada Sekretariat BSKAP, diantaranya berupa lima unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, pada tanggal 7 Oktober 2022, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 249. Daftar Kendaraan Bermotor Roda Empat yang diterima dari Balai Arkeologi

No	Merk/Tipe Barang	No Polisi (Sebelum Balik Nama)	No Polisi (Setelah Balik Nama)	Digunakan Satker	Tanggal BAST		Nilai Perolehan (Rp)
					Balar - Sekre	Sekre - PSKP dan Puskur	
1	Toyota/Fortuner 2.4 G4X2M/T	DK 1396 A	Belum Selesai	Puskurjar	07 Oktober 2022	20 Oktober 2022	473.360.000,00
2	Toyota New Fortuner 4x2 2.4 G A/T DSL Lux Vin 2018	D 1525 V	Belum Selesai	PSKP	07 Oktober 2022	24 Oktober 2022	483.820.000,00

Kendaraan diserahkan oleh Seketariat BSKAP kepada Puskurjar dan PSKP sampai dengan saat ini belum selesai dalam proses balik nama, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Puskurjar

Sekretariat BSKAP menyerahkan kendaraan kepada Puskurjar dengan nomor polisi DK1396A. Pengurus Barang Puskurjar telah mengajukan proses pencabutan dan balik nama BPKB dari wilayah Denpasar ke Jakarta, tetapi ditolak oleh Samsat wilayah Denpasar karena adanya perbedaan antara pihak penerima barang yaitu Sekretariat BSKAP, dengan pihak yang mengurus balik nama, yaitu Puskurjar. Atas hal tersebut telah dikirimkan Berita Acara Serah Terima dari Sekretariat BSKAP kepada Puskurjar tetapi tetap belum membuahkan hasil. sehingga sampai dengan saat ini proses tersebut belum selesai, dan nama pemilik pada BPKB adalah Balai Arkeologi Bali, dimana satker tersebut saat ini telah melebur ke BRIN. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa barang tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan BRIN.

2) PSKP

Sekretariat BSKAP menyerahkan kendaraan kepada PSKP dengan Nomor Polisi D1525V. Pengurus Barang PSKP telah mempersiapkan semua berkas yang diperlukan dan menyerahkannya kepada biro jasa dalam rangka pencabutan dan balik nama BPKB dari wilayah Kabupaten Bandung ke Jakarta. Namun demikian, Samsat wilayah Kabupaten Bandung menolak dengan alasan masih terdapat persyaratan yang belum lengkap, yaitu Surat Keterangan Penyerahan Kendaraan dari Eselon I kepada Eselon II.

Atas hal tersebut, telah dikirimkan BAST BMN dari Sekretariat kepada PSKP, namun sampai saat ini proses tersebut belum selesai. Nama yang tercantum pada BPKB adalah Balai Arkeologi Jawa Barat, dimana satker tersebut saat ini telah melebur ke BRIN. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa barang tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan BRIN.

i. Penatausahaan dan monitoring penggunaan Aset Tetap belum memadai

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas penatausahaan dam monitoring penggunaan aset oleh pegawai, menunjukkan kelemahan sebagai berikut.

1) Setjen

a) Puspresnas

Terdapat 16 buah laptop yang dipinjamkan ke pegawai pada Puspresnas, tidak didukung Berita Acara Peminjaman.

b) Biro Perencanaan

Biro perencanaa telah menerbitkan104 BA pinjam pakai laptop kepada pegawai. Sedangkan sesuai data dalam SIMAN, Biro Perencanaan mempunyai 142 laptop yang saat ini aktif digunakan oleh pegawai Biro Perencanaan. Dengan demikian terdapat sebanyak 38 (142 – 104) unit laptop tidak mempunyai BA Pinjam pakai.

Selain itu, dokumen BA pinjam pakai pada Biro Perencanaan hanya memuat nama peminjam, merek dan serial number laptop. BA pinjam pakai tidak memuat spesifikasi laptop dan NUP aset, sementara informasi yang diinput oleh operator aset BMN di SIMAN/SAKTI hanya NUP saja, tidak memuat serial number atau spesifikasi laptop. Hal ini akan menyulitkan pada saat akan dilakukan penelusuran dan inventarisasi laptop. Operator aset BMN saat ini sedang mengupayakan untuk menginventarisasi 38 laptop yang belum mempunyai berita acara pinjam pakai.

Dari 104 BA pinjam pakai tersebut terdapat 23 BA pinjam pakai dengan informasi yang tidak lengkap dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Tidak memuat NUP Aset

Berita acara pinjam pakai tidak memuat NUP aset sehingga menyulitkan dalam penelusuran data di SIMAN/SAKTI. Sebagai contoh: laptop rusak berat yang tercatat pada SIMAN/SAKTI yaitu Asus Expertbook P1440FB NUP 107 tidak dapat dicari pada BA Pinjam Pakai untuk mengetahui siapa peminjamnya karena BA Pinjam Pakai tidak memuat informasi NUP. Selain itu terdapat 6 laptop lainnya dengan merek serupa yaitu NUP 105, 106, 108, 109 dan 110 dengan kondisi baik dan NUP 104 dengan kondisi rusak berat.

(2) Tidak dilengkapi dengan label BMN dan tidak dapat diselaraskan dengan Aplikasi SIMAN

Berdasarkan dokumen pendataan 23 laptop rusak berat yang dilakukan setelah pemeriksaan fisik, diketahui sebanyak 9 unit laptop tidak dilengkapi dengan label BMN dan di klaim sebagai laptop NUP 107, 188, 211, 225, 226, 240, 242, 243 dan 253. Sembilan unit laptop yang di klaim tersebut tidak dapat ditelusuri identitasnya karena BA pinjam pakai tidak memuat NUP laptop, sementara itu

serial number yang tertera pada laptop dan BA pinjam pakai tidak dapat diselaraskan dengan data SIMAN/SAKTI.

2) Ditjen PDM

Penatausahaan BAST penggunaan laptop, notebook, *telphone mobile*, eksternal/*portable harddisk,* dan alat komunikasi telepon lainnya pada Ditjen PDM belum memadai yaitu:

a) Pada Direktorat PAUD, BAST penggunaan BMN tidak disimpan oleh pengelola BMN dengan baik, melainkan hanya diletakkan pada gudang sementara. Saat pemeriksaan fisik aset tetap, pengelola BMN kesulitan untuk mencari BAST tersebut;

b) Pada Direktorat PMPK, pengelola BMN tidak dapat menunjukan BAST penggunaan BMN karena tidak ada serah terima BAST dari pengelola BMN sebelumnya;

c) Pada Direktorat SMP, pengelola BMN tidak dapat menunjukkan BAST;

d) Pada Direktorat SMA dari 183 unit BMN yang dalam digunakan, hanya ada 19 unit yang dilengkapi BAST penggunaan BMN. Untuk BAST penggunaan 134 unit BMN, tidak dapat ditunjukkan karena belum ada serah terima BAST dari pengelola BMN sebelumnya;

e) Pada BBPMP Prov. Jawa Barat pengarsipan BAST tidak tertata dengan baik. BAST disimpan di beberapa MAP dan disimpan pada tempat penyimpanan yang terpisah.

Selain itu, tidak ada daftar pengguna aset untuk memudahkan monitoring penggunaan aset dan identitas pengguna aset tidak di input pada aplikasi SIMAN BMN.

3) Ditjen Diksi

Dua unit Samsung Galaxy S23 Ultra dan satu unit Ipad Pro 11 Inch Wifi Cellular yang digunakan oleh pegawai Setditjen Pendidikan Vokasi belum didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai.

j. Pemanfaatan Aset Tetap belum didukung perjanjian sewa dan/atau tarif sewa

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pemanfaatan Aset Tetap, diketahui permasalahan sebagai berikut.

1) Penggunaan/pemanfaatan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Itjen belum didukung perjanjian dan tarif sewa. Koperasi Pegawai Itjen berdiri sejak tahun 1984 dan saat ini menggunakan ruangan lantai 1 gedung B Itjen Kemendikbudristek.

Usaha yang dilaksanakan oleh koperasi Itjen terdiri dari simpan pinjam (simpanan wajib, simpanan sukarela dan pinjaman), penjualan ATK, penjualan snack rapat dan makan siang rapat. Atas penggunaan ruang tersebut oleh Koperasi Pegawai. Saat ini Kuasa Pengguna Barang Itjen belum mengajukan permohonan tarif ke KPKNL dan belum ada perjanjian sewa ruangan antara Itjen dengan Koperasi Pegawai.

2) Pada BBPMP Prov. Jawa Barat terdapat penggunaan ruangan pada gedung oleh Koperasi pegawai BBPMP Prov. Jawa Barat. Ruangan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha berupa minimarket dan kantin yang dikelola oleh Koperasi BBPMP Prov. Jawa Barat. Penggunaan ruangaan BBPMP Prov. Jawa Barat oleh Koperasi sejak tahun 2001.

BBPMP Prov. Jawa Barat telah memiliki SK Tarif BMN yang ditetapkan oleh Kepala BBPMP Prov. Jawa Barat pada tahun 2020, namun dalam SK tersebut belum mencantumkan tarif sewa koperasi dan kantin. Tarif sewa koperasi dan kantin baru ditetapkan pada tahun 2023 dalam SK Kepala BBPMP Prov. Jawa Barat Nomor 4391/C7.2/KU.04.00/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Tarif Sewa BMN Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Tahun 2023. Dalam keputusan tersebut, tarif sewa kantin dan koperasi masing-masing senilai Rp4.250.000,00 per tahun. Namun hingga saat pemeriksaan dilaksanakan, belum ada PKS antara koperasi dan BBPMP Jawa Barat terkait sewa ruangan dan belum dilakukan pembayaran terkait sewa ruangan.

3) Pada tahun 2006 Untan dan Polnep melakukan kerjasama pemanfaatan tanah seluas 12.000 m^2. Kerjasama dilakukan berdasarkan Surat Rektor Untan Nomor 1805/J22/LK/2006 tanggal 20 Juni 2006 yang diantaranya menyatakan bahwa, Polnep hanya berhak untuk memanfaatkannya sebagai lahan parkir dan tidak membangun bangunan permanen di atasnya. Hasil observasi lapangan, pada saat pemeriksaan diketahui bahwa, atas lahan tersebut telah didirikan bangunan permanen berupa kanopi parkiran, gerbang, Toko/Café, ATM BNI, pos satpam parkiran, papan Bilboard, taman dan kolam, serta minimarket Polnep

4) Pemanfaatan BMN PNJ berupa gedung dan bangunan belum ditetapkan perjanjian kerjasamanya yaitu di bagian ruangan seluas 48 m^2 pada Gedung Administrasi Jurusan yang dimanfaatkan untuk aktivitas perniagaan (*minimarket*) oleh Koperasi Karya Sejahtera Indonesia. Pihak koperasi memanfaatkan bagian ruangan tersebut sejak Maret 2023 dan PNJ telah menyusun *draft* perjanjian kerjasama dengan pihak Koperasi dengan besaran tarif sewa senilai Rp4.000.000,00 setiap bulannya. Namun pihak koperasi belum sepakat dengan tarif tersebut. Sampai dengan akhir pemeriksaan draft perjanjian kerjasama tersebut belum ditandatangani.

5) Pemanfaatan BMN PNUP berupa tanah serta gedung dan bangunan yang belum ditetapkan perjanjian kerjasamanya pada PNUP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250. Daftar Pemanfaatan Aset Untan yang belum memiliki PKS

No	Jenis BMN	Keterangan
1	Bagian tanah pada Kampus II PNUP	Tanah dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam (lahan sawah) oleh pihak ketiga. pendapatan sewa senilai Rp13.760.000,00
2	Bangunan seluas 129,6 m2 pada Kampus I PNUP	Bangunan dimanfaatkan untuk koperasi yang telah beroperasi sejak tahun 1997

6) Pemanfaatan aset Untan yang belum memiliki PKS dan dikelola secara perorangan/unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 251. Daftar Pemanfaatan Aset Untan yang belum memiliki PKS

Nomor	Unit Kerja	Nama Aset	Pengelola	Keterangan
1.	Fakultas Kedokteran	Kantin Pojok	Dikelola perorangan	Belum ada perjanjian kerjasama
2.	Fakultas FEB	5 kios kantin	Dikelola Koperasi FEB	Belum ada perjanjian kerjasama
3.	FMIPA	2 Kios Kantin	Dikelola perorangan	Belum ada perjanjian kerjasama
4.	Fakultas Kehutanan	3 Kios Kantin	Dikelola perorangan	Belum ada perjanjian kerjasama

Nomor	Unit Kerja	Nama Aset	Pengelola	Keterangan
5.	Koperasi Kopmart Untan	Kopmart Untan	Dikelola perorangan	Kerjasama dibuat antara Pengurus koperasi dengan perorangan, tarif sewa senilai Rp36.000.000,00 pertahun
6.	Untan Tennis Club (UTC)	Lapangan Tenis	Ketua Untan Tennis Club (UTC)	Belum ada perjanjian kerjasama Belum ditetapkan tarif sewa

7) BMN milik UPR berupa tanah dan bangunan yang dimanfaatkan pihak ketiga yang belum dilengkapi dengan perjanjian dan/atau belum memberikan kontribusi kepada UPR dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 252. Daftar Pemanfaatan Aset UPR yang belum memiliki PKS

No	Tanah dan/atau bangunan dimanfaatkan pihak ketiga	Permasalahan	Keterangan
1	Asrama Mahasiswa	satu pemakaian lahan tidak ada dokumen ijin/kerjasamanya dan terdapat perjanjian kerjasama tanpa batas waktu berakhir	**Lampiran C.8.26**
2	Kaveling tanah UPR di Jalan B. Koetin, Palangka Raya	Terdapat 97 kepala keluarga yang menggunakan lahan tanah UPR, belum adanya SK Rektor terkait tarif sewa BMN	**Lampiran C.8.27**
3	Lahan kantin	Terdapat 26 kantin yang menggunakan lahan tanah UPR, belum adanya SK Rektor terkait tarif sewa BMN	**Lampiran C.8.28**
4	Lahan taman	Terdapat 58 nama atau blok taman yang menggunakan lahan tanah UPR, belum adanya SK Rektor terkait tarif sewa BMN	**Lampiran C.8.29**

8) Polimedia

Terdapat BMN yang sudah dimanfaatkan namun belum dipungut PNBP pada Polimedia yaitu sebuah wisma berlantai tiga yang dinamakan Polimedia Hotel. Polimedia Hotel telah ada sejak awal pendirian Polimedia (dahulu Pusgrafin) dan memiliki tiga orang pengelola yang bertugas sebagai petugas front office, housekeeping dan petugas dapur yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pengawasan atas pengelolaan Polimedia Hotel dilaksanakan oleh Sdr. A (dosen) dan Sdr. N (PPNPN). Biaya perawatan, pemeliharaan, dan honor petugas pengelola dibebankan pada DIPA Polimedia.

Polimedia Hotel digunakan sebagai laboratorium yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi income generator saat Polimedia menjadi BLU. Namun karena belum menjadi BLU, maka Polimedia Hotel dipergunakan untuk menunjang aktifitas dan kegiatan lembaga tanpa dipungut biaya. Selama Tahun 2023 Polimedia Hotel digunakan untuk menginap bagi karyawan, dosen, tamu, mahasiswa, dan mahasiswa magang tanpa dipungut biaya sesuai daftar pada **Lampiran C.8.30**. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dalam mendukung kegiatan Polimedia. Polimedia belum pernah mengajukan usulan tarif Polimedia Hotel ke KPKNL

Hal tersebut tidak sesuai dengan

a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada:

1) Lampiran I.01 Kerangka Konspetual Paragraf 20 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan;

2) PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap pada:

a) Paragraf 4 yang diantaranya menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

b) Paragraf 15 yang menyatakan bahwa Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut, diantaranya (e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

c) Paragraf 17 yang menyatakan bahwa Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

d) Paragraf 18 yang menyatakan bahwa Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

e) Paragraf 19 yang menyatakan bahwa Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

f) Paragraf 20 yang menyatakan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan

g) Paragraf 49 yang menyatakan bahwa Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi merupakan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

h) paragraf 52 yang menyatakan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi

kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

i) Paragraf 77 yang menyatakan bahwa Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;

j) Paragraf 78 yang menyatakan bahwa Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

b. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah:

1) Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna BMN.

2) Pasal 6 Ayat (2.d) yang menyatakan bahwa Pengguna BMN berwenang dan bertanggungjawab mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;

3) Pasal 6 Ayat (2.f) yang menyatakan bahwa Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;

4) Pasal 6 Ayat (2.j) yang menyatakan bahwa Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;

5) Pasal 6 Ayat (2.l) yang menyatakan bahwa Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;

6) Pasal 7 Ayat (2.b) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna BMN berwenang dan bertanggungjawab mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;

7) Pasal 30 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu, tanggungjawab peminjam serta hak dan kewajiban para pihak.

8) Pasal 42 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN/D yang berada dalam penguasannya.

9) Pasal 42 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan BMN/Dsebagaimana dimaksdu pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

10) Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMN selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.

11) Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN/Dyang status penggunaannya berada

pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 – 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN Berupa Tanah pada Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rangka melaksanakan persertipikatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Negara/Lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut.

   1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi BMN berupa tanah.

   2) Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan/atau pensertipikatan BMN berupa tanah.

   3) Mengajukan permohonan Hak Pakai atau perubahan nama pemegang hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   4) Menyusun dan mengajukan anggaran dalam rangka pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan mekanisme APBN.

   5) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah kepada Pengelola Barang dengan melampirkan asli sertipikat, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

d. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 Lampiran Bab VII Kebijakan Akuntansi Aset Tetap huruf C Pengakuan yang menyatakan bahwa KDP merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi KDP yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari Neraca dilakukan sesuai ketentuan mengenai pengelolaan BMN.

e. PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN pasal 6 pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang:

   1) Mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;

   2) Melakukan pemanfaatan BMN setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;

   3) Menyetujui permohonan penerusan sewa atas BMN yang pelaksanaan sewanya telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang;

f. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN:

1) Pasal 1 Ayat (14) yang menyatakan bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN;

2) Pasal 15 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan BMN ke dalam buku barang pada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya menyampaikannya kepada pengelola barang;

3) Pasal 18 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengguna barang melakukan pendaftaran, pencatatan, dan/atau pemutakhiran daftar barang berdasarkan hasil inventarisasi;

4) Pasal 38 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelola barang wajib melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;

5) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:

a) Huruf a, sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan

b) Huruf b, sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan;

g. PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 76/PMK.06/2019 pada:

1) Pasal 7 ayat (1.a) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;

2) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural di lingkungan unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan;

3) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.

h. Kepmendikbudristek Nomor 125/M/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kemendikbudristek pada POS AP Pendistribusian BMN langkah kegiatan nomor 4 yaitu melakukan pengkodean (pelabelan) BMN.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Potensi penyalahgunaan, sengketa dan hilangnya aset tetap tanah yang masih bersertipikat a.n. pihak lain, aset tetap tanah yang belum bersertipikat, aset yang sedang dalam sengketa/dikuasai pihak lain, aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, dan pengamanan fisik yang belum memadai;

b. Potensi hilang dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertangung jawab atas BMN yang belum memiliki penetapan status pengguna;

c. Potensi kehilangan aset tanah pada Politeknik Negeri Samarinda;

d. Penyajian aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp7.181.873.450,00 (Rp7.021.623.450,00 + Rp97.970.000,00 + Rp62.280.000,00) tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;

e. Polines tidak dapat memanfaatkan dan mengembangkan secara optimal BMN Tanah yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan;

f. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi BMN dan SIMAN kurang andal.;

g. PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan aset kurang optimal; dan

h. Tujuan tertib administrasi atas pengelolaan BMN belum sepenuhnya tercapai

Hal tersebut disebabkan karena:

a. KPB terkait belum cermat melakukan pengendalian yaitu pengamanan dan pensertifikatan BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaannya, melakukan inventarisasi aset tetap dan ATB serta memproses permohonan penghentian dan penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

b. Pengelola BMN pada masing-masing satker belum optimal dan tidak cermat dalam mengelola dan menatausahakan BMN;

c. Operator BMN tidak cermat dalam menatausahakan pencatatan asset ke dalam aplikasi BMN; dan

d. Pengurus Barang dan Kuasa Pengguna Barang belum melakukan iventarisasi atas BMN yang terdapat pada satkernya

Atas permasalahan tersebut Kemendikbudristek menyatakan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan kepatuhan sebagian telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara dan sisanya dalam proses, sedangkan terkait dengan penyajian telah dilakukan penyesuaian/koreksi dan pengungkapan pada laporan keuangan tahun 2023. Kemendikbudristek berkomitmen terus mengupayakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan asset tetap.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan:

a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan masing-masing KPA untuk:

   1) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengamanan dan pensertifikatan BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaannya;

   2) Menginventarisasi aset tetap serta memproses permohonan penghentian dan penghapusan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional pemerintahan;

   3) Memerintahkan Pengelola dan operator BMN pada masing-masing satker agar lebih optimal dan cermat dalam mengelola dan menatausahakan BMN; dan

b. Irjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, dan Dirjen PDM supaya memerintahkan Kepala satuan kerja terkait untuk menyusun atau menetapkan Perjanjian Kerjasama, Sewa dan/atau Tarif Sewa pada Itjen, PNJ, PNUP, UNTAN, UPR, Polimedia, dan BBPMP Prov. Jawa Barat.

D. Kewajiban

Penyajian dan Pengungkapan Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Diksi Belum Memadai dan Kelebihan Pembayaran UKT pada PENS Belum Dikembalikan

Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 menyajikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga senilai Rp825.974.451.838,00 (*audited*) atau meningkat senilai Rp128.057.259.786,00 atau 18,35% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp697.917.192.052,00 (*audited*).

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga pada Dirjen Diksi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada empat satker belum dapat diidentifikasi sumber dana maupun peruntukannya

Hasil pemeriksaan atas kertas kerja pendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan wawancara dengan pengelola keuangan satker diketahui bahwa terdapat dana pihak ketiga yang belum dapat diidentifikasi baik sumber dana maupun peruntukannya pada Politeknik Negeri Manado (Polimdo), Polimedia, PNJ, dan Polman Bandung. Dana tersebut disajikan dalam akun Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya, Dana Pihak Ketiga dan Dana Pihak Ketiga Lainnya-BLU sebagai berikut.

Tabel 253. Dana Pihak Ketiga Belum Dapat Diidentifikasi pada Empat Satker

Satker	Jenis Utang kepada Pihak Ketiga		Rincian	
	Uraian	Jumlah	Nama	Jumlah
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya				
Polimedia	Dana pada Rekening Titipan yang Belum Didistribusikan	3.130.038.992	KIP	704.753.688
			KJMU	2.413.185.304
			ADik	12.000.000
			Salah Transfer	100.000
	Dana PMW sejak Tahun 2021 dan dianggap sebagai pengembalian dana bergulir PMW dari mahasiswa	27.256.688	Tidak diketahui nama penyetor dan peruntukannya	27.256.688
Jumlah		**3.157.295.680**		**3.157.295.680**
Dana Pihak Ketiga				
Polimedia	Dana Pada Rekening Titipan Yang Belum Didistribusikan	3.115.814.696	KIP	749.600.000
			KJMU	2.339.814.696
			ADik	26.400.000
Polimdo	Dana Lainnya	16.500.000	Belum ada rincian	16.500.000
Jumlah		**3.132.314.696**		**3.132.314.696**
Dana Pihak Ketiga Lainnya-BLU				
PNJ	Dana Pihak Ketiga di RPL 088 BLU PNJ UTK DK	2.800.800	Belum ada rincian	2.800.000
Polman Bandung	Dana Titipan P2KR Tidak Jelas	61.307.283	Belum ada rincian	61.307.283
Jumlah		**64.108.083**		**64.108.083**

Dari tabel di atas, utang pihak ketiga yang belum dapat teridentifikasi sumber dana dan peruntukannya senilai Rp107.864.771,00 (Rp27.256.688,00 + Rp16.500.000,00 + Rp2.800.800,00 + Rp61.307.283,00).

b. UKT yang telah dibayarkan secara mandiri oleh mahasiswa penerima beasiswa KIPK senilai Rp87.000.000,00 belum dikembalikan

Utang Kepada Pihak Ketiga antara lain terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk mencatat pengembalian UKT atas mahasiswa penerima beasiswa KIPK. Hasil pemeriksaan atas pembayaran UKT mahasiswa penerima beasiswa KIPK pada PENS menunjukkan bahwa terdapat 40 mahasiswa yang telah membayar UKT secara mandiri senilai Rp87.000.000,00 namun kemudian 40 mahasiswa tersebut memperoleh beasiswa KIPK. Penerimaan UKT secara mandiri oleh mahasiswa dan UKT yang berasal dari beasiswa KIPK telah disetor ke Kas Negara dengan rincian sesuai **Lampiran D**. Kelebihan pembayaran UKT ini tidak dicatat sebagai utang kepada pihak ketiga lainnya dalam Neraca PENS karena belum adanya kepastian terkait sumber dana pengembalian UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa sebelum menerima beasiswa KIPK.

Hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa UKT mandiri yang diterima dari mahasiswa dan beasiswa KIPK yang diterima di rekening Bendahara Penerimaan pada bulan November dan Desember 2023 langsung disetor ke Kas Negara. Bendahara Penerimaan tidak mengecek kembali daftar penerima dan pembayaran UKT tersebut.

Hasil wawancara dengan Bagian Akademik sebagai pengurus beasiswa KIPK diketahui bahwa penerimaan ganda tersebut terjadi karena rekening tujuan transfer beasiswa KIPK atas 40 mahasiswa tersebut menggunakan rekening Bendahara Penerimaan dan belum diganti ke rekening RPL 031 PENS untuk Dana Beasiswa. Pencairan beasiswa KIPK tahap selanjutnya langsung ke RPL 031 PENS untuk Dana Beasiswa sehingga memudahkan dalam memverifikasi pembayaran dan pengembalian UKT mahasiswa.

Mahasiswa penerima beasiswa KIPK dan telah membayar UKT mandiri telah meminta PENS untuk mengembalikan kelebihan UKT. Selanjutnya PENS berkomunikasi dengan KPPN melalui surat Nomor 0153/PL14/KU.04.01/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk meminta penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) untuk pengembalian PNBP. KPPN telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SKTB Nomor KET-2/KPN.160105/2024 tanggal 19 Februari 2024 namun sampai dengan akhir pemeriksaan pengembalian PNBP tersebut belum terealisasi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

1) Lampiran I.01 SAP Berbasis Akrual – Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

a) Paragraf 38 yang menyatakan bahwa Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik.

(1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

b) Paragraf 65 huruf (b) yang menyatakan bahwa Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

2) Lampiran I.10 SAP Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban

a) Paragraf 11 yang menyatakan bahwa Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka Panjang.

b) Paragraf 87 yang menyatakan bahwa Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

b. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 Lampiran Bab XI Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, Bagian A Poin 6 c. Utang kepada Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

c. Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2003 Bagian Lampiran, Bab III, Mekanisme Pelaksanaan, huruf C, Penyaluran PIP Dikti, poin Nomor 12 yang menyatakan bahwa Dalam hal, Perguruan Tinggi telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional Pendidikan kepada penerima PIP Dikti baik sebelum penyaluran biaya pendidikan ataupun sesudah penyaluran biaya pendidikan penerima PIP Dikti, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima PIP Dikti.

d. Surat Keputusan Direktur PENS Nomor 029/PK14/KU/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pengembalian UKT di lingkungan PENS menyatakan bahwa:

1) Pengembalian UKT bagi mahasiswa aktif dan penerima beasiswa apabila sudah membayar UKT dan beasiswa turun setelah daftar ulang (*double* bayar) maka UKT dikembalikan dalam tenggang waktu sesuai dengan masa di Unit Perencanaan.

2) Segala pengeluaran yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA PENS.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Utang kepada Pihak Ketiga yang disajikan di Neraca Kemdikbudristek per 31 Desember 2023 senilai Rp107.864.771,00 (Rp27.256.688,00 + Rp16.500.000,00 + Rp2.800.800,00 + Rp61.307.283,00) tidak menunjukkan kondisi sebenarnya; dan

b. Pembayaran UKT atas mahasiswa penerima KIPK berpotensi tidak dapat diterima oleh mahasiswa senilai Rp87.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Dirjen Diksi belum menyusun petunjuk teknis akuntansi terkait Utang kepada Pihak Ketiga dan menyusun sistem yang terintegrasi atas dana kelolaan PTV dengan unit kerja di PTV yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas hak dan kewajiban dana yang dikelola;
b. Direktur PENS belum menyusun SOP koordinasi dan rekonsiliasi secara berkala antara Bagian Keuangan dan Bagian Akademik pada PENS terkait pencairan beasiswa KIP-K dan pembayaran UKT.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Polimdo, PNJ, Polman Bandung, dan PENS menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Dirjen Diksi supaya:

a. Menyusun petunjuk teknis akuntansi terkait Utang kepada Pihak Ketiga dan menyusun sistem yang terintegrasi atas dana kelolaan PTV dengan unit kerja di PTV;
b. Memerintahkan Direktur Polimdo, Polimedia, PNJ, dan Polman Bandung supaya mengidentifikasi sumber dana dan peruntukan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga senilai Rp107.864.771,00 dan segera melakukan penyaluran dana tersebut;
c. Memerintahkan Direktur PENS untuk:
    1) Menyusun SOP koordinasi dan rekonsiliasi secara berkala antara Bagian Keuangan dan Bagian Akademik terkait pencairan beasiswa KIP-K dan pembayaran UKT;
    2) Berkoordinasi dengan KPPN untuk mempercepat pengembalian UKT mahasiswa senilai Rp87.000.000,00.

BAB II IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2023

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi atas LHP LK Kemendikbudristek TA 2010 – 2022. Sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab keuangan Kemendikbudristek dan DPR.

Pemantauan atas tindak lanjut Kemendikbudristek terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 254. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi per 31 Desember 2023

No	LHP LK	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindak-lanjuti
1	TA 2010	47	106	78	11	17	0
2	TA 2011	77	148	118	27	1	2
3	TA 2012	59	152	104	45	0	3
4	TA 2013	45	147	57	84	5	1
5	TA 2014	71	259	98	131	21	9
6	TA 2015	118	394	231	149	13	1
7	TA 2016	76	225	112	113	0	0
8	TA 2017	52	195	88	105	0	2
9	TA 2018	51	177	84	93	0	0
10	TA 2019	36	151	64	86	1	0
11	TA 2020	39	115	47	68	0	0
12	TA 2021	34	88	36	52	0	0
13	TA 2022	24	74	33	41	0	0
Jumlah		**729**	**2.231**	**1.150**	**1.005**	**58**	**18**

Pada Tahun 2023, Kemendikbudristek telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK antara lain mengenai:

1. LHP LK TA 2010 terdapat 47 temuan pemeriksaan dengan 106 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 78 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 11 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak 17 rekomendasi belum ditindak lanjuti.
2. LHP LK TA 2011 terdapat 77 temuan pemeriksaan dengan 148 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 118 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 27 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi, sebanyak satu rekomendasi belum ditindak lanjuti, dan sebanyak dua rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah.
3. LHP LK TA 2012 terdapat 59 temuan pemeriksaan dengan 152 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 104 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 45 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai

rekomendasi, dan sebanyak tiga rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah.

4. LHP LK TA 2013 terdapat 45 temuan pemeriksaan dengan 147 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 57 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 84 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi, sebanyak lima rekomendasi belum ditindak lanjuti, dan sebanyak satu rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah.
5. LHP LK TA 2014 terdapat 71 temuan pemeriksaan dengan 259 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 98 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 131 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi, sebanyak 21 rekomendasi belum ditindak lanjuti, dan sebanyak sembilan rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah.
6. LHP LK TA 2015 terdapat 118 temuan pemeriksaan dengan 394 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 231 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 149 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi, sebanyak 13 rekomendasi belum ditindak lanjuti, dan sebanyak satu rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah.
7. LHP LK TA 2016 terdapat 76 temuan pemeriksaan dengan 225 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 112 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dan sebanyak 113 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi.
8. LHP LK TA 2017 terdapat 52 temuan pemeriksaan dengan 195 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 88 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 105 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak dua rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah
9. LHP LK TA 2018 terdapat 51 temuan pemeriksaan dengan 177 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 84 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dan sebanyak 93 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi.
10. LHP LK TA 2019 terdapat 36 temuan pemeriksaan dengan 151 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 64 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 86 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak satu rekomendasi belum ditindak lanjuti.
11. LHP LK TA 2020 terdapat 39 temuan pemeriksaan dengan 115 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 47 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dan sebanyak 68 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi.
12. LHP LK TA 2021 terdapat 34 temuan pemeriksaan dengan 88 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 36 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dan sebanyak 52 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi.

13. LHP LK TA 2022 terdapat 24 temuan pemeriksaan dengan 74 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 33 rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dan sebanyak 41 rekomendasi telah ditindak lanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR SINGKATAN

A		
AA	:	*Automatic Adjustment*
ADB	:	*Asia Development Bank*
ADEM	:	Afirmasi Pendidikan Menengah
ADIK	:	Afirmasi Pendidikan Tinggi
AKN	:	Akademi Komunitas Negeri
AKSI	:	*Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth in Indonesia*
Antun	:	Aneka Tunjangan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APMI	:	Asosiasi Peneliti Muda Indonesia
APTV	:	Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
ARO	:	*Automatic Roll Over*
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATK	:	Alat Tulis Kantor
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
Atdikbud	:	Atase Pendidikan dan Kebudayaan
B		
BA	:	Bagian Anggaran
BA	:	Berita Acara
BAAK	:	Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Balar	:	Balai Arkeologi
Banpem	:	Bantuan Pemerintah
BAN-PT	:	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPP	:	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BB	:	Balai Besar
BB	:	Balai Bahasa
BBGP	:	Balai Besar Guru Penggerak
BBPMP	:	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan
BBPPMPV	:	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BBPPMPV KPTK	:	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan
BBPPMPV BMTI	:	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri
BDDM	:	Belanja Dibayar Dimuka
Belmawa	:	Pembelajaran dan Kemahasiswaan
BGP	:	Balai Guru Penggerak

BIMA	:	Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
BK	:	Balai Konservasi
BKD	:	Beban Kerja Dosen
BKHM	:	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKT	:	Biaya Kuliah Tunggal
BKU	:	Buku Kas Umum
BL	:	Biaya Langsung
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BMN/D	:	Barang Milik Negara/Daerah
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BOP KUM	:	Bantuan Operasional Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
BOPTN	:	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKB	:	Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKHM	:	Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas
BPMP	:	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
BPP	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu
BP PAUD dan Dikmas	:	Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
BPP Bahasa	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
BPPP	:	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
BPPTNBH	:	Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
BPSMP	:	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba
BPTI	:	Balai Pengembangan Talenta Indonesia
BPU	:	Badan Pengelola Usaha
BSKAP	:	Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSI	:	Bank Syariah Indonesia
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
BTN	:	Bank Tabungan Negara
BTL	:	Biaya Tidak Langsung
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUK	:	Biro Umum dan Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CB	:	Cagar Budaya
CCO	:	*Contract Change Order*
CF	:	*Competitive Fund*

CLTN	:	Cuti Diluar Tanggungan Negara
CMS	:	*Cash Management System*
CO	:	*Carry Over*
COVID-19	:	*Corona Virus Diseases* 2019
CS	:	*Cleaning Service*
CV	:	*Commanditaire Vennootschap*

D

Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DED	:	*Detail Engineering Design*
Dikdas	:	Pendidikan Dasar
Dikmas	:	Pendidikan Masyarakat
Dikmensus	:	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Diksi	:	Pendidikan Vokasi
Ditdaya	:	Direktorat Sumber Daya
Diktiristek	:	Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi
DIPA	:	Daftar Isian Penggunaan Anggaran
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Dit.Belmawa	:	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	:	Ditjen Kekayaan Negara
DPR	:	Daftar Pengeluaran Riil
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUDI	:	Dunia Usaha Dunia Industri
DUPAK	:	Daftar Urutan Penilaian Angka Kredit

F

FEB	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FGD	:	*Focus Group Discussion*
FIKP	:	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
FKIP	:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
FMIPA	:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
FPPTI	:	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia
FKP2TN	:	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri

G

GCP	:	*Google Cloud Platform*
GLP	:	*General Ledger* dan Pelaporan
GP	:	Guru Penggerak
GSI	:	Gala Siswa Indonesia
GTK	:	Guru dan Tenaga Kependidikan

GUP	:	Ganti Uang Persediaan
H		
HPP	:	Harmonisasi Peraturan Penganggaran
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HICPHAS	:	*Halu Oleo International Conference on Pharmacy, Health, and Applied Sciences*
HICAFS	:	*Halu Oleo International Conference on Agriculture and Food Security*
HIMBARA	:	Himpunan Bank Milik Negara
HETI	:	*Higher Education for Technology and Innovation*
HOICEB	:	*Halu Oleo International Conference on Economics and Business*
HOICPH	:	*Halu Oleo International Conference on Public Health*
I		
ICC	:	*International International Interdisciplinary Conference*
ICMID	:	*International Conference on Maritime Infrastructure and Development*
ICMSE	:	*International Conference on Mathematics and Science Education*
IIP	:	*ITB Innovation Park*
IKN	:	Ibu Kota Nusantara
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IMB	:	Ijin Mendirikan Bangunan
IMHO	:	*International Conference Medical and Health Science*
IMJ	:	*Indonesian Midwifery Journal*
INKINDO	:	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
IT	:	*Information and Technology*
ITAPS	:	*International Conference on Improving Tropical Animal Production for Food Security*
ITB	:	Institut Teknologi Bandung
ITERA	:	Institut Teknologi Sumatera
ITK	:	Institut Teknologi Kalimantan
Irjen	:	Inspektur Jenderal
Itjen	:	Inspektorat Jenderal
ITS	:	Institut Teknologi Surabaya
J		
JF	:	Jabatan Fungsional
JICA	:	*Japan International Cooperation Agency*
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	:	Petunjuk Teknis
JCU	:	*James Cook University*
JMV	:	*Joint Monitoring Visit*
K		
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kabag	:	Kepala Bagian
Kantah	:	Kantor Pertanahan

KAP	:	Kantor Akuntan Publik
Kaprodi	:	Kepala Prodi
Karwas	:	Kartu Pengawasan
Kasubag	:	Kepala Subbagian
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KB	:	Kantor Bahasa
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KDH	:	Koperasi Kreasi Dinamika Harmoni
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendikbudristek	:	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
Kepmen	:	Keputusan Menteri
KFW	:	*Kreditanstalt für Wiederaufbau ("Institut Kredit untuk Rekonstruksi")*
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KK	:	Kartu Keluarga
KKP	:	Kartu Kredit Pemerintah
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KLK	:	Kegiatan Luar Kampus
KLK	:	Komunitas Luar Kotak
KLSD	:	Kelembagaan dan Sumber Daya
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KIP-K	:	Kartu Indonesia Pintar Kuliah
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPS	:	Kartu Perlindungan Sosial
KPT	:	Koordinator Penguruan Tinggi
Krida Dubas	:	Koordinasi Pembuatan Konten Kebahasaan
KRO	:	Klasifikasi perincian *Output*
KSO	:	Kerja Sama Operasional
KSPSTK	:	Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan
KTU	:	Kepala Tata Usaha
KUM	:	Keaksaraan Usaha Mandiri
KWRI	:	Kantor Wakil Republik Indonesia

L

LCD	:	*Liquid Crystal Display*
LHKPN	:	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHKASN	:	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keungan Pemerintah Daerah

LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LLDikti	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LO	:	Laporan Operasional
LoA	:	*Letter of Acceptance*
LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPMP	:	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPPKSPS	:	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
LPPM	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
LPPMP	:	Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPTK	:	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LP3M	:	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LS	:	Langsung
LSF	:	Lembaga Sensor Film

M

M	:	Memenuhi
MACIFIC	:	*Maritime Continent Fulcrum International Conference*
MAK	:	Mata Anggaran Keluaran
MAP	:	Mata Anggaran Penerimaan
MCB	:	Museum dan Cagar Budaya
MCC	:	*Millenium Challenge Corporation*
MenPANRB	:	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MWA	:	Majelis Wali Amanat

N

NI	:	Nomor Induk
NKA	:	Nilai Kekayaan Awal
NON GCP	:	*Non Google Cloud Platform*
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NSBPB	:	Narasumber Berbagi Praktik Baik
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTPN	:	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
NUP	:	Nomor Urut Pendaftaran
NUPTK	:	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

O

OPK	:	Objek Pemajuan Kebudayaan

OPSI	:	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia
Ormas	:	Organisasi Masyarakat
OTK	:	Organisasi Tata Kerja
Otsus	:	Otonomi Khusus

P

PAK	:	Penilai Angka Kredit
PAUD DIKDASMEN	:	Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
PBET	:	*Production Based Education Training*
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBJ	:	Pengadaan Barang dan Jasa
PDDikti	:	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PDM	:	PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
PENS	:	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Perjadin	:	Perjalanan Dinas
Permendikbud	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbudristek	:	Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
PermenPANRB	:	Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Permenristekdikti	:	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perpres	:	Peraturan Presiden
Persesjen	:	Peraturan Sekretaris Jenderal
PGP	:	Program Guru Penggerak
PGSD	:	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PGRI	:	Persatuan Guru Republik Indonesia
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PHLN	:	Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PIC	:	*Person In Charge*
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PIP SD	:	Program Indonesia Pintar - Sekolah Dasar
PIP SMP	:	Program Indonesia Pintar - Sekolah Menengah Pertama
PIP SMA	:	Program Indonesia Pintar - Sekolah Menengah Atas
PIP SMK	:	Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan
PKAPIK	:	Pusat Kolaborasi Akademik dan Pembelajaran Inovatif Kebencanaan
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKK	:	Pendidikan Kecakapan Kerja
PKLN	:	Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
PKM	:	Program Kreatifitas Mahasiswa
PKN	:	Pekan Kebudayaan Nasional
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PKW	:	Pendidikan Kecakapan Wirausaha
PLP	:	Pengolahan Laporan Pengawasan

Plt	:	Pelaksana Tugas
PMB	:	Penerimaan Mahasiswa Baru
PMC	:	*Project Management Consultant*
PMDSU	:	Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMM	:	Pertukaran Mahasiswa Merdeka
PMO	:	Pokja Manajemen Operasional
PMPK	:	Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
PMSC	:	*Project Management Specialist*
PMU	:	*Project Management Unit*
PMW	:	Program Mahasiswa Wirausaha
PNB	:	Politeknik Negeri Bali
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNJ	:	Politeknik Negeri Jakarta
PNKA	:	Penetapan Nilai Kekayaan Awal
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PNUP	:	Politeknik Negeri Ujung Pandang
PNSD	:	PNS Daerah
POBKD	:	Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
Pokja	:	Kelompok Kerja
Polban	:	Politeknik Negeri Bandung
Polibatam	:	Politeknik Negeri Batam
Polije	:	Politeknik Negeri Jember
Polimedia	:	Politeknik Negeri Media Kreatif
Polimdo	:	Politeknik Negeri Manado
Polinela	:	Politeknik Negeri Lampung
Polinema	:	Politeknik Negeri Malang
Polines	:	Politeknik Negeri Semarang
Politala	:	Politeknik Negeri Tanah Laut
Poliwangi	:	Politeknik Negeri Banyuwangi
Polman Babel	:	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
Polman Bandung	:	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
Polnep	:	Politeknik Negeri Pontianak
Polnes	:	Politeknik Negeri Samarinda
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsri	:	Politeknik Negeri Sriwijaya
POS	:	Prosedur Operasional Standar
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPA	:	Peningkatan Prestasi Akademik
PPABP	:	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
PPG	:	Pendidikan Profesi Guru
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPHP	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	:	Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
PPK BLU	:	Pola Pengelolaan Keuangan BLU

PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPN/Bappenas	:	Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PPNS	:	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
PPNPN	:	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPPPTK	:	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PPSPM	:	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
PPU Untan	:	Pengelola dan Pengembangan Usaha Universitas Tanjungpura
PP-PAUD	:	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Prov	:	Provinsi
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSDKU	:	Program Studi Di Luar Kampus Utama
PSKP	:	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
PSP	:	Penetapan Status Pengguna
PSP	:	Program Sekolah Penggerak
PSW	:	Pulang Sebelum Waktu
PT	:	Perseroan Terbatas
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTNBLU	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
PTLHP	:	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
PTV	:	Perguruan Tinggi Vokasi
Pusbanglin	:	Pusat Perlindungan dan Pengembangan
Pusbin	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Pusdatin	:	Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pusdiklat	:	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Puskurjar	:	Pusat Kurikulum dan Pengajaran
Puslapdik	:	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Puspresnas	:	Pusat Prestasi Nasional
P2MD	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
P3M	:	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
P3TV	:	Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi

R

RAB	:	Rincian Anggaran dan Biaya
RBA	:	Rencana Bisnis dan Anggaran
RKA-K/L	:	Rencana Kegiatan Anggaran-Kementerian/Lembaga
RKAT	:	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
RKB	:	Ruang Kelas Baru
RKS	:	Rencana Kerja dan Syarat
RM	:	Rupiah Murni
RO	:	Rincian *Output*
RPATA	:	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTPM	:	Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
Rusunawa	:	Rumah Susun Sederhana Sewa
S		
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
Satker	:	Satuan Kerja
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAKTI	:	Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi
SBM	:	Standar Biaya Masukan
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SD	:	Sekolah Dasar
SDIT	:	Sekolah Dasar Islam Terpadu
SDLB	:	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sdr	:	Saudara
SE	:	Surat Edaran
SEAMEO	:	*Southeast Asian Ministers of Education Organization*
Sekjen	:	Sekretaris Jenderal
SERUNI	:	Sistem Informasi Tunjangan Profesi Dosen
Sesditjen	:	Sekretaris Direktorat Jenderal
Setditjen	:	Sekretariat Direktorat Jenderal
Setjen	:	Sekretariat Jenderal
SFD	:	*Saudi Fund for Development*
SHM	:	Sertipikat Hak Milik
SHU	:	Sisa Hasil Usaha
SINTA	:	*Science and Technology Index*
SK	:	Surat Keputusan
SKP	:	Sasaran Kinerja Pegawai
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	:	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SKTM	:	Surat Keterangan Tidak Mampu
SKTK	:	Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus
SKTP	:	Surat Keputusan Tunjangan Profesi
SKU	:	*Stock Keeping Unit*
SILN	:	Sekolah Indonesia Luar Negeri
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMAN	:	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIM-Bar	:	Sistem Informasi Manajemen Pembayaran
SIMKEU RBA	:	Sistem Informasi Keuangan Rencana Bisnis Anggaran
SimPel	:	Simpanan Pelajar
SIMPONI	:	Sistem Informasi PNBP Online
SIM-Tun	:	Sistem Informasi Manajemen Tunjangan
SIPTL	:	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SISMINRA	:	Sistem Administrasi Bendahara
SISTER	:	Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi

SKM	:	Staff Khusus Menteri
SKS	:	Satuan Kredit Semester
SLBN	:	Sekolah Luar Biasa Negeri
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMAN	:	Sekolah Menengah Atas Negeri
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMKN	:	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SMKS	:	Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
SMK PK	:	Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMPN	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SMPIT	:	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
SOP	:	Standar Operasi Prosedur
SOTK	:	Susunan Organisasi Tata Kerja
SPBy	:	Surat Perintah Bayar
SPR	:	Surat Pendebetan Rekening
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
SP3B	:	Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SPAB	:	Satuan Pendidikan Aman Bencana
SPASIKITA	:	Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPD	:	Surat Perjalanan Dinas
SPI	:	Satuan Pengawasan Internal
SPHL	:	Surat Pengesahan Hibah Langsung
SPK	:	Surat Perjanjian Kerja
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPMB	:	Surat Perintah Mengeluarkan Barang
SPP	:	Sumbangan Pengembangan Pendidikan
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
SPPN	:	Surat Perintah Penyaluran
SPTJB	:	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
SPTJM	:	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
SP3B	:	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
SSBOPT	:	Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
SSKK	:	Syarat-Syarat Khusus Kontrak
SSO	:	*Single Sign On*
SSUK	:	Syarat-Syarat Umum Kontrak
STIPER	:	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian
STMIK	:	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
Sulsel	:	Sulawesi Selatan
Sumbar	:	Sumatera Barat
Suslat	:	Kursus dan Pelatihan

T

TA	:	Tahun Anggaran

TAYL	:	Tahun Anggaran yang Lalu
TENDIK	:	Tenaga Kependidikan
Tgl	:	Tanggal
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TIK	:	Teknologi Informasi Komunikasi
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TK/TPA	:	Taman Kanak-kanak/ Taman Pendidikan Al-Qur'an
TKG	:	Tunjangan Khusus Guru
TKGB	:	Tunjangan Kehormatan Guru Besar
TK-TM	:	Transfer Keluar Transfer Masuk
TKI	:	Tim Kerjasama Industri
TL	:	Keterlambatan
TLHP	:	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
TLK	:	Tata Laksana Kepegawaian
TM	:	Tidak Memenuhi
TMT	:	Terhitung Mulai Tanggal
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNP	:	*Treasury National Pooling*
ToR	:	*Term of Reference*
TPD	:	Tunjangan Profesi Dosen
TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
TPKN	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TU	:	Tata Usaha
Tukin	:	Tunjangan Kinerja
TUP	:	Tambahan Uang Persediaan

U

UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UHO	:	Universitas Halu Oleo
UI	:	Universitas Indonesia
UIN	:	Universitas Islam Negeri
UJK	:	Uji Kompetensi
UKBI	:	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMRAH	:	Universitas Maritim Raja Ali Haji
UNCEN	:	Universitas Cenderawasih
UNDIP	:	Universitas Diponegoro
UNEJ	:	Universitas Jember
UNESA	:	Universitas Negeri Surabaya
UNESCO	:	*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*
UNICEF	:	*United Nations Children's Fund*
UNIMA	:	Universitas Negeri Manado
UNIMAL	:	Universitas Malikussaleh

UNIMED	:	Universitas Negeri Medan
UNILA	:	Universitas Lampung
UNIPA	:	Universitas Papua
UNJ	:	Universitas Negeri Jakarta
UNBK	:	Ujian Nasional Berbasis Komputer
UNDANA	:	Universitas Nusa Cendana
UNG	:	Universitas Negeri Gorontalo
UNHAS	:	Universitas Hasanuddin
UNKP	:	Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil
UNM	:	Universitas Negeri Makassar
UNMUL	:	Universitas Mulawarman
UNNES	:	Universitas Negeri Semarang
UNP	:	Universitas Negeri Padang
UNPATTI	:	Universitas Pattimura
UNRAM	:	Universitas Mataram
UNRI	:	Universitas Riau
UNSIKA	:	Universitas Singaperbangsa Karawang
UNTAN	:	Universitas Tanjungpura
UNTAR	:	Universitas Tarumanegara
UNTIRTA	:	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
UNY	:	Universitas Negeri Yogyakarta
UP	:	Uang Persediaan
UPA	:	Unit Penunjang Akademik
UPN	:	Universitas Pembangunan Nasional
UPR	:	Universitas Palangka Raya
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
USK	:	Universitas Syiah Kuala
UT	:	Universitas Terbuka
UTBK	:	Ujian Tertulis Berbasis Komputer
UTC	:	Untan Tennis Club
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

V

Verval	:	Verifikasi dan validasi

W

WNI	:	Warga Negara Indonesia

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
Nomor : 16366/A.A2/WS.02.00/2024
Tanggal : Mei 2024

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITAMA KEUANGAN NEGARA : VI

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
A.1	Pengelolaan Pendapatan pada Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama terhadap masing-masing satkernya supaya: 1) segera menyetorkan PNBP yang diterima ke Kas Negara dalam waktu sesuai ketentuan; 2) menyetorkan setiap PNBP ke Kas Negara seluruhnya (bruto) tanpa dipergunakan terlebih dahulu; 3) mengusulkan penetapan tarif atas pemanfaatan BMN yang dikelolanya; 4) membuat perjanjian pemanfaatan sewa yang sudah habis masa berlaku kontraknya; b. Dirjen Diktristek dan Dirjen Dikti memerintahkan Rektor/Direktur pada Unimal, Polinela, Polman Bandung, Polban, Polnep supaya berkoordinasi dengan bank mitra untuk tidak mengenakan pajak atas jasa giro pada rekening pemerintah; c. Sekjen, Dirjen Diksi, Irjen, Kepala BPP Bahasa, Pimpinan satker terkait belum mengusulkan tarif PNBP atas pemanfaatan BMN kepada KPKNL dan memproses perpanjangan PKS; d. Sekjen Kemendikbudristek supaya memerintahkan Kepala Biro Umum dan PBJ: 1) menetapkan prosedur penatausahaan keuangan Wisma Arga Mulya; 2) segera menyetorkan PNBP yang diterima ke Kas Negara dalam waktu sesuai ketentuan; e. Dirjen Kebudayaan supaya melakukan kajian naskah akademik terkait peraturan pengelolaan penerimaan dari kegiatan penyensoran iklan dan film; f. Dirjen PDM supaya memerintahkan:	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan kepada: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama untuk memerintahkan satker terkait agar segera : 1) menyetorkan PNBP yang diterima ke Kas Negara dalam waktu sesuai ketentuan; 2) menyetorkan setiap PNBP ke Kas Negara seluruhnya (bruto) tanpa dipergunakan terlebih dahulu; 3) mengusulkan penetapan tarif atas pemanfaatan BMN yang dikelolanya; 4) membuat perjanjian pemanfaatan sewa yang sudah habis masa berlaku kontraknya; b. Dirjen Diktristek dan Dirjen Dikti untuk memerintahkan Rektor/Direktur pada Univ Malikussaleh, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Pontianak agar berkoordinasi dengan bank mitra untuk tidak mengenakan pajak atas jasa giro pada rekening pemerintah; c. Sesjen, Dirjen Diksi, Irjen, Kepala BPP Bahasa, Pimpinan satker terkait yang belum mengusulkan tarif PNBP atas pemanfaatan BMN kepada KPKNL dan memproses perpanjangan PKS, d. Sesjen Kemendikbudristek supaya memerintahkan Kepala Biro Umum dan PBJ untuk: 1) menetapkan prosedur penatausahaan keuangan Wisma Arga Mulya; 2) segera menyetorkan PNBP yang diterima ke Kas Negara dalam waktu sesuai ketentuan; e. Dirjen Kebudayaan supaya melakukan kajian naskah akademik terkait peraturan pengelolaan penerimaan dari kegiatan penyensoran iklan dan film; f. Dirjen PDM supaya memerintahkan:	Minggu ke 2 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		1) Kepala BPMP Prov. Papua melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan keuangan tuntutan ganti kerugian negara; 2) Direktur SD mengajukan pengesahan hibah UNICEF kepada KPPN; g. Dirjen GTK memerintahkan Kepala BGP Prov NTT untuk menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan penerimaan negara senilai Rp3.500.000,00.	1) Kepala BPMP Prov. Papua melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan keuangan tuntutan ganti kerugian negara; 2) Direktur SD mengajukan pengesahan hibah UNICEF kepada KPPN; g. Dirjen GTK agar memerintahkan Kepala BGP Prov NTT untuk menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan penerimaan negara senilai Rp3.500.000,00.		
A. 2	Pemungutan dan Pengembalian Uang Kuliah Tunggal Belum Sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya: a. Memerintahkan Rektor PTN dan Direktur Politeknik terkait untuk: 1) Menetapkan kebijakan terkait integrasi data SKS yang diambil oleh mahasiswa masing-masing fakultas dengan sistem tagihan pembayaran UKT; 2) Memerintahkan Kepala Biro Akademik dan Kepala Biro Keuangan pada PTN dan Politeknik terkait untuk ke depannya menyesuaikan tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan enam SKS; dan b. Memerintahkan Direktur POLINELA untuk mengkaji ulang kebijakan mekanisme pembayaran UKT khususnya terkait perubahan rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya: a. Memerintahkan Rektor PTN dan Direktur Politeknik terkait untuk: 1) Menetapkan kebijakan terkait integrasi data SKS yang diambil oleh mahasiswa masing-masing fakultas dengan sistem tagihan pembayaran UKT; 2) Memerintahkan Kepala Biro Akademik dan Kepala Biro Keuangan pada PTN dan Politeknik terkait untuk ke depannya menyesuaikan tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan enam SKS; dan b. Memerintahkan Direktur Politeknik Negeri Lampung untuk mengkaji ulang kebijakan mekanisme pembayaran UKT khususnya terkait perubahan rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan.	Minggu ke 3 Juli 2024	
A.3	Pengelolaan Pendapatan BLU Belum Seperuhnya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Kepala BSKAP supaya memerintahkan Kepala BPPP untuk: 1) melaporkan semua PKS dengan pihak ketiga atas dukungan pelaksanaan SNPMB kepada Kepala BSKAP sebagai bahan monev; 2) segera menyelesaikan harmonisasi peraturan pengelolaan pendapatan BLU; b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan Rektor Untan, Undana, UHO, UPR, UNMUL, Unmed, dan Direktur Polsri, Polines, PPNS memerintahkan	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Kepala BSKAP supaya memerintahkan Kepala BPPP untuk: 1) melaporkan semua PKS dengan pihak ketiga atas dukungan pelaksanaan SNPMB kepada Kepala BSKAP sebagai bahan monev; 2) segera menyelesaikan harmonisasi peraturan pengelolaan pendapatan BLU; b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan Rektor Univ Tanjungpura, Univ Nusa Cendana, Univ Halu Oleo, Univ Palangka Raya, Univ Mulawarman, Univ Negeri	Minggu ke 3 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		pengelola pendapatan BLU agar menyetorkan seluruh penerimaan BLU ke kas BLU sesuai ketentuan yang berlaku; c. Direktur PPNS untuk menetapkan standar operasional prosedur terkait pemberian diskon/potongan harga atas pemanfaatan BMN; d. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan Rektor Untan dan Direktur Polsri, Polban, PNUP memerintahkan penanggung jawab pengelola pemanfaatan BMN masing-masing satker memastikan calon penyewa BMN telah membayar sewa sebelum perjanjian ditandatangani; e. Kepala BSKAP untuk memerintahkan Kepala BPPP supaya membuat standarisasi tarif pembuatan soal; f. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan seluruh Rektor PTN dan Direktur Politeknik untuk menginventarisasi sumber pendapatan kerjasama dan/atau pemanfaatan BMN serta menetapkan tarif kerjasama/pemanfaatan BMN tersebut ke dalam SK Rektor/Direktur sebagai dasar pemungutan pendapatan; g. Dirjen Diktiristek memerintahkan Rektor Untan segera: 1) memperpanjang PKS yang telah berakhir; 2) merekonsiliasi pendapatan dengan PT. Telekomunikasi Seluler untuk memastikan hak Untan atas Kerjasama sewa lahan. h. Dirjen Kebudayaan untuk: 1) menuntaskan proses likuidasi dan penggabungan satker di bawah Ditjen Kebudayaan dalam rangka pembentukan BLU MCB; 2) memerintahkan Kepala MCB agar: a) menerapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU dalam mengelola pendapatan BLU; b) membuat POS atau dokumen sejenis yang mengatur tentang pengelolaan Pendapatan di MCB beserta monitoringnya; c) memerintahkan Kepala MCB melakukan rekonsiliasi dengan Pemkab Mojokerto terkait penerimaan bagi hasil kerjasama pelestarian kawasan Cagar Budaya; dan	Medan, dan Direktur Politeknik Sriwijaya, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) agar memerintahkan pengelola pendapatan BLU untuk menyetorkan seluruh penerimaan BLU ke kas BLU sesuai ketentuan; c. Dirjen Diksi untuk memerintahkan Direktur PPNS untuk menetapkan standar operasional prosedur terkait pemberian diskon/potongan harga atas pemanfaatan BMN; d. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan Rektor Untan dan Direktur Polsri, Polban, Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) agar memerintahkan penanggung jawab pengelola pemanfaatan BMN masing-masing satker untuk memastikan calon penyewa BMN telah membayar sewa sebelum perjanjian ditandatangani; e. Kepala BSKAP untuk memerintahkan Kepala BPPP supaya membuat standarisasi tarif pembuatan soal; f Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi untuk memerintahkan seluruh Rektor PTN dan Direktur Politeknik untuk menginventarisasi sumber pendapatan kerja sama dan/atau pemanfaatan BMN serta menetapkan tarif kerja sama/pemanfaatan BMN tersebut ke dalam SK Rektor/Direktur sebagai dasar pemungutan pendapatan; g. Dirjen Diktiristek agar memerintahkan Rektor Untan segera: 1) memperpanjang PKS yang telah berakhir; 2) merekonsiliasi pendapatan dengan PT. Telekomunikasi Seluler untuk memastikan hak Untan atas Kerjasama sewa lahan. h Dirjen Kebudayaan untuk: 1) menuntaskan proses likuidasi dan penggabungan satker di bawah Ditjen Kebudayaan dalam rangka pembentukan BLU MCB; 2) memerintahkan Kepala MCB agar: a) menerapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU dalam mengelola pendapatan BLU; b) membuat POS atau dokumen sejenis yang mengatur tentang pengelolaan Pendapatan di MCB beserta monitoringnya;		

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		i. Dirjen Diktiristek untuk memerintahkan Rektor Unej, Unmul dan Unimed berkoordinasi dengan bank mitra terkait penghentian pemungutan pajak penghasilan atas jasa giro pada rekening yang digunakan BLU.	c) memerintahkan Kepala MCB melakukan rekonsiliasi dengan Pemkab Mojokerto terkait penerimaan bagi hasil kerjasama pelestarian kawasan Cagar Budaya; dan i. Dirjen Diktiristek untuk memerintahkan Rektor Unej, Unmul dan Unimed berkoordinasi dengan bank mitra terkait penghentian pemungutan pajak penghasilan atas jasa giro pada rekening yang digunakan BLU.		
B.1	Kemendikbudristek Belum Menetapkan Kebijakan Penggunaan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan Sesuai Dengan Amanat PP Nomor 18 Tahun 2022 Sehingga Pelaksanaan Automatic Adjustment Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Tidak Memiliki Kriteria Yang Jelas	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyusun dan menetapkan aturan turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2022 terkait mekanisme usulan dan kriteria penggunaan anggaran pendidikan melalui Permendikbudristek.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyusun dan menetapkan aturan turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2022 terkait mekanisme usulan dan kriteria penggunaan anggaran pendidikan melalui Permendikbudristek.	Minggu ke 4 Juli 2024	
B.2	Pengelolaan Belanja Pegawai pada Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan bagian kepegawaian dan bagian keuangan untuk melakukan rekonsiliasi secara periodik per bulan terkait administrasi pegawai yang berkompensasi keuangan; b. Sesjen supaya: 1) membuat mekanisme yang mengatur batas waktu pengajuan pembayaran TPG Non PNS; 2) memerintahkan Kepala Pustapdik untuk mengkompensasikan kekurangan/kelebihan pembayaran TPG Non PNS pada pembayaran berikutnya; 3) melakukan rekonsiliasi dengan Dirjen Diktiristek dan memutakhirkan data kepegawaian dosen PNS dan Non PNS termasuk didalamnya BKD dalam rangka pembayaran TPD PNS maupun TPD Non PNS;	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan kepada: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan bagian kepegawaian dan bagian keuangan satker terkait untuk melakukan rekonsiliasi secara periodik per bulan terkait administrasi pegawai yang berkompensasi keuangan; b. Sesjen supaya: 1) membuat mekanisme yang mengatur batas waktu pengajuan pembayaran TPG Non PNS; 2) memerintahkan Kepala Pustapdik untuk mengkompensasikan kekurangan/kelebihan pembayaran TPG Non PNS pada pembayaran berikutnya; 3) melakukan rekonsiliasi dengan Dirjen Diktiristek dan memutakhirkan data kepegawaian dosen PNS dan	Minggu ke 3 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		4) membuat kebijakan pembayaran TPD Non PNS yang berlaku untuk seluruh LLDikti; 5) membuat kajian terkait adanya suatu unit kerja yang mempunyai tupoksi sebagai koordinator LLDikti di seluruh Indonesia; c. Dirjen GTK dan Sesjen memerintahkan Sesditjen GTK dan Kepala Puslapdik berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait guru yang telah alih status menjadi PPPK; d. Irjen dan Kepala BPP Bahasa supaya menerapkan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Dirjen GTK dan Dirjen Diktiristek memerintahkan Kepala BGP Prov Bali, Kepala BGP BBGP Prov. Jawa Barat, Rektor Untan, UPN Veteran Jawa Timur, UMRAH, Unimed, Untirta, Itera dan UPN Veteran Jakarta untuk memerintahkan bagian kepegawaian masing untuk mempercepat penerbitan SK Tugas belajar sebagai dasar perhitungan Kembali tunjangan yang telah dibayarkan; f. Seluruh Pimpinan Unit Utama memerintahkan PPK terkait menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan atau gaji ke kas Negara/Kas BLU senilai Rp1.866.140.107,15 terdiri dari: 1) Tunjangan kinerja pada Itjen senilai Rp22.924.479,00; 2) Tunjangan umum dan tunjangan fungsional pada Ditjen Diksi Rp892.587.250,00; dan 3) Tunjangan kinerja, gaji, tunjangan sertifikasi dan TPD PNS pada Ditjen Diktiristek senilai Rp719.278.378,15.	Non PNS termasuk didalamnya BKD dalam rangka pembayaran TPD PNS maupun TPD Non PNS; 4) membuat kebijakan pembayaran TPD Non PNS yang berlaku untuk seluruh LLDikti; 5) membuat kajian terkait adanya suatu unit kerja yang mempunyai tupoksi sebagai koordinator LLDikti di seluruh Indonesia; c. Dirjen GTK dan Sesjen agar memerintahkan Sesditjen GTK dan Kepala Puslapdik berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait guru yang telah alih status menjadi PPPK; d. Irjen dan Kepala BPP Bahasa supaya menerapkan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Dirjen GTK dan Dirjen Diktiristek memerintahkan Kepala BGP Prov Bali, Kepala BGP BBGP Prov. Jawa Barat, Rektor Untan, UPN Veteran Jawa Timur, UMRAH, Unimed, Untirta, Itera dan UPN Veteran Jakarta untuk memerintahkan bagian kepegawaian masing-masing untuk mempercepat penerbitan SK Tugas belajar sebagai dasar perhitungan Kembali tunjangan yang telah dibayarkan; f. Seluruh Pimpinan Unit Utama memerintahkan PPK terkait menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan atau gaji ke kas Negara/Kas BLU senilai Rp1.866.140.107,15 terdiri dari: 1) Tunjangan kinerja pada Itjen senilai Rp22.924.479,00; 2) Tunjangan umum dan tunjangan fungsional pada Ditjen Diksi Rp892.587.250,00; dan 3) Tunjangan kinerja, gaji, tunjangan sertifikasi dan TPD PNS pada Ditjen Diktiristek senilai Rp719.278.378,15.		
B.3	Penganggaran dan Proses Pengadaan Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Sekjen, Dirjen GTK, Dirjen Kebudayaan, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Irjen supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Sekjen, Dirjen GTK, Dirjen Kebudayaan, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Irjen memerintahkan:	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Sesjen, Dirjen GTK, Dirjen Kebudayaan, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Irjen supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Sesjen, Dirjen GTK, Dirjen Kebudayaan, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Irjen memerintahkan:	Minggu ke 3 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		1) PPK terkait supaya lebih cermat dalam menjalankan tugasnya; 2) Pejabat Pengadaan terkait supaya mematuhi ketentuan penyusunan HPS; 3) Koordinator kegiatan pada satker terkait supaya mematuhi ketentuan penyusunan KAK; c. Itjen supaya membuat kajian terkait pemberian honorarium atas kegiatan yang berirsan dengan tupoksi Itjen; d. Dirjen Kebudayaan memerintahkan Sesditjen Kebudayaan untuk menyusun juknis pelaksanaan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan; e. Dirjen Diktiristek memerintahkan KPA Ditdaya supaya memerintahkan PPK menyampaikan laporan pelaksanaan hasil pekerjaan secara lengkap.	1) PPK terkait supaya lebih cermat dalam menjalankan tugasnya; 2) Pejabat Pengadaan terkait supaya mematuhi ketentuan penyusunan HPS; 3) Koordinator kegiatan pada satker terkait supaya mematuhi ketentuan penyusunan KAK; c. Itjen supaya membuat kajian terkait pemberian honorarium atas kegiatan yang berirsan dengan tupoksi Itjen; d. Dirjen Kebudayaan memerintahkan Sesditjen Kebudayaan untuk menyusun juknis pelaksanaan monev kegiatan Ditjen Kebudayaan; e. Dirjen Diktiristek memerintahkan KPA Ditdaya supaya memerintahkan PPK menyampaikan laporan pelaksanaan hasil pekerjaan secara lengkap.		
B.4	Pengelolaan BPPTNBH Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan sehingga Hak dan Kewajiban Pemerintah Kepada PTNBH belum dapat Disajikan Secara Tepat	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan serta melibatkan PTNBH untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi pengelolaan BPPTNBH dengan peraturan terkait, dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, serta memerintahkan Dirjen Dikti untuk melakukan rekonsiliasi data penyaluran dana APBN ke PTNBH dengan unit utama terkait lainnya sebagai dasar pengajuan usulan BPPTNBH.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan : a. berkoordinasi dengan Menteri Keuangan serta melibatkan PTNBH untuk : 1) mengevaluasi kesesuaian implementasi pengelolaan BPPTNBH dengan peraturan terkait; dan 2) menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut; b. memerintahkan Dirjen Diktiristek untuk melakukan rekonsiliasi data penyaluran dana APBN ke PTNBH dengan unit utama terkait lainnya sebagai dasar pengajuan usulan BPPTNBH.	Minggu ke 3 Juli 2024	
B.5	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Realisasi Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Sekjen, Kepala BPP Bahasa, Dirjen Kebudayaan, dan Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan masing-masing KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. b. Sekjen memberikan sanksi kepada KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan BPP BPTI atas realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban; c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unmul:	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Sesjen, Kepala BPP Bahasa, Dirjen Kebudayaan, dan Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan masing-masing KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan BPP terkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. b. Sesjen agar memberikan sanksi kepada KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan BPP Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) atas realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban; c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unmul untuk:	Minggu ke 4 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		1) Menyusun SOP pengendalian atas pencatatan belanja secara periodik di tingkat unit kerja, dengan melibatkan SPI, serta melaksanakan sosialisasi mekanisme penginputan dokumen sumber belanja melalui aplikasi SAKTI. 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Keuangan Unmul, Koordinator Keuangan, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan BPP karena lalai dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan; d. Irjen menginventarisasi dan memverifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang kurang memadai dan menyampaikan hasilnya kepada BPK pada: 1) BPTI senilai Rp562.700.648,00; 2) Unmul senilai Rp18.163.327.476,00; 3) Direktorat PPK pada Ditjen Kebudayaan senilai Rp1.687.563.000,00.	1) Menyusun SOP pengendalian atas pencatatan belanja secara periodik di tingkat unit kerja, dengan melibatkan SPI, serta melaksanakan sosialisasi mekanisme penginputan dokumen sumber belanja melalui aplikasi SAKTI. 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Keuangan Unmul, Koordinator Keuangan, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan BPP karena lalai dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan; d. Irjen menginventarisasi dan memverifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang kurang memadai dan menyampaikan hasilnya kepada BPK pada: 1) BPTI senilai Rp562.700.648,00; 2) Unmul senilai Rp18.163.327.476,00; 3) Direktorat PPK pada Ditjen Kebudayaan senilai Rp1.687.563.000,00.		
8.6	Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Sekjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Dirjen PDM, Dirjen Kebudayaan, dan Dirjen GTK, agar mengevaluasi kebijkan internal terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketenuan perundangan. b. Sekjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi memerintahkan masing-masing PPK menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Kas Negara/Kas BLU dengan rincian: 1) Setjen senilai Rp157.558.429,80; 2) Ditjen Diksi – PNJ senilai Rp21.800.000,00, Polimedia senilai Rp31.267.659,60 dan Polsri senilai Rp20.877.302,40; dan 3) Ditjen Diktiristek-UMRAH, Universitas Musamus, Unmul senilai Rp71.062.222,00. c. Dirjen Diksi memerintahkan Direktur PNJ supaya memutakhirkan Keputusan Nomor 1301/PL3/KU.03.00/2020 tentang SBM Internal PNJ sesuai ketentuan yang berlaku.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Sesjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Dirjen PDM, Dirjen Kebudayaan, dan Dirjen GTK, agar mengevaluasi kebijkan internal terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketenuan perundangan. b. Sesjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi memerintahkan masing-masing PPK terkait untuk menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Kas Negara/Kas BLU dengan rincian: 1) Setjen senilai Rp157.558.429,80; 2) Ditjen Diksi – PNJ senilai Rp21.800.000,00, Polimedia senilai Rp31.267.659,60 dan Polsri senilai Rp20.877.302,40; dan 3) Ditjen Diktiristek-UMRAH, Universitas Musamus, Unmul senilai Rp71.062.222,00 c. Dirjen Diksi memerintahkan Direktur PNJ supaya memutakhirkan Keputusan Nomor 1301/PL3/KU.03.00/2020 tentang SBM Internal PNJ sesuai ketentuan yang berlaku.	Minggu ke 3 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
6.7	Kelebihan Bayar atas Pertanggungjawaban Belanja Barang Senilai Rp6.635.419.102,15 dan Terdapat Kekurangan Pemotongan/Pemungutan Pajak atas Belanja Barang Senilai Rp1.559.030.234,20	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Sekjen untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK senilai Rp6.497.484.510,87 yang terdiri dari: 1) Kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp5.450.488.843,80; dan 2) Kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp1.043.076.768,07. b. Dirjen Diktiristek untuk menyetorkan ke Kas Negara/Kas BLU dan menyampaikan bukti setor ke BPK senilai Rp524.983.667,59 terdiri dari: 1) Kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp124.718.461,00; dan 2) Kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp262.165.657,04. 3) Kelebihan pembayaran atas komponen PPN pada Pekerjaan Langganan *E-Journal* dan *E-Book* di Universitas Halu Oleo senilai Rp138.099.549,55 c. Dirjen Kebudayaan untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp187.320.693,00; d. Dirjen GTK untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp32.420.290,90; e. Kepala BPP Bahasa untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai senilai Rp9.234.158,19; f. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UHO untuk lebih cermat memungut pajak sesuai ketentuan; dan g. Irjen untuk menyusun SOP terkait pengelolaan belanja BBM.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Sesjen untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK senilai Rp6.497.484.510,87 yang terdiri dari: 1) Kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp5.450.488.843,80; dan 2) Kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp1.043.076.768,07. b. Dirjen Diktiristek untuk menyetorkan ke Kas Negara/Kas BLU dan menyampaikan bukti setor ke BPK senilai Rp524.983.667,59 terdiri dari: 1) Kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp124.718.461,00; dan 2) Kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp262.165.657,04; 3) Kelebihan pembayaran atas komponen PPN pada Pekerjaan Langganan *E-Journal* dan *E-Book* di Universitas Halu Oleo senilai Rp138.099.549,55 c. Dirjen Kebudayaan untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kelebihan bayar seluruhnya senilai Rp187.320.693,00; d. Dirjen GTK untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai Rp32.420.290,90; e. Kepala BPP Bahasa untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kekurangan penerimaan negara dari pajak belum dipungut dan disetor senilai senilai Rp9.234.158,19; f. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UHO untuk lebih cermat memungut pajak sesuai ketentuan; dan g. Irjen untuk menyusun SOP terkait pengelolaan belanja BBM.	Minggu ke 4 Juli 2024	Setjen: • Biro Umum&PBJ • Pusdatin • BPTI • Biroren Diktiristek: • Dit.Sumber Daya • Ummah • UHO GTK BAHASA

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
B.5	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Banpem untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Sekjen supaya: 1) menyusun kebijakan akuntansi banpem dana penelitian; 2) memerintahkan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk memutakhirkan penginputan proposal dan LPJ pada aplikasi banpem dan segera melakukan validasi atas inputan secara tepat waktu; 3) merevisi juknis ADEM dengan melengkapi ketentuan terkait komponen biaya pendidikan; b. Sekjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Kepala BPP Bahasa supaya: 1) mengoptimalkan pengendalian atas penyaluran dana banpem; 2) mengevaluasi kepatuhan penerima banpem untuk menjadi pertimbangan pemberian bantuan selanjutnya; 3) memerintahkan kepada PPK, Bendahara, Tim Pengelola Banpem agar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan banpem dengan tertib; c. Dirjen Diksi menyusun juknis secara lengkap dalam mengatur pencatatan aset dari belanja MAK 521211; d. Dirjen Diktiristek memerintahkan Direktur RTPM berkoordinasi dengan LLDikti X dan LLDikti XII atas sisa dana bantuan yang tidak digunakan pada program pengabdian kepada masyarakat pada Direktorat RTPM senilai Rp63.793.000,00.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Sesjen supaya: 1) menyusun kebijakan akuntansi banpem dana penelitian; 2) memerintahkan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk memutakhirkan penginputan proposal dan LPJ pada aplikasi banpem dan segera melakukan validasi atas inputan secara tepat waktu; 3) merevisi juknis ADEM dengan melengkapi ketentuan terkait komponen biaya pendidikan; b. Sesjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi dan Kepala BPP Bahasa supaya: 1) mengoptimalkan pengendalian atas penyaluran dana banpem; 2) mengevaluasi kepatuhan penerima banpem untuk menjadi pertimbangan pemberian bantuan selanjutnya; 3) memerintahkan kepada PPK, Bendahara, Tim Pengelola Banpem agar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan banpem dengan tertib; c. Dirjen Diksi menyusun juknis secara lengkap dalam mengatur pencatatan aset dari belanja MAK 521211; d. Dirjen Diktiristek memerintahkan Direktur RTPM berkoordinasi dengan LLDikti X dan LLDikti XII atas sisa dana bantuan yang tidak digunakan pada program pengabdian kepada masyarakat pada Direktorat RTPM senilai Rp63.793.000,00.	Minggu ke 3 Juli 2024	
B.9	Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Dikdasmen Belum Memadai	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Sekjen supaya: a. Meninjau kembali PKS dengan Bank Penyalur PIP untuk memasukkan perihal: 1) sanksi kepada Bank apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajibannya, 2) mekanisme monitoring dan pelaporan yang tersistem untuk aktivasi dan pencairan yang dilakukan secara kuasa. b. Memerintahkan Kepala Puslapdik, Koordinator, dan Subkoordinator PIP agar lebih cermat dalam	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan Sesjen supaya: a. Meninjau kembali PKS dengan Bank Penyalur PIP untuk memasukkan perihal: 1) sanksi kepada Bank apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajibannya; 2) mekanisme monitoring dan pelaporan yang tersistem untuk aktivasi dan pencairan yang dilakukan secara kuasa. b. Memerintahkan Kepala Puslapdik, Koordinator, dan Subkoordinator PIP agar lebih cermat dalam melakukan	Minggu ke 4 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		melakukan verifikasi dan validasi atas data usulan penerima PIP dan memastikan informasi SK Nominasi sampai kepada satuan pendidikan; c. Memerintahkan Kepala Puslapdik untuk: 1) melakukan *cleansing data* untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku sebelum dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan atau pihak lainnya; 2) memedomani Persekjen 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen pada penyaluran Tahun 2024.	verifikasi dan validasi atas data usulan penerima PIP dan memastikan informasi SK Nominasi sampai kepada satuan pendidikan; c. Memerintahkan Kepala Puslapdik untuk: 1) melakukan *cleansing* data untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku sebelum dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan atau pihak lainnya; 2) memedomani PerSesjen 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen pada penyaluran Tahun 2024.		
B.10	Pengelolaan Belanja Bansos Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Sekjen Kemendikbudristek melalui Kepala Puslapdik agar: 1) Melakukan koordinasi secara periodik dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk sinkronisasi data penerima beasiswa; 2) Melakukan koordinasi secara periodik dengan BAN-PT untuk sinkronisasi data akreditasi prodi; 3) Memperbaiki aplikasi KIPK agar dapat memuat data UKT dan Akreditasi Prodi dengan akurat; 4) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan verifikasi data calon penerima bantuan dan Pokja yang belum melakukan monitoring atas pengelolaan bantuan sosial PIP Pendidikan Tinggi secara memadai; b. Irjen agar melakukan penelusuran atas potensi kelebihan pembayaran bantuan sosial Bidikmisi dan KIPK senilai Rp70.563.677.995,00.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Sesjen Kemendikbudristek melalui Kepala Puslapdik agar: 1) Melakukan koordinasi secara periodik dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk sinkronisasi data penerima beasiswa; 2) Melakukan koordinasi secara periodik dengan BAN-PT untuk sinkronisasi data akreditasi prodi; 3) Memperbaiki aplikasi KIPK agar dapat memuat data UKT dan Akreditasi Prodi dengan akurat; 4) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan verifikasi data calon penerima bantuan dan Pokja yang belum melakukan monitoring atas pengelolaan bantuan sosial PIP Pendidikan Tinggi secara memadai; b. Irjen agar melakukan penelusuran atas potensi kelebihan pembayaran bantuan sosial Bidikmisi dan KIPK senilai Rp70.563.677.995,00.	Minggu ke 3 Juli 2024	
B.11	Pelaksanaan Belanja Modal pada Beberapa Satker Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan dan Kondisi Sebenarnya	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sekjen, Dirjen GTK, Dirjen PDM, dan Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sesjen, Dirjen GTK, Dirjen PDM, dan Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa.	Minggu ke 3 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		b. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sekjen, dan Dirjen GTK memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetorkan kekurangan volume pekerjaan ke Kas Negara/Kas BLU senilai Rp781.745.717,78, dengan rincian. 1) Diljen Diktiristek senilai Rp471.242.521,80, 2) Diljen Diksi senilai Rp251.380.858,08; 3) Setjen senilai Rp12.570.055,00; 4) Diljen GTK senilai Rp46.552.282,90. c. Dirjen Diktiristek dan Sekjen memerintahkan PPK supaya menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara/Kas BLU minimal senilai Rp81.728.767,97; 1) Diljen Diktiristek senilai Rp18.589.603,81, 2) Setjen senilai Rp43.139.164,16. d. Dirjen Kebudayaan memerintahkan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII agar memerintahkan PPK supaya menarik dan menyetorkan kekurangan pungut denda keterlambatan ke Kas Negara minimal senilai Rp75.849.810,60. e. Dirjen Diktiristek memerintahkan Rektor UMRAH supaya memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam memperhitungkan penyesuaian harga satuan pekerjaan yang mengalami perubahan volume (*addendum*). f. Dirjen Diksi memerintahkan Rektor PNUP supaya memerintahkan PPK agar dalam pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga mencantumkan persyaratan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup pengukuran dan pembayaran atas hasil pekerjaan. g. Sekjen dan Kepala BPP Bahasa memerintahkan PPK terkait supaya menyelesaikan dan dapat mencairkan jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh pihak ketiga. h. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sekjen, Dirjen GTK, Dirjen PDM, BPP Bahasa, dan Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan Kelompok Kerja/Pokja Perencanaan lebih cermat dalam menyusun program kerja dan perencanaan anggaran yang akan dilakukan.	b. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sesjen, dan Dirjen GTK memerintahkan PPK terkait untuk menarik dan menyetorkan kekurangan volume pekerjaan ke Kas Negara/Kas BLU senilai Rp781.745.717,78, dengan rincian: 1) Ditjen Diktiristek senilai Rp471.242.521,80; 2) Ditjen Diksi senilai Rp251.380.858,08; 3) Setjen senilai Rp12.570.055,00; 4) Ditjen GTK senilai Rp46.552.282,90. c. Dirjen Diktiristek dan Sesjen memerintahkan PPK terkait supaya menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara/Kas BLU minimal senilai Rp81.728.767,97, 3) Ditjen Diktiristek senilai Rp18.589.603,81; 4) Setjen senilai Rp43.139.164,16. d. Dirjen Kebudayaan memerintahkan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII agar memerintahkan PPK supaya menarik dan menyetorkan kekurangan pungut denda keterlambatan ke Kas Negara minimal senilai Rp75.849.810,60. e. Dirjen Diktiristek memerintahkan Rektor UMRAH supaya memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam memperhitungkan penyesuaian harga satuan pekerjaan yang mengalami perubahan volume (*addendum*). f. Dirjen Diksi memerintahkan Direktur PNUP supaya memerintahkan PPK agar dalam pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga mencantumkan persyaratan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup pengukuran dan pembayaran atas hasil pekerjaan. g. Sesjen dan Kepala BPP Bahasa memerintahkan PPK terkait supaya menyelesaikan dan dapat mencairkan jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh pihak ketiga. h. Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, Sesjen, Dirjen GTK, Dirjen PDM, BPP Bahasa, dan Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan Kelompok Kerja/Pokja Perencanaan lebih cermat dalam menyusun program kerja dan perencanaan anggaran yang akan dilakukan.		

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
B.12	Penganggaran dan Penggunaan Mata Anggaran Penerimaan dan MAK Tidak Tepat dan tidak konsisten pada Kemendikbudristek	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Sekjen, Dirjen PDM, Kepala BSKAP, Dirjen Kebudayaan, Dirjen GTK, Dirjen Diktristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan: a. KPA terkait lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses penyusunan anggaran serta melakukan perencanaan dalam memanfaatkan efisiensi anggaran sesuai ketentuan supaya penentuan akun belanja menjadi tepat; b. PPK terkait lebih cermat dalam pengeluaran belanja dengan kesesuaian MAK dan perencanaan program; dan c. Bagian perencanaan pada setiap satker terkait lebih cermat dalam menganalisis dan mereviu atas penyusunan anggaran ke dalam RKAKL satker.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan Sesjen, Dirjen PDM, Kepala BSKAP, Dirjen Kebudayaan, Dirjen GTK, Dirjen Diktristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan: a. KPA terkait lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses penyusunan anggaran serta melakukan perencanaan dalam memanfaatkan efisiensi anggaran sesuai ketentuan supaya penentuan akun belanja menjadi tepat; b. PPK terkait lebih cermat dalam pengeluaran belanja dengan kesesuaian MAK dan perencanaan program; dan c. Bagian perencanaan pada setiap satker terkait lebih cermat dalam menganalisis dan mereviu atas penyusunan anggaran ke dalam RKAKL satker.	Minggu ke 3 Juli 2024	
C. 1	Pengelolaan Kas pada Setjen dan Ditjen Diktristek Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan Kas	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Sekjen Kemendikbudristek supaya: 1) memerintahkan Kepala BKHM meminta pertanggungjawaban dari Bendahara yang bersangkutan dan memproses Tuntutan Perbendaharaan dan melaporkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK; 2) memberikan sanksi kepada KPA dan PPK Kantor Pusat Atdikbud BKHM atas kelalaian dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kas di satkernya; dan 3) memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. DA) atas kekurangan kas yang terjadi pada Kantor Pusat Atdikbud BKHM. b. Irjen supaya melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.917.828.672,00 pada Kantor Pusat Atdikbud; c. Dirjen Diktristek supaya memerintahkan Rektor Unpatti untuk: 1) Menetapkan mekanisme yang terintegrasi antara petugas pengelola dana kelolaan dengan unit	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan kepada: a. Sesjen Kemendikbudristek supaya: 1) memerintahkan Kepala BKHM meminta pertanggungjawaban dari Bendahara yang bersangkutan dan memproses Tuntutan Perbendaharaan dan melaporkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK; 2) memberikan sanksi kepada KPA dan PPK Kantor Pusat Atdikbud atas kelalaian dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kas di satkernya; dan 3) memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. DA) atas kekurangan kas yang terjadi pada Kantor Pusat Atdikbud. b. Irjen supaya melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.917.828.672,00 pada Kantor Pusat Atdikbud; c. Dirjen Diktristek supaya memerintahkan Rektor Unpatti untuk: 1) Menetapkan mekanisme yang terintegrasi antara petugas pengelola dana kelolaan dengan unit kerja yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas hak dan kewajiban dana yang dikelola;	Minggu ke 4 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		kerja yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas hak dan kewajiban dana yang dikelola; 2) Membuat kebijakan terkait pengembalian dana kepada mahasiswa penerima program KIPK; dan 3) Menetapkan mekanisme yang terintegrasi antara Bendahara Penerima dan Bagian Akademik terkait mahasiswa yang sudah dan belum membayar biaya pendidikan. d. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unimed untuk: 1) Menetapkan mekanisme penyaluran beasiswa pada Unimed berupa bantuan biaya hidup mahasiswa Kabupaten Labura; dan 2) Membuat kebijakan terkait mekanisme pembayaran belanja kegiatan PPG; e. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unsen untuk memerintahkan Koordinator Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Unsen berkoordinasi kembali dengan KPPN dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyajian saldo yang tidak seharusnya sebagai hasil migrasi data dari aplikasi SAIBA ke aplikasi SAKTI yang masih menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp150.000.000,00.	2) Membuat kebijakan terkait pengembalian dana kepada mahasiswa penerima program KIPK; dan 3) Menetapkan mekanisme yang terintegrasi antara Bendahara Penerima dan Bagian Akademik terkait mahasiswa yang sudah dan belum membayar biaya pendidikan. d. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unimed untuk: 1) Menetapkan mekanisme penyaluran beasiswa pada Unimed berupa bantuan biaya hidup mahasiswa Kabupaten Labura; dan 2) Membuat kebijakan terkait mekanisme pembayaran belanja kegiatan PPG; e. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unsen untuk memerintahkan Koordinator Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Unsen berkoordinasi kembali dengan KPPN dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyajian saldo yang tidak seharusnya sebagai hasil migrasi data dari aplikasi SAIBA ke aplikasi SAKTI yang masih menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp150.000.000,00.		
C. 2	Pengelolaan Kas pada PTN BLU Universitas Manado, Unmul, dan PPNS Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya menetapkan pedoman dana kelolaan pada PTN dan Politeknik BLU; b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor/Direktur untuk memerintahkan: 1) KPA Unima, Unmul, dan PPNS lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Kas yang dikelola BLU yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Kepala Biro Keuangan Unima, Unmul, dan PPNS melaksanakan tugas sesuai ketentuan pengelolaan kas pada BLU; c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unima untuk memerintahkan Tim verifikasi Biro Keuangan lebih cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya menetapkan pedoman dana kelolaan pada PTN dan Politeknik BLU; b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor/Direktur untuk memerintahkan: 1) KPA Unima, Unmul, dan PPNS lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Kas yang dikelola BLU yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Kepala Biro Keuangan Unima, Unmul, dan PPNS melaksanakan tugas sesuai ketentuan pengelolaan kas pada BLU; c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor Unima untuk memerintahkan Tim verifikasi Biro Keuangan lebih cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi batas pagu	Minggu ke 4 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		batas pagu pemberian uang panjar dan batas akhir pertanggungjawabannya; d. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor Unmul dan Direktur PPNS memerintahkan: 1) Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam mengidentifikasi pihak yang berhak untuk menggunakan saldo dana kelolaan; 2) Kepala Biro Keuangan dan Bendahara Pengeluaran menyelesaikan permasalahan selisih kas; e. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan SPI PTN/PTV lebih optimal dalam melakukan pendampingan pengelolaan kas di BLU.	pemberian uang panjar dan batas akhir pertanggungjawabannya; d. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor Unmul dan Direktur PPNS memerintahkan: 1) Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam mengidentifikasi pihak yang berhak untuk menggunakan saldo dana kelolaan; 2) Kepala Biro Keuangan dan Bendahara Pengeluaran menyelesaikan permasalahan selisih kas; e. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan SPI PTN/PTV lebih optimal dalam melakukan pendampingan pengelolaan kas di BLU.		
C. 3	Pengoptimalan Kas Melalui Investasi Jangka Pendek pada Delapan Satker BLU di Ditjen Diksi Tidak Didukung Kebijakan Investasi Jangka Pendek yang Memadai	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur PNJ, Polban, Polinema, Politeknik Batam, PNB, Polije, Polnep, dan PPNS untuk menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang meliputi sistem pengawasan, pelaporan, serta pembatasan wewenang sesuai ketentuan.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur PNJ, Polban, Polinema, Politeknik Batam, PNB, Polije, Polnep, dan PPNS untuk menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang meliputi sistem pengawasan, pelaporan, serta pembatasan wewenang sesuai ketentuan.	Minggu ke 4 Juli 2024	
C. 4	Monev Pertanggung-jawaban atas Kegiatan pada Akun BDDM dari Belanja Banpem Belum Memadai	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar: a. Menyusun kebijakan yang mengatur pencatatan BDDM dari Belanja Banpem terutama Banpem penelitian; b. Menginstruksikan kepada Sekjen supaya: 1) Memerintahkan Kepala Puslapdik untuk lebih mengoptimalkan penagihan kepada perguruan tinggi yang menerima mahasiswa ADik agar segera menyampaikan LPJ penggunaan dana yang diterimanya; dan 2) memerintahkan kepada Kepala LLDikti XIV untuk segera menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap bendahara di unit kerjanya senilai Rp717.600.00,00 sesuai ketentuan; c. Menginstruksikan Sekjen, Dirjen PDM, Dirjen Diktiristek, dan Dirjen Diksi supaya:	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. kepada Sesjen supaya: 1) menyusun kebijakan yang mengatur pencatatan BDDM dari Belanja Banpem terutama Banpem penelitian; 2) memerintahkan Kepala Puslapdik untuk lebih mengoptimalkan penagihan kepada perguruan tinggi yang menerima mahasiswa ADik agar segera menyampaikan LPJ penggunaan dana yang diterimanya; dan 3) memerintahkan kepada Kepala LLDikti XIV untuk segera menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap bendahara di unit kerjanya senilai Rp717.600.00,00 sesuai ketentuan; b. Sesjen, Dirjen PDM, Dirjen Diktiristek, dan Dirjen Diksi supaya:	Minggu ke 4 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		1) Lebih optimal dalam melaksanakan monev, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Memerintahkan kepada PPK Belanja Banpem untuk meningkatkan koordinasi dengan penerima banpem agar segera menyampaikan LPJ; dan d. Irjen melakukan verifikasi atas LPJ atas Banpem tahun 2016 s.d. 2022 yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp41.324.266.746,00.	1) Lebih optimal dalam melaksanakan monev, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Memerintahkan kepada PPK Belanja Banpem untuk meningkatkan koordinasi dengan penerima banpem agar segera menyampaikan LPJ; dan d. Irjen melakukan verifikasi atas LPJ atas Banpem tahun 2016 s.d. 2022 yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp41.324.266.746,00.		
C. 6	Pengelolaan Piutang pada Unit Kerja di Kemendikbudristek Belum Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan KPA satker terkait lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan piutang di lingkungan satkernya; b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor UNJ, Unsika, UHO, UMRAH, UPN Veteran Jakarta, Unpatti, Unmul, Direktur Polimedia, dan Polsri menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala UPT TIK untuk melakukan rekonsiliasi atas data tunggakan UKT dan/atau IPI dan menyusun laporan secara periodik; c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UNJ, Unsika, UHO, UMRAH menyusun sistem informasi pengelolaan tagihan yang dapat mengidentifikasi mahasiswa yang tidak aktif; d. Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur Polimedia menelusuri piutang yang belum teridentifikasi sebagai akibat perubahan sistem akademik; e. Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur Polsri mengoptimalkan penagihan atas piutang UKT; f. Dirjen PDM dan Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Kepala BPMP Prov. Papua dan Rektor Untan segera memproses penyelesaian TP/TGR sesuai ketentuan yang berlaku; dan	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan KPA satker terkait lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan piutang di lingkungan satkernya; b. Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi supaya memerintahkan Rektor UNJ, Unsika, UHO, UMRAH, UPN Veteran Jakarta, Unpatti, Unmul, Direktur Polimedia, dan Polsri menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala UPT TIK untuk melakukan rekonsiliasi atas data tunggakan UKT dan/atau IPI dan menyusun laporan secara periodik; c. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UNJ, Unsika, UHO, UMRAH menyusun sistem informasi pengelolaan tagihan yang dapat mengidentifikasi mahasiswa yang tidak aktif; d. Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur Polimedia menelusuri piutang yang belum teridentifikasi sebagai akibat perubahan sistem akademik; e. Dirjen Diksi supaya memerintahkan Direktur Polsri mengoptimalkan penagihan atas piutang UKT; f. Dirjen PDM dan Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Kepala BPMP Prov. Papua dan Rektor Untan segera memproses penyelesaian TP/TGR sesuai ketentuan yang berlaku; dan	Minggu ke 4 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		g. Dirjen PDM, Dirjen Diktiristek, dan Kepala BPP Bahasa supaya memerintahkan Rektor Untan dan Kepala Bagian Keuangan BPMP Prov. Papua, Untan, Pusbanglin, dan BB Prov. DIY untuk lebih cermat dalam pengelolaan PNBP dan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait penagihan tunggakan PNBP.	g. Dirjen PDM, Dirjen Diktiristek, dan Kepala BPP Bahasa supaya memerintahkan Rektor Untan dan Kepala Bagian Keuangan BPMP Prov. Papua, Untan, Pusbanglin, dan BB Prov. DIY untuk lebih cermat dalam pengelolaan PNBP dan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait penagihan tunggakan PNBP.		
C.6	Pengelolaan Persediaan Kemendikbudristek Belum Memadai	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk: 1) melakukan *stock opname* persediaan secara tertib; 2) memutakhirkan pencatatan dan penyajian persediaan; 3) melakukan pengamanan dalam pengelolaan persediaan sesuai ketentuan; 4) melaporkan kondisi barang persediaan sesuai kondisi sebenarnya; 5) mengintensifkan proses BAST atas barang yang diserahkan kepada masyarakat; b. Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan Sesditjen Kebudayaan untuk melakukan reviu keberlanjutan pekerjaan yang bersifat perencanaan seperti masterplan, dan DED, pada tiga objek cagar budaya yang akan diserahkan kepada pemda setempat senilai Rp2.085.010.650,00; c. Dirjen Diktiristek memerintahkan KPA masing-masing Eselon II supaya: 1) melakukan inventarisasi atas persediaan yang diserahkan kepada PTNBH dan tidak lagi dalam penguasaan Kemdikbudristek serta melaporkan hasilnya ke BPK; 2) segera mengajukan proses BAST dan persetujuan hibah kepada PTNBH secara berjenjang ke Presiden melalui Kemendikbudristek selaku	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan Kuasa Pengguna Barang satker terkait untuk: 1) melakukan *stock opname* persediaan secara tertib; 2) memutakhirkan pencatatan dan penyajian persediaan; 3) melakukan pengamanan dalam pengelolaan persediaan sesuai ketentuan; 4) melaporkan kondisi barang persediaan sesuai kondisi sebenarnya; 5) mengintensifkan proses BAST atas barang yang diserahkan kepada masyarakat; b. Dirjen Kebudayaan supaya memerintahkan Sesditjen Kebudayaan untuk melakukan reviu keberlanjutan pekerjaan yang bersifat perencanaan seperti masterplan, dan DED, pada tiga objek cagar budaya yang akan diserahkan kepada pemda setempat senilai Rp2.085.010.650,00; c. Dirjen Diktiristek memerintahkan KPA masing-masing Eselon II terkait supaya: 1) melakukan inventarisasi atas persediaan yang diserahkan kepada PTNBH dan tidak lagi dalam penguasaan Kemdikbudristek serta melaporkan hasilnya ke BPK; 2) segera mengajukan proses BAST dan persetujuan hibah kepada PTNBH secara berjenjang ke Presiden melalui Kemendikbudristek selaku Pengguna Barang dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;	Minggu ke 4 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		Pengguna Barang dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; 3) Menyusun laporan monitoring atas: a) Rincian nilai dan kondisi persediaan berupa BMN yang dikuasai oleh PTNBH; b) Proses pengajuan persetujuan hibah yang belum selesai dilaksanakan oleh PTNBH penerima. 4) Memerintahkan a) Kuasa Pengguna Barang Dikdaya agar lebih optimal melakukan pengendalian pengelolaan dan pemindahtangan BMN sesuai ketentuan; b) Pengelola Persediaan Dikdaya agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Operator Komitmen di PTNBH penerima dalam proses pengusulan pemindahtangan BMN berupa tanah dan bangunan serta peralatan dan mesin; d. Dirjen GTK supaya memerintahkan kepada Kepala BBGP Prov. Jawa Barat, Kepala BBGP Prov. Jawa Tengah, Kepala BBGP Prov. Jawa Timur, dan Kepala BBGP Prov. D.I.Yogyakarta untuk memerintahkan pengelola barang agar mengadministrasikan barang sisa belanja bahan (*kit* pendukung seminar) dan memantau distribusinya.	3) menyusun laporan monitoring atas: a) rincian nilai dan kondisi persediaan berupa BMN yang dikuasai oleh PTNBH; b) proses pengajuan persetujuan hibah yang belum selesai dilaksanakan oleh PTNBH penerima; 4) memerintahkan: a) Kuasa Pengguna Barang Dikdaya agar lebih optimal melakukan pengendalian pengelolaan dan pemindahtangan BMN sesuai ketentuan; b) Pengelola Persediaan Dikdaya agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Operator Komitmen di PTNBH penerima dalam proses pengusulan pemindahtangan BMN berupa tanah dan bangunan serta peralatan dan mesin; d Dirjen GTK supaya memerintahkan kepada Kepala BBGP Prov. Jawa Barat, Kepala BBGP Prov. Jawa Tengah, Kepala BBGP Prov. Jawa Timur, dan Kepala BBGP Prov. D.I.Yogyakarta untuk memerintahkan pengelola barang agar mengadministrasikan barang sisa belanja bahan (*kit* pendukung seminar) dan memantau distribusinya.		
C. 7	Penatausahaan dan Pencatatan Aset Lainnya pada Kemdikbudristek Kurang Memadai	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan; a. Seluruh Pimpinan Unit Utama di Kemendikbudristek supaya memerintahkan: 1) KPB masing-masing satker untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Aset Lainnya yang dimilikinya; 2) Menginventarisasi seluruh aplikasi dan hak kekayaan intelektual yang dapat dikapitalisasi menjadi ATB; 3) Menginventarisasi seluruh BMN yang telah dihentikan dari operasional pemerintah, rusak berat	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan kepada: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama di Kemendikbudristek supaya memerintahkan: 1) KPB masing-masing satker untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Aset Lainnya yang dimilikinya; 2) Menginventarisasi seluruh aplikasi dan hak kekayaan intelektual yang dapat dikapitalisasi menjadi ATB; 3) Menginventarisasi seluruh BMN yang telah dihentikan dari operasional pemerintah, rusak berat dan BMN	Minggu ke 3 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
		dan BMN yang telah dihibahkan kepada pihak lain namun masih tercatat dalam Aset Lainnya untuk diusulkan penghapusannya; b. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UPN Veteran Jawa Timur dan Rektor UMRAH untuk melengkapi data dan informasi ATB dalam aplikasi SAKTI; dan c. Dirjen PDM supaya memerintahkan Direktur SMA untuk melakukan penelusuran atas perbedaan antara nilai mutasi kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan nilai pada SK Penghapusan untuk selanjutnya melakukan perbaikan.	yang telah dihibahkan kepada pihak lain namun masih tercatat dalam Aset Lainnya untuk diusulkan penghapusannya; b. Dirjen Diktiristek supaya memerintahkan Rektor UPN Veteran Jawa Timur dan Rektor UMRAH untuk melengkapi data dan informasi ATB dalam aplikasi SAKTI; dan c. Dirjen PDM supaya memerintahkan Direktur SMA untuk melakukan penelusuran atas perbedaan antara nilai mutasi kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan nilai pada SK Penghapusan untuk selanjutnya melakukan perbaikan.		
C.8	Pengelolaan Aset Tetap pada Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan: a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan masing-masing KPA untuk: 1) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengamanan dan pensertifikatan BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaannya; 2) Menginventarisasi aset tetap serta memproses permohonan penghentian dan penghapusan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional pemerintahan; 3) Memerintahkan Pengelola dan operator BMN pada masing-masing satker agar lebih optimal dan cermat dalam mengelola dan menatausahakan BMN; dan b. Irjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, dan Dirjen PDM supaya memerintahkan Kepala satuan kerja terkait untuk menyusun atau menetapkan Perjanjian Kerjasama, Sewa dan/atau Tarif Sewa pada Itjen, PNJ, PNUP, UNTAN, UPR, Polimedia, dan BBPMP Prov. Jawa Barat.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan kepada : a. Seluruh Pimpinan Unit Utama supaya memerintahkan masing-masing KPA untuk: 1) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengamanan dan pensertifikatan BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaannya; 2) menginventarisasi aset tetap serta memproses permohonan penghentian dan penghapusan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional pemerintahan; 3) memerintahkan pengelola dan operator BMN pada masing-masing satker agar lebih optimal dan cermat dalam mengelola dan menatausahakan BMN; dan b. Irjen, Dirjen Diktiristek, Dirjen Diksi, dan Dirjen PDM supaya memerintahkan Kepala Satuan Kerja terkait untuk menyusun atau menetapkan Perjanjian Kerja Sama, Sewa dan/atau Tarif Sewa pada Itjen, PNJ, PNUP, UNTAN, UPR, Polimedia, dan BBPMP Prov. Jawa Barat.	Minggu ke 3 Juli 2024	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Keterangan
D. 1	Penyajian dan Pengungkapan Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Diksi Belum Memadai dan Kelebihan Pembayaran UKT pada PENS Belum Dikembalikan	BPK merekomendasikan Mendikbudristek agar menginstruksikan Dirjen Diksi supaya: a. Menyusun petunjuk teknis akuntansi terkait Utang kepada Pihak Ketiga dan menyusun sistem yang terintegrasi atas dana kelolaan PTV dengan unit kerja di PTV; b. Memerintahkan Direktur Polimdo, Polimedia, PNJ, dan Polman Bandung supaya mengidentifikasi sumber dana dan peruntukan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga senilai Rp107.864.771,00 dan segera melakukan penyaluran dana tersebut; c. Memerintahkan Direktur PENS untuk: 1) Menyusun SOP koordinasi dan rekonsiliasi secara berkala antara Bagian Keuangan dan Bagian Akademik terkait pencairan beasiswa KIP-K dan pembayaran UKT; 2) Berkoordinasi dengan KPPN untuk mempercepat pengembalian UKT mahasiswa senilai Rp87.000.000,00.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menginstruksikan Dirjen Diksi agar: a. menyusun petunjuk teknis akuntansi terkait Utang kepada Pihak Ketiga dan menyusun sistem yang terintegrasi atas dana kelolaan PTV dengan unit kerja di PTV; b. memerintahkan Direktur Polimdo, Polimedia, PNJ, dan Polman Bandung untuk mengidentifikasi sumber dana dan peruntukan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga senilai Rp107.864.771,00 dan segera melakukan penyaluran dana tersebut; c. memerintahkan Direktur PENS untuk: 1) menyusun SOP koordinasi dan rekonsiliasi secara berkala antara Bagian Keuangan dan Bagian Akademik terkait pencairan beasiswa KIP-K dan pembayaran UKT; 2) berkoordinasi dengan KPPN untuk mempercepat pengembalian UKT mahasiswa senilai Rp87.000.000,00.	Minggu ke 4 Juli 2024	

Jakarta, Mei 2024

Auditor Utama Keuangan Negara VI

Laode Nusriadi S.E., M.Si., CA, Ak, CSFA, CFrA, ACPA, FCPA
NIP 196801231988031002

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Ir. Suharti, M.A., Ph.D.
NIP 196911211992032002



LLDIKTI WILAYAH VI

TRANSAKSI RESIPROKAL

DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL
TAHUN : 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON 1 : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROPINSI : 0300 Kantor Daerah
SATUAN KERJA : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

No	No. SP2D / No. Referensi	Tanggal	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Akun	Jumlah	Satker Intraco	Unit Satker Intraco	Uraian
BEBAN									
1	240261302003522	08-05-2024	00001/BLJ/723014/2024	28-06-2024	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,790,000	418934	087.01	Kursus/Diklat/Pelatihan bagi Pegawai - Pembayaran PNBP Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli
					Total	**6,790,000**			

mandiri

mandiri cash management

Transaction Status Audit Report

Bank Name	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Channel	MCM
Corporate	JXPU001 - BPG 026 LLDIKTI Wilayah VI SMG
Branch	7000 - KC Jkt Plaza Mandiri
Request Date	14 March 2024 14:45:13
Account	8100127230141000 - IDR - BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG

Details:

Bank Reference Number	202403140831837570
Posting Reference Number	202403140831837570
Posting Date	14/03/2024 08:35:35
Effective Date	14/03/2024
Amount	IDR 6,790,000.00
Exchange Rate	
Equivalent Amount	
Status	Success
Service Type	Single Bill Payment - Bill Payment
Debit Account Number	8100127230141000 - IDR - BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG
Credit Account Number	50012 - Pajak/PNBP/Cukai
Beneficiary Bank Name	PT. Bank Mandiri Tbk.
Charge To	OUR
Charge Account	8100127230141000 - IDR - BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SMG
Remark	
Customer Reference Number	-
Extended Payment Details	Pembayaran PNBP Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan IV tgl 4 Maret s.d. 13 Mei 2024 a.n Suto Sugiraharjo

Transaction History

Action Date	Action Type	Bank Reference	Document Number	Action By	Action Status	Transaction Status
Mar 14, 2024 08:35:35 (GMT +7)	Execute	202403140831837570	202403140831837570	System	Succeed	Success
Mar 14, 2024 08:35:34 (GMT +7)	Approve	202403140831837570	202403140831837570	LLDIKTI6-HERAWATY	Succeed	Pending Execute
Mar 14, 2024 08:31:08 (GMT +7)	Create	202403140831837570	202403140831837570	LLDIKTI6MAKER-Nofalina	Succeed	Pending Approval



LLDIKTI WILAYAH VI

PERSETUJUAN SEWA BMN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.id

SURAT PERJANJIAN

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI

Dengan

SARAH LUTFIANI

Tentang

SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI PERIODE KETIGA

Nomor : 94/LL6/LK.05.05/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Bhimo Widyo Andoko, SH, MH** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Sarah Lutfiani**: berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK** dan untuk selanjutnya secara berdiri sendiri disebut **PIHAK**.

KEDUA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas barang milik negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wialyah VI dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR SEWA

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemorintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

(3) Surat Persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.

(4) Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor : 69/LL6/LK.01.07/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022

(5) Surat dari Saudara Maridi tanggal 11 Januari 2023 tentang ketidaksanggupan untuk melanjutkan sewa tempat di tahun kedua dan ketiga yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

(6) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2023 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

(7) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2024 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 2
OBYEK SEWA

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewa dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 60 m^2 dan Sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60 m^2 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang.

(2) PIHAK PERTAMA setuju bahwa obyek sewa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2025

PASAL 4
HARGA SEWA

Harga sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun merujuk pada surat persetujuan sewa dari KPKNL dengan nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 14.796.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan harga sewa periode Ketiga sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

(1) Pembayaran uang sewa periode Ketiga sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian ini.
(2) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke kas negara melalui kode billing yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Apabila dikemudian hari terdapat pajak sewa yang terhutang maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan objek sewa selama jangka waktu sewa
(2) Berhak memeriksa kondisi obyek sewa dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA
(3) Berkewajiban memberikan hak penggunaan atas obyek sewa untuk digunakan sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Berhak menggunakan obyek sewa sesuai Pasal 1 butir 3 (lima) perjanjian ini
(2) Berkewajiban merawat, memelihara kebersihan, keselamatan, ketertiban, keamanan Gedung beserta sarana dan prasarana didalamnya.
(3) Menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan segala biaya yang timbul akibat operasional sehari-hari.
(4) Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(5) Menyerahkan kembali obyek sewa pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dalam keadaan baik dan terawat, setelah masa sewa berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN SEWA

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :
   a. Berakhirnya jangka waktu sewa dan KEDUA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu sewa
   b. PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian sewa ini sebelum jangka waktu Sewa ini berakhir apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa ini
(2) Apabila pihak kedua bermaksud melakukan pelaksanaan sewa kembali maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa ini untuk diproses kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kesepakatan KEDUA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka KEDUA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh KEDUA PIHAK.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Bhimo Widyo Andoko, SH, MH	Sarah Lutfiani

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.id

SURAT PERJANJIAN

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI

Dengan

SARAH LUTFIANI

Tentang

SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI
PERIODE KETIGA

Nomor : 94/LL6/LK.05.05/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Bhime Widyo Audoke, SH, MH** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Sarah Lutfiani**: berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK** dan untuk selanjutnya secara berdiri sendiri disebut **PIHAK.**

KEDUA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas barang milik negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wialyah VI dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR SEWA

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
(3) Surat Persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.
(4) Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor : 69/LL6/LK.01.07/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022
(5) Surat dari Saudara Maridi tanggal 11 Januari 2023 tentang ketidaksanggupan untuk melanjutkan sewa tempat di tahun kedua dan ketiga yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.
(6) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2023 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.
(7) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2024 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 2
OBYEK SEWA

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewa dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 60 m^2 dan Sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60 m^2 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang.
(2) PIHAK PERTAMA setuju bahwa obyek sewa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2025

PASAL 4
HARGA SEWA

Harga sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun merujuk pada surat persetujuan sewa dari KPKNL dengan nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 14.796.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan harga sewa periode Ketiga sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

(1) Pembayaran uang sewa periode Ketiga sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian ini.
(2) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke kas negara melalui kode billing yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Apabila dikemudian hari terdapat pajak sewa yang terhutang maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan objek sewa selama jangka waktu sewa
(2) Berhak memeriksa kondisi obyek sewa dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA
(3) Berkewajiban memberikan hak penggunaan atas obyek sewa untuk digunakan sesuai Pasal I butir 5 (lima) perjanjian ini

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Berhak menggunakan obyek sewa sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini
(2) Berkewajiban merawat, memelihara kebersihan, keselamatan, ketertiban, keamanan Gedung beserta sarana dan prasarana didalamnya.
(3) Menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan segala biaya yang timbul akibat operasional sehari-hari.
(4) Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(5) Menyerahkan kembali obyek sewa pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dalam keadaan baik dan terawat, setelah masa sewa berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN SEWA

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :
   a. Berakhirnya jangka waktu sewa dan KEDUA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu sewa
   b. PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian sewa ini sebelum jangka waktu Sewa ini berakhir apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa ini
(2) Apabila pihak kedua bermaksud melakukan pelaksanaan sewa kembali maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa ini untuk diproses kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kesepakatan KEDUA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka KEDUA PIHAK sepakat untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh KEDUA PIHAK.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Bhimo Wahyo Andoko, SH, MH	**Sarah Lutfiani**



LLDIKTI WILAYAH VI

LAPORAN BMN

LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA
LLDIKTI WILAYAH VI
SEMESTER I TAHUN 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
2024

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
LLDIKTI WILAYAH VI KODE SATKER 723014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.06/2014 tentang perubahan PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.05/207 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2005 tentang pelaksanaan Penyusunan laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga Negara;

11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

B. ENTITAS PELAPORAN PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) LLDIKTI WILAYAH VI BA 023.01 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

1. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Setiap entitas pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disebut LBKP, adalah laporan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.

2. Berdasarkan PMK Nomor Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Laporan Barang Milik Negara ini menyajikan Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan dan mencakup seluruh transaksi yang dikelola oleh satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah untuk kode satuan kerja 023.01.0300.723014.000KD, DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berasal dari dana APBN maupun Non APBN selama Periode Semester I Tahun Anggaran 2024.

C. PERIODE PELAPORAN SEMESTER I TAHUN 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2024 Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah untuk kode satuan kerja 023.01.0300.723014.000KD, DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berasal dari dana APBN maupun Non APBN selama Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 yang disajikan berdasarkan:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Internal;
2. Laporan Posisi BMN di Neraca;
3. Laporan Barang Persediaan;
4. Laporan BMN (Sub Sub Kelompok):
    a) BMN Intrakomptabel
    b) BMN Ekstrakomptabel
    c) BMN Gabungan Intrakomptabel dan ekstrakomptabel
    d) BMN Bersejarah
    e) BMN Aset Tidak Berwujud
    f) BMN Konstruksi Dalam Pengerjaan
5. Laporan Penyusutan Reguler (Sub Sub Kelompok);
    a) BMN Intrakomptabel
    b) BMN Ekstrakomptabel
    c) BMN berupa Aset Tak Berwujud
6. Laporan Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat)
7. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
8. Laporan Berita Acara Hasil Stock Opname Barang Persediaan Periode Semester I Tahun Anggaran 2024;
9. Lain-lain:
    a) Pemanfaatan BMN
    b) Penghapusan BMN
    c) Tindak lanjut atas Temuan/Koreksi Tim BPK, Itjen, dan atau SPI dan Proses-proses yang terjadi pada BMN LLDIKTI VI selama periode Semester I Tahun 2024
10. Arsip Data Komputer (ADK);

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. KAPITALISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, maka aset BMN untuk dapat dikapitalisasi tidak hanya di lihat dari jenis belanja yang digunakan melainkan dari jenis pekerjaan dan nilai yang dibelanjakan, dengan kata lain suatu belanja pemeliharaan dapat dikapitalisasi, jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki;
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya, yakni:
   - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat oleh raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
   - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

B. KODEFIKASI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara; dan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyajian neraca sesuai klasifikasi dalam bagan akun standar, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 137/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara untuk memenuhi penggolongan dan kodefikasi secara sistematik Barang Milik Negara. Adapun yang dimaksud Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok

BMN. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh LLDIKTI Wilayah VI. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan dan ATB);
8. Laporan Transaksi BMN (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
9. Laporan Transaksi BMN Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
10. Laporan Transaksi BMN Aset Tak Berwujud
11. Laporan Transaksi BMN Barang Bersejarah
12. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
13. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
14. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada LLDIKTI Wilayah VI;
15. Berita Acara Stok Opname Persediaan
16. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2024

A. SALDO AWAL SEMESTER I TAHUN 2024

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per 1 Januari 2024 menurut LLDIKTI Wilayah VI adalah sebesar Rp 7.670.267.889 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 7.581.854.164 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 88.413.725 (delapan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

B. RINGKASAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA SEMESETER I TAHUN 2024

Mutasi BMN Periode Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sebesar Rp 35.122.330 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Semester I per 1 Januari 2024 sebesar Rp 26.073.390 (dua puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) mutasi masuk persediaan selama periode Semester I tahun 2024 sebesar Rp 29.485.035 (dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah) mutasi keluar persediaan selama periode Semester I Tahun 2024 sebesar Rp 20.436.095 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) total mutasi persediaan selama periode Semester I tahun 2024 masuk sebesar Rp9.048.940 (sembilan juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal Semester I (1 Januari 2024)	Mutasi Masuk Semester I	Mutasi Keluar Semester I	Saldo Akhir Semester I (30 Juni 2024)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
117111	Barang Konsumsi	24.131.720	23.026.980	15.638.390	31.520.310
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.941.670	6.458.055	4.797.705	3.602.020
117131	Bahan Baku	-	-	-	-
11799	Persediaan Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH		26.073.390	29.485.035	20.436.095	35.122.330

2. Tanah

Saldo Tanah pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 seluas 27.651 m² dengan nilai sebesar Rp 91.868.492.000 (sembilan puluh satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah per 1 Januari 2024 seluas 27.651 m² dengan nilai sebesar Rp 91.868.492.000 (sembilan puluh satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah tanah selama periode Semester I Tahun 2024 seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang tanah selama periode Semester I Tahun 2024 seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) total mutasi tanah selama periode Semester I Tahun 2024 seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
0 0	0 0

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
0 0	0 0

dari luas tanah diatas, seluas kurang lebih 5.000 m² dimanfaatkan oleh Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN) dengan surat perjanjian kerjasama nomor 993/LL6/LK.01.07/2021 dan nomor 2574/PL38/SF.04.03/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang telah dilakukan adendum dengan nomor 1066/LL6/LK.05.05/2022 dan 2888/PL38/KS.08.02/2022 tanggal 7 November 2022.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m^2)	Nilai (Rp)
Baik	27.651	91.868.492.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah.

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m^2)	Nilai (Rp)
Sengketa	0	0
Tidak terdapat bukti Kepemilikan	0	0
Dikuasai pihak lain	0	0

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 1.515 seribu lima ratus lima belas) barang dengan nilai sebesar Rp 7.854.578.889 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) barang dengan nilai sebesar Rp 7.670.267.889 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Mutasi tambah selama periode Semeseter I Tahun 2024 sejumlah 19 (sembilan belas) barang dengan nilai sebesar Rp 184.311.000 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) barang dengan

nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semeseter I Tahun 2024 bertambah sejumlah 19 (sembilan belas) barang dengan nilai sebesar Rp 184.311.000 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)
Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Angkut Darat Bermotor

Saldo Alat Angkut Darat Bermotor pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 12 (dua belas) unit dengan nilai sebesar Rp 2.169.992.000. (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 10 (sepuluh) unit dengan nilai sebesar Rp 2.108.166.000 (dua milyar seratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 61.826.000 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 bertambah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 61.826.000 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

b. Alat Bengkel Bermesin

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 5 (lima) barang dengan nilai sebesar Rp 8.743.034 (delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 5 (lima) barang dengan nilai sebesar Rp 8.743.034 (delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai berkurang sebesar Rp 0 (nol rupiah)

c. Alat Bengkel Tak Bermesin

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 2 (dua) barang dengan nilai sebesar Rp 6.634.000 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 2 (dua) barang dengan nilai sebesar Rp 6.634.000 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

d. Alat Pengolahan

Saldo Alat Pengolahan pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 3 (tiga) barang dengan nilai sebesar Rp15.478.000 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 3 (tiga) barang dengan nilai sebesar Rp15.478.000 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

e. Alat Kantor

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) barang dengan nilai sebesar Rp608.794.213 (enam ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) barang dengan nilai sebesar Rp 608.794.213 (enam ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0

(nol) barang dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 berkurang sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

f. Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 930 (sembilan ratus tiga puluh) barang dengan nilai sebesar Rp1.670.557.480 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 914 (sembilan ratus empat belas) barang dengan nilai sebesar Rp1.548.072.480 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 16 (enam belas) barang dengan nilai sebesar Rp 122.485.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 bertambah sejumlah 16 (enam belas) barang dengan nilai sebesar Rp 122.485.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

g. Alat Studio

Saldo Alat Studio pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 48 (empat puluh delapan) barang dengan nilai sebesar Rp189.723.100 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 48 (empat puluh delapan) barang dengan nilai sebesar Rp189.723.100 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

h. Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 3 (tiga) barang dengan nilai sebesar Rp 6.297.000 (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 2024 sejumlah 3 (tiga) barang dengan nilai sebesar Rp 6.297.000 (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai berkurang sebesar Rp 0 (nol rupiah).

i. Alat Kedokteran

Saldo Alat Kedokteran Bermesin pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) barang dengan nilai sebesar Rp75.013.128 (tujuh puluh lima juta tiga belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) barang dengan nilai sebesar Rp75.013.128 (tujuh puluh lima juta tiga belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

j. Alat Kesehatan Umum

Saldo Alat Kesehatan Umum pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 1 (satu) barang dengan nilai sebesar Rp 372.415.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah sejumlah 1 (satu) barang dengan nilai sebesar Rp 372.415.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima belas ribu

rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

k. Unit Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 5 (lima) barang dengan nilai sebesar Rp 15.766.000 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 5 (lima) barang dengan nilai sebesar Rp 15.766.000 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

l. Unit Alat Laboratorium Fisika

Saldo Alat Laboratorium Fisika pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 16 (enam belas) barang dengan nilai sebesar Rp 87.908.125 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 16 (enam belas) barang dengan nilai sebesar Rp 87.908.125 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

m. Alat Khusus Kepolisian

Saldo Alat Khusus Kepolisian pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 4 (empat) barang dengan nilai sebesar Rp 142.197.900 (seratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 4 (empat) barang dengan nilai sebesar Rp 142.197.900 (seratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0. (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0. (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0. (nol rupiah)

n. Komputer Unit

Saldo Alat Unit pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) barang dengan nilai sebesar Rp1.035.895.185 (satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) barang dengan nilai sebesar Rp1.035.895.185 (satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester 1 Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

o. Peralatan Komputer

Saldo Alat Komputer pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 81 (delapan puluh satu) barang dengan nilai sebesar Rp945.338.918 (sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 81 (delapan puluh satu) barang dengan nilai sebesar Rp945.338.918 (

sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

p. Alat Eksplorasi Topografi

Saldo Alat Eksplorasi Topografi pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 1 (satu) barang dengan nilai sebesar Rp 3.599.200 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) barang dengan nilai sebesar Rp 3.599.200 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

q. Alat Kerja Penerbangan

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 12 (dua belas) barang dengan nilai sebesar Rp 495.379.106 (empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 12 (dua belas) barang dengan nilai sebesar Rp 495.379.106 (empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

r. Peralatan Olah Raga

Saldo Alat Olah Raga pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 3 (tiga) barang dengan nilai sebesar Rp4.847.500 (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 3 (tiga) barang dengan nilai sebesar Rp 3.499.500 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah), total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

1) Peralatan dan Mesin

Mutasi Peralatan dan Mesin tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
101 Pembelian	184.311.000	0
-		

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel Nilai (Rp)	Ekstrakomptabel Nilai (Rp)
-	0	0
-	0	0

Dari jumlah Peralatan dan Mesin di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per 30 Juni 2024 sebesar Rp 6.857.814.046 (enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh enam rupiah)

4. Gedung Dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 18 (delapan belas) unit dengan nilai sebesar Rp 21.616.397.751 (dua puluh satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2024 adalah 18 (delapan belas) unit dengan nilai sebesar Rp 21.616.397.751 (dua puluh satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) mutasi tambah untuk periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

1) Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Kantor Permanen

Saldo Bangunan Gedung Kantor Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 5 (lima) unit dengan nilai sebesar Rp 7.537.586.500 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per I Januari 2024 sejumlah 5 (lima) unit dengan nilai sebesar Rp 7.537.586.500 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

b. Bangunan Gudang Tertutup Permanen

Saldo Bangunan Gudang tertutup Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 71.136.000 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 71.136.000 (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

c. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen

Saldo Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 581.602.000 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 581.602.000 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah), Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

d. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

Saldo Bangunan Gedung Pertemuan Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 6.555.855.761 (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp

6.555.855.761 (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)., Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

e. Bangunan Olahraga Terbuka Permanen

Saldo Bangunan Olahraga Terbuka Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 165.223.400 (seratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 165.223.400 (seratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

f. Gedung Pos Jaga Permanen

Saldo Gedung Pos Jaga Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 49.249.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 49.249.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

g. Gedung Garasi Pool Permanen

Saldo Gedung Garasi Pool Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 461.340.000 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 461.340.000 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

h. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp 5.051.673.090 (lima milyar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp 5.051.673.090 (lima milyar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah). Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

i. Bangunan Lainnya

Saldo Bangunan Lainnya pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp 923.080.000 (sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp

923.080.000 (sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah). Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

j. Mess/Wisma/Bungalow Tempat Peristirahatan Permanen

Saldo Mess/Wisma/Bungalow Tempat Peristirahatan Permanen pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 219.652.000. (dua ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 219.652.000. (dua ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah). Mutasi tambah pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) barang dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan :

No	Nama Bangunan Gedung	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Gedung Kantor Permanen	Rp -	Rp -
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Rp -	Rp -
3	Gedung Tempat Ibadah Permanen	Rp -	Rp -
4	Gedung Pertemuan Permanen	Rp -	Rp -
5	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Rp -	Rp -
6	Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen	Rp -	Rp -
7	Bangunan Gedung Garasi/Pool Permanen	Rp -	Rp -
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Rp -	Rp -
9	Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -
10	Tempat Peristirahatan Permanen	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sewa sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) per tiga tahun dan 1 (satu) ruang dengan nilai sewa Rp 4.392.000 (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap tahun dengan jangka waktu sewa selama tiga tahun sedang dalam proses penghapusan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 sebesar Rp 7.976.547.722 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah)

5. Jalan Irigasi Dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 532.291.317 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sebesar Rp 532.291.317 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sebesar Rp 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp 0 (nol rupiah). Total mutasi selama periode Semester I Tahun 2024 sebesar Rp 0 (nol rupiah)

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 532.291.317 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)Jumlah tersebut terdiri dari :

Saldo Jalan dan Jembatan per 1 Januari 2024 sejumlah 772 m² dengan nilai sebesar Rp 457.291.317 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

Tidak terdapat Irigasi pada LLDIKTI Wilayah VI.

Saldo Jaringan per 1 Januari 2024 sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 sebesar Rp485.181.938 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) Yang terdiri dari Akmumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 457.291.317 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp 27.890.621 (dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya dalam nilai buku :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya dalam nilai buku:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) buah dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 (nol) buah dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

1) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah), Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

8. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 5 (lima) dengan nilai sebesar Rp 335.051.500 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2024 sejumlah 5 (lima) dengan nilai sebesar Rp 335.051.500 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) mutasi tambah selama selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah)

Dengan Rincian sebagai berikut :

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

   Tidak terdapat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

2) Aset Tak Berwujud

   Saldo Aset Tak Berwujud pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 4 (empat) dengan nilai sebesar Rp332.601.500 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 4 (empat) dengan nilai sebesar Rp332.601.500 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

   Akumulasi penyusutan Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 sebesar Rp 261.896.938. (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
0	0
0	0

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
0	0
0	0

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp.0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah). Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada LLDITI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2024 sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Mutasi tambah selama periode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp.0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp.0 (nol rupiah)

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	0

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	0

9. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah). Mutasi tambah selama peiode Semester I Tahun 2024 sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai Rp 0 (nol rupiah)

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	0
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0
Penghapusan Barang Bersejarah	0

C. BARANG MILIK NEGARA PADA LLDIKTI WILAYAH VI PER 30 JUNI 2024

1. BMN per akun neraca

Nilai BMN di Neraca pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 106.651.175.444 (seratus enam milyar enam ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) nilai BMN dimaksud merupakan nilai buku yaitu nilai BMN setelah dikurangi nilai penyusutan sampai dengan periode Semester I Tahun 2024 tanpa nilai barang ekstrakomtabel.

Untuk Rincian lengkap nilai berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya dapat dilihat dalam penyajian nilai BMN sebagai berikut :

Posisi BMN di Neraca Per 30 Juni 2024

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Barang Konsumsi	31.520.310	0,03%			31.520.310	*0,03%*
2	Bahan untuk Pemeliharaan	3.602.020	0,00%			3.602.020	*0,00%*
3	Bahan Baku	-	0,00%			-	*0,00%*
4	Persediaan Lainnya	-	0,00%			-	*0,00%*
	Sub Jumlah (I)	35.122.330	0,03%			35.122.330	0,03%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	91.868.492.000	*75,15%*			91.868.492.000	*75,15%*
2	Peralatan dan Mesin	7.766.165.164	*6,35%*	88.413.725	*26,39%*	7.854.578.889	*6,43%*
3	Gedung dan Bangunan	21.616.397.751	*17,68%*			21.616.397.751	*17,68%*
4	Jalan dan Jembatan	457.291.317	*0,37%*			457.291.317	*0,37%*
5	Irigasi	-	*0,00%*			-	*0,00%*
6	Jaringan	75.000.000	*0,06%*			75.000.000	*0,06%*
7	Aset Tetap Lainnya	-	*0,00%*			-	*0,00%*
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	*0,00%*			-	*0,00%*
	Sub Jumlah (II)	121.783.346.232	*99,62%*	88.413.725	*26,39%*	121.871.759.957	*99,70%*
III	Aset Lainnya						
1	Software	332.601.500	*0,27%*			332.601.500	*0,27%*
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	2.450.000	*0,00%*			2.450.000	*0,00%*
	Sub Jumlah (III)	335.051.500	*0,27%*			335.051.500	*0,27%*
	Total	122.153.520.062		88.413.725		122.241.933.787	100,0%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan BMN di Neraca 30 Juni 2024

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Barang Konsumsi	-	0,00%			-	*0,00%*
2	Bahan untuk Pemeliharaan	-	0,00%			-	*0,00%*
3	Bahn Baku	-	0,00%			-	*0,00%*
4	Persediaan Lainnya	-				-	*0,00%*
	Sub Jumlah (I)	-	0,00%				0,00%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-	*0,00%*			-	*0,00%*
2	Peralatan dan Mesin	6.776.268.020	*43,48%*	81.546.026	*0,52%*	6.857.814.046	*44,01%*
3	Gedung dan Bangunan	7.976.547.722	*51,18%*			7.976.547.722	*51,18%*
4	Jalan dan Jembatan	457.291.317	*2,93%*			457.291.317	*2,93%*
5	Irigasi	-	*0,00%*			-	*0,00%*
6	Jaringan	27.890.621	*0,18%*			27.890.621	*0,18%*
7	Aset Tetap Lainnya	-	*0,00%*			-	*0,00%*
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-				-	*0,00%*
	Sub Jumlah (II)	15.237.997.680	*97,78%*	81.546.026	*0,52%*	15.319.543.706	*98,30%*
III	Aset Lainnya						
1	Software	261.896.938	*1,7%*	-	*0,0%*	261.896.938	*1,7%*
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	2.450.000	*0,02%*	-	*0%*	2.450.000	*0,02%*
	Sub Jumlah (III)	264.346.938	*1,70%*	-	*0%*	264.346.938	*1,70%*
Total		15.502.344.618		81.546.026		15.583.890.644	100,00%

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan keuangan	Selisih
1	Persediaan	35.122.330	35.122.330	0
2	Tanah	91.868.492.000	91.868.492.000	0
3	Peralatan dan Mesin	7.766.165.164	7.766.165.164	0
4	Gedung dan Bangunan	21.616.397.751	21.616.397.751	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	532.291.317	532.291.317	0
6	Aset Tetap Lainnya	-	0	0
7	KDP	-	0	0
8	Aset Tak Berwujud	332.601.500	332.601.500	0
9	Aset Lain-lain*)	2.450.000	2.450.000	0
Total		122.153.520.062	122.153.520.062	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

V. PENGELOLAAN BMN PADA LLDIKTI WILAYAH VI SELAMA PERIODE SEMSETER I TAHUN 2024

A. PEMANFAATAN BMN

Pemanfaatan BMN pada LLDIKTI Wilayah VI adalah berupa Sewa Tanah dan Bangunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu :

- Sewa Tanah dan Bangunan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI

  Pada tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI menerima surat permohonan sewa atas sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 150m^2 yang diatasnya berdiri Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 12 seluas 150m^2 dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI yang akan digunakan sebagai kantor APTISI Wilayah VI. Proses yang sudah dijalankan terkait permohonan sewa ini antara lain :

  1) Tanggal 22 Oktober 2021 LLDIKTI menerima surat dari APTISI Wilayh VI dengan nomor 21.21/E./APTISI.6/X/2021 tentang Permohonan sewa gedung untuk kantor APTISI Wilayah VI Jawa Tengah dengan jangka waktu sewa 3

tahun dengan nilai sewa sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

2) Tanggal 2 November 2021 LLDIKTI Wilayah VI bersurat ke KPKNL semarang dengan nomor : 1549/LL6/LK.01.01/2021 tentang permohonan sewa atas bangunan gedung
3) Tanggal 24 November 2021 LLDIKTI Wilayah VI menerima surat dari KPKNL Semarang dengan nomor : S-6621/WKN.09/KNL.01/2021 tentang pemberitahuan survey lapangan dalam rangka penilaian BMN.
4) Tanggal 24 Desember 2021 LLDIKTI Wilayah VI menerima surat dari KPKNL Semarang dengan nomor : S-284/MK.6/WKN.09/KNL.01/2021 tentang Persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.
5) Tanggal 18 Juli 2022 LLDIKTI Wilayah VI mengirimkan surat kepada APTISI Wilayah VI tentang Sewa Bangunan Gedung (menanggapi surat permohonan sewa dan meneruskan surat persetujuan sewa serta konsep Perjanjian sewa kepada APTISI Wilayah VI)
6) Tanggal 19 Juli 2022 LLDIKTI Wilayah VI mengirimkan SK Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI tentang Pelaksanaan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI tahun 2022
7) Tanggal 27 Juli 2022 telah terbit Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah)
8) Tanggal 1 Februari 2022 LLDIKTI Wilayah VI dan APTISI Wilayah VI menandatangani Surat perjanjian Sewa dengan Nomor : 122/LL6/LK.01.01/2022 dan Nomor : 22.01/E/APTISI 6/II/2022
9) Tanggal 23 februari 2022 LLDIKTI Wilayah VI melaporkan proses sewa yang telah dilaksanakan ke KPKNL melalui surat nomor : 276/LL6/LK.01.01/2022
10) Proses sewa masih berjalan untuk tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2025

- Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kantin LLDIKTI Wilayah VI

  Pada tahun 2021 LLDIKTI wilayah VI menerima surat permohonan sewa atas sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 dan sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 100m^2 yang berdiri diatas tanah tersebut oleh Saudara Maridi yang akan digunakan untuk kantin di Lingkungan LLDIKTI wilayah VI. Proses yang sudah dijalankan terkait permohonan sewa ini antara lain :

  1) Tanggal 14 Desember 2021 LLDIKTI Wilayah VI menerima surat permohonan sewa dari Saudara Maridi atas sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 dan sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 100m^2 yang berdiri diatas tanah tersebut oleh Saudara Maridi yang akan digunakan untuk kantin di Lingkungan LLDIKTI wilayah VI dengan jangka waktu 3 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp 4.800.00,-
  2) Tanggal 15 Desember 2021 LLDIKTI Wilayah VI mengajukan permohonan penilaian sewa tempat ke KPKNL semarang dengan nomor : 1787/LL6/LK.01.01/2021 tentang permohonan penilaian sewa tempat
  3) Tanggal 3 Juli 2022 LLDIKTI Wilayah VI menerima surat dari KPKNL Semarang dengan nomor : S-19/WKN.09/KNL.01/2022 tentang Pemberitahuan pelaksanaan survei lapangan dalam rangka penilaian sewa BMN pada LLDIKTI Wilayah VI.
  4) Tanggal 6 Juli 2022 LLDIKTI Wilayah VI menerima revisi surat permohonan sewa Saudara Maridi atas sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 dan sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60m^2 yang berdiri diatas tanah tersebut oleh Saudara Maridi yang akan digunakan untuk kantin di Lingkungan LLDIKTI wilayah VI.
  5) Tanggal 6 Juli 2022 LLDIKTI Wilayah VI mengirim kembali surat ajuan sewa ke KPKNL Semarang dengan nomor : 38/LL6/LK.01.01/2022 tentang Permohonan penilaian ulang sewa tempat
  6) Tanggal 18 Juli 2022 LLDIKTI Wilayah VI menerima surat dari KPKNL semarang tentang persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah

dan atau Bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.

7) Tanggal 28 Juli 2022 Kepala LLDIKTI Wilayah VI menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa dengan Nomor : 69/LL6/LK.01.07/2022 serta mengirimkan Surat Keputusan tersebut ke KPKNL melalui surat dengan nomor : 228/LL6/LK.01/07/2022.
8) Tanggal 31 Juli 2022 LLDIKTI Wilayah VI meneruskan surat persetujuan sewa dengan lampiran konsep perjanjian sewa tahap pertama kepada Saudara Maridi dengan surat nomor : 229/LL6/LK.01.07/2022
9) Tanggal 2 Februari 2022 telah terbit Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp 4.932.000,- (empat juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
10) Tanggal 7 Februari 2022 LLDIKTI Wilayah VI dengan Saudara Maridi menandatangani Surat perjanjian Sewa Periode Pertama dengan Nomor :158/LL6/LK.01.07/2022
11) Tanggal 2 Maret 2022 LLDIKTI Wilayah VI melaporkan proses sewa yang telah dilaksanakan ke KPKNL melalui surat nomor : 311/LL6/Lk.01.07/2022
12) Tanggal 11 Januari 2023 saudara maridi mengirim surat ke LLDIKTI Wilayah VI yang berisi pemberitahuan tidak melanjutkan sewa untuk tahun kedua
13) Tanggal 1 Februari 2023 LLDIKTI Wilayah VI menerima surat permohonan dari Saudari Sarah Lutfiani untuk meneruskan sewa tempat seluas 100m^2 yang sebelumnya disewa oleh Saudara Maridi dengan menyetujui ketentuan yang berlaku sebelumnya.
14) LLDIKTI Wilayah VI berkonsultasi langsung melalui panggilan suara ke KPKNL Semarang terkait pergantian penyewa dengan ketentuan yang sama. KPKNL Semarang menyampaikan pergantian penyewa dengan ketentuan yang sama tidak dilarang.
15) Tanggal 3 Februari 2023, telah terbit Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp 4.932.000,- (empat juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saudari Sarah Lutfiani.

16) Tanggal 7 Februari 2023 LLDIKTI Wilayah VI dengan Saudari Sarah Lutfiani menandatangani Surat perjanjian Sewa Periode Kedua dengan Nomor :130/LL6/LK.05.05/2023
17) Tanggal 27 Februari 2023 LLDIKTI Wilayah VI melaporkan proses sewa yang telah dilaksanakan ke KPKNL melalui surat nomor : 402/LL6/Lk.05.05/2023
18) Tanggal 1 Februari 2024 LLDIKTI Wilayah VI menerima surat dari Saudari Sarah Lutfiani tentang melanjutkan sewa untuk periode ketiga
19) Tanggal 31 januari telah terbit Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp 4.932.000,- (empat juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saudari Sarah Lutfiani
20) Tanggal 7 Februari 2024 LLDIKTI Wilayah VI dengan Saudari Sarah Lutfiani menandatangani Surat perjanjian Sewa Periode Ketiga dengan Nomor :94/LL6/LK.05.05/2024
21) Tanggal 20 Februari 2024 LLDIKTI Wilayah VI melaporkan proses sewa yang telah dilaksanakan ke KPKNL melalui surat nomor : 145/LL6/Lk.05.05/2024

B. Penetapan Status Penggunaan

LLDIKTI Wilayah VI memiliki 19 NUP BMN yang belum diajukan proses Penetapan Status Penggunaan. 19 NUP tersebut merupakan BMN perolehan tahun 2024 dan akan diajukan Penetapan Status Penggunaannya di Semester II mendatang.

VI. TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN/KOREKSI TIM BPK, ITJEN, DAN ATAU SPI

Pada LLDITI Wilayah VI Tidak terdapat Temuan/Koreksi Tim BPK, Itjen maupun SPI di tahun 2024.

VII. INFORMASI BMN LAINNYA

A. PERKEMBANGAN NILAI BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel), dapat

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Semester II Tahun 2023	121.689.898.957	0	0,00%
2	Semeseter I Tahun 2024	121.874.209.957	184.311.000	0,15%

disajikan sebagai berikut:

B. INFORMASI PENGELOLAAN BMN

1. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggu-naan	Peman-faatan	Pemindah-tanganan	Pengha-pusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a.Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b.Ditolak	0	0	0	0	0
	c.Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima	0	2	0	6	6

2. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

C. BMN DARI BELANJA LAIN-LAIN (BA 999)

Tidak Terdapat BMN dari dana Belanja Lain-lain pada LLDIKTI Wilayah VI.

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1 2	-	-	-	-
Total				

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

D. INFORMASI TERKAIT BMN YANG TELAH DIUSULKAN PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG

Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.

Tidak terdapat BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan	Nilai Buku
-	-	-	-
Total		-	-

E. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada LLDIKTI Wilayah VI per 30 Juni 2024 dan disajikan sebagai Daftar barang dengan kondisi Rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian BMN Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya:

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1 2			
Total			

F. BMN BERUPA BPYBDS

Tidak Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada LLDIKTI Wilayah VI.

No	SATUAN KERJA	Nilai
1 2		
Total		

G. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMN

Tidak terdapat permasalahan dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN pada LLDIKTI Wilayah VI

H. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH TERKAIT PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMN

LLDIKTI Wilayah VI akan meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

Penanggungjawab
Kuasa Pengguna Barang
Kepala,

Dr. Bhimo Widyo Andoko, SH, MH
NIP 196808051994031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 023 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
UAKPB : 723014 **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**

Tgl.Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl.Cetak : 10/07/24 8:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	31,520,310
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,602,020
131111	Tanah	91,868,492,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,766,165,164
133111	Gedung dan Bangunan	21,616,397,751
134111	Jalan dan Jembatan	457,291,317
134113	Jaringan	75,000,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,776,268,020)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7,976,547,722)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(457,291,317)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(27,890,621)
162151	Software	332,601,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,450,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,450,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(261,896,938)
J U M L A H		**106,651,175,444**

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala



Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 023 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
UAKPB : 723014 **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**

Tanggal : 10/07/24 8:24 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	24,131,720
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,941,670
131111	Tanah	91,868,492,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,581,854,164
133111	Gedung dan Bangunan	21,616,397,751
134111	Jalan dan Jembatan	457,291,317
134113	Jaringan	75,000,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,492,718,829)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7,440,534,105)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(457,291,317)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(26,966,908)
162151	Software	332,601,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,450,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,450,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(220,321,750)
J U M L A H		**107,319,877,213**

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:25 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**27,651**	**91,868,492,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,651**	**91,868,492,000**
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	27,651	91,868,492,000	0	0	0	0	27,651	91,868,492,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,363**	**7,581,854,164**	**19**	**184,311,000**	**0**	**0**	**1,382**	**7,766,165,164**
3020101001	Sedan	Unit	1	344,400,000	0	0	0	0	1	344,400,000
3020101002	Jeep	Unit	2	909,800,000	0	0	0	0	2	909,800,000
3020101003	Station Wagon	Unit	1	152,800,000	0	0	0	0	1	152,800,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	673,366,000	0	0	0	0	2	673,366,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	26,850,000	3	61,826,000	0	0	5	88,676,000
3020107006	Trolly Car/Lori	Unit	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000
3030103001	Battery Charge	Buah	1	3,350,000	0	0	0	0	1	3,350,000
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	2	4,569,034	0	0	0	0	2	4,569,034
3030211008	Cermin Besar	Buah	1	5,401,000	0	0	0	0	1	5,401,000
3030212036	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	Buah	1	1,233,000	0	0	0	0	1	1,233,000
3040103007	Alat Penggiling Kopi	Buah	1	1,578,000	0	0	0	0	1	1,578,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	2	13,900,000	0	0	0	0	2	13,900,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	4,028,000	0	0	0	0	1	4,028,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	32	78,222,000	0	0	0	0	32	78,222,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	29	30,248,000	0	0	0	0	29	30,248,000
3050104003	Rak Besi	Buah	26	25,950,214	0	0	0	0	26	25,950,214
3050104004	Rak Kayu	Buah	15	9,701,800	0	0	0	0	15	9,701,800
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	31	33,892,000	0	0	0	0	31	33,892,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	23,595,000	0	0	0	0	1	23,595,000
3050104013	Buffet	Buah	1	221,000	0	0	0	0	1	221,000
3050104014	Mobile File	Buah	1	8,092,000	0	0	0	0	1	8,092,000
3050104020	Lemari Display	Buah	5	27,173,119	0	0	0	0	5	27,173,119
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	14	31,170,000	0	0	0	0	14	31,170,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	25	43,112,002	0	0	0	0	25	43,112,002
3050105010	White Board	Buah	4	3,983,800	0	0	0	0	4	3,983,800
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	17,600,000	0	0	0	0	1	17,600,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	4,480,000	0	0	0	0	1	4,480,000
3050105028	Overhead Projector	Buah	1	3,813,000	0	0	0	0	1	3,813,000
3050105038	Laser Pointer	Buah	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	14	205,949,471	0	0	0	0	14	205,949,471
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	6	40,681,807	0	0	0	0	6	40,681,807
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	1	14,877,000	0	0	0	0	1	14,877,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	11	107,721,500	0	0	0	0	11	107,721,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	117	150,343,500	0	0	0	0	117	150,343,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:25 AM

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	344	171,843,400	0	0	0	0	344	171,843,400
3050201004	Kursi Kayu	Buah	168	154,947,090	0	0	0	0	168	154,947,090
3050201008	Meja Rapat	Buah	28	53,548,900	0	0	0	0	28	53,548,900
3050201009	Meja Komputer	Buah	7	878,000	0	0	0	0	7	878,000
3050201013	Meja Telepon	Buah	3	1,870,500	0	0	0	0	3	1,870,500
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	6,090,260	0	0	0	0	1	6,090,260
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	2	6,162,000	0	0	0	0	2	6,162,000
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	3	7,937,160	0	0	0	0	3	7,937,160
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	5	16,412,000	0	0	0	0	5	16,412,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	1	19,434,250	0	0	0	0	1	19,434,250
3050201033	Sofa	set	1	7,048,500	0	0	0	0	1	7,048,500
3050202003	Jam Elektronik	Buah	6	1,170,000	0	0	0	0	6	1,170,000
3050204001	Lemari Es	Buah	3	1,110,000	0	0	0	0	3	1,110,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	6	125,011,700	0	0	0	0	6	125,011,700
3050204004	A.C. Split	Buah	54	376,587,650	13	100,815,000	0	0	67	477,402,650
3050204006	Kipas Angin	Buah	6	4,280,000	0	0	0	0	6	4,280,000
3050205009	Tabung Gas	Buah	2	482,000	0	0	0	0	2	482,000
3050206001	Radio	Buah	4	544,000	0	0	0	0	4	544,000
3050206002	Televisi	Buah	9	35,317,500	3	21,670,000	0	0	12	56,987,500
3050206005	Amplifier	Buah	3	26,374,000	0	0	0	0	3	26,374,000
3050206006	Equalizer	Buah	1	2,970,000	0	0	0	0	1	2,970,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	26	90,232,500	0	0	0	0	26	90,232,500
3050206008	Sound System	Buah	2	13,750,000	0	0	0	0	2	13,750,000
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	12	6,364,000	0	0	0	0	12	6,364,000
3050206016	Mic Conference	Buah	6	2,616,000	0	0	0	0	6	2,616,000
3050206025	Alat Hiasan	Buah	4	13,637,040	0	0	0	0	4	13,637,040
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	3	37,000	0	0	0	0	3	37,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	4	48,000	0	0	0	0	4	48,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	846,000	0	0	0	0	6	846,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	2	443,000	0	0	0	0	2	443,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	2	3,007,991	0	0	0	0	2	3,007,991
3050206066	Panggung	Buah	1	5,827,500	0	0	0	0	1	5,827,500
3050206068	DVD Player	Buah	1	2,187,500	0	0	0	0	1	2,187,500
3050206072	Lampu	Buah	1	10,351,000	0	0	0	0	1	10,351,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	4	9,322,900	0	0	0	0	4	9,322,900
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	5	80,576,042	0	0	0	0	5	80,576,042
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	1	2,648,000	0	0	0	0	1	2,648,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:25 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060101003	Audio Mixing Stationer	Buah	6	48,037,500	0	0	0	0	6	48,037,500
3060101005	Audio Amplifier	Buah	2	4,475,000	0	0	0	0	2	4,475,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	10	24,356,500	0	0	0	0	10	24,356,500
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	8,500,000	0	0	0	0	5	8,500,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	1	2,479,000	0	0	0	0	1	2,479,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	40,349,100	0	0	0	0	2	40,349,100
3060102132	Video Conference	Buah	6	32,954,000	0	0	0	0	6	32,954,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	15	27,864,000	0	0	0	0	15	27,864,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	3	6,297,000	0	0	0	0	3	6,297,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	1,017,500	0	0	0	0	1	1,017,500
3070104108	Kursi Zeis	Buah	10	13,380,000	0	0	0	0	10	13,380,000
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	1	4,750,000	0	0	0	0	1	4,750,000
3070201003	Audio/Vidio Comunication	Buah	1	372,415,000	0	0	0	0	1	372,415,000
3080113081	TV Monitor	Buah	1	11,850,000	0	0	0	0	1	11,850,000
3080120012	Lensa Cembung	Buah	4	3,916,000	0	0	0	0	4	3,916,000
3080302044	DC Power Supply	Buah	3	2,812,500	0	0	0	0	3	2,812,500
3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	13	85,095,625	0	0	0	0	13	85,095,625
3090402031	Kamera Digital	Buah	4	142,197,900	0	0	0	0	4	142,197,900
3100101002	Mini Komputer	Buah	1	46,851,562	0	0	0	0	1	46,851,562
3100102001	P.C Unit	Buah	9	84,425,000	0	0	0	0	9	84,425,000
3100102002	Lap Top	Buah	72	824,832,123	0	0	0	0	72	824,832,123
3100102003	Note Book	Buah	7	79,786,500	0	0	0	0	7	79,786,500
3100203002	Monitor	Buah	1	2,875,000	0	0	0	0	1	2,875,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	39	124,107,354	0	0	0	0	39	124,107,354
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	17	73,795,770	0	0	0	0	17	73,795,770
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	4,299,709	0	0	0	0	2	4,299,709
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	5	7,004,000	0	0	0	0	5	7,004,000
3100204001	Server	Buah	5	564,225,085	0	0	0	0	5	564,225,085
3100204002	Router	Buah	3	9,740,000	0	0	0	0	3	9,740,000
3100204003	Hub	Buah	2	4,092,000	0	0	0	0	2	4,092,000
3100204014	Rak Server	Buah	1	7,600,000	0	0	0	0	1	7,600,000
3100204024	Switch	Buah	1	28,700,000	0	0	0	0	1	28,700,000
3100204026	Acces Point	Buah	3	3,480,000	0	0	0	0	3	3,480,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	1	114,500,000	0	0	0	0	1	114,500,000
3110102021	Mounting Kamera	Buah	1	3,599,200	0	0	0	0	1	3,599,200
3150404003	Public Address Branch Exchange (PABX)	Buah	2	38,022,106	0	0	0	0	2	38,022,106
3150405001	Genset	Buah	1	414,117,000	0	0	0	0	1	414,117,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:25 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	9	43,240,000	0	0	0	0	9	43,240,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	1	3,499,500	0	0	0	0	1	3,499,500
133111	**Gedung dan Bangunan**		**18**	**21,616,397,751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**21,616,397,751**
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	5	7,537,586,500	0	0	0	0	5	7,537,586,500
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	71,136,000	0	0	0	0	1	71,136,000
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	581,602,000	0	0	0	0	1	581,602,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	6,555,855,761	0	0	0	0	1	6,555,855,761
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	165,223,400	0	0	0	0	1	165,223,400
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	49,249,000	0	0	0	0	1	49,249,000
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	461,340,000	0	0	0	0	1	461,340,000
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	4	5,051,673,090	0	0	0	0	4	5,051,673,090
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	2	923,080,000	0	0	0	0	2	923,080,000
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1	219,652,000	0	0	0	0	1	219,652,000
134111	**Jalan dan Jembatan**		**772**	**457,291,317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772**	**457,291,317**
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	772	457,291,317	0	0	0	0	772	457,291,317
134113	**Jaringan**		**1**	**75,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**75,000,000**
5040201002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA	Unit	1	75,000,000	0	0	0	0	1	75,000,000
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**1**	**2,450,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2,450,000**
3050206005	Amplifier	Buah	1	2,450,000	0	0	0	0	1	2,450,000
TOTAL				**121,601,485,232**		**184,311,000**		**0**		**121,785,796,232**

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala



Bhima Widyo Andoko
NIP.196808051994031001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	**Peralatan dan Mesin**		**133**	**88,413,725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133**	**88,413,725**
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	-	1	288,000	0	0	0	0	1	288,000
3030102002	Mesin Bor Tangan	-	1	536,000	0	0	0	0	1	536,000
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105060	Proyector Spider Bracket	-	3	654,000	0	0	0	0	3	654,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	14	12,230,680	0	0	0	0	14	12,230,680
3050201013	Meja Telepon	-	1	715,000	0	0	0	0	1	715,000
3050201019	Meja Makan Kayu	-	1	897,010	0	0	0	0	1	897,010
3050201031	Meja TV	-	1	900,000	0	0	0	0	1	900,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	-	1	354,948	0	0	0	0	1	354,948
3050205011	Treng Air/Tandon Air	-	2	1,980,000	0	0	0	0	2	1,980,000
3050206007	Loudspeaker	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206012	Wireless	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206025	Alat Hiasan	-	1	529,474	0	0	0	0	1	529,474
3050206029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	-	1	282,371	0	0	0	0	1	282,371
3050206068	DVD Player	-	1	420,000	0	0	0	0	1	420,000
3050206069	Lampu Belajar	-	1	139,473	0	0	0	0	1	139,473
3050206070	Tangga	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	-	2	750,000	0	0	0	0	2	750,000
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	-	4	2,360,000	0	0	0	0	4	2,360,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	2	1,425,000	0	0	0	0	2	1,425,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	17	5,110,141	0	0	0	0	17	5,110,141
3060102045	Tripod Camera	-	1	708,000	0	0	0	0	1	708,000
3070104108	Kursi Zeis	-	75	55,865,628	0	0	0	0	75	55,865,628
3080706003	Multi Tester	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202005	Console Unit (Peralatan Mini Komputer)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203007	External	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	-	1	920,000	0	0	0	0	1	920,000
3100204001	Server	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	-	1	549,000	0	0	0	0	1	549,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	-	1	799,000	0	0	0	0	1	799,000
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:26 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206007	Loudspeaker	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206012	Wireless	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3070104108	Kursi Zeis	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3080706003	Multi Tester	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202005	Console Unit (Peralatan Mini Komputer)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203007	External	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204001	Server	-	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				**88,413,725**		**0**		**0**		**88,413,725**

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala



Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**27,651**	**91,868,492,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,651**	**91,868,492,000**
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	27,651	91,868,492,000	0	0	0	0	27,651	91,868,492,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,496**	**7,670,267,889**	**19**	**184,311,000**	**0**	**0**	**1,515**	**7,854,578,889**
3010103001	Crawler Excavator + Attachment	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020101001	Sedan	Unit	1	344,400,000	0	0	0	0	1	344,400,000
3020101002	Jeep	Unit	2	909,800,000	0	0	0	0	2	909,800,000
3020101003	Station Wagon	Unit	1	152,800,000	0	0	0	0	1	152,800,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	673,366,000	0	0	0	0	2	673,366,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	26,850,000	3	61,826,000	0	0	5	88,676,000
3020107006	Trolly Car/Lori	Unit	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	Buah	1	288,000	0	0	0	0	1	288,000
3030102002	Mesin Bor Tangan	Buah	1	536,000	0	0	0	0	1	536,000
3030103001	Battery Charge	Buah	1	3,350,000	0	0	0	0	1	3,350,000
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	2	4,569,034	0	0	0	0	2	4,569,034
3030211008	Cermin Besar	Buah	1	5,401,000	0	0	0	0	1	5,401,000
3030211009	Tangga Latihan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030212036	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	Buah	1	1,233,000	0	0	0	0	1	1,233,000
3030311001	Kilogram Tembaga Nasional Platina	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3040102003	Babatan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3040103003	Alat Perontokan Mesin (Power Thresser)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3040103007	Alat Penggiling Kopi	Buah	1	1,578,000	0	0	0	0	1	1,578,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	2	13,900,000	0	0	0	0	2	13,900,000
3050101004	Mesin Ketik Listrik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	4,028,000	0	0	0	0	1	4,028,000
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	32	78,222,000	0	0	0	0	32	78,222,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	29	30,248,000	0	0	0	0	29	30,248,000
3050104003	Rak Besi	Buah	26	25,950,214	0	0	0	0	26	25,950,214
3050104004	Rak Kayu	Buah	15	9,701,800	0	0	0	0	15	9,701,800
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	31	33,892,000	0	0	0	0	31	33,892,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	23,595,000	0	0	0	0	1	23,595,000
3050104013	Buffet	Buah	1	221,000	0	0	0	0	1	221,000
3050104014	Mobile File	Buah	1	8,092,000	0	0	0	0	1	8,092,000
3050104016	Roll Opek	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104017	Tempat Menyimpan Gambar	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104020	Lemari Display	Buah	5	27,173,119	0	0	0	0	5	27,173,119

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	14	31,170,000	0	0	0	0	14	31,170,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	25	43,112,002	0	0	0	0	25	43,112,002
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	4	3,983,800	0	0	0	0	4	3,983,800
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	17,600,000	0	0	0	0	1	17,600,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	4,480,000	0	0	0	0	1	4,480,000
3050105028	Overhead Projector	Buah	1	3,813,000	0	0	0	0	1	3,813,000
3050105038	Laser Pointer	Buah	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	14	205,949,471	0	0	0	0	14	205,949,471
3050105049	Flip Chart	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	6	40,681,807	0	0	0	0	6	40,681,807
3050105060	Proyector Spider Bracket	Buah	3	654,000	0	0	0	0	3	654,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	1	14,877,000	0	0	0	0	1	14,877,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	11	107,721,500	0	0	0	0	11	107,721,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	117	150,343,500	0	0	0	0	117	150,343,500
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	358	184,074,080	0	0	0	0	358	184,074,080
3050201004	Kursi Kayu	Buah	168	154,947,090	0	0	0	0	168	154,947,090
3050201005	Sice	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	28	53,548,900	0	0	0	0	28	53,548,900
3050201009	Meja Komputer	Buah	7	878,000	0	0	0	0	7	878,000
3050201013	Meja Telepon	Buah	4	2,585,500	0	0	0	0	4	2,585,500
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	6,090,260	0	0	0	0	1	6,090,260
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	2	6,162,000	0	0	0	0	2	6,162,000
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	3	7,937,160	0	0	0	0	3	7,937,160
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	6	17,309,010	0	0	0	0	6	17,309,010
3050201021	Pot Bunga	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201026	Nakas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	1	19,434,250	0	0	0	0	1	19,434,250
3050201031	Meja TV	Buah	1	900,000	0	0	0	0	1	900,000
3050201033	Sofa	set	1	7,048,500	0	0	0	0	1	7,048,500
3050202003	Jam Elektronik	Buah	6	1,170,000	0	0	0	0	6	1,170,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	354,948	0	0	0	0	1	354,948
3050204001	Lemari Es	Buah	3	1,110,000	0	0	0	0	3	1,110,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	6	125,011,700	0	0	0	0	6	125,011,700
3050204004	A.C. Split	Buah	54	376,587,650	13	100,815,000	0	0	67	477,402,650
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	6	4,280,000	0	0	0	0	6	4,280,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050205007	Rice Warmer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050205009	Tabung Gas	Buah	2	482,000	0	0	0	0	2	482,000
3050205011	Treng Air/Tandon Air	Buah	2	1,980,000	0	0	0	0	2	1,980,000
3050205013	Kompor Kompresor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206001	Radio	Buah	4	544,000	0	0	0	0	4	544,000
3050206002	Televisi	Buah	9	35,317,500	3	21,670,000	0	0	12	56,987,500
3050206003	Video Cassette	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206005	Amplifier	Buah	3	26,374,000	0	0	0	0	3	26,374,000
3050206006	Equalizer	Buah	1	2,970,000	0	0	0	0	1	2,970,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	26	90,232,500	0	0	0	0	26	90,232,500
3050206008	Sound System	Buah	2	13,750,000	0	0	0	0	2	13,750,000
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206010	Laser Disc	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206012	Wireless	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206013	Megaphone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	12	6,364,000	0	0	0	0	12	6,364,000
3050206016	Mic Conference	Buah	6	2,616,000	0	0	0	0	6	2,616,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206025	Alat Hiasan	Buah	5	14,166,514	0	0	0	0	5	14,166,514
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	3	37,000	0	0	0	0	3	37,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	4	48,000	0	0	0	0	4	48,000
3050206028	Lambang Korpri/Dharma Wanita	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	282,371	0	0	0	0	1	282,371
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	846,000	0	0	0	0	6	846,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	2	443,000	0	0	0	0	2	443,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	2	3,007,991	0	0	0	0	2	3,007,991
3050206059	Kabel Roll	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206066	Panggung	Buah	1	5,827,500	0	0	0	0	1	5,827,500
3050206068	DVD Player	Buah	2	2,607,500	0	0	0	0	2	2,607,500
3050206069	Lampu Belajar	Buah	1	139,473	0	0	0	0	1	139,473
3050206070	Tangga	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206072	Lampu	Buah	1	10,351,000	0	0	0	0	1	10,351,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	6	10,072,900	0	0	0	0	6	10,072,900
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	4	2,360,000	0	0	0	0	4	2,360,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	7	82,001,042	0	0	0	0	7	82,001,042
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	18	7,758,141	0	0	0	0	18	7,758,141
3060101003	Audio Mixing Stationer	Buah	6	48,037,500	0	0	0	0	6	48,037,500
3060101005	Audio Amplifier	Buah	2	4,475,000	0	0	0	0	2	4,475,000
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101017	Cassette Duplicator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101018	Disc Record Player	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	10	24,356,500	0	0	0	0	10	24,356,500
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101038	Microphone Connector Box	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101040	Power Supply Microphone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	8,500,000	0	0	0	0	5	8,500,000
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101074	Compact Disc Recorder	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102045	Tripod Camera	Buah	2	3,187,000	0	0	0	0	2	3,187,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	40,349,100	0	0	0	0	2	40,349,100
3060102072	Camera Adaptor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102101	Photo Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102132	Video Conference	Buah	6	32,954,000	0	0	0	0	6	32,954,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	15	27,864,000	0	0	0	0	15	27,864,000
3060102151	Splitter	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060104031	Mesin Potong	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105012	Vacum Frame	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	3	6,297,000	0	0	0	0	3	6,297,000
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	1,017,500	0	0	0	0	1	1,017,500
3070102032	Bracket Holder	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070104108	Kursi Zeis	Buah	85	69,245,628	0	0	0	0	85	69,245,628
3070108162	Wall Rail Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	1	4,750,000	0	0	0	0	1	4,750,000
3070201003	Audio/Vidio Comunication	Buah	1	372,415,000	0	0	0	0	1	372,415,000
3080106001	Plane Machine For Wood	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080106052	Sample Splitter Set	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080106091	Pompa Hidrolik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080107001	Oven Loss Onheating	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110001	Wheel Balancer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110071	Dial & Test Indikator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110076	Mesin Bubut Presisi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110133	Anemometer Portable Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080111120	Mesin Potong Jerami	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080113081	TV Monitor	Buah	1	11,850,000	0	0	0	0	1	11,850,000
3080115015	Immunodiffusion Puch Set	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080120012	Lensa Cembung	Buah	4	3,916,000	0	0	0	0	4	3,916,000
3080141194	Personal Computer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080149006	Abem Sounding Cable	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080156063	Disseting Set	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203013	UWFP Control Panel With HR	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203045	Hot Plate (General Laboratory Tool)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203084	Laboratory High Speed Centrifuge	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203088	Distilation Equipment	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203115	Manual Screen	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080204004	Mikrolitre Piperdort	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080302044	DC Power Supply	Buah	3	2,812,500	0	0	0	0	3	2,812,500
3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	13	85,095,625	0	0	0	0	13	85,095,625
3080404005	Thermo- Hygrograph	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080601002	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080602020	Higt Volume Air Sampler	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080706003	Multi Tester	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080714006	Wireless Control System For Ship Model	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402031	Kamera Digital	Buah	4	142,197,900	0	0	0	0	4	142,197,900
3100101002	Mini Komputer	Buah	1	46,851,562	0	0	0	0	1	46,851,562
3100102001	P.C Unit	Buah	9	84,425,000	0	0	0	0	9	84,425,000
3100102002	Lap Top	Buah	72	824,832,123	0	0	0	0	72	824,832,123

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100102003	Note Book	Buah	7	79,786,500	0	0	0	0	7	79,786,500
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100201012	Hard Disk	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202004	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202005	Console Unit (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203002	Monitor	Buah	1	2,875,000	0	0	0	0	1	2,875,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	39	124,107,354	0	0	0	0	39	124,107,354
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	17	73,795,770	0	0	0	0	17	73,795,770
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203007	External	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203016	External Floppy Disk Drive	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	4,299,709	0	0	0	0	2	4,299,709
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	6	7,924,000	0	0	0	0	6	7,924,000
3100204001	Server	Buah	5	564,225,085	0	0	0	0	5	564,225,085
3100204002	Router	Buah	3	9,740,000	0	0	0	0	3	9,740,000
3100204003	Hub	Buah	2	4,092,000	0	0	0	0	2	4,092,000
3100204004	Modem	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204005	Netware Interface External	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204014	Rak Server	Buah	1	7,600,000	0	0	0	0	1	7,600,000
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204021	Kabel UTP	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204024	Switch	Buah	1	28,700,000	0	0	0	0	1	28,700,000
3100204026	Acces Point	Buah	3	3,480,000	0	0	0	0	3	3,480,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	1	114,500,000	0	0	0	0	1	114,500,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3110102021	Mounting Kamera	Buah	1	3,599,200	0	0	0	0	1	3,599,200
3150404003	Public Address Branch Exchange (PABX)	Buah	2	38,022,106	0	0	0	0	2	38,022,106
3150405001	Genset	Buah	1	414,117,000	0	0	0	0	1	414,117,000
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	9	43,240,000	0	0	0	0	9	43,240,000
3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	dummy	1	549,000	0	0	0	0	1	549,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	2	4,298,500	0	0	0	0	2	4,298,500
133111	**Gedung dan Bangunan**		**18**	**21,616,397,751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**21,616,397,751**
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	5	7,537,586,500	0	0	0	0	5	7,537,586,500
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	71,136,000	0	0	0	0	1	71,136,000
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	581,602,000	0	0	0	0	1	581,602,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	6,555,855,761	0	0	0	0	1	6,555,855,761

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	165,223,400	0	0	0	0	1	165,223,400
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	49,249,000	0	0	0	0	1	49,249,000
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	461,340,000	0	0	0	0	1	461,340,000
4010125003	Bangunan Lantai Jemur Darurat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	4	5,051,673,090	0	0	0	0	4	5,051,673,090
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	2	923,080,000	0	0	0	0	2	923,080,000
4010134002	Taman Semi Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1	219,652,000	0	0	0	0	1	219,652,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
134111	**Jalan dan Jembatan**		**772**	**457,291,317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772**	**457,291,317**
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	772	457,291,317	0	0	0	0	772	457,291,317
134112	**Irigasi**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5020104002	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
134113	**Jaringan**		**1**	**75,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**75,000,000**
5040201002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA	Unit	1	75,000,000	0	0	0	0	1	75,000,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6010101001	Monografi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
6010102004	Laporan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**1**	**2,450,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2,450,000**
3010103001	Crawler Excavator + Attachment	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020101001	Sedan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020101003	Station Wagon	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3020107006	Trolly Car/Lori	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3030103001	Battery Charge	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030211009	Tangga Latihan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030311001	Kilogram Tembaga Nasional Platina	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3040102003	Babatan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3040103003	Alat Perontokan Mesin (Power Thresser)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101004	Mesin Ketik Listrik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104014	Mobile File	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104016	Roll Opek	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104017	Tempat Menyimpan Gambar	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105049	Flip Chart	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201021	Pot Bunga	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201026	Nakas	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050205007	Rice Warmer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050205013	Kompor Kompresor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206001	Radio	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206002	Televisi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206003	Video Cassette	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206005	Amplifier	Buah	1	2,450,000	0	0	0	0	1	2,450,000
3050206006	Equalizer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206008	Sound System	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206010	Laser Disc	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206012	Wireless	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206013	Megaphone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206016	Mic Conference	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206028	Lambang Korpri/Dharma Wanita	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206059	Kabel Roll	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206068	DVD Player	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101017	Cassette Duplicator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101018	Disc Record Player	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101038	Microphone Connector Box	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101040	Power Supply Microphone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101074	Compact Disc Recorder	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102045	Tripod Camera	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102072	Camera Adaptor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102101	Photo Tustel	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102151	Splitter	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060104031	Mesin Potong	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060105012	Vacum Frame	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3070102032	Bracket Holder	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070104108	Kursi Zeis	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070108162	Wall Rail Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070201003	Audio/Vidio Comunication	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080106001	Plane Machine For Wood	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080106052	Sample Splitter Set	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080106091	Pompa Hidrolik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080107001	Oven Loss Onheating	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110001	Wheel Balancer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110071	Dial & Test Indikator	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110076	Mesin Bubut Presisi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110133	Anemometer Portable Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080111120	Mesin Potong Jerami	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080115015	Immunodiffusion Puch Set	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080141194	Personal Computer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080149006	Abem Sounding Cable	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080156063	Disseting Set	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203013	UWFP Control Panel With HR	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203045	Hot Plate (General Laboratory Tool)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203084	Laboratory High Speed Centrifuge	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203088	Distilation Equipment	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080203115	Manual Screen	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080204004	Mikrolitre Piperdort	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080404005	Thermo- Hygrograph	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:30 AM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080601002	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080602020	Higt Volume Air Sampler	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080706003	Multi Tester	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3080714006	Wireless Control System For Ship Model	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102003	Note Book	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100201012	Hard Disk	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202004	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100202005	Console Unit (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203007	External	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203016	External Floppy Disk Drive	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204001	Server	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204002	Router	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204004	Modem	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204005	Netware Interface External	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204021	Kabel UTP	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
6010101001	Monografi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
6010102004	Laporan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				**121,689,898,957**		**184,311,000**		**0**		**121,874,209,957**

Semarang, 10 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala



Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tanggal : 10/07/24 8:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	**Software**		**4**	**332,601,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**332,601,500**
8010101001	Software Komputer	dummy	4	332,601,500	0	0	0	0	4	332,601,500
TOTAL				**332,601,500**		**0**		**0**		**332,601,500**

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tanggal : 10/07/24 8:44 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2024	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tanggal : 10/07/24 8:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2024
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:47 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	**Tanah**		**27,651**	**91,868,492,000**	**0**	**0**	**0**	**91,868,492,000**
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	27,651	91,868,492,000	0	0	0	91,868,492,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,382**	**7,766,165,164**	**(6,492,718,829)**	**(283,549,191)**	**(6,776,268,020)**	**989,897,144**
3020101001	Sedan	Unit	1	344,400,000	(344,400,000)	0	(344,400,000)	0
3020101002	Jeep	Unit	2	909,800,000	(754,442,858)	(31,071,428)	(785,514,286)	124,285,714
3020101003	Station Wagon	Unit	1	152,800,000	(152,800,000)	0	(152,800,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	673,366,000	(533,477,501)	(48,097,572)	(581,575,073)	91,790,927
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	88,676,000	(26,850,000)	(4,416,144)	(31,266,144)	57,409,856
3020107006	Trolly Car/Lori	Unit	1	950,000	(950,000)	0	(950,000)	0
3030103001	Battery Charge	Buah	1	3,350,000	(3,350,000)	0	(3,350,000)	0
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	2	4,569,034	(814,689)	(228,452)	(1,043,141)	3,525,893
3030211008	Cermin Besar	Buah	1	5,401,000	(3,240,600)	(540,100)	(3,780,700)	1,620,300
3030212036	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	Buah	1	1,233,000	(246,600)	(123,300)	(369,900)	863,100
3040103007	Alat Penggiling Kopi	Buah	1	1,578,000	(986,250)	(197,250)	(1,183,500)	394,500
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	2	13,900,000	(13,900,000)	0	(13,900,000)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	4,028,000	(4,028,000)	0	(4,028,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	32	78,222,000	(78,222,000)	0	(78,222,000)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	29	30,248,000	(19,609,600)	(1,816,000)	(21,425,600)	8,822,400
3050104003	Rak Besi	Buah	26	25,950,214	(25,950,214)	0	(25,950,214)	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	15	9,701,800	(6,369,680)	(660,980)	(7,030,660)	2,671,140
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	31	33,892,000	(33,892,000)	0	(33,892,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	23,595,000	(14,157,000)	(2,359,500)	(16,516,500)	7,078,500
3050104013	Buffet	Buah	1	221,000	(221,000)	0	(221,000)	0
3050104014	Mobile File	Buah	1	8,092,000	(8,092,000)	0	(8,092,000)	0
3050104020	Lemari Display	Buah	5	27,173,119	(23,103,119)	(1,017,500)	(24,120,619)	3,052,500
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	14	31,170,000	(31,170,000)	0	(31,170,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	25	43,112,002	(37,796,802)	(1,328,800)	(39,125,602)	3,986,400
3050105010	White Board	Buah	4	3,983,800	(2,738,160)	(369,380)	(3,107,540)	876,260
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	17,600,000	(17,600,000)	0	(17,600,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	4,480,000	(3,136,000)	(448,000)	(3,584,000)	896,000
3050105028	Overhead Projector	Buah	1	3,813,000	(2,669,100)	(381,300)	(3,050,400)	762,600
3050105038	Laser Pointer	Buah	1	1,350,000	(810,000)	(135,000)	(945,000)	405,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	14	205,949,471	(202,379,471)	(3,570,000)	(205,949,471)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	6	40,681,807	(40,153,147)	(176,220)	(40,329,367)	352,440
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	1	14,877,000	(14,877,000)	0	(14,877,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	11	107,721,500	(19,532,000)	(10,539,450)	(30,071,450)	77,650,050
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	117	150,343,500	(121,626,900)	(7,179,150)	(128,806,050)	21,537,450

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:47 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	344	171,843,400	(154,678,650)	(3,749,350)	(158,428,000)	13,415,400
3050201004	Kursi Kayu	Buah	168	154,947,090	(111,528,363)	(14,246,309)	(125,774,672)	29,172,418
3050201008	Meja Rapat	Buah	28	53,548,900	(33,476,205)	(4,239,490)	(37,715,695)	15,833,205
3050201009	Meja Komputer	Buah	7	878,000	(878,000)	0	(878,000)	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	3	1,870,500	(1,367,250)	(167,750)	(1,535,000)	335,500
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	6,090,260	(4,263,182)	(609,026)	(4,872,208)	1,218,052
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	2	6,162,000	(4,357,500)	(601,500)	(4,959,000)	1,203,000
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	3	7,937,160	(5,556,012)	(793,716)	(6,349,728)	1,587,432
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	5	16,412,000	(11,488,400)	(1,641,200)	(13,129,600)	3,282,400
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	1	19,434,250	(11,660,550)	(1,943,425)	(13,603,975)	5,830,275
3050201033	Sofa	set	1	7,048,500	(1,409,700)	(704,850)	(2,114,550)	4,933,950
3050202003	Jam Elektronik	Buah	6	1,170,000	(1,170,000)	0	(1,170,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	3	1,110,000	(1,110,000)	0	(1,110,000)	0
3050204002	A.C. Sentral	Buah	6	125,011,700	(75,007,020)	(12,501,170)	(87,508,190)	37,503,510
3050204004	A.C. Split	Buah	67	477,402,650	(355,867,755)	(16,811,465)	(372,679,220)	104,723,430
3050204006	Kipas Angin	Buah	6	4,280,000	(4,280,000)	0	(4,280,000)	0
3050205009	Tabung Gas	Buah	2	482,000	(482,000)	0	(482,000)	0
3050206001	Radio	Buah	4	544,000	(544,000)	0	(544,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	12	56,987,500	(34,148,300)	(2,823,400)	(36,971,700)	20,015,800
3050206005	Amplifier	Buah	3	26,374,000	(26,374,000)	0	(26,374,000)	0
3050206006	Equalizer	Buah	1	2,970,000	(2,970,000)	0	(2,970,000)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	26	90,232,500	(88,962,500)	(1,270,000)	(90,232,500)	0
3050206008	Sound System	Buah	2	13,750,000	(13,750,000)	0	(13,750,000)	0
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	12	6,364,000	(6,364,000)	0	(6,364,000)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	6	2,616,000	(2,616,000)	0	(2,616,000)	0
3050206025	Alat Hiasan	Buah	4	13,637,040	(9,029,478)	(1,363,704)	(10,393,182)	3,243,858
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	3	37,000	(37,000)	0	(37,000)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	4	48,000	(48,000)	0	(48,000)	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	846,000	(846,000)	0	(846,000)	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	2	443,000	(443,000)	0	(443,000)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	2	3,007,991	(2,105,593)	(300,799)	(2,406,392)	601,599
3050206066	Panggung	Buah	1	5,827,500	(1,165,500)	(582,750)	(1,748,250)	4,079,250
3050206068	DVD Player	Buah	1	2,187,500	(2,187,500)	0	(2,187,500)	0
3050206072	Lampu	Buah	1	10,351,000	(6,210,600)	(1,035,100)	(7,245,700)	3,105,300
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	4	9,322,900	(7,805,340)	(379,390)	(8,184,730)	1,138,170
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	5	80,576,042	(48,089,124)	(8,057,605)	(56,146,729)	24,429,313
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	1	2,648,000	(1,853,600)	(264,800)	(2,118,400)	529,600

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:47 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060101003	Audio Mixing Stationer	Buah	6	48,037,500	(48,037,500)	0	(48,037,500)	0
3060101005	Audio Amplifier	Buah	2	4,475,000	(4,475,000)	0	(4,475,000)	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	10	24,356,500	(23,051,500)	(1,305,000)	(24,356,500)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	8,500,000	(8,500,000)	0	(8,500,000)	0
3060102045	Tripod Camera	Buah	1	2,479,000	(495,800)	(247,900)	(743,700)	1,735,300
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	40,349,100	(24,209,460)	(4,034,910)	(28,244,370)	12,104,730
3060102132	Video Conference	Buah	6	32,954,000	(23,067,800)	(3,295,400)	(26,363,200)	6,590,800
3060102135	LCD Monitor	Buah	15	27,864,000	(27,864,000)	0	(27,864,000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	3	6,297,000	(3,778,200)	(629,700)	(4,407,900)	1,889,100
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	1,017,500	(508,750)	(101,750)	(610,500)	407,000
3070104108	Kursi Zeis	Buah	10	13,380,000	(13,380,000)	0	(13,380,000)	0
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	1	4,750,000	(4,750,000)	0	(4,750,000)	0
3070201003	Audio/Vidio Comunication	Buah	1	372,415,000	(372,415,000)	0	(372,415,000)	0
3080113081	TV Monitor	Buah	1	11,850,000	(4,443,750)	(740,625)	(5,184,375)	6,665,625
3080120012	Lensa Cembung	Buah	4	3,916,000	(3,015,626)	(244,750)	(3,260,376)	655,624
3080302044	DC Power Supply	Buah	3	2,812,500	(2,002,500)	(90,000)	(2,092,500)	720,000
3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	13	85,095,625	(67,482,638)	(2,711,763)	(70,194,401)	14,901,224
3090402031	Kamera Digital	Buah	4	142,197,900	(102,648,925)	(17,774,739)	(120,423,664)	21,774,236
3100101002	Mini Komputer	Buah	1	46,851,562	(5,856,445)	(5,856,445)	(11,712,890)	35,138,672
3100102001	P.C Unit	Buah	9	84,425,000	(84,425,000)	0	(84,425,000)	0
3100102002	Lap Top	Buah	72	824,832,123	(616,138,950)	(50,093,525)	(666,232,475)	158,599,648
3100102003	Note Book	Buah	7	79,786,500	(79,786,500)	0	(79,786,500)	0
3100203002	Monitor	Buah	1	2,875,000	(2,875,000)	0	(2,875,000)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	39	124,107,354	(108,488,604)	(2,231,250)	(110,719,854)	13,387,500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	17	73,795,770	(73,795,770)	0	(73,795,770)	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	4,299,709	(4,149,121)	(150,588)	(4,299,709)	0
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	5	7,004,000	(6,128,500)	(875,500)	(7,004,000)	0
3100204001	Server	Buah	5	564,225,085	(564,225,085)	0	(564,225,085)	0
3100204002	Router	Buah	3	9,740,000	(9,740,000)	0	(9,740,000)	0
3100204003	Hub	Buah	2	4,092,000	(4,092,000)	0	(4,092,000)	0
3100204014	Rak Server	Buah	1	7,600,000	(7,600,000)	0	(7,600,000)	0
3100204024	Switch	Buah	1	28,700,000	(28,700,000)	0	(28,700,000)	0
3100204026	Acces Point	Buah	3	3,480,000	(3,480,000)	0	(3,480,000)	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	1	114,500,000	(114,500,000)	0	(114,500,000)	0
3110102021	Mounting Kamera	Buah	1	3,599,200	(2,159,520)	(359,920)	(2,519,440)	1,079,760
3150404003	Public Address Branch Exchange (PABX)	Buah	2	38,022,106	(22,746,568)	(1,901,105)	(24,647,673)	13,374,433
3150405001	Genset	Buah	1	414,117,000	(414,117,000)	0	(414,117,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:47 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	9	43,240,000	(24,367,004)	(2,161,996)	(26,529,000)	16,711,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	1	3,499,500	(3,499,500)	0	(3,499,500)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**		**18**	**21,616,397,751**	**(7,440,534,105)**	**(536,013,617)**	**(7,976,547,722)**	**13,639,850,029**
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	5	7,537,586,500	(2,424,543,864)	(177,578,631)	(2,602,122,495)	4,935,464,005
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	71,136,000	(16,813,966)	(1,293,382)	(18,107,348)	53,028,652
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	581,602,000	(252,027,531)	(19,386,733)	(271,414,264)	310,187,736
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	6,555,855,761	(2,402,195,990)	(153,839,251)	(2,556,035,241)	3,999,820,520
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	165,223,400	(43,834,777)	(3,371,906)	(47,206,683)	118,016,717
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	49,249,000	(12,804,740)	(984,980)	(13,789,720)	35,459,280
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	461,340,000	(119,948,400)	(9,226,800)	(129,175,200)	332,164,800
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	4	5,051,673,090	(1,932,351,418)	(152,177,056)	(2,084,528,474)	2,967,144,616
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	2	923,080,000	(184,095,670)	(14,161,205)	(198,256,875)	724,823,125
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1	219,652,000	(51,917,749)	(3,993,673)	(55,911,422)	163,740,578
134111	**Jalan dan Jembatan**		**772**	**457,291,317**	**(457,291,317)**	**0**	**(457,291,317)**	**0**
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	772	457,291,317	(457,291,317)	0	(457,291,317)	0
134113	**Jaringan**		**1**	**75,000,000**	**(26,966,908)**	**(923,713)**	**(27,890,621)**	**47,109,379**
5040201002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA	Unit	1	75,000,000	(26,966,908)	(923,713)	(27,890,621)	47,109,379
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**1**	**2,450,000**	**(2,450,000)**	**0**	**(2,450,000)**	**0**
3050206005	Amplifier	Buah	1	2,450,000	(2,450,000)	0	(2,450,000)	0
JUMLAH			**29,825**	**121,785,796,232**	**(14,419,961,159)**	**(820,486,521)**	**(15,240,447,680)**	**106,545,348,552**

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:47 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	**Peralatan dan Mesin**		**133**	**88,413,725**	**(72,801,686)**	**(8,744,340)**	**(81,546,026)**	**6,867,699**
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	Buah	1	288,000	(86,400)	(14,400)	(100,800)	187,200
3030102002	Mesin Bor Tangan	Buah	1	536,000	(160,800)	(26,800)	(187,600)	348,400
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0
3050105060	Proyector Spider Bracket	Buah	3	654,000	(457,800)	(65,400)	(523,200)	130,800
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	14	12,230,680	(7,884,756)	(1,223,068)	(9,107,824)	3,122,856
3050201013	Meja Telepon	Buah	1	715,000	(500,500)	(71,500)	(572,000)	143,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	897,010	(627,907)	(89,701)	(717,608)	179,402
3050201031	Meja TV	Buah	1	900,000	(450,000)	(90,000)	(540,000)	360,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	354,948	(354,948)	0	(354,948)	0
3050205011	Treng Air/Tandon Air	Buah	2	1,980,000	(1,782,000)	(198,000)	(1,980,000)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206012	Wireless	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206025	Alat Hiasan	Buah	1	529,474	(370,632)	(52,947)	(423,579)	105,895
3050206029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	282,371	(197,659)	(28,237)	(225,896)	56,475
3050206068	DVD Player	Buah	1	420,000	(378,000)	(42,000)	(420,000)	0
3050206069	Lampu Belajar	Buah	1	139,473	(97,631)	(13,947)	(111,578)	27,895
3050206070	Tangga	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	2	750,000	(495,000)	(75,000)	(570,000)	180,000
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	4	2,360,000	(1,652,000)	(236,000)	(1,888,000)	472,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	1,425,000	(855,000)	(142,500)	(997,500)	427,500
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	17	5,110,141	(3,756,050)	(511,015)	(4,267,065)	843,076
3060102045	Tripod Camera	Buah	1	708,000	(354,000)	(70,800)	(424,800)	283,200
3070104108	Kursi Zeis	Buah	75	55,865,628	(50,279,103)	(5,586,525)	(55,865,628)	0
3080706003	Multi Tester	Buah	0	0	0	0	0	0
3100202005	Console Unit (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203007	External	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	1	920,000	(805,000)	(115,000)	(920,000)	0
3100204001	Server	Buah	0	0	0	0	0	0
3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	dummy	1	549,000	(457,500)	(91,500)	(549,000)	0
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	1	799,000	(799,000)	0	(799,000)	0
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tgl Cetak : 10/07/24 8:47 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206012	Wireless	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	Buah	0	0	0	0	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	0	0	0	0	0	0
3070104108	Kursi Zeis	Buah	0	0	0	0	0	0
3080706003	Multi Tester	Buah	0	0	0	0	0	0
3100202005	Console Unit (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203007	External	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	0	0	0	0
3100204001	Server	Buah	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			**133**	**88,413,725**	**(72,801,686)**	**(8,744,340)**	**(81,546,026)**	**6,867,699**

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala



Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tanggal : 10/07/24 8:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

UAPA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	**Software**		**4**	**332,601,500**	**(220,321,750)**	**(41,575,188)**	**(261,896,938)**	**70,704,562**
8010101001	Software Komputer	dummy	4	332,601,500	(220,321,750)	(41,575,188)	(261,896,938)	70,704,562
JUMLAH			**4**	**332,601,500**	**(220,321,750)**	**(41,575,188)**	**(261,896,938)**	**70,704,562**

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala



Bhima Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	M2	91,868,492,000	27,651	0	0
Jumlah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah					91,868,492,000	27,651	0	0
1	3.02.01.01.001	Sedan	2	Unit	344,400,000	1	0	0
Jumlah Sedan					344,400,000	1	0	0
1	3.02.01.01.002	Jeep	1	Unit	474,800,000	1	0	0
2			2	Unit	435,000,000	1	0	0
Jumlah Jeep					909,800,000	2	0	0
1	3.02.01.01.003	Station Wagon	6	Unit	152,800,000	1	0	0
Jumlah Station Wagon					152,800,000	1	0	0
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	367,512,500	1	0	0
2			2	Unit	305,853,500	1	0	0
Jumlah Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)					673,366,000	2	0	0
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	Unit	11,975,000	1	0	0
2			7	Unit	14,875,000	1	0	0
3			8	Unit	23,580,000	1	0	0
4			9	Unit	19,123,000	1	0	0
5			10	Unit	19,123,000	1	0	0
Jumlah Sepeda Motor					88,676,000	5	0	0
1	3.02.01.07.006	Trolly Car/Lori	2	Unit	950,000	1	0	0
Jumlah Trolly Car/Lori					950,000	1	0	0
1	3.03.01.02.001	Mesin Gerinda Tangan	1	Buah	288,000	1	0	0
Jumlah Mesin Gerinda Tangan					288,000	1	0	0
1	3.03.01.02.002	Mesin Bor Tangan	1	Buah	536,000	1	0	0
Jumlah Mesin Bor Tangan					536,000	1	0	0
1	3.03.01.03.001	Battery Charge	1	Buah	3,350,000	1	0	0
Jumlah Battery Charge					3,350,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.03.01.06.011	Gergaji Chain Saw	1	Buah	1,431,134	1	0	0
2			2	Buah	3,137,900	1	0	0
Jumlah Gergaji Chain Saw					4,569,034	2	0	0
1	3.03.02.11.008	Cermin Besar	1	Buah	5,401,000	1	0	0
Jumlah Cermin Besar					5,401,000	1	0	0
1	3.03.02.12.036	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	Buah	1,233,000	1	0	0
Jumlah Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer					1,233,000	1	0	0
1	3.04.01.03.007	Alat Penggiling Kopi	1	Buah	1,578,000	1	0	0
Jumlah Alat Penggiling Kopi					1,578,000	1	0	0
1	3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	1	Buah	6,950,000	1	0	0
2			2	Buah	6,950,000	1	0	0
Jumlah Lemari Penyimpan					13,900,000	2	0	0
1	3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	1	Buah	4,028,000	1	0	0
Jumlah Mesin Penghitung Uang					4,028,000	1	0	0
1	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	9	Buah	719,000	1	0	0
2			10	Buah	719,000	1	0	0
3			11	Buah	719,000	1	0	0
4			12	Buah	2,511,000	1	0	0
5			13	Buah	2,511,000	1	0	0
6			14	Buah	2,511,000	1	0	0
7			15	Buah	1,349,000	1	0	0
8			16	Buah	1,349,000	1	0	0
9			17	Buah	1,349,000	1	0	0
10			18	Buah	1,349,000	1	0	0
11			19	Buah	1,349,000	1	0	0
12			20	Buah	1,349,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13			21	Buah	1,349,000	1	0	0
14			22	Buah	1,349,000	1	0	0
15			23	Buah	2,449,000	1	0	0
16			24	Buah	1,249,000	1	0	0
17			25	Buah	1,249,000	1	0	0
18			26	Buah	1,249,000	1	0	0
19			27	Buah	2,147,000	1	0	0
20			28	Buah	2,147,000	1	0	0
21			29	Buah	2,425,000	1	0	0
22			30	Buah	2,425,000	1	0	0
23			31	Buah	8,000,000	1	0	0
24			32	Buah	8,000,000	1	0	0
25			33	Buah	3,300,000	1	0	0
26			34	Buah	3,300,000	1	0	0
27			35	Buah	3,300,000	1	0	0
28			36	Buah	3,300,000	1	0	0
29			37	Buah	3,300,000	1	0	0
30			38	Buah	3,300,000	1	0	0
31			39	Buah	3,300,000	1	0	0
32			40	Buah	3,300,000	1	0	0
Jumlah Lemari Besi/Metal					78,222,000	32	0	0
1	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	43	Buah	275,000	1	0	0
2			44	Buah	1,173,000	1	0	0
3			47	Buah	516,000	1	0	0
4			48	Buah	516,000	1	0	0
5			49	Buah	559,000	1	0	0
6			55	Buah	464,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7			66	Buah	212,000	1	0	0
8			77	Buah	345,000	1	0	0
9			78	Buah	345,000	1	0	0
10			80	Buah	345,000	1	0	0
11			81	Buah	355,000	1	0	0
12			84	Buah	432,000	1	0	0
13			85	Buah	1,325,000	1	0	0
14			86	Buah	1,040,000	1	0	0
15			87	Buah	1,449,000	1	0	0
16			89	Buah	9,724,000	1	0	0
17			90	Buah	8,436,000	1	0	0
Jumlah Lemari Kayu					27,511,000	17	0	0
1	3.05.01.04.003	Rak Besi	32	Buah	1,791,000	1	0	0
2			33	Buah	1,791,000	1	0	0
3			34	Buah	1,791,000	1	0	0
4			35	Buah	4,320,000	1	0	0
5			36	Buah	550,000	1	0	0
6			37	Buah	550,000	1	0	0
7			38	Buah	550,000	1	0	0
8			39	Buah	550,000	1	0	0
9			40	Buah	550,000	1	0	0
10			41	Buah	550,000	1	0	0
11			42	Buah	550,000	1	0	0
12			43	Buah	550,000	1	0	0
13			45	Buah	550,000	1	0	0
14			46	Buah	3,937,500	1	0	0
15			47	Buah	2,142,857	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16			48	Buah	2,142,857	1	0	0
17			50	Buah	1,198,000	1	0	0
18			51	Buah	1,198,000	1	0	0
Jumlah Rak Besi					25,262,214	18	0	0
1	3.05.01.04.004	Rak Kayu	31	Buah	38,000	1	0	0
2			38	Buah	3,217,500	1	0	0
3			39	Buah	1,671,800	1	0	0
4			40	Buah	1,720,500	1	0	0
Jumlah Rak Kayu					6,647,800	4	0	0
1	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	40	Buah	386,000	1	0	0
2			41	Buah	386,000	1	0	0
3			42	Buah	386,000	1	0	0
4			43	Buah	585,000	1	0	0
5			44	Buah	585,000	1	0	0
6			45	Buah	1,819,000	1	0	0
7			46	Buah	1,819,000	1	0	0
8			47	Buah	1,819,000	1	0	0
9			48	Buah	1,819,000	1	0	0
10			49	Buah	1,819,000	1	0	0
11			50	Buah	1,819,000	1	0	0
12			51	Buah	1,819,000	1	0	0
13			53	Buah	1,641,000	1	0	0
14			54	Buah	1,950,000	1	0	0
15			55	Buah	1,950,000	1	0	0
16			56	Buah	1,950,000	1	0	0
17			57	Buah	2,200,000	1	0	0
18			58	Buah	2,200,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19			59	Buah	2,200,000	1	0	0
20			60	Buah	2,200,000	1	0	0
Jumlah Filing Cabinet Besi					31,352,000	20	0	0
1	3.05.01.04.007	Brandkas	3	Buah	23,595,000	1	0	0
Jumlah Brandkas					23,595,000	1	0	0
1	3.05.01.04.013	Buffet	1	Buah	221,000	1	0	0
Jumlah Buffet					221,000	1	0	0
1	3.05.01.04.014	Mobile File	6	Buah	8,092,000	1	0	0
Jumlah Mobile File					8,092,000	1	0	0
1	3.05.01.04.020	Lemari Display	1	Buah	1,878,619	1	0	0
2			2	Buah	5,302,000	1	0	0
3			3	Buah	5,302,000	1	0	0
4			4	Buah	4,515,500	1	0	0
5			5	Buah	10,175,000	1	0	0
Jumlah Lemari Display					27,173,119	5	0	0
1	3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	10	Buah	2,070,000	1	0	0
2			11	Buah	2,070,000	1	0	0
3			12	Buah	2,070,000	1	0	0
4			13	Buah	2,070,000	1	0	0
5			14	Buah	2,070,000	1	0	0
6			15	Buah	2,070,000	1	0	0
7			18	Buah	2,070,000	1	0	0
8			19	Buah	2,070,000	1	0	0
9			20	Buah	2,070,000	1	0	0
10			21	Buah	2,070,000	1	0	0
11			23	Buah	2,070,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12			25	Buah	2,800,000	1	0	0
13			26	Buah	2,800,000	1	0	0
14			27	Buah	2,800,000	1	0	0
Jumlah Tabung Pemadam Api					31,170,000	14	0	0
1	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	1,712,500	1	0	0
2			3	Buah	1,712,500	1	0	0
3			4	Buah	1,712,500	1	0	0
4			6	Buah	1,287,500	1	0	0
5			7	Buah	1,287,500	1	0	0
6			8	Buah	1,287,500	1	0	0
7			9	Buah	1,287,500	1	0	0
8			10	Buah	1,287,500	1	0	0
9			11	Buah	1,312,667	1	0	0
10			12	Buah	1,312,667	1	0	0
11			13	Buah	1,312,667	1	0	0
12			14	Buah	1,312,667	1	0	0
13			15	Buah	1,312,667	1	0	0
14			16	Buah	1,312,667	1	0	0
15			17	Buah	10,373,000	1	0	0
16			18	Buah	3,358,750	1	0	0
17			19	Buah	1,103,250	1	0	0
18			20	Buah	1,103,250	1	0	0
19			21	Buah	1,103,250	1	0	0
20			22	Buah	1,103,250	1	0	0
21			23	Buah	1,103,250	1	0	0
22			24	Buah	1,103,250	1	0	0
23			25	Buah	1,103,250	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24			26	Buah	1,103,250	1	0	0
25			27	Buah	1,103,250	1	0	0
Jumlah CCTV - Camera Control Television System					43,112,002	25	0	0
1	3.05.01.05.010	White Board	38	Buah	1,159,400	1	0	0
2			39	Buah	1,159,400	1	0	0
3			40	Buah	1,375,000	1	0	0
Jumlah White Board					3,693,800	3	0	0
1	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	3	Buah	17,600,000	1	0	0
Jumlah Alat Penghancur Kertas					17,600,000	1	0	0
1	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	Buah	4,480,000	1	0	0
Jumlah Mesin Absensi					4,480,000	1	0	0
1	3.05.01.05.028	Overhead Projector	12	Buah	3,813,000	1	0	0
Jumlah Overhead Projector					3,813,000	1	0	0
1	3.05.01.05.038	Laser Pointer	1	Buah	1,350,000	1	0	0
Jumlah Laser Pointer					1,350,000	1	0	0
1	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2	Buah	8,300,000	1	0	0
2			3	Buah	8,300,000	1	0	0
3			4	Buah	6,700,000	1	0	0
4			5	Buah	6,700,000	1	0	0
5			8	Buah	17,668,613	1	0	0
6			9	Buah	17,668,613	1	0	0
7			10	Buah	17,668,613	1	0	0
8			11	Buah	17,668,613	1	0	0
9			12	Buah	17,668,613	1	0	0
10			13	Buah	17,668,613	1	0	0
11			14	Buah	16,500,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12			15	Buah	17,737,793	1	0	0
13			16	Buah	17,850,000	1	0	0
14			17	Buah	17,850,000	1	0	0
Jumlah LCD Projector/Infocus					205,949,471	14	0	0
1	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	5,842,857	1	0	0
2			2	Buah	9,192,250	1	0	0
3			3	Buah	9,192,250	1	0	0
4			4	Buah	9,192,250	1	0	0
5			5	Buah	5,500,000	1	0	0
6			7	Buah	1,762,200	1	0	0
Jumlah Focusing Screen/Layar LCD Projector					40,681,807	6	0	0
1	3.05.01.05.060	Proyector Spider Bracket	1	Buah	218,000	1	0	0
2			2	Buah	218,000	1	0	0
3			3	Buah	218,000	1	0	0
Jumlah Proyector Spider Bracket					654,000	3	0	0
1	3.05.01.05.999	Perkakas Kantor Lainnya	12	dummy	14,877,000	1	0	0
Jumlah Perkakas Kantor Lainnya					14,877,000	1	0	0
1	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	1	Buah	2,327,000	1	0	0
2			7	Buah	3,796,200	1	0	0
3			8	Buah	3,796,200	1	0	0
4			9	Buah	3,796,200	1	0	0
5			10	Buah	3,796,200	1	0	0
6			11	Buah	3,796,200	1	0	0
7			12	Buah	3,796,200	1	0	0
8			13	Buah	21,939,150	1	0	0
9			14	Buah	21,939,150	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			15	Buah	19,369,500	1	0	0
11			16	Buah	19,369,500	1	0	0
Jumlah Meja Kerja Besi/Metal					107,721,500	11	0	0
1	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	19	Buah	382,000	1	0	0
2			20	Buah	382,000	1	0	0
3			21	Buah	382,000	1	0	0
4			23	Buah	382,000	1	0	0
5			24	Buah	203,000	1	0	0
6			29	Buah	730,000	1	0	0
7			30	Buah	730,000	1	0	0
8			31	Buah	730,000	1	0	0
9			32	Buah	730,000	1	0	0
10			33	Buah	730,000	1	0	0
11			34	Buah	730,000	1	0	0
12			35	Buah	730,000	1	0	0
13			37	Buah	730,000	1	0	0
14			38	Buah	730,000	1	0	0
15			42	Buah	286,000	1	0	0
16			43	Buah	286,000	1	0	0
17			44	Buah	286,000	1	0	0
18			45	Buah	286,000	1	0	0
19			46	Buah	286,000	1	0	0
20			47	Buah	286,000	1	0	0
21			48	Buah	286,000	1	0	0
22			49	Buah	286,000	1	0	0
23			50	Buah	286,000	1	0	0
24			51	Buah	286,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25			52	Buah	286,000	1	0	0
26			53	Buah	286,000	1	0	0
27			54	Buah	286,000	1	0	0
28			55	Buah	286,000	1	0	0
29			56	Buah	286,000	1	0	0
30			57	Buah	286,000	1	0	0
31			58	Buah	286,000	1	0	0
32			59	Buah	286,000	1	0	0
33			60	Buah	286,000	1	0	0
34			61	Buah	286,000	1	0	0
35			62	Buah	286,000	1	0	0
36			63	Buah	286,000	1	0	0
37			64	Buah	286,000	1	0	0
38			65	Buah	286,000	1	0	0
39			66	Buah	286,000	1	0	0
40			68	Buah	286,000	1	0	0
41			86	Buah	230,000	1	0	0
42			87	Buah	230,000	1	0	0
43			88	Buah	407,000	1	0	0
44			89	Buah	926,000	1	0	0
45			90	Buah	926,000	1	0	0
46			91	Buah	532,000	1	0	0
47			92	Buah	457,000	1	0	0
48			93	Buah	2,004,000	1	0	0
49			94	Buah	2,004,000	1	0	0
50			96	Buah	1,020,000	1	0	0
51			97	Buah	1,650,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52			98	Buah	1,650,000	1	0	0
53			99	Buah	1,003,500	1	0	0
54			100	Buah	1,003,500	1	0	0
55			101	Buah	1,003,500	1	0	0
56			102	Buah	1,003,500	1	0	0
57			103	Buah	1,003,500	1	0	0
58			104	Buah	1,003,500	1	0	0
59			105	Buah	1,003,500	1	0	0
60			106	Buah	1,003,500	1	0	0
61			107	Buah	1,003,500	1	0	0
62			108	Buah	1,003,500	1	0	0
63			111	Buah	1,003,500	1	0	0
64			112	Buah	1,003,500	1	0	0
65			113	Buah	1,322,000	1	0	0
66			114	Buah	1,322,000	1	0	0
67			115	Buah	1,322,000	1	0	0
68			116	Buah	1,322,000	1	0	0
69			117	Buah	1,322,000	1	0	0
70			118	Buah	1,322,000	1	0	0
71			119	Buah	1,322,000	1	0	0
72			120	Buah	1,322,000	1	0	0
73			121	Buah	1,322,000	1	0	0
74			122	Buah	1,322,000	1	0	0
75			123	Buah	1,322,000	1	0	0
76			124	Buah	1,322,000	1	0	0
77			125	Buah	1,322,000	1	0	0
78			126	Buah	1,322,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79			127	Buah	1,322,000	1	0	0
80			128	Buah	1,322,000	1	0	0
81			130	Buah	1,322,000	1	0	0
82			131	Buah	1,322,000	1	0	0
83			132	Buah	1,322,000	1	0	0
84			133	Buah	1,322,000	1	0	0
85			134	Buah	1,322,000	1	0	0
86			135	Buah	1,322,000	1	0	0
87			136	Buah	1,322,000	1	0	0
88			137	Buah	1,322,000	1	0	0
89			138	Buah	1,322,000	1	0	0
90			139	Buah	1,322,000	1	0	0
91			140	Buah	1,322,000	1	0	0
92			141	Buah	1,322,000	1	0	0
93			143	Buah	3,756,500	1	0	0
94			144	Buah	3,756,500	1	0	0
95			145	Buah	3,756,500	1	0	0
96			146	Buah	3,756,500	1	0	0
97			147	Buah	3,756,500	1	0	0
98			148	Buah	3,756,500	1	0	0
99			149	Buah	5,472,500	1	0	0
100			150	Buah	5,472,500	1	0	0
101			151	Buah	5,472,500	1	0	0
102			152	Buah	5,472,500	1	0	0
103			153	Buah	5,472,500	1	0	0
104			154	Buah	5,472,500	1	0	0
105			155	Buah	5,472,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106			156	Buah	5,472,500	1	0	0
107			157	Buah	5,472,500	1	0	0
Jumlah Meja Kerja Kayu					148,622,500	107	0	0
1	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	434	Buah	560,000	1	0	0
2			435	Buah	560,000	1	0	0
3			436	Buah	560,000	1	0	0
4			437	Buah	560,000	1	0	0
5			446	Buah	641,000	1	0	0
6			492	Buah	109,000	1	0	0
7			493	Buah	109,000	1	0	0
8			714	Buah	3,200,000	1	0	0
9			715	Buah	2,500,000	1	0	0
10			718	Buah	484,200	1	0	0
11			719	Buah	484,200	1	0	0
12			720	Buah	484,200	1	0	0
13			721	Buah	484,200	1	0	0
14			722	Buah	484,200	1	0	0
15			723	Buah	484,200	1	0	0
16			724	Buah	484,200	1	0	0
17			725	Buah	484,200	1	0	0
18			726	Buah	484,200	1	0	0
19			727	Buah	484,200	1	0	0
20			728	Buah	484,200	1	0	0
21			729	Buah	484,200	1	0	0
22			730	Buah	484,200	1	0	0
23			731	Buah	484,200	1	0	0
24			732	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25			733	Buah	426,300	1	0	0
26			734	Buah	426,300	1	0	0
27			735	Buah	426,300	1	0	0
28			736	Buah	426,300	1	0	0
29			737	Buah	426,300	1	0	0
30			738	Buah	426,300	1	0	0
31			739	Buah	426,300	1	0	0
32			740	Buah	426,300	1	0	0
33			741	Buah	426,300	1	0	0
34			742	Buah	426,300	1	0	0
35			743	Buah	426,300	1	0	0
36			744	Buah	426,300	1	0	0
37			745	Buah	426,300	1	0	0
38			746	Buah	426,300	1	0	0
39			747	Buah	426,300	1	0	0
40			748	Buah	426,300	1	0	0
41			749	Buah	426,300	1	0	0
42			750	Buah	426,300	1	0	0
43			751	Buah	426,300	1	0	0
44			752	Buah	426,300	1	0	0
45			753	Buah	426,300	1	0	0
46			754	Buah	426,300	1	0	0
47			755	Buah	426,300	1	0	0
48			756	Buah	426,300	1	0	0
49			757	Buah	426,300	1	0	0
50			758	Buah	426,300	1	0	0
51			759	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52			760	Buah	426,300	1	0	0
53			761	Buah	426,300	1	0	0
54			762	Buah	426,300	1	0	0
55			763	Buah	426,300	1	0	0
56			764	Buah	426,300	1	0	0
57			765	Buah	426,300	1	0	0
58			766	Buah	426,300	1	0	0
59			767	Buah	426,300	1	0	0
60			768	Buah	426,300	1	0	0
61			769	Buah	426,300	1	0	0
62			770	Buah	426,300	1	0	0
63			771	Buah	426,300	1	0	0
64			772	Buah	426,300	1	0	0
65			773	Buah	426,300	1	0	0
66			774	Buah	426,300	1	0	0
67			775	Buah	426,300	1	0	0
68			776	Buah	426,300	1	0	0
69			777	Buah	426,300	1	0	0
70			778	Buah	426,300	1	0	0
71			779	Buah	426,300	1	0	0
72			780	Buah	426,300	1	0	0
73			781	Buah	426,300	1	0	0
74			782	Buah	426,300	1	0	0
75			783	Buah	426,300	1	0	0
76			784	Buah	426,300	1	0	0
77			785	Buah	426,300	1	0	0
78			786	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79			787	Buah	426,300	1	0	0
80			788	Buah	426,300	1	0	0
81			789	Buah	426,300	1	0	0
82			790	Buah	426,300	1	0	0
83			791	Buah	426,300	1	0	0
84			792	Buah	426,300	1	0	0
85			793	Buah	426,300	1	0	0
86			794	Buah	426,300	1	0	0
87			795	Buah	426,300	1	0	0
88			796	Buah	426,300	1	0	0
89			797	Buah	426,300	1	0	0
90			798	Buah	426,300	1	0	0
91			799	Buah	426,300	1	0	0
92			800	Buah	426,300	1	0	0
93			801	Buah	426,300	1	0	0
94			802	Buah	426,300	1	0	0
95			803	Buah	426,300	1	0	0
96			804	Buah	426,300	1	0	0
97			805	Buah	426,300	1	0	0
98			806	Buah	426,300	1	0	0
99			807	Buah	426,300	1	0	0
100			808	Buah	426,300	1	0	0
101			809	Buah	426,300	1	0	0
102			810	Buah	426,300	1	0	0
103			811	Buah	426,300	1	0	0
104			812	Buah	426,300	1	0	0
105			813	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106			814	Buah	426,300	1	0	0
107			815	Buah	426,300	1	0	0
108			816	Buah	426,300	1	0	0
109			817	Buah	426,300	1	0	0
110			818	Buah	426,300	1	0	0
111			819	Buah	426,300	1	0	0
112			820	Buah	426,300	1	0	0
113			821	Buah	426,300	1	0	0
114			822	Buah	426,300	1	0	0
115			823	Buah	426,300	1	0	0
116			824	Buah	426,300	1	0	0
117			825	Buah	426,300	1	0	0
118			826	Buah	426,300	1	0	0
119			827	Buah	426,300	1	0	0
120			828	Buah	426,300	1	0	0
121			829	Buah	426,300	1	0	0
122			830	Buah	426,300	1	0	0
123			831	Buah	426,300	1	0	0
124			832	Buah	426,300	1	0	0
125			833	Buah	426,300	1	0	0
126			834	Buah	426,300	1	0	0
127			835	Buah	426,300	1	0	0
128			836	Buah	426,300	1	0	0
129			837	Buah	426,300	1	0	0
130			838	Buah	426,300	1	0	0
131			839	Buah	426,300	1	0	0
132			840	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133			841	Buah	426,300	1	0	0
134			842	Buah	426,300	1	0	0
135			843	Buah	426,300	1	0	0
136			844	Buah	426,300	1	0	0
137			845	Buah	426,300	1	0	0
138			846	Buah	426,300	1	0	0
139			847	Buah	426,300	1	0	0
140			848	Buah	426,300	1	0	0
141			849	Buah	426,300	1	0	0
142			850	Buah	426,300	1	0	0
143			851	Buah	426,300	1	0	0
144			852	Buah	426,300	1	0	0
145			853	Buah	426,300	1	0	0
146			854	Buah	426,300	1	0	0
147			855	Buah	426,300	1	0	0
148			856	Buah	426,300	1	0	0
149			857	Buah	426,300	1	0	0
150			858	Buah	426,300	1	0	0
151			859	Buah	426,300	1	0	0
152			860	Buah	426,300	1	0	0
153			861	Buah	426,300	1	0	0
154			862	Buah	426,300	1	0	0
155			863	Buah	426,300	1	0	0
156			864	Buah	426,300	1	0	0
157			865	Buah	426,300	1	0	0
158			866	Buah	426,300	1	0	0
159			867	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160			868	Buah	426,300	1	0	0
161			869	Buah	426,300	1	0	0
162			870	Buah	426,300	1	0	0
163			871	Buah	426,300	1	0	0
164			872	Buah	426,300	1	0	0
165			873	Buah	426,300	1	0	0
166			874	Buah	426,300	1	0	0
167			875	Buah	426,300	1	0	0
168			876	Buah	426,300	1	0	0
169			877	Buah	426,300	1	0	0
170			878	Buah	426,300	1	0	0
171			879	Buah	426,300	1	0	0
172			880	Buah	426,300	1	0	0
173			881	Buah	426,300	1	0	0
174			882	Buah	426,300	1	0	0
175			883	Buah	426,300	1	0	0
176			884	Buah	426,300	1	0	0
177			885	Buah	426,300	1	0	0
178			886	Buah	426,300	1	0	0
179			887	Buah	426,300	1	0	0
180			888	Buah	426,300	1	0	0
181			889	Buah	426,300	1	0	0
182			890	Buah	426,300	1	0	0
183			891	Buah	426,300	1	0	0
184			892	Buah	426,300	1	0	0
185			893	Buah	426,300	1	0	0
186			894	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187			895	Buah	426,300	1	0	0
188			896	Buah	426,300	1	0	0
189			897	Buah	426,300	1	0	0
190			898	Buah	426,300	1	0	0
191			899	Buah	426,300	1	0	0
192			900	Buah	426,300	1	0	0
193			901	Buah	426,300	1	0	0
194			902	Buah	426,300	1	0	0
195			903	Buah	426,300	1	0	0
196			904	Buah	426,300	1	0	0
197			905	Buah	426,300	1	0	0
198			906	Buah	426,300	1	0	0
199			907	Buah	426,300	1	0	0
200			908	Buah	426,300	1	0	0
201			909	Buah	426,300	1	0	0
202			910	Buah	426,300	1	0	0
203			913	Buah	426,300	1	0	0
204			914	Buah	426,300	1	0	0
205			915	Buah	426,300	1	0	0
206			916	Buah	426,300	1	0	0
207			917	Buah	426,300	1	0	0
208			918	Buah	426,300	1	0	0
209			919	Buah	426,300	1	0	0
210			920	Buah	426,300	1	0	0
211			921	Buah	426,300	1	0	0
212			922	Buah	426,300	1	0	0
213			923	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214			924	Buah	426,300	1	0	0
215			925	Buah	426,300	1	0	0
216			926	Buah	426,300	1	0	0
217			927	Buah	426,300	1	0	0
218			928	Buah	426,300	1	0	0
219			929	Buah	426,300	1	0	0
220			930	Buah	426,300	1	0	0
221			931	Buah	426,300	1	0	0
222			932	Buah	426,300	1	0	0
223			933	Buah	426,300	1	0	0
224			934	Buah	426,300	1	0	0
225			935	Buah	426,300	1	0	0
226			936	Buah	426,300	1	0	0
227			937	Buah	426,300	1	0	0
228			938	Buah	426,300	1	0	0
229			939	Buah	426,300	1	0	0
230			940	Buah	426,300	1	0	0
231			941	Buah	426,300	1	0	0
232			942	Buah	426,300	1	0	0
233			943	Buah	426,300	1	0	0
234			944	Buah	426,300	1	0	0
235			945	Buah	426,300	1	0	0
236			946	Buah	426,300	1	0	0
237			947	Buah	426,300	1	0	0
238			948	Buah	426,300	1	0	0
239			949	Buah	426,300	1	0	0
240			950	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241			951	Buah	426,300	1	0	0
242			952	Buah	426,300	1	0	0
243			953	Buah	426,300	1	0	0
244			954	Buah	426,300	1	0	0
245			955	Buah	426,300	1	0	0
246			956	Buah	426,300	1	0	0
247			957	Buah	426,300	1	0	0
248			958	Buah	426,300	1	0	0
249			959	Buah	426,300	1	0	0
250			960	Buah	426,300	1	0	0
251			961	Buah	426,300	1	0	0
252			962	Buah	426,300	1	0	0
253			963	Buah	426,300	1	0	0
254			964	Buah	426,300	1	0	0
255			965	Buah	426,300	1	0	0
256			966	Buah	426,300	1	0	0
257			967	Buah	426,300	1	0	0
258			968	Buah	426,300	1	0	0
259			969	Buah	426,300	1	0	0
260			970	Buah	426,300	1	0	0
261			971	Buah	426,300	1	0	0
262			972	Buah	426,300	1	0	0
263			973	Buah	426,300	1	0	0
264			974	Buah	426,300	1	0	0
265			975	Buah	426,300	1	0	0
266			976	Buah	426,300	1	0	0
267			977	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
268			978	Buah	426,300	1	0	0
269			979	Buah	426,300	1	0	0
270			980	Buah	426,300	1	0	0
271			981	Buah	426,300	1	0	0
272			982	Buah	426,300	1	0	0
273			983	Buah	426,300	1	0	0
274			985	Buah	426,300	1	0	0
275			986	Buah	426,300	1	0	0
276			987	Buah	426,300	1	0	0
277			988	Buah	426,300	1	0	0
278			989	Buah	426,300	1	0	0
279			990	Buah	426,300	1	0	0
280			991	Buah	426,300	1	0	0
281			992	Buah	426,300	1	0	0
282			993	Buah	426,300	1	0	0
283			994	Buah	426,300	1	0	0
284			995	Buah	426,300	1	0	0
285			996	Buah	426,300	1	0	0
286			997	Buah	426,300	1	0	0
287			998	Buah	426,300	1	0	0
288			999	Buah	426,300	1	0	0
289			1000	Buah	426,300	1	0	0
290			1001	Buah	426,300	1	0	0
291			1002	Buah	426,300	1	0	0
292			1003	Buah	426,300	1	0	0
293			1004	Buah	426,300	1	0	0
294			1005	Buah	426,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
295			1006	Buah	426,300	1	0	0
296			1007	Buah	426,300	1	0	0
297			1008	Buah	426,300	1	0	0
298			1009	Buah	426,300	1	0	0
299			1010	Buah	426,300	1	0	0
300			1011	Buah	426,300	1	0	0
301			1030	Buah	4,290,000	1	0	0
302			1031	Buah	4,290,000	1	0	0
303			1032	Buah	1,123,650	1	0	0
304			1033	Buah	1,123,650	1	0	0
305			1034	Buah	910,580	1	0	0
306			1035	Buah	910,580	1	0	0
307			1036	Buah	910,580	1	0	0
308			1037	Buah	910,580	1	0	0
309			1038	Buah	910,580	1	0	0
310			1039	Buah	910,580	1	0	0
311			1040	Buah	2,888,500	1	0	0
312			1041	Buah	2,888,500	1	0	0
313			1042	Buah	2,888,500	1	0	0
314			1043	Buah	2,888,500	1	0	0
315			1044	Buah	2,888,500	1	0	0
316			1045	Buah	2,888,500	1	0	0
317			1046	Buah	845,900	1	0	0
318			1047	Buah	845,900	1	0	0
319			1048	Buah	845,900	1	0	0
320			1049	Buah	845,900	1	0	0
321			1050	Buah	845,900	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322			1051	Buah	845,900	1	0	0
323			1052	Buah	845,900	1	0	0
324			1053	Buah	845,900	1	0	0
325			1054	Buah	1,210,000	1	0	0
326			1055	Buah	1,354,200	1	0	0
327			1056	Buah	1,354,200	1	0	0
328			1057	Buah	1,354,200	1	0	0
329			1058	Buah	1,354,200	1	0	0
330			1059	Buah	1,354,200	1	0	0
331			1060	Buah	1,354,200	1	0	0
Jumlah Kursi Besi/Metal					183,387,080	331	0	0
1	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	113	Buah	58,000	1	0	0
2			114	Buah	58,000	1	0	0
3			115	Buah	58,000	1	0	0
4			116	Buah	58,000	1	0	0
5			117	Buah	58,000	1	0	0
6			118	Buah	58,000	1	0	0
7			119	Buah	58,000	1	0	0
8			120	Buah	58,000	1	0	0
9			121	Buah	58,000	1	0	0
10			122	Buah	58,000	1	0	0
11			123	Buah	58,000	1	0	0
12			124	Buah	58,000	1	0	0
13			125	Buah	58,000	1	0	0
14			126	Buah	58,000	1	0	0
15			127	Buah	58,000	1	0	0
16			128	Buah	58,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17			129	Buah	95,000	1	0	0
18			130	Buah	95,000	1	0	0
19			131	Buah	95,000	1	0	0
20			132	Buah	95,000	1	0	0
21			133	Buah	95,000	1	0	0
22			134	Buah	95,000	1	0	0
23			135	Buah	95,000	1	0	0
24			136	Buah	95,000	1	0	0
25			137	Buah	95,000	1	0	0
26			138	Buah	95,000	1	0	0
27			139	Buah	95,000	1	0	0
28			140	Buah	95,000	1	0	0
29			141	Buah	95,000	1	0	0
30			142	Buah	95,000	1	0	0
31			143	Buah	95,000	1	0	0
32			144	Buah	95,000	1	0	0
33			145	Buah	95,000	1	0	0
34			146	Buah	95,000	1	0	0
35			147	Buah	95,000	1	0	0
36			148	Buah	95,000	1	0	0
37			149	Buah	95,000	1	0	0
38			150	Buah	95,000	1	0	0
39			151	Buah	95,000	1	0	0
40			152	Buah	95,000	1	0	0
41			153	Buah	95,000	1	0	0
42			154	Buah	95,000	1	0	0
43			155	Buah	95,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44			156	Buah	95,000	1	0	0
45			157	Buah	95,000	1	0	0
46			158	Buah	95,000	1	0	0
47			159	Buah	95,000	1	0	0
48			160	Buah	95,000	1	0	0
49			161	Buah	95,000	1	0	0
50			162	Buah	95,000	1	0	0
51			163	Buah	95,000	1	0	0
52			164	Buah	95,000	1	0	0
53			165	Buah	95,000	1	0	0
54			166	Buah	95,000	1	0	0
55			167	Buah	95,000	1	0	0
56			168	Buah	95,000	1	0	0
57			169	Buah	95,000	1	0	0
58			170	Buah	95,000	1	0	0
59			171	Buah	95,000	1	0	0
60			172	Buah	95,000	1	0	0
61			173	Buah	95,000	1	0	0
62			174	Buah	95,000	1	0	0
63			175	Buah	95,000	1	0	0
64			176	Buah	95,000	1	0	0
65			177	Buah	95,000	1	0	0
66			178	Buah	95,000	1	0	0
67			179	Buah	95,000	1	0	0
68			180	Buah	95,000	1	0	0
69			181	Buah	95,000	1	0	0
70			182	Buah	95,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71			183	Buah	95,000	1	0	0
72			184	Buah	95,000	1	0	0
73			185	Buah	95,000	1	0	0
74			186	Buah	95,000	1	0	0
75			187	Buah	95,000	1	0	0
76			188	Buah	95,000	1	0	0
77			189	Buah	95,000	1	0	0
78			190	Buah	95,000	1	0	0
79			191	Buah	95,000	1	0	0
80			192	Buah	95,000	1	0	0
81			193	Buah	95,000	1	0	0
82			194	Buah	95,000	1	0	0
83			195	Buah	95,000	1	0	0
84			196	Buah	95,000	1	0	0
85			197	Buah	95,000	1	0	0
86			198	Buah	95,000	1	0	0
87			249	Buah	109,000	1	0	0
88			250	Buah	109,000	1	0	0
89			251	Buah	109,000	1	0	0
90			254	Buah	109,000	1	0	0
91			336	Buah	108,000	1	0	0
92			338	Buah	6,160,000	1	0	0
93			339	Buah	2,706,000	1	0	0
94			340	Buah	6,187,500	1	0	0
95			341	Buah	2,706,000	1	0	0
96			342	Buah	2,706,000	1	0	0
97			343	Buah	2,706,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98			344	Buah	2,706,000	1	0	0
99			345	Buah	2,706,000	1	0	0
100			346	Buah	2,706,000	1	0	0
101			347	Buah	6,242,500	1	0	0
102			348	Buah	1,265,000	1	0	0
103			349	Buah	1,265,000	1	0	0
104			350	Buah	1,265,000	1	0	0
105			351	Buah	1,265,000	1	0	0
106			352	Buah	1,265,000	1	0	0
107			353	Buah	1,265,000	1	0	0
108			354	Buah	1,265,000	1	0	0
109			355	Buah	1,265,000	1	0	0
110			356	Buah	1,265,000	1	0	0
111			357	Buah	1,265,000	1	0	0
112			358	Buah	4,647,500	1	0	0
113			359	Buah	4,647,500	1	0	0
114			360	Buah	3,537,050	1	0	0
115			361	Buah	2,377,870	1	0	0
116			362	Buah	2,377,870	1	0	0
117			363	Buah	1,477,300	1	0	0
118			364	Buah	1,477,300	1	0	0
119			365	Buah	1,477,300	1	0	0
120			366	Buah	1,477,300	1	0	0
121			367	Buah	3,537,050	1	0	0
122			368	Buah	3,537,050	1	0	0
123			369	Buah	3,239,500	1	0	0
124			370	Buah	3,239,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125			371	Buah	3,239,500	1	0	0
126			372	Buah	3,239,500	1	0	0
127			373	Buah	3,239,500	1	0	0
128			374	Buah	3,239,500	1	0	0
129			375	Buah	3,239,500	1	0	0
130			376	Buah	3,239,500	1	0	0
131			377	Buah	3,239,500	1	0	0
132			378	Buah	3,239,500	1	0	0
133			379	Buah	3,239,500	1	0	0
134			380	Buah	3,239,500	1	0	0
135			381	Buah	3,239,500	1	0	0
136			382	Buah	3,239,500	1	0	0
137			383	Buah	3,239,500	1	0	0
138			384	Buah	3,239,500	1	0	0
139			385	Buah	3,239,500	1	0	0
140			386	Buah	3,239,500	1	0	0
141			387	Buah	3,399,000	1	0	0
Jumlah Kursi Kayu					150,585,090	141	0	0
1	3.05.02.01.008	Meja Rapat	13	Buah	564,000	1	0	0
2			14	Buah	564,000	1	0	0
3			15	Buah	564,000	1	0	0
4			16	Buah	564,000	1	0	0
5			17	Buah	564,000	1	0	0
6			18	Buah	564,000	1	0	0
7			19	Buah	564,000	1	0	0
8			20	Buah	564,000	1	0	0
9			21	Buah	564,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			22	Buah	564,000	1	0	0
11			23	Buah	564,000	1	0	0
12			24	Buah	495,000	1	0	0
13			25	Buah	495,000	1	0	0
14			26	Buah	495,000	1	0	0
15			27	Buah	495,000	1	0	0
16			28	Buah	495,000	1	0	0
17			29	Buah	495,000	1	0	0
18			30	Buah	495,000	1	0	0
19			31	Buah	495,000	1	0	0
20			32	Buah	495,000	1	0	0
21			33	Buah	495,000	1	0	0
22			34	Buah	2,611,950	1	0	0
23			35	Buah	2,611,950	1	0	0
24			36	Buah	2,611,950	1	0	0
25			37	Buah	4,092,000	1	0	0
26			38	Buah	10,417,000	1	0	0
27			39	Buah	10,304,250	1	0	0
28			40	Buah	9,745,800	1	0	0
Jumlah Meja Rapat					53,548,900	28	0	0
1	3.05.02.01.009	Meja Komputer	40	Buah	542,000	1	0	0
Jumlah Meja Komputer					542,000	1	0	0
1	3.05.02.01.013	Meja Telepon	3	Buah	94,000	1	0	0
2			7	Buah	1,677,500	1	0	0
3			8	Buah	715,000	1	0	0
Jumlah Meja Telepon					2,486,500	3	0	0
1	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	Buah	6,090,260	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Meja Resepsionis					6,090,260	1	0	0
1	3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	1	Buah	147,000	1	0	0
2			2	Buah	6,015,000	1	0	0
Jumlah Kasur/Spring Bed					6,162,000	2	0	0
1	3.05.02.01.018	Meja Makan Besi	1	Buah	3,135,000	1	0	0
2			2	Buah	3,135,000	1	0	0
3			3	Buah	1,667,160	1	0	0
Jumlah Meja Makan Besi					7,937,160	3	0	0
1	3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	1	Buah	4,042,500	1	0	0
2			2	Buah	5,076,500	1	0	0
3			3	Buah	2,431,000	1	0	0
4			4	Buah	2,431,000	1	0	0
5			5	Buah	2,431,000	1	0	0
6			6	Buah	897,010	1	0	0
Jumlah Meja Makan Kayu					17,309,010	6	0	0
1	3.05.02.01.029	Backdrop TV/Wardrobe	1	set	19,434,250	1	0	0
Jumlah Backdrop TV/Wardrobe					19,434,250	1	0	0
1	3.05.02.01.031	Meja TV	7	Buah	900,000	1	0	0
Jumlah Meja TV					900,000	1	0	0
1	3.05.02.01.033	Sofa	1	set	7,048,500	1	0	0
Jumlah Sofa					7,048,500	1	0	0
1	3.05.02.02.003	Jam Elektronik	2	Buah	170,000	1	0	0
2			3	Buah	200,000	1	0	0
3			4	Buah	200,000	1	0	0
4			5	Buah	200,000	1	0	0
5			7	Buah	200,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			8	Buah	200,000	1	0	0
Jumlah Jam Elektronik					1,170,000	6	0	0
1	3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2	Buah	354,948	1	0	0
Jumlah Mesin Pemotong Rumput					354,948	1	0	0
1	3.05.02.04.001	Lemari Es	2	Buah	378,000	1	0	0
2			3	Buah	211,000	1	0	0
3			5	Buah	521,000	1	0	0
Jumlah Lemari Es					1,110,000	3	0	0
1	3.05.02.04.002	A.C. Sentral	1	Buah	16,777,200	1	0	0
2			2	Buah	16,777,200	1	0	0
3			3	Buah	20,959,400	1	0	0
4			4	Buah	32,300,400	1	0	0
5			5	Buah	14,245,000	1	0	0
6			6	Buah	23,952,500	1	0	0
Jumlah A.C. Sentral					125,011,700	6	0	0
1	3.05.02.04.004	A.C. Split	7	Buah	2,702,000	1	0	0
2			8	Buah	2,702,000	1	0	0
3			10	Buah	4,340,000	1	0	0
4			11	Buah	4,340,000	1	0	0
5			12	Buah	4,340,000	1	0	0
6			13	Buah	4,340,000	1	0	0
7			14	Buah	4,340,000	1	0	0
8			15	Buah	5,500,000	1	0	0
9			16	Buah	5,500,000	1	0	0
10			17	Buah	5,500,000	1	0	0
11			18	Buah	5,500,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12			19	Buah	5,500,000	1	0	0
13			20	Buah	5,500,000	1	0	0
14			21	Buah	5,500,000	1	0	0
15			22	Buah	5,500,000	1	0	0
16			23	Buah	5,500,000	1	0	0
17			24	Buah	5,500,000	1	0	0
18			25	Buah	8,625,000	1	0	0
19			26	Buah	8,625,000	1	0	0
20			27	Buah	8,625,000	1	0	0
21			28	Buah	8,625,000	1	0	0
22			29	Buah	14,900,000	1	0	0
23			30	Buah	14,900,000	1	0	0
24			31	Buah	14,900,000	1	0	0
25			32	Buah	14,900,000	1	0	0
26			41	Buah	5,865,600	1	0	0
27			42	Buah	5,865,600	1	0	0
28			43	Buah	8,872,400	1	0	0
29			44	Buah	8,872,400	1	0	0
30			46	Buah	6,500,000	1	0	0
31			47	Buah	6,500,000	1	0	0
32			48	Buah	12,750,000	1	0	0
33			49	Buah	12,750,000	1	0	0
34			50	Buah	5,768,000	1	0	0
35			51	Buah	5,768,000	1	0	0
36			52	Buah	5,768,000	1	0	0
37			53	Buah	5,768,000	1	0	0
38			54	Buah	5,768,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39			55	Buah	5,768,000	1	0	0
40			56	Buah	6,100,000	1	0	0
41			57	Buah	6,100,000	1	0	0
42			58	Buah	6,100,000	1	0	0
43			59	Buah	6,100,000	1	0	0
44			60	Buah	6,100,000	1	0	0
45			61	Buah	8,250,000	1	0	0
46			62	Buah	8,250,000	1	0	0
47			63	Buah	8,250,000	1	0	0
48			64	Buah	8,250,000	1	0	0
49			65	Buah	8,250,000	1	0	0
50			66	Buah	8,250,000	1	0	0
51			67	Buah	3,692,150	1	0	0
52			68	Buah	5,307,500	1	0	0
53			69	Buah	3,500,000	1	0	0
54			70	Buah	5,300,000	1	0	0
55			71	Buah	7,755,000	1	0	0
56			72	Buah	7,755,000	1	0	0
57			73	Buah	7,755,000	1	0	0
58			74	Buah	7,755,000	1	0	0
59			75	Buah	7,755,000	1	0	0
60			76	Buah	7,755,000	1	0	0
61			77	Buah	7,755,000	1	0	0
62			78	Buah	7,755,000	1	0	0
63			79	Buah	7,755,000	1	0	0
64			80	Buah	7,755,000	1	0	0
65			81	Buah	7,755,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66			82	Buah	7,755,000	1	0	0
67			83	Buah	7,755,000	1	0	0
Jumlah A.C. Split					477,402,650	67	0	0
1	3.05.02.04.006	Kipas Angin	17	Buah	190,000	1	0	0
2			18	Buah	190,000	1	0	0
3			21	Buah	450,000	1	0	0
4			22	Buah	1,150,000	1	0	0
5			23	Buah	1,150,000	1	0	0
6			24	Buah	1,150,000	1	0	0
Jumlah Kipas Angin					4,280,000	6	0	0
1	3.05.02.05.009	Tabung Gas	1	Buah	241,000	1	0	0
2			2	Buah	241,000	1	0	0
Jumlah Tabung Gas					482,000	2	0	0
1	3.05.02.05.011	Treng Air/Tandon Air	1	Buah	990,000	1	0	0
2			2	Buah	990,000	1	0	0
Jumlah Treng Air/Tandon Air					1,980,000	2	0	0
1	3.05.02.06.001	Radio	1	Buah	63,000	1	0	0
2			2	Buah	63,000	1	0	0
3			4	Buah	209,000	1	0	0
4			5	Buah	209,000	1	0	0
Jumlah Radio					544,000	4	0	0
1	3.05.02.06.002	Televisi	4	Buah	3,937,500	1	0	0
2			5	Buah	4,500,000	1	0	0
3			6	Buah	2,564,000	1	0	0
4			7	Buah	3,350,000	1	0	0
5			8	Buah	3,350,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			9	Buah	5,150,000	1	0	0
7			10	Buah	5,150,000	1	0	0
8			11	Buah	4,000,000	1	0	0
9			12	Buah	13,250,000	1	0	0
10			13	Buah	4,210,000	1	0	0
11			14	Buah	4,210,000	1	0	0
Jumlah Televisi					53,671,500	11	0	0
1	3.05.02.06.005	Amplifier	1	Buah	2,450,000	1	0	0
2			2	Buah	10,174,000	1	0	0
3			3	Buah	7,250,000	1	0	0
4			4	Buah	8,950,000	1	0	0
Jumlah Amplifier					28,824,000	4	0	0
1	3.05.02.06.006	Equalizer	2	Buah	2,970,000	1	0	0
Jumlah Equalizer					2,970,000	1	0	0
1	3.05.02.06.007	Loudspeaker	26	Buah	17,235,000	1	0	0
2			27	Buah	4,600,000	1	0	0
3			28	Buah	4,600,000	1	0	0
4			29	Buah	4,600,000	1	0	0
5			30	Buah	8,360,000	1	0	0
6			32	Buah	2,700,000	1	0	0
7			33	Buah	2,700,000	1	0	0
8			34	Buah	2,700,000	1	0	0
9			35	Buah	2,700,000	1	0	0
10			36	Buah	2,700,000	1	0	0
11			37	Buah	2,700,000	1	0	0
12			38	Buah	650,000	1	0	0
13			39	Buah	650,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14			40	Buah	837,500	1	0	0
15			41	Buah	837,500	1	0	0
16			43	Buah	837,500	1	0	0
17			44	Buah	837,500	1	0	0
18			45	Buah	837,500	1	0	0
19			46	Buah	837,500	1	0	0
20			47	Buah	837,500	1	0	0
21			48	Buah	837,500	1	0	0
22			49	Buah	737,500	1	0	0
23			61	Buah	6,600,000	1	0	0
24			62	Buah	6,600,000	1	0	0
25			63	Buah	4,500,000	1	0	0
26			64	Buah	8,200,000	1	0	0
Jumlah Loudspeaker					90,232,500	26	0	0
1	3.05.02.06.008	Sound System	2	Buah	6,500,000	1	0	0
2			3	Buah	7,250,000	1	0	0
Jumlah Sound System					13,750,000	2	0	0
1	3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	7	Buah	455,000	1	0	0
2			8	Buah	455,000	1	0	0
3			11	Buah	600,000	1	0	0
4			12	Buah	600,000	1	0	0
5			14	Buah	531,750	1	0	0
6			15	Buah	531,750	1	0	0
7			16	Buah	531,750	1	0	0
8			17	Buah	531,750	1	0	0
9			18	Buah	531,750	1	0	0
10			19	Buah	531,750	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11			20	Buah	531,750	1	0	0
12			21	Buah	531,750	1	0	0
Jumlah Microphone Table Stand					6,364,000	12	0	0
1	3.05.02.06.016	Mic Conference	1	Buah	436,000	1	0	0
2			2	Buah	436,000	1	0	0
3			3	Buah	436,000	1	0	0
4			4	Buah	436,000	1	0	0
5			5	Buah	436,000	1	0	0
6			6	Buah	436,000	1	0	0
Jumlah Mic Conference					2,616,000	6	0	0
1	3.05.02.06.025	Alat Hiasan	1	Buah	3,126,200	1	0	0
2			2	Buah	4,169,000	1	0	0
3			3	Buah	1,177,340	1	0	0
4			4	Buah	529,474	1	0	0
5			5	Buah	5,164,500	1	0	0
Jumlah Alat Hiasan					14,166,514	5	0	0
1	3.05.02.06.029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Buah	282,371	1	0	0
Jumlah Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))					282,371	1	0	0
1	3.05.02.06.030	Tiang Bendera	92	Buah	186,000	1	0	0
2			93	Buah	186,000	1	0	0
Jumlah Tiang Bendera					372,000	2	0	0
1	3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	3	Buah	319,000	1	0	0
Jumlah Mimbar/Podium					319,000	1	0	0
1	3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	4	Buah	1,604,640	1	0	0
2			5	Buah	1,403,351	1	0	0
Jumlah Gordyin/Kray					3,007,991	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.05.02.06.066	Panggung	1	Buah	5,827,500	1	0	0
Jumlah Panggung					5,827,500	1	0	0
1	3.05.02.06.068	DVD Player	1	Buah	2,187,500	1	0	0
2			3	Buah	420,000	1	0	0
Jumlah DVD Player					2,607,500	2	0	0
1	3.05.02.06.069	Lampu Belajar	1	Buah	139,473	1	0	0
Jumlah Lampu Belajar					139,473	1	0	0
1	3.05.02.06.072	Lampu	1	Buah	10,351,000	1	0	0
Jumlah Lampu					10,351,000	1	0	0
1	3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	Buah	815,000	1	0	0
2			2	Buah	815,000	1	0	0
3			9	Buah	450,000	1	0	0
4			10	Buah	3,899,000	1	0	0
5			12	Buah	300,000	1	0	0
6			13	Buah	3,793,900	1	0	0
Jumlah Bracket Standing Peralatan					10,072,900	6	0	0
1	3.05.02.06.083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	1	dummy	590,000	1	0	0
2			2	dummy	590,000	1	0	0
3			3	dummy	590,000	1	0	0
4			4	dummy	590,000	1	0	0
Jumlah Lampu Tegak/ Standing Lamp					2,360,000	4	0	0
1	3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3	dummy	825,000	1	0	0
2			4	dummy	10,000,000	1	0	0
3			5	dummy	5,940,000	1	0	0
4			6	dummy	600,000	1	0	0
5			7	dummy	7,672,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			8	dummy	54,398,542	1	0	0
7			9	dummy	2,565,000	1	0	0
Jumlah Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					82,001,042	7	0	0
1	3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	dummy	220,000	1	0	0
2			2	dummy	220,000	1	0	0
3			3	dummy	220,000	1	0	0
4			4	dummy	220,000	1	0	0
5			5	dummy	220,000	1	0	0
6			6	dummy	220,000	1	0	0
7			7	dummy	220,000	1	0	0
8			8	dummy	220,000	1	0	0
9			9	dummy	447,375	1	0	0
10			10	dummy	447,375	1	0	0
11			11	dummy	447,375	1	0	0
12			12	dummy	447,375	1	0	0
13			13	dummy	250,000	1	0	0
14			14	dummy	250,000	1	0	0
15			15	dummy	844,270	1	0	0
16			16	dummy	2,648,000	1	0	0
17			17	dummy	119,526	1	0	0
18			18	dummy	96,845	1	0	0
Jumlah Alat Rumah Tangga Lainnya					7,758,141	18	0	0
1	3.06.01.01.003	Audio Mixing Stationer	1	Buah	5,837,500	1	0	0
2			2	Buah	9,550,000	1	0	0
3			3	Buah	9,550,000	1	0	0
4			4	Buah	7,700,000	1	0	0
5			5	Buah	7,700,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			7	Buah	7,700,000	1	0	0
Jumlah Audio Mixing Stationer					48,037,500	6	0	0
1	3.06.01.01.005	Audio Amplifier	2	Buah	2,237,500	1	0	0
2			3	Buah	2,237,500	1	0	0
Jumlah Audio Amplifier					4,475,000	2	0	0
1	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	5	Buah	753,500	1	0	0
2			19	Buah	6,000,000	1	0	0
3			20	Buah	1,800,000	1	0	0
4			22	Buah	2,150,000	1	0	0
5			23	Buah	2,150,000	1	0	0
6			24	Buah	2,150,000	1	0	0
7			25	Buah	6,600,000	1	0	0
8			26	Buah	1,246,000	1	0	0
9			27	Buah	753,500	1	0	0
10			28	Buah	753,500	1	0	0
Jumlah Microphone/Wireless MIC					24,356,500	10	0	0
1	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Buah	1,700,000	1	0	0
2			2	Buah	1,700,000	1	0	0
3			3	Buah	1,700,000	1	0	0
4			4	Buah	1,700,000	1	0	0
5			5	Buah	1,700,000	1	0	0
Jumlah Uninterruptible Power Supply (UPS)					8,500,000	5	0	0
1	3.06.01.02.045	Tripod Camera	3	Buah	708,000	1	0	0
2			4	Buah	2,479,000	1	0	0
Jumlah Tripod Camera					3,187,000	2	0	0
1	3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	Buah	23,499,300	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			2	Buah	16,849,800	1	0	0
Jumlah Lensa Kamera					40,349,100	2	0	0
1	3.06.01.02.132	Video Conference	1	Buah	7,601,000	1	0	0
2			2	Buah	7,601,000	1	0	0
3			3	Buah	7,601,000	1	0	0
4			4	Buah	7,601,000	1	0	0
5			5	Buah	1,275,000	1	0	0
6			6	Buah	1,275,000	1	0	0
Jumlah Video Conference					32,954,000	6	0	0
1	3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	Buah	1,188,000	1	0	0
2			2	Buah	1,188,000	1	0	0
3			3	Buah	1,188,000	1	0	0
4			4	Buah	1,230,000	1	0	0
5			5	Buah	1,230,000	1	0	0
6			6	Buah	1,230,000	1	0	0
7			7	Buah	1,230,000	1	0	0
8			8	Buah	1,230,000	1	0	0
9			9	Buah	1,230,000	1	0	0
10			10	Buah	1,230,000	1	0	0
11			11	Buah	1,230,000	1	0	0
12			12	Buah	1,230,000	1	0	0
13			13	Buah	1,230,000	1	0	0
14			14	Buah	6,000,000	1	0	0
15			15	Buah	6,000,000	1	0	0
Jumlah LCD Monitor					27,864,000	15	0	0
1	3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	16	Buah	2,099,000	1	0	0
2			17	Buah	2,099,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			18	Buah	2,099,000	1	0	0
Jumlah Handy Talky (HT)					6,297,000	3	0	0
1	3.07.01.01.127	Kursi Dorong	1	Buah	1,017,500	1	0	0
Jumlah Kursi Dorong					1,017,500	1	0	0
1	3.07.01.04.108	Kursi Zeis	1	Buah	1,338,000	1	0	0
2			3	Buah	1,338,000	1	0	0
3			4	Buah	1,338,000	1	0	0
4			5	Buah	1,338,000	1	0	0
5			6	Buah	1,338,000	1	0	0
6			7	Buah	1,338,000	1	0	0
7			8	Buah	1,338,000	1	0	0
8			9	Buah	1,338,000	1	0	0
9			10	Buah	1,338,000	1	0	0
10			11	Buah	1,338,000	1	0	0
11			13	Buah	744,875	1	0	0
12			14	Buah	744,875	1	0	0
13			15	Buah	744,875	1	0	0
14			16	Buah	744,875	1	0	0
15			17	Buah	744,875	1	0	0
16			18	Buah	744,875	1	0	0
17			19	Buah	744,875	1	0	0
18			20	Buah	744,875	1	0	0
19			21	Buah	744,875	1	0	0
20			22	Buah	744,875	1	0	0
21			23	Buah	744,875	1	0	0
22			24	Buah	744,875	1	0	0
23			25	Buah	744,875	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24			26	Buah	744,875	1	0	0
25			27	Buah	744,875	1	0	0
26			28	Buah	744,875	1	0	0
27			30	Buah	744,875	1	0	0
28			31	Buah	744,875	1	0	0
29			33	Buah	744,875	1	0	0
30			34	Buah	744,875	1	0	0
31			35	Buah	744,875	1	0	0
32			36	Buah	744,875	1	0	0
33			37	Buah	744,875	1	0	0
34			38	Buah	744,875	1	0	0
35			39	Buah	744,875	1	0	0
36			40	Buah	744,875	1	0	0
37			41	Buah	744,875	1	0	0
38			42	Buah	744,875	1	0	0
39			43	Buah	744,875	1	0	0
40			44	Buah	744,875	1	0	0
41			45	Buah	744,875	1	0	0
42			46	Buah	744,875	1	0	0
43			47	Buah	744,875	1	0	0
44			48	Buah	744,875	1	0	0
45			49	Buah	744,875	1	0	0
46			50	Buah	744,875	1	0	0
47			51	Buah	744,875	1	0	0
48			52	Buah	744,875	1	0	0
49			53	Buah	744,875	1	0	0
50			54	Buah	744,875	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51			55	Buah	744,875	1	0	0
52			56	Buah	744,875	1	0	0
53			57	Buah	744,875	1	0	0
54			58	Buah	744,875	1	0	0
55			59	Buah	744,875	1	0	0
56			60	Buah	744,875	1	0	0
57			61	Buah	744,875	1	0	0
58			62	Buah	744,875	1	0	0
59			63	Buah	744,875	1	0	0
60			64	Buah	744,875	1	0	0
61			65	Buah	744,875	1	0	0
62			66	Buah	744,875	1	0	0
63			67	Buah	744,875	1	0	0
64			68	Buah	744,875	1	0	0
65			69	Buah	744,875	1	0	0
66			70	Buah	744,875	1	0	0
67			71	Buah	744,875	1	0	0
68			72	Buah	744,875	1	0	0
69			73	Buah	744,875	1	0	0
70			77	Buah	744,875	1	0	0
71			78	Buah	744,875	1	0	0
72			79	Buah	744,875	1	0	0
73			80	Buah	744,875	1	0	0
74			81	Buah	744,875	1	0	0
75			82	Buah	744,875	1	0	0
76			83	Buah	744,875	1	0	0
77			84	Buah	744,875	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36
Halaman : 48 dari 59
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78			85	Buah	744,875	1	0	0
79			86	Buah	744,875	1	0	0
80			87	Buah	744,875	1	0	0
81			88	Buah	744,875	1	0	0
82			89	Buah	744,875	1	0	0
83			90	Buah	744,875	1	0	0
84			91	Buah	744,875	1	0	0
85			92	Buah	744,878	1	0	0
Jumlah Kursi Zeis					69,245,628	85	0	0
1	3.07.01.20.010	Kursi Gynecologi	1	Buah	4,750,000	1	0	0
Jumlah Kursi Gynecologi					4,750,000	1	0	0
1	3.07.02.01.003	Audio/Vidio Comunication	1	Buah	372,415,000	1	0	0
Jumlah Audio/Vidio Comunication					372,415,000	1	0	0
1	3.08.01.13.081	TV Monitor	1	Buah	11,850,000	1	0	0
Jumlah TV Monitor					11,850,000	1	0	0
1	3.08.01.20.012	Lensa Cembung	1	Buah	629,000	1	0	0
2			2	Buah	629,000	1	0	0
3			3	Buah	1,329,000	1	0	0
4			4	Buah	1,329,000	1	0	0
Jumlah Lensa Cembung					3,916,000	4	0	0
1	3.08.03.02.044	DC Power Supply	1	Buah	937,500	1	0	0
2			2	Buah	937,500	1	0	0
3			3	Buah	937,500	1	0	0
Jumlah DC Power Supply					2,812,500	3	0	0
1	3.08.03.05.002	Uninterupted Power Supply (UPS)	10	Buah	62,580,000	1	0	0
2			11	Buah	2,300,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			17	Buah	2,300,000	1	0	0
4			18	Buah	2,300,000	1	0	0
5			19	Buah	2,300,000	1	0	0
6			20	Buah	2,300,000	1	0	0
7			22	Buah	1,523,125	1	0	0
8			23	Buah	1,523,125	1	0	0
9			24	Buah	1,523,125	1	0	0
10			25	Buah	1,523,125	1	0	0
11			26	Buah	1,523,125	1	0	0
12			27	Buah	1,700,000	1	0	0
13			28	Buah	1,700,000	1	0	0
Jumlah Uninterupted Power Supply (UPS)					85,095,625	13	0	0
1	3.09.04.02.031	Kamera Digital	3	Buah	59,999,500	1	0	0
2			4	Buah	49,399,900	1	0	0
3			5	Buah	24,799,500	1	0	0
4			6	Buah	7,999,000	1	0	0
Jumlah Kamera Digital					142,197,900	4	0	0
1	3.10.01.01.002	Mini Komputer	1	Buah	46,851,562	1	0	0
Jumlah Mini Komputer					46,851,562	1	0	0
1	3.10.01.02.001	P.C Unit	39	Buah	7,600,000	1	0	0
2			40	Buah	7,600,000	1	0	0
3			49	Buah	12,100,000	1	0	0
4			51	Buah	9,525,000	1	0	0
5			52	Buah	9,525,000	1	0	0
6			53	Buah	9,525,000	1	0	0
7			57	Buah	9,750,000	1	0	0
8			58	Buah	9,750,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			59	Buah	9,050,000	1	0	0
Jumlah P.C Unit					84,425,000	9	0	0
1	3.10.01.02.002	Lap Top	13	Buah	11,780,000	1	0	0
2			15	Buah	10,388,948	1	0	0
3			16	Buah	10,388,948	1	0	0
4			17	Buah	10,388,948	1	0	0
5			21	Buah	10,000,000	1	0	0
6			22	Buah	15,800,000	1	0	0
7			23	Buah	5,450,000	1	0	0
8			24	Buah	15,187,000	1	0	0
9			25	Buah	11,773,010	1	0	0
10			26	Buah	11,773,010	1	0	0
11			27	Buah	11,773,010	1	0	0
12			28	Buah	8,573,010	1	0	0
13			29	Buah	8,573,010	1	0	0
14			30	Buah	8,573,010	1	0	0
15			31	Buah	8,573,010	1	0	0
16			33	Buah	8,573,013	1	0	0
17			34	Buah	4,891,000	1	0	0
18			35	Buah	16,300,000	1	0	0
19			36	Buah	11,000,000	1	0	0
20			37	Buah	11,000,000	1	0	0
21			38	Buah	11,000,000	1	0	0
22			39	Buah	11,000,000	1	0	0
23			40	Buah	11,000,000	1	0	0
24			41	Buah	15,587,500	1	0	0
25			42	Buah	15,587,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26			43	Buah	11,650,000	1	0	0
27			44	Buah	11,650,000	1	0	0
28			45	Buah	11,650,000	1	0	0
29			46	Buah	8,000,000	1	0	0
30			47	Buah	8,000,000	1	0	0
31			48	Buah	8,000,000	1	0	0
32			49	Buah	8,000,000	1	0	0
33			51	Buah	8,000,000	1	0	0
34			52	Buah	15,700,000	1	0	0
35			53	Buah	19,500,000	1	0	0
36			54	Buah	7,800,000	1	0	0
37			55	Buah	7,800,000	1	0	0
38			56	Buah	7,800,000	1	0	0
39			57	Buah	7,800,000	1	0	0
40			58	Buah	7,800,000	1	0	0
41			60	Buah	6,900,000	1	0	0
42			61	Buah	6,900,000	1	0	0
43			62	Buah	6,900,000	1	0	0
44			63	Buah	6,900,000	1	0	0
45			64	Buah	6,900,000	1	0	0
46			65	Buah	6,900,000	1	0	0
47			66	Buah	6,900,000	1	0	0
48			67	Buah	6,900,000	1	0	0
49			68	Buah	6,900,000	1	0	0
50			69	Buah	6,900,000	1	0	0
51			70	Buah	6,900,000	1	0	0
52			71	Buah	6,900,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53			72	Buah	6,900,000	1	0	0
54			73	Buah	20,999,998	1	0	0
55			74	Buah	18,749,998	1	0	0
56			75	Buah	15,500,000	1	0	0
57			76	Buah	15,500,000	1	0	0
58			77	Buah	15,500,000	1	0	0
59			78	Buah	21,650,000	1	0	0
60			79	Buah	15,699,200	1	0	0
61			80	Buah	17,299,000	1	0	0
62			81	Buah	14,350,000	1	0	0
63			82	Buah	14,350,000	1	0	0
64			83	Buah	14,350,000	1	0	0
65			84	Buah	14,350,000	1	0	0
66			85	Buah	14,350,000	1	0	0
67			86	Buah	14,350,000	1	0	0
68			87	Buah	14,350,000	1	0	0
69			88	Buah	14,350,000	1	0	0
70			89	Buah	14,350,000	1	0	0
71			90	Buah	20,500,000	1	0	0
72			91	Buah	20,500,000	1	0	0
Jumlah Lap Top					824,832,123	72	0	0
1	3.10.01.02.003	Note Book	13	Buah	10,786,500	1	0	0
2			21	Buah	11,500,000	1	0	0
3			22	Buah	11,500,000	1	0	0
4			23	Buah	11,500,000	1	0	0
5			24	Buah	11,500,000	1	0	0
6			25	Buah	11,500,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7			26	Buah	11,500,000	1	0	0
Jumlah Note Book					79,786,500	7	0	0
1	3.10.02.03.002	Monitor	2	Buah	2,875,000	1	0	0
Jumlah Monitor					2,875,000	1	0	0
1	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	Buah	2,940,000	1	0	0
2			38	Buah	3,975,000	1	0	0
3			39	Buah	3,975,000	1	0	0
4			42	Buah	3,325,000	1	0	0
5			48	Buah	1,822,500	1	0	0
6			54	Buah	1,350,000	1	0	0
7			55	Buah	1,350,000	1	0	0
8			57	Buah	4,250,000	1	0	0
9			62	Buah	2,934,825	1	0	0
10			63	Buah	2,934,825	1	0	0
11			64	Buah	2,934,825	1	0	0
12			66	Buah	4,231,237	1	0	0
13			67	Buah	4,231,237	1	0	0
14			68	Buah	2,108,675	1	0	0
15			69	Buah	2,108,675	1	0	0
16			70	Buah	2,108,675	1	0	0
17			71	Buah	2,108,675	1	0	0
18			72	Buah	2,108,675	1	0	0
19			73	Buah	7,644,480	1	0	0
20			74	Buah	2,996,525	1	0	0
21			76	Buah	2,996,525	1	0	0
22			77	Buah	2,130,000	1	0	0
23			78	Buah	2,130,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24			79	Buah	2,130,000	1	0	0
25			80	Buah	4,225,000	1	0	0
26			81	Buah	2,450,000	1	0	0
27			82	Buah	2,800,000	1	0	0
28			83	Buah	3,128,500	1	0	0
29			84	Buah	3,128,500	1	0	0
30			85	Buah	3,000,000	1	0	0
31			87	Buah	1,500,000	1	0	0
32			88	Buah	1,500,000	1	0	0
33			89	Buah	1,500,000	1	0	0
34			91	Buah	4,100,000	1	0	0
35			92	Buah	4,100,000	1	0	0
36			93	Buah	2,000,000	1	0	0
37			94	Buah	2,000,000	1	0	0
38			95	Buah	8,925,000	1	0	0
39			96	Buah	8,925,000	1	0	0
Jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer)					124,107,354	39	0	0
1	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	Buah	2,920,000	1	0	0
2			7	Buah	2,920,000	1	0	0
3			8	Buah	4,200,000	1	0	0
4			9	Buah	4,200,000	1	0	0
5			10	Buah	4,876,443	1	0	0
6			11	Buah	4,876,443	1	0	0
7			12	Buah	4,876,443	1	0	0
8			13	Buah	4,876,441	1	0	0
9			14	Buah	4,450,000	1	0	0
10			15	Buah	4,450,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11			16	Buah	4,450,000	1	0	0
12			17	Buah	4,500,000	1	0	0
13			18	Buah	4,500,000	1	0	0
14			20	Buah	4,500,000	1	0	0
15			21	Buah	4,400,000	1	0	0
16			22	Buah	4,400,000	1	0	0
17			23	Buah	4,400,000	1	0	0
Jumlah Scanner (Peralatan Personal Komputer)					73,795,770	17	0	0
1	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1	Buah	3,095,000	1	0	0
2			13	Buah	1,204,709	1	0	0
Jumlah External/ Portable Hardisk					4,299,709	2	0	0
1	3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	dummy	920,000	1	0	0
2			2	dummy	1,035,000	1	0	0
3			3	dummy	1,700,000	1	0	0
4			4	dummy	1,170,000	1	0	0
5			5	dummy	1,989,000	1	0	0
6			6	dummy	1,110,000	1	0	0
Jumlah Peralatan Personal Komputer Lainnya					7,924,000	6	0	0
1	3.10.02.04.001	Server	30	Buah	19,750,000	1	0	0
2			31	Buah	75,650,000	1	0	0
3			32	Buah	268,125,085	1	0	0
4			33	Buah	192,450,000	1	0	0
5			34	Buah	8,250,000	1	0	0
Jumlah Server					564,225,085	5	0	0
1	3.10.02.04.002	Router	2	Buah	20,000	1	0	0
2			3	Buah	20,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			36	Buah	9,700,000	1	0	0
Jumlah Router					9,740,000	3	0	0
1	3.10.02.04.003	Hub	1	Buah	3,842,000	1	0	0
2			2	Buah	250,000	1	0	0
Jumlah Hub					4,092,000	2	0	0
1	3.10.02.04.014	Rak Server	1	Buah	7,600,000	1	0	0
Jumlah Rak Server					7,600,000	1	0	0
1	3.10.02.04.024	Switch	1	Buah	28,700,000	1	0	0
Jumlah Switch					28,700,000	1	0	0
1	3.10.02.04.026	Acces Point	1	Buah	1,160,000	1	0	0
2			2	Buah	1,160,000	1	0	0
3			3	Buah	1,160,000	1	0	0
Jumlah Acces Point					3,480,000	3	0	0
1	3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	dummy	114,500,000	1	0	0
Jumlah Peralatan Jaringan Lainnya					114,500,000	1	0	0
1	3.11.01.02.021	Mounting Kamera	1	Buah	3,599,200	1	0	0
Jumlah Mounting Kamera					3,599,200	1	0	0
1	3.15.04.04.003	Public Address Branch Exchange (PABX)	1	Buah	18,344,106	1	0	0
2			2	Buah	19,678,000	1	0	0
Jumlah Public Address Branch Exchange (PABX)					38,022,106	2	0	0
1	3.15.04.05.001	Genset	1	Buah	414,117,000	1	0	0
Jumlah Genset					414,117,000	1	0	0
1	3.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	1	Buah	5,850,000	1	0	0
2			2	Buah	3,561,250	1	0	0
3			3	Buah	3,736,250	1	0	0
4			4	Buah	3,511,250	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5			5	Buah	4,361,250	1	0	0
6			6	Buah	3,511,250	1	0	0
7			7	Buah	3,436,250	1	0	0
8			8	Buah	4,361,250	1	0	0
9			9	Buah	10,911,250	1	0	0
Jumlah Air Conditioning (AC)					43,240,000	9	0	0
1	3.19.01.02.999	Peralatan Permainan Lainnya	1	dummy	549,000	1	0	0
Jumlah Peralatan Permainan Lainnya					549,000	1	0	0
1	3.19.01.06.999	Peralatan Olah Raga Lainnya	1	dummy	799,000	1	0	0
2			2	dummy	3,499,500	1	0	0
Jumlah Peralatan Olah Raga Lainnya					4,298,500	2	0	0
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Unit	1,694,702,000	1	0	0
2			3	Unit	1,677,498,000	1	0	0
3			10	Unit	485,683,000	1	0	0
4			11	Unit	3,154,703,500	1	0	0
5			12	Unit	525,000,000	1	0	0
Jumlah Bangunan Gedung Kantor Permanen					7,537,586,500	5	0	0
1	4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Unit	71,136,000	1	0	0
Jumlah Bangunan Gudang Tertutup Permanen					71,136,000	1	0	0
1	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Unit	581,602,000	1	0	0
Jumlah Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen					581,602,000	1	0	0
1	4.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Unit	6,555,855,761	1	0	0
Jumlah Bangunan Gedung Pertemuan Permanen					6,555,855,761	1	0	0
1	4.01.01.11.004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	Unit	165,223,400	1	0	0
Jumlah Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen					165,223,400	1	0	0
1	4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	49,249,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Gedung Pos Jaga Permanen					49,249,000	1	0	0
1	4.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Unit	461,340,000	1	0	0
Jumlah Gedung Garasi/Pool Permanen					461,340,000	1	0	0
1	4.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Unit	3,787,384,000	1	0	0
2			2	Unit	265,904,490	1	0	0
3			4	Unit	13,682,600	1	0	0
4			5	Unit	984,702,000	1	0	0
Jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen					5,051,673,090	4	0	0
1	4.01.01.30.999	Bangunan Lainnya	1	dummy	868,002,000	1	0	0
2			2	dummy	55,078,000	1	0	0
Jumlah Bangunan Lainnya					923,080,000	2	0	0
1	4.01.02.04.001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Unit	219,652,000	1	0	0
Jumlah Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen					219,652,000	1	0	0
1	5.01.01.09.002	Jalan Khusus Kompleks	1	M2	457,291,317	772	0	0
Jumlah Jalan Khusus Kompleks					457,291,317	772	0	0
1	5.04.02.01.002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA	1	Unit	75,000,000	1	0	0
Jumlah Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA					75,000,000	1	0	0
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	1	dummy	99,566,500	1	0	0
2			2	dummy	72,050,000	1	0	0
3			3	dummy	72,985,000	1	0	0
4			4	dummy	88,000,000	1	0	0
Jumlah Software Komputer					332,601,500	4	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI BAIK

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.14.36

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Semarang, 10 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala



Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	30	Buah	152,000	0	1	0
2			31	Buah	152,000	0	1	0
3			32	Buah	152,000	0	1	0
4			33	Buah	152,000	0	1	0
5			34	Buah	216,000	0	1	0
6			53	Buah	240,000	0	1	0
7			54	Buah	240,000	0	1	0
8			56	Buah	321,000	0	1	0
9			57	Buah	321,000	0	1	0
10			63	Buah	312,000	0	1	0
11			64	Buah	312,000	0	1	0
12			68	Buah	167,000	0	1	0
Jumlah Lemari Kayu					2,737,000	0	12	0
1	3.05.01.04.003	Rak Besi	8	Buah	86,000	0	1	0
2			9	Buah	86,000	0	1	0
3			10	Buah	86,000	0	1	0
4			13	Buah	86,000	0	1	0
5			14	Buah	86,000	0	1	0
6			15	Buah	86,000	0	1	0
7			16	Buah	86,000	0	1	0
8			17	Buah	86,000	0	1	0
Jumlah Rak Besi					688,000	0	8	0
1	3.05.01.04.004	Rak Kayu	15	Buah	275,000	0	1	0
2			16	Buah	275,000	0	1	0
3			17	Buah	275,000	0	1	0
4			18	Buah	275,000	0	1	0
5			19	Buah	275,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			20	Buah	275,000	0	1	0
7			21	Buah	275,000	0	1	0
8			22	Buah	275,000	0	1	0
9			23	Buah	275,000	0	1	0
10			24	Buah	275,000	0	1	0
11			30	Buah	304,000	0	1	0
Jumlah Rak Kayu					3,054,000	0	11	0
1	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	10	Buah	157,000	0	1	0
2			11	Buah	157,000	0	1	0
3			31	Buah	202,000	0	1	0
4			32	Buah	253,000	0	1	0
5			33	Buah	253,000	0	1	0
6			34	Buah	253,000	0	1	0
7			35	Buah	253,000	0	1	0
8			36	Buah	253,000	0	1	0
9			37	Buah	253,000	0	1	0
10			38	Buah	253,000	0	1	0
11			39	Buah	253,000	0	1	0
Jumlah Filing Cabinet Besi					2,540,000	0	11	0
1	3.05.01.05.010	White Board	28	Buah	290,000	0	1	0
Jumlah White Board					290,000	0	1	0
1	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	Buah	240,000	0	1	0
2			18	Buah	133,000	0	1	0
3			77	Buah	189,000	0	1	0
4			78	Buah	189,000	0	1	0
5			79	Buah	189,000	0	1	0
6			80	Buah	189,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7			81	Buah	148,000	0	1	0
8			82	Buah	148,000	0	1	0
9			83	Buah	148,000	0	1	0
10			84	Buah	148,000	0	1	0
Jumlah Meja Kerja Kayu					1,721,000	0	10	0
1	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	154	Buah	15,000	0	1	0
2			155	Buah	15,000	0	1	0
3			156	Buah	15,000	0	1	0
4			157	Buah	15,000	0	1	0
5			158	Buah	15,000	0	1	0
6			159	Buah	15,000	0	1	0
7			160	Buah	15,000	0	1	0
8			161	Buah	15,000	0	1	0
9			162	Buah	15,000	0	1	0
10			163	Buah	15,000	0	1	0
11			164	Buah	15,000	0	1	0
12			165	Buah	15,000	0	1	0
13			166	Buah	15,000	0	1	0
14			167	Buah	15,000	0	1	0
15			168	Buah	15,000	0	1	0
16			169	Buah	15,000	0	1	0
17			170	Buah	15,000	0	1	0
18			171	Buah	15,000	0	1	0
19			172	Buah	15,000	0	1	0
20			173	Buah	15,000	0	1	0
21			174	Buah	15,000	0	1	0
22			175	Buah	15,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23			176	Buah	15,000	0	1	0
24			177	Buah	15,000	0	1	0
25			401	Buah	25,000	0	1	0
26			402	Buah	25,000	0	1	0
27			431	Buah	277,000	0	1	0
Jumlah Kursi Besi/Metal					687,000	0	27	0
1	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	199	Buah	480,000	0	1	0
2			201	Buah	161,000	0	1	0
3			202	Buah	161,000	0	1	0
4			203	Buah	161,000	0	1	0
5			204	Buah	161,000	0	1	0
6			205	Buah	161,000	0	1	0
7			206	Buah	161,000	0	1	0
8			207	Buah	161,000	0	1	0
9			208	Buah	161,000	0	1	0
10			209	Buah	161,000	0	1	0
11			210	Buah	161,000	0	1	0
12			211	Buah	161,000	0	1	0
13			212	Buah	161,000	0	1	0
14			213	Buah	161,000	0	1	0
15			214	Buah	161,000	0	1	0
16			215	Buah	161,000	0	1	0
17			216	Buah	161,000	0	1	0
18			217	Buah	161,000	0	1	0
19			218	Buah	161,000	0	1	0
20			219	Buah	161,000	0	1	0
21			220	Buah	161,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22			221	Buah	161,000	0	1	0
23			222	Buah	161,000	0	1	0
24			223	Buah	161,000	0	1	0
25			224	Buah	161,000	0	1	0
26			231	Buah	9,000	0	1	0
27			232	Buah	9,000	0	1	0
Jumlah Kursi Kayu					4,362,000	0	27	0
1	3.05.02.01.009	Meja Komputer	15	Buah	56,000	0	1	0
2			16	Buah	56,000	0	1	0
3			17	Buah	56,000	0	1	0
4			18	Buah	56,000	0	1	0
5			19	Buah	56,000	0	1	0
6			20	Buah	56,000	0	1	0
Jumlah Meja Komputer					336,000	0	6	0
1	3.05.02.01.013	Meja Telepon	1	Buah	99,000	0	1	0
Jumlah Meja Telepon					99,000	0	1	0
1	3.05.02.06.002	Televisi	1	Buah	3,316,000	0	1	0
Jumlah Televisi					3,316,000	0	1	0
1	3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	15,000	0	1	0
2			2	Buah	16,000	0	1	0
3			3	Buah	6,000	0	1	0
Jumlah Lambang Garuda Pancasila					37,000	0	3	0
1	3.05.02.06.027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah	15,000	0	1	0
2			2	Buah	15,000	0	1	0
3			3	Buah	9,000	0	1	0
4			4	Buah	9,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Gambar Presiden/Wakil Presiden					48,000	0	4	0
1	3.05.02.06.030	Tiang Bendera	88	Buah	176,000	0	1	0
2			89	Buah	176,000	0	1	0
3			90	Buah	61,000	0	1	0
4			91	Buah	61,000	0	1	0
Jumlah Tiang Bendera					474,000	0	4	0
1	3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	2	Buah	124,000	0	1	0
Jumlah Mimbar/Podium					124,000	0	1	0

Semarang, 10 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala



Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK KONDISI RUSAK BERAT

PER JUNI 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

Tanggal : 16/07/2024 15.24.37

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah null								

Semarang, 10 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala

Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUBSUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024
SEMESTER 1

Tanggal : 16/7/2024
NAMA UAKPB : 023.01.0300.723014.000 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
Halama : 1 dari 1
JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian
Kode : DTBSISSKT

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		19	184,311,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	3	61,826,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	13	100,815,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	3	21,670,000
T O T A L				184,311,000

Semarang, 09 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala



Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER SUBSUB KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

SEMESTER 1

Tanggal : 16/7/2024

NAMA UAKPB : 023.01.0300.723014.000 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Halama : 1 dari 1

JENIS TRANSAKSI :

Kode : DTBSESSKT

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
T O T A L				

Semarang, 09 July 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala

Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE
RINCIAN PERS SUBSUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024
SEMESTER 1

Tanggal : 16/07/2024 15.38.08
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 023.01.0300.723014.000 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		19	184,311,000	19	184,311,000	0	0
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	3	61,826,000	3	61,826,000	0	0
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	13	100,815,000	13	100,815,000	0	0
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	3	21,670,000	3	21,670,000	0	0
T O T A L				184,311,000		184,311,000		0

Semarang, 10 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala



Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

ASET TAK BERWUJUD

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

SEMESTER 1

Tanggal : 16/7/2024

NAMA UAKPB : 023.01.0300.723014.000 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Halama : 1 dari 1

JENIS TRANSAKSI :

Kode : DTBSTSSKT

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	ASET TAK BERWUJUD	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
T O T A L				

Semarang, 09 July 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

RINCIAN PER SUBSUB KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

SEMESTER 1

Tanggal : 16/07/2024 15.49.48

NAMA UAKPB : 023.01.0300.723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Halaman : 1 dari 1

JENIS TRANSAKSI :

Kode Lap : DTBSKSSKT

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
T O T A L				

Semarang, 09 July 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

BARANG BERSEJARAH

RINCIAN PER KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

SEMESTER 1

Tanggal : 16/7/2024

NAMA UAKPB : 023.01.0300.723014.000 - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Halama : 1 dari 1

JENIS TRANSAKSI :

Kode : DTBSSSSKT

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	BARANG BERSEJARAH	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
T O T A L				

Semarang, 09 July 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala

Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

TANGGAL : 10-07-2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
KODE UAKPB : 723014

Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

SEMARANG, 10 JULI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kepala



Bhimo Widyo Andoko
NIP. NIP 196808051994031001

DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

TANGGAL : 10-07-2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 723014

Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

SEMARANG, 10 JULI 2024

PENANGGUNG JAWAB UAKPB

Kepala



Bhimo Widyo Andoko

NIP. NIP 196808051994031001

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 10/07/24 6:33 AM
Tanggal : 10/07/24 9:41 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAKPB : 723014 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	1,997,100
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	928,400
1010301003	Penjepit Kertas	972,990
1010301004	Penghapus/Korektor	130,250
1010301005	Buku Tulis	772,540
1010301006	Ordner Dan Map	6,576,800
1010301007	Penggaris	97,300
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	163,980
1010301010	Alat Perekat	781,820
1010301011	Stadler HD	1,163,800
1010301012	Staples	258,800
1010301013	Isi Staples	27,600
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	541,610
1010302001	Kertas HVS	5,315,400
1010302002	Berbagai Kertas	728,300
1010302003	Kertas Cover	1,080,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	79,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	24,120
1010304004	Tinta/Toner Printer	5,131,000
1010304005	Disket	571,200
1010304006	USB/Flash Disk	685,700
1010304010	Mouse	1,058,400
1010304011	CD/DVD	919,200
1010306010	Batu Baterai	1,515,000
Jumlah Barang Konsumsi		**31,520,310**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	530,435
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	415,605
1010305012	Pengharum Ruangan	2,655,980
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**3,602,020**
TOTAL		**35,122,330**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH
KPPN SEMARANG I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 723014
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	335,042,788,000	335,042,788,000	0
2	Belanja	166,553,076,346	166,553,076,346	0
3	Pengembalian Belanja	-21,050,206	-21,050,206	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	99,879,550	99,879,550	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JUL-24

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA MODUL PERSEDIAAN,
MODUL ASET DAN MODUL GLP
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN DAN BARANG
SEKRETARIAT JENDERAL
SEMSTER I TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di LLDIKTI Wilayah VI, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Rina Hapsari
NIP : 198908262015042003
Jabatan : Analis BMN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kompilator pada Modul Persediaan, Modul Aset *Tetap LLDIKTI Wilayah VI* untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Yolanda Sarah Dilla
NIP : 199008132019032020
Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kompilator pada Modul GLP *LLDIKTI Wilayah VI* untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada Lingkup Internal Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang *Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI* dengan cara membandingkan data Modul Persediaan, Modul Aset, dan Modul GLP dari aplikasi SAKTI dengan hasil sebagai berikut:

III. Tabel Kesepakatan

a. Saldo Awal Tahun 2024 (Periode 1 Januari 2024)

	Uraian Akun	Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
A	**ASET LANCAR**	**26.073.390**	**26.073.390**	-
1	Persediaan	26.073.390	26.073.390	-
B	**ASET TETAP**	**107.181.524.073**	**107.181.524.073**	**-**
1	Tanah	91.868.492.000	91.868.492.000	**-**
2	Peralatan dan Mesin	7.581.854.164	7.581.854.164	**-**
3	Gedung dan Bangunan	21.616.397.751	21.616.397.751	**-**
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	532.291.317	532.291.317	**-**
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	**-**
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	**-**
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(14.417.511.159)	(14.417.511.159)	**-**
C	**ASET LAINNYA**	**112.279.750**	**112.279.750**	**-**
1	Aset Tak Berwujud	332.601.500	332.601.500	**-**
2	Aset Lain-Lain	2.450.000	2.450.000	**-**
3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(222.771.750)	(222.771.750)	**-**
D	**Total Intrakomptabel (A+B+C)**	**107.319.877.213**	**107.319.877.213**	**-**
E	**Ekstra Komptabel**	**15.612.039**	**-**	**15.612.039**
1	Peralatan dan Mesin	88.413.725	-	**88.413.725**
2	Gedung dan Bangunan	-	-	**-**
3	Aset Lain-lain	-	-	**-**
4	Aset Lain-Lain/Aset Yang Tidak Digunakan	-	-	**-**
5	Akumulasi Penyusutan Extrakomptabe	(72.801.686)	-	**(72.801.686)**
	Total Gabungan (D+E)	**107.335.489.252**	**107.319.877.213**	**15.612.039**

Selisih sebesar **Rp Rp 15.612.039-,-** merupakan Aset Ekstrakomptabel yang hanya tercatat di Laporan BMN.

b. Saldo per 30 Juni 2024

Uraian Akun		Modul Persediaan dan Modul Aset	Modul GLP	Selisih
A	**ASET LANCAR**	**35.122.330**	**35.122.330**	-
1	Persediaan	35.122.330	35.122.330	-
B	**ASET TETAP**	**106.545.348.552**	**106.545.348.552**	**-**
1	Tanah	91.868.492.000	91.868.492.000	-
2	Peralatan dan Mesin	7.766.165.164	7.766.165.164	-
3	Gedung dan Bangunan	21.616.397.751	21.616.397.751	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	532.291.317	532.291.317	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(15.237.997.680)	(15.237.997.680)	-
C	**ASET LAINNYA**	**70.704.562**	**70.704.562**	**-**
1	Aset Tak Berwujud	332.601.500	332.601.500	-
2	Aset Tak Berwujud dalam Pengerj	-	-	-
3	Akumulasi Amortisasi ATB	(261.896.938)	(261.896.938)	-
4	Aset Lain-Lain/Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	2.450.000	2.450.000	-
5	Akumulasi AT Yang tidak Digunakan dalam operasional	(2.450.000)	(2.450.000)	-
5	Akumulasi ATB yang tidak digunakan dalam operasional	-	-	-
D	**Total Intrakomptabel (A+B+C)**	**106.651.175.444**	**106.651.175.444**	**-**
E	**Ekstra Komptabel**	**6.867.699**	**-**	**6.867.699**
1	Peralatan dan Mesin	88.413.725	-	88.413.725
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
4	Aset Lain-Lain/Aset Yang Tidak Digunakan	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	(81.546.026)	-	(81.546.026)
F	**Total Gabungan (D+E)**	**106.658.043.143**	**106.651.175.444**	**6.867.699**

Selisih sebesar **Rp 6.867.699-** merupakan Aset Ekstrakomptabel yang hanya tercatat di Laporan BMN.

IV. Informasi Lainnya :

Terlampir dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Semesetr 1 Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN *Sekretariat Jenderal* periode 30 Juni Tahun 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juli 2024

Operator Aset Tetap,



Rina Hapsari
NIP 198908262015042003

Operator GLP,



Yolanda Sarah Dilla
NIP 199008132019032020

Mengetahui,
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Penguna Barang



Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan PawiyatanLuhur I/1 BendanDhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521

BERITA STOCK OPNAME PERSEDIAAN
SEMESTER I TAHUN 2024
Nomor : 415/LL6/LK.05.05/2024

Pada hari ini, hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat diselenggarakan Stock Opname Barang Persediaan per: 30 Juni 2024 di Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah VI Kode Satker 723014
Dengan rincian sebagai berikut :

Hasil laporan persedian pada aplikasi sakti di Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah VI Satker 723014, adalah;

1)	Barang Konsumsi (117111)	Rp	31.520.310,00
2)	Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	Rp	3.602.020,00
3)	Saldo Akun Persediaan	Rp	35.122.330,00

Demikian Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan ini dibuat untuk ditindak lanjuti masing-masing pihak.

Operator Modul Aset Tetap

Rina Hapsari
NIP 198908262015042003

Operator Modul Persediaan

Andhi Prasetya
NIP 198204302010121004

Kepala Gudang

Budi Cholisetiawan

Petugas Inventaris

M. Zaenudin

Mengetahui Penanggung Jawab UAKPB

Bhima Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Lampiran BA-Stock Opname
Nomor : 415/LL6/LK.05.05/2024
Periode : 30 Juni 2024

No	Nama Barang	Banyaknya / Volume	Satuan / Ukuran
	Barang Konsumsi		
1	Stabilo	20	Buah
2	Bollpoint Bolliner	0	Buah
3	Pensil	5	Buah
4	Spidol White Board Besar Permanent	8	buah
5	Bollpoint Warna Merah	0	Dusin
6	Bollpoint Standart Hitam	8	Buah
7	Bolpoin warna biru	129	buah
8	Boardmarker	20	buah
9	Tinta Stempel Flash 15ml Ungu	13	Buah
10	Tinta stempel flash 15ml biru	11	buah
11	Binder Clips No. 107	3	Pack
12	Binder Clips No. 111	44	Pack
13	Binder Clips No. 155	40	Pack
14	Binder Clips No. 200	20	Pack
15	Binder Clips No. 260	4	Dos
16	Paper Klip No.3	51	Dos
17	Binder Clipp no 105	24	Pack
18	Tipek	12	Buah
19	Penghapus Karet	37	Buah
20	Tipe Ex Gulung	5	Buah
21	Buku Agenda Folio isi 100 lb	17	Buah
22	Buku Ekspedisi	14	Buah
23	Buku Kwitansi Besar	18	Buah
24	Buku Block Note	0	buah
25	Buku Tulis Batik 100 lbr	0	Buah
26	Ordner	0	Buah
27	Box File	0	Buah
28	Stopmap Kop	269	Lembar
29	Stopmap Sambutan	30	Lembar
30	Stopmap Plastik Folio	0	Pak
31	Map Bussines File	10	Lembar
32	Stopmap Plastik Kancing	26	Lusin
33	Stopmap Gantung	0	Buah
34	Stopmap LLDIKTI	500	Buah
35	Penggaris Plastik	5	Buah
36	Penggaris Besi 30 cm	11	Buah
37	Cuter Besar	8	Buah
38	Cuter Kecil	0	Buah
39	Gunting kertas	3	Buah
40	isi pisau cuter	0	pack
41	Isi cutter kecil	0	Buah
42	Lakban Linen Besar	5	Roll
43	Lakban Linen Kecil	17	Roll
44	Isolasi Bening Besar	6	Roll
45	Isolasi Bening Kecil	7	Roll
46	Double Tape	14	Roll

No	Nama Barang	Banyaknya / Volume	Satuan / Ukuran
47	Lem Kertas Stik	8	Buah
48	Lem Alteco	0	Buah
49	Double Tape Hijau	24	Roll
50	Lak Band Kertas	8	Buah
51	Isi Stapler Hechnaces No.10	19	Dos
52	Remover Pembuka Steples	3	Buah
53	Isi Stapler No.3 Max	30	Dos
54	Stapler No.50 Max	12	Pcs
55	Stapler Hechmacine HD-10	2	Buah
56	Staples Jilid HD 23513	2	buah
57	Isi staples 23 10	1	dus
58	Post It	11	Pad
59	Post It Kotak 3M	7	Pad
60	Tempat Isolasi	0	Buah
61	Kalkulator	4	Buah
62	Pos it warna plastik	0	buah
63	Kertas A4 70 gram	23	Rim
64	Kertas A4 80 gram	21	Rim
65	Kertas F4 70 gram	53	Rim
66	Kertas F4 75 gram	0	Rim
67	Kertas Stiker	2	Pak
68	Kertas Stensil Folio	4	Rim
69	Kertas Fax Thermal Paper Oji	10	Roll
70	Kertas Photo	0	Pak
71	Kertas BC	2	Pak
72	Kertas Thermal	8	Roll
73	Kertas Surat Perintah Membayar (SPM)	8	rim
74	Amplop Coklat Kop Ukuran A4	0	Pak
75	Amplop Putih Ukuran 90	0	Dus
76	Kertas BC	0	Pak
77	Mika Cover	2	Pak
78	Pensil 2B	6	Buah
79	Tinta Printer	27	Botol
80	Toner Original 12A	1	Buah
81	Toner Original 85A	1	Buah
82	Toner Original 35A	0	Buah
83	CD RW (Verbatin)	53	Keping
84	DVD RW Single Pack	36	KEPING
85	Flash Disk 8 GB	10	buah
86	Mouse Pad	7	Buah
87	Keyboard	0	Buah
88	Mouse Logitec M170	9	Buah
89	DVD R	100	Keping
90	Cover DVD	122	Buah
91	Baterai AA	7	Set
92	Baterai Kotak	31	Buah
93	Batu Baterai Kotak 9 Volt Recharger	2	Pcs
94	Batu Baterai Ukuran C (ABC)	7	Buah
95	Baterai AAA	34	Set
96	Sabit Kupeng	0	Buah
97	Sabit Besar	0	Buah
98	Ungkal	0	buah

No	Nama Barang	Banyaknya / Volume	Satuan / Ukuran
	Bahan untuk Pemeliharaan		
99	Sapu Lidi	0	Buah
100	Kuwas 3	0	Buah
101	Sapu Ijuk	0	pcs
102	Tisu Kotak	46	Box
103	Tisu gulung	35	Roll
104	Slaber Kering	0	Buah
105	Pel Basah	0	Buah
106	Kain Pel Basah	0	Buah
107	Bowl Cleaner	0	galon
108	Tisu kotak makan	0	Box
109	Botol Spray	0	Buah
110	Ember	0	Buah
111	Keset	0	Buah
112	Ingkrak Kayu	0	Buah
113	Tempat Sampah 10lt	0	Buah
114	Tempat Sampah	0	Buah
115	Wipol	0	Liter
116	Sabun Cuci Tangan	0	Jerigen
117	Dry Dust Cleaner	0	Jerigen
118	Pembersih Kaca	0	Buah
119	Cairan Pembasmi Serangga (Baygon)	12	Botol
120	Porstex	0	Jerigen
121	Pledge Natural Beauty	0	Botol
122	Pembersih lantai	0	jerigen
123	Kapur Barus	0	Bungkus
124	Bayfresh	21	Botol
125	Alat Pengharum Ruangan Matic	2	Buah
126	Pengharum Ruangan Gantung	55	Pcs
127	Pengharum Ruangan Matic Refil	51	Botol
	JUMLAH	2.351	

Kepala Gudang

Budi Cholisetiawan

Petugas Inventaris

M. Zaenudin

Lampiran BA-Stock Opname
Nomor : 415/LL6/LK.05.05/2024
Periode : 30 Juni 2024

No	Nama Barang	Banyaknya / Volume	Satuan / Ukuran	Nilai (Rp)
	Barang Konsumsi			31.520.310
1	Stabilo	20	Buah	221.200
2	Bollpoint Bolliner	0	Buah	0
3	Pensil	5	Buah	30.000
4	Spidol White Board Besar Permanent	8	buah	84.000
5	Bollpoint Warna Merah	0	Dusin	0
6	Bollpoint Standart Hitam	8	Buah	21.600
7	Bolpoin warna biru	129	buah	1.427.300
8	Boardmarker	20	buah	213.000
9	Tinta Stempel Flash 15ml Ungu	13	Buah	471.300
10	Tinta stempel flash 15ml biru	11	buah	457.100
11	Binder Clips No. 107	3	Pack	20.790
12	Binder Clips No. 111	44	Pack	202.100
13	Binder Clips No. 155	40	Pack	271.500
14	Binder Clips No. 200	20	Pack	168.500
15	Binder Clips No. 260	4	Dos	104.000
16	Paper Klip No.3	51	Dos	110.100
17	Binder Clipp no 105	24	Pack	96.000
18	Tipek	12	Buah	72.000
19	Penghapus Karet	37	Buah	24.050
20	Tipe Ex Gulung	5	Buah	34.200
21	Buku Agenda Folio isi 100 lb	17	Buah	475.800
22	Buku Ekspedisi	14	Buah	151.200
23	Buku Kwitansi Besar	18	Buah	145.540
24	Buku Block Note	0	buah	0
25	Buku Tulis Batik 100 lbr	0	Buah	0
26	Ordner	0	Buah	0
27	Box File	0	Buah	0
28	Stopmap Kop	269	Lembar	807.000
29	Stopmap Sambutan	30	Lembar	64.800
30	Stopmap Plastik Folio	0	Pak	0
31	Map Bussines File	10	Lembar	26.400
32	Stopmap Plastik Kancing	26	Lusin	678.600
33	Stopmap Gantung	0	Buah	0
34	Stopmap LLDIKTI	500	Buah	5.000.000
35	Penggaris Plastik	5	Buah	12.600
36	Penggaris Besi 30 cm	11	Buah	84.700
37	Cuter Besar	8	Buah	136.080
38	Cuter Kecil	0	Buah	0
39	Gunting kertas	3	Buah	27.900
40	isi pisau cuter	0	pack	0
41	Isi cutter kecil	0	Buah	0
42	Lakban Linen Besar	5	Roll	105.000
43	Lakban Linen Kecil	17	Roll	173.500
44	Isolasi Bening Besar	6	Roll	107.500
45	Isolasi Bening Kecil	7	Roll	48.300
46	Double Tape	14	Roll	63.000
47	Lem Kertas Stik	8	Buah	36.720

No	Nama Barang	Banyaknya / Volume	Satuan / Ukuran	Nilai (Rp)
48	Lem Alteco	0	Buah	0
49	Double Tape Hijau	24	Roll	193.800
50	Lak Band Kertas	8	Buah	54.000
51	Isi Stapler Hechnaces No.10	19	Dos	95.000
52	Remover Pembuka Steples	3	Buah	195.000
53	Isi Stapler No.3 Max	30	Dos	180.000
54	Stapler No.50 Max	12	Pcs	693.800
55	Stapler Hechmacine HD-10	2	Buah	50.000
56	Staples Jilid HD 23S13	2	buah	208.800
57	Isi staples 23 10	1	dus	27.600
58	Post It	11	Pad	58.410
59	Post It Kotak 3M	7	Pad	126.000
60	Tempat Isolasi	0	Buah	0
61	Kalkulator	4	Buah	357.200
62	Pos it warna plastik	0	buah	0
63	Kertas A4 70 gram	23	Rim	1.113.000
64	Kertas A4 80 gram	21	Rim	1.257.900
65	Kertas F4 70 gram	53	Rim	2.944.500
66	Kertas F4 75 gram	0	Rim	0
67	Kertas Stiker	2	Pak	36.500
68	Kertas Stensil Folio	4	Rim	136.800
69	Kertas Fax Thermal Paper Oji	10	Roll	195.000
70	Kertas Photo	0	Pak	0
71	Kertas BC	2	Pak	120.000
72	Kertas Thermal	8	Roll	240.000
73	Kertas Surat Perintah Membayar (SPM)	8	rim	1.080.000
74	Amplop Coklat Kop Ukuran A4	0	Pak	0
75	Amplop Putih Ukuran 90	0	Dus	0
76	Kertas BC	0	Pak	0
77	Mika Cover	2	Pak	79.000
78	Pensil 2B	6	Buah	24.120
79	Tinta Printer	27	Botol	2.215.000
80	Toner Original 12A	1	Buah	1.536.000
81	Toner Original 85A	1	Buah	1.380.000
82	Toner Original 35A	0	Buah	0
83	CD RW (Verbatin)	53	Keping	445.200
84	DVD RW Single Pack	36	KEPING	126.000
85	Flash Disk 8 GB	10	buah	580.000
86	Mouse Pad	7	Buah	105.700
87	Keyboard	0	Buah	0
88	Mouse Logitec M170	9	Buah	1.058.400
89	DVD R	100	Keping	480.000
90	Cover DVD	122	Buah	439.200
91	Baterai AA	7	Set	126.000
92	Baterai Kotak	31	Buah	542.500
93	Batu Baterai Kotak 9 Volt Recharger	2	Pcs	189.000
94	Batu Baterai Ukuran C (ABC)	7	Buah	52.500
95	Baterai AAA	34	Set	605.000
96	Sabit Kupeng	0	Buah	0
97	Sabit Besar	0	Buah	0
98	Ungkal	0	buah	0

No	Nama Barang	Banyaknya / Volume	Satuan / Ukuran	Nilai (Rp)
	Bahan untuk Pemeliharaan			3.602.020
99	Sapu Lidi	0	Buah	0
100	Kuwas 3	0	Buah	0
101	Sapu Ijuk	0	pcs	0
102	Tisu Kotak	46	Box	321.310
103	Tisu gulung	35	Roll	209.125
104	Slaber Kering	0	Buah	0
105	Pel Basah	0	Buah	0
106	Kain Pel Basah	0	Buah	0
107	Bowl Cleaner	0	galon	0
108	Tisu kotak makan	0	Box	0
109	Botol Spray	0	Buah	0
110	Ember	0	Buah	0
111	Keset	0	Buah	0
112	Ingkrak Kayu	0	Buah	0
113	Tempat Sampah 10lt	0	Buah	0
114	Tempat Sampah	0	Buah	0
115	Wipol	0	Liter	0
116	Sabun Cuci Tangan	0	Jerigen	0
117	Dry Dust Cleaner	0	Jerigen	0
118	Pembersih Kaca	0	Buah	0
119	Cairan Pembasmi Serangga (Baygon)	12	Botol	415.605
120	Porstex	0	Jerigen	0
121	Pledge Natural Beauty	0	Botol	0
122	Pembersih lantai	0	jerigen	0
123	Kapur Barus	0	Bungkus	0
124	Bayfresh	21	Botol	413.600
125	Alat Pengharum Ruangan Matic	2	Buah	127.500
126	Pengharum Ruangan Gantung	55	Pcs	566.825
127	Pengharum Ruangan Matic Refil	51	Botol	1.548.055
	JUMLAH	2.353		35.122.330

Kepala Gudang

Budi Cholisetiawan

Petugas Inventaris

M. Zaenudin

UAPB : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UAPPB-E1 : SEKRETARIAT JENDERAL
UAPPB-W : PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
KODE UAKPB : 023.01.0300.723014.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-JAN-2024	MUTASI		NILAI S/D 30-JUN-2024
			TAMBAH	KURANG	
117111	Barang Konsumsi	24.131.720	23.026.980	15.638.390	31,520,310
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.941.670	6.458.055	4.797.705	3.602.020
	Jumlah	26.073.390	29.485.035	20.436.095	35,122,330

Disetujui tanggal : 30-06-2024
Kuasa Pengguna Barang
Kepala

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Semarang, 30-06-2024
Petugas Pengelola Persediaan

Andhi Prasetya
NIP 198204302010121004

UAPB : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAPPB-E1 : SEKRETARIAT JENDERAL

UAPPB-W : PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,997,100
000002	Stabilo	221,200
000003	Bollpoint Bolliner	0
000004	Pensil	30,000
000011	Spidol White Board Besar Permanent	84,000
000018	Bollpoint Warna Merah	0
000020	Bollpoint Standart Hitam	21,600
000021	Bolpoin warna biru	1,427,300
000022	Boardmarker	213,000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	928,400
000003	Tinta Stempel Flash 15ml Ungu	471,300
000006	Tinta stempel flash 15ml biru	457,100
1010301003	Penjepit Kertas	972,900
000001	Binder Clips No. 107	20,790
000002	Binder Clips No. 111	202,100
000003	Binder Clips No. 155	271,500
000004	Binder Clips No. 200	168,500
000007	Binder Clips No. 260	104,000
000008	Paper Klip No.3	110,100
000010	Binder Clipp no 105	96,000
1010301004	Penghapus/Korektor	130,250
000001	Tipek	72,000
000002	Penghapus Karet	24,050
000007	Tipe Ex Gulung	34,200
1010301005	Buku Tulis	772,540
000001	Buku Agenda Folio isi 100 lb	475,800
000004	Buku Ekspedisi	151,200
000005	Buku Kwitansi Besar	145,540
000007	Buku Block Note	0
000008	Buku Tulis Batik 100 lbr	0
1010301006	Ordner Dan Map	6,576,800
000001	Ordner	0
000002	Box File	0
000003	Stopmap Kop	607,000
000004	Stopmap Sambutan	64,800
000007	Stopmap Plastik Folio	0
000012	Map Bussines File	26,400
000014	Stopmap Plastik Kancing	678,600
000017	Stopmap Gantung	0
000018	Stopmap LLDIKTI	5,000,000
1010301007	Penggaris	97,300

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2024
000002	Penggaris Plastik	12,600
000003	Penggaris Besi 30 cm	84,700
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	163,980
000001	Cuter Besar	136,080
000002	Cuter Kecil	0
000003	Gunting kertas	27,900
000006	isi pisau cuter	0
000009	Isi cutter kecil	0
1010301010	Alat Perekat	781,820
000001	Lakban Linen Besar	105,000
000002	Lakban Linen Kecil	173,500
000003	Isolasi Bening Besar	107,500
000004	Isolasi Bening Kecil	48,300
000005	Double Tape	63,000
000006	Lem Kertas Stik	36,720
000007	Lem Alteco	0
000008	Double Tape Hijau	193,800
000015	Lak Band Kertas	54,000
1010301011	Stadler HD	1,163,800
000003	Isi Stapler Hechnaces No.10	95,000
000005	Remover Pembuka Steples	195,000
000008	Isi Stapler No.3 Max	180,000
000009	Stapler No.50 Max	693,800
1010301012	Staples	258,800
000001	Stapler Hechmacine HD-10	50,000
000003	Staples Jilid HD 23S13	208,800
1010301013	Isi Staples	27,600
000001	Isi staples 23 10	27,600
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	541,610
000002	Post It	58,410
000003	Post It Kotak 3M	126,000
000004	Tempat Isolasi	0
000022	Kalkulator	357,200
000023	Pos it warna plastik	0
1010302001	Kertas HVS	5,315,400
000001	Kertas A4 70 gram	1,113,000
000002	Kertas A4 80 gram	1,257,900
000003	Kertas F4 70 gram	2,944,500
000006	Kertas F4 75 gram	0
1010302002	Berbagai Kertas	728,300
000001	Kertas Stiker	36,500
000006	Kertas Stensil Folio	136,800
000008	Kertas Fax Thermal Paper Oji	195,000
000011	Kertas Photo	0
000013	Kertas BC	120,000

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2024
000014	Kertas Thermal	240,000
1010302003	Kertas Cover	1,080,000
000010	Kertas Surat Perintah Membayar (SPM)	1,080,000
1010302004	Amplop	0
000003	Amplop Coklat Kop Ukuran A4	0
000008	Amplop Putih Ukuran 90	0
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	79,000
000001	Kertas BC	0
000002	Mika Cover	79,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	24,120
000004	Pensil 2B	24,120
1010304004	Tinta/Toner Printer	5,131,000
000001	Tinta Printer	2,215,000
000067	Toner Original 12A	1,536,000
000068	Toner Original 85A	1,380,000
000069	Toner Original 35A	0
1010304005	Disket	571,200
000001	CD RW (Verbatin)	445,200
000003	DVD RW Single Pack	126,000
1010304006	USB/Flash Disk	685,700
000006	Flash Disk 8 GB	580,000
000010	Mouse Pad	105,700
000013	Keyboard	0
1010304010	Mouse	1,058,400
000001	Mouse Logitec M170	1,058,400
1010304011	CD/DVD	919,200
000001	DVD R	480,000
000002	Cover DVD	439,200
1010306010	Batu Baterai	1,515,000
000001	Baterai AA	126,000
000002	Baterai Kotak	542,500
000006	Batu Baterai Kotak 9 Volt Recharger	189,000
000008	Batu Baterai Ukuran C (ABC)	52,500
000010	Baterai AAA	605,000
1010307007	Perlengkapan Lapangan	0
000001	Sabit Kupeng	0
000002	Sabit Besar	0
000019	Ungkal	0
	Jumlah per Akun	31,520,310
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	0
000001	Sapu Lidi	0
000002	Kuwas 3	0
000008	Sapu Ijuk	0
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	530,425

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2024
000001	Tisu Kotak	321,310
000002	Tisu gulung	209,125
000003	Slaber Kering	0
000004	Pel Basah	0
000005	Kain Pel Basah	0
000013	Bowl Cleaner	0
000022	Tisu kotak makan	0
000030	Botol Spray	0
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	0
000001	Ember	0
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	0
000001	Keset	0
000003	Ingkrak Kayu	0
000004	Tempat Sampah 10lt	0
000005	Tempat Sampah	0
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	415,605
000001	Wipol	0
000003	Sabun Cuci Tangan	0
000004	Dry Dust Cleaner	0
000005	Pembersih Kaca	0
000008	Cairan Pembasmi Serangga (Baygon)	415,605
000010	Porstex	0
000011	Pledge Natural Beauty	0
000013	Pembersih lantai	0
1010305012	Pengharum Ruangan	2,655,990
000001	Kapur Barus	0
000002	Bayfresh	413,600
000003	Alat Pengharum Ruangan Matic	127,500
000005	Pengharum Ruangan Gantung	566,825
000020	Pengharum Ruangan Matic Refil	1,548,055
	Jumlah per Akun	3,602,020

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2024
	Total Jumlah	35,122,330

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 30-06-2024
Kuasa Pengguna Barang

Kepala

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Semarang, 30-06-2024
Petugas Pengelola Persediaan

Andhi Prasetya
NIP 198204302010121004

UAPB : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UAPPB-E1 : SEKRETARIAT JENDERAL

UAPPB-W : PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2024		MUTASI			NILAI S/D 30-06-2024	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
	ALAT TULIS		614,000					1,097,100
000002	Stabilo	21	232,000	0	1	-1	20	221,200
000003	Ballpoint Balliner	0	0	0	0	0	0	0
000004	Pensil	5	30,000	0	0	0	5	30,000
000011	Spidol White Board Besar Permanent	2	21,000	10	4	6	8	84,000
000018	Ballpoint Warna Merah	0	0	0	0	0	0	0
000020	Ballpoint Standart Hitam	21	83,000	50	63	-13	8	21,600
000021	Bolpoin warna biru	45	160,000	150	66	84	129	1,427,300
000022	Boardmarker	10	88,000	10	0	10	20	213,000
	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL		225,000					925,400
000003	Tinta Stempel Flash 15ml Ungu	2	90,000	15	4	11	13	471,300
000008	Tinta stempel flash 15ml biru	3	135,000	15	7	8	11	457,100
	PENJEPIT KERTAS		959,400					972,990
000001	Binder Clips No. 107	0	0	20	17	3	3	20,790
000002	Binder Clips No. 111	56	254,900	0	12	-12	44	202,100
000003	Binder Clips No. 155	49	319,200	0	9	-9	40	271,500
000004	Binder Clips No. 200	27	214,000	0	7	-7	20	168,500
000007	Binder Clips No. 260	4	104,000	0	0	0	4	104,000
000008	Paper Klip No.3	4	8,400	50	3	47	51	110,100
000010	Binder Clipp no 105	19	58,900	20	15	5	24	96,000
	PENGHAPUS/KOREKTOR		70,400					130,250
000001	Tipek	5	36,000	10	3	7	12	72,000
000002	Penghapus Karet	40	26,000	0	3	-3	37	24,050
000007	Tipe Ex Gulung	1	8,400	5	1	4	5	34,200

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2024		MUTASI			NILAI S/D 30-06-2024	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
	BUKU TULIS		641,500					772,540
000001	Buku Agenda Folio isi 100 lb	17	475,800	0	0	0	17	475,800
000004	Buku Ekspedisi	14	151,200	0	0	0	14	151,200
000005	Buku Kwitansi Besar	2	14,500	30	14	16	18	145,540
000007	Buku Block Note	0	0	0	0	0	0	0
000008	Buku Tulis Batik 100 lbr	0	0	0	0	0	0	0
	ORDNER DAN MAP		2,245,400					6,576,800
000001	Ordner	4	96,000	0	4	-4	0	0
000002	Box File	0	0	0	0	0	0	0
000003	Stopmap Kop	179	537,000	500	410	90	269	807,000
000004	Stopmap Sambutan	30	64,800	0	0	0	30	64,800
000007	Stopmap Plastik Folio	0	0	0	0	0	0	0
000012	Map Bussines File	30	79,200	0	20	-20	10	26,400
000014	Stopmap Plastik Kancing	38	991,400	0	12	-12	26	678,600
000017	Stopmap Gantung	0	0	0	0	0	0	0
000018	Stopmap LLDIKTI	40	480,000	500	40	460	500	5,000,000
	PENGGARIS		35,700					97,300
000002	Penggaris Plastik	5	12,600	0	0	0	5	12,600
000003	Penggaris Besi 30 cm	3	23,100	10	2	8	11	84,700
	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)		123,600					163,980
000001	Cuter Besar	4	75,600	8	4	4	8	136,080
000002	Cuter Kecil	0	0	0	0	0	0	0
000003	Gunting kertas	5	50,000	10	12	-2	3	27,900
000006	isi pisau cuter	0	0	0	0	0	0	0
000009	Isi cutter kecil	0	0	0	0	0	0	0
	ALAT PEREKAT		603,500					781,820
000001	Lakban Linen Besar	3	63,000	15	13	2	5	105,000

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2024		MUTASI			NILAI S/D 30-06-2024	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
000002	Lakban Linen Kecil	13	125,600	10	6	4	17	173,500
000003	Isolasi Bening Besar	7	113,400	15	16	-1	6	107,500
000004	Isolasi Bening Kecil	7	67,700	10	10	0	7	48,300
000005	Double Tape	6	25,500	10	2	8	14	63,000
000006	Lem Kertas Stik	5	27,500	20	17	3	8	36,720
000007	Lem Alteco	0	0	0	0	0	0	0
000008	Double Tape Hijau	14	126,800	10	0	10	24	193,800
000015	Lak Band Kertas	8	54,000	0	0	0	8	54,000
	STADLER HO		1,083,800					1,163,800
000003	Isi Stapler Hechmaces No.10	10	15,000	20	11	9	19	95,000
000005	Remover Pembuka Steples	3	195,000	0	0	0	3	195,000
000008	Isi Stapler No.3 Max	30	180,000	0	0	0	30	180,000
000009	Stapler No.50 Max	12	693,800	0	0	0	12	693,800
	STAPLES		308,800					258,800
000001	Stapler Hechmacine HD-10	4	100,000	0	2	-2	2	50,000
000003	Staples Jilid HD 23S13	2	208,800	0	0	0	2	208,800
	ISI STAPLES		27,600					27,600
000001	Isi staples 23 10	1	27,500	0	0	0	1	27,600
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA		517,900					541,610
000002	Post It	6	48,000	38	33	5	11	58,410
000003	Post It Kotak 3M	3	22,500	27	23	4	7	126,000
000004	Tempat Isolasi	0	0	0	0	0	0	0
000022	Kalkulator	5	446,500	0	1	-1	4	357,200
000023	Pos it warna plastik	0	0	0	0	0	0	0
	KERTAS HVS		5,519,100					5,315,400
000001	Kertas A4 70 gram	51	2,397,000	65	93	-28	23	1,113,000
000002	Kertas A4 80 gram	33	1,967,100	0	12	-12	21	1,257,900

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2024		MUTASI			NILAI S/D 30-06-2024	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
000003	Kertas F4 70 gram	22	1,155,000	70	39	31	53	2,944,500
000006	Kertas F4 75 gram	0	0	0	0	0	0	0
	BERBAGAI KERTAS		691,800					728,300
000001	Kertas Stiker	0	0	20	18	2	2	36,500
000005	Kertas Stensil Folio	4	136,800	0	0	0	4	136,800
000008	Kertas Fax Thermal Paper Oji	10	195,000	0	0	0	10	195,000
000011	Kertas Photo	0	0	0	0	0	0	0
000013	Kertas BC	2	120,000	0	0	0	2	120,000
000014	Kertas Thermal	8	240,000	0	0	0	8	240,000
	KERTAS COVER		1,080,000					1,080,000
000010	Kertas Surat Perintah Membayar (SPM)	8	1,080,000	0	0	0	8	1,080,000
	AMPLOP		0					0
000003	Amplop Coklat Kop Ukuran A4	0	0	0	0	0	0	0
000005	Amplop Putih Ukuran 90	0	0	0	0	0	0	0
	KERTAS DAN COVER LAINNYA		79,000					79,000
000001	Kertas BC	0	0	0	0	0	0	0
000002	Mika Cover	2	79,000	0	0	0	2	79,000
	BAHAN CETAK LAINNYA		24,120					24,120
000004	Pensil 2B	6	24,120	0	0	0	6	24,120
	TINTA/TONER PRINTER		4,051,000					5,131,000
000001	Tinta Printer	14	1,135,000	30	17	13	27	2,215,000
000067	Toner Original 12A	1	1,536,000	0	0	0	1	1,536,000
000068	Toner Original 85A	1	1,380,000	0	0	0	1	1,380,000
000069	Toner Original 35A	0	0	0	0	0	0	0
	DISKET		571,200					571,200
000001	CD RW (Verbatin)	53	445,200	0	0	0	53	445,200
000003	DVD RW Single Pack	36	126,000	0	0	0	36	126,000

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2024		MUTASI			NILAI S/D 30-06-2024	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
	USB/FLASH DISK		757,600					685,700
000006	Flash Disk 8 GB	11	621,700	0	1	-1	10	580,000
000010	Mouse Pad	9	135,900	0	2	-2	7	105,700
000013	Keyboard	0	0	0	0	0	0	0
	MOUSE		562,500					1,058,400
000001	Mouse Logitec M170	5	562,500	10	6	4	9	1,058,400
	CD/DVD		919,200					919,200
000001	DVD R	100	480,000	0	0	0	100	480,000
000002	Cover DVD	122	439,200	0	0	0	122	439,200
	SAPU DAN SIKAT		0					0
000001	Sapu Lidi	0	0	0	0	0	0	0
000002	Kuwas 3	0	0	0	0	0	0	0
000008	Sapu Ijuk	0	0	0	0	0	0	0
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP		169,605					630,435
000001	Tisu Kotak	9	62,055	150	113	37	46	321,310
000002	Tisu gulung	18	107,550	150	133	17	35	209,125
000003	Slaber Kering	0	0	0	0	0	0	0
000004	Pel Basah	0	0	0	0	0	0	0
000005	Kain Pel Basah	0	0	0	0	0	0	0
000013	Bowl Cleaner	0	0	0	0	0	0	0
000022	Tisu kotak makan	0	0	0	0	0	0	0
000030	Botol Spray	0	0	0	0	0	0	0
	EMBER, SLANG, DAN TEMPAT AIR LAINNYA		0					0
000001	Ember	0	0	0	0	0	0	0
	KESET DAN TEMPAT SAMPAH		0					0
000001	Keset	0	0	0	0	0	0	0
000003	Ingkrak Kayu	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2024		MUTASI			NILAI S/D 30-06-2024	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
000004	Tempat Sampah 10lt	0	0	0	0	0	0	0
000005	Tempat Sampah	0	0	0	0	0	0	0
	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH		85,790					415,605
000001	Wipol	0	0	0	0	0	0	0
000003	Sabun Cuci Tangan	0	0	2	2	0	0	0
000004	Dry Dust Cleaner	0	0	0	0	0	0	0
000005	Pembersih Kaca	0	0	0	0	0	0	0
000008	Cairan Pembasmi Serangga (Baygon)	2	68,790	16	6	10	12	415,605
000010	Porstex	0	0	0	0	0	0	0
000011	Pledge Natural Beauty	0	0	0	0	0	0	0
000013	Pembersih lantai	0	0	0	0	0	0	0
	PENGHARUM RUANGAN		1,683,275					2,655,980
000001	Kapur Barus	0	0	0	0	0	0	0
000002	Baytresh	22	437,100	0	1	-1	21	413,600
000003	Alat Pengharum Ruangan Matic	2	127,500	0	0	0	2	127,500
000005	Pengharum Ruangan Gantung	37	381,370	90	72	18	55	566,825
000020	Pengharum Ruangan Matic Refil	24	737,305	91	64	27	51	1,548,055
	BATU BATERAI		2,415,500					1,515,000
000001	Baterai AA	33	594,000	0	26	-26	7	126,000
000002	Baterai Kotak	40	700,000	0	9	-9	31	542,500
000006	Batu Baterai Kotak 9 Volt Recharger	2	189,000	0	0	0	2	189,000
000008	Batu Baterai Ukuran C (ABC)	11	82,500	0	4	-4	7	52,500
000010	Baterai AAA	48	850,000	0	14	-14	34	605,000
	PERLENGKAPAN LAPANGAN		0					0
000001	Sabit Kupeng	0	0	0	0	0	0	0
000002	Sabit Besar	0	0	0	0	0	0	0
000019	Ungkal	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

KODE UAKPB : 023.01.0300.723014

KODE	URAIAN	NILAI S/D 01-01-2024		MUTASI			NILAI S/D 30-06-2024	
		JUMLAH	RUPIAH	MASUK	KELUAR	JUMLAH	JUMLAH	RUPIAH
	Jumlah		26,073,390					35,122,310

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 30-06-2024
Kuasa Pengguna Barang
Kepala

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196805051994031001

Semarang, 30-06-2024
Petugas Pengelola Persediaan

Andhi Prasetya
NIP 198204302010121004

SEWA

SEWA

DIGUNAKAN UNTUK KANTOR APTISI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-284/MK.6/WKN.09/KNL.01/2021 24 Desember 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI

Yth. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
u.p.
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jalan Pawiyatan Luhur I No.1
Semarang

Sehubungan dengan surat Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI nomor 1549/LL6/LK.01.01/2021 tanggal 02 November 2021 hal Permohonan Penilaian Sewa atas Gedung dan Bangunan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q. LLDIKTI Wilayah VI berupa sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan sebagian Bangunan Gedung Kantor Permanen masing-masing seluas 150 m2 yang terletak di Jalan Pawiyatan Luhur I No.1 Kel. Bendan Duwur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dengan nilai perolehan BMN secara proporsional sebesar Rp751.106.960,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai Sewa sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara pembayaran dilakukan sekaligus.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan sewa yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, identitas calon penyewa dan jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa.
3. Pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian untuk periodesitas tahunan dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara.

4. Penyewaan...

4. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan setelah seluruh pembayaran uang sewa dibayar sekaligus dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dan bukti setor dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
5. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa untuk periodesitas tahunan.
6. Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang selaku Pengelola Barang dilampiri Salinan Keputusan Pelaksanaan Penyewaan, fotokopi perjanjian sewa menyewa, dan bukti setor pembayaran ke Rekening Kas Umum Negara.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Semarang

Partolo

Tembusan:
1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-284/MK.6/WKN.09/KNL.01/2021
Tanggal : 24 Desember 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI C.Q. LLDIKTI WILAYAH VI

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas Yang Disewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa Untuk 3 Tahun (Rp)	Peruntukan	Calon Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pawiyatan Luhur I No.1 Kel. Bendan Duwur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang	150 m2	3 (tiga) Tahun	27.000.000,00	Kantor	APTISI Wilayah VI Jawa Tengah
2.	4.01.01.01.001	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen		150 m2				
Jumlah							27.000.000,00		

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Semarang

Ditandatangani secara elektronik
Partolo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pandanaran Luhur I/1 Bendan Duwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
NOMOR : 39/LL6/LK.01.01/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI TAHUN 2022

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, penanganan, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI tentang Pelaksanaan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan Bangunan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

4. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Nomor S-284/MK.6/WKN.09/KNL.01/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PELAKSANAAN SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Persetujuan Pelaksanaan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 150 m^2 dan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 12 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang.

KEDUA : Besaran tarif sewa senilai Rp 27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 dengan cara pembayaran dilakukan sekaligus di depan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian.

KETIGA : Penyewa adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI Jawa Tengah.

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan sewa adalah 3 (tiga) tahun dimulai sejak surat perjanjian sewa ditandatangani oleh kedua belah pihak.

KELIMA : Periodesitas sewa ini berlaku sekali dan akan dilakukan pelaksanaan sewa ulang untuk periodesitas selanjutnya setelah kedua belah pihak sepakat.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Januari 2022
KEPALA LLDIKTI WILAYAH VI,

Bhimo Widyo Andoko, SH, MH
NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dituwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.kemdikbud.go.id

SURAT PERJANJIAN

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI

Dengan

**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)
WILAYAH VI JAWA TENGAH**

Tentang

**SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI**

Nomor : 122/LL6/LK.01.01/2022
Nomor : 22.01/E/APTISI 6/II/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Bhisma Widyo Andeko, SH, MH** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dituwur Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.** : Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VI Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK** dan untuk selanjutnya secara berdiri sendiri disebut **PIHAK.**

KEDUA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang digunakan sebagai kantor/tempat kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR SEWA

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
(3) Surat Persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor : S-284/MK.6/WKN.09/KNL.01/2021 tentang Persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.
(4) Surat Keputusan Persetujuan Sewa Nomor : 39/LL6/LK.01.01/2022 tentang pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022.
(5) Surat Permohonan sewa dari APTISI Wilayah VI Jawa Tengah Nomor : 21.21/E./APTISI.6/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Permohonan sewa Gedung untuk Kantor APTISI Wilayah VI Jawa Tengah.

PASAL 2
OBYEK SEWA

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewa dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 150 m2 dan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 12 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang.
(2) PIHAK PERTAMA setuju bahwa obyek sewa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantor APTISI Wilayah VI Jawa Tengah.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2025.

PASAL 4
HARGA SEWA

Harga sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun merujuk pada surat persetujuan sewa dari KPKNL dengan nomor S-284/MK.6/WKN.09/KNL.01/2021 tanggal 24 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

(1) Pembayaran dilaksanakan sekaligus didepan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian ini.
(2) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke kas negara melalui kode billing yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Apabila dikemudian hari terdapat pajak sewa yang terbutang maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan objek sewa selama jangka waktu sewa.
(2) Berhak memeriksa kondisi obyek sewa dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA.
(3) Berkewajiban memberikan hak penggunaan atas obyek sewa untuk digunakan sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Berhak menggunakan obyek sewa sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini
(2) Berkewajiban merawat, memelihara kebersihan, kesclamatan, ketertiban, keamanan Gedung dan Halaman.
(3) Menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan, tagihan PLN dan segala biaya yang timbul akibat operasional schari-hari.
(4) Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(5) Menyerahkan kembali Gedung pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dalam keadaan baik dan terawat, setelah masa sewa berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN SEWA

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :
   a. Berakhirnya jangka waktu sewa dan KEDUA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu sewa.
   b. Sewa ini berakhir apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa ini.

(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud melakukan perjanjian sewa kembali maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa ini untuk diproses kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kesepakatan KEDUA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka KEDUA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh KEDUA PIHAK.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Bhimo Wahyo Andoko, SH, MH	**Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.**

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Bhimo Widyo Andoko, SH, MH	Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar	: 27/01/2022 13:09:42	NTB	: 220127986223
Tanggal Buku	: 28/01/2022	NTPN	: 2FDA448VURQ7AKBM
Kode Cab. Bank	: 0325	STAN	675097

Data Setoran:

Kode Billing	: 8202201276262294
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	: 023
Unit Eselon I	: 01
Satuan Kerja	: 723014
Jumlah Setoran	: Rp. 27,000,000.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: DUA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH

27 [illegible] 2022

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI 0000 0000 27000000.00 28012022 27012022 2FDA448VURQ7AKBM 220127986223 675097 138

SEWA

DIGUNAKAN UNTUK KANTIN

LLDIKTI WILAYAH VI

SEWA TAHUN PERTAMA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 18 Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI

Yth. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
u.p.
Sekretaris LLDIKTI Wilayah VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur
Semarang

Sehubungan dengan surat Sekretaris LLDIKTI Wilayah VI selaku Kuasa Pengguna Barang nomor 1787/LL6/LK.01.01/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Permohonan Penilaian Sewa Tempat dan Surat Kepala Bagian Umum atas nama Kepala LLDIKTI Wilayah VI nomor 38/LL6/LK.01.01/2022 tanggal 06 Januari 2022 hal Permohonan Penilaian Ulang Sewa Tempat, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk Barang Milik Negara yang digunakan oleh LLDIKTI Wilayah VI berupa sewa sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 dan Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60 m2 untuk kantin dengan nilai keseluruhan BMN yang disewakan sebesar Rp280.492.443,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun dengan periodesitas tahunan yang terletak di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan dengan Nilai Sewa sebesar Rp14.796.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan sewa yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, identitas calon penyewa dan jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa.
3. Pembayaran uang sewa dilakukan per tahun sebesar Rp4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian untuk periodesitas tahunan dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara.
4. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan setelah seluruh pembayaran uang sewa dibayar sekaligus dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dan bukti setor dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.

5. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa untuk periodesitas tahunan.
6. Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang selaku Pengelola Barang dilampiri Salinan Keputusan Pelaksanaan Penyewaan, fotokopi perjanjian sewa menyewa, dan bukti setor pembayaran ke Rekening Kas Umum Negara;
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud;
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Semarang

Partolo

Tembusan:
1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022
Tanggal : 18 Januari 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI C.Q. LLDIKTI WILAYAH VI

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas Yang Disewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa Untuk 3 Tahun (Rp)	Pembayaran per Tahun (Rp)	Calon Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Pawiyatan Luhur I/1, Kel. Bendan Dhuwur Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	60 m2	3 (tiga) Tahun	14.796.000,00	4.932.000,00	Sdr. Maridi (untuk kantin)
2.	4.01.01.30.999	1	Bangunan Lainnya		60 m2				

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Semarang

Partolo

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://uffice.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawoyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
NOMOR : 69/LL6/LK.01.07/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI TAHUN 2022

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, penatausahaan, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI tentang Pelaksanaan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Sebagian Bangunan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

4. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PELAKSANAAN SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Persetujuan Pelaksanaan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 60 m^2 dan Sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60 m2 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang.

KEDUA : Besaran tarif sewa senilai Rp 14.796.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun. Pembayaran uang sewa dilakukan per tahun sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian untuk periodesitas tahunan.

KETIGA : Penyewa atas nama Maridi.

KEEMPAT : Periodesitas sewa ini berlaku 3 (tiga) kali dan akan dilakukan perjanjian sewa untuk setiap periodesitasnya. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir akan dilakukan pelaksanaan sewa ulang setelah kedua belah pihak sepakat.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Januari 2022
KEPALA LLDIKTI WILAYAH VI,



Bhirowo Vidyo Andoko, SH, MH
NIP 196808051994031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8301521 Laman https://lldikti6.id

SURAT PERJANJIAN

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI

Dengan

MARIDI

Tentang

SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI
PERIODE PERTAMA

Nomor : 158/LL6/LK.01.07/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Bhimo Widyo Andoko, SH, MH** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Maridi**: berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK** dan untuk selanjutnya secara berdiri sendiri disebut **PIHAK.**

KEDUA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas barang milik negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wilayah VI dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR SEWA

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
(3) Surat Persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI
(4) Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor : 69/LL6/LK.01.07/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022
(5) Surat Permohonan sewa dari Sundara Maridu tanggal 6 Januari 2022 tentang Permohonan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 2
OBYEK SEWA

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewa dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 60 m^2 dan Sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60 m^2 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang
(2) PIHAK PERTAMA setuju bahwa obyek sewa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 6 Februari 2023

PASAL 4
HARGA SEWA

Harga sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun merujuk pada surat persetujuan sewa dari KPKNL dengan nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 14.796.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan harga sewa periode pertama sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

(1) Pembayaran uang sewa periode pertama sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian ini.
(2) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke kas negara melalui kode billing yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Apabila dikemudian hari terdapat pajak sewa yang terhutang maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan objek sewa selama jangka waktu sewa
(2) Berhak memeriksa kondisi obyek sewa dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA
(3) Berkewajiban memberikan hak penggunaan atas obyek sewa untuk digunakan sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Berhak menggunakan obyek sewa sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini
(2) Berkewajiban merawat, memelihara kebersihan, keselamatan, ketertiban, keamanan Gedung beserta sarana dan prasarana didalamnya.
(3) Menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan segala biaya yang timbul akibat operasional sehari-hari.
(4) Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(5) Menyerahkan kembali obyek sewa pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dalam keadaan baik dan terawat, setelah masa sewa berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN SEWA

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :
   a. Berakhirnya jangka waktu sewa dan KEDUA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu sewa
   b. PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian sewa ini sebelum jangka waktu Sewa ini berakhir apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa ini
(2) Apabila pihak kedua bermaksud melakukan pelaksanaan sewa kembali maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa ini untuk diproses kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kesepakatan KEDUA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka KEDUA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh KEDUA PIHAK.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini sebagaimana akan dibicarakan dan disepakati bersama.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Bhimo Widyo Andoko, SH, MH	Maridi

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Bhimo Widyo Andoko, SH, MH	Maridi

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820220202304072
Tanggal Billing	:	02-02-2022 14:44:42
Tanggal Kedaluwarsa	:	09-02-2022 14:44:42
Tanggal Bayar	:	02-02-2022 14:47:43
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	4.932.000 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000027657**
NTPN	:	**7DCC82G4V6NLHGI8**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	:	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	:	4.932.000 (IDR)
Keterangan	:	Sewa Kantin LLDIKTI Wilayah VI untuk Bapak Maridi Periode 07 Februari 2022 s.d 06 Februari 2023

SEWA TAHUN KEDUA

Kepada :

Yth, Kepala LLDIKTI Wilayah VI
di Semarang

Di sampaikan dengan hormat , Bahwa masa sewa Gedung Kantin LLdikti Wilayah VI akan berakhir pada Tanggal 1 Februari 2023.

Sehubungan dengan Hal tersebut, Kami tidak akan melakukan Perpanjangan Sewa di Tahun kedua dan Tahun ketiga.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan kerjasamanya.

Semarang, 11 Januari 2023
Hormat Kami

Maridi

Hal : Sewa tempat
Lampiran : 1 (satu) bendel

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur
Semarang

Bersama surat ini dengan hormat saya mengajukan permohonan meneruskan sewa tempat seluas 100 m^2 Kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang beralamat di Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang yang sebelumnya di sewa oleh Saudara Maridi. Tempat akan saya sewa selama 1 (satu) tahun untuk digunakan sebagai kantin di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wilayah VI.

Untuk besaran nilai sewa, saya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku sebelumnya dan bersama ini saya lampirkan fotocopy KTP.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 1 Februari 2023
Hormat Saya,



Sarah Lutfiani

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374014701920001



Nama	SARAH LUTFIANI
Tempat/Tgl Lahir	SEMARANG, 07-01-1992
Jenis kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	JL. PURWOYOSO V-A
RT/RW	004/012
Kel/Desa	PURWOYOSO
Kecamatan	NGALIYAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	BELUM KAWIN
Pekerjaan	BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP

KOTA SEMARANG
27-05-2021

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230203183290
Tanggal Billing	:	03-02-2023 18:42:44
Tanggal Kedaluwarsa	:	10-02-2023 18:42:44
Tanggal Bayar	:	03-02-2023 18:48:40
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	4.932.000 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**064799534808**
NTPN	:	**0024B0N9VQSUA45Q**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	:	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	:	4.932.000 (IDR)
Keterangan	:	Sewa Kantin LLDIKTI Wilayah VI untuk Periode Februari 2023 s.d Februari 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.id

SURAT PERJANJIAN

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI

Dengan

SARAH LUTFIANI

Tentang

SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI PERIODE KEDUA

Nomor : 130/LL6/LK.05.05/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Bhimo Widyo Andoko, SH, MH** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Sarah Lutfiani**: berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK** dan untuk selanjutnya secara berdiri sendiri disebut **PIHAK**.

KEDUA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas barang milik negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wialyah VI dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR SEWA

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
(3) Surat Persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.
(4) Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor : 69/LL6/LK.01.07/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022
(5) Surat dari Saudara Maridi tanggal 11 Januari 2023 tentang ketidaksanggupan untuk melanjutkan sewa tempat di tahun kedua dan ketiga yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.
(6) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2023 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 2
OBYEK SEWA

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewa dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 60 m^2 dan Sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60 m^2 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang.
(2) PIHAK PERTAMA setuju bahwa obyek sewa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 6 Februari 2024

PASAL 4
HARGA SEWA

Harga sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun merujuk pada surat persetujuan sewa dari KPKNL dengan nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 14.796.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan harga sewa periode kedua sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

(1) Pembayaran uang sewa periode kedua sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian ini.
(2) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke kas negara melalui kode billing yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Apabila dikemudian hari terdapat pajak sewa yang terhutang maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan objek sewa selama jangka waktu sewa
(2) Berhak memeriksa kondisi obyek sewa dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA
(3) Berkewajiban memberikan hak penggunaan atas obyek sewa untuk digunakan sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Berhak menggunakan obyek sewa sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini
(2) Berkewajiban merawat, memelihara kebersihan, keselamatan, ketertiban, keamanan Gedung beserta sarana dan prasarana didalamnya.
(3) Menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan segala biaya yang timbul akibat operasional sehari-hari.
(4) Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(5) Menyerahkan kembali obyek sewa pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dalam keadaan baik dan terawat, setelah masa sewa berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN SEWA

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :
   a. Berakhirnya jangka waktu sewa dan KEDUA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu sewa
   b. PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian sewa ini sebelum jangka waktu Sewa ini berakhir apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa ini
(2) Apabila pihak kedua bermaksud melakukan pelaksanaan sewa kembali maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa ini untuk diproses kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kesepakatan KEDUA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka KEDUA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh KEDUA PIHAK.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Bhimo Widyo Andoko, SH, MH	**Sarah Lutfiani**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.kemdikbud.go.id

Nomor : 402/LL6/LK.05.05/2023 27 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Sewa atas BMN berupa Sebagian Tanah dan Sebagian Bangunan Periode Kedua pada LLDIKTI Wilayah VI

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang
di Semarang

Menindaklanjuti surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang nomor : S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI, dengan hormat kami sampaikan Surat Perjanjian Sewa Periode Kedua atau Tahun Kedua atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang tercantum dalam surat persetujuan Sewa tersebut.

Perlu kami sampaikan untuk periode kedua ini, terdapat perubahan penyewa yang sebelumnya atas nama Maridi menjadi Sarah Lutfiani. Berdasarkan Surat dari Saudara Maridi, tanggal 11 Januari 2023 tentang pemberitahuan tidak melakukan perpanjangan sewa untuk tahun kedua dan ketiga serta surat dari Saudara Sarah Lutfiani, tanggal 1 Februari 2023 tentang permohonan meneruskan sewa tempat dan bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bersama surat ini kami lampirkan Salinan Perjanjian Sewa Periode Kedua, Surat dari Saudara Maridi, Surat dari Saudari Sarah Lutfiani, KTP Saudari Sarah Lutfiani dan Bukti Setor ke Kas Negara atas pembayaran uang sewa periode kedua.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Selaku Kuasa Pengguna Barang,
Kepala

Bhimo Widyo Andoko, SH, MH
NIP 196808051994031001

SEWA TAHUN KETIGA

Hal : Sewa tempat
Lampiran : 1 (satu) bendel

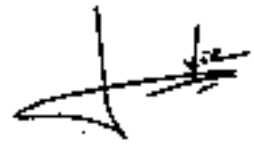
Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur
Semarang

Bersama surat ini dengan hormat saya mengajukan permohonan melanjutkan sewa periode ketiga, dimana periode pertama di sewa oleh saudara maridi dan periode kedua saya sewa, berupa tempat seluas 100 m^2 Kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang beralamat di Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang untuk digunakan sebagai kantin di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wilayah VI.

Untuk besaran nilai sewa, saya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 1 Februari 2024
Hormat Saya,



Sarah Lutfiani

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240131252301
Tanggal Billing	:	31-01-2024 14:48:25
Tanggal Kedaluwarsa	:	07-02-2024 14:48:25
Tanggal Bayar	:	31-01-2024 14:59:56
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN LLDIKTI WILAYAH VI
Kementerian/Lembaga	:	***023*** - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	:	***01*** - Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	:	***723014*** - LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
Total Disetor	:	4.932.000 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**332926214795**
NTPN	:	**C532E1JNFUN6RO2D**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	:	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	:	4.932.000 (IDR)
Keterangan	:	Sewa Kantin LLDIKTI Wilayah VI untuk Periode 7 Februari 2024 s.d 6 Februari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.id

SURAT PERJANJIAN

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI

Dengan

SARAH LUTFIANI

Tentang

SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI
PERIODE KETIGA

Nomor : 94/LL6/LK.05.05/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Bhime Widyo Audoke, SH, MH** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Sarah Lutfiani**: berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK** dan untuk selanjutnya secara berdiri sendiri disebut **PIHAK.**

KEDUA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas barang milik negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wialyah VI dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR SEWA

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
(3) Surat Persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.
(4) Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor : 69/LL6/LK.01.07/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022
(5) Surat dari Saudara Maridi tanggal 11 Januari 2023 tentang ketidaksanggupan untuk melanjutkan sewa tempat di tahun kedua dan ketiga yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.
(6) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2023 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.
(7) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2024 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 2
OBYEK SEWA

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewa dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 60 m^2 dan Sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60 m^2 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang.
(2) PIHAK PERTAMA setuju bahwa obyek sewa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2025

PASAL 4
HARGA SEWA

Harga sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun merujuk pada surat persetujuan sewa dari KPKNL dengan nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 14.796.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan harga sewa periode Ketiga sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

(1) Pembayaran uang sewa periode Ketiga sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian ini.
(2) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke kas negara melalui kode billing yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Apabila dikemudian hari terdapat pajak sewa yang terhutang maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan objek sewa selama jangka waktu sewa
(2) Berhak memeriksa kondisi obyek sewa dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA
(3) Berkewajiban memberikan hak penggunaan atas obyek sewa untuk digunakan sesuai Pasal I butir 5 (lima) perjanjian ini

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Berhak menggunakan obyek sewa sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini
(2) Berkewajiban merawat, memelihara kebersihan, keselamatan, ketertiban, keamanan Gedung beserta sarana dan prasarana didalamnya.
(3) Menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan segala biaya yang timbul akibat operasional sehari-hari.
(4) Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(5) Menyerahkan kembali obyek sewa pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dalam keadaan baik dan terawat, setelah masa sewa berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN SEWA

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :
   a. Berakhirnya jangka waktu sewa dan KEDUA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu sewa
   b. PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian sewa ini sebelum jangka waktu Sewa ini berakhir apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa ini
(2) Apabila pihak kedua bermaksud melakukan pelaksanaan sewa kembali maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa ini untuk diproses kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kesepakatan KEDUA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka KEDUA PIHAK sepakat untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh KEDUA PIHAK.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Bhimo Wahyo Andoko, SH, MH	**Sarah Lutfiani**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.id

SURAT PERJANJIAN

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI

Dengan

SARAH LUTFIANI

Tentang

SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI PERIODE KETIGA

Nomor : 94/LL6/LK.05.05/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Bhimo Widyo Andoko, SH, MH** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Sarah Lutfiani**: berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK** dan untuk selanjutnya secara berdiri sendiri disebut **PIHAK**.

KEDUA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas barang milik negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wialyah VI dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR SEWA

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemorintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

(3) Surat Persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Persetujuan sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi c.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.

(4) Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor : 69/LL6/LK.01.07/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang pelaksanaan sewa atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Tahun 2022

(5) Surat dari Saudara Maridi tanggal 11 Januari 2023 tentang ketidaksanggupan untuk melanjutkan sewa tempat di tahun kedua dan ketiga yang digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

(6) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2023 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

(7) Surat dari Saudara Sarah Lutfiani tanggal 1 Februari 2024 tentang Permohonan melanjutkan sewa tempat yang akan digunakan sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 2
OBYEK SEWA

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewa dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 seluas 60 m^2 dan Sebagian Bangunan Lainnya NUP 1 seluas 60 m^2 yang berdiri di atas tanah dimaksud, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang.

(2) PIHAK PERTAMA setuju bahwa obyek sewa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantin di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2025

PASAL 4
HARGA SEWA

Harga sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun merujuk pada surat persetujuan sewa dari KPKNL dengan nomor S-12/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 tanggal 18 Januari 2022 yaitu sebesar Rp 14.796.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan harga sewa periode Ketiga sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

(1) Pembayaran uang sewa periode Ketiga sebesar Rp 4.932.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian ini.
(2) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke kas negara melalui kode billing yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Apabila dikemudian hari terdapat pajak sewa yang terhutang maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan objek sewa selama jangka waktu sewa
(2) Berhak memeriksa kondisi obyek sewa dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA
(3) Berkewajiban memberikan hak penggunaan atas obyek sewa untuk digunakan sesuai Pasal 1 butir 5 (lima) perjanjian ini

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Berhak menggunakan obyek sewa sesuai Pasal 1 butir 3 (lima) perjanjian ini
(2) Berkewajiban merawat, memelihara kebersihan, keselamatan, ketertiban, keamanan Gedung beserta sarana dan prasarana didalamnya.
(3) Menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan segala biaya yang timbul akibat operasional sehari-hari.
(4) Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(5) Menyerahkan kembali obyek sewa pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dalam keadaan baik dan terawat, setelah masa sewa berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN SEWA

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :
   a. Berakhirnya jangka waktu sewa dan KEDUA PIHAK tidak memperpanjang jangka waktu sewa
   b. PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian sewa ini sebelum jangka waktu Sewa ini berakhir apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa ini
(2) Apabila pihak kedua bermaksud melakukan pelaksanaan sewa kembali maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa ini untuk diproses kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kesepakatan KEDUA PIHAK.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka KEDUA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh KEDUA PIHAK.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh KEDUA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Bhimo Widyo Andoko, SH, MH	Sarah Lutfiani



LLDIKTI WILAYAH VI

LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja
2023

LLDIKTI



Terus Bergerak

Menuju Puncak

DAFTAR
ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 12-16

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 18-26

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 28-165

BAB 4 PENUTUP 167-170

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBARAN UMUM

STRUKTUR ORGANISASI

CAPAIAN KINERJA

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nyaberhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pada tahun 2023 menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Secara umum telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja pada tahun 2023.

Semarang, Januari 2024
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001



Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang Tahun Anggaran 2023 kami lampirkan pada ikhtisar ekseskutif ini sebagai berikut.



Penyerapan Anggaran Tahun 2023

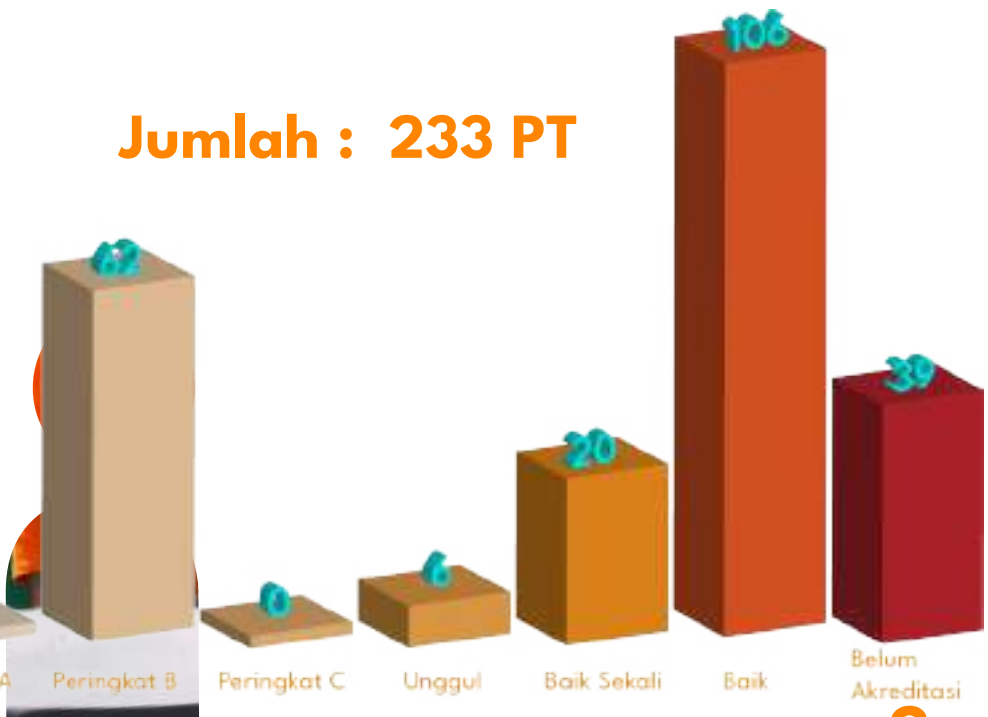




Status Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi



Jumlah : 233 PT

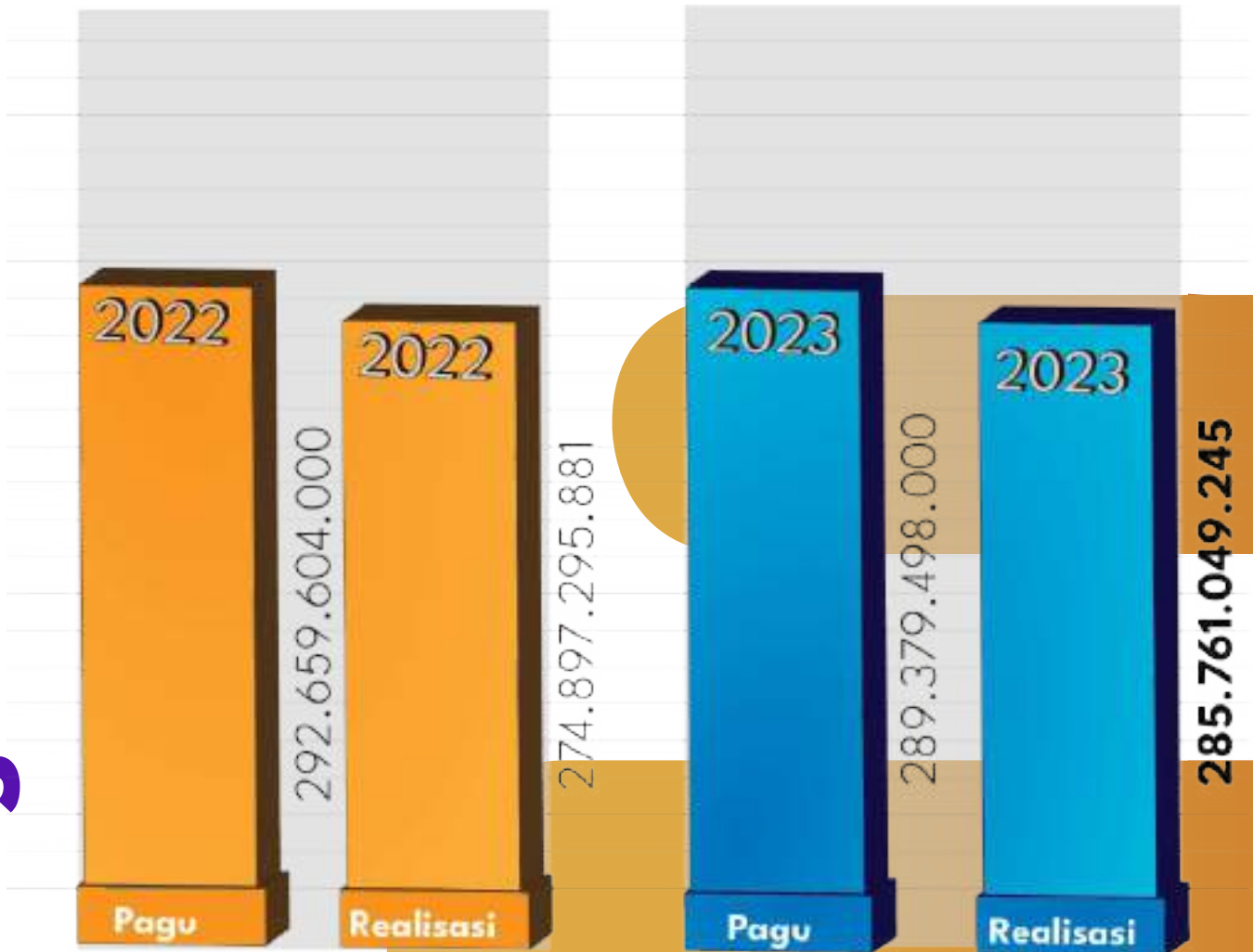


Pagu dan Realisasi Anggaran
Per Komponen

Kode/Nama Kegiatan	Ket	Jenis Belanja		
		Pegawai	Barang	Modal
4472 PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI	Pagu	Rp 209.906.002.000	Rp 3.454.762.000	-
	Realisasi	Rp 208.421.833.955	Rp 3.429.537.530	-
	Presentase	99,29%	99,27%	-
	Sisa	Rp 1.484.168.045	Rp 25.224.470	-
6392 PENGELOLAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI	Pagu	Rp 68.832.268.000	Rp 6.836.466.000	Rp 350.000.000
	Realisasi	Rp 67.255.599.076	Rp 6.304.931.784	Rp 349.146.900
	Presentase	97,71%	92,23%	99,76%
	Sisa	Rp 1.576.668.924	Rp 531.534.216	Rp 853.100

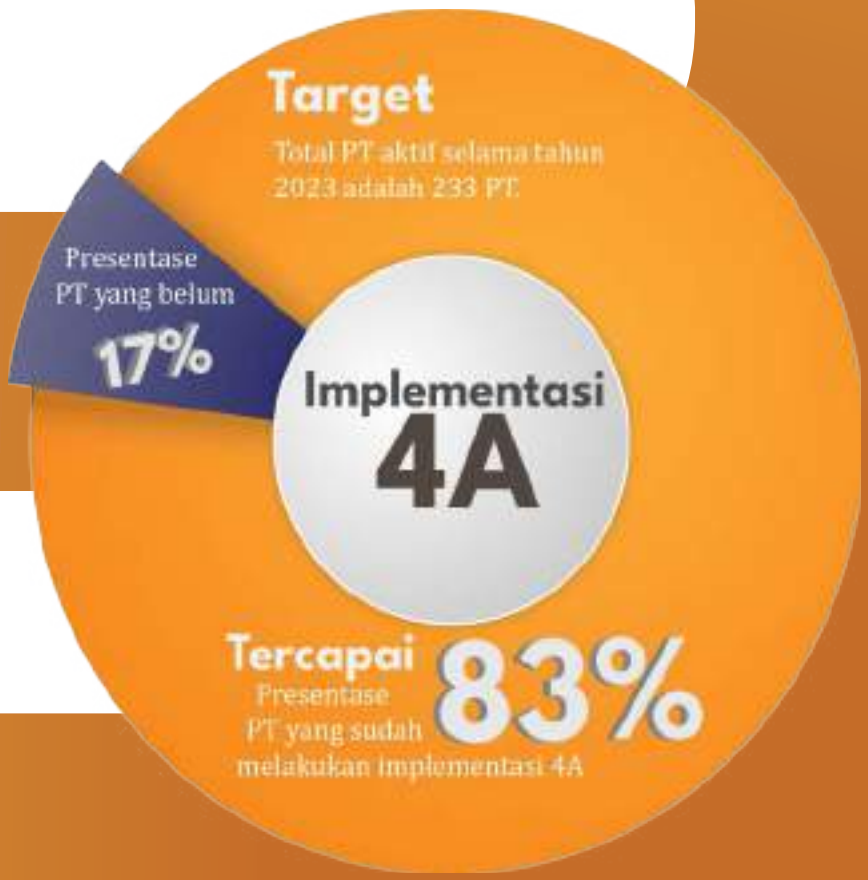
TA 2022 & 2023

Pagu dan Realisasi



Status Penilaian Akreditasi Progdi

Jenjang	Akreditasi							Total
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Belum Akreditasi	
S-3	0	6	0	1	4	5	4	21
S-2	3	34	0	23	22	22	12	120
S-1	39	312	28	79	113	303	85	992
D-4	1	15	3	0	4	30	34	88
D-3	17	99	29	6	77	66	27	333
D-2	0	0	0	0	0	8	0	8
D-1	0	1	1	0	0	0	3	5
Profesi	4	21	2	5	16	25	17	89
Jumlah	64	488	63	114	236	459	182	1656



Implementasi 4A

Sepanjang Tahun 2023, dari target Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI yang berjumlah 233 Perguruan Tinggi yang telah melaksanakan Implementasi 4A (Anti Korupsi, Anti Perundungan, Anti Intoleransi dan Anti Kekerasan Seksual), tercapai 83% dari jumlah 233 Perguruan Tinggi yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang.

Nama Peserta	Perguruan Tinggi	Seleksi Awal Nasional	Hasil Seleksi Final Tingkat Nasional
Jenjang Sarjana			
Dian Fatimatus Salwa	Universitas Negeri Semarang	Tidak Lolos	
Syahidah Asma Amanina	Universitas Diponegoro	Lolos	Juara 2
I Putu Arya Aditia Utama	Universitas Jenderal Soedirman	Lolos	
Nuri Utami	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Tidak Lolos	
Jenjang Diploma			
Intan Sakina Ramadhani	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Lolos	
Kharizma Aulia Syarifiyah	Universitas Diponegoro	Lolos	Juara 3
Gading Nasywaa Aji Azzahra	Universitas Sebelas Maret	Tidak Lolos	
Mardhiva Indra Saputra	Universitas Setia Budi	Lolos	
Claudio Ferdinan Cimi	Politeknik ATMI	Tidak Lolos	
Yovita Christi	Universitas Pekalongan	Tidak Lolos	
Nur Sahid	Universitas 'Aisyiyah Surakarta	Tidak Lolos	



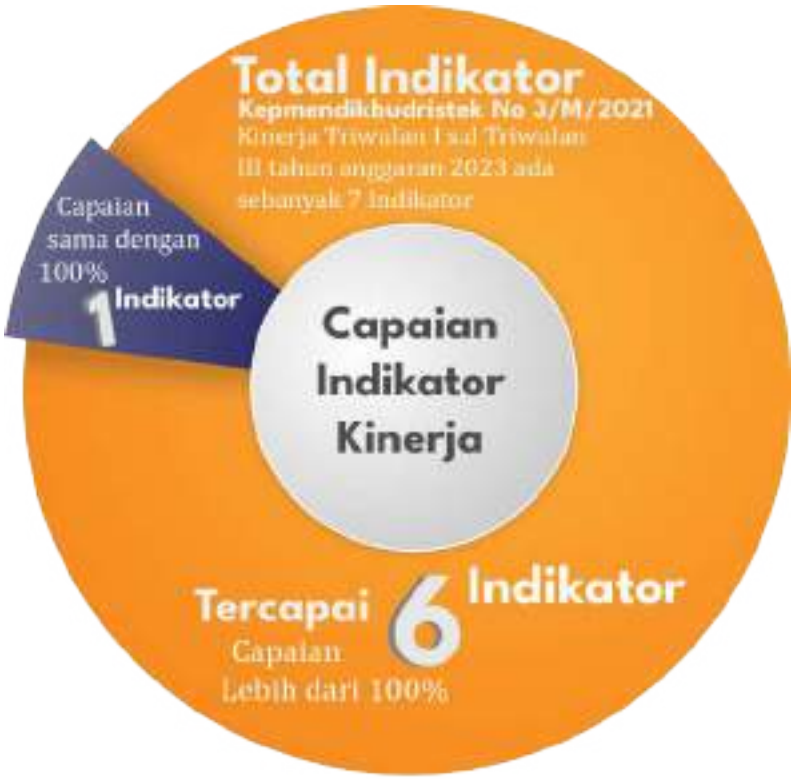
KOMPOSISI DOSEN JABATAN FUNGSIONAL

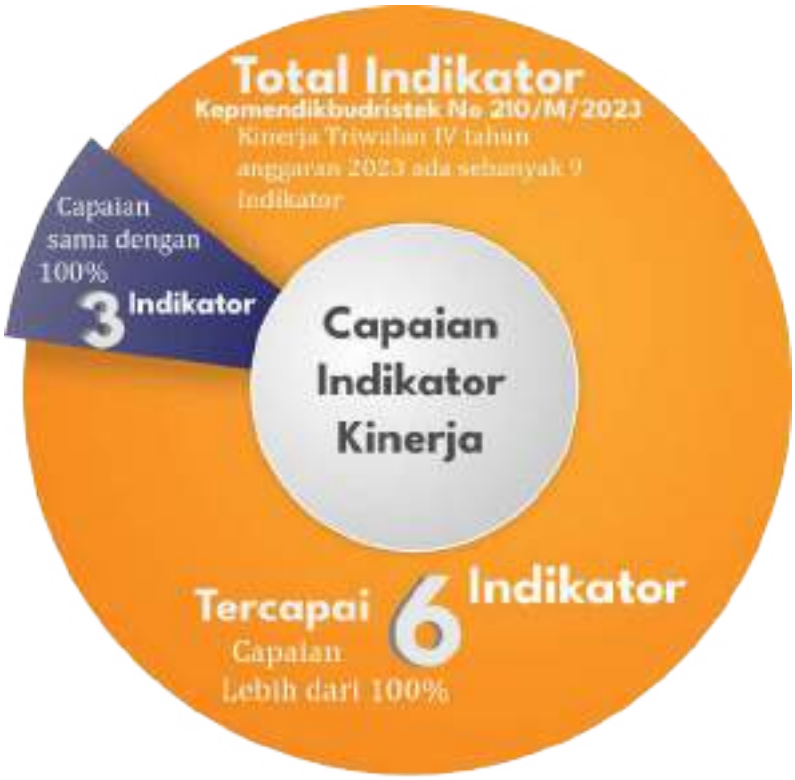
Jabatan Fungsional	2022	2023
Tanpa Jabatan	4.442	4.320
Asisten Ahli	4.660	4.519
Lektor	4.041	4.940
Lektor Kepala	984	1.022
Guru Besar	133	172

KOMPOSISI DOSEN JENJANG PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	2022	2023
Tanpa Jenjang	300	341
D3	21	20
D4	19	19
S1	331	302
S2	11541	11975
S3	1861	2123
Sp1	168	181
Sp2	3	3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA 2023





NILAI KINERJA ANGGARAN







PERMASALAHAN TAHUN ANGGARAN 2023



1. Informasi dan data terkait layanan yang tersedia secara online belum dapat diakses secara optimal oleh pengguna layanan;
2. Keterbatasan Keuangan dan Sumber Daya Perguruan Tinggi;
3. Kepatuhan terhadap Persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi;
4. Penyelarasan dengan Standar Nasional dan Internasional bagi Perguruan Tinggi;
5. Rekapitulasi APT PTS LLDIKTI Wilayah VI di atas, 30% atau 70 PTS diantaranya terkena Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA);
6. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah;
7. Sistem kurasi prestasi mahasiswa untuk pelaporan data prestasi mahasiswa masih dalam tahap pengembangan oleh Puspresnas;
8. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih;
9. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship;
10. Masih ada perguruan tinggi yang belum melakukan konfirmasi dalam menyampaikan partisipasinya untuk mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 4A tersebut masih menjadi target dari LLDIKTI Wilayah VI;
11. Pendataan dosen yang berkegiatan di luar kampus. Tidak semua perguruan tinggi mengisi dengan lengkap data tersebut;
12. Mempertahankan predikat A pada SAKIP dengan meningkatkan nilai nya. Range nilai untuk kategori A adakah 80 sd 90, dimana saat ini LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan nilai 85,35.



LANGKAH ANTISIPASI LLDIKTI WILAYAH VI



1 Menyusun usulan perbaikan / perubahan sistem informasi terkait layanan khususnya tata letak laman yang lebih user-friendly;

2 Fasilitasi Kelembagaan Melalui PAKARTI dan PINARAK;

3 Fasilitasi terhadap Perguruan Tinggi yang terkena pemantauan dengan mengadakan 2 (dua) kegiatan khusus untuk pendampingan teknis perbaikan data, kegiatan tersebut adalah Coaching PEPA, dan Klinik Akreditasi Online Angkatan 4 (PEPA);

4 Secara rutin memberikan informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM melalui laman maupun media sosial;

5 Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PTS berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM);

6 LLDIKTI WIlayah VI juga telah bekerjasama dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM) untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka (KM) Fair dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem MBKM di lingkungan PT;

7 LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarkana kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa;

8 LLDIKTI WIlayah VI telah melakukan kegiatan pendampingan pengelolaan KIP Kuliah dengan bekerjasama dengan Puslapdik;

9 Melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD;

10 Melakukan pemantauan pelaporan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI;

11 Bekerja sama dengan organisasi pimpinan PT bidang kemahasiswaan PTS untuk meningkatkan capaian kompetensi mahasiswa;

12 LLDIKTI akan selalu berupaya untuk memberikan himbauan, informasi dalam bentuk sosialisasi serta melakukan konfirmasi ke semua perguruan tinggi untuk menyadarkan kembali upaya pentingnya mewujudkan kepastian sistem kurikulum perguruan tinggi utamanya terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum 4A ini yang pastinya akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keamanan dan kenyamanan semua pihak baik untuk semua jajaran perguruan tinggi maupun bagi para mahasiswa yang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar;

13 LLDIKTI Wilayah VI telah mengakomodir pendataan melalui sistem.lldikti6.id (SIBRAJA). Data lain yang dapat dijadikan sumber sebenarnya terlihat pada SISTER, pada laporan beban kerja dosen, tetapi data tersebut tidak terdapat menu yang mengakomodir LLDIKTI untuk mengunduh dan mengumpulkan data tridharma dosen.



BAB I
PENDAHULUAN



GAMBARAN UMUM
LLDIKTI WILAYAH VI
Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VI

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Sekretariat Jenderal. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang sebagai perubahan dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta terhitung sejak tanggal 9 April 2018. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang dipimpin oleh Bhimo Widyo Andoko dengan jumlah SDM sebanyak 63 Pegawai yang terdiri dari 52 PNS dan 11 Pegawai PPNPN, serta 383 dosen PNS yang dipekerjakan pada rayon Semarang, Surakarta, dan Kedu. Wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang melingkupi seluruh wilayah Jawa Tengah.

Layanannya mencakup 233 perguruan tinggi yang tersebar di 29 Kabupaten dan 6 Kota yang berada di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 69 Universitas, 14 Institut, 71 Sekolah Tinggi, 39 Akademi, 35 Politeknik, dan 5 Akademi Komunitas dengan jumlah 1656 program studi, serta jumlah mahasiswa aktif sebanyak 342.314 mahasiswa (berdasarkan pelaporan 20222). Dan juga mengelola 40 layanan yang sudah memiliki standar pelayanan publik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Permendikbudristek No 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI;
8. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Kepmendikbud 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5/2019 tentang Tentang Tatacara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
13. Keputusan Mendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Tugas :

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Vi Semarang mempunyai tugas :

Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Fungsi :

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Vi Semarang Mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
e. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
f. pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
g. pelaksanaan kerja sama;
h. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
j. pelaksanaan administrasi.





LLDIKTI
WILAYAH VI

STRUKTUR ORGANISASI
2023



KEPALA

Bhimo Widyo Andoko, SH., MH



KEPALA BAG. UMUM

Adhrial Refaddin SIP., MPP

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BERSAMA
Berintegritas dan Siap Melayani

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

1. Penataan aset belum optimal
2. Pembangunan ZI dalam meraih predikat WBBM
3. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, termasuk pemanfaatan SINDE
4. Literasi digital pemangku kepentingan pendidikan tinggi Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan
5. Masih terdapat kesenjangan kompetensi SDM LLDIKTI Wilayah VI dalam upaya menyediakan layanan yang prima.

2. Peran Strategis

1. Berperan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap stakeholder di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI.
2. Berperan penting dalam penguatan integritas dan anti korupsi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI, dalam mendukung pemerintah menerapkan good and clean government. LLDIKTI Wilayah VI akan terus berupaya dan terus bergerak untuk mendapatkan predikat WBBM.
3. Berperan penting dalam percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengembangan sistem informasi layanan LLDIKTI termasuk integrasi sistem informasi persuratan online LLDIKTI Wilayah VI dengan SINDE.
4. Berperan penting dalam percepatan literasi digital melalui sosialisasi sistem informasi yang berkaitan dengan pendidikan tinggi terhadap pemangku kepentingan pendidikan tinggi Jawa Tengah.
5. Berperan penting dalam pengembangan kompetensi pegawai melalui Pendidikan, pelatihan dan studi lanjut baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta secara daring maupun luring untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi : LLDIKTI Wilayah VI menjadi institusi yang prima dalam pelayanan pendidikan tinggi dalam rangka membentuk insan Indonesia yang cerdas komprehensif.

Misi :

1. Pelaksanaan regulasi dari pemerintah dalam pengawasan, pengendalian dan pemantauan PTS di Jawa Tengah
2. Fasilitator bagi semua stakeholder pendidikan tinggi khususnya PTS dalam penguat (empower), pemberdaya (enabler) dan penyedia (provider) layanan pendidikan tinggi
3. Penyelaras sistem pendidkan tinggi, baik terhadap strategi nasional, pembangunan daerah, pembangunan lintas sektor dan perkembangan global. Interaksi Perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Rencana Kinerja Jangka Menengah:

Sesuai dengan (permendikbudristek/kepmendikbudristek IKU),Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel Renstra Satker

Berdasarkan Kepmendikbudristek No 3/M/2021

Uraian		Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	S			
1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	IKU	98.50	98.75	-
1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	IKU	75.63	85.89	-
2.0	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	S			
2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IKU	43.46	54.78	-
2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	IKU	75	86,95	-
3.0	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	S			
3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	IKU	75.63	77.81	-
4.0	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	SK			
4.1	Predikat SAKIP	IKK	A	A	-
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	IKK	90	91	-

Berdasarkan Kepmendikbudristek No 210/M/2023

Uraian		Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	S			
1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	IKU	-	88	88,5
1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	IKU	-	82.05	93,99
2.0	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	S			
2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	IKU	-	67.52	75,12
2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	IKU	-	4.13	6,22
2.3	Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	IKU	-	86.32	94,42
3.0	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	S			
3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	IKU	-	20.09	23,6
3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	IKU	-	78.2	85,84
4.0	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	S			
4.1	Predikat SAKIP	IKU	-	A	A
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	IKU	-	91	97,5

Tujuan Strategis :

Tujuan pelaksanaan program kegiatan LLDIKTI Wilayah VI ditetapkan berdasarkan visi dan misi LLDIKTI Wilayah VI untuk mempercepat terwujudnya :

1. Sistem penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang otonom dan akuntabel
2. Perguruan Tinggi Swasta yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing
3. Akses yang berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat
4. Interaksi Perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Vi Semarang merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Awal

Berdasarkan Kepmendikbudristek No 3/M/2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	98.75
	[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	85.89
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	54.78
	[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	86.95

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	77.81
[SK 4] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91

Sesuai Kepmendikbudristek No 210/M/2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	82.05
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	67.52
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4.13
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	86.32

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	20.09
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	78.2
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	183.610.764.000
6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	114.678.756.000

Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	98.75
	[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	85.89
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	54.78
	[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	86.95
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	77.81
[SK 4] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91

Sesuai Kepmendikbudristek No 210/M/2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	82.05
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	67.52
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4.13
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	86.32
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	20.09

	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	78.2
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	213.360.764.000
6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	76.018.734.000

Terdapat perubahan anggaran pada program 4472 pembinaan kelembagaan Pendidikan tinggi yang semula Rp. 183.610.764.000 Menjadi Rp. 213.360.764.000,- disebabkan karena adanya penambahan anggaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Dosen NON PNS dan pada Program 6392 Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi semula Rp. 114.678.756.000,- menjadi Rp. 76.018.734.000,- yang disebabkan kelebihan anggaran belanja pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja IKU Lama

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	98.75	100	101,26%
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	85.89	100	116,43%
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	54.78	68,37	124,8%

Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	86.95	87,3	100,4%
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	77.81	84,79	108,97%
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	A	A	100%
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	91	93,65	102,91%

Sasaran Kinerja Utama 1

Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Pengelolaan layanan di LLDIKTI Wilayah VI mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hal itu dibuktikan dengan diperolehnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 berproses untuk menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) hal ini dibuktikan dengan peningkatan layanan di LLDIKTI Wilayah VI. Beberapa layanan yang ada telah dibuat sistem dan beberapa telah di adopsi oleh LLDIKTI Wilayah lain maupun dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.

Indikator Kinerja Utama 1.1

Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.

Layanan tepat waktu adalah ketepatan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan, definisi menurut Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Jika menurut Kepmendikbud no 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, layanan yang tepat waktu adalah jumlah layanan tepat waktu dibagi total jumlah layanan dikalikan 100 dengan satuan persen.

Formula penghitungan adalah sebagai berikut :

$$\frac{n}{t} x\ 100$$

n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

Realisasi target indikator kinerja pada persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu didukung oleh beberapa kegiatan yang termasuk dalam standar layanan public. Dari 40 layanan pada tahun 2023 keseluruhan layanan tercapai 100 %.

40 layanan tersebut adalah:

1. Verifikasi dan Validasi Ijazah
2. Usul Pergantian Personil Peneliti PDP
3. Usul Pembatalan PIN
4. Usulan Akun Verifikator Sinta Perguruan Tinggi
5. Usulan Perubahan Afiliasi Dosen di Sinta
6. Usulan Penyesuaian Masa Studi di Masa Pandemi
7. Pelaporan Wisuda
8. Usulan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi Melalui KIP Kuliah
9. Penandatanganan E-Kontrak Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
10. Penandatanganan E-Kontrak Program Pemberdayaan Masyarakat Desa P2MD
11. Verifikasi Pengajuan Akun Pengelola Sistem Pelaporan *Tracer Study*
12. Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS Dengan Pangkat PNS (Inpassing Pertama)
13. Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS Dengan Pangkat PNS Golongan III (Revisi)
14. Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan Pns Dengan Pangkat PNS Golongan IV
15. Izin Belajar Bagi PNS Dosen Dipekerjakan (Dpk)
16. Kenaikan Pangkat/ Golongan Dosen PNS Dpk
17. Tugas Belajar Dosen PNS Dipekerjakan (Dpk)
18. Data Dan Informasi Publik
19. Konsultasi

20. Pengaduan Pelayanan Publik
21. Publikasi Informasi
22. Layanan Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik
23. Layanan Kelembagaan Perguruan Tinggi Vokasi
24. Rekomendasi Akreditasi Perguruan Tinggi
25. Rekomendasi Akreditasi Program Studi
26. Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen
27. Pembayaran Uang Makan
28. SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
29. Penerbitan Surat Rekomendasi Migrasi Data Program Studi Pada Pddikti
30. Validasi Pembukaan Periode Pelaporan Pada Pddikti
31. Validasi Perubahan Data Dosen Pada Pddikti
32. Validasi Pindah Homebase Pada Pddikti
33. Validasi Perubahan Data Mahasiswa Pada Pddikti
34. Proses Usulan Rekomendasi Seleksi Beasiswa Bagi Dosen
35. Pengaktifan Kembali Studi Lanjut
36. Pengusulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor
37. Pengusulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor
38. Pembinaan dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi
39. Pendataan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi
40. Rekomendasi Sarana dan Prasarana

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
98.53	**98.75**	**100**	**98.75**	**99,25**

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa realisasi persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu pada tahun 2023 terpenuhi sejumlah 100% melebihi target yang ditetapkan yakni 98.75%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh pengguna layanan menyatakan puas terhadap kinerja layanan LLDIKTI Wilayah VI yang tepat waktu, pada sejumlah 40 layanan yang tersedia. Capaian ini juga telah melebihi realisasi pada tahun 2022 yang mencapai nilai 98.53%.

Dalam mendukung pelaksanaan dan meningkatkan mutu layanan kepada pengguna layanan, LLDIKTI Wilayah VI telah menyiapkan sumber daya yang diperlukan, melalui peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana pendukung. Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah dilaksanakan upaya fasilitasi berupa kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima yang diikuti oleh petugas pelayanan dari setiap kelompok kerja. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari dunia industri dan usaha yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada publik dan diharapkan memberikan wawasan serta keahlian teknis dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun upaya peningkatan sumber daya sarana

prasarana meliputi pengadaan dan perawatan fasilitas di ruang pelayanan seperti AC, ruang tunggu yang nyaman, kesediaan jaringan internet, material informasi seperti *banner*, *flyer* dan sebagainya. Selain itu, bagi pengguna layanan yang berbasis *online* juga didukung oleh sistem informasi yang mudah diakses, *user-friendly* dan langsung mendapatkan tanggapan dari petugas yang dituju sesuai kategori layanan yang digunakan.

Seluruh upaya dalam memenuhi persentase layanan LLDIKTI tepat waktu ini terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pelatihan pelayanan yang prima pada periode tahun mendatang, perawatan dan penambahan fasilitas sarana prasarana pendukung termasuk pengembangan sistem informasi yang lebih terkini, dengan tujuan persentase layanan LLDIKTI kembali memenuhi target indikator kinerja tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama 1.2

Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Dalam IKU 1.2 ini indikator kinerja yang didapatkan adalah melalui perbandingan antara keseluruhan jumlah PTS yang ada di lingkup pembinaan LLDIKTI Wilayah VI dengan jumlah PTS yang telah melakukan peningkatan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Adapun rumus yang dipergunakan dalam perhitungan indikator kinerja adalah

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain.
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Berikut adalah data perbandingan target dan realisasinya.

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
83.91	**85.89**	**100**	**85.89**	**90,9**

Pada tabel di atas tidak terlihat perbedaan yang signifikan dari target perjanjian kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2023, penghitungan persentase target perjanjian kinerja masih menggabungkan 3 (tiga) indikator yaitu jumlah PTS dengan peringkat akreditasi A atau unggul, jumlah PTS dengan jumlah mahasiswa lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa, serta jumlah PTS yang melakukan konsolidasi dengan PTN/PTS lain.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, menyebutkan bahwa perguruan tinggi swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Pendirian PTS salah satunya memiliki tujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

PTS mendapatkan izin pendirian dari Menteri setelah memenuhi syarat minimum akreditasi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, dan wajib terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

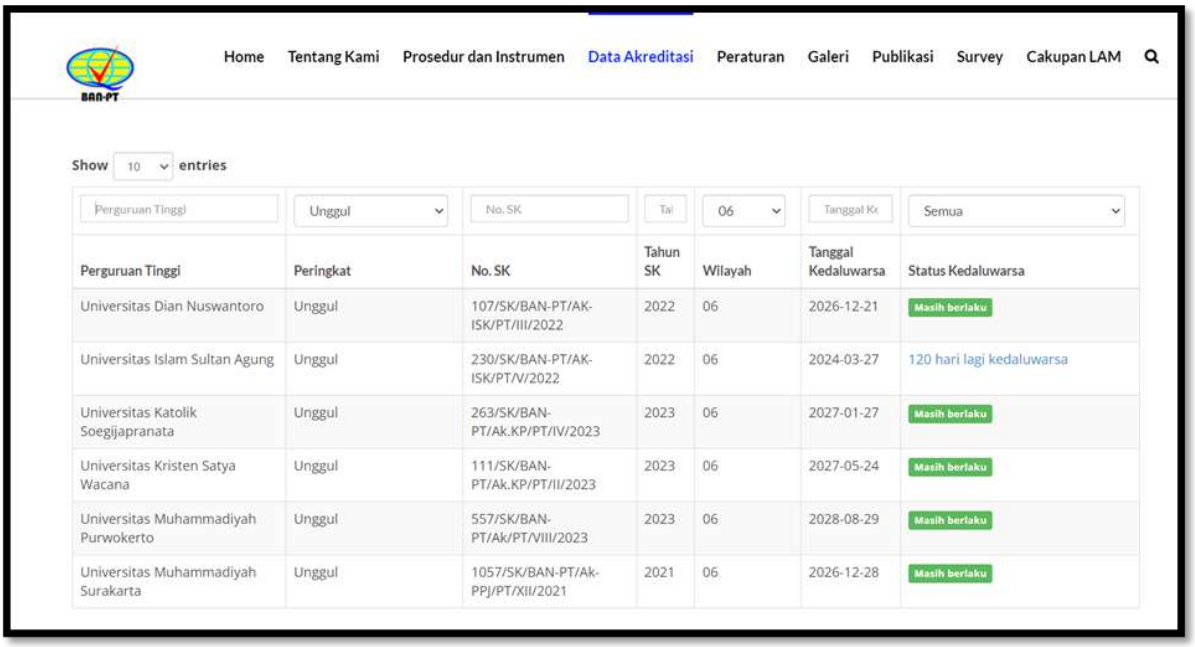
Luaran proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas : terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Makna peringkat terakreditasi yaitu terakreditasi Baik jika sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta terakreditasi Baik Sekali jika telah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan terakreditasi Unggul jika telah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta memiliki daya saing di tingkat internasional. Tingkat pelampauan standar ini ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa sebagai Perguruan Tinggi yang bermutu, kinerja institusinya telah melampaui standar mutu yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Standar mutu yang telah ditetapkan ini bertujuan agar masyarakat tidak salah dalam memilih penyelenggara Pendidikan tinggi yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan tersebut. Dari sisi pengelola Perguruan Tinggi, penetapan standar mutu juga dapat diartikan sebagai dorongan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas mutu secara berkesinambungan.

Sebagai catatan, bahwa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 Agustus 2023. Semua pemangku kepentingan diwajibkan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Akreditasi Unggul

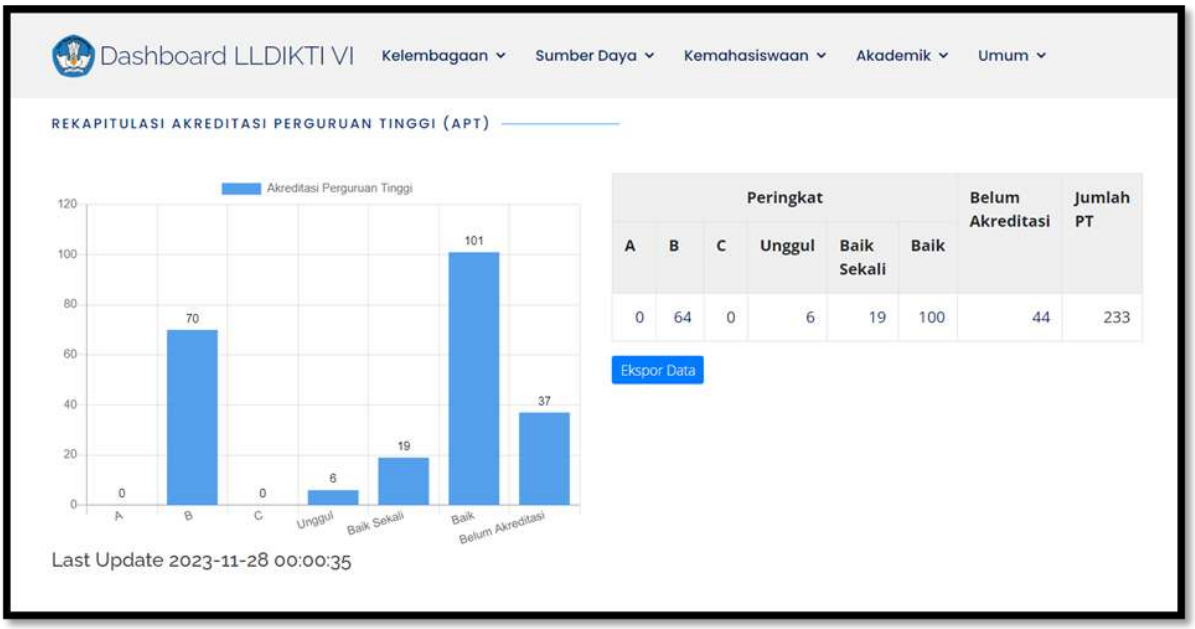
Apabila pada Tahun 2022 Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Unggul masih berjumlah 3 (tiga) PTS yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Dian Nuswantoro, dan Universitas Islam Sultan Agung, maka pada Tahun 2023, capaian predikat Unggula naik menjadi 6 (enam) PTS dengan Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas Kristen Satya Wacana berhasil mengkonversi peringkat A menjadi Unggul, serta Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang meraih peringkat Unggul melalui skema re-Akreditasi. UMP sendiri merupakan salah satu dari 5 PTS di Jawa Tengah yang pada Tahun 2022 dimasukkan ke dalam program pembinaan LLDIKTI Wilayah VI untuk diproyeksikan meraih peringkat Akreditasi Unggul.



Perguruan Tinggi	Peringkat	No. SK	Tahun SK	Wilayah	Tanggal Kedaluwarsa	Status Kedaluwarsa
Universitas Dian Nuswantoro	Unggul	107/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/III/2022	2022	06	2026-12-21	Masih berlaku
Universitas Islam Sultan Agung	Unggul	230/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022	2022	06	2024-03-27	120 hari lagi kedaluwarsa
Universitas Katolik Soegijapranata	Unggul	263/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023	2023	06	2027-01-27	Masih berlaku
Universitas Kristen Satya Wacana	Unggul	111/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/II/2023	2023	06	2027-05-24	Masih berlaku
Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Unggul	557/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023	2023	06	2028-08-29	Masih berlaku
Universitas Muhammadiyah Surakarta	Unggul	1057/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021	2021	06	2026-12-28	Masih berlaku

Daftar APT Unggul di LLDIKTI Wilayah VI

Selain APT unggul yang mengalami peningkatan dari Tahun 2022, jumlah PTS yang belum terakreditasi pada Tahun 2023 juga berhasil untuk ditekan atau dikurangi. Jika pada akhir Tahun 2022 tercatat ada sebanyak 68 PTS (29,67%) belum terakreditasi, maka Tahun ini (TW 1 – TW 3) PTS yang belum terakreditasi menyisakan hanya 44 PTS (18,8%).



Rekap APT di LLDIKTI Wilayah VI

Senada dengan APT, untuk Program Studi yang belum terakreditasi juga berhasil ditekan atau diturunkan. Jika pada akhir Tahun 2022 jumlah Prodi yang belum terakreditasi ada sebanyak 212 Prodi dari 1580 Prodi, atau 13,41%, maka pada Tahun 2023 jumlah Prodi yang belum terakreditasi turun menjadi 192 Prodi dari 1654 Prodi atau 11,6%.

Jenjang	Akreditasi						Belum Akreditasi	Total
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik		
S-3	0	6	0	1	4	5	4	21
S-2	5	35	0	20	20	23	11	118
S-1	47	319	30	71	110	293	92	992
D-4	1	16	4	0	2	30	33	87
D-3	18	105	30	6	74	63	28	335
D-2	0	0	0	0	0	7	1	8
D-1	0	1	1	0	0	0	3	5
Profesi	4	22	2	5	16	20	20	88
Jumlah	**75**	**504**	**67**	**103**	**226**	**441**	**192**	**1654**

LLDIKTI Wilayah VI

PTS dengan Lebih dari 3.000 Mahasiswa Terdaftar

Berdasarkan data pelaporan Semester 2022-1 pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) didapatkan data bahwa terjadi peningkatan jumlah PTS yang memiliki mahasiswa lebih dari 3.000 orang. Tahun 2022 tercatat 29 PTS memiliki 3.000 lebih mahasiswa terdaftar, Tahun 2023 jumlah PTS yang memiliki lebih dari 3.000 mahasiswa terdaftar naik menjadi 38 PTS atau 16,24%.

Berikut adalah datanya:

NO	Kode PT	NAMA PT	Jml Mhsw
1	061008	Universitas Muhammadiyah Surakarta	43557
2	061002	Universitas Islam Sultan Agung	20656
3	061001	Universitas Kristen Satya Wacana	19926
4	061017	Universitas Semarang	19721
5	061031	Universitas Dian Nuswantoro	17239
6	061038	Universitas PGRI Semarang	16595
7	061019	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	16276
8	061009	Universitas Muria Kudus	14567
9	061030	Universitas Sains Alqur an	12618
10	061026	Universitas Muhammadiyah Semarang	12473
11	061003	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	11625
12	061012	Universitas Katolik Soegijapranata	10553
13	061013	Universitas Pancasakti Tegal	9528
14	061027	Universitas Wahid Hasyim	9368
15	061037	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	8407

16	061006	Universitas Slamet Riyadi	7409
17	061007	Universitas Wijayakusuma Purwokerto	6790
18	061011	Universitas Pekalongan	6602
19	061047	Universitas Duta Bangsa Surakarta	5719
20	061016	Universitas Veteran Bangun Nusantara	5665
21	061050	Universitas Muhammadiyah Kudus	5650
22	061004	Universitas Muhammadiyah Magelang	5375
23	061058	Universitas Sains dan Teknologi Komputer	5265
24	062003	Institut Teknologi Telkom Purwokerto	5035
25	061049	Universitas Ivet	4869
26	061025	Universitas Muhammadiyah Purworejo	4580
27	061044	Universitas Ngudi Waluyo	4299
28	061024	Universitas Surakarta	4179
29	061029	Universitas Stikubank	3835
30	061054	Universitas Amikom Purwokerto	3482
31	061010	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)	3439
32	061015	Universitas Islam Batik	3426

33	061018	Universitas Widya Dharma	3416
34	065012	Politeknik Harapan Bersama	3320
35	063025	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	3291
36	061055	Universitas Kusuma Husada Surakarta	3258
37	061022	Universitas Setia Budi	3198
38	061043	Universitas Selamat Sri	3120

Data PTS dengan Mahasiswa Lebih dari 3.000 orang

PTS Berkonsolidasi

Tahun 2023, PTS yang melakukan konsolidasi atau Kerjasama dengan pihak lain baik itu berbentuk MoU, MoA, maupun IA berjumlah 183 PTS atau 78,2%

Berikut adalah datanya yang diambil dari laman https://laporankerma.kemdikbud.go.id/

No.	Nama	MoU	MoA	IA	Total	Status
1	061001 Universitas Kristen Satya Wacana	461	517	505	1483	Aktif
2	061002 Universitas Islam Sultan Agung	397	112	22	531	Aktif
3	061003 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	86	64	7	157	Aktif
4	061004 Universitas Muhammadiyah Magelang	91	12	2	105	Aktif
5	061006 Universitas Slamet Riyadi	67	3	2	72	Aktif

6	061007 Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto	14	4	20	38	Aktif
7	061008 Universitas Muhammadiyah Surakarta	504	203	40	747	Aktif
8	061009 Universitas Muria Kudus	113	74	4	191	Aktif
9	061010 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)	103	21	3	127	Aktif
10	061011 Universitas Pekalongan	53	29	1	83	Aktif
11	061012 Universitas Katolik Soegijapranata	80	34	58	172	Aktif
12	061013 Universitas Pancasakti Tegal	162	72	6	240	Aktif
13	061014 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman	6	2	0	8	Aktif
14	061015 Universitas Islam Batik	39	12	0	51	Aktif
15	061016 Universitas Veteran Bangun Nusantara	134	50	3	187	Aktif
16	061017 Universitas Semarang	150	57	40	247	Aktif
17	061018 Universitas Widya Dharma	446	9	3	458	Aktif
18	061019 Universitas Muhammadiyah Purwokerto	301	93	50	444	Aktif
19	061021 Universitas Pandanaran	48	9	0	57	Aktif
20	061022 Universitas Setia Budi	49	44	0	93	Aktif

21	061024 Universitas Surakarta	17	26	0	43	Aktif
22	061025 Universitas Muhammadiyah Purworejo	94	69	33	196	Aktif
23	061026 Universitas Muhammadiyah Semarang	114	21	9	144	Aktif
24	061027 Universitas Wahid Hasyim	118	25	4	147	Aktif
25	061028 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta	4	0	1	5	Aktif
26	061029 Universitas Stikubank	78	31	19	128	Aktif
27	061030 Universitas Sains Alqur an	97	8	7	112	Aktif
28	061031 Universitas Dian Nuswantoro	433	1764	623	2820	Aktif
29	061033 Universitas Sahid Surakarta	85	18	12	115	Aktif
30	061034 Universitas Aki	155	13	0	168	Aktif
31	061035 Universitas Boyolali	20	0	3	23	Aktif
32	061036 Universitas Muhadi Setiabudi	55	19	1	75	Aktif
33	061037 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	263	233	23	519	Aktif
34	061038 Universitas PGRI Semarang	139	117	73	329	Aktif

35	061040 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen	3	0	0	3	Aktif
36	061041 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap	107	12	1	120	Aktif
37	061042 Universitas Peradaban	2	2	0	4	Aktif
38	061043 Universitas Selamat Sri	9	7	6	22	Aktif
39	061044 Universitas Ngudi Waluyo	166	111	58	335	Aktif
40	061045 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto	26	22	0	48	Aktif
41	061046 Universitas Nasional Karangturi Semarang	4	0	0	4	Aktif
42	061047 Universitas Duta Bangsa Surakarta	79	20	9	108	Aktif
43	061048 Universitas Harapan Bangsa	166	60	2	228	Aktif
44	061049 Universitas Ivet	24	4	10	38	Aktif
45	061050 Universitas Muhammadiyah Kudus	166	25	3	194	Aktif
46	061051 Universitas Perwira Purbalingga	10	1	0	11	Aktif
47	061052 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan	72	69	11	152	Aktif
48	061053 Universitas An Nuur	24	80	0	104	Aktif
49	061054 Universitas Amikom Purwokerto	37	2	0	39	Aktif

50	061055 Universitas Kusuma Husada Surakarta	192	21	0	213	Aktif
51	061056 Universitas Maritim AMNI	98	3	1	102	Aktif
52	061057 Universitas 'Aisyiyah Surakarta	174	4	0	178	Aktif
53	061058 Universitas Sains dan Teknologi Komputer	241	225	501	967	Aktif
54	061059 Universitas Widya Husada Semarang	50	1	0	51	Aktif
55	061060 Universitas Putra Bangsa	31	4	0	35	Aktif
56	061061 Universitas Muhammadiyah Gombong	4	2	0	6	Aktif
57	061062 Universitas Al-Irsyad Cilacap	13	31	0	44	Aktif
58	061063 Universitas Bhamada Slawi	19	0	0	19	Aktif
59	061064 Universitas Karya Husada Semarang	1	1	1	3	Aktif
60	061067 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang	4	0	0	4	Aktif
61	061071 Universitas Pignatelli Triputra	1	1	0	2	Aktif
62	061073 Universitas Safin Pati	7	0	0	7	Aktif
63	062003 Institut Teknologi Telkom Purwokerto	302	253	16	571	Aktif
64	062004 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan	0	3	1	4	Aktif

65	062005 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta	0	1	0	1	Aktif
66	062007 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang	14	0	0	14	Aktif
67	062008 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	2	1	0	3	Aktif
68	062010 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang	2	0	0	2	Aktif
69	062011 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia	0	1	0	1	Aktif
70	062014 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus	8	0	0	8	Aktif
71	063003 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna	1	0	0	1	Aktif
72	063005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria	0	1	0	1	Aktif
73	063006 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti	6	0	0	6	Aktif
74	063008 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang	9	0	0	9	Aktif
75	063010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia	13	2	0	15	Aktif
76	063011 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama	28	0	0	28	Aktif

77	063013 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah	8	9	0	17	Aktif
78	063018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri	1	0	0	1	Aktif
79	063021 STMIK Bina Patria	12	0	0	12	Aktif
80	063022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA	1	0	0	1	Aktif
81	063025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	22	4	6	32	Aktif
82	063028 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara	35	3	0	38	Aktif
83	063039 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali	4	13	0	17	Aktif
84	063040 STMIK Sinar Nusantara	4	1	1	6	Aktif
85	063043 STMIK Widya Pratama	4	44	3	51	Aktif
86	063044 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo	7	2	0	9	Aktif
87	063052 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe	1	0	0	1	Aktif
88	063054 STMIK AKI Pati	6	0	0	6	Aktif
89	063056 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa	31	40	0	71	Aktif
90	063060 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal	28	8	1	37	Aktif

91	063061 STMIK YMI Tegal	22	0	0	22	Aktif
92	063073 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso	21	3	0	24	Aktif
93	063075 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta	13	0	0	13	Aktif
94	063078 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang	63	3	0	66	Aktif
95	063079 STIKES Telogorejo Semarang	46	3	0	49	Aktif
96	063082 STIA Asuh Mitra Solo	4	0	0	4	Aktif
97	063096 STIKES Mitra Husada Karanganyar	34	6	0	40	Aktif
98	063098 STIKES Estu Utomo	12	0	0	12	Aktif
99	063099 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional	113	6	0	119	Aktif
100	063100 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal	0	0	1	1	Aktif
101	063104 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta	23	1	0	24	Aktif
102	063109 Sekolah Tinggi Teknik Pati	3	5	0	8	Aktif
103	063110 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta	0	1	0	1	Aktif
104	063112 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati	56	2	0	58	Aktif

105	063115 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum	32	0	0	32	Aktif
106	063116 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	8	0	0	8	Aktif
107	063117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa	1	0	0	1	Aktif
108	063120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes	21	0	0	21	Aktif
109	063122 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	17	0	0	17	Aktif
110	063126 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern	41	5	53	99	Aktif
111	064007 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria	11	1	0	12	Aktif
112	064010 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini	3	4	2	9	Aktif
113	064012 Akademi Peternakan Karanganyar	15	1	0	16	Aktif
114	064018 Akademi Maritim Nusantara Cilacap	1	0	0	1	Aktif
115	064040 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti	5	0	0	5	Aktif
116	064051 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang	1	0	0	1	Aktif
117	064055 Akademi Akuntansi Effendi Harahap	2	2	0	4	Aktif

118	064057 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta	1	0	0	1	Aktif
119	064061 Akademi Teknik Tirta Wiyata	22	2	4	28	Aktif
120	064062 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan	86	0	0	86	Aktif
121	064090 Akademi Keperawatan Yappi Sragen	1	0	0	1	Aktif
122	064097 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta	6	1	0	7	Aktif
123	064101 Akademi Kebidanan Mardi Rahayu	8	0	0	8	Aktif
124	064111 Akademi Keperawatan Insan Husada Surakarta	1	0	0	1	Aktif
125	064112 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara	1	2	14	17	Aktif
126	064137 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan	2	0	0	2	Aktif
127	064139 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta	2	0	0	2	Aktif
128	064150 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa	7	3	0	10	Aktif
129	064154 Akademi Kesehatan Asih Husada	7	0	0	7	Aktif
130	064156 Akademi Fisioterapi Widya Husada	22	1	0	23	Aktif

131	064158 Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang	5	0	0	5	Aktif
132	065002 Politeknik Pratama Mulia	1	1	0	2	Aktif
133	065006 Politeknik Pratama	1	1	2	4	Aktif
134	065008 Politeknik Sawunggalih Aji	1	1	0	2	Aktif
135	065012 Politeknik Harapan Bersama	259	138	0	397	Aktif
136	065013 Politeknik Indonusa Surakarta	136	10	8	154	Aktif
137	065018 Politeknik Stibisnis	1	0	0	1	Aktif
138	065021 Politeknik Banjarnegara	2	1	0	3	Aktif
139	065024 Politeknik ATMI	27	4	33	64	Aktif
140	065026 Politeknik Baja Tegal	6	0	0	6	Aktif
141	065028 Politeknik Santo Paulus Surakarta	13	1	0	14	Aktif
142	065030 Politeknik Balekambang Jepara	1	1	0	2	Aktif
143	065031 Politeknik Katolik Mangunwijaya	60	2	0	62	Aktif
144	065033 Politeknik Bumi Akpelni	8	69	1	78	Aktif
145	065034 Politeknik Yakpermas Banyumas	12	1	0	13	Aktif
146	065037 Politeknik Rukun Abdi Luhur	26	26	0	52	Aktif

147	065038 Politeknik Harapan Bangsa Surakarta	1	0	0	1	Aktif
148	065040 Politeknik Bhakti Semesta	7	3	0	10	Aktif
149	065043 Politeknik Gusdurian	4	1	0	5	Aktif
150	061020 Universitas Kristen Surakarta	3	0	0	3	Alih Bentuk
151	062001 IKIP Veteran Jawa Tengah	0	1	0	1	Alih Bentuk
152	063012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi St Pignatelli	1	0	0	1	Alih Bentuk
153	063024 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa	73	33	6	112	Alih Bentuk
154	063030 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Assholeh	19	16	0	35	Alih Bentuk
155	063037 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa	31	12	0	43	Alih Bentuk
156	063042 STMIK AUB Surakarta	14	1	0	15	Alih Bentuk
157	063048 Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Kebumen	6	0	0	6	Alih Bentuk
158	063049 Sekolah Tinggi Elektronika & Komputer (STEKOM)	3	2	0	5	Alih Bentuk
159	063051 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong	122	3	2	127	Alih Bentuk

160	063066 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Surakarta	52	0	0	52	Alih Bentuk
161	063068 STIKES Muhammadiyah Pekajangan	1	0	0	1	Alih Bentuk
162	063071 STIKES Bhakti Mandala Husada Slawi	56	50	0	106	Alih Bentuk
163	063072 STIKES Muhammadiyah Klaten	93	2	0	95	Alih Bentuk
164	063076 STIKES An-Nur Purwodadi	14	0	0	14	Alih Bentuk
165	063080 Sekolah Tinggi Maritim Dan Transpor AMNI	67	0	0	67	Alih Bentuk
166	063084 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKA	18	0	0	18	Alih Bentuk
167	063086 STIKES Kusuma Husada Surakarta	42	0	0	42	Alih Bentuk
168	063087 STIKES Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap	1	2	5	8	Alih Bentuk
169	063093 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS	0	1	0	1	Alih Bentuk
170	063108 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Uniska	21	3	0	24	Alih Bentuk
171	064026 Akademi Teknologi Warga Surakarta	2	0	51	53	Alih Bentuk

172	064028 AMIK YMI Tegal	0	1	0	1	Alih Bentuk
173	064074 Akademi Kebidanan An-Nur Purwodadi	1	0	0	1	Alih Bentuk
174	064076 Akademi Teknologi AUB	0	1	0	1	Alih Bentuk
175	064100 Akademi Keperawatan Panti Kosala	4	27	0	31	Alih Bentuk
176	064102 Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo	7	2	0	9	Alih Bentuk
177	064106 Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas	23	2	0	25	Alih Bentuk
178	064138 Akademi Kebidanan YPBHK Brebes	8	0	0	8	Alih Bentuk
179	064141 Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo	14	0	0	14	Alih Bentuk
180	064151 Akademi Keperawatan Kesdam IV/Diponegoro	10	0	0	10	Alih Bentuk
181	064157 Akademi Keperawatan Widya Husada	19	0	0	19	Alih Bentuk
182	064160 Akademi Teknik Elektro Medik	8	1	2	11	Alih Bentuk
183	065014 Politeknik Pusmanu	14	2	0	16	Alih Bentuk

Hambatan bagi PTS

Dari berbagai analisa data yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Kelembagaan, ditemukan bahwa terdapat 3 (tiga) isu utama yang menjadi kendala atau hambatan bagi PTS untuk dapat memenuhi kewajibannya yaitu terakreditasi. Ketiga hal tersebut adalah :

1. **Keterbatasan Keuangan dan Sumber Daya**

Melakukan proses akreditasi, baik itu APT maupun APS membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya operasional, sampai ke pembiayaan teknis. Bagi APT dan APS yang masih dalam naungan akreditasi oleh BAN-PT, kebutuhan biaya sangat bisa ditekan karena proses akreditasi di BAN-PT tidak dipungut biaya. Tetapi untuk Prodi yang sudah masuk ke dalam naungan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), biaya yang dikeluarkan oleh tiap Prodi tidak sedikit, yaitu di atas 55 juta Rupiah. Jumlah biaya yang cukup besar ini yang menjadi masalah dan hambatan terutama PTS dengan keterbatasan finansial untuk dapat meningkatkan kualitas mutu melalui Akreditasi. Sebagian PTS yang berbentuk Akademik seperti Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi bisa mengajukan bantuan akreditasi melalui laman https://bantuanaps.kemdikbud.go.id/ , tetapi untuk perguruan tinggi dengan bentuk Politeknik dan Akademi belum ada fasilitasi serupa dari Kemdikbudristek sehingga keterbatasan finansial menjadi sebuah hambatan.

2. **Kepatuhan terhadap Persyaratan Akreditasi**

Penting bagi institusi pendidikan untuk memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh BAN-PT agar dapat memperoleh akreditasi yang diinginkan. Perguruan Tinggi kesulitan dalam memenuhi syarat perlu untuk mendapatkan peringkat Akreditasi Baik Sekali dan Unggul. Hal ini disebabkan karena mayoritas PTS yang belum membawa budaya mutu ke dalam kinerja pengelolaan Perguruan Tingginya sehingga berdampak besar ketika terkena pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA) oleh BAN-PT.

3. **Penyelarasan dengan Standar Nasional dan Internasional**

Adaptasi dan harmonisasi dengan standar nasional dan/atau standar internasional dapat menjadi tantangan yang membutuhkan perubahan dan peningkatan dalam sistem pendidikan dan administrasi, terutama ketika menyikapi persaingan global dengan rencana masuknya PT asing ke Indonesia yang sedikit banyak pasti akan mengancam keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Tuntutan inilah yang pada akhirnya "memaksa" PTS untuk menunjukkan program-program internasionalnya yang pada akhirnya menjadi perwujudan atau bermuara pada peringkat Akreditasi Unggul.

Fasilitasi Kelembagaan Melalui PAKARTI dan PINARAK

Menyikapi ketiga isu utama tersebut, LLDIKTI Wilayah VI melalui Pokja Kelembagaan menginisiasi 2 (dua) program strategis fasilitasi berbasis komunitas melalui PINARAK (Pojok Inklusif Bicara Akreditasi), dan PAKARTI (Pendampingan Kinerja Perguruan Tinggi) sebagai program pendampingan bagi PTS di Jawa Tengah dalam melakukan berbagai percepatan kinerja, pengelolaan perguruan tinggi, dan akreditasinya. Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik, serta ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi menjadi salah satu tujuan

dalam kegiatan pendampingan tersebut. Secara umum program tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Kedua program tersebut (PINARAK dan PAKARTI) selanjutnya diimplementasikan menjadi berbagai program kerja pendampingan langsung kepada PTS, program-program tersebut yaitu:

1. Rakor Pimpinan BP dan Pimpinan PTS
2. Rakor BP PTS bagi PT Akreditasi C dan Tidak Terakreditasi
3. Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Tidak Terakreditasi
4. Klinik Akreditasi Online
5. Workshop IAPS bersama LAM TEKNIK
6. Workshop IAPS Prodi EMBA
7. Sinkronisasi IKU, Rencana Operasional,dan RENSTRA Perguruan Tinggi
8. Coaching Clinic Menuju APT Unggul
9. Coaching PEPA
10. Workshop Percepatan Mutu bagi PT Tidak Terakreditasi/PT Baru
11. Asistensi Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Legalitas Perguruan Tinggi
12. Bimtek Penyusunan Statuta PTS
13. FGD Pemetaan Permasalahan Hukum Kelembagaan PT
14. PAKARTI SERIES : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI

Hasil dari fasilitasi LLDIKTI

Dari berbagai program fasilitasi yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah VI, maka didapatkan hasil peningkatan PTS di Jawa Tengah yang terakreditasi dari sebelumnya pada Tahun 2022 70% PTS yang terakreditasi institusinya menjadi pada Tahun 2023 81,2% PTS yang terakreditasi institusinya. Sedangkan untuk Prodi dari sebelumnya yang terakreditasi 86,59% pada Tahun 2022, naik menjadi 88,4% pada Tahun 2023.

Raihan yang sangat positif ini tentunya didukung juga oleh peningkatan kinerja pengelolaan Perguruan Tinggi di berbagai bidang, baik itu akademik maupun non akademik.

Sasaran Kinerja Utama 2

Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

Indikator Kinerja Utama 2.1

Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Untuk menciptakan SDM yang unggul, Kemdikbudristek mendorong transformasi perguruan tinggi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Kepmendikbud tersebut, IKU LLDIKTI nomor 2.1 adalah terkait dengan persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Pada poin pertama terkait kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif berdasarkan 9 (sembilan) bentuk pembelajaran yang meliputi: 1) Magang atau praktek kerja, 2) Proyek di desa, 3) Mengajar di sekolah, 4) Pertukaran pelajar, 5) Penelitian atau riset, 6) Kegiatan wirausaha, 7) Studi atau proyek independen, 8) Proyek kemanusiaan, dan 9) Bela Negara. Lalu, pada kedua terkait kriteria untuk prestasi mahasiswa adalah berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Cara perhitungan pencapaian IKU terkait mahasiswa sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
44,78	**54.78**	**68,37**	**54.78**	**59,97**

Pada tahun 2023, target untuk IKU 2.1 sebanyak 54,78% dengan capaian realisasi sebanyak 68,37% mahasiswa telah menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang ada dalam pelaporan PDDIKTI pada tahun 2022, terdapat penurunan jumlah perguruan tinggi dari awal Januari sebanyak 231 perguruan tinggi swasta sedangkan pada bulan September mengalami peningkatan menjadi 234 perguruan tinggi swasta yang memiliki jenjang program studi S1 dan D4/D3/D2. Telah terdapat sebanyak 4.757 mahasiswa dari 119 PTS telah dilaporkan mendapatkan prestasi tingkat nasional dan internasional pada tahun 2023 melalui laman PDDIKTI. Terkait capaian pembelajaran di luar kampus, sebanyak 95 PT telah melaporkan data MBKM dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15.763. Di tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI juga mendapatkan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari DIKTI dan DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 69 PTS. Untuk program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah dari DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 3 PTS. Kegiatan PKM dan P2MD ini dalam rangka implementasi MBKM mahasiswa di perguruan tinggi. Total PTS yang mengimplementasikan MBKM sebanyak 158 PTS.

Dari kegiatan-kegiatan di atas, tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, dari 230 perguruan tinggi swasta terdapat 103 perguruan tinggi swasta dengan jumlah presentase 44,78% yang mahasiswanya menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Sedangkan pada tahun 2023, meningkat menjadi 158 perguruan tinggi swasta dari 234 perguruan tinggi swasta dengan presentase dengan jumlah presentase 68,37% yang mahasiswanya menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Peningkatan jumlah perguruan tinggi ini dikarenakan semakin banyaknya perguruan tinggi yang melaksanakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong

perguruan tinggi swasta terkait pentingnya implementasi dan pelaporan hasil implementasi kebijakan Merdeka Belajar. berbagai upaya telah dilakukan LLDIKTI Wilayah VI untuk mendorong perguruan tinggi tidak hanya aktif berpartisipasi pada program flagship MBKM kementerian, tetapi membangun ekosistem MBKM mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga secara masif mendorong perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan diri melalui keikutsertaan dalam mengembangkan kompetensi dan meraih prestasi mahasiswa melalui ajang kompetisi.

Adapun capaian kinerja tahun 2023 sebanyak 68,37% meningkat dari capaian tahun 2022 dengan capaian 44,78%. Jumlah realisasi tahun 2023 juga meningkat menjadi 158 perguruan tinggi swasta dengan capaian tahun 2022 sebanyak 103 perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yang mana tahun 2021 sebanyak 102 Perguruan Tinggi Swasta dengan presentase 41,46% meningkat menjadi 103 perguruan tinggi dengan presentase sesuai target yaitu 44,78 % Perguruan Tinggi Swasta. secara garis besar dari tahun 2021, 2022, 2023, capaian presentase jumlah PTS yang mahasiswanya menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional meningkat, bahkan capaian di tahun 2023 meningkat banyak.

Pada tahun 2023, sebanyak 68,37% perguruan tinggi swasta memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Capaian tahun 2023 ini meningkat dibandingkan target capaian renstra LLDIKTI untuk target jangka menengah pada tahun 2023 sebanyak 47,34%. Capaian indikator kinerja ini berdasarkan target jangka menengah dalam renstra LLDIKTI tahun 2022-2024. Meningkatnya capaian jangka menengah ini ini dikarenakan semakin banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI yang difokuskan serta mendorong perguruan tinggi mengimplementasikan kebijakan MBKM. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI tidak hanya mendorong perguruan tinggi dalam memfasilitasi mahasiswanya mengikuti kompetisi-kompetisi mahasiswa sehingga dapat meraih prestasi, tetapi LLDIKTI Wilayah VI juga menyelenggarakan kegiatan kompetisi mahasiswa yang menghasilkan prestasi mahasiswa bahkan sampai tingkat nasional.

LLDIKTI Wilayah VI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja terkait pengalaman mahasiswa di luar kampus atau berprestasi minimal tingkat nasional. Dalam rangka peningkatan mutu layanan LLDIKTI khususnya dalam bidang akademik dan kemahasiswaan, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Melalui kegiatan ini, sistem pengelolaan bidang kemahasiswaan yang telah ada dievaluasi dan dikembangkan untuk meningkatkan layanan LLDIKTI.



Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB – KM)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2023, telah muncul kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang memperkuat implementasi pembelajaran mahasiswa dengan berbagai bentuk pembelajaran. Selain itu, untuk menciptakan SDM yang unggul, Kemdikbudristek juga mendorong transformasi perguruan tinggi melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui kebijakan MBKM ini, mahasiswa diberikan kesempatan atau hak untuk mengambil pembelajaran di luar program studi sampai maksimal 3 (tiga) semester, dan mewajibkan perguruan tinggi untuk memfasilitasinya.

Dalam rangka mendukung implementasi Merdeka Belajar dan mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait baik kepada perguruan tinggi maupun kepada mahasiswa secara langsung. Untuk mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan fasilitasi mahasiswa terkait pelaksanaan MBKM, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan menyasar beberapa elemen yang ada di perguruan tinggi.

Untuk memastikan implementasi MBKM di masing-masing perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Strategi Implementasi MBKM yang ditujukan untuk penanggung jawab implementasi MBKM perguruan tinggi akademik yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga menyelenggarakan kegiatan Asistensi Pengembangan Kurikulum Program Studi dalam rangka mendukung MBKM. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan perguruan tinggi dapat penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Dalam upaya memberikan hak pembelajaran mahasiswa diluar program studinya, perguruan tinggi wajib menyiapkan fasilitasi berupa sarana prasarana, kurikulum yang mendukung, sosialisasi, serta program-program yang mendukung MBKM.





Selanjutnya, untuk penguatan dari sisi tenaga pendidik, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM melalui kegiatan Pendampingan Pengelolaan Wirausaha bagi Dosen Pendamping Kewirausahaan, Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi Dosen Pendamping, serta Pendampingan Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan dosen sebagai pendidik serta pendamping mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dapat memahami dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya dengan mengembangkan dirinya dalam pembelajaran kewirausahaan dan penalaran mahasiswa. Selain itu, memberikan dorongan dan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri mengikuti pembelajaran di luar prodi. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Pendidikan Vokasi yang dalam pelaksanaannya mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dan dapat dikonversikan menjadi sks. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang merupakan program *flagship* pusat yang dapat diikuti oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran dalam implementasi MBKM.

Selain menyasar perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan MBKM untuk mahasiswa secara langsung melalui kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa. Harapannya mahasiswa dapat menjadi lulusan pendidikan tinggi memiliki daya saing, kompetensi dan memiliki yang baik untuk menghadapi dunia kerja dan industri.

Salah satu kompetisi program kemahasiswaan terkait penalaran dari Kemdikbudristek yang dapat dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pembelajaran diluar program studi adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Program PKM dikembangkan untuk mengantarkan

mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi.





Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah VI terkait PKM, LLDIKTI Wilayah VI terdapat mencapai peringkat terbaik ke-2 dengan jumlah proposal terdanai untuk PKM dari Ditjendiktiristek. Sebanyak 10 judul diantaranya merupakan judul PKM yang dibawa oleh peserta ketika mengikuti kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah VI baik yang ditujukan untuk dosen pendamping maupun mahasiswa. Jumlah pendanaan program PKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebanyak 357 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 2.348.775.000,- dari 63 perguruan tinggi swasta. Sedangkan jumlah pendanaan program PKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebanyak 13 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 88.500.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Sehingga total pendanaan PKM yang dikelola oleh LLDIKTI Wilayah VI sebanyak 370 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 2.698.250.000,- dari 69 perguruan tinggi swasta. Dalam proses pengelolaan program PKM ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.

Verifikasi Kontrak PKM 5 Bidang dan PKM GFK

No	Tahun	Jumlah PT	Tahap 2					Tahap 3				
			Dalam Proses	Draft PT	Perlbaa	Disposisi	Selesai	Dalam Proses	Draft PT	Perlbaa	Disposisi	Selesai
1	2022	66	0	0	0	0	59	7	50	0	43	6

Selain pendanaan program PKM, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola pendanaan hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran mahasiswa diluar program studinya yang dapat dikonversikan sks-nya sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Program P2MD ini dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk menumbuhkan rasa peduli mahasiswa dan berkontribusi kepada masyarakat desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Pada tahun 2023, terdapat II batch pendanaan untuk P2MD. Pada Batch I, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan pendanaan sebanyak 8 judul dengan dana sebesar

Rp 225.500.000,- dari 3 perguruan tinggi swasta. Kemudian pada batch II, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan pendanaan sebanyak 12 judul dengan dana sebesar Rp 321.000.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Total jumlah pendanaan program P2MD Batch I dan II sebanyak 20 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 546.500.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Sama halnya dengan pengelolaan program PKM, dalam proses pengelolaan program P2MD ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.



Dalam rangka memastikan pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di lingkungan perguruan tinggi serta adanya tertib pelaporan aktivitas mahasiswa, LLDIKTI Wilayah VI melakukan penarikan data terhadap implementasi kebijakan MBKM termasuk 8 (delapan) bentuk pembelajaran diluar prodi ditambah Bela Negara yang dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui laman PDDIKTI. Pada pelaporan data PDDIKTI, perguruan tinggi dapat mencatatkan mahasiswa yang menempuh MBKM pada status keaktifan mahasiswa. total terdapat sebanyak 95 perguruan tinggi telah melaporkan data MBKM pada tahun 2023 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15.763 orang.

Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola penyaluran beasiswa mahasiswa yang meliputi Bidikmisi/KIP Kuliah *On Going* dan KIP Kuliah Merdeka Baru. Bidikmisi dan KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Pelaporan Bidikmisi/KIP Kuliah *On Going* dilakukan setiap semester sehingga LLDIKTI Wilayah VI akan mewajibkan perguruan tinggi swasta pengelola untuk melaporkan. Pada tahun anggaran 2023, terdapat 2 (dua) kali periode pelaporan yaitu Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024. Setiap semesternya, terutama pergantian semester genap menuju semester gasal, jumlah mahasiswa menurun dikarenakan kelulusan atau akhir masa studi beasiswa.

Periode	Jumlah Mahasiswa Bidikmisi On Going	Jumlah Mahasiswa Bidikmisi On Going	Jumlah Mahasiswa KIP K On Going	Jumlah PTS KIP K On Going	Total Jumlah Mahasiswa On Going	Total Jumlah PTS On Going	Jumlah Mahasiswa Mundur
Semester Genap TA 2022/2023	2.055 mhs	79 PTS	23.924 mhs	186 PTS	25.979 mhs	186 PTS	424 mhs
Semester Gasal TA 2023/2024	12 mhs	6 PTS	22.077 mhs	184 PTS	22.089 mhs	184 PTS	319 mahasiswa mundur dan 121 mahasuswa dilakukan penggantian

Namun, dalam proses pengelolaannya, masih banyak mahasiswa yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, contohnya bekerja, non aktif, dan maupun alasan lainnya. Pada periode

pelaporan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, terdapat banyak mahasiswa yang mengundurkan diri. Pada periode pelaporan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, Puslapdik membuka kebijakan terkait adanya penggantian terhadap mahasiswa yang telah mundur.

Tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI menerima kuota KIP Kuliah Merdeka baru sebanyak 2.256 mahasiswa yang diberikan kuota masing-masing akreditasi program studi.

Tahun	Kuota Pembiayaan Penuh KIPK			Kuota Biaya Pendidikan
	Prodi A	Prodi B	Prodi C	
2023	231 / 231	1577 / 1577	448 / 448	1273 / 1273

Kuota Penerapan Mhs KIP Kuliah untuk LLDIKTI wilayah VI

Dalam proses pengelolaan KIP K Merdeka tahun 2023, terdapat perubahan kebijakan dalam distribusi kuota yang didapat. Pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI mendistribusikan kuota KIP Kuliah dengan menggunakan beberapa indikator kinerja perguruan tinggi yaitu jumlah mahasiswa aktif jenjang D1/D/D3/D4/S1, capaian prestasi mahasiswa tingkat nasional, capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional, adanya aduan/temuan terkait pengelolaan KIP Kuliah yang terbukti, adanya mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah *on going* yang mundur pada pelaporan per semester, jumlah program studi terakreditasi A/Unggul, serta perguruan tinggi yang terdaftar pada laman portal PPKS. Atas hasil kinerja perguruan tinggi tersebut, kuota didistribusikan dengan menggunakan rasio masing-masing indikator untuk masing-masing akreditasi program studi.



Selain mengelola kuota KIPK Kuliah sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Puslapdik, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola KIP Kuliah Usulan Masyarakat sebanyak 5.580 mahasiswa, sehingga total kuota KIP Kuliah untuk mahasiswa baru tahun 2023 sebanyak 7.836 mahasiswa. Pengelolaan KIP Kuliah yang ada di LLDIKTI Wilayah VI telah sepenuhnya menggunakan sistem *online* melalui sistem LLDIKTI 6, baik untuk distribusi kuota sampai pelaporan data perguruan tinggi setiap semesternya yang telah dikembangkan dari tahun 2021. Namun, untuk mengoptimalisasi sistem pengelolaan KIP Kuliah yang telah ada, pada tahun 2023 LLDIKTI Wilayah VI telah mengembangkan sistem pengelolaan KIP Kuliah sehingga sistem dapat digunakan lebih mudah, efektif dan efisien serta menyesuaikan kebijakan yang berlaku.





Dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Distribusi Kuota KIP Kuliah yang dihadiri oleh pimpinan PT yang menangani KIP Kuliah Puslapdik dan 4 (empat) bank himbara penyalur dana KIP Kuliah di LLDIKTI Wilayah VI. Melalui kegiatan ini, diharapkan perguruan tinggi memahami kebijakan pengelolaan KIP Kuliah yang terbaru serta dapat mengelola sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI menyampaikan terkait kebijakan distribusi kuota KIP Kuliah tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka Tahun 2023, pada tahun 2023, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) bekerjasama dengan LLDIKTI Wilayah VI melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengelolaan Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023. Kegiatan ini difokuskan pada pendampingan perhitungan besaran komponen biaya pendidikan penerima KIP Kuliah Tahun 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan bahwa perguruan tinggi penerima KIP Kuliah tahun 2023 memahami teknis perhitungan usulan besaran biaya pendidikan mahasiswa KIP Kuliah sesuai kebijakan yang berlaku.





Pada tahun 2023, terdapat skema baru Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi selain KIP Kuliah Merdeka, yaitu Bantuan Biaya Pendidikan (BBP). Program BBP merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan

Mahasiswa. Adapun sasaran Program BBP diberikan kepada Mahasiswa dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima Program KIP Kuliah yang disebabkan oleh keterbatasan kuota penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi. Pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan kuota BBP dari Puslapdik sebanyak 1.273 mahasiswa. Selain mengelola kuota BBP sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Puslapdik, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola BBP Usulan Masyarakat sebanyak 578 mahasiswa, sehingga total kuota BBP untuk mahasiswa tahun 2023 sebanyak 1.851 mahasiswa.

Tahun	Kuota Pembiayaan Penuh KIPK			Kuota Biaya Pendidikan
	Prodi A	Prodi B	Prodi C	
2023	231 / 231	1577 / 1577	448 / 448	1273 / 1273

Kuota Penerapan Mhs KIP Kuliah untuk LLDIKTI wilayah VI

Seperti halnya pengelolaan KIP Kuliah, untuk mengoptimalisasi pengelolaan program BBP, pada tahun 2023 LLDIKTI Wilayah VI telah mengembangkan sistem pengelolaan BBP sehingga sistem dapat digunakan lebih mudah, efektif dan efisien serta menyesuaikan kebijakan yang berlaku.



Program BBP merupakan program bantuan yang termasuk dalam Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi. Dengan sasaran yang sama dengan KIP Kuliah, LLDIKTI Wilayah VI mendistribusikan kuota program BBP dengan menggunakan beberapa indikator kinerja perguruan tinggi yaitu capaian prestasi mahasiswa tingkat nasional, capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional, adanya aduan/temuan terkait pengelolaan KIP Kuliah yang terbukti, adanya mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah *on going* yang mundur pada pelaporan per semester, jumlah program studi terakreditasi A/Unggul, serta perguruan tinggi yang terdaftar pada laman portal PPKS. Atas hasil kinerja perguruan tinggi tersebut, kuota didistribusikan dengan menggunakan rasio masing-masing indikator untuk masing-masing akreditasi program studi. Kuota program BBP yang diterima oleh LLDIKTI didistribusikan ke perguruan tinggi ke masing-masing akreditasi program studi dengan harapan mahasiswa

penerima BBP merata ke semua akreditasi program studi dari A/Unggul, B/Baik Sekali, dan C/Baik.



Dalam pengelolaan KIP Kuliah, LLDIKTI Wilayah VI selalu menyampaikan terkait pengelolaan KIP Kuliah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku kepada perguruan tinggi penerima KIP Kuliah. Namun, masih terdapat aduan masyarakat yang masuk ke LLDIKTI Wilayah VI terkait adanya dugaan ketidaksesuaian pengelolaan KIP Kuliah. Pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) aduan terhadap perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI yang masuk dan telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung ke perguruan tinggi swasta atau mahasiswa serta pelapor. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi bahan aduan yaitu pungutan biaya kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah, kurangnya monitoring perguruan tinggi swasta terhadap keaktifan mahasiswa penerima KIP Kuliah, biaya hidup yang tidak diserahkan kepada mahasiswa KIP Kuliah, dan lainnya. Adapun hasil tindak lanjut dari aduan masyarakat ini adalah perguruan tinggi swasta mengembalikan dana ke kas negara, menyerahkan biaya hidup mahasiswa, ataupun penyelesaian atas kasus sesuai dengan permasalahan masing-masing.





Prestasi Mahasiswa

Dalam rangka mencari, mewadahi/mengumpulkan, mengatur, mendorong, dan mengembangkan bakat, minat, serta potensi generasi emas Indonesia untuk mencapai puncak prestasi tertinggi dalam berinovasi dan berkreativitas, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) memiliki beberapa program, salah satunya adalah Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres). Pilmapres merupakan salah satu ajang pembentukan karakter mahasiswa dalam melakukan inovasi, berpikir kreatif dan membentuk lulusan yang memiliki daya saing serta peka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang siap menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kegiatan Pilmapres tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu seleksi wilayah dan seleksi nasional. Untuk seleksi tingkat wilayah, sejak tahun 2021 Puspresnas mempercayakan sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam penyelenggaraannya.

Dalam rangkaian Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) tingkat wilayah Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah Jawa Tengah. Mahasiswa berprestasi yang masuk dalam ruang lingkup seleksi wilayah ini adalah mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri dan swasta, baik jenjang diploma dan sarjana, di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Melalui kegiatan ini, LLDIKTI Wilayah VI menetapkapkan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah Jawa Tengah yang akan mewakili untuk ke tahap selanjutnya seleksi tingkat nasional. Pada tahun 2023, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) mahasiswa jenjang sarjana dan 24 (dua puluh empat) mahasiswa jenjang diploma pada Pilmapres tingkat wilayah Jawa Tengah.



Sesuai dengan kuota hasil seleksi tingkat wilayah yang berhak mewakili wilayahnya menuju seleksi nasional awal, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah Jawa Tengah dengan kuota jenjang Sarjana sebanyak 4 (empat) mahasiswa dan jenjang Diploma sebanyak 7 (tujuh) mahasiswa.

Peserta Program Sarjana

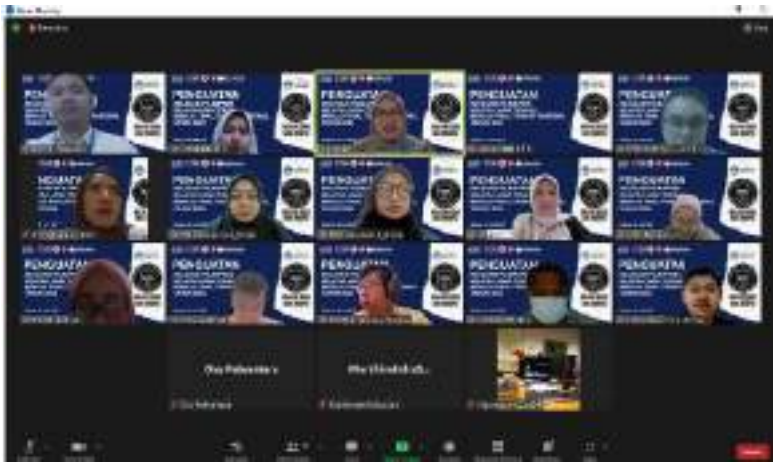
No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Dian Fatimatus Salwa	Universitas Negeri Semarang
2.	Syahidah Asma Amanina	Universitas Diponegoro
3.	I Putu Arya Aditia Utama	Universitas Jenderal Soedirman
4.	Nuri Utami	Universitas Muhammadiyah Surakarta

Peserta Program Diploma

No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Intan Sakina Ramadhani	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2.	Khairizma Aulia Syarifiyah	Universitas Diponegoro
3.	Gading Nasywaa Aji Azzahra	Universitas Sebelas Maret
4.	Mardhiva Indra Saputra	Universitas Setia Budi
5.	Claudio Ferdinan Cimi	Politeknik ATMI
6.	Yovita Christi	Universitas Pekalongan
7.	Nur Sahid	Universitas 'Aisyiyah Surakarta

Setelah penyelenggaraan kegiatan Pilmapres tingkat wilayah, dalam rangka memberikan pembekalan dan perbaikan kepada peserta seleksi tingkat nasional perwakilan dari wilayah Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional bagi 11 (sebelas) peserta disertai pendamping yang akan mewakili Jawa Tengah pada tahap seleksi nasional. Selanjutnya, peserta tingkat wilayah yang telah lolos pada seleksi awal tingkat nasional diberikan penguatan peserta wilayah Jawa Tengah untuk menuju seleksi tahap selanjutnya tingkat nasional melalui kegiatan Penguatan Delegasi Pilmapres Wilayah Jawa Tengah menuju Final Tingkat Nasional bagi 5 (lima) peserta.





Peserta Program Sarjana

No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Syahidah Asma Amanina	Universitas Diponegoro
2.	I Putu Arya Aditia Utama	Universitas Jenderal Soedirman

Peserta Program Diploma

No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Intan Sakina Ramadhani	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2.	Kharizma Aulia Syarifiyah	Universitas Diponegoro
3.	Mardhova Indra Saputra	Universitas Setia Budi

Pada Pilmapres seleksi akhir tingkat nasional, perwakilan Jawa Tengah jenjang sarjana lolos sebagai Juara 2 (dua) dan jenjang diploma juara 3 (tiga) dengan rincian pemenang sebagai berikut.

DAFTAR PEMENANG
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES) TAHUN 2023

1. Program Diploma

Juara	Nama Tim	Asal Perguruan Tinggi
Juara 1	VOLIKA SINCI SARI	INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Juara 2	FATIMAH NURUL IZZAH	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Juara 3	KHARIZMA AULIA SYARIFIYAH	UNIVERSITAS DIPONEGORO
Juara Harapan 1	FARHAN NAUFALDY	POLITEKNIK CALTEX
Juara Harapan 2	NABILAH AZIIZAH TJANDRA	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Juara Harapan 3	MUHAMMAD DAFFA FADLURRAHMAN	POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

2. Program Sarjana

Juara	Nama Tim	Asal Perguruan Tinggi
Juara 1	SCHALKE ANINDYA PUTRI	UNIVERSITAS GADJAH MADA
Juara 2	SYAHIDAH ASMA AMANINA	UNIVERSITAS DIPONEGORO
Juara 3	SHAKIRA AMIRAH	UNIVERSITAS INDONESIA
Juara Harapan 1	GASTIN GABRIEL JANGKANG	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Juara Harapan 2	I GEDE ASWIN PARISYA BASMANA	UNIVERSITAS UDAYANA
Juara Harapan 3	AZZAHRA PUTRI SANTI	INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Selain penyelenggaraan Pilmapres tingkat Wilayah, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan pendataan atas capaian prestasi mahasiswa pada kompetisi lain yang dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui laman PDDIKTI. Terdapat sebanyak 4.757 mahasiswa dari 119 PTS telah dilaporkan mendapatkan prestasi tingkat nasional dan internasional pada tahun 2023 melalui laman PDDIKTI.

Organisasi Kemahasiswaan

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan agar mampu menjadi organisasi kemahasiswaan yang kompeten, modern, berkarakter, dan cinta tanah air, dengan hormat kami sampaikan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI akan menyelenggarakan

kegiatan Pendampingan Peningkatan Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Untuk mendorong mahasiswa untuk meningkatkan *soft skill*-nya, mahasiswa perlu untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan melalui wadah organisasi kemahasiswaan. Melalui kegiatan pengalaman-pengalaman kegiatan kemahasiswaan akan menambah *skill* mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja.

Dengan adanya program-program kegiatan yang telah dilaksanakan di atas pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI dapat mencapai target terkait pengalaman mahasiswa di luar kampus dan prestasi mahasiswa minimal tingkat nasional. Dalam pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2023. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini, yaitu :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah;
2. Sistem kurasi prestasi mahasiswa untuk pelaporan data prestasi mahasiswa masih dalam tahap pengembangan oleh Puspresnas;
3. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih;
4. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship.

Sebagaimana permasalahan tersebut di atas, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Untuk mengatasi kendala tersebut, LLDIKTI Wilayah VI memiliki strategi yang telah dilakukan antara lain :

1. Secara rutin memberikan informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM melalui laman maupun media sosial;
2. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PTS berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM);
3. LLDIKTI WIlayah VI juga telah bekerjasama dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM) untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka (KM) Fair dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem MBKM di lingkungan PT;
4. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarkana kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa;
5. LLDIKTI WIlayah VI telah melakukan kegiatan pendampingan pengelolaan KIP Kuliah dengan bekerjasama dengan Puslapdik;
6. Melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD;
7. Melakukan pemantauan pelaporan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI;
8. Bekerja sama dengan organisasi pimpinan PT bidang kemahasiswaan PTS untuk meningkatkan capaian kompetensi mahasiswa.

Strategi-strategi tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk beberapa fasilitasi, yaitu :

1. Pendampingan Pengelolaan Kewairausahaan PT;
2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi MBKM Mandiri ;
3. Multi-Stakeholder Dialogue (MSD);
4. Kampus Merdeka Fair Semarang 2023 ”Kampus Merdeka, Bersama Lebih Baik;
5. Pendampingan Pengelolaan Program KIP Kuliah Merdeka;
6. Pengelolaan Hibah PKM dan P2MD;
9. Melakukan koordinasi Persiapan POMNAS XVIII Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Pengurus Daerah Jawa Tengah

Hasil dari strategi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI telah mampu meningkatkan sebanyak 95 PT telah melaporkan data MBKM dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15.763 orang. Di tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI juga mendapatkan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari DIKTI dan DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 69 PTS. Untuk program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah dari DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 3 PTS. Kegiatan PKM dan P2MD ini dalam rangka implementasi MBKM mahasiswa di perguruan tinggi. Total PTS yang mengimplementasikan MBKM sebanyak 158 PTS, yang mana pada capaian TW I terdapat 42 PT, pada capaian TW II terdapat 71 PT, dan capaian pada TW III sebanyak 45 PT. Pada TW III ini juga terdapat peningkatan jumlah perguruan tinggi menjadi 233 PTS. sehingga secara akumulatif untuk capaian tahun 2023 menjadi 67.52%.

LLDIKTI Wilayah VI senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong perguruan tinggi dalam meningkatkan implementasi kebijakan MBKM. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga mendorong perguruan tinggi dan memfasilitasi perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan kompetisi mahasiswa. Melalui kegiatan-kegiatan di atas, realisasi terkait Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dapat tercapai dan bahkan melebihi target. Pada tahun-tahun berikutnya, LLDIKTI Wilayah VI akan senantiasa meningkatkan layanannya untuk dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi khususnya mutu mahasiswa dan lulusan.

Indikator Kinerja Utama 2.2

Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Untuk menciptakan kampus aman dari tindak kekerasan seksual dan perundungan, perlu ada upaya bersama dari setiap elemen kampus. Dalam rangka penerapan dan implementasi Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan dan Anti Korupsi.

Adapun rumus yang dipergunakan dalam perhitungan indikator kinerja untuk pencapaian IKU terkait adalah

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
76	**86.95**	**87,30**	**86.95**	**91,2**

LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan Sosialisasi Implentasi Kebijakan Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan dan Anti Korupsi. Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan tindakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada pelaksanaan Tridharma sehingga dapat menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kaloboratif serta tanpa ada kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Warga Kampus.

Dalam mendukung implementasi kebijakan 4A yang terdiri dari pendidikan anti korupsi, anti perundungan, anti intoleransi serta anti kekerasan seksual pada perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI melakukan peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi dan memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta upaya penanaman nilai-nilai moral, pembekalan ilmu pengetahuan tentang hukum, adat istiadat ketimuran serta religius sebagai cara melahirkan calon-calon figur pemangku kekuasaan yang bersih dari korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. LLDIKTI Wilayah VI mendorong Perguruan Tinggi mengimplementasikan kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam meningkatkan peran perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 4A menghasilkan peningkatan yaitu pada tahun 2022 dari 230 perguruan tinggi swasta terdapat 175 perguruan tinggi swasta, sedangkan pada tahun 2023 untuk perguruan tinggi yang mengimplementasikan kebijakan kurikulum 4A meningkat dari target tahun 2022 sesuai restra LLDIKTI Wilayah VI sebesar 84,37% menjadi 86,32% dengan rincian dari 234 perguruan tinggi swasta terdapat 202 perguruan tinggi yang menerapkan implementasi kebijakan kurikulum 4A.

Peningkatan tersebut tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak yang berkentingan untuk mewujudkan atmosfer Pendidikan di perguruan tinggi yang aman serta nyaman bagi semua. Upaya LLDIKTI Wilayah VI yang terus menerus melakukan himbauan untuk seluruh perguruan tinggi serta komitmen dari pimpinan perguruan tinggi dan didukung

oleh seluruh pihak sehingga upaya menyadarkan arti pentingnya perlindungan terhadap semua pihak, utamanya mahasiswa untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas secara bertahap dapat meningkat.

Namun demikian, masih ada perguruan tinggi yang belum melakukan konfirmasi dalam menyampaikan partisipasinya untuk mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 4A tersebut masih menjadi target dari LLDIKTI Wilayah VI. Ketidaktahuan dan kekurangaktifan pimpinan perguruan tinggi beserta jajarannya menjadi salah satu faktor belum semua perguruan tinggi terlibat dalam mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 4A tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, LLDIKTI akan selalu berupaya untuk memberikan himbauan, informasi dalam bentuk sosialisasi serta melakukan konfirmasi ke semua perguruan tinggi untuk menyadarkan kembali upaya pentingnya mewujudkan kepastian sistem kurikulum perguruan tinggi utamanya terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum 4A ini yang pastinya akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keamanan dan kenyamanan semua pihak baik untuk semua jajaran perguruan tinggi maupun bagi para mahasiswa yang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.

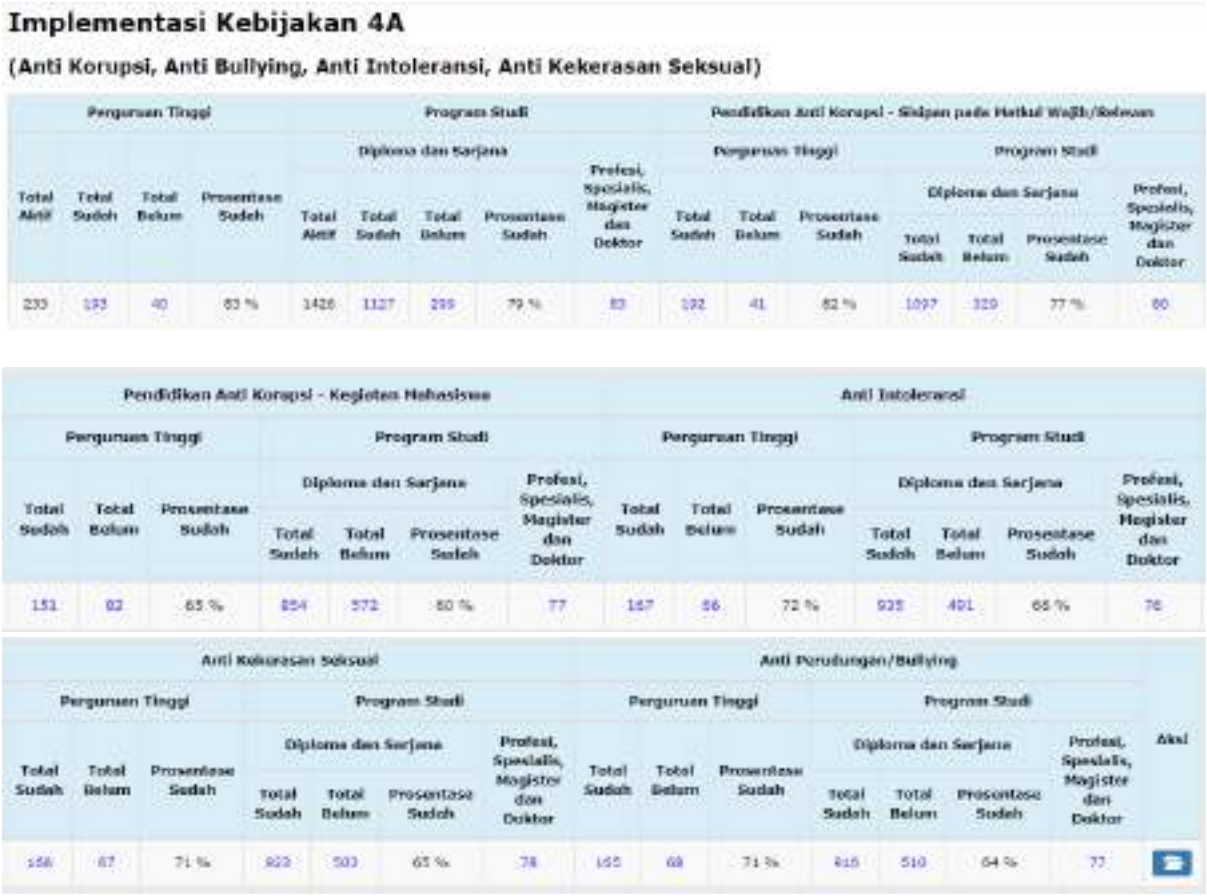
Dalam upaya peningkatan implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), LLDIKTI Wilayah VI senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Karakter (Puspeka) Kemdikbudristek terkait pendaftaran akun perguruan tinggi swasta, pendataan pansel serta tim satgas PPKS yang dibentuk pada perguruan tinggi swasta pada laman portal PPKS.



Selain memonitoring pendaftaran perguruan tinggi pada laman portal PPKS, LLDIKTI Wilayah VI juga mendorong perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PPKS dengan mendatakan pelaksanaan PPKS di lingkungan perguruan tinggi melalui laman Sibraja.



Dalam pemantauan implementasi kebijakan 4A di perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan pendataan implementasi kebijakan 4A pada laman Sibraja.



Selain pendataan, himbauan, serta arahan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI ke berbagai perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan juga Anti Intoleransi untuk saling bersinergi memberikan pemahaman pentingnya pendidikan 4A tersebut serta Tindakan pencegahan agar tidak timbul permasalahan terkait dengan perundungan, intoleransi serta kekerasan seksual.

Dengan adanya pemantauan implementasi kebijakan 4A yang telah dilaksanakan di atas pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI dapat mencapai target terkait implementasi 4A di lingkungan perguruan tinggi. Dalam pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2023. Kendala yang dihadapi perguruan tinggi terkait anti kekerasan seksual adalah perguruan tinggi masih kesulitan dalam pembentukan Pansel dan Satgas PPKS yang mewajibkan harus mengikuti pelatihan terpusat terlebih dahulu melalui laman portal PPKS.

Strategi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah menjadikan pembentukan satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota KIP Kuliah tahun 2023, dan secara rutin mengadakan koordinasi dengan PUSPEKA untuk memastikan alur pelatihan bagi perguruan tinggi swasta. Dari hasil tersebut, LLDIKTI WIlayah VI bekerjasama dengan PUSPEKA mengadakan fasilitasi Sosialisasi Pembentukan SATGAS PPKS melalui laman Portal PPKS.

Strategi dan upaya fasilitasi tersebut membuahkan hasil dengan meningkatnya perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan Kebijakan 4A pada aspek anti kekerasan seksual yang mengalami peningkatan partisipasi pada laman portal ppks yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Karakter (PUSPEKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang semula pada awal TW 2 hanya sejumlah 6 Perguruan Tinggi Swasta yang telah mengimplementasikan, sekarang meningkat menjadi 109 Perguruan Tinggi. sehingga secara akumulatif untuk capaian tahun 2023 menjadi 87.30%.

LLDIKTI Wilayah VI senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong perguruan tinggi dalam meningkatkan implementasi kebijakan antiintoleran, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga mendorong perguruan tinggi untuk membentuk satgas PPKS dan melaporkannya melalui laman portal PPKS. Melalui kegiatan-kegiatan di atas, realisasi terkait Persentase PTS yang memiliki memiliki kebijakan implementasi kebijakan antiintoleran, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi dapat tercapai dan bahkan melebihi target. Pada tahun-tahun berikutnya, LLDIKTI Wilayah VI akan senantiasa meningkatkan layanannya untuk dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi khususnya dalam implementasi 4A.

Sasaran Kinerja Utama 3

Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dan dampak besar dalam dunia pendidikan, ditambah dalam beberapa tahun kemarin kita mengalami pandemi COVID yang menyebabkan perubahan dalam proses pembelajaran dalam upaya menjaga jarak untuk membatasi penyebaran virus tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk dapat memunculkan bentuk inovasi-inovasi bentuk pembelajaran agar proses pembelajaran tidak mengalami hambatan maupun kendala. Begitu juga LLDIKTI Wilayah VI, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat berkepentingan untuk selalu memiliki informasi penting dan terukur

dalam hal penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai dasar untuk melaksanakan tugas utama LLDIKTI yaitu melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Jawa Tengah dengan selalu mendorong perguruan tinggi untuk selalu memutakhirkan laporan data pelaksanaan kegiatan akademik serta selalu mengawal implementasi pada perguruan tinggi melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam mengawal mutu Pendidikan tinggi, maka LLDIKTI Wilayah VI selalu melakukan sosialisasi dan pemantauan dari pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan maupun hasil keluarannya.

Beberapa Langkah yang dilakukan oleh LLDIKTI dalam meningkatkan mutu Pendidikan tinggi utamanya dalam hal sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi antara lain :

1. Mengembangkan sistem untuk memantau perkembangan kelengkapan dokumen spmi pada perguruan tinggi
2. Melakukan himbauan pentingnya menjaga dan meningkatkan mutu pada perguruan tinggi
3. Melaksanakan workshop SPMI dan Audit Mutu Internal pada Perguruan Tinggi
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis pengisian pelaporan SPMI pada sistem spmi
5. Memantau dan memastikan lulusan perguruan tinggi sesuai dengan mutu dan ketentuan yang berlaku

Dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi, pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan terkait penguatan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi melalui kegiatan Asistensi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal bagi perguruan tinggi serta Pendampingan Pelaporan SPMI bagi Perguruan Tinggi Vokasi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga mendapatkan hibah Bantuan Penguatan Fasilitator Wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Melalui dana bantuan ini, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Internalisasi Penguatan Penjaminan Mutu Internal, Asistensi Implementasi dan Pelaporan SPMI bagi Perguruan Tinggi Akademik, dan *Workshop* Penguatan Penjaminan Mutu Internal bagi Pengelola Program Studi Baru/ Belum Terakreditasi.





Terkait pelaporan SPMI, perguruan tinggi melaporkan dokumen SPMI nya melalui laman https://spmi.kemdikbud.go.id/auth/login. dalam pelaporan di laman SPMI tersebut, tim fasilitator wilayah SPMI akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen SPMI perguruan tinggi.





Indikator Kinerja Utama 3.1

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian ada masyarakat. Tugas utama dosen tersebut tertuang dalam tridharma. Tugas dan kewajiban dosen dengan jelas disebutkan bahwa dalam satu semester dosen sekurang-kurangnya melaksanakan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 16 (enam belas) satuan kredit semester. Implementasi tridharma tersebut terdapat dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.

Selaras dengan Implementasi MBKM dan mendukung berjalannya MBKM dosen harus secara aktif menjadi pembimbing mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut, maka dosen harus mengembangkan dirinya serta memiliki tekad untuk melaksanakan hal tersebut, dengan berkegiatan di luar kampus melalui tridharma yang menjadi tugas pokoknya.

Adapun rumus yang dipergunakan dalam perhitungan indikator kinerja adalah

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
75,65	**77.81**	**84,79**	**77.81**	**82,87**

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI (LLDIKTI Wilayah VI) merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah dosennya 14.973 dosen yang tersebar pada 234 Perguruan Tinggi, dan terdapat 198 Perguruan Tinggi yang dosennya telah bersertifikat pendidik. Pelaksanaan indikator kinerja pada Tahun 2022 terealisasi sejumlah 84,79%. Pada tahun 2023, target pelaksanaan IKU ini adalah 77,81% meningkat dari tahun 2022. Realisasi pada akhir tahun 2023 yaitu 84,79% dengan dosen yang melaksanakan tridharma diluar kampus mayoritas adalah dosen yang telah bersertifikat pendidik, dosen dari PT Vokasi, serta dosen dari Perguruan Tinggi Kesehatan. Hal ini mempertegas pelaksanaan tugas dan kewajiban dosen, dalam beban kerja dosen setiap semester.

Pelaksanaan tridharma di luar kampus sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI, dengan kriteria kegiatan mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen dengan contoh kegiatan mengajar, membimbing, membina kegiatan mahasiswa seperti Kegiatan KKN, KKL. di dharma yang ke 2 yakni penelitian, kriterianya adalah membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan. Untuk penelitian tersebut, dosen mayoritas melaksanakan penelitan di luar kampus, dan bekerjasama dengan dosen lain, mahasiswa, maupun dengan praktisi. Demikian pula, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dosen dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan mengajak serta mahasiswa.

Pelaksanaan Kegiatan di Perguruan tinggi pasti tak lepas dari Tri dharma perguruan tinggi, yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketiganya menjadi poin penting dalam mewujudkan visi dari perguruan tinggi. Ketiga hal tersebut juga menjadi tanggung jawab semua elemen yang terdapat di Perguruan Tinggi, diantaranya

mahasiswa, dosen, serta berbagai sivitas akademika yang terlibat. Untuk mencapai aktifitas yang menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, c.q. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah VI mendorong perguruan tinggi untuk dapat lebih aktif dalam membimbing para dosennya untuk mengajukan serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan LLDIKTI Wilayah VI mengelola hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk para dosen perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah.

Guna mendukung kegiatan tridharma utamanya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LLDIKTI Wilayah VI juga melaksanakan pengelolaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diraih oleh para dosen sebagai peneliti di perguruan tinggi serta melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya FGD Peningkatan Riset dan Publikasi, Asistensi Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Pemula, serta Bimbingan Teknis Verifikator Sinta Perguruan Tinggi Swasta.







Untuk memudahkan pengelolaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LLDIKTI Wilayah VI juga membuat media penunjang yaitu adanya sistem e-kontrak untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun untuk hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diraih oleh para dosen/peneliti di perguruan tinggi pada tahun 2023 sebagai berikut :

Jenis Hibah	Jenis	PTS	Judul	Nominal
Penelitian	Baru	84	378	Rp. 25.040.700.000
	Lnjutan	18	63	Rp. 9.753.865..000
Pengabdian	Batch I	31	100	Rp. 5.900.983.000
	Batch 2	53	114	Rp. 3.471.035.000
Vokasi		28	53	Rp. 1.856.718.000

Table data hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023

Selain itu untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen maupun peneliti di perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI mengembangkan sistem e-kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dimana melalui sistem tersebut semua *stakeholder* yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib untuk menyampaikan progress pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi masing-masing baik itu dari unsur pimpinan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat maupun dosen atau peneliti yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah.





Berdasarkan data yang didapatkan dari SISTER, Sibraja, terdapat 182 Perguruan Tinggi yang dosennya melaksanakan tridharma/berkegiatan di luar kampus dengan daftar sebagai berikut :

No	Nama PT
1	Universitas Kristen Satya Wacana
2	Universitas Islam Sultan Agung
3	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
4	Universitas Muhammadiyah Magelang
5	Universitas Slamet Riyadi
6	Universitas Wijayakusuma Purwokerto
7	Universitas Muhammadiyah Surakarta
8	Universitas Muria Kudus
9	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)
10	Universitas Pekalongan
11	Universitas Katolik Soegijapranata
12	Universitas Pancasakti Tegal
13	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
14	Universitas Islam Batik
15	Universitas Veteran Bangun Nusantara

16	Universitas Semarang
17	Universitas Widya Dharma
18	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
19	Universitas Pandanaran
20	Universitas Setia Budi
21	Universitas Surakarta
22	Universitas Muhammadiyah Purworejo
23	Universitas Muhammadiyah Semarang
24	Universitas Wahid Hasyim
25	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
26	Universitas Stikubank
27	Universitas Sains Alqur an
28	Universitas Dian Nuswantoro
29	Universitas Sultan Fatah
30	Universitas Sahid Surakarta
31	Universitas Aki
32	Universitas Boyolali
33	Universitas Muhadi Setiabudi
34	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
35	Universitas PGRI Semarang
36	Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen
37	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
38	Universitas Peradaban
39	Universitas Selamat Sri
40	Universitas Ngudi Waluyo
41	Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

42	Universitas Nasional Karangturi Semarang
43	Universitas Duta Bangsa Surakarta
44	Universitas Harapan Bangsa
45	Universitas Ivet
46	Universitas Muhammadiyah Kudus
47	Universitas Perwira Purbalingga
48	Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
49	Universitas An Nuur
50	Universitas Amikom Purwokerto
51	Universitas Kusuma Husada Surakarta
52	Universitas Maritim AMNI
53	Universitas 'Aisyiyah Surakarta
54	Universitas Sains dan Teknologi Komputer
55	Universitas Widya Husada Semarang
56	Universitas Putra Bangsa
57	Universitas Muhammadiyah Gombong
58	Universitas Al-Irsyad Cilacap
59	Universitas Bhamada Slawi
60	Universitas Karya Husada Semarang
61	Universitas Al Hikmah Jepara
62	Universitas Muhammadiyah Klaten
63	Universitas Muhammadiyah Kendal Batang
64	Universitas Dharma AUB Surakarta
65	Universitas YPPI Rembang
66	Universitas Muhammadiyah Karanganyar
67	Universitas Pignatelli Triputra

68	Universitas Kristen Teknologi Solo
69	Universitas Safin Pati
70	Institut Teknologi Telkom Purwokerto
71	Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
72	Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta
73	Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan
74	Institut Teknologi dan Bisnis Semarang
75	Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
76	Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang
77	Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia
78	Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono
79	Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus
80	Institut Teknologi dan Bisnis Adias
81	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi
82	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna
83	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
84	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria
85	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti
86	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala
87	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang
88	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming
89	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
90	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama
91	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah
92	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia
93	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri

94	STMIK Widya Utama
95	STMIK Bina Patria
96	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA
97	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang
98	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin
99	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya
100	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara
101	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi
102	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali
103	STMIK Sinar Nusantara
104	STMIK Widya Pratama
105	Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo
106	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani
107	STMIK Himsya
108	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
109	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli
110	STMIK AKI Pati
111	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa
112	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal
113	STMIK YMI Tegal
114	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap
115	STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara
116	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto
117	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso
118	Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta
119	STIKES Telogorejo Semarang

120	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang
121	STIKES Mitra Husada Karanganyar
122	STKIP Majenang
123	STIKES Estu Utomo
124	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional
125	STIKES Mamba ul Ulum Surakarta
126	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta
127	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati
128	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
129	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa
130	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas
131	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes
132	Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta
133	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
134	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala
135	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo
136	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro
137	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern
138	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap
139	Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria
140	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
141	Akademi Maritim Nusantara Cilacap
142	AMIK PGRI Kebumen
143	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
144	Akademi Akuntansi Effendi Harahap

145	Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta
146	Akademi Analis Kesehatan Pekalongan
147	AMIK Jakarta Teknologi Cipta
148	Akademi Keperawatan Yappi Sragen
149	Akademi Kebidanan Mardi Rahayu
150	Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo
151	Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara
152	Akademi Keperawatan Giri Satria Husada
153	Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang
154	Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan
155	Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta
156	Akademi Kebidanan KH Putra
157	Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang
158	Akademi Keperawatan Primaya
159	Politeknik Pratama Mulia
160	Politeknik Muhammadiyah Magelang
161	Politeknik Pratama
162	Politeknik Sawunggalih Aji
163	Politeknik Harapan Bersama
164	Politeknik Indonusa Surakarta
165	Politeknik Manufaktur Ceper
166	Politeknik Banjarnegara
167	Politeknik Muhammadiyah Tegal
168	Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia
169	Politeknik ATMI
170	Politeknik Santo Paulus Surakarta

171	Politeknik Katolik Mangunwijaya
172	Politeknik Bumi Akpelni
173	Politeknik Akbara
174	Politeknik Rukun Abdi Luhur
175	Politeknik Harapan Bangsa Surakarta
176	Politeknik Insan Husada Surakarta
177	Politeknik Piksi Ganesha Indonesia
178	Akademi Teknik Elektro Medik
179	Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang
180	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga
181	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum
182	Akademi Kesehatan Asih Husada
183	Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa
184	Akademi Keperawatan Al Kautsar Temanggung
185	Akademi Kebidanan Muslimat Nahdhatul Ulama Kudus
186	Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto
187	Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang
188	Akademi Kebidanan Siti Fatimah
189	Akademi Pelayaran Nasional Surakarta
190	Politeknik Bhakti Semesta
191	Politeknik Stibisnis
192	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ibnu Sina Ajibarang
193	STT Minyak dan Gas Cilacap
194	STKIP Darussalam Cilacap
195	STKIP Muhammadiyah Blora
196	STMIK Komputama Majenang

197	Akademi Teknik Tirta Wiyata
198	Politeknik Yakpermas Banyumas

Permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian, lebih kepada pendataan dosen yang berkegiatan di luar kampus. Tidak semua perguruan tinggi mengisi dengan lengkap data tersebut. LLDIKTI Wilayah VI telah mengakomodir pendataan melalui sistem.lldikti6.id (SIBRAJA). Data lain yang dapat dijadikan sumber sebenarnya terlihat pada SISTER, pada laporan beban kerja dosen, tetapi data tersebut tidak terdapat menu yang mengakomodir LLDIKTI untuk mengunduh dan mengumpulkan data tridharma dosen.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

Indikator Kegiatan 4.1

Predikat SAKIP

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
A	A	A	A	A

Tata kelola LLDIKTI Wilayah VI mengalami perbaikan secara terus menerus. Dibuktikan dari setelah dinobatkannya LLDIKTI Wilayah VI sebagai satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 hingga 2023 LLDIKTI Wilayah VI berproses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bukti adanya perbaikan tatakelola juga terlihat dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang semakin meningkat kualitasnya. Sesuai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan internal oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LLDIKTI Wilayah VI berada pada kategori/predikat "A" dengan interprestasi "Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel". Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannnya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP di LLDIKTI Wilayah

VI melalui 2 (dua) tahap, yakni Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Satuan Kerja (Satker), dan Reviu atas Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

Berikut rincian nilai implementasi SAKIP LLDIKTI Wilayah VI tahun 2022 berdasarkan evaluasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24.6
2.	Pengukuran Kinerja	30%	26.5
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**A**	**85.35**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di LLDIKTI Wilayah VI antara lain:

1. Rapat evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
2. Penyusunan rencana tindak lanjut/rencana aksi melalui penjadwalan kegiatan;
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja antara kepala LLDIKTI Wilayah VI dengan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek;
4. Sosialisasi PK kepada seluruh Brayat Agung LLDIKTI Wilayah VI;
5. Review laporan kinerja;
6. Pengembangan peningkatan kapasitas pegawai;
7. Penyusunan rencana aksi melalui aplikasi spasikita;
8. Mempublikasikan dokumen SAKIP melalui Website LLDIKTI Wilayah VI;
9. Menyusun rencana kinerja tahunan dalam aplikasi spasikita;
10. Review dan evaluasi kinerja anggaran yang dilaksanakan secara periodik;
11. melaksanakan revisi anggaran yang digunakan untuk kegiatan-Kegiatan yang mendukung pencapaian IKK;
12. melaksanakan review laporan keuangan secara berkala;
13. Menindaklanjuti hasil dari LHE yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan;
14. Melakukan evaluasi mandiri melalui aplikasi spasikita;
15. Melayani kunjungan studi tiru terkait sistem aplikasi keuangan SiCantik dan Seruni.
16. Pengembangan aplikasi keuangan dan melayani konsultasi stakeholder

Meskipun secara target capaian tahun 2023 telah tercapai, namun masih ditemui hambatan kendala dan permasalahan peningkatan kualitas implementasi

sakip di LLDIKTI Wilayah VI. Sesuai hasil penilaian oleh Biro perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek komponen Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja 24,6, Pengukuran kinerja 25,5, Pelaporan Kinerja dari bobot 12,75, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 22,5 dengan total nilai SAKIP 85,35 berpredikat A. Terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu:

1. Perencanaan
    a. Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan, antara lain dengan penyesuaian IKU dengan Kepmendikbudristek Nomo 210/M/2023. Perbaikan analisa penentuan target dengan dasar pencapaian tahun berikutnya dengan menggunakan strategi-strategi yang digunakan pada tahun sebelumnya. Terdapat dokumen yang mampu menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) yang berakibat belum dapat disimpulkan kausalitas pencapaian indikator kinerja individu dengan pencapaian indikator diatasnya diatasnya misalkan matriks peran hasil.
    b. Perencanaan Kinerja ditingkatkan pemanfaatannya untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan antara lain melakukan analisa anggaran yang ditetapkan untuk tiap target indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi realisasi anggaran pada LAKIN tahun sebelumnya dan rekapitulasi pengukuran pencapaian tiap triwulan dari masing-masing indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja.

2. Pengukuran

Menyusun Pedoman Pengumpulan Data Kinerja berdasarkan POS yang sudah dimiliki dan perlunya reviu POS Pengumpulan data yang ada sehingga dapat menjelaskan bagaimana pencapian pengukuran kinerja setiap bulanan/triwulannya untuk dapat memastikan target dapat terpenuhi di akhir tahun anggaran dan terdapat perbaikan kualitas pencapaian kinerja sehingga seluruh target kinerja dari masing-masing indikator dapat tercapai.

3. Pelaporan

Pelaporan Kinerja ditingkatkan dampak yang dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian target pada perencanaan kinerja dan mempengaruhi pada budaya kerja organisasi.

4. Evaluasi

Menganalisis peningkatan implementasi SAKIP pada indikator kinerja yang mana dan menjelaskan efektifitas dan efisiensi terkait dengan hasil evaluasi akuntabilitas pada tahun berjalan.

Permasalahan dan kendala lain yang ditemui dalam pencapaian target 4.1 tahun 2023 yaitu terjadi beberapa kali refocusing anggaran. Beberapa kali antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain :

1. Melakukan reviu Renstra LLDIKTI Wilayah VI 2020-2024 setiap tahun;
2. Mengembangkan inovasi dalam rangka pencapaian dan pengukuran capaian IKK;
3. Mereview penjadwalan kegiatan untuk menyelaraskan dengan target IKK yang ada dalam Perjanjian kinerja;
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap awal tahun dengan berdasar pada capaian informasi dalam LAKIP;
5. Melakukan evaluasi kinerja rencana aksi/kegiatan bersama penangungjawab kegiatan/ketua kelompok kerja.

Indikator Kegiatan 4.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
90,24	**91**	**93,65**	**91**	**91**

Tahun 2023 berdasarkan penilaian pada aplikasi SPASIKITA, nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sebesar 97,02 Dapat disimpulkan bahwa target IK 4.2 telah tercapai dengan baik. Dari target sebesar 91 terealisasi 97,02 Capaian realisasi nilai kinerja anggaran tersebut diperoleh dari akumulasi nilai EKA 99,78 dan IKPA 94,26

Dibandingkan dengan pencapaian 2022 capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,78 poin dari sebelumnya 90,24 menjadi 97,02 Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 91 sudah tercapai.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh instansi pemerintah. Pada tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan dari nilai atas atas implementasi anggaran dengan bobot 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 persen. Namun pada tahun 2023 bobot tersebut berubah menjadi 50 persen dan nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan 50 persen. Penilaian pada aspek implementasi dilakukan dengan melihat empat indikator yaitu capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.Sedangkan indikator kinerja penilaian IKPA ada 13 indikator yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, capaian output, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Return SP2D, Pagu minus, dan Dispensasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan "terwujudnya tatakelola LLDIKTI yang baik", LLDIKTI Wilayah VI menambah dan memperbarui fitur aplikasi SICANTIK (Sistem Perencanaan Keuangan Elektronik) dan SERUNI (Sertifikasi Dosen Untuk Indonesia). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L selama tahun 2022 antara lain:

1. Review Laporan Keuangan;
2. Mengadakan kegiatan guna peningkatan kompetensi Pegawai;
3. Review dan evaluasi kinerja anggaran secara berkala;
4. Pengendalian atas laporan keuangan oleh TIM SPI;
5. Menyusun laporan keuangan setiap Tri Wulan dan direview oleh SPI;
6. Merevisi halaman III DIPA sesuai dengan jadwal;
7. Menyampaikan laporan capaian kegiatan melalui aplikasi spasikita yang dilaksanakan setiap bulan;
8. Melakukan revisi RKA-K/L yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKK;
9. Melakukan rekon data internal antara data Keuangan dan data barang milik negara;
10. Melakukan rekon eksternal dengan KPPN sebelum batas waktu yang ditentukan;
11. Melakukan koordinasi dengan petugas persediaan;
12. Operator persediaan melakukan stock opname persediaan setiap semester;
13. Operator persediaan mengirim data ke BMN setiap bulan;
14. Melakukan telaah Laporan Keuangan setiap triwulan;
15. Melakukan koordinasi Internal di LLDIKTI Wilayah VI;
16. Mengisi Laporan Tahunan pada aplikasi Spasikita.

Permasalahan dan hambatan yang dijumpai dalam upaya pencapaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L yaitu terjadi beberapa kali refocusing anggaran.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target kinerja yaitu:

1. memfokuskan kegiatan pada kegiatan yang langsung berkaitan dengan pencapaian IKK 4.2;
2. mengembangkan berbagai inovasi dalam mendukung perbaikan tata kelola melalui Aplikasi Sicantik dan Seruni.

Sedangkan rencana tindak lanjut atau langkah antisipasi yang akan dilakukan ke depan agar permasalahan yang muncul tersebut tidak dijumpai kembali antara lain dengan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pokja pelaksana kegiatan melalui kegiatan rapat internal yang dilaksanakan secara periodik.

Kinerja IKU Baru 2023

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88	88	100%
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	82,05	82,05	100%
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	67,52	72,1	106,78%
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4,13	5,22	126,39%

	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	86,32	87,98	101,92%
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	20,09	22,64	112,69%
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	78,2	81,5	104,21%
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	A	100%
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	97,02	106,61%

Sasaran Kinerja Utama 1

Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Layanan utama LLDIKTI

Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori:

a. Layanan akademik.

b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan.

c. Layanan terkait dengan administrasi.

Formula:

$$\frac{n}{t} x\ 100$$

n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

t= total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
88	88,17	88	88,5

Berdasarkan data SKM LLDIKTI Wilayah VI mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yakni dari 87,79% sampai dengan 88,45%. Kemudian terjadi penurunan pada hasil nilai SKM di tahun 2023 yaitu menjadi 88,17%. Setelah dilakukan analisis, faktor tertinggi akibat penurunan kecepatan waktu layanan dari aspek pengusulan Jabatan Fungsional. Dengan adanya perubahan peraturan terkait jabatan fungsional, khususnya terkait pengakuan Angka Kredit, yang berubah - ubah sejak awal tahun. Hal tersebut menyebabkan usulan yang masuk menjadi bertambah hampir 50% sehingga memerlukan waktu dan upaya lebih dari tahun sebelumnya. Selain itu terdapat perubahan kebijakan terkait penggunaan SISTER ke SISTER CLOUD serta SISTER DISPAKATI, yang juga memakan waktu serta *error* data antara PDDIKTI, SISTER, dan SIASN, sedangkan target penyelesaian bersamaan dengan waktu target usulan - usulan Jabatan Fungsional terutama Lektor Kepala dan Guru Besar.

Sebagai solusi atas kendala tersebut, disusun beberapa rencana peningkatan kinerja diantaranya:

1) Menentukan skala prioritas terkait penyelesaian layanan jabatan fungsional, konversi Angka Kredit, validasi Beban Kerja Dosen, serta layanan-layanan lain di pokja Sumber Daya Perguruan Tinggi (SDPT);

2) Memaksimalkan peran anggota pokja sesuai dengan skala prioritas, serta kemampuan masing-masing;
3) Memaksimalkan komunikasi dengan pengguna layanan, baik melalui surat edaran, maupun program pendampingan.

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan pts lain.

Formula:

$$\frac{a + b}{t} \times 100$$

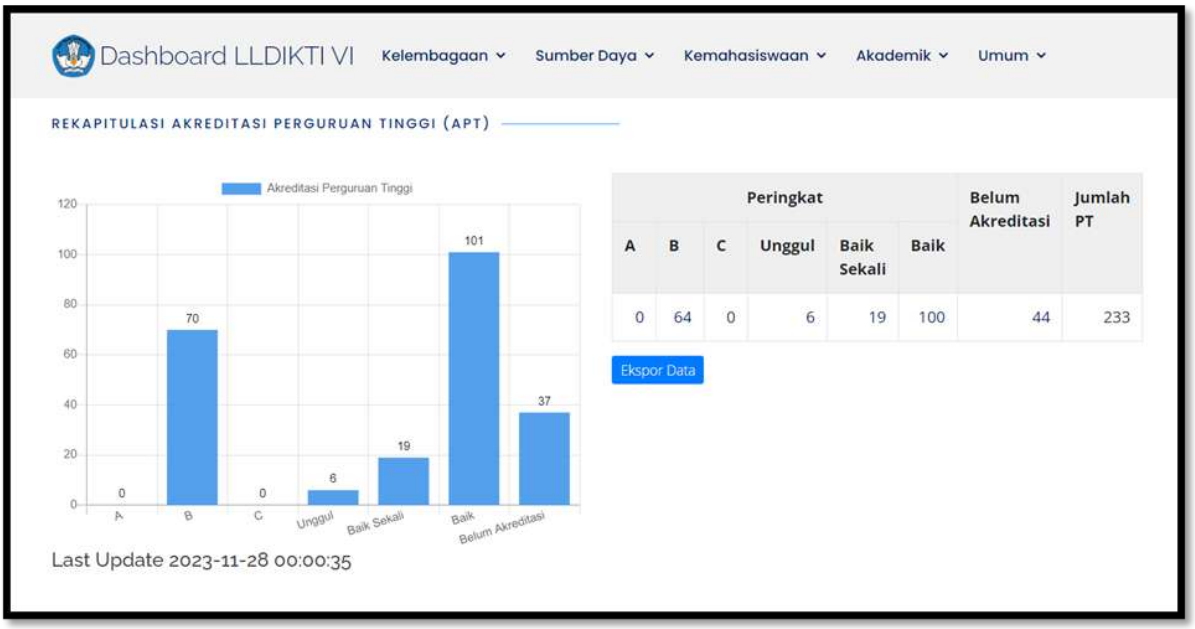
a = jumlah PTS yang terakreditasi

b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
82,05	**82,05**	**82,05**	**93,99**

Data pada tabel di atas didapat setelah dilakukan penghitungan atas rasio PTS yang terakreditasi dengan jumlah PTS secara keseluruhan. Berikut ini adalah datanya.



Rekapitulasi APT PTS LLDIKTI Wilayah VI

Jumlah PTS yang terakreditasi pada data tersebut berjumlah 190 PTS, dengan jumlah PTS seluruhnya adalah 233 PTS, tetapi telah disepakati bahwa data pembanding jumlah PTS (*cut off*) adalah 234 PTS, dan jumlah PTS terakreditasi adalah 195 PTS. Kesepakatan ini diambil karena jumlah PTS terakreditasi dan jumlah PTS keseluruhan bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti faktor proses re-akreditasi maupun penggabungan/penyatuan PTS.

Alasan data PTS terakreditasi ditambah 5 PTS adalah pada saat penyusunan LAKIN ini, kelima PTS tersebut sedang berproses Akreditasi Perguruan Tingginya di BAN-PT. Kelimanya yaitu :

1. STKIP NU Kabupaten Tegal : telah mengunggah borang akreditasi pada sistem SAPTO BAN-PT
2. STIE Satria Purwokerto : telah mengunggah borang akreditasi pada sistem SAPTO BAN-PT
3. Universitas Bhamada Slawi : sedang dilakukan proses evaluasi untuk perpanjangan akreditasi
4. STIKES Graha Mandiri Cilacap : sedang dilakukan proses evaluasi untuk perpanjangan akreditasi
5. STIKES Pemkab Purworejo : sedang dilakukan surveilen APT setelah dilakukan perubahan bentuk

Sesuai data-data yang disampaikan tersebut maka didapatkan hasil penghitungan terhadap capaian kinerja adalah sebesar 82,05%. Hasil ini tidak bisa dibandingkan dengan data sebelumnya karena hasil penghitungan ini mengikuti IKU baru yang telah ditetapkan.

Program Percepatan APT

Menyikapi indikator Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dan untuk memberikan fasilitasi kepada PTS untuk meningkatkan kualitas mutunya, LLDIKTI Wilayah V dan LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan fasilitasi Percepatan APT bagi PT yang Tidak Terakreditasi oleh BAN-PT. Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada PTS yang belum terakreditasi serta masih dalam proses penyusunan instrument APT, untuk selanjutnya akan dilakukan pendampingan langsung oleh BAN-PT melalui asesornya untuk menyelesaikan instrumen akreditasi.

Untuk PTS di wilayah Jawa Tengah, telah dipilih 11 (sebelas) PTS berdasarkan analisa kesiapan PTS tersebut dalam melakukan Akreditasi yaitu:

1. Akademi Seni dan Desain Indonesia Surakarta

2. Politeknik Rukun Abdi Luhur

3. Akademi Kebidanan KH Putra

4. Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang

5. Akademi Kebidanan Siti Fatimah

6. STT Woworotomo Purwokerto

7. Institut Teknologi Bisnis Dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia

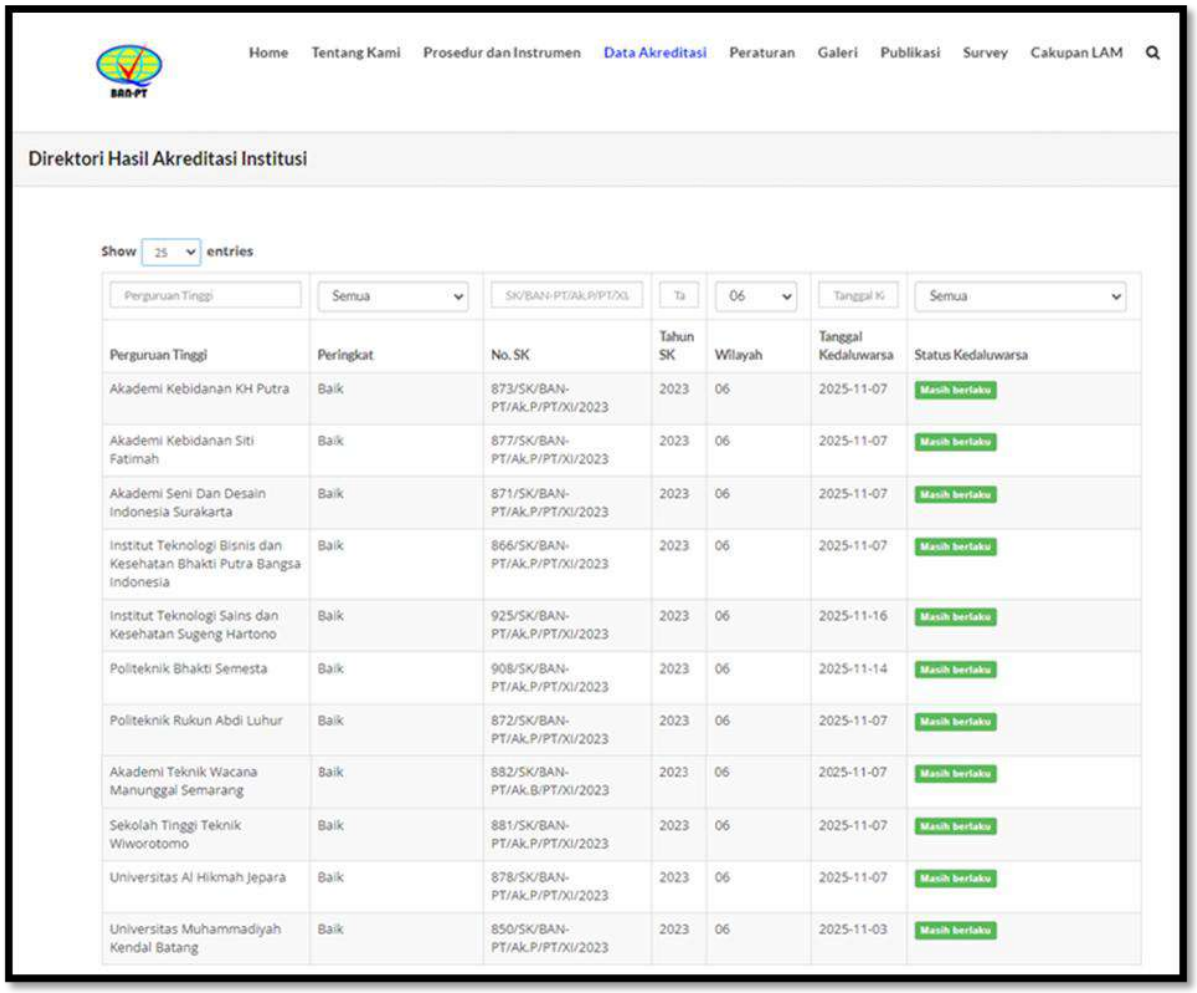
8. Universitas Muhammadiyah Kendal Batang

9. Universitas Al Hikmah Jepara

10. Politeknik Bhakti Semesta

11. Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono

Pemilihan kesebelas PTS tersebut dilakukan setelah menganalisa keaktifan PTS tersebut dalam berbagai program pendampingan APT yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2023, serta 11 PTS tersebut memang masih dalam proses penyusunan instrumen APT sehingga membutuhkan percepatan dari BAN-PT. Hasil dari program Percepatan APT ini telah muncul dan kesebelas PTS telah terakreditasi. Berikut adalah datanya yang diambil dari laman BAN-PT.



Home Tentang Kami Prosedur dan Instrumen Data Akreditasi Peraturan Galeri Publikasi Survey Cakupan LAM

Direktori Hasil Akreditasi Institusi

Show 25 entries

Perguruan Tinggi	Peringkat	No. SK	Tahun SK	Wilayah	Tanggal Kedaluwarsa	Status Kedaluwarsa
Akademi Kebidanan KH Putra	Baik	873/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-07	Masih berlaku
Akademi Kebidanan Siti Fatimah	Baik	877/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-07	Masih berlaku
Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta	Baik	871/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-07	Masih berlaku
Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia	Baik	866/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-07	Masih berlaku
Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono	Baik	925/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-16	Masih berlaku
Politeknik Bhakti Semesta	Baik	908/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-14	Masih berlaku
Politeknik Rukun Abdi Luhur	Baik	872/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-07	Masih berlaku
Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang	Baik	882/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-07	Masih berlaku
Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo	Baik	881/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-07	Masih berlaku
Universitas Al Hikmah Jepara	Baik	878/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-07	Masih berlaku
Universitas Muhammadiyah Kendal Batang	Baik	850/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2023	2023	06	2025-11-03	Masih berlaku

Data APT LLDIKTI Wilayah VI Hasil Program Percepatan APT

Permasalahan dan Pendampingan PEPA

Dari data Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi seperti yang terlihat pada data Rekapitulasi APT PTS LLDIKTI Wilayah VI di atas, 30% atau 70 PTS diantaranya

terkena Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA). Data yang dirilis oleh BAN-PT pada tanggal 5 Oktober 2023 memperlihatkan bahwa 42 PTS terkena pemantauan Perguruan Tinggi, 22 PTS terkena pemantauan Program Studi, dan 6 PTS terkena pemantauan Perguruan Tinggi dan Program Studi.

PEPA yang dilakukan oleh BAN-PT yang mengacu pada Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi, merupakan bagian dari mekanisme akreditasi dalam rangka memantau konsistensi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi serta telah dilaporkan secara periodik oleh setiap Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).

Proses pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan secara *machine to machine* antara PDDIKTI dan SAPTO dengan mengacu pada Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi pada pasal 3 ayat (6) dinyatakan pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir.

No	Nama PT	Nama PS	Yang Kena Pemantauan
1	Akademi Kebidanan Mardi Rahayu		PT saja
2	Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus		PT saja
3	Akademi Keperawatan Insan Husada Surakarta		PT saja
4	Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara		PT saja
5	Akademi Keperawatan Yappi Sragen		PT saja
6	Akademi Kesehatan Asih Husada		PT saja
7	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti		PT saja
8	Akademi Pelayaran Nasional Surakarta		PT dan PS
9	Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang		PT saja

10	Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta		PT saja
11	Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang		PT saja
12	Politeknik Bumi Akpelni	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan	PS Saja
13	Politeknik Bumi Akpelni	Nautika	PS Saja
14	Politeknik Harapan Bersama		PT saja
15	Politeknik Indonusa Surakarta		PT saja
16	Politeknik Insan Husada Surakarta		PT saja
17	Politeknik Manufaktur Ceper		PT saja
18	Politeknik Piksi Ganesha Indonesia		PT dan PS
19	Politeknik Pratama Mulia		PT saja
20	Politeknik Pratama		PT dan PS
21	Politeknik Pusmanu	Kriya Batik	PS Saja
22	Politeknik Santo Paulus Surakarta		PT saja
23	Politeknik Yakpermas Banyumas		PT saja
24	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani	Ilmu Administrasi Niaga	PS Saja
25	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin		PT saja

26	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati		PT saja
27	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes		PT saja
28	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang		PT saja
29	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap		PT saja
30	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro		PT saja
31	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo		PT saja
32	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa		PT saja
33	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas		PT saja
34	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas		PT saja
35	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang		PT saja
36	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso		PT saja
37	Sekolah Tinggi Teknologi “Warga” Surakarta		PT saja
38	STIKES Estu Utomo		PT saja
39	STIKES Karya Husada Semarang		PT saja
40	STMIK AKI Pati		PT saja
41	STMIK AUB Surakarta		PT dan PS

42	STMIK Widya Pratama		PT saja
43	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Bahasa Jepang	PS Saja
44	Universitas Amikom Purwokerto	Bahasa Inggris (Kampus Kota Yogyakarta)	PS Saja
45	Universitas Bhamada Slawi		PT saja
46	Universitas Boyolali		PT dan PS
47	Universitas Dian Nuswantoro	Film dan Televisi	PS Saja
48	Universitas Islam Batik	Agribisnis	PS Saja
49	Universitas Islam Sultan Agung	Sejarah dan Peradaban Islam	PS Saja
50	Universitas Karya Husada Semarang		PT saja
51	Universitas Katolik Soegijapranata	Ilmu Komunikasi	PS Saja
52	Universitas Katolik Soegijapranata	Ilmu Hukum	PS Saja
53	Universitas Katolik Soegijapranata	Arsitektur	PS Saja
54	Universitas Katolik Soegijapranata	Lingkungan Dan Perkotaan	PS Saja
55	Universitas Katolik Soegijapranata	Psikologi	PS Saja
56	Universitas Kristen Satya Wacana	Sosiologi	PS Saja
57	Universitas Kristen Satya Wacana	Sekretari	PS Saja

58	Universitas Kristen Satya Wacana	Psikologi	PS Saja
59	Universitas Kristen Surakarta		PT saja
60	Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen	Peternakan	PS Saja
61	Universitas Muhadi Setiabudi		PT dan PS
62	Universitas Muhammadiyah Karanganyar	Perhotelan	PS Saja
63	Universitas Muhammadiyah Klaten		PT saja
64	Universitas Muhammadiyah Magelang	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	PS Saja
65	Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan		PT saja
66	Universitas Muhammadiyah Purworejo	Hukum	PS Saja
67	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap	Komunikasi dan Penyiaran Islam	PS Saja
68	Universitas Pancasakti Tegal	Ilmu Pemerintahan	PS Saja
69	Universitas Pandanaran		PT saja
70	Universitas Putra Bangsa	Perhotelan	PS Saja
71	Universitas Sains dan Teknologi Komputer	Desain Grafis	PS Saja
72	Universitas Selamat Sri	Perencanaan Wilayah dan Kota	PS Saja
73	Universitas Selamat Sri	Psikologi	PS Saja

74	Universitas Semarang	Ilmu Hukum	PS Saja
75	Universitas Sultan Fatah	Arsitektur	PS Saja
76	Universitas Surakarta	Arsitektur	PS Saja
77	Universitas Surakarta	Ilmu Hukum	PS Saja
78	Universitas Widya Husada Semarang		PT saja
79	Universitas YPPI Rembang		PT saja

No	Nama PT	Nama PS	Yang Kena Pemantauan
1	Akademi Kebidanan Mardi Rahayu		PT saja
2	Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus		PT saja
3	Akademi Keperawatan Insan Husada Surakarta		PT saja
4	Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara		PT saja
5	Akademi Keperawatan Yappi Sragen		PT saja
6	Akademi Kesehatan Asih Husada		PT saja
7	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti		PT saja
8	Akademi Pelayaran Nasional Surakarta		PT dan PS
9	Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang		PT saja

10	Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta		PT saja
11	Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang		PT saja
12	Politeknik Bumi Akpelni	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan	PS Saja
13	Politeknik Bumi Akpelni	Nautika	PS Saja
14	Politeknik Harapan Bersama		PT saja
15	Politeknik Indonusa Surakarta		PT saja
16	Politeknik Insan Husada Surakarta		PT saja
17	Politeknik Manufaktur Ceper		PT saja
18	Politeknik Piksi Ganesha Indonesia		PT dan PS
19	Politeknik Pratama Mulia		PT saja
20	Politeknik Pratama		PT dan PS
21	Politeknik Pusmanu	Kriya Batik	PS Saja
22	Politeknik Santo Paulus Surakarta		PT saja
23	Politeknik Yakpermas Banyumas		PT saja
24	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani	Ilmu Administrasi Niaga	PS Saja
25	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin		PT saja

26	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati		PT saja
27	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes		PT saja
28	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang		PT saja
29	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap		PT saja
30	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro		PT saja
31	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo		PT saja
32	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa		PT saja
33	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas		PT saja
34	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas		PT saja
35	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang		PT saja
36	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso		PT saja
37	Sekolah Tinggi Teknologi “Warga” Surakarta		PT saja
38	STIKES Estu Utomo		PT saja
39	STIKES Karya Husada Semarang		PT saja
40	STMIK AKI Pati		PT saja
41	STMIK AUB Surakarta		PT dan PS

42	STMIK Widya Pratama		PT saja
43	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Bahasa Jepang	PS Saja
44	Universitas Amikom Purwokerto	Bahasa Inggris (Kampus Kota Yogyakarta)	PS Saja
45	Universitas Bhamada Slawi		PT saja
46	Universitas Boyolali		PT dan PS
47	Universitas Dian Nuswantoro	Film dan Televisi	PS Saja
48	Universitas Islam Batik	Agribisnis	PS Saja
49	Universitas Islam Sultan Agung	Sejarah dan Peradaban Islam	PS Saja
50	Universitas Karya Husada Semarang		PT saja
51	Universitas Katolik Soegijapranata	Ilmu Komunikasi	PS Saja
52	Universitas Katolik Soegijapranata	Ilmu Hukum	PS Saja
53	Universitas Katolik Soegijapranata	Arsitektur	PS Saja
54	Universitas Katolik Soegijapranata	Lingkungan Dan Perkotaan	PS Saja
55	Universitas Katolik Soegijapranata	Psikologi	PS Saja
56	Universitas Kristen Satya Wacana	Sosiologi	PS Saja
57	Universitas Kristen Satya Wacana	Sekretari	PS Saja

58	Universitas Kristen Satya Wacana	Psikologi	PS Saja
59	Universitas Kristen Surakarta		PT saja
60	Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen	Peternakan	PS Saja
61	Universitas Muhadi Setiabudi		PT dan PS
62	Universitas Muhammadiyah Karanganyar	Perhotelan	PS Saja
63	Universitas Muhammadiyah Klaten		PT saja
64	Universitas Muhammadiyah Magelang	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	PS Saja
65	Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan		PT saja
66	Universitas Muhammadiyah Purworejo	Hukum	PS Saja
67	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap	Komunikasi dan Penyiaran Islam	PS Saja
68	Universitas Pancasakti Tegal	Ilmu Pemerintahan	PS Saja
69	Universitas Pandanaran		PT saja
70	Universitas Putra Bangsa	Perhotelan	PS Saja
71	Universitas Sains dan Teknologi Komputer	Desain Grafis	PS Saja
72	Universitas Selamat Sri	Perencanaan Wilayah dan Kota	PS Saja
73	Universitas Selamat Sri	Psikologi	PS Saja

74	Universitas Semarang	Ilmu Hukum	PS Saja
75	Universitas Sultan Fatah	Arsitektur	PS Saja
76	Universitas Surakarta	Arsitektur	PS Saja
77	Universitas Surakarta	Ilmu Hukum	PS Saja
78	Universitas Widya Husada Semarang		PT saja
79	Universitas YPPI Rembang		PT saja

Data PEPA PTS LLDIKTI Wilayah VI – 5 Oktober 2023

Menyikapi permasalahan terkait hasil PEPA tersebut, LLDIKTI Wilayah VI melakukan fasilitasi terhadap Perguruan Tinggi yang terkena pemantauan dengan mengadakan 2 (dua) kegiatan khusus untuk pendampingan teknis perbaikan data, kegiatan tersebut adalah Coaching PEPA, dan Klinik Akreditasi Online Angkatan 4 (PEPA). Dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh PT dalam proses perbaikan data adalah sebagai berikut :

- Beberapa PTS di akun SAPTO-nya tidak muncul hasil penghitungan (hanya surat terkena pantau saja), sehingga PTS harus berkomunikasi langsung ke BAN-PT untuk mendapatkan hasil penghitungan
- Data PDDIKTI dan BAN-PT yang kurang sinkron
- Proses validasi Registrasi NIDN bagi dosen baru yang lama (proses validasi di LLDIKTI maksimal 3 hari, tetapi proses oleh pengelola PDDIKTI pusat bisa berbulan-bulan)
- Dosen dengan jabatan AA harus didorong ekstra untuk naik ke Lektor, masih banyak dosen dengan jabatan akademik AA tidak segera mengajukan kenaikan ke Lektor sehingga dalam penghitungan PEPA, indikator terkait hal ini tidak memenuhi (LLDIKTI siap memberikan fasilitasi percepatan apabila diperlukan)
- Kualifikasi pendidikan dosen perlu didorong sampai ke jenjang S-3, sehingga tiap prodi memiliki dosen homebase dengan kualifikasi Doktor.
- PTS belum paham tentang menu *Re-Run* sebagai menu untuk meminta penghitungan ulang yang akan muncul di laman SAPTO PTS setiap tanggal 1-10 setiap bulan di masa pantau.
- Indikator pemenuhan syarat perlu peringkat akreditasi di dalam perhitungan PEPA tidak sepenuhnya dapat terpenuhi oleh perguruan tinggi dengan bentuk Sekolah Tinggi, Politeknik, maupun Akademi.

Menyikapi berbagai permasalahan yang timbul tersebut, LLDIKTI Wilayah VI melalui Kelompok Kerja Kelembagaan menginisiasi kegiatan pendampingan PAKARTI SERIES : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI.

PAKARTI SERIES juga bisa dikatakan sebagai *one stop service* bagi PTS yang memiliki permasalahan dalam tata Kelola dan kinerja baik di bidang akademik dan non akademik. Kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber yang akan memberikan pemahaman terkait tata kelola perguruan tinggi sesuai SN-DIKTI dan juga praktik baik dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Seluruh Kelompok Kerja di LLDIKTI Wilayah VI dihadirkan di tempat acara agar dapat memberikan fasilitasi langsung kepada PTS yang hadir baik secara luring maupun daring, sehingga permasalahan yang ada dalam kewenangan LLDIKTI Wilayah VI bisa langsung terselesaikan.

Dari kegiatan ini, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan form evaluasi yang diisi oleh peserta, bahwa PTS sangat membutuhkan kegiatan seperti ini, pendampingan langsung ke pokok permasalahan dan ada solusi untuk setiap permasalahan tersebut. Tahun 2024 akan direncanakan penyelenggaraan kegiatan serupa dengan skema yang lebih baik dan intensitas yang yang lebih banyak.


LLDIKTI
WILAYAH VI
GO BEYOND!
BERSAMA
SERIES
Semarang, 21 November 2023
KEPALA
21 November 2023
PAKARTI (Pendampingan Kinerja Perguruan Tinggi) Series
Patra Semarang Hotel & Convension
Geser
lldikti6.kemdikbud.go.id | @lldikti6

Sasaran Kinerja Utama 2

Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI /D4/D3/D2/D1.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
67,52	72,10	67,52	75,12

Pada tahun 2023, target untuk IKU 2.1 sebanyak 67,52% dengan capaian realisasi sebanyak 67,52% perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1. Sebanyak 130 perguruan tinggi swasta yang melaporkan menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 dan sebanyak 121 perguruan tinggi swasta melaporkan capaian prestasi mahasiswanya. Sebanyak 49 perguruan tinggi swasta telah melaporkan aktivitas bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodinya pada laman PDDIKTI. Kemudian, sebanyak 95 perguruan tinggi swasta telah mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program flagship MBKM pada program MSIB, KM, dan PMM. Tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari DIKTI dan DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 69 PTS. Untuk program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah dari DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 3 PTS. Kegiatan PKM dan P2MD ini dalam rangka implementasi MBKM mahasiswa. Lalu, sebanyak 19 PTS telah melaporkan penyelenggaraan MBKM mandiri, dan sebanyak 22 PTS mengikuti kegiatan bela negara yang diselenggarakan oleh Kemhan. Total PTS yang menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4 /D3/ D2/ D1 sebanyak 168 PTS.

Pada indikator kinerja utama LLDIKTI sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210 tahun 2023, terdapat perbedaan indikator kinerja utama terkait pembelajaran di luar program studi. Pada indikator kinerja utama sebelumnya sesuai Kepmendikbud Nomor 2 Tahun 2021, indikator kinerja utama LLDIKTI terkait dengan perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya

menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. sedangkan pada kebijakan yang baru, indikator kinerja terkait pembelajaran di luar program studi terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu IKU 2.1 perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan IKU 2.2 Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/Dl PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.

IKU 2.1 ini, dari kegiatan-kegiatan di atas, tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, dari 230 perguruan tinggi swasta terdapat 103 perguruan tinggi swasta dengan jumlah presentase 44,78% yang mahasiswanya menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Sedangkan pada tahun 2023, meningkat menjadi 168 perguruan tinggi swasta dari 233 perguruan tinggi swasta dengan presentase dengan jumlah presentase 72,10% perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1. Peningkatan jumlah perguruan tinggi ini dikarenakan semakin banyaknya perguruan tinggi yang melaksanakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perguruan tinggi swasta terkait pentingnya implementasi dan pelaporan hasil implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Berbagai upaya telah dilakukan LLDIKTI Wilayah VI untuk mendorong perguruan tinggi tidak hanya aktif berpartisipasi pada program *flagship* MBKM kementerian, tetapi membangun ekosistem MBKM mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga secara masif mendorong perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan diri melalui keikutsertaan dalam mengembangkan kompetensi dan meraih prestasi mahasiswa melalui ajang kompetisi.

Adapun capaian kinerja tahun 2023 sebanyak 72,10% meningkat dari capaian tahun 2022 dengan capaian 44,78%. Jumlah realisasi tahun 2023 juga meningkat menjadi 168 perguruan tinggi swasta dengan capaian tahun 2022 sebanyak 103 perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yang mana tahun 2021 sebanyak 102 Perguruan Tinggi Swasta dengan presentase 41,46% meningkat menjadi 103 perguruan tinggi dengan presentase sesuai target yaitu 44,78 % Perguruan Tinggi Swasta. secara garis besar dari tahun 2021 dan 2022, capaian presentase jumlah PTS yang mahasiswanya menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional meningkat, sedangkan di tahun 2023 capaian perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1 meningkat banyak.

Pada tahun 2023, sebanyak 72,10% perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1. Capaian tahun 2023 ini meningkat dibandingkan target capaian renstra LLDIKTI untuk target jangka menengah pada tahun 2023 sebanyak 47,34%. Capaian indikator kinerja ini berdasarkan target jangka menengah dalam renstra LLDIKTI tahun 2022-2024. Meningkatnya capaian jangka menengah ini ini dikarenakan semakin banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

LLDIKTI Wilayah VI yang difokuskan serta mendorong perguruan tinggi mengimplementasikan kebijakan MBKM.

LLDIKTI Wilayah VI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja terkait pengalaman mahasiswa di luar kampus atau berprestasi minimal tingkat nasional. Dalam rangka peningkatan mutu layanan LLDIKTI khususnya dalam bidang akademik dan kemahasiswaan, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Melalui kegiatan ini, sistem pengelolaan bidang kemahasiswaan yang telah ada dievaluasi dan dikembangkan untuk meningkatkan layanan LLDIKTI.



Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB – KM)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2023, telah muncul kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang memperkuat implementasi pembelajaran mahasiswa dengan berbagai bentuk pembelajaran. Selain itu, untuk menciptakan SDM yang unggul, Kemdikbudristek juga mendorong transformasi perguruan tinggi melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui kebijakan MBKM ini, mahasiswa diberikan kesempatan atau hak untuk mengambil pembelajaran di luar program studi sampai maksimal 3 (tiga) semester, dan mewajibkan perguruan tinggi untuk memfasilitasinya.

Dalam rangka mendukung implementasi Merdeka Belajar dan mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait baik kepada perguruan tinggi maupun kepada mahasiswa secara langsung. Untuk mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan fasilitasi mahasiswa terkait pelaksanaan MBKM, LLDIKTI Wilayah VI

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan menyasar beberapa elemen yang ada di perguruan tinggi.

Untuk memastikan implementasi MBKM di masing-masing perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Strategi Implementasi MBKM yang ditujukan untuk penanggung jawab implementasi MBKM perguruan tinggi akademik yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga menyelenggarakan kegiatan Asistensi Pengembangan Kurikulum Program Studi dalam rangka mendukung MBKM. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan perguruan tinggi dapat penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Dalam upaya memberikan hak pembelajaran mahasiswa diluar program studinya, perguruan tinggi wajib menyiapkan fasilitasi berupa sarana prasarana, kurikulum yang mendukung, sosialisasi, serta program-program yang mendukung MBKM.





Selanjutnya, untuk penguatan dari sisi tenaga pendidik, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM melalui kegiatan Pendampingan Pengelolaan Wirausaha bagi Dosen Pendamping Kewirausahaan, Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi Dosen Pendamping, serta Pendampingan Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan dosen sebagai pendidik serta pendamping mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dapat memahami dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya dengan mengembangkan dirinya dalam pembelajaran kewirausahaan dan penalaran mahasiswa. Selain itu, memberikan dorongan dan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri mengikuti pembelajaran di luar prodi. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Pendidikan Vokasi yang dalam pelaksanaannya mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dan dapat dikonversikan menjadi sks. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang merupakan program *flagship* pusat yang dapat diikuti oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran dalam implementasi MBKM.

Selain menyasar perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan MBKM untuk mahasiswa secara langsung melalui kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa. Harapannya mahasiswa dapat menjadi lulusan pendidikan tinggi memiliki daya saing, kompetensi dan memiliki yang baik untuk menghadapi dunia kerja dan industri.





Salah satu kompetisi program kemahasiswaan terkait penalaran dari Kemdikbudristek yang dapat dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pembelajaran diluar program studi adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Program PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah VI terkait PKM, LLDIKTI Wilayah VI terdapat mencapai peringkat terbaik ke-2 dengan jumlah proposal terdanai untuk PKM dari Ditjendiktiristek. Sebanyak 10 judul diantaranya merupakan judul PKM yang dibawa oleh peserta ketika mengikuti kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah VI baik yang ditujukan untuk dosen pendamping maupun mahasiswa. Jumlah pendanaan program PKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebanyak 357 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 2.348.775.000,- dari 63 perguruan tinggi swasta. Sedangkan jumlah pendanaan program PKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebanyak 13 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 88.500.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Sehingga total pendanaan PKM yang dikelola oleh LLDIKTI Wilayah VI sebanyak 370 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 2.698.250.000,- dari 69 perguruan tinggi swasta. Dalam proses pengelolaan program PKM ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.



Selain pendanaan program PKM, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola pendanaan hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) dari Direktorat Jenderal Pendidikan

Vokasi. Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran mahasiswa diluar program studinya yang dapat dikonversikan sks-nya sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Program P2MD ini dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk menumbuhkan rasa peduli mahasiswa dan berkontribusi kepada masyarakat desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Pada tahun 2023, terdapat II batch pendanaan untuk P2MD. Pada Batch I, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan pendanaan sebanyak 8 judul dengan dana sebesar Rp 225.500.000,- dari 3 perguruan tinggi swasta. Kemudian pada batch II, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan pendanaan sebanyak 12 judul dengan dana sebesar Rp 321.000.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Total jumlah pendanaan program P2MD Batch I dan II sebanyak 20 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 546.500.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Sama halnya dengan pengelolaan program PKM, dalam proses pengelolaan program P2MD ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.



Dalam rangka memastikan pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di lingkungan perguruan tinggi serta adanya tertib pelaporan aktivitas mahasiswa, LLDIKTI Wilayah VI melakukan penarikan data terhadap implementasi kebijakan MBKM termasuk 8 (delapan) bentuk pembelajaran diluar prodi ditambah Bela Negara yang dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui laman PDDIKTI. Pada pelaporan data PDDIKTI, perguruan tinggi dapat mencatatkan mahasiswa yang menempuh MBKM pada status keaktifan mahasiswa. total terdapat sebanyak 95 perguruan tinggi telah melaporkan data MBKM pada tahun 2023 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15.763 orang. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini, yaitu :

1. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih;
2. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship.

untuk mengatasi kendala tersebut LLDIKTI Wilayah VI memiliki strategi yang telah dilakukan antara lain :

1. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PTS berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM);
2. LLDIKTI WIlayah VI juga telah bekerjasama dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM) untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka (KM) Fair dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem MBKM di lingkungan PT;

3. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarkana kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa;
4. LLDIKTI WIlayah VI telah melakukan kegiatan pendampingan pengelolaan KIP Kuliah dengan bekerjasama dengan Puslapdik;
5. Melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD;

Strategi-strategi tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk beberapa fasilitasi, yaitu :

1. Pendampingan Pengelolaan Kewairausahaan PT;
2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi MBKM Mandiri ;
3. Multi-Stakeholder Dialogue (MSD);
4. Kampus Merdeka Fair Semarang 2023 ”Kampus Merdeka, Bersama Lebih Baik;
5. Pendampingan Pengelolaan Program KIP Kuliah Merdeka;
6. Pengelolaan Hibah PKM dan P2MD;

Hasil dari strategi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI telah mampu meningkatkan sebanyak 95 PT telah melaporkan data MBKM. Total PTS yang mengimplementasikan MBKM sebanyak 158 PTS, yang mana pada capaian TW I terdapat 42 PT, pada capaian TW II terdapat 71 PT, dan capaian pada TW III sebanyak 45 PT. Pada TW III ini juga terdapat peningkatan jumlah perguruan tinggi menjadi 233 PTS. sehingga secara akumulatif untuk capaian tahun 2023 menjadi 67.52%.

[2.2] Persentase mahasiswa SI atau D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.

Definisi, Kriteria :

a. Kriteria pembelajaran di luar program studi, mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.
b. Kriteria prestasi, mengacu pada kriteria yang sama untuk prestasi mahasiswa di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.

Formula:

$$\frac{\sum_1^i nk_i}{t} \times 100$$

n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria.

k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.

Matriks bobot sks:

Jumlah sks	Bobot
x>20	1.00
10<x<20	0.50

Matriks bobot prestasi:

Tingkat Wiiayah Kompetisi	Bobot
Internasional	0.75
Nasional	0.50
Provinsi	0.25

t = total jumlah mahasiswa di PIS di wilayah kerja LLDIKTI.

Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
4,13	**5,22**	**4,13**	**6,22**

Pada indikator kinerja utama LLDIKTI sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210 tahun 2023, terdapat perbedaan indikator kinerja utama terkait pembelajaran di luar program studi. Pada indikator kinerja utama sebelumnya sesuai Kepmendikbud Nomor 2 Tahun 2021, indikator kinerja utama LLDIKTI terkait dengan perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. sedangkan pada kebijakan yang baru, indikator kinerja terkait pembelajaran di luar program studi terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu IKU 2.1 perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan IKU 2.2 Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/Dl PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.

Pada IKU 2.2 ini, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya mahasiswa yang menjalankan pembelajaran di luar program studinya atau meraih prestasi. Kondisi saat ini, jumlah mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran di luar program studi sebanyak 6.123 mahasiswa dari 49 perguruan tinggi swasta dan 6.459 mahasiswa yang berprestasi. Di tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI juga mendapatkan hibah

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari DIKTI dan DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 69 PTS. Untuk program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah dari DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 3 PTS. Kegiatan PKM dan P2MD ini dalam rangka implementasi MBKM mahasiswa di perguruan tinggi. Adapun capaian presentasi sampai saat ini sebesar 5,22% melebihi target tahun 2023 sebesar 4,13%.

LLDIKTI Wilayah VI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja terkait pengalaman mahasiswa di luar kampus atau berprestasi minimal tingkat nasional. Dalam rangka peningkatan mutu layanan LLDIKTI khususnya dalam bidang akademik dan kemahasiswaan, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang didalamnya membahas terkait pengembangan Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) yang memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi dengan mitra-mitra. Melalui kegiatan ini, sistem pengelolaan bidang kemahasiswaan yang telah ada dievaluasi dan dikembangkan untuk meningkatkan layanan LLDIKTI.



Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB – KM)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2023, telah muncul kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang memperkuat implementasi pembelajaran mahasiswa dengan berbagai bentuk pembelajaran. Selain itu, untuk menciptakan SDM yang unggul, Kemdikbudristek juga mendorong transformasi perguruan tinggi melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui

kebijakan MBKM ini, mahasiswa diberikan kesempatan atau hak untuk mengambil pembelajaran di luar program studi sampai maksimal 3 (tiga) semester, dan mewajibkan perguruan tinggi untuk memfasilitasinya.

Dalam rangka mendukung implementasi Merdeka Belajar dan mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait baik kepada perguruan tinggi maupun kepada mahasiswa secara langsung. Untuk mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan fasilitasi mahasiswa terkait pelaksanaan MBKM, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan menyasar beberapa elemen yang ada di perguruan tinggi.

Untuk memastikan implementasi MBKM di masing-masing perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Strategi Implementasi MBKM yang ditujukan untuk penanggung jawab implementasi MBKM perguruan tinggi akademik yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga menyelenggarakan kegiatan Asistensi Pengembangan Kurikulum Program Studi dalam rangka mendukung MBKM. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan perguruan tinggi dapat penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Dalam upaya memberikan hak pembelajaran mahasiswa diluar program studinya, perguruan tinggi wajib menyiapkan fasilitasi berupa sarana prasarana, kurikulum yang mendukung, sosialisasi, serta program-program yang mendukung MBKM.

Selanjutnya, untuk penguatan dari sisi tenaga pendidik, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM melalui kegiatan Pendampingan Pengelolaan Wirausaha bagi Dosen Pendamping Kewirausahaan, Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi Dosen Pendamping, serta Pendampingan Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan dosen sebagai pendidik serta pendamping mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dapat memahami dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya dengan mengembangkan dirinya dalam pembelajaran kewirausahaan dan penalaran mahasiswa. Selain itu, memberikan dorongan dan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri mengikuti pembelajaran di luar prodi. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Pendidikan Vokasi yang dalam pelaksanaannya mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dan dapat dikonversikan menjadi sks. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang merupakan program *flagship* pusat yang dapat diikuti oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran dalam implementasi MBKM.

Kegiatan-kegiatan yang ditujukan bagi perguruan tinggi diharapkan agar perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi terhadap mahasiswanya untuk menempuh pembelajaran di luar program studinya ataupun mendorong mahasiswa untuk mengikuti kompetisi mahasiswa.

Selain menyasar perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan MBKM untuk mahasiswa secara langsung melalui kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa. Harapannya mahasiswa dapat menjadi lulusan pendidikan tinggi memiliki daya saing, kompetensi dan memiliki yang baik untuk menghadapi dunia kerja dan industri.

Salah satu kompetisi program kemahasiswaan terkait penalaran dari Kemdikbudristek yang dapat dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pembelajaran diluar program studi adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Program PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah VI terkait PKM, LLDIKTI Wilayah VI terdapat mencapai peringkat terbaik ke-2 dengan jumlah proposal terdanai untuk PKM dari Ditjendiktiristek. Sebanyak 10 judul diantaranya merupakan judul PKM yang dibawa oleh peserta ketika mengikuti kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah VI baik yang ditujukan untuk dosen pendamping maupun mahasiswa. Jumlah pendanaan program PKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebanyak 357 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 2.348.775.000,- dari 63 perguruan tinggi swasta. Sedangkan jumlah pendanaan program PKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebanyak 13 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 88.500.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Sehingga total pendanaan PKM yang dikelola oleh LLDIKTI Wilayah VI sebanyak 370 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 2.698.250.000,- dari 69 perguruan tinggi swasta. Dalam proses pengelolaan program PKM ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.



Selain pendanaan program PKM, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola pendanaan hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran mahasiswa diluar program studinya yang dapat dikonversikan sks-nya sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Program P2MD ini dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk menumbuhkan rasa peduli mahasiswa dan berkontribusi kepada masyarakat desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Pada tahun 2023, terdapat II batch pendanaan untuk P2MD. Pada Batch I, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan pendanaan sebanyak 8 judul dengan dana sebesar Rp 225.500.000,- dari 3 perguruan tinggi swasta. Kemudian pada batch II, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan pendanaan sebanyak 12 judul dengan dana sebesar Rp 321.000.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Total jumlah pendanaan program P2MD Batch I dan II sebanyak 20 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 546.500.000,- dari 6 perguruan tinggi swasta. Sama halnya dengan pengelolaan program PKM, dalam proses pengelolaan program P2MD ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.



Dalam rangka memastikan pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di lingkungan perguruan tinggi serta adanya tertib pelaporan aktivitas mahasiswa, LLDIKTI Wilayah VI melakukan penarikan data terhadap implementasi kebijakan MBKM termasuk 8 (delapan) bentuk pembelajaran diluar prodi ditambah Bela Negara yang dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui laman PDDIKTI. Pada pelaporan data PDDIKTI, perguruan tinggi dapat mencatatkan mahasiswa yang menempuh MBKM pada status keaktifan mahasiswa. Sebanyak 6.123 mahasiswa dari 49 PTS telah dilaporkan menempuh pembelajaran di luar program studinya melalui laman PDDIKTI.

Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola penyaluran beasiswa mahasiswa yang meliputi Bidikmisi/KIP Kuliah *On Going* dan KIP Kuliah Merdeka Baru. Bidikmisi dan KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Pelaporan Bidikmisi/KIP Kuliah *On Going* dilakukan setiap semester sehingga LLDIKTI Wilayah VI akan mewajibkan perguruan tinggi swasta pengelola untuk melaporkan. Pada tahun anggaran 2023, terdapat 2 (dua) kali periode pelaporan yaitu Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024. Setiap semesternya, terutama pergantian semester genap menuju semester gasal, jumlah mahasiswa menurun dikarenakan kelulusan atau akhir masa studi beasiswa.

Periode	Jumlah Mahasiswa Bidikmisi On Going	Jumlah Mahasiswa Bidikmisi On Going	Jumlah Mahasiswa KIP K On Going	Jumlah PTS KIP K On Going	Total Jumlah Mahasiswa On Going	Total Jumlah PTS On Going	Jumlah Mahasiswa Mundur
Semester Genap TA 2022/2023	2.055 mhs	79 PTS	23.924 mhs	186 PTS	25.979 mhs	186 PTS	424 mhs
Semester Gasal TA 2023/2024	12 mhs	6 PTS	22.077 mhs	184 PTS	22.089 mhs	184 PTS	319 mahasiswa mundur dan 121 mahasuswa dilakukan penggantian

Namun, dalam proses pengelolaannya, masih banyak mahasiswa yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, contohnya bekerja, non aktif, dan maupun alasan lainnya. Pada periode pelaporan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, terdapat banyak mahasiswa yang mengundurkan diri. Pada periode pelaporan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, Puslapdik membuka kebijakan terkait adanya penggantian terhadap mahasiswa yang telah mundur.

Tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI menerima kuota KIP Kuliah Merdeka baru sebanyak 2.256 mahasiswa yang diberikan kuota masing-masing akreditasi program studi.

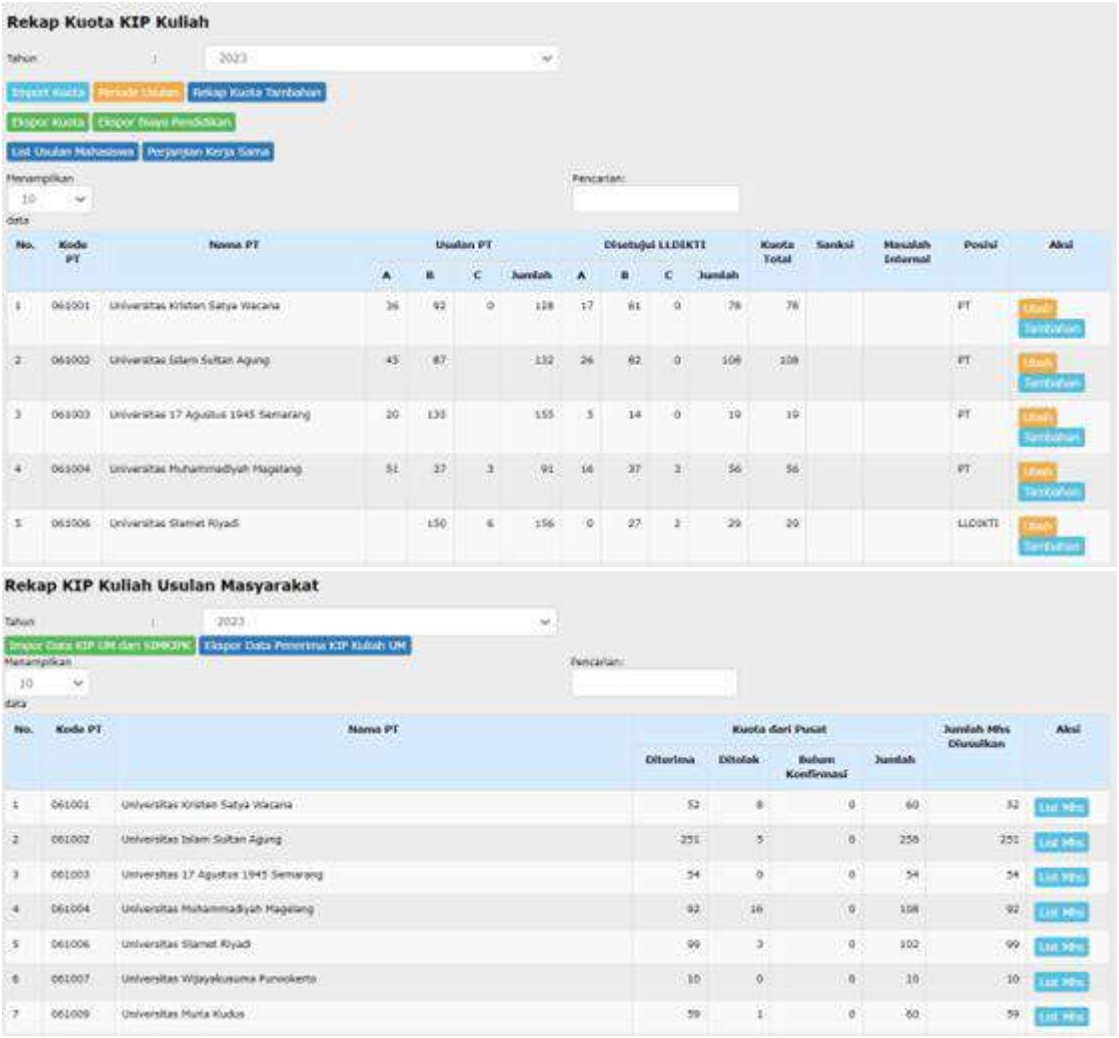
Tahun	Kuota Pembiayaan Penuh KIPK			Kuota Biaya Pendidikan
	Prodi A	Prodi B	Prodi C	
2023	231 / 231	1577 / 1577	448 / 448	1273 / 1273

Kuota Penetapan Mhs KIP Kuliah untuk LLDIKTI wilayah VI

Dalam proses pengelolaan KIP K Merdeka tahun 2023, terdapat perubahan kebijakan dalam distribusi kuota yang didapat. Pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI mendistribusikan kuota KIP Kuliah dengan menggunakan beberapa indikator kinerja perguruan tinggi yaitu jumlah mahasiswa aktif jenjang D1/D/D3/D4/S1, capaian prestasi mahasiswa tingkat nasional, capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional, adanya aduan/temuan terkait pengelolaan KIP Kuliah yang terbukti, adanya mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah *on going* yang mundur pada pelaporan per semester, jumlah program studi terakreditasi A/Unggul, serta perguruan tinggi yang terdaftar pada laman portal PPKS. Atas hasil kinerja perguruan tinggi tersebut, kuota didistribusikan dengan menggunakan rasio masing-masing indikator untuk masing-masing akreditasi program studi.



Selain mengelola kuota KIPK Kuliah sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Puslapdik, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola KIP Kuliah Usulan Masyarakat sebanyak 5.580 mahasiswa, sehingga total kuota KIP Kuliah untuk mahasiswa baru tahun 2023 sebanyak 7.836 mahasiswa. Pengelolaan KIP Kuliah yang ada di LLDIKTI Wilayah VI telah sepenuhnya menggunakan sistem *online* melalui sistem LLDIKTI 6, baik untuk distribusi kuota sampai pelaporan data perguruan tinggi setiap semesternya yang telah dikembangkan dari tahun 2021. Namun, untuk mengoptimalisasi sistem pengelolaan KIP Kuliah yang telah ada, pada tahun 2023 LLDIKTI Wilayah VI telah mengembangkan sistem pengelolaan KIP Kuliah sehingga sistem dapat digunakan lebih mudah, efektif dan efisien serta menyesuaikan kebijakan yang berlaku.



Dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Distribusi Kuota KIP Kuliah yang dihadiri oleh pimpinan PT yang menangani KIP Kuliah Puslapdik dan 4 (empat) bank himbara penyalur dana KIP Kuliah di LLDIKTI Wilayah VI. Melalui kegiatan ini, diharapkan perguruan tinggi memahami kebijakan pengelolaan KIP Kuliah yang terbaru serta dapat mengelola sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI menyampaikan terkait kebijakan distribusi kuota KIP Kuliah tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka Tahun 2023, pada tahun 2023, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) bekerjasama dengan LLDIKTI Wilayah VI melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengelolaan Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023. Kegiatan ini difokuskan pada pendampingan perhitungan besaran komponen biaya pendidikan penerima KIP Kuliah Tahun 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan bahwa perguruan tinggi penerima KIP Kuliah tahun 2023 memahami teknis perhitungan usulan besaran biaya pendidikan mahasiswa KIP Kuliah sesuai kebijakan yang berlaku.





Pada tahun 2023, terdapat skema baru Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi selain KIP Kuliah Merdeka, yaitu Bantuan Biaya Pendidikan (BBP). Program BBP merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan Mahasiswa. Adapun sasaran Program BBP diberikan kepada Mahasiswa dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima Program KIP Kuliah yang disebabkan oleh keterbatasan kuota penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi. Pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan kuota BBP dari Puslapdik sebanyak 1.273 mahasiswa. Selain mengelola kuota BBP sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Puslapdik, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola BBP Usulan Masyarakat sebanyak 578 mahasiswa, sehingga total kuota BBP untuk mahasiswa tahun 2023 sebanyak 1.851 mahasiswa.

Tahun	Kuota Pembiayaan Penuh KIPK			Kuota Biaya Pendidikan
	Prodi A	Prodi B	Prodi C	
2023	231 / 231	1577 / 1577	448 / 448	1273 / 1273

Kuota Penetapan Mhs KIP Kuliah untuk LLDIKTI wilayah VI

Seperti halnya pengelolaan KIP Kuliah, untuk mengoptimalisasi pengelolaan program BBP, pada tahun 2023 LLDIKTI Wilayah VI telah mengembangkan sistem pengelolaan BBP sehingga sistem dapat digunakan lebih mudah, efektif dan efisien serta menyesuaikan kebijakan yang berlaku.



Program BBP merupakan program bantuan yang termasuk dalam Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi. Dengan sasaran yang sama dengan KIP Kuliah, LLDIKTI Wilayah VI mendistribusikan kuota program BBP dengan menggunakan beberapa indikator kinerja perguruan tinggi yaitu capaian prestasi mahasiswa tingkat nasional, capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional, adanya aduan/temuan terkait pengelolaan KIP Kuliah yang terbukti, adanya mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah *on going* yang mundur pada pelaporan per semester, jumlah program studi terakreditasi A/Unggul, serta perguruan tinggi yang terdaftar pada laman portal PPKS. Atas hasil kinerja perguruan tinggi tersebut, kuota didistribusikan dengan menggunakan rasio masing-masing indikator untuk masing-masing akreditasi program studi. Kuota program BBP yang diterima oleh LLDIKTI didistribusikan ke perguruan tinggi ke masing-masing akreditasi program studi dengan harapan mahasiswa penerima BBP merata ke semua akreditasi program studi dari A/Unggul, B/Baik Sekali, dan C/Baik.



Dalam pengelolaan KIP Kuliah, LLDIKTI Wilayah VI selalu menyampaikan terkait pengelolaan KIP Kuliah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku kepada perguruan tinggi penerima KIP Kuliah. Namun, masih terdapat aduan masyarakat yang masuk ke LLDIKTI Wilayah VI terkait adanya dugaan ketidaksesuaian pengelolaan KIP Kuliah. Pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) aduan terhadap perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI yang masuk dan telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung ke perguruan tinggi swasta atau mahasiswa serta pelapor. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi bahan aduan yaitu pungutan biaya kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah, kurangnya monitoring perguruan tinggi swasta terhadap keaktifan mahasiswa penerima KIP Kuliah, biaya hidup yang tidak diserahkan kepada mahasiswa KIP Kuliah, dan lainnya. Adapun hasil tindak lanjut dari aduan masyarakat ini adalah perguruan tinggi swasta mengembalikan dana ke kas negara, menyerahkan biaya hidup mahasiswa, ataupun penyelesaian atas kasus sesuai dengan permasalahan masing-masing.





Prestasi Mahasiswa

Dalam rangka mencari, mewadahi/mengumpulkan, mengatur, mendorong, dan mengembangkan bakat, minat, serta potensi generasi emas Indonesia untuk mencapai puncak prestasi tertinggi dalam berinovasi dan berkreativitas, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) memiliki beberapa program, salah satunya adalah Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres). Pilmapres merupakan salah satu ajang pembentukan karakter mahasiswa dalam melakukan inovasi, berpikir kreatif dan membentuk lulusan yang memiliki daya saing serta peka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang siap menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kegiatan Pilmapres tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu seleksi wilayah dan seleksi nasional. Untuk seleksi tingkat wilayah, sejak tahun 2021 Puspresnas mempercayakan

sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam penyelenggaraannya.

Dalam rangkaian Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) tingkat wilayah Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah Jawa Tengah. Mahasiswa berprestasi yang masuk dalam ruang lingkup seleksi wilayah ini adalah mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri dan swasta, baik jenjang diploma dan sarjana, di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Melalui kegiatan ini, LLDIKTI Wilayah VI menetapkapkan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah Jawa Tengah yang akan mewakili untuk ke tahap selanjutnya seleksi tingkat nasional. Pada tahun 2023, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) mahasiswa jenjang sarjana dan 24 (dua puluh empat) mahasiswa jenjang diploma pada Pilmapres tingkat wilayah Jawa Tengah.

Sesuai dengan kuota hasil seleksi tingkat wilayah yang berhak mewakili wilayahnya menuju seleksi nasional awal, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah Jawa Tengah dengan kuota jenjang Sarjana sebanyak 4 (empat) mahasiswa dan jenjang Diploma sebanyak 7 (tujuh) mahasiswa.

Peserta Program Sarjana

No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Dian Fatimatus Salwa	Universitas Negeri Semarang
2.	Syahidah Asma Amanina	Universitas Diponegoro
3.	I Putu Arya Aditia Utama	Universitas Jenderal Soedirman
4.	Nuri Utami	Universitas Muhammadiyah Surakarta

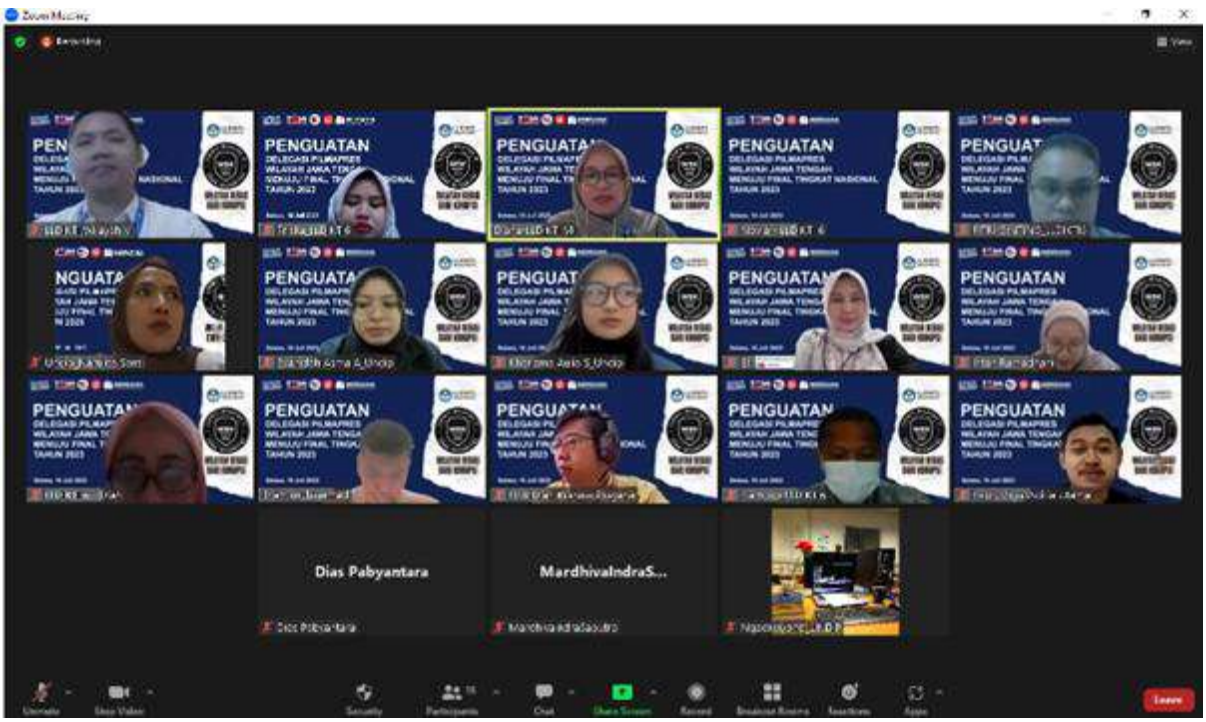
Peserta Program Diploma

No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Intan Sakina Ramadhani	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2.	Kharizma Aulia Syarifiyah	Universitas Diponegoro
3.	Gading Nasywaa Aji Azzahra	Universitas Sebelas Maret
4.	Mardhiva Indra Saputra	Universitas Setia Budi
5.	Claudio Ferdinan Cimi	Politeknik ATMI
6.	Yovita Christi	Universitas Pekalongan
7.	Nur Sahid	Universitas 'Aisyiyah Surakarta

Setelah penyelenggaraan kegiatan Pilmapres tingkat wilayah, dalam rangka memberikan pembekalan dan perbaikan kepada peserta seleksi tingkat nasional perwakilan dari

wilayah Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional bagi 11 (sebelas) peserta disertai pendamping yang akan mewakili Jawa Tengah pada tahap seleksi nasional. Selanjutnya, peserta tingkat wilayah yang telah lolos pada seleksi awal tingkat nasional diberikan penguatan peserta wilayah Jawa Tengah untuk menuju seleksi tahap selanjutnya tingkat nasional melalui kegiatan Penguatan Delegasi Pilmapres Wilayah Jawa Tengah menuju Final Tingkat Nasional bagi 5 (lima) peserta.





Peserta Program Sarjana

No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Syahidah Asma Amanina	Universitas Diponegoro
2.	I Putu Arya Aditia Utama	Universitas Jenderal Soedirman

Peserta Program Diploma

No	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Intan Sakina Ramadhani	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2.	Kharizma Aulia Syarifiyah	Universitas Diponegoro
3.	Mardhiva Indra Saputra	Universitas Setia Budi

Pada Pilmapres seleksi akhir tingkat nasional, perwakilan Jawa Tengah jenjang sarjana lolos sebagai Juara 2 (dua) dan jenjang diploma juara 3 (tiga) dengan rincian pemenang sebagai berikut:

DAFTAR PEMENANG
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES) TAHUN 2023

1. Program Diploma

Juara	Nama Tim	Asal Perguruan Tinggi
Juara 1	VOLIKA SINCI SARI	INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Juara 2	FATIMAH NURUL IZZAH	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Juara 3	KHARIZMA AULIA SYARIFIYAH	UNIVERSITAS DIPONEGORO
Juara Harapan 1	FARHAN NAUFALDY	POLITEKNIK CALTEX
Juara Harapan 2	NABILAH AZIIZAH TJANDRA	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Juara Harapan 3	MUHAMMAD DAFFA FADLURRAHMAN	POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

2. Program Sarjana

Juara	Nama Tim	Asal Perguruan Tinggi
Juara 1	SCHALKE ANINDYA PUTRI	UNIVERSITAS GADJAH MADA
Juara 2	SYAHIDAH ASMA AMANINA	UNIVERSITAS DIPONEGORO
Juara 3	SHAKIRA AMIRAH	UNIVERSITAS INDONESIA
Juara Harapan 1	GASTIN GABRIEL JANGKANG	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Juara Harapan 2	I GEDE ASWIN PARISYA SASMANA	UNIVERSITAS UDAYANA
Juara Harapan 3	AZZAHRA PUTRI SANTI	INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Selain penyelenggaraan Pilmapres tingkat Wilayah, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan pendataan atas capaian prestasi mahasiswa pada kompetisi lain yang dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui laman PDDIKTI. Terdapat sebanyak 4.757 mahasiswa dari 119 PTS telah dilaporkan mendapatkan prestasi tingkat nasional dan internasional pada tahun 2023 melalui laman PDDIKTI.

Organisasi Kemahasiswaan

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan agar mampu menjadi organisasi kemahasiswaan yang kompeten, modern, berkarakter, dan cinta tanah air, dengan hormat kami sampaikan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI akan menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Peningkatan Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Untuk mendorong mahasiswa untuk meningkatkan *soft skill*-nya, mahasiswa perlu untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan melalui wadah organisasi kemahasiswaan. Melalui kegiatan pengalaman-pengalaman kegiatan kemahasiswaan akan menambah *skill* mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja.

Dengan adanya program-program kegiatan yang telah dilaksanakan di atas pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI dapat mencapai target terkait pengalaman mahasiswa di luar kampus dan prestasi mahasiswa minimal tingkat nasional. Dalam pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2023. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini, yaitu :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah;
2. Sistem kurasi prestasi mahasiswa untuk pelaporan data prestasi mahasiswa masih dalam tahap pengembangan oleh Puspresnas;
3. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih;
4. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship.

Sebagaimana permasalahan tersebut di atas, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Untuk mengatasi kendala tersebut, LLDIKTI Wilayah VI memiliki strategi yang telah dilakukan antara lain :

1. Secara rutin memberikan informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM melalui laman maupun media sosial;
2. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PTS berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM);
3. LLDIKTI WIlayah VI juga telah bekerjasama dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM) untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka (KM) Fair dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem MBKM di lingkungan PT;
4. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa;

5. LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan kegiatan pendampingan pengelolaan KIP Kuliah dengan bekerjasama dengan Puslapdik;
6. Melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD;
7. Melakukan pemantauan pelaporan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI;
8. Bekerja sama dengan organisasi pimpinan PT bidang kemahasiswaan PTS untuk meningkatkan capaian kompetensi mahasiswa.

Strategi-strategi tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk beberapa fasilitasi, yaitu :

1. Pendampingan Pengelolaan Kewairausahaan PT;
2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi MBKM Mandiri ;
3. Multi-Stakeholder Dialogue (MSD);
4. Kampus Merdeka Fair Semarang 2023 ”Kampus Merdeka, Bersama Lebih Baik;
5. Pendampingan Pengelolaan Program KIP Kuliah Merdeka;
6. Pengelolaan Hibah PKM dan P2MD;
9. Melakukan koordinasi Persiapan POMNAS XVIII Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Pengurus Daerah Jawa Tengah;
10. Fgd Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah Jawa Tengah;
11. Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional;
12. Penguatan Delegasi Pilmapres Wilayah Jawa Tengah Menuju Final Tingkat Nasional;

Hasil dari strategi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI, sebanyak 6.123 mahasiswa dari 49 PTS telah dilaporkan menempuh pembelajaran di luar program studinya melalui laman PDDIKTI. Selain itu, terdapat 6.459 mahasiswa mendapatkan prestasi tingkat provinsi, nasional, regional, dan internasional pada tahun 2023 melalui laman PDDIKTI. Pada pelaporan PDDIKTI 20222, terdapat sebanyak 240.977 mahasiswa yang tercatat aktif dan memenuhi kriteria untuk menempuh pembelajaran di luar program studinya. Total sebanyak 12.582 mahasiswa dari 240.977 mahasiswa telah menempuh pembelajaran di luar prodi dan meraih prestasi mahasiswa yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI.

LLDIKTI Wilayah VI senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong perguruan tinggi dalam meningkatkan implementasi kebijakan MBKM serta mendorong pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga mendorong perguruan tinggi dan memfasilitasi perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan kompetisi mahasiswa. Melalui kegiatan-kegiatan di atas, realisasi terkait mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/Dl PTS yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi dapat tercapai dan bahkan melebihi target. Pada tahun-tahun berikutnya, LLDIKTI Wilayah VI akan senantiasa meningkatkan layanannya untuk dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi khususnya mutu mahasiswa dan lulusan.

[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

a. Kriteria kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan PTS menerapkan:
   1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform Learning Management System; dan
   2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya. Kebijakan dapat berbentuk:
      a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
      b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai
      Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS);
      c) melakukan sosialisasi terkait PPKS;
      d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
      e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
      f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

b. Kriteria kebijakan antinarkoba
   PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut:
   1) memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau
   2) melakukan sosialisasi antinarkoba.

c. Kriteria kebijakan antikorupsi

PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan antikorupsi berikut:

1) menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi;
2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/ atau
5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Formula :

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PIS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
86,32	87,98	86,32	94,42

LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan Sosialisasi Implentasi Kebijakan Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan dan Anti Korupsi. Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan tindakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada pelaksanaan Tridharma sehingga dapat menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kaloboratif serta tanpa ada kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Warga Kampus.

Dalam mendukung implementasi kebijakan 4A yang terdiri dari pendidikan anti korupsi, anti perundungan, anti intoleransi serta anti kekerasan seksual pada perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI melakukan peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi dan memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta upaya penanaman nilai-nilai moral, pembekalan ilmu pengetahuan tentang hukum, adat istiadat ketimuran serta religius sebagai cara melahirkan calon-calon figur pemangku kekuasaan yang bersih dari korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. LLDIKTI Wilayah VI mendorong Perguruan Tinggi mengimplementasikan kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam meningkatkan peran perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 4A menghasilkan peningkatan yaitu pada tahun 2022 dari 230 perguruan tinggi swasta terdapat 175 perguruan tinggi swasta, sedangkan pada tahun 2023 untuk perguruan tinggi yang mengimplementasikan

kebijakan kurikulum 4A meningkat dari target tahun 2022 sesuai restra LLDIKTI Wilayah VI sebesar 84,37% menjadi 86,32% dengan rincian dari 234 perguruan tinggi swasta terdapat 202 perguruan tinggi yang menerapkan implementasi kebijakan kurikulum 4A.

Peningkatan tersebut tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak yang berkentingan untuk mewujudkan atmosfer Pendidikan di perguruan tinggi yang aman serta nyaman bagi semua. Upaya LLDIKTI Wilayah VI yang terus menerus melakukan himbauan untuk seluruh perguruan tinggi serta komitmen dari pimpinan perguruan tinggi dan didukung oleh seluruh pihak sehingga upaya menyadarkan arti pentingnya perlindungan terhadap semua pihak, utamanya mahasiswa untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas secara bertahap dapat meningkat.

Namun demikian, masih ada perguruan tinggi yang belum melakukan konfirmasi dalam menyampaikan partisipasinya untuk mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 4A tersebut masih menjadi target dari LLDIKTI Wilayah VI. Ketidaktahuan dan kekurangaktifan pimpinan perguruan tinggi beserta jajarannya menjadi salah satu faktor belum semua perguruan tinggi terlibat dalam mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 4A tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, LLDIKTI akan selalu berupaya untuk memberikan himbauan, informasi dalam bentuk sosialisasi serta melakukan konfirmasi ke semua perguruan tinggi untuk menyadarkan kembali upaya pentingnya mewujudkan kepastian sistem kurikulum perguruan tinggi utamanya terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum 4A ini yang pastinya akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keamanan dan kenyamanan semua pihak baik untuk semua jajaran perguruan tinggi maupun bagi para mahasiswa yang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.

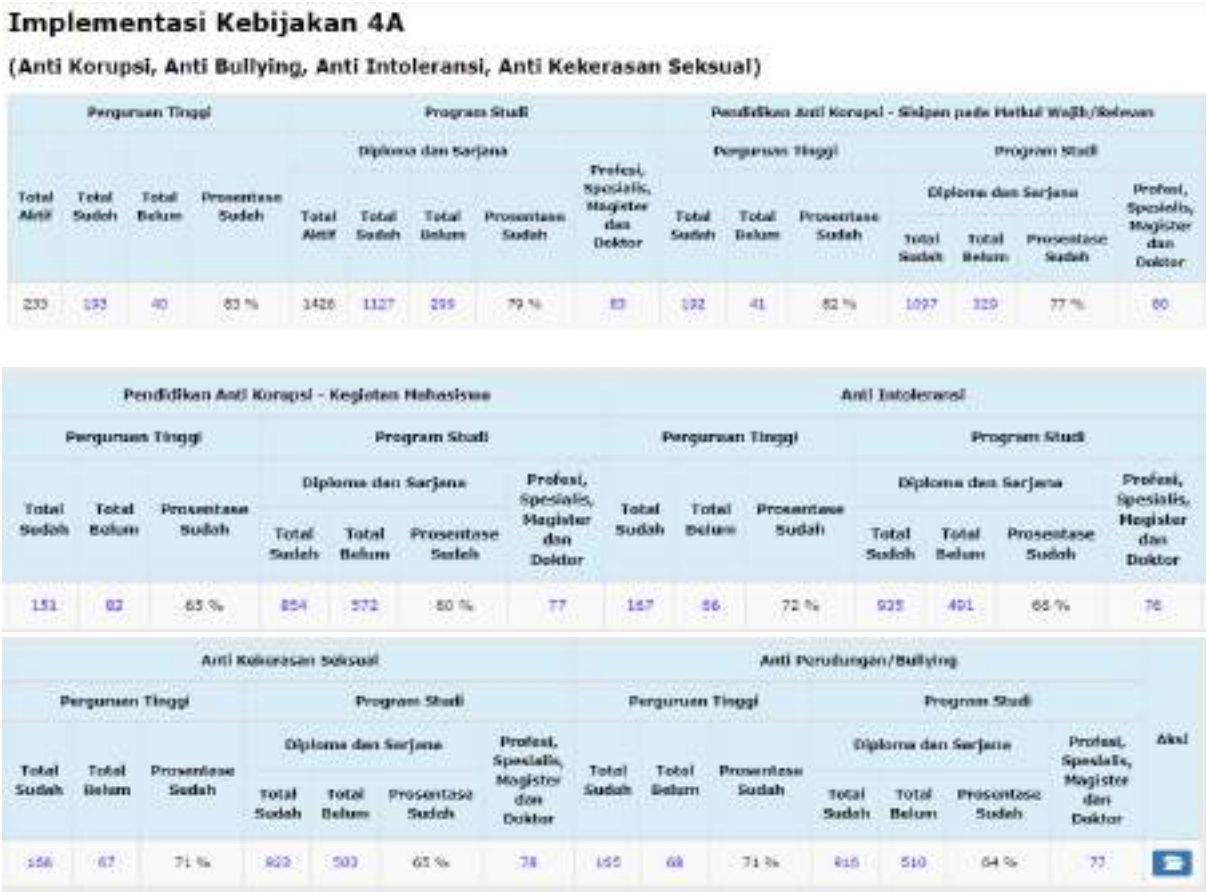
Dalam upaya peningkatan implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), LLDIKTI Wilayah VI senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Karakter (Puspeka) Kemdikbudristek terkait pendaftaran akun perguruan tinggi swasta, pendataan pansel serta tim satgas PPKS yang dibentuk pada perguruan tinggi swasta pada laman portal PPKS.



Selain memonitoring pendaftaran perguruan tinggi pada laman portal PPKS, LLDIKTI Wilayah VI juga mendorong perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PPKS dengan mendatakan pelaksanaan PPKS di lingkungan perguruan tinggi melalui laman Sibraja.



Dalam pemantauan implementasi kebijakan 4A di perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan pendataan implementasi kebijakan 4A pada laman Sibraja.



Selain pendataan, himbauan, serta arahan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI ke berbagai perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan juga Anti Intoleransi untuk saling bersinergi memberikan pemahaman pentingnya pendidikan 4A tersebut serta Tindakan pencegahan agar tidak timbul permasalahan terkait dengan perundungan, intoleransi serta kekerasan seksual.

Dengan adanya pemantauan implementasi kebijakan 4A yang telah dilaksanakan di atas pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI dapat mencapai target terkait implementasi 4A di lingkungan perguruan tinggi. Dalam pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2023. Kendala yang dihadapi perguruan tinggi terkait anti kekerasan seksual adalah perguruan tinggi masih kesulitan dalam pembentukan Pansel dan Satgas PPKS yang mewajibkan harus mengikuti pelatihan terpusat terlebih dahulu melalui laman portal PPKS.

Strategi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah menjadikan pembentukan satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota KIP Kuliah tahun 2023, dan secara rutin mengadakan koordinasi dengan PUSPEKA untuk memastikan alur pelatihan bagi perguruan tinggi swasta. Dari hasil tersebut, LLDIKTI WIlayah VI bekerjasama dengan PUSPEKA mengadakan fasilitasi Sosialisasi Pembentukan SATGAS PPKS melalui laman Portal PPKS.

Strategi dan upaya fasilitasi tersebut membuahkan hasil dengan meningkatnya perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan Kebijakan 4A pada aspek anti kekerasan seksual yang mengalami peningkatan partisipasi pada laman portal ppks yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Karakter (PUSPEKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi 162 PTS telah berpartisipasi pada laman portal PPKS yang dikelola oleh pusat pengembangan karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. LLDIKTI Wilayah VI juga memberikan penghargaan terhadap 7 perguruan tinggi swasta yang telah membentuk dan melaporkan satgas PPKS di laman portal PPKS melalui kegiatan Anugerah LLDIKTI Wilayah VI.



Selain itu, sebanyak 192 perguruan tinggi swasta telah melaporkan implementasikan kebijakan 4A yang dilaporkan melalui laman Sibraja. Kemudian, LLDIKTI WIlayah VI telah mengimplementasikan kebijakan antinarkoba secara internal dengan menyelenggarakan penyuluhan bahaya narkoba bersama BNN. Sehingga total sebanyak 205 perguruan tinggi swasta

dari total 233 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba dengan capaian sebesar 87,98%.

Sasaran Kinerja Utama 3

Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dan dampak besar dalam dunia pendidikan, ditambah dalam beberapa tahun kemarin kita mengalami pandemi COVID yang menyebabkan perubahan dalam proses pembelajaran dalam upaya menjaga jarak untuk membatasi penyebaran virus tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk dapat memunculkan bentuk inovasi-inovasi bentuk pembelajaran agar proses pembelajaran tidak mengalami hambatan amupun kendala. Begitu juga LLDIKTI Wilayah VI, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat berkepentingan untuk selalu memiliki informasi penting dan terukur dalam hal penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai dasar untuk melaksanakan tugas utama LLDIKTI yaitu melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Jawa Tengah dengan selalu mendorong perguruan tinggi untuk selalu memutakhirkan laporan data pelaksanaan kegiatan akademik serta selalu mengawal implementasi pada perguruan tinggi melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam mengawal mutu Pendidikan tinggi, maka LLDIKTI Wilayah VI selalu melakukan sosialisasi dan pemantauan dari pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan maupun hasil keluarannya.

Beberapa Langkah yang dilakukan oleh LLDIKTI dalam meningkatkan mutu Pendidikan tinggi utamanya dalam hal sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi antara lain :

1. Mengembangkan sistem untuk memantau perkembangan kelengkapan dokumen spmi pada perguruan tinggi
2. Melakukan himbauan pentingnya menjaga dan meningkatkan mutu pada perguruan tinggi
3. Melaksanakan workshop SPMI dan Audit Mutu Internal pada Perguruan Tinggi
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis pengisian pelaporan SPMI pada sistem spmi
5. Memantau dan memastikan lulusan perguruan tinggi sesuai dengan mutu dan ketentuan yang berlaku

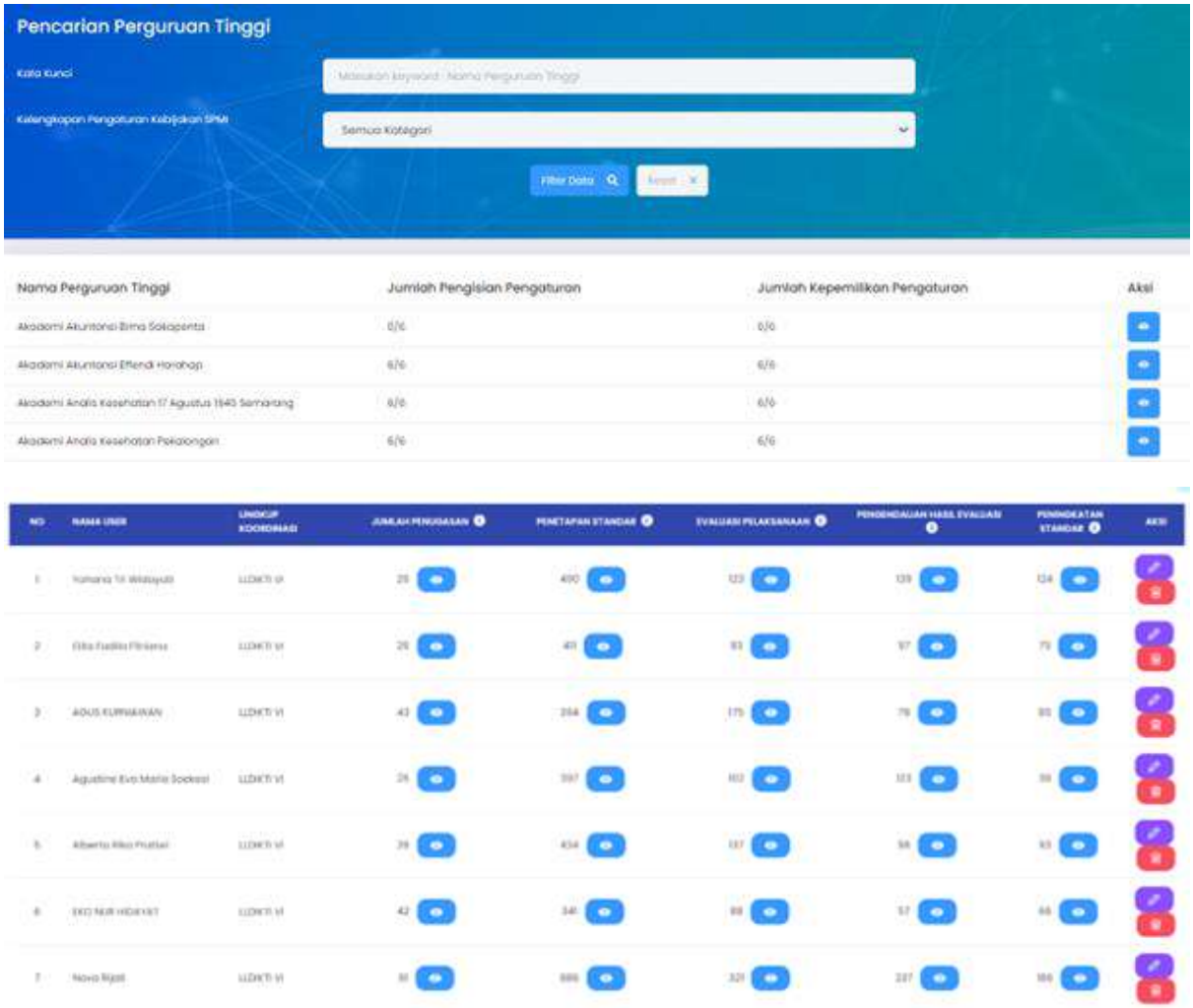
Dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi, pada tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan terkait penguatan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi melalui kegiatan Asistensi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal bagi perguruan tinggi serta Pendampingan Pelaporan SPMI bagi Perguruan Tinggi Vokasi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga mendapatkan hibah Bantuan Penguatan Fasilitator Wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Melalui dana bantuan ini,

LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Internalisasi Penguatan Penjaminan Mutu Internal, Asistensi Implementasi dan Pelaporan SPMI bagi Perguruan Tinggi Akademik, dan *Workshop* Penguatan Penjaminan Mutu Internal bagi Pengelola Program Studi Baru/ Belum Terakreditasi.





Terkait pelaporan SPMI, perguruan tinggi melaporkan dokumen SPMI nya melalui laman https://spmi.kemdikbud.go.id/auth/login. dalam pelaporan di laman SPMI tersebut, tim fasilitator wilayah SPMI akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen SPMI perguruan tinggi.



[IKU 3.1] Persentase yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus :
Mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
20,09	**22,64**	**20,09**	**23,60**

Pelaksanaan Kegiatan di Perguruan tinggi pasti tak lepas dari Tri dharma perguruan tinggi, yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketiganya menjadi poin penting dalam mewujudkan visi dari perguruan tinggi. Ketiga hal tersebut juga menjadi tanggung jawab semua elemen yang terdapat di Perguruan Tinggi, diantaranya mahasiswa, dosen, serta berbagai sivitas akademika yang terlibat. Untuk mencapai aktifitas yang menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, c.q. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah VI mendorong perguruan tinggi untuk dapat lebih aktif dalam membimbing para dosennya untuk mengajukan serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan LLDIKTI Wilayah VI mengelola hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk para dosen perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah.

Guna mendukung kegiatan tridharma utamanya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LLDIKTI Wilayah VI juga melaksanakan pengelolaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diraih oleh para dosen sebagai peneliti di perguruan tinggi serta melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya FGD Peningkatan Riset dan Publikasi, Asistensi Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Pemula, serta Bimbingan Teknis Verifikator Sinta Perguruan Tinggi Swasta.


LLDIKTI
CUS GROUP DISCUSSION
INGKATAN RISET DAN PUBLIKASI
URUAN TINGGI SWASTA
NGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VI
UN 2023
publikasi untuk dosen pemula


LLDIKTI
WILAYAH VI
ASISTENSI
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BAGI DOSEN PEMULA PADA PTS
DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VI
TAHUN 2023


LLDIKTI
BIMBINGAN TEKNIS
VERIFIKATOR SINTA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VI
TAHUN 2023

Untuk memudahkan pengelolaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LLDIKTI Wilayah VI juga membuat media penunjang yaitu adanya sistem e-kontrak untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun untuk hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diraih oleh para dosen/peneliti di perguruan tinggi pada tahun 2023 sebagai berikut :

Jenis Hibah	Jenis	PTS	Judul	Nominal
Penelitian	Baru	84	378	Rp. 25.040.700.000
	Lnjutan	18	63	Rp. 9.753.865..000
Pengabdian	Batch I	31	100	Rp. 5.900.983.000
	Batch 2	53	114	Rp. 3.471.035.000
Vokasi		28	53	Rp. 1.856.718.000

Table data hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023

Selain itu untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen maupun peneliti di perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI mengembangkan sistem e-kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dimana melalui sistem tersebut semua *stakeholder* yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib untuk menyampaikan progress pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi masing-masing baik itu dari unsur pimpinan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat maupun dosen atau peneliti yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah.





Pada akhir 2023, pemenuhan Indikator Kinerja pada IKU ini, selain berfokus pada dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus, juga pada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Terdapat 47 Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan tridharma di luar kampus, membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Daftar 47 Perguruan Tinggi tersebut sebagai berikut :

No	Nama PT
1	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
2	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
3	Akademi Keperawatan Giri Satria Husada
4	Institut Teknologi Telkom Purwokerto
5	STKIP Majenang
6	Universitas Perwira Purbalingga
7	Universitas Harapan Bangsa
8	Akademi Kebidanan Siti Fatimah
9	Politeknik Insan Husada Surakarta
10	Universitas YPPI Rembang
11	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe
12	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin
13	Universitas Islam Batik
14	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi
15	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara

16	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
17	Politeknik Harapan Bersama
18	Universitas Stikubank
19	Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
20	Universitas Pekalongan
21	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes
22	Universitas Muhammadiyah Purworejo
23	Universitas Muhammadiyah Semarang
24	Universitas Putra Bangsa
25	Universitas Bhamada Slawi
26	Universitas Dian Nuswantoro
27	Universitas Muhammadiyah Magelang
28	Universitas Widya Husada Semarang
29	Politeknik Bumi Akpelni
30	Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono
31	Akademi Kebidanan Giri Satria Husada
32	STMIK YMI Tegal
33	STT Minyak dan Gas Cilacap
34	Politeknik Akbara
35	STMIK Bina Patria
36	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
37	STIKES Muhammadiyah Tegal
38	Universitas Sahid Surakarta
39	Universitas Surakarta

40	Politeknik Indonusa Surakarta
41	Universitas PGRI Semarang
42	Universitas Kristen Satya Wacana
43	Politeknik ATMI
44	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
45	Universitas Muhammadiyah Surakarta
46	Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan
47	Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung

Indikator Kinerja Utama 7

Kemitraan program studi:

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Kriteria kerjasama program studi
Mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
78,2	81,5	78,2	85,84

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah saat ini berjumlah 233 Perguruan Tinggi yang berbentuk Universitas, Intstitut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Akademi Komunitas.



Dalam pelaksanaan kerja sama, perguruan tinggi didorong untuk melakukan kerja sama dengan mitra dan pihak lain serta melaporkannya melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id.

Berdasarkan hasil pelaporan dari laman tersebut, saat ini telah ada 190 Perguruan tinggi aktif yang telah melaporkan kerjasamanya.

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
A	A	A	A	A

Tata kelola LLDIKTI Wilayah VI mengalami perbaikan secara terus menerus. Dibuktikan dari setelah dinobatkannya LLDIKTI Wilayah VI sebagai satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 hingga 2023 LLDIKTI

Wilayah VI berproses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bukti adanya perbaikan tatakelola juga terlihat dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang semakin meningkat kualitasnya. Sesuai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan internal oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LLDIKTI Wilayah VI berada pada kategori/predikat "A" dengan interprestasi "Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel". Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannnya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP di LLDIKTI Wilayah VI melalui 2 (dua) tahap, yakni Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Satuan Kerja (Satker), dan Reviu atas Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

Berikut rincian nilai implementasi SAKIP LLDIKTI Wilayah VI tahun 2022 berdasarkan evaluasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24.6
2.	Pengukuran Kinerja	30%	26.5
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	85.35

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di LLDIKTI Wilayah VI antara lain:

1. Rapat evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
2. Penyusunan rencana tindak lanjut/rencana aksi melalui penjadwalan kegiatan;
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja antara kepala LLDIKTI Wilayah VI dengan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek;
4. Sosialisasi PK kepada seluruh Brayat Agung LLDIKTI Wilayah VI;
5. Review laporan kinerja;
6. Pengembangan peningkatan kapasitas pegawai;
7. Penyusunan rencana aksi melalui aplikasi spasikita;
8. Mempublikasikan dokumen SAKIP melalui Website LLDIKTI Wilayah VI;
9. Menyusun rencana kinerja tahunan dalam aplikasi spasikita;
10. Review dan evaluasi kinerja anggaran yang dilaksanakan secara periodik;

11. melaksanakan revisi anggaran yang digunakan untuk kegiatan-Kegiatan yang mendukung pencapaian IKK;
12. melaksanakan review laporan keuangan secara berkala;
13. Menindaklanjuti hasil dari LHE yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan;
14. Melakukan evaluasi mandiri melalui aplikasi spasikita;
15. Melayani kunjungan studi tiru terkait sistem aplikasi keuangan SiCantik dan Seruni.
16. Pengembangan aplikasi keuangan dan melayani konsultasi stakeholder

Meskipun secara target capaian tahun 2023 telah tercapai, namun masih ditemui hambatan kendala dan permasalahan peningkatan kualitas implementasi sakip di LLDIKTI Wilayah VI. Sesuai hasil penilaian oleh Biro perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek komponen Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja 24,6, Pengukuran kinerja 25,5, Pelaporan Kinerja dari bobot 12,75, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 22,5 dengan total nilai SAKIP 85,35 berpredikat A. Terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu:

1. Perencanaan

a. Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan, antara lain dengan penyesuaian IKU dengan Kepmendikbudristek Nomo 210/M/2023. Perbaikan analisa penentuan target dengan dasar pencapaian tahun berikutnya dengan menggunakan strategi-strategi yang digunakan pada tahun sebelumnya. Terdapat dokumen yang mampu menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) yang berakibat belum dapat disimpulkan kausalitas pencapaian indikator kinerja individu dengan pencapaian indikator diatasnya diatasnya misalkan matriks peran hasil.
b. Perencanaan Kinerja ditingkatkan pemanfaatannya untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan antara lain melakukan analisa anggaran yang ditetapkan untuk tiap target indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi realisasi anggaran pada LAKIN tahun sebelumnya dan rekapitulasi pengukuran pencapaian tiap triwulan dari masing-masing indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja.

2. Pengukuran

Menyusun Pedoman Pengumpulan Data Kinerja berdasarkan POS yang sudah dimiliki dan perlunya reviu POS Pengumpulan data yang ada sehingga

dapat menjelaskan bagaimana pencapian pengukuran kinerja setiap bulanan/triwulannya untuk dapat memastikan target dapat terpenuhi di akhir tahun anggaran dan terdapat perbaikan kualitas pencapaian kinerja sehingga seluruh target kinerja dari masing-masing indikator dapat tercapai.

3. Pelaporan

Pelaporan Kinerja ditingkatkan dampak yang dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian target pada perencanaan kinerja dan mempengaruhi pada budaya kerja organisasi.

4. Evaluasi

Menganalisis peningkatan implementasi SAKIP pada indikator kinerja yang mana dan menjelaskan efektifitas dan efisiensi terkait dengan hasil evaluasi akuntabilitas pada tahun berjalan.

Permasalahan dan kendala lain yang ditemui dalam pencapaian target 4.1 tahun 2023 yaitu terjadi beberapa kali refocusing anggaran. Beberapa kali antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain :

1. Melakukan reviu Renstra LLDIKTI Wilayah VI 2020-2024 setiap tahun;
2. Mengembangkan inovasi dalam rangka pencapaian dan pengukuran capaian IKK;
3. Mereview penjadwalan kegiatan untuk menyelaraskan dengan target IKK yang ada dalam Perjanjian kinerja;
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap awal tahun dengan berdasar pada capaian informasi dalam LAKIP;
5. Melakukan evaluasi kinerja rencana aksi/kegiatan bersama penangungjawab kegiatan/ketua kelompok kerja.

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Realisasi 2022 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi PK 2023 (%)	Target Renstra 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
90,24	**91**	**97,02**	**91**	**97,50**

Tahun 2023 berdasarkan penilaian pada aplikasi SPASIKITA, nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sebesar 97,02 Dapat disimpulkan bahwa target IK 4.2 telah tercapai dengan baik. Dari target sebesar 91 terealisasi 97,02 Capaian realisasi nilai kinerja anggaran tersebut diperoleh dari akumulasi nilai EKA 99,78 dan IKPA 94,26

Dibandingkan dengan pencapaian 2022 capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,78 poin dari sebelumnya 90,24 menjadi 97,02 Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 91 sudah tercapai.



Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh instansi pemerintah. Pada tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan dari nilai atas atas implementasi anggaran dengan bobot 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 persen. Namun pada tahun 2023 bobot tersebut berubah menjadi 50 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan 50 persen. Penilaian pada aspek implementasi dilakukan dengan melihat empat indikator yaitu capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.Sedangkan indikator kinerja penilaian IKPA ada 13 indikator yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, capaian output, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Return SP2D, Pagu minus, dan Dispensasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan "terwujudnya tatakelola LLDIKTI yang baik", LLDIKTI Wilayah VI menambah dan memperbarui fitur aplikasi SICANTIK (Sistem Perencanaan Keuangan Elektronik) dan SERUNI (Sertifikasi Dosen Untuk Indonesia). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L selama tahun 2022 antara lain:

1. Review Laporan Keuangan;
2. Mengadakan kegiatan guna peningkatan kompetensi Pegawai;
3. Review dan evaluasi kinerja anggaran secara berkala;
4. Pengendalian atas laporan keuangan oleh TIM SPI;
5. Menyusun laporan keuangan setiap Tri Wulan dan direview oleh SPI;
6. Merevisi halaman III DIPA sesuai dengan jadwal;
7. Menyampaikan laporan capaian kegiatan melalui aplikasi spasikita yang dilaksanakan setiap bulan;
8. Melakukan revisi RKA-K/L yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKK;
9. Melakukan rekon data internal antara data Keuangan dan data barang milik negara;
10. Melakukan rekon eksternal dengan KPPN sebelum batas waktu yang ditentukan;
11. Melakukan koordinasi dengan petugas persediaan;
12. Operator persediaan melakukan stock opname persediaan setiap semester;
13. Operator persediaan mengirim data ke BMN setiap bulan;
14. Melakukan telaah Laporan Keuangan setiap triwulan;
15. Melakukan koordinasi Internal di LLDIKTI Wilayah VI;
16. Mengisi Laporan Tahunan pada aplikasi Spasikita.

Permasalahan dan hambatan yang dijumpai dalam upaya pencapaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L yaitu terjadi beberapa kali refocusing anggaran.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasian target kinerja yaitu:

1. memfokuskan kegiatan pada kegiatan yang langsung berkaitan dengan pencapaian IKK 4.2;
2. mengembangkan berbagai inovasi dalam mendukung perbaikan tata kelola melalui Aplikasi Sicantik dan Seruni.

Sedangkan rencana tindak lanjut atau langkah antisipasi yang akan dilakukan ke depan agar permasalahan yang muncul tersebut tidak dijumpai kembali antara lain dengan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pokja pelaksana kegiatan melalui kegiatan rapat internal yang dilaksanakan secara periodik

Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Vi Semarang dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 289.379.498.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 285.777.755.646 dengan persentase daya serap sebesar 98,76 %. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel Serapan



2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Vi Semarang berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.3.618.448.755 (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja pegawai senilai Rp 3.060.836.969, belanja barang Rp 556.758.686, dan belanja modal senilai Rp 853.100.

Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2023, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Vi Semarang melakukan inovasi sebagai berikut:

1. **Inovasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen surat keputusan jabatan fungsional dosen dan inpassing pangkat**

   Sejak Agustus 2023, LLDIKTI Wilayah VI telah menerapkan teknologi tanda tangan elektronik pada layanan administrasi kepegawaiannya. Layanan administrasi yang dimaksud adalah layanan penerbitan Surat Keputusan (SK) Jabatan Fungsional Dosen dan Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk jenjang Asisten Ahli dan Lektor, dan SK Inpassing pangkat bagi dosen yayasan (non PNS). Hal ini dilakukan dalam upaya LLDIKTI Wilayah VI untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien karena dengan TTE proses penerbitan SK dapat lebih cepat. Pejabat penandatangan dapat memberikan tanda tangannya di manapun berada, sehingga tidak ada lagi waktu tunggu dikarenakan pejabat penanda tangan tidak berada di tempat. Selain itu, dengan TTE dapat memangkas alur proses, yang sebelumnya melalui 6 tahapan : cetak - tanda tangan - *scan* – unggah – kirim – SK diterima, menjadi lebih singkat hanya 2 tahapan : tanda tangan (TTE) – SK diterima secara digital. Lebih efisien, karena dapat mengurangi penggunaan kertas dan perangkat cetak. Selain itu tidak diperlukan lagi biaya pengiriman dokumen fisik ke perguruan tinggi.

   Selain efektif dan efisien, penggunaan TTE menambah produktifitas pemrosesan dan penerbitan SK. Diagram berikut menggambarkan peningkatan produktifitas tersebut.



2. Pinarak (Pojok Inklusif Bicara Akreditasi)

   Merupakan bentuk fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah VI sebagai upaya konkret agar seluruh program studi dan perguruan tinggi dapat memperoleh peringkat akreditasi. Fokus utama yang dilakukan

adalah memacu peningkatan peringkat akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi.

3. PAKARTI (Pendampingan Kinerja Perguruan Tinggi)

PAKARTI sendiri merupakan akronim dari Pendampingan Kinerja Perguruan Tinggi. Dalam terminologi Jawa, PAKARTI juga dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan atau kinerja.

PAKARTI yang diinisiasi oleh Pokja Kelembagaan juga menjadi Rumah Bersama berbagai program pendampingan atau fasilitasi oleh LLDIKTI dalam meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi untuk mencapai kualitas mutu sesuai dengan SNDIKTI. PAKARTI ini melibatkan seluruh Kelompok Kerja di LLDIKTI Wilayah VI. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di seluruh layanan dapat disampaikan langsung pada saat kegiatan PAKARTI.

4. SiBraja

Sistem Informasi Brayat Agung Pendidikan Tinggi Jawa Tengah (SiBRAJA) merupakan sebuah sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan antara dosen, perguruan tinggi dan LLDIKTI Wilayah VI. Hampir semua layanan LLDIKTI Wilayah VI kepada dosen, dan perguruan tinggi di Wilayah Jawa Tengah dapat difasilitasi melalui sistem informasi tersebut. SiBRAJA menjadi brand LLDIKTI Wilayah VI dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Jawa Tengah.

Sebagai sistem informasi layanan, SiBRAJA terus berbenah, bergerak dan berinovasi guna menuju layanan prima sesuai visi dan misi LLDIKTI Wilayah VI. Beberapa inovasi di tahun 2023 diantaranya penyederhanaan prosedur usulan inpassing pertama dosen yayasan dan integrasi SiBRAJA dengan PDDikti.

Pada prosedur usulan inpassing, dosen yayasan dapat mengusulkan inpassing setelah dosen tersebut memperoleh jabatan fungsional pertama. SiBRAJA melakukan inovasi, ketika dosen yayasan memperoleh jabatan fungsional pertama, surat keputusan inpassing akan otomatis diterbitkan dan mulai berlaku satu bulan setelah tanggal surat keputusan jabatan fungsional pertama. Jadi dosen tidak perlu mengusulkan inpassing pertama, hal ini sudah memangkas birokrasi.

SiBRAJA juga melakukan inovasi dengan menyediakan tujuh belas menu API PDDikti sebagaimana Gambar 1 yang dapat dimanfaatkan dosen dalam mengusulkan Jabatan Fungsional Dosen.

List Menu API PDDikti

No	Menu	Keterangan	Aksi
1	Profil Dosen	Menampilkan Profil Dosen	Lihat
2	Jabatan Fungsional	Menampilkan Riwayat Jabatan Fungsional	Lihat
3	Kepangkatan	Menampilkan Riwayat Kepangkatan	Lihat
4	Inpassing	Menampilkan Riwayat Inpassing	Lihat
5	Pendidikan	Menampilkan Riwayat Pendidikan	Lihat
6	Diklat	Menampilkan Riwayat Diklat	Lihat
7	Pengajaran	Menampilkan Riwayat Pengajaran	Lihat
8	Bimbingan	Menampilkan Riwayat Bimbingan	Lihat
9	Pengujian	Menampilkan Riwayat Pengujian	Lihat
10	Penelitian	Menampilkan Riwayat Penelitian	Lihat
11	Publikasi	Menampilkan Riwayat Publikasi	Lihat
12	Pengabdian	Menampilkan Riwayat Pengabdian	Lihat
13	Anggota Profesi	Menampilkan Riwayat Anggota Profesi	Lihat
14	Penghargaan	Menampilkan Riwayat Penghargaan	Lihat
15	Penunjang	Menampilkan Riwayat Penunjang	Lihat
16	Pekerjaan	Menampilkan Riwayat Pekerjaan	Lihat
17	Sertifikasi	Menampilkan Riwayat Sertifikasi	Lihat

Gambar 1 List Menu API PDDikti di SiBRAJA

2. Penghargaan

Pada tahun 2023, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI mendapatkan berbagai capaian penghargaan, diantaranya :

1. Peringkat 1 - Kategori LLDIKTI dengan Fasilitasi Pengembangan dan Implementasi SPMI Terbaik - Apresiasi Program Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek di Jogja, 11 Desember 2023;



2. Terbaik 1 - Anugerah Dikti Ristek Tahun 2023: Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kategori SPMI, Sub Kategori LLDIKTI dengan Tema Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek di Jakarta, 13 Desember 2023;
3. Terbanyak 3 - Anugerah Dikti Ristek Tahun 2023: Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kategori Kampus Mengajar, Sub Kategori LLDIKTI dengan Mahasiswa Pendaftar Terbanyak, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek di Jakarta, 13 Desember 2023;
4. Bronze Winner - Anugerah Dikti Ristek Tahun 2023: Anugerah Humas Kategori LLDIKTI, Sub kategori Majalah Instansi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek di Jakarta, 13 Desember 2023;







3. Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2023, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang melakukan program *crosscutting /collaborative* nama program *crosscutting / collaborative*. uraikan :

1.Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting / collaborative*

- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI
- Resimen Induk Kodam IV/Diponegoro
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur
- Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (BKS PTN - LLDIKTI) Wilayah Jawa Tengah dan DIY

2. Uraikan peran satker dan pihak-pihak yang terkait pada program *crosscutting / collaborative tersebut*

- Mengkoordinir Perguruan Tinggi serta pendataan Mahasiswa Wilayah LLDIKTI VI Provinsi Jawa Tengah, sebagai peserta Diklat Kader Bela Negara
- Memberikan akses informasi dan kesisteman serta memberikan fasilitasi baik dalam bentuk sumber daya manusia untuk melakukan pendampingan, pembimbingan teknis, dan kegiatan lain berkenaan dengan kegiatan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan
- Mendorong pelaksanaan bersama Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengembangannya yang mencakup Pendidikan, Penelitian Pengabdian Masyarakat, Program MBKM dan bidang yang lain yang relevan di wilayah masing-masing PTN dan LLDIKTI

3.Dampak dari program *crosscutting / collaborative*

- Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara Lingkup Pendidikan Bagi Mahasiswa Wilayah LLDIKTI VI Tahun 2023
- Pemanfaatan Bersama Aplikasi Layanan Pendidikan Tinggi Berbasis Daring
- Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antar Perguruan Tinggi di lingkungan Jawa Tengah dan DIY

4.Bukti



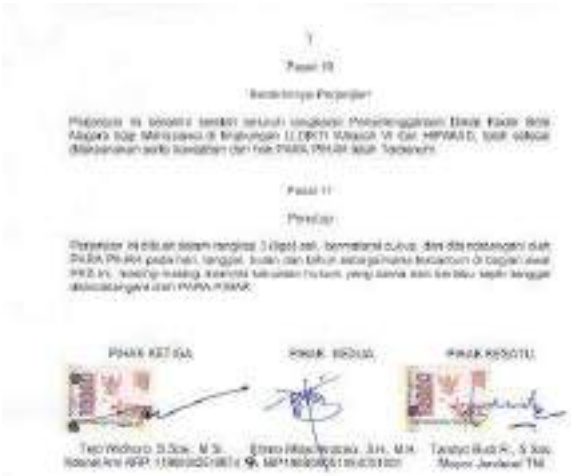
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DENGAN

DAN

TENTANG



PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
JAWA TENGAH

NOMOR : 0959/LL15/LP.00.01/2023
NOMOR : 559/LL6/KS.03.00/2023

TENTANG

PEMANFAATAN BERSAMA APLIKASI LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS DARING

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023, bertempat di Kupang, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. ADRIANUS AMHEKA : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV NTT berkedudukan di Jalan Taebenu RT 007/RW 003, Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV,
Selanjutnya secara disebut PIHAK KESATU;

2. BHIMO WIDYO ANDOKO : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan perjanjian ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam *addendum* yang disepakati PARA PIHAK.
2. Apabila setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
3. Setiap permasalahan dan perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
ADRIANUS AMHEKA	BHIMO WIDYO ANDOKO

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

BADAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (BKS PTN – LLDIKTI)

WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 01/BKS/MOU/VII/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (29-07-2023), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. **Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Purwokerto Jalan Prof. dr. HR. Bunyamin No. 708, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. **Prof. Dr. S Martono M.Si.** : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026, berkedudukan di Semarang Jalan Taman Siswa, Sekaran, Gunungpati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Yogyakarta Jalan Tentara Pelajar No. 13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Ketiga Belas.**

14. **Bhimo Widyo Andoko, SH, MH.** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Semarang Jalan Pawiyatan Luhur I No.1, Bendan Duwur, Gajahmungkur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Keempat Belas.**

15. **Prof. Dr. Drs. Mohammad Irhas Effendi, M.Si** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **Para Pihak** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc Agr., IPU	Prof. Dr. S Martono M.Si	Prof.dr.Ova Emilia,M.Med Ed.Sp.,OG (K) Ph.D
Pihak Keempat	**Pihak Kelima**	**Pihak Keenam**
Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO	Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum	Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
Pihak Ketujuh	**Pihak Kedelapan**	**Pihak Kesembilan**
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M. Hum	Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Pihak Kesepuluh	**Pihak Kesebelas**	**Pihak Kedua Belas**
Prof. Dr. Totok Prasetyo, B.Eng., MT., IPU, ACPE	Prof. Dr. Rohmani Taufiq, M.Ag.	Ir. Akhmad Nuriyanis,MT

Pihak Ketiga Belas	Pihak Keempat Belas	Pihak Kelima Belas
Prof. dr. Aris Junaidi, Ph.D.	Bhimo Widyo Andoko, SH, MH.	Prof. Dr. Mohammad Irhas Effendi, M. Si
Pihak Keenam Belas	**Pihak Ketujuh Belas**	**Pihak Kedelapan Belas**
Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.	Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag	Prof. Dr. Zakiyuddin, M. Ag.
Pihak Kesembilan Belas	**Pihak Kedua Puluh**	**Pihak Kedua Puluh Satu**
Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Riyadi Purwanto, S.T., M.Eng	Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si
Pihak Kedua Puluh Dua		
Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.		

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

Selama Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2023, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang memiliki 4 Sasaran Kinerja yaitu:

Sasaran Kinerja	
[S 1]	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[S 2]	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[S 3]	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan
[S 4]	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI.
Indikator Kinerja Utama	
[IKU 1.1]	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.
[IKU 1.2]	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.
[IKU 2.1]	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
[IKU 2.2]	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.
[IKU 3.1]	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.
[IKK 4.1]	Predikat SAKIP
[IKK 4.2]	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Sedangkan pada triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

LLDIKTI Wilayah VI berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Untuk Indikator Kinerja Lama berdasarkan Kepmendikbudristek No 3/M/2021 dari 7 indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 4 sasaran kegiatan terdapat 6 indikator yang melebihi target (>100%) dari yang ditetapkan, sedangkan 1 indikator kegiatan realisasinya sesuai target (100%).

Untuk Indikator Kinerja Baru berdasarkan Kepmendikbudristek dari 7 indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 4 sasaran kegiatan terdapat 6 indikator yang melebihi target (>100%) dari yang ditetapkan, sedangkan 3 indikator kegiatan realisasinya sesuai target (100%).

Permasalahan

1. Informasi dan data terkait layanan yang tersedia secara online belum dapat diakses secara optimal oleh pengguna layanan.
2. Keterbatasan Keuangan dan Sumber Daya
3. Kepatuhan terhadap Persyaratan Akreditasi
4. Penyelarasan dengan Standar Nasional dan Internasional
5. Rekapitulasi APT PTS LLDIKTI Wilayah VI di atas, 30% atau 70 PTS diantaranya terkena Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA)
6. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah;
7. Sistem kurasi prestasi mahasiswa untuk pelaporan data prestasi mahasiswa masih dalam tahap pengembangan oleh Puspresnas;
8. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih;
9. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship.
10. Masih ada perguruan tinggi yang belum melakukan konfirmasi dalam menyampaikan partisipasinya untuk mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 4A tersebut masih menjadi target dari LLDIKTI Wilayah VI
11. pendataan dosen yang berkegiatan di luar kampus. Tidak semua perguruan tinggi mengisi dengan lengkap data tersebut.
12. Mempertahankan predikat A pada SAKIP dengan meningkatkan nilai nya. Range nilai untuk kategori A adakah 80 sd 90, dimana saat ini LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan nilai 85,35.

Langkah Kerja Kedepan

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang,LLDIKTI Wilayah VI akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun usulan perbaikan / perubahan sistem informasi terkait layanan khususnya tata letak laman yang lebih user-friendly.
2. Fasilitasi Kelembagaan Melalui PAKARTI dan PINARAK
3. Fasilitasi terhadap Perguruan Tinggi yang terkena pemantauan dengan mengadakan 2 (dua) kegiatan khusus untuk pendampingan teknis perbaikan data, kegiatan tersebut adalah Coaching PEPA, dan Klinik Akreditasi Online Angkatan 4 (PEPA)
4. Secara rutin memberikan informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM melalui laman maupun media sosial;
5. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PTS berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM);
6. LLDIKTI WIlayah VI juga telah bekerjasama dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM) untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka (KM) Fair dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem MBKM di lingkungan PT;
7. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarkana kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa;
8. LLDIKTI WIlayah VI telah melakukan kegiatan pendampingan pengelolaan KIP Kuliah dengan bekerjasama dengan Puslapdik;
9. Melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD;
10. Melakukan pemantauan pelaporan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI;
11. Bekerja sama dengan organisasi pimpinan PT bidang kemahasiswaan PTS untuk meningkatkan capaian kompetensi mahasiswa.
12. LLDIKTI akan selalu berupaya untuk memberikan himbauan, informasi dalam bentuk sosialisasi serta melakukan konfirmasi ke semua perguruan tinggi untuk menyadarkan kembali upaya pentingnya mewujudkan kepastian sistem kurikulum perguruan tinggi utamanya terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum 4A ini yang pastinya akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keamanan dan kenyamanan semua pihak baik untuk semua jajaran perguruan tinggi maupun bagi para mahasiswa yang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.
13. LLDIKTI Wilayah VI telah mengakomodir pendataan melalui sistem.lldikti6.id (SIBRAJA). Data lain yang dapat dijadikan sumber sebenarnya terlihat pada SISTER, pada laporan beban kerja dosen, tetapi data tersebut tidak terdapat menu yang mengakomodir LLDIKTI untuk mengunduh dan mengumpulkan data tridharma dosen.

LAMPIRAN

LAKIN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala LLDIKTI Wilayah VI
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bhimo Widyo Andoko

Jabatan : Kepala LLDIKTI Wilayah VI

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang,26 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,	**Kepala LLDIKTI Wilayah VI,**
Suharti	**Bhimo Widyo Andoko**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	98.75
		[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	85.89
2	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	54.78
		[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	86.95
3	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	77.81
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	A
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 183.610.764.000
2	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp. 114.678.756.000
		TOTAL	**Rp. 298.289.520.000**

Semarang,26 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

Suharti

Kepala LLDIKTI Wilayah VI,

Bhimo Widyo Andoko

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala LLDIKTI Wilayah VI
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bhimo Widyo Andoko

Jabatan : Kepala LLDIKTI Wilayah VI

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang,17 November 2023

Sekretaris Jenderal,	**Kepala LLDIKTI Wilayah VI,**
Suharti	**Bhimo Widyo Andoko**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88
		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	82.05
2	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	67.52
		[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4.13
		[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	86.32
3	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	20.09
		[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	78.2
4	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp. 76.018.734.000
2	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 213.360.764.000
		TOTAL	**Rp. 289.379.498.000**

Semarang,17 November 2023

Sekretaris Jenderal,



Suharti

Kepala LLDIKTI Wilayah VI,



Bhimo Widyo Andoko

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 1
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	predikat	A	**TW1 :** -	**TW1 :** -
1	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	91	**TW1 :** 0	**TW1 :** 74,25
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	98.75	**TW1 :** 9.88	**TW1 :** 15
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	85.89	**TW1 :** 21.3	**TW1 :** 62.34
2	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	54.78	**TW1 :** 8.70	**TW1 :** 18.40
2	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	86.95	**TW1 :** 75.75	**TW1 :** 76
2	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	77.81	**TW1 :** 14.20	**TW1 :** 14.70

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.293.689.520.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 09 Mei 2023 sebesar **Rp. 91.461.848.787** atau **31.14%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 09 Mei 2023 **Rp. 202.227.671.213**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 1.1 Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.

Progress / Kegiatan :
6 layanan yaitu
1.)Rekomendasi akreditas program studi
2.) layanan kelembagaan , Rekomendasi Akreditasi PT, Layanan Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik,, Pengaduan Pelayanan Publik, Validasi Perubahan Data Mahasiswa pada PDDIKTI, Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS dengan Pangkat PNS (Inpassing Pertama), Pengusulan Jabatan fungsional akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan terkait kualitas luaran dan waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan Kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan yaitu
1.) Pemeliharaan sarana prasarana
2.) evaluasi hasil SKM
3.) FGD pemutakhiran standar pelayanan (SOP)
4.) Pengembangan dan pemeliharaan sistem LLDIKTI Wilayah VI
5.) Pemutakhiran data di PDDIKTI dan SISTER

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

6.) Diseminasi standar pelayanan secara periodik.

Kendala / Permasalahan :

Beberapa layanan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti aplikasi yang dikelola oleh unit kerja lain : PDDIKTI, SISTER, perubahan peraturan, dll. Informasi terkait layanan yang dikelola oleh LLDIKTI Wil VI masih perlu disosialisasikan lebih luas.

Strategi / Tindak Lanjut :

Membangun komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan melakukan upaya diseminasi standar pelayanan serta melakukan evaluasi pelaksanaan layanan di LLDIKTI Wilayah VI

B . S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 1.2 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Progress / Kegiatan :

1 PTS (UKSW) telah mendapat peringkat APT Unggul, pada bulan Januari 2023, dengan demikian PTS dengan peringkat Akreditasi unggul ada 4 (empat) yakni Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Kristen Satya Wacana. PTS dengan peringkat APT A adalah Universitas Katolik Soegijapranata. PT yang aktif melakukan konsolidasi dengan PT lain berjumlah 144 PT dibuktikan dengan pelaporan pada laporankerma.kemdikbud.go.id, dan jumlah PTS yg punya 3000 mahasiswa (sampai dengan saat ini ada 11 PTS yg sudah melaporkan jumlah mahasiswanya sebanyak 3000) Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Dian Nuswantoro Universitas Muhammadiyah Purwokerto Universitas Islam Sultan Agung Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Universitas Muhammadiyah Magelang Institut Teknologi Telkom Purwokerto Universitas Slamet Riyadi Kegiatan yang dilakukan

1. Rakor Pimpinan Badan Penyelenggara dan Pimpinan PT
2. Rakor Badan Penyelenggara PT Akreditasi C dan Tidak Terakreditasi
3. Bimbingan Teknis IAPT 3.0 bagi PT tidak terkareditasi Angkatan 1
4. Asistensi Legalitas Badan Penyelenggara
5. Workshop IAPS bersama LAM Teknik Angkatan 1
6. FGD Forum Pengelola Kerjasama PT (FORKAMA)
7. Workshop Peningkatan Kerja Sama dalam program studi.

Kendala / Permasalahan :

1. Jumlah PTS yang memenuhi untuk diproyeksikan menuju Unggul tidak banyak, karena indikator-indikator pemenuhan syarat perlu Unggul yang belum bisa dipenuhi

2.Jumlah mahasiswa yang bisa direkrut bergantung pada bentuk perguruan tinggi seperti politeknik, sekolah tinggi,akademi yang mempunyai keterbatasan daya tampung mahasiswa, perolehan mahasiswa baru, serta sarana prasarana penunjang

3.Masih ada perguruan tinggi yang tidak konsisten dalam menyampaikan laporan kerjasama melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id.

Strategi / Tindak Lanjut :

1.Melakukan fasilitasi terhadap Badan Penyelenggara dan pengelola PTS dalam bentuk rapat koordinasi, pendampingan, asistensi, workshop, klinik

2.Mengoptimalkan peran forum pengelola kerjasama perguruan tinggi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama

C . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Progress / Kegiatan :

Sebanyak 659 mahasiswa dari 46 PTS telah dilaporkan mendapatkan prestasi tingkat nasional dan internasional pada tahun 2022. Namun, kompetisi mahasiswa pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Puspresnas masih berlangsung sehingga belum ada hasil pemenang kompetisinya. Sebanyak 93 PT telah melaporkan aktivitas MBKM pada tahun 2022 dengan jumlah mhs sebanyak 45.612 mhs, sedangkan pada tahun 2023, sebanyak 9 PT telah melaporkan data MBKM pada tahun 2023 dengan jumlah mhs sebanyak 1.094 mahasiswa Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

1. Sosialisasi Pengisian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
2. Sosialisasi dan Workshop MBKM Mandiri
3. Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi Dosen Pendamping dan Mahasiswa
4. Pendampingan Peningkatan Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan.

Kendala / Permasalahan :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mhs kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas
2. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Puspresnas masih dalam tahap seleksi sehingga belum ada hasilnya
3. PT belum melaporkan data aktivitas MBKM yang dilakukan
4. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan fasilitasi informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM
2. LLDIKTI telah mengembangkan sistem informasi perjanjian kinerja antara LLDIKTI dengan PTS untuk mendorong PT dalam mencapai IKU PT sesuai kebijakan, termasuk salah satunya terkait MBKM
3. LLDIKTI WIlayah VI juga telah bekerjasama dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM) untuk menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop MBKM Mandiri

sehingga mendorong PT untuk dapat menyelenggarakan MBKM secara mandiri diluar keikutsertaan dalam program flagship pusat 4. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarkana kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

D . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.2 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.

Progress / Kegiatan :
Sebanyak 173 perguruan tinggi telah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi, 147 perguruan tinggi mengimplemntasikan Anti Intoleransi, 146 perguruan tinggi mengimplementasikan Anti Kekerasan Seksual, 145 perguruan tinggi telah mengimplementasikan Anti Perudungan
Kendala / Permasalahan :
untuk implementasi Anti Kekerasan Seksual perguruan tinggi masih kesulitan dalam pembentukan Pansel dan Satgas PPKS yang mewajibkan harus mengikuti pelatihan terpusat terlebih dahulu.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan koordinasi dengan pusat untuk memastikan alur pelatihan bagi perguruan tinggi swasta

E . S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

- IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Progress / Kegiatan :
Sebanyak 44 perguruan tinggi telah meningkatkan program studi nya untuk bekerjasama dengan mitra Kegiatan yang dilaksanakan
1. Rakor Pimpinan Badan Penyelenggara dan Pimpinan PT
2. Sosialisasi dan Workshop MBKM Mandiri
3. FGD Forum Pengelola Kerjasama PT (FORKAMA)
4. Workshop Peningkatan Kerja Sama dalam program studi.

Kendala / Permasalahan :
1. PT belum melaporkan data aktivitas MBKM yang dilakukan
2. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship.

Strategi / Tindak Lanjut :
Meningkatkan sosialisasi dan workshop terkait implementasi MBKM dan penguatan kerjasama bagi perguruan tinggi

F . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

- IKK 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :
Melakukan Koordinasi Capaian Kinerja yang telah dicapai dengan keterlibatan penuh dari Pimpinan dan seluruh Kelompok Kerja dalam setiap Tri Wulan
Kendala / Permasalahan :
Tidak Terdapat Kendala dan Permasalahan
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan Koordinasi secara terus menerus

G . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

- IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :
Sepanjang Tri Wulan I capaian IKPA adalah 92.77. Dengan Total Penyerapan Anggaran adalah sebesar 16.19%. Dengan capaian NKA sebesar 74.25
Kendala / Permasalahan :
Pada Bulan Februari dan Maret terjadi penundaan pembayaran Tunjangan Profesi dan Kehormatan yang disebabkan karena rencana implementasi Aplikasi SERUNI Advance yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan Kemendikbu Ristek. Hal tersebut mengakibatkan penurunan daya serap pada bulan Februari dan Maret.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan percepatan pemrosesan pembayaran tunjangan profesi Dosen dan Kehormatan Guru Besar pada Peride Bulan April 2023 untuk segera mengejar ketertinggalan daya serap

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Rekomendasi berdasarkan hasil capaian Kinerja Triwulan I adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas layanan dengan melakukan tindak lanjut atas startegi yang telah direncanakan yaitu dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan melakukan upaya diseminasi standar pelayanan serta melakukan evaluasi pelaksanaan layanan di LLDIKTI Wilayah VI. Selain itu dilakukan penilaian atas survei kepuasan masyarakat untuk menilai kualitas layanan LLDIKTI Wilayah VI berdasarkan penialain stake holder

2. Pembinaan dan pengawasan kepada PTS melalui peningkatan layanan terkait akreditasi baik Perguruan Tinggi maupun Akreditasi Prodi untuk memastikan kesehatan lembaga PTS. LLDIKTI VI juga harus terus menerus melakukan fasilitasi kepada PTS dengan melakukan koordinasi dan pendampingan kepada PTS. Percepatan pelayanan akreditasi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung PTS untuk peningkatan

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

kinerja dan kualitas bersaingnya. LLDIKTI Vi juga lebih menggiatkan dan mengoptimalkan fungsi Forum Kerjasama Perguruan Tinggi di Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas PTS

3. LLDIKTI Wilayah VI perlu terus menggiatkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PTS dalam pelaksanaan MBKM, dan giat melakukan sosialiasi-sosialiasi kebijakan MBKM, agar PTS lebih memiliki semangat dalam peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal. PTS dengan kualitas yang semakin meningkat akan dapat mendorong para mahasiswanya untuk meraih prestasi baik nasional maupun internasional. LLDIKTI VI juga harus terus mengembangkan sistem-sistem informasi untuk peningkatan pencapaian indikator-indikator kinerja pada PTS, sehingga dapat meningkatkan kualitas PTS tersebut

4. LLDIKTI Wilayah VI harus lebih maksimal dalam menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Eselon I dalam hal pelaksanaan Pelatihan-pelatihan Tenaga Pansel dan PPKS pada PTS, sehingga dapat segera dibentuk Tim-Tim 4A pada PTS

5. LLDIKTI Wilayah VI harus semakin meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama-kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk semakin meningkatkan kualitas kinerja Perguruan Tinggi. Pelaksanaan koordinasi dengan PTS bertujuan untuk memperkuat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada PTS

6. LLDIKTI Wilayah VI harus semakin cermat dalam melakukan perencanaan terhadap anggaran yang tersedia. Diperlukan kerjasama dan keterlibatan seluruh Kelompok Kerja dalam proses percepatan penyerapan anggaran dan pencapaia output-output kegiatan agar kualitas pelayanan LLDIKTI VI terus meningkat. Pencapaian Kinerja Anggaran masih harus terus ditingkatkan dengan memperhatikan berbagai komponen-komponen penilaian kinerja anggaran baik dari penilaian IKPA maupun indikator Penilaian EKA

7. Evaluasi Kinerja harus terus dilakukan sebagai alat kendali dan pengawasan terhadap capaian kinerja yang perlu dilakukan setiap Tri Wulan untuk memastikan target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai, dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan dengan lebih cepat dan terkontrol. Setiap Kelompok Kerja harus salaing berkoordinasi untuk salaing memantau tercapainya target output setiap triwulannya.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Semarang, 09 Mei 2023

Kepala LLDIKTI Wilayah VI



Bhimo Widyo Andoko

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
SEMARANG
TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	predikat	A	**TW2 :** -	**TW2 :** -
1	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	91	**TW2 :** 0	**TW2 :** 92,98
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	98.75	**TW2 :** 29.63	**TW2 :** 37.50
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	85.89	**TW2 :** 49.69	**TW2 :** 37.66
2	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	54.78	**TW2 :** 20.30	**TW2 :** 30.74
2	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	86.95	**TW2 :** 3.36	**TW2 :** 4
2	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	77.81	**TW2 :** 21.30	**TW2 :** 33.74

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.318.449.884.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 11 Juli 2023 sebesar **Rp. 147.294.721.901** atau **46.25%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 11 Juli 2023 **Rp. 171.155.162.099**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 1.1 Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.

Progress / Kegiatan :
15 layanan telah dilaksanakan yaitu
1) Verifikasi dan validasi ijazah
2) Usulan akun verifikasi SINTA PT
3) Usulan perubahan afiliasi dosen di SINTA
4) Verifikasi pengajuan akun pengelola sistem pelaporan tracer study
5) Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS golongan III
6) Data dan informasi publik
7) Konsultasi
8) Pembayaran tunjangan serdos
9) Pembayaran uang makan
10) SKPP
11) Penerbitan surat rekomendasi migrasi data program studi pada PDDIKTI

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

12) Validasi perubahan data dosen pada PDDIKTI
13) Pengusulan Jafa dosen LK dan Profesor
14) Pembinaan dan pengembangan sarpras
15) Pendataan sarpras PT
telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan terkait kualitas luaran dan waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan Kegiatan yang telah dilaksanakan
1.) Pemeliharaan sarana prasarana
2.) evaluasi hasil SKM
3.) FGD pemutakhiran standar pelayanan (SOP)
4.) Pengembangan dan pemeliharaan sistem LLDIKTI Wilayah VI
5.) Pemutakhiran data di PDDIKTI dan SISTER
6.) Diseminasi standar pelayanan secara periodik.
Kendala / Permasalahan :
Beberapa layanan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan adanya beberapa perubahan peraturan. Informasi terkait layanan yang dikelola oleh LLDIKTI Wil VI masih perlu disosialisasikan lebih luas.
Strategi / Tindak Lanjut :
Membangun komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan melakukan upaya diseminasi standar pelayanan serta melakukan evaluasi pelaksanaan layanan di LLDIKTI Wilayah VI

B . S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 1.2 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Progress / Kegiatan :
Pada TW II ini PTS dengan peringkat Akreditasi unggul ada 5 (lima) yakni Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Kristen Satya Wacana, dan Universitas Katolik Soegijapranata. PT yang aktif melakukan konsolidasi dengan PT lain berjumlah 170 PT dibuktikan dengan pelaporan pada laporankerma.kemdikbud.go.id, dan jumlah PTS yg punya 3000 mahasiswa (sampai dengan saat ini ada 11 PTS yg sudah melaporkan jumlah mahasiswanya sebanyak 3000)
Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Dian Nuswantoro Universitas Muhammadiyah Purwokerto Universitas Islam Sultan Agung Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Universitas Muhammadiyah Magelang Institut Teknologi Telkom Purwokerto Universitas Slamet Riyadi
Kegiatan yang dilakukan
1. Klinik Akreditasi Online Angkatan 1
2. Klinik Akreditasi Online Angkatan 2
3. Klinik Akreditasi Online Angkatan 3
4. Bimbingan Teknis IAPT 3.0 bagi Perguruan Tinggi Tidak Terakreditasi Angkatan 2
5. Workshop Instrumen Akreditasi Program Studi bersama LAM Teknik Angkatan 2
6. Workshop Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
Kendala / Permasalahan :
1. Jumlah PTS yang memenuhi untuk diproyeksikan menuju Unggul tidak banyak, karena indikator-indikator pemenuhan syarat perlu Unggul yang belum bisa dipenuhi. 2.Jumlah mahasiswa yang bisa direkrut bergantung pada bentuk perguruan tinggi seperti politeknik, sekolah tinggi,akademi yang mempunyai keterbatasan daya tampung mahasiswa, perolehan mahasiswa baru, serta sarana prasarana penunjang. 3.Pada TW2 dilakukan perbaikan pada sistem laporankerma.kemdikbud.go.id sehingga menyebabkan updating pelaporan sedikit terhambat 4.Masih ada perguruan tinggi yang tidak konsisten dalam menyampaikan laporan kerjasama melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id
Strategi / Tindak Lanjut :
1.Melakukan fasilitasi terhadap Badan Penyelenggara dan pengelola PTS dalam bentuk rapat koordinasi, pendampingan, asistensi, workshop, klinik
2.Pada TW3 akan Melakukan kegiatan fasilitasi kerjasama Perguruan Tinggi: Rintisan kerjasama MBKM, KMM mandiri, Bimtek Legal Drafting, Forum komunikasi pengelola Kerma
3.Mengoptimalkan peran forum pengelola kerjasama perguruan tinggi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama

C . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Progress / Kegiatan :
Sebanyak 2.716 mahasiswa dari 113 PTS telah dilaporkan mendapatkan prestasi tingkat nasional dan internasional pada tahun 2023. Namun, kompetisi mahasiswa pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Puspresnas masih berlangsung sehingga belum ada hasil pemenang kompetisinya. Sebanyak 17 PT telah melaporkan data MBKM pada tahun 2023 dengan jumlah mhs sebanyak 2.652 mhs. Selanjutnya, LLDIKTI Wilayah VI telah menandatangani dokumen kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI terkait pelaksanaan kegiatan Bela Negara yang diikuti oleh 180 mahasiswa dari 22 PTS. Tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari DIKTI dan DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 69 PTS. Untuk program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah dari DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 3 PTS. Kegiatan PKM dan P2MD ini dalam rangka implementasi MBKM mahasiswa. Kegiatan Yang Dilaksanakan
1. FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah Jawa Tengah
2. Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah Jawa Tengah menuju Seleksi Tingkat Nasional
3. Diseminasi Strategi Implementasi MBKM
4. Asistensi Pengembangan Kurikulum Program Studi dalam Mendukung MBKM

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

5. Sosialisasi Distribusi Kuota KIP Kuliah
6. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bela Negara dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI
7. Audiensi dengam Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
dan Bank Indonesia (BI) untuk menyusun kerjasama dalam implementassi MBKM
8. Pengelolaan Hibah PKM dan P2MD.

Kendala / Permasalahan :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mhs kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah
2. LLDIKTI Wilayah VI tidak memiliki akses untuk memonitor keikutsertaan dan capaian mahasiswa dalam program-program kompetisi yang diselenggarakan oleh Puspresnas
3. PT belum melaporkan data aktivitas MBKM yang dilakukan
4. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship
5. Masih sedikitnya capaian prestasi mahasiswa baik tingkat nasional ataupun internasional.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan fasilitasi informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM
2. LLDIKTI telah mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)
3. LLDIKTI WIlayah VI juga telah bekerjasama dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM) untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka (KM) Fair dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem MBKM di lingkungan PT
4. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarkana kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa
5. LLDIKTI WIlayah VI telah melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
dan Bank Indonesia (BI) untuk dapat bekerjasama dalam implementassi MBKM yang dilakukan oleh PT
6. LLDIKTI WIlayah VI telah menandatangani dokumen kerjasama dengan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI terkait pelaksanaan kegiatan Bela Negara
7. Menandatangani dokumen kerjasama pelaksanaan hibah PKM dan P2MD, serta menyalurkan dana hibah yang cair.

D . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.2 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.

Progress / Kegiatan :

Terdapat peningkatan perguruan tinggi yang telah mengimplemntasikan Kebijakan 4A, dan pada implementasi 4A untuk Anti kekerasan seksual terjadi peningkatan partisipasi pada laman portal ppks yang di kelola oleh pusat pengembangan karakter kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. yang pada awal TW 2 hanya sejumlah 6 Perguruan Tinggi Swasta meningkat menjadi 109 Perguruan Tinggi. LLDIKTI Wilayah VI juga menjadikan pembentukan satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota KIP Kuliah tahun 2023.

Kendala / Permasalahan :

Untuk implementasi Anti Kekerasan Seksual perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan monitoring karena LLDIKTI tidak memiliki akses di laman portal ppks

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Membuat surat edaran himbauan untuk implementasi kurikulum 4A, serta memasukkan program implementasi yang telah dilakukan oleh Perguruan Tinggi di sistem lldikti6
2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan karakter untuk memastikan admin, pansel serta satgas PPKS di perguruan tinggi swasta telah terdaftar pada portal ppks
3. Menjadikan pembentukan satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota KIP Kuliah tahun 2023.

E . S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

- IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Progress / Kegiatan :

Sebanyak 122 PT telah meningkatkan program studi nya untuk bekerjasama dengan mitra yang dilaporkan laman laporankerma.kemdikbud.go.id. Selain itu, sebanyak 105 PTS telah mendapatakan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat baik untuk program Akademik maupun Vokasi pada tahun 2023. Selanjutnya, LDLITKI Wilayah VI telah mengembangkan sistem Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) yang mana sistem ini akan menjembatani PT untuk bekerjasama dengan mitra/stakeholder dalam implementasi MBKM Kegiatan yang telah dilaksanakan

1. Diseminasi Strategi Implementasi MBKM
2 Asistensi Pengembangan Kurikulum Program Studi dalam Mendukung MBKM
3. Audiensi dengam Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
dan Bank Indonesia (BI) untuk menyusun kerjasama dalam implementassi MBKM
4. Pengelolaan hibah Riset dan Pengabdian Masyarakat.

Kendala / Permasalahan :

1. PT belum melaporkan data aktivitas MBKM yang dilakukan
2. PT belum melaporkan data aktivitas dosen diluar kampus
3. PT belum meng-update data kerjasama dengan mitra
4. Proses penerimaan hibah Riset dan Pengabdian Masyarakat tidak melibatkan LLDIKTI WIlayah VI, sehingga tidak bisa memonitor

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

usulan dari PTS.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan workshop terkait implementasi MBKM dan penguatan kerjasama bagi perguruan tinggi
2. Mengembangkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi PT dalam menjalin kerjasama dengan mitra yaitu Bursa KMM
3. LLDIKTI WIlayah VI telah melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
dan Bank Indonesia (BI) untuk dapat bekerjasama dalam implementassi MBKM yang nantinya PT dapat menjalin kerjasama dengan mitra untuk dapat bekerjasama dalam implementassi MBKM yang nantinya PT dapat menjalin kerjasama dengan mitra
4. Menandatangani perjanjian kerjasama penerimaan Hibah Riset dan pengabdian Masyarakat.

F . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

- IKK 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan Evaluasi dan pemantauan atas Pelaksanaan Kinerja Organisasi secara menyeluruh. Pimpinan secara langsung terlibat penuh dalam pemantauan kinerja organisasi mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja dan pemantauan hasil kinerja. Pimpinan menilai kinerja antara target dengan capaian kinerja selama Tri Wulan II dan menyusun rekomendasi dan strategi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada Triwulan berikutnya.

Kendala / Permasalahan :

Tidak terdapat kendala dan permasalahan

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi secara terus menerus antara pimpinan dan seluruh Kelompok Kerja untuk terus meningkatkan capaian kinerja organisasi. Kelompok Kerja terus berupaya mencapai target-target kinerja yang telah disusun dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang semakin berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

G . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

- IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

Sepanjang Tri Wulan II capaian IKPA adalah 90.27. Dengan Total Penyerapan Anggaran adalah sebesar 49.19%. Pada Triwulan II Capaian Nilai EKA pada Aplikasi SMART DJA adalah sebesar 94.79. Sehingga pada Triwulan II nilai NKA secara total adalah sebesar 92.98. Nilai ini meningkat dari Triwulan I yang hanya sebesar 74.25. Pencapaian ini adalah dikarenakan peningkatan penyerapan anggaran dan adanya kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin meningkat dengan meningkatnya capaian output pada setiap Rincian Output (RO).

Kendala / Permasalahan :

Pada TriWulan II ini tidak terdapat kendala dan Permasalahan. Seluruh target serapan anggararan dan target capaian output telah tercapai seluruhnya.

Strategi / Tindak Lanjut :

Pimpinan terus mendorong percepatan penyerapan anggaran baik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Adanya optimalisasi penggunaan aplikasi-aplikasi yang dapat mempercepat proses pembayaran dan pengadaan baik aplikasi SERUNI (untuk pembayaran TPD dan TKGB Dosen PNS maupun Non PNS), Aplikasi SiCantik (aplikasi perencanaan dan keuangan elektronik), Aplikasi SAKTI dan OM SPAN.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil capaian kinerja pada Tri Wulan II adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas layanan kepada para stake holder harus terus dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan telah semakin menunjukkan peningkatan atas dukungan peningkatan capaian kinerja yang semakin baik. Namun perlu terus dilakukan mitigasi terhadap setiap kendala dan permasalahan yang masih terjadi. Melakukan koordinasi dengan setiap unit terkait untuk terus meningkatkan komunikasi dan berupaya untuk melakukan diseminasi standar pelayanan. Capaian atas kinerja kualitas layanan juga harus selalui dievaluasi dan dilakukan pemantauan secara berkala secara berjenjang disetiap unit, sehingga standar layanan publik yang telah ditargetkan dapat diwujudkan. Upaya peningkatan kualitas dan optimalisasi penggunaan sistem elektronik juga terus dikembangkan dan sangat perlu dilakukan sosilalisasi kepada para stake holder.

2. Kinerja kualitas layanan LLDIKTI Wilayah VI yang dilihat dari pertumbuhan kualitas PTS di Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada Tri Wulan II ini LLDIKTI Wilayah VI dapat melakukan pembinaan yang menghasilkan tambahan 1 PTS yang terakreditasi unggul. LLDIKTI VI juga telah mampu mendorong PTS untuk semakin giat melakukan konsolidasi dengan PT lainnya. Optimalisasi penggunakan media elektronik laporankerma.kemdikbud.go.id menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini perlu selalu didorong dan disosialisasikan agar semakin banyak PTS yang melakukan kerjasama dengan PT lainnya sehingga secara umum pertumbuhan kualitas pendidikan tinggi di Jawa Tengah juga semakin meningkat. Upaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mendorong pembinaan PTS juga harus semakin ditumbuhkan pencapaian output dan outcome kegiatannya sehingga mendorong terwujudnya visi dan misi LLDIKTI Wilayah VI. LLDIKTI VI juga harus semikin giat melakukan pendampingan kepada PTS-PTS agar semakin giat melakukan pemenuhan indikator akreditasi unggul, sehingga akan semakin menarik minat mahasiswa di PTS tersebut. Strategi yang dilakukan melalui rapat koordinasi, pendampingan dan asistensi dan workshop baik kepada Badan Penyelenggara maupun kepada Pengelola PTS harus terus dilakukan dan ditingkatkatkan kualitas pencapaiannya.

3. LLDIKTI Wilayah VI tetap menjalin kerjasama dalam pelaksanaan fasilitasi kompetisi-kompetisi mahasiswa meskipun tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaannya. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan MBKM juga perlu terus digalakkan dan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Selan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak LLDIKTI VI juga harus giat melakukan audiensi-audiensi dengan

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan maupun MBKM. LLDIKTI VI juga harus dapat mendorong PTS untuk teratur menyampaikan laporan terkait aktivitas MBKM, karena salah satu kendala peningkatan kinerja ini adalah masih banyaknya PTS yang belum memberikan laporan terkait aktivitas MBKM pada organisasinya. Sehingga penilaian capaian aktivitas MBKM tidak seluruhnya dapat terpotret sesuai dengan kondisi yang ada.

4. Untuk capaian kinerja PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan dan anti korupsi, dalam Triwulan II ini menunjukkan peningkatan partisipasi dalam laman ppks yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Karakter Kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja LLDIKTI VI telah sangat baik dalam mendorong PTS untuk mengimplementasikan Kebijakan 4A pada PTS nya. Meskipun terdapat kelemahan dalam akses ke laman PPKS, namun LLDIKTI VI harus tetap melakukan kerjasama dan koordinasi agar mendapat data pertumbuhan PTS yang telah memiliki kebijakan 4A. LLDIKTI VI juga melakukan koordinasi dengan PTS dengan menjadikan pembentukan satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota KIP Kuliah pada tahun 2023.

5. LLDIKTI Wilayah VI juga menunjukkan peningkatan dalam kualitas inovasi perguruan tinggi dengan indikator meningkatnya PTS yang menjalin kerjasama dengan mitra nya. Capaian kinerja ini harus terus ditingkatkan dengan pelaksanaan koordinasi dengan PTS untuk mendorong para Dosen semakin giat dalam melakukan penelitian-penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. LLDIKTI VI juga harus terus meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan sosialisasi dan workshop kepada PTS untuk meningkatkan kerjasama. Optimalisasi penggunaan sistem elektronik juga harus terus ditingkatkan untuk mempermudah proses pelaksanaan kerjasama.

6. Setiap unit dalam LLDIKTI Wilayah VI harus selalu berkoordinasi bersama. Saling mendukung dalam peningkatan kinerja. Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala atas capaian kinerja pada setiap pelaksanaan kegiatan. Capaian sasaran output yang terukur akan dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP. Proses perencaanaan, pelaksanaan dan pelaporan dievaluasi bersama dan menjadi tolak ukur bagi perbaikan di Tri Wulan berikutnya.

7. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan EKA menunjukkan peningkatan pada Tri Wulan II ini dengan total nilai 92,98. Besarnya serapan anggaran adalah sebesar 49,19% dari total anggaran yang tersedia. Capaian penyerapan anggaran belum tercapai 50% pada Tri Wulan II, artinya masih harus dilakukan evaluasi dan percepatan serapan anggaran baik pada belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal. Proses percepatan pengadaan barang juga harus terus didorong sehingga dapat mendukung sarana dan prasarana penjunjang operasional. Kinerja anggaran perlu terus ditingkatkan baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Semarang, 11 Juli 2023

Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Bhimo Widyo Andoko

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
SEMARANG
TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	predikat	A	**TW3 :** -	**TW3 :** -
1	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	91	**TW3 :** 0	**TW3 :** 93,65
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	98.75	**TW3 :** 49.38	**TW3 :** 47.50
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	85.89	**TW3 :** 10.43	**TW3 :** 0
2	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	54.78	**TW3 :** 18.05	**TW3 :** 19.23
2	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	86.95	**TW3 :** 5.60	**TW3 :** 7.30
2	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	77.81	**TW3 :** 35.50	**TW3 :** 36.35

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.289.379.498.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 30 Oktober 2023 sebesar **Rp. 238.771.804.292** atau **82.51%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 30 Oktober 2023 **Rp. 50.607.693.708**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 1.1 Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.

Progress / Kegiatan :
9 layanan telah dilaksanakan yaitu:
1). Usul Pembatalan PIN
2). Usulan Penerima Prigram Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi melalui KIP Kuliah
3). Penandatanganan E-Kontrak Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD).
Pengguna layanan dan pemangku kepentingan mendapatkan manfaat maksimal dari layanan yang dibuktikan dengan tingkat kepuasan dari SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) periode bulan Juni 2023 sebesar 88,02%.
Kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan :
1.) Pemeliharaan sarana prasarana
2.) Evaluasi hasil SKM
3.) FGD pemutakhiran standar pelayanan (SOP)
4.) Pengembangan dan pemeliharaan sistem LLDIKTI Wilayah VI
5.) Pemutakhiran data di PDDIKTI dan SISTER

6.) Diseminasi standar pelayanan secara periodik

Kendala / Permasalahan :

Beberapa layanan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan adanya beberapa perubahan peraturan. Informasi terkait layanan yang dikelola oleh LLDIKTI Wil VI masih perlu disosialisasikan lebih luas.

Strategi / Tindak Lanjut :

Membangun komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan melakukan upaya diseminasi standar pelayanan serta melakukan evaluasi pelaksanaan layanan di LLDIKTI Wilayah VI

B . S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 1.2 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Progress / Kegiatan :

Pada TW III ini PTS dengan peringkat Akreditasi unggul ada 6 (enam) yakni Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Katolik Soegijapranata, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. PT yang aktif melakukan konsolidasi dengan PT lain berjumlah 176 PT dibuktikan dengan pelaporan pada laporankerma.kemdikbud.go.id, dan jumlah PTS yg punya 3000 mahasiswa (sampai dengan pelaporan PDDIKTI terakhir ada 26 PTS yg sudah melaporkan jumlah mahasiswanya sebanyak 3000 yaitu : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Semarang, Universitas PGRI Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Muria Kudus, Universitas Sains Alqur an, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Wahid, Hasyim, Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Slamet Riyadi, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Universitas Pekalongan, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Universitas Ngudi Waluyo, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas Ivet.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. FGD Permasalahan Hukum Kelembagaan Perguruan Tinggi Angkatan 1
2. FGD Permasalahan Hukum Kelembagaan Perguruan Tinggi Angkatan 2
3. Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis Perguruan Tinggi
4. Bimbingan Teknis Penyusunan STATUTA Perguruan Tinggi Swasta
5. Coaching Clinic menuju Akreditasi Perguruan Tinggi Unggul
6. Workshop Percepatan Mutu Bagi PT Tidak Terakreditasi / PT Baru.

Kendala / Permasalahan :

(1). Tata Kelola perguruan tinggi yang belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI

(2). Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga data jumlah PT yag melakukan kerjasama juga berubah

(3). Data perguruan tinggi yang melakukan konsolidasi dengan perguruan tinggi lain/kerjasama, berubah-ubah karena proses perubahan PTS maupun PTS baru.

Strategi / Tindak Lanjut :

(1). Melakukan pendampingan perguruan tinggi/program studi dalam penjaminan mutu eksternal

(2). Asistensi pendampingan perguruan tinggi yang melakukan perubahan PTS

(3). Pendampingan tata kelola perguruan tinggi bermasalah

(4). Asistensi bagi perguruan tinggi baru terkait tata kelola dan kesiapan menghadapi akreditasi

(5). Diskusi kinerja untuk peningkatan peringkat akreditasi.

C . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Progress / Kegiatan :

Sebanyak 4.757 mahasiswa dari 119 PTS telah dilaporkan mendapatkan prestasi tingkat nasional dan internasional pada tahun 2023 melalui laman PDDIKTI. Sebanyak 95 PT telah melaporkan data MBKM pada tahun 2023 dengan jumlah mhs sebanyak 15.763 mhs. Tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari DIKTI dan DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 69 PTS. Untuk program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah dari DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 3 PTS. Kegiatan PKM dan P2MD ini dalam rangka implementasi MBKM mahasiswa. Total PTS yang mengimplementasikan MBKM sebanyak 158 PTS, yang mana pada capaian TW I terdapat 42 PT, pada capaian TW II terdapat 71 PT, sehingga capaian pada TW III sebanyak 45 PT. Pada TW III ini juga terdapat peningkatan jumlah perguruan tinggi menjadi 234 PTS.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Pendampingan Pengelolaan Kewairausahaan PT
2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi MBKM Mandiri
3. Multi-Stakeholder Dialogue (MSD)
4. Kampus Merdeka Fair Semarang 2023 ”Kampus Merdeka, Bersama Lebih Baik”
5. Pendampingan Pengelolaan Program KIP Kuliah Merdeka
6. Pengelolaan Hibah PKM dan P2MD
7. Melakukan koordinasi Persiapan POMNAS XVIII Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Pengurus Daerah Jawa Tengah

Kendala / Permasalahan :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah
2. Sistem kurasi prestasi mahasiswa untuk pelaporan data prestasi mahasiswa masih dalam tahap pengembangan oleh Puspresnas

3. PT belum melaporkan data aktivitas implmentasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih
4. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan fasilitasi informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM
2. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)
3. LLDIKTI WIlayah VI juga telah bekerjasama dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM) untuk menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka (KM) Fair dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem MBKM di lingkungan PT
4. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarkana kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa
5. LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan kegiatan pendampingan pengelolaan KIP Kuliah dengan bekerjasama dengan Puslapdik
6. Melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD
7. Melakukan pemantauan pelaporan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI
8. Bekerja sama dengan organisasi pimpinan PT bidang kemahasiswaan PTS untuk meningkatkan capaian kompetensi mahasiswa.

D . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.2 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.

Progress / Kegiatan :

Terdapat peningkatan perguruan tinggi yang telah mengimplemntasikan Kebijakan 4A, dan pada implementasi 4A untuk Anti kekerasan seksual terjadi peningkatan partisipasi pada laman portal PPKS yang di kelola oleh Pusat Pengembangan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. pada capaian sampai TW III terdapat 202 PTS yang telah mengimplementasikan 4A, yang mana TW I tercapai 144 PTS, TW II tercapai 11 PTS, sehingga pada TW III tercapai 17 PTS. Pada TW III ini juga terdapat peningkatan jumlah perguruan tinggi menjadi 234 PTS. LLDIKTI Wilayah VI juga menjadikan pembentukan satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Puslapdik tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Melakukan monitoring dan pendataan update pelaporan implementasi 4A bagi PT yang belum melaporkan
2. Melakukan monitoring pengajuan akun dan pelaporan satgas PPKS pada laman protal PPKS
3. Memberikan informasi terkait pentingnya PPKS dan 4A dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI.

Kendala / Permasalahan :

1. Untuk implementasi Anti Kekerasan Seksual perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan monitoring karena LLDIKTI tidak memiliki akses di laman portal PPKS
2. PTS tidak melaporkan dan meng-upadte data implemnetasi 4A.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan pemantauan pelaporan implementasi 4A pada laman SIbraja
2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan karakter serta monitoring admin, pansel serta satgas PPKS di perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar pada portal PPKS
3. Menjadikan pembentukan satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Puslapdik tahun 2023
4. Memberikan informasi terkait pentingnya PPKS dan 4A dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI.

E . S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

- IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Progress / Kegiatan :

Sebanyak 149 PT telah meningkatkan program studi nya untuk bekerjasama dengan mitra yang dilaporkan laman laporankerma.kemdikbud.go.id. Selain itu, sebanyak 105 PTS telah mendapatakan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat baik untuk program Akademik maupun Vokasi pada tahun 2023. Selanjutnya, LLDIKTI Wilayah VI telah mengembangkan sistem Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) yang mana sistem ini akan menjembatani PT untuk bekerjasama dengan mitra/stakeholder dalam implementasi MBKM. dosen-dosen juga telah melaporkan aktivias mengajar di luar kampus, memiliki kompetensi profesi, aktif dalam membimbing mahasiswa dalam berkegiatan kemahasiswaan. sehingga didapatkan bahwa sebanyak 207 PTS yang meningkatkan jumlah dosen berkegiatan tridharma di luar prodinya dan jumlah prodi yang bekerja sama dengan mitra, yang mana telah tercapai TW I sebanyak 44 PT, TW II sebanyak 78 PT, sehingga terdapat 85 PT yang dicapai pada TW III. Pada TW III ini juga terdapat peningkatan jumlah perguruan tinggi menjadi 234.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Asistensi Penyusunan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Pemula
2. Bimbingan Teknis Penguatan Sistem Penjamin Mutu Internal bagi Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah VI
3. Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi MBKM Mandiri
4. Multi-Stakeholder Dialogue (MSD)
5. Kampus Merdeka Fair Semarang 2023 ”Kampus Merdeka, Bersama Lebih Baik”
6. Melakukan pengelolaan hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Kendala / Permasalahan :

1. PT belum melaporkan data aktivitas MBKM yang dilakukan
2. PT belum melaporkan data aktivitas dosen diluar kampus
3. PT belum meng-update data kerjasama dengan mitra
4. LLDIKTI tidak memiliki akses pada database SINTA.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan workshop terkait implementasi MBKM dan penguatan kerjasama bagi perguruan tinggi
2. Mengembangkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi PT dalam menjalin kerjasama dengan mitra yaitu Bursa KMM

3. LLDIKTI WIlayah VI telah melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
dan Bank Indonesia (BI) untuk dapat bekerjasama dalam implementassi MBKM yang nantinya PT dapat menjalin kerjasama dengan mitra
4. Menandatangani perjanjian kerjasama penerimaan Hibah Riset dan pengabdian Masyarakat.

F . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

- IKK 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :
Pelaksanaan Evaluasi dan pemantauan atas Pelaksanaan Kinerja Organisasi secara menyeluruh. Pimpinan secara langsung terlibat penuh dalam pemantauan kinerja organisasi mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja dan pemantauan hasil kinerja. Pimpinan menilai kinerja antara target dengan capaian kinerja selama Tri Wulan III dan menyusun rekomendasi dan strategi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada Triwulan berikutnya. Pemimpin memberikan rekomendasi untuk percepatan penyelesain realisasi anggaran karena telah memasuki awal dari babak akhir penyelesaian anggaran supaya anggaran dapat terserap seluruhnya secara efektif, efisien akuntabel dan transparan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Kendala / Permasalahan :
Tidak terdapat kendala dan permasalahan
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan koordinasi secara terus menerus antara pimpinan dan seluruh unit dalam organisasi untuk terus meningkatkan capaian kinerja organisasi. Kelompok Kerja terus berupaya mencapai target-target kinerja yang telah disusun dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang semakin berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

G . SK 4.0 Meningkatnya tata kelola LLDIKTI

- IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :
Sepanjang Tri Wulan III capaian IKPA adalah 94.42. Dengan Total Penyerapan Anggaran adalah sebesar Rp.211.646.906.959 dari total pagu anggaran LLDIKTI Wilayah VI tahun 2023 sesuai dengan Revisi DIPA Ke- 5 sebesaar Rp.284.389.862.000, atau sebesar 74,42%. Peningkatan Nilai IKPA ini didosrong peningkatan kinerja anggaran dan keuangan yang terus diperbaiki dan proses percepatan realisasi anggaran yang didukung oleh seluruh unit kerja. Para Tri Wulan III Pimpinan terus berkoordinasi dengan setiap unit kerja untuk melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan.
Kendala / Permasalahan :
Pada TriWulan III ini tidak terdapat kendala dan Permasalahan. Seluruh target serapan anggararan dan target capaian output telah tercapai seluruhnya.
Strategi / Tindak Lanjut :
Pimpinan terus mendorong percepatan penyerapan anggaran baik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Adanya optimalisasi dan evaluasi atas efektifitas penggunaan aplikasi-aplikasi yang dapat mempercepat proses pembayaran dan pengadaan baik aplikasi SERUNI (untuk pembayaran TPD dan TKGB Dosen PNS maupun Non PNS), Aplikasi SiCantik (aplikasi perencanaan dan keuangan elektronik), Aplikasi SAKTI dan OM SPAN.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Pada TW III ini peningkatan kualitas layanan kepada para stake holder sudah semakin baik, namun harus terus dilaksanakan. Namun demikian proses mitigasi terhadap setiap kendala dan permasalahan yang masih terjadi, tetap harus secar kontinu diilaksanakan. Layanan-layanan yang sangat terpengaruh oleh fakor eksternal harus sangat dicermati agar setiap perubahan yang terjadi masih dalam pantauan LLDIKTI Wilayah VI. Begitu pula dengan perubahan aturan-aturan yang terus terjadi, LLDIKTI Wilayah VI harus responsif dan tanggap serta segera beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan komunikas dan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dengan melakukan upaya diseminasi standar pelayanan serta melakukan evaluasi pelaksanaan layanan di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI.

2. Pada Tri Wulan III, layanan LLDIKTI Wilayah VI terkait dengan kualitas Perguruan Tinggi terus meningkat. Terdapat 6 PTS telah meraih Akreditasi Unggul dan peningkatan jumlah PTS yang melakukan konsolidasi dengan Perguruan Tinggi lainnya.Namun demikian masih terdapat kendala dan permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi. Permasalahan terkait kualitas PTS harus mendapat penanganan dan tindak lanjut scara cepat dan responsif. Langkah-langkah yang dapat menjadi masukan peningkatan kualitas PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI antara lain adalah : melakukan pendampingan pada Perguruan Tinggi maupun Program Studi dalam penjaminan mutu eksternal, melakukan pendampingan terhadap PTS yang melakukan perubahan statuta, pendampingan-pendampingan pada tata kelola Perguruan Tinggi yang bermasalah, pendampingan-pendampingan pada PTS untuk memastikan kesiapan PTS dalam menghadapi akreditasi dan melakukan diskusi kinerja untuk peningkatan peringkat akreditasi.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam pencapaian prestasi PTS melalui prestasi mahasiswa adalah LLDIKTI Wilayah VI memiliki kewenangan yang terbatas terhadap penyelenggaraan kompetisi mahasiswa, sistem pada Puspresnas yang masih dalam pengembangan, dan banyaknya PTS yang belum melakukan pelaporan atas prestasi mahasiswanya dan kurangnya pemahaman PTS atas Implementasi MBKM secara mandiri. Hal ini perlu mendapat tindak lanjut dari LLDIKTI Wilayah VI melalui fasilitasi informasi kepada PTS terkait penyelenggaraan kompetisi mahasiswa. LLDIKTI Wilayah VI juga perlu untuk mengembangkan sistem informasi untuk pelaksanaan MBKM dengan melibatkan stakeholder (IDUKA) dan Perguruan Tinggi dengan penyelenggaraan Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM). LLDIKTI Wilayah VI juga perlu untuk menciptakan ekosistem MBKM di lingkungan Perguruan Tinggi. Melakukan pendampingan-pendampingan dalam pengelolaan KIP Kuliah dengan kerjasama dengan PUSLAPDIK. PTS juga perlu diberikan pendampingan dan selalu melakukan pemantauan dalam pelaporan

prestasi mahasiswanya. LLDIKTI Wilayah VI juga harus melakukan kerjasama dengan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk terus meningkatkan capaian kompetensi mahasiswa.

4. Pada Tri Wulan III ini terdapatme peningkatan jumlah PTS yang mengimplementasikan Kebijakan 4A. Hal ini merupakan suatu progres yang sangat baik dari Triwulan sebelumnya. Perbaikan dan strategi peningkatan jumlah PTS yang mengimplementasikan kebijakan 4A harus terus dijalankan salah satunya adalah dengan menjadikan Pembentukan Satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Puslapdik Tahun 2023. LLDIKTI Wilayah VI juga harus terus melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan karakter serta monitoring admin, pansel serta satgas PPKS di perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar pada portal PPKS. Dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, LLDIKTI Wilayah VI juga harus memberikan informasi-informasi tentang pentingnya PPKS dan 4A.

5. Rekomendasi atas peningkatan kinerja dosen yang berkegiatan Tri Dharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra adalah LLDIKTI Wilayah VI harus semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan workshop terkait implementasi MBKM dan penguatan kerjasama bagi Perguruan Tinggi. Sistm Informasi yang saat ini telah digunakan juga harus terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat memfasilitasi PT dalam menjalin kerjasama. LLDIKTI Wilayah VI juga harus menjalin kerjasama dengan Pihak Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan audiensi dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah dan juga dengan Pihak Perbankan juga.

6. Rekomendasi atas tata kelola organisasi LLDIKTI Wilayah VI, dimana capaian pada TriWulan III sudah cukup baik dan sesuai dengan target baik untuk kinerja anggaran maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Setiap unit harus bersinergi bersama dan saling melakukan evaluasi dan perbaikan. Pada Tri Wulan III pelaksanaan kegiatan harus dilakukan percepatan agar dapat meningkatkan Kinerja Penyerapan Anggaran dan optimalisasi pencapaian target kinerja organisasi.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Semarang, 30 Oktober 2023

Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Bhimo Widyo Andoko

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
SEMARANG
TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	88	**TW4 :** 88	**TW4 :** 88,17
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	82.05	**TW4 :** 82,05	**TW4 :** 82,05
3	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	67.52	**TW4 :** 67,52	**TW4 :** 72,1
4	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	4.13	**TW4 :** 4,13	**TW4 :** 5,22
5	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	86.32	**TW4 :** 86,32	**TW4 :** 87,98
6	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	20.09	**TW4 :** 20,09	**TW4 :** 22,64
7	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	78.2	**TW4 :** 78,2	**TW4 :** 81,5
8	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	predikat	A	**TW4 :** A	**TW4 :** A
8	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	91	**TW4 :** 91	**TW4 :** 97,02

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.289.379.498.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 285.777.755.646** atau **98,76%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 3.601.742.354**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress / Kegiatan :
Perhitungan SKM berdasarkan formulir Survey Kepuasan Masyarakat yang tersedia di laman resmi LLDIKTI VI (alamat URL: https://lldikti6.kemdikbud.go.id/survey/) dan secara berkala dipublikasikan ulang melalui media sosial resmi. Formulir SKM berisi 14 poin pertanyaan terkait kepuasan pengguna layanan LLDIKTI Wilayah VI dan dapat diakses oleh umum.

Sampai dengan TW4 jumlah responden yang mengisi SKM sejumlah: 3206 responden. Dengan rincian hasil rata-rata setiap poin pertanyaan sebagai berikut:
- kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya = 85.38%
- kemudahan prosedur pelayanan unit = 85.39%

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

- ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan = 81.27%
- kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi) = 98.49%
- kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan = 84.54%
- kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan = 84.76%
- perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan = 85.61%
- penanganan pengaduan pengguna layanan = 96.37%
- kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan = 86.15%
- Jumlah yang mengisi Saran dan Masukan = 1356 responden.

Kegiatan yang Dilakukan :
- Pelatihan Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik LLDIKTI Wilayah VI
- Internalisasi peningkatan pelayanan secara rutin pada setiap kegiatan Prima Bersama / Jumat Sehat
- Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi LLDIKTI VI.

Kendala / Permasalahan :
1. Belum ada evaluasi berkala terkait ketepatan waktu pegawai / petugas dalam memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Belum terlaksana program peningkatan kapasitas pelayanan untuk pegawai / petugas secara rutin
3. Pembagian tugas dalam memberikan pelayanan kepada publik di setiap kelompok kerja belum berjalan secara optimal
4. Informasi dan data terkait layanan yang tersedia secara online belum dapat diakses secara optimal oleh pengguna layanan.

Strategi / Tindak Lanjut :
1. Melaksanakan pendataan dan evaluasi pada point prosentase nilai SKM yang masih rendah
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas / pelatihan pelayanan bagi seluruh pegawai LLDIKTI VI secara berkala
3. Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna
4. Menyusun usulan perbaikan / perubahan sistem informasi terkait layanan khususnya tata letak laman yang lebih user-friendly.

B . S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress / Kegiatan :
Jumlah PT yang terakreditasi : 190 PTS
Jumlah PTS yang melakukan penggabungan atau penyatuan 2 PTS (Institut Karya Mulia Bangsa dan Universitas Safin Pati)
Total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI : 234

Jumlah PTS yang terakreditasi sebanyak 16 PTS, sebelumnya merupakan PT Tidak terakreditasi, diantaranya adalah :
Universitas Al Hikmah Jepara
Universitas Muhammadiyah Kendal Batang
Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo
Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia
Politeknik Rukun Abdi Luhur
Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta
Akademi Kebidanan Siti Fatimah
Akademi Kebidanan KH Putra
Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang
Politeknik Bhakti Semesta
Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono
STIA Madani
Politeknik Trisila Dharma
Politeknik Muhammadiyah Tegal
Politeknik Akbara
STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes

Kegiatan yang dilakukan :
(1)Asistensi Integrasi 9 Kriteria untuk pemenuhan IAPS 4.0
(2)Workshop IAPS (LAM TEKNIK, LAMEMBA, LAM INFOKOM,LAMSAMA,LAM Kependidikan)
(3)Pembinaan PT/PS Tidak Terakreditasi
(4)Bimbingan Teknis IAPT 3.0 Bagi PT Tidak Terakreditasi
(5)Coaching PEPA
(6) WORKSHOP PERCEPATAN MUTU BAGI PT TIDAK TERAKREDITASI / PT BARU.

Kendala / Permasalahan :
(1) Tata Kelola perguruan tinggi yang tidak terakreditasi belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI
(2) Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama
(3) Minat perguruan tinggi melakukan penyatuan/penggabungan masih minim

Strategi / Tindak Lanjut :
(1) melakukan pendampingan perguruan tinggi/program studi dalam penjaminan mutu eksternal
(2) asistensi pendampingan perguruan tinggi yang melakukan perubahan PTS
(3) pendampingan tata kelola perguruan tinggi bermasalah.

C . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

n/t x 100
n= jumlah perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1
t=jumlah perguruan tinggi swasta, total 168 PTS dari total PTS 233 yang menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4 /D3/ D2/ D1

Sebanyak 130 perguruan tinggi swasta yang melaporkan menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 dan sebanyak 121 perguruan tinggi swasta melaporkan capaian prestasi mahasiswanya.

Sebanyak 49 perguruan tinggi swasta telah melaporkan aktivitas bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodinya pada laman PDDIKTI. Kemudian, sebanyak 95 perguruan tinggi swasta telah mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program flagship MBKM pada program MSIB, KM, dan PMM. Tahun 2023, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari DIKTI dan DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 69 PTS. Untuk program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah dari DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 3 PTS. Kegiatan PKM dan P2MD ini dalam rangka diimplementasi MBKM mahasiswa. Lalu, sebanyak 19 PTS telah melaporkan penyelenggaraan MBKM mandiri, dan sebanyak 22 PTS mengikuti kegiatan bela negara yang diselenggarakan oleh Kemhan. Total PTS yang menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4 /D3/ D2/ D1 sebanyak 168 PTS.

Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Anugerah LLDIKTI Wilayah VI
2. Sosialiasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Mahasiswa Pelaksana MBKM
3. FGD Evaluasi Peta Jalan Kerja Sama
4. Nonton Bersama Vokasifest X FKM
5. Pengelolaan Hibah PKM dan P2MD
6. Sosialisasi dan supervisi PKM Vokasi.

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang dihadapi :
1. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM
2. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship
3. PT belum memahami teknis fasilitasi pembelajaran di luar prodi untuk mahasiswa.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)
2. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa
3. Melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD
4. Memberikan penghargaan kepada PT yang menyelenggarakan MBKM terbaik
5. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi implementasi MBKM.

D . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

∑i1 nki/t x 100
n= jumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta yang memenuki kriteria
k= pembobotan per mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi
t=jumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta, sebanyak 12.582 mahasiswa dari 240.977 mahasiswa telah menempuh pembelajaran di luar prodi dan meraih prestasi mahasiswa yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI

Sebanyak 6.123 mahasiswa dari 49 PTS telah dilaporkan menempuh pembelajaran di luar program studinya melalui laman PDDIKTI. Selain itu, terdapat 6.459 mahasiswa mendapatkan prestasi tingkat provinsi, nasional, regional, dan internasional pada tahun 2023 melalui laman PDDIKTI. pada pelaporan PDDIKTI 20222, terdapat sebanyak 240.977 mahasiswa yang tercatat aktif dan memenuhi kriteria untuk menempuh pembelajaran di luar program studinya. Total sebanyak 12.582 mahasiswa dari 240.977 mahasiswa telah menempuh pembelajaran di luar prodi dan meraih prestasi mahasiswa yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI.

Kegiatan yang dilakukan :
1. Anugerah LLDIKTI Wilayah VI
2. Sosialiasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Mahasiswa Pelaksana MBKM
3. FGD Evaluasi Peta Jalan Kerja Sama
4. Nonton Bersama Vokasifest X FKM
5. Pengelolaan Hibah PKM dan P2MD
6. Sosialisasi dan supervisi PKM Vokasi.

Kendala / Permasalahan :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mhs kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah
2. Sistem kurasi prestasi mahasiswa untuk pelaporan data prestasi mahasiswa masih dalam tahap pengembangan oleh Puspresnas
3. PT belum melaporkan data aktivitas implmentasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih
4. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship
5. PT belum siap dalam fasilitasi pembelajaran di luar prodi sehingga mahasiswa belum bisa menempuh pembelajaran di luar prodi.

Strategi / Tindak Lanjut :

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

1. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)
2. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa
3. Melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD
4. Melakukan pemantauan pelaporan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI
5. Memberikan penghargaan kepada PT yang menyelenggarakan MBKM dan prestasi kemahasiswaan terbaik
6. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi implementasi MBKM dan aktivitas kegiatan kemahasiswaan.

E . S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

- IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress / Kegiatan :
n/t x 100

n = PTS yang mengimplementasi kebijalan antiintoleransi, antikekerasan, seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI
Total 205 PTS dari total PTS 233 yang melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba

Terdapat 205 perguruan tinggi swasta telah mengimplementasikan kebijakan 4A. Pada implementasi 4A untuk Anti kekerasan seksual sebanyak 162 PTS telah berpartisipasi pada laman portal PPKS yang di kelola oleh pusat pengembangan karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. LLDIKTI Wilayah VI juga memberikan penghargaan terhadap 7 perguruan tinggi swasta yang telah membentuk dan melaporkan satgas PPKS di laman portal PPKS melalui kegiatan Anugerah LLDIKTI Wilayah VI. Selain itu, sebanyak 192 perguruan tinggi swasta telah melaporkan implementasikan kebijakan 4A. Kemudian, LLDIKTI WIlayah VI telah mengimplementasikan kebijakan antinarkoba secara internal dengan menyelenggarakan penyuluhan bahaya narkoba bersama BNN. Sehingga total sebanyak 205 perguruan tinggi swasta dari total 233 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba.

Kegiatan yang dilakukan :
1. Melakukan monitoring dan pendataan update pelaporan implementasi 4A bagi PT yang belum melaporkan
2. Melakukan monitoring pengajuan akun dan pelaporan satgas PPKS pada laman porotal PPKS
3. Sosialisasi dan Diskusi Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
4. Penyuluhan bahaya narkoba
5. Anugerah LLDIKTI Wilayah VI.

Kendala / Permasalahan :
1. Untuk implementasi Anti Kekerasan Seksual perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan monitoring karena LLDIKTI tidak memiliki akses di laman portal PPKS
2. PTS tidak melaporkan dan meng-upadte data implemnetasi 4A
3. LLDIKTI belum memiliki akses data PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti narkoba.

Strategi / Tindak Lanjut :
1. Melakukan pemantauan pelaporan implementasi 4A pada laman SIbraja
2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan karakter serta monitoring admin, pansel serta satgas PPKS di perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar pada portal ppks
3. Memberikan penghargaan terhadap 7 perguruan tinggi swasta yang telah membentuk dan melaporkan satgas PPKS di laman portal PPKS melalui kegiatan Anugerah LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2023
4. Memberikan informasi terkait pentingnya PPKS dan 4A dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI 5. LLDIKTI Wilayah VI melalui pengurus Dharmawanita menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
6. Melakukan penyuluhan dan pengecekan urin bagi pegawai LLDIKTI terkait penggunaan narkoba.

F . S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

- IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress / Kegiatan :
Formula : (n/t) x 100
n : = jumlah PTS yarrg memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal
t : total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Terdapat 53 PTS yang memiliki dosen berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal, dari seluruh PTS di LLDIKTI VI sejumlah 234 PTS.

Pada Triwulan IV, terdapat 10 PTS yang melaporkan bahwa terdapat dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus, baik dalam bentuk dharma Pendidikan (mengajar), Penelitian, maupun Pengabdian. Bentuk tridharma tersebut. Bentuk kegiatan berbagai macam, misalnya Pengabdian pada Masyarakat dengan memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan sesuai bidang keahlian, dengan contoh dosen Teknologi Batik Universitas Pekalongan melaksanakan pengabdian dengan memberikan pemahaman dan alternatif solusi kepada Dinas Perindustrian dengan tema Green Product untuk Menyongsong Ekonomi Hijau di Kota Pekalongan. Di Bidang penelitian mislanya dosen dari STIKES Graha Mandiri melaksanakan penelitian Gabungan dengan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Al Gazali Cilacap.
Memantau perkembangan pelaporan data Dosen yang berkegiatan Tridharma di luar kampus dan mengkonfirmasikan kepada sebagian PT yang telah melaporkan.

Kendala / Permasalahan :
Belum seluruhnya PT melaporkan dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus, ke LLDIKTI VI.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Strategi / Tindak Lanjut :
Memantau perkembangan pelaporan data Dosen yang berkegiatan Tridharma di luar kampus dan mengkonfirmasikan kepada sebagian PT yang telah melaporkan.

G . S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

- IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress / Kegiatan :
n/t x 100

n = PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI
total 190 PTS dari total PTS 233 yang melaporkan data Kerjasama melalui laporankerma

Terdapat 190 perguruan tinggi swasta telah meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra dibuktikan dengan pelaporan pada laman laporankerma. LLDIKTI Wilayah VI juga memberikan penghargaan terhadap perguruan tinggi swasta yang telah menunjukkan kinerja kerja sama terbaik melalui kegiatan Anugerah LLDIKTI Wilayah VI.

Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Melakukan monitoring dan pendataan update pelaporan dokumen kerja sama bagi PT yang belum melaporkan
2. Melakukan monitoring pengajuan akun dan pelaporan dokumen kerja sama pada laman laporan kerma
3. Sosialisasi dan Diskusi terkait rintisan kerja sama
4. Workshop penyusunan dokumen
5. Anugerah LLDIKTI Wilayah VI
6. Sarasehan Kerja Sama sebagai wadah pertukan pengalaman.

Kendala / Permasalahan :
1. Untuk peningkatan kerja sama, perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan rintisan kerja sama
2. PTS belum memiliki kemampuan dalam membuat dokumen legal kerja sama
3. PTS masih berfokus pada MOU dan belum berfokus pada MOA dan Implementasinya.

Strategi / Tindak Lanjut :
1. Melakukan pemantauan pelaporan kerjasama pada laporankerma
2. Memberikan penghargaan terhadap perguruan tinggi swasta yang telah menunjukkan kinerja kerja sama terbaik.
3. Memberikan informasi terkait pentingnya kerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI
4. melakukan fasilitasi rintisan kerja sama maupun penyusunan legal drafting

H . S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :
Berdasarkan hasil penilaian hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 LLDIKTI Wilayah VI memperoleh hasil penilaian sebesar 85.35 sehingga memperoleh hasil penilaian A utk kinerja tahun 2023

Kendala / Permasalahan :
1. Belum adanya Pedoman Pengumpulan Data Kinerja yang menjelaskan bagaimana pencapaian pengukuran kinerja bulanan/triwulan untuk dapat memastikan target dapat terpenuhi di akhir tahun anggaran dan perbaikan kualitas pencapaian kinerja sehingga seluruh target kinerja dari masing-masing indikator dapat tercapai
2. IKU belum update dengan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023.Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dimana target pencapaian IK 1.1 tahun 2023 nilainya lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.
3. Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya diantaranya sebagai dasar penyesuaian target pada perencanaan kinerja yang menyebabkan target lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan pengaruhnya pada budaya kerja organisasi,
4. Belum dapat dianalisis peningkatan implementasi SAKIP ada di dalam indikator kinerja mana saja terkait dengan tindaklanjut LHE yang telah dilakukan, belum ada penjelasan efektifitas dan efisiensi terkait dengan hasil evaluasi akuntabilitas.
5. Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya diantaranya sebagai dasar penyesuaian target pada perencanaan kinerja yang menyebabkan target lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan pengaruhnya pada budaya kerja organisasi, 6. Belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) yang berakibat belum dapat disimpulkan kausalitas pencapaian indikator kinerja individu dengan pencapaian indikator diatasnya diatasnya.

Strategi / Tindak Lanjut :
1. Menganalisis peningkatan implementasi SAKIP pada indikator kinerj yang mana dan menjelaskan efektifitas dan efisiensi terkait dengan hasil evaluasi akuntabilitas pada tahun berjalan.
2. Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan, antara lain dengan penyesuaian IKU dengan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023
3. Perencanaan Kinerja ditingkatkan pemanfaatannya untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan antara lain melakukan analisa anggaran yang ditetapkan untuk tiap target indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi realisasi anggaran pada LAKIN tahun sebelumnya dan rekapitulasi pengukuran pencapaian tiap triwulan dari masing-masing indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja

I . S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

- IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :
Capaian nilai EKA per 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,78 sedangkan capaian nilai IKPA adalah sebesar 94,26 sehingga capaikan nilai EKA untuk tahun 2023 adalah sebesar 97,02.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :: 1. Pemantauan capaian output dan progres kinerja setiap bulan yang dilaporkan melalui aplikasi SAKTI
2. Evaluasi dan penyusunan startegi tindak lanjut setiap tri wulan yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA
3. Koordinasi Pimpinan dengan setiap Pokja dalam rangka percepatan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap Tri Wulan.

Kendala / Permasalahan :
Pelaksanaan kegiatan yang berupa ketentuan atau perubahan yang bersifat mandatory dari Pimpinan Unit Eselon I yang seringkali mendadak sehingga perlu melakukan revisi-revisi anggaran maupun jadwal pelaksanaan kegiatan.
Strategi / Tindak Lanjut :
1. Peningkatan koordinasi antara Pimpinan dan setiap Pokja dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan perencanaan anggaran setiap Tri Wulan dalam rangka peningkatan nilai kinerja anggaran.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Pada TW IV ini peningkatan kualitas layanan kepada para stake holder sudah semakin baik, namun harus terus dilaksanakan. Namun demikian proses mitigasi terhadap setiap kendala dan permasalahan yang masih terjadi, tetap harus secar kontinu diilaksanakan. Layanan-layanan yang sangat terpengaruh oleh fakor eksternal harus sangat dicermati agar setiap perubahan yang terjadi masih dalam pantauan LLDIKTI Wilayah VI. Begitu pula dengan perubahan aturan-aturan yang terus terjadi, LLDIKTI Wilayah VI harus responsif dan tanggap serta segera beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan komunikas dan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dengan melakukan upaya diseminasi standar pelayanan serta melakukan evaluasi pelaksanaan layanan di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI.

2. Pada Tri Wulan IV, layanan LLDIKTI Wilayah VI terkait dengan kualitas Perguruan Tinggi terus meningkat. Terdapat peningkatan jumlah PTS yang melakukan konsolidasi dengan Perguruan Tinggi lainnya. Namun demikian masih terdapat kendala dan permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi. Permasalahan terkait kualitas PTS harus mendapat penanganan dan tindak lanjut scara cepat dan responsif. Langkah-langkah yang dapat menjadi masukan peningkatan kualitas PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI antara lain adalah : melakukan pendampingan pada Perguruan Tinggi maupun Program Studi dalam penjaminan mutu eksternal, melakukan pendampingan terhadap PTS yang melakukan perubahan statuta, pendampingan-pendampingan pada tata kelola Perguruan Tinggi yang bermasalah, pendampingan-pendampingan pada PTS untuk memastikan kesiapan PTS dalam menghadapi akreditasi dan melakukan diskusi kinerja untuk peningkatan peringkat akreditasi.

3. Pada Triwulan IV Sebanyak 130 perguruan tinggi swasta yang melaporkan menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 dan sebanyak 121 perguruan tinggi swasta melaporkan capaian prestasi mahasiswanya. Sebanyak 49 perguruan tinggi swasta telah melaporkan aktivitas bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodinya pada laman PDDIKTI. Kemudian, sebanyak 95 perguruan tinggi swasta telah mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program flagship MBKM pada program MSIB, KM, dan PMM. Namun demikian beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan MBKM juga harus diatasi dan terus didorong anatara lain melalui sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) dan juga pemberian apresiasi dan penghargaan kepada PT yang menyelenggarakan MBKM terbaik.

Rekomendasi yang untuk meningkatkan indikator kinerja untuk mendorong pelaksanaan MBKM pada PT di Jawa Tengah anatara lain adalah dengan mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM), menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa, melakukan pengelolaan dana hibah PKM dan P2MD, melakukan pemantauan pelaporan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI, memberikan penghargaan kepada PT yang menyelenggarakan MBKM dan prestasi kemahasiswaan terbaik, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi implementasi MBKM dan aktivitas kegiatan kemahasiswaan

4. Pada Triwulan IV LLDIKTI Wilayah VI terdapat 205 perguruan tinggi swasta telah mengimplementasikan kebijakan 4A. Pada implementasi 4A untuk Anti kekerasan seksual sebanyak 162 PTS telah berpartisipasi pada laman portal PPKS yang di kelola oleh pusat pengembangan karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. LLDIKTI Wilayah VI juga memberikan penghargaan terhadap 7 perguruan tinggi swasta yang telah membentuk dan melaporkan satgas PPKS di laman portal PPKS melalui kegiatan Anugerah LLDIKTI Wilayah VI. Selain itu, sebanyak 192 perguruan tinggi swasta telah melaporkan implementasikan kebijakan 4A. Kemudian, LLDIKTI WIlayah VI telah mengimplementasikan kebijakan antinarkoba secara internal dengan menyelenggarakan penyuluhan bahaya narkoba bersama BNN. Sehingga total sebanyak 205 perguruan tinggi swasta dari total 233 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba. Hal ini merupakan suatu progres yang sangat baik dari Triwulan sebelumnya. Perbaikan dan strategi peningkatan jumlah PTS yang mengimplementasikan kebijakan 4A harus terus dijalankan salah satunya adalah dengan menjadikan Pembentukan Satgas PPKS sebagai salah satu indikator pemberian kuota Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Puslapdik Tahun 2023. LLDIKTI Wilayah VI juga harus terus melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan karakter serta monitoring admin, pansel serta satgas PPKS di perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar pada portal PPKS. Dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, LLDIKTI Wilayah VI juga harus memberikan informasi-informasi tentang pentingnya PPKS dan 4A.

5. Berkaitan dengan Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus, Pada Triwulan IV, terdapat 53 PTS yang melaporkan bahwa terdapat dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus, baik dalam bentuk

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

dharma Pendidikan (mengajar), Penelitian, maupun Pengabdian. Bentuk tridharma tersebut tertuang dalam bentuk kegiatan berbagai macam, misalnya Pengabdian pada Masyarakat dengan memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan sesuai bidang keahlian. Rekomendasi atas peningkatan kinerja dosen yang berkegiatan Tri Dharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra adalah LLDIKTI Wilayah VI harus semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan workshop terkait implementasi MBKM dan penguatan kerjasama bagi Perguruan Tinggi. Sistm Informasi yang saat ini telah digunakan juga harus terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat memfasilitasi PT dalam menjalin kerjasama. LLDIKTI Wilayah VI harus selalu memantau perkembangan pelaporan data Dosen yang berkegiatan Tridharma di luar kampus dan mengkonfirmasikan kepada sebagian PT yang telah melaporkan.

6. Rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra adalah dengan : melakukan pemantauan pelaporan kerjasama pada laporan kerma, memberikan penghargaan terhadap perguruan tinggi swasta yang telah menunjukkan kinerja kerja sama terbaik, memberikan informasi terkait pentingnya kerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI, melakukan fasilitasi rintisan kerja sama maupun penyusunan legal drafting. Hal ini perlu terus menerus dilakukan untuk semakin meningkatkan kinerja PT agar dapat memiliki jaringan kerjasama yang luas terutama dengan PT lain dan dengan dunia industri untuk menerima lulusan yang sesuai dengan kebutuhan.

7. Rekomendasi atas tata kelola organisasi LLDIKTI Wilayah VI, dimana capaian pada TriWulan IV sudah memenuhi target yang sesuai baik untuk kinerja anggaran maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Setiap unit harus bersinergi bersama dan saling melakukan evaluasi dan perbaikan. Pada Tri Wulan IV pelaksanaan kegiatan harus dilakukan percepatan agar dapat meningkatkan Kinerja Penyerapan Anggaran dan optimalisasi pencapaian target kinerja organisasi.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Semarang, 17 Januari 2024

Kepala LLDIKTI Wilayah VI



Bhimo Widyo Andoko

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah VI Semarang sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen LLDIKTI Wilayah VI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Semarang, 25 Januari 2024
Ketua Tim Reviu,



Adhrial Refaddin
NIP 197504212008121003